

RPJMD 2025-2029

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhr dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-

2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
dan
BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 - 2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan Pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana Pembangunan tahunan daerah.

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Sumatera Barat dan RPJMN.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan jangka menengah untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ditetapkan.

Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:
a. menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan Daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan lima tahunan agar mekanisme perencanaan dan pembangunan Daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah; dan
b. pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 5

(1). Ruang lingkup RPJMD meliputi visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan serta prioritas dan program strategis Bupati disertai dengan Rencana Kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
(2). RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur bagi penilaian kinerja Bupati pada akhir masa jabatan.

Pasal 6

(1) RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. bab I pendahuluan;
   b. bab II gambaran umum daerah;

c. bab III visi, misi dan program prioritas pembangunan Daerah;
d. bab IV program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
e. bab V penutup.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3) Manajemen Risiko Perencanaan Pembangunan Daerah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah imi.

Pasal 7

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

Pasal 8

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan;
c. terjadi perubahan yang mendasar.
(2) Dalam rangka efektifitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 9

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

RUDY REPENALDI RILIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT (2 / 46 /2025)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan penjabaran dari visi, misi, program kepala daerah yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun. RPJMD ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, hingga program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

Penyusunan RPJMD tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD tahun 2025-2029 adalah pendekatan teknokratik, pendekatan partisifpatif, pendekatan politis, pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, pendekatan holistik-tematik, pendekatan integratif dan pendekatan spasial.

Peraturan ini mengatur bahwa RPJMD disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045, serta selaras dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat, sehingga terjadi kesinambungan antara perencanaan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.Secara umum, RPJMD dijadikan sebagai pedoman utama dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahunan. RKPD inilah yang menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dokumen RPJMD ini juga mengatur mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, serta ketentuan mengenai perubahan dokumen apabila terjadi kondisi luar biasa seperti bencana alam, krisis, atau perubahan kebijakan nasional. Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan bila masa berlaku dokumen masih tersisa lebih dari tiga tahun.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memiliki acuan strategis dan operasional dalam menyelenggarakan pembangunan yang terarah, terukur, dan terintegrasi selama periode 2025–2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 2

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR xiv
BAB I PENDAHULUAN ..... I | 1
1.1 Latar Belakang ..... I | 1
1.2 Dasar Hukum ..... I | 6
1.3 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ..... I | 8
1.3.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman dengan RPJPD Kabupaten Padang Pariaman ..... I | 9
1.3.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN ..... I | 10
1.3.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2040 ..... I | 12
1.3.4 Hubungan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman dengan KLHS RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 ..... I | 12
1.3.5 Hubungan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 dengan RPJPN Tahun 2025-2045 ..... I | 13
1.3.6 Hubungan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman dengan RPJPD Provinsi Sumatera Barat ..... I | 14
1.3.7 Hubungan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ..... I | 15
1.3.8 Hubungan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) ..... I | 16
1.4 Maksud dan Tujuan ..... I | 16
1.4.1 Maksud ..... I | 16
1.4.2 Tujuan ..... I | 17
1.5 Sistematika RPJMD Tahun 2025-2029 ..... I | 18
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH ..... II | 1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah ..... II | 1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi ..... II | 1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... II | 60
2.1.3 Aspek Daya Saing ..... II | 90
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum ..... II | 122
2.1.5 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 ..... II | 210

2.1.6 Capaian Standar Pelayanan Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2021-2024 ..... II | 234
2.1.7 Capaian SDGs Tahun 2021-2024 ..... II | 274
2.2. Gambaran Keuangan Daerah ..... II | 290
2.2.1 Realisasi APBD Tahun 2020-2024 ..... II | 291
2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2025-2030 ..... II | 333
2.3 Permasalahan dan Isu – Isu Strategis ..... II | 353
2.3.1 Permasalahan Pembangunan ..... II | 353
2.3.2 Isu Strategis ..... II | 360
BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ..... III | 1
3.1 Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2045 ..... III | 1
3.1.1 Visi dan Sasaran Visi RPJPD Tahun 2025-2045 ..... III | 1
3.1.2 Misi RPJPD Tahun 2025-2045 ..... III | 4
3.2 Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 ..... III | 14
3.2.1 Visi RPJMN Tahun 2025-2029 ..... III | 14
3.2.2 Misi RPJMN Tahun 2025-2029 ..... III | 15
3.2.3 Sasaran Pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029 ..... III | 16
3.3 Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 ..... III | 17
3.3.1 Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 ..... III | 17
3.3.2 Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 ..... III | 19
3.3.3 Sasaran Pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 ..... III | 20
3.4 Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 ..... III | 25
3.4.1 Visi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 ..... III | 25
3.4.2 Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 ..... III | 28
3.4.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025-2029 ..... III | 32
3.4.4 Keterkaitan antara Visi Misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2045 ..... III | 36
3.4.5 Keterkaitan antara Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 dengan Visi

Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Dan Visi Misi RPJMN Tahun 2025-2045 ..... III | 37
3.5 Arah Kebijakan, Strategi Menurut Tujuan Dan Sasaran ..... III | 41
3.5.1 Arah Kebijakan dan Strategi pada Tujuan dan Sasaran Kabupaten Padang Padang Pariaman ..... III | 41
3.5.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2030 ..... III | 77
3.5.3 Tema dan Fokus Pembangunan Tahun 2025-2030 ..... III | 87
3.6 Program Unggulan Per Misi ..... III | 89
3.6.1 Program Unggulan Misi 1 : Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dengan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkelanjutan ..... III | 89
3.6.2 Program Unggulan Misi 2 : Mencipatakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing ..... III | 90
3.6.3 Program Unggulan Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju dan Merata ..... III | 92
3.6.4 Program Unggulan Misi 4 : Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan ..... III | 93
3.6.5 Program Unggulan Misi 5 : Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya. ..... III | 94
3.6.6 Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah terhadap Fokus Prioritas RPJMN Tahun 2025-2029 ..... III | 126
3.7 Kebijakan Pembangunan Berdimensi Kewilayahan ..... III | 131
3.7.1 Isu Strategis Kewilayahan ..... III | 131
3.7.2 Arah Kebijakan Kewilayahan Nasional ..... III | 132
3.7.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Padang Pariaman ..... III | 133
3.8 Rencana Pengembangan Sektor Strategis ..... III | 136
3.8.1. Pertanian ..... III | 136
3.8.2 Perikanan ..... III | 138
3.8.3 Peternakan ..... III | 140
3.8.4 Pariwisata ..... III | 141
3.8.5 Perindustrian ..... III | 143
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ..... IV | 1

4.1 Program Perangkat Daerah Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. ..... IV | 1
4.2 Indikator Kinerja Makro ..... IV | 34
4.3 Indikator Kinerja Sasaran Visi ..... IV | 35
4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) ..... IV | 36
4.5 Indikator Kinerja Daerah (IKD) ..... IV | 42
4.6 Pagu Program Perangkat Daerah Per Urusan ..... IV | 63
BAB V PENUTUP ..... V | 1
5.1. Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan RPJMD. ..... V | 1
5.1.1. Pedoman Transisi ..... V | 1
5.1.2 Kaidah Pelaksanaan ..... V | 1
5.2. Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD ..... V | 2
5.2.1. Pengendalian Pelaksanaan RPJMD ..... V | 3
5.2.2. Evaluasi Akhir Pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029 ..... V | 4
5.3. Manajemen Risiko Perencanaan Pembangunan Daerah . V | 4
5.4. Tata Kelola Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten ..... V | 6
5.4.1 Memperkuat Tata Kelola Pembangunan dan Mendorong Transformasi Digital Daerah ..... V | 6
5.4.2. Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Padang Pariaman ..... V | 7
5.4.3 Satu Data Indonesia Padang Pariaman ..... V | 8
5.5. Kolaborasi Multipihak Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah ..... V | 9

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 ..... II | 3
Tabel 2.2 Unsur-Unsur Iklim ..... II | 5
Tabel 2.3 Penggunaan Lahan Tahun 2024 ..... II | 8
Tabel 2.4 Penggunaan Lahan Per Kecamatan Tahun 2024 ..... II | 9
Tabel 2.5 Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 .. II | 12
Tabel 2.6 Produksi Komoditi Perkebunan di Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 12
Tabel 2.7 Produksi Peternakan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 13
Tabel 2.8 Perkembangan Produksi Perikanan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 14
Tabel 2.9 Wisata dari Sisi Daya Tarik di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 15
Tabel 2.10 Klasifikasi Jasa Ekosistim ..... II | 16
Tabel 2.11 DDDTLH Jasa Penyediaan Kabupaten Padang Pariaman ..... II | 21
Tabel 2.12 DDDTLH Jasa Pengaturan Kabupaten Padang Pariaman ..... II | 24
Tabel 2.13 DDDTLH Jasa Pengaturan Kabupaten Padang Pariaman ..... II | 28
Tabel 2.14 DDDTLH Jasa Pendukung Kabupaten Padang Pariaman ..... II | 30
Tabel 2.15 Perhitungan D3T Air Kabupaten Padang Pariaman ..... II | 32
Tabel 2.16 Luas Lahan Sawah dan Bukan Sawah Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ... II | 34
Tabel 2.17 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Sawah di Kabupaten Padang Pariaman ..... II | 35
Tabel 2.18 Estimasi Produksi dan Konsumsi Beras Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2045 ..... II | 36
Tabel 2.19 Nama-nama sungai di Kabupaten Padang Pariaman ..... II | 39
Tabel 2.20 Lebar, kedalaman, dan debit air sungai-sungai di Kabupaten Padang Pariaman ..... II | 40
Tabel 2.21 Potensi Bahaya di Kabupaten Padang Pariaman ... II | 49
Tabel 2.22 Perkembangan Kejadian Bencana di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 51
Tabel 2.23 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2025 ..... II | 52
Tabel 2.24 Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Menurut Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2025 ..... II | 54

Tabel 2.25 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2020-2024 ..... II | 55
Tabel 2.26 Jumlah Penduduk Kabupaten Padang Pariaman Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2024-2025 .. II | 56
Tabel 2.27 Jumlah Penduduk Kabupaten Padang Pariaman Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024 ..... II | 57
Tabel 2.28 Rasio Jenis Kelamin Tahun 2024-2025 ..... II | 58
Tabel 2.29 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030 ..... II | 58
Tabel 2.30 Pertumbuhan Ekonomi Padang Pariaman, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 .....II | 60
Tabel 2.31 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020–2024 ..... II | 62
Tabel 2.32 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 .. II | 62
Tabel 2.33 Jumlah pekerja disabilitas menurut status pekerjaan utama di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 85
Tabel 2.34 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 202 .....II | 91
Tabel 2.35 Rata-rata Pengeluaran PerKapita Sebulan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 93
Tabel 2.36 Produktivitas Total Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2024 ..... II | 95
Tabel 2.37 ROA BUMD di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2024 ..... II | 105
Tabel 2.38 Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 107
Tabel 2.39 Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 - 2024 ..... II | 109
Tabel 2.40 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan .....II | 110
Tabel 2.41 Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 111
Tabel 2.42 Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu per Komoditas Bahan Pokok Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 .....II | 112
Tabel 2.43 Perkembangan Status Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 - 2024 ..... II | 116
Tabel 2.44 Nilai SAKIP Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 125

Tabel 2.45 Angka Kriminalitas di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 .....II | 129
Tabel 2.46 Capaian dan Target Kinerja Urusan Wajib Pendidikan pada RPJMD Tahun 2020-2024 ..... II | 132
Tabel 2.47 Capaian dan Target Kinerja Indikator Urusan Wajib Kesehatan pada RPJMD Tahun 2020-2024 ..... II | 134
Tabel 2.48 Capaian dan Target Indikator Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada RPJMD Tahun 2020-2024 ..... II | 139
Tabel 2.49 Capaian dan Target Indikator Urusan Wajib Perumahan dan Permukiman pada RPJMD Tahun 2020-2024 ..... II | 141
Tabel 2.50 Capaian dan Target Indikator Urusan Wajib Trantibum dan Linmas pada RPJMD Tahun 2020-2024 ..... II | 144
Tabel 2.51 Capaiandan Target Indikator Urusan Wajib Sosial pada RPJMD Tahun 2020-2024 ..... II | 147
Tabel 2.52 Capaian dan Target Indikator Urusan Wajib Tenaga Kerja pada RPJMD Tahun 2020-2024 ..... II | 149
Tabel 2.53 Capaian Indikator Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada RPJMD Tahun 2020-2024 .....II | 151
Tabel 2.54 Capaian dan Target Indikator Urusan Wajib Pangan pada RPJMD Tahun 2020-2024 ..... II | 153
Tabel 2.55 Capaian dan Target Indikator Urusan Wajib Pertanahan pada RPJMD Tahun 2020-2024 .....II | 155
Tabel 2.56 Capaian Indikator Urusan Wajib Lingkungan Hidup pada RPJMD Tahun 2020-2024 ..... II | 156
Tabel 2.57 Capaian dan Target Indikator Urusan Wajib Adminduk Catatan Sipil pada RPJMD Tahun 2020-2024 .....II | 159
Tabel 2.58 Capaian Indikator Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada RPJMD Tahun 2020-2024 .....II | 160
Tabel 2.59 Capaian dan Target Indikator Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada RPJMD Tahun 2020-2024 ..... II | 162
Tabel 2.60 Capaian dan Target Indikator Urusan Wajib Perhubungan pada RPJMD Tahun 2020-2024 ...II | 165
Tabel 2.61 Capaian dan Target Kinerja Indikator Urusan Wajib Komunikasi dan Infromatika pada RPJMD Tahun 2020-2024 ..... II | 168
Tabel 2.62 Capaian dan Target Indikator Urusan Wajib Koperasi dan UMKM pada RPJMD Tahun 2020-2024 ..... II | 170
Tabel 2.63 Capaian dan Target Indikator Urusan Wajib Penanaman Modal pada RPJMD Tahun 2020-2024 .....II | 172

Tabel 2.64 Capaian dan Target Indikator Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga pada RPJMD Tahun 2020-2024 ....II|173
Tabel 2.65 Capaian Indikator Urusan Wajib Statistik pada RPJMD Tahun 2020-2024 .....II|175
Tabel 2.66 Capaian Indikator Urusan Wajib Persandian pada RPJMD Tahun 2020-2024 ..... II|176
Tabel 2.67 Capaian dan Target Indikator Urusan Wajib Kebudayaan pada RPJMD Tahun 2020-2024 .... II|177
Tabel 2.68 Capaian Indikator Urusan Wajib Perpustakaan pada RPJMD Tahun 2020-2024 ..... II|178
Tabel 2.69 Capaian Indikator Urusan Wajib Kearsipan pada RPJMD Tahun 2020-2024 ..... II|180
Tabel 2.70 Capaian Indikator Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan pada RPJMD Tahun 2020-2024 .....II|182
Tabel 2.71 Capaian Indikator Urusan Pilihan Pariwisata pada RPJMD Tahun 2020-2024 ..... II|184
Tabel 2.72 Capaian Indikator Urusan Pilihan Pertanian pada RPJMD Tahun 2020-2024 ..... II|185
Tabel 2.73 Capaian Indikator Urusan Pilihan Perdagangan pada RPJMD Tahun 2020-2024 ..... II|186
Tabel 2.74 Capaian Indikator Urusan Pilihan Perindustrian pada RPJMD Tahun 2020-2024 ..... II|188
Tabel 2.75 Capaian Indikator Urusan Pendukung Pemerintahan Sekretariat Daerah pada RPJMD Tahun 2020-2024 .....II|190
Tabel 2.76 Capaian Indikator Urusan Pendukung Pemerintahan Sekretariat DPRD pada RPJMD Tahun 2020-2024 .....II|192
Tabel 2.77 Capaian Indikator Urusan Perencanaan pada RPJMD Tahun 2020-2024 .....II|195
Tabel 2.78 Capaian Indikator Urusan Keuangan pada RPJMD Tahun 2020-2024 .....II|197
Tabel 2.79 Capaian Indikator Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan pada RPJMD Tahun 2020-2024 ..... II|199
Tabel 2.80 Capaian Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan pada RPJMD Tahun 2020-2024 . II|201
Tabel 2.81 Capaian Indikator Urusan Pengawas pada RPJMD Tahun 2020-2024 202
Tabel 2.82 Capaian Indikator Urusan Kewilayahan pada RPJMD Tahun 2020-2024 .....II|204
Tabel 2.83 Capaian Indikator Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada RPJMD Tahun 2020-2024 .....II|209
Tabel 2.84 Perkembangan Realisasi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 .....II|211

Tabel 2.85 Perkembangan indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 Misi 1 .....II|213
Tabel 2.86 Perkembangan indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 Misi 2 .....II|214
Tabel 2.87 Perkembangan indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 Misi 3 .....II|216
Tabel 2.88 Perkembangan indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 Misi 4 .....II|218
Tabel 2.89 Perkembangan indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 Misi 5 .....II|219
Tabel 2.90 Perkembangan indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 Misi 6 .....II|221
Tabel 2.91 Perkembangan indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 Misi 7 .....II|223
Tabel 2.92 Realisasi SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 .....II|235
Tabel 2.93 Realisasi SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 .....II|238
Tabel 2.94 Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 .....II|252
Tabel 2.95 Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 .....II|255
Tabel 2.96 Realisasi SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 202 .....II|257
Tabel 2.97 Realisasi SPM Bidang Sosial Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 .....II|262
Tabel 2.98 Indikator TPB Capaian SS Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2023 .....II|275
Tabel 2.99 Indikator TPB Capaian SB Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2023 .....II|283
Tabel 2.100 Indikator TPB Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Ada Data Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2023 288
Tabel 2.101 Indikator TPB Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2023 .....II|290
Tabel 2.102 Realisasi APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 .....II|292

Tabel 2.103 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II|294
Tabel 2.104 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 (Lanjutan) ..... II|298
Tabel 2.105 Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II|301
Tabel 2.106 Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 . II|304
Tabel 2.107 Target dan Realisasi serta Pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II|310
Tabel 2.108 Target dan Realisasi serta Pertumbuhan Belanja Operasi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II|313
Tabel 2.109 Target dan Realisasi serta Pertumbuhan Belanja Modal Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 . II|316
Tabel 2.110 Target dan Realisasi serta Pertumbuhan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II|317
Tabel 2.111 Target dan Realisasi serta Pertumbuhan Belanja Transfer Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II|319
Tabel 2.112 Realisasi Defisit/Surplus serta Pembiayaan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 . II|321
Tabel 2. 113 Indeks Kemampuan Fiskal Daerah Kabupaten Padang Pariaman ..... II|323
Tabel 2.114 Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman ..... II|326
Tabel 2.115 Proporsi Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman ..... II|327
Tabel 2.116 Neraca Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II|330
Tabel 2.117 Rasio Keuangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II|333
Tabel 2.118 Proyeksi Belanja Pegawai Tahun 2026-2030 ..... II|338
Tabel 2.119 Proyeksi Belanja Infrastruktur Tahun 2026-2030 ..... II|339
Tabel 2.120 Proyeksi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030 ..... II|340
Tabel 2.121 Kemampuan Riil Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030 ..... II|352

Tabel 2.122 Permasalahan Daerah Terkait dengan Misi 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas ..... II | 354
Tabel 2.123 Permasalahan Daerah Terkait dengan Misi 2 Menciptakan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing ..... II | 355
Tabel 2.124 Permasalahan Daerah Terkait dengan Misi 3 Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju, dan Merata ..... II | 356
Tabel 2.125 Permasalahan Daerah Terkait dengan Misi 4 Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan ..... II | 358
Tabel 2.126 Permasalahan Daerah Terkait dengan Misi 5 Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya ..... II | 359
Tabel 3.1 Sasaran Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2045 ..... III | 4
Tabel 3.2 Sasaran Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2045 ..... III | 11
Tabel 3.3 Sasaran Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2030 ..... III | 19
Tabel 3.4 Sasaran Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 ..... III | 21
Tabel 3.5 Sasaran Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030 ..... III | 28
Tabel 3.6 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 ..... III | 32
Tabel 3.7 Keselarasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2045 ..... III | 36
Tabel 3.8 Keselarasan Visi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan RPJMN Tahun 2025-2029 ..... III | 38
Tabel 3.9 Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman dan RPJMN Tahun 2025-2029 ..... III | 39
Tabel 3.10 Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 ..... III | 40
Tabel 3.11 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 ..... III | 42
Tabel 3.12 Arah Kebijakan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026-2030 ..... III | 53

Tabel 3.13 Program Prioritas Pembangunan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi 1 : Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dengan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkelanjutan ..... III | 77
Tabel 3.14 Program Prioritas Pembangunan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing ..... III | 80
Tabel 3.15 Program Prioritas Pembangunan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju dan Merata ..... III | 82
Tabel 3.16 Program Prioritas Pembangunan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi 4 : Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan ..... III | 85
Tabel 3.17 Program Prioritas Pembangunan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi 5 : Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmoni dan Berbudaya ..... III | 86
Tabel 3.18 Tema dan Fokus Pembangunan Pada RPJMD Tahun 2025-2029 ..... III | 88
Tabel 3.19 Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 ..... III | 96
Tabel 3.20 Arah Kebijakan dan Program Prioritas Penurunan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 ..... III | 127
Tabel 3.21 Arah Kebijakan dan Program Prioritas Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 ..... III | 128
Tabel 3.22 Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 III | 130
Tabel 3.23 Target Kinerja Fokus Prioritas RPJMN Tahun 2025-2030 ..... III | 130
Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030 ..... IV | 1
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Makro Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030 ..... IV | 34
Tabel 4.3 Target Indikator Kinerja Sasaran Visi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030 ..... IV | 36
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030 ..... IV | 38

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 ..... IV|43
Tabel 4.6 Pagu Program Perangkat Daerah Per Urusan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 ..IV|65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah .....I|9
Gambar 2. 1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Padang Pariaman ..... II|3
Gambar 2.2 Topografi Kabupaten Padang Pariaman ..... II|4
Gambar 2.3 Kondisi Geologi Kabupaten Padang Pariaman .....II|6
Gambar 2.4 Peta Hidrologi Kabupaten Padang Pariaman ..... II|7
Gambar 2.5 Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kabupaten Padang Pariaman .II|21
Gambar 2.6 Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Kabupaten Padang Pariaman .....II|22
Gambar 2.7 Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Serat Kabupaten Padang Pariaman .... II|22
Gambar 2.8 Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Bahan Bakar, Kayu dan Fosil Kabupaten Padang Pariaman ..... II|23
Gambar 2.9 Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Sumber Daya Genetik Kabupaten Padang Pariaman ..... II|23
Gambar 2.10 Peta Daya Tampung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kabupaten Padang Pariaman .... II|24
Gambar 2.11 Peta Daya Tampung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Kabupaten Padang Pariaman ..... II|25
Gambar 2.12 Peta Daya Tampung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan, Pemurnian Air Kabupaten Padang Pariaman ..... II|25
Gambar 2.13 Peta Daya Tampung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan pengolahan dan Penguraian Limbah Kabupaten Padang Pariam .....II|26
Gambar 2.14 Peta Daya Dukung Jasa Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Kabupaten Padang Pariaman ..... II|26
Gambar 2.15 Peta Daya Tampung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Penyerbukan Alami (Pollination) Kabupaten Padang Pariaman .....II|27
Gambar 2.16 Peta Daya Tampung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit Kabupaten Padang Pariaman .....II|27
Gambar 2.17 Peta Daya Dukung Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Kabupaten Padang Pariaman .....II|28

Gambar 2.18 Peta Daya Lingkungan Jasa Ekosistem Budaya Rekreasi dan Ecotourism Kabupaten Padang Pariaman .....II | 29
Gambar 2.19 Peta Daya Lingkungan Jasa Ekosistem Budaya Estetika (alam) Kabupaten Padang Pariaman ..... II | 29
Gambar 2.20 Peta Daya Tampung Lingkungan Jasa Ekosistem Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan Kabupaten Padang Pariaman ..... II | 30
Gambar 2.21 Peta Daya Tampung Lingkungan Jasa Ekosistem Pendukung Siklus Hara (Nutrient Cycle) Kabupaten Padang Pariaman ..... II | 31
Gambar 2.22 Peta Daya Tampung Lingkungan Jasa Ekosistem Pendukung Produksi Primer Kabupaten Padang Pariaman ..... II | 31
Gambar 2.23 Peta Daya Tampung Lingkungan Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas (Perlindungan Plasma Nutfah) Kabupaten Padang Pariaman ..... II | 32
Gambar 2.24 Peta Daya Dukung Daya Tampung Air Kabupaten Padang Pariaman 2023 .....II | 33
Gambar 2.25 Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) dan Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 37
Gambar 2.26 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 38
Gambar 2.27 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2025 ..... II | 39
Gambar 2.28 Debit Aliran Sungai Batang Anai Tahun 2022 ..... II | 41
Gambar 2.29 Debit Aliran Sungai Batang Tapakis Tahun 2022 . II | 41
Gambar 2.30 Debit Aliran Sungai Batang Ulakan Tahun 2022 .. II | 42
Gambar 2.31 Kapasitas Air Baku Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 42
Gambar 2.32 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ...II | 43
Gambar 2.33 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 44
Gambar 2.34 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (Persen) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 46
Gambar 2.35 Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 47
Gambar 2.36 Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 48

Gambar 2.37 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 50
Gambar 2.38 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 64
Gambar 2.39 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Padang Pariaman ..... II | 65
Gambar 2.40 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Padang Pariaman ..... II | 66
Gambar 2.41 Kemiskinan Ekstrim Kabupaten Padang Pariaman ..... II | 67
Gambar 2.42 Perkembangan PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Padang Pariaman dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 ..... II | 68
Gambar 2.43 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 69
Gambar 2.44 Rasio Gini Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 70
Gambar 2.45 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 70
Gambar 2.46 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 71
Gambar 2.47 Usia Harapan Hidup Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 72
Gambar 2.48 Angka Kematian Ibu Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 73
Gambar 2.49 Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 74
Gambar 2.50 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus TBC Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ... II | 75
Gambar 2.51 Angka Keberhasilan Pengobatan TBC Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 76
Gambar 2.52 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2024 ... II | 77
Gambar 2.53 Grafik Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020–2024 ..... II | 78
Gambar 2.54 Angka Literasi dan Numerasi Tingkat Pendidikan SD Tahun 2021 – 2024 ..... II | 79
Gambar 2.55 Angka Literasi dan Numerasi Tingkat Pendidikan SMP Tahun 2021 – 2024 ..... II | 79
Gambar 2.56 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Padang Pariaman 2020–2024 ..... II | 80
Gambar 2.57 Perkembangan Angka HLS Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 81

Gambar 2.58 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Tahun 2020-2024 ..... II | 82
Gambar 2.59 Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi Tahun 2020-2024 ..... II | 83
Gambar 2.60 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 84
Gambar 2.61 Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Formal, Informal dan Jasa Konstruksi) Tahun 2020-2024 II | 84
Gambar 2.62 Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan ..... II | 86
Gambar 2.63 Persentase Warisan tak Benda yang dilestarikan .. II | 87
Gambar 2.64 Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 88
Gambar 2.65 Indeks Ketimpangan Gender ..... II | 89
Gambar 2.66 Indeks Perlindungan Khusus Anak Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 90
Gambar 2.67 Persentase Pengeluaran Per Kapita Sebulan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ... II | 93
Gambar 2.68 Persentase Pengeluaran Konsumsi Masyarakat Pada Kelompok Makanan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 ..... II | 94
Gambar 2.69 Persentase Pengeluaran Konsumsi Masyarakat Pada Kelompok Non Makanan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 ..... II | 94
Gambar 2.70 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 96
Gambar 2.71 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minuman Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 97
Gambar 2.72 Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara Tahun 2020-2024 ..... II | 98
Gambar 2.73 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2020-2024 ..... II | 99
Gambar 2.74 Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 100
Gambar 2.75 Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 . II | 101
Gambar 2.76 Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 . II | 102
Gambar 2.77 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 103
Gambar 2.78 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2024 . II | 104

Gambar 2.79 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 105
Gambar 2.80 Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 . II | 106
Gambar 2.81 Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 113
Gambar 2.82 Grafik Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 114
Gambar 2.83 Persentase RT yang memiliki akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau (%) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 114
Gambar 2.84 Indeks Desa Membangun Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 .....II | 115
Gambar 2.85 Persentase Desa Mandiri Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 .....II | 117
Gambar 2.86 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 117
Gambar 2.87 Total Dana Pihak Ketiga/PDRB Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 118
Gambar 2.88 Nilai Transaksi Saham Per Kapita Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 119
Gambar 2.89 Persentase Pertumbuhan Investasi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 120
Gambar 2.90 Total Kredit/PDRB Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 .....II | 121
Gambar 2.91 Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 122
Gambar 2.92 Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 .....II | 122
Gambar 2.93 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2024 . II | 123
Gambar 2.94 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 124
Gambar 2.95 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 .....II | 126
Gambar 2.96 Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK (nilai) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 127
Gambar 2.97 Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2024 .....II | 128
Gambar 2.98 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada/Pilpres .....II | 129
Gambar 2.99 Persentase Kerjasama Wajib yang dilaksanakan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 . II | 130
Gambar 2.100 Indeks Kemanan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2024 .....II | 131

Gambar 2.101 Grafik Persentase Kontribusi Pendapatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 (dalam persen) ..... II | 302
Gambar 2.102 Grafik Kinerja Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 303
Gambar 2.103 Grafik Persentase Kontribusi Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 303
Gambar 2.104 Grafik Kinerja Pajak Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 304
Gambar 2.105 Grafik Kinerja Retribusi Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 305
Gambar 2.106 Grafik Kinerja Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 306
Gambar 2.107 Grafik Kinerja Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 307
Gambar 2.108 Grafik Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 308
Gambar 2.109 Grafik Perkembangan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 308
Gambar 2.110 Grafik Perkembangan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 309
Gambar 2.111 Grafik Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 . II | 311
Gambar 2.112 Grafik Proporsi Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 312
Gambar 2.113 Grafik Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 314
Gambar 2.114 Grafik Perkembangan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 . II | 315
Gambar 2.115 Grafik Realisasi Belanja Modal Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 316
Gambar 2.116 Grafik Realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 318
Gambar 2.117 Grafik Realisasi Belanja Transfer Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 319
Gambar 2.118 Grafik Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 ..... II | 320
Gambar 2.119 Kemampuan Fiskal Daerah Kabupaten Padang Pariaman ..... II | 323
Gambar 2.120 Perkembangan Tax Buoyancy Tahun 2020-2024 ..... II | 324

Gambar 2.121 Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman ..... II|325
Gambar 2.122 Tren Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja .....II|326

LAMPIRAN I
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan nasional. Hakikat Pembangunan daerah adalah mewujudkan tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat tujuan Pembangunan nasional dimuat dalam Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:
"... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..."

Pemerintah Daerah memiliki peran yang krusial dalam mengelola dan mengatur urusan dalam wilayahnya sesuai dengan prinsip otonomi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Otonomi ini memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas berbagai aspek pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, penyediaan kesempatan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan daya saing daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka daerah sesuai dengan kewenangannya diwajibkan menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antara pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat; serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya memerlukan perencanaan pembangunan yang mencakup jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Perencanaan ini harus memiliki substansi

yang saling berkaitan dan mampu menjadi kerangka acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 Ayat 3, serta dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 260 Ayat 1. Perencanaan pembangunan yang disusun secara sinergis oleh semua pemangku kepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama kedua undang-undang tersebut, diharapkan mampu memberikan arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya.

Dalam kerangka tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun yang disusun sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik. RPJMD berfungsi sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah yang dilengkapi dengan kerangka pendanaan indikatif.

Kabupaten Padang Pariaman memasuki periode pembangunan tahun 2025–2029 setelah dilantiknya H. John Kenedy Azis, S.H., M.H., sebagai Bupati Padang Pariaman dan Rahmat Hidayat, S.E., M.M., sebagai Wakil Bupati Padang Pariaman berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Pelantikan tersebut dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Februari 2025 di Istana Negara, dengan masa bakti kepemimpinan yang berlaku untuk periode 2025–2030. Periode ini menjadi momentum strategis bagi Kabupaten Padang Pariaman untuk mempercepat pembangunan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah diwajibkan untuk menyusun RPJMD Tahun 2025-2029 yang memuat data, informasi capaian kinerja pembangunan daerah, dan memuat visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan serta program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta rekomendasi oleh para teknokrat untuk rencana pembangunan 5 (lima) tahun ke depan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 merupakan tahap awal dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2045, sehingga menjadi momentum penting untuk merefleksikan pencapaian selama dua puluh tahun terakhir sebagaimana dituangkan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025, mengevaluasi pelaksanaan program, sebelumnya dan merumuskan arah pembangunan masa depan yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing.

RPJMD juga menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dokumen ini berperan penting dalam memastikan pembangunan daerah berlangsung secara terarah, sistematis dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta tantangan yang dihadapi daerah.

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, RPJMD harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Keselarasan ini bertujuan untuk menciptakan kesinambungan pembangunan dari tingkat nasional hingga daerah, sehingga setiap kebijakan dan program yang dicanangkan dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun lokal.

Penyusunan RPJMD juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti masyarakat, akademisi, dunia usaha serta organisasi masyarakat. Pelibatan berbagai pihak bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dirumuskan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan pendekatan yang partisipatif, RPJMD dapat menjadi dokumen yang inklusif dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi daerah. Selain sebagai dokumen perencanaan, RPJMD juga memiliki fungsi sebagai instrumen evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan melalui indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Selain itu, RPJMD mencerminkan visi dan misi kepala daerah terpilih yang telah dipilih oleh masyarakat. Dokumen ini menjadi alat untuk mewujudkan janji politik yang telah disampaikan dalam kampanye. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD harus mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar program yang dirancang benar-benar memberikan solusi atas permasalahan yang ada di daerah. Dengan demikian, RPJMD dapat menjadi instrumen pembangunan yang lebih inklusif dan berbasis pada kepentingan masyarakat luas.

Dokumen RPJMD Tahun 2025–2029 juga berada dalam konteks transisi nasional menuju Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2045, yang merupakan cetak biru menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, RPJMD tidak hanya menyesuaikan dengan arah kebijakan nasional, tetapi juga harus mampu menyiapkan pondasi transformasi daerah yang lebih adaptif, inklusif, dan berdaya saing tinggi Penyusunan dokumen ini dilandasi oleh kondisi faktual pembangunan daerah, antara lain masih tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan antar wilayah, belum optimalnya kualitas layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan,ketergantungan terhadap sektor ekonomi tradisional yang belum sepenuhnya produktif dan inovatif, tantangan terhadap pelestarian lingkungan dan peningkatan risiko bencana, serta perlunya akselerasi transformasi digital dan penguatan ekonomi berbasis potensi lokal dan budaya.

Meskipun demikian, Padang Pariaman juga memiliki peluang besar untuk dikembangkan, seperti bonus demografi, posisi geografis strategis di wilayah barat Sumatera, potensi wisata berbasis budaya dan alam, keberagaman kuliner, serta kekuatan sosial masyarakat Minangkabau yang berbasis kearifan lokal, adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah (ABS-SBK). Sehingga semua permasalahan dan peluang besar tersebut harus mampu dijawab dengan perencanaan pembangunan yang komprehensif serta terintegrasi antar sektor.

RPJMD Kabupaten Padang Pariaman mengadopsi berbagai pendekatan, termasuk teknokratik, partisipatif, politis, pendekatan dari bawah (*bottom-up*) dan dari atas (*top-down*).

1. Pendekatan Politis: Pendekatan politis digunakan dalam penyusunan RPJMD untuk memastikan bahwa dokumen ini selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Hal ini penting untuk memperoleh dukungan politik yang kuat dan berkesinambungan kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Melalui pendekatan ini, berbagai kepentingan politik dapat diakomodasi dalam kerangka pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.
2. Pendekatan Teknokratik: Perencanaan dan implementasi pembangunan berbasis pada data dan analisis ilmiah. Dengan menggunakan pendekatan ini, berbagai indikator pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan pembangunan manusia dianalisis secara mendalam untuk merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Pendekatan ini memastikan bahwa RPJMD didasarkan pada fakta dan proyeksi yang realistis.
3. Pendekatan Partisipatif: Diwujudkan melalui pelibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil serta seluruh pihak berkepentingan melalui forum konsultasi publik dan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) guna memperhitungkan berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat terakomodasi dalam dokumen RPJMD. Partisipasi aktif dari berbagai pihak juga meningkatkan rasa memiliki dan dukungan terhadap implementasi program pembangunan.
4. Pendekatan Atas-Bawah *(Top-Down)* dan Bawah-Atas *(Bottom-U*p): Diterapkan dengan mengacu pada arahan dan kebijakan dari pemerintah pusat dan provinsi yang kemudian diadaptasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Pendekatan ini memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman selaras dengan visi, misi, arah kebijakan, arah pembangunan, sasaran pokok nasional dan provinsi serta memperoleh dukungan dan sumber daya yang diperlukan dari tingkat yang lebih tinggi.
5. Pendekatan Holistik-tematik: Pendekatan ini diterapkan dengan melihat pembangunan secara menyeluruh (holistik) dan berfokus pada tema-tema prioritas pembangunan (tematik) yang bersifat lintas sektor. Di Kabupaten Padang Pariaman, pendekatan ini memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan tidak dilakukan secara sektoral semata, melainkan dirancang berdasarkan isu strategis utama seperti pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur dasar, ketahanan pangan, serta mitigasi bencana. Dengan mengintegrasikan berbagai sektor dan aktor dalam satu kerangka tematik yang konsisten, pemerintah daerah mampu menyusun perencanaan yang lebih fokus, terarah, dan berdampak luas terhadap masyarakat. Pendekatan holistik-tematik juga bertujuan untuk menghindari tumpang tindih program antar perangkat daerah, sekaligus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan pembangunan. Dalam implementasinya, tema prioritas yang ditetapkan akan menjadi landasan dalam menyusun RKPD maupun Renja perangkat daerah agar pembangunan yang dilakukan tepat sasaran, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan konsisten dengan pencapaian tujuan jangka menengah dan panjang daerah.
6. Pendekatan Integratif dan spasial: dilakukan untuk menyatukan kewenangan antar sektor dan tingkatan pemerintahan ke dalam satu proses pembangunan yang terpadu dan menyelaraskan berbagai

kewenangan lintas sektor dan lintas tingkatan pemerintahan dalam satu proses pembangunan yang terpadu dan harmonis. Dalam konteks Kabupaten Padang Pariaman, pendekatan ini sangat penting mengingat kompleksitas tantangan pembangunan daerah yang memerlukan koordinasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat, serta antar perangkat daerah. Dengan menerapkan pendekatan integratif, seluruh program dan kegiatan pembangunan dapat dirancang secara terkoordinasi, sinergis, dan tidak tumpang tindih, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas capaian pembangunan.

7. Sedangkan pendekatan spasial memperhatikan dimensi keruangan dan karakteristik wilayah dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan. Digunakan untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan mempertimbangkan aspek keruangan dan karakteristik wilayah, seperti kondisi geografis, potensi sumber daya alam, tata guna lahan, sebaran penduduk, hingga kerentanan terhadap bencana. Pendekatan ini mendorong pembangunan yang lebih kontekstual dan berkeadilan, karena perumusan kebijakan dan program dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan spesifik dan keunikan masing-masing wilayah. Dalam pelaksanaannya, pendekatan spasial juga berperan dalam mendukung pemerataan pembangunan antar wilayah serta mendorong tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan baru di luar kawasan perkotaan utama.

Dari perspektif sosiologis, penyusunan RPJMD ini mencerminkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat yang tidak hanya berperan sebagai pelaku pembangunan, tetapi juga sebagai pihak yang secara langsung merasakan dampaknya. Khususnya di Sumatera Barat, keterlibatan masyarakat memiliki peran krusial mengingat karakter sosial budaya Minangkabau yang egaliter, menjunjung tinggi prinsip musyawarah, dan memiliki ikatan komunitas yang kuat.

RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 memiliki peran strategis dalam berbagai aspek, terutama sebagai sarana untuk mensinergikan visi dan misi Kepala Daerah dengan dokumen perencanaan nasional serta RPJMD Kabupaten/Kota lain dalam kerangka RPJPN 2025–2045 menuju Indonesia Emas 2045. Dokumen ini juga menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, sekaligus sebagai pijakan dalam merumuskan arah kebijakan tahunan melalui RKPD, serta menjadi dasar dalam proses penyusunan KUA-PPAS dan APBD.

Lebih jauh, RPJMD ini akan menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah melalui indikator yang jelas dan terukur, serta mendukung upaya percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di tingkat daerah. Selain itu, dokumen ini juga menjadi panduan dalam pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada prinsip *money follows program priorities,* yaitu mengarahkan belanja daerah pada program-program prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.

Komitmen pembangunan berkelanjutan diimplementasikan melalui integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs) ke dalam setiap tujuan, sasaran, dan indikator kinerja daerah. Strategi yang dirumuskan mencakup penguatan ketahanan ekonomi daerah berbasis potensi lokal, peningkatan kualitas dan daya saing sumber

daya manusia, pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dengan skenario ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bertekad untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pembangunan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan dipandang bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan, demi terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang maju, berdaya saing, sejahtera, dan lestari.

Dengan dasar tersebut, penyusunan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 merupakan wujud komitmen kolektif antara Pemerintah Daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Padang Pariaman Maju dan Sejahtera.

1.2 Dasar Hukum

RPJMD disusun berdasarkan berbagai regulasi yang mengatur Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan daerah. Landasan hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 696868);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

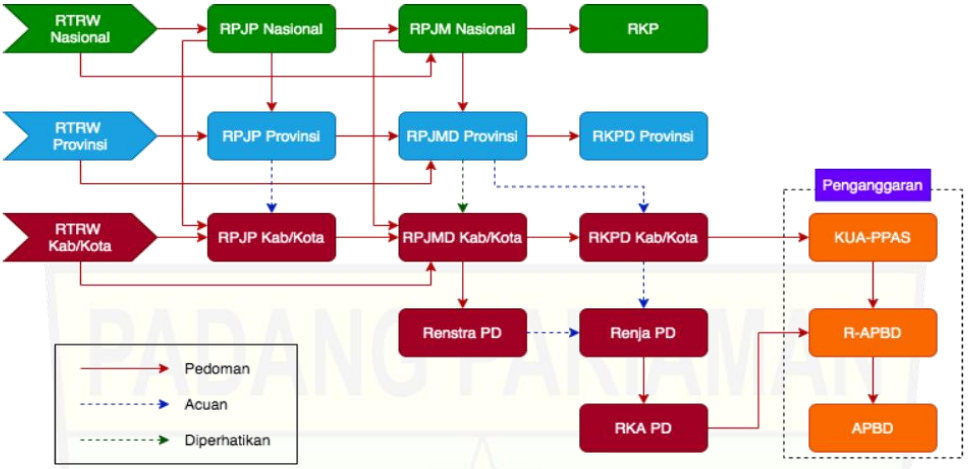
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 281);
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6).

1.3 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diamanatkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran serta program kegiatan pembangunan jangka menengah daerah.

RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 sangat terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Hal ini dikarenakan RPJMD merupakan sebuah dokumen yang sifatnya memberikan panduan pembangunan jangka panjang dan akan dioperasionalkan ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan. Gambar 1.1. menunjukkan bahwa dokumen RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tidak dapat mandiri substansial. Dokumen ini memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sehingga tercipta sinkronisasi antar dokumen perencanaan pusat dan daerah. Oleh karena itu, dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman, perlu memperhatikan keterkaitannya dengan dokumen-dokumen seperti RPJP Nasional, RPJPD Provinsi, RPJMN, RPJMD Provinsi serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten Padang Pariaman sendiri.

Gambar 1. 1
Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah



Dalam penyusunannya, RPJMD Kabupaten Padang Pariaman mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2025-2029. Dokumen RPJMD Kabupaten Padang Pariaman juga memperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 sebagai dasar penyusunan, terutama untuk sinkronisasi tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota, serta strategi dan arah kebijakan yang bersifat lintas kabupaten/kota. Penyusunan dokumen RPJMD ini juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di tingkat Provinsi dan Kabupaten. RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan tentang perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan 5 (lima) tahun dan akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.3.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman dengan RPJPD Kabupaten Padang Pariaman

RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 memiliki hubungan langsung dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Pariaman 2025-2045. RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 tahun yang menjadi landasan utama dalam penyusunan RPJMD setiap periode pemerintahan. Dengan kata lain, RPJMD berperan sebagai dokumen operasional yang menguraikan tahapan-tahapan pencapaian visi pembangunan jangka panjang sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJPD.

RPJPD Kabupaten Padang Pariaman 2025-2045 akan menetapkan visi pembangunan daerah dalam jangka panjang yang mencerminkan potensi, tantangan, serta arah kebijakan yang akan diambil dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Padang Pariaman 2025-2029 harus disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, dan sasaran utama yang telah digariskan dalam RPJPD. Dengan demikian, setiap kebijakan dan program pembangunan yang dirancang dalam RPJMD akan berkontribusi dalam mencapai target pembangunan jangka panjang daerah.

1.3.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN

RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 memiliki hubungan yang erat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2025-2029. Sebagai bagian dari wilayah administratif Provinsi Sumatera Barat, pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman harus selaras dengan kebijakan, strategi, dan program pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat provinsi. Keselarasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan dalam satu arah yang mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan.

RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 tidak disusun secara terpisah dari arah pembangunan tingkat provinsi, melainkan memiliki keterkaitan yang kuat dan strategis dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029. Sebagai salah satu kabupaten di wilayah administratif Sumatera Barat, Kabupaten Padang Pariaman secara normatif dan fungsional berkewajiban menyelaraskan arah kebijakan, sasaran, dan program pembangunannya dengan dokumen perencanaan provinsi.

Keselarasan ini dimaksudkan untuk menciptakan sinergi antar tingkatan pemerintahan, memperkuat efektivitas pelaksanaan pembangunan, serta memastikan bahwa kontribusi Kabupaten Padang Pariaman turut mendorong pencapaian visi dan misi Provinsi Sumatera Barat secara agregat. Dalam kerangka tersebut, kebijakan pembangunan kabupaten harus memperhatikan prioritas provinsi, baik dari sisi pembangunan ekonomi, sosial, infrastruktur, maupun lingkungan hidup, agar terwujud pembangunan yang harmonis, berkelanjutan, dan saling mendukung antar wilayah.

Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tidak hanya menjadi pedoman pembangunan di tingkat lokal, tetapi juga menjembatani tujuan pembangunan daerah dengan arah pembangunan provinsi dan nasional. Sinergi dan integrasi ini menjadi kunci utama dalam meningkatkan daya saing wilayah dan mempercepat pencapaian pembangunan yang inklusif dan merata di Sumatera Barat

RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan erat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk lima tahun ke depan. RPJMN disusun sebagai pedoman bagi pembangunan nasional dengan mempertimbangkan visi dan misi presiden serta arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Padang Pariaman, wajib menyelaraskan RPJMD mereka agar sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional yang lebih luas

Keselarasan antara RPJMD dan RPJMN sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan di daerah berjalan selaras dengan agenda pembangunan nasional. RPJMN 2025-2029 berfokus pada penurunan kemiskinan, penguatan sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Kabupaten Padang Pariaman, sebagai bagian dari sistem pembangunan nasional, perlu menyesuaikan program dan kebijakan daerahnya agar dapat berkontribusi

terhadap pencapaian target nasional sambil tetap memperhatikan kebutuhan dan potensi lokal.

Dalam konteks sistem perencanaan pembangunan nasional, pembangunan di tingkat daerah tidak bisa berlangsung secara terpisah atau terlepas dari kerangka kebijakan pusat. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus diselaraskan dan diintegrasikan dengan arah kebijakan serta sasaran pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).

Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menekankan pentingnya integrasi dan sinergi antara perencanaan pembangunan di pusat dan daerah. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengharuskan agar dokumen perencanaan pembangunan daerah berpedoman pada dokumen perencanaan nasional.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 secara eksplisit menyatakan bahwa:

1. RPJMD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang merinci visi, misi, dan program Kepala Daerah dengan tetap mengacu pada RPJP Daerah dan RPJMN 2025–2029;
2. RPJMN 2025–2029 menjadi rujukan legal dalam penyusunan RPJMD serta memperhatikan peran dan fungsi pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran pembangunan nasional;
3. Semua pelaku pembangunan, baik dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah, wajib mengikuti arah kebijakan RPJMN sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Dari sisi substansi, RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 merupakan instrumen perencanaan yang berisi arah pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah. Namun demikian, dalam perumusannya, RPJMD juga harus mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang nasional menuju Indonesia Emas 2045 serta visi RPJMN 2025–2045, yang dijabarkan ke dalam delapan agenda pembangunan prioritas (Astacita). Dengan demikian, setiap prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Sumatera Barat harus menunjukkan kontribusi langsung atau tidak langsung terhadap pencapaian sasaran nasional, terutama melalui indikator kinerja daerah yang mendukung indikator makro nasional.

Sinkronisasi antara RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 dan RPJMN 2025–2029 menjadi sangat strategis dalam menjamin kesinambungan kebijakan pembangunan, meningkatkan akses pendanaan dari pusat ke daerah (seperti DAK dan Dana Insentif Daerah), memastikan kontribusi nyata daerah terhadap pencapaian tujuan nasional, serta memperkuat daya saing daerah dalam tataran nasional maupun global.

Dengan demikian, RPJMD Sumatera Barat tidak hanya menjadi acuan pembangunan di tingkat provinsi selama lima tahun ke depan, tetapi juga merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan RPJMN 2025–2045 secara nasional. Kesesuaian dan keterpaduan antara keduanya menjadi syarat penting dalam menciptakan pembangunan yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

1.3.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2040

Penyusunan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman juga mengacu kepada RTRW Kabupaten Padang Pariaman. RTRW merupakan dokumen perencanaan spasial yang menetapkan struktur dan pola pemanfaatan ruang suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat sektoral dan mencakup kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Dengan demikian, keselarasan antara RPJMD dan RTRW sangat penting untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip tata ruang yang telah ditetapkan.

Kabupaten Padang Pariaman memiliki posisi strategis sebagai daerah penyangga ibu kota Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kota Padang. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan permukiman di Kabupaten Padang Pariaman harus selaras dengan RTRW Provinsi, terutama dalam mendukung fungsi Kabupaten Padang Pariaman sebagai daerah hinterland yang menopang pertumbuhan ekonomi di Kota Padang. Selain itu, pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya dan alam di Kabupaten Padang Pariaman juga harus sejalan dengan kebijakan RTRW Provinsi yang mendorong penguatan pariwisata berbasis kearifan lokal dan kelestarian lingkungan.

RTRW Kabupaten Padang Pariaman adalah dokumen yang mengatur pemanfaatan ruang di tingkat kabupaten dan menjadi acuan utama bagi perencanaan pembangunan daerah. RPJMD harus selaras dengan RTRW Kabupaten agar setiap kebijakan dan program pembangunan tidak bertentangan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Salah satu aspek penting dalam hubungan antara RPJMD dan RTRW Kabupaten adalah pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai kecamatan. RTRW Kabupaten Padang Pariaman telah menetapkan zona-zona pemanfaatan ruang, seperti kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan pertanian, serta kawasan pariwisata. Oleh karena itu, RPJMD harus mengacu pada RTRW Kabupaten dalam menyusun program pembangunan, misalnya dalam penetapan lokasi pembangunan infrastruktur, pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan, serta pengembangan destinasi wisata yang sesuai dengan zonasi tata ruang.

1.3.4 Hubungan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman dengan KLHS RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 memiliki hubungan yang erat dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD. KLHS merupakan instrumen perencanaan yang bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan program (KRP) yang tertuang dalam RPJMD. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap pemerintah daerah wajib menyusun KLHS untuk memastikan bahwa pembangunan yang dirancang dalam RPJMD tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan

ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

KLHS RPJMD berperan dalam mengidentifikasi berbagai isu strategis lingkungan yang dapat berdampak terhadap pembangunan daerah. Dalam konteks Kabupaten Padang Pariaman, isu-isu lingkungan yang perlu diperhatikan dalam KLHS meliputi pengelolaan sumber daya alam, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, risiko bencana alam seperti banjir dan tsunami, serta pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri dan permukiman. Oleh karena itu, RPJMD harus merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Hubungan antara RPJMD dan KLHS juga terlihat dalam integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam setiap program dan kegiatan yang dirancang oleh pemerintah daerah. KLHS menyediakan rekomendasi yang harus menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD, termasuk strategi untuk menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan konservasi lingkungan. Sebagai contoh, jika RPJMD menetapkan sektor pariwisata sebagai salah satu prioritas pembangunan, maka KLHS akan memberikan arahan agar pengembangan pariwisata dilakukan dengan pendekatan ekowisata yang ramah lingkungan, tidak merusak ekosistem, dan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaannya.

Dengan adanya keterkaitan yang kuat antara RPJMD dan KLHS, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dapat memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan keberlanjutan jangka panjang. Integrasi KLHS dalam RPJMD akan membantu dalam mengantisipasi dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan serta menciptakan kebijakan yang lebih adaptif terhadap tantangan perubahan iklim dan bencana alam. Oleh karena itu, dalam penyusunan RPJMD 2025-2029, KLHS harus dijadikan sebagai instrumen utama dalam menilai dampak lingkungan dari setiap kebijakan dan program pembangunan, sehingga Kabupaten Padang Pariaman dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya tahan terhadap perubahan lingkungan di masa depan.

1.3.5 Hubungan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 dengan RPJPN Tahun 2025-2045

RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional dalam jangka waktu 20 tahun ke depan. RPJPN menjadi pedoman utama dalam perencanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan, termasuk dalam penyusunan RPJMN dan RPJMD di seluruh daerah. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Padang Pariaman harus selaras dengan kebijakan dan visi besar yang tertuang dalam RPJPN, sehingga arah pembangunan daerah dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka panjang.

RPJPN 2025-2045 mengusung visi Indonesia Emas 2045, yang berfokus pada empat pilar utama, yaitu pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta ketahanan nasional dan

tata kelola pemerintahan. Kabupaten Padang Pariaman sebagai bagian dari sistem pembangunan nasional harus merancang kebijakan dan program pembangunan yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian visi tersebut. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Padang Pariaman perlu menyelaraskan strategi dan arah kebijakan dengan pilar-pilar pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJPN.

Salah satu aspek utama dalam hubungan RPJMD dengan RPJPN adalah pembangunan manusia dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). RPJPN menargetkan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya saing tenaga kerja sebagai salah satu prioritas utama pembangunan nasional. Kabupaten Padang Pariaman perlu menyesuaikan kebijakan dan programnya dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, memperkuat layanan kesehatan, serta menciptakan tenaga kerja yang siap menghadapi persaingan global melalui program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi berbasis keterampilan dan inovasi.

Dengan adanya keterkaitan yang erat antara RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045, pembangunan daerah dapat diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam jangka panjang. Keselarasan ini tidak hanya memastikan bahwa kebijakan daerah memiliki dampak yang lebih luas dalam konteks pembangunan nasional, tetapi juga membuka peluang bagi Kabupaten Padang Pariaman untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat, baik dalam bentuk pendanaan, infrastruktur, maupun kebijakan yang mendorong percepatan pembangunan di tingkat daerah. Oleh karena itu, RPJMD harus disusun dengan mempertimbangkan visi besar Indonesia 2045 agar dapat berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.

1.3.6 Hubungan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman dengan RPJPD Provinsi Sumatera Barat

RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 memiliki hubungan yang erat dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat 2025-2045. RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 tahun yang menjadi pedoman utama bagi penyusunan RPJMD setiap periode pemerintahan. Sebagai bagian dari wilayah administratif Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Padang Pariaman harus memastikan bahwa arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam RPJMD selaras dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam RPJPD provinsi.

Dengan adanya hubungan yang kuat antara RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045, pembangunan daerah dapat berjalan lebih terarah dan selaras dengan visi pembangunan jangka panjang provinsi. Keselarasan ini akan memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan daerah memiliki dampak yang lebih luas, mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, dalam penyusunan RPJMD, pemerintah daerah harus menjadikan RPJPD Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu acuan utama agar pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan daerah secara keseluruhan.

1.3.7 Hubungan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 memiliki hubungan erat dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu satu tahun. RKPD disusun setiap tahun oleh pemerintah daerah sebagai dokumen operasional yang menjabarkan tahapan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Dengan kata lain, RKPD merupakan instrumen utama dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan daerah yang telah dirancang dalam RPJMD secara bertahap dan terukur.

Hubungan antara RPJMD dan RKPD bersifat hirarkis dan fungsional. RPJMD menetapkan arah pembangunan daerah dalam jangka menengah lima tahun, sementara RKPD berfungsi sebagai panduan tahunan yang memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilakukan setiap tahun berkontribusi terhadap pencapaian target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Oleh karena itu, setiap penyusunan RKPD harus mengacu pada RPJMD agar pelaksanaan pembangunan tetap terarah dan konsisten dengan visi, misi, serta prioritas daerah.

Dalam aspek penyusunan program dan kegiatan, RKPD menerjemahkan kebijakan strategis dalam RPJMD ke dalam rencana tahunan yang lebih rinci dan operasional. Misalnya, jika dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman 2025-2029 ditetapkan prioritas pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, maka RKPD setiap tahunnya akan merinci proyek-proyek spesifik, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan sarana transportasi, yang harus direalisasikan pada tahun tersebut. Dengan demikian, RKPD menjadi instrumen yang menjamin kesinambungan dan efektivitas pelaksanaan RPJMD.

Selain itu, RKPD berperan penting dalam proses penganggaran daerah. Dokumen RKPD menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang kemudian digunakan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan adanya keterkaitan ini, RKPD memastikan bahwa alokasi anggaran setiap tahun sejalan dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Oleh karena itu, konsistensi antara RPJMD dan RKPD sangat penting untuk memastikan efektivitas penggunaan sumber daya dan pencapaian target pembangunan daerah.

Dengan adanya hubungan yang erat antara RPJMD dan RKPD, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan secara sistematis dan berkesinambungan. Penyusunan RKPD yang selaras dengan RPJMD akan membantu dalam mengatasi tantangan pembangunan secara lebih terstruktur dan berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, dalam penyusunan RKPD setiap tahunnya, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman harus selalu mengacu pada kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dalam RPJMD agar arah pembangunan daerah tetap terjaga dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

1.3.8 Hubungan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)

RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan langsung dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan pada level perangkat daerah untuk jangka waktu lima tahun. Renstra PD disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Dengan demikian, Renstra PD berfungsi sebagai instrumen operasional bagi OPD dalam mengimplementasikan kebijakan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Hubungan antara RPJMD dan Renstra PD bersifat strategis dan teknis. RPJMD menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah secara keseluruhan, sedangkan Renstra PD menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam program dan kegiatan yang lebih spesifik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah harus memastikan bahwa penyusunan Renstra PD selaras dengan RPJMD agar program dan kegiatan yang dijalankan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Dalam aspek perencanaan program dan kegiatan, Renstra PD menjadi acuan dalam menentukan prioritas kerja OPD selama periode lima tahun. Misalnya, jika RPJMD Kabupaten Padang Pariaman 2025-2029 menargetkan peningkatan kualitas layanan kesehatan, maka Dinas Kesehatan harus menyusun Renstra yang mencakup program-program strategis, seperti penguatan layanan kesehatan primer, peningkatan kapasitas tenaga medis, serta pembangunan dan revitalisasi fasilitas kesehatan. Dengan cara ini, setiap OPD memiliki peran yang jelas dalam mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Selain sebagai dokumen perencanaan, Renstra PD juga menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan OPD, yang kemudian menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan adanya keterkaitan ini, Renstra PD memastikan bahwa setiap OPD memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan tugasnya dan dapat mempertanggungjawabkan capaian kinerjanya secara terukur. Oleh karena itu, RPJMD dan Renstra PD harus memiliki keselarasan agar implementasi pembangunan daerah dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Penyusunan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dokumen Pembangunan daerah yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan Pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan. RPJMD berfungsi sebagai acuan dalam menetapkan Tujuan, Sasaran, Kebijakan , Strategi serta program prioritas yang akan dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.

Selain itu, RPJMD disusun untuk memastikan bahwa proses Pembangunan daerah berjalan secara sistematis, terarah, efektif dan efisien. Dengan adanya dokumen ini, pemerintah daerah memiliki landasan yang kuat dalam mengalokasikan sumber daya, anggaran dan kebijakan sehingga pembangunan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi Masyarakat.

1.4.2 Tujuan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 bertujuan untuk memberikan arah dan landasan yang jelas dalam pelaksanaan pembangunan daerah selama periode lima tahun. Adapun tujuan utama dari penyusunan dokumen ini adalah sebagai berikut:

a. **Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah**
   Merumuskan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati ke dalam tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan daerah yang konkret, terukur, dan terarah.
b. **Menjamin Keselarasan dengan Dokumen Perencanaan Perencanaan Pembangunan**
   Memastikan kebijakan pembangunan daerah selaras dan terpadu dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJPD Kabupaten, RPJMD Provinsi Sumatera Barat, RPJMN, serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dalam rangka mewujudkan kesatuan sistem perencanaan nasional dan daerah.
c. **Menjadi Landasan Penyusunan Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah**
   Menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selama periode lima tahun. RPJMD disusun untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam arah kebijakan pembangunan daerah yang terukur dan sistematis, serta menjadi landasan bagi perangkat daerah dalam merumuskan rencana strategis (Renstra), rencana kerja (Renja), dan dokumen penganggaran daerah, guna menjamin keterpaduan dan konsistensi pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
d. **Mewujudkan Tata Kelola dan Perencanaan yang Partisipatif dan Akuntabel**
   Mendorong keterlibatan aktif masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan guna menghasilkan kebijakan yang responsif, tepat sasaran, dan memiliki legitimasi publik.
e. **Menjamin Efektivitas dan Efisiensi Pembangunan**
   Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah melalui perencanaan yang terukur, berbasis data, serta berorientasi pada hasil dan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.5 Sistematika RPJMD Tahun 2025-2029

Sistematika RPJMD Tahun 2025-2029 memuat:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan RPJMD, diantaranya:

1.1 Latar belakang
Membahas pengertian RPJMD, proses penyusunan, kedudukan RPJMD dalam RPJPD, serta keterkaitannya dengan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum nasional dan daerah yang menjadi landasan yuridis dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029, yang diurutkan secara sistematis untuk menunjukkan keterkaitan perencanaan pembangunan daerah dengan kerangka hukum yang berlaku.

1.3 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Menjelaskan hubungan RPJMD dengan dokumen lain yang relevan beserta uraian penjelasannya, termasuk keterhubungan dengan RPJMN, RPJPD, RPJMD Provinsi, RTRW Nasional, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota, serta KLHS.

1.4 Maksud dan Tujuan
Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJMD bagi daerah yang bersangkutan, termasuk sasaran yang ingin dicapai melalui penyusunan dokumen tersebut.

1.5 Sistematika Penulisan
Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJMD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang dasar-dasar analisis yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi
Bagian ini menjelaskan kondisi umum geografis mengenai posisi dan peran strategis daerah, potensi sumber daya alam, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan, lingkungan hidup yang berkualitas, resiliensi terhadap bencana dan

perubahan iklim, serta kondisi demografi.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Bagian ini menjelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Bagian ini menjelaskan tentang kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum daerah bersangkutan.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Bagian ini menjelaskan tentang kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang kemudian dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan, disertai indikator kinerja dan targetnya, disertai dengan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, dan didukung dengan program pembangunan daerah serta memuat tentang arah kebijakan pengembangan kewilayahan, disertai sasaran pembangunan untuk seluruh perangkat daerah.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat program Perangkat Daerah per urusan yang mendukung dalam pencapaian visi dan misi serta menjadi pedoman dalam penyusunan program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif dan perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan, serta juga Bab ini menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja utama (IKU) daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan sebagai indikator kinerja daerah

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

LAMPIRAN I METADATA INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH

Lampiran ini memuat informasi terstruktur yang menjelaskan secara rinci mengenai setiap indikator yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029 Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Program

LAMPIRAN II MANAJEMEN RISIKO PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Lampiran ini memuat substansi sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan mengendalikan berbagai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2`.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Memahami aspek geografi dan demografi Kabupaten Padang Pariaman sangat penting dalam merencanakan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Aspek Geografi yang mencakup luas wilayah, kondisi iklim, ketinggian, temperatur, curah hujan, dan garis pantai memberikan informasi kritis tentang potensi dan tantangan lingkungan daerah. Informasi ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan sektor pertanian, mengelola sumber daya alam, serta memitigasi risiko bencana alam seperti gempa bumi, banjir dan longsor. Sementara itu, aspek demografi memberikan gambaran tentang jumlah penduduk, distribusi usia, etnis, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Data demografi dapat membantu dalam perencanaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, memastikan bahwa kebutuhan seluruh penduduk terpenuhi. Pemahaman tentang kondisi geografi dan demografi memungkinkan pemerintah daerah merumuskan kebijakan yang tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman secara keseluruhan.

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

a) Kondisi Geografi dan Administrasi

Kabupaten Padang Pariaman adalah sebuah kabupaten yang terletak di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Secara astronomis, Kabupaten Padang Pariaman terletak antara 0°11' – 0°49' Lintang Selatan dan 98°36' – 100°28' Bujur Timur, dengan luas wilayah sekitar 1.343,09 km² dan panjang garis pantai 60,50 km². Luas daratan daerah ini setara dengan 3,2 persen dari luas daratan wilayah Provinsi Sumatera Barat. Ketinggian wilayah Kabupaten Padang Pariaman bervariasi, mulai dari dataran rendah di pesisir pantai hingga daerah perbukitan dan pegunungan di bagian yang lebih dalam. Ketinggian rata-rata wilayah ini berkisar antara 0 hingga 1.000 meter di atas permukaan laut (mdpl). Bagian pesisir berada di ketinggian 0 mdpl, sementara daerah pegunungan bisa mencapai ketinggian yang lebih tinggi, terutama di bagian timur kabupaten.

Kabupaten Padang Pariaman berada di posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Kota Padang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat. Salah satunya adalah keberadaan Bandar Udara Internasional Minangkabau yang terletak di Kecamatan Batang Anai, Nagari Ketaping memberikan dampak yang sangat baik untuk meningkatkan perekonomian karena dapat membuka peluang lapangan kerja baik sektor formal maupun nonformal bagi masyarakat. Selain itu, dengan adanya Bandar Udara Internasional Minangkabau menjadikan Kabupaten Padang Pariaman sebagai gerbang pintu masuk bagi wisatawan lokal maupun wisatawan asing yang akan berkunjung ke kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

Dengan posisi strategis Kabupaten Padang Pariaman, maka Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dapat memanfaatkan potensi tersebut dengan baik. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dapat dikembangkan menjadi kota penyangga bagi Kota Padang. Selain itu, di

Kabupaten Padang Pariaman juga telah berdiri Kawasan Industri Padang Industrial Park (KI PIP) yang merupakan satu-satunya kawasan industri yang berada di wilayah Sumatera Barat. Dengan demikian pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dapat lebih mengoptimalkan keberadaan kawasan ini untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara administrasi, Kabupaten Padang Pariaman memiliki luas sebesar 1.343,09 km² atau sebesar 3,2 persen dari luas daratan wilayah Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

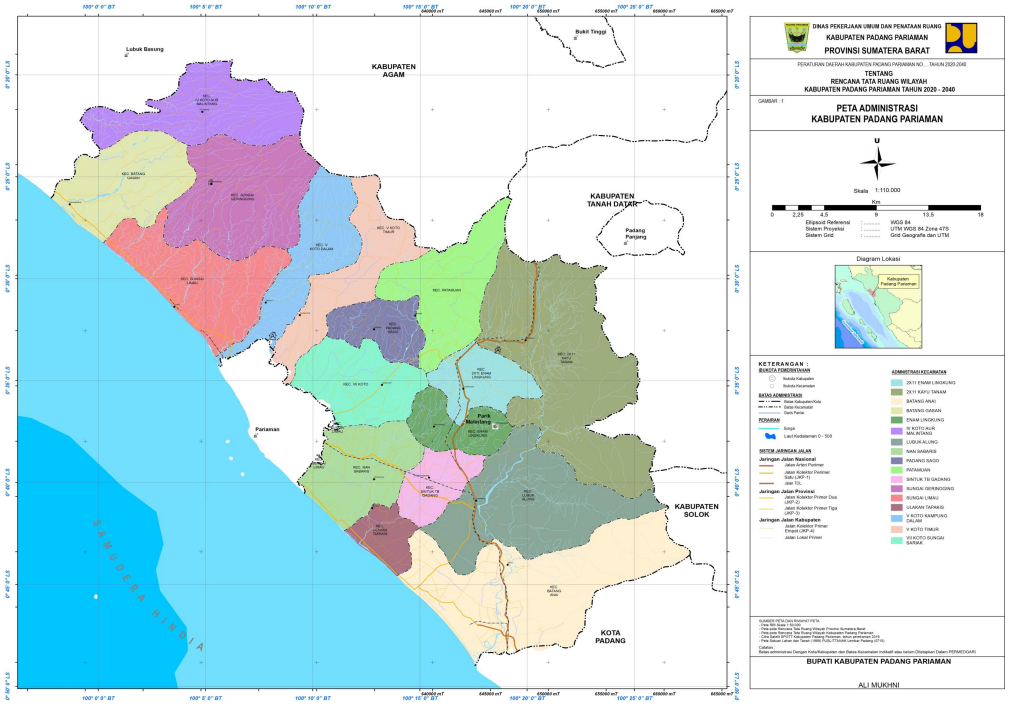
- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Agam;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kota Padang;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kota Pariaman dan Samudra Hindia;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar.

Kabupaten Padang Pariaman memiliki 17 kecamatan yaitu; Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Lubuak Aluang, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kecamatan Ulakan Tapakih, Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan Anam Lingkuang, Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kecamatan VII Koto, Kecamatan VII Koto Patamuan, Kecamatan VII Koto Padang Sago, Kecamatan V Koto, Kecamatan V Koto Timur, Kecamatan Sungai Limau, Kecamatan Batang Gasan, Kecamatan Sungai Garinggiang, dan Kecamatan IV Koto Aua Malintang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun terakhir pencatatan, Kabupaten Padang Pariaman terdiri atas 17 kecamatan, 103 nagari, dan lebih dari 700 korong. Jumlah ini menunjukkan adanya dinamika pemekaran wilayah sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif di tingkat lokal.

Secara administrasi, posisi strategis Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada peta administrasi yang disajikan pada Gambar 2.1 berikut:

Gambar 2. 1
Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Padang Pariaman



Sumber: Perda Nomor 5 Tahun 2025 tentang RTRW Kabupaten Padang Pariaman 2020-2040, 2025

Adapun rincian luas wilayah dan jumlah kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No.	Kecamatan	Luas (ha)	Persen (%)
1	Batang Anai	16.446,01	12,24
2	Lubuak Aluang	12.476,13	9,29
3	Sintuak Toboh Gadang	3.265,36	2,43
4	Ulakan Tapakih	2.298,24	1,71
5	Nan Sabaris	6.617,84	4,93
6	2x11 Anam Lingkuang	4.063,61	3,02
7	Anam Lingkuang	3.428,32	2,55
8	2 x 11 Kayu Tanam	18.855,50	14,03
9	VII Koto	6.414,62	4,77
10	VII Koto Patamuan	7.794,53	5,80
11	VII Koto Padang Sago	3.493,16	2,60
12	V Koto	6.668,53	4,96
13	V Koto Timur	6.678,93	4,97
14	Sungai Limau	9.032,12	6,72
15	Batang Gasan	7.616,97	5,67
16	Sungai Garinggiang	10.772,76	8,02
17	IV Koto Aua Malintang	8.429,43	6,27
Total		**134.352**	**100,00**

Sumber: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, 2024

Berdasarkan data Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat tahun 2024, luas wilayah Kabupaten Padang Pariaman tercatat sebesar 134.352 hektar yang tersebar di 17 kecamatan. Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam merupakan wilayah dengan cakupan terluas, yakni 18.855,5 hektar atau sekitar 14,03% dari total luas kabupaten. Wilayah luas berikutnya adalah Kecamatan Batang Anai seluas 16.446 hektar (12,24%) dan Kecamatan Lubuak Aluang dengan luas 12.476,13 hektar (9,29%). Sementara itu, terdapat beberapa kecamatan dengan cakupan wilayah yang relatif kecil. Kecamatan Ulakan Tapakih dan Sintuak Toboh Gadang merupakan dua kecamatan dengan luas wilayah terkecil, masing-masing seluas 2.298,24 hektar (1,71%) dan 3.265,36 hektar (2,43%).

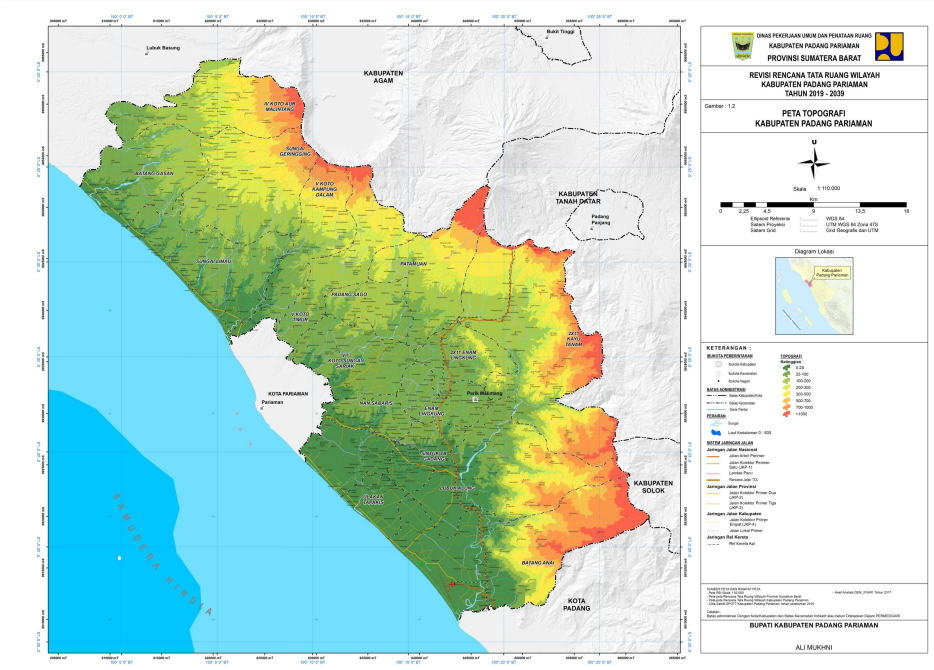
Distribusi luas wilayah antar kecamatan ini menjadi salah satu dasar dalam mempertimbangkan perencanaan tata ruang wilayah, pemerataan pembangunan, serta pengalokasian sumber daya secara lebih proporsional dan berkeadilan.

b) Kondisi Topografi

Kabupaten Padang Pariaman memiliki topografi yang beragam, meliputi wilayah daratan di Pulau Sumatera serta dua pulau kecil, yaitu Pulau Pieh dan Pulau Bando. Sekitar 56,10% wilayahnya merupakan daerah datar hingga landai dengan ketinggian antara 0 sampai 100 meter di atas permukaan laut, yang sebagian besar terletak di bagian barat dan memanjang sepanjang kawasan pesisir pantai.

Sementara itu, sekitar 43,90% wilayah lainnya merupakan daerah bergelombang hingga berbukit curam dan sangat curam, dengan ketinggian mencapai 100 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut, yang tersebar di bagian Timur dan Utara, mengarah ke gugusan Pegunungan Bukit Barisan. Kondisi topografi Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2
Topografi Kabupaten Padang Pariaman



Sumber: RTRW Kabupaten Padang Pariaman 2020-2040

c) Kondisi Klimatologi

Secara keseluruhan, kondisi klimatologi di Kabupaten Padang Pariaman mencerminkan wilayah dengan suhu hangat, kelembapan tinggi, dan potensi radiasi matahari yang cukup, yang penting untuk sektor pertanian dan ekosistem setempat, meskipun tren penurunan kecepatan angin dan peningkatan kelembaban perlu menjadi perhatian dalam perencanaan adaptasi perubahan iklim pada masa mendatang. Selengkapnya, kondisi klimatologi tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Unsur-Unsur Iklim

Tahun	Suhu (°C)			Kelembaban (%)			Kec. Angin (knot)			Penyinaran Matahari (Jam)		
	St. 1	St. 2	Rata-Rata	St.1	St. 2	Rata-Rata	St. 1	St. 2	Rata-Rata	St. 1	St. 2	Rata-Rata
2020	27,30	26,00	26,70	85,00	85,00	85,00	4,0	2,00	3,00	5,00	4,70	4,90
2021	26,98	27,27	27,10	84,55	81,30	82,90	2,07	3,37	2,70	46,82	41,30	44,10
2022	26,75	27,08	26,90	83,67	81,17	82,40	3,41	1,98	2,70	5,06	4,51	4,80
2023	27,03	27,18	27,10	86,69	83,55	85,10	3,43	1,97	2,70	5,48	4,41	4,90
2024	26,27	27,26	26,80	87,27	84,47	85,90	1,03	1,74	1,40	5,33	4,47	4,90

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman, 2021 s.d. 2025.

Keterangan:
St. 1 = Stasiun Meteorologi Minangkabau
St. 2 = Stasiun Klimatologi Padang Pariaman

Secara umum, kondisi iklim di Kabupaten Padang Pariaman tergolong stabil dalam lima tahun terakhir. Suhu udara rata-rata berkisar antara 26,7°C hingga 27,1°C, tanpa fluktuasi ekstrem yang mengganggu aktivitas masyarakat. Kelembaban udara menunjukkan tren peningkatan, dari 82,4% pada 2022 menjadi 85,9% pada 2024, yang berpengaruh terhadap curah hujan dan kesehatan lingkungan. Kecepatan angin mengalami penurunan, dari 3,0 knot pada 2020 menjadi 1,4 knot pada 2024, mencerminkan atmosfer yang lebih tenang, tetapi berpotensi menurunkan kualitas sirkulasi udara. Sementara itu, penyinaran matahari relatif stabil di kisaran 4,8–4,9 jam per hari, yang mendukung sektor pertanian dan potensi energi terbarukan.

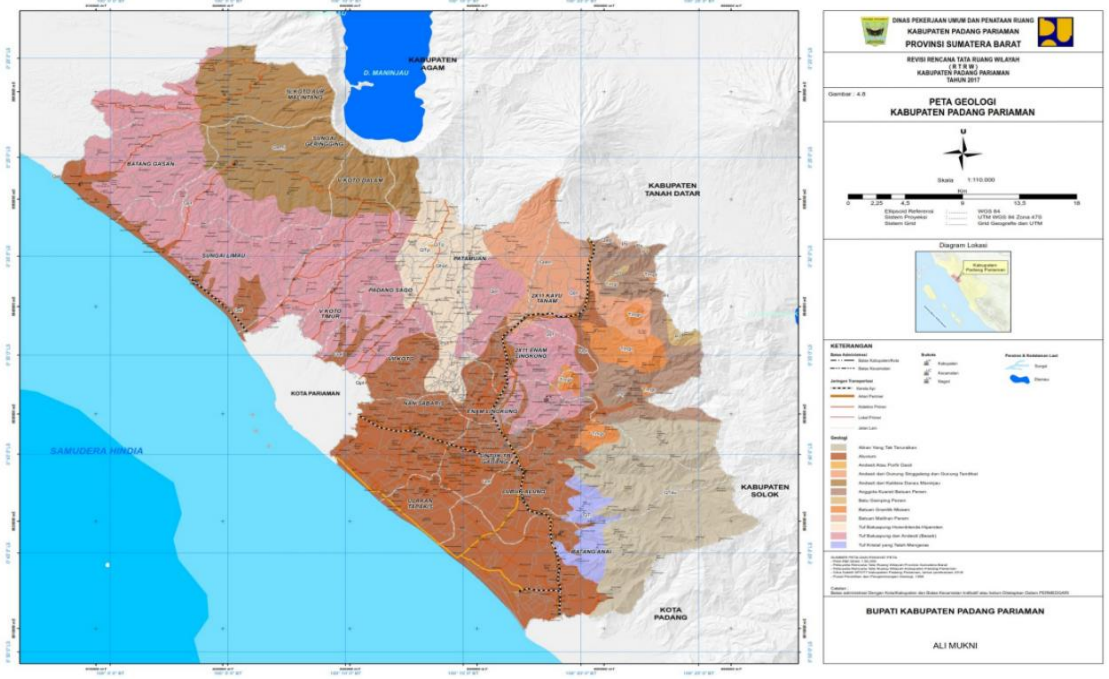
d) Kondisi Geologi

Kabupaten Padang Pariaman memiliki struktur geologi yang kompleks dan kaya akan formasi batuan vulkanik serta endapan permukaan. Berdasarkan peta geologi dan studi terdahulu (Suryana et al., 1990), wilayah ini didominasi oleh batuan berumur Kuarter, yang terdiri dari endapan aluvium, lanau, pasir, kerikil, serta material vulkanik seperti lava, lahar, tuf, dan aglomerat, terutama di wilayah timur dan utara yang dipengaruhi oleh aktivitas vulkanik Gunung Tandikat, Gunung Singgalang, dan Kaldera Maninjau.

Bagian tengah wilayah didominasi oleh lanau pasiran, sedangkan di bagian utara hingga timur ditemukan jalur tuf batu apung yang memanjang, serta sebaran batuan andesit dan batu gamping. Kondisi ini mencerminkan pengaruh kuat aktivitas gunung api masa lalu terhadap pembentukan tanah dan batuan di wilayah ini. Keberagaman struktur

geologi ini menjadi salah satu faktor penting dalam perencanaan pemanfaatan ruang, pengelolaan sumber daya alam, dan mitigasi bencana geologi di Kabupaten Padang Pariaman. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3
Kondisi Geologi Kabupaten Padang Pariaman



Sumber: RTRW Kabupaten Padang Pariaman 2020-2040

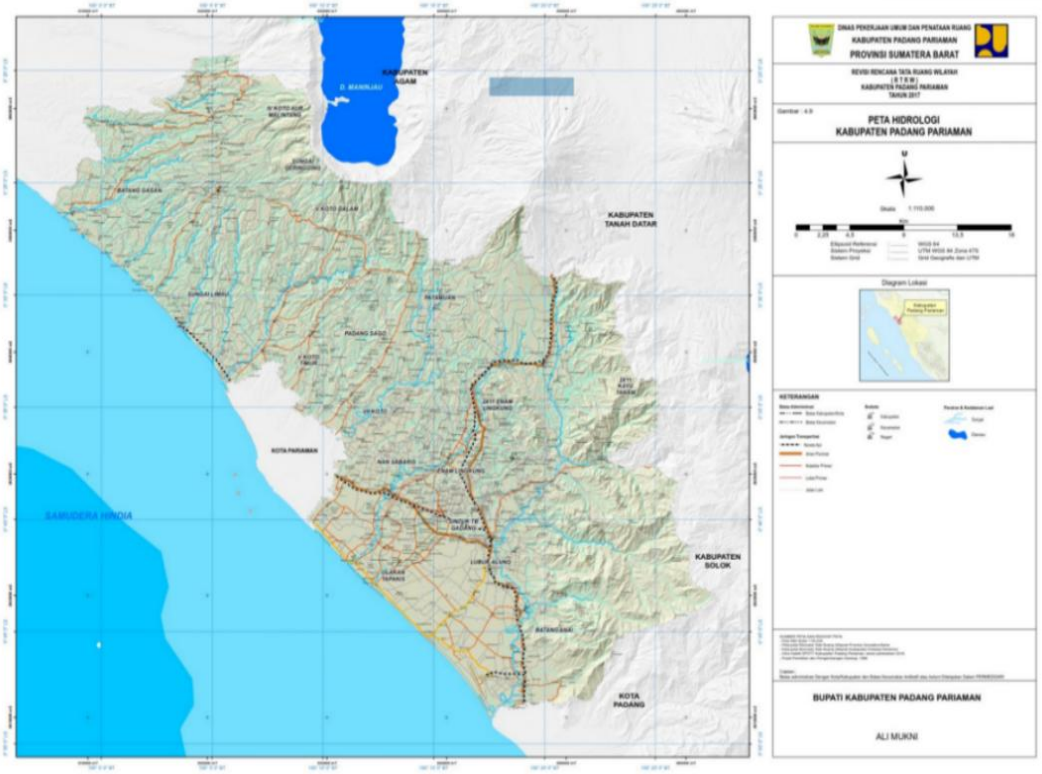
e) Kondisi Hidrologi

Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi sumber daya air yang cukup besar, baik dari air tanah dangkal maupun aliran sungai. Terdapat sedikitnya 11 sungai utama yang mengalir di wilayah ini, diantaranya Batang Anai, Batang Ulakan, Batang Gasan, Batang Naras, Batang Tapakih, Batang Mangau, Batang Piaman, dan Batang Sungai Limau, yang berperan penting sebagai sumber air baku serta mendukung kegiatan pertanian dan kebutuhan domestik masyarakat. Profil sungai di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada peta hidrologi yang disajikan pada Gambar 2.4.

Berdasarkan data hidrologi, debit sungai menunjukkan fluktuasi musiman yang signifikan. Sungai Batang Gasan memiliki debit tertinggi yang tercatat hingga 60 m^3/detik, dengan debit minimum mencapai 9,2 m^3/detik. Sebaliknya, fluktuasi debit yang lebih stabil tercatat pada Sungai Batang Ulakan, dengan kisaran debit antara 36 m^3/detik sampai 60 m^3/detik.

Pola aliran sungai di wilayah ini umumnya dendritik, sesuai dengan karakteristik morfologi vulkanik dan aluvial. Lembah-lembah sungai pada bagian hulu cenderung berbentuk huruf “V” (stadium muda), sedangkan bagian hilirnya telah berkembang menjadi bentuk “U” (stadium dewasa), menunjukkan dominasi proses erosi lateral. Selain itu, sebagian besar sungai bersifat intermiten, dengan debit besar pada musim hujan dan mengalami penurunan drastis atau bahkan mengering pada musim kemarau.

Gambar 2.4
Peta Hidrologi Kabupaten Padang Pariaman



Sumber: RTRW Kabupaten Padang Pariaman 2020-2040

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

a) Penggunaan Lahan

Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, terutama dalam pemanfaatan lahan. Berdasarkan data Neraca Penatagunaan Tanah Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN), struktur penggunaan lahan di Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan dominasi sektor-sektor berbasis sumber daya alam dan pertanian.

Dari total luas wilayah sebesar 134.352,05 hektar, penggunaan lahan terbesar adalah untuk perkebunan rakyat, yaitu seluas 46.305,12 hektar atau 34,47% dari total wilayah. Pemanfaatan lahan berikutnya didominasi oleh hutan lebat seluas 38.572,11 hektar (28,71%), serta sawah irigasi yang mencapai 13.796,53 hektar (10,27%). Wilayah permukiman (kampung) menempati sekitar 9,41% dari luas wilayah.

Jenis penggunaan lahan lainnya mencakup ladang/tegalan, sawah nonirigasi, kebun campuran, sungai, semak, rawa, serta pemanfaatan untuk sektor non-pertanian seperti pertambangan, industri, perumahan, tambak, dan fasilitas publik lainnya, dengan luasan dan proporsi yang lebih kecil. Jenis penggunaan lahan terkecil adalah hutan belukar seluas 6,27 hektar atau kurang dari 0,01% dari total luas wilayah.

Kondisi ini mencerminkan bahwa pemanfaatan ruang di Kabupaten Padang Pariaman masih sangat bergantung pada sektor agraris, terutama perkebunan dan kehutanan, serta permukiman yang tersebar. Oleh karena

itu, perencanaan pembangunan ke depan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan prinsip keberlanjutan serta daya dukung lingkungan guna mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah yang inklusif dan berkelanjutan. Penggunaan Lahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dan Penggunaan Lahan Per Kecamatan dapat dilihat Tabel 2.3. dan Tabel 2.4.

Tabel 2.3
Penggunaan Lahan Tahun 2024

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	% Wilayah
1	Perkebunan Rakyat	46.305,12	34,47
2	Hutan Lebat	38.572,11	28,71
3	Sawah Irigasi	13.796,53	10,27
4	Kampung	12.639,28	9,41
5	Tegalan/ Ladang	8.720,71	6,49
6	Sawah Non Irigasi	6.238,66	4,64
7	Kebun Campuran	3.240,33	2,41
8	Sungai	1.355,72	1,01
9	Semak	819,82	0,61
10	Tanah Penggunaan Lain	659,14	0,49
11	Rawa	530,58	0,39
12	Pertambangan	255,00	0,19
13	Bandar Udara	224,12	0,17
14	Industri Non Pertanian	205,47	0,15
15	Perumahan	162,56	0,12
16	Tambak	160,16	0,12
17	Industri Pertanian	98,18	0,07
18	Hutan Sejenis	79,09	0,06
19	Kebun Buah-buahan	76,38	0,06
20	Kolam	55,18	0,04
21	Hutan Rawa	41,30	0,03
22	Sarana Olah Raga	34,39	0,03
23	Tanah Tandus	26,34	0,02
24	Tanah Rusak	20,23	0,02
25	Padang Rumput	19,28	0,01
26	Kuburan/ Makam	10,09	0,01
27	Hutan Belukar	6,27	0,00
	Total	**134.352,05**	**100,00**

Sumber : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional , 2024

Tabel 2.4
Penggunaan Lahan Per Kecamatan Tahun 2024

No	Penggunaan lahan	Kecamatan [Luas Wilayah (Ha)]							
		2X11 Anam Lingkuang	2X11 Kayu Tanam	Batang Anai	Batang Gasan	Anam Lingkuang	IV Koto Aua Malintang	V Koto	Lubuak Aluang
1	Perkebunan Rakyat	656,48	1.833,71	1.254,75	5.573,04	1.268,11	5.118,54	3.605,10	664,03
2	Hutan Lebat	-	13.688,93	8.468,50	-		1.376,66	1.302,50	6.618,40
3	Sawah Irigasi	513,40	913,72	1.069,85	515,25	730,07	663,80	339,92	1.886,37
4	Kampung	511,86	527,98	-	356,26	641,87	220,50	367,90	1.333,94
5	Tegalan/ Ladang	255,20	782,74	1.267,30	460,82	290,59	407,48	226,76	964,07
6	Sawah Non Irigasi	170,15	417,67	965,31	331,57	113,25	421,70	446,38	495,53
7	Kebun Campuran	230,04	374,30	457,58	41,28	61,55	165,82	316,34	73,75
8	Sungai	26,30	136,87	166,23	189,95	17,10	43,42	34,49	180,73
9	Semak	3,68	42,48	511,36	6,92	42,06	2,02	2,69	86,20
10	Tanah Penggunaan Lain	53,80	65,37	127,35	60,14	78,84	3,48	9,26	70,01
11	Rawa	-	--	174,18	38,25	-	-	2,62	7,36
12	Pertambangan	-	-	5,13	-	137,69	3,59	5,26	38,63
13	Bandar Udara	-	-	224,12	-	-	-	-	-
14	Industri Non Pertanian	1,67	6,86	136,09	-	0,74	-	-	0,59
15	Perumahan	-	-	117,02	-	4,10	-	-	8,64
16	Tambak	-	-	108,10	1,45	-	0,30	-	-
17	Industri Pertanian	4,35	11,91	10,19	-	1,72	-	1,90	16,81
18	Hutan Sejenis	-	-	14,79	34,09	-	-	-	-
19	Kebun Buah-buahan	6,68	40,49	8,52	-	0,91	0,95	0,64	2,87
20	Kolam	0,77	0,51	11,69	1,53	1,70	-	5,41	15,14
21	Hutan Rawa	-	-	22,10	-	-	-	-	-
22	Sarana Olah Raga	2,01	1,64	2,39	-	2,35	1,16	1,37	11,41
23	Tanah Tandus	-	-	7,20	3,67	9,18	-	-	0,63
24	Tanah Rusak	11,50	-	-	-	-	-	-	-
25	Padang Rumput	-	-	-	2,47	-	-	-	-
26	Kuburan/ Makam	-	-	4,01	-	1,08	-	-	-
27	Hutan Belukar	6,27	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, 2024

Tabel 2.4
Penggunaan Lahan Per Kecamatan Tahun 2024 (Lanjutan)

No	Penggunaan lahan	Kecamatan [Luas Wilayah (Ha)]								
		Nan Sabaris	VII Koto Padang Sago	VII Koto Patamuan	Sintuak Toboh Gadang	Sungai Garinggiang	Sungai Limau	Ulakan Tapakih	V Koto Timur	VII Koto
1	Perkebunan Rakyat	1,467,18	2,435,59	2,269,12	421,10	6.572,89	5.283,27	417,11	4.665,97	2.779,11
2	Hutan Lebat	-		3,297,91		1.432,25			752,13	
3	Sawah Irigasi	2,129,59	196,95	700,00	1,091,89	472,77	857,96	555,35	176,29	983,34
4	Kampung	1,873,96	312,71	450,04	1,058,91	834,86	956,47	306,15	358,71	1.230,28
5	Tegalan/ Ladang	513,21	332,92	587,24	264,75	561,52	676,95	429,65	218,03	481,48
6	Sawah Non Irigasi	261,09	142,94	286,92	53,90	639,43	501,37	122,05	437,63	431,76
7	Kebun Campuran	170,46	4,18	75,86	113,86	200,94	394,12	107,87	62,18	390,20
8	Sungai	81,34	62,73	29,64	18,32	50,60	196,21	38,26	7,89	75,64
9	Semak	14,42	0,10	6,10	43,58	4,40	26,66	15,59	-	11,56
10	Tanah Penggunaan Lain	23,97	3,08	41,36	0,36	2,37	69,36	44,38	-	5,64
11	Rawa	14,69	-	-	36,40	-	29,44	227,64	0,10	-
12	Pertambangan	-	-	19,91	33,01	-	2,33	-	-	-
13	Bandar Udara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Industri Non Pertanian	-	-	-	59,51	-	-	-	-	-
15	Perumahan	6,02	-	0,77	23,83	-	-	-	-	1,32
16	Tambak	28,96	-	-	-	-	8,27	12,04	-	0,02
17	Industri Pertanian	12,96	0,28	25,02	5,74	-	0,39	6,14	-	0,76
18	Hutan Sejenis	-	-	-	-	-	24,64	5,57	-	-
19	Kebun Buah-buahan	-	1,67	2,96	8,23	-	-	2,47	-	-
20	Kolam	1,99	-	0,78	9,82	-	1,63	3,87	-	0,34
21	Hutan Rawa	7,76	-	-	8,51	-	-	0,77	-	2,16
22	Sarana Olah Raga	7,00	-	0,89	0,49	-	0,78	1,89	-	1,02
23	Tanah Tandus	1,24	-	-	4,42	-	-	-	-	-
24	Tanah Rusak	-	-	-	8,73	-	-	-	-	-
25	Padang Rumput	-	-	-	-	-	-	1,45	-	-
26	Kuburan/ Makam	2,00	-	-	-	0,72	2,28	-	-	-
27	Hutan Belukar	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, 2024

Berdasarkan Tabel 2.4 di atas, penggunaan lahan di Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah masih didominasi oleh aktivitas perkebunan rakyat dan pertanian lahan basah, terutama sawah irigasi. Kecamatan dengan penggunaan lahan terbesar untuk perkebunan rakyat adalah Sungai Garinggiang (6.572,89 ha), disusul Batang Gasan (5.573,04 ha), Sungai Limau (5.283,27 ha), dan IV Koto Aua Malintang (5.118,54 ha). Ini menunjukkan bahwa komoditas perkebunan menjadi basis ekonomi utama di banyak wilayah. Sementara itu, untuk sawah irigasi, luas lahan terbesar ditemukan di Nan Sabaris (2.129,59 ha), Lubuak Aluang (1.886,37 ha), dan Batang Anai (1.069,85 ha), menandakan tingginya intensitas budidaya pertanian berbasis irigasi di daerah-daerah ini.

Selain itu, terdapat beberapa kecamatan yang masih memiliki tutupan hutan lebat cukup luas, seperti 2X11 Kayu Tanam (13.688,93 ha), Batang Anai (8.468,50 ha), dan Sungai Garinggiang (1.432,25 ha), yang berfungsi sebagai kawasan lindung dan ekosistem penyangga. Sementara itu, jenis penggunaan lahan yang paling kecil atau terbatas terdapat pada kategori tanah tandus, kuburan/makam, sarana olahraga, padang rumput, dan industri nonpertanian. Misalnya, tanah tandus hanya muncul secara minor di beberapa kecamatan seperti Nan Sabaris, Sintuak Toboh Gadang, dan Anam Lingkuang, masing-masing di bawah 10 hektar. Kategori industri nonpertanian juga belum berkembang luas, hanya terdapat signifikan di Sintuak Toboh Gadang (59,51 ha) dan Batang Anai (136,09 ha).

Secara keseluruhan, penggunaan lahan di Kabupaten Padang Pariaman mencerminkan karakteristik wilayah agraris yang kuat, dengan ketergantungan tinggi terhadap sumber daya lahan untuk pertanian dan perkebunan. Kawasan hutan masih berperan penting di beberapa kecamatan, namun pemanfaatan lahan nonpertanian seperti industri, perumahan, dan fasilitas publik masih relatif terbatas. Hal ini membuka peluang pengembangan kawasan yang lebih seimbang antara produktivitas ekonomi, kelestarian lingkungan, dan peningkatan infrastruktur pelayanan publik pada masa mendatang.

b) Potensi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, produksi tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Padang Pariaman mengalami dinamika yang beragam. Secara umum, terdapat adanya tren penurunan pada beberapa komoditas utama, meskipun sebagian lainnya menunjukkan peningkatan di tahun-tahun tertentu sebelum kembali menurun. Fluktuasi ini mencerminkan adanya tantangan dalam menjaga stabilitas produksi sektor pertanian, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, ketersediaan sarana produksi, dan pola tanam masyarakat. Produksi tanaman pangan dan hortikultura Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020-2024

No.	Komoditi	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Padi (Ton)	283.127,72	252.723,26	227.996,24	221.662,66	185.907,80
2.	Jagung (Ton)	33.945,44	41.784,69	43.670,84	49.087,28	37.002,77
3.	Ubi Kayu (Ton)	7.506,79	8.142,60	5.614,94	6.144,83	5.163,35
4.	Kacang Kedelai (Ton)	-	0,75	-	-	-
5.	Kacang Hijau (Ton)	-	-	-	-	-
6.	Kacang Tanah (Ton)	59,68	75,71	124,35	49,29	59,68

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman, 2025

Komoditas padi sebagai tanaman pangan utama mengalami penurunan produksi yang signifikan dari 283.127,72 ton pada tahun 2020 menjadi 185.907,80 ton pada tahun 2024, menunjukkan penurunan secara bertahap setiap tahunnya. Sementara itu, produksi jagung mengalami peningkatan hingga mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebesar 49.087,28 ton, namun kembali menurun menjadi 37.002,77 ton pada tahun 2024. Ubi kayu menunjukkan tren produksi yang fluktuatif, dengan angka tertinggi pada tahun 2021 sebesar 8.142,60 ton, lalu menurun menjadi 5.163,35 ton pada akhir periode. Untuk komoditas kacang tanah, terjadi peningkatan produksi hingga 124,35 ton pada tahun 2022, namun menurun tajam pada tahun 2023 dan sedikit meningkat kembali pada tahun 2024. Sementara itu, produksi kacang kedelai dan kacang hijau tercatat sangat rendah dan belum menunjukkan perkembangan berarti selama lima tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa belum adanya pengembangan yang signifikan terhadap komoditas legum (kacang-kacangan) di wilayah ini.

c) Produksi Perkebunan

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, produksi komoditas perkebunan di Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan tren yang beragam antarkomoditas. Sebagian besar komoditas mengalami penurunan luas areal dan produksi secara bertahap dari tahun ke tahun. Meskipun beberapa komoditas sempat mencatatkan peningkatan produksi pada tahun-tahun tertentu, namun secara umum tren penurunan masih menjadi karakteristik utama yang mencerminkan tantangan dalam pengembangan sektor perkebunan, seperti alih fungsi lahan, rendahnya produktivitas, serta terbatasnya peremajaan tanaman. Selengkapnya, Produksi Komoditas Perkebunan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2025 dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Produksi Komoditi Perkebunan di Padang Pariaman
Tahun 2020-2024

No.	Jenis Tanaman	2020		2021		2022		2023		2024	
		Luas Area (ha)	Produksi (Ton)	Luas Area (ha)	Produksi (Ton)	Luas Area (ha)	Produksi (Ton)	Luas Area (ha)	Produksi (Ton)	Luas Area (ha)	Produksi (Ton)
1.	Kelapa Sawit	1.309,00	2.782,10	1.262,00	2.675,37	1.231,00	2.625,70	1.203,00	2.583,28	1.190,00	2.573,73
2.	Kelapa	40.048,00	37.666,19	39.732,00	38.224,86	39.676,00	38.794,22	39.514,00	39.039,50	39.594,00	39.020,91
3.	Karet	3.013,00	3.290,38	3.000,00	3.630,00	2.995,00	3.585,58	2.974,00	3.562,73	2.923,00	3.507,32
4.	Kopi	271,00	288,68	271,00	291,46	285,00	290,22	297,00	289,82	294,00	289,89
5.	Kakao	11.690,00	4.851,89	11.374,00	4.662,70	11.158,00	4.360,58	9.584,00	3.915,96	8.358,00	3.548,46

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman, 2025

Komoditas kelapa sawit menunjukkan penurunan konsisten baik dari sisi luas areal maupun volume produksi, dari 2.782,10 ton (2020) menjadi 2.573,73 ton (2024). Tanaman kelapa sebagai komoditas utama dengan luas lahan terbesar, cenderung stabil dengan sedikit fluktuasi dan peningkatan produksi dari 37.666,19 ton menjadi 39.020,91 ton dalam periode lima tahun. Produksi karet sempat meningkat pada 2021, namun kembali mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya, seiring dengan penyusutan luasan lahannya. Tanaman kopi relatif stabil baik dari sisi luas areal maupun produksinya, sementara komoditas kakao mengalami penurunan yang signifikan, dari produksi sebesar 4.851,89 ton (2020) menjadi hanya 3.548,46 ton pada tahun 2024, sejalan dengan penyusutan luas areal dari 11.690 ha menjadi 8.358 ha. Kondisi ini mengindikasikan perlunya upaya revitalisasi dan peningkatan produktivitas pada subsektor perkebunan, khususnya terhadap komoditas strategis daerah.

d) Produksi Peternakan

Tren produksi peternakan di Kabupaten Padang Pariaman selama periode tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang bervariasi antarjenis ternak. Pada ternak besar dan kecil, sebagian besar populasi mengalami fluktuasi namun cenderung stabil, sementara pada ternak unggas terlihat dinamika yang signifikan, terutama pada ayam pedaging yang mengalami penurunan tajam setelah tahun 2022. Secara umum, tren ini mencerminkan tantangan dalam stabilisasi populasi ternak, baik dari aspek pemeliharaan, pasar, maupun ketahanan produksi. Produksi Peternakan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7
Produksi Peternakan Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020-2024

No.	Populasi Ternak	2020	2021	2022	2023	2024
	Jenis Ternak					
1.	Sapi Perah	32	32	16	12	14
2.	Sapi Potong	43,629	44,575	44,499	42,689	43,512
3.	Kerbau	14,953	11,184	11,457	11,277	11,522
4.	Kuda	67	52	67	15	47
5.	Kambing	35,005	36,608	33,586	31,962	32,891
6.	Domba	253	285	224	255	256
7.	Rusa	31	33	24	23	26
	Jenis Unggas					
1.	Ayam Kampung	843,52	832,167	753,791	712,592	679,745
2.	Ayam Petelur	2.678.403	3.682.411	3.899.349	3.665.767	3.604.870
3.	Ayam Pedaging	6.600.941	11.150.979	9.832.735	3.523.500	4.926.364
4.	Itik	144,647	137,200	111,691	101,027	108,071

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman, 2025

Sapi potong tetap menjadi komoditas utama dengan populasi terbanyak dan relatif stabil, yaitu berkisar antara 42 ribu hingga 44 ribu ekor. Sebaliknya, populasi sapi perah menurun drastis dari 32 ekor pada

tahun 2020 menjadi hanya 14 ekor pada 2024. Populasi kerbau dan kambing juga menunjukkan tren penurunan meskipun masih berada dalam kisaran puluhan ribu ekor. Untuk ternak unggas, ayam petelur menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil dan tinggi, dengan populasi mencapai lebih dari 3,6 juta ekor pada 2024. Sebaliknya, ayam pedaging mengalami lonjakan populasi hingga hampir 11 juta ekor pada 2021, namun menurun drastis menjadi sekitar 4,9 juta ekor pada tahun 2024. Populasi ayam kampung dan itik pun mengalami penurunan secara bertahap. Situasi ini menggambarkan perlunya penguatan sistem budidaya, manajemen produksi, serta dukungan pasar dan distribusi dalam mendukung keberlanjutan sektor peternakan daerah.

e) Produksi Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan data dari Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman, produksi perikanan di daerah ini menunjukkan tren yang meningkat selama periode 2020-2024. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa sektor perikanan, baik tangkap maupun budidaya, terus mengalami pertumbuhan dan berkontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan dan perekonomian daerah. Perkembangan produksi perikanan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8
Perkembangan Produksi Perikanan
di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024

No.	Produksi	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Produksi perikanan tangkap	17.839,20	17.870,00	18.768,70	18.655,60	18.954,10
2.	Produksi perikanan budidaya (ton)	52.511,60	53.112,74	55.561,82	56.720,30	57.914,62

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman, 2025

Produksi perikanan tangkap mengalami pertumbuhan relatif stabil, dari 17.839,20 ton pada tahun 2020 menjadi 18.954,10 ton pada tahun 2024. Meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 (18.655,60 ton), produksi kembali meningkat pada tahun berikutnya. Sementara itu, produksi perikanan budidaya menunjukkan kenaikan yang konsisten setiap tahun. Pada tahun 2020, produksi tercatat sebesar 52.511,60 ton, dan terus meningkat hingga mencapai 57.914,62 ton pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perkembangan positif dalam sektor budidaya perikanan, yang didukung oleh komoditas unggulan seperti udang vaname, ikan nila, ikan lele, dan ikan patin.

f) Potensi Pariwisata

Pariwisata Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi alam, budaya, dan religi yang beragam serta bernilai jual tinggi. Berbagai daya tarik wisata tersebar di seluruh kecamatan, antara lain pantai, air terjun, perbukitan, cagar budaya, hingga wisata religi seperti Makam Syekh Burhanuddin yang telah dikenal luas di Sumatera Barat. Keanekaragaman daya tarik ini didukung pula oleh kekayaan adat, seni, dan tradisi lokal yang berpotensi memperkuat identitas pariwisata daerah.

Berdasarkan hasil kajian Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022-2025,

pengembangan pariwisata masih menghadapi sejumlah permasalahan strategis. Aksesibilitas menuju destinasi belum merata, sarana dan prasarana pendukung seperti MCK, air bersih, serta fasilitas penunjang wisata masih terbatas, dan promosi pariwisata belum dilakukan secara optimal. Dari sisi kelembagaan, kemampuan manajerial pengelolaan destinasi masih lemah, koordinasi antarpemangku kepentingan belum maksimal, serta riset pasar pariwisata masih kurang. Kondisi pandemi *COVID*-19 juga sempat menurunkan jumlah kunjungan wisatawan, meskipun sektor ini mulai bangkit seiring pemulihan ekonomi.

Pada tahun 2024, sektor pariwisata Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan pertumbuhan yang positif, tercermin dari tingginya jumlah kunjungan wisatawan. Tercatat sebanyak 773.695 wisatawan domestik berkunjung ke daerah ini, disertai dengan 149 wisatawan mancanegara. Angka ini menunjukkan potensi besar sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah, meskipun kunjungan masih didominasi oleh wisatawan nusantara.

Untuk mendukung kebutuhan wisatawan, Kabupaten Padang Pariaman memiliki 21 unit akomodasi penginapan, terdiri dari 3 hotel dan 18 wisma. Keberadaan fasilitas ini perlu terus ditingkatkan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas layanan, guna meningkatkan kenyamanan dan lama tinggal wisatawan.

Tabel.2.9
Wisata dari Sisi Daya Tarik di Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020-2024

Tahun	Wisata Alam	Wisata Budaya	Wisata Sejarah	Wisata Pantai	Wisata Minat Khusus
2020	33	3	38	10	9
2021	35	3	38	10	9
2022	63	0	41	0	33
2023	60	0	42	5	33
2024	60	0	42	5	33

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman, 2025

Tabel 2.9. menunjukkan data objek wisata dari sisi daya tarik di Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki potensi besar untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Hal ini ditandai dengan keberadaan 140 objek wisata yang tersebar dalam berbagai kategori, meliputi 60 objek wisata alam, 42 wisata sejarah, 5 wisata pantai, dan 33 wisata minat khusus. Data tahun 2020–2024 menunjukkan peningkatan signifikan pada wisata alam dan minat khusus, sementara wisata budaya dan pantai mengalami fluktuasi, bahkan sempat tidak tercatat pada tahun 2022. Kondisi ini menandakan pentingnya penguatan pencatatan, promosi, dan pengelolaan destinasi, serta pengembangan wisata budaya sebagai peluang strategis untuk meningkatkan daya saing pariwisata daerah secara menyeluruh.

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

a) Konsep Dasar dan Pendekatan Penentuan DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, serta menjaga keseimbangan di antara keduanya. Adapun daya tampung lingkungan hidup merupakan kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui forum koordinasi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (PPPE) seluruh Indonesia, menyepakati penggunaan konsep jasa ekosistem (*ecosystem services*) sebagai pendekatan dalam pengukuran daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pendekatan ini dinilai lebih sederhana dalam proses penyusunan serta memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi untuk berbagai kebutuhan perencanaan pembangunan pada seluruh tingkatan wilayah.

Konsep jasa ekosistem pertama kali diperkenalkan oleh *Millennium Ecosystem Assessment* pada tahun 2005. Jasa ekosistem didefinisikan sebagai manfaat yang diterima manusia dari berbagai sumber daya dan proses alami yang disediakan secara bersama oleh suatu ekosistem. Jasa ekosistem dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu:

1. jasa penyediaan (*provisioning*),
2. jasa pengaturan (*regulating*),
3. jasa budaya (*cultural*), dan
4. jasa pendukung (*supporting*).

Setiap kategori terdiri atas beberapa subkategori sehingga secara keseluruhan terdapat 20 klasifikasi jasa ekosistem (De Groot, 2002), sebagaimana disajikan pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10
Klasifikasi Jasa Ekosistim

Klasifikasi Jasa Ekosistem		Definisi	Ruang Lingkup Pengertian
Fungsi Penyediaan (Provisioning)			
1	Pangan	Hasil laut, pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian & perkebunan untuk pangan, hasil peternakan	Ekosistem memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Jenis-jenis pangan di Indonesia sangat bervariasi diantaranya seperti beras, jagung, ketela, gandum, sagu, segala macam buah, ikan, daging, telur dan sebagainya. Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan.
2	Air bersih	Penyediaan air dari tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), penyediaan air dari sumber permukaan	Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air bersih yaitu ketersediaan air bersih baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Penyediaan jasa air bersih sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (*akuifer*) serta faktor yang dapat mempengaruhi sistem

Klasifikasi Jasa Ekosistem		Definisi	Ruang Lingkup Pengertian
			penyimpanan air tanah seperti penutup lahan.
3	Serat *(fiber)*	Hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian & perkebunan untuk material	Serat (*fiber*) adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Ekosistem menyediakan serat alami yang meliputi serat yang diproduksi oleh tumbuh-tumbuhan, hewan, dan proses geologis. Serat jenis ini bersifat dapat mengalami pelapukan. Serat alami dapat digolongkan ke dalam (1) serat tumbuhan /serat pangan, (2) serat kayu, (3) serat hewan, dan (3) serat mineral seperti logam dan carbon. Serat alami hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian & perkebunan menjadi material dasar dalam proses produksi dan industri serta *bio-chemical.*
4	Bahan bakar (*fuel)*	Penyediaan kayu bakar dan bahan bakar dari fosil	Ekosistem memberikan manfaat penyediaan energi, baik yang berasal dari fosil seperti minyak bumi dan batubara serta sumber energi alternatif dari alam seperti tenaga air mikro hidro, tenaga matahari dan tenaga angin serta panas bumi. Selain itu ekosistem juga menyediakan energi yang berasal dari bio massa minyak tanaman seperti minyak sawit, minyak buah biji jarak. Hutan dan berbagai macam tanaman kayu-kayuan juga memberikan sumbangan terhadap sumber energi. Sumber energi fosil dan tenaga alam dapat diduga berdasarkan struktur geologi dan bentuk lahannya, sedangkan untuk sumber energi biomassa dan tanaman kayu-kayuan dapat dilihat dari pola penutup lahan ataupun penutup lahan.
5	Sumberdaya genetik	Pembibitan hewan, tanaman dan bioteknologi (bahan obat dan biokimia)	Ekosistem menyediakan beragam sumber daya genetik yang melimpah dan bernilai ekonomis dan bermanfaat bagi kesejahteraan manusia. Sumberdaya genetik berhubungan erat dengan keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna, dimana keanekaragaman hayati yang tinggi akan diikuti dengan sumber daya genetik yang melimpah. Ketersediaan dan distribusi sumberdaya genetik ditentukan oleh tipe ekosistem yaitu ekoregion bentang alam dan penutup lahan khususnya areal bervegetasi. Potensi penyediaan sumberdaya genetik dimanfaatkan sebagai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin beragam dan kompleks
Fungsi Pengaturan (Regulating)			
1	Pengaturan iklim	Pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, pengendalian gas rumah kaca & karbon	Secara alamiah ekosistem memiliki fungsi jasa pengaturan iklim, yang meliputi pengaturan suhu, kelembapan dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca & penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan *emisi carbondioksida* dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkataan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas.
2	Pengaturan tata aliran air & banjir	Siklus hidrologi, serta infrastruktur alam untuk penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan air	Siklus hidrologi *(hydrology cycle),* adalah pergerakan air dalam hidrosfer yang meliputi proses penguapan *(evaporasi),* pendinginan massa udara *(kondensasi),* hujan *(presipitasi),* dan pengaliran *(flow).* Siklus hidrologi yang terjadi di atmosfer meliputi terbentuknya awan hujan, terbentuknya hujan, dan evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi. Sedangkan siklus hidrologi yang terjadi di biosfer dan litosfer yaitu ekosistem air yang meliputi aliran permukaan,

Klasifikasi Jasa Ekosistem		Definisi	Ruang Lingkup Pengertian
			ekosistem air tawar, dan ekosistem air laut. Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan seperti penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu kawasan.
3	Pencegahan dan perlindungan dari bencana	Infrastruktur alam pencegahan dan perlindungan dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami	Ekosistem, di dalamnya juga mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya bencana alam. Beberapa fungsi pencegahan bencana alam dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami berhubungan erat dengan keberadaan liputan lahan dan bentuk lahan. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari bencana erosi, longsor, abrasi, dan tsunami. Selain itu bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh bencana erosi dan longsor umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan denudasional dengan morfologi perbukitan.
4	Pemurnian air	Kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar	Ekosistem memiliki kemampuan untuk "membersihkan" pencemar melalui proses-proses kimia-fisik-biologi yang berlangsung secara alami dalam badan air. Kemampuan pemurnian air secara alami (*self purification*) memerlukan waktu dan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya beban pencemar dan teknik pemulihan alam khususnya aktivitas bakteri alam dalam merombak bahan organik, sehingga kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar meningkat
5	Pengolahan dan penguraian limbah	Kapasitas lokasi dalam menetralisir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah	Jasa ekosistem meliputi kapasitas lokasi dalam menetralisir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah. *Dalam kapasitas* yang terbatas, ekosistem memiliki kemampuan untuk menetralisir zat organik yang ada *dalam* air *limbah. Alam menyediakan berbagai macam mikroba (aerob) yang mampu menguraikan zat organik yang terdapat dalam limbah dan sampah menjadi zat anorganik yang stabil dan tidak memberikan dampak pencemaran bagi lingkungan. Mikroba aerob yang disediakan ekosistem dan berperan dalam proses* menetralisir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah diantaranya bakteri, jamur, protozoa, ganggang.
6	Pemeliharaan kualitas udara	Kapasitas mengatur sistem kimia udara	Kualitas udara yang baik merupakan salah satu manfaat yang diberikan oleh ekosistem. Kualitas udara. sangat dipengaruhi oleh interaksi antar berbagai polutan yang diemisikan ke udara dengan faktor-faktor meteorologis (angin, suhu, hujan, sinar matahari) dan pemanfaatan ruang permukaan bumi. Semakin tinggi intensitas pemanfaatan ruang, semakin dinamis kualitas udara. Jasa pemeliharaan kualitas udara pada kawasan bervegetasi dan pada daerah bertopografi tinggi umumnya lebih baik dibanding dengan daerah non vegetasi.
7	Pengaturan penyerbukan alami *(pollination)*	Distribusi habitat spesies pembantu proses penyerbukan alami	Penyerbukan alami *(pollination)* adalah proses berpindahnya serbuk sari dari kepala sari ke kepala putik) yang secara khusus terjadi pada bunga yang sama atau antar bunga yang berbeda tetapi dalam satu tanaman atau di antara bunga pada jenis tanaman yang sama. Ekosistem menyediakan jasa pengaturan penyerbukan alami khususnya lewat tersedianya habitat spesies yang dapat pembantu proses penyerbukan alami. Habitat

Klasifikasi Jasa Ekosistem		Definisi	Ruang Lingkup Pengertian
			alami seperti hutan dan areal bervegetasi umumnya menyediakan media spesies pengatur penyerbukan yang lebih melimpah.
8	Pengendalian hama & penyakit	Distribusi habitat spesies *trigger* dan pengendali hama dan penyakit	Pengendalian hama adalah pengaturan makhluk-makhluk atau organisme pengganggu yang disebut hama karena dianggap mengganggu kesehatan manusia, ekologi, atau ekonomi. Hama dan penyakit merupakan ancaman biotis yang dapat mengurangi hasil dan bahkan dapat menyebabkan gagal panen. Ekosistem secara alami menyediakan sistem pengendalian hama dan penyakit melalui keberadaan habitat spesies *trigger* dan pengendali hama dan penyakit.
Fungsi Budaya (*Cultural)*			
1	Tempat tinggal & ruang hidup *(sense of place)*	Ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera, "kampung halaman" yang punya nilai sentimental	Ekosistem memberikan manfaat positif bagi manusia khususnya ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera. Ruang hidup ini didukung oleh kemampuan dan kesesuaian lahan yang tinggi sehingga memberikan dukungan kehidupan baik secara sosial, ekonomi maupun budaya. Jasa ekosistem sebagai tempat tinggal dan ruang hidup secara sosial sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik dan geografis serta peluang pengembangan wilayah yang lebih besar.
2	Rekreasi & *ecotourism*	Fitur lansekap, keunikan alam, atau nilai tertentu yang menjadi daya tarik wisata	Ekosistem menyediakan fitur lansekap, keunikan alam, atau nilai tertentu yang menjadi daya tarik wisata. Berbagai macam bentuk bentang alam dan keunikan flora dan fauna serta keanekaragaman hayati yang terdapat dalam ekosistem memberi ciri dan keindahan bagi para wisatawan. Dari sisi ekonomi, akan diperoleh banyak keuntungan bahkan menjadi sumber devisa negara yang besar. Variasi bentang alam berpengaruh besar terhadap nilai jasa budaya rekreasi dan *ecotourism.*
3	Estetika	Keindahan alam yang memiliki nilai jual	Ekosistem bentang alam seperti laut, pegunungan, lembah, pantai dan lain sebagainya telah memberikan nuansa keindahan alam dan nilai-nilai estetika yang mengagumkan dan memiliki nilai jual. Paduan bentang alam dan bentang budaya semakin memperkuat nilai keindahan dan estetika yang telah diberikan oleh ekosistem.
Fungsi Pendukung *(Supporting)*			
1	Pembentukan lapisan tanah & pemeliharaan kesuburan	Kesuburan tanah	Tanah merupakan salah satu sumber daya alam utama yang ada di planet bumi serta merupakan kunci keberhasilan makhluk hidup. Tanah adalah lapisan tipis kulit bumi dan terletak paling luar. Tanah merupakan hasil pelapukan atau erosi batuan induk (anorganik) yang bercampur dengan bahan organik. Tanah mengandung partikel batuan atau mineral, bahan organik (senyawa organik dan organisme) air dan udara. Mineral merupakan unsur utama tanah yang terbentuk dari padatan anorganik dan mempunyai komposisi homogen. Ekosistem memberikan jasa pendukung berupa pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan yang bervariasi antar lokasi. Lokasi yang memiliki jenis batuan cepat lapuk, dengan kondisi curah hujan dan penyinaran matahari yang tinggi akibat bentuk permukaan bumi serta didukung oleh keberadaan organisme dalam tanah dan tumbuhan penutup tanah.
2	Siklus hara (*nutrient)*	Kesuburan tanah, tingkat produksi	Siklus hara dalam suatu ekosistem merupakan proses yang terintegrasi dari pergerakan/ pemindahan energi dan hara di dalam ekosistem itu sendiri dan juga

Klasifikasi Jasa Ekosistem		Definisi	Ruang Lingkup Pengertian
		pertanian	interaksinya dengan atmosfir, biosfir, geosfir dan hidrosfir. Energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan siklus hara ini didapatkan dari proses yang terjadi pada biosfir yaitu proses fotosintesis. Ekosistem secara alamiah memberikan unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan dari dalam tanah melalui serapan haranya dan kemudian diakumulasi dalam jaringan tumbuhan dan kembali lagi ke tanah baik langsung atau tidak langsung sebagai bahan organik. Proses dari serapan hara, akumulasi hara pada tubuh tumbuhan dan kembali ke tanah melalui siklus yang bervariasi sesuai dengan kondisi tumbuhan, iklim dan jenis tanahnya sendiri sehingga pada akhirnya berpengaruh terhadap kesuburan tanah dan tingkat produksi pertanian yang tinggi
3	Produksi primer	Produksi oksigen, penyediaan habitat spesies	Ekosistem memberikan jasa produksi primer berupa produksi oksigen dan penyediaan habitat spesies. Produksi oksigen memberikan dukungan bagi seluruh kehidupan makhluk. Tanpa adanya oksigen maka tidak akan ada kehidupan. Ekosistem memberikan jasa penghasil oksigen sekaligus mengurangi kadar karbondioksida dan populasi udara di bumi. Keberadaan vegetasi seperti hutan yang menyerap karbondioksida untuk pembuatan makanan (fotosintesis). Hasil dari fotosintesis adalah oksigen. Inilah gas yang diperlukan makhluk hidup di bumi untuk beraktivitas dan memungkinkan tumbuhnya banyak habitat spesies. Jasa produksi oksigen bervariasi antar lokasi dan berhubungan erat dengan keberadaan vegetasi dan hutan.
4	Biodiversitas	Perlindungan plasma nutfah	Ekosistem telah memberikan jasa keanekaragaman hayati (*biodiversity*) di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem yang menjadi habitat perkembangbiakan flora fauna. Semakin tinggi karakter biodiversitas maka semakin tinggi fungsi dukungan ekosistem terhadap perikehidupan.

Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Padang Pariaman, 2023

b) Profil Jasa Penyediaan

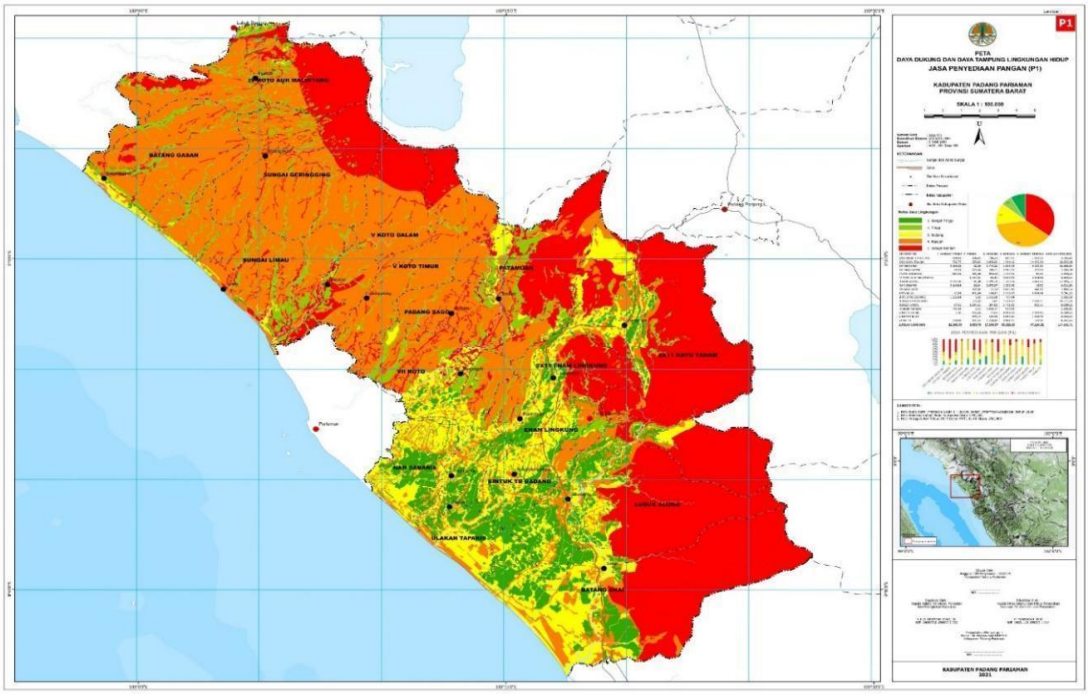
Jasa ekosistem penyediaan adalah barang yang dihasilkan oleh ekosistem dan dimanfaatkan secara langsung oleh manusia. Rata-rata DDDTLH jasa penyediaan Kabupaten Padang Pariaman berada pada kategori sangat rendah dan rendah, yaitu mencapai 48,86% dari luas wilayah. Semua jenis jasa penyediaan berada pada kategori sangat rendah dan rendah, kecuali jasa penyediaan bahan bakar yang mempunyai kategori sangat tinggi dan tinggi mencapai 70,44%. DDDTLH jasa penyediaan dapat dilihat pada tabel 2.11 dan Gambar 2.5 berikut.

Tabel 2.11
DDDTLH Jasa Penyediaan Kabupaten Padang Pariaman

No	Nama Jasa Penyediaan	Persentase Luas DDDTLH		
		Sangat Tinggi & Tinggi	Sedang	Rendah & Sangat Rendah
1	Pangan	14,50%	12,89%	**72,61%**
2	Air Bersih	39,44%	18,77%	**41,78%**
3	Serat	33,22%	2,62%	**64,17%**
4	Bahan Bakar	**70,44%**	17,33%	12,23%
5	SD Genetik	32,11%	14,40%	**53,49%**
Rata-rata		37,94%	13,20%	**48,86%**

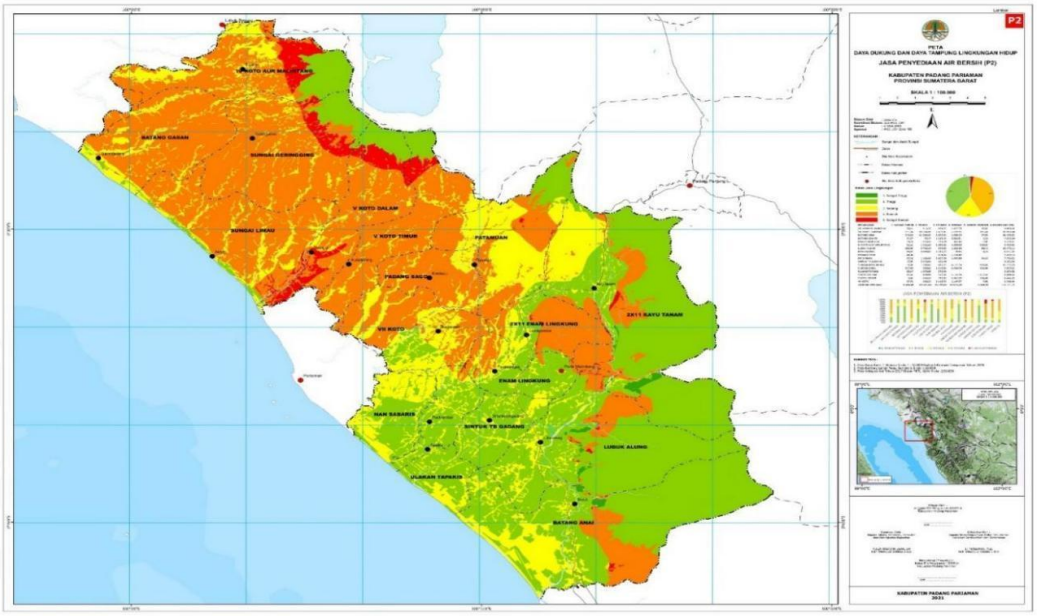
Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 2.5
Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kabupaten Padang Pariaman



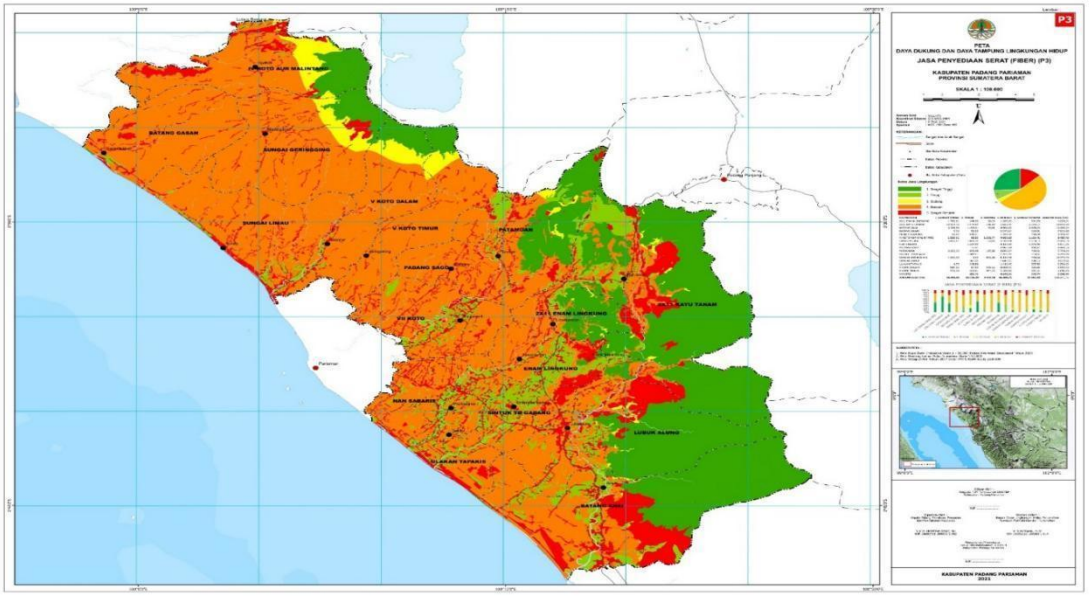
Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 2.6
Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Kabupaten Padang Pariaman



Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 2.7
Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Serat Kabupaten Padang Pariaman



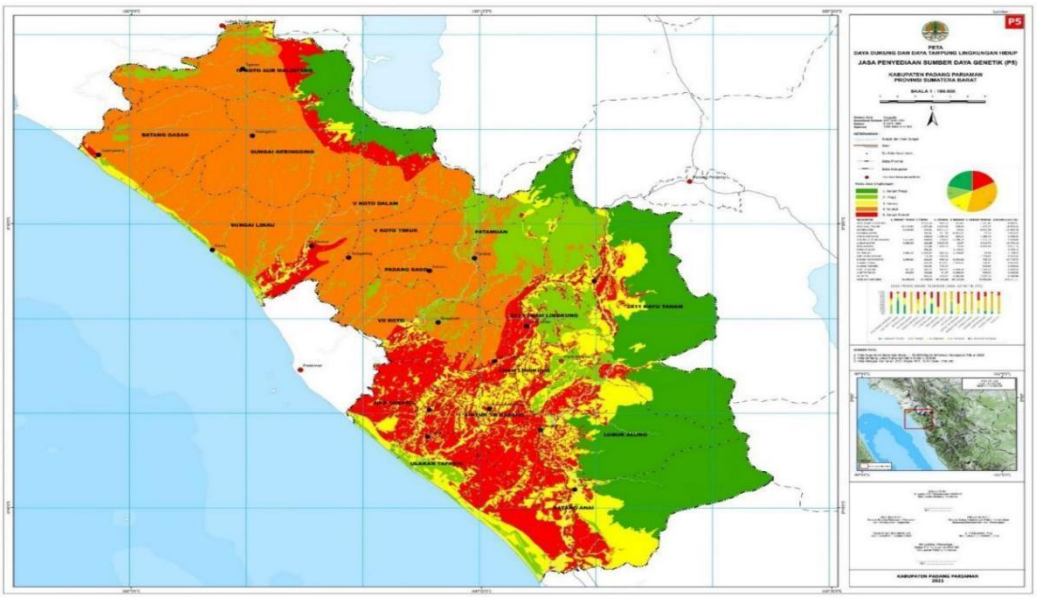
Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 2.8
Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Bahan Bakar, Kayu dan Fosil Kabupaten Padang Pariaman



Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 2.9
Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Sumber Daya Genetik Kabupaten Padang Pariaman



Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Padang Pariaman, 2023

c) Profil Jasa Pengaturan

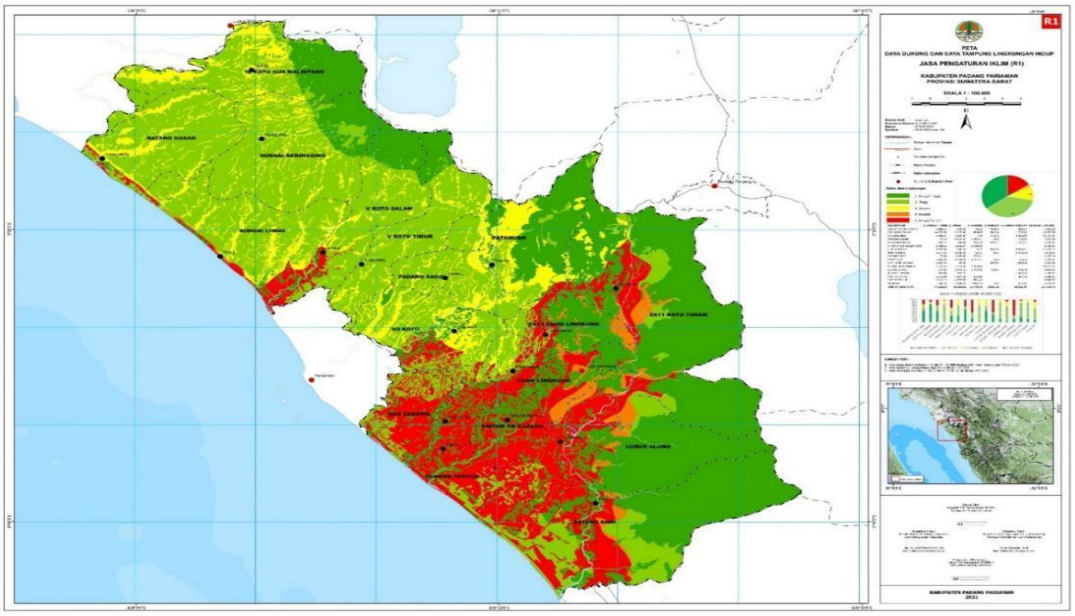
Berbeda dengan jasa penyediaan, DDDTLH untuk jasa pengaturan di Kabupaten Padang Pariaman rata-rata berada pada kategori sangat tinggi dan tinggi. Semua jenis jasa berada pada kategori sangat tinggi dan tinggi, kecuali jasa perlindungan bencana dan jasa pemurnian air. Kedua jasa tersebut berada pada kategori sangat rendah dan rendah seperti terlihat pada tabel 2.12 dan Gambar 2.10 berikut ini:

Tabel 2.12
DDDTLH Jasa Pengaturan Kabupaten Padang Pariaman

No.	Nama Jasa Pengaturan	Persentase Luas DDDTLH		
		Sangat Tinggi & Tinggi	Sedang	Rendah & Sangat Rendah
1.	Iklim	71,93%	10,24%	17,83%
2.	Tata Aliran Air dan Banjir	40,90%	21,54%	37,56%
3.	Perlindungan Bencana	36,09%	20,10%	43,81%
4.	Pemurnian Air	47,91%	0,00%	58,84%
5.	Penguraian Limbah	34,18%	35,66%	30,16%
6.	Kualitas Udara	68,57%	14,97%	16,46%
7.	Penyerbukan Alami	72,31%	5,93%	21,76%
8.	Pengendaliaan Hama	39,82%	38,31%	21,87%
Rata-rata		**53,13%**	**15,49%**	**32,35%**

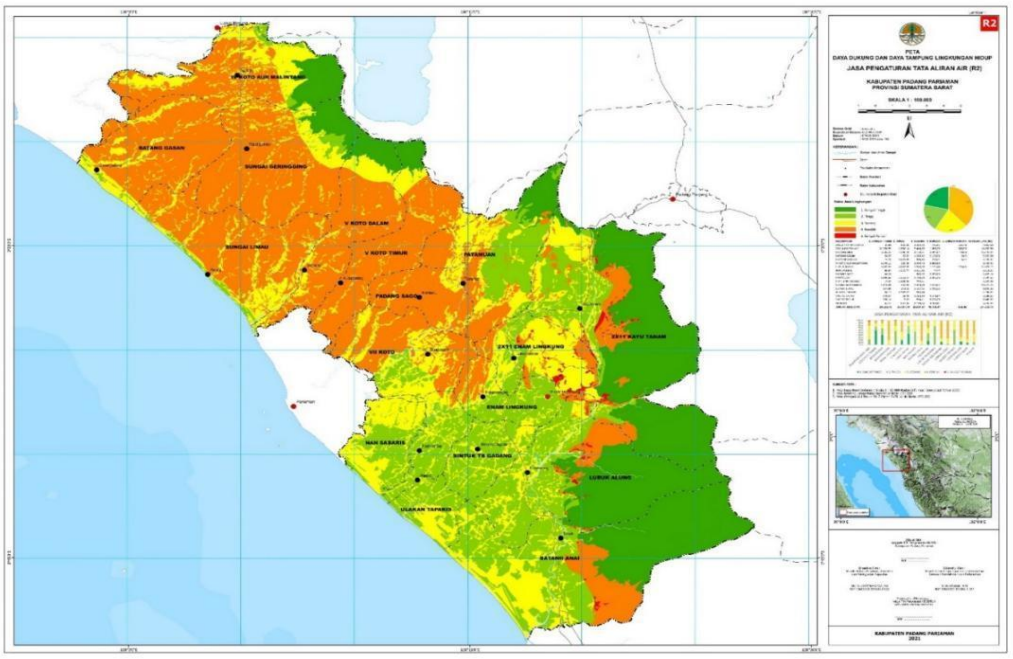
Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 2.10
Peta Daya Tampung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kabupaten Padang Pariaman



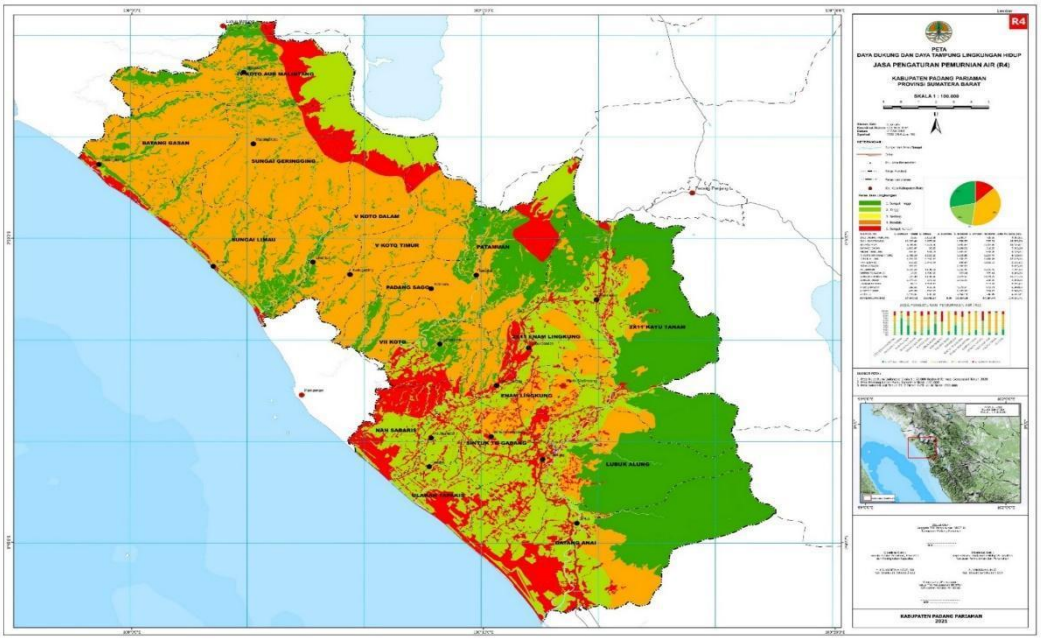
Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 2.11
Peta Daya Tampung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Kabupaten Padang Pariaman



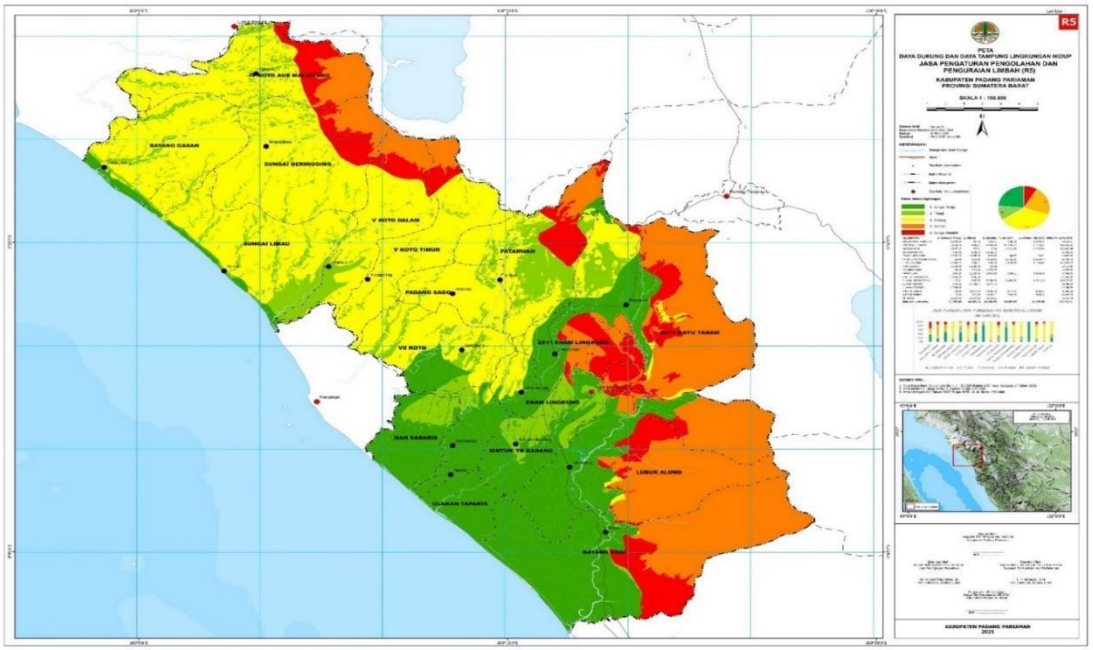
Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 2.12
Peta Daya Tampung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan, Pemurnian Air Kabupaten Padang Pariaman



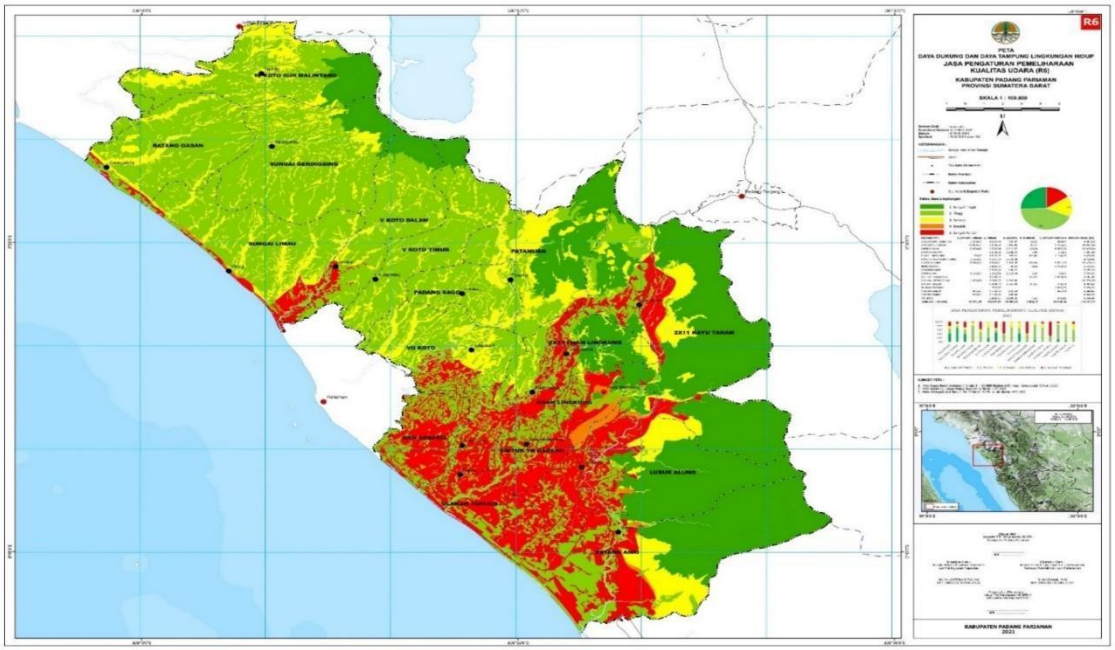
Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 2.13
Peta Daya Tampung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan pengolahan dan Penguraian Limbah Kabupaten Padang Pariaman



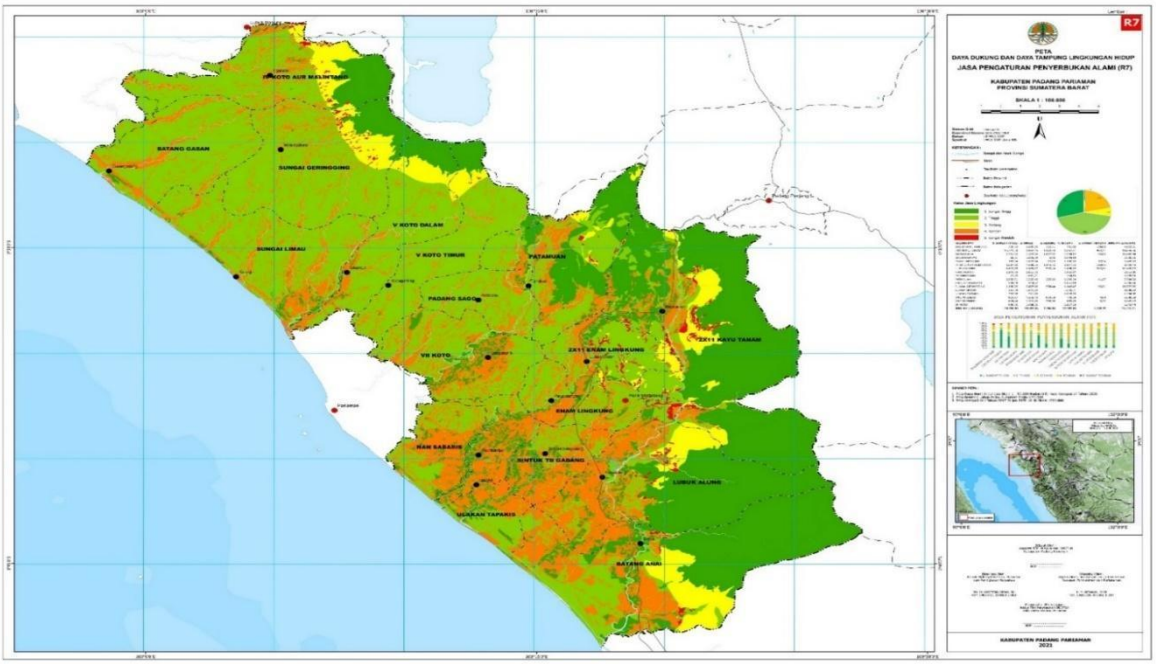
Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 2.14
Peta Daya Dukung Jasa Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Kabupaten Padang Pariaman



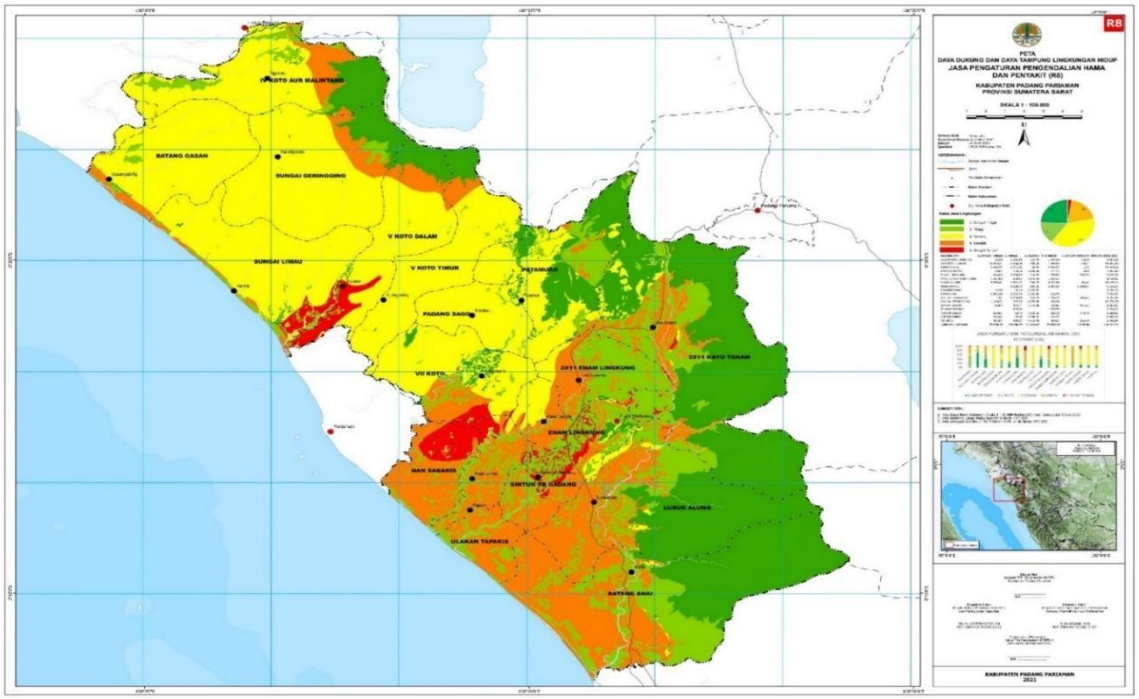
Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 2.15
Peta Daya Tampung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Penyerbukan Alami (Pollination) Kabupaten Padang Pariaman



Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 2.16
Peta Daya Tampung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit Kabupaten Padang Pariaman



Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Padang Pariaman, 2023

d) Profil Jasa Budaya

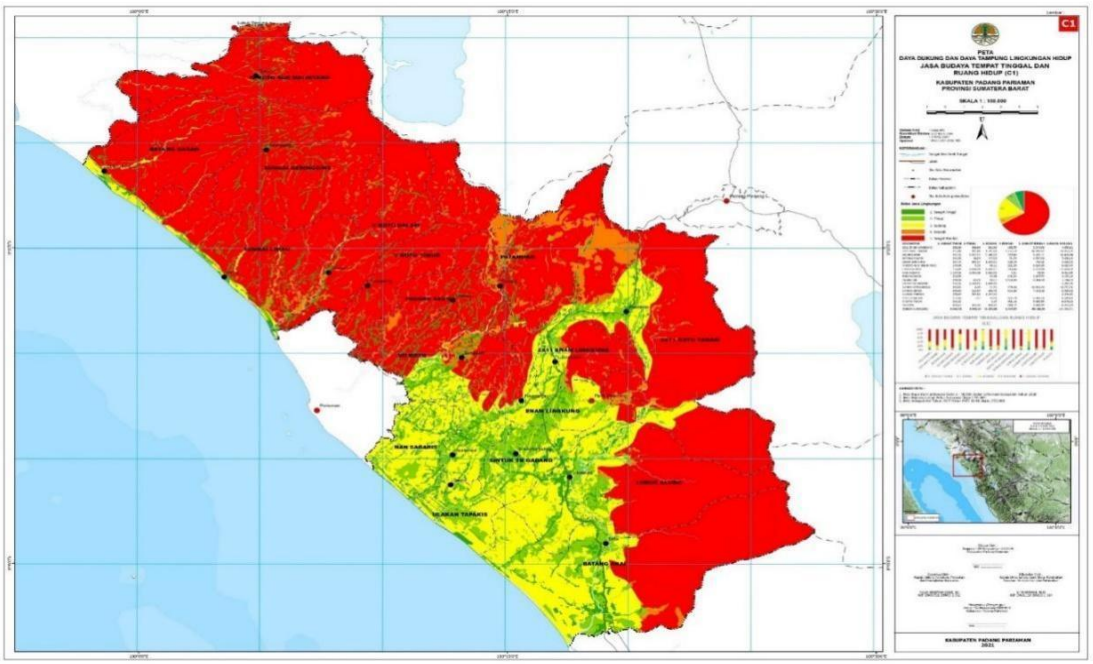
Jasa budaya di Kabupaten Padang Pariaman pada umumnya mempunyai kategori sangat rendah dan rendah rata-rata 48,48%. Jasa tempat tinggal bahkan mencapai 71,19% dari luas wilayah untuk kategori sangat rendah dan rendah. Demikian juga untuk jasa ekoturisme seperti terlihat pada tabel 2.13 dibawah ini.

Tabel 2.13
DDDTLH Jasa Pengaturan Kabupaten Padang Pariaman

No	Nama Jasa Budaya	Persentase Luas DDDTLH		
		Sangat Tinggi & Tinggi	Sedang	Rendah & Sangat Rendah
1	Tempat Tinggal	13,01%	15,80%	**71,19%**
2	Ekoturisme	28,02%	25,35%	**46,63%**
3	Estetika (Alam)	32,31%	**40,07%**	27,62%
Rata-rata		**24,45%**	**27,07%**	**48,48%**

Sumber : Dokumen DDDTLH Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 2.17
Peta Daya Dukung Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Kabupaten Padang Pariaman



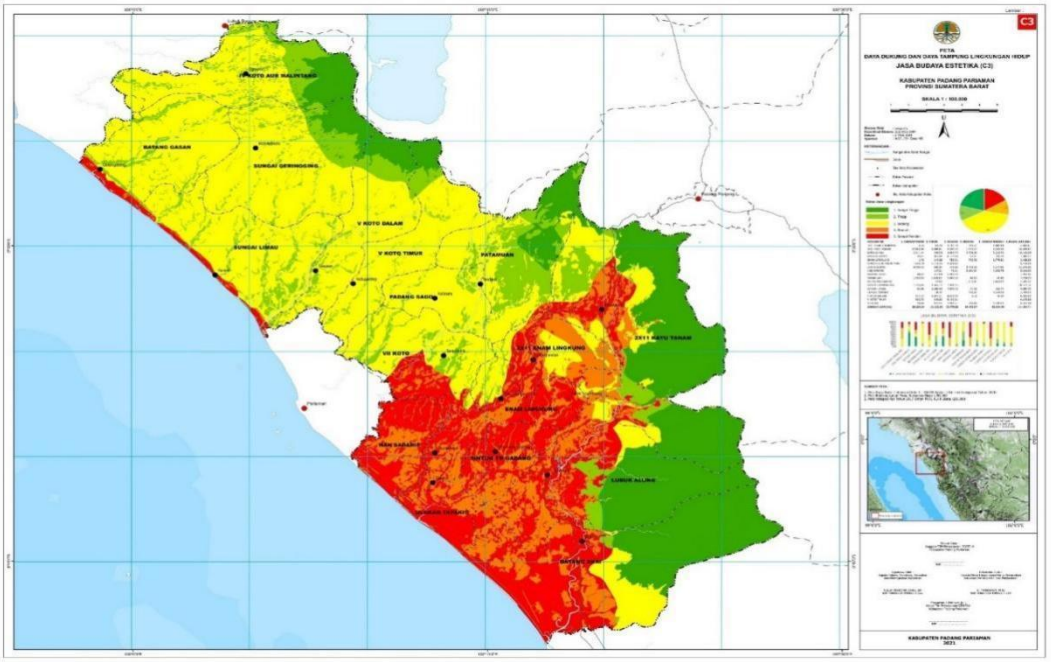
Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 2.18
Peta Daya Lingkungan Jasa Ekosistem Budaya Rekreasi dan Ecotourism Kabupaten Padang Pariaman



Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 2.19
Peta Daya Lingkungan Jasa Ekosistem Budaya Estetika (alam) Kabupaten Padang Pariaman



Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Padang Pariaman, 2023

e) Profil Jasa Pendukung

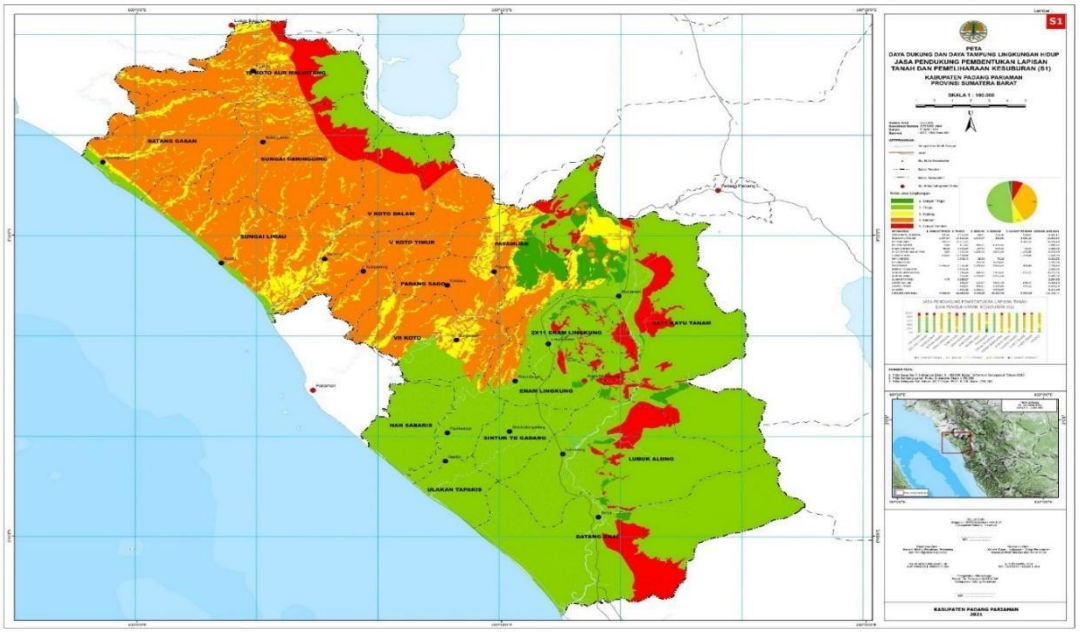
Untuk DDDTLH Jasa pendukung di Kabupaten Padang Pariaman umumnya termasuk dalam kategori sangat tinggi dan tinggi di Kabupaten Padang Pariaman. Hanya jasa biodiversitas (keanekaragaman hayati) yang mempunyai kategori sangat rendah dan rendah. Rata-rata untuk kategori sangat tinggi dan tinggi untuk Jasa Pendukung di Kabupaten Padang Pariaman adalah 48,13% dari luas wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

Tabel 2.14
DDDTLH Jasa Pendukung Kabupaten Padang Pariaman

No	Nama Jasa Pendukung	Persentase Luas DDDTLH		
		Sangat Tinggi & Tinggi	Sedang	Rendah & Sangat Rendah
1	Pembentukan Tanah	50,98%	7,00%	42,02%
2	Siklus Hara	59,44%	21,46%	19,10%
3	Produksi Primer	48,52%	9,96%	41,52%
4	Biodiversitas	33,59%	0,05%	66,36%
Rata-rata		48,13%	9,62%	42,25%

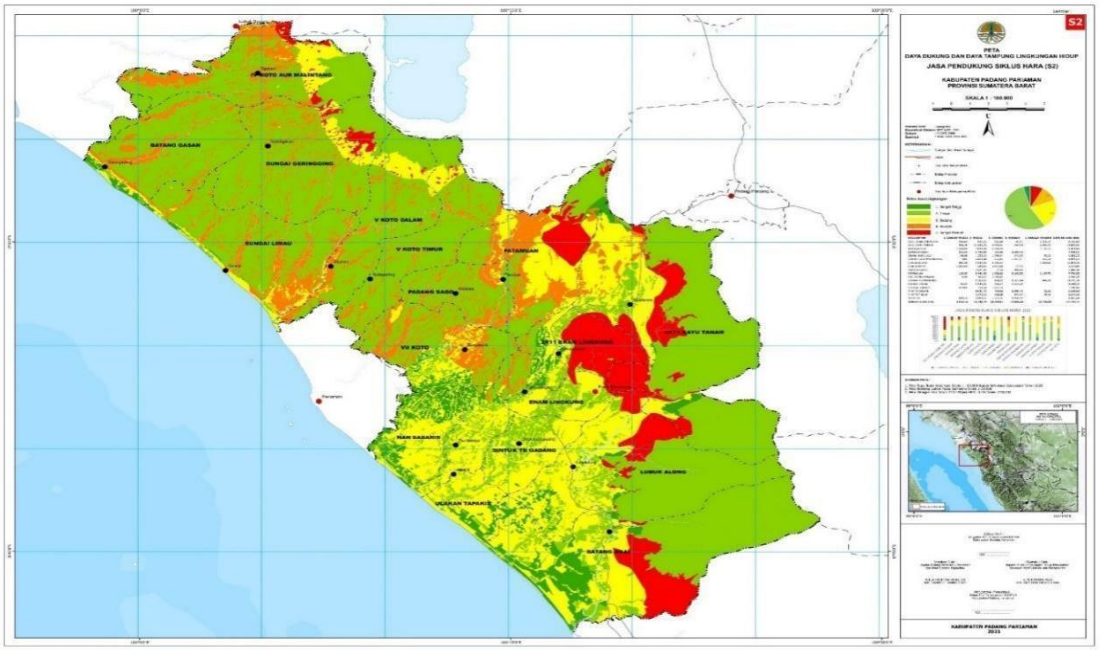
Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 2.20
Peta Daya Tampung Lingkungan Jasa Ekosistem Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan Kabupaten Padang Pariaman



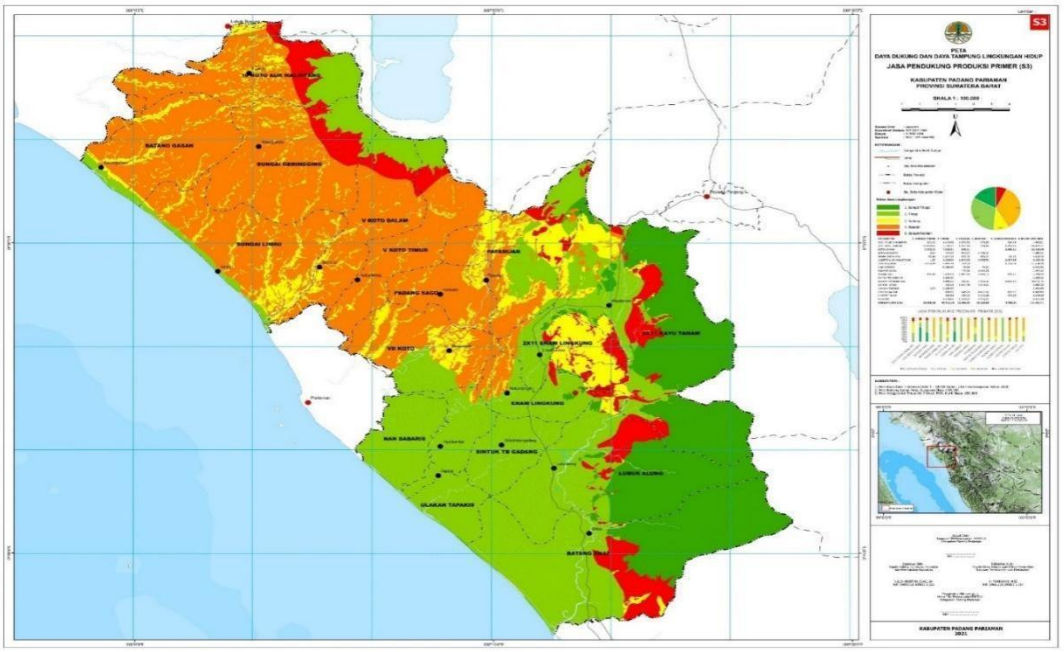
Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 2.21
Peta Daya Tampung Lingkungan Jasa Ekosistem Pendukung Siklus Hara (Nutrient Cycle) Kabupaten Padang Pariaman



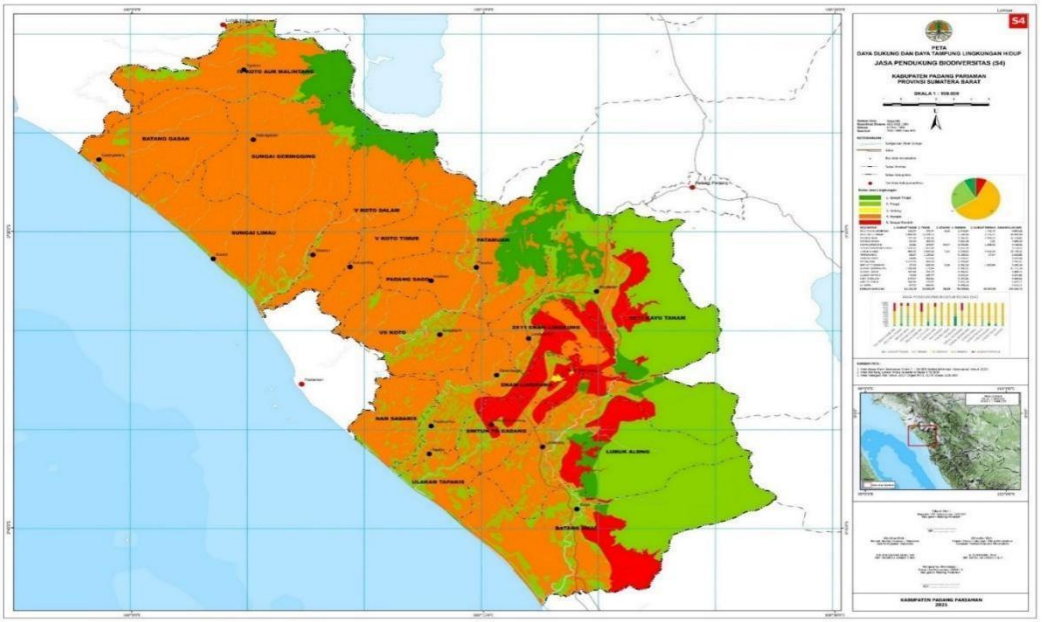
Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 2.22
Peta Daya Tampung Lingkungan Jasa Ekosistem Pendukung Produksi Primer Kabupaten Padang Pariaman



Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 2.23
Peta Daya Tampung Lingkungan Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas (Perlindungan Plasma Nutfah) Kabupaten Padang Pariaman



Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Padang Pariaman, 2023

f) Daya Dukung dan Daya Tampung Air (DDDT) Air

Daya dukung dan daya tampung yang digunakan mengacu kepada peta dan data daya dukung dan daya tampung (DDDT) air nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) melalui Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.146/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional. Wilayah kajian dibagi menjadi 2 kelas yaitu DDDT air belum terlampaui dan sudah terlampaui Hasil analisis tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.15 dan Gambar 2.24. Berdasarkan analisis tersebut, secara umum daya dukung dan daya tampung air di Kabupaten Padang Pariaman masih berada pada status belum terlampaui.

Pada pembahasan DDDT Jasa Ekosistem Penyediaan Air, analisis dilakukan dengan menggunakan peta ekoregion, peta penutupan lahan, peta vegetasi alami dan ditambahkan dengan indeks pakar. Sedangkan, pada DDDT Status Air, dianalisis dengan memperkirakan ketersediaan air dari debit sungai dan kebutuhan air domestik dan kebutuhan air lahan pada Kabupaten Padang Pariaman.

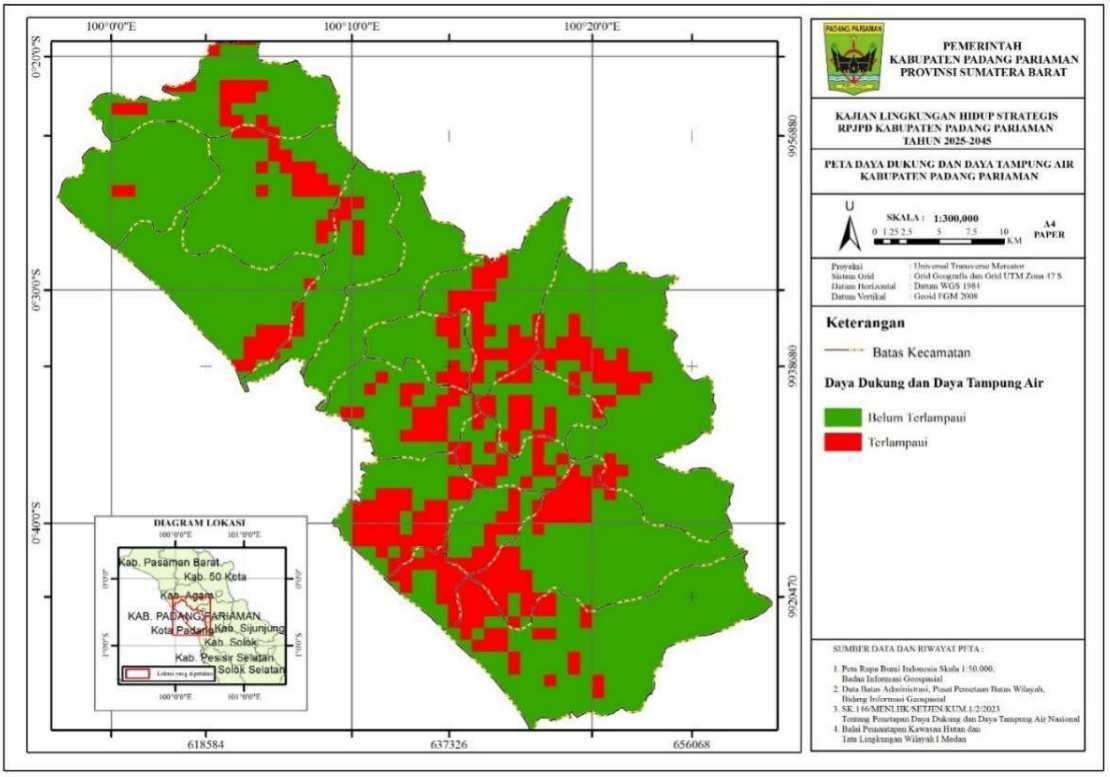
Tabel 2.15
Perhitungan D3T Air Kabupaten Padang Pariaman

No.	Kecamatan	Kebutuhan Domestik (m^3/tahun)	Kebutuhan Lahan (m^3/tahun)	Total Kebutuhan (m^3/tahun)	Total Sedia (m^3/tahun)	Status
1.	2X11 Anam Lingkuang	963.101	22.915.324	23.878.425	28.344.387	Terlampaui
2.	2X11 Kayu Tanam	2.191.363	81.301.756	83.493.120	197.473.547	Belum Terlampaui
3.	Batang Anai	4.456.253	75.900.308	80.356.561	188.845.493	Belum Terlampaui
4.	Batang Gasan	2.116.368	52.468.473	54.584.841	92.948.364	Belum

No.	Kecamatan	Kebutuhan Domestik (m³/tahun)	Kebutuhan Lahan (m³/tahun)	Total Kebutuhan (m³/tahun)	Total Sedia (m³/tahun)	Status
						Terlampaui
5.	Anam Lingkuang	1.267.142	34.220.700	35.487.842	35.716.241	Belum Terlampaui
6.	IV Koto Aua Malintang	2.367.706	69.550.712	71.918.417	108.793.296	Belum Terlampaui
7.	Lubuak Aluang	3.848.083	116.190.175	120.038.258	187.504.173	Belum Terlampaui
8.	Nan Sabaris	4.071.082	74.510.935	78.582.016	78.151.745	Terlampaui
9.	VII Koto Padang Sago	1.008.202	17.182.235	18.190.436	26.153.759	Belum Terlampaui
10.	VII Koto Patamuan	2.312.582	66.299.466	68.612.049	91.082.646	Belum Terlampaui
11.	Sintuak Toboh Gadang	1.352.938	29.791.725	31.144.663	32.932.630	Belum Terlampaui
12.	Sungai Garinggiang	3.425.674	80.434.122	83.859.796	126.638.098	Belum Terlampaui
13.	Sungai Limau	3.801.082	87.607.188	91.408.269	142.017.520	Belum Terlampaui
14.	Ulakan Tapakih	1.588.723	43.544.747	45.133.470	39.398.931	Terlampaui
15.	V Koto	1.881.792	42.993.470	44.875.262	72.275.767	Belum Terlampaui
16.	V Koto Timur	2.182.810	37.217.076	39.399.885	86.018.142	Belum Terlampaui
17.	VII Koto	3.401.309	63.783.654	67.184.963	76.670.340	Belum Terlampaui
	Total	42.236.208	995.912.065	1.038.148.273	1.610.965.079	Belum Terlampaui

Sumber: SK KLHK 146 Tahun 2023, BPKHTL Medan

Gambar 2.24
Peta Daya Dukung Daya Tampung Air
Kabupaten Padang Pariaman 2023



Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Padang Pariaman, 2023

g) Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan

Sektor pertanian merupakan salah satu kontributor utama dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Padang Pariaman. Kontribusi sektor pertanian pada tahun 2022 hanya 21,37%, sedikit menurun dari tahun sebelumnya yaitu 22,65%. Luas lahan sawah pada tahun 2022 di Kabupaten Padang Pariaman adalah 13,76% dari total keseluruhan Kabupaten atau sekitar 18.289 hektar, sedangkan 62,63% (83.217 ha) dari total luas lahan adalah luas lahan pertanian bukan sawah, dan selebihnya adalah luas lahan bukan pertanian (23,61%). Untuk lahan sawah terluas berada pada Kecamatan Lubuak Aluang dengan luas lahan 2.521 ha (1,95% dari luas Kabupaten), dan kecamatan dengan luas lahan sawah terkecil berada pada Kecamatan VII Koto Padang Sago (238 ha). Luas lahan sawah mengalami penurunan sebesar 4.567 ha pada tahun 2021 seperti dapat dilihat pada Tabel 2.16 berikut.

Tabel 2.16
Luas Lahan Sawah dan Bukan Sawah Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Lahan Sawah	Bukan Lahan Sawah		Jumlah
			Lahan Kering	Lainnya	
1.	Batang Anai	2.595,00	3.983	719	7.297
2.	Lubuak Aluang	2.521,00	8.295	151	10.967
3.	Sintuak Toboh Gadang	1.150,00	959	62	2.171
4.	Ulakan Tapakih	673,00	2.916	40	3.629
5.	Nan Sabaris	667,00	1.707	298	2.672
6	2 x 11 Anam Lingkuang	791,00	1.509	796	3.096
7.	Anam Lingkuang	1.033,00	1.562	162	2.757
8.	2 x 11 Kayu Tanam	1.474,00	11.650	204	3.328
9.	VII Koto	1.226,00	7.519	200	8.945
10.	VII Koto Patamuan	1.066,00	3.908	46	5.020
11.	VII Koto Padang Sago	238,00	2.773	16	3.027
12.	V Koto	769,00	3.317	1.276	5.362
13.	V Koto Timur	353,00	3.847	230	4.430
14.	Sungai Limau	1.020,00	5.241	277	6.538
15.	Batang Gasan	553,00	3.258	30	3.841
16.	Sungai Garingging	620,00	7.757	320	8.697
17.	IV Koto Aua Malintang	1.540,00	8.135	54	9.729
2024		18.289	79.397	3.882	101.568
2023		18.289	79.302	3.877	101.468
2022		18.289	78.336	4.881	101.506
2021		18.289	78.338	4.879	101.506
2020		22.856	73.239	4.809	100.904

Sumber: BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2021 sd 2025

Untuk tanaman pangan sendiri, luas panen padi di Kabupaten Padang Pariaman menurun tiap tahunnya, dan produktivitas padi mengalami fluktuatif tiap tahunnya. Produktivitas padi di Kabupaten Padang Pariaman mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 4,73

ton/ha, dari sebelumnya 4,56 ton/ha pada tahun 2021. Akan tetapi produktivitas ini jauh menurun dari pada tahun 2018 yaitu 5,26 ton/ha. Luas panen, produksi dan produktivitas padi di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.17 berikut.

Tabel 2.17
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Sawah di Kabupaten Padang Pariaman

No	Tahun	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (ton/ha)
1.	2020	62.847,10	59.331,00	283.127,72	4,68
2.	2021	49.514,30	55.426,20	252.723,26	4,54
3.	2022	47.892,12	46.016,37	227.996,24	4,96
4.	2023	44.448,96	45.609,60	221.662,66	4,86
5.	2024	40.760,32	42.175,09	185.907,80	4,41

Sumber: BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2025

Melihat kondisi produktivitas padi eksisting, luas sawah yang cenderung mengalami perubahan fungsi dan laju pertumbuhan penduduk sampai tahun 2045, dengan kondisi seperti saat ini (*business as usual* - BAU), maka diperkirakan Kabupaten Padang Pariaman akan mengalami defisit beras pada tahun 2040. Hal serupa juga dialami oleh kota/kabupaten di daerah lain di Provinsi Sumatera Barat. Oleh karenanya, Kabupaten Padang Pariaman sebagai salah satu kabupaten pemasok beras untuk kota/kabupaten sekitar berpotensi mengalami peristiwa defisit beras lebih cepat dari waktu yang telah diperkirakan, dikarenakan kebutuhan akan memasok beras ke daerah lain. Untuk mengantisipasi hal ini, diperlukan perhatian dan kebijakan yang tepat untuk dapat mempertahankan lahan sawah, serta meningkatkan produktivitas pertanian dan mengelola pertumbuhan penduduk, serta meningkatkan diversifikasi pangan seperti jagung dan ubi yang juga banyak diproduksi di Kabupaten Padang Pariaman. Simulasi produksi dan konsumsi beras di Kabupaten Padang Pariaman sampai tahun 2045 dapat dilihat pada tabel 2.18.

Produksi Jagung pada tahun 2022 adalah 43.670,84 ton, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 41.784,69 ton. Produksi Ubi Kayu tahun 2022 sebesar 5.614,94 ton mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 8.142,6 ton. Produksi Kacang Tanah tahun 2022 sebesar 124,35 ton mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 yaitu 75,71 ton.

Tabel 2.18
Estimasi Produksi dan Konsumsi Beras Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2045

				persen/tahun	Kwintal/ha	kg/kapita/minggu	kali/tahun
Asumsi Awal				**0.93**	**49.58**	**1.60**	**1.49**
Perubahan Asumsi				**0.80%**	**55.00**	**1.20**	**2.00**
Estimasi	**Tahun**	**BAU (luas sawah menurun)**	**LSD (Kepmen ATR No. 589/2021)**	**LSD + LPP Turun**	**LSD + LPP Turun + Produktivitas Naik**	**LSD + LPP Turun + Produktivitas Naik + Konsumsi Turun**	**LSD + LPP Turun + Produktivitas Naik + Konsumsi Turun + Kali Tanam Naik**
Estimasi Luas Sawah (ha)	2025	17,152.00	17,793.98	17,793.98	17,793.98	17,793.98	17,793.98
	2030	14,958.40	17,793.98	17,793.98	17,793.98	17,793.98	17,793.98
	2035	12,764.80	17,793.98	17,793.98	17,793.98	17,793.98	17,793.98
	2040	10,571.20	17,793.98	17,793.98	17,793.98	17,793.98	17,793.98
	2045	8,377.60	17,793.98	17,793.98	17,793.98	17,793.98	17,793.98
Estimasi Konsumsi Beras (ton)	2022	33,072.08	33,072.08	33,072.08	33,072.08	33,072.08	33,072.08
	2025	34,640.97	34,640.97	34,416.30	34,416.30	34,416.30	34,416.30
	2030	36,284.30	36,284.30	35,815.15	35,815.15	35,815.15	35,815.15
	2035	38,005.58	36,284.30	35,815.15	35,815.15	35,815.15	35,815.15
	2040	39,808.52	39,808.52	38,785.74	38,785.74	38,785.74	38,785.74
	2045	41,696.98	41,696.98	40,362.19	40,362.19	40,362.19	40,362.19
Selisih Estimasi Produksi dengan estimasi Konsumsi Beras (ton)	2025	18,564.20	20,555.61	20,780.29	26,814.29	35,418.36	56,395.97
	2030	10,116.37	18,912.29	19,381.43	25,415.43	34,369.22	55,346.82
	2035	1,590.59	17,191.01	17,925.72	23,959.72	33,277.43	54,255.04
	2040	-7,016.86	15,388.07	16,410.84	22,444.84	32,141.27	53,118.88
	2045	-15,709.83	13,499.60	14,834.39	20,868.39	30,958.94	51,936.54

KLHS RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029, 2025

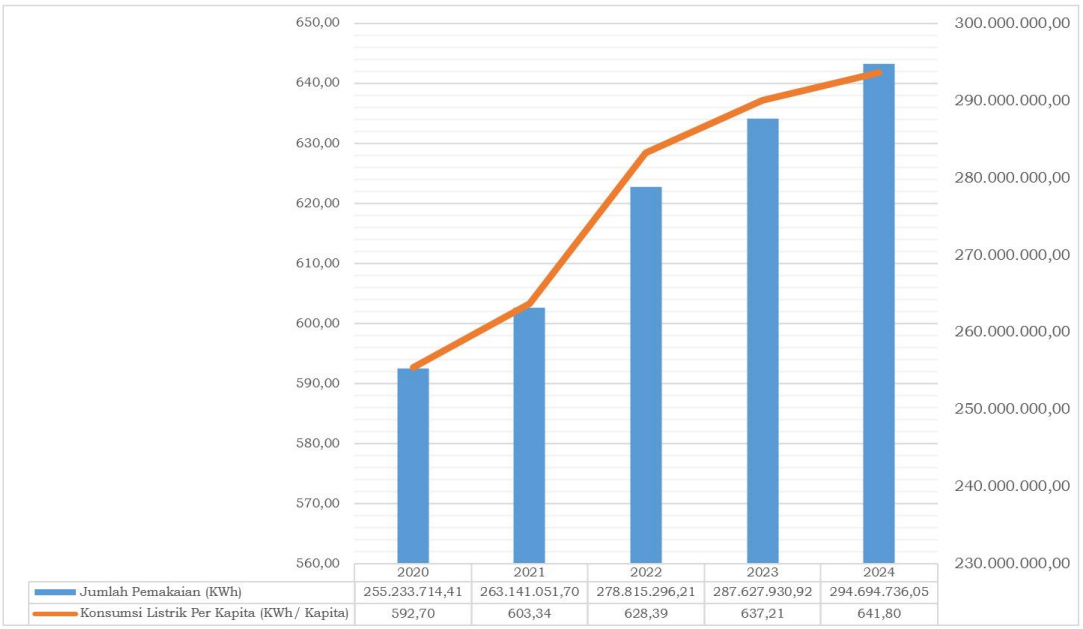
2.1.1.5 Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

1) Konsumsi Listrik per Kapita

Kesejahteraan penduduk dapat tercermin melalui tingkat konsumsi listrik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di Kabupaten Padang Pariaman, pengelolaan layanan listrik dilaksanakan oleh tiga Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3), yaitu Pariaman, Lubuak Aluang, dan Sicincin. Konsumsi listrik per kapita (kWh/kapita) dihitung dengan membagi total pemakaian listrik dengan jumlah penduduk selama satu tahun, yang mencakup seluruh energi listrik yang digunakan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan Gambar 2.25, jumlah pemakaian listrik di Kabupaten Padang Pariaman terus meningkat setiap tahun. Pada tahun pertama, pemakaian listrik tercatat sebesar 255,23 juta kWh, meningkat menjadi 263,14 juta kWh, dan mencapai 294,69 juta kWh pada tahun terakhir periode pengamatan. Tren peningkatan yang sama juga terlihat pada konsumsi listrik per kapita, dari 592,70 kWh/kapita pada tahun pertama menjadi 603,34 kWh/kapita, dan meningkat hingga 641,80 kWh/kapita pada tahun terakhir.

Gambar 2.25
Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) dan Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pemakaian (KWh)	255.233.714,41	263.141.051,70	278.815.296,21	287.627.930,92	294.694.736,05
Konsumsi Listrik Per Kapita (KWh/ Kapita)	592,70	603,34	628,39	637,21	641,80

Sumber: PLN Ranting Pariaman, Lubuk Alung dan Sicincin, 2025 (Diolah)

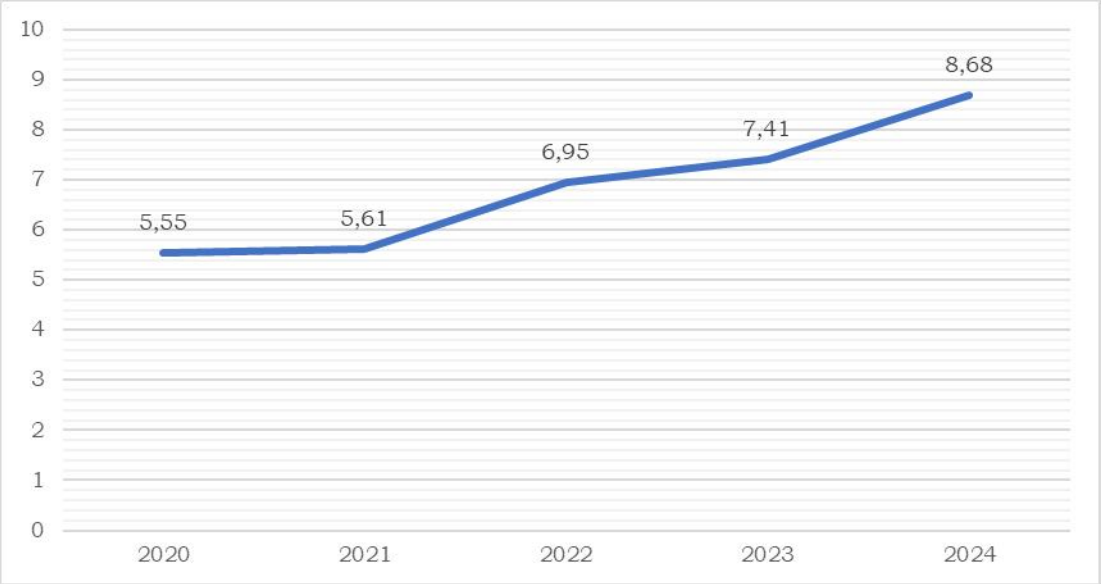
Kecenderungan kenaikan baik pada total pemakaian listrik maupun konsumsi per kapita menunjukkan meningkatnya kebutuhan energi listrik masyarakat, sejalan dengan pertumbuhan penduduk, peningkatan aktivitas ekonomi, serta meluasnya pemanfaatan sarana dan prasarana listrik.

2) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%)

Ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*) adalah kondisi ketika seseorang tidak memperoleh asupan energi yang cukup secara berkelanjutan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat kerawanan pangan kronis dalam suatu populasi, di mana individu yang kekurangan energi secara berkelanjutan berisiko

mengalami gangguan kesehatan, penurunan produktivitas, dan menurunnya kualitas hidup. Perkembangan nilai Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020–2024 dapat dilihat pada Gambar 2.26.

Gambar 2.26
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024



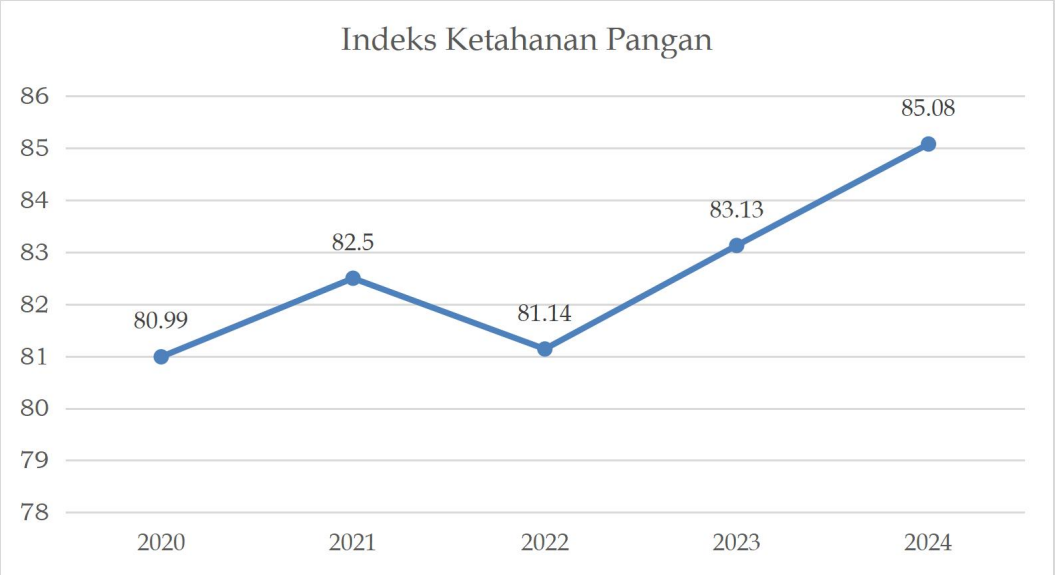
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024

Gambar 2.26 menunjukkan bahwa prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Padang Pariaman terus meningkat selama periode 2020–2024, hingga mencapai 8,68 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang tidak memperoleh cukup makanan untuk memenuhi kebutuhan energi harian. Kondisi ini mengindikasikan adanya masalah serius terkait ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan di Kabupaten Padang Pariaman. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk memastikan akses setiap orang terhadap makanan yang cukup dan bergizi.

3) Indeks Ketahanan Pangan

Indeks ini menunjukkan kemampuan daerah dalam menjamin ketersediaan pangan yang cukup, bergizi, aman, dan terjangkau. Indeks tersebut mengukur tiga pilar utama, yaitu ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Selain itu, indeks ini menjadi acuan untuk menilai potensi kerentanan maupun keberhasilan program ketahanan pangan suatu daerah. Nilai indeks yang tinggi mencerminkan bahwa daerah tersebut memiliki ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan gizi penduduknya.

Gambar 2.27
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Gambar 2.27 menunjukkan perkembangan nilai Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman pada periode 2020–2024. Pada tahun 2020, IKP Padang Pariaman berada pada angka 80,99 dan mengalami fluktuasi, namun secara umum menunjukkan tren peningkatan hingga mencapai 85,08 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan upaya nyata pemerintah daerah dalam memperkuat sistem ketahanan pangan melalui peningkatan produksi, distribusi yang lebih merata, serta intervensi pada aspek gizi dan daya beli masyarakat.

4) Kapasitas Air Baku (m^3/detik)

Kabupaten Padang Pariaman dilintasi oleh 11 sungai dengan total panjang mencapai 277,6 km, yang tersebar hampir di seluruh kecamatan. Sungai terpanjang adalah Batang Anai dengan panjang 54,6 km, melintasi Kecamatan 2/11 Kayu Tanam, Lubuak Aluang, dan Batang Anai, serta termasuk sungai lintas kabupaten/kota. Sementara itu, Sungai Batang Kamumuang menjadi yang terpendek dengan panjang 12 km, berada di Kecamatan Sungai Limau dan Sungai Garinggiang. Berdasarkan data DIKPLHD 2017, debit tertinggi tercatat pada Sungai Batang Ulakan dan Batang Gasan sebesar 60 m^3/detik, sedangkan debit terendah terdapat pada Sungai Batang Naras sebesar 0,91 m^3/detik. Informasi lebih lengkap mengenai jumlah sungai dan wilayah yang dilalui dapat dilihat pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19
Nama-nama sungai di Kabupaten Padang Pariaman

No	Nama Sungai	Daerah yang Dilalui (Kecamatan)	Panjang (Km)
1.	Batang Sungai Limau	Sungai Garinggiang – Sungai Limau	14,0
2.	Batang Kamumuan	Sungai Garinggiang – Sungai Limau	12,0
3.	Batang Paingan	Sungai Garinggiang – Sungai Limau	16,0
4.	Batang Gasan	IV Koto Aua Malintang – Sungai Limau – Batang Gasan	20,0

5.	Batang Sungai Sirah	Sungai Garinggiang – Sungai Limau	18,0
6.	Batang Naras	V Koto – VII Koto	20,0
7.	Batang Piaman	VII Koto – Pariaman	12,0
8.	Batang Mangau	VII Koto Patamuan – VII Koto – Nan Sabaris	46,0
9.	Batang Ulakan	2x11 Anam Lingkuang – Nan Sabaris – Ulakan Tapakih	19,0
10.	Batang Anai	2x11 Anam Lingkuang – Lubuak Aluang – Batang Anai	54,6
11.	Batang Tapakis	Lubuk Aluang – Sintuak Toboh Gadang – Nan Sabaris – Ulakan Tapakih	46,0

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029, 2025

Tabel 2.20
Lebar, kedalaman, dan debit air sungai-sungai di Kabupaten Padang Pariaman

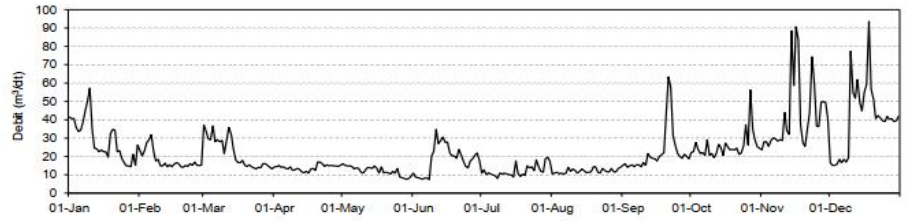
No	Nama sungai	Lebar (m)		Kedalaman (m)	Debit (m^3/dtk)	
		Permukaan	Dasar		Maks	Min
1.	Batang Sungai Limau	30	20	1-2	45,0	7,77
2.	Batang Kamumuan	40	30	1-3	-	-
3.	Batang Paingan	30	20	1-3	36,0	3,98
4.	Batang Gasan	30	20	2-4	60,0	9,2
5.	Batang Sungai Sirah	40	30	3-4	45,0	7,32
6.	Batang Naras	30	20	1-3	76,49	0,91
7.	Batang Piaman	30	20	1-3	6,11*	0,83*
8.	Batang Mangau	70	60	2-5	38,35	4,4
9.	Batang Ulakan	45	40	1-3	21,65*	10,89*
10.	Batang Anai	80	70	2-7	93,5*	7,3*
11.	Batang Tapakis	45	40	2-4	5,32*	0,13*

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029, 2025

Kabupaten Padang Pariaman dilewati oleh Sungai Batang Anai yang mana kewenangan pengujian kualitas airnya berada pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2022, Sungai Batang Anai memiliki debit maksimum sebesar 93,5 m^3/detik. Sedangkan debit minimum sebesar 7,3 m^3/detik. Tinggi muka air Sungai Batang Anai terbesar setinggi 3,81 meter pada tahun 2020 dan tinggi muka air terkecil sebesar 0,01 meter pada tahun 2022. Untuk tahun 2022 sendiri, tinggi muka air terbesar setinggi 1,43 m. Debit Sungai Batang Anai disajikan pada gambar 2.28.

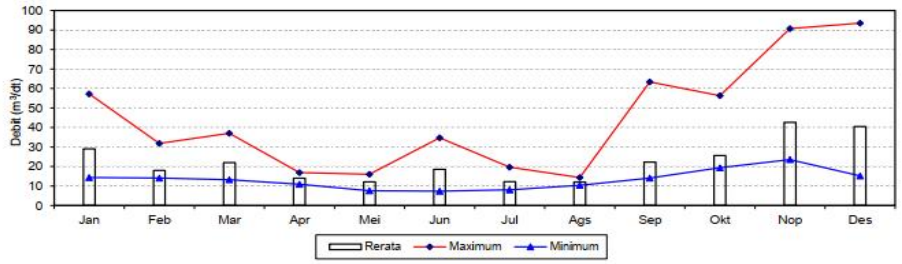
Berdasarkan data Balai Wilayah Sungai Sumatera V pada tahun 2022, sungai Batang Tapakis memiliki debit maksimum sebesar 5,32 m^3/detik pada tahun 2022 dan debit terkecil 0,13 m^3/detik. Tinggi muka air terbesar Batang Tapakis sebesar 1,78 m. Pada tahun 2022, Sungai Batang Ulakan memiliki debit terbesar sebesar 21,65 m^3/detik dan debit terkecil sebesar 10,89 m^3/detik. Tinggi muka air terbesar Sungai Batang Ulakan mencapai 3,63 meter. Data debit aliran sungai Batang Anai, Batang Tapakis dan Batang Ulakan tahun 2022 disajikan pada Gambar 2.28, Gambar 2.29 dan Gambar 2.30.

Gambar 2.28
Debit Aliran Sungai Batang Anai Tahun 2022



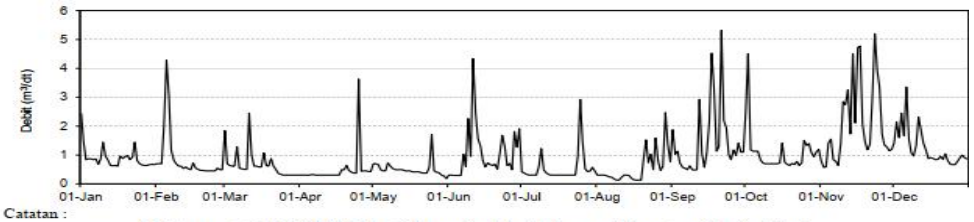
Catatan :

Perhitungan statistik tidak dilakukan bilamana jumlah data kosong dalam setengah bulan > 5 hari
Tampilan grafik debit harian negatif berarti pada tanggal tersebut tidak ada data debit harian



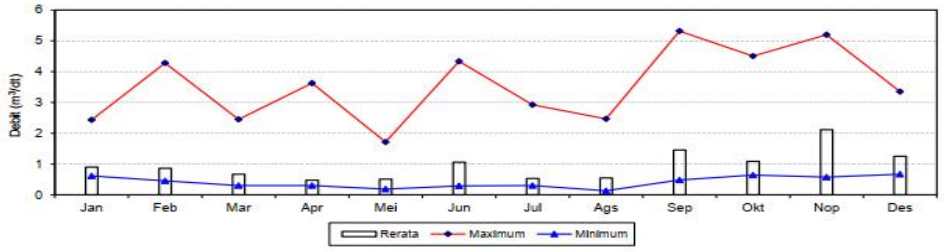
KLHS RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029, 2025

Gambar 2.29
Debit Aliran Sungai Batang Tapakis Tahun 2022



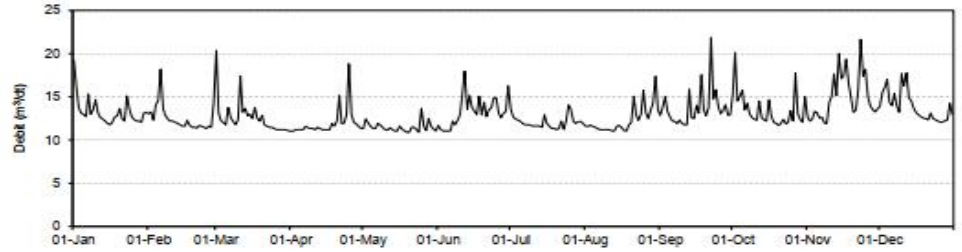
Catatan :

Perhitungan statistik tidak dilakukan bilamana jumlah data kosong dalam setengah bulan 5 hari
Tampilan grafik debit harian negatif berarti pada tanggal tersebut tidak ada data debit harian



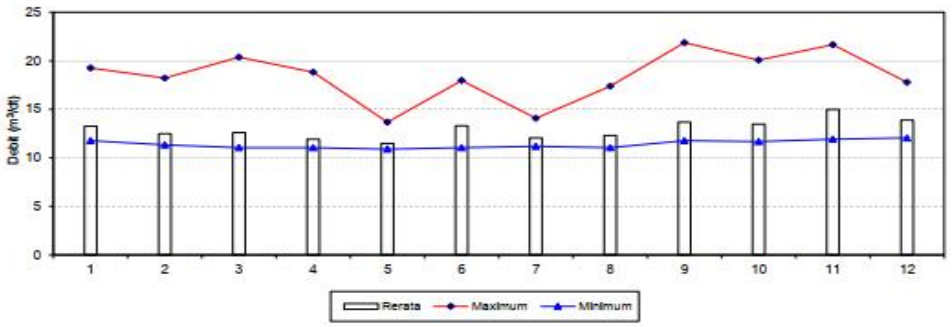
KLHS RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029, 2025

Gambar 2.30
Debit Aliran Sungai Batang Ulakan Tahun 2022



Catatan :

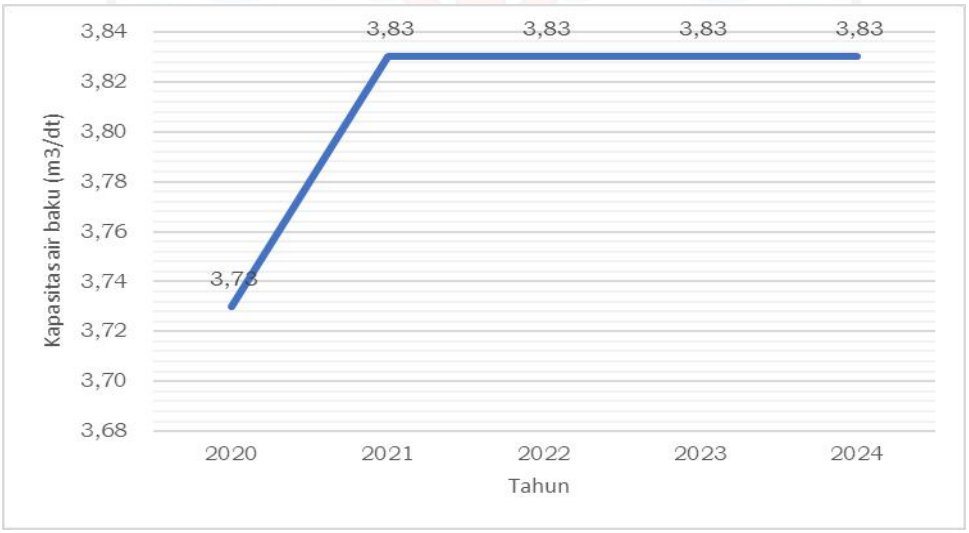
Perhitungan statistik tidak dilakukan bilamana jumlah data kosong dalam setengah bulan 5 hari
Tampilan grafik debit harian negatif berarti pada tanggal tersebut tidak ada data debit harian



KLHS RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029, 2025

Kapasitas air baku merupakan jumlah debit air yang tersedia untuk diolah atau dimanfaatkan bagi berbagai kebutuhan, seperti domestik, perkotaan, industri, dan sektor lainnya, yang berasal dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, maupun sumber air lainnya. Gambar 2.31 menunjukkan Kapasitas Air Baku Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020 s/d 2024.

Gambar 2.31
Kapasitas Air Baku Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020-2024



Sumber: PDAM Kabupaten Padang Pariaman, 2025

Berdasarkan data yang bersumber dari PDAM Kabupaten Padang Pariaman, Kapasitas air baku pada tahun 2020 tercatat sebesar 3,73 m^3/detik. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi 3,83 m^3/detik, dan angka ini tetap stabil hingga tahun 2024. Setelah adanya peningkatan pada tahun 2021, kapasitas air baku relatif konstan dalam periode 2022–2024, sehingga dapat dikatakan ketersediaan sumber air baku berada pada kondisi stabil. Dengan demikian, Kabupaten Padang Pariaman memiliki pasokan air baku yang cukup terjaga dan berkesinambungan untuk mendukung kebutuhan masyarakat maupun aktivitas ekonomi daerah.

5) Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan

Indikator Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan digunakan untuk mengukur sejauh mana rumah tangga telah memperoleh pelayanan air siap minum melalui jaringan perpipaan. Indikator ini mencerminkan tingkat ketersediaan infrastruktur dasar air bersih yang memenuhi standar kualitas, kontinuitas, dan kemudahan akses bagi masyarakat. Rumah tangga dikategorikan memiliki akses jika menggunakan air minum layak melalui jaringan perpipaan sebagai sumber utama, baik secara langsung maupun melalui sumber air layak lainnya (seperti air kemasan bermerek, air isi ulang, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, maupun air hujan) dengan leding sebagai sumber utama untuk kebutuhan mandi, mencuci, dan keperluan rumah tangga lainnya.

Gambar 2.32
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Gambar 2.32 menunjukkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum jaringan perpipaan di Kabupaten Padang Pariaman. Data untuk tahun 2020 tidak tersedia, namun pada tahun 2021 persentase akses tercatat sebesar 20,67 persen dan meningkat menjadi 22,47 persen pada tahun 2022. Selanjutnya, pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 17,88 persen dan pada tahun 2024

persentasenya tetap stagnan di angka yang sama, yaitu 17,88 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses rumah tangga terhadap sumber air minum perpipaan belum mengalami perbaikan yang berarti dalam dua tahun terakhir.

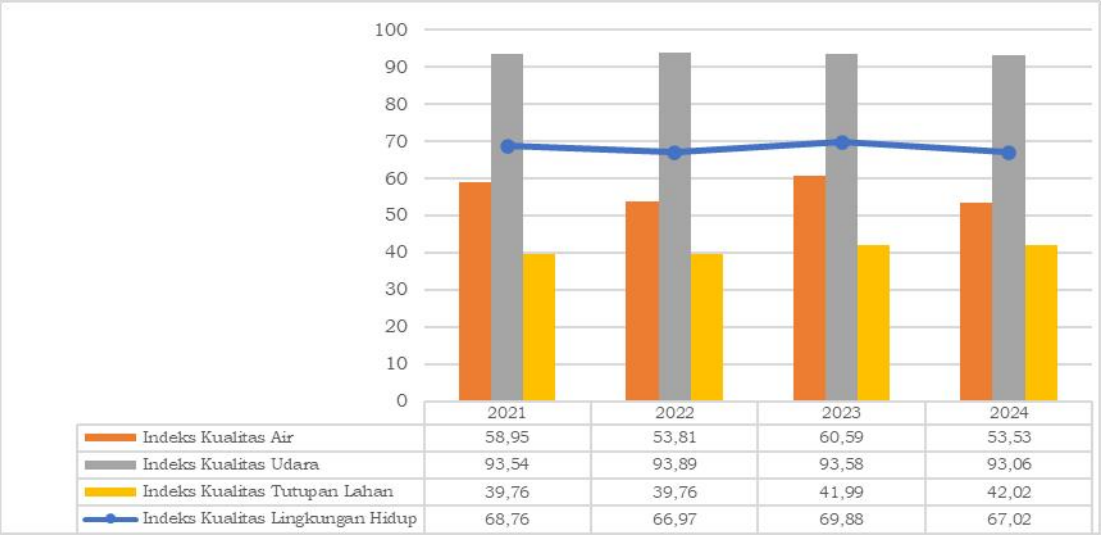
2.1.1.6 Lingkungan Hidup yang Berkualitas

1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa baik kondisi lingkungan di suatu daerah. Indeks ini dihitung berdasarkan tiga hal utama, yaitu kualitas udara, kualitas air, dan kondisi tutupan lahan (seperti hutan, sawah, dan ruang terbuka hijau). Nilai IKLH berada dalam skala 0 sampai 100. Semakin tinggi nilainya, berarti semakin baik kondisi lingkungan hidup di daerah tersebut. Sebaliknya, nilai yang rendah menunjukkan bahwa lingkungan menghadapi banyak masalah, seperti pencemaran atau kerusakan alam.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada periode 2021–2024 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2021, nilai IKLH tercatat sebesar 68,76, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 66,97. Selanjutnya, pada tahun 2023 nilai IKLH meningkat hingga 69,88, namun kembali menurun menjadi 67,02 pada tahun 2024. Perkembangan ini mencerminkan bahwa kualitas lingkungan hidup daerah belum menunjukkan tren yang konsisten serta masih dipengaruhi oleh dinamika perubahan pada masing-masing komponen penyusunnya. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Pariaman lengkap dengan komponen perhitungannya seperti Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dapat dilihat pada Gambar 2.33 berikut.

Gambar 2.33
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020-2024



	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air	58,95	53,81	60,59	53,53
Indeks Kualitas Udara	93,54	93,89	93,58	93,06
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	39,76	39,76	41,99	42,02
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,76	66,97	69,88	67,02

Sumber: DLHPKPP Kabupaten Padang Pariaman dan BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

a. Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air (IKA) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menilai kondisi mutu air di suatu wilayah berdasarkan parameter fisik, kimia, dan biologi yang dibandingkan dengan baku mutu yang berlaku. Indeks ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencemaran serta sejauh mana air dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari maupun kegiatan ekonomi secara berkelanjutan. Indeks Kualitas Air menunjukkan kecenderungan menurun. Gambar 2.33 menunjukkan nilai Indeks Kualitas Air pada tahun 2021 nilainya sebesar 58,95, turun menjadi 53,81 pada tahun 2022, sempat meningkat menjadi 60,59 pada tahun 2023, dan kembali menurun signifikan pada tahun 2024 menjadi 53,53. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas air masih menghadapi tekanan, baik akibat pencemaran maupun keterbatasan pengendalian kualitas sumber daya air.

b. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kebersihan udara berdasarkan konsentrasi pencemar utama, seperti partikulat (PM10 dan PM2.5), karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, dan ozon. Nilai indeks ini memberikan gambaran mengenai kondisi lingkungan udara serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat maupun ekosistem. Sebaliknya, Indeks Kualitas Udara relatif stabil dengan capaian tinggi pada rentang 93,54–93,89, yang mengindikasikan kualitas udara masih terjaga dengan baik sepanjang periode tersebut.

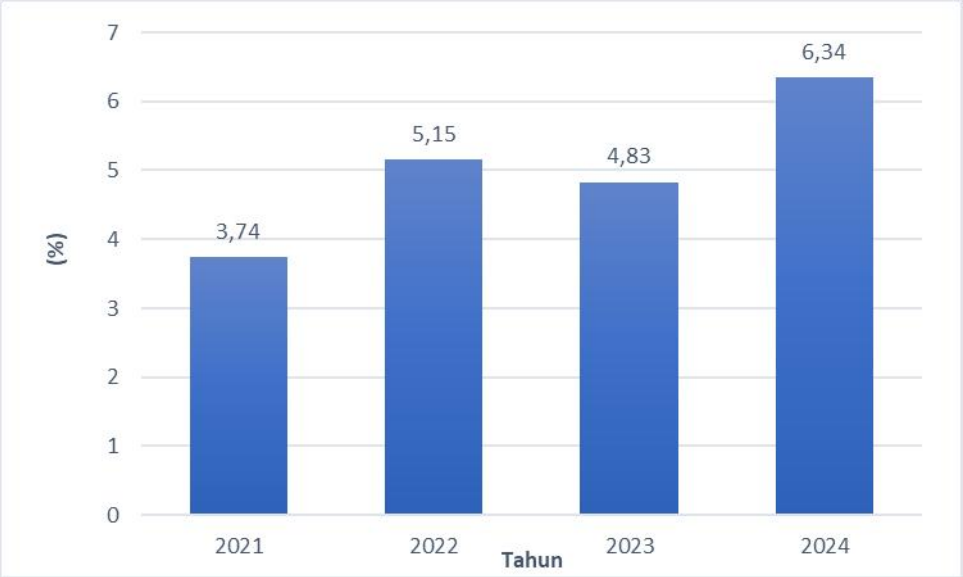
c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kondisi penutupan lahan suatu wilayah, yang mencerminkan keseimbangan ekosistem, fungsi resapan air, serta kemampuan lahan dalam mendukung keberlanjutan lingkungan hidup. Indeks ini umumnya dipengaruhi oleh keberadaan hutan, ruang terbuka hijau, lahan pertanian, maupun perubahan alih fungsi lahan. Sementara itu, Indeks Kualitas Tutupan Lahan menunjukkan tren positif. Dari 39,76 pada tahun 2021–2022, meningkat menjadi 41,99 pada tahun 2023 dan naik tipis menjadi 42,02 pada tahun 2024. Kenaikan ini menggambarkan adanya perbaikan dalam pengelolaan tutupan lahan, misalnya melalui peningkatan penghijauan, rehabilitasi lahan, atau perlindungan kawasan hijau.

2) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Akses terhadap sanitasi yang aman merupakan indikator penting dalam menilai derajat kesehatan dan kualitas lingkungan masyarakat. Sanitasi aman mencakup penggunaan fasilitas sanitasi layak yang tidak mencemari lingkungan dan menjamin pengelolaan limbah domestik yang sesuai standar kesehatan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi aman, semakin baik pula kualitas hidup dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.34.

Gambar 2.34
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (Persen) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2025

Data capaian rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020 tidak tersedia. Pada tahun 2021, capaian tersebut tercatat sebesar 3,74 persen, kemudian meningkat menjadi 5,15 persen pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 4,83 persen, sebelum kembali meningkat pada tahun 2024 dengan capaian 6,34 persen. Peningkatan ini antara lain dipengaruhi oleh pelaksanaan program pembangunan sarana sanitasi, termasuk penyediaan dan perbaikan drainase permukiman.

3) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitasi Pengolahan Sampah

Timbulan sampah adalah sampah yang dihasilkan dari berbagai sumber sampah, khususnya yang berasal dari Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga sendiri merupakan sampah yang ditimbulkan dari aktivitas sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja maupun jenis sampah spesifik. Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengelolaan sampah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.35.

Gambar 2.35
Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024



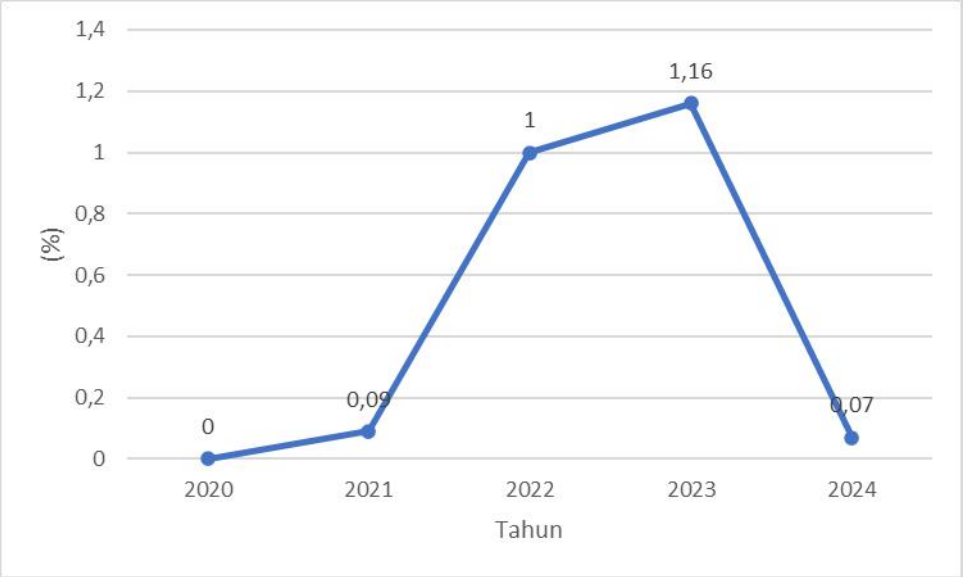
Sumber: DLHPKPP, 2025

Gambar di atas menunjukkan capaian persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah Kabupaten Padang Pariaman periode 2020–2024. Pada tahun 2020, data pengolahan sampah belum tersedia. Mulai tahun 2021, capaian pengolahan sampah tercatat sebesar 6,54 persen dan mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2022 menjadi 6,72 persen. Tren kenaikan berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian 6,86 persen. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan yang cukup signifikan, di mana capaian pengolahan sampah hanya sebesar 4,72 persen. Rendahnya capaian sampah terolah disebabkan oleh keterbatasan fasilitas pengolahan, rendahnya kesadaran pemilahan sampah dari sumber, cakupan layanan persampahan yang belum merata, serta dukungan anggaran dan regulasi yang masih terbatas.

4) Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)

Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah merupakan indikator yang menggambarkan sejauh mana sistem pengelolaan sampah telah menjangkau masyarakat secara menyeluruh. Layanan penuh berarti sampah dari rumah tangga dikumpulkan secara rutin dan terorganisir oleh pihak berwenang atau penyedia jasa resmi, dari sumber hingga ke tempat pengolahan akhir. Semakin tinggi proporsi ini, semakin baik pula kualitas layanan kebersihan dan pengelolaan lingkungan di suatu daerah. Capaian ini juga mencerminkan efektivitas tata kelola persampahan, kesadaran masyarakat, serta kesiapan infrastruktur pengangkutan dan pengolahan sampah.

Gambar 2.36
Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024



Sumber: DLHPKPP, 2025

Gambar 2.36 menunjukkan proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah di Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan data DLHKPP Kabupaten Padang Pariaman, rumah tangga yang terlayani pengumpulan sampah hanya berada pada angka 0,09% pada tahun 2021 dan 1,00% pada tahun 2022. Selanjutnya angka ini sedikit mengalami peningkatan menjadi 1,16% pada tahun 2023. Sementara pada tahun 2024 menurun menjadi 0,07%. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah di Kabupaten Padang Pariaman masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena masih minimnya sarana dan prasarana pengumpulan sampah, rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga, serta keterbatasan anggaran daerah untuk memperluas layanan pengelolaan sampah secara menyeluruh.

2.1.1.7 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

1) Indeks Risiko Bencana (IRB)

Kabupaten Padang Pariaman terletak pada dua jalur patahan lempeng dunia, yaitu Lempeng Eurasia dan Lempeng Indo-Australia, serta memiliki kondisi topografi yang dilalui oleh banyak anak sungai sehingga menjadikan wilayah ini memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Jenis bencana yang pernah maupun berpotensi terjadi di Kabupaten Padang Pariaman erat kaitannya dengan kondisi alam tersebut, antara lain banjir, tanah longsor, angin puting beliung, abrasi, gempa bumi, tsunami, serta bencana hidrometeorologi lainnya.

Berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2025, bahwa komponen dan indikator dalam menghitung indeks bahaya berbeda untuk setiap jenis bencana. Pengkajian indeks bahaya disusun berdasarkan dua komponen utama, yaitu:

1. Kemungkinan terjadinya ancaman bencana, dan
2. Besaran dampak yang pernah tercatat dari kejadian bencana di wilayah tersebut.

Dengan demikian, indeks bahaya pada dasarnya disusun berdasarkan data dan catatan sejarah kejadian bencana yang pernah terjadi di suatu daerah. Kategori skala indeks bahaya ditentukan menjadi tiga kelas, yaitu:

- 0–0,333 : kelas rendah,
- >0,333–0,666 : kelas sedang, dan
- >0,666–1 : kelas tinggi.

Tabel 2.21
Potensi Bahaya di Kabupaten Padang Pariaman

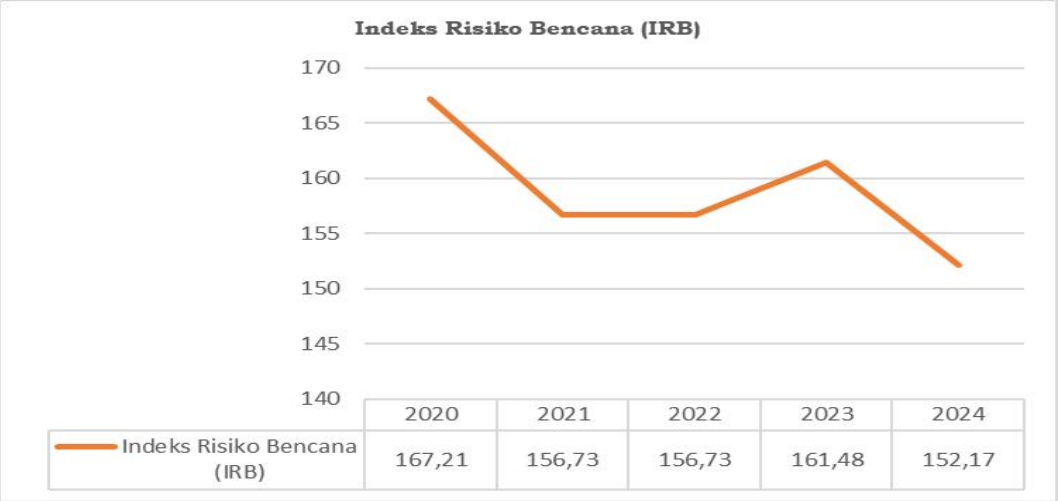
No	Jenis Bencana	Luas (Ha)	Kelas
1	Banjir Bandang	11.481,48	Tinggi
2	Banjir	33.733,40	Tinggi
3	Cuaca Ekstrim	66.513,43	Sedang
4	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	828,81	Tinggi
5	Gempabumi	133.224,00	Tinggi
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	73.427,45	Sedang
7	Kekeringan	133.224,00	Sedang
8	Letusan Gunung api Tandikek	4.321,05	Sedang
9	Tanah Longsor	43.851,97	Tinggi
10	Tsunami	6.199,08	Tinggi

Sumber Data: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2025

Tabel 2.21 menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Padang Pariaman memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap berbagai jenis bencana, khususnya banjir, gempabumi, tanah longsor, dan tsunami. Oleh karena itu, diperlukan langkah mitigasi dan penanganan bencana yang komprehensif agar risiko yang ditimbulkan dapat diminimalisir. Selain itu, dampak perubahan iklim juga semakin memperparah frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, dan angin puting beliung, sehingga memperbesar potensi risiko yang harus diantisipasi.

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021–2024 dapat dilihat pada Gambar 2.37. Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan hasil dari kajian risiko bencana yang digunakan untuk menggambarkan potensi dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh suatu bencana di suatu wilayah. Kajian risiko bencana dilakukan dengan mempertimbangkan tiga komponen utama, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi ketiga komponen tersebut menghasilkan potensi risiko bencana yang mencakup kemungkinan terpaparnya jiwa, kerugian harta benda, serta kerusakan lingkungan.

Gambar 2.37
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025

Berdasarkan dokumen Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) BNPB, Indeks Risiko Bencana Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan fluktuasi pada periode 2021–2024. Nilai indeks tercatat 156,73 pada tahun 2021 dan 2022, meningkat menjadi 161,48 pada tahun 2023, lalu menurun signifikan menjadi 152,17 pada tahun 2024. Peningkatan pada tahun 2023 mengindikasikan adanya faktor risiko yang perlu diantisipasi secara serius, sementara penurunan signifikan pada tahun 2024 mencerminkan efektivitas sebagian upaya pengurangan risiko yang telah dilakukan. Meskipun demikian, tren fluktuatif ini menegaskan perlunya langkah mitigasi yang konsisten, penguatan kapasitas daerah, serta pemantauan berkelanjutan agar penurunan indeks risiko dapat terjaga secara berkesinambungan.

Hubungan antara tren indeks risiko bencana dengan jenis dan frekuensi kejadiannya tercermin dari data perkembangan bencana di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020–2024. Bencana angin puting beliung mendominasi dengan jumlah kejadian tertinggi pada tahun 2021 sebanyak 331 kejadian, meskipun jumlahnya berfluktuasi pada tahun-tahun berikutnya. Banjir juga menjadi ancaman signifikan, dengan lonjakan kasus pada tahun 2023 sebanyak 132 kejadian sebelum menurun menjadi 108 kejadian pada tahun 2024. Kejadian longsor cenderung fluktuatif, dengan peningkatan tajam pada tahun 2024 sebanyak 68 kejadian, sedangkan erosi sungai, gempa bumi, dan kebakaran hutan tercatat dalam jumlah yang lebih kecil namun tetap memerlukan kewaspadaan.

Tabel 2.22
Perkembangan Kejadian Bencana di Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jenis Musibah					
		Banjir	Longsor	Erosi Sungai	Angin Puting Beliung	Gempa Bumi	Kebakaran hutan
1	2020	31	46	3	229	33	0
2	2021	38	34	3	331	49	0
3	2022	27	25	9	168	1	0
4	2023	132	35	6	181	0	1
5	2024	108	68	1	140	38	0

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka 2025

Tabel 2.22 di atas menunjukkan bahwa sepanjang 2020–2024, bencana angin puting beliung mendominasi kejadian di Kabupaten Padang Pariaman, disusul banjir dan longsor yang fluktuatif. Pola ini mencerminkan tingginya kerentanan daerah terhadap bencana hidrometeorologi akibat faktor geografis, perubahan iklim, dan tata guna lahan. Untuk itu, diperlukan strategi penanggulangan yang berkelanjutan melalui penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan, serta integrasi mitigasi bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah, guna mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan di masa mendatang.

2.1.1.8 Demografi

Kabupaten Padang Pariaman terletak di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, dan memiliki kondisi geografi serta demografi yang menarik, yang berperan penting dalam pembangunan daerah ini. Secara geografis, kabupaten ini terletak di bagian barat Provinsi Sumatera Barat, dengan beragam topografi dari pegunungan dan pantai yang indah. Keberagaman ini menciptakan potensi besar untuk sektor pariwisata dan pemanfaatan sumber daya alam guna meningkatkan ekonomi daerah.

Aspek demografi Kabupaten Padang Pariaman juga memiliki peran kunci dalam membentuk karakteristik wilayah ini. Dengan populasi yang terus bertambah dengan mayoritas penduduk berada pada usia produktif, Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi untuk berkembang di masa depan. Saat ini, mayoritas penduduk merupakan etnis Minangkabau dan beragama Islam. Kehidupan sosial-ekonomi masyarakat terutama bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan. Meskipun demikian, tantangan dapat muncul dalam menjaga keseimbangan dan harmoni antar kelompok masyarakat, sehingga diperlukan pendekatan bijak dalam membangun identitas dan solidaritas masyarakat.

Memahami aspek geografi dan demografi Kabupaten Padang Pariaman menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Data geografi, seperti luas wilayah, iklim, curah hujan, dan garis pantai, membantu mengoptimalkan sektor pertanian, mengelola sumber daya alam, serta memitigasi risiko bencana. Sementara itu, informasi demografi yang meliputi jumlah penduduk, distribusi usia, dan kondisi sosial-ekonomi, menjadi acuan penyediaan layanan publik yang merata. Sinergi antara data geografi dan demografi memungkinkan pemerintah daerah merumuskan kebijakan yang tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1) Jumlah dan Distribusi Penduduk

Jumlah penduduk merupakan salah satu indikator demografi yang berpengaruh besar terhadap kebutuhan pelayanan dasar, penyediaan infrastruktur, serta arah pembangunan daerah. Tabel 2.23 menyajikan perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman menurut kecamatan pada periode 2020–2025. Secara umum, jumlah penduduk kabupaten terus meningkat dari 430.626 jiwa pada tahun 2020 menjadi 467.038 jiwa pada tahun 2025, atau meningkat sekitar 36 ribu jiwa dalam lima tahun terakhir.

Tabel 2.23
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2025

No.	Kecamatan	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Batang Anai	52,844	53,570	54,409	56,755	58,206	59,681
2	Lubuak Aluang	46,895	47,144	47,477	49,152	49,996	50,848
3	Sintuak Toboh Gadang	19,268	19,347	19,464	20,062	20,361	20,663
4	Ulakan Tapakih	20,652	20,745	20,878	21,648	22,020	22,396
5	Nan Sabaris	30,035	30,255	30,531	31,661	32,266	32,878
6	2 x 11 Anam Lingkuang	18,736	1,744	18,742	19,229	19,422	19,616
7	Anam Lingkuang	20,609	20,704	20,840	21,496	21,829	22,165
8	2 x 11 Kayu Tanam	28,051	28,191	28,385	29,366	29,858	30,355
9	VII Koto	35,524	35,574	35,688	36,803	37,289	37,778
10	VII Koto Patamuan	17,481	17,604	17,762	18,380	18,715	19,054
11	VII Koto Padang Sago	8,674	8,712	8,769	9,034	9,170	9,306
12	V Koto	23,690	23,710	23,775	24,537	24,860	25,184
13	V Koto Timur	14,450	14,454	14,513	14,802	14,941	15,080
14	Sungai Limau	29,774	29,856	29,988	31,010	31,475	31,944
15	Batang Gasan	10,949	10,956	10,973	11,315	11,455	11,596
16	Sungai Garinggiang	32,021	32,200	32,438	34,299	35,141	36,000
17	IV Koto Aua Malintang	20,973	21,252	21,497	21,839	22,165	22,494
Kabupaten Padang Pariaman		**430,626**	**433,018**	**436,129**	**451,388**	**459,169**	**467,038**

Sumber : Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2021-2025

Jika ditinjau lebih rinci menurut kecamatan, pertumbuhan jumlah penduduk menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Pertumbuhan jumlah penduduk ini tidak merata antar kecamatan, melainkan terkonsentrasi di wilayah dengan daya tarik ekonomi dan aksesibilitas yang lebih baik. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang responsif terhadap dinamika kependudukan, dengan memastikan kecamatan berpenduduk padat memperoleh dukungan pelayanan dasar dan infrastruktur yang memadai, sekaligus mendorong pengembangan potensi di wilayah dengan jumlah penduduk lebih rendah agar tercapai pemerataan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Laju pertumbuhan penduduk merupakan faktor penentu utama dalam perencanaan pembangunan, karena peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan berdampak pada melonjaknya kebutuhan layanan dasar, meningkatnya tekanan terhadap daya dukung lingkungan, serta timbulnya ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dengan ketersediaan sumber daya. Oleh sebab itu, Peta Jalan Pembangunan Kependudukan disusun sebagai instrumen strategis untuk mengarahkan pengendalian laju pertumbuhan penduduk sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerataan persebaran, pembangunan keluarga, dan penguatan administrasi kependudukan. Dengan adanya peta jalan, isu pertumbuhan penduduk tidak hanya dipandang sebagai tantangan, tetapi juga peluang dalam mewujudkan bonus demografi yang produktif serta pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah maupun nasional.

Peta jalan ini merupakan instrumen operasional dari *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang disusun dalam periode lima tahunan. Dokumen ini hadir untuk menjawab kompleksitas masalah kependudukan, mulai dari besarnya jumlah dan ketidakmerataan persebaran penduduk, rendahnya kualitas sumber daya manusia, hingga tantangan bonus demografi dan meningkatnya penduduk lanjut usia. Dalam kerangka pembangunan menuju Visi Indonesia Emas 2045, peta jalan berfungsi sebagai panduan strategis yang diintegrasikan ke dalam RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja. Penyusunannya dilakukan melalui analisis PSRI (*Pressure, State, Response, Impact)* yang dilanjutkan dengan perumusan kebijakan, strategi, indikator, target tahunan, dan rencana aksi lintas sektor. Sebagai dokumen yang bersifat *living document*, peta jalan memuat 30 indikator utama yang mencakup lima dimensi pembangunan kependudukan: (1) pengendalian kuantitas penduduk, (2) peningkatan kualitas penduduk, (3) pembangunan keluarga, (4) penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta (5) integrasi data kependudukan.

2) Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk merupakan gambaran persentase kenaikan atau penurunan jumlah penduduk pada periode tertentu yang dipengaruhi oleh angka kelahiran, angka kematian, serta perpindahan penduduk (migrasi). Indikator ini penting karena tidak hanya menunjukkan dinamika demografi, tetapi juga mencerminkan tekanan dan potensi yang harus diantisipasi dalam perencanaan pembangunan. Perkembangan jumlah penduduk yang terus meningkat akan berdampak langsung terhadap kebutuhan pelayanan dasar dan infrastruktur, sementara variasi laju pertumbuhan antarwilayah menjadi faktor penentu dalam merumuskan strategi pembangunan berbasis kewilayahan.

Tabel 2.24
Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Menurut Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2025

No.	Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Batang Anai	1,79	1,84	1,55	2,55	2,56	2,56
2	Lubuak Aluang	0,93	0,71	0,70	1,73	1,73	1,72
3	Sintuak Toboh Gadang	0,82	0,55	0,59	1,5	1,5	1,5
4	Ulakan Tapakih	0,86	0,60	0,63	1,73	1,73	1,73
5	Nan Sabaris	1,13	0,98	0.90	1,92	1,92	1,92
6	2 x 11 Anam Lingkuang	0,33	0,06	0,10	1,02	1,02	1,01
7	Anam Lingkuang	0,87	0,62	0,64	1,56	1,56	1,56
8	2 x 11 Kayu Tanam	0,90	0,67	0,67	1,69	1,69	1,68
9	VII Koto	0,54	0,19	0,31	1,33	1,33	1,33
10	VII Koto Patamuan	1,11	0,94	0,88	1,83	1,83	1,83
11	VII Koto Padang Sago	0,86	0,58	0,62	1,51	1,51	1,51
12	V Koto	0,49	0,11	0,26	1,33	1,33	1,32
13	V Koto Timur	0,18	0,04	0,64	0,95	0,95	0,95
14	Sungai Limau	0,67	0,37	0,44	1,51	1,51	1,51
15	Batang Gasan	0,42	0,09	0,19	1,25	1,25	1,25
16	Sungai Garinggiang	0,96	0,75	0,73	2,47	2,47	2,46
17	IV Koto Aua Malintang	1,79	1,78	1,09	1,51	1,51	1,5
Padang Pariaman		**0,94**	**0,74**	**0,72**	**1,73**	**1,73**	**1,73**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman, 2025

Berdasarkan data kependudukan di atas, Tabel 2.24 menunjukkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Padang Pariaman periode 2020–2025. Pertumbuhan penduduk memperlihatkan pola fluktuatif, yaitu melambat dari 0,94 persen pada tahun 2020 menjadi 0,72 persen pada 2022, kemudian meningkat signifikan hingga mencapai 1,73 persen pada 2023 dan bertahan sampai 2025. Dinamika ini tidak hanya mencerminkan keseimbangan alami antara kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk, tetapi juga mengindikasikan adanya konsentrasi pertumbuhan di wilayah tertentu yang memiliki daya tarik sosial-ekonomi lebih tinggi, sehingga perlu diantisipasi dengan perencanaan yang berbasis kewilayahan.

3) Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan ukuran persebaran jumlah penduduk per kilometer persegi luas wilayah. Tingginya kepadatan di suatu wilayah berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan kompleks, seperti keterbatasan ruang permukiman, tekanan terhadap pelayanan dasar, dan penurunan kualitas lingkungan. Kondisi ini berimplikasi langsung terhadap kualitas hidup masyarakat, yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui indikator pengeluaran per kapita, umur harapan hidup, serta rata-rata lama sekolah. Oleh karena itu, peningkatan kepadatan penduduk perlu diimbangi dengan pemerataan fasilitas dasar dan peningkatan kualitas layanan publik agar mampu mendorong peningkatan IPM serta pemerataan pembangunan antar wilayah.

Tabel 2.25
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk per km²				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Batang Anai	321	325	330	354	363
2	Lubuak Aluang	376	378	381	401	408
3	Sintuak Toboh Gadang	590	593	596	624	633
4	Ulakan Tapakih	898	902	907	957	973
5	Nan Sabaris	454	457	461	487	497
6	2x11 Anam Lingkuang	461	461	461	478	483
7	Anam Lingkuang	601	604	608	637	647
8	2x11 Kayu Tanam	149	150	151	158	161
9	VII Koto	560	561	563	581	589
10	VII Koto Patamuan	224	226	228	240	244
11	VII Koto Padang Sago	248	249	251	263	266
12	V Koto	354	354	355	373	378
13	V Koto Timur	217	218	218	224	226
14	Sungai Limau	330	330	332	348	354
15	Batang Gasan	144	144	144	150	152
16	Sungai Garinggiang	297	299	301	326	334
17	IV Koto Aua Malintang	249	252	255	263	267
Kepadatan Penduduk (Jiwa/km²)		**321**	**322**	**325**	**342**	**348**

Sumber : Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2021-2025

Jika dilihat berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk pada tahun 2025, kepadatan penduduk Kabupaten Padang Pariaman tercatat sebesar 384 jiwa/km^2. Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu Ulakan Tapakih dengan kepadatan sebesar 973 jiwa/km^2 dan Batang Gasan memiliki kepadatan terendah yaitu sebesar 152 jiwa/km^2. Ketimpangan kepadatan ini menunjukkan adanya konsentrasi penduduk pada wilayah tertentu yang berimplikasi terhadap kebutuhan infrastruktur, pelayanan publik, serta ketersediaan lahan. Oleh karena itu, pengendalian persebaran penduduk, perencanaan tata ruang, dan pemerataan pembangunan antarwilayah menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan daerah.

4) Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Distribusi penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan adanya dinamika demografi yang beragam. Secara umum, jumlah penduduk terus meningkat dari tahun 2024 ke 2025, dengan variasi yang berbeda pada setiap kelompok usia. Selengkapnya, perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada Tabel 2.26.

Tabel 2.26
Jumlah Penduduk Kabupaten Padang Pariaman Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020-2025

No.	Kelompok Umur	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	0-4	34,758	34,668	34,644	37,766	39,157	40,915
2.	5-9	36,291	35,899	35,716	35,949	35,928	35,650
3.	10-14	39,782	39,195	38,540	38,258	37,773	37,434
4.	15-19	40,834	40,634	40,546	40,918	40,844	40,614
5.	20-24	40,422	40,107	39,842	41,011	41,078	41,152
6.	25-29	35,908	35,956	36,008	39,726	40,634	41,278
7.	30-34	29,829	30,061	30,327	34,347	36,031	37,666
8.	35-39	26,678	26,932	27,227	28,452	29,471	30,712
9.	40-44	26,085	26,327	26,596	26,470	26,695	27,016
10.	45-49	25,241	25,594	25,999	26,107	26,343	26,558
11.	50-54	23,097	23,444	23,811	24,528	24,969	25,379
12.	55-59	19,962	20,370	20,822	21,518	22,121	22,688
13.	60-64	17,630	18,054	18,486	18,409	18,689	19,054
14.	65-69	34,109	14,323	14,880	15,230	15,728	16,147
15.	70-74		10,911	11,676	10,885	11,338	11,807
16.	75+		10,543	11,676	11,814	12,37	12,968
		430,626	**433,018**	**362,540**	**451,388**	**459,169**	**467,038**

Sumber : Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2021-2025

Peningkatan signifikan terlihat pada kelompok usia 0–4 tahun, yang menunjukkan angka kelahiran masih tinggi. Namun, kelompok usia 5–9 tahun dan 10–14 tahun justru mengalami sedikit penurunan, mengindikasikan adanya perlambatan angka kelahiran pada beberapa tahun sebelumnya. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan layanan kesehatan ibu dan anak serta pendidikan usia dini untuk memastikan kualitas generasi mendatang tetap terjaga.

Komposisi penduduk usia produktif terus mendominasi struktur penduduk Kabupaten Padang Pariaman, yakni sekitar 67–68 persen dari total penduduk pada periode 2020–2025. Kondisi ini mencerminkan adanya bonus demografi, di mana proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Hal ini menjadi potensi penting bagi pembangunan daerah, sepanjang dapat diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, keterampilan, serta penciptaan lapangan kerja yang memadai.

Kelompok usia lanjut (65 tahun ke atas) turut mengalami peningkatan, mencerminkan membaiknya kualitas kesehatan dan harapan hidup masyarakat. Namun, tren ini juga membawa tantangan dalam penyediaan layanan kesehatan, jaminan sosial, dan dukungan kesejahteraan bagi lansia. Secara keseluruhan, pola demografi ini menuntut strategi pembangunan yang terintegrasi, mulai dari pendidikan dan ketenagakerjaan hingga kesehatan, agar kesejahteraan seluruh kelompok umur dapat terjamin di masa depan.

5) Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan jenis kelamin pada periode 2020–2025 memperlihatkan kondisi yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan. Keseimbangan ini menunjukkan dinamika demografi yang wajar serta memberikan gambaran bahwa kebutuhan pembangunan daerah, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, maupun layanan sosial, harus dirancang secara inklusif dan merata bagi seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin. Jumlah Penduduk Kabupaten Padang Pariaman Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024-2025 dapat dilihat pada Tabel 2.27.

Tabel 2.27
Jumlah Penduduk Kabupaten Padang Pariaman Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Laki						Perempuan					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Batang Anai	26,741	27,084	27,484	28,762	29,503	30,524	26,103	26,486	26,925	27,993	28,703	29,427
2	Lubuak Aluang	23,725	23,839	23,996	24,911	25,346	25,785	23,170	23,305	23,481	24,241	24,65	25,063
3	Sintuak Toboh Gadang	9,465	9,484	9,519	9,818	9,949	10,08	9,803	9,863	9,945	10,244	10,412	10,583
4	Ulakan Tapakih	10,328	10,409	10,509	10,998	11,243	11,491	10,324	10,336	10,369	10,650	10,777	10,905
5	Nan Sabaris	14,877	15,007	15,165	15,603	15,869	16,138	15,158	15,248	15,366	16,058	16,397	16,74
6	2 x 11 Anam Lingkuang	9,200	9,202	9,174	9,435	9,524	9,613	9,536	9,542	9,568	9,794	9,898	10,003
7	Anam Lingkuang	10,305	10,349	10,411	10,784	10,961	11,138	10,304	10,355	10,429	10,712	10,868	11,027
8	2 x 11 Kayu Tanam	14,057	14,126	14,222	14,795	15,065	15,338	13,994	14,065	14,163	14,571	14,793	15,017
9	VII Koto	17,474	17,525	17,607	18,278	18,574	18,872	18,050	18,049	18,081	18,525	18,715	18,906
10	VII Koto Patamuan	8,712	8,773	8,850	9,190	9,365	9,542	8,769	8,831	8,912	9,190	93,500	9,512
11	VII Koto Padang Sago	4,246	4,276	4,314	44,557	4,535	4,613	4,428	4,436	4,455	4,577	4,635	4,693
12	V Koto	11,968	11,979	12,012	12,438	12,611	12,786	11,722	11,731	11,763	12,099	12,249	12,398
13	V Koto Timur	7,211	7,213	7,211	7,439	7,525	7,611	7,239	7,241	7,302	7,363	7,416	7,469
14	Sungai Limau	14,941	14,995	15,074	15,681	15,952	16,226	14,833	14,861	14,914	15,329	15,523	15,718
15	Batang Gasan	5,487	5,492	5,512	5,716	5,800	5,885	5,462	5,464	5,461	5,599	5,655	5,711
16	Sungai Garinggiang	16,016	16,147	16,307	17,398	17,903	18,421	16,055	16,053	16,131	16,901	17,238	17,579
17	IV Koto Aua Malintang	10,285	10,408	10,566	10,732	10,897	11,063	10,688	10,844	10,931	11,107	11,268	11,431
Kabupaten Padang Pariaman		**215,038**	**216,308**	**217,933**	**266,535**	**230,622**	**234,856**	**239,090**	**243,324**	**218,196**	**224,953**	**228,547**	**232,182**

Sumber : Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2021-2025

Berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman menurut kecamatan dan jenis kelamin Tahun 2020–2025, terlihat adanya tren peningkatan jumlah penduduk baik laki-laki maupun perempuan di hampir semua kecamatan. Pada tahun 2020 jumlah penduduk laki-laki tercatat sebanyak 215,0 ribu jiwa dan meningkat menjadi 234,9 ribu jiwa pada tahun 2025. Sementara itu, jumlah penduduk perempuan pada periode yang sama juga mengalami kenaikan dari 218,2 ribu jiwa pada tahun 2020 menjadi 232,2 ribu jiwa pada tahun 2025.

6) Rasio Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam suatu wilayah pada periode

tertentu, yang dinyatakan dalam angka per 100 penduduk perempuan. Nilai rasio di atas 100 menunjukkan jumlah laki-laki lebih banyak dibanding perempuan, sedangkan nilai di bawah 100 menandakan jumlah perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Selengkapnya, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Padang Pariaman pada periode 2020–2024 dapat dilihat pada Tabel 2.28.

Tabel 2.28
Rasio Jenis Kelamin
Tahun 2024-2025

No.	Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Batang Anai	102.44	102.26	102.08	102.75	102.79
2	Lubuak Aluang	102.4	102.29	102.19	102.76	102.82
3	Sintuak Toboh Gadang	96.55	96.16	95.72	95.84	95.55
4	Ulakan Tapakih	100.04	100.71	101.35	103.27	104.32
5	Nan Sabaris	98.15	98.42	98.69	97.17	96.78
6	2 x 11 Anam Lingkuang	96.48	96.44	95.88	96.33	96.22
7	Anam Lingkuang	100.01	99.94	99.83	100.67	100.86
8	2 x 11 Kayu Tanam	100.45	100.43	100.42	101.54	101.84
9	VII Koto	96.81	97.1	97.38	98.67	99.25
10	VII Koto Patamuan	99.35	99.34	99.30	100	100.16
11	VII Koto Padang Sago	95.89	96.39	96.84	97.38	97.84
12	V Koto	102.10	102.11	102.12	102.8	102.96
13	V Koto Timur	99.61	99.61	98.75	101.03	101.47
14	Sungai Limau	100.73	100.9	101.07	102.3	102.76
15	Batang Gasan	100.46	100.51	100.93	102.09	102.56
16	Sungai Garinggiang	100.07	100.59	101.09	102.94	103.86
17	IV Koto Aua Malintang	96.23	95.98	96.66	96.62	96.71
Kabupaten Padang Pariaman		**99.74**	**99.81**	**99.88**	**100.66**	**100.91**

Sumber : Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2021-2025

Angka rasio jenis kelamin di tingkat kabupaten berada pada nilai 99,74 pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 100,91 pada tahun 2024, yang menandakan jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan. Rasio jenis kelamin 100,91 berarti bahwa untuk setiap 100 penduduk perempuan, terdapat sekitar 101 penduduk laki-laki. Peningkatan angka rasio jenis kelamin ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sosial budaya, serta angka kelahiran dan kematian di masing-masing wilayah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dinamika rasio jenis kelamin ini merupakan pertimbangan penting dalam perencanaan pembangunan, termasuk dalam sektor pendidikan, ketenagakerjaan, dan kesehatan, guna memastikan keseimbangan dan kesejahteraan penduduk di setiap kecamatan.

7) Proyeksi dan analisis penduduk 5 (lima) tahun 2025-2030

Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman untuk periode 2025–2030 dihitung berdasarkan tren pertumbuhan sebelumnya. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi kecamatan dengan tingkat pertumbuhan tinggi maupun rendah serta implikasinya terhadap

kebutuhan fasilitas umum, lapangan kerja, dan pengelolaan sumber daya. Proyeksi ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah menyusun strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman. Selengkapnya, proyeksi jumlah penduduk dapat dilihat pada Tabel 2.29.

Tabel 2.29
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2025-2030

No.	Kecamatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Batang Anai	56.756	57.703	58.667	59.646	60.642	61.654
2	Lubuak Aluang	50.986	51.837	52.703	53.583	54.477	55.387
3	Sintuak Toboh Gadang	20.959	21.309	21.665	22.026	22.394	22.768
4	Ulakan Tapakih	22.388	22.762	23.142	23.528	23.921	24.320
5	Nan Sabaris	32.486	33.028	33.580	34.140	34.710	35.290
6	2 x 11 Anam Lingkung	20.508	20.850	21.198	21.552	21.911	22.277
7	Anam Lingkuang	22.411	22.785	23.165	23.552	23.945	24.344
8	2 x 11 Kayu Tanam	30.415	30.923	31.439	31.963	32.497	33.039
9	VII Koto	38.718	39.364	40.021	40.689	41.368	42.058
10	VII Koto Patamuan	18.966	19.282	19.604	19.931	20.264	20.602
11	VII Koto Padang Sago	9.435	9.592	9.753	9.915	10.081	10.249
12	V Koto	25.830	26.257	26.691	27.132	27.580	28.036
13	V Koto Timur	15.863	16.128	16.397	16.671	16.949	17.232
14	Sungai Limau	32.323	32.862	33.411	33.969	34.536	35.112
15	Batang Gasan	11.956	12.156	12.359	12.565	12.775	12.988
16	Sungai Garingging	34.148	34.718	35.297	35.886	36.485	37.094
17	IV Koto Aua Malintang	22.892	23.274	23.662	24.057	24.459	24.867
	Jumlah	**467.040**	**474.830**	**482.754**	**490.805**	**498.994**	**507.317**

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2025 (diolah)

Jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Rata-rata pertumbuhan penduduk sekitar 1,67% per tahun, jika tren ini berlanjut maka pada tahun 2030 jumlah penduduk bisa mencapai 507.317 jiwa. Kecamatan dengan pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan kecamatan lainnya adalah Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Sungai Garinggiang, Kecamatan Lubuak Aluang dan Kecamatan Nan Sabaris. Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika kependudukan di Kabupaten Padang Pariaman ke depan akan semakin kompleks, sehingga diperlukan perencanaan pembangunan yang komprehensif agar pertumbuhan jumlah penduduk dapat diimbangi dengan penyediaan layanan dasar, peningkatan infrastruktur, serta penciptaan lapangan kerja yang memadai. Dengan demikian, pertumbuhan penduduk tidak hanya menjadi tantangan, tetapi juga potensi untuk mendorong pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu dimensi penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), karena mencerminkan tujuan utama pembangunan yaitu meningkatkan kualitas hidup penduduk secara menyeluruh. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, perumahan layak, akses terhadap pangan dan gizi, serta jaminan sosial. Selain itu, aspek kesejahteraan juga menekankan pada peningkatan kesempatan kerja yang produktif, perlindungan kelompok rentan, serta penguatan ketahanan keluarga dan komunitas. Dengan demikian, arah kebijakan pembangunan daerah dalam bidang kesejahteraan harus mampu menciptakan kondisi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sehingga setiap lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara nyata.

2.1.2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi regional maupun nasional, sehingga penting untuk melihat perbandingan kinerja antarwilayah. Dengan membandingkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman dengan Provinsi Sumatera Barat dan nasional, dapat diperoleh gambaran mengenai posisi dan dinamika ekonomi daerah ini dalam konteks yang lebih luas.

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan dinamika yang berbeda dibandingkan dengan tren di tingkat provinsi Sumatera Barat maupun nasional. Pada tahun 2020, Padang Pariaman mengalami kontraksi yang cukup dalam, yaitu lebih besar dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional. Namun, sejak tahun 2021, pertumbuhan ekonomi daerah ini mulai pulih dan bahkan mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan Sumatera Barat dan nasional pada tahun 2022. Meski demikian, pada tahun 2023 dan 2024 laju pertumbuhan ekonomi Padang Pariaman mengalami perlambatan dan cenderung berada di bawah capaian nasional, meskipun masih relatif sejalan dengan tren perlambatan yang juga terjadi di tingkat provinsi. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Padang Pariaman, Sumatera Barat, dan nasional tahun 2020–2024 dapat dilihat pada Tabel 2.30.

Tabel 2.30
Pertumbuhan Ekonomi Padang Pariaman, Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Padang Pariaman	-10,46	2,15	6,83	5,46	4,57
Sumatera Barat	-2,07	3,29	4,36	4,62	4,36
Nasional	-1,61	3,7	5,3	5,1	5

Sumber: BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2025

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020 mengalami kontraksi ekonomi paling dalam yaitu -10,46 persen, jauh lebih rendah dibandingkan Sumatera Barat (-2,07 persen) maupun nasional (-1,61 persen). Hal ini mengindikasikan bahwa dampak pandemi *COVID*-19 terhadap aktivitas ekonomi lokal di Padang Pariaman relatif lebih besar. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh sektor Transportasi dan Pergudangan yang terkontraksi hingga -47,30 persen, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar -9,12 persen, sektor Industri Pengolahan sebesar -1,88 persen, serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar -0,60 persen. Kondisi ini mencerminkan dampak signifikan pandemi *COVID*-19 terhadap aktivitas ekonomi daerah.

Memasuki tahun 2021, perekonomian Kabupaten Padang Pariaman mulai menunjukkan tren pemulihan setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020, dengan pertumbuhan sebesar 2,15 persen. Pemulihan ini didorong oleh peningkatan kinerja sektor Industri Pengolahan sebesar 4,97 persen, sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 4,58 persen, serta sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh cukup tinggi sebesar 8,52 persen, meskipun sektor Transportasi dan Pergudangan masih mengalami kontraksi -10,54 persen, namun dengan perbaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Tren positif tersebut semakin menguat pada tahun 2022 dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,83 persen, didukung oleh lonjakan kinerja sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 31,41 persen, sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 24,26 persen, sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 5,50 persen, serta sektor Industri Pengolahan sebesar 2,68 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2023–2024 masih berada pada tren positif, meskipun menunjukkan perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, perekonomian Kabupaten Padang Pariaman tumbuh sebesar 5,46 persen, ditopang oleh sektor Transportasi dan Pergudangan (11,92 persen), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (9,00 persen), serta Konstruksi (7,77 persen). Namun pada tahun 2024, laju pertumbuhan menurun menjadi 4,57 persen, seiring perlambatan pada sektor Transportasi dan Pergudangan (4,72 persen) serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (3,65 persen). Meskipun demikian, sektor Konstruksi meningkat menjadi 9,29 persen, Pertambangan dan Penggalian tumbuh 6,40 persen, dan Jasa Keuangan dan Asuransi naik 6,85 persen. Hal ini menunjukkan pergeseran sumber pertumbuhan ekonomi dari sektor berbasis mobilitas masyarakat ke arah sektor konstruksi, jasa keuangan, dan pertambangan. Selengkapnya, Secara lebih rinci, laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha, beserta distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020–2024, dapat dilihat pada Tabel 2.31 dan Tabel 2.32.

Tabel 2.31
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020–2024

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,29	2,28	6,19	3,87	1,91
2.	Pertambangan dan Penggalian	-1,76	3,28	2,19	4,16	6,40
3.	Industri Pengolahan	-1,88	4,97	2,68	3,93	3,09
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	5,21	3,38	3,59	3,32	3,25
5.	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3,58	3,12	2,8	2,89	3,04
6.	Konstruksi	-4,28	3,78	2,02	7,77	9,29
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,6	4,58	5,5	4,42	4,95
8.	Transportasi dan Pergudangan	-47,3	-10,54	24,26	11,92	4,72
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-9,12	8,52	31,41	9,00	3,65
10.	Informasi dan Komunikasi	8,78	7,11	6,57	6,63	5,00
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,1	8,2	6,16	4,40	6,85
12.	Real Estat	1,12	1,75	5,75	5,51	5,72
13.	Jasa Perusahaan	-1,34	1,03	7,24	5,98	4,20
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-1,72	3,3	-0,81	1,82	8,18
15.	Jasa Pendidikan	5,53	4,2	5,27	1,81	2,67
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,99	8,72	4,54	7,45	4,62
17.	Jasa Lainnya	-6,24	5,16	11,72	7,80	7,15
	PDRB Padang Pariaman	**-10,46**	**2,15**	**6,83**	**5,46**	**4,57**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman, 2025

Tabel 2.32
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,68	22,65	21,37	20,55	20,2
2.	Pertambangan dan Penggalian	7,42	7,54	6,71	6,48	6,32
3.	Industri Pengolahan	11,19	11,95	10,92	10,48	10,31
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
5.	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
6.	Konstruksi	10,16	10,66	9,82	9,83	10,15
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,54	10,65	10,44	10,19	10,19
8.	Transportasi dan Pergudangan	16,29	13,57	19,34	21,97	22,43
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,05	1,13	1,27	1,27	1,25
10.	Informasi dan Komunikasi	3,67	3,96	3,75	3,63	3,61
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,64	1,77	1,63	1,53	1,54
12.	Real Estat	1,1	1,12	1,03	1,02	1,02

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
13.	Jasa Perusahaan	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5,68	6,1	5,36	5,06	5,13
15.	Jasa Pendidikan	6,19	6,4	5,97	5,59	5,45
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,71	0,77	0,7	0,7	0,7
17.	Jasa Lainnya	1,5	1,56	1,53	1,54	1,57
	PDRB Padang Pariaman	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman, 2025

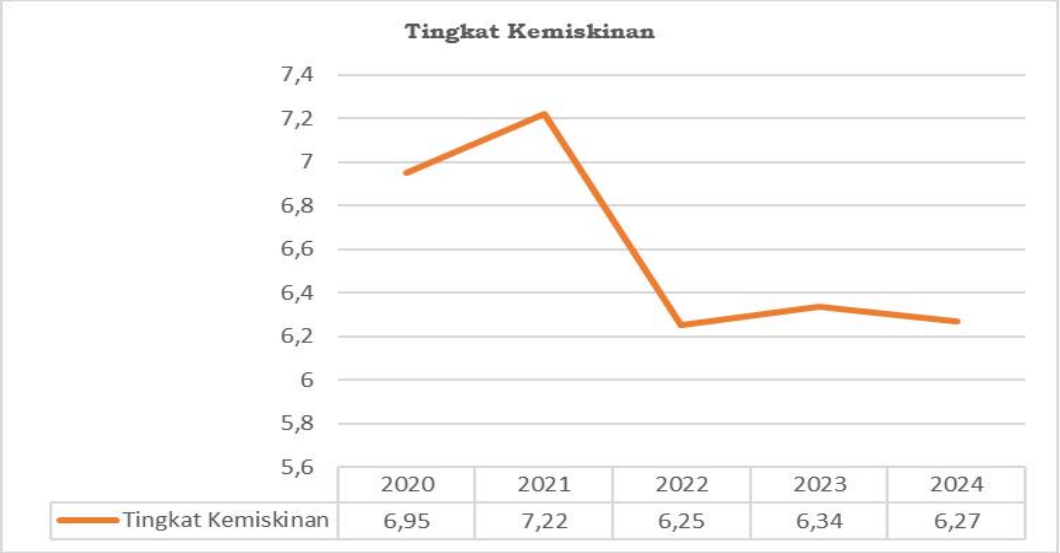
Jika dilihat pada distribusi PDRB menurut lapangan usaha, terjadi pergeseran struktur ekonomi Kabupaten Padang Pariaman sepanjang tahun 2020–2024. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang pada tahun 2020 berkontribusi sebesar 22,68% terus menurun hingga 20,20% pada tahun 2024. Hal yang sama terjadi pada Pertambangan dan Penggalian yang turun dari 7,42% menjadi 6,32%, serta Industri Pengolahan yang melemah dari 11,19% pada tahun 2020 menjadi 10,31% pada tahun 2024. Penurunan kontribusi sektor-sektor ini menunjukkan adanya pergeseran dari sektor primer menuju sektor lain, seiring dengan perubahan kebutuhan dan perkembangan pembangunan daerah.

Di sisi lain, beberapa sektor memperlihatkan tren peningkatan kontribusi. Transportasi dan Pergudangan tumbuh pesat dari 16,29% pada tahun 2020 menjadi 22,43% pada tahun 2024, menegaskan peran Kabupaten Padang Pariaman sebagai wilayah strategis dalam mobilitas barang dan jasa. Konstruksi relatif stabil dan meningkat kembali menjadi 10,15% pada tahun 2024, sementara Jasa Lainnya juga menunjukkan kenaikan meski kecil, dari 1,50% menjadi 1,57%. Sektor-sektor jasa seperti perdagangan, informasi dan komunikasi, serta administrasi pemerintahan dan pendidikan tetap memberikan kontribusi signifikan meskipun cenderung stagnan atau sedikit menurun. Pergeseran ini menggambarkan bahwa perekonomian Kabupaten Padang Pariaman secara perlahan bertransformasi dari dominasi sektor primer menuju sektor jasa dan transportasi yang semakin berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

2.1.2.2 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan indikator penting dalam mengukur kesejahteraan sosial dan keberhasilan pembangunan. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pendapatan, tetapi juga mencerminkan keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan yang layak. Selanjutnya, pengukuran tingkat kemiskinan juga perlu dilengkapi dengan indikator lain seperti Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Selain itu, Isu kemiskinan ekstrem, yaitu penduduk dengan pengeluaran jauh di bawah garis kemiskinan, menjadi perhatian utama karena menunjukkan kerentanan serius yang memerlukan intervensi kebijakan terarah. Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.38.

Gambar 2.38
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020-2024



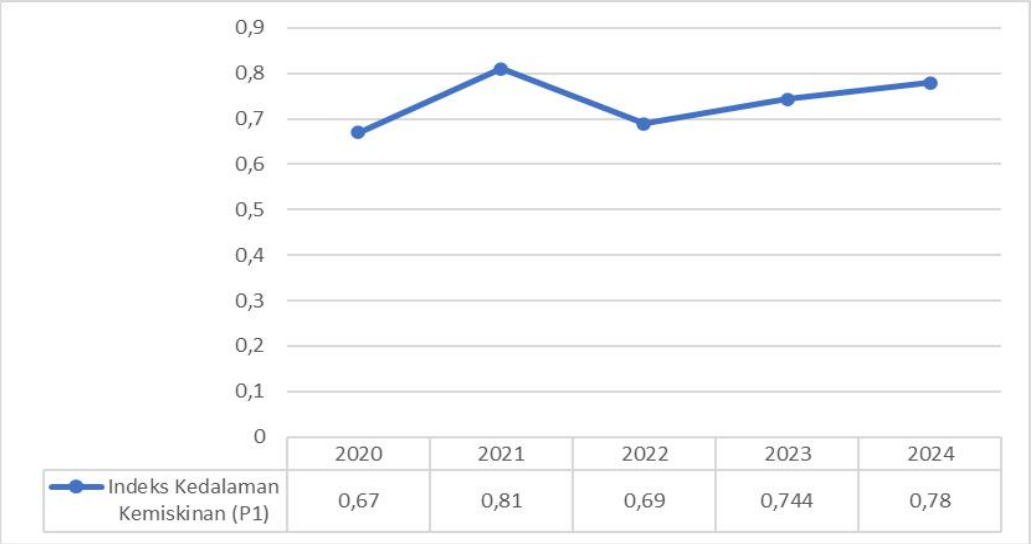
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman, 2025

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman pada periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2020 angka kemiskinan tercatat sebesar 6,95 persen dan meningkat menjadi 7,22 persen pada tahun 2021 akibat dampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2022, angka kemiskinan menurun signifikan menjadi 6,25 persen seiring pemulihan ekonomi dan dukungan program bantuan sosial. Namun, pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 6,34 persen sebelum mengalami perbaikan pada tahun 2024 dengan capaian 6,27 persen. Perkembangan ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah melalui pemulihan ekonomi dan program perlindungan sosial telah membantu menahan laju kemiskinan, meskipun tantangan masih ada. Selanjutnya, diperlukan penguatan ketahanan ekonomi masyarakat, pemberdayaan sektor informal, serta pemerataan akses kesempatan kerja untuk mendorong penurunan kemiskinan yang lebih konsisten dan berkelanjutan.

a. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Gambar 2.39 menunjukkan indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012-2023. Indeks P1 meningkat dari tahun 2020 yaitu 0,67 menjadi 0,74 pada tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin masih jauh di bawah garis kemiskinan.

Gambar 2.39
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020-2024



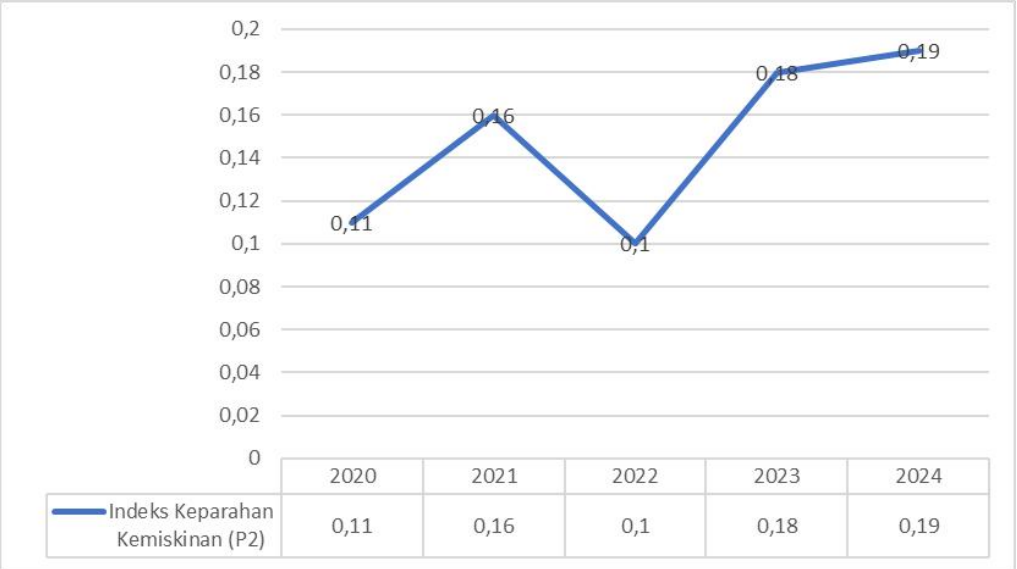
Sumber: BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2025

Selain itu, jika dilihat dari kecenderungan lima tahun terakhir, fluktuasi indeks kedalaman kemiskinan memperlihatkan bahwa kondisi penduduk miskin sangat rentan terhadap perubahan ekonomi maupun sosial, seperti inflasi, ketersediaan lapangan kerja, hingga efektivitas program bantuan pemerintah. Kenaikan nilai indeks pada 2023 dan 2024 menandakan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin mungkin menurun, tingkat kesenjangan pengeluaran di antara mereka masih cukup besar. Oleh karena itu, selain fokus pada penurunan angka kemiskinan, upaya yang lebih strategis diperlukan untuk menekan kedalaman kemiskinan dengan memastikan keberlanjutan pendapatan rumah tangga miskin, meningkatkan produktivitas, dan memperluas akses mereka terhadap layanan dasar yang berkualitas.

b. Indeks Keparahan Kemiskinan

Grafik Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020–2024 menunjukkan tren yang berfluktuasi. Pada tahun 2020, nilai indeks tercatat sebesar 0,11 dan meningkat pada 2021 menjadi 0,16. Namun, pada 2022, indeks turun kembali ke angka 0,10, yang menandakan adanya perbaikan kondisi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Akan tetapi, kondisi tersebut tidak berlanjut, karena pada tahun 2023 indeks kembali naik cukup tajam menjadi 0,18 dan berlanjut meningkat pada 2024 menjadi 0,19. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020–2024 dapat dilihat pada Gambar 2.40.

Gambar 2.40
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020-2024



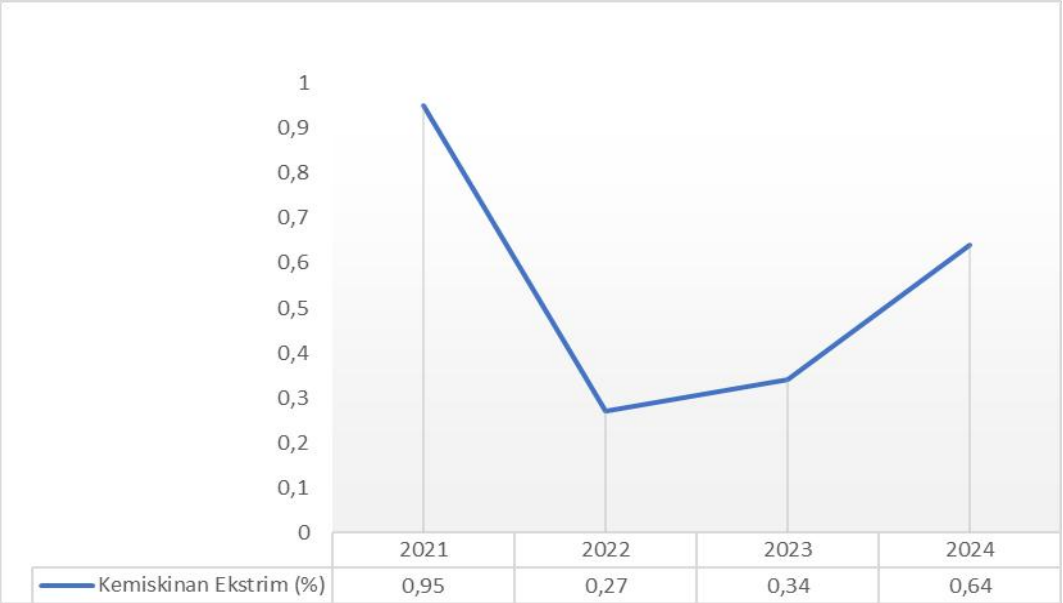
Sumber: BPS Kabupaten Padang Pariaman (diolah), 2025

Grafik Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2020–2024 menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin masih menjadi tantangan serius, dengan kecenderungan meningkat pada dua tahun terakhir. Setelah sempat menurun pada 2022, tren kenaikan kembali pada 2023 dan 2024 mengindikasikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan perlu diarahkan tidak hanya pada penurunan jumlah penduduk miskin, tetapi juga pada pengurangan kesenjangan pengeluaran, agar kesejahteraan masyarakat dapat lebih merata.

c. Kemiskinan Ekstrim

Persentase kemiskinan ekstrim di Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan dinamika fluktuatif selama periode 2021–2024. Pada tahun 2021, persentasenya tercatat sebesar 0,95%, kemudian mengalami penurunan signifikan menjadi 0,27% pada 2022, yang mencerminkan efektivitas awal program perlindungan sosial serta peningkatan akses ekonomi bagi kelompok masyarakat paling rentan. Namun demikian, pada tahun 2023, persentase tersebut meningkat tipis menjadi 0,34% dan kembali naik menjadi 0,64% pada 2024. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakstabilan ekonomi yang berdampak pada kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrim. Kemiskinan Ekstrim Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021–2024 dapat dilihat pada Gambar 2.41.

Gambar 2.41
Kemiskinan Ekstrim Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020-2024

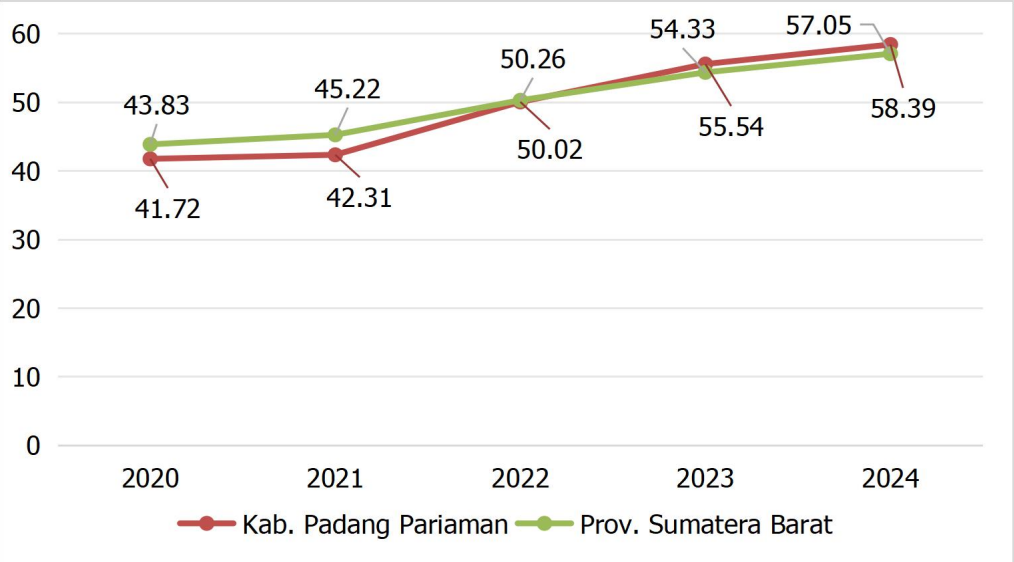


Perkembangan data kemiskinan ekstrim di atas menegaskan pentingnya pelaksanaan upaya berkelanjutan dalam menurunkan kemiskinan ekstrim, meliputi penguatan perlindungan sosial, peningkatan akses terhadap kegiatan ekonomi produktif, serta pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. Selain itu, pemantauan dan evaluasi program secara berkala menjadi sangat penting untuk memastikan penanganan kemiskinan ekstrim berlangsung efektif, tepat sasaran, dan konsisten.

2.1.2.3 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB per kapita merupakan indikator penting yang mencerminkan kemampuan ekonomi rata-rata penduduk di suatu daerah. Indikator ini dihitung dengan membagi nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dengan jumlah penduduk pada tahun bersangkutan. Semakin tinggi nilai PDRB per kapita, semakin besar tingkat pendapatan rata-rata masyarakat secara umum. Perkembangan PDRB ADHB per kapita Kabupaten Padang Pariaman dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020–2024 dapat dilihat pada Gambar 2.42.

Gambar 2.42
Perkembangan PDRB ADHB per Kapita
Kabupaten Padang Pariaman dan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020-2024



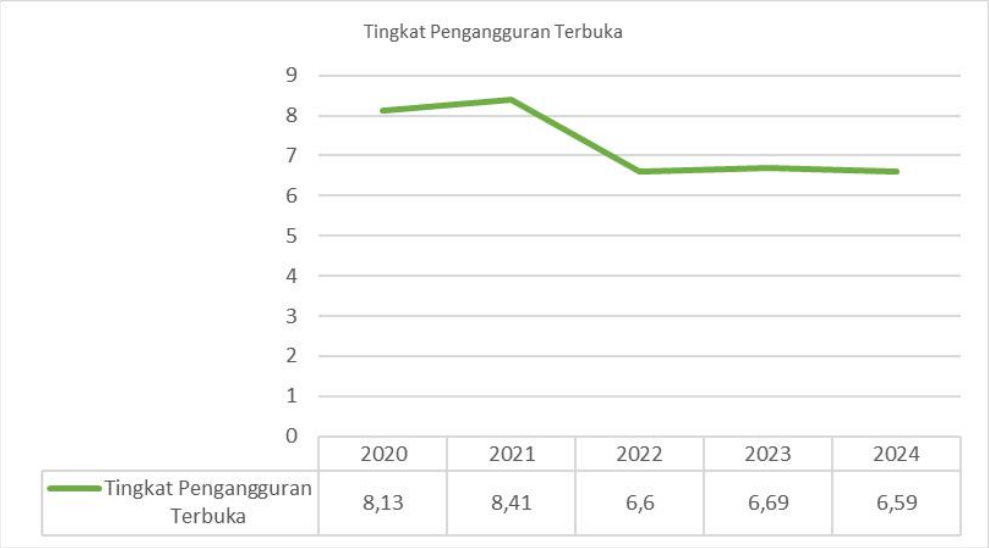
Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Nilai PDRB per kapita ADHB Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2021, PDRB per kapita tercatat sebesar Rp41,72 juta, masih di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat yang sebesar Rp43,83 juta. Namun, sejak tahun 2023, capaian PDRB per kapita Kabupaten Padang Pariaman meningkat signifikan hingga mencapai Rp55,54 juta, melampaui rata-rata provinsi sebesar Rp54,33 juta. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024, ketika PDRB per kapita Kabupaten Padang Pariaman mencapai Rp58,39 juta, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Barat yang sebesar Rp57,05 juta. Capaian tersebut mencerminkan penguatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor unggulan, terutama transportasi dan pergudangan, pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta meningkatnya efisiensi dan produktivitas perekonomian daerah.

2.1.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari dalam seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Sedangkan tingkat pengangguran merupakan perbandingan antara jumlah penganggur atau pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu, yang disajikan dalam bentuk persentase. Pengangguran merupakan permasalahan makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan termasuk salah satu masalah paling serius, yang terjadi akibat ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja (Sukirno, 2019).

Gambar 2.43
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020-2024



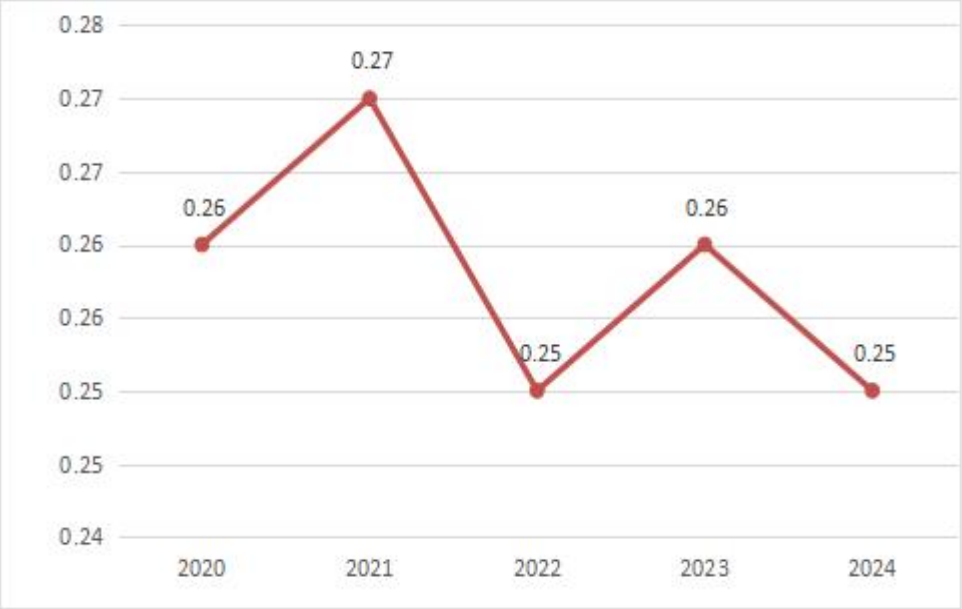
Sumber : Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka, 2022-2025

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.43. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun 2024 mengalami penurunan dari 6,69 persen pada Tahun 2023 menjadi 6,59 persen. Angka TPT ini lebih tinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki, yaitu 8,74 persen berbanding 5,83 persen. Sementara itu, TPT pada Tahun 2023 mengalami sedikit kenaikan dari 6,60 persen pada Tahun 2022 menjadi 6,69 persen, dengan angka pengangguran lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan perempuan, yaitu 6,74 persen berbanding 6,63 persen.

2.1.2.5 Ketimpangan Pendapatan/Rasio Gini

Indikator ini mengukur tingkat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah, dimana nilainya adalah 0 (nol) sampai 1 (satu). Jika nilai Rasio Gini suatu daerah mendekati nilai 1 maka pendapatan penduduk daerah yang bersangkutan semakin tidak merata, sedangkan jika nilainya mendekati nol, maka pendapatan penduduk daerah yang bersangkutan semakin merata. Secara keseluruhan, Rasio Gini Kabupaten Padang Pariaman dalam periode 2020–2024 menunjukkan tren yang cukup stabil dengan sedikit fluktuasi. Meskipun terjadi sedikit peningkatan ketimpangan pada tahun 2023, kondisi ini kembali membaik pada tahun berikutnya. Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, kebijakan yang mendorong inklusivitas, seperti pemberdayaan UMKM, akses pendidikan dan kesehatan yang lebih luas, serta peningkatan kesempatan kerja bagi kelompok berpenghasilan rendah, perlu terus diperkuat. Rasio Gini Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.44.

Gambar 2.44
Rasio Gini Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2025

2.1.2.6 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Komponen dari IPM adalah umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu komponen tidak dapat ditutupi oleh capaian di komponen lainnya. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga komponen harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya. Perkembangan IPM Kabupaten Padang Pariaman dari Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.45.

Gambar 2.45
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024



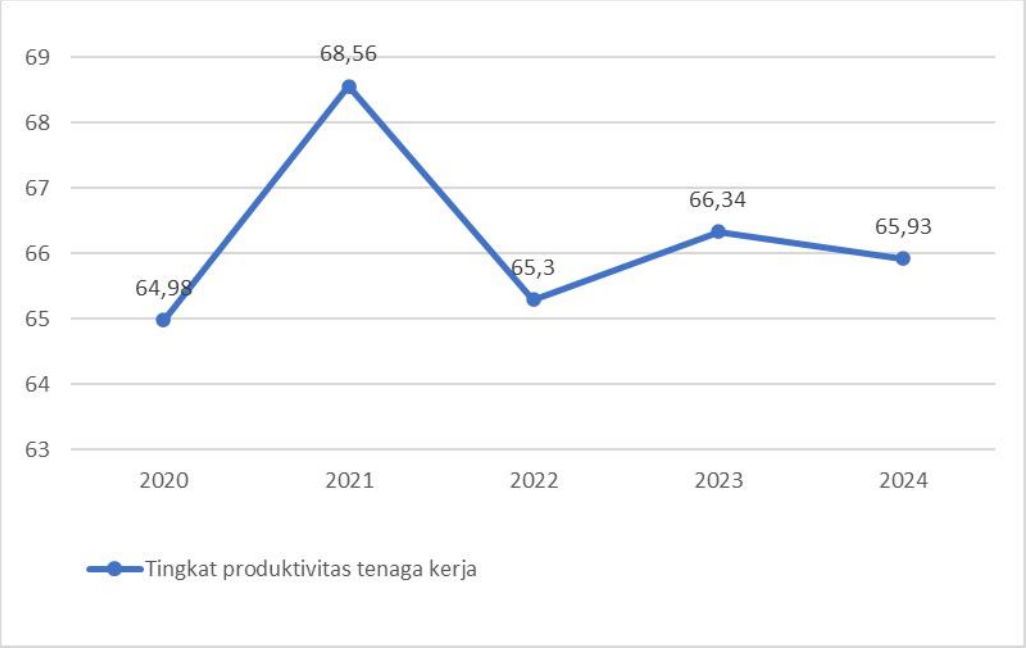
Sumber: BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Padang Pariaman mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, dimulai dari 72,80 pada tahun 2020 dan naik menjadi 74,90 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk pandemi *COVID*-19. Peningkatan IPM sebesar 2,10 poin selama lima tahun menunjukkan keberhasilan program pembangunan sumber daya manusia yang semakin inklusif dan merata, sekaligus menjadi indikator positif dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

2.1.2.6 Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja adalah ukuran efisiensi tenaga kerja dalam menghasilkan output dibandingkan dengan input yang digunakan dalam suatu periode tertentu. Secara umum, indikator ini mencerminkan sejauh mana tenaga kerja mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja ekonomi, serta dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kualitas sumber daya manusia, penerapan teknologi, dan efektivitas manajemen kerja. Perkembangan Tingkat produktivitas tenaga kerja Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.46.

Gambar 2.46
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Tingkat produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Padang Pariaman dalam periode 2020–2024 menunjukkan pola yang berfluktuasi. Pada tahun 2020, tingkat produktivitas tercatat sebesar 64,98 dan meningkat cukup signifikan menjadi 68,56 pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan ke angka 65,30. Selanjutnya pada tahun 2023 produktivitas kembali mengalami peningkatan menjadi 66,34, meskipun kemudian mengalami sedikit penurunan ke level 65,93 pada tahun 2024.

Secara umum, produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Padang Pariaman dalam lima tahun terakhir belum menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, melainkan mengalami fluktuasi setiap tahun. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun terdapat potensi peningkatan, namun masih diperlukan upaya penguatan kualitas tenaga kerja, peningkatan keterampilan, serta pemanfaatan teknologi yang lebih optimal agar pertumbuhan produktivitas dapat lebih konsisten dan berkelanjutan.

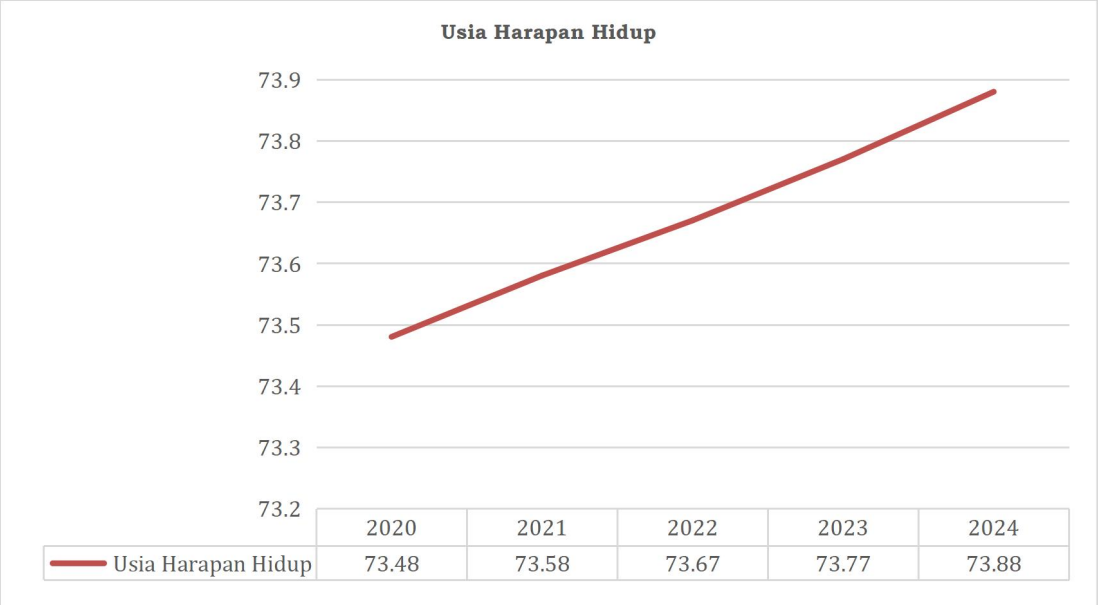
2.1.2.7 Kesehatan Untuk Semua

1) Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan sebuah indikator penilaian dalam melakukan evaluasi kinerja/intervensi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan penduduk. Meningkatnya angka UHH menunjukkan peningkatan angka kehidupan dan kesejahteraan yang dapat dijadikan landasan bagi pemerintah dalam pengembangan program pembangunan pada sektor kesehatan dan sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan angka UHH pada sejak tahun 2020-2024, Kabupaten Padang Pariaman berhasil meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan penduduk secara konsisten dan berkelanjutan. Tren menunjukkan peningkatan rata-rata sekitar 0,37–0,4 tahun per tahun. Ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam layanan kesehatan, gizi, sanitasi, serta faktor sosial-ekonomi yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat. Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap peningkatan usia harapan hidup ini meliputi peningkatan akses layanan Kesehatan, gaya hidup yang lebih sehat, program pemerintah, serta peningkatan ekonomi dan pendidikan, yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Tren peningkatan Usia Harapan Hidup Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.47.

Gambar 2.47
Usia Harapan Hidup Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2024

2) Angka kematian Ibu

Berdasarkan definisi *World Health Organization* (WHO), Angka Kematian Ibu (AKI) dapat dihitung berdasarkan per 100.000 angka kelahiran hidup. Berdasarkan data AKI sejak tahun 2020-2024, terlihat bahwa angka kematian ibu berfluktuasi secara drastis. Tahun 2023 mencatat angka nol, sementara 2020 sampai 2022 angka kematian relatif tinggi dan 2024 menunjukkan penurunan. Tahun 2022 mencatat 45,59 kasus, yang kemudian turun drastis menjadi 0 kasus di 2023, sebelum melonjak tajam ke 82,53 kasus pada 2024. Tingginya Angka Kematian Ibu tahun 2024 disebabkan karena banyaknya ibu hamil dengan penyakit penyerta seperti diabetes melitus, hipertensi dan kanker. Selengkapnya, Angka Kematian Ibu Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.48.

Gambar 2.48
Angka Kematian Ibu Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020-2024

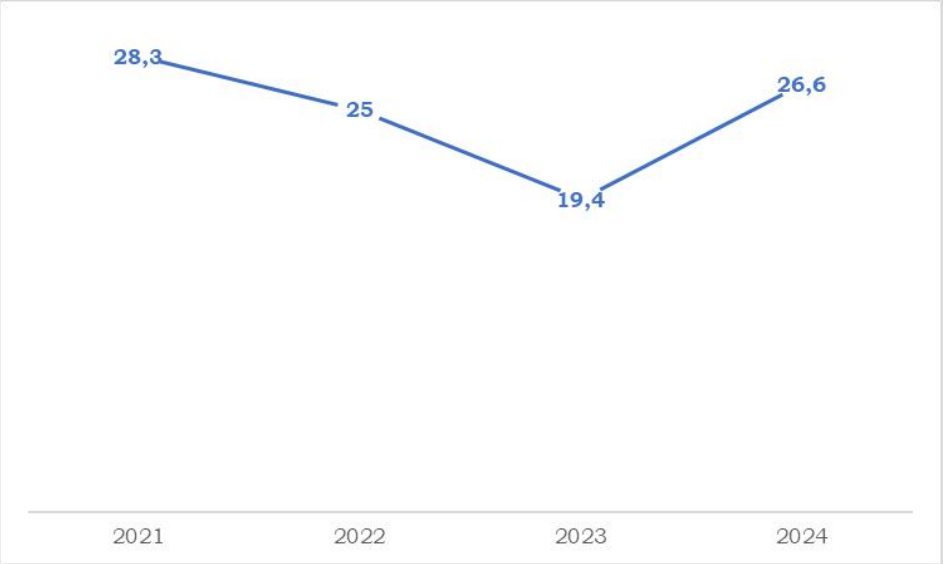


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman, 2024

3) *Prevalensi Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada Balita

Indikator prevalensi stunting yang dihitung oleh Kementerian Kesehatan mengacu pada persentase balita yang mengalami hambatan pertumbuhan akibat kekurangan gizi serta pola asuh dan perawatan yang belum memadai. Tinggi rendahnya angka stunting menjadi parameter penting dalam menilai kualitas pembangunan sumber daya manusia. Stunting pada anak dapat mengganggu perkembangan kognitif dan fisik, yang pada akhirnya akan memengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Selengkapnya, Prevalensi Stunting Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021–2024 dapat dilihat pada Gambar 2.49.

Gambar 2.49
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024



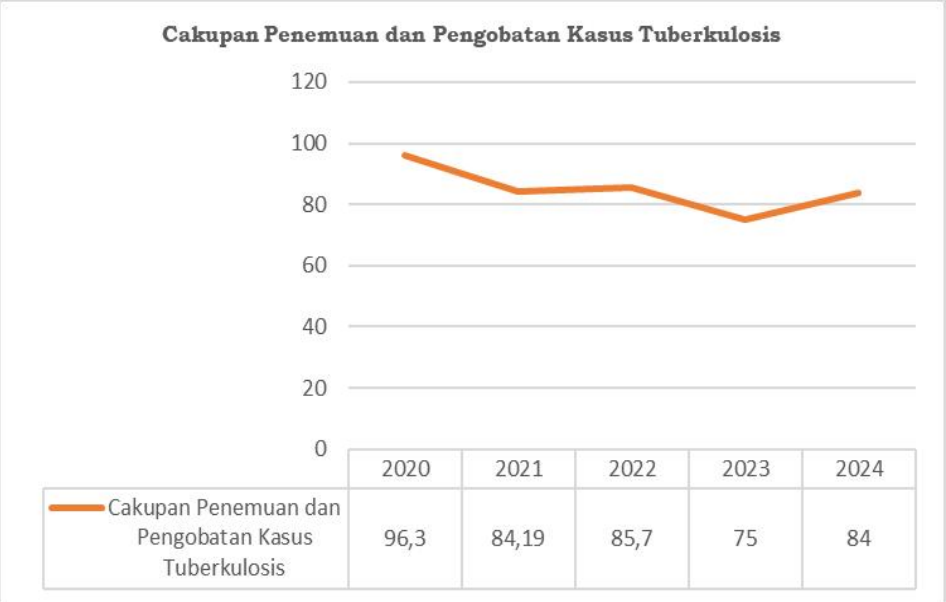
Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2025

Berdasarkan Buku Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kabupaten Padang Pariaman mengalami fluktuasi sejak tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, angka prevalensi *stunting* belum tersedia. Pada tahun 2021, prevalensi stunting menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dengan angka mencapai 28,3 persen. Pada tahun 2022, kondisi ini membaik dengan penurunan menjadi 25 persen. Tren positif berlanjut pada tahun 2023, di mana prevalensi *stunting* turun signifikan menjadi 19,4 persen. Namun, pada tahun 2024 angka stunting kembali meningkat hingga mencapai 26,6 persen. Fluktuasi prevalensi *stunting* di Kabupaten Padang Pariaman mengindikasikan bahwa meskipun terdapat perbaikan pada beberapa tahun, upaya pengendalian *stunting* masih menghadapi tantangan besar. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang lebih konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan agar penurunan prevalensi *stunting* dapat tercapai secara stabil dan berkesinambungan, serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

4) Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*Treatment Coverage*)

Indikator cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis merupakan parameter penting dalam upaya penanggulangan penyakit ini karena menggambarkan sejauh mana keberhasilan sistem kesehatan dalam menemukan dan menangani kasus TBC. Indikator ini mencakup dua aspek utama, yaitu: (1) penemuan kasus, yang menunjukkan kemampuan sistem kesehatan dalam mengidentifikasi dan mendiagnosis penderita TBC, serta (2) pengobatan kasus, yang menggambarkan efektivitas sistem kesehatan dalam memberikan terapi yang tepat kepada pasien yang terdiagnosis. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada Gambar 2.50.

Gambar 2.50
Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus TBC Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024



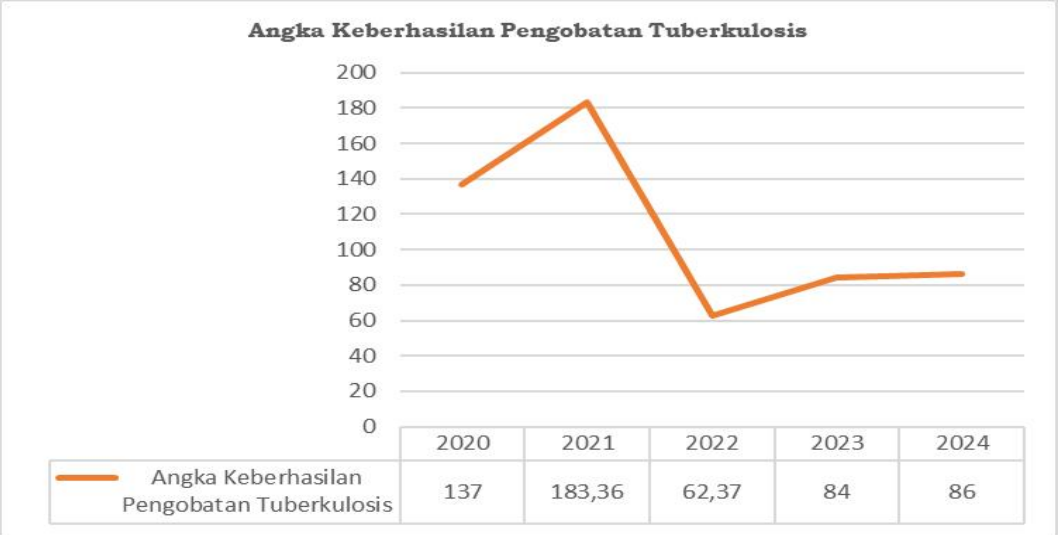
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman, cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis menunjukkan pola yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2020 hingga 2022, terjadi peningkatan cakupan dari 84,19% menjadi 85,7% atau naik sebesar 1,51%. Hal ini menunjukkan adanya upaya peningkatan deteksi kasus dan pengobatan yang lebih efektif. Pada tahun 2022 hingga 2023, terjadi penurunan drastis menjadi 75%, yaitu turun sebesar 10,7%. Kemungkinan penyebabnya antara lain penurunan aktivitas skrining, keterbatasan tenaga kesehatan, atau dampak pandemi COVID-19 yang masih terasa. Pada tahun 2024, angka ini kembali meningkat menjadi 84%.

5) Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Success Rate*)

Indikator ini memiliki bagian yang penting dalam tahapan evaluasi pengobatan tuberkulosis yang merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas program pengobatan tuberkulosis di Kabupaten Padang Pariaman. Selengkapnya, angka keberhasilan pengobatan TBC di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada Gambar 2.51.

Gambar 2.51
Angka Keberhasilan Pengobatan TBC Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024



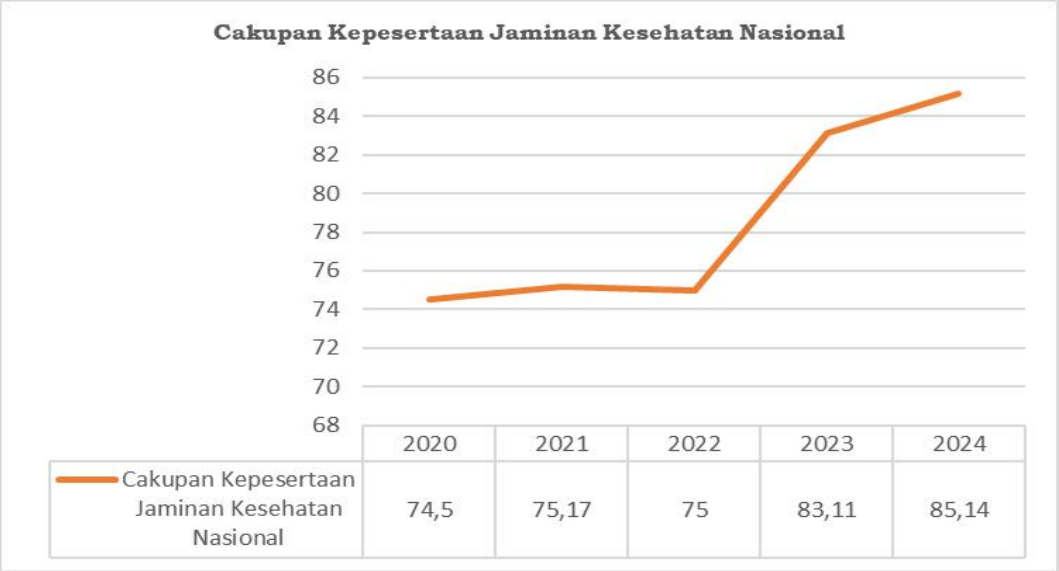
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman, angka keberhasilan pengobatan TBC menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2022, capaian keberhasilan menurun drastis menjadi 62,37 persen, sebelum kembali meningkat menjadi 84 persen pada tahun 2023 dan 86 persen pada tahun 2024. Penurunan pada tahun 2022 diperkirakan disebabkan oleh faktor putus pengobatan, resistensi obat, keterlambatan diagnosis, serta keterbatasan akses layanan kesehatan. Sementara itu, peningkatan pada tahun 2023 hingga 2024 dipengaruhi oleh adanya pendampingan pasien, peningkatan edukasi, ketersediaan obat yang lebih baik, serta dukungan dari komunitas. Strategi yang diperlukan untuk meningkatkan angka keberhasilan pengobatan TBC mencakup pencegahan putus pengobatan, penguatan edukasi pasien, serta peningkatan mutu layanan kesehatan.

6) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Indikator Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan indikator penting sebagai bentuk evaluasi pemerintah dalam sektor kesehatan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan jaminan kesehatan, terutama bagi masyarakat tidak mampu yang menjadi tanggungan pemerintah. Selengkapnya, cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada Gambar 2.52.

Gambar 2.52
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	74,5	75,17	75	83,11	85,14

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Berdasarkan data di atas, akses pelayanan kesehatan, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan, komitmen pemerintah daerah dalam program jaminan kesehatan, serta pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Cakupan kepesertaan JKN mengalami perkembangan positif pada periode 2020–2024, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2023 dan 2024. Sementara itu, pada tahun 2022 sempat terjadi sedikit penurunan yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor administratif, keterbatasan anggaran, atau kendala teknis lainnya. Peningkatan cakupan pada tahun 2023 dan 2024 mencerminkan efektivitas penyuluhan, kemudahan akses pendaftaran, serta pemberian subsidi bagi masyarakat miskin.

2.1.2.8 Pendidikan Berkualitas dan Merata

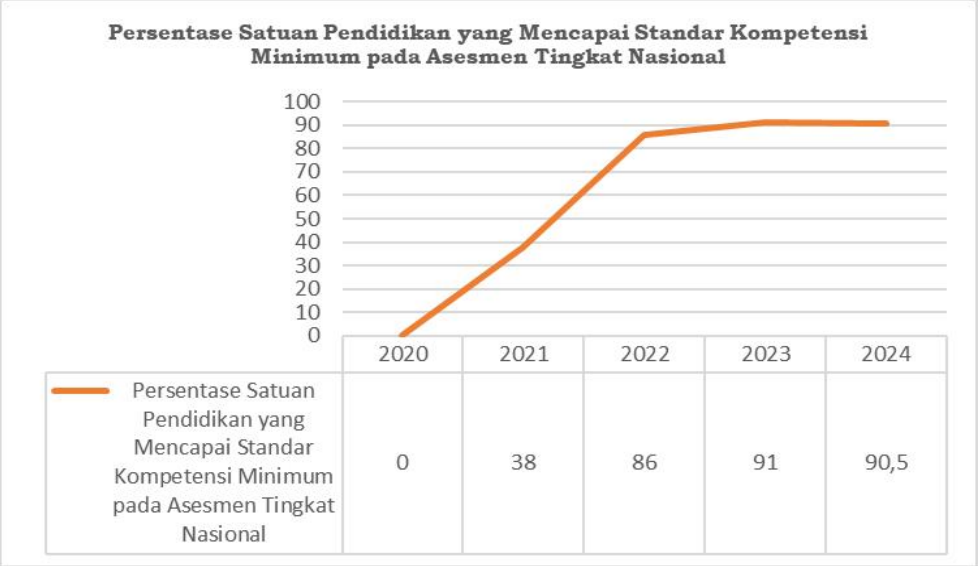
1) Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional

Asesmen Nasional merupakan evaluasi hasil belajar peserta didik secara nasional pada aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh satuan pendidikan pada jenjang dasar dan menengah, termasuk pendidikan kesetaraan. Pada setiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang ditentukan secara acak oleh Kemendikbudristek.

Literasi membaca merupakan kemampuan penting dalam kehidupan modern, yang diukur melalui indikator Kemampuan Literasi, yaitu persentase peserta didik berdasarkan kemampuan memahami, menggunakan, merefleksikan, dan mengevaluasi berbagai jenis teks, baik informasional maupun fiksi. Sementara itu, numerasi adalah kemampuan memahami dan menggunakan angka dalam kehidupan sehari-hari, yang diukur melalui indikator Kemampuan Numerasi, yaitu persentase peserta

didik berdasarkan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah dalam berbagai konteks yang relevan.

Gambar 2.53
Grafik Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020–2024



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2025

Berdasarkan Gambar 2.53, persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen nasional menunjukkan tren peningkatan pada periode 2020–2024. Pada tahun 2021 capaian Kabupaten Padang Pariaman sebesar 38 persen, meningkat menjadi 86 persen pada tahun 2022, dan mencapai 91 persen pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 capaian tersebut mengalami sedikit penurunan menjadi 90,5 persen. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman terus mengalami perbaikan meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi.

2) Angka Literasi dan Numerasi Tingkat Pendidikan SD dan SMP

Literasi dan Numerasi adalah dua keterampilan dasar yang sangat penting bagi setiap individu untuk dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan sehari-hari dan berkontribusi pada pembangunan bangsa. Literasi merupakan kemampuan membaca, menulis, memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif untuk menyelesaikan masalah, mengevaluasi ide-ide, dan mengambil keputusan. Sementara itu, numerasi adalah kemampuan memahami dan menggunakan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari.

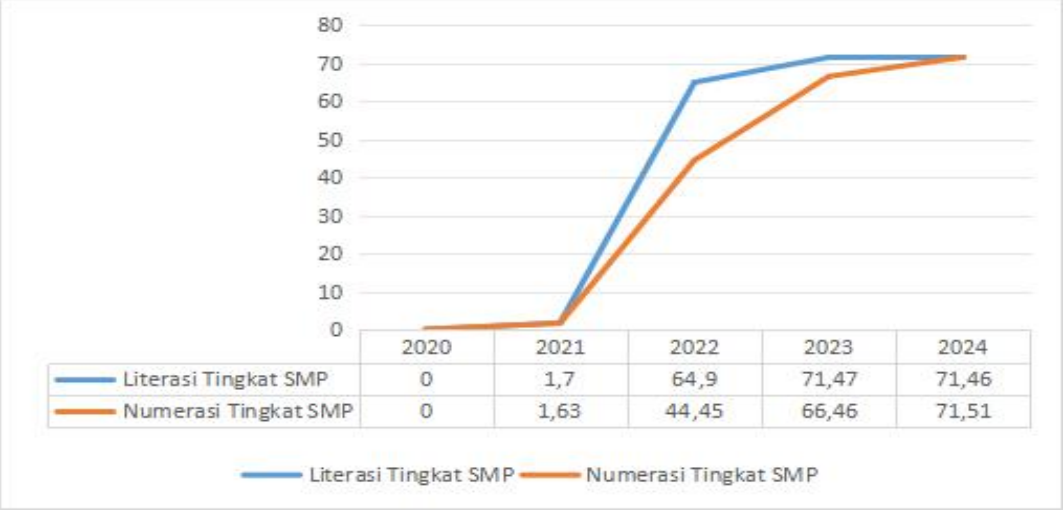
Gambar 2.54
Angka Literasi dan Numerasi Tingkat Pendidikan SD
Tahun 2020 – 2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Literasi Tingkat SD	0	1,54	65,22	72,94	72,93
Numerasi Tingkat SD	0	1,73	47,95	61,29	61,28

Sumber : Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025

Gambar 2.55
Angka Literasi dan Numerasi Tingkat Pendidikan SMP
Tahun 2020 – 2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Literasi Tingkat SMP	0	1,7	64,9	71,47	71,46
Numerasi Tingkat SMP	0	1,63	44,45	66,46	71,51

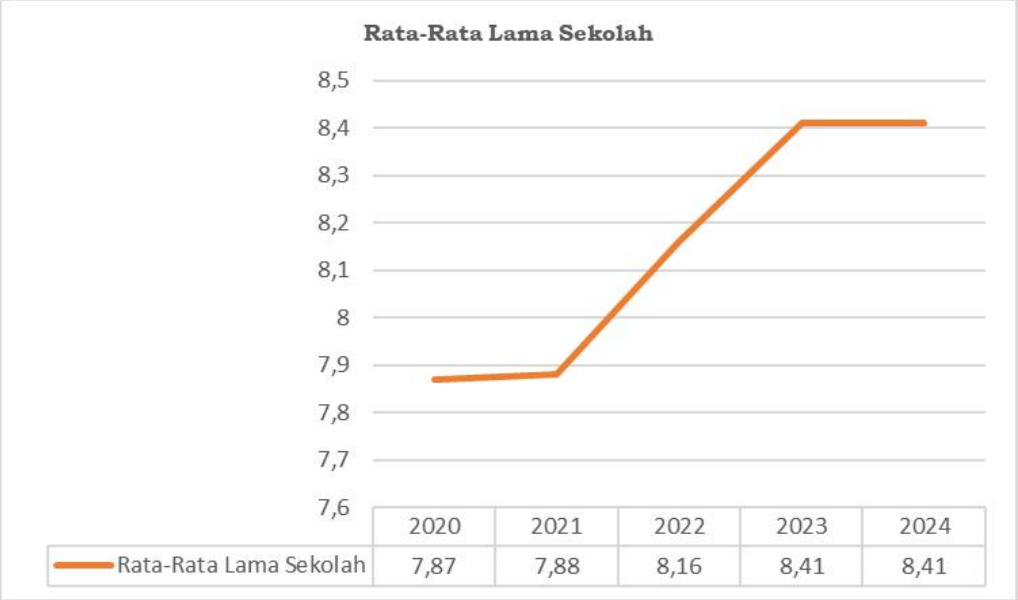
Sumber : Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025

Gambar 2.54 dan Gambar 2.55 menunjukkan bahwa angka literasi dan numerasi tingkat pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Padang Pariaman meningkat dari tahun 2021 hingga 2024. Angka literasi dan numerasi Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dari tahun 2021 hingga 2024, dengan masing-masing angka literasi dan numerasi pada tingkat pendidikan SD mencapai 72,93 dan 61,28 pada tahun 2024. Sementara itu, untuk tingkat pendidikan SMP, angka literasi dan numerasi mencapai 71,46 dan 71,51 pada tahun 2024. Pencapaian ini mencerminkan perbaikan besar dalam sistem pendidikan dasar di Kabupaten Padang Pariaman, baik dalam hal kualitas pengajaran, dukungan sumber daya, maupun program-program pembelajaran yang lebih baik.

3) Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang ditempuh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan pendidikan formal, berdasarkan ijazah terakhir atau jenjang pendidikan yang sedang dijalani, tanpa memperhitungkan pengulangan kelas.

Gambar 2.56
Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Kabupaten Padang Pariaman 2020–2024



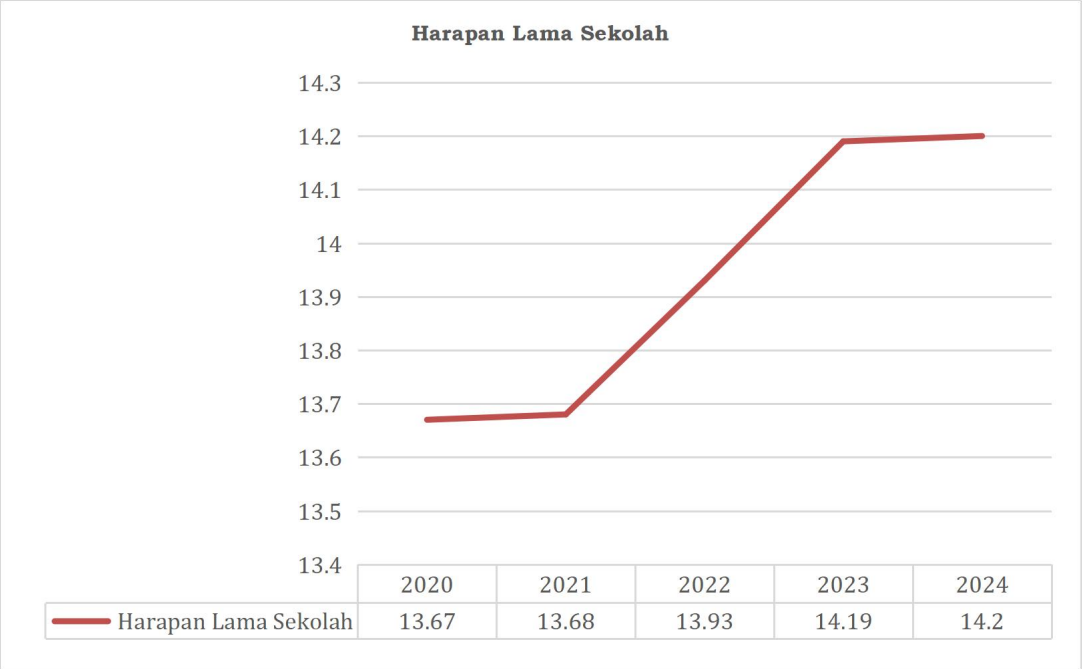
Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2025

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan tren positif dari 2020 hingga 2024, meningkat dari 7,87 tahun menjadi 8,41 tahun. Namun, angka ini masih cukup jauh dari target pemerintah, yaitu 12 tahun wajib belajar. Oleh sebab itu, peningkatan tersebut belum menunjukkan pencapaian yang optimal dan masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai target pemerintah agar lebih banyak peserta didik dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

4) Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan dapat ditempuh oleh seorang anak pada umur tertentu di masa mendatang. Indikator ini memberikan gambaran mengenai peluang pendidikan yang tersedia bagi generasi muda, sekaligus mencerminkan akses dan kualitas layanan pendidikan di suatu daerah. HLS yang tinggi menunjukkan semakin baiknya kesempatan anak-anak untuk menempuh pendidikan formal hingga jenjang yang lebih tinggi, sedangkan HLS yang rendah mengindikasikan adanya keterbatasan dalam akses maupun kesinambungan pendidikan.

Gambar 2.57
Perkembangan Angka HLS Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020-2024



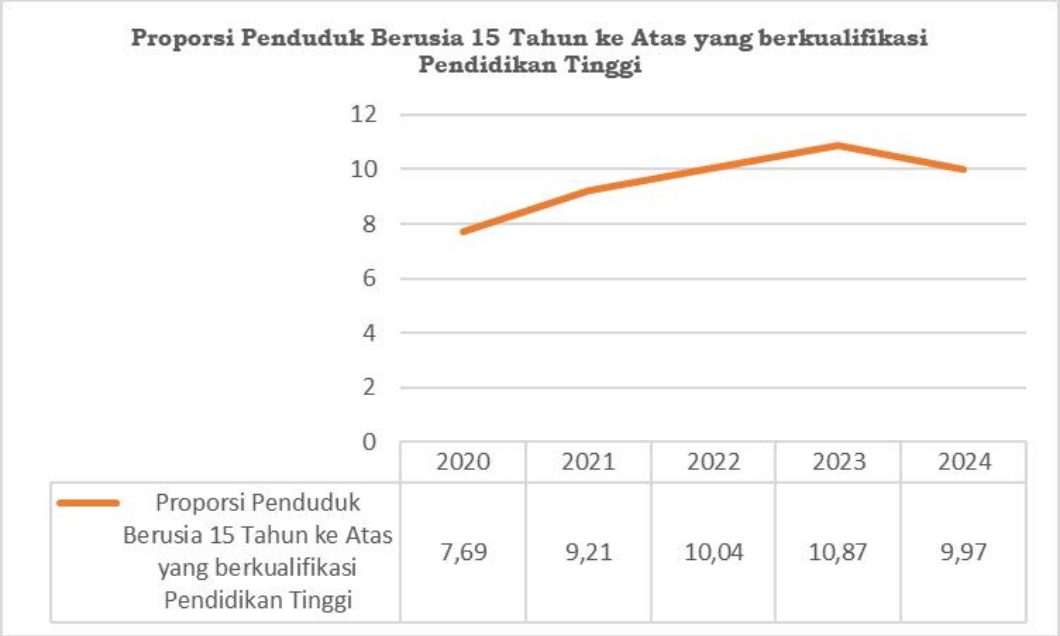
Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2021-2025

Berdasarkan Gambar 2.57, dapat dilihat bahwa perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Padang Pariaman terus mengalami kenaikan yang signifikan dari 13,67 tahun pada 2020 menjadi 14,2 tahun pada 2024. Angka ini mencerminkan perbaikan yang baik dalam akses pendidikan, dengan semakin banyaknya siswa yang menyelesaikan pendidikan mereka hingga tingkat SMA dan melanjutkan ke perguruan tinggi.

5) Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Proporsi ini merupakan persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas di suatu wilayah yang telah menyelesaikan pendidikan formal hingga jenjang perguruan tinggi. Indikator ini mencerminkan tingkat pencapaian pendidikan masyarakat serta kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut. Semakin tinggi proporsi penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi, semakin besar pula potensi peningkatan daya saing, produktivitas, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Gambar 2.58
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Tahun 2020-2024



Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka 2025, 2025

Gambar 2.58 menunjukkan proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Tahun 2020-2024 di Kabupaten Padang Pariaman. Pada tahun 2021, proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi tercatat sebesar 9,21%. Angka ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Padang Pariaman, hanya sekitar 9,21% dari penduduk dewasa yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi (S1, D3, atau setara). Pada tahun 2022, terjadi sedikit peningkatan proporsi menjadi 10,04%, dengan kenaikan sebesar 0,83% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada 2023, angka proporsi meningkat lebih signifikan menjadi 10,87%, dengan kenaikan 0,83% dibandingkan tahun sebelumnya. Tren positif ini mengindikasikan bahwa lebih banyak penduduk yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Pada 2024, terjadi penurunan sedikit menjadi 9,97%, yang turun sebesar 0,9% dibandingkan dengan tahun 2023. Meskipun ada penurunan, angka ini masih relatif tinggi, dan proporsi penduduk yang berkualifikasi pendidikan tinggi tetap menunjukkan tren positif dibandingkan dengan tahun 2021.

6) Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi

Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi di Kabupaten Padang Pariaman adalah indikator yang penting dalam mengukur seberapa baik pendidikan menengah tinggi dapat mempersiapkan lulusannya untuk memasuki pasar kerja di bidang yang sesuai dengan keahliannya. Indikator ini menunjukkan adanya keselarasan antara program-program pendidikan dengan tuntutan pasar kerja, sehingga lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan sektor tertentu.

Gambar 2.59
Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi
Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat dan Survei Angkatan Kerja

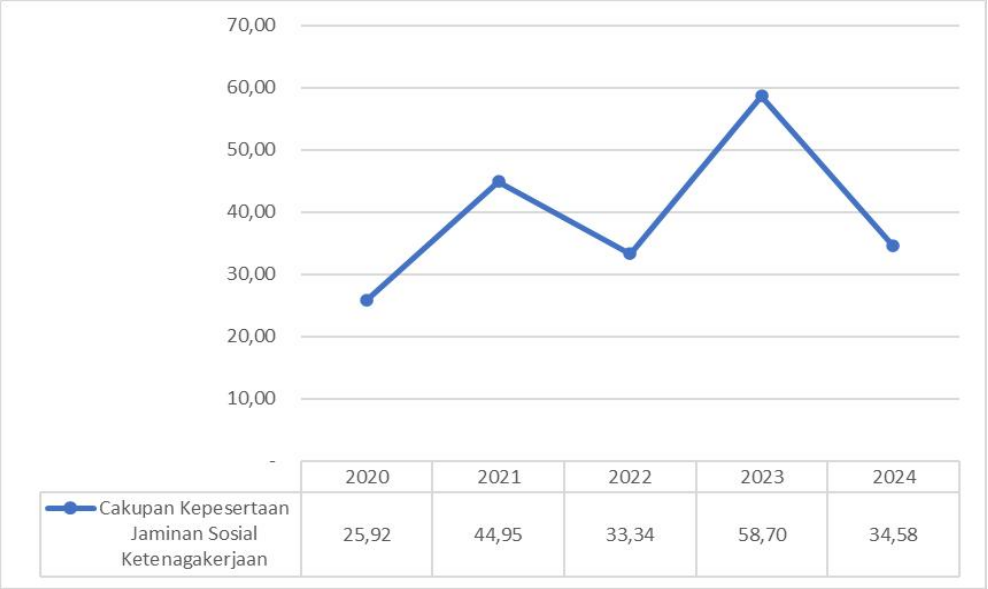
Gambar 2.59 menunjukkan bahwa sejak tahun 2022, persentase lulusan pendidikan menengah dan tinggi di Kabupaten Padang Pariaman yang bekerja di bidang keahlian menengah hingga tinggi berada pada angka 73,82%. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 70,29%, dan angka ini tetap sama pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan belum optimalnya penyerapan tenaga kerja sesuai kompetensi yang dimiliki. Sekitar 30% lulusan masih bekerja di luar bidang keahliannya, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara output dunia pendidikan dan kebutuhan nyata dunia kerja.

2.1.2.9 Perlindungan Sosial yang Adaptif

1) Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan indikator penting untuk mengetahui dan mengevaluasi akses masyarakat terhadap perlindungan sosial terkait ketenagakerjaan. Data cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjadi cerminan dari seberapa efektif program ini dalam mencakup berbagai segmen pekerja formal. Ini mencakup pekerja dari berbagai sektor ekonomi, termasuk industri, perdagangan, dan jasa, serta pekerja mandiri dan buruh harian. Selengkapnya, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024

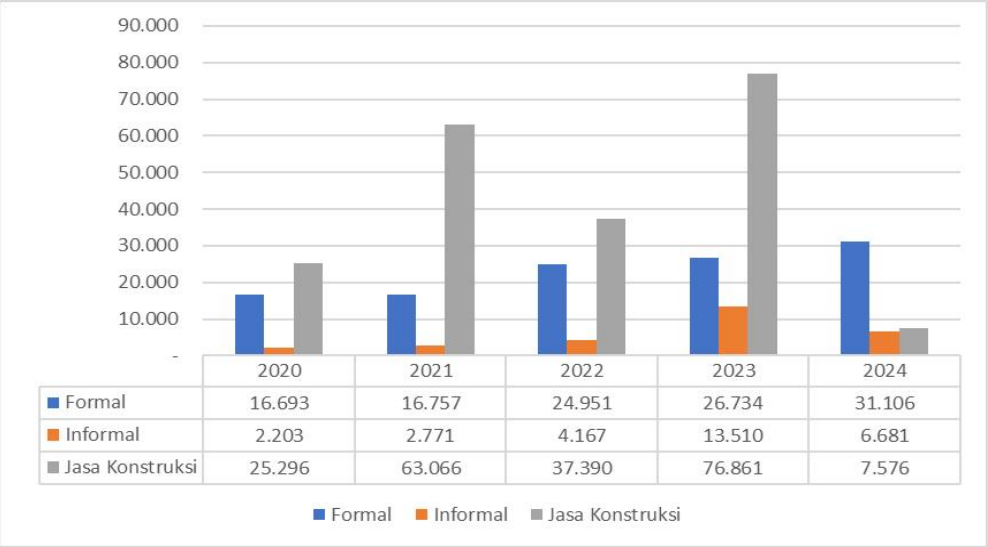
Gambar 2.60
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	25,92	44,95	33,34	58,70	34,58

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Padang Pariaman, 2025

Gambar 2.61
Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
(Formal, Informal dan Jasa Konstruksi)
Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Formal	16.693	16.757	24.951	26.734	31.106
Informal	2.203	2.771	4.167	13.510	6.681
Jasa Konstruksi	25.296	63.066	37.390	76.861	7.576

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Padang Pariaman, 2025

Gambar 2.61 menunjukkan cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari 2020 sampai 2024 yang bersifat fluktuatif. Cakupan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2020 sebesar 25,92%, sedangkan cakupan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 58,70%. Meskipun demikian, pada tahun 2024 cakupan kepesertaan kembali mengalami penurunan menjadi 34,58%. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan kepesertaan masih menghadapi tantangan, sehingga diperlukan upaya strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, kepatuhan pemberi kerja, serta

perluasan jangkauan kepesertaan agar cakupan dapat lebih stabil dan konsisten ke depannya.

Dari Gambar 2.61 terlihat bahwa pada tahun 2024 jumlah kepesertaan Jasa Konstruksi turun sangat signifikan dibandingkan tahun 2023, sementara sektor Formal dan Informal justru mengalami peningkatan. Artinya, penurunan total kepesertaan lebih banyak dipengaruhi oleh menurunnya kepesertaan dari sektor Jasa Konstruksi. Penurunan jumlah kepesertaan pada tahun 2024 terutama disebabkan oleh berkurangnya kepesertaan di sektor jasa konstruksi yang bersifat temporer dan sangat bergantung pada keberlanjutan proyek. Sementara itu, sektor formal dan informal justru menunjukkan peningkatan, yang mengindikasikan adanya pergeseran tenaga kerja dari sektor konstruksi ke sektor lainnya.

2) Persentase Disabilitas di Sektor Formal

Persentase disabilitas di sektor formal Kabupaten Padang Pariaman menjadi indikator yang dapat menggambarkan inklusi dan kesetaraan akses terhadap kesempatan kerja bagi individu yang menyandang disabilitas Langkah-langkah seperti penyediaan aksesibilitas fisik, pelatihan khusus, dan kesadaran akan kebutuhan individu dengan disabilitas telah berkontribusi pada peningkatan persentase ini dari tahun ke tahun. Namun, masih ada ruang untuk peningkatan lebih lanjut dalam menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas dan inklusif bagi mereka yang memiliki disabilitas. Tabel 2.33 menunjukkan Jumlah pekerja disabilitas menurut status pekerjaan utama di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024.

Tabel 2.33
Jumlah pekerja disabilitas menurut status pekerjaan utama di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024

No.	Status Pekerjaan Utama	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Berusaha Sendiri	N/A	N/A	885	N/A	N/A
2.	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ Buruh tidak dibayar	N/A	N/A	229	N/A	N/A
3.	Berusaha dibantu buruh tetap/ dibayar	N/A	N/A	0	N/A	N/A
4.	Buruh/Karyawan/Pegawai	N/A	N/A	624	N/A	N/A
5.	Pekerja bebas di pertanian	N/A	N/A	168	N/A	N/A
6.	Pekerja bebas di non pertanian	N/A	N/A	791	N/A	N/A
7.	Pekerja Keluarga/ tak dibayar	N/A	N/A	154	N/A	N/A
	Total	N/A	N/A	2.851	N/A	N/A
	Sektor Formal (2 dan 4)	N/A	N/A	624	N/A	N/A
	Sektor Informal (selain 3 dan 4)	N/A	N/A	2.227	N/A	N/A
	Angkatan Kerja Disabilitas	N/A	N/A	2.851	N/A	N/A
	Persentase Disabilitas di Sektor Formal (%)	N/A	N/A	21,89	N/A	N/A

Sumber : Penduduk Provinsi Sumatera Barat, Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020

Jumlah pekerja disabilitas menurut status pekerjaan utama di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.33. Data disabilitas yang bekerja di sektor formal hanya tersedia di tahun 2022 berjumlah 624 orang dengan capaian 21,89% yaitu status pekerjaan

utama sebagai pekerja yang berusaha dibantu buruh tetap/dibayar serta buruh/ karyawan/pegawai. Persentase disabilitas yang bekerja di sektor formal pada tahun 2020, 2021,2023 dan 2024 tidak tersedia.

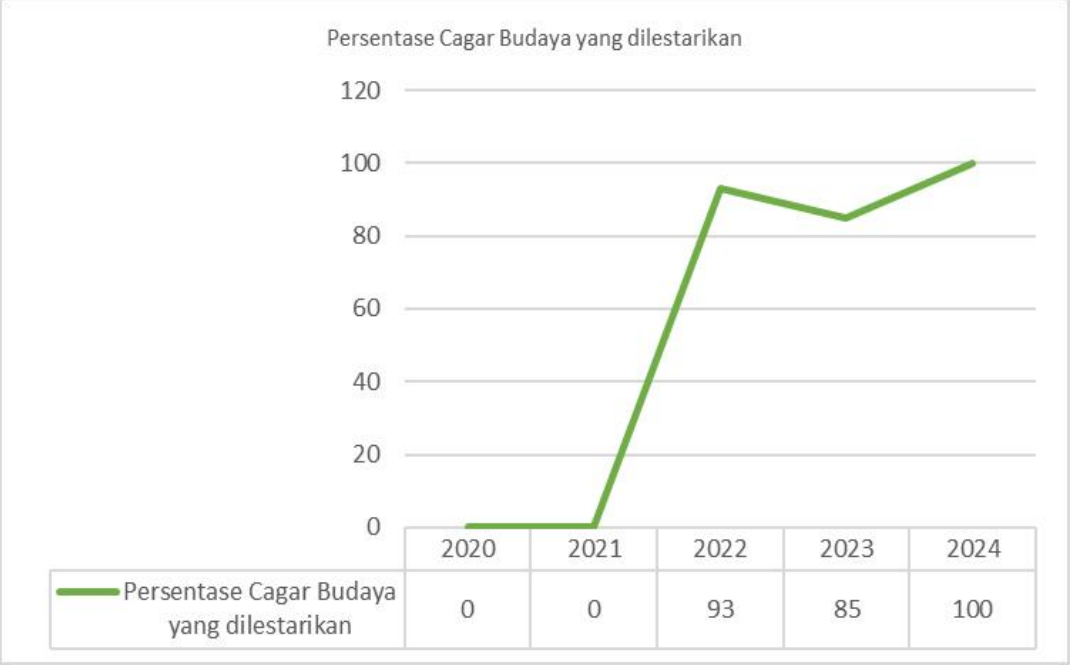
2.1.2.10 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

1) Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan Persentase Warisan Tak Benda yang dilestarikan.

Angka Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan sebuah indikator untuk menunjukkan upaya pemerintah dalam mengukur kemajuan pembangunan kebudayaan. Salah satu komponen untuk menghitung Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dibagi menjadi beberapa dimensi, antara lain adalah dimensi ekonomi budaya, dimensi pendidikan, dimensi ketahanan sosial budaya, dimensi warisan budaya, dimensi ekspresi budaya, dimensi budaya literasi, dan dimensi kesetaraan gender.

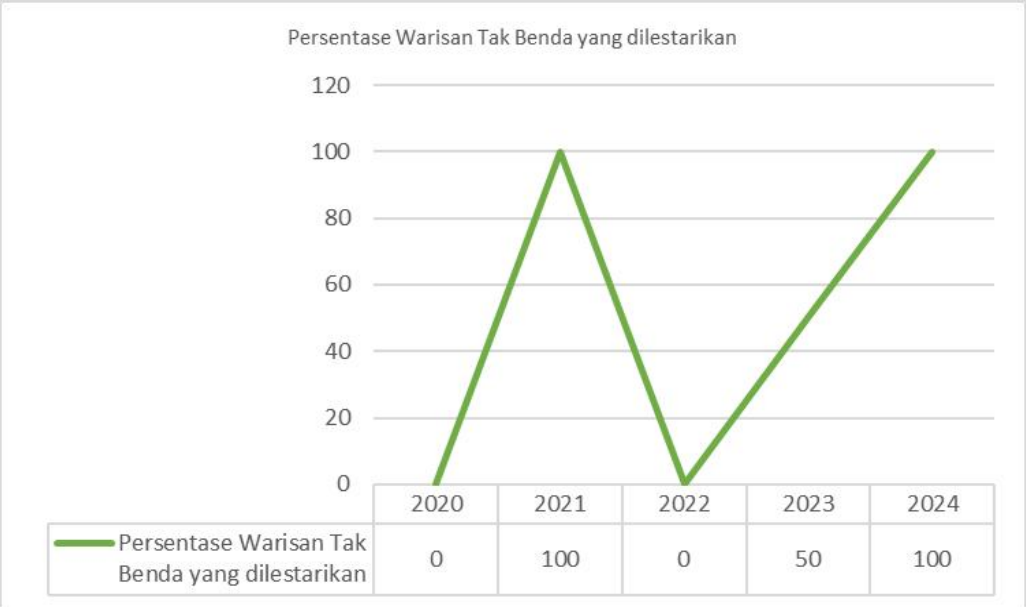
Karena keterbatasan ketersediaan data pada tingkat kabupaten, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memilih menggunakan salah satu sub-komponen sebagai turunan IPK dari dimensi warisan budaya yaitu ”persentase cagar budaya yang dilestarikan dan persentase warisan tak benda yang dilestarikan”. Data yang tersedia mengenai sub-komponen tersebut adalah data pada tahun 2021-2023 yang menunjukkan angka 61 cagar budaya yang dilestarikan dan 6 warisan tak benda yang diwariskan yang meningkat setiap tahunnya, dapat dilihat pada Gambar 2.62 dan Gambar 2.63.

Gambar 2.62
Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan
Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman, diolah

Gambar 2.63
Persentase Warisan tak Benda yang dilestarikan
Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman, diolah.

Di Kabupaten Padang Pariaman, pelestarian cagar budaya menunjukkan perkembangan yang cukup positif dalam lima tahun terakhir. Data tahun 2020 tidak tersedia, sementara pada tahun 2021 belum terdapat cagar budaya yang dilestarikan (0%). Namun, capaian meningkat tajam pada tahun 2022 menjadi 93%, sedikit menurun menjadi 85% pada 2023, dan kembali mencapai 100% pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya nyata dalam melestarikan benda-benda bernilai sejarah, arsitektur tradisional, dan situs budaya lainnya.

Sementara itu, pelestarian warisan budaya tak benda menunjukkan tren yang lebih fluktuatif. Pada tahun 2021, seluruh WBT yang teridentifikasi berhasil dilestarikan (100%), namun tidak ada pelestarian yang tercatat pada 2022 (0%). Capaian kembali naik menjadi 50% pada 2023 dan meningkat lagi menjadi 100% pada 2024. Fluktuasi ini menunjukkan adanya tantangan dalam pelaksanaan, terutama terkait pendataan, fasilitasi komunitas adat, dan kesinambungan program pelestarian.

2) Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

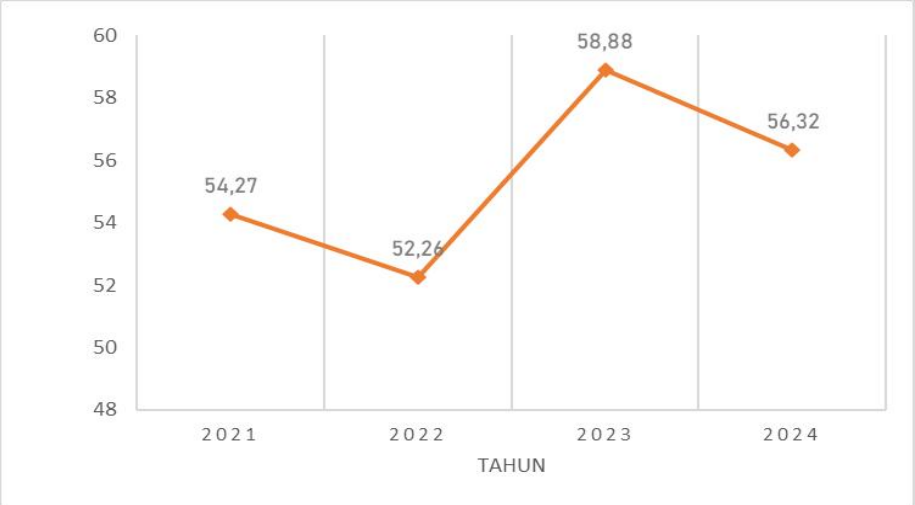
Indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana kerukunan dan keharmonisan antara umat beragama di suatu daerah atau negara. Indeks ini mengukur tingkat toleransi, kerja sama, dan kehidupan berdampingan secara damai antara individu atau kelompok yang berbeda agama. Pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Padang Pariaman mulai dilaksanakan pada tahun 2024, mengacu pada hasil survei tahun yang sama. Berdasarkan hasil survei tersebut, nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Padang Pariaman sebesar 71,81, termasuk kategori tinggi dengan rentang nilai 60,01–80,00. Indeks Kerukunan Umat Beragama dihitung menggunakan dimensi indeks toleransi, indeks kesetaraan, dan indeks kerja sama.

2.1.2.11 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

1) Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga sangat penting karena dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih terarah dan efektif. Indeks Pembangunan Keluarga dapat digunakan untuk memantau kemajuan pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga, sekaligus menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Capaian Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Padang Pariaman tersedia mulai tahun 2021 dan mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2024, seperti ditampilkan pada Gambar 2.64.

Gambar 2.64
Indeks Pembangunan Keluarga
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024



Sumber: DPPKB Kabupaten Padang Pariaman, 2024

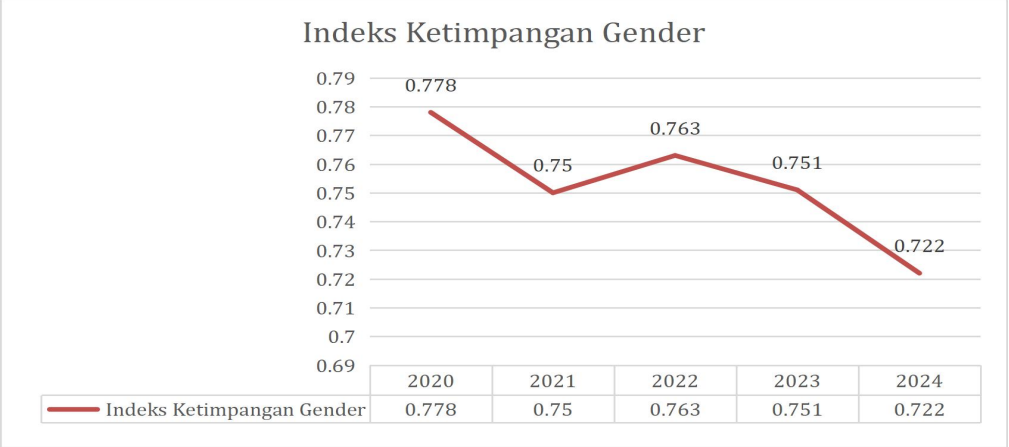
Indeks Pembangunan Keluarga di Kabupaten Padang Pariaman baru mulai diukur pada tahun 2021 sehingga data tahun 2020 belum tersedia. Pada tahun 2021, Indeks Pembangunan Keluarga tercatat sebesar 54,27, kemudian menurun menjadi 52,26 pada tahun 2022. Pada tahun 2023, nilai ini meningkat signifikan menjadi 58,88 namun pada tahun 2024 kembali sedikit menurun menjadi 56,32. Meskipun fluktuatif, capaian ini tetap menunjukkan tren positif yang penting untuk dijaga melalui strategi pembangunan keluarga yang konsisten, berkesinambungan, dan berbasis data, serta keberlanjutan penguatan program lintas sektor agar Indeks Pembangunan Keluarga semakin meningkat dan mencerminkan kualitas keluarga yang lebih baik, berdaya, dan sejahtera.

2) Indeks Ketimpangan Gender

Secara umum, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur sejauh mana ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan akses terhadap pasar kerja. Indeks ini memberikan gambaran mengenai potensi

pembangunan manusia yang hilang akibat ketimpangan gender di suatu wilayah, dengan nilai yang berada dalam rentang 0 hingga 1. Semakin rendah nilai IKG menunjukkan semakin kecil tingkat ketimpangan gender, yang berarti semakin setara kondisi antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses layanan dasar, kesempatan ekonomi, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan.

Gambar 2.65
Indeks Ketimpangan Gender
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024



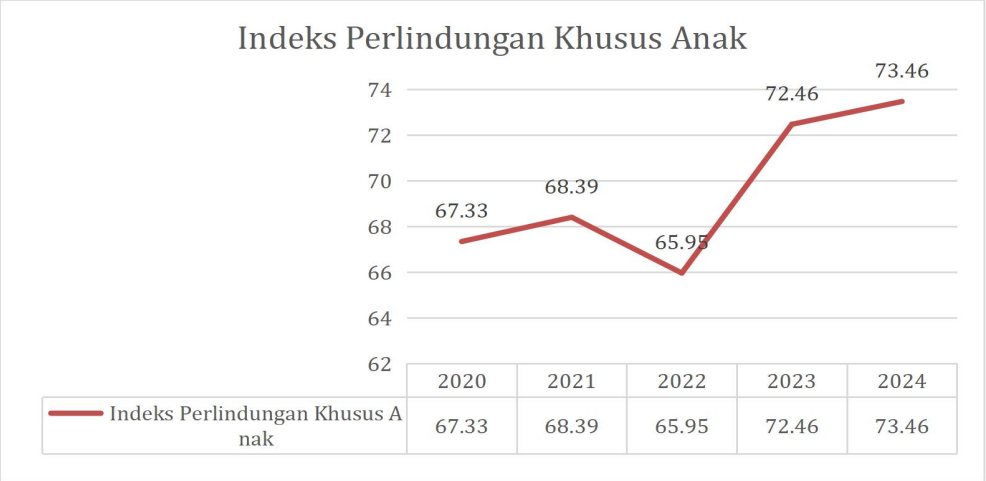
Sumber: BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Gambar 2.65 menunjukkan perkembangan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan tren perbaikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, indeks tercatat sebesar 0,778 dan menurun menjadi 0,75 pada tahun 2021. Meski sempat naik kembali ke angka 0,763 pada tahun 2022, indeks ketimpangan kemudian berangsur turun menjadi 0,751 pada tahun 2023, hingga mencapai titik terendah dalam periode lima tahun terakhir pada 0,722 pada tahun 2024. Penurunan nilai indeks ini menandakan semakin kecilnya ketimpangan gender di Kabupaten Padang Pariaman. Faktor utama yang masih menjadi tantangan adalah absennya keterwakilan perempuan di parlemen selama lima tahun terakhir. Namun, membaiknya indeks pada tahun 2023 antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan tinggi pratama dan administrator di instansi pemerintah, dari 50 orang pada tahun 2022 menjadi 60 orang pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan representasi perempuan dalam jabatan publik dapat memberikan kontribusi positif dalam memperkecil ketimpangan gender secara bertahap.

3) Indeks Perlindungan Khusus Anak

Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus mendapatkan perlindungan yang layak. Anak-anak yang termasuk dalam kategori ini adalah mereka yang berada dalam situasi rentan, seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak, anak terlantar, dan anak korban kekerasan. Gambar 2.66 menunjukkan nilai Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024.

Gambar 2.66
Indeks Perlindungan Khusus Anak
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Perlindungan Khusus Anak	67.33	68.39	65.95	72.46	73.46

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024

Berdasarkan grafik diatas, capaian Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan tren yang bervariasi selama periode 2020–2024. Nilai IPKA meningkat dari 67,33 pada 2020 menjadi 68,39 pada 2021. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak, termasuk penanganan kasus kekerasan, peningkatan layanan ramah anak, serta perluasan cakupan program perlindungan khusus anak. Terjadi penurunan capaian dari 68,39 menjadi 65,95 pada tahun 2022 dan melonjak signifikan pada tahun 2024**.** Hal ini menunjukkan keberhasilan intervensi strategis, seperti penguatan peran Satuan Tugas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), optimalisasi layanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), serta intensifikasi kampanye pencegahan kekerasan terhadap anak.

2.1.3 Aspek Daya Saing

Daya saing daerah menurut Bank Indonesia didefinisikan sebagai kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Konsep dan definisi daya saing daerah yang dikembangkan dalam penelitian tersebut didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu : perkembangan perekonomian daerah ditinjau dari aspek ekonomi regional dan perkembangan konsep dan definisi daya saing daerah dari penelitian-penelitian terdahulu. Daya saing daerah dihasilkan oleh interaksi yang kompleks antara faktor *input*, *output* dan *outcome* yang ada di daerah masing-masing, dengan faktor *input* sebagai faktor utama pembentuk daya saing daerah yaitu kemampuan daerah, yang selanjutnya akan menentukan kinerja *output* yang merupakan inti dari kinerja perekonomian. Inti dari kinerja perekonomian adalah upaya meningkatkan daya saing dari suatu perekonomian yaitu meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat yang berada di dalam perekonomian tersebut. Suatu daerah (provinsi/kabupaten/kota) disebut berdaya saing jika dapat menciptakan lingkungan kondusif bagi pelaku usaha untuk berkembang dan berkompetisi pada kancah perekonomian global, serta dapat

meningkatkan standar hidup masyarakat. Peningkatan daya saing daerah merupakan salah satu komponen penting di dalam penguatan ekonomi domestik. Peningkatan perekonomian domestik, baik oleh daerah dan nasional akan menjadi modal utama untuk menjaga momentum pembangunan dan melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi untuk menuju ke arah transformasi ekonomi menjadi negara maju dan berdaya saing. Terdapat dua karakteristik umum daerah-daerah yang mempunyai daya saing tinggi. Pertama, daerah yang memiliki kondisi perekonomian yang baik. Kedua, daerah-daerah dengan kondisi keamanan, politik, sosial dan budaya yang kondusif. Kondisi perekonomian daerah yang baik dan ditunjang oleh kondisi keamanan, politik, sosial budaya, dan birokrasi yang ramah terhadap kegiatan usaha, akan menciptakan daya saing investasi daerah. Kondisi yang baik pada faktor-faktor tersebut akan makin memengaruhi daya saing investasi daerah jika didukung oleh ketersediaan tenaga kerja yang cukup dengan kualitas yang baik dan infrastruktur fisik pendukung kegiatan usaha yang memadai. Oleh sebab itu, peran daerah untuk meningkatkan daya saing daerahnya akan sangat bergantung kepada kemampuan daerah untuk melakukan identifikasi faktor penentu daya saing dan strategi untuk meningkatkan daya saingnya.

Pada Tahun 2024, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah mengeluarkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), pengukuran IDSD dilakukan pada 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota se-Indonesia dan hanya 463 kabupaten/kota yang bisa dihitung skor IDSD-nya, sementara 51 kabupaten/kota yang tidak bisa dihitung skornya karena ketidaklengkapan data. Pengukuran IDSD mengacu pada kerangka pengukuran *Global Competitiveness Index* (GCI) yang didasarkan pada 4 (empat) komponen yakni lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi dan 12 pilar yaitu institusi, infrastruktur, Adopsi TIK, Stabilitas Ekonomi Makro, Kesehatan, Keterampilan, Pasar Produk, Pasar Tenaga Kerja, Sistem Keuangan, Ukuran Pasar, Dinamismo Bisnis serta Kapabilitas Inovasi.

Tabel 2.34
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2024

KABUPATEN/ KOTA	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM			PASAR			EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
Kepulauan Mentawai	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
Pesisir Selatan	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
Kab. Solok	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72
Sijunjung	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71
Tanah Datar	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61
Padang Pariaman	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58
Agam	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58
Lima Puluh Kota	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76
Pasaman	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38
Solok Selatan	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20

KABUPATEN/ KOTA	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM		PASAR				EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
Dharmasraya	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73
Pasaman Barat	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82
Padang	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34
Kota Solok	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98
Sawahlunto	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
Padang Panjang	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25
Bukittinggi	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92
Payakumbuh	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Pariaman	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63
Provinsi Sumatera Barat	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38
Nasional	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18

Sumber : Indeks Daya Saing Daerah, BRIN 2024

Berdasarkan Dokumen Indeks Daya Saing Daerah tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), skor IDSD Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2024 sebesar 4,58. Namun jika dilihat dari capaian indeks pilar daya saing Kabupaten Padang Pariaman, dari 12 pilar IDSD, terdapat 5 (lima) pilar memiliki skor yang lebih besar dari rata-rata nasional, yaitu pilar 1 (Kesehatan), pilar 2 (Infrastruktur), pilar 7 (Pasar Produk), pilar 8 (Pasar Tenaga Kerja) dan pilar 11 (Dinamisme Bisnis).

2.1.3.1 Pengeluaran Rata-Rata per Kapita per Bulan

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Pengeluaran Rata-Rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan, baik yang berasal dari pembelian, pemberian, maupun produksi sendiri, dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

Pada tahun 2021, pengeluaran untuk kelompok makanan sebesar Rp641.174,69 meningkat menjadi Rp649.140,00 pada tahun 2022, naik sekitar 1,2%. Sementara itu, pengeluaran non makanan turun dari Rp516.562,58 pada tahun 2021 menjadi Rp510.270,97 pada tahun 2022, turun sekitar 1,2%. Pengeluaran per kapita di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp1.317.747,00, naik Rp24.119,00 (1,9%) dibandingkan tahun 2023. Kontribusi pengeluaran makanan meningkat sedikit menjadi Rp715.317,00, sedangkan pengeluaran non makanan naik menjadi Rp602.430,00, menunjukkan pertumbuhan yang lebih signifikan pada kelompok non makanan. Secara keseluruhan, peningkatan pengeluaran non makanan mencerminkan kemampuan daya beli masyarakat yang membaik dan perubahan pola konsumsi, sementara pengeluaran makanan tetap relatif stabil. Data lengkap pengeluaran per kapita beserta rinciannya disajikan pada Tabel 2.35.

Tabel 2.35
Rata-rata Pengeluaran PerKapita Sebulan
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024

Tahun	Pengeluaran Makanan	Pengeluaran Non Makanan	Total Pengeluaran
2020	619.088,63	465.216,28	1.084.304,92
2021	641.174,69	516.562,58	1.157.737,27
2022	649 140,00	510 270,97	1 159 410,97
2023	713.517,00	580.111,00	1.293.628,00
2024	715.317,00	602.430,00	1.317.747,00

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2021-2024

Gambar 2.67
Persentase Pengeluaran Per Kapita Sebulan
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024

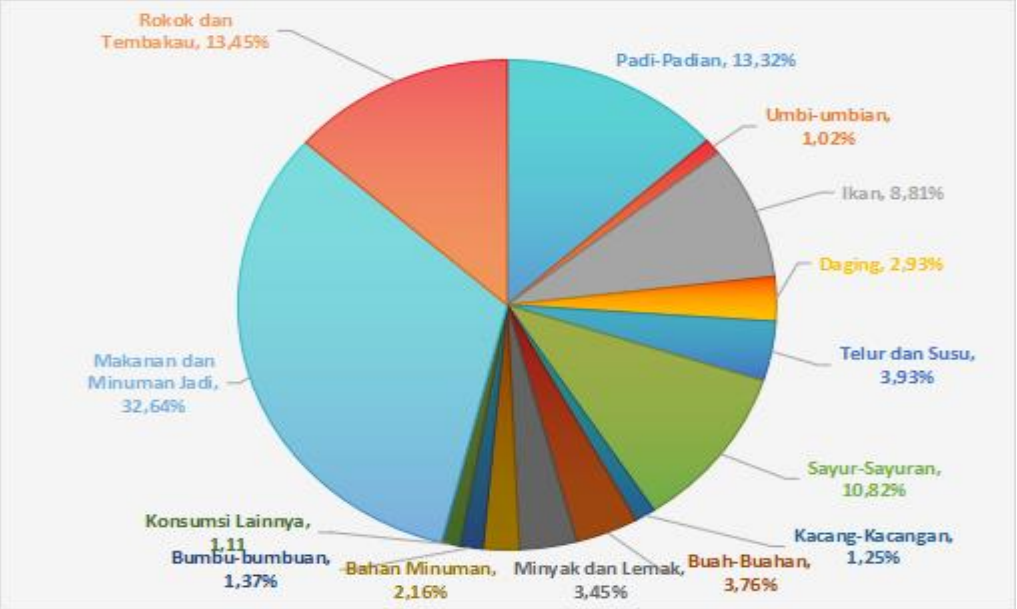


Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2020-2024

Selanjutnya, jika dirinci maka terlihat bahwa pengeluaran konsumsi masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman pada kelompok makanan lebih besar jika dibandingkan dengan kelompok non makanan sebagaimana diterangkan pada Gambar 2.67. Pada tahun 2022, 55,99 persen pengeluaran masyarakat digunakan untuk konsumsi makanan dan hanya 44,01 persen untuk non makanan. Untuk Tahun 2023, pengeluaran konsumsi masyarakat pada kelompok makanan sebesar 55,16 persen dan untuk kelompok non makanan sebesar 44,84 persen, jika dibandingkan pada tahun 2024 pengeluaran konsumsi masyarakat mengalami penurunan pada kelompok Pengeluaran makanan sebesar 54,28 persen tetapi pada pengeluaran non makanan mengalami peningkatan konsumsi sebesar 45,72 persen. Adapun pengeluaran terbanyak pada tahun 2024, yang digunakan untuk konsumsi makanan per kapita sebulan adalah makanan dan minuman jadi yakni sebesar 32,64 persen, rokok 13,45 persen, padi-padian sebesar 13,32 persen. Sementara itu, untuk pengeluaran non makanan terbanyak adalah perumahan, bahan bakar, penerangan, air sebesar 45,68 persen, aneka barang dan jasa 23,11 persen

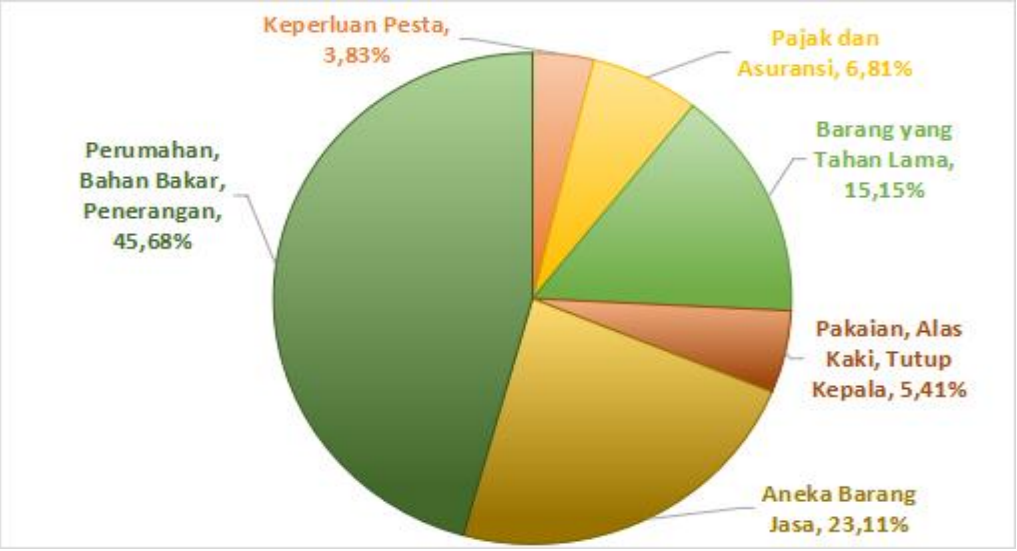
dan barang yang tahan lama 15,15 persen dengan rincian sebagaimana Gambar 2.68.

Gambar 2.68
Persentase Pengeluaran Konsumsi Masyarakat Pada Kelompok Makanan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024



Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2025

Gambar 2.69
Persentase Pengeluaran Konsumsi Masyarakat Pada Kelompok Non Makanan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024



Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2025

2.1.3.2 Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah merupakan perbandingan antara nilai tambah sektor tertentu terhadap jumlah angkatan kerja pada sektor tertentu. Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat

produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Berdasarkan informasi dan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa data angkatan kerja menurut sektor lapangan usaha belum tersedia, oleh sebab itu maka perhitungan produktivitas tenaga kerja dihitung berdasarkan total nilai tambah bruto pada seluruh sektor. Dari olahan data tersebut diperoleh nilai rasio produktivitas daerah kabupaten padang pariaman Tahun 2024 sebesar 8.70 dengan total nilai tambah bruto sebesar 26.808,46 triliun Rupiah dengan jumlah angkatan kerja 233.318 jiwa sebagaimana terlihat pada Tabel 2.36.

Tabel 2.36
Produktivitas Total Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2024

NO	LAPANGAN USAHA	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
1	Pertanian. Peternakan. Kehutanan & Perikanan	4,067.53	22.68	4,180.13	22.65	4,742.34	21.37	5,152.48	20.55	5,414.38	20.20
2	Pertambangan & Penggalian	1,331.50	7.42	1,391.91	7.54	1,489.98	6.71	1,625.66	6.48	1,693.09	6.32
3	Industri Pengolahan	2,007.60	11.19	2,205.04	11.95	2,422.53	10.92	2,627.66	10.48	2,763.25	10.31
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6.77	0.04	7.06	0.04	7.42	0.03	7.80	0.03	8.15	0.03
5	Pengadaan air, Pengelolaan sampah, limbah dan Daur Ulang	9.43	0.05	9.89	0.05	10.67	0.05	11.44	0.05	12.09	0.05
6	Konstruksi	1,822.69	10.16	1,966.84	10.66	2,179.33	9.82	2,463.43	9.83	2,720.74	10.15
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	1,889.59	10.54	1,965.31	10.65	2,315.94	10.44	2,555.30	10.19	2,732.82	10.19
8	Transportasi dan Pergudangan	2,920.91	16.29	2,503.86	13.57	4,291.85	19.34	5,508.84	21.97	6,012.71	22.43
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	187.96	1.05	208.69	1.13	282.17	1.27	317.74	1.27	334.55	1.25
10	Infromasi dan Komunikasi	658.82	3.67	731.24	3.96	833.3	3.75	909.97	3.63	966.55	3.61
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	293.78	1.64	326.36	1.77	361.95	1.63	384.47	1.53	411.94	1.54
12	Real Estat	197.59	1.10	207.02	1.12	229.45	1.03	256.63	1.02	274.34	1.02
13	Jasa Perusahaan	15.12	0.08	15.38	0.08	17.00	0.08	19.19	0.08	20.15	0.08
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1,018.99	5.68	1,125.95	6.10	1,189.18	5.36	1,268.79	5.06	1,375.02	5.13
15	Jasa Pendidikan	1,110.49	6.19	1,181.71	6.40	1,325.76	5.97	1,401.34	5.59	1,461.52	5.45
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	126.68	0.71	141.59	0.77	155.50	0.70	174.94	0.70	186.95	0.70
17	Jasa lainnya	269.36	1.50	287.10	1.56	338.99	1.53	385.18	1.54	420.21	1.57
PDRB		17,934.81	**100**	**100**	100.00	22,193.36	100.00	25,070.86	100.00	26,808.46	100.00
JUMLAH ANGKATAN KERJA		199,985		199,985		213,620		221,992		233,318	
PRODUKTIVITAS TOTAL		0.09		0.09		9.63		8.85		8.70	

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2022-2025

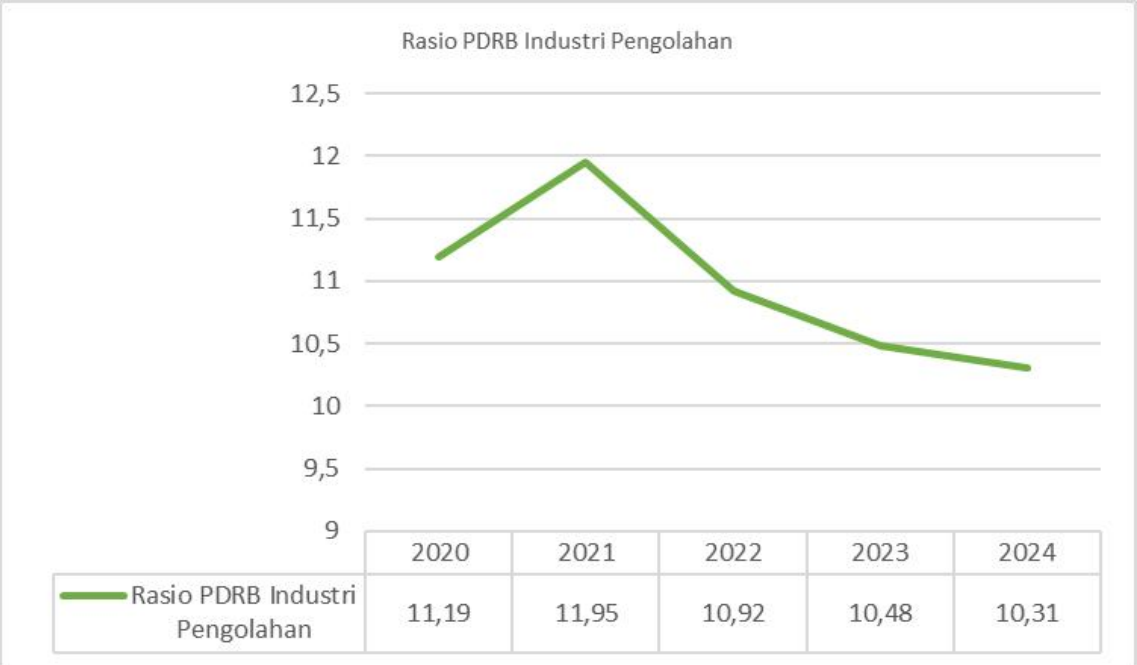
2.1.3.3 IPTEK, Inovasi dan Produkstivitas Ekonomi

1) Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)

Indikator Rasio PDRB Industri Pengolahan mencerminkan peranan sektor industri pengolahan dalam membentuk PDRB daerah, yang dihitung berdasarkan proporsi nilai tambah sektor ini terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB). Semakin besar nilai tambah yang dihasilkan, semakin tinggi kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Industri pengolahan sendiri merupakan sektor penting karena mampu menciptakan nilai tambah melalui pengolahan bahan baku menjadi produk yang lebih bernilai, termasuk industri mikro dan kecil.

Gambar 2.70 menunjukkan bahwa rasio PDRB industri pengolahan Kabupaten Padang Pariaman pada periode 2020–2024 cenderung menurun. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 11,95%, sementara rasio terendah tercatat pada tahun 2024 sebesar 10,31%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun nilai tambah sektor industri pengolahan meningkat secara absolut, kontribusinya terhadap total PDRB daerah relatif menurun karena pertumbuhan sektor lain lebih dominan.

Gambar 2.70
Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio PDRB Industri Pengolahan	11,19	11,95	10,92	10,48	10,31

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2025

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman, sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan positif dari tahun 2020 hingga 2024, dengan nilai PDRB meningkat dari Rp2.007,60 miliar pada 2020 menjadi Rp2.763,25 miliar pada 2024. Hal ini menunjukkan adanya aktivitas produksi yang terus berkembang dan kontribusi nyata industri pengolahan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

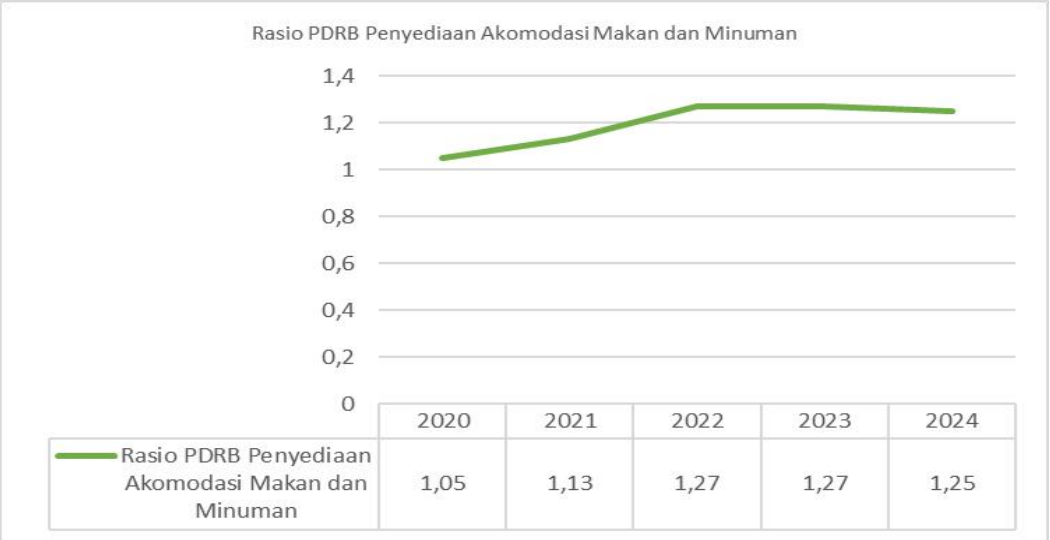
Meski demikian, kontribusi sektor ini terhadap total PDRB cenderung menurun, dari 11,19% pada 2020 menjadi 10,31% pada 2024, menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman lebih banyak ditopang oleh sektor lain, terutama transportasi, perdagangan, dan pertanian. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendorong hilirisasi, peningkatan nilai tambah produk, dan investasi industri agar sektor pengolahan dapat berkontribusi lebih besar terhadap struktur perekonomian daerah.

2) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minuman

Akomodasi adalah tempat yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan, misalnya tempat tinggal sementara bagi orang yang bepergian. Dalam pariwisata, akomodasi merupakan salah satu industri penting karena menjadi bagian dari industri pariwisata secara keseluruhan.

Akomodasi menyediakan ruang bagi pengunjung untuk beristirahat, menginap, makan, mandi, serta menikmati layanan dan fasilitas hiburan yang tersedia. Salah satu bentuk akomodasi yang berkontribusi terhadap perekonomian adalah sektor jasa makanan dan minuman, yang turut meningkatkan rasio PDRB Kabupaten Padang Pariaman.

Gambar 2.71
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minuman
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minuman	1,05	1,13	1,27	1,27	1,25

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2025

Penyediaan akomodasi makanan dan minuman merupakan salah satu pendukung PDRB Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan gambar di atas, rasio PDRB sektor ini mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023, dari 1,27 pada 2023 menjadi sedikit menurun menjadi 1,25 pada 2024.

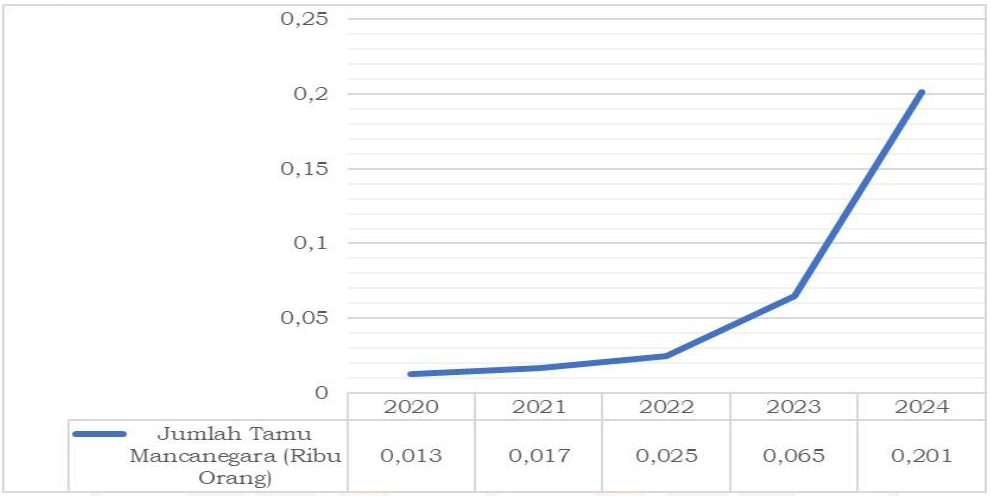
Rasio PDRB penyediaan akomodasi makanan dan minuman menunjukkan tren peningkatan dari 2020 hingga 2023, mencerminkan peran strategis sektor ini dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya pariwisata dan ekonomi kreatif. Meski terjadi penurunan pada 2024, hal ini menegaskan perlunya penguatan kebijakan dalam pengembangan destinasi wisata, peningkatan kualitas layanan akomodasi dan kuliner, serta pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran. Dengan langkah-langkah tersebut, sektor ini diharapkan terus memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB, sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi lokal.

3) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (orang)

Indikator jumlah tamu wisatawan mancanegara merupakan ukuran penting untuk menilai perkembangan sektor pariwisata Kabupaten Padang Pariaman, karena mencerminkan daya tarik destinasi sekaligus menjadi acuan pemerintah dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan pariwisata. Secara teknis, indikator ini seharusnya dihitung berdasarkan wisatawan yang menginap di hotel berbintang. Namun, hingga saat ini Kabupaten Padang Pariaman belum memiliki hotel berbintang, sehingga data yang digunakan berasal dari tamu yang menginap di hotel non-bintang maupun

homestay. Kondisi ini menegaskan bahwa potensi pariwisata daerah masih sangat besar untuk dikembangkan melalui peningkatan kapasitas akomodasi, penguatan peran masyarakat dalam penyediaan *homestay*, dan dorongan investasi pembangunan hotel berbintang. Dengan demikian, indikator ini tidak hanya menggambarkan jumlah kedatangan wisatawan, tetapi juga merepresentasikan peluang pertumbuhan ekonomi kreatif dan jasa pariwisata daerah.

Gambar 2.72
Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara
Tahun 2020-2024



Sumber : Disparpora Kabupaten Padang Pariaman, 2025

Gambar 2.72 menunjukkan bahwa jumlah tamu mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Padang Pariaman mengalami peningkatan signifikan pada periode 2020–2024. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 0,013 ribu orang, meningkat menjadi 0,017 ribu pada 2021, dan terus bertambah hingga 0,025 ribu pada 2022. Pertumbuhan lebih pesat terlihat pada 2023 dengan 0,065 ribu orang, dan melonjak tajam pada 2024 mencapai 0,201 ribu orang. Sebagian besar wisatawan mancanegara menginap di Kabupaten Padang Pariaman untuk mengunjungi objek wisata unggulan minat khusus, Air Terjun Nyarai, yang dikenal sebagai destinasi petualangan berbasis alam dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Air Terjun Nyarai menjadi magnet utama kunjungan internasional, meskipun fasilitas akomodasi masih terbatas pada *homestay* dan penginapan sederhana yang dikelola oleh masyarakat lokal.

4) Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional (%)

Di Kabupaten Padang Pariaman, potensi ekonomi kreatif sangat besar, dengan dukungan kekayaan budaya Minangkabau, keanekaragaman kuliner, serta kreativitas masyarakat yang terus berkembang. Namun demikian, pengembangan sektor ini masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi secara terarah dan kolaboratif.

Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi kreatif di Padang Pariaman antara lain: terbatasnya akses pelaku usaha terhadap pembiayaan, minimnya pelatihan dan kapasitas SDM kreatif, rendahnya literasi pemasaran digital, inovasi produk yang masih

terbatas, serta infrastruktur dan teknologi pendukung yang belum merata di seluruh wilayah.

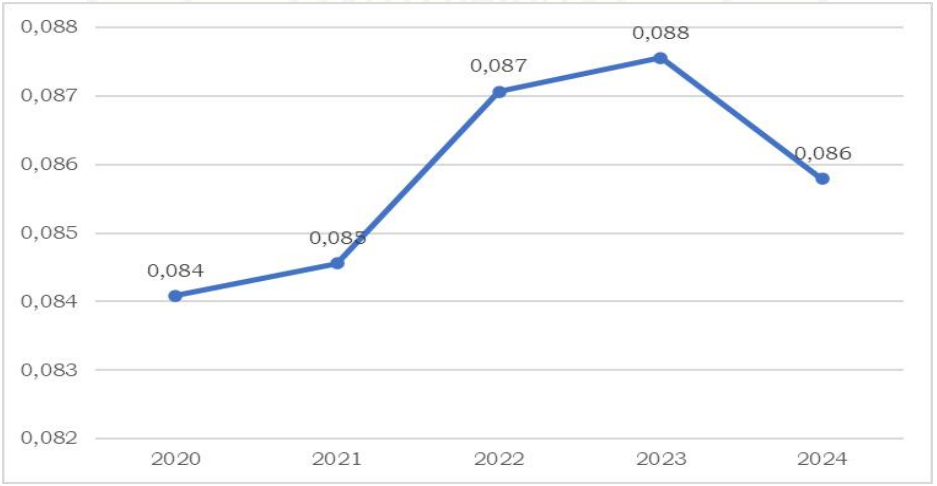
Pengembangan ekonomi kreatif bukan hanya tentang menciptakan produk, tetapi juga merawat identitas, budaya, dan masa depan ekonomi daerah. Kabupaten Padang Pariaman memiliki modal besar dalam bentuk budaya yang hidup, sumber daya alam yang mendukung, serta masyarakat yang kreatif. Dengan strategi yang tepat dan dukungan lintas sektor, ekonomi kreatif diyakini mampu menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi berkelanjutan di Padang Pariaman.

Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Ekonomi Kreatif merupakan indikator yang menggambarkan bagaimana kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Indikator ini juga menggambarkan seberapa besar peran dari sektor ekonomi kreatif dalam menciptakan nilai tambah dari suatu produk, membuka lapangan pekerjaan. Hingga kemajuan ekonomi secara keseluruhan. Dengan memperkuat sektor ekonomi kreatif, Kabupaten Padang Pariaman dapat memperluas diversifikasi ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan nilai tambah produk dan jasa lokal, serta meningkatkan daya tarik wisata dan investasi. Langkah-langkah untuk mendukung ekosistem ekonomi kreatif seperti pelatihan, fasilitasi akses pasar, dan pengembangan infrastruktur kreatif, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan sektor ini. Diharapkan pada tahun 2025, Rasio PDRB Ekonomi Kreatif Kabupaten Padang Pariaman dapat mencapai 0,09%.

Perhitungan PDRB dan PDB Ekonomi Kreatif dilakukan dengan mencakup tujuh kategori lapangan usaha yang termasuk:

1. Industri Pengolahan;
2. Perdagangan Besar dan Eceran;
3. Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
4. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
5. Informasi dan Komunikasi;
6. Jasa Perusahaan; Jasa Pendidikan; dan
7. Jasa Lainnya.

Gambar 2.73
Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap
PDB Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2020-2024



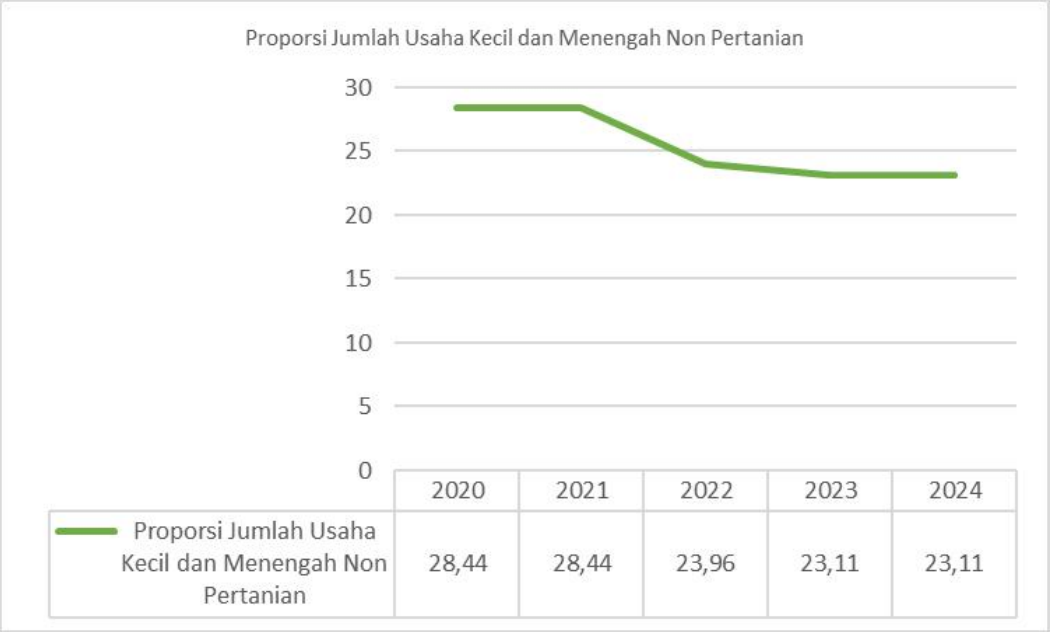
Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka dan Statistik Indonesia 2025, diolah

Gambar 2.73 di atas menunjukkan perkembangan nilai Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2020-2024 yang cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 nilai tercatat sebesar 0,084 dan meningkat menjadi 0,085 di tahun 2021. Tren peningkatan berlanjut pada 2022 dengan capaian 0,087, bahkan mencapai titik tertinggi pada 2023 sebesar 0,088. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 0,086. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat tren positif hingga 2023, upaya konsistensi perlu diperkuat agar capaian dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

5) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada level Kab/Kota (%)

Proporsi jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian merupakan sebuah perbandingan mengenai jumlah unit UKM Non Pertanian terhadap seluruh unit UKM pada tahun yang sama. Indikator ini mengukur kontribusi sektor non pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Padang Pariaman. Proporsi jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian menjadi tolok ukur yang memberikan gambaran tentang diversifikasi ekonomi dan keterlibatan sektor non pertanian dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan menumbuhkan nilai tambah ekonomi lokal. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian Kabupaten Padang Pariaman mengalami penurunan setiap tahunnya, hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.74.

Gambar 2.74
Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024



Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2025,diolah

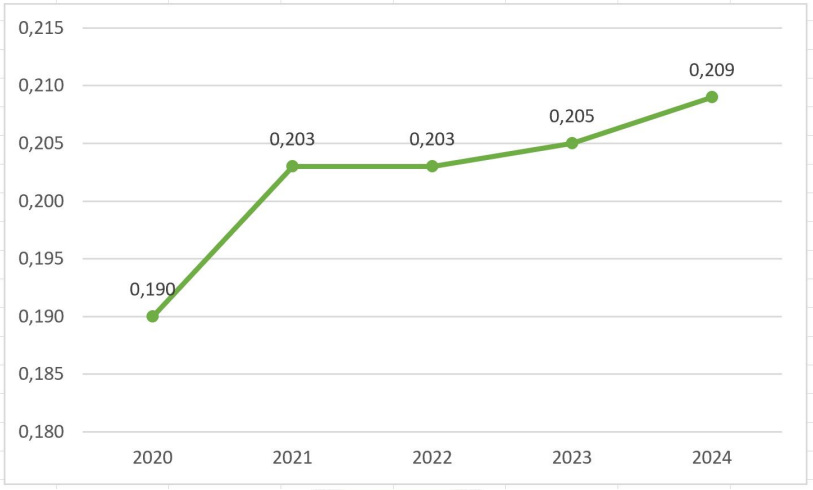
Pada Gambar 2.74, proporsi UKM non-pertanian di Kabupaten Padang Pariaman mengalami penurunan dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 dan 2021, proporsi UKM non-pertanian berada pada angka yang sama, yaitu sebesar 28,44 persen. Namun, mulai tahun

2022 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 23,96 persen, dan terus menurun hingga mencapai 23,11 persen pada tahun 2023 serta tetap pada angka tersebut di tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya pergeseran atau stagnasi dalam pengembangan UKM di luar sektor pertanian, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan akses pembiayaan, lemahnya daya saing, atau dampak lanjutan dari krisis ekonomi akibat pandemi.

6) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)

Proporsi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ditentukan berdasarkan perhitungan jumlah pelaku usaha dengan kriteria tertentu terhadap total pelaku usaha. Kriteria yang dimaksud mencakup pelaku usaha dengan omzet lebih dari 2 miliar hingga 50 miliar yang berstatus berusaha sendiri, dibantu buruh tidak tetap, pekerja keluarga, tenaga kerja tidak dibayar, maupun dibantu buruh tetap yang menerima upah. Selain itu, perhitungan juga mencakup pelaku usaha dengan omzet kurang dari atau sama dengan 2 miliar yang mempekerjakan buruh tetap dengan upah, dengan ketentuan jumlah tenaga kerja antara 3 hingga 26 orang untuk sektor pertanian, atau antara 3 hingga 22 orang untuk sektor non-pertanian. Seluruh komponen tersebut kemudian dibandingkan dengan jumlah total pelaku usaha untuk mendapatkan proporsi UKM. Proporsi jumlah Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat pada Gambar 2.75.

Gambar 2.75
Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Padang Pariaman, 2025

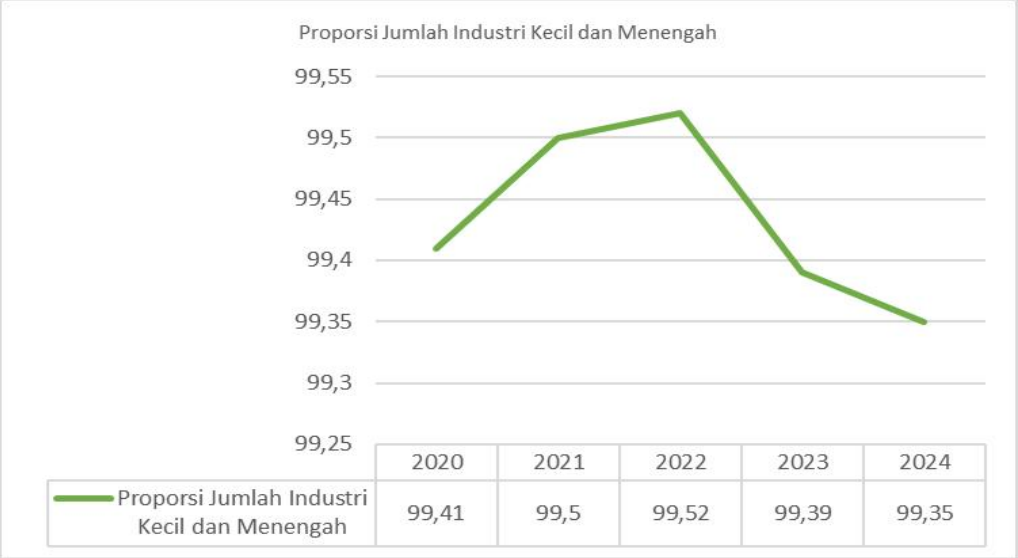
Proporsi jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan tren yang cenderung meningkat selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, proporsi UKM tercatat sebesar 0,190, kemudian mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2021 menjadi 0,203. Angka tersebut relatif stagnan pada tahun 2022 dengan nilai yang sama, sebelum kembali meningkat secara bertahap menjadi 0,205 pada tahun 2023 dan mencapai 0,209 pada tahun 2024. Perkembangan ini mencerminkan adanya pertumbuhan positif meskipun dengan laju

peningkatan yang melambat setelah lonjakan awal pada tahun 2021. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa sektor UKM di Kabupaten Padang Pariaman terus mengalami penguatan dan menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung perekonomian daerah.

7) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (%)

Proporsi jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan sebuah perbandingan mengenai jumlah unit IKM terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama. Indikator proporsi jumlah IKM bertujuan untuk merepresentasikan bagian dari IKM yang cenderung sudah berubah menjadi sektor formal dan berpotensi untuk tumbuh. Peningkatan proporsi IKM yang diikuti dengan menurunnya industri mikro dapat menunjukkan meningkatnya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Proporsi jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.76.

Gambar 2.76
Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024



Sumber : DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, 2025

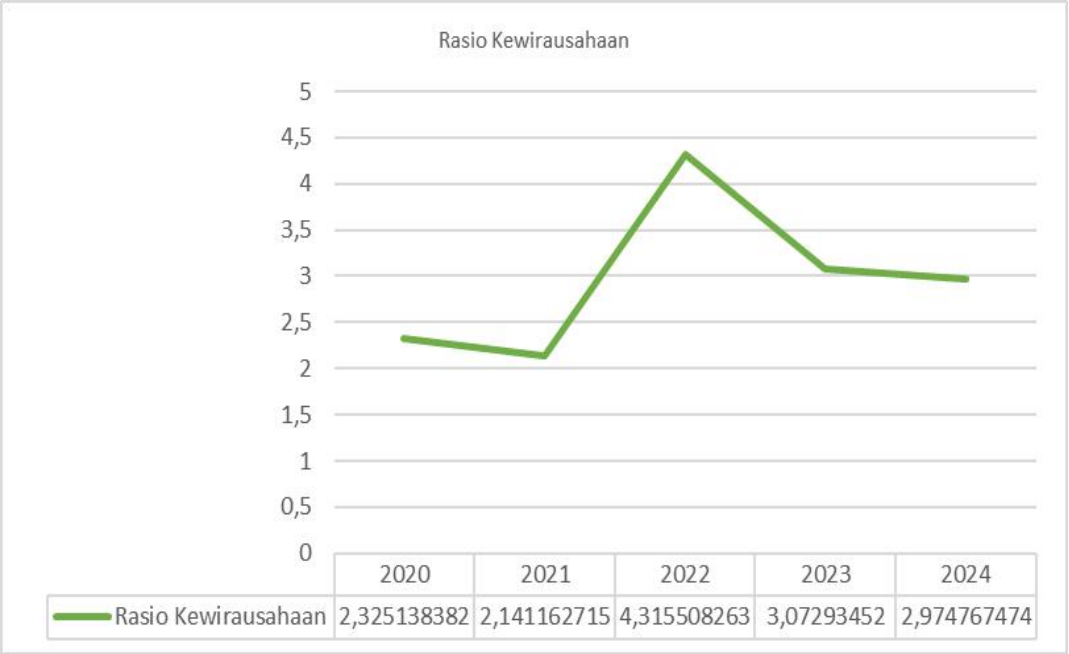
Berdasarkan grafik di atas, proporsi IKM meningkat dari 99,41% pada 2020 menjadi 99,50% pada 2021, dan sedikit naik menjadi 99,52% pada 2022. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan unit usaha kecil dan menengah yang relatif konsisten, didukung oleh program pembinaan dan kemudahan perizinan usaha.

Namun, pada 2023–2024, proporsi IKM menurun berturut-turut menjadi 99,39% dan 99,35%. Meskipun penurunan ini kecil, tren tersebut menunjukkan adanya penurunan daya saing atau berkurangnya jumlah IKM dibandingkan total industri. Faktor penyebabnya antara lain keterbatasan modal kerja, kesulitan mengakses pembiayaan dari perbankan atau lembaga keuangan, adaptasi yang belum optimal terhadap teknologi digital (online marketplace), serta minimnya minat generasi muda untuk melanjutkan atau mengembangkan usaha keluarga, yang berpotensi menyebabkan penutupan beberapa IKM.

8) Rasio Kewirausahaan (%)

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha. Rasio Kewirausahaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.77.

Gambar 2.77
Rasio Kewirausahaan Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Kewirausahaan	2,325138382	2,141162715	4,315508263	3,07293452	2,974767474

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2025,diolah

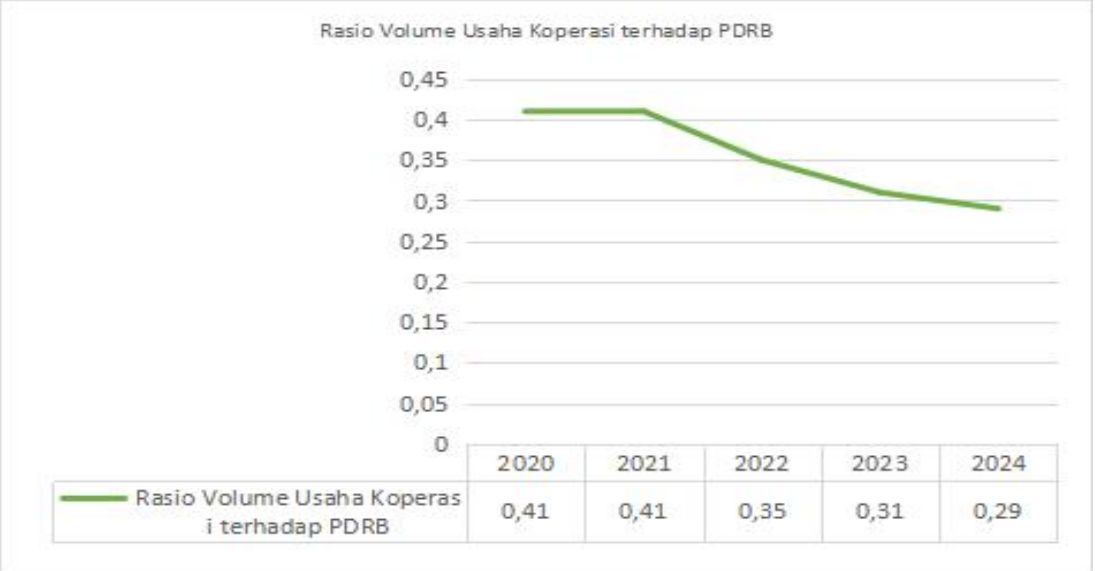
Berdasarkan definisi dan tujuan dari indikator rasio kewirausahaan dan data historis sejak tahun 2020 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa kontribusi penyerapan tenaga kerja melalui wirausaha mengalami penurunan yang cukup drastis pada tahun 2020 hingga tahun 2021 dikarenakan terjadinya pandemi Covid-19. Pada tahun 2022, sektor wirausaha di Kabupaten Padang Pariaman berhasil meningkatkan kembali jumlah rasio kewirausahaan walaupun mengalami sedikit penurunan kembali pada tahun 2023.

9) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)

Indikator Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB merupakan sebuah perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan

pembiayaan dalam satu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Gambar 2.78
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM serta BPS kabupaten Padang Pariaman, diolah

Persentase Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB di Kabupaten Padang Pariaman sejak tahun 2020 hingga 2024 cenderung menurun, sebagaimana terlihat pada Gambar 2.78. Persentase tertinggi tercatat sebesar 0,41% pada tahun 2020 dan 2021, kemudian mengalami penurunan signifikan pada tahun 2024 menjadi 0,29%. Penurunan ini menunjukkan lemahnya daya saing koperasi di tengah persaingan usaha dengan sektor swasta dan UMKM non-koperasi, sehingga kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah semakin berkurang dan memerlukan intervensi kebijakan yang lebih strategis.

Hal ini disebabkan oleh beberapa koperasi yang mengalami penurunan volume usaha akibat keterbatasan modal, kurangnya inovasi produk, lemahnya manajemen usaha, serta masih lambat dalam memanfaatkan platform digital untuk pemasaran, distribusi, dan transaksi, sehingga tertinggal dari pelaku usaha yang telah bertransformasi secara digital.

10) Return of Asset (ROA) BUMD (%)

Return on Asset (ROA) BUMD merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan/BUMD melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA BUMD, dapat diketahui tingkat prioritas BUMD tersebut jika dibandingkan dengan BUMD lainnya dalam sektor yang sama. Indikator ini juga memberikan gambaran mengenai seberapa efektif manajemen BUMD dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba, sekaligus menjadi dasar evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan dalam pengembangan strategi usaha, efisiensi operasional, dan alokasi investasi di sektor daerah.

Tabel 2.37
ROA BUMD di Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2021-2024

No.	2020	2021	2022	2023	2024
	N/A	-2,11%	-1,41%	-4,18%	2,37%

Sumber: LKPD, BPS, Laporan Keuangan BUMDKabupaten Padang Pariaman

Tabel 2.37 menunjukkan ROA BUMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 sampai 2023. Berdasarkan audit laporan keuangan pada 2 (dua) BUMD di Kabupaten Padang Pariaman yaitu Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tergambarkan bahwa pada tiga tahun terakhir nilai ROA PDAM sangat rendah sekali berada dalam angka minus (-), hal ini menunjukkan bahwa PDAM di Kabupaten Padang Pariaman belum mempunyai kemandirian fiskal, sehingga kontribusi PDAM dalam peningkatan perekonomian belum berjalan optimal. Sedangkan ROA Bank Pengkreditan Rakyat perlahan menunjukkan trend yang positif, sehingga dapat diasumsikan bahwa BPR sudah mempunyai kemandirian fiskal dari efisiensi penggunaan asetnya.

11) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari dua hari dalam seminggu, atau sedang berusaha memperoleh pekerjaan. Sedangkan tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah penganggur atau pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Pengangguran merupakan permasalahan makroekonomi yang memengaruhi kehidupan manusia secara langsung dan merupakan salah satu masalah paling berat, yang disebabkan oleh ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja (Sukirno, 2019).

Gambar 2.79
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020-2024



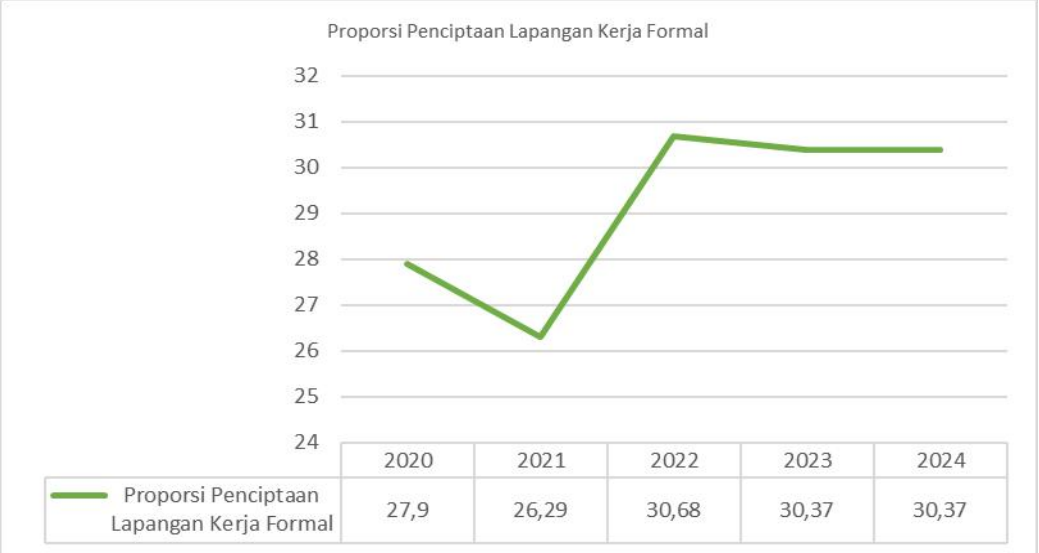
Sumber : Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka, 2020-2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun 2024 mengalami penurunan dari 6,69 persen di Tahun 2023 menjadi 6,59 persen di Tahun 2024. Angka TPT ini lebih tinggi terjadi pada perempuan dari pada laki-laki dengan perbandingan 8,74 persen banding 5,83 persen. Kemudian, untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun 2023 mengalami sedikit kenaikan dari 6,60 persen di Tahun 2022 menjadi 6,69 persen di Tahun 2023. Angka TPT ini lebih tinggi terjadi pada laki-laki daripada perempuan dengan perbandingan 6,74 persen banding 6,63 persen. Namun angka pengangguran Kabupaten Padang Pariaman masih berada dibawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Perbandingan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Padang Pariaman dan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar di atas.

12) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)

Proprosi penciptaan lapangan kerja formal menunjukkan seberapa dominan pekerja dengan status pekerjaan utama yang termasuk dalam pekerja formal sesuai dengan ketentuan nasional yang berlaku. Semakin tinggi nilai persentasenya, maka semakin dominan kekuatan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan kerja formal. Dengan meningkatkan proporsi ini, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Gambar 2.80 menunjukkan proporsi penciptaan lapangan kerja formal di Kabupaten Padang Pariaman.

Gambar 2.80
Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024



Sumber : Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka, 2020-2025

Di Kabupaten Padang Pariaman, proporsi penciptaan lapangan kerja formal menunjukkan tren yang dinamis selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, proporsi lapangan kerja formal tercatat sebesar 27,90%, menurun menjadi 26,29% pada 2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi peningkatan signifikan menjadi 30,68%, dan proporsi tersebut relatif stabil pada tahun 2023 dan 2024, masing-masing sebesar 30,37%.

13) Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah ukuran tingkat pembaruan yang dilakukan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. IID mencakup inovasi pada pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan inovasi lainnya yang dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Penilaian IID dilakukan melalui sistem berbasis indikator Satuan Pemerintah Daerah (SPD) dan Satuan Inovasi Daerah (SID), dengan kategori skor mulai dari *Kurang Inovatif* hingga *Sangat Inovatif*. Tujuannya adalah mendorong kompetisi positif antar daerah, memperbaiki kualitas layanan, meningkatkan efisiensi pemerintahan, serta membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan.

Data Indeks Inovasi Daerah (IID) menunjukkan bahwa Kabupaten Padang Pariaman mengalami perkembangan inovasi yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada 2020, tercatat 71 inovasi dengan skor 7,035 dan menempati peringkat ke-13 nasional. Pada 2021, jumlah inovasi menurun menjadi 67 dengan skor 40,64 dan peringkat turun ke posisi 188, yang mencerminkan tantangan konsistensi dalam pengelolaan inovasi. Sejak 2022, terjadi lonjakan signifikan menjadi 279 inovasi dengan skor 69,59 dan peringkat ke-10 nasional, terutama didorong oleh pertumbuhan inovasi pada sektor tata kelola pemerintahan dan inovasi lainnya. Tren positif ini berlanjut pada 2023 dengan 282 inovasi (skor 83,63; peringkat ke-7) dan mencapai puncaknya pada 2024 dengan 303 inovasi, skor 85,73, serta predikat *Sangat Inovatif*.

Tabel 2.38
Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Inovasi Daerah			Jumlah	Skor Total	Peringkat IIID
	Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan	Lainnya			
2020	59	3	9	71	7.035	13
2021	57	3	7	67	40.64	188
2022	225	29	25	279	69.59	10
2023	210	42	30	282	83,63	7
2024	200	60	43	303	85,73	11

Sumber : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2020-2024

Tabel 2.38 menunjukkan perkembangan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022-2024 yang terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan strategi daerah dalam membangun ekosistem inovasi yang berkesinambungan, mulai dari penguatan regulasi, pembinaan perangkat daerah, hingga perluasan partisipasi masyarakat. Keberhasilan tersebut tidak hanya berdampak pada pengakuan nasional, tetapi juga memberi kontribusi terhadap peningkatan indikator kinerja makro daerah. Dengan ekosistem inovasi yang semakin baik, Kabupaten Padang Pariaman berada pada posisi strategis untuk mempertahankan dan memperluas predikat Sangat Inovatif pada tahun mendatang.

2.1.3.4 Penerapan Ekonomi Hijau

Ekonomi hijau adalah konsep pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sambil mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Prinsip utama ekonomi hijau adalah menciptakan pertumbuhan

ekonomi yang berkelanjutan dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Beberapa penerapan ekonomi hijau dalam berbagai sektor antara lain energi terbarukan, pengelolaan limbah, pertanian berkelanjutan, transportasi ramah lingkungan, industri hijau, pengelolaan sumber daya alam, serta pendidikan dan kesadaran masyarakat.

Penerapan ekonomi hijau melalui energi terbarukan antara lain dengan menggunakan tenaga surya, angin, hidro dan biomassa untuk menggantikan bahan bakar fosil, dan juga pembangunan pembangunan listrik tenaga surya di daerah terpencil untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Sedangkan penerapan ekonomi hijau pada pertanian berkelanjutan antara lain penggunaan pupuk organik dan pestisida alami untuk mengurangi dampak negatif terhadap tanah dan air, penerapan sistem pertanian terpadu seperti argoforestri yang menggabungkan tanaman pangan dengan pohon untuk nmeningkatkan keberlanjutan ekosistem. Penerapan ekonomi hijau ini tidak hanya membantu menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga dapat menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi ketimpangan sosial, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Indeks Ekonomi Hijau adalah alat pengukuran yang menilai kinerja suatu wilayah dalam menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Indeks ini mencakup indikator lingkungan, ekonomi, dan sosial, seperti efisiensi penggunaan sumber daya alam, kontribusi sektor ekonomi hijau terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta tingkat emisi gas rumah kaca.

Kabupaten Padang Pariaman telah menunjukkan komitmen dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi hijau ke dalam perencanaan pembangunannya. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), salah satu arah kebijakan yang diusung adalah penerapan ekonomi hijau, yang mencakup indikator seperti rasio PDRB dan ekspor barang serta jasa. Selain itu, program ECHO Green telah mempromosikan model ekonomi hijau, khususnya dalam pertanian ramah lingkungan yang inklusif. Inisiatif ini diharapkan dapat diadopsi oleh pemerintah nagari dalam perencanaan pembangunan, sehingga mendukung peningkatan Indeks Ekonomi Hijau di wilayah tersebut. Dengan langkah-langkah strategis ini, Kabupaten Padang Pariaman berupaya meningkatkan kinerja ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

1) Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki peran signifikan dalam perekonomian Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan data yang tersedia hingga tahun 2024, kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan tren yang konsisten. Rasio PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah persentase kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap total PDRB suatu daerah. PDRB sendiri adalah nilai total barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam suatu wilayah selama periode waktu tertentu (biasanya satu tahun). Proporsi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas dalam kelompok lapangan usaha (sektor) pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan.

Berikut adalah data kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2020-2024 s:

Tabel 2.39
Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020 - 2024

Tahun	PDRB Total (Juta Rp)	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (juta Rp)	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)
2020	17,934.81	4,065.46	22.6679848
2021	18,455.09	4,180.13	22.6502824
2022	22,193.35	4,742.34	21.3682928
2023	25,070.85	5,152.48	20.5516765
2024	26,808.95	5,414.88	20.1980309

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2021-2025

Dari tabel di atas, terlihat bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan secara konsisten memberikan kontribusi rata-rata diatas 20% terhadap PDRB Kabupaten Padang Pariaman selama periode 2021 hingga 2024. Ini menunjukkan stabilitas peran sektor tersebut dalam perekonomian daerah, yang mana juga pertumbuhan sektor tersebut seiring dengan pertumbuhan PDRB total Kabupaten Padang Pariaman. Dengan demikian, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi pilar utama dalam struktur ekonomi Kabupaten Padang Pariaman, dan diharapkan terus berkembang seiring dengan upaya peningkatan produktivitas dan keberlanjutan.

2) Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Juta/Orang)

Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja pertanian diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, sehingga berdampak pada kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Padang Pariaman. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat agar langkah-langkah yang diambil sesuai dengan target yang diharapkan.

Secara umum, indikator produktivitas diartikan sebagai hubungan antara output berupa barang atau jasa dengan input sumber daya atau tenaga yang digunakan dalam suatu proses produksi. Dalam konteks ini, fokusnya adalah produktivitas tenaga kerja sebagai acuan keberhasilan dalam menghasilkan produk tertentu. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi salah satu penyangga perekonomian, dengan sebagian besar tenaga kerja masyarakat terlibat di sektor ini.

Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja diukur sebagai besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk, dihitung dengan pendekatan rasio antara output berupa barang dan jasa terhadap tenaga kerja yang digunakan, baik individu maupun kelompok, dalam satuan waktu tertentu.

Tabel 2.40
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Tahun	PDRB Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan (Juta)	Jumlah Penduduk Bekerja Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Juta/Orang)
2020	4.067,53	65.484	62,11
2021	4.180,13	50.894	82,13
2022	4.742,34	61.771	76,77
2023	5.152,48	59.895	86,02
2024	5.414,88	64.401	84,08

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2021-2025

Berdasarkan Tabel 2.40, produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Padang Pariaman selama periode tahun 2020–2024 menunjukkan dinamika yang perlu dicermati sebagai bagian dari evaluasi capaian pembangunan ekonomi.

Pada tahun 2020, data produktivitas belum tersedia. Memasuki tahun 2021, PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tercatat sebesar Rp 4.180,13 miliar dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 50.894 orang, menghasilkan produktivitas sebesar Rp 8,21 juta per tenaga kerja. Namun, pada tahun 2022, meskipun nilai PDRB meningkat menjadi Rp 4.742,34 miliar, jumlah tenaga kerja juga naik signifikan menjadi 61.771 orang, sehingga produktivitas mengalami penurunan menjadi Rp 7,67 juta per tenaga kerja.

Pada tahun 2023, produktivitas meningkat tajam menjadi Rp 8,60 juta per tenaga kerja, seiring dengan naiknya PDRB menjadi Rp 5.152,48 miliar dan menurunnya jumlah tenaga kerja menjadi 59.895 orang. Sementara itu, pada tahun 2024, meskipun nilai PDRB kembali meningkat menjadi Rp 5.414,88 miliar, produktivitas sedikit menurun menjadi Rp 8,40 juta per tenaga kerja, disebabkan oleh peningkatan jumlah pekerja menjadi 64.401 orang. Fluktuasi produktivitas ini mengindikasikan bahwa peningkatan *output* sektor belum selalu dibarengi dengan efisiensi tenaga kerja.

2.1.2.5 Transformasi Digital

1) Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Indeks Transformasi Digital adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana sebuah organisasi, sektor, atau negara telah mengadopsi teknologi digital dalam operasional dan layanannya. Indeks ini mencakup berbagai aspek, antara lain infrastruktur digital, adopsi teknologi oleh masyarakat dan bisnis, kesiapan regulasi, serta inovasi digital. Beberapa contoh indeks transformasi digital yang sering digunakan adalah Digital Economy and Society Index (DESI), Networked Readiness Index (NRI), E-Government Development Index (EGDI), dan Digital Competitiveness Index. Di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama berbagai lembaga telah mengembangkan indeks khusus untuk mengukur transformasi digital di sektor pemerintahan, industri, dan masyarakat. Berikut adalah data Indeks Masyarakat Digital Indonesia untuk periode 2020–2024:

Tabel 2.41
Indeks Masyarakat Digital Indonesia
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024

Tahun	Indeks Masyarakat Digital Indonesia
2020	N/A
2021	N/A
2022	42,24
2023	43,74
2024	46,78

Sumber : Kementerian Komunikasi dan Digital, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 2.41, tren Indeks Masyarakat Digital Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif dan stabil selama tiga tahun terakhir. Kenaikan indeks ini didorong oleh peningkatan infrastruktur digital, transformasi digital di berbagai sektor, meningkatnya literasi digital, serta dukungan kebijakan dan regulasi. Namun, beberapa tantangan masih harus diatasi, antara lain kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan, ancaman keamanan siber yang terus berkembang, serta adopsi teknologi yang belum merata, terutama di sektor UMKM yang menghadapi kendala integrasi teknologi dalam bisnis mereka.

Untuk mempertahankan dan mempercepat tren pertumbuhan ini, diperlukan langkah strategis seperti pemerataan akses digital ke seluruh wilayah, peningkatan pelatihan dan edukasi bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil, penguatan sistem keamanan siber, serta dorongan inovasi dan investasi di bidang teknologi.

2.1.2.6 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi Ekonomi Domestik dan Global adalah proses penyatuan aktivitas ekonomi suatu negara dengan ekonomi global melalui perdagangan, investasi, aliran modal, tenaga kerja, dan transfer teknologi. Integrasi ini mencakup berbagai aspek, termasuk kebijakan ekonomi, konektivitas pasar, serta harmonisasi regulasi antara negara dengan ekonomi global. Komponen Integrasi Ekonomi Domestik dan Global antara lain perdagangan Internasional, investasi asing, mobilitas tenaga kerja, aliran modal dan keuangan, transfer teknomlogi dan inovasi serta konektivitas infrastruktur. Integrasi ekonomi yang efektif memerlukan kebijakan yang seimbang untuk memaksimalkan manfaat sambil mengelola risiko dari keterbukaan ekonomi terhadap dunia.

1) Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu per Komoditas Bahan Pokok

Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu per Komoditas Bahan Pokok adalah ukuran statistik yang digunakan untuk melihat fluktuasi atau volatilitas harga suatu bahan pokok dalam periode waktu tertentu. Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu menunjukkan seberapa besar fluktuasi atau perubahan harga suatu komoditas dari waktu ke waktu dibandingkan dengan rata-rata harganya. Dari nilai tersebut dapat dilihat apakah harga suatu komoditas cenderung stabil atau sering mengalami perubahan signifikan. Indikator ini juga dapat memungkinkan kita untuk membandingkan tingkat kestabilan harga

berbagai komoditas sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga.

Tabel 2.42
Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu per Komoditas Bahan Pokok Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024

Tahun	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu per Komoditas Bahan Pokok
2020	44
2021	45
2022	46
2023	46
2024	7

Sumber : Disdagnakerkop dan UKM, 2025

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa fluktuasi harga bahan pokok di Kabupaten Padang Pariaman relatif tinggi dengan kisaran 45%–46% selama tiga tahun terakhir. Tidak ada perubahan signifikan antara 2022 dan 2023, menunjukkan bahwa volatilitas harga cenderung konstan. Selain itu tingkat volatilitas harga yang cukup tinggi ini menunjukkan harga bahan pokok di Kabupaten Padang Pariaman mengalami perubahan yang cukup besar dari waktu ke waktu. Tidak adanya penurunan angka juga bisa diartikan bahwa stabilisasi harga mungkin belum cukup efektif. Solusi untuk mengurangi fluktuasi harga ini antara lain dengan menjaga stok dan distribusi bahan pokok, stabilisasi harga oleh pemerintah melalui intervensi pasar dengan subsidi dan kebijakan harga, serta diversifikasi sumber pasokan untuk mengurangi ketergantungan pada satu wilayah atau musim tertentu.

2) Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDB/PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDB) merupakan share PMTB terhadap PDB/PDRB. PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (*financial leasing*), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (*financial leasing*) Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan. Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.81.

Gambar 2.81
Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman, 2025

Selama 5 tahun terakhir, nilai PMTB tertinggi dicapai pada tahun 2020 sebesar 33,78 persen, dan terendah pada tahun 2024 sebesar 32,12 persen. Pada tahun 2024 nilai PTMB cenderung meningkat.

3) Ekspor Barang dan Jasa (%PDRB)

Ekspor barang dan jasa (% PDB) merupakan *share* ekspor barang dan jasa terhadap PDB Nasional. Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. PDB adalah ukuran nilai total produksi dalam suatu negara dalam satu periode waktu. Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk-produk domestik di pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pendapatan mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan produksi barang dan jasa yang diekspor. Selain itu, ekspor juga meningkatkan efisiensi dan daya saing industri dalam negeri untuk dapat bersaing di pasar global. Ekspor barang dan jasa Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.82.

Gambar 2.82
Grafik Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020-2024



Sumber: Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka 2025

Selama 5 tahun terakhir, nilai ekspor tertinggi dicapai pada tahun 2023 sebesar 2,23 persen.

2.1.2.7 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

1) Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)

Kesejahteraan suatu masyarakat dapat diukur dari seberapa mudah masyarakat mempunyai akses terhadap perumahan yang layak dan terjangkau. Tingkat pendapatan rumah tangga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap dapat tidaknya seseorang memiliki rumah layak huni. Rumah Tangga pada kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) akan kesulitan mengakses perumahan layak huni.

Gambar 2.83
Persentase RT yang memiliki akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau (%)
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020-2024



Sumber : DLHKPP, 2024

Gambar 2.83 menunjukkan tren persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Kabupaten Padang Pariaman menurun dari 94,97% pada 2020 menjadi 92,21% pada 2023. Penurunan ini relatif moderat pada periode tersebut. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan sangat signifikan, yaitu dari 92,21% menjadi 59,03%, atau turun sekitar 33,18 poin persentase dibanding tahun sebelumnya.

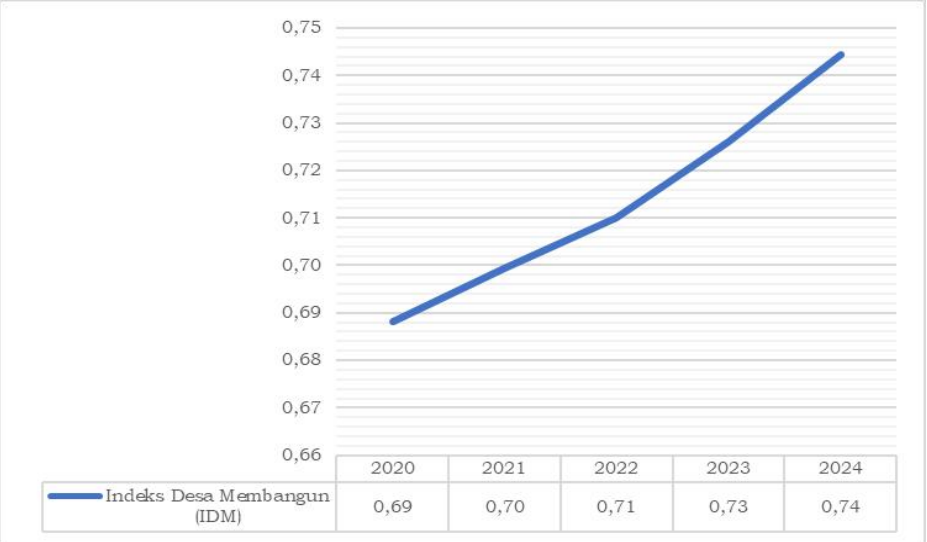
Ketidaksediaan anggaran untuk program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) pada tahun 2024 menjadi penyebab utama penurunan ini, yang berdampak pada:

1. Tidak adanya intervensi perbaikan atau pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan.
2. Keterlambatan rehabilitasi rumah rusak akibat bencana atau faktor usia bangunan, sehingga banyak rumah yang sebelumnya layak menjadi tidak memenuhi standar kelayakan.
3. Peningkatan *backlog* hunian layak huni, karena tidak ada upaya menambah jumlah rumah layak melalui program bantuan pemerintah daerah.
4. Meningkatnya kesenjangan akses hunian layak, terutama di wilayah perdesaan dan daerah rawan bencana.

2) Indeks Desa Membangun / Indeks Desa

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan nilai komposit yang menggambarkan tingkat kemandirian desa berdasarkan capaian pada tiga dimensi utama: sosial, ekonomi, dan ekologi/lingkungan. Indeks ini mengklasifikasikan desa ke dalam lima status: Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju, dan Desa Mandiri. Saat ini istilah IDM masih digunakan, namun ke depan akan disederhanakan menjadi Indeks Desa (ID). Selengkapnya, perkembangan Indeks Desa Membangun dan dinamika status Nagari di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada Gambar 2.84 dan Tabel 2.43.

Gambar 2.84
Indeks Desa Membangun Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020-2024



Sumber: DPMD Kabupaten Padang Pariaman, 2025

Tabel. 2.43
Perkembangan Status Nagari di Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020 - 2024

No.	Status Desa/Nagari	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Desa/ Nagari Mandiri	1	3	5	7	21
2.	Desa Maju atau Desa Pra-Sembada	29	37	46	53	45
3.	Desa Berkembang atau Desa Madya	69	61	50	42	37
4.	Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya	4	2	2	1	0
5.	Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama	0	0	0	0	0
6.	**Jumlah**	**103**	**103**	**103**	**103**	**103**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2025

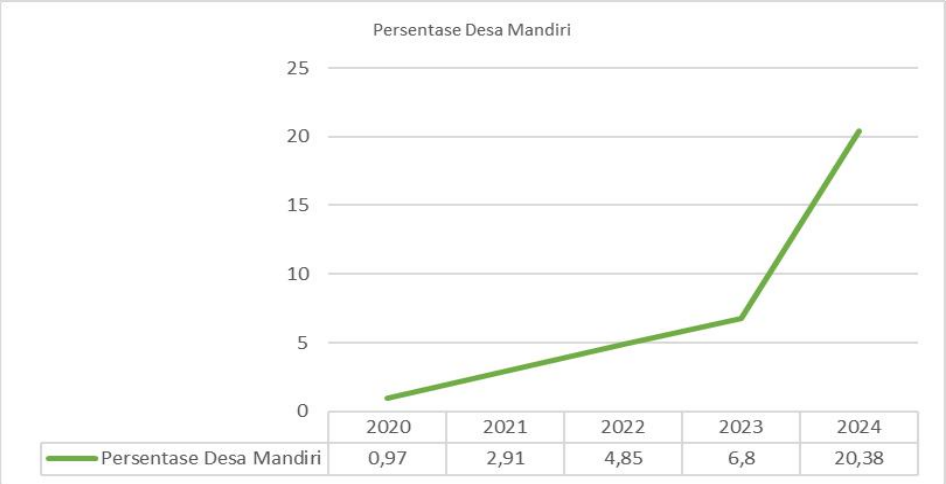
Gambar 2.84 menunjukkan perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Padang Pariaman dengan tren peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, nilai IDM tercatat sebesar 0,69, kemudian meningkat menjadi 0,70 pada tahun 2021, dan kembali naik menjadi 0,71 pada tahun 2022. Tren positif ini berlanjut dengan capaian 0,73 pada tahun 2023 dan mencapai 0,74 pada tahun 2024. Kenaikan yang konsisten tersebut mencerminkan adanya perbaikan pembangunan desa/nagari di berbagai dimensi, baik sosial, ekonomi, maupun ekologi, sehingga mendorong peningkatan status desa menuju kategori yang lebih tinggi.

Tabel 2.43 di atas menampilkan data Perkembangan status desa/nagari di Kabupaten Padang Pariaman selama periode 2020–2024. Jumlah nagari berstatus Mandiri meningkat signifikan dari 1 nagari pada tahun 2020 menjadi 21 nagari pada tahun 2024. Jumlah nagari berstatus Maju juga mengalami peningkatan dari 29 nagari pada tahun 2020 menjadi 45 nagari pada tahun 2024, meskipun sempat mencapai 53 nagari pada tahun 2023. Sebaliknya, jumlah nagari berstatus Berkembang menurun dari 69 nagari pada tahun 2020 menjadi 37 nagari pada tahun 2024. Nagari berstatus Tertinggal yang semula berjumlah 4 nagari pada tahun 2020 berhasil ditekan hingga tidak ada lagi pada tahun 2024, dan tidak terdapat nagari dengan status Sangat Tertinggal sepanjang periode tersebut. Perubahan ini menggambarkan adanya perbaikan kualitas pembangunan desa/nagari secara berkelanjutan, dengan semakin banyak nagari yang naik kelas ke kategori Mandiri dan Maju, serta semakin berkurangnya nagari dengan status Berkembang maupun Tertinggal.

3) Persentase Desa Mandiri (%)

Persentase Desa Mandiri merupakan indeks dalam pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia. Metode data yang digunakan Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa yang dikelola oleh kementerian Desa PDTT. Untuk Indeks Desa mandiri terdapat 5 klasifikasi status desa yaitu Mandiri, Maju, Berkembang, tertinggal dan Sangat Tertinggal. Persentase Desa Mandiri Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.85 berikut.

Gambar 2.85
Persentase Desa Mandiri Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024



Sumber : Kementrian PPN/ Bappenas, diolah

Berdasarkan data yang disediakan oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kabupaten Padang Pariaman sejak tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan peningkatan. Laju peningkatan persentase desa mandiri hampir mencapai 2% setiap tahunnya. Tahun 2024 mengalami peningkatan 14% dari tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan strategi pembangunan desa yang mendorong kemandirian, pemerataan layanan, dan penguatan kapasitas ekonomi desa secara berkelanjutan.

2.1.2.8 Stabilitas Ekonomi Makro

1) Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) merupakan indikator yang menunjukkan tingkat kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Persentase rasio ini mencerminkan peran pajak daerah dalam mendukung pendapatan pemerintah daerah. Sebagaimana terlihat pada Gambar 2.86, rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Padang Pariaman mengalami fluktuasi selama periode 2020–2024.

Gambar 2.86
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024



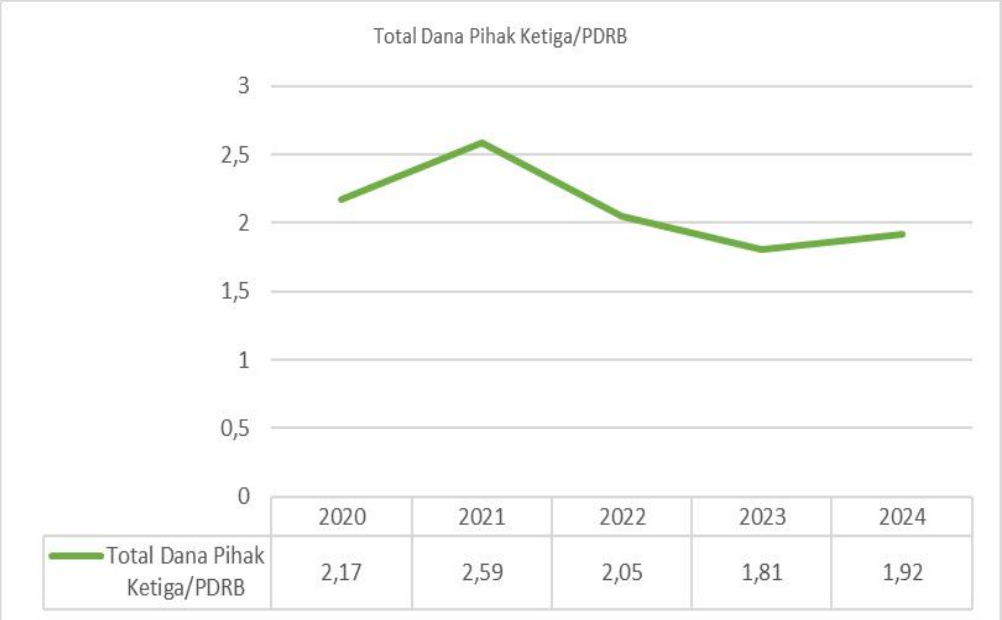
Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka 2021-2025, diolah

Rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Padang Pariaman periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan yang relatif stabil disertai sedikit peningkatan. Pada tahun 2020 rasio tercatat sebesar 0,23 persen, kemudian naik menjadi 0,24 persen pada tahun 2021. Selanjutnya, pada tahun 2022 rasio kembali berada pada angka 0,23 persen, sebelum meningkat menjadi 0,25 persen pada 2023, dan mencapai 0,26 persen pada 2024. Perkembangan ini mencerminkan adanya upaya perbaikan dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah, meskipun secara keseluruhan kontribusinya terhadap PDRB masih relatif rendah.

2) Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%)

Total Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB merupakan rasio yang menggambarkan persentase total dana pihak ketiga perbankan di suatu wilayah dibandingkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada periode tertentu. Indikator ini juga mencerminkan tingkat pendalaman keuangan di wilayah tersebut, dimana peningkatan rasio DPK terhadap PDRB menunjukkan bertambahnya simpanan masyarakat pada sektor keuangan yang sekaligus mengindikasikan semakin dalamnya aktivitas sektor keuangan di daerah.

Gambar 2.87
Total Dana Pihak Ketiga/PDRB
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	2,17	2,59	2,05	1,81	1,92

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2025, diolah

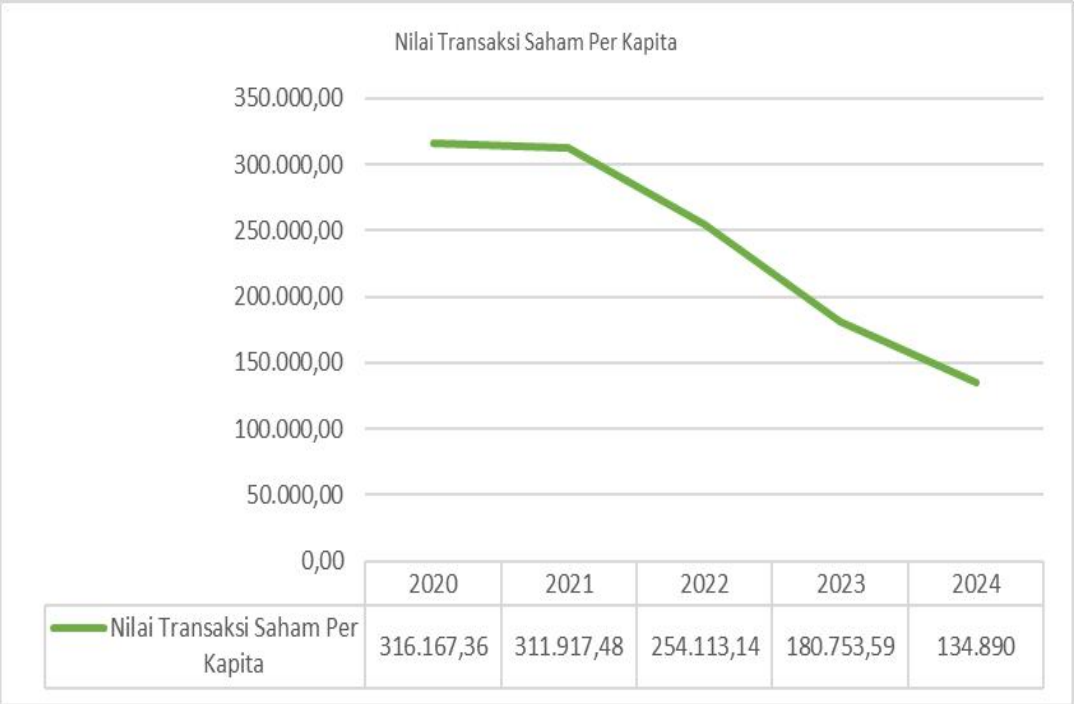
Total dana pihak ketiga Kabupaten Padang Pariaman terhadap PDRB periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2020 rasio tercatat sebesar 2,17 persen dan meningkat menjadi 2,59 persen pada tahun 2021. Namun, pada tahun berikutnya mengalami penurunan cukup signifikan hingga mencapai 2,05 persen pada 2022 dan 1,81 persen pada 2023. Meskipun demikian, pada tahun 2024 terlihat adanya perbaikan dengan kenaikan rasio menjadi 1,92 persen. Perkembangan ini menunjukkan bahwa peranan sektor keuangan di Kabupaten Padang Pariaman cenderung menurun dalam tiga tahun

terakhir, meskipun terdapat sedikit pemulihan pada akhir periode pengamatan.

3) Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per (Rupiah)

Nilai transaksi saham per kapita di Kabupaten Padang Pariaman menjadi indikator yang menggambarkan dalam mengevaluasi aktivitas investasi dan keterlibatan masyarakat serta pelaku ekonomi lokal di pasar modal. Nilai transaksi saham mencerminkan minat dan kepercayaan investor terhadap potensi pertumbuhan ekonomi daerah.

Gambar 2.88
Nilai Transaksi Saham Per Kapita
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Transaksi Saham Per Kapita	316.167,36	311.917,48	254.113,14	180.753,59	134.890

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2025, diolah

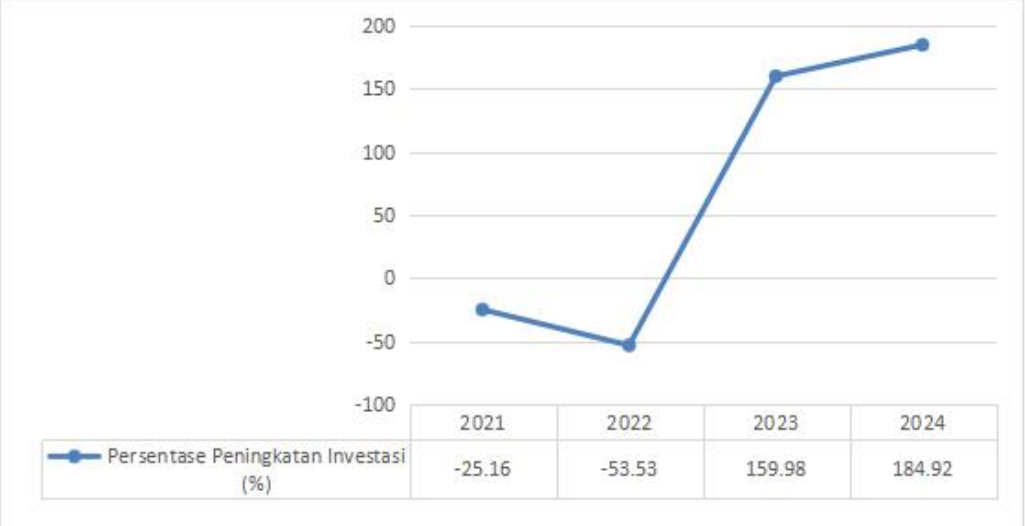
Gambar 2.88 menunjukkan nilai transaksi saham per kapitas selama kurun waktu 3 (tiga) tahun. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat, nilai transaksi saham per kapita sebesar Rp 316.167,36 (2020). Peningkatan nilai transaksi saham per kapita selama pandemi *Covid* 19 merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Fenomena ini memberikan dampak yang signifikan bagi pasar modal dan perekonomian.

4) Persentase pertumbuhan investasi

Persentase peningkatan investasi merupakan indikator yang menggambarkan peningkatan atau penurunan realisasi investasi dari satu periode ke periode berikutnya. Nilai positif menunjukkan adanya kenaikan minat investor dan perbaikan iklim usaha, sedangkan nilai negatif menandakan terjadinya kontraksi yang perlu diantisipasi dengan kebijakan yang tepat. Indikator ini penting sebagai alat evaluasi kinerja pembangunan ekonomi daerah sekaligus dasar perumusan strategi peningkatan investasi

secara berkelanjutan. Pertumbuhan investasi Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada Gambar 2.89.

Gambar 2.89
Persentase Pertumbuhan Investasi Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020-2024



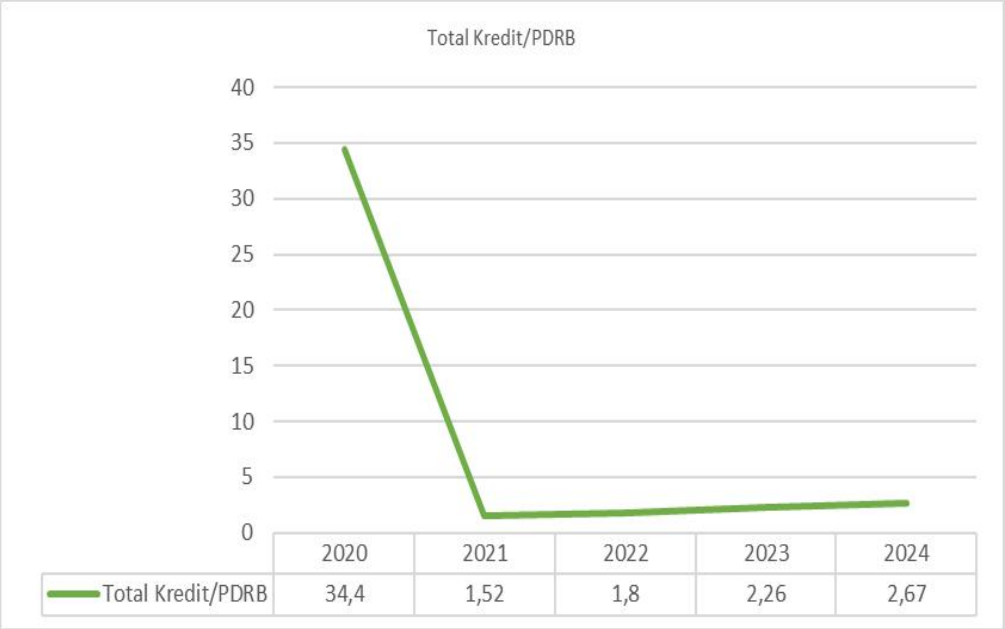
Sumber: DPMPTSP, 2025

Pertumbuhan investasi di Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan fluktuasi signifikan selama periode 2020–2024. Tahun berikutnya, terjadi penurunan sebesar 25,16 persen. Tren penurunan berlanjut pada 2022 dengan penurunan drastis sebesar 53,53 persen Namun, pada 2023 terjadi pemulihan signifikan dengan peningkatan 159,98 persen, yang mendorong nilai investasi naik menjadi Rp1.205,3 miliar. Kenaikan ini berlanjut pada 2024, dengan pertumbuhan sebesar 184,92 persen. Proyek Strategis Nasional menjadi *determinant* utama lonjakan investasi di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 dan 2024. Perusahaan besar seperti PT Hutama Karya menjadi sumber utama realisasi investasi. Realisasi investasi meningkat bukan hanya karena masuknya investor baru, tetapi juga perbaikan kualitas data dan disiplin pelaporan.

5) Total Kredit/PDRB (%)

Total Kredit/PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Padang Pariaman adalah indikator yang penting dalam mengukur hubungan antara jumlah kredit yang disalurkan oleh lembaga keuangan dengan besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan di daerah. Hubungan antara Total Kredit/PDRB di Kabupaten Padang Pariaman mencerminkan peran sektor keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Total kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan, seperti bank dan lembaga keuangan lainnya, merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat kepercayaan dan dukungan finansial yang diberikan kepada pelaku usaha dan masyarakat dalam mengembangkan ekonomi daerah. Total Kredit/PDRB Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.90.

Gambar 2.90
Total Kredit/PDRB
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2025, diolah

Di Kabupaten Padang Pariaman, rasio total kredit terhadap PDRB menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, rasio tercatat sebesar 34,4%, namun pada 2021 turun drastis menjadi hanya 1,52%, kemungkinan akibat pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi dan sektor keuangan. Sejak 2022, rasio meningkat secara bertahap dari 1,80%, menjadi 2,26% pada 2023, dan mencapai 2,67% pada 2024. Meskipun demikian, angka ini masih menunjukkan keterbatasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha dan masyarakat, sehingga kontribusi kredit perbankan terhadap perekonomian daerah relatif rendah.

6) Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan

Indikator Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan merupakan turunan dari Indeks Inklusi Keuangan yang berguna untuk menentukan tingkat penggunaan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, indikator tersebut juga menunjukkan ketersediaan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang disediakan lembaga keuangan formal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018-2023 dapat terlihat pada Gambar 2.91.

Gambar 2.91
Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024



Sumber: Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka 2025

Sama halnya dengan indikator Total Dana Pihak Ketiga/PDRB, persentase rasio PDRB sektor jasa keuangan di Kabupaten Padang Pariaman telah mengalami penurunan sejak tahun 2020 dan hingga tahun 2024 yang hanya menyumbang sebesar 1,54%.

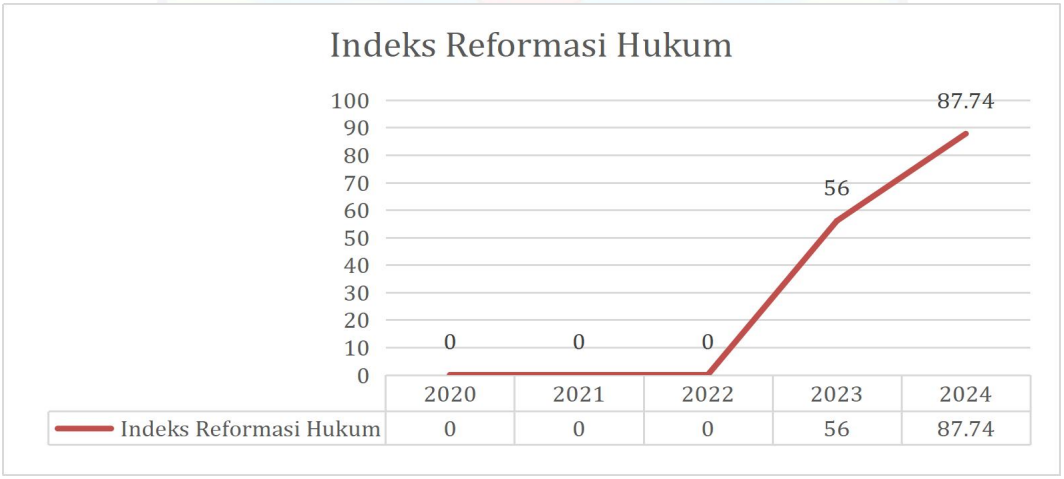
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

1) Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum merupakan indikator yang menggambarkan sejauh mana suatu wilayah telah melakukan perubahan dan perbaikan dalam aspek hukum guna menciptakan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif.

Gambar 2.92
Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020-2024



Sumber : Bagian Hukum Setda Kabupaten Padang Pariaman, 2025

Data capaian Indeks Reformasi Hukum ada mulai tahun 2023. Peningkatan Indeks Reformasi Hukum dari 56% pada tahun 2023 menjadi 87,74% pada tahun 2024 menunjukkan keberhasilan Kabupaten Padang Pariaman dalam melakukan reformasi di sektor hukum. Faktor utama yang mendukung pencapaian ini adalah perbaikan regulasi, peningkatan transparansi, efektivitas pelayanan, serta penguatan kapasitas aparatur hukum.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini, diperlukan keberlanjutan dalam inovasi dan evaluasi berkala terhadap kebijakan hukum yang diterapkan, sehingga reformasi hukum di Kabupaten Padang Pariaman dapat semakin optimal dan berdampak positif bagi masyarakat.

2) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur daerah melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, Aparatur Sipil Negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya. Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Adapun Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada Gambar 2.93.

Gambar 2.93
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2024



Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

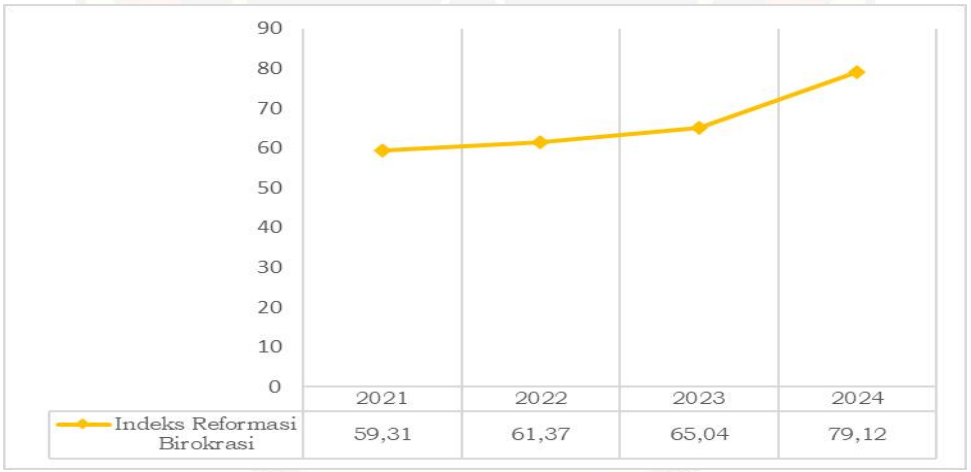
Berdasarkan Gambar 2.94, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan tren peningkatan pada periode 2020–2024. Pada tahun 2020 nilai indeks tercatat sebesar 1,41, kemudian meningkat signifikan menjadi 2,60 pada tahun 2021, dan relatif stabil hingga tahun 2023 dengan capaian 2,62.

Selanjutnya, pada tahun 2024 kembali terjadi peningkatan yang cukup signifikan dengan capaian 3,51. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi dalam pemerintahan semakin dioptimalkan guna meningkatkan efisiensi layanan publik dan tata kelola yang lebih baik. Peningkatan Indeks SPBE mencerminkan adanya konsistensi komitmen Pemerintah Daerah dalam mendorong transformasi digital, yang diharapkan mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik di Kabupaten Padang Pariaman.

3) Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi adalah ukuran kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah yang mencakup delapan area perubahan, termasuk manajemen perubahan, penataan kelembagaan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, integritas pegawai, efektivitas pengawasan, serta penerapan sistem merit dalam manajemen SDM. Indeks ini menjadi tolok ukur upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Nilai indeks ini diperoleh dari hasil penilaian Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Secara umum, penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) yang dilakukan oleh Kementerian PANRB memang terdiri dari 3 komponen utama yaitu Indeks Reformasi General, Indeks Reformasi Tematik, dan Indeks RB.

Gambar 2.94
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020-2024



Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2025

Gambar 2.94 menunjukkan perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Padang Pariaman pada periode 2021–2024, yang memperlihatkan tren peningkatan konsisten. Pada 2021, nilai indeks tercatat 59,31, meningkat menjadi 61,37 pada 2022, dan kembali naik menjadi 65,04 pada 2023. Pada 2024, indeks meningkat signifikan menjadi 79,12 (kategori "BB"). Perkembangan ini mencerminkan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi, terutama dalam tata kelola pemerintahan, penguatan akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan ukuran tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan melalui proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, serta capaian kinerja. Nilai ini menjadi tolok ukur efektivitas, efisiensi, dan konsistensi penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan pembangunan daerah serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Evaluasi SAKIP dilakukan untuk menilai sejauh mana implementasi sistem ini mampu mendorong peningkatan kinerja yang efektif dan tepat sasaran. Selengkapnya, nilai SAKIP Kabupaten Padang Pariaman hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dapat dilihat pada Tabel 2.44.

Tabel 2.44
Nilai SAKIP Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020-2024

No.	Komponen Penilaian SAKIP	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Perencanaan Kinerja	21,71	22,33	22,5	22,54	22,84
2.	Pengukuran Kinerja	17,41	17,81	21,15	21,25	22,27
3.	Pelaporan Kinerja	11,54	11,59	10,76	10,81	11,11
4.	Evaluasi Internal	5,8	6,01	14,45	14,59	14,83
5.	Capaian Kinerja	10,75	10,76	-	-	-
	Nilai Hasil Evaluasi	**67,21**	**68,5**	**68,86**	**69,19**	**71,05**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	**B**	**B**	**B**	**B**	**BB**

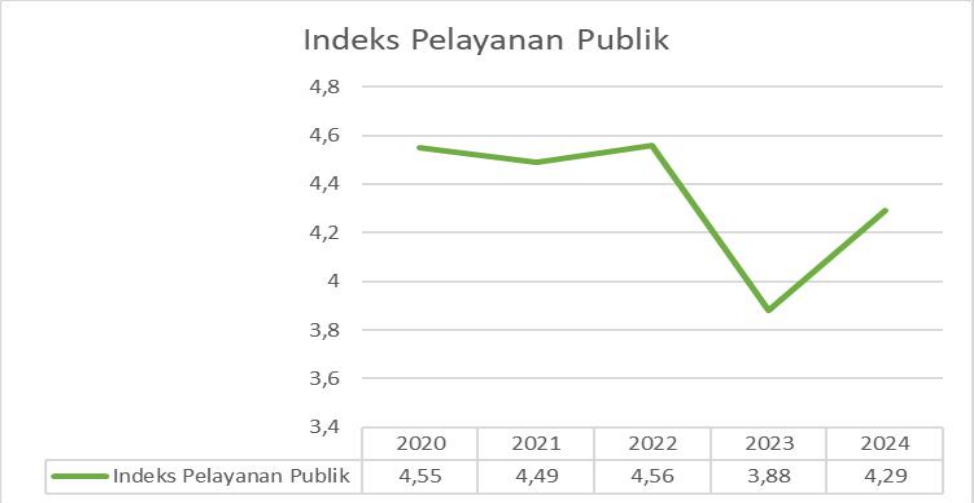
Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2025

Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Pemerintah Daerah pada periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada 2020, nilai SAKIP tercatat 67,21 (predikat B), kemudian meningkat menjadi 68,50 pada 2021, 68,86 pada 2022, dan 69,19 pada 2023 (predikat B). Pada 2024, nilai SAKIP meningkat signifikan menjadi 71,05 (predikat BB). Peningkatan ini menggambarkan perbaikan kinerja yang lebih akuntabel, efektif, dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4) Indeks Pelayanan Publik

Pelayanan publik mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa Pelayanan Publik merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Gambar 2.95 menunjukkan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021 sampai 2024.

Gambar 2.95
Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020-2024



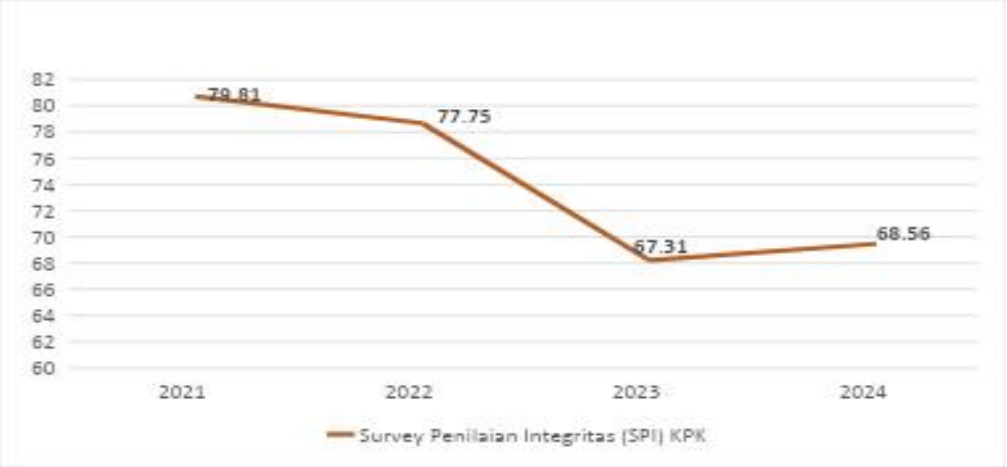
Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan data capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2020 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik mengalami fluktuasi dengan kecenderungan peningkatan setelah mengalami penurunan. Pada tahun 2021, indeks tercatat sebesar 4,55%, kemudian mengalami peningkatan kecil menjadi 4,56% di tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem pelayanan publik yang mungkin dipengaruhi oleh kebijakan yang lebih baik atau peningkatan fasilitas dan sumber daya. Namun, pada tahun 2023, indeks mengalami penurunan signifikan menjadi 3,88%, yang dapat mengindikasikan adanya tantangan dalam implementasi pelayanan, seperti keterbatasan anggaran, kendala administratif, atau faktor eksternal yang menghambat efektivitas pelayanan.

5) Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK (Nilai)

Survei Penilaian Integritas yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan proksi dari Indeks Integritas Nasional di tingkat kabupaten. Pengukuran Indeks Integritas Nasional dilaksanakan dengan metode survei memotret integritas sebuah lembaga pemerintah melalui tiga sumber; pegawai di lembaga tersebut (internal), publik yang pernah berhubungan atau mengakses layanan lembaga tersebut (eksternal), dan dari kalangan ahli (*expert*). Semakin rendah nilai SPI, menunjukkan semakin tinggi risiko korupsi pada pemerintah daerah yang meliputi transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, pengelolaan pengadaan barang dan jasa (PBJ), pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), *trading in influence* (intervensi eksternal untuk pemberian izin/rekomendasi teknis), pengelolaan anggaran, dan sosialisasi anti korupsi. Adapun nilai survei penilaian integritas KPK di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada Gambar 2.96.

Gambar 2.96
Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK (nilai)
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2024



Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

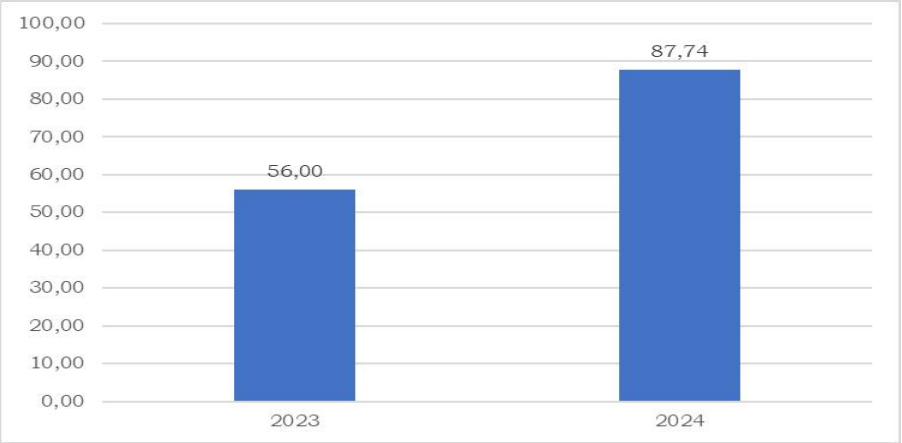
Dari data di atas, terlihat bahwa capaian SPI KPK ada mulai tahun 2021 dan mengalami penurunan berturut-turut dalam tiga tahun terakhir. Penurunan yang terjadi dari 2021 ke 2022 relatif kecil, namun pada tahun 2024 terjadi sedikit peningkatan dari tahun 2023. Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap penurunan ini adalah kelemahan dalam sistem pengawasan dan pencegahan korupsi yang mungkin belum berjalan secara optimal, Kurangnya efektivitas implementasi kebijakan antikorupsi yang menyebabkan penurunan persepsi integritas, serta faktor eksternal, seperti perubahan regulasi atau dinamika politik dan birokrasi, yang dapat mempengaruhi persepsi dan praktik integritas di lingkungan pemerintahan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa risiko korupsi pada pemerintah daerah mengalami peningkatan, sehingga diperlukan adanya penguatan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial

1) Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum merupakan indikator yang menggambarkan sejauh mana suatu wilayah telah melaksanakan perubahan dan perbaikan dalam aspek hukum untuk mewujudkan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif. Indeks Reformasi Hukum berfungsi sebagai instrumen pengukuran reformasi hukum melalui identifikasi, pemetaan, serta deregulasi peraturan, sekaligus penguatan sistem regulasi nasional.

Gambar 2.97
Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023-2024



Sumber : Bagian Hukum Setda Kabupaten Padang Pariaman, 2025

Indeks Reformasi Hukum di Kabupaten Padang Pariaman belum tersedia untuk periode 2020 hingga 2022, dan baru tercatat mulai tahun 2023. Nilai Indeks Reformasi Hukum pada tahun 2023 berada pada angka 56% dan meningkat signifikan menjadi 87,74% pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan reformasi di sektor hukum. Faktor utama yang mendukung capaian tersebut meliputi perbaikan regulasi, peningkatan transparansi, peningkatan efektivitas pelayanan, serta penguatan kapasitas aparatur hukum. Untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian ini, diperlukan keberlanjutan inovasi dan evaluasi berkala terhadap kebijakan hukum yang diterapkan, sehingga reformasi hukum di Kabupaten Padang Pariaman dapat semakin optimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

2) Angka Kriminalitas

Angka Kriminalitas adalah ukuran statistik yang menunjukkan jumlah tindak pidana atau kejahatan yang terjadi dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan kondisi keamanan masyarakat secara makro serta memantau perkembangan tren kriminalitas dari waktu ke waktu. Angka kriminalitas (*crime rate*) dapat dimaknai sebagai rata-rata jumlah tindak pidana yang terjadi dalam satu tahun, mencakup berbagai jenis kejahatan seperti pencurian, penipuan, penganiayaan, kejahatan seksual, dan penyalahgunaan narkoba. Tingkat kriminalitas juga berpengaruh terhadap iklim investasi, yaitu semakin rendah angka kriminalitas yang berarti kondisi keamanan semakin baik, maka semakin besar pula peluang bagi investor untuk menanamkan modal di wilayah tersebut. Angka kriminalitas Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.45.

Setiap wilayah tentunya tidak jumlah tindak pidana, Pada tahun 2024, jumlah tindak pidana di Kabupaten Padang Pariaman yaitu sebanyak 907 kejadian, Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 645, Angka kriminalitas di Kabupaten Padang Pariaman selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.45.

Tabel 2.45
Angka Kriminalitas di Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Tindak Kriminal	592	453	430	645	907
Jumlah Penduduk	430,626	438,022	447,170	451,388	459,169
Angka Kriminalitas	137,47	103,42	96,16	142,89	197,53

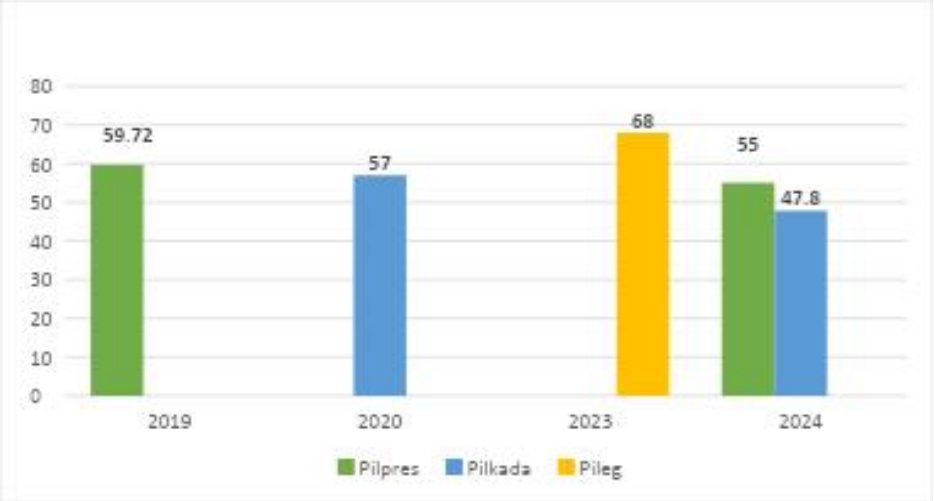
Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2021-2025

Angka kriminalitas di Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan tren yang berfluktuasi. Pada tahun 2020, angka kriminalitas tercatat sebesar 137,47 dan menurun menjadi 103,42 pada tahun 2021. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2022 dengan capaian 96,16. Namun, pada tahun 2023 angka kriminalitas kembali meningkat signifikan menjadi 142,89, bahkan mencapai 197,53 pada tahun 2024. Artinya, dalam periode lima tahun terakhir, Kabupaten Padang Pariaman sempat mengalami perbaikan kondisi keamanan, tetapi dua tahun terakhir memperlihatkan peningkatan jumlah tindak kriminalitas yang cukup tinggi, sehingga perlu mendapatkan perhatian serius dalam upaya pengendalian dan pencegahan kejahatan.

3) Tingkat Partisipasi Pemilih dan Pilpres dan Pilkada

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) atau Pemilihan Presiden (Pilpres) adalah persentase jumlah penduduk yang menggunakan hak pilihnya dari total jumlah penduduk yang terdaftar sebagai pemilih. Angka partisipasi ini menjadi indikator penting untuk mengukur tingkat demokrasi dan kesadaran politik masyarakat.

Gambar 2.98
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada/Pilpres
Tahun 2019-2024



Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, 2025

Berdasarkan Gambar 2.98 di atas, tingkat partisipasi pemilih dalam Pilpres dan Pilkada di Kabupaten Padang Pariaman cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2020, tingkat partisipasi masyarakat pada Pilpres tercatat sebesar 57%. Data tahun 2021 dan 2022 tidak tersedia karena tidak ada

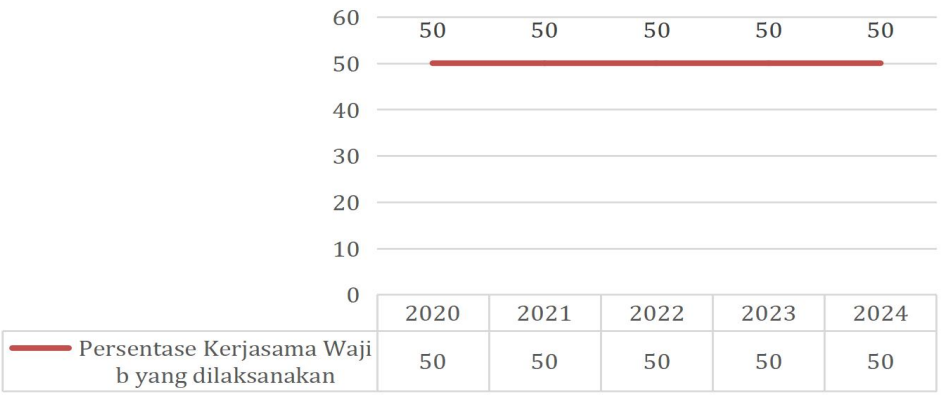
proses pemilihan, namun pada tahun 2023 partisipasi pemilih meningkat menjadi 68%, terutama pada pelaksanaan Pemilihan Legislatif. Meski demikian, pada tahun 2024 angka partisipasi menurun menjadi 51,4% dengan tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan Presiden adalah 55% dan 47,8% pada Pemilihan Legislatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum di Kabupaten Padang Pariaman mengalami tren penurunan pada beberapa momentum penting, khususnya pada Pilpres dan Pilkada, sementara Pileg justru mencatat tingkat partisipasi yang lebih tinggi. Fenomena ini dapat mengindikasikan adanya pergeseran minat pemilih terhadap jenis pemilihan yang dianggap lebih berpengaruh langsung terhadap kehidupan mereka.

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

1) Persentase Kerjasama wajib yang dilaksanakan

Persentase kerja sama wajib yang dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman pada 3 tahun terakhir stagnan. Berdasarkan data dari Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama (TPKS) Sekretariat Daerah pada tahun 2025, capaian kerja sama wajib pada tahun 2020, 20121, 2022, 2023 dan 2024 adalah sebesar 50 persen. Persentase Kerjasama Wajib yang dilaksanakan Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada Gambar 2.99.

Gambar 2.99
Persentase Kerjasama Wajib yang dilaksanakan
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024



Sumber: Bagian TPKS Sekretariat Daerah, 2025

Berdasarkan data yang tersedia, Hal ini menunjukkan bahwa selama lima tahun berturut-turut, tidak terjadi peningkatan maupun penurunan dalam pelaksanaan kerja sama yang bersifat wajib bagi pemerintah daerah. Kondisi disebabkan oleh keterbatasan sumber daya dan anggaran, yang menghambat peningkatan jumlah kerja sama yang dapat dijalankan oleh pemerintah daerah, kurangnya inovasi atau inisiatif dalam menjalin kerja sama, baik dengan pemerintah daerah lain, sektor swasta, maupun lembaga lainnya. Kendala administratif atau regulasi yang menyebabkan proses perjanjian kerja sama berjalan lambat atau sulit ditingkatkan. Tingkat kebutuhan yang dianggap telah terpenuhi, sehingga pemerintah daerah tidak merasa perlu untuk menambah jumlah kerja sama yang dilakukan.

2) Indeks Keamanan Daerah

Indeks Keamanan Daerah adalah suatu ukuran atau metrik yang digunakan untuk mengukur tingkat keamanan suatu wilayah atau daerah tertentu. Indeks ini memberikan gambaran kuantitatif tentang kondisi keamanan di suatu daerah, sehingga memudahkan dalam perbandingan antar daerah dan dalam memantau perkembangan tingkat keamanan dari waktu ke waktu. Capaian Indeks Keamanan Daerah Kabupaten Padang Pariaman ada mulai Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada gambar 2.100.

Gambar 2.100
Indeks Kemanan Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2024



Sumber: Satpol PP dan Damkar, Dinsos PPPA dan BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Berdasarkan data di atas, Indeks Keamanan Daerah Kabupaten Padang Pariaman mengalami fluktuasi dari tahun 2021-2024. Indeks Keamanan Daerah Kabupaten Padang Pariaman mengalami tren yang tidak stabil dalam empat tahun terakhir, dengan penurunan pada tahun 2022 diikuti oleh peningkatan signifikan pada tahun 2023 dan stabilitas pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem keamanan, namun tetap perlu dilakukan evaluasi untuk memastikan keamanan tetap terjaga atau bahkan meningkat di masa mendatang.

2.1.4.4 Capaian Kinerja setiap urusan Pemerintah Daerah

1) Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a) Urusan Wajib Pendidikan

Penyelenggaraan urusan pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Hal ini tercermin dari meningkatnya capaian berbagai indikator kinerja utama pendidikan yang sebagian besar telah melampaui target yang ditetapkan. Kabupaten Padang Pariaman terus berupaya meningkatkan capaian indikator pendidikan melalui berbagai strategi, seperti peningkatan infrastruktur sekolah, penyediaan tenaga pendidik yang berkualitas, serta program bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Upaya ini dilakukan guna memastikan tidak ada anak usia sekolah yang tertinggal dalam mendapatkan hak pendidikannya. Perkembangan indikator capaian urusan pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.46
Capaian dan Target Kinerja Urusan Wajib Pendidikan pada RPJMD Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	%	52.5	60	52.5	60	54.8	60	57.2	61	59.7	63
Persentase Warga Negara Usia 7- 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	2.87	2	2.87	2	2.96	2	2.53	2	2.18	2
Jumlah Warga Negara usia 5. 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	70	60	70	60	71.5	60	73	70	74.5	70
Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.82	13,67	13.82	13.68	13.97	14	14.12	14	14.27	14.2
Pendidikan Dasar											
Angka partisipasi murni SD/SDLB	%	94.67	61.95	94.67	61.95	94.77	87	94.86	99.15	94.96	99.6
Angka partisipasi kasar SD/SDLB/paket A	Angka	88.7	97.4	88.7	97.4	89.9	95	91.2	96	92.4	109.01
Angka partisipasi murni SMP/SMPLB	Angka	60.9	84	60.9	84	63.5	77.27	66.2	78.22	69	82.13
Angka partisipasi kasar SMP/SMPLB/paket B	%	95	84	95	84	96	60	97	73	98	86.89
Rasio guru/murid	Ratio	21	18	21	18	22	13	23	9.1	24	13
Rasio ruang kelas/rombel	Ratio	0.94	0.99	0.94	0.99	0.95	1.04	0.96	1.2	0.98	17.8
Fasilitas Pendidikan											
Sekolah SD/SDLB kondisi bangunan baik	%	95.5	54.14	95.5	54.14	96	54	98	98	98	95
Sekolah SMP/SMPLB kondisi bangunan baik	%	82	77.47	82	77.47	84	77.5	90	81	90	90
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)											
Angka Partisipasi kasar PAUD	Angka (%)	52.5	50,28	52.5	56	54.8	52.6	57.2	61	59.7	39.33
Angka Putus Sekolah											
Angka Putus Sekolah SD	Angka (%)	0.45	0.51	0.45	0.51	0.4	0.51	0.36	0.6	0.32	0.02
Angka Putus Sekolah SMP	Angka (%)	1.63	1.9	1.63	1.9	1.48	1.9	1.34	2.2	1.22	0.07
Mutu Pendidikan											
Angka Kelulusan (AL) SD	Angka (%)	100	100,06	100	100	100	100	100	100	100	100
Angka Kelulusan (AL) SMP	Angka (%)	100	87,49	100	100	100	100	100	100	100	100

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP	Angka (%)	85	82,26	85	80	87.8	80	90.7	80	93.7	80
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	Angka (%)	83	91	83	91	85	62	87.8	64	90.7	65
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	92.8	93,55	92.8	92.4	94.2	92.4	95.6	92.42	97.1	97

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman, 2025

1. Partisipasi Pendidikan Dasar dan Kesetaraan

Tingkat partisipasi warga negara usia 7–15 tahun dalam pendidikan dasar menunjukkan tren positif. Realisasi pada tahun 2020 sebesar 60% terus meningkat menjadi 63% pada tahun 2024, selalu melebihi target yang ditetapkan setiap tahunnya. Sementara itu, partisipasi pendidikan kesetaraan untuk warga usia 7–18 tahun juga menunjukkan capaian yang konsisten, yaitu sebesar 2% dari tahun 2021 hingga 2024, dan selalu lebih baik dibandingkan target tahunan.

2. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Jumlah partisipasi warga usia 5–6 tahun dalam pendidikan PAUD menunjukkan peningkatan, dari 60% (2020) menjadi 70% (2024), mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini. Namun, angka partisipasi kasar PAUD justru mengalami penurunan signifikan, dari 61% pada 2023 menjadi hanya 39,33% pada 2024. Penurunan ini perlu mendapatkan perhatian serius karena berpotensi menghambat upaya peningkatan kualitas SDM sejak dini.

3. Pendidikan Dasar (SD dan SMP)

Capaian indikator partisipasi pendidikan dasar menunjukkan hasil sangat baik. Angka partisipasi murni SD meningkat signifikan dari 61,95% (2020) menjadi 99,5% (2024), melampaui target setiap tahunnya. Angka partisipasi kasar SD juga terus meningkat hingga mencapai 109,01% pada tahun 2024. Sementara itu, angka partisipasi murni SMP juga mengalami peningkatan dari 84% pada 2020 menjadi 82,13% pada 2024, dengan fluktuasi capaian di tengah jalan. Angka partisipasi kasar SMP tumbuh dari 60% menjadi 86,89%, mencerminkan semakin luasnya akses terhadap pendidikan menengah.

4. Rasio dan Fasilitas Pendidikan

Rasio guru per murid menunjukkan tren perbaikan dengan penurunan angka dari 18 (2020) menjadi 13 (2024), yang berimplikasi pada peningkatan efektivitas pembelajaran. Namun, rasio ruang kelas per rombongan belajar (rombel) di tahun 2024 menunjukkan angka anomali yaitu 17,8, yang secara signifikan lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga perlu dilakukan validasi data lebih lanjut. Fasilitas pendidikan dasar, khususnya kondisi bangunan sekolah SD dan SMP, mengalami perbaikan yang nyata. Persentase sekolah dasar dengan kondisi bangunan baik meningkat dari 54,14% pada 2020 menjadi 95% pada 2024. Demikian pula, kondisi bangunan sekolah SMP membaik dari 77,47% menjadi 90% pada periode yang sama.

5. Angka Putus Sekolah

Upaya penurunan angka putus sekolah menunjukkan hasil yang sangat positif. Angka putus sekolah SD menurun drastis dari 0,51% (2020) menjadi hanya 0,02% pada 2024. Sementara itu, angka putus sekolah SMP juga berhasil ditekan dari 1,9% menjadi 0,07% dalam kurun waktu yang sama. Pencapaian ini menunjukkan efektivitas intervensi kebijakan yang mendukung keberlanjutan pendidikan.

6. Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan tetap terjaga dengan angka kelulusan SD dan SMP yang mencapai 100% secara konsisten selama empat tahun terakhir. Angka melanjutkan dari SD ke SMP meningkat dari 80% (2020) menjadi 93,7% (2024), sedangkan angka melanjutkan dari SMP ke jenjang pendidikan menengah juga mengalami peningkatan dari 91% menjadi 90,7%, meskipun belum mencapai target tahunan. Di sisi lain, proporsi guru yang memiliki kualifikasi minimal S1/D-IV terus meningkat dari 92,4% (2020) menjadi 97,1% (2024), menunjukkan peningkatan kualitas tenaga pendidik yang signifikan.

b) Urusan Wajib Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu modal utama dari sumber daya manusia dalam melaksanakan aktivitas untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Kesehatan juga menjadi prasyarat mutlak bagi penduduk untuk melaksanakan segala program perencanaan pembangunan terkait pendidikan, ketenagakerjaan, perekonomian, bahkan kesehatan itu sendiri. Oleh karena itu peningkatan bidang kesehatan akan memiliki multiplier effect pada program-program pembangunan kedepannya baik secara langsung maupun tidak. Kondisi umum urusan kesehatan dapat tercermin dari pencapaian beberapa indikator urusan wajib kesehatan. Capaian indikator urusan kesehatan selama periode Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.47.

Tabel 2.47
Capaian dan Target Kinerja Indikator Urusan Wajib Kesehatan pada RPJMD Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase Orang terduga TB Mendapatkan Pelayanan Kesehatan TB sesuai dengan Standar	%	100	70.5	100	70.5	100	82.92	100	78.45	100	79.01
Persentase Orang usia 15-59 Tahun Mendapatkan skreening kesehatan sesuai standar	%	100	81.35	100	81.35	100	83.61	100	87.66	100	98.71
Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke atas mendapatkan skreening kesehatan sesuai standar	%	100	67.37	100	67.37	100	82.54	100	94.8	100	100
Persentase Penderita Hypertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	%	100	66.65	100	66.65	100	73.5	100	85.07	100	90.23
Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	88.45	100	88.45	100	92.64	100	100.4	100	105.02

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	99.77	100	99.77	100	98.99	100	96.64	100	100
Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	89.89	88.89	89.89	88.89	87.43	87.43	100	83.99	100	67.1
Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standar	%	100	85.63	100	85.63	100	86.78	100	80.53	100	68.23
Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	%	100	69.56	100	69.56	100	77.17	100	87.54	100	72.57
Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	22.8	100	57.98	100	100	100	100	100	85.08
Persentase Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	100	82.4	100	82.4	100	80.27	100	80.44	100	64.74
Angka Usia Harapan Hidup	Angka	68.89	68.97	68.89	68.97	68.99	69.34	69.29	69.7	69.5	70.1
Insidensi HIV (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	Angka	0,21	0	0,21	0	0.2	0.052	0.19	0.05	0.18	0.19
Persentase Masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan	%	80	92	80	92	85	81.46	90	83.21	95	85.14
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Orang	48	10	48	10	47	3	46	0	45	5
Angka kelangsungan hidup bayi (Jumlah Kelahiran Hidup)	%	89.6	99.16	89.6	99.16	92.6	88.05	95.6	85.42	98.6	83.64
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Orang	6	4	6	4	4	1	3	1	2	16
Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Orang	16	53	16	53	15	46	14	53	13	6
Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Orang	8	11	8	11	7	3	6	0	5	5
Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	35	28	35	28	47	47	59	80	71	92
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	79,3	60.72	79,3	60.72	83	63.2	87.9	36.7	91.6	29.3
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100	99.2	100	100
Prevalensi Balita Stunting	%	21.1	28.3	21.1	28.3	18.4	25	16	19.4	14	26,6
Cakupan Ibu hamil kurang energi kronik (KEK) yang mendapat makanan tambahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Balita Kurus yang Mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	80	60.7	80	60.7	83	82	86	68.4	89	53.2
Non Polio AFP rate per 100.000 pddk	Angka	4	3	4	3	4	5	4	8	4	8
Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Cakupan penemuan dan pengobatan TB	%	90	55	90	55	90	62.4	90	54	90	85
Case Notifikasi Rate TB per 100.000 penduduk	Angka	316/ 100.000 pddk	181/ 100.000 pddk	316/ 100.000 pddk	181/ 100.000 pddk	328/ 100.000 pddk	206/ 100.000 pddk	324/ 100.000 pddk	216/ 100.000 pddk	316/ 100.000 pddk	350/ 100.000 pddk
Tingkat Kematian karena Tuberku losis (per 100.000 penduduk)	%	10	7	10	7	9	6	8	6	7	7
Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (*TBC succes rate*)	%	90	84.2	90	84.2	90	87.4	90	85	90	86.8
Penemuan kasus DBD per 100.000 pddk (Insiden Rate)	Angka	<45 per 100.000 pddk	0.48 per 100.000 pddk	<45 per 100.000 pddk	0.48 per 100.000 pddk	<44 per 100.000 pddk	14.64 per 100.000 pddk	<43 per 100.000 pddk	14.1 per 100.000 pddk	<42 per 100.000 pddk	30.1 per 100.000 pddk
Persentase tatalaksana Diare sesuai standar	%	52	100	52	100	55	100	57	100	60	100
Penemuan kasus malaria	Angka	<1 per 1000 pddk	0.000237	<1 per 1000 pddk	0.000237	<1 per 1000 pddk	0	<1 per 1000 pddk	0	<1 per 1000 pddk	0
Kecamatan memiliki minimal 1 Puskesmas	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan Pelayanan Kunjungan Nifas Lengkap (KF3)	%	100	82.15	100	82.15	100	82.87	100	79.12	100	63.92
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan Balita yang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ter akreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah Puskesmas yang mengimplementasikan PSC 119 sebanyak 25 Puskesmas	Angka	25 Puskesmas	25 Puskesmas	25 Puskesmas	25 Puskesmas	25 Puskesmas	25 Puskesmas	25 Puskesmas	25 Puskesmas	25 Puskesmas	25 Puskesmas
Cakupan Desa / Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Korong dengan *Stop* Buang Air Besar	%	20	34.6	20	34.6	30	25.71	40	14.77	50	30.09
Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	Angka	25 Puskesmas	25 Puskesmas	25 Puskesmas	25 Puskesmas	25 Puskesmas	25 Puskesmas	25 Puskesmas	25 Puskesmas	25 Puskesmas	25 Puskesmas
Persentase Alkes yang sesuai standar permenkes	%	65	64.57	65	64.57	68	39.35	70	67.17	73	67
Jumlah Kecamatan Sehat	Angka	12	11	12	11	13	11	14	11	16	11
Indeks Keluarga Sehat	%	0.09	0.1	0.09	0.1	0.1	0.13	0.11	0.15	0.12	0.17
Persentase Rumah Tangga PHBS	%	72	70	72	72	74	74	76	77.5	78	78
Jumlah IRTP yang diawasi	Angka	130	105	130	105	135	75	140	159	145	70

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat capaian kinerja indikator bidang kesehatan di Kabupaten Padang Pariaman selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang cukup dinamis, dengan sejumlah indikator yang mengalami peningkatan signifikan, meskipun beberapa indikator lainnya menunjukkan fluktuasi atau belum mencapai target yang ditetapkan.

Capaian indikator kinerja layanan kesehatan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020–2024, pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan menunjukkan hasil yang bervariasi. Sejumlah indikator

menunjukkan keberhasilan, namun tidak sedikit pula yang masih menghadapi tantangan signifikan. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas dalam penyediaan layanan esensial bagi kelompok rentan, khususnya ibu dan balita, serta kelompok dengan kebutuhan khusus. Namun demikian, beberapa indikator SPM masih belum mencapai target secara konsisten dan perlu mendapatkan perhatian khusus.

Indikator Usia Harapan Hidup (UHH) menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020 hingga 2024. Dimulai dari 68,97 tahun pada tahun 2021, indikator ini meningkat secara bertahap hingga mencapai 70,1 tahun pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan perbaikan dalam aspek kesehatan masyarakat secara umum, termasuk peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta perbaikan kondisi gizi dan lingkungan hidup. Namun demikian, meskipun tren UHH menunjukkan arah yang positif, laju peningkatannya masih tergolong moderat. Ini menandakan bahwa meskipun berbagai program kesehatan telah berjalan, terdapat ruang untuk penguatan intervensi, khususnya dalam hal penanganan penyakit tidak menular, pemenuhan gizi, peningkatan kualitas pelayanan lansia, serta penguatan promotif dan preventif kesehatan masyarakat. Upaya-upaya ini penting untuk terus mendorong peningkatan UHH secara berkelanjutan, sekaligus memperkecil kesenjangan usia harapan hidup antardaerah di tingkat nasional

Capaian indikator pelayanan kesehatan dasar, seperti skrining kesehatan usia produktif (15–59 tahun) dan usia lanjut (60 tahun ke atas), mengalami peningkatan signifikan. Skrining kesehatan usia produktif meningkat dari 81,35% pada tahun 2021 menjadi 98,71% pada tahun 2024, menunjukkan komitmen kuat dalam deteksi dini penyakit. Capaian pelayanan skrining untuk lansia juga mengalami kenaikan dari 67,37% (2021) menjadi 100% (2024). Sementara itu, pelayanan bagi penderita hipertensi dan diabetes melitus (DM) juga menunjukkan peningkatan yang positif, dengan capaian pelayanan DM bahkan melampaui target (105,02% pada 2024).

Namun demikian, terdapat penurunan signifikan pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, khususnya pada pelayanan bayi baru lahir (turun dari 88,89% pada 2021 menjadi 67,1% pada 2024), pelayanan ibu hamil (dari 85,63% menjadi 68,23%), serta pelayanan persalinan (dari 82,4% menjadi 64,74%). Penurunan ini perlu mendapatkan perhatian serius karena berdampak langsung pada derajat kesehatan generasi mendatang.

Angka usia harapan hidup (UHH) mengalami tren naik dari 68,97 tahun (2021) menjadi 70,1 tahun (2024), mencerminkan perbaikan kualitas hidup secara umum. Capaian penanggulangan penyakit menular seperti TBC dan HIV juga menunjukkan kemajuan. *Case Notification Rate* (CNR) TBC meningkat dari 181 per 100.000 penduduk (2021) menjadi 350 per 100.000 penduduk (2024), sejalan dengan meningkatnya angka keberhasilan pengobatan yang stabil di atas 85%.

Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi justru menunjukkan penurunan yang signifikan dari 82% pada tahun 2022 menjadi hanya 53,2% pada tahun 2024, yang menandakan adanya tantangan serius dalam sistem pelayanan imunisasi yang perlu segera diatasi. Penurunan ini diperparah dengan anjloknya cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI), dari 63,2% pada tahun 2022 menjadi hanya 29,3% pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya belum optimalnya pemetaan wilayah sasaran imunisasi, lemahnya sistem

pencatatan dan pelaporan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, serta menurunnya partisipasi masyarakat dalam membawa anak ke fasilitas kesehatan akibat kurangnya edukasi dan sosialisasi yang efektif. Selain itu, hambatan geografis dan kondisi infrastruktur di wilayah yang tidak terjangkau juga menjadi penyebab berkurangnya cakupan UCI. Situasi ini perlu segera direspons dengan penguatan program imunisasi, peningkatan kapasitas dan distribusi tenaga kesehatan, serta optimalisasi peran lintas sektor, terutama pemerintah nagari dan kader kesehatan, dalam mendukung kampanye imunisasi secara berkelanjutan.

Indikator prevalensi stunting menunjukkan tren yang fluktuatif, dengan penurunan signifikan dari 28,3% pada tahun 2021 menjadi 19,4% pada tahun 2023, namun mengalami peningkatan kembali pada tahun 2024 menjadi 26,6%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian penurunan stunting belum sepenuhnya berkelanjutan dan rentan mengalami kemunduran apabila tidak didukung oleh intervensi yang konsisten dan menyeluruh. Kenaikan prevalensi di tahun terakhir mengindikasikan adanya potensi lemahnya koordinasi lintas sektor, gangguan dalam rantai program intervensi spesifik dan sensitif, atau faktor eksternal seperti ketahanan pangan keluarga, kondisi sosial ekonomi, dan penurunan cakupan pelayanan gizi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pemantauan dan evaluasi serta keberlanjutan program yang lebih adaptif terhadap dinamika lokal untuk memastikan penurunan stunting yang berkelanjutan dan merata di semua wilayah

Persentase puskesmas yang memiliki jenis tenaga kesehatan sesuai standar meningkat dari 28% pada tahun 2021 menjadi 92% pada tahun 2024. Namun, cakupan Kecamatan Sehat stagnan di angka 11 setiap tahunnya. Indeks Keluarga Sehat juga menunjukkan peningkatan dari 0,10 menjadi 0,17.

Dengan melihat keseluruhan capaian, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Padang Pariaman telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam peningkatan cakupan pelayanan kesehatan dasar dan pengendalian penyakit. Namun, terdapat beberapa tantangan serius yang perlu segera diintervensi, terutama pada pelayanan kesehatan ibu dan anak serta cakupan imunisasi dasar. Perlu penguatan sistem kesehatan primer, peningkatan kapasitas SDM kesehatan, dan pendekatan berbasis komunitas untuk menjangkau wilayah yang belum optimal.

c) Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur dan tata ruang wilayah. Urusan ini mencakup berbagai aspek penting, seperti pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air minum, serta penataan ruang yang berkelanjutan. Implementasi kebijakan dalam sektor PUPR sangat berpengaruh terhadap peningkatan konektivitas, kesejahteraan masyarakat, serta daya saing daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Perkembangan capaian indikator urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat pada Tabel 2.48.

Tabel 2.48
Capaian dan Target Indikator Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada RPJMD Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	88	72.05	88	72.05	90	72.05	92	76.57	95	83.59
Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	81	79,03	81	79.59	85	75.14	87	75.66	93	76.77
Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	%	65.3	64,28	65.3	63.63	67	62.02	69	65.63	71	66.56
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	54.82	50,98	54.82	69.3	58.72	69.47	62.72	68.5	66.74	66.77
Persentase Ketaatan terhadap RTRW	%	63	58	63	60.39	68	69.57	70	72.86	75	82.1
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai (WS) kewenangan kabupaten	%	7.02	6,67	7.02	1.24	7.43	1.29	7.95	6.59	8.53	9.05
Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	55	39.98	55	39.98	60	40.13	70	23.55	75	24.18
Persentase pengembangan dan pemanfaatan kawasan strategis dan kawasan perkotaan	%	35	21.74	35	21.74	43	57.14	52	53	65	66.67
Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	%	37.5	25,00	37.5	33.33	50	55.55	62.5	66.57	75	77.79
Persentase Pemenuhan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	%	60.65	58,65	60.65	N/A	62.87	N/A	64.7	N/A	66.85	N/A
Kawasan strategis dan cepat tumbuh yang sesuai dengan rencana tata ruang	Jumlah Kawasan	9	N/A	9	N/A	9	N/A	9	N/A	9	N/A
Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah	%	10	N/A	10	N/A	20	N/A	25	N/A	30	N/A
Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal dan rumah deret yang sederhana) yang layak fungsi	%	25	20	25	95.4	30	95.4	40	3.2	45	3.2
Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	%	30	N/A	30	23.49	35	23.49	40	12	45	12
Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	81	79,03	81	79.59	85	75.14	87	75.66	93	76.77

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

Capaian kinerja urusan PUPR Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan perkembangan yang bervariasi pada masing-masing indikator. Dari sisi akses air minum, capaian meningkat secara konsisten dari 72,05% (2021 dan 2022), naik menjadi 76,57% (2023), dan mencapai 83,59% pada tahun 2024. Kinerja ini mengindikasikan adanya kemajuan yang cukup signifikan dalam pemenuhan kebutuhan dasar air bersih masyarakat.

Layanan pengolahan air limbah domestik, capaian cenderung stagnan bahkan sedikit menurun dari 79,59% (2021), ke 75,14% (2022), 75,66% (2023), dan hanya 76,77% (2024), jauh di bawah target tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan cakupan pengelolaan air limbah masih menjadi tantangan dan memerlukan perbaikan pada aspek infrastruktur serta kelembagaan pengelolaannya.

Pada indikator tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten yang baik dan sedang, capaian sedikit berfluktuasi, dari 63,63% (2021), turun ke 62,02% (2022), lalu meningkat menjadi 65,63% (2023), dan 66,56% pada tahun 2024. Kinerja ini masih di bawah target tahunan yang terus meningkat, menunjukkan perlunya optimalisasi pemeliharaan dan rehabilitasi jalan. Sementara kondisi jaringan irigasi kabupaten tergolong stabil dan konsisten baik, meskipun cenderung stagnan di angka 69,3% (2021), 69,47% (2022), 68,5% (2023), dan 66,77% (2024). Capaian ini menunjukkan bahwa infrastruktur irigasi masih dalam kondisi layak, meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun terakhir.

Indikator ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mengalami kemajuan yang sangat baik, meningkat dari 60,39% (2021) menjadi 82,1% pada 2024, melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan keberhasilan penguatan regulasi dan pengawasan pemanfaatan ruang di daerah. Kemajuan signifikan juga terlihat pada perlindungan kawasan rawan banjir, di mana rasio kawasan permukiman yang terlindungi meningkat dari 1,24% (2021) menjadi 9,05% (2024). Ini mencerminkan percepatan pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan mitigasi risiko bencana.

Sistem drainase menunjukkan kinerja yang memburuk, dengan capaian menurun dari 39,98% (2021) menjadi hanya 24,18% (2024), meskipun target meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini mengindikasikan perlunya intervensi yang lebih serius dalam perbaikan dan pemeliharaan saluran drainase.

Pengembangan kawasan strategis dan kawasan perkotaan menunjukkan capaian yang meningkat, dari 21,74% (2021) menjadi 66,67% (2024), mendekati target. Hal serupa juga terlihat pada penyediaan informasi tata ruang melalui peta analog dan digital yang meningkat dari 33,33% (2021) menjadi 77,79% (2024), mendukung upaya transparansi dan pemanfaatan data spasial.

Kinerja pengawasan bangunan gedung (non-rumah tinggal) yang layak fungsi sangat menurun drastis dari 95,4% (2021–2022) menjadi hanya 3,2% (2023–2024). Penurunan tajam ini mengindikasikan penurunan kapasitas pengawasan teknis atau adanya perubahan metode verifikasi yang belum diimbangi oleh peningkatan kapasitas kelembagaan. Rasio tenaga operator/analis/teknisi bersertifikat mengalami penurunan signifikan dari 23,49% (2021–2022) menjadi hanya 12% (2023–2024), menunjukkan pentingnya investasi dalam peningkatan kapasitas SDM teknis.

Secara umum, capaian urusan PUPR Kabupaten Padang Pariaman pada 2021–2024 menunjukkan kemajuan pada aspek akses air bersih, pengendalian banjir, ketaatan RTRW, serta digitalisasi informasi ruang. Namun masih terdapat tantangan besar terkait peningkatan pelayanan air limbah, sistem drainase, kualitas bangunan gedung, dan kompetensi teknis SDM. Diperlukan sinergi lintas sektor, penguatan tata kelola, dan peningkatan pendanaan berbasis kinerja untuk memastikan pemerataan dan keberlanjutan layanan infrastruktur dasar di seluruh wilayah kabupaten.

d) Urusan Wajib Perumahan dan Permukiman

Urusan perumahan dan permukiman merupakan tanggung jawab utama pemerintah daerah dalam memastikan setiap warga memiliki akses terhadap hunian yang layak, nyaman, dan terjangkau. Selain sebagai kebutuhan dasar, perumahan yang tertata dengan baik berkontribusi besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menciptakan lingkungan yang sehat dan aman. Penataan kawasan permukiman yang baik juga berperan dalam mengurangi risiko sosial maupun lingkungan, seperti kemacetan, sanitasi buruk, dan penyebaran kawasan kumuh.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah menjalankan berbagai program, termasuk penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), peningkatan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi, serta revitalisasi kawasan permukiman yang tidak layak huni. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan masyarakat, menjadi kunci dalam mewujudkan lingkungan permukiman yang lebih baik. Adapun capaian dan target indikator kinerja pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 2.49.

Tabel 2.49
Capaian dan Target Indikator Urusan Wajib Perumahan dan Permukiman pada RPJMD Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah (%)	100	0	100	0	100	0	100	100	100	100
Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah Daerah Kab/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Jumah (%)	100	0	100	0	100	0	100	100	100	100
Persentase areal kawasan kumuh	%	0.55	0.66	0.55	0.62	0.44	0.64	0.33	0.62	0.22	0.62
Luas Ruang Terbuka Hijau	Ha	852	850	852	43,27	854	0	856	0	858	0
Rasio rumah layak huni	Angka	0.13	0,129	0.13	0.2	0.14	0.2	0.15	0.19	0.16	0.19
Rasio permukiman layak huni	Nilai	0,1	N/A	0,1	0	0.1	0	0.11	0.36	0.12	0.36
Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	63.5	63,00	63.5	90.2	64	92.2	64.5	92.21	65	92.27
Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	19	N/A	19	0	20	0	21	0	22	0
Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	0.66	0,66	0.66	0.63	0.65	0.64	0.64	0.62	0.63	0.62

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	1,20	N/A	1,20	0	1.23	2.23	3.11	4.13	3.85	4.13
Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	1,78	N/A	1,78	0	1.75	6.04	1.72	2.39	1.7	2.39
Persentase pemukiman yang tertata	%	19,9	N/A	19,9	0	20	3.92	20.1	4.13	20.2	4.13
Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	50	N/A	50	100	50	100	55	100	60	100
Persentase Pengembang Perumahan yang telah tersertifikasi	%	2,1	N/A	2,1	0	3.4	0	6.8	0	10	0
Persentase Pengembang Perumahan yang telah teregistrasi	%	100	N/A	100	0	100	0	100	29	100	90
Timbulan sampah yang ditangani	%	19	0,0227	19	0	224	0	223	0	222	0
Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	%	419	0,422	419	0	417	0	223	0	412	0
Persentase cakupan area pelayanan	%	0.28	0,28	0.28	0	0.3	0	0.32	0	0.34	0
Persentase penanganan sampah	%	8	0	8	0	10	0	12	0	14	0

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2025

Capaian kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman menunjukkan dinamika yang beragam sepanjang periode 2020 hingga 2024. Aspek penyediaan rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan mereka yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah menunjukkan perkembangan positif. Setelah nihil realisasi pada tahun 2021 dan 2022, capaian meningkat signifikan menjadi 100% pada tahun 2023 dan bertahan pada angka yang sama di tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam respon pemerintah daerah terhadap kebutuhan hunian darurat dan relokasi penduduk terdampak.

Indikator areal kawasan kumuh memperlihatkan tantangan yang belum terselesaikan. Target penurunan kawasan kumuh dari 0,55% di tahun 2021 menjadi 0,22% di tahun 2024 tidak diikuti oleh perbaikan realisasi. Sebaliknya, realisasi justru stagnan pada angka 0,62% selama empat tahun berturut-turut, mengindikasikan belum optimalnya program pengurangan kawasan kumuh. Hal serupa juga terlihat pada indikator proporsi rumah tangga kumuh perkotaan, yang melonjak dari 0% pada 2021 menjadi 6,04% pada 2022, dan meskipun sempat menurun menjadi 2,39% pada 2023, capaian tersebut stagnan pada 2024.

Pada aspek ruang terbuka hijau, meskipun target meningkat dari 852 hektar pada 2021 menjadi 858 hektar pada 2024, realisasi tetap nol sejak tahun 2022. Hal ini menunjukkan belum ada penambahan ruang terbuka hijau baru selama tiga tahun terakhir. Indikator rasio rumah layak huni juga menunjukkan kesenjangan, di mana meskipun target meningkat dari 0,13 menjadi 0,16, capaian tetap stagnan pada angka 0,19 sejak 2022. Begitu pula dengan rasio permukiman layak huni, yang tidak menunjukkan capaian pada 2021 dan 2022, namun meningkat menjadi 0,36 pada 2023 dan bertahan pada angka yang sama pada 2024.

Indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni mencatat capaian cukup tinggi, dengan peningkatan dari 90,2% di tahun 2021

menjadi 92,27% pada tahun 2024. Namun, pada aspek keterjangkauan, yaitu cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau, tidak ada capaian sama sekali dari 2021 hingga 2024 meskipun target terus naik dari 19% menjadi 22%. Ini menunjukkan bahwa ketersediaan hunian belum mampu menjangkau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Persentase lingkungan permukiman kumuh mengalami penurunan dari 0,63% di tahun 2021 menjadi 0,62% pada 2024, mencerminkan tren yang membaik meski sangat lambat. Namun, luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan justru meningkat drastis dari 0% di tahun 2021 menjadi 4,13% di tahun 2024. Kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat urbanisasi yang meningkat dan kurangnya pengawasan terhadap pengembangan kawasan perkotaan.

Indikator persentase pemukiman yang tertata juga memperlihatkan capaian yang sangat rendah. Dari target yang meningkat dari 19,9% menjadi 20,2%, capaian hanya sebesar 4,13% pada 2024, meskipun sebelumnya tidak mencapai target sama sekali di tahun 2021. Sebaliknya, indikator cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan prasarana dan sarana umum (PSU) menunjukkan hasil optimal dengan capaian 100% pada seluruh tahun.

Persentase pengembang perumahan yang tersertifikasi tetap nol selama empat tahun, meskipun target meningkat dari 2,1% menjadi 10%. Sedangkan untuk pengembang yang teregistrasi, capaian mulai menunjukkan kemajuan dari 0% pada 2021 hingga mencapai 90% pada tahun 2024, menunjukkan perbaikan dalam sistem pendaftaran pengembang.

Pada aspek pengelolaan sampah, seluruh indikator seperti timbulan sampah yang ditangani, pengurangan melalui 3R, cakupan area pelayanan, dan persentase penanganan tidak mencatat capaian sama sekali dari 2021 hingga 2024, meskipun target terus meningkat. Hal ini menandakan lemahnya infrastruktur dan sistem pengelolaan persampahan yang memerlukan intervensi komprehensif.

Secara keseluruhan, capaian urusan perumahan dan kawasan permukiman menunjukkan kemajuan pada aspek ketersediaan rumah layak huni, namun menghadapi stagnasi serius dalam pengelolaan kawasan kumuh, keterjangkauan hunian, ruang terbuka hijau, dan pengelolaan sampah. Reformasi tata kelola, penguatan regulasi, serta peningkatan investasi infrastruktur menjadi krusial untuk mempercepat pencapaian target yang telah ditetapkan.

e) Urusan Wajib Trantibum dan Linmas

Ketentraman dan ketertiban merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai dan merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama. Upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban dilakukan dengan meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan, peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat. Perkembangan capaian indikator kinerja dalam penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada Tabel 2.50

Tabel 2.50
Capaian dan Target Indikator Urusan Wajib Trantibum dan Linmas pada RPJMD Tahun 2020-2024

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
	SATPOL PP DAMKAR											
1.	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	%	100	70	100	70	100	79.1	100	77.42	100	84.37
2.	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase penegakkan PERDA	%	62.5	50,00	62.5	70	65	79.1	67.5	77.42	70	84.37
4.	Penurunan Jumlah Tindak Pidana	Jumlah	562	453	562	453	532	0	482	0	462	0
5.	Persentase gangguan trantibum dan linmas yang dapat diselesaikan	%	62.5	N/A	62.5	70	65	79.1	67.5	77.42	80	84.37
6.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen kebakaran (WMK)	Menit	17.8	15.7	17.8	15.7	15.8	7	14.1	9.47	12.6	9.22
7.	Rasio pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	Jumlah	733		733		734		735	103	736	
8.	Cakupan patrol petugas Satpol PP	Jam	1.41	1.05	1.41	1.05	1.42	1.07	1.43	1.03	1.44	1.05
9.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	%	73.64	70	73.64	70	74.55	79.1	75.45	77.42	76.36	84.37
10.	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	%	96.17	51.22	96.17	51.22	97.14	51.22	98.11	51.22	99.09	32.73
11.	Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 – 5000 liter pada WMK	Unit	6	5	6	5	7	6	8	7	9	7
12.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	50		50		55	207	60	650	65	207
13.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	20.3	100	20.3	100	23.3	100	26.3	93.4	29.3	65.08
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH											
1.	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan Informasi rawan bencana	%	20	30,25	20	30,25	40	41,17	60	124,67	80	140
2.	Persentase warga Negara yang memperoleh pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	58	100	58	100	70	55,87	75	101	83	119
3.	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	70	99,9	70	99,9	75	100	80	100	85	100
4.	Nagari tangguh bencana	Nagari	15	14	15	15	16	16	17	16	18	16
5.	Tingkat waktu tanggap (respone time rate)	Menit	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
6.	Persentase sarana dan prasarana kebencanaan yang ramah bencana	%	41,69	41,84	41,69	41,84	42,57	42,24	43,04	66,75	55,07	66,75

Sumber: Satpol PP Damkar dan BPBD Padang Pariaman, 2025

Capaian kinerja urusan Trantibum dan Linmas secara umum menunjukkan perbaikan yang konsisten, meskipun terdapat beberapa indikator yang masih menghadapi tantangan serius. Dalam aspek pelayanan publik terkait penegakan hukum Perda dan Perkada, terjadi peningkatan capaian dari 70% di tahun 2021 menjadi 84,37% pada 2024, mencerminkan adanya penguatan kapasitas aparatur dalam menegakkan peraturan daerah. Indikator penegakan Perda sendiri mengalami progres yang sejalan, dengan realisasi capaian meningkat dari 70% (2021) menjadi 84,37% (2024), menunjukkan kinerja yang stabil dan terus meningkat dari sisi hukum dan regulasi daerah.

Layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran menunjukkan capaian maksimal dengan tingkat keberhasilan 100% selama empat tahun berturut-turut. Hal ini mencerminkan sistem penanggulangan kebakaran yang telah berfungsi dengan optimal. Namun, dari sisi kualitas aparatur, persentase petugas pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi justru mengalami penurunan signifikan dari 51,22% (2021–2023) menjadi hanya 32,73% pada 2024. Penurunan ini mengindikasikan perlunya perhatian terhadap aspek pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang pemadam kebakaran.

Tingkat respons waktu layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) mengalami perbaikan signifikan, dari 15,7 menit pada 2021 menjadi 9,22 menit pada tahun 2024. Peningkatan ini memperlihatkan adanya efisiensi operasional dalam pelayanan darurat, didukung oleh penambahan armada mobil pemadam kebakaran dari lima unit pada 2021 menjadi tujuh unit pada 2024. Meski jumlah unit belum sepenuhnya sesuai target, namun arah perbaikannya cukup positif.

Penanganan terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum mengalami peningkatan dari sisi capaian penyelesaian, yang naik dari 70% di tahun 2021 menjadi 84,37% pada 2024. Demikian pula dengan tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan (K3), yang juga mencapai 84,37% pada akhir periode, mencerminkan peningkatan efektivitas kinerja Satpol PP dalam mengelola pelanggaran-pelanggaran ringan di masyarakat.

Cakupan petugas Linmas, terdapat data yang fluktuatif dan kurang konsisten. Meskipun terdapat peningkatan signifikan pada tahun 2023 sebesar 650%, namun data ini menurun kembali menjadi 207% di 2024, menunjukkan belum stabilnya distribusi atau pelaporan kinerja Linmas. Hal yang sama terjadi pada cakupan pelayanan kebakaran, yang meskipun mencapai 100% pada 2021 dan 2022, justru turun menjadi 65,08% pada 2024, menandakan adanya tantangan baru dalam mempertahankan cakupan layanan.

Rasio pos siskamling per desa/kelurahan tidak mengalami kemajuan yang signifikan, dengan hanya satu data capaian yang tercatat pada 2023 yaitu 103 pos, dari target tahunan yang meningkat bertahap. Cakupan patroli Satpol PP cenderung stagnan, menunjukkan perlunya penguatan intensitas pengawasan di lapangan.

Dalam aspek pengurangan risiko bencana, capaian kinerja menunjukkan tren yang meningkat secara signifikan. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana menunjukkan peningkatan pesat dari 30,25% pada tahun 2021 menjadi 140% pada 2024. Capaian ini bahkan melampaui target yang ditetapkan, menandakan bahwa upaya diseminasi informasi rawan bencana melalui berbagai media dan sosialisasi telah menjangkau masyarakat secara luas dan efektif.

Indikator persentase warga negara yang memperoleh pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana juga memperlihatkan peningkatan yang konsisten. Meskipun sempat menurun pada 2022 dengan capaian 55,87%, namun tahun-tahun berikutnya mencatatkan perbaikan hingga mencapai 119% pada 2024. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam upaya mitigasi bencana, didukung oleh penguatan kelembagaan dan sistem peringatan dini di tingkat lokal.

Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana menunjukkan capaian yang sangat tinggi, mencapai hampir 100% sejak tahun 2021 hingga 2024. Ini menunjukkan efektivitas respon cepat dan kesiapsiagaan tim penanggulangan bencana dalam menangani situasi darurat secara menyeluruh di seluruh wilayah kabupaten. Jumlah Nagari Tangguh Bencana mengalami stagnasi, tetap berada pada angka 16 nagari sejak 2022 hingga 2024, meskipun target tahunan terus meningkat. Stagnasi ini menunjukkan perlunya percepatan pembentukan atau penguatan nagari tangguh melalui fasilitasi program-program pengurangan risiko bencana yang lebih intensif di tingkat nagari.

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) tetap terjaga stabil pada 15 menit selama empat tahun terakhir. Konsistensi ini menjadi indikator bahwa sistem koordinasi dan mobilisasi tanggap darurat di Padang Pariaman cukup efisien. Capaian indikator sarana dan prasarana kebencanaan yang ramah bencana juga mengalami kemajuan yang signifikan, dari 41,84% (2021) menjadi 66,75% (2023 dan 2024). Kemajuan ini menunjukkan peningkatan kualitas infrastruktur kebencanaan yang memperhatikan standar keselamatan dan keberlanjutan lingkungan dalam menghadapi ancaman bencana.

Capaian kinerja urusan Trantibum dan Linmas Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan kemajuan dalam aspek penegakan hukum dan layanan evakuasi kebakaran. Namun demikian, peningkatan kompetensi aparatur, pemerataan layanan, dan konsistensi pelaporan data menjadi tantangan penting yang perlu segera ditangani untuk memperkuat sistem ketertiban umum dan perlindungan masyarakat secara berkelanjutan. Begitu juga dengan capaian kinerja dalam aspek penanggulangan bencana menunjukkan kemajuan yang sangat baik, terutama dalam hal sosialisasi, kesiapsiagaan masyarakat, dan evakuasi. Tantangan ke depan adalah memperluas cakupan Nagari Tangguh Bencana dan memastikan peningkatan kualitas sarana prasarana terus berlanjut secara merata di seluruh wilayah rawan bencana.

f) Urusan Wajib Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui pemberian perlindungan dan jaminan sosial yang diberikan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Program Kesejahteraan Sosial (PPKS). Bentuk perlindungan dan jaminan sosial yaitu melalui program perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan bencana, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan. Sedangkan pemberdayaan sosial dilakukan dengan memberikan bimbingan dan bantuan yang diberikan kepada Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Indikator Kinerja dalam penyelenggaraan urusan wajib sosial pada periode RPJMD Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 2.51.

Tabel 2.51
Capaiandan Target Indikator Urusan Wajib Sosial pada RPJMD
Tahun 2020-2024

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1.	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase anak telantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase Warga Negara korban bencana Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6.	Tingkat kemiskinan	%	7.11	7,26	7.11	7.22	6.99	6.25	6.87	6.34	6.74	6.27
7.	Persentase PPKS Mandiri	%	23	21	23	0	25	0	27	6.71	28	28
8.	Persentase penanganan dan peningkatan kesejahteraan sosial	%	74	82	74	82	76	98.99	78	78	80	85
9.	Persentase Terpeliharanya dan Terawatnya Taman Makam Pahlawan	%	100	72	100	100	100	100	100	100	100	100
10.	Persentase Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial dan bantuan Usaha yang diberikan	%	65	65	65	100	80	98.99	82	82	85	85
11.	Persentase PPKS yang direhabilitasi dan diberikan Bimtek	%	52	82	52	82	54	98.99	56	56	58	60
12.	Persentase Tertanggulangi Korban Bencana Alam	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial	%	88	82	88	82	89	98.99	90	90	91	91
14.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
15.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	%	7	7	7	7	7	7	8	7	8	7

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPBD 2025

Pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian 100% dari target setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan sosial dasar yang inklusif dan merata bagi kelompok marginal, melalui pendekatan berbasis masyarakat di luar panti. Begitu pula dengan aspek penanganan korban bencana dan pemberian jaminan sosial, seluruh indikator menunjukkan capaian maksimal sebesar 100% sejak tahun 2020 hingga 2024. Ini menunjukkan bahwa respon sosial terhadap bencana, baik dari sisi perlindungan maupun bantuan selama masa tanggap darurat, telah dilaksanakan secara optimal dan merata di seluruh wilayah terdampak.

Tingkat kemiskinan hanya mengalami penurunan yang relatif kecil dalam empat tahun terakhir, dari 7,22% (2021) menjadi 6,27% (2024). Meskipun ada perbaikan, laju penurunannya tergolong lambat dan memerlukan strategi intervensi yang lebih terarah, terutama dalam menciptakan kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat.

Indikator Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mandiri memperlihatkan progres yang cukup signifikan, meningkat dari 0% pada 2021–2022 menjadi 28% pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan hasil dari upaya peningkatan kapasitas dan pemberdayaan sosial melalui bimbingan teknis dan pemberian bantuan usaha, meskipun di tahun awal pelaksanaan belum menunjukkan hasil. Tingkat capaian terhadap indikator penanganan dan peningkatan kesejahteraan sosial juga cukup menggembirakan, dengan pencapaian mendekati target pada 2024, yaitu 85% dari target 80%. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan dalam efektivitas program-program intervensi sosial yang bersifat menyeluruh, baik dari sisi pemulihan sosial, ekonomi, maupun akses terhadap layanan dasar.

Indikator terkait pengembangan potensi kesejahteraan sosial dan pemberian bantuan usaha menunjukkan realisasi yang sangat baik di tahun 2021 dan 2022 dengan capaian mendekati atau mencapai 100%, meskipun cenderung stagnan pada tahun 2023 dan 2024. Ini mengindikasikan perlunya inovasi program dan perluasan jangkauan agar potensi sosial masyarakat dapat dioptimalkan secara lebih merata.

Peningkatan pada indikator PPKS yang direhabilitasi dan diberikan bimbingan teknis juga mengalami progres dari 0% pada tahun awal menjadi 60% pada 2024. Meski belum mencapai target penuh, ini menunjukkan bahwa program rehabilitasi mulai menunjukkan hasil yang nyata dalam jangka menengah. Capaian indikator sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi cenderung stagnan dengan nilai realisasi yang tetap di angka 7, meskipun target bertambah. Ini menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan sosial belum mengalami pertumbuhan yang signifikan dan perlu mendapat perhatian khusus, terutama dalam menghadapi tuntutan pelayanan yang semakin kompleks.

Capaian kinerja urusan sosial Kabupaten Padang Pariaman sangat baik dalam hal rehabilitasi sosial, perlindungan bencana, dan bantuan sosial. Namun demikian, tantangan masih terdapat pada aspek penguatan kemandirian sosial (PPKS mandiri), pengentasan kemiskinan secara signifikan, serta penambahan sarana kelembagaan sosial yang memadai untuk mendukung pelayanan yang berkelanjutan dan berkualitas.

2) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a) Urusan Wajib Tenaga Kerja

Masalah pokok ketenagakerjaan adalah produktivitas tenaga kerja yang masih rendah dengan melihat Rasio Orang Bekerja dan Tingkat Pengangguran terbuka (TPT). TPT menggambarkan perbandingan jumlah penduduk usia kerja yang menganggur dengan banyaknya angkatan kerja, sedangkan rasio orang bekerja menggambarkan perbandingan jumlah penduduk yang bekerja pada angkatan kerja. Berikut disajikan indikator kinerja urusan wajib tenaga kerja pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.

Tabel 2.52
Capaian dan Target Indikator Urusan Wajib Tenaga Kerja pada RPJMD Tahun 2020-2024

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7.61	7,84	7.61	8.41	7.15	6.6	7.17	6.69	7.15	6,59
2.	Tingkat produktivitas tenaga kerja	%	70	N/A	70	68,56	70	65,3	70	66,34	70	69,53
3.	jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Orang	2.4	N/A	2.4	1636	2.4	117	2.43	409	2.5	699
4.	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	51	N/A	51	40	51	79.41	51	68.68	51	51
5.	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%	0.9	N/A	0.9	1.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.31
6.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Angka	10	5	10	5	10	8	10	26.04	10	15.3
7.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	62	100	62	100	64	100	66	0	68	13.6
8.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	6	4.8	6	4.8	6.15	5.6	6.2	22.5	6.25	154
9.	Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	%	57.77	58.23	57.77	58.23	57.77	57.77	59	58.99	60	59.2
10.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	71	80.42	71	80.42	73	80	75	96.67	78	78
11.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah	670	336	670	336	700	368	720	240	730	154
13.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Jumlah	40	0	40	0	60	32	80	136	100	50
14.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Jumlah	80	96	80	96	100	96	120	409	140	50
15.	Rasio lulusan S1/S2/S3	Ratio(%)	56.78	59.7	56.78	59.7	56.86	22.38	56.97	6.85	57.23	6.85
16.	Rasio penduduk yg bekerja	%	70.9	85.1	70.9	85.1	70.92	95.35	70.93	20	70.94	0
17.	Angka partisipasi angkatan kerja	%	70.9	70.9	70.9	70.9	70.92	61.1	70.93	65.15	70.94	45.99
18.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Jumlah	24	5	24	5	24	8	25	8	26	0
19.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	1.5	1.9	1.5	1.9	1.6	1.7	1.7	23.4	1.8	45.99
20.	Pencari kerja yang ditempatkan	%	3.2	1	3.2	1	4	3.8	4.2	23.4	4.5	154
21.	Persentase Pengangguran/mencari Pekerjaan	%	17.98	5,10	17.98	19.44	16.54	9	15.22	6.69	14	5.51
22.	Rasio daya serap tenaga kerja	%	127	112	127	112	140	89	154	0.37	169	154
23.	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap	Orang	2.6	2.1	2.6	2.1	2.7	117	2.8	409	2.9	154

Sumber : Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat capaian kinerja di bidang ketenagakerjaan menunjukkan perbaikan dari sisi pengurangan pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan dari 8,41% pada tahun 2021 menjadi 6,69% pada 2024, mengindikasikan adanya peningkatan dalam serapan tenaga kerja. Tingkat produktivitas tenaga kerja mengalami penurunan pada 2022 menjadi 65,3%, dan pada tahun 2024 menjadi 69,53%. Ini menunjukkan bahwa peningkatan penyerapan tenaga kerja belum sepenuhnya dibarengi oleh peningkatan kualitas dan produktivitas.

Jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan sangat fluktuatif dan cenderung rendah dibandingkan target, dengan realisasi paling tinggi hanya 1.636 orang pada 2021, dan sempat turun drastis pada 2022 (117 orang), sebelum kembali meningkat di tahun-tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas mekanisme penempatan tenaga kerja dan penguatan koordinasi dengan sektor industri.

Indikator tata kelola kerja layak menunjukkan progres positif di 2022 dengan capaian 79,41%, meskipun kembali turun ke 51% pada 2024. Penurunan ini menunjukkan belum stabilnya penerapan prinsip kerja layak di tingkat perusahaan, serta perlunya pengawasan dan pembinaan yang lebih intensif. Rasio pertumbuhan wirausaha baru mengalami kemunduran pada 2024, menurun menjadi hanya 0,31%, jauh di bawah capaian awal tahun 2021 sebesar 1,8%. Hal ini menunjukkan lemahnya dukungan terhadap pengembangan kewirausahaan mikro yang berkelanjutan, terutama dalam konteks pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Sementara itu, angka penyelesaian sengketa antara pekerja dan pengusaha menunjukkan dinamika yang tidak stabil. Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) menurun drastis dari 100% pada 2021–2022 menjadi hanya 13,6% di tahun 2024, menandakan lemahnya kapasitas mediasi dan negosiasi dalam hubungan industrial. Pada sisi perlindungan pekerja, jumlah buruh peserta program Jamsostek mengalami peningkatan signifikan, dari 80,42% pada 2021 menjadi 96,67% pada 2023, sebelum kembali menurun ke 78% pada 2024. Meskipun tren ini belum stabil, capaian tersebut mencerminkan komitmen untuk memperluas perlindungan sosial bagi pekerja. Indikator pelatihan tenaga kerja seperti pelatihan berbasis kompetensi, masyarakat, dan kewirausahaan masih belum mencapai target yang diharapkan. Pada tahun 2024, hanya 154 orang yang menerima pelatihan berbasis kompetensi dari target 730 orang, dan hanya 50 orang untuk pelatihan kewirausahaan dari target 140. Hal ini menjadi indikasi lemahnya eksekusi program pengembangan kapasitas tenaga kerja.

Indikator rasio lulusan S1/S2/S3, rasio penduduk yang bekerja, dan angka partisipasi angkatan kerja juga menunjukkan inkonsistensi dan bahkan kemunduran pada 2023 dan 2024. Misalnya, rasio lulusan pendidikan tinggi stagnan di angka 6,85% pada 2023 dan 2024 dari target lebih dari 56%, sementara rasio penduduk bekerja mencapai 0% di 2024, yang kemungkinan menunjukkan kesalahan pelaporan atau kendala teknis pengumpulan data.

Capaian angka partisipasi angkatan kerja juga cenderung turun dari 70,9% menjadi hanya 45,99% di tahun 2024. Penurunan ini sangat signifikan dan dapat berdampak langsung pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Meskipun ada peningkatan capaian pada indikator pengangguran terbuka dan partisipasi program jaminan sosial tenaga kerja, masih ada tantangan besar dalam peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, optimalisasi pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan, serta efektivitas mekanisme penempatan kerja. Ketimpangan antara target dan realisasi pada beberapa indikator strategis juga menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program ketenagakerjaan secara terpadu dan berbasis data yang akurat.

b) Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan manusia. Dalam konteks ini, pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat menjalankan program-program yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan serta hak-hak perempuan dan anak. Berikut capaian indikator kinerja urusan wajib pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tabel 2.53
Capaian Indikator Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada RPJMD Tahun 2020-2024

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	93.3	92.69	93.3	92.69	93.6	92.78	94	93,32	94.3	93,92
2.	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	12	35	12	26.01	13	35	13	17	14	14
3.	Persentase Keselarasan program dan kebijakan peningkatan kualitas perempuan dan anak	%	40	40	40	50	45	45	46	46	47	47
4.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	66	74	66	74	67	69.7	68	57	69	74.41
5.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
6.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	30	39	30	39	32	32	33	43	35	42.26
7.	Rasio KDRT	Rasio	0.78	0	0.78	0	0.74	0	0.74	4	0.74	0.0013
8.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Angka	53	38.8	53	38.8	54	50.304	55	57	56	59.47
10.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12.	Cakupan perempuan dan anak korban Kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
15.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPBD 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan hasil yang relatif positif dengan kecenderungan peningkatan dalam beberapa aspek strategis. Indeks Pembangunan Gender (IPG) menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil, meningkat dari 92,69 pada tahun 2021 menjadi 93,92 pada tahun 2024. Meskipun capaian ini belum sepenuhnya mencapai target tahunan (94,3), namun mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam mendorong kesetaraan gender dalam pembangunan.

Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami fluktuasi. Capaian tertinggi terjadi pada 2022 sebesar 35%, namun menurun signifikan menjadi 17% pada 2023 dan stagnan di angka 14% pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya

serius, tantangan dalam pencegahan kekerasan masih tinggi dan membutuhkan pendekatan yang lebih intensif serta komprehensif, khususnya dari sisi edukasi masyarakat dan penegakan hukum.

Sementara itu, keselarasan program dan kebijakan peningkatan kualitas perempuan dan anak tercapai secara konsisten sesuai target dari tahun 2022 hingga 2024, yaitu pada angka 45%, 46%, dan 47%. Ini mengindikasikan adanya perbaikan koordinasi lintas sektor serta integrasi kebijakan yang lebih baik untuk memperkuat peran perempuan dan perlindungan anak.

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah juga menunjukkan tren peningkatan setelah mengalami penurunan. Dari capaian 74% di 2021, sempat turun menjadi 57% di 2023, kemudian kembali naik menjadi 74,41% pada 2024. Ini menjadi sinyal positif terhadap keberpihakan pada keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan publik, meskipun proporsi kursi perempuan di DPR belum menunjukkan kemajuan signifikan dan masih berada pada angka 0% hingga 2024, tidak mencapai target minimal 1%.

Capaian partisipasi perempuan di lembaga swasta juga menunjukkan peningkatan dari 32% (2022) menjadi 42,26% (2024), menunjukkan keterlibatan perempuan dalam sektor swasta semakin menguat. Di sisi lain, rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memperlihatkan dinamika signifikan, dari nol kasus pada 2021–2022, meningkat menjadi 4 kasus pada 2023, dan menurun drastis menjadi 0,0013 pada 2024. Penurunan tajam ini menunjukkan efektivitas upaya perlindungan dan layanan pengaduan terhadap korban kekerasan domestik.

Seluruh indikator layanan perlindungan dan rehabilitasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan (indikator 10 hingga 15) mencapai capaian maksimal sebesar 100% selama empat tahun berturut-turut. Capaian ini menegaskan kesiapan dan keberlanjutan layanan Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) di daerah, baik dalam bentuk layanan pengaduan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan, hingga reintegrasi sosial.

Dalam konteks tenaga kerja anak, capaian 0% selama empat tahun berturut-turut menunjukkan tidak adanya laporan atau temuan kasus anak yang bekerja di bawah umur, menandakan keberhasilan pengawasan dan perlindungan anak di bidang ketenagakerjaan. Adapun angka partisipasi angkatan kerja perempuan menunjukkan peningkatan dari 38,8 (2021) menjadi 59,47 pada 2024. Hal ini menunjukkan tren positif dalam akses perempuan terhadap dunia kerja dan ekonomi produktif, mendukung penguatan peran perempuan dalam pembangunan berkelanjutan.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara umum menunjukkan arah yang membaik. Capaian pada indikator layanan perlindungan menunjukkan konsistensi maksimal, namun peningkatan kesetaraan di sektor legislatif serta penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu terus digenjot melalui strategi pencegahan yang lebih masif dan sistematis. Diperlukan sinergi lebih kuat antar-perangkat daerah, lembaga non-pemerintah, serta masyarakat untuk memastikan perempuan dan anak mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan yang optimal.

c) Urusan Wajib Pangan

Urusan wajib pangan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas sangat penting untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk mencapai ketahanan pangan, mengingat tantangan yang dihadapi, seperti perubahan iklim, pertumbuhan populasi, dan fluktuasi harga pangan di pasar global.

Program dan kegiatan dalam urusan pangan dilaksanakan dalam rangka penguatan cadangan pangan, aksesibilitas pangan dan ketersediaan informasi dan peningkatan mutu konsumsi pangan. Berikut capaian dan target kinerja urusan pangan Kabupaten Padang Pariaman pada RPJMD Tahun 2021-2026.

Tabel 2.54
Capaian dan Target Indikator Urusan Wajib Pangan pada RPJMD Tahun 2020-2024

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1.	Skor pola pangan harapan (PPH)	Nilai	88.5	88,10	88.5	79.1	88.9	83.7	89.3	81.4	89.7	80
2.	Ketersediaan pangan utama (beras) per tahun	Ton	156,083.00	137,262.72	156,083.00	137,262.72	158,424.00	118,183.34	160,800.00	120,449.27	163,212.00	100,254.75
3.	Ketersediaan energi	Kkal/kap/ hari	2,400	2.431	2,400	2,074.50	2,400	1,994.90	2,400	1,911.00	2,400	1,878.00
4.	Ketersediaan protein	Gram/kap /hari	54.85	54,04	54.85	57.4	55.66	56.8	56.47	54.4	57.28	52.7
5.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

Capaian kinerja urusan ketahanan pangan di Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan hasil yang beragam dengan tren penurunan pada beberapa indikator utama, yang perlu menjadi perhatian serius dalam perencanaan pembangunan ke depan. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) mengalami fluktuasi selama empat tahun terakhir. Capaian skor tertinggi terjadi pada 2022 sebesar 83,7, namun menurun menjadi 81,4 di tahun 2023 dan kembali turun menjadi 80 pada 2024, meskipun target terus dinaikkan dari 88,5 pada 2021 menjadi 89,7 pada 2024. Penurunan skor ini mengindikasikan kurangnya keragaman konsumsi pangan masyarakat, yang dapat mempengaruhi kualitas gizi secara umum. Pola konsumsi pangan masyarakat menjadi salah satu tolok ukur ketahanan pangan dan gizi di daerah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus berupaya meningkatkan kualitas konsumsi pangan guna mencapai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang lebih ideal

Ketersediaan pangan utama (beras) juga menunjukkan penurunan signifikan. Realisasi pada 2021 mencapai 137.262,72 ton, namun terus menurun menjadi hanya 100.254,75 ton pada 2024, meskipun target ketersediaan terus ditingkatkan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya (1) alih fungsi lahan pertanian untuk kepentingan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol *trace* Padang-Sicincin yang cukup banyak melewati lahan sawah masyarakat, (2)

kerusakan infrastruktur irigasi akibat bencana alam yang menyebabkan terhambatnya distribusi air ke lahan pertanian, (3) keterbatasan akses petani terhadap pupuk bersubsidi sehingga menyebabkan produktivitas padi semakin menurun, dan (4) serangan hama dan penyakit tanaman seperti wereng, kepinding tanah dan tikus yang semakin sering terjadi dan belum tertangani secara optimal.

Ketersediaan energi (kalori) per kapita per hari mengalami tren penurunan yang cukup signifikan. Pada 2021, ketersediaan energi tercatat sebesar 2.074,50 kkal, dan terus menurun hingga mencapai 1.878,00 kkal pada 2024, jauh di bawah target yang tetap dipatok sebesar 2.400 kkal. Ini mencerminkan menurunnya kecukupan asupan energi masyarakat, yang dapat menjadi faktor risiko terhadap gizi buruk, terutama bagi kelompok rentan.

Sementara itu, ketersediaan protein juga memperlihatkan tren penurunan. Setelah sempat mencapai 57,4 gram/kapita/hari pada 2021, angka ini turun menjadi 52,7 gram pada 2024. Meskipun target protein meningkat setiap tahunnya, capaian justru bergerak ke arah sebaliknya. Kondisi ini dapat berdampak terhadap status gizi masyarakat dan memperburuk angka stunting, khususnya pada anak-anak.

Satu-satunya indikator yang menunjukkan kinerja maksimal adalah pengawasan dan pembinaan keamanan pangan, yang konsisten mencapai 100% dari tahun 2021 hingga 2024. Hal ini menunjukkan komitmen dan kesiapan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan pangan dari aspek mutu dan keamanan konsumsi.

Kinerja urusan ketahanan pangan di Kabupaten Padang Pariaman secara umum masih menghadapi tantangan besar, khususnya dalam hal peningkatan ketersediaan pangan pokok, energi, dan protein. Penurunan capaian dalam tiga indikator utama tersebut perlu direspons dengan kebijakan yang terfokus pada penguatan produksi pertanian lokal, diversifikasi sumber pangan, serta intervensi gizi berbasis masyarakat. Keberhasilan dalam menjaga keamanan pangan belum cukup jika tidak dibarengi dengan kecukupan dan keragaman konsumsi yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat.

d) Urusan Wajib Pertanahan

Kebijakan pada urusan pertanahan diarahkan pada upaya peningkatan tertib administrasi pertanahan dan pemecahan masalah-masalah atau konflik pertanahan. Urusan wajib pertanahan di Kabupaten Padang Pariaman memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah pertumbuhan populasi dan kebutuhan ruang yang semakin meningkat, pengelolaan tanah yang efektif menjadi krusial. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan bahwa penguasaan dan pemanfaatan tanah dilakukan secara adil, transparan, dan berkelanjutan, dengan mengedepankan hak-hak masyarakat dan kepentingan umum. Berikut capaian dan target kinerja urusan pangan Kabupaten Padang Pariaman pada RPJMD Tahun 2021-2026.

Tabel 2.55
Capaian dan Target Indikator Urusan Wajib Pertanahan pada RPJMD Tahun 2020-2024

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1.	Persentase luas lahan milik Pemda bersertifikat	%	8.8	0	8.8	0	8.9	5.5	9	7.3	9.5	8.4
2.	Penyelesaian Izin Lokasi	IZIN	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
3.	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	100	100	100	0	100	0	100	100	100	0
4.	Cakupan penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	%	60	50	60	0	65	0	70	0	75	100
5.	Cakupan pelaksanaan redistribusi tanah dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	%	0	0	0	0	5	0	15	0	20	0
6.	Cakupan pelayanan pengelolaan izin membuka tanah	%	5	5	5	0	5	0	5	0	5	0

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2025

Capaian kinerja urusan pertanahan masih menghadapi berbagai kendala dalam pengelolaan dan penyelesaian administrasi pertanahan, khususnya terkait legalitas aset daerah, izin, serta redistribusi tanah. Persentase luas lahan milik Pemda yang bersertifikat menunjukkan tren meningkat secara bertahap dari 0% pada 2021 menjadi 8,4% pada 2024. Meskipun belum mencapai target tahunan yang ditetapkan (misalnya target 9,5% di tahun 2024), perkembangan ini mengindikasikan adanya upaya yang berkelanjutan dalam mensertifikasi aset milik daerah sebagai bagian dari upaya tertib administrasi dan pengamanan aset.

Namun demikian, indikator penyelesaian izin lokasi menunjukkan stagnasi dengan tidak ada capaian realisasi selama empat tahun berturut-turut, meskipun target izin lokasi ditetapkan setiap tahun. Hal ini menunjukkan lemahnya pelaksanaan proses perizinan lokasi, yang dapat menghambat investasi atau pengembangan wilayah. Penyelesaian kasus tanah negara juga menunjukkan pola fluktuatif. Tidak ada realisasi pada tahun 2021, 2022, dan 2024, sementara capaian 100% hanya terjadi pada tahun 2023. Inkonsistensi ini menunjukkan bahwa penyelesaian kasus tanah negara belum dilakukan secara berkelanjutan dan sistematis.

Capaian pada indikator penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan baru menunjukkan perbaikan signifikan pada tahun 2024 dengan realisasi 100%, setelah tiga tahun sebelumnya tidak menunjukkan capaian sama sekali. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam mekanisme pengadaan tanah untuk proyek pembangunan, namun juga mencerminkan lambannya progres selama tiga tahun sebelumnya.

Adapun indikator pelaksanaan redistribusi tanah dan penyelesaian tanah kelebihan maksimum maupun tanah absentee tidak menunjukkan capaian sama sekali meskipun target tahunan telah ditetapkan dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Demikian pula, cakupan pelayanan pengelolaan izin membuka tanah tidak mengalami perkembangan selama empat tahun terakhir, dengan realisasi tetap 0%. Secara umum, kinerja urusan pertanahan di Kabupaten Padang Pariaman masih menghadapi berbagai hambatan administratif dan kelembagaan. Rendahnya capaian pada sejumlah indikator menunjukkan perlunya penguatan koordinasi

lintas sektor, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penyusunan strategi percepatan legalisasi aset, penyelesaian kasus tanah, dan pengelolaan perizinan secara lebih efisien dan transparan. Keberhasilan pada indikator tertentu, seperti ganti kerugian tanah dan sertifikasi aset Pemda, patut diapresiasi, namun tetap perlu ditingkatkan agar mampu mendukung penyelenggaraan pembangunan yang lebih tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan.

e) Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Di Kabupaten Padang Pariaman, kualitas lingkungan hidup masih terjaga dengan baik, ditandai dengan kualitas udara dan air yang relatif baik. Namun, pertumbuhan aktivitas masyarakat serta penggunaan sumber daya alam tetap perlu dikelola secara berkelanjutan untuk mencegah potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan di masa depan. Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan menjadi langkah penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) digunakan sebagai indikator dalam pemantauan dan pengelolaan lingkungan. Adapun perkembangan capaian dan target kinerja urusan lingkungan hidup tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.56.

Tabel 2.56
Capaian Indikator Urusan Wajib Lingkungan Hidup pada RPJMD
Tahun 2020-2024

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	66.93	67,38	66.93	68.76	67	66.97	67.09	69.88	67.17	67.02
2.	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
3.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten / kota	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
4.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air	Angka	55.79	55,41	55.79	58.95	55.89	53.81	55.99	60.59	56.09	53.53
6.	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	Angka	91.83	93,32	91.83	93.54	91.93	93.89	92.06	93.58	92.16	93.06
7.	Persentase Keanekaragaman Hayati yang terkelola	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0
8.	Cakupan pelayanan pengawasan pengelolaan LB3 terhadap usaha/kegiatan yang memiliki izin lingkungan	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9.	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau ke giatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin	%	35	31	35	56.67	40	75	45	71.43	50	78.57

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
	PPLH dan PUU LH											
10.	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	Orang	2	0	2	2	2	2	3	2	3	2
11.	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Kelompok	N/A	N/A	N/A	0	1	0	1	0	1	0
12.	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	Kelompok	N/A	N/A	N/A	0	1	0	1	0	1	0
13.	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Kelompok	N/A	N/A	N/A	0	1	0	1	0	1	0
14	Penetapan hak MHA	Kelompok	N/A	N/A	N/A	0	1	0	1	0	1	0
15.	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Kelompok	N/A	N/A	N/A	0	1	0	1	0	1	0
16.	Terfasilitasi penyediaan sarana / prasarana	Kelompok	N/A	N/A	N/A	0	1	0	1	0	1	0
17.	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Kali	0	0	0	0	2	0	2	2	2	2
18.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
19.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota,lokasi usaha dan dampaknya di Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	%	60	0	60	0	70	0	80	0	85	0
21.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal atau UKL- UPL	%	20.23	N/A	20.23	N/A	24.72	21.05	24.73	10.66	25.51	13.82
22.	Penegakan hukum lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2025

Capaian kinerja urusan lingkungan hidup menunjukkan tren yang beragam antara indikator yang mengalami peningkatan dan stagnasi, serta beberapa yang belum mencapai target atau bahkan belum direalisasikan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) memperlihatkan fluktuasi capaian dari tahun ke tahun. IKLH meningkat dari 66,93 (2021) menjadi 68,76 (2021), namun sempat turun ke 66,97 (2022), dan meskipun sempat membaik pada 2023 menjadi 69,88, capaian kembali turun ke 67,02 di tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan belum sepenuhnya konsisten.

Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara juga bersifat fluktuatif. Indeks kualitas air cenderung menurun, dari 58,95 (2021) menjadi 53,53 (2024), menandakan penurunan kualitas sumber daya air.

Sebaliknya, indeks kualitas udara tetap berada pada kisaran baik, meskipun terdapat sedikit penurunan di 2024 (93,06 dari 93,58 pada 2023), yang tetap menunjukkan kualitas udara yang relatif terjaga.

Indikator tersusunnya RPPLH dan terintegrasinya dalam rencana pembangunan menunjukkan bahwa meskipun RPPLH akhirnya tersedia pada 2024, integrasinya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan belum berjalan konsisten, dengan capaian hanya tercatat pada 2021 dan 2023. Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) mulai menunjukkan kemajuan, dengan capaian penuh sejak 2023. Kinerja pengawasan dan pembinaan juga menunjukkan peningkatan. Persentase pengawasan terhadap penanggung jawab usaha dan kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan meningkat dari 56,67% (2021) menjadi 78,57% (2024), menunjukkan perbaikan signifikan dalam pengawasan lingkungan hidup.

Namun, capaian untuk indikator keanekaragaman hayati, pendampingan dan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), serta hak-hak kearifan lokal tidak menunjukkan progres dari tahun 2021 hingga 2024. Meskipun target ditetapkan setiap tahun, realisasinya tetap nihil, menandakan lemahnya perhatian terhadap aspek keadilan ekologis dan kultural dalam perlindungan lingkungan. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat menunjukkan perbaikan, dari nihil pada 2021–2022 menjadi tercapai pada 2023–2024. Begitu pula dengan penghargaan lingkungan hidup, yang konsisten diberikan setiap tahun.

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air tidak menunjukkan capaian apa pun meski target meningkat tiap tahun, yang merupakan sinyal lemahnya konservasi sumber daya alam. Pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL/UKL-UPL cenderung meningkat secara perlahan, dari 21,05% pada 2022 menjadi 13,82% pada 2024, namun belum mencapai target maksimal. Penegakan hukum lingkungan tetap konsisten di angka 100% selama empat tahun, yang merupakan indikator positif dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi lingkungan.

Meskipun terdapat indikator yang menunjukkan kemajuan, seperti indeks kualitas udara, pelaksanaan KLHS, dan penegakan hukum lingkungan, banyak indikator strategis lainnya yang stagnan atau bahkan tidak terealisasi, terutama yang menyangkut keanekaragaman hayati, konservasi lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat. Perlu dilakukan penguatan komitmen dalam implementasi kebijakan lingkungan yang inklusif, berkelanjutan, serta terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh.

f) Urusan Wajib Adminduk Catatan Sipil

Salah satu indikator tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan Akta Perkawinan. Peningkatan atau penurunan jumlah penduduk yang memiliki dokumen tersebut mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya identitas diri dan administrasi kependudukan. Berikut adalah gambaran kepemilikan dokumen kependudukan, dengan fokus pada kepemilikan KTP selama periode 2020-2024. Capaian dan target indikator administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam RPJMD Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 2.57
Capaian dan Target Indikator Urusan Wajib Adminduk Catatan Sipil pada RPJMD Tahun 2020-2024

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	SATUAN	Capaian Kinerja									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1.	Indeks Pelayanan Publik	INDEKS	4.56	4,55	4.56	4.74	4.56	4.74	4.57	-	4.57	4.17
2	Persentase Penerbitan KTP EL	%	99	99,68	99	99.8	99	99.73	99	99.31	99	97.83
3	Persentase Penerbitan KK	%	100	99,31	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Penerbitan KIA	%	30	20,06	30	36.38	35	41.88	40	50.93	45	57.53
5	Persentase penerbitan akta kelahiran	%	93	91,73	93	97.05	95	97.6	95	96.93	97	98.35
6	Persentase Penerbitan akta perkawinan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentasi penerbitan akta kematian	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase database kependudukan yang disusun	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk	RATIO	3:02	N/A	3:02	4.2:3	3:02	4.3:3	3:02	4.1:3	3:02	4.1:3
10	Rasio bayi berakte kelahiran	RATIO	1:01	1:01	1:01	1:01	1:01	1:01	1:01	1:01	1:01	1:01
111	Rasio pasangan berakte nikah	RATIO	1:02	2:3.64	1:02	2:3.64	2:03	2:3.22	2:03	2.98:2	3:04	2.86:2
12	Ketersediaan data base kependudukan skala provinsi	ADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
13	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	SUDAH	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2025

Capaian kinerja pelayanan administrasi kependudukan secara umum menunjukkan tren yang positif dan stabil, meskipun terdapat beberapa penurunan pada indikator tertentu di tahun 2024. Indeks Pelayanan Publik mengalami fluktuasi. Meskipun tercatat stabil pada nilai 4.74 pada 2021 dan 2022, terjadi penurunan signifikan menjadi 4.17 pada 2024 setelah tidak tersedia data pada tahun 2023. Penurunan ini perlu menjadi perhatian karena mencerminkan persepsi atau kualitas layanan publik yang menurun.

Pada aspek administrasi kependudukan, penerbitan dokumen kependudukan utama menunjukkan capaian yang tinggi dan konsisten. Penerbitan KTP-el tetap tinggi di atas 97%, meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2024 menjadi 97,83%. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan akta-akta pencatatan sipil lainnya (akta kelahiran, akta perkawinan, dan akta kematian) berhasil dipertahankan pada capaian maksimal 100% untuk sebagian besar indikator sepanjang empat tahun. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) menunjukkan peningkatan progresif yang signifikan dari 36,38% (2021) menjadi 57,53% (2024), menggambarkan komitmen yang kuat dalam melindungi hak identitas anak.

Persentase database kependudukan yang disusun dan ketersediaan data skala provinsi konsisten mencapai target 100% dan tersedia setiap tahun, yang menunjukkan pengelolaan data kependudukan yang andal. Begitu juga dengan penerapan KTP nasional berbasis NIK, yang telah sepenuhnya diterapkan sejak awal periode dan tetap berjalan tanpa kendala.

Capaian indikator urusan administrasi kependudukan menunjukkan performa yang sangat baik dan konsisten, dengan sebagian besar indikator mencapai atau mendekati 100%. Namun, penurunan Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2024 serta ketidaktercapaian rasio ideal pasangan berakte nikah menjadi catatan penting. Diperlukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik secara menyeluruh dan peningkatan advokasi serta kemudahan layanan pencatatan sipil agar seluruh masyarakat dapat terlindungi hak sipilnya secara setara.

g) Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta pemanfaatan sumber daya yang ada. Upaya ini dilakukan melalui kebijakan, program, dan pendampingan yang tepat. Keberhasilan pemberdayaan desa dapat diukur dari meningkatnya jumlah desa yang mampu berkembang secara mandiri.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan suatu desa berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi. IDM bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai kondisi desa serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam pelaksanaannya, IDM mengelompokkan desa ke dalam lima kategori, yaitu desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri. Semakin tinggi skor IDM suatu desa, maka semakin baik tingkat kemandirian dan kesejahteraannya. Capaian dan target kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020-2024 di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada Tabel 2.58.

Tabel 2.58
Capaian Indikator Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada RPJMD Tahun 2020-2024

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1	Indeks Desa Membangun	%	4	4	4	0.69	1	0.71	1	0.74	1	0.74
2.	Persentase Nagari yang tertata	%	100	60	100	70	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase Nagari yang telah melakukan kerjasama	%	100	55	100	70	100	100	100	100	100	75
4.	Persentase administrasi Nagari dengan kategori baik	%	100	60	100	70	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga masyarakat hukum adat yang aktif	%	100	65	100	91	100	100	100	100	100	100
6.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga berdayaan masyarakat (LPM)	%	90	75	90	75	90	100	92	92	94	100
7.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.	Persentase LPM aktif	%	72	72	72	72	74	100	78	78	81	100
9.	Persentase LPM Berprestasi	%	68	68	68	68	72	72	75	75	77	75
10.	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11.	Persentase Posyandu aktif	%	75	75	75	75	80	100	85	85	90	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyaakat dan Desal, 2025

Berdasarkan Tabel 2.58 di atas, capaian indikator pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat menunjukkan tren yang sangat positif dan progresif dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Hal ini mencerminkan konsistensi dan keberhasilan program-program pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan nagari, pemberdayaan kelembagaan masyarakat, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Indeks Desa Membangun (IDM) menunjukkan tren peningkatan, dari capaian awal sebesar 0,69 (2021) menjadi 0,74 pada 2024. Meskipun target tahun 2021 lebih tinggi dari capaian, namun dalam tiga tahun terakhir indeks ini berhasil mendekati target dan menunjukkan perbaikan kualitas desa dalam dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi.

Capaian indikator penataan administrasi nagari sangat baik. Hampir semua indikator seperti Persentase nagari yang tertata, Persentase administrasi nagari kategori baik, Persentase lembaga adat dan lembaga masyarakat hukum adat yang aktif dan Persentase nagari yang telah melakukan kerjasama telah mencapai atau mendekati 100% sejak tahun 2022. Hal ini menunjukkan penguatan tata kelola pemerintahan nagari yang efisien dan responsif. Namun demikian, persentase nagari yang telah melakukan kerjasama sempat mengalami sedikit penurunan pada 2024 (menjadi 75%) yang patut menjadi perhatian untuk ditingkatkan kembali, mengingat pentingnya kolaborasi antar nagari maupun dengan pihak ketiga untuk pembangunan lokal.

Partisipasi kelembagaan masyarakat, seperti PKK, Posyandu, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) juga menunjukkan capaian yang sangat baik, PKK dan Posyandu aktif meningkat secara konsisten, bahkan mencapai 100% pada 2024, Persentase LPM aktif juga mengalami peningkatan signifikan dari 72% (2021) menjadi 100% (2024). Sementara itu, LPM berprestasi mengalami stagnasi pada 75% dalam dua tahun terakhir, mengindikasikan perlunya program pembinaan lebih lanjut yang bersifat kompetitif dan inovatif.

Secara umum, capaian kinerja pada urusan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan nagari mengalami peningkatan yang signifikan dan stabil. Hampir seluruh indikator menunjukkan keberhasilan mencapai target-target yang ditetapkan, bahkan dalam beberapa hal sudah konsisten pada tingkat capaian maksimal sejak tahun 2022. Namun, ada beberapa aspek seperti kerjasama nagari dan prestasi LPM yang perlu mendapat perhatian melalui inovasi program pembinaan dan fasilitasi kemitraan. Pemerintah daerah perlu mempertahankan capaian positif ini sembari mengidentifikasi titik-titik lemah untuk ditingkatkan pada periode perencanaan berikutnya.

Keberadaan desa mandiri memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dari tingkat desa. Hal ini tercermin dari berkembangnya sektor usaha dan industri lokal yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal sebagai faktor utama produksi.

h) Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program kependudukan dan keluarga berencana bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui upaya peningkatan kesejahteraan dan

ketahanan keluarga. Program ini mengedepankan perencanaan keluarga yang sehat dan sejahtera, baik dari aspek sosial maupun ekonomi. Pelaksanaannya difokuskan pada penguatan kebijakan program, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan keluarga berencana, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun indikator Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada RPJMD 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 2.59 berikut:

Tabel 2.59
Capaian dan Target Indikator Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada RPJMD Tahun 2020-2024

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	3.5	0.74	3.5	0.74	3.39	0.27	3.29	1.73	1.7	1.72
2.	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	%	2.38	2.28	2.38	2.28	2.34	1.93	2.31	1.89	2	2.2
3.	Persentase Pemakaian alat kontrasepsi (Contraseption Prevalence Rate = CPR)	%	65.5	65,39	65.5	65.69	65.75	65.29	66	65.89	66.25	65.91
4.	Angka kelahiran remaja Perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	Angka	14	14	14	6.31	13	2.34	12	3.18	3.7	2.32
5.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	11	74	11	74	13	43.18	15	22.72	17	100
6.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	100	0	100	0	100	0	100	0	100	100
7.	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Jumlah	NA	0	NA	0	1	1	1	0	2	0
8.	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Jumlah	2	0	2	0	4	1	6	6	8	8
9.	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Jumlah	3	2	3	2	5	2	7	3	10	100
10.	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	%	2.6	2.5	2.6	2.5	2.5	1.66	2.4	1.21	2.3	1.53
11	Ratio Akseptor KB	%	65.5	65,69	65.5	65,69	65.75	65.29	66	65.89	66.25	65.91
12.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 Tahun	%	N/A	0	N/A	0	1.15	0	1.11	0	1.07	0
13.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi *(unmet need)*	%	12.5	15.55	12.5	15.55	12	16.05	11.75	15.72	11.5	15.54
14.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	24.75	17.9	24.75	17.9	24.9	17.99	25	16.75	25.15	25.13
15.	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	34.5	23.7	34.5	23.7	34.7	34.7	34.9	27.91	35	27.81

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
16.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	50.62	51.12	50.62	51.12	51.12	47.71	51.62	45.43	52.12	67.95
17.	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	40.86	41.36	40.86	41.36	41.36	38.96	41.86	15.12	42.36	21.7
18.	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	39.97	40.47	39.97	40.47	40.47	32.6	40.97	4.69	41.47	6.17
19.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Jumlah	423	435	423	435	435	82.35	447	82.35	458	111.76
20.	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling remaja/Mahasiswa	%	335	337	335	337	347	623.5	358	411.76	370	417.64
21.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	44.37	16.5	44.37	16.5	44.47	100	44.57	100	44.67	100
22.	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	61.9	9.7	0	9.7	1.24
23.	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	219.4	100	219.4	100	100	100	100	100	495
24.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	96.94	100	88.78
25.	Persentase Faskes dan jejaringnya (di seluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	25	52.08	25	52.08	30	100	35	50	40	50.4
26.	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	20	25	20	25	22	100	24	100	26	100
27.	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	71	71.5	71	71.5	71.5	0	72	0	72.5	0
28.	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	62.54	63.4	62.54	63.4	63.04	60.02	63.54	0	64.04	0
29.	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	22	22	22	22	22.5	11.05	23	0	23.5	0
30.	Rata -rata usia kawin pertama wanita	%	44.37	25.44	44.37	25.44	44.47	25.5	44.57	25.23	44.67	22.5
31.	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	0.13	0.78	0.13	0.78	0.14	0.8	0.15	0.76	0.16	0.7

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2025

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, pelaksanaan program pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga di Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan dinamika capaian yang bervariasi. Beberapa indikator memperlihatkan kemajuan yang signifikan, sementara beberapa lainnya masih menghadapi tantangan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Pada aspek pengendalian kuantitas penduduk, indikator laju pertumbuhan penduduk menunjukkan tren penurunan yang positif, dari 0,74% pada tahun 2021 menjadi 1,72% pada tahun 2024, meskipun masih terdapat fluktuasi di tengah periode. Sementara itu, angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*/TFR) juga mengalami penurunan dari 2,28 menjadi 2,20 pada tahun 2024. Hal ini menandakan adanya pergeseran menuju pertumbuhan penduduk yang lebih terkendali, meskipun target TFR belum sepenuhnya tercapai pada beberapa tahun.

Tingkat pemakaian alat kontrasepsi (CPR) relatif stabil pada kisaran 65–66%, namun pemakaian kontrasepsi jangka panjang (MKJP) masih tergolong rendah, hanya mencapai 25,13% pada tahun 2024. Rendahnya capaian MKJP ini juga berimplikasi pada tingkat keberlangsungan ber-KB yang masih di bawah target, menandakan perlunya upaya intensif dalam peningkatan pemahaman dan akses terhadap metode kontrasepsi jangka panjang.

Angka kelahiran remaja (ASFR 15–19 tahun) mengalami penurunan signifikan dari 6,31 per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun pada tahun 2021 menjadi 2,32 pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan edukasi dan intervensi pencegahan perkawinan usia dini serta peningkatan kesadaran remaja terhadap kesehatan reproduksi.

Partisipasi perangkat daerah dalam program Kampung KB menunjukkan peningkatan, mencapai 100% pada tahun 2024. Namun demikian, penyusunan dan pemanfaatan Rencana Induk Pengendalian Penduduk (RIPPK) baru terealisasi pada tahun 2024 setelah tiga tahun berturut-turut tanpa capaian. Demikian pula, pemanfaatan data proyeksi penduduk oleh berbagai sektor meningkat tajam dari 0 sektor (2021) menjadi 8 sektor (2024), mencerminkan peningkatan kesadaran akan pentingnya data dalam perencanaan pembangunan.

Indikator *unmet need* atau kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi masih tinggi, berkisar antara 15–16% selama empat tahun terakhir, jauh dari target maksimal 12%. Hal ini menunjukkan masih adanya hambatan dalam menjangkau pasangan usia subur yang ingin ber-KB namun belum mendapatkan layanan. Indikator terkait edukasi keluarga dan bina keluarga balita, remaja, serta lansia menunjukkan capaian yang belum optimal. Misalnya, cakupan Bina Keluarga Lansia (BKL) yang ber-KB hanya mencapai 6,17% pada tahun 2024, sementara Bina Keluarga Remaja (BKR) tercatat hanya 21,7% di tahun yang sama. Rendahnya capaian ini menunjukkan perlunya peningkatan program pembinaan keluarga secara menyeluruh.

Dari segi dukungan regulasi dan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan program melalui APBD dan APBDes masih sangat minim, hanya 0,70% pada tahun 2024. Selain itu, jumlah kebijakan daerah yang mengatur pengendalian penduduk juga belum konsisten meningkat setiap tahun, menunjukkan masih perlunya penguatan regulasi daerah secara berkelanjutan.

Di bidang pelayanan dan penyuluhan KB, rasio petugas PPKBD per desa meningkat tajam menjadi 495 pada tahun 2024, menunjukkan

penguatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal. Namun demikian, distribusi alat dan obat kontrasepsi menurun dari 100% (2021–2022) menjadi 88,78% pada 2024, yang berpotensi mengganggu kelancaran pelayanan KB bila tidak ditindaklanjuti segera.

Beberapa capaian menunjukkan kemajuan yang perlu diapresiasi, seperti peningkatan cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling serta cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga yang meningkat secara konsisten.

Kabupaten Padang Pariaman telah menunjukkan kemajuan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk dan pelaksanaan program KB. Namun, masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian khusus, terutama dalam hal peningkatan capaian MKJP, pemenuhan kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi, dan edukasi keluarga berkelanjutan. Diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, perangkat nagari, dan masyarakat untuk mendorong pencapaian indikator yang lebih merata dan berkelanjutan di masa mendatang.

i) Urusan Wajib Perhubungan

Urusan perhubungan merupakan salah satu aspek strategis dalam pembangunan daerah yang berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta integrasi antarwilayah. Dalam konteks Kabupaten Padang Pariaman, pengelolaan sektor perhubungan diarahkan untuk meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar arus lalu lintas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi yang andal dan berkelanjutan. Hal ini mencakup pembangunan jalan, terminal, jembatan timbang, serta fasilitas transportasi darat lainnya, termasuk penataan angkutan umum yang efisien dan berkeselamatan.

Transportasi merupakan elemen krusial dalam mendukung keberhasilan pembangunan, khususnya dalam memperlancar kegiatan perekonomian masyarakat serta mendorong pengembangan wilayah, baik di kawasan perdesaan maupun daerah lainnya. Adapun capaian dan target kinerja urusan perhubungan di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.60
Capaian dan Target Indikator Urusan Wajib Perhubungan pada RPJMD Tahun 2020-2024

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1	Rasio Konektivitas Kabupaten	Rasio	1;54	1;54	1;54	1;54	1;57	1;43	1;59	1;41	0.0840 27778	1;51
2.	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukkannya	%	85.00	85	85.00	88.24	87.00	82.00	90.00	80/00	92.00	82.00
3.	Penurunan tingkat kecelakaan diperlintasan sebidang	Angka	21.00	21	21.00	5.00	18.00	10.00	16.00	20.00	14.00	14.00
4.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Orang	5,99,318,00	5.995.318	5,99,318,00	54,889,00	5,995,320	1,915,636,00	5,995,325	1,560,345,00	5,995,330,00	1,191,601,00
5.	Rasio Izin Trayek	Rasio	33.00	17	33.00	37.00	38.00	37.00	43.0	17.00	46.00	39.00
6.	Jumlah Uji kir Angkutan Umum	Jumlah	5,600.00	4.093	5,600.00	7,016,00	5,750.00	6,603,00	5,900.00	4.364.00	6.150.00	3.675.00

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
7.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus	Jumlah	*3/1/3	*3/1/2	*3/1/3	*3/1/3	*3/1/3	*3/1/3	*3/1/3	*3/1/3	*3/1/3	*3/1/3
8.	Persentase Layanan Angkutan Udara	%	60.00	43.00	60.00	43.00	65.00	14.45	70.00	100.00	75.00	72.00
9.	Persentase Kepemilikan KIR angkutan Umum	%	2,800.00	5,600.00	2,800.00	5,600.00	2,925.00	100.00	3,050.00	3,050.00	3,225.00	3,675.00
10.	Jumlah Pemasangan Rambu-rambu	Jumlah	975.00	975	975.00	0.00	980.00	0.00	985.00	230.00	990.00	53.00
11.	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	Rasio	0.54	0,35987	0.54	0,35987	1	0.37	1	0,51	0.54	0,55
12.	Jumlah orang /barang yang terangkut angkutan umum	Jumlah	5,995,318	10,630.00	5,995,318	10,630.00	5,995,319	3,995,319,00	5,995,320	2,785,000.00	5,995,325.00	2,897,775.00
13.	Jumlah orang /barang melalui dermaga/bandara /terminal pertahun	Jumlah	5,995,350	1,078,520.00	5,995,350	1,078,520.00	5,995,355	1,462,407,00	5,995,360	2,789,000.00	5,995,365.00	2,897,775.00
14.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Menit	20.00	20	20.00	20.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00
15.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	Rp	53,500.00	53,500.00	53,500.00	70,000.00	53,500.00	70,000.00	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00

Sumber : Dinas Perhubungan, 2025

Berdasarkan Tabel 2.60 di atas dapat dilihat capaian kinerja pembangunan daerah di sektor perhubungan dan transportasi di Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan dinamika yang mencerminkan adanya tantangan dalam peningkatan konektivitas, keselamatan, dan efisiensi pelayanan transportasi publik.

Indikator rasio konektivitas kabupaten mengalami fluktuasi, dari tahun 2021 hingga 2024. Rasio ini menunjukkan tingkat keterhubungan jaringan jalan dalam mendukung mobilitas masyarakat, dan meskipun rasio pada tahun 2024 menunjukkan perbaikan (1:51), capaian belum sepenuhnya menunjukkan peningkatan signifikan dari sisi pembangunan konektivitas yang merata.

Pada indikator ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan, persentase realisasi sempat menurun dari 88,24% pada tahun 2021 menjadi 80% pada tahun 2023, namun kembali naik ke 82% di tahun 2024. Hal ini mencerminkan upaya perbaikan terhadap fasilitas lalu lintas seperti rambu, marka, dan penerangan jalan, meskipun masih belum optimal terhadap target tahunan yang terus meningkat.

Penurunan tingkat kecelakaan di perlintasan sebidang belum menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Jumlah kasus kecelakaan meningkat pada tahun 2023 (20 kasus), namun berhasil ditekan kembali ke angka 14 kasus di tahun 2024. Ini menunjukkan perlunya penguatan pengawasan, sosialisasi keselamatan, serta pembenahan infrastruktur di titik-titik rawan. Iindikator jumlah arus penumpang angkutan umum dan jumlah orang/barang yang terangkut menurun drastis setiap tahunnya. Misalnya, jumlah penumpang umum turun dari 1,915 juta pada 2022 menjadi hanya 1,191 juta pada 2024. Penurunan ini mengindikasikan menurunnya minat atau kepercayaan masyarakat terhadap transportasi publik, atau bisa juga karena pengaruh pandemi sebelumnya yang belum pulih sepenuhnya, serta belum optimalnya fasilitas angkutan umum.

Rasio izin trayek sempat turun tajam pada tahun 2023 (17 izin dari target 43), namun kembali meningkat ke 39 pada tahun 2024. Hal ini

menunjukkan adanya kendala administratif atau kurangnya peminat operator untuk membuka layanan angkutan reguler. Jumlah uji KIR juga terus menurun dari 7.016 uji kendaraan pada 2021 menjadi hanya 3.675 pada tahun 2024. Penurunan signifikan ini mengindikasikan lemahnya kepatuhan operator terhadap kewajiban uji kelayakan kendaraan, atau terbatasnya kapasitas pelayanan uji kendaraan di daerah.

Dari sisi ketersediaan prasarana transportasi, jumlah pelabuhan laut, bandara, dan terminal tetap stagnan (3 pelabuhan laut, 1 bandara, dan 3 terminal), menandakan tidak adanya ekspansi prasarana selama empat tahun terakhir. Layanan angkutan udara sempat menunjukkan capaian 100% pada tahun 2023, namun kembali menurun menjadi 72% di tahun 2024, yang mengindikasikan belum stabilnya pelayanan transportasi udara, terutama dalam keterjangkauan atau frekuensi layanan penerbangan.

Jumlah pemasangan rambu lalu lintas sangat rendah dibanding target. Realisasi hanya 0 rambu pada tahun 2021–2022, kemudian meningkat sedikit menjadi 230 dan 53 rambu di tahun 2023 dan 2024. Ini menandakan lemahnya pengadaan atau penempatan rambu lalu lintas untuk mendukung keselamatan jalan. Indikator lama pengujian KIR meningkat dari 20 menit menjadi 25 menit pada tahun 2022 dan stagnan hingga 2024. Hal ini menunjukkan adanya penurunan efisiensi dalam proses pelayanan, sedangkan biaya pengujian KIR sempat naik dari Rp53.500 menjadi Rp70.000, namun kembali tidak tercatat pada dua tahun terakhir, yang menandakan inkons dalam pencatatan atau perubahan kebijakan tarif. Indikator lain seperti rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dan rasio kepemilikan KIR angkutan umum mengalami fluktuasi, namun belum mencerminkan perbaikan signifikan terhadap kemacetan ataupun kelayakan kendaraan.

Capaian kinerja bidang perhubungan Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan bahwa masih terdapat banyak tantangan dalam meningkatkan kualitas, keselamatan, dan jangkauan layanan transportasi umum. Menurunnya jumlah penumpang angkutan umum, rendahnya jumlah uji KIR, serta belum optimalnya fasilitas jalan dan keselamatan lalu lintas menjadi indikator utama yang perlu segera ditangani. Diperlukan peningkatan kapasitas pelayanan uji KIR dan pengawasan ketat terhadap kepatuhan kendaraan umum, penambahan rambu dan perlengkapan jalan sesuai standar keselamatan, reaktivasi dan revitalisasi angkutan umum untuk menarik minat masyarakat, perluasan akses konektivitas dan pengembangan moda transportasi baru dan efisiensi pelayanan transportasi melalui digitalisasi dan peningkatan SDM teknis.

j) Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Sarana dan prasarana komunikasi serta informatika saat ini mengalami perkembangan pesat, yang secara fundamental mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk cara berkomunikasi, belajar, bekerja, dan berbisnis. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi memungkinkan berbagai aktivitas dilakukan dengan lebih inovatif, instan, transparan, akurat, tepat waktu, dan efektif. Selain itu, proses pelaksanaan kegiatan serta penyampaian informasi telah bertransformasi dari bentuk fisik dan statis menjadi digital, mobile, virtual, serta lebih bersifat personal, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja.

Teknologi informasi berperan penting dalam pengolahan data, mencakup pemrosesan, pengelolaan, penyusunan, penyimpanan, serta

manipulasi data untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu relevan, akurat, dan tepat waktu. Informasi yang berkualitas ini menjadi elemen strategis dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor. Berikut ini dijelaskan capaian dan target kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2024:

Tabel 2.61
Capaian dan Target Kinerja Indikator Urusan Wajib Komunikasi dan Infromatika pada RPJMD Tahun 2020-2024

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1.	Indeks E-Government /SPBE	Indeks	2.15	1.9	2.15	2.6	2.44	2.61	2.76	2.62	3.12	3.15
2.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	41	0	41	41	59	58.82	88	85	100	85
3.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	55	50	55	55	60	60	62	65	63	67
4.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	76	76	76	76	77	79	78	80	79	84
5.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	36	36	36	36	38	38	40	42	42	57
6.	Jumlah jaringan komunikasi	Jumlah	112	112	112	112	112	191	112	191	112	191
7.	Jumlah penyiaran radio Lokal	Buah	3		3	3	3	3	3	3	3	3
8.	Web site milik pemerintah daerah	Jumlah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Jumlah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
10	Buku "kabupaten dalam angka"	Buku	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Buku "PDRB kabupaten"	Buku	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	15.91	15.91	15.91	15.91	61.36	20	68.18	25	79.55	25

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Pembangunan komunikasi dan informatika di Kabupaten Padang Pariaman memperlihatkan tren positif selama tahun 2020 hingga 2024, terutama dalam hal digitalisasi pelayanan publik, pemanfaatan teknologi informasi, serta pemberdayaan masyarakat dalam diseminasi informasi. Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-Government* mengalami peningkatan yang cukup konsisten. Capaian indeks meningkat dari 2,6 pada tahun 2021 menjadi 3,15 pada tahun 2024, melampaui target yang ditetapkan sebesar 3,12. Hal ini mencerminkan kemajuan dalam integrasi sistem digital pemerintahan, penggunaan layanan elektronik, dan efektivitas pengelolaan informasi publik secara daring.

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan juga menunjukkan pertumbuhan signifikan. Dari 41% di tahun 2021, capaian meningkat menjadi 85% di tahun 2024, meskipun tidak meningkat dari tahun 2023. KIM berperan penting dalam menjembatani informasi antara pemerintah dan masyarakat di tingkat akar rumput, terutama dalam isu-isu pembangunan dan layanan publik. Cakupan layanan telekomunikasi mengalami peningkatan secara bertahap dari 55% pada tahun 2021 menjadi 67% di tahun 2024. Capaian ini menunjukkan keberhasilan dalam perluasan akses jaringan telekomunikasi, khususnya di wilayah-wilayah yang sebelumnya belum terlayani secara optimal.

Sementara itu, proporsi penduduk yang menggunakan HP/telepon naik dari 76% pada 2021 menjadi 84% pada 2024. Peningkatan ini menandakan

meluasnya akses dan penggunaan teknologi komunikasi oleh masyarakat, sejalan dengan tren digitalisasi nasional.

Akses rumah tangga terhadap internet meningkat secara signifikan, dari 36% pada 2021 menjadi 57% pada 2024. Capaian ini sangat penting dalam mendukung program literasi digital, *e-learning,* dan ekonomi ber basis digital di masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Indikator jumlah jaringan komunikasi stabil di angka 112 pada 2021, namun melonjak menjadi 191 pada tahun 2022 dan stagnan hingga 2024. Peningkatan drastis ini menunjukkan adanya intervensi besar pada penyediaan infrastruktur jaringan (seperti BTS atau WiFi publik) selama masa pemulihan pasca pandemi.

Beberapa indikator lainnya seperti jumlah penyiaran radio lokal dan website pemerintah daerah tetap konstan selama empat tahun terakhir, masing-masing berada di angka 3 dan 1. Hal ini menunjukkan keberlangsungan operasional, namun belum terlihat adanya inovasi atau ekspansi baru dalam kanal penyiaran dan diseminasi informasi digital. Keberadaan sistem informasi dan data statistik daerah juga tetap terjaga. Sistem data dan statistik yang terintegrasi tersedia secara berkelanjutan sejak 2021. Publikasi tahunan seperti "Kabupaten Dalam Angka" dan "PDRB Kabupaten" juga terbit secara rutin setiap tahun, menjadi sumber utama dalam penyusunan kebijakan berbasis data.

Indikator persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi resmi menunjukkan capaian yang stagnan. Setelah melonjak dari 15,91% pada tahun 2021 ke 61,36% pada 2022, capaian ini justru menurun dan stagnan di angka 25% selama 2023 dan 2024. Hal ini menunjukkan lemahnya konsistensi dalam penerapan standar keamanan informasi antar perangkat daerah.

Secara umum, capaian kinerja pembangunan daerah di sektor komunikasi, informasi, dan *e-government* Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, khususnya dalam hal peningkatan akses digital dan kapasitas kelembagaan informasi. Untuk memperkuat transformasi digital daerah ke depan, beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Meningkatkan integrasi sistem informasi antar perangkat daerah, khususnya dalam satu data dan interoperabilitas layanan publik.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan KIM di seluruh kecamatan dengan pelatihan rutin dan dukungan infrastruktur.
3. Meningkatkan cakupan perlindungan keamanan informasi, terutama dalam komunikasi antar perangkat daerah dengan penggunaan sandi dan enkripsi.
4. Mendorong diversifikasi kanal informasi publik, seperti menambah jumlah penyiaran radio komunitas, kanal TV daring, serta sistem informasi desa.
5. Melanjutkan ekspansi jaringan telekomunikasi dan internet, khususnya untuk mendukung layanan pendidikan, kesehatan, dan UMKM berbasis digital.

k) Urusan Wajib Koperasi dan UMKM

Koperasi merupakan badan usaha yang terdiri atas individu atau badan hukum koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Selain itu, koperasi juga berfungsi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 25/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Revitalisasi Koperasi, koperasi yang dikategorikan aktif adalah koperasi yang dalam tiga tahun terakhir secara berkelanjutan menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) serta menjalankan kegiatan usaha yang bertujuan untuk melayani anggotanya.

Koperasi berperan sebagai salah satu instrumen dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengurangan tingkat kemiskinan, serta perluasan kesempatan kerja. Dengan meningkatnya jumlah koperasi yang aktif, diharapkan perekonomian berbasis kerakyatan semakin berkembang, angka kemiskinan menurun, dan jumlah pengangguran berkurang. Berikut ini dijelaskan capaian dan target kinerja Urusan Koperasi dan UMKM tahun 2020-2024 pada Tabel 2.62.

Tabel 2.62
Capaian dan Target Indikator Urusan Wajib Koperasi dan UMKM pada RPJMD Tahun 2020-2024

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1.	Persentase koperasi aktif	%	41.5	75,51	41.5	33.33	41.98	35.58	42.8	24.2	43.75	21
2.	Persentase koperasi sehat	%	40	N/A	40	57.33	40	35.58	40	15.5	40	21
3.	Koperasi mampu melaksanakan rat tepat waktu	Koperasi	57	N/A	57	57.33	57	45	57	34	57	47
4.	Persentase koperasi yang melaksakan RAT	%	40	N/A	40	57.33	40	55.55	40	15.5	40	21
5.	Persentase UMKM	%	62	N/A	62	30	64	75.99	65	65.34	67	65.42
6.	Jumlah UMKM	Orang	11,297	38.050	11,297	47802	11,579	21123	11,868	22473	12,165	22527
7.	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%	0.9	N/A	0.9	1.8	0.9	0.9	0.9	7.8	0.9	0.31
8.	Jumlah Koperasi yang melaksanakan unit usaha simpan pinjam yang otonom	Unit	49	50	49	31	51	45	53	31	55	47
9.	Jumlah BPR/LKM	Unit	15	0	15	0	18	0	21	0	24	0
10.	Jumlah BUMNAG	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM, 2025

Capaian kinerja pembangunan daerah dalam bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta lembaga keuangan di Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan dinamika yang beragam. Terdapat sejumlah indikator yang mengalami kemajuan, namun tidak sedikit pula yang menunjukkan penurunan atau stagnasi, sehingga perlu mendapat perhatian khusus dalam penyusunan kebijakan ke depan.

Dalam aspek kelembagaan koperasi, persentase koperasi aktif mengalami penurunan signifikan. Pada tahun 2021, capaian realisasi berada pada angka 33,33%, dan terus menurun hingga 21% pada tahun 2024, jauh dari target yang ditetapkan sebesar 43,75%. Penurunan ini juga tercermin pada capaian koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tepat waktu, yang hanya mencapai 47 koperasi dari target 57 koperasi pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan menurunnya kapasitas dan partisipasi koperasi dalam tata kelola kelembagaan yang sehat dan akuntabel.

Capaian indikator koperasi sehat pun mengalami fluktuasi. Jika pada tahun 2021 realisasi sempat melampaui target sebesar 57,33%, namun capaian tersebut terus menurun menjadi hanya 21% pada tahun 2024. Fenomena ini mencerminkan perlunya peningkatan pembinaan dan

pengawasan secara lebih intensif terhadap koperasi yang ada agar mampu memenuhi kriteria koperasi sehat sesuai standar nasional. alam pengembangan UMKM, terdapat peningkatan jumlah pelaku UMKM yang cukup signifikan. Data menunjukkan bahwa jumlah UMKM mencapai 22.527 unit pada tahun 2024, meningkat dari 47.802 pada tahun 2021. Namun demikian, peningkatan jumlah ini belum sepenuhnya mencerminkan pertumbuhan wirausaha baru yang berkelanjutan. Hal ini terlihat dari rasio pertumbuhan wirausaha baru berskala mikro yang sempat melonjak hingga 7,8% pada 2023, namun kembali menurun tajam menjadi hanya 0,31% pada 2024. Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi pembinaan wirausaha yang lebih konsisten dan terukur.

Persentase UMKM yang tercatat menunjukkan peningkatan dari 30% pada tahun 2021 menjadi 65,42% pada tahun 2024. Meskipun capaian ini patut diapresiasi, perlu dipastikan bahwa peningkatan tersebut disertai dengan peningkatan kapasitas usaha, akses terhadap pembiayaan, dan kemudahan perizinan. Pada aspek lembaga keuangan daerah, capaian indikator jumlah BPR/LKM (Bank Perkreditan Rakyat/Lembaga Keuangan Mikro) masih menunjukkan stagnasi. Meskipun target jumlah BPR/LKM meningkat setiap tahun, realisasi selama empat tahun berturut-turut tetap nihil. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya lebih besar dalam mendorong terbentuknya lembaga keuangan mikro yang sehat dan berdaya saing, khususnya untuk mendukung pembiayaan koperasi dan UMKM di tingkat nagari dan desa.

Indikator jumlah BUMNag (Badan Usaha Milik Nagari) selama empat tahun tidak menunjukkan perkembangan. Tidak adanya realisasi pembentukan BUMNag dari tahun 2021 hingga 2024 mencerminkan belum optimalnya fasilitasi dan dukungan dari pemerintah daerah, baik dalam bentuk kebijakan, pelatihan manajerial, maupun akses permodalan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja bidang koperasi, UMKM, dan lembaga keuangan masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan intervensi strategis dan berkelanjutan. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas koperasi, mendorong pertumbuhan wirausaha baru, serta memperkuat kelembagaan ekonomi lokal seperti BUMNag dan BPR/LKM. Dengan penguatan tata kelola, pemberdayaan sumber daya manusia, dan dukungan kebijakan yang tepat, diharapkan sektor ini dapat menjadi motor penggerak utama pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Padang Pariaman.

l) Urusan Wajib Penanaman Modal

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan investasi yang bersumber dari modal dalam negeri dan berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sementara itu, Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan investasi yang berasal dari pihak asing yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peningkatan jumlah investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penanaman modal memberikan manfaat bagi berbagai pihak, tidak hanya bagi investor, tetapi juga bagi perekonomian di wilayah tujuan investasi serta negara asal investor. Kebijakan pemerintah dalam menarik investasi, khususnya investasi asing, bertujuan untuk meningkatkan ekspor, mengurangi ketergantungan terhadap impor, serta mendorong alih

teknologi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Berikut ini dijelaskan capaian dan target kinerja Urusan Penanaman Modal tahun 2020-2024:

Tabel 2.63
Capaian dan Target Indikator Urusan Wajib Penanaman Modal pada RPJMD Tahun 2020-2024

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	SATUAN	Capaian Kinerja									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Milyar	365.1	1330,3	365.1	997.63	403.3	463.62	445.4	1.205	491.9	3.444
2.	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.	Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Dokumen/ Event	1 Dokumen 4 Event	1 Dokumen 4 Event	1 Dokumen 4 Event	1 Dokumen 0 Event	1 Dokumen 5 Event	1 Dokumen 2 Event	1 Dokumen 5 Event	1 Dokumen 2 Event	1 Dokumen 6 Event	1 Dokumen 1 Event
4.	Indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah	Angka	88	88	88	83.75	89	89.06	90	89.98	91	91.05
5.	Jumlah Objek Perizinan dan non perizinan yang diawasi, dikendalikan dan ditertibkan	Objek	100	100	100	103	110	179	110	118	120	187
6.	Jumlah Aplikasi pelayanan yang dikembangkan	Aplikasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jml Perusahaan	83	117	83	337	91	159	100	35	110	5,694
8.	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi	Rp. (Milyar)	60.5	333	60.5	333	66.55	-0.53	73.21	99.46	80.53	58
9.	Lama Proses Perizinan (Rata-rata lama proses perizinan)	Hari Kerja	7	5	7	5	7	5	7	5	7	5
10.	Jumlah dan Macam Pajak dan retribusi Daerah	Angka	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
11.	Jumlah perda yang mendukung iklim investasi	PERDA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Padang Pariaman, 2025

Pembangunan sektor investasi dan pelayanan perizinan di Kabupaten Padang Pariaman selama periode 2020–2024 menunjukkan tren positif yang cukup signifikan, meskipun terdapat beberapa fluktuasi capaian. Hal ini tercermin dari beberapa indikator utama yang menunjukkan peningkatan substansial, terutama dalam hal realisasi investasi dan perbaikan layanan publik.

Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, realisasi investasi tercatat sebesar Rp997,63 miliar, meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding target sebesar Rp365,1 miliar. Capaian ini terus berlanjut, dan pada tahun 2024 realisasi investasi mencapai Rp3,444 triliun, melebihi target hampir tujuh kali lipat dari target Rp491,9 miliar. Lonjakan ini mengindikasikan iklim investasi di daerah yang semakin kondusif, serta efektivitas promosi dan fasilitasi investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Indikator jumlah investor berskala nasional juga

menunjukkan tren peningkatan yang drastis, terutama pada tahun 2024 dengan capaian sebanyak 5.694 perusahaan, melonjak tajam dibanding tahun 2023 yang hanya mencatat 35 perusahaan. Peningkatan ini patut diapresiasi, meskipun perlu dikaji lebih lanjut apakah lonjakan angka ini mencerminkan investor aktif atau hanya sekadar pencatatan administratif.

Indikator penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD) menunjukkan konsistensi, dengan target dan realisasi dokumen per tahun selalu tercapai. Ini menandakan bahwa aspek perencanaan investasi daerah telah berjalan sesuai ketentuan. Rata-rata lama proses perizinan tetap stabil dan efisien pada angka 5 hari kerja sepanjang periode 2021–2024, lebih cepat dari target 7 hari. Efisiensi ini mendukung peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Hal ini diperkuat oleh peningkatan indeks kepuasan masyarakat dari 83,75 poin pada 2021 menjadi 91,05 poin pada 2024, mencerminkan perbaikan kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh pengguna.

Jumlah objek perizinan dan non-perizinan yang diawasi dan ditertibkan juga mengalami peningkatan. Pada 2021 tercatat 103 objek, meningkat menjadi 187 objek pada 2024, menunjukkan peningkatan pengawasan dan penegakan regulasi yang mendukung terciptanya kepastian hukum dalam berusaha. Indikator jumlah event promosi investasi menunjukkan fluktuasi. Pada 2021 dan 2023 terdapat 5–6 event promosi investasi, namun jumlah ini menurun di 2024 menjadi hanya 1 event. Penurunan ini dapat berdampak terhadap eksposur daerah dalam menarik investasi dan perlu diantisipasi melalui optimalisasi strategi promosi dan kemitraan publik-swasta. Capaian pada jumlah dan macam pajak serta retribusi daerah, serta jumlah Perda yang mendukung iklim investasi, relatif stagnan. Sejak 2021 hingga 2024, hanya terdapat 1 jenis pajak dan retribusi serta 1 Perda pendukung investasi yang dicatat per tahun. Hal ini menandakan perlunya peninjauan kembali terhadap regulasi dan potensi fiskal daerah yang bisa dioptimalkan untuk memperkuat basis penerimaan dan pelayanan investasi.

m) Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga

Pemuda memiliki peran strategis dalam melanjutkan pembangunan daerah dan nasional. Kontribusi kepemudaan dalam pembangunan tercermin melalui berbagai pencapaian di bidang kepemudaan, olahraga, serta peran wirausaha muda dalam meningkatkan perekonomian daerah. Berikut ini dijelaskan capaian dan target kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga tahun 2020-2024:

Tabel 2.64
Capaian dan Target Indikator Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga pada RPJMD Tahun 2020-2024

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	SATUAN	Capaian Kinerja									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1.	Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	360	357	360	367	365	372	370	412	375	415
2.	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	%	37.03	18,51	37.03	18.86	46.29	100	55.55	58	64.81	59
3.	Persentase Wirausaha Muda	%	0.14	8,97	0.14	0.13	0.14	0.49	0.17	0.5	0.2	0.57
4.	Cakupan pembinaan olahraga	Kegiatan	36	36	36	36	36	40	38	40	39	40
5.	Jumlah lapangan olahraga	Jumlah	246	246	246	246	246	250	247	300	248	300

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2025

Capaian kinerja di bidang kepemudaan dan olahraga Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang umumnya positif, khususnya dalam hal peningkatan jumlah atlet berprestasi, pembinaan olahraga, dan pembangunan infrastruktur pendukung. Indikator jumlah atlet berprestasi memperlihatkan tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Dari 367 orang pada tahun 2021, jumlahnya meningkat menjadi 415 orang pada tahun 2024, melampaui target yang ditetapkan setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa program pembinaan atlet yang dilakukan oleh pemerintah daerah cukup efektif dalam mendorong peningkatan prestasi olahraga, baik di tingkat lokal maupun regional.

Capaian pada cakupan pembinaan olahraga juga menunjukkan pelaksanaan kegiatan yang stabil dan meningkat. Target yang ditetapkan pemerintah daerah selalu tercapai, bahkan pada tahun 2022–2024, realisasi kegiatan pembinaan selalu mencapai 40 kegiatan, lebih tinggi dibanding tahun 2021 sebanyak 36 kegiatan. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi dan peningkatan komitmen terhadap pengembangan sektor olahraga.

Dari sisi penyediaan sarana dan prasarana, jumlah lapangan olahraga juga mengalami pertumbuhan. Realisasi pada tahun 2021 sebesar 246 lapangan meningkat menjadi 300 lapangan pada tahun 2023 dan 2024, menunjukkan adanya peningkatan akses masyarakat terhadap fasilitas olahraga. Penambahan ini penting untuk menunjang pembinaan atlet dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas olahraga.

Keempat, indikator persentase organisasi pemuda yang aktif menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Tahun 2021 menunjukkan capaian rendah (18,86%), tetapi meningkat drastis menjadi 100% pada 2022. Namun, pada tahun 2023 dan 2024 terjadi penurunan menjadi 58% dan 59%. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan tingkat partisipasi dan aktivitas organisasi kepemudaan, yang mungkin disebabkan oleh minimnya fasilitas, dinamika internal organisasi, atau kurangnya regenerasi kepemimpinan pemuda.

Capaian pada persentase wirausaha muda menunjukkan peningkatan yang stabil dari 0,13% pada tahun 2021 menjadi 0,57% pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya menciptakan kemandirian dan daya saing pemuda di bidang kewirausahaan. Namun, secara absolut, angka ini masih tergolong rendah dan perlu ditingkatkan lebih lanjut melalui program pelatihan, inkubasi bisnis, serta akses permodalan yang lebih luas bagi generasi muda.

Capaian kinerja bidang kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Padang Pariaman selama periode 2021–2024 menunjukkan arah perkembangan yang positif, terutama dalam pembinaan atlet dan peningkatan infrastruktur olahraga. Namun, masih terdapat tantangan yang harus diatasi, seperti menstabilkan partisipasi organisasi pemuda dan meningkatkan rasio wirausaha muda. Ke depan, dibutuhkan kebijakan yang lebih terintegrasi antara pembinaan olahraga, pemberdayaan organisasi pemuda, dan pengembangan ekonomi kreatif untuk memperkuat kontribusi pemuda dalam pembangunan daerah.

n) Urusan Wajib Statistik

Instrumen analisis yang digunakan dalam evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta sebagai dasar dalam perumusan

kebijakan dan perencanaan pembangunan adalah data dan informasi statistik. Ketersediaan dokumen statistik memungkinkan pemerintah memperoleh gambaran potensi daerah secara umum, yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pembangunan serta menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabel 2.65 menyajikan capaian dan target kinerja Urusan Wajib Statistik tahun 2020-2024.

Tabel 2.65
Capaian Indikator Urusan Wajib Statistik pada RPJMD
Tahun 2020-2024

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Jumlah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Buku ”kabupaten dalam angka”	Buku	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.	Buku ”PDRB kabupaten”	Buku	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Capaian kinerja bidang statistik dan sistem data di Kabupaten Padang Pariaman selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan konsistensi dan keberlanjutan dalam penyediaan data dasar yang dibutuhkan untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Indikator tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi telah secara konsisten dicapai setiap tahun, dari 2021 hingga 2024. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil membangun dan mempertahankan sistem informasi yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Keberadaan sistem data yang terintegrasi menjadi pondasi penting dalam pelaksanaan *e-government* serta mendukung kebijakan berbasis bukti.

Publikasi Buku “Kabupaten dalam Angka” telah terealisasi dengan baik setiap tahunnya sejak 2021. Publikasi ini sangat vital sebagai sumber informasi makro daerah yang mencakup berbagai indikator demografi, ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Konsistensi dalam penerbitannya mencerminkan komitmen terhadap keterbukaan data dan transparansi pembangunan. Publikasi Buku “PDRB Kabupaten” juga menunjukkan capaian penuh setiap tahun. Buku ini memberikan informasi penting terkait struktur dan pertumbuhan ekonomi daerah berdasarkan sektor-sektor usaha. Data PDRB yang mutakhir sangat dibutuhkan dalam mengevaluasi kinerja ekonomi daerah serta sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi.

Capaian kinerja indikator di bidang statistik dan penyediaan data menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan realisasi penuh atas target setiap tahun. Keberhasilan ini menjadi pondasi penting bagi perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data, sekaligus mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Ke depan, tantangan berikutnya adalah meningkatkan kualitas, pemanfaatan, dan interoperabilitas data antar perangkat daerah agar integrasi data tidak hanya tersedia, tetapi juga benar-benar efektif dan digunakan secara luas dalam proses pengambilan keputusan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman.

o) Urusan Wajib Persandian

Pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dalam instansi pemerintah berkembang pesat dalam mendukung terwujudnya *Good Governance* serta transformasi menuju implementasi *e-Government*. Tantangan dalam penerapan *e-Government*, salah satunya adalah potensi kebocoran informasi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penguatan sistem persandian guna memastikan keamanan informasi. Informasi dan dokumen elektronik yang dipertukarkan dalam proses *e-Government* mengandung data yang harus terjamin keamanannya agar tidak mudah dimanipulasi, dirusak, atau disalahgunakan. Berikut capaian dan target kinerja Urusan Wajib Persandian tahun 2020-2024:

Tabel 2.66
Capaian Indikator Urusan Wajib Persandian pada RPJMD
Tahun 2020-2024

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	15.91	N/A	15.91	15.91	61.36	20	68.18	25	79.55	25

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Berdasarkan data capaian tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa capaian indikator ini belum mencapai target secara konsisten, terutama dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, target dan realisasi capaian sama, yaitu sebesar 15,91%, yang menunjukkan awal pelaksanaan yang cukup baik dan sesuai dengan harapan. Namun, pada tahun 2022, terjadi kesenjangan yang signifikan antara target (61,36%) dan realisasi (20%). Tahun 2023 kembali menunjukkan pola serupa, dengan target 68,18% dan realisasi hanya 25%. Kondisi stagnan berlanjut pada tahun 2024, di mana target meningkat menjadi 79,55%, namun realisasi tidak berubah dari tahun sebelumnya yaitu tetap 25%.

Meskipun target terus meningkat mengindikasikan adanya hambatan yang bersifat struktural maupun teknis. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman perangkat daerah terhadap urgensi penggunaan sandi, terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi dalam pengamanan informasi, belum optimalnya regulasi atau kebijakan internal yang mewajibkan penggunaan sandi dan keterbatasan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung sistem persandian.

p) Urusan Wajib Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan bertujuan untuk memperkuat ketahanan budaya dalam menghadapi dampak globalisasi yang dapat mempengaruhi keberlanjutan budaya daerah serta berdampak pada budaya nasional. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam upaya pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya di masyarakat melalui kebijakan yang mendukung pelestarian budaya daerah, termasuk perlindungan cagar budaya. Berikut capaian dan target kinerja Urusan Wajib Kebudayaan tahun 2020-2024:

Tabel 2.67
Capaian dan Target Indikator Urusan Wajib Kebudayaan pada RPJMD Tahun 2020-2024

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1.	Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	35	N/A	35	5	36	5	38	7	38	10
2.	Rasio pengembangan kebudayaan masyarakat pelakunya	%	6	5	6	4	6	4	7	5	7	5
3.	Rasio pengembangan kesenian tradisional masyarakat pelakunya	Rasio	6	5	6	4	6	4	7	5	7	5
4.	Rasio pelestarian dan pengelolaan/penetapan cagar budaya	Rasio	50	45	50	30	50	30	50	40	50	40
5.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jml	3	5	3	1	5	1	5	3	5	2
6.	Benda,Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Jml	25	45	25	3	30	3	35	8	40	9
7.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Jml	4		4	3	4	3	4	3	5	4
8.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Jml	12		12	8	15	0	18	11	21	11
9.	Rasio grup kesenian/ 10.000 penduduk	%	0.61	1,05	0.61	0.59	0.72	0.75	0.83	1	0.94	1.1
10.	Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	2	4	2	1	3	2	3	2	4	2

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025

Pelaksanaan urusan kebudayaan di Kabupaten Padang Pariaman sepanjang tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika capaian yang beragam. Beberapa indikator menunjukkan perkembangan positif, namun sebagian besar lainnya masih menghadapi tantangan baik dari sisi partisipasi masyarakat maupun dari aspek kelembagaan dan infrastruktur pendukung. Indikator persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang terlibat sebagai pelaku atau pendukung pertunjukan seni mencerminkan masih rendahnya partisipasi publik dalam kegiatan seni budaya. Capaian yang hanya meningkat dari 5% pada tahun 2021 menjadi 10% pada tahun 2024 belum mampu mendekati target tahunan sebesar 35–38%. Hal ini menunjukkan bahwa pelestarian seni pertunjukan belum sepenuhnya menjadi bagian dari aktivitas masyarakat, terutama generasi muda.

Rasio pengembangan kebudayaan masyarakat pelakunya dan rasio pengembangan kesenian tradisional menunjukkan capaian yang relatif stagnan. Meskipun target meningkat setiap tahun, realisasi hanya berada pada angka 4 hingga 5 dari target 6 hingga 7. Hal ini menunjukkan terbatasnya inisiatif dan fasilitasi dalam mengembangkan kelompok budaya masyarakat secara menyeluruh.

Upaya pelestarian warisan budaya juga belum optimal. Rasio pelestarian dan pengelolaan cagar budaya mengalami kenaikan dari 30 menjadi 40 pada tahun 2024, namun tetap belum memenuhi target sebesar 50. Capaian jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan hanya mencapai 9 dari target 40 pada tahun 2024. Selain itu, penyelenggaraan festival seni dan budaya belum konsisten, dengan capaian antara 1 hingga 3 kegiatan per tahun dari target yang ditetapkan sebanyak 5 festival.

Capaian jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi mengalami stagnasi pada angka 3 hingga 4 per tahun, dari

target 4 hingga 5. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu pun masih rendah, yakni hanya mencapai 11 unit pada tahun 2024 dari target 21 unit. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan peran lembaga pelestari budaya serta penguatan kolaborasi lintas sektor.

Di sisi lain, indikator rasio grup kesenian per 10.000 penduduk menunjukkan capaian yang cukup menggembirakan. Rasio meningkat dari 0,59 pada tahun 2021 menjadi 1,1 pada tahun 2024, melampaui target yang ditetapkan. Ini menjadi sinyal positif bahwa kelompok kesenian masyarakat mulai tumbuh, meskipun perlu didukung secara berkelanjutan.

Ketersediaan sarana penyelenggaraan seni dan budaya masih terbatas. Realisasi pembangunan atau pemanfaatan sarana hanya mencapai 2 unit dari target 4 unit pada tahun 2024. Kekurangan fasilitas ini berdampak pada terbatasnya ruang ekspresi budaya masyarakat. Secara umum, capaian indikator kinerja urusan kebudayaan menunjukkan adanya upaya perbaikan bertahap, namun belum mencapai hasil yang optimal. Rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan infrastruktur, dan minimnya kegiatan yang bersifat masif dan terencana menjadi tantangan yang harus diatasi dalam perencanaan pembangunan ke depan.

q) Urusan Wajib Perpustakaan

Pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan diarahkan untuk meningkatkan budaya membaca masyarakat (*reading habit society*) menuju masyarakat pembelajar *(learning society*), yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, perpustakaan harus menyediakan koleksi buku yang memadai, mudah diakses, dan terjangkau bagi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengamanatkan standar perpustakaan, yang mencakup jumlah koleksi buku dan jumlah pengunjung sebagai indikator minat baca masyarakat. Berikut capaian dan target kinerja Urusan Wajib Perpustakaan tahun 2020-2024:

Tabel 2.68
Capaian Indikator Urusan Wajib Perpustakaan pada RPJMD Tahun 2020-2024

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	18.8	18,62	18.8	1.84	18.85	4.12	18.88	67.75	18.97	68.19
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan	Indeks	90.2	90,17	90.2	91.93	90.25	97.27	90.3	97.5	90.4	89.1
3.	Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk	Rasio	2.9	2,87	2.9	1.6	2.95	1.72	3	51	3.2	59.91
4.	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	%	0.4	0,30	0.4	10.38	0.45	5.69	0.5	1.15	0.55	2.29
5.	Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk	Rasio	0.15	0,14	0.15	0.58	0.2	0.04	0.2	0.03	0.25	0.87
6.	Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	%	0.35	0,33	0.35	0.34	0.4	1.61	0.4	14.6	0.45	24.46
7.	Persentase Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diakuisisi/dialihmedia (Digitalisasi)/Terdaftar	%	10	0,00	10	0	20	7	30	10	40	10
8.	Persentase Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	%	0.06	10.38	0.06	10.38	65	5.69	0.07	12.86	75	10.25
9.	Persentase Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	%	0.53	0.54	0.53	0.54	0.53	0.56	0.53	49.5	0.54	49.55

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
10.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	1.01	0.27	1.01	0.27	1.03	1.25	1.05	0.13	1.08	0.13
11.	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Jml (Org)	18.413	51.32	18.413	51.32	19.947	77	21.482	57.523	23.016	46.69
12.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Jumlah	6.184	6.784	6.184	6.784	6.234	7.434	6.284	226.41	6.334	294.781
13.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	3	0	3	0	3	0	3	5	4	5

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2025

Capaian kinerja pembangunan literasi masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman dalam periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, meskipun masih terdapat sejumlah indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat mencatat peningkatan realisasi yang sangat mencolok, dari hanya 1,84 pada tahun 2021 menjadi 68,19 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya langkah-langkah strategis dalam upaya peningkatan minat baca dan literasi di tengah masyarakat, meskipun target tahunan secara angka indeks tetap konstan di kisaran 18,8-an, yang mengindikasikan adanya kekeliruan dalam penetapan target atau sistem pengukuran indeks.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepustakaan juga menunjukkan tren yang relatif baik. Indeks ini meningkat dari 91,93 di tahun 2021 menjadi 97,5 pada tahun 2023, meskipun menurun menjadi 89,1 di tahun 2024. Hal ini bisa menjadi sinyal perlunya evaluasi atas layanan di tahun terakhir, agar kualitas layanan tetap konsisten sesuai harapan pengguna. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan terhadap jumlah penduduk menunjukkan peningkatan tajam pada 2023 dan 2024 (mencapai 51 dan 59,91) dibandingkan capaian awal yang hanya 1,6 pada tahun 2021. Namun demikian, tingkat pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat masih rendah, dengan persentase yang berfluktuasi dan jauh dari target, dari hanya 10,38% di tahun 2021 menjadi turun ke 2,29% di 2024. Ini menunjukkan bahwa meskipun koleksi meningkat, pemanfaatan oleh masyarakat belum optimal, sehingga perlu strategi diseminasi dan promosi literasi yang lebih masif.

Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan terhadap jumlah penduduk sempat menurun drastis di tahun 2022–2023, namun meningkat signifikan menjadi 0,87 pada tahun 2024, mendekati target. Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah pustakawan dan tenaga teknis bersertifikat, dari nihil pada awal periode menjadi lima orang pada 2023 dan 2024. Sementara itu, persentase perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan mengalami peningkatan pesat dari 0,34% pada 2021 menjadi 24,46% pada 2024. Capaian ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap kualitas dan standar layanan perpustakaan mulai meningkat secara nyata.

Namun demikian, masih terdapat tantangan, seperti rendahnya digitalisasi naskah kuno dan koleksi budaya etnis, yang hanya mencapai 10% pada 2024 dari target 40%. Begitu pula rasio jumlah perpustakaan per satuan penduduk menunjukkan stagnasi dan bahkan penurunan pada 2023–2024, yang menandakan masih kurangnya pemerataan akses fisik terhadap fasilitas literasi. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan juga tidak stabil dan cenderung menurun di 2024, meski sempat melonjak di

2022 dan 2023, menandakan tantangan dalam mempertahankan keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan.

Jumlah koleksi judul buku menunjukkan lonjakan drastis pada tahun 2023 dan 2024, dari 7.434 menjadi 294.781. Jika data ini valid, maka merupakan pencapaian luar biasa dalam penyediaan bahan bacaan. Namun capaian ini belum berbanding lurus dengan persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat. Secara keseluruhan, meskipun beberapa indikator menunjukkan peningkatan yang signifikan terutama pada aspek koleksi dan indeks literasi, tingkat pemanfaatan dan partisipasi masyarakat dalam layanan perpustakaan masih menjadi tantangan utama. Hal ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Daerah untuk menguatkan program-program literasi berbasis masyarakat dan menjadikan perpustakaan sebagai pusat kegiatan literasi yang inklusif, menarik, dan mudah diakses semua lapisan masyarakat.

r) Urusan Wajib Kearsipan

Pengelolaan arsip merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menyelamatkan dan melestarikan dokumen atau arsip dengan memanfaatkan sarana dan prasarana kearsipan secara optimal. Keberhasilan pengelolaan arsip yang sesuai dengan standar bergantung pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sementara itu, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berperan dalam melakukan pembinaan, pelatihan, serta sosialisasi terkait pengelolaan arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan pengelolaan arsip di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bergantung pada peran instansi pembina kearsipan serta unit kearsipan di masing-masing OPD, yang dalam hal ini dijalankan oleh petugas kearsipan. Pengelolaan arsip di lingkungan OPD Kabupaten Padang Pariaman dalam kurun waktu 2021-2024 telah dilaksanakan sesuai dengan norma dan standar yang berlaku. Berikut capaian dan target kinerja Urusan Wajib Kearsipan tahun 2020-2024:

Tabel 2.69
Capaian Indikator Urusan Wajib Kearsipan pada RPJMD Tahun 2020-2024

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1.	Indeks kearsipan Eksternal	Indeks	73,48	B	73,48	B	60.8	60.1	63.95	67.05	65	BB
2.	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Laporan Audit Kearsipan Internal yang Baik	%	10.88	8,84	10.88	4	13.95	12	16.27	20	18.6	69.23
3.	Persentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan.	%	5	N/A	5	0	10	0	15	0	20	0
4.	Persentase Peningkatan Arsip Statis yang terselamatkan	%	45	40	45	46.37	50	58.52	55	57	60	123.2
5.	Persentase Peningkatan Arsip daerah yang alih mediakan	%	30	20	30	33.22	40	40	45	44	50	0
6.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	4	1	4	1	5	10	6	23	7	25

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2025

Capaian kinerja di bidang kearsipan menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dalam kurun waktu empat tahun terakhir, baik dari aspek kelembagaan, kualitas pengelolaan arsip, maupun sumber daya manusianya. Indeks Kearsipan Eksternal, yang semula berada pada kategori "Baik" dengan skor 73,48 pada tahun 2021, justru mengalami

penurunan dalam dua tahun berikutnya hingga menyentuh angka 60,1 di tahun 2022. Meskipun pada 2023 indeks ini sempat naik menjadi 67,05, namun pada 2024 tercatat kembali menurun ke kategori "BB" (Belum Baik). Penurunan ini mencerminkan adanya tantangan dalam konsistensi penerapan standar pengelolaan kearsipan lintas perangkat daerah, yang perlu segera dibenahi melalui peningkatan pengawasan dan bimbingan teknis.

Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Laporan Audit Kearsipan Internal yang Baik menunjukkan peningkatan progresif, dari hanya 4% pada tahun 2021 menjadi 69,23% di tahun 2024. Kenaikan tajam ini mengindikasikan meningkatnya kesadaran dan komitmen perangkat daerah terhadap tata kelola kearsipan yang akuntabel. Namun, terdapat indikator yang belum menunjukkan kemajuan, yakni penerbitan izin penggunaan arsip tertutup, yang sejak tahun 2021 hingga 2024 selalu berada pada realisasi nol persen. Hal ini menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi publik, terutama untuk kepentingan penelitian atau pelestarian nilai sejarah.

Persentase peningkatan arsip statis yang terselamatkan mengalami capaian melampaui target secara signifikan pada 2024, yakni mencapai 123,2% dari target 60%. Ini menunjukkan keberhasilan dalam kegiatan penyelamatan dokumen penting yang memiliki nilai guna permanen. Namun, kondisi berbeda terjadi pada persentase arsip daerah yang dialihmediakan, yang semula menunjukkan capaian positif hingga tahun 2023 (44% dari target 45%), tetapi justru nihil pada tahun 2024. Hal ini menjadi perhatian penting mengingat digitalisasi arsip menjadi salah satu pilar penguatan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi.

Dari aspek peningkatan sumber daya manusia, jumlah SDM pengelola kearsipan yang ditingkatkan kompetensinya mengalami pertumbuhan cukup pesat, dari hanya 1 orang pada 2021 menjadi 25 orang pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya komitmen nyata dari Pemerintah Daerah dalam membangun kapasitas arsiparis dan tenaga fungsional pengelola kearsipan.

Meskipun terdapat sejumlah capaian positif seperti peningkatan audit internal dan penyelamatan arsip statis, namun masih terdapat kendala serius dalam hal digitalisasi, pemanfaatan arsip tertutup, serta konsistensi skor indeks kearsipan eksternal. Masih diperlukan strategi penguatan kelembagaan kearsipan yang menyeluruh, termasuk percepatan transformasi digital, penguatan regulasi, dan integrasi lintas perangkat daerah guna menjamin pengelolaan arsip yang tertib, akuntabel, dan berdaya guna bagi pembangunan daerah.

3) Urusan Pilihan

a) Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan di Kabupaten Padang Pariaman mencakup perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Budidaya perikanan air tawar dilakukan melalui berbagai metode, seperti budidaya di kolam, sawah, mina kangkung, dan karamba. Jenis ikan yang dominan dibudidayakan adalah ikan nila, karena ketersediaan benih yang mencukupi, harga yang terjangkau, serta kemudahan pemasaran dengan nilai jual yang stabil. Selain ikan nila, jenis ikan lain yang banyak dibudidayakan meliputi ikan karper, gurami, bawal, dan patin. Berikut capaian dan target kinerja Urusan Wajib Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024:

Tabel 2.70
Capaian Indikator Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan pada RPJMD Tahun 2020-2024

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1.	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	%	7.35	7,20	7.35	7.97	7.5	8.07	7.65	7.86	7.8	7.44
2.	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	18,441.90	18.080,30	18,441.90	18,112.50	18,810.73	19,130.50	19,186.93	19,420.50	19,570.66	19420.5
3.	Produksi Perikanan Budidaya	Ton/ Tahun	53,561.83	52.511,60	53,561.83	53,112.74	54,633.06	55,561.82	55,725.72	56,720.30	56,840.23	59274.62
4.	Produksi Benih Ikan	Ekor/ Tahun	480,000,000	687.828.985	480,000,000	694,692,000.00	495,000,000	702,333,612.00	510,000,000	540,216,000.00	525,000,000	539,025,000
5.	Persentase Lubuk Larangan yang Diawasi	%	60	N/A	60	33.33	70	97	80	80	90	100
6.	Cakupan Pembinaan Pokmaswas	%	100	N/A	100	25.48	100	100	100	100	100	100
7.	Konsumsi ikan	Kg/ Kapita / Tahun	43.95	42,04	43.95	43.85	44.45	42.82	44.95	44.23	45.45	
8.	Produksi Ikan Olahan	Ton/ Tahun	179.82	176,30	179.82	178.01	183.41	184.24	187.07	187.37	190.81	190.672
9.	Cakupan bina kelompok nelayan	%	24.59	42.19	24.59	42.19	31.75	90	38.46	62.67	44.78	100
10.	Produksi perikanan kelompok nelayan	ton	12,909.33	13,402.50	12,909.33	13,402.50	13,167.51	15,103.76	13,430.85	15,858.00	13,699.46	17964.4
11.	Cakupan bina kelompok kelautan dan perikanan	%	34.56	30.05	34.56	30.05	41.07	63.59	47.19	58.91	52.94	100
12.	Jumlah unit pengolah ikan	unit	193	193	193	193	194	210	195	217	196	224

Sumber : Dinas Perikanan, 2025

Kinerja sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Padang Pariaman selama periode 2020–2024 menunjukkan capaian yang cukup menggembirakan di beberapa indikator strategis, meskipun masih terdapat beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian. Kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 kontribusinya mencapai 7,97%, kemudian sedikit meningkat menjadi 8,07% pada tahun 2022. Namun, pada 2023 dan 2024 kontribusinya menurun menjadi 7,86% dan 7,44%, meskipun secara nominal produksi sektor perikanan terus mengalami peningkatan.

Produksi perikanan tangkap dan budidaya secara konsisten menunjukkan pertumbuhan positif. Produksi perikanan tangkap meningkat dari 18.112,5 ton pada 2021 menjadi 19.420,5 ton pada 2024. Begitu pula produksi perikanan budidaya naik dari 53.112,74 ton pada 2021 menjadi 59.274,62 ton pada 2024. Sementara itu, produksi benih ikan sempat mengalami peningkatan signifikan pada 2022 sebesar 702 juta ekor, namun mengalami penurunan menjadi 539 juta ekor pada 2024, lebih rendah dari target yang ditetapkan.

Indikator pengawasan dan pembinaan masyarakat nelayan mengalami perkembangan positif. Persentase *Lubuk Larangan* yang diawasi meningkat dari 33,33% pada 2021 menjadi 100% pada 2024. Cakupan pembinaan *Pokmaswas* (Kelompok Masyarakat Pengawas) juga menunjukkan pencapaian maksimal, yaitu 100% sejak tahun 2022. Cakupan bina kelompok nelayan dan kelompok kelautan juga meningkat secara signifikan, masing-masing mencapai 100% pada 2024, menunjukkan efektivitas pembinaan yang semakin meluas. Produksi perikanan dari kelompok nelayan pun meningkat pesat, dari 13.402,5 ton pada 2021 menjadi 17.964,4 ton pada 2024.

Konsumsi ikan per kapita per tahun relatif stabil meski belum mencapai target. Capaian tertinggi berada pada tahun 2023 sebesar 44,23 kg/kapita/tahun. Sedangkan produksi ikan olahan juga terus meningkat dari 178,01 ton pada 2021 menjadi 190,67 ton pada 2024, menandakan tumbuhnya aktivitas hilirisasi perikanan. Jumlah unit pengolahan ikan juga bertambah dari 193 unit pada 2021 menjadi 224 unit pada 2024, menunjukkan penguatan kapasitas pelaku usaha pengolahan hasil perikanan di daerah.

Secara keseluruhan, kinerja sektor kelautan dan perikanan menunjukkan kecenderungan positif dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi masyarakat pesisir. Namun, tantangan masih ada terutama dalam menjaga stabilitas kontribusi terhadap PDRB serta pemenuhan target produksi benih ikan. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan yang lebih terarah dan sinergi antar-stakeholder untuk mempertahankan tren positif dan mengatasi hambatan teknis maupun struktural di sektor ini.

b) Urusan Pilihan Pariwisata

Jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara ke Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020-2024 mengalami Fluktuasi. Berikut capaian dan target kinerja Urusan Pilihan Pariwisata tahun 2020-2024:

Tabel 2.71
Capaian Indikator Urusan Pilihan Pariwisata pada RPJMD Tahun 2020-2024

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1.	Jumlah Destinasi Wisata Sesuai Standar	Objek Wisata	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6
2.	Jumlah Pelaku Pariwisata yang tersertifikasi	Orang	41	41	41	72	45	79	50	16	55	1
3.	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	Orang	36	36	36	36	40	42	45	131	50	225
4.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	250,000	208.872	250,000	152,207	265,000	725,593	275,000	773,844	300,000	505,067

Sumber : Dinas Pariwisata dan Olahraga, 2025

Kinerja sektor pariwisata Kabupaten Padang Pariaman selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, baik dari sisi jumlah destinasi, penguatan pelaku usaha pariwisata, maupun volume kunjungan wisatawan. Secara umum, sektor ini memperlihatkan potensi yang besar, meskipun masih menghadapi tantangan dalam aspek kualitas dan keberlanjutan sumber daya manusia. Dari sisi pengembangan destinasi, jumlah objek wisata yang telah memenuhi standar terus meningkat secara konsisten dari 4 objek pada tahun 2021 menjadi 6 objek pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya upaya perbaikan infrastruktur, amenitas, dan pengelolaan destinasi oleh pemerintah daerah guna mendukung daya tarik wisata.

Pencapaian dalam aspek sertifikasi pelaku pariwisata menunjukkan penurunan drastis. Jumlah pelaku yang tersertifikasi naik dari 72 orang pada 2021 menjadi 79 orang pada 2022, tetapi kemudian mengalami penurunan tajam menjadi hanya 16 orang pada 2023 dan 1 orang pada 2024. Hal ini mengindikasikan lemahnya kesinambungan program pelatihan dan sertifikasi kompetensi, serta rendahnya tingkat keberlanjutan kapasitas SDM pariwisata.

Sektor ekonomi kreatif justru menunjukkan tren positif yang sangat kuat. Jumlah pelaku ekonomi kreatif meningkat secara tajam dari 36 orang pada 2021 menjadi 225 orang pada 2024. Peningkatan signifikan ini menjadi indikasi adanya daya dorong baru dalam sektor ekonomi kreatif sebagai pendukung utama sektor pariwisata. Dari sisi kunjungan wisatawan, terjadi lonjakan sangat besar dari 152.207 orang pada 2021 menjadi puncaknya pada tahun 2023 sebanyak 773.844 kunjungan. Namun, pada tahun 2024, jumlah kunjungan menurun menjadi 505.067 orang. Penurunan ini perlu ditelusuri lebih lanjut, apakah disebabkan oleh faktor eksternal seperti cuaca, kondisi nasional, promosi yang kurang optimal, atau kendala layanan di lapangan.

Secara keseluruhan, kinerja pariwisata Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan tren positif dalam hal jumlah destinasi dan keterlibatan pelaku ekonomi kreatif. Namun, rendahnya jumlah pelaku pariwisata yang tersertifikasi serta fluktuasi kunjungan wisatawan menjadi perhatian utama yang harus diatasi ke depan. Penguatan kelembagaan SDM dan strategi promosi yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk menjaga momentum pertumbuhan sektor ini sebagai salah satu penggerak utama ekonomi daerah.

c) Urusan Pilihan Pertanian

Sektor pertanian menjadi salah satu penyumbang utama PDRB Kabupaten Padang Pariaman dalam periode 2020-2024. Berikut capaian dan target kinerja Urusan Pilihan Pertanian tahun 2020-2024:

Tabel 2.72
Capaian Indikator Urusan Pilihan Pertanian pada RPJMD
Tahun 2020-2024

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1	Kontribusi ekonomi pertanian/perkebunan terhadap PDRB (Rp. Juta)	Rp./Juta	2,731,777.20	2668793,67	2,731,777.20	2,608,426.60	2,796,247.10	2,547,073.71	2,862,238.50	2,745,289.91	2,929,787.40	
2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	15	14.13	15	14.13	15	11.48	15	10.94	15	
3	Produktivitas pangan utama (padi) per hektar	Ton/Ha	4.8	4.56	4.8	4.56	4.92	4.73	5.04	4.86	5.17	4.4
4	Produksi tanaman pangan (padi) per tahun	Ton	287,374.00	252,723.00	287,374.00	252,723.00	291,685.00	217,493.00	296,060.00	221,663.00	300,501.00	184,499.00
5	Cakupan bina kelompok petani	%	25.88	46.77	25.88	46.77	26.52	52.16	27.19	8.29	27.87	23.2

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

Kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Secara nominal, nilai kontribusi ekonomi sektor ini sempat menurun dari Rp2.731.777,20 juta pada tahun 2021 menjadi Rp2.547.073,71 juta pada tahun 2022. Namun, nilai tersebut kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi Rp2.745.289,91 juta dan diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2024. Meskipun demikian, kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB secara persentase justru mengalami penurunan dari 14,13% pada tahun 2021 menjadi 10,94% pada tahun 2023, menunjukkan adanya pergeseran struktur ekonomi daerah ke sektor lain yang tumbuh lebih cepat dibanding pertanian.

Dari sisi produktivitas, kinerja pertanian tanaman pangan khususnya padi mengalami kenaikan bertahap dalam hal produktivitas per hektar dari 4,56 ton/ha pada tahun 2021 menjadi 4,86 ton/ha pada tahun 2023. Namun demikian, capaian tahun 2024 justru menurun drastis menjadi 4,4 ton/ha, yang mengindikasikan adanya tantangan teknis atau eksternal yang berdampak pada hasil panen seperti perubahan iklim, gangguan hama, atau keterbatasan sarana produksi. Hal ini juga tercermin pada penurunan volume produksi tahunan padi yang cukup signifikan, dari 252.723 ton pada tahun 2021 menurun menjadi hanya 184.499 ton pada tahun 2024, meskipun target produksi setiap tahun terus ditingkatkan.

Capaian pembinaan terhadap kelompok tani juga menunjukkan fluktuasi yang tajam. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 52,16%, namun angka tersebut anjlok drastis pada tahun 2023 menjadi

hanya 8,29%, dan naik kembali menjadi 23,2% di tahun 2024. Ketidakstabilan capaian ini menjadi catatan penting dalam efektivitas pembinaan dan pendampingan kelompok tani, yang seharusnya menjadi tulang punggung peningkatan produksi dan produktivitas pertanian daerah. Meskipun sektor pertanian dan perkebunan tetap menjadi salah satu kontributor penting terhadap perekonomian daerah, tantangan dalam hal produktivitas, kesinambungan pembinaan petani, serta konsistensi pencapaian target masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan ke depan. Diperlukan upaya penguatan kelembagaan petani, peningkatan teknologi budidaya, serta pengelolaan risiko produksi yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika iklim dan pasar.

d) Urusan Pilihan Perdagangan

Pada sektor perdagangan Kabupaten Padang Pariaman dapat dinilai dari Kontribusi sektor Perdagangan dan Jumlah Pasar yang Kondusif. Berikut capaian dan target kinerja Urusan Pilihan Perdagangan tahun 2020-2024:

Tabel 2.73
Capaian Indikator Urusan Pilihan Perdagangan pada RPJMD
Tahun 2020-2024

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	%	8.52	8,30	8.52	10.65	8.58	10.44	8.6	10.19	8.64	10.19
2	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	60	N/A	60	45	60	6.51	62	6.5	62	66
3	Jumlah Pasar yang Kondusif	Pasar	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1
4	jumlah pasar yang diawasi	Kecamatan	17	N/A	17	8	17	17	17	0	17	4
5	Jumlah pengusaha ekspor yang tumbuh	Pedagang	1	N/A	1	1	1	5	2	0	2	0
6	Pasar tertib ukur	Pasar	1	N/A	1	0	1	1	1	1	1	1
7	Terwujudnya pasar BANA	Pasar	1	N/A	1	0	1	1	1	0	1	1
8	Ekspor Perdagangan Bersih	Rp.(Juta)	4,879,200.50	3245685.33	4,879,200.50	3245685.33	5,250,300.20	87460.64	5,550,100.30	0	5,870,200.20	0
9	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	67.3	67,25	67.3	67.25	67.4	0	67.7	10	67.80%	10

Sumber : Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM, 2025

Sektor perdagangan menunjukkan kontribusi yang cukup signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Padang Pariaman. Selama periode 2020 hingga 2024, kontribusi sektor

ini terhadap PDRB terus berada di atas target yang ditetapkan. Pada tahun 2021, kontribusi sektor perdagangan mencapai 10,65% dari target 8,52%, dan tren positif ini berlanjut hingga tahun 2024, dengan realisasi tetap stabil di angka 10,19% meskipun target meningkat menjadi 8,64%. Hal ini menunjukkan peran sektor perdagangan yang konsisten dalam mendukung perekonomian daerah.

Indikator pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan belum menunjukkan kinerja yang stabil. Pada tahun 2021, capaian sebesar 45% masih relatif mendekati target sebesar 60%, tetapi pada tahun 2022 dan 2023 realisasi turun drastis ke angka 6,51% dan 6,5% dari target di atas 60%, yang baru menunjukkan peningkatan pada tahun 2024 dengan capaian 66%. Hal ini mencerminkan perlunya peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap perizinan serta penguatan fungsi pelayanan dan pengawasan perizinan daerah.

Jumlah pasar yang kondusif dan pasar tertib ukur relatif stagnan selama empat tahun terakhir. Meskipun target dan realisasi jumlah pasar kondusif hanya satu pasar per tahun, hal ini menandakan masih minimnya penciptaan atau penguatan pasar yang memenuhi kriteria nyaman dan tertib bagi konsumen serta pedagang. Begitu pula untuk pasar tertib ukur yang baru mulai mencapai target sejak tahun 2022.

Pengawasan terhadap pasar mengalami dinamika yang cukup signifikan. Jumlah pasar yang diawasi pada 2021 hanya sebanyak 8 dari target 17 kecamatan, meningkat menjadi capaian penuh pada 2022, tetapi kembali menurun drastis di 2023 dan hanya mencapai 4 kecamatan pada 2024. Fluktuasi ini menunjukkan belum konsistennya upaya pengawasan pasar yang dapat berdampak pada kualitas layanan dan perlindungan konsumen.

Terkait penguatan pasar ekspor, jumlah pengusaha ekspor yang tumbuh masih sangat rendah dan bahkan nihil pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini sejalan dengan realisasi nilai ekspor perdagangan bersih yang merosot tajam, dari Rp 3,245 miliar pada tahun 2021 menjadi hanya Rp 87 juta pada 2022, dan tidak terealisasi sama sekali pada 2023 dan 2024, meskipun target terus meningkat. Situasi ini menandakan perlunya intervensi yang lebih kuat untuk membuka akses pasar ekspor dan pendampingan pelaku usaha menuju pasar internasional.

Program pembinaan kelompok pedagang dan usaha informal juga belum menunjukkan keberlanjutan. Setelah mencapai realisasi yang hampir sama dengan target pada tahun 2021 (67,25%), capaian justru nihil pada 2022, dan hanya mencapai 10% pada 2023 dan 2024. Ketidakkonsistenan dalam pembinaan ini patut menjadi perhatian mengingat kelompok ini merupakan bagian penting dari struktur ekonomi kerakyatan.

Meskipun kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tergolong baik dan stabil, namun tantangan masih cukup besar dalam aspek legalisasi usaha, penguatan pasar ekspor, pengawasan pasar, serta pembinaan pedagang informal. Upaya perbaikan kebijakan, sinergi antar-perangkat daerah, serta dukungan fasilitasi bagi pelaku usaha sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan sektor perdagangan daerah.

e) Urusan Pilihan Perindustrian

Capaian kinerja pembangunan urusan perindustrian dapat tergambarkan dari capaian beberapa indikator, seperti kontribusi sektor industri terhadap PDRB, dan pertumbuhan industri. Berikut capaian dan target kinerja Urusan Pilihan Perindustrian tahun 2020-2024:

Tabel 2.74
Capaian Indikator Urusan Pilihan Perindustrian pada RPJMD
Tahun 2020-2024

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1.	Kontribusi Ekonomi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	11.8	11,19	11.8	11.95	12.6	10.46	13.3	10.48	14.2	10.31
2.	Pengembangan Sentra Sentra Industri Potensial	Sentra	1	1	1	0.7	1	1	1	1	1	1
3.	Peningkatan jumlah Industri kecil dan Menengah yang bersertifikasi	Sertifikasi	sertifikasi	sertifikasi	sertifikasi	82 sertifikasi	sertifikasi	95 sertifikasi	sertifikasi	89 sertifikasi	sertifikasi	92 sertifikasi
4.	Tersedianya data dan Informasi tentang Industri kecil dan Menengah	Dokumen Ranperda	1	1	1	0.7	1	1	1	1	1	1
5.	Cakupan bina kelompok pengrajin	Jumlah	155	155	155	155	160	215	165	215	170	173
6.	Pertumbuhan Industri	%	2.4	1.92	2.4	1.92	2.42	18.72	2.45	3.67	2.47	4.22

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian , 2025

Kinerja sektor industri pengolahan di Kabupaten Padang Pariaman selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, terutama dalam kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Meskipun target kontribusi terhadap PDRB terus mengalami peningkatan, dari 11,8% pada tahun 2021 menjadi 14,2% pada 2024, realisasi justru menunjukkan tren penurunan, dari 11,95% pada tahun 2021 menjadi 10,31% di tahun 2024. Penurunan capaian ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan sektor industri pengolahan belum sejalan dengan ekspektasi penguatan struktur ekonomi daerah.

Dalam hal pengembangan sentra-sentra industri potensial, kinerja pemerintah daerah cukup konsisten. Meskipun pada tahun 2021 realisasi hanya 0,7 dari target 1 sentra, namun sejak tahun 2022 hingga 2024 realisasi berhasil mencapai 100% sesuai target. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas kelembagaan dan dukungan terhadap penguatan basis industri lokal. Dari sisi peningkatan sertifikasi industri kecil dan menengah (IKM), capaian selama empat tahun terakhir tergolong baik. Jumlah IKM yang memperoleh sertifikasi mengalami fluktuasi namun tetap berada pada angka tinggi, yakni 82 sertifikasi pada 2021, meningkat menjadi 95 pada 2022, lalu sedikit menurun menjadi 89 dan 92 pada 2023 dan 2024. Hal

ini mencerminkan komitmen berkelanjutan dalam peningkatan standar mutu produk IKM, meskipun masih diperlukan upaya untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan jumlah sertifikasi ke depan.

Ketersediaan data dan informasi terkait IKM, yang merupakan fondasi pengambilan kebijakan, juga telah menunjukkan capaian maksimal. Target penyediaan dokumen Ranperda tercapai sejak 2022 hingga 2024, setelah sebelumnya belum sepenuhnya terpenuhi pada 2021. Capaian ini penting untuk menjamin pengambilan keputusan yang berbasis data dalam pengembangan sektor industri kecil dan menengah.

Untuk indikator cakupan pembinaan kelompok pengrajin, capaian menunjukkan tren positif pada tahun 2022 dan 2023, dengan realisasi sebesar 215 kelompok dari target masing-masing 160 dan 165. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan capaian menjadi 173 dari target 170, meskipun masih melampaui target. Fluktuasi ini menunjukkan dinamika yang dapat dikendalikan, namun tetap perlu perhatian dalam menjaga kesinambungan program pembinaan pengrajin lokal. Pertumbuhan sektor industri menunjukkan tren peningkatan yang menggembirakan. Meskipun capaian pada tahun 2021 masih rendah (1,92% dari target 2,4%), lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2022 sebesar 18,72%, jauh melampaui target 2,42%. Walau pertumbuhan menurun menjadi 3,67% dan 4,22% pada tahun 2023 dan 2024, capaian tersebut tetap berada di atas target tahunan yang ditetapkan, menunjukkan pemulihan dan potensi sektor industri untuk terus berkembang.

Sektor industri pengolahan Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan beberapa capaian strategis, terutama dalam pengembangan sentra industri, pertumbuhan sektor industri, dan pembinaan IKM. Namun, penurunan kontribusi sektor terhadap PDRB menjadi catatan penting yang harus mendapat perhatian serius melalui intervensi kebijakan dan program yang lebih agresif dan terukur untuk mendorong penguatan nilai tambah dan daya saing industri lokal di masa mendatang.

4) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

a) Sekretariat Daerah

Sekretariat daerah merupakan pusat administrasi pemerintahan daerah yang berperan penting dalam memastikan jalannya roda pemerintahan secara efektif, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Sekretariat Daerah bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah serta pelaksanaan tugas perangkat daerah. Keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Setda merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan daerah. Berikut capaian kinerja Urusan Sekretariat Daerah:

Tabel 2.75
Capaian Indikator Urusan Pendukung Pemerintahan Sekretariat Daerah pada RPJMD
Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2020		2021		2022		2023		2024		
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	
Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizah	%	26	38	26	38	27	27.02	28	43.54	29	72	Setda
PDRB/Income Per Kapita ADHB	Rp Juta	44.63	42.31	44.63	42.31	46.98	50.02	49.46	55.54	52.71	55.54	Setda
Indeks Pelayanan Publik	Indeks	A	4,69	A	4,69	A	4,65	A	3,88	A	4,29	Setda
Nilai SAKIP Pemerintah Dearah Hasil Evaluasi Kemenpan RB	Nilai	B	B	B	68,50 (B)	B	68,86 (B)	BB	69,19 (B)	BB	71,05 (BB)	Setda
Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai LPPD)	Nilai	2,600 (tinggi)	2,600 (tinggi)	2,600 (tinggi)	2,52 (rendah)	2,700 (tinggi)	3,2904 (sedang)	2,800 (tinggi)	Menunggu proses penilaian Mendagri	2,900 (tinggi)		Setda
Jumlah Hafiz dan Hafizah yang bersertifikat Gebu Pafa	Orang	1100	281	1100	281	1200	406	1300	445	1400	528	Setda
Indeks reformasi birokrasi	Indeks	60	54	60	59,31 (CC)	63	61,37 (B)	63	65,04 (B)	64		Setda
Persentase pelayanan dasar yang memenuhi standar	%	75.33	80.58	75.33	80.58	75.83	85.89	76.33	84.66	76.83	97.39	Setda
Persentase penggunaan E-Procurement terhadap belanja pengadaan	%	10	10	10	10	11	11	12	12	13	13	Setda
Persentase terfasilitasinya kebijakan kesejahteraan rakyat bidang bina mental, kesejahteraan sosial dan	%	100	N/A	100	100	100	100	100	100	100	100	Setda

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2020		2021		2022		2023		2024		
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	
kesejahteraan masyarakat												
Persentase BUMD yang sehat di Padang Pariaman	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-150.79	Setda
Persentase efisiensi belanja barang dan jasa melalui E-Procurement terhadap APBD	%	10	10	10	10	11	11	12	12	13	13	Setda
Persentase proses pengadaan selesai tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Setda
Persentase Rancangan produk hukum daerah yang menjadi produk hukum daerah	%	70	70	70	100	75	99.3	75	90.5	75	98.7	Setda
Persentase Laporan Realisasi kegiatan Perangkat Daerah yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Setda
Persentasen peliputan dan dokumentasi kegiatan pimpinan daerah	%	80	80	80	95	85	97	90	95	95	99	Setda
Persentase kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi pelayanan kehumasan dan keprotokolan	%	80	80	80	95	85	97	90	95	95	99	Setda
Persentase acara daerah yang sesuai standar keprotokolan	%	80	80	80	95	85	97	90	95	95	99	Setda
Persentase kerjasama informasi dengan mass media	%	80	80	80	95	85	97	90	95	95	99	Setda

Sumber: Sekretariat Daerah Padang Pariaman, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa, pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman akan terus berupaya meningkatkan capaian pada indikator kinerja sekretariat daerah, terutama pada indikator persentase lembaga pendidikan Al-Quran yang menghasilkan Hafizh/Hafizah. Secara keseluruhan capaian kinerja sekretariat daerah sangat baik, hal ini ditunjukkan oleh tren peningkatan realisasi target setiap tahunnya yang konsisten, serta capaian yang mendekati atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut mencerminkan efektivitas program dan kegiatan yang dilaksanakan, mulai dari pembinaan lembaga pendidikan Al-Qur'an, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, hingga penyediaan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran.

Upaya ini diharapkan dapat terus berlanjut agar kualitas sumber daya manusia di bidang keagamaan semakin meningkat, sekaligus memperkuat identitas religius masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

b) Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsur pendukung urusan pemerintahan daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD sebagai lembaga legislatif daerah. Keberadaan Sekretariat DPRD menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan daerah yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

Fungsi utama Sekretariat DPRD adalah memberikan pelayanan administratif, teknis, dan operasional kepada seluruh anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan. Lingkup tugasnya meliputi penyusunan rencana kerja DPRD, fasilitasi kegiatan rapat dan kunjungan kerja, pengelolaan administrasi keuangan DPRD, hingga penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan politik di daerah. Berikut capaian dan target kinerja Urusan Sekretariat DPRD tahun 2020-2024:

Tabel 2.76
Capaian Indikator Urusan Pendukung Pemerintahan Sekretariat DPRD pada RPJMD Tahun 2020-2024

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1.	Jumlah produk Peraturan Daerah yang dihasilkan	Perda	8	11	8	6	8	5	8	6	8	1
2.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
3.	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksankan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda , dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
4.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
5.	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	75
6	Persetujuan DPRD terhadap Ranperda APBD dan APBD Perubahan yang dilakukan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7.	Cakupan aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD	%	70	100	70	100	72	100	75	100	77	100
8..	Cakupan kebutuhan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	%	80	93.38	80	93.38	81	95.86	82	95.05	83	90

Sumber : Sekretariat DPRD , 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, capaian kinerja penyelenggaraan fungsi DPRD Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan konsistensi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan, meskipun terdapat penurunan signifikan pada beberapa indikator tertentu. Produksi legislasi daerah yang diukur dari jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang dihasilkan mengalami fluktuasi dan penurunan yang cukup tajam pada tahun 2024. Jika pada tahun 2021 hingga 2023 jumlah Perda yang disahkan berkisar antara lima hingga enam dari target delapan, maka pada tahun 2024 hanya satu Perda yang berhasil ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan dalam proses legislasi yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut untuk mendorong produktivitas DPRD dalam menghasilkan regulasi.

Indikator tersedianya Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada setiap alat kelengkapan DPRD menunjukkan capaian yang stabil dengan realisasi yang selalu tersedia setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa aspek perencanaan kelembagaan telah berjalan baik dan mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD secara sistematis dan terencana. Begitu pula dengan tersusunnya dan terintegrasinya program kerja DPRD dalam dokumen perencanaan daerah, baik lima tahunan maupun tahunan, juga menunjukkan kinerja yang konsisten dan telah tersedia secara lengkap selama empat tahun berturut-turut.

Capaian indikator keputusan DPRD yang ditindaklanjuti mengalami penurunan di tahun 2024. Jika pada tiga tahun pertama capaian berada di angka 100%, maka pada 2024 turun menjadi 75%. Hal ini menjadi catatan penting bahwa efektivitas hasil keputusan DPRD dalam mendorong perubahan kebijakan atau pengawasan perlu diperkuat, baik melalui tindak lanjut eksekutif maupun dari sisi fungsi pengawasan internal DPRD sendiri. Dalam hal pengesahan Ranperda APBD dan APBD Perubahan, kinerja DPRD sangat baik dengan capaian 100% tepat waktu selama empat tahun berturut-turut. Capaian ini menunjukkan sinergi yang baik antara legislatif dan eksekutif dalam menjaga ritme perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah.

Cakupan aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti oleh DPRD, tren capaian berada pada angka maksimal 100% sejak tahun 2021

hingga 2024. Walaupun targetnya meningkat secara bertahap dari 70% menjadi 77%, realisasi menunjukkan DPRD mampu menyerap dan menindaklanjuti seluruh aspirasi masyarakat yang masuk. Ini menunjukkan kinerja representatif DPRD dalam menyalurkan kehendak rakyat secara efektif.

Cakupan kebutuhan pendukung pelaksanaan tugas DPRD yang difasilitasi juga menunjukkan capaian yang cukup baik. Meskipun tidak sepenuhnya mencapai target, capaian tetap berada di atas 90% selama periode tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung fungsi kelembagaan DPRD cukup memadai namun masih memerlukan penguatan terutama dalam aspek kualitas dan keberlanjutan layanan penunjang.

Secara umum, fungsi kelembagaan DPRD Kabupaten Padang Pariaman dalam empat tahun terakhir telah menunjukkan kinerja yang cukup solid dalam aspek perencanaan, penganggaran, dan pengawasan, meskipun masih diperlukan penguatan di bidang legislasi serta peningkatan efektivitas tindak lanjut atas keputusan-keputusan strategis DPRD.

5) Fungsi Penunjang urusan Pemerintahan

a) Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam era desentralisasi fiskal, setiap daerah memiliki kewenangan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran pembangunan secara mandiri, mengingat keduanya saling berkaitan dan harus berjalan secara terpadu, selaras, serta konsisten. Integrasi antara perencanaan dan penganggaran menjadi kunci bagi Pemerintah Daerah dalam merealisasikan komitmen yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan. Selain itu, keterpaduan perencanaan dan penganggaran juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi kinerja pemerintahan dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Dokumen perencanaan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Beberapa dokumen perencanaan daerah yang menjadi acuan dalam proses pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Berikut capaian dan target kinerja Urusan Perencanaan tahun 2020-2024:

Tabel 2.77
Capaian Indikator Urusan Perencanaan pada RPJMD
Tahun 2020-2024

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1.	Indeks kualitas perencanaan	%	100	N/A	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan	%	90	N/A	90	97.96	92	100	93	100	94	100
3.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	%	75	93,00	75	100	80	100	85	100	90	100
7.	Persentase Peningkatan kualitas musrenbang	%	75	93,00	75	85	80	85	85	90	90	90
8.	Kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	%	75	93,00	75	100	80	100	85	100	90	100

Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah , 2025

Kinerja perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan pencapaian yang sangat baik dan konsisten dalam berbagai aspek strategis penyusunan dokumen perencanaan daerah. Hal ini terlihat dari capaian Indeks Kualitas Perencanaan yang berhasil mempertahankan nilai maksimal sebesar 100% selama empat tahun berturut-turut, menandakan bahwa dokumen perencanaan daerah telah disusun secara sistematis, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator sinergitas, konsistensi, dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan juga menunjukkan tren peningkatan dan capaian yang optimal. Dimulai dari capaian 97,96% pada tahun 2021, indikator ini kemudian mencapai nilai sempurna (100%) sejak tahun 2022 hingga 2024, melebihi target tahunan yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan bahwa seluruh dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD telah disusun secara harmonis dan saling mendukung satu sama lain, memastikan keterpaduan perencanaan dalam jangka panjang dan menengah.

Dari sisi ketersediaan dokumen perencanaan, semua indikator menunjukkan kinerja yang optimal. Dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD secara konsisten telah tersedia dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah (PERDA) atau Peraturan Kepala Daerah (PERKADA), memastikan legalitas dan legitimasi proses perencanaan pembangunan daerah setiap tahunnya. Penjabaran program-program prioritas dalam RPJMD ke dalam RKPD tahunan juga menunjukkan kinerja sangat baik. Target tahunan yang ditetapkan secara bertahap dari 75% pada 2021 hingga 90% pada 2024, seluruhnya berhasil direalisasikan dengan capaian sempurna 100% setiap tahun. Ini mencerminkan kemampuan perangkat daerah dalam menerjemahkan visi-misi kepala daerah ke dalam kebijakan tahunan yang operasional.

Pada aspek partisipatif, indikator peningkatan kualitas musrenbang juga mengalami peningkatan signifikan. Dimulai dengan capaian 85% pada tahun 2021, kualitas pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) terus meningkat dan mencapai 90% pada tahun 2023 dan 2024, sesuai target. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam proses penjaringan aspirasi masyarakat serta meningkatnya kualitas substansi usulan yang masuk ke dalam dokumen RKPD. Indikator terakhir, yaitu kesesuaian program RKPD dengan RPJMD, juga menunjukkan capaian optimal sebesar 100% selama empat tahun terakhir. Ini menandakan bahwa seluruh program kegiatan tahunan yang direncanakan benar-benar sejalan dengan arah kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
Secara keseluruhan, kinerja perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam kurun waktu 2021–2024 dapat dikategorikan sangat baik, ditandai dengan konsistensi pencapaian indikator strategis di atas target yang ditetapkan. Keberhasilan ini menjadi fondasi yang kokoh untuk pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih terarah, terukur, dan akuntabel di masa mendatang.

b) Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dilaksanakan berdasarkan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam mengelola pendapatan serta pengeluaran daerah. Pengelolaan belanja daerah mencakup belanja tidak langsung dan belanja langsung yang bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan daerah.

Pendapatan daerah bersumber dari beberapa komponen utama, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri atas:
   a) Pajak daerah
   b) Retribusi daerah
   c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
   d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Dana Perimbangan**,** yang mencakup:
   a) Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak
   b) Dana alokasi umum
   c) Dana alokasi khusus
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yaitu penerimaan yang tidak termasuk dalam kategori PAD maupun dana perimbangan, namun tetap menjadi bagian dari sumber pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opini BPK terhadap laporan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 termasuk predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berikut capaian dan target kinerja Urusan Keuangan tahun 2020-2024:

Tabel 2.78
Capaian Indikator Urusan Keuangan pada RPJMD
Tahun 2020-2024

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Persentase Peningkatan PAD	%	3	10.4	3	10.4	3.5	7.99	4	18.47	4.5	3.54
3.	Persentase Tingkat ketergantungan Daerah Terhadap Dana Transfer Pusat	%	81.81	90,21	81.81	81.83	82.22	82.75	82.31	84.78	82.3	84.07
4.	Perencanaan Anggaran Tepat Waktu	Tanggal	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2024	30/11/2024
5.	Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6.	Persentase kualitas laporan keuangan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7.	Persentase BMD yang tercatat dengan akurat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.	Persentase BMD yang termanfaatkan dengan tepat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9.	Persentase Pencapaian Target PAD	%	100	100	100	95.18	100	100.2	100	96.86	100	90.88
10.	Jumlah Perda tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 tahun.	dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
11.	Jumlah Perbub tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 tahun	dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
12.	Rasio belanja modal terhadap APBD	Rasio	20.5	10.34	20.5	10.34	22	10.27	25	13.39	28.1	10.43
13.	Persentase kenaikan pajak dan retribusi daerah	%	5	5.71	5	5.71	5.5	13.05	6	24.68	6.5	99.19
14.	Rasio PAD terhadap penerimaan APBD	Rasio	6.33	8.57	6.33	8.57	6.94	9.36	7.19	10.73	8.45	10.38
15.	Rasio PAD terhadap pengeluaran APBD	Rasio	6.48	8.81	6.48	8.81	6.98	9.6	7.25	10.64	8.64	10.23

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah , 2025

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan kinerja yang relatif stabil dan positif dalam beberapa aspek utama, terutama dalam menjaga akuntabilitas dan ketepatan waktu pelaksanaan anggaran. Salah satu indikator kinerja utama, yaitu opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan daerah, secara konsisten memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama empat tahun berturut-turut. Capaian ini mencerminkan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip standar akuntansi pemerintah.

Perencanaan anggaran juga menunjukkan komitmen yang tinggi, dimana seluruh dokumen anggaran tahunan ditetapkan tepat waktu setiap tanggal 30 November pada masing-masing tahun. Hal ini sejalan dengan capaian 100% pada indikator pengelolaan kas daerah yang akurat, kualitas laporan keuangan, serta pencatatan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang selalu mencapai target maksimal setiap tahun.

Masih ada tantangan pada aspek kemandirian fiskal daerah, khususnya pada tingkat ketergantungan terhadap dana transfer pusat yang menunjukkan tren peningkatan dari 81,83% pada tahun 2021 menjadi 84,07% pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa porsi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah masih relatif kecil dan belum mampu menopang sepenuhnya kebutuhan belanja daerah.

Terdapat capaian positif dalam peningkatan PAD, di mana terjadi pertumbuhan signifikan terutama pada tahun 2023 sebesar 18,47%, walaupun kembali melambat menjadi 3,54% pada 2024. Pencapaian target PAD juga tergolong cukup baik, dengan realisasi di atas 90% setiap tahun, bahkan sempat melampaui target di tahun 2022 (100,2%). Indikator lain yang juga memperlihatkan perbaikan adalah persentase kenaikan pajak dan retribusi daerah yang meningkat tajam dari 5,71% pada 2021 menjadi 99,19% pada 2024. Ini merupakan sinyal positif atas intensifikasi pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi, walaupun perlu ditelusuri lebih lanjut terkait faktor penyebab kenaikan signifikan ini. Seiring dengan itu, rasio PAD terhadap penerimaan dan pengeluaran APBD juga mengalami peningkatan konsisten dari masing-masing 8,57% dan 8,81% di tahun 2021 menjadi 10,38% dan 10,23% di tahun 2024.

Rasio belanja modal terhadap APBD masih jauh di bawah target yang direncanakan. Meskipun target belanja modal meningkat dari 20,5% pada 2021 menjadi 28,1% pada 2024, realisasi belanja modal tetap berada pada kisaran 10% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa porsi belanja yang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dan aset jangka panjang masih rendah, dan dapat menjadi fokus perbaikan dalam perencanaan anggaran ke depan.

c) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Urusan kepegawaian merupakan salah satu urusan pemerintahan yang bersifat mendasar dan strategis dalam mendukung pelaksanaan seluruh fungsi pemerintahan daerah. Pengelolaan kepegawaian yang baik menjadi kunci terciptanya aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, kompeten, dan berintegritas dalam menjalankan

tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Melalui urusan kepegawaian, pemerintah daerah berupaya untuk mewujudkan tata kelola sumber daya manusia aparatur yang efektif dan efisien, sejalan dengan prinsip-prinsip reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima. Kinerja urusan ini sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program pembangunan daerah secara menyeluruh, karena ASN merupakan pelaksana utama kebijakan pemerintah. Capaian Kinerja Indikator Urusan Kepegawaian pada RPJMD Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.79
Capaian Indikator Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan pada RPJMD Tahun 2020-2024

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1.	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	78	76	78	46.18	80	56.93	82	75.81	84	75.81
2.	Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti diklat/bimtek	%	93	93	93	83	93	100	93	93.28	93	93
3.	Persentase peningkatan terfasilitasinya pindah/purna tugas PNS	%	92	92	92	82	92	95	92	91.5	92	92
4.	Persentase peningkatan dokumen ASN yang terarsipkan	%	75	75	75	80	75	80	75	75	75	75
5.	Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan ASN (Kepegawaian)	%	73	73	73	69	73	80	73	73	73	73
6.	Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan ASN (Diklat)	%	90	90	90	80	90	90	90	90	90	90
7.	Persentase pegawai yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi manajerial	%	81	45.15	81	45.15	81	83.5	81	81	81	81
8.	Persentase pegawai yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis	%	20	49	20	49	25	100	30	100	35	100
9.	Tingkat pendidikan aparat D3, D4, S1, S2, S3	%	40	77.65	40	77.65	41	100	42	90.23	43	92
10.	Tingkat penyelesaian pelanggaran disiplin pegawai	%	80	90	80	90	80	85	85	62.5	85	85
11.	Persentase tingkat kehadiran ASN	%	80	90	80	90	80	85	85	85	85	85
12.	Persentase prestasi ASN berdasarkan masa kerja PNS	%	47	90	47	90	50	90	53	90	56	90
13.	Persentase penerbitan SK tepat waktu	%	67	77	67	77	69	75	71	77.02	73	78
14.	Persentase pengisian jabatan sesuai formasi dan kompetensi	%	96	94.12	96	94.12	97	100	97	99.82	97	98
15.	Persentase record data kepegawaian yang akurat	%	30	80	30	80	60	100	100	99.02	100	100
16.	Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	%	63	85	63	85	70	85	75	80.02	75	85.3

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia , 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, kinerja pembangunan daerah pada aspek kepegawaian secara umum menunjukkan perkembangan positif, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Indeks Profesionalitas ASN mengalami peningkatan signifikan dari 46,18 pada tahun 2021 menjadi 75,81 pada tahun 2024. Capaian ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kapasitas dan profesionalitas ASN mulai menunjukkan hasil. Di sisi lain, partisipasi ASN dalam pendidikan dan pelatihan (diklat/bimtek) mencapai angka yang memuaskan, dengan realisasi yang secara konsisten mendekati atau bahkan melampaui target. Misalnya, pada tahun 2022 realisasi mencapai 100%, melebihi target sebesar 93%, dan tetap tinggi pada tahun-tahun berikutnya.

Fasilitasi pindah dan purna tugas ASN juga menunjukkan pencapaian yang stabil dan mendekati target. Sementara itu, pengelolaan arsip kepegawaian belum menunjukkan peningkatan yang berarti, dengan capaian stagnan di angka 75% sejak tahun 2022, meskipun target tetap tidak berubah. Pembinaan dan pengembangan ASN baik dari sisi kepegawaian maupun diklat menunjukkan hasil yang cukup baik. Khusus untuk aspek diklat, capaian tetap konsisten di angka 90% selama empat tahun berturut-turut, sesuai dengan target yang ditetapkan. Dalam hal peningkatan kompetensi ASN, baik manajerial maupun teknis, terdapat kemajuan signifikan, terutama pada diklat teknis yang berhasil mencapai realisasi 100% sejak tahun 2022.

Peningkatan tingkat pendidikan aparatur juga menunjukkan kinerja yang menggembirakan, dengan realisasi yang selalu melebihi target. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan realisasi mencapai 100%. Namun, terdapat penurunan sementara pada indikator penyelesaian pelanggaran disiplin pegawai pada tahun 2023, yang hanya mencapai 62,5%, namun berhasil kembali meningkat ke angka 85% pada tahun 2024. Tingkat kehadiran ASN relatif stabil dan tetap tinggi, berada pada kisaran 85% hingga 90% setiap tahunnya, menunjukkan disiplin kerja yang terjaga dengan baik.

Prestasi ASN berdasarkan masa kerja menunjukkan capaian yang konsisten dan jauh di atas target, dengan realisasi sebesar 90% setiap tahun. Penerbitan SK tepat waktu juga menunjukkan tren perbaikan secara bertahap, meskipun masih berada sedikit di bawah target. Capaian pengisian jabatan sesuai formasi dan kompetensi terbilang sangat baik, dengan realisasi yang hampir selalu menyamai atau melebihi target, mencapai angka 100% pada tahun 2022. Akurasi record data kepegawaian meningkat signifikan dari 80% pada tahun 2021 menjadi 100% pada tahun 2024, menunjukkan keberhasilan pembenahan sistem administrasi kepegawaian.

Indeks kepuasan terhadap pelayanan administrasi kepegawaian menunjukkan tren stabil di atas target, dengan capaian tertinggi sebesar 85,3% pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan bahwa pelayanan administrasi internal telah dilaksanakan dengan baik dan diterima positif oleh ASN. Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja pada bidang kepegawaian menunjukkan arah perkembangan yang positif dan selaras dengan upaya reformasi birokrasi, meskipun beberapa aspek

masih perlu penguatan untuk mencapai standar kualitas tata kelola ASN yang optimal.

d) Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan memiliki peranan yang penting untuk mendukung pembangunan suatu daerah. Capaian Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan pada RPJMD Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.80
Capaian Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan pada RPJMD Tahun 2020-2024

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1.	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan	%	65	60	65	60	70	100	75	100	80	100
2.	Jumlah Kerjasama Penelitian	jml	1	2	1	2	4	1	6	4	8	6
3.	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	35	100	35	100	40	100	41	100	42	100
4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	25	98.5	25	98.5	35	100	40	100	45	100

Sumber : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2024

Capaian kinerja pembangunan daerah dalam bidang kelitbangan dan inovasi menunjukkan tren yang sangat positif selama periode 2020–2024. Indikator Persentase Hasil Kajian Kelitbangan yang Dimanfaatkan untuk Perumusan Kebijakan mengalami peningkatan yang signifikan dari realisasi 60% pada tahun 2021 menjadi 100% pada tahun 2022 dan terus konsisten di angka 100% hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa hasil kajian penelitian dan pengembangan benar-benar dioptimalkan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan daerah, mencerminkan sinergi yang kuat antara fungsi penelitian dengan kebutuhan perencanaan pembangunan.

Jumlah Kerja Sama Penelitian menunjukkan fluktuasi capaian dari tahun ke tahun. Meskipun target terus meningkat dari satu pada tahun 2021 hingga delapan pada tahun 2024, realisasi hanya tercapai dua pada tahun 2021, turun menjadi satu pada 2022, lalu meningkat lagi menjadi empat pada 2023, dan enam pada 2024. Walaupun belum sepenuhnya memenuhi target, tren kenaikan pada dua tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan kolaborasi dan kemitraan riset, yang menjadi indikasi positif terhadap penguatan basis ilmiah pembangunan daerah.

Sementara itu, indikator Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah menunjukkan capaian luar biasa dengan realisasi 100% secara konsisten sejak tahun 2021, meskipun target terus meningkat setiap tahun. Capaian ini mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Daerah dalam mendukung penyebarluasan inovasi lintas perangkat daerah serta memberikan pendampingan terhadap proses penerapannya. Begitu juga dengan indikator Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah, yang

menunjukkan performa sangat tinggi dengan realisasi di atas 98% sejak tahun 2021 hingga 100% pada tahun-tahun berikutnya. Meskipun target tahun 2021 hanya 25% dan meningkat menjadi 45% pada tahun 2024, realisasi capaian jauh melampaui target, menunjukkan bahwa kebijakan berbasis inovasi telah dilakukan dalam proses tata kelola pemerintahan daerah.

Capaian indikator pada bidang kelitbangan dan inovasi di Kabupaten Padang Pariaman mencerminkan penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengintegrasikan hasil kajian ilmiah, mendorong kolaborasi riset, serta menginternalisasi budaya inovasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kinerja ini menjadi modal penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, berbasis data, dan responsif terhadap dinamika pembangunan.

6) Unsur Pengawas

a) Inspektorat

Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan berperan sebagai sistem peringatan dini *(early warning system)* untuk mendeteksi adanya potensi penyimpangan serta sebagai instrumen pembinaan bagi setiap satuan kerja di lingkungan pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, auditor menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang wajib ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa. Tindak lanjut ini harus dilakukan sesuai dengan rekomendasi auditor melalui mekanisme Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).

Kewajiban penyelesaian TLHP telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain; Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 pada Bab II, Surat Edaran Nomor: SE/02/M.PAN/01/2005.

Capaian Indikator Urusan Pengawas pada RPJMD Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 2.81 di bawah ini.

Tabel 2.81
Capaian Indikator Urusan Pengawas pada RPJMD Tahun 2020-2024

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1.	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB	Level	B	B	B	B	B	B	BB	B	BB	BB
2.	Tingkat kapabilitas APIP	Level	level 3 dengan catatan	level 3 dengan catatan	level 3 dengan catatan	level 3	level 3	level 2	level 3	level 3	level 3	level 3
3.	Tingkat kematangan implementasi SPIP	Level	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	level 2	level 3	level 2
4.	Persentase pengawasan yang dilakukan	%	60	N/A	60	100	60	100	60	100	60	100
5.	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang dilakukan	%	60	N/A	60	100	60	100	60	100	60	100

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
6.	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	%	70	80	70	80	75	80	75	85	75	85
7.	Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD	Jumlah	12	13	12	13	12	13	11	15	11	
8.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	Nilai	B	B	B	B	B	B	BB	B	BB	BB
9.	Jumlah OPD yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja sesuai nilai akuntabilitas kinerja Pemda	unit	6	40	6	40	10	40	12	40	14	40
10.	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit BPK	%	65	62	65	62	65	69	70	77	70	76
11.	Jumlah OPD yang memperoleh level maturitas sesuai level maturitas Pemda	unit	10	25	10	25	10	25	10	25	10	25

Sumber : Inspektorat Daerah, 2025

Selama lima tahun terakhir, capaian indikator kinerja pada aspek pengawasan, evaluasi kinerja, dan akuntabilitas pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, meskipun masih terdapat dinamika dan tantangan yang perlu mendapat perhatian. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) menunjukkan tren peningkatan, dari level *B* pada tahun 2021 dan 2022 menjadi *BB* pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan dalam penyusunan perencanaan yang berbasis kinerja serta peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran. Namun demikian, pada tahun 2023 nilai SAKIP sempat stagnan di level *B*, mengindikasikan bahwa penguatan konsistensi penerapan manajemen kinerja perlu terus dilakukan.

Tingkat kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) secara umum tercapai sesuai target, yaitu *level 3*, meskipun pada tahun 2022 sempat mengalami penurunan ke *level 2*. Hal ini menandakan bahwa meskipun kapasitas APIP telah mencapai tingkat yang memadai, masih dibutuhkan penguatan yang lebih berkelanjutan agar kapabilitas pengawasan internal tetap stabil dan meningkat. Sementara itu, tingkat kematangan implementasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) justru menunjukkan tren menurun. Setelah stabil pada *level 3* pada tahun 2021 dan 2022, turun ke *level 2* pada tahun 2023 dan 2024. Penurunan ini perlu menjadi perhatian serius, mengingat SPIP berperan penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan proses tata kelola pemerintahan berjalan efektif.

Pelaksanaan fungsi pengawasan dan asistensi terhadap perangkat daerah menunjukkan capaian yang sangat baik. Persentase pengawasan yang dilakukan, serta pendampingan dan perumusan kebijakan, tercapai 100% secara konsisten dari tahun 2021 hingga 2024, jauh melampaui target tahunan yang ditetapkan sebesar 60%. Ini

mencerminkan optimalisasi fungsi pengawasan internal dan keterlibatan aktif dalam pembinaan terhadap OPD. Indikator penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP juga menunjukkan peningkatan, dari 80% pada tahun 2021 menjadi 85% pada 2024, yang berarti responsivitas perangkat daerah terhadap temuan audit terus membaik.

Sementara itu, jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD menunjukkan tren yang kurang menggembirakan, dengan jumlah temuan justru meningkat dari 13 temuan pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 15 pada tahun 2023, meskipun data 2024 tidak tercantum. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perlu lebih ditingkatkan di berbagai OPD.

Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga menunjukkan tren positif, meningkat dari level *B* pada tahun 2021–2022 menjadi *BB* pada tahun 2024. Sejalan dengan itu, jumlah OPD yang memperoleh nilai akuntabilitas sesuai standar Pemda meningkat setiap tahun, dari 6 unit pada tahun 2021 menjadi 14 unit pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan terjadinya perluasan penerapan prinsip akuntabilitas kinerja di tingkat perangkat daerah.

Indikator lainnya seperti penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit BPK juga menunjukkan peningkatan dari 62% pada tahun 2021 menjadi 76% pada tahun 2024, yang mengindikasikan semakin baiknya tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal. Jumlah OPD yang memperoleh level maturitas sesuai dengan Pemda juga mengalami konsistensi, dengan realisasi sebanyak 25 OPD setiap tahunnya sejak 2021, menunjukkan keberhasilan pembinaan sistem pengendalian intern secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam aspek pengawasan, akuntabilitas, dan pengendalian intern mengalami kemajuan yang cukup baik. Ke depan, penguatan implementasi SPIP dan penurunan jumlah temuan BPK menjadi tantangan utama untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.

7) Unsur Kewilayahan

Berikut capaian dan target indikator kinerja pada unsur kewilayahan tahun 2020-2024 yang diperlihatkan pada tabel 2.82 :

Tabel 2.82
Capaian Indikator Urusan Kewilayahan pada RPJMD
Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	2026	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	T	
KECAMATAN BATANG ANAI														
Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	100	100	100	99,38	100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	100	100	100	77,11	100	100	100	100	100	100	100	100	
Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase terselenggaranya urusan	%	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	2026	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	T	
pemerintahan umum di kecamatan														
Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100	99,56	100	100	100	100	100	100	100	100	
KECAMATAN LUBUAK ALUANG														
Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	100	100	100	90	100	100	100	100	100	100	100	100	
Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	%	100	100	100	85	100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	%	100	100	100	85	100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100	89	100	100	100	100	100	100	100	100	
KECAMATAN ANAM LINGKUANG														
Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	100	100	100	97	100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	100	100	100	94	100	100	100	100	100	100	100	100	
Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	%	100	100	100	90	100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	%	100	100	100	91	100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100	89	100	100	100	100	100	100	100	100	
KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG														
Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	100	100	100	99,71	100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	100	100	100	99,97	100	95	100	100	100	100	100	100	
Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
KECAMATAN 2X11 KAYU TANAM														
Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	100	100	100	95	100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	100	100	100	90	100	90	100	100	100	100	100	100	
Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	%	100	100	100	85	100	90	100	100	100	100	100	100	
Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	%	100	100	100	98	100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100	89	100	100	100	100	100	100	100	100	

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	2026	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	T	
KECAMATAN VII KOTO PATAMUAN														
Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	100	100	100	95,81	100	100	100	100	100	100	100	100	
Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	99,1	100	100	100	100	100	100	
Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO														
Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	100	100	100	0	100	98	100	100	100	100	100	100	
Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	100	100	100	0	100	99	100	100	100	100	100	100	
Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	%	100	100	100	0	100	98	100	100	100	100	100	100	
Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	%	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100	0	100	95	100	100	100	100	100	100	
KECAMATAN VII KOTO														
Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100	100	100	99	100	100	100	100	100	100	
KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG														
Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	100	100	100	92	100	100	100	98	100	100	100	100	
Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	100	100	100	99	100	93	100	100	100	100	100	100	
Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	%	100	100	100	99	100	100	100	90	100	100	100	100	
Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	%	100	100	100	97	100	98	100	100	100	100	100	100	
Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100	100	100	97	100	90	100	100	100	100	
KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH														
Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase Partisipasi Masyarakat Desa	%	100	100	100	94,79	100	98	100	100	100	100	100	100	

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	2026	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	T	
terhadap Pembangunan Daerah														
Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	%	100	100	100	99,5	100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	%	100	100	100	99,5	100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	
KECAMATAN NAN SABARIS														
Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	100	100	100	99,47	100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	100	100	100	99,15	100	100	100	100	100	100	100	100	
Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	%	100	100	100	99,42	100	99	100	100	100	100	100	100	
Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	%	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100	100	100	99	100	100	100	100	100	100	
KECAMATAN V KOTO TIMUR														
Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	100	100	100	75	100	98	100	100	100	100	100	100	
Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	100	100	100	75	100	95	100	100	100	100	100	100	
Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	%	100	100	100	75	100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	%	100	100	100	75	100	95	100	100	100	100	100	100	
Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100	75	100	98	100	100	100	100	100	100	
KECAMATAN V KOTO														
Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	100	100	100	95	100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	100	100	100	80	100	95	100	100	100	100	100	100	
Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	%	100	100	100	95	100	95	100	100	100	100	100	100	
Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
KECAMATAN SUNGAI LIMAU														
Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	100	100	100	100	100	91,85	100	100	100	100	100	100	
Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	100	100	100	99,5	100	90	100	100	100	100	100	100	
Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak	%	100	100	100	99	100	100	100	100	100	100	100	100	

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	2026	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	T	
kriminal yang dilaksanakan														
Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	%	100	100	100	94,35	100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100	97,72	100	100	100	100	100	100	100	100	
KECAMATAN BATANG GASAN														
Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	100	100	100	16,59	100	100	100	100	100	100	100	100	
Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	%	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	%	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100	0	100	98	100	100	100	100	100	100	
KECAMATAN SUNGAI GARINGGIANG														
Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	100	100	100	95	100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	100	100	100	69	100	100	100	100	100	100	100	100	
Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	%	100	100	100	91	100	95	100	100	100	100	100	100	
Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	%	100	100	100	33	100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100	56	100	100	100	100	100	100	100	100	
KECAMATAN IV KOTO AUA MALINTANG														
Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	100	100	100	94,37	100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	100	100	100	98,6	100	100	100	100	100	100	100	100	
Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	%	100	100	100	68,59	100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100	99,9	100	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber: Evaluasi RPJMD 2021-2026

8) Unsur Pemerintahan Umum

a) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan umum yang berperan dalam menjaga stabilitas politik, membina wawasan kebangsaan, serta memperkuat integrasi nasional di daerah. Selain itu, peran Kesbangpol dalam peningkatan wawasan kebangsaan, penguatan ideologi Pancasila, dan pencegahan konflik sosial dilakukan melalui edukasi kebangsaan, deteksi dini, dan penguatan forum-forum koordinasi antar elemen masyarakat. Kegiatan pembinaan partai politik serta pengawasan terhadap potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum juga menjadi bagian penting dari kinerja lembaga ini. Capaian Indikator urusan Pemerintahan Umum pada RPJMD Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.83
Capaian Indikator Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada RPJMD Tahun 2020-2024

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1.	Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam	%	-	N/A	-	-	100	100	100	95	100	96
2.	persentase laporan pertanggungjawaban partai politik tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	persentase ormas / kelompok masyarakat yang terdaftar dan aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	persentase pelaksanaan pembinaan penanganan kasus narkoba	%	100	N/A	100	100	100	100	100	96	100	98
5.	persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah	%	100	N/A	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Kesbangpol 2025

Capaian indikator pada urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat menunjukkan performa yang sangat baik dan stabil sepanjang periode 2020–2024. Secara umum, target yang ditetapkan hampir seluruhnya tercapai bahkan melampaui standar minimum pelayanan. Indikator persentase gangguan keamanan yang dapat diredam mulai terlaporkan pada tahun 2022 dengan capaian 100%, dan meskipun sempat mengalami sedikit penurunan menjadi 95% pada 2023 dan 96% pada 2024, realisasi tetap berada dalam kisaran yang sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem deteksi dan penanganan dini terhadap potensi gangguan keamanan telah berjalan secara efektif, meskipun tetap dibutuhkan penguatan untuk menjaga konsistensi.

Untuk indikator Persentase Laporan Pertanggungjawaban Partai Politik yang Tepat Waktu, capaian 100% secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2024 mencerminkan tingkat kepatuhan dan

koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah dan partai politik dalam memenuhi kewajiban administratif secara tepat waktu. Persentase Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang Terdaftar dan Aktif juga menunjukkan realisasi sempurna sebesar 100% setiap tahun. Hal ini menandakan keberhasilan dalam pendataan, legalisasi, dan pembinaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang ada, sehingga dapat meminimalisir potensi disintegrasi sosial dan memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan.

Indikator Persentase Pelaksanaan Pembinaan Penanganan Kasus Narkoba mengalami sedikit fluktuasi, dengan capaian 100% pada tahun 2021 dan 2022, menurun ke 96% pada 2023, dan kembali meningkat menjadi 98% pada 2024. Meskipun terjadi sedikit penurunan, capaian ini tetap tergolong tinggi dan menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba, namun peningkatan kolaborasi dengan instansi terkait tetap diperlukan. Persentase Jumlah Potensi Konflik Sosial yang Dapat Dicegah secara konsisten mencapai 100% dalam seluruh periode pengamatan. Capaian ini mencerminkan keberhasilan deteksi dini, komunikasi sosial, dan mediasi oleh unsur pemerintah dan aparat keamanan terhadap berbagai potensi konflik horizontal di tengah masyarakat.

Capaian kinerja pada aspek ketentraman dan ketertiban umum menunjukkan performa yang sangat optimal. Hal ini mencerminkan bahwa fungsi koordinasi, pembinaan masyarakat, penanganan potensi konflik, serta penegakan ketertiban umum di Kabupaten Padang Pariaman telah berjalan secara efektif. Ke depan, upaya peningkatan kualitas pembinaan, pengawasan, dan kolaborasi lintas sektor perlu terus diperkuat untuk menjaga stabilitas sosial serta memperkuat kohesi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

2.1.5 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026

I. Perkembangan Capaian Indikator Makro Pembangunan

Indikator makro pembangunan merupakan tolok ukur utama yang mencerminkan kondisi dan arah pembangunan daerah secara menyeluruh. Indikator-indikator ini mencakup berbagai aspek strategis seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia (IPM), gini ratio, serta inflasi daerah. Perkembangan indikator makro menjadi landasan penting dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pencapaian tujuan strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021–2026.

Tabel 2.84
Perkembangan Realisasi Indikator Makro Ekonomi
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d 2024	Capaian	Keterangan
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,27	4,57	107,03	Tercapai
2.	Tingkat Kemiskinan	6,48	6,27	103,35	Tercapai
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,21	6,59	109,41	Tercapai
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,09	74,9	101,09	Tercapai
	Angka Harapan Hidup (Tahun)	70,45	70,1	99,50	On The Track
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,57	14,42	98,97	On The Track
	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,54	8,41	98,48	On The Track
	Pengeluaran Per Kapita (Rp.Ribu)	12.156	11.756	96,71	On The Track
5.	Rasio Gini	0,28	0,287	102,50	Tercapai

Sumber : Perda dan Padang Pariaman Dalam Angka

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa semua indikator makro ekonomi Kabupaten Padang Pariaman dapat tercapai pada akhir RPMJD Tahun 2021-2026. Hal ini mencerminkan efektivitas kebijakan pembangunan yang dijalankan serta resiliensi ekonomi daerah dalam menghadapi berbagai tantangan.

Capaian laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman yang mencapai 4,57% pada tahun 2024, melampaui target akhir RPJMD sebesar 4,27%, menunjukkan adanya perbaikan kinerja sektor-sektor produktif di daerah. Hal ini mencerminkan pemulihan ekonomi yang kuat serta keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong kegiatan ekonomi lokal, termasuk di sektor pertanian, perdagangan, dan jasa. Pertumbuhan ini juga memperlihatkan sinergi antara investasi publik dan swasta yang mampu mendorong peningkatan output daerah secara agregat.

Tingkat kemiskinan yang berhasil ditekan hingga 6,27% pada tahun 2024, lebih rendah dari target akhir RPJMD sebesar 6,48%, menandakan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Capaian ini tidak terlepas dari berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan pemerintah daerah, seperti bantuan sosial terarah, penguatan UMKM, serta peningkatan akses layanan dasar. Penurunan tingkat kemiskinan juga turut memperbaiki distribusi kesejahteraan, sebagaimana tercermin dalam capaian rasio gini yang sebesar 0,287—lebih rendah dari batas target 0,28—yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang relatif rendah dan terkendali.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 74,90 pada tahun 2024 menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Padang Pariaman terus mengalami kemajuan. Capaian ini melampaui target akhir RPJMD sebesar 74,09. Meskipun beberapa subkomponen penyusun IPM, seperti harapan hidup, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita belum sepenuhnya memenuhi target akhir, nilai capaian ketiganya berada di kisaran 96–99 persen dari target, yang

mengindikasikan bahwa arah pembangunan sumber daya manusia masih berada dalam jalur yang tepat. Intervensi berkelanjutan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan peningkatan daya beli diperkirakan akan mempercepat pencapaian indikator-indikator ini pada tahun 2025 dan 2026.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang berhasil ditekan hingga 6,59%, lebih rendah dari target RPJMD sebesar 7,21%, menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja di Padang Pariaman menunjukkan perbaikan. Hal ini didukung oleh program peningkatan keterampilan tenaga kerja, pelatihan vokasi, serta kebijakan penciptaan lapangan kerja yang diarahkan pada sektor-sektor padat karya. Keberhasilan ini menjadi penanda penting dalam pemulihan ekonomi yang inklusif, karena mendorong partisipasi produktif penduduk usia kerja. Dengan konsistensi kebijakan dan penguatan koordinasi lintas sektor, capaian indikator makro ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi percepatan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Padang Pariaman.

Capaian rasio gini Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024 sebesar 0,287, yang lebih rendah dari target akhir RPJMD sebesar 0,28, menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan antarpenduduk berada dalam kondisi yang relatif baik dan terkendali. Rasio gini sendiri merupakan indikator penting dalam menilai keadilan ekonomi dan kesetaraan sosial, di mana nilai yang semakin mendekati nol menunjukkan distribusi pendapatan yang semakin merata. Capaian ini mengindikasikan bahwa manfaat pembangunan telah mulai dirasakan secara lebih inklusif oleh berbagai lapisan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

Penurunan ketimpangan ini dapat dikaitkan dengan meningkatnya akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi dan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur ekonomi lokal. Program-program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan kerja, dan perluasan akses pembiayaan usaha kecil turut mendorong perbaikan kesejahteraan kelompok rentan dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Selain itu, distribusi bantuan sosial yang lebih tepat sasaran dan terintegrasi dengan data kemiskinan juga membantu menekan ketimpangan pendapatan.

Meski demikian, perlu diwaspadai bahwa angka rasio gini yang relatif baik bukan berarti ketimpangan telah sepenuhnya hilang. Ketimpangan masih mungkin terjadi dalam bentuk akses terhadap pekerjaan berkualitas, kepemilikan aset, atau peluang ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah daerah tetap perlu mempertahankan dan memperkuat kebijakan-kebijakan yang mendukung pemerataan ekonomi, termasuk upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah terpencil serta memperluas inklusi keuangan dan digitalisasi ekonomi lokal.

Keberhasilan menjaga rasio gini dalam kisaran rendah ini menjadi pencapaian penting yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam memastikan tidak ada warga yang tertinggal (*no one left behind*). Untuk itu, di sisa periode RPJMD 2021–2026, perhatian terhadap dimensi keadilan dan kesetaraan harus terus diutamakan dalam perumusan kebijakan pembangunan, agar capaian dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

II. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran strategis yang digunakan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). IKU menjadi tolok ukur utama kinerja kepala daerah dan perangkat daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan. Oleh karena itu, pemantauan dan evaluasi capaian IKU setiap tahunnya menjadi sangat penting dalam rangka memastikan tercapainya target pembangunan daerah secara efektif dan akuntabel.

Tahun 2024 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021–2026. Pada tahun ini, capaian IKU Pemerintah Daerah menunjukkan kemajuan yang signifikan di berbagai sektor. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, sebagian besar indikator kinerja menunjukkan tren peningkatan dan berada pada jalur yang tepat *(on the track)* untuk mencapai target akhir RPJMD. Hal ini mencerminkan kinerja yang cukup baik dari perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu menjadi perhatian ke depan.

Tabel 2.85
Perkembangan indikator Kinerja Utama RPJMD
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026
Misi 1

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI S/D TAHUN 2024	CAPAIAN	KET
Misi 1 : Meningkatnya kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban							
Terwujudnya kepribadian masyarakat yang religius beradat dan berbudaya dalam menciptakan ketertiban dan keamanan kehidupan kemasyarakatan	Peningkatan Kualitas Kehidupan beragama dan berbudaya	Persentase Lembaga pendidikan Al Quran yang menghasilkan hafiz/Hafizah	%	31	72	232,26	Tercapai
IK 1 : Jumlah hafiz dan hafizah yang bersertifikat Gebu Pafa		Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	42	10	23,81	*On The Track*
IK 2: Penurunan Jumlah Tindak Pidana	Peningkatan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penegakaan perda	%	75	84,37	112,49	Tercapai
		Persentase gangguan trantibum dan linmas yang dapat diselesaikan	%	75	84,37	112,49	Tercapai

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI S/D TAHUN 2024	CAPAIAN	KET
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	95	94,3	99,26	*On The Track*
		Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	14	14	100	Tercapai

Sumber : Evaluasi RPJMD 2021-2026, diolah

Dari tabel di atas, terlihat bahwa pada Misi 1 Meningkatnya kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban, terdapat 2 (dua) sasaran yang terdiri dari 6 (enam) indikator, dengan capaian dari akhir tahun RPJMD menunjukkan dengan capai lebih dari 100% kecuali pada indikator persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni. Meski demikian, indikator ini masih berada dalam jalur yang sesuai *(on the track)* karena kegiatan seni budaya merupakan proses pembinaan jangka menengah-panjang yang memerlukan dukungan lintas sektor. Penguatan budaya lokal, pembinaan sanggar seni, serta pelibatan generasi muda dalam aktivitas budaya perlu terus diintensifkan agar target dapat tercapai pada akhir periode RPJMD.

Tabel 2.86
Perkembangan indikator Kinerja Utama RPJMD
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026
Misi 2

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI S/D TAHUN 2024	CAPAIAN	KET
Misi 2 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang							
Terwujdunya Infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi	Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	%	75	66,56	88,75	*On The Track*
IK 1 : Persentase pemenuhan infratstruktur yang berkualitas dan berkelanjutan		Rasio konektivitas kabupaten	%				
	Meningkatnya infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase Irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	75,54	66,77	88,39	*On The Track*
		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai (WS) kewenangan kabupaten	%	9,94	9,05	91,05	*On The Track*

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI S/D TAHUN 2024	CAPAIAN	KET
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	85	24,18	28,45	*On The Track*
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	68,95	67,02	97,20	*On The Track*
		Persentase areal kawasan kumuh	%	0,00	0,02	0,00	*On The Track*
		Luas Ruang Terbuka Hijau	Ha	862			*On The Track*
IK 2:Kawasan Strategis dan cepat tumbuh yang sesuai dengan rencana tata ruang	Meningkatnya pemanfaatan kawasan sesuai dengan perencanaan tata ruang	Persentase pengembangan dan pemanfaatan kawasan strategis dan kawasan perkotaan	%	85	24,18	28,45	*On The Track*
		Persentase ketaatan terhadap RTRW	%	90	82,10	91	*On The Track*
		Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya	%	100	77,79	77,79	*On The Track*
		Persentase luas lahan milik pemda bersertifikat	%	10,50	8,4	80	*On The Track*

Sumber : Evaluasi RPJMD 2021-2026, diolah

Dari tabel di atas, terlihat bahwa capaian indikator yang mendukung Misi 2 secara umum menunjukkan tren yang positif dan berada dalam jalur pencapaian yang sesuai (*on the track*) menuju target akhir RPJMD 2021–2026. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana publik, termasuk infrastruktur transportasi, sumber daya air, permukiman, dan penataan ruang, merupakan bagian strategis dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Pada sektor transportasi, persentase kondisi jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang telah mencapai 66,56% dari target akhir 75%, atau sekitar 88,75% capaian. Ini menunjukkan bahwa pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan masih terus dilakukan, meskipun masih memerlukan akselerasi terutama untuk jalan-jalan yang belum tersentuh perbaikan. Indikator ini sangat penting karena berkontribusi langsung terhadap konektivitas antarwilayah dan kelancaran distribusi barang dan jasa.

Untuk infrastruktur sumber daya air, dua indikator utama menunjukkan capaian yang cukup memuaskan. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik mencapai 66,77% dari target 75,54% (88,39% capaian), dan rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi mencapai 9,05% dari target 9,94% (91,05% capaian). Hal ini menunjukkan efektivitas pengelolaan dan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dan irigasi dalam mendukung ketahanan wilayah

terhadap perubahan iklim serta menjamin keberlanjutan produksi pertanian.

Namun demikian, persentase drainase dalam kondisi baik masih relatif rendah, hanya mencapai 24,18% dari target 85% (28,45% capaian). Ini menjadi perhatian khusus karena buruknya sistem drainase dapat meningkatkan risiko banjir lokal dan menurunkan kualitas lingkungan permukiman. Sementara itu, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sudah berada pada angka 67,02 dari target 68,95, yang menunjukkan pencapaian sebesar 97,20%. Persentase areal kawasan kumuh yang tersisa sebesar 0,02% menunjukkan hampir tuntasnya penanganan kawasan kumuh, sedangkan luas ruang terbuka hijau (RTH) tercatat 862 hektar meskipun belum tersedia target pembanding dalam data tersebut.

Dalam aspek penataan ruang, pengembangan dan pemanfaatan kawasan strategis serta kawasan perkotaan baru mencapai 24,18% dari target 85% (28,45% capaian). Sementara itu, ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mencapai 82,10% dari target 90% (91% capaian), menunjukkan bahwa meskipun pemanfaatan ruang masih rendah, ketaatan terhadap rencana tata ruang cukup tinggi. Persentase ketersediaan informasi tata ruang tercatat 77,79% dan persentase lahan milik Pemerintah daerah yang bersertifikat sebesar 8,4% dari target 10,5% (80% capaian), menunjukkan bahwa transparansi dan legalitas penguasaan lahan pemerintah juga sudah mulai diperkuat.

Tabel 2.87
Perkembangan indikator Kinerja Utama RPJMD
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026
Misi 3

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI S/D TAHUN 2024	CAPAIAN	KET
Misi 3 : Membangun Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Daya Dukung Sektor Primer dan Jasa Berbasiskan Pemberdayaan Masyarakat							
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian, perikanan, perdagangan, perindustrian dan ekowisata	Kontribusi ekonomi pertanian/perkebunan terhadap PDRB (Rp. Juta)	(Rp. Juta)	3.069.705,15	3.420.698,35	111,43	Tercapai
IK 1 : Laju Pertumbuhan Ekonomi		Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	%	8,10	7,44	91,85	On The Track
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	8,71	10,19	116,99	Tercapai
		Kontribusi Ekonomi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	16,00	10,31	64,44	On The Track
		Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	350.000	505.067	144,30	Tercapai

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI S/D TAHUN 2024	CAPAIAN	KET
Misi 3 : Membangun Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Daya Dukung Sektor Primer dan Jasa Berbasiskan Pemberdayaan Masyarakat							
	Berkurangnya jumlah penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	6,48	6,27	103,35	Tercapai
	Peningkatan daya beli masyarakat	PDRB/Income Per Kapita ADHB (Rp Juta)	(Rp. Juta)	58,72	58,38	99,42	On The Track
	Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	1,00	0,74	74,00	On The Track

Sumber : Evaluasi RPJMD 2021-2026, diolah

Capaian indikator untuk Misi 3 menunjukkan kemajuan signifikan dalam upaya Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman membangun kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai sektor strategis seperti pertanian, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri pengolahan, serta pariwisata menunjukkan performa yang cukup baik, walaupun masih terdapat tantangan dalam beberapa sektor.

Sektor pertanian/perkebunan mencatat kontribusi terhadap PDRB sebesar Rp3.420.698,35 juta, melampaui target akhir RPJMD sebesar Rp3.069.705,15 juta atau 111,43% capaian. Ini menegaskan bahwa sektor primer masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Sementara itu, sektor perdagangan menunjukkan capaian luar biasa dengan kontribusi 10,19% terhadap PDRB dari target 8,71% (116,99% capaian). Sektor pariwisata juga tampil menonjol, dengan jumlah kunjungan wisatawan yang mencapai 505.067 orang, jauh melebihi target 350.000 (144,30%). Hal ini menandakan efektivitas strategi promosi wisata dan peningkatan destinasi unggulan daerah.

Sebaliknya, sektor kelautan dan perikanan serta industri pengolahan belum sepenuhnya mencapai target. Kontribusi kelautan dan perikanan terhadap PDRB baru mencapai 7,44% dari target 8,10% , dan industri pengolahan hanya 10,31% dari target 16%. Ini menunjukkan perlunya peningkatan nilai tambah produk lokal dan penguatan infrastruktur hilirisasi serta akses pasar, khususnya bagi pelaku UMKM dan nelayan.

Indikator kesejahteraan masyarakat menunjukkan hasil yang positif. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 6,27%, lebih rendah dari target 6,48%, menunjukkan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Namun, PDRB per kapita (ADHB) tercatat sebesar Rp58,38 juta, sedikit di bawah target Rp58,72 juta, mengindikasikan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat masih perlu didorong secara merata. Sementara itu, Indeks Desa Membangun (IDM) mencapai 0,74 dari target 1,00 (74%), menunjukkan bahwa proses kemandirian desa terus berjalan namun masih membutuhkan intervensi lanjutan, terutama dalam hal pelayanan dasar, ekonomi lokal, dan keberlanjutan lingkungan desa.

Secara keseluruhan, indikator kinerja pada Misi 3 menunjukkan kinerja yang cukup solid dengan empat indikator telah mencapai atau melampaui target, dan lima lainnya masih dalam jalur pencapaian (on the track). Ke depan, perhatian khusus perlu diberikan pada penguatan sektor industri pengolahan, percepatan kemandirian desa, serta peningkatan kualitas belanja produktif masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 2.88
Perkembangan indikator Kinerja Utama RPJMD
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026
Misi 4

Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d tahun 2024	Capaian	Ket
Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal							
Membangun masyarakat yang cerdas, terampil dan berdaya saing dengan peningkatan pendidikan dan keterampilan	Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	19,36	68,19	352,22	Tercapai
IK 1: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Peningkatan Mutu Pendidikan	Harapan lama sekolah	Tahun	14,57	14,2	97,46	*On The Track*
		Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,54	8,42	98,59	*On The Track*
	Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,10	6,59	92,82	*On The Track*
	Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga daerah	Jumlah pemuda berkarakter mandiri	Orang	185	185	100	Tercapai
		Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	385	415	107,79	Tercapai

Sumber : Evaluasi RPJMD 2021-2026, diolah

Capaian indikator kinerja Misi 4 menunjukkan kemajuan signifikan dalam upaya Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, terampil, dan berdaya saing. Mayoritas indikator berada dalam kategori "Tercapai" atau *"On the Track"*, yang mencerminkan arah kebijakan pembangunan SDM berjalan sesuai rencana.

Salah satu capaian paling menonjol adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, yang melonjak jauh hingga 68,19 dari target hanya 19,36, dengan capaian sebesar 352,22%. Ini mencerminkan keberhasilan program literasi, peningkatan akses informasi, dan aktivitas pengembangan budaya baca masyarakat yang masif. Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator kinerja utama, turut menunjukkan capaian positif yang menopang keberhasilan pembangunan SDM secara umum.

Indikator pendidikan formal menunjukkan hasil yang hampir memenuhi target. Harapan lama sekolah tercatat 14,2 tahun dari target 14,57 tahun, sementara rata-rata lama sekolah berada pada angka 8,42 tahun dari target 8,54 tahun. Meski belum mencapai target akhir RPJMD, keduanya masih dalam tren yang baik dan mendekati target, menunjukkan adanya peningkatan akses dan partisipasi pendidikan secara berkelanjutan.

Dalam aspek ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berhasil ditekan hingga 6,59% dari target 7,10%. Capaian ini mengindikasikan peningkatan keterampilan kerja masyarakat, serta terserapnya tenaga kerja ke sektor-sektor produktif, meskipun tetap memerlukan penguatan pelatihan vokasional dan *link-and-match* antara dunia pendidikan dengan dunia usaha/industri. Sementara itu, pada sektor kepemudaan dan olahraga, jumlah pemuda berkarakter mandiri tercapai 100% (185 orang), dan jumlah atlet berprestasi melebihi target, yakni 415 dari target 385. Ini menunjukkan pembinaan generasi muda dan pembinaan prestasi olahraga daerah telah berjalan dengan baik.

Secara keseluruhan, Misi 4 menunjukkan performa yang solid dalam pembangunan sumber daya manusia. Keberhasilan dalam capaian literasi dan prestasi olahraga perlu diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan kerja agar tujuan jangka panjang terkait daya saing daerah dapat tercapai secara menyeluruh dan merata.

Tabel 2.89
Perkembangan indikator Kinerja Utama RPJMD
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026
Misi 5

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2024	Capaian	Ket
Misi 5 :Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan							
Terwujudnya Reformasi dan Birokrasi yang efektif dan efisien	Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	Tercapai
IK 1:Indeks reformasi Birokrasi		Tingkat Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	100	*On The Track*
		Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Level	Level 3	Level 2	75	*On The Track*
		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB	Nilai	BB	BB	100	*Tercapai*
		Persentase Penggunaan *EProcurement* terhadap Belanja Pengadaan	%	15	13	86,67	*On The Track*
		Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai LPPD)	Nilai	3,0500	3,1529	103,37	Tercapai

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2024	Capaian	Ket
	Birokrasi yang efisien dan efektif (kapabel)	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	88	75,81	86,15	*On The Track*
		Indeks *E-Government* /SPBE	Indeks	4	3,51	87,75	*On The Track*
		Indeks Kearsipan Eksternal	Indeks	70	70	100	Tercapai
	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,58	4,29	93,67	*On The Track*

Sumber : Evaluasi RPJMD 2021-2026, diolah

Capaian indikator kinerja Misi 5 menunjukkan kemajuan yang baik dalam reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Padang Pariaman. Dari keseluruhan indikator yang dilaporkan, sebagian besar telah menunjukkan capaian yang sesuai dengan jalur *(on the track)*, dan beberapa bahkan telah memenuhi target akhir RPJMD Tahun 2021–2026.

Capaian Opini BPK atas Laporan Keuangan yang tetap meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) menegaskan konsistensi tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Begitu pula nilai SAKIP yang bertahan pada kategori BB, serta nilai LPPD (Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) yang melebihi target dengan capaian 103,37%, menggambarkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang cukup baik di tingkat daerah.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang meskipun berada dalam kategori on the track, menunjukkan perlunya percepatan, terutama pada indikator Tingkat Kematangan SPIP yang masih berada di Level 2 dari target Level 3, dengan capaian 75%. Hal ini mengindikasikan bahwa integrasi pengendalian internal dalam proses pemerintahan belum sepenuhnya optimal dan perlu penguatan, baik dari sisi perencanaan risiko, pengendalian, maupun pengawasan internal.

Dari sisi kualitas dan efisiensi birokrasi, indikator Indeks Profesionalitas ASN, SPBE *(E-Government)*, dan Indeks Pelayanan Publik masih berada dalam kategori *on the track*, namun belum mencapai nilai ideal. Hal ini mencerminkan bahwa masih dibutuhkan peningkatan kapasitas aparatur, transformasi digital pemerintahan, serta perbaikan layanan publik. Meski demikian, capaian Indeks Kearsipan Eksternal yang telah mencapai 100%, menunjukkan adanya perhatian terhadap pengelolaan dokumen dan informasi secara baik dan sesuai standar nasional.

Secara keseluruhan, capaian Misi 5 menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah berada pada jalur yang tepat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan profesional. Untuk mencapai target akhir RPJMD secara penuh, diperlukan peningkatan kualitas birokrasi yang lebih komprehensif, penguatan sistem pengawasan internal, serta akselerasi digitalisasi pemerintahan.

Tabel 2.90
Perkembangan indikator Kinerja Utama RPJMD
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026
Misi 6

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2024	Capaian	Ket
Misi 6 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat							
Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	70	70,10	100,14	Tercapai
IK 1:Persentase Pelayanan dasar yang memenuhi standar	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	3	1,73	57,67	On The Track
	Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum	Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100	83,59	83,59	On The Track
	Peningkatan pengelolaan air limbah domestik	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	76,77	76,77	On The Track
	Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Rasio rumah layak huni	Rasio	0,19	0,19	100	Tercapai
	Penguatan layanan kebencanaan	Nagari tangguh bencana	Nagari	20	18	90	On The Track
	Pengurangan resiko kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen kebakaran (WMK)	Menit	10	9,22	92,20	On The Track
	Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat	Persentase PPKS Mandiri	%	33	28	84,85	On The Track
	Peningkatan penanganan masalah sosial	Persentase penanganan dan peningkatan kesejahteraan sosial	%	85	85	100	Tercapai

Sumber : Evaluasi RPJMD 2021-2026, diolah

Capaian kinerja indikator-indikator Misi 6 menunjukkan arah yang positif dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Sebagian besar indikator telah mencapai atau mendekati target akhir RPJMD, yang menunjukkan bahwa pelayanan dasar di Kabupaten Padang Pariaman berada dalam jalur yang cukup baik.

Indikator Angka Harapan Hidup (AHH) telah mencapai target dengan capaian 100,14%, menandakan bahwa derajat kesehatan masyarakat mengalami peningkatan dan pelayanan kesehatan dasar mampu menopang kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, rasio rumah layak huni dan persentase penanganan kesejahteraan sosial juga mencapai target 100%, menunjukkan keberhasilan program perumahan dan sosial yang inklusif.

Namun, terdapat beberapa indikator yang belum sepenuhnya memenuhi target, meskipun tetap dikategorikan *on the track*. Misalnya, laju pertumbuhan penduduk tercapai hanya 57,67% dari target akhir, mengindikasikan perlunya penguatan program pengendalian pertumbuhan penduduk melalui edukasi, layanan kesehatan reproduksi, dan perencanaan keluarga yang lebih efektif.

Dalam hal infrastruktur dasar, indikator akses terhadap air minum (83,59%) dan layanan pengolahan air limbah domestik (76,77%) masih perlu ditingkatkan agar dapat menjangkau seluruh rumah tangga. Hal ini penting untuk menjaga kualitas hidup dan kesehatan masyarakat, terutama di wilayah perdesaan dan pinggiran.

Selain itu, indikator Nagari Tangguh Bencana (90%) dan response time layanan kebakaran (92,20%) menunjukkan kesiapsiagaan yang cukup baik, namun tetap memerlukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sarana-prasarana kebencanaan. Indikator Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang Mandiri yang baru mencapai 84,85% menunjukkan perlunya pendampingan lanjutan agar kelompok rentan dapat benar-benar mandiri secara sosial dan ekonomi.

Secara keseluruhan, kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam mencapai indikator-indikator pelayanan dasar berada pada tren yang menggembirakan. Capaian yang sudah baik perlu dipertahankan, sementara beberapa indikator yang belum optimal perlu intervensi lebih lanjut agar seluruh target RPJMD 2021–2026 dapat tercapai secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Tabel 2.91
Perkembangan indikator Kinerja Utama RPJMD
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026
Misi 7

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2024	Capaian	Ket
Misi 7 :meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja							
Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD dalam Pembangunan							
IK 1 : Rasio Ketergantungan keuangan daerah	Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah	Persentase peningkatan PAD	%	5,50	3,54	64,36	*On The Track*
Meningkatkan nilai investasi / penanaman modal							
IK 2: Jumlah Nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Peningkatan nilai investasi di Padang Pariaman	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA	Milyar				

Sumber : Evaluasi RPJMD 2021-2026, diolah

Pelaksanaan Misi 7 dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021–2026 bertujuan untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan pengembangan usaha. Namun, dari capaian hingga tahun 2024, terlihat bahwa beberapa indikator strategis masih belum menunjukkan hasil yang optimal.

Indikator Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mencapai 3,54% dari target akhir 5,50%, atau sekitar 64,36% dari capaian target. Hal ini mengindikasikan bahwa optimalisasi potensi PAD, baik dari sektor pajak daerah, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah, maupun pendapatan sah lainnya, masih belum berjalan maksimal. Kemungkinan penyebabnya adalah rendahnya efektivitas penggalian potensi, lemahnya inovasi pelayanan publik yang berdampak pada penerimaan PAD, serta belum optimalnya digitalisasi sistem pendapatan.

Sementara itu, indikator terkait nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) belum tercantum realisasinya dalam tabel, sehingga belum dapat dianalisis secara kuantitatif. Namun, ketidakterisian data ini sendiri menunjukkan adanya potensi persoalan dalam sistem pencatatan atau pelaporan investasi daerah, atau bisa juga karena capaian yang masih minim. Padahal, investasi sangat penting untuk mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing daerah.

Dari sisi indikator kinerja utama (IKU), rasio ketergantungan keuangan daerah juga menjadi penting untuk dianalisis lebih lanjut. Jika data tersedia, indikator ini akan menggambarkan seberapa jauh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mampu mandiri dalam pembiayaan pembangunan tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Misi 7 menunjukkan bahwa meskipun upaya penguatan kapasitas fiskal daerah telah dimulai, masih diperlukan strategi yang lebih agresif dan inovatif, baik dalam pengelolaan PAD maupun dalam menarik investor. Perluasan basis pajak, peningkatan pelayanan investasi, penyederhanaan perizinan, serta promosi potensi unggulan daerah menjadi langkah-langkah strategis yang perlu didorong secara konsisten.

III. Perkembangan Capaian Indikator Program dalam RPJMD 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021–2026, telah dirumuskan berbagai program prioritas yang dijabarkan ke dalam indikator-indikator program sebagai tolok ukur pencapaian kinerja pemerintah daerah. Indikator program ini menjadi instrumen penting dalam mengukur seberapa efektif pelaksanaan program pembangunan di setiap perangkat daerah dalam menjawab tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Capaian indikator program menggambarkan tingkat kemajuan pelaksanaan pembangunan berdasarkan hasil yang dicapai dibandingkan dengan target-target yang telah direncanakan. Evaluasi terhadap perkembangan capaian indikator program juga berfungsi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan kebijakan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penyusunan rencana pembangunan tahunan secara lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Perkembangan capaian indikator program hingga tahun 2024, termasuk capaian kumulatif terhadap target akhir RPJMD. Analisis yang ditampilkan mencakup berbagai sektor pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, sosial budaya, serta tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, gambaran menyeluruh terhadap efektivitas implementasi program pembangunan daerah dapat terlihat secara objektif dan terukur.

Melalui pemantauan indikator program ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat mengevaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan daerah secara lebih akurat, serta mendorong peningkatan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas perencanaan pembangunan di masa yang akan datang.

1. Misi 1 : Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama Berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban

Pencapaian sasaran pada Misi 1 yaitu Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama Berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban, untuk :

a. Sasaran 1 : Peningkatan Kualitas Kehidupan beragama dan berbudaya

Sasaran ini didukung oleh 5 (lima) program, terdiri atas 1 (satu) program pada Sekretariat Daerah dan 4 (empat) program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Secara umum, capaian

indikator kinerja telah mencapai target, kecuali pada program pengembangan kebudayaan. Rendahnya capaian program ini dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, terutama untuk fasilitasi dan pemberdayaan komunitas seni budaya di tingkat nagari. Selain itu, belum optimalnya kolaborasi lintas sektor serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian nilai budaya turut menjadi faktor penghambat. Beberapa kegiatan seperti festival budaya, pelatihan seniman lokal, dan dokumentasi warisan budaya tak benda belum sepenuhnya terealisasi sesuai rencana. Kondisi ini berdampak pada belum maksimalnya penguatan identitas budaya lokal, yang seharusnya menjadi bagian penting dalam membangun karakter masyarakat Padang Pariaman yang religius dan beradat. Meski demikian, program lain menunjukkan kinerja positif, seperti peningkatan jumlah lembaga pendidikan Al-Qur'an yang melahirkan hafiz/hafizah serta pelestarian cagar budaya. Ke depan, diperlukan strategi untuk memperkuat sinergi antarperangkat daerah, memanfaatkan sumber pendanaan alternatif, serta meningkatkan peran masyarakat agar sasaran peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya dapat dicapai secara lebih merata dan berkelanjutan.

b. Sasaran 2 : Peningkatan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Sasaran ini didukung oleh 12 program, terdiri atas 1 program pada Satpol PP dan Damkar, 6 program pada Dinas Sosial P3A, serta 5 program pada Kesbangpol. Rendahnya capaian dipengaruhi keterbatasan anggaran, SDM, dan koordinasi, bahkan beberapa program tidak terealisasi, khususnya di bidang perlindungan perempuan, anak, serta seluruh program Kesbangpol. Hal ini berpotensi menghambat upaya menjaga stabilitas sosial dan perlindungan masyarakat. Namun, capaian signifikan terlihat pada program peningkatan kualitas keluarga dan perlindungan khusus anak. Ke depan, perlu penguatan perencanaan berbasis kebutuhan riil, peningkatan anggaran, sinergi lintas sektor, serta reformulasi program agar lebih responsif terhadap dinamika sosial dan keamanan daerah.

2. Misi 2 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang

a. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi

Sasaran ini didukung oleh 3 (tiga) program, terdiri atas 1 (satu) program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta 2 (dua) program pada Dinas Perhubungan. Pelaksanaan program menunjukkan adanya ketimpangan antarperangkat daerah. Program pada Dinas PUPR tidak berjalan optimal, yang diduga dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, perubahan kebijakan, atau belum matangnya perencanaan teknis. Sementara itu, program pada Dinas Perhubungan berjalan dengan baik dan mampu memberikan kontribusi positif terhadap

peningkatan layanan transportasi. Kondisi ini menegaskan perlunya sinergi yang lebih kuat antarperangkat daerah, khususnya dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program, serta evaluasi menyeluruh terhadap hambatan yang dihadapi agar pembangunan infrastruktur transportasi dapat tercapai secara merata dan berkelanjutan.

b. Sasaran 2 : Meningkatnya infrastruktur Sumber Daya Air

Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pelaksanaan sebagian besar kegiatan pada program pengelolaan sumber daya air telah berjalan sesuai perencanaan, terutama dalam pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi serta infrastruktur pengendalian banjir. Namun, target belum sepenuhnya tercapai akibat sejumlah kendala, seperti keterbatasan anggaran, kondisi cuaca ekstrem yang menghambat pekerjaan fisik, keterlambatan proses tender, maupun kendala teknis lainnya di lapangan. Meskipun demikian, program ini tetap memberikan hasil positif dalam mendukung pemenuhan sasaran pembangunan infrastruktur sumber daya air. Ke depan, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap hambatan yang ada agar capaian kinerja dapat lebih ditingkatkan dan target akhir RPJMD dapat terwujud secara optimal.

c. Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman

Untuk mencapai sasaran ini didukung oleh 17 program pada tiga perangkat daerah, namun capaian menunjukkan ketimpangan: sebagian program berhasil melebihi target seperti kawasan permukiman, pengelolaan persampahan, dan pembinaan izin lingkungan, sementara sejumlah program lainnya sama sekali tidak berjalan dengan capaian 0%, seperti pengelolaan drainase, pengelolaan sampah regional, serta beberapa program perumahan dan lingkungan hidup. Kondisi ini dipengaruhi oleh hambatan teknis, keterbatasan anggaran, keterlambatan pengadaan, serta lemahnya koordinasi lintas sektor, sedangkan program dengan capaian tinggi umumnya ditopang tambahan kegiatan atau pendanaan di luar rencana awal. Perbedaan capaian antar program ini menegaskan perlunya evaluasi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan yang lebih matang, serta peningkatan koordinasi antar perangkat daerah agar target pembangunan infrastruktur permukiman dapat tercapai secara lebih merata dan berkelanjutan.

d. Sasaran 4 : Meningkatnya Pemanfaatan Kawasan sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang

Sasaran ini dilaksanakan melalui 12 program, terdiri atas 9 program pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan serta 3 program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sebagian besar program belum terlaksana secara optimal, termasuk beberapa program strategis seperti pengelolaan izin lokasi, penataan ruang, dan pengelolaan tanah kosong. Hal ini menunjukkan adanya

hambatan serius dalam aspek perencanaan teknis, regulasi, pendanaan, maupun koordinasi antarperangkat daerah. Di sisi lain, terdapat beberapa program yang berjalan dengan baik, khususnya terkait kebutuhan mendesak pengadaan tanah untuk pembangunan dan proyek strategis. Namun demikian, keberhasilan sebagian kecil program belum mampu menutupi ketidakberhasilan mayoritas program. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang lebih realistis, peningkatan efektivitas koordinasi lintas sektor, serta evaluasi menyeluruh terhadap hambatan implementasi di lapangan agar pemanfaatan ruang dan kawasan dapat berlangsung tertib, merata, dan berkelanjutan.

3. **Misi 3 : Membangun Kemandirian Ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasiskan pemberdayaan masyarakat**
   a. Sasaran 1 : Meningkatnya perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian, perikanan, perdagangan, perindustrian dan ekowisata

      Sasaran 1 dalam Misi 3 RPJMD 2021–2026 didukung oleh 33 program lintas perangkat daerah, dengan capaian kinerja yang sangat bervariasi. Sektor perikanan dan perindustrian mencatat performa sangat baik bahkan melampaui target, seperti program perencanaan dan pembangunan industri dan sistem informasi industri nasional, yang menunjukkan adanya lonjakan investasi dan pelaksanaan yang efektif. Sebaliknya, banyak program di sektor pertanian, perdagangan ekspor, dan pariwisata masih menunjukkan capaian rendah bahkan 0%, menandakan hambatan serius pada aspek perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan. Di sisi lain, beberapa program perdagangan dan koperasi mampu mencapai target tinggi, seperti stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan standarisasi serta perlindungan konsumen. Ketimpangan capaian ini menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap akar masalah program yang belum berjalan, sekaligus mendorong penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas pelaksanaan, serta adopsi praktik baik dari sektor yang berhasil, agar sasaran peningkatan perekonomian masyarakat dapat tercapai lebih merata dan berkelanjutan.

   b. Sasaran 2 : Berkurangnya jumlah penduduk miskin

      Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Capaian belum optimal karena cakupan kegiatan pemberdayaan sosial masih rendah dan kurang tepat sasaran. Keterbatasan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang belum akurat juga menjadi kendala dalam penentuan penerima manfaat secara tepat. Selain itu, beberapa intervensi tidak dapat dilaksanakan optimal akibat perubahan kebijakan maupun keterlambatan dalam proses pengadaan dan penyaluran bantuan sosial produktif. Kondisi ini berdampak pada minimnya kontribusi program terhadap penurunan jumlah penduduk miskin selama periode evaluasi.

c. Sasaran 3 : Peningkatan Daya Beli Masyarakat

Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program pada Sekretariat Daerah. Capaian belum optimal karena kegiatan yang dilaksanakan lebih bersifat koordinatif dan fasilitatif, sehingga dampaknya terhadap peningkatan daya beli masyarakat masih terbatas. Selain itu, tantangan ekonomi makro seperti inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan pokok turut memengaruhi daya beli masyarakat secara umum. Kurangnya sinergi lintas perangkat daerah dalam mengakselerasi kegiatan ekonomi masyarakat juga menjadi faktor penghambat, sehingga capaian indikator belum maksimal.

d. Sasaran 4 : Kemandirian Desa

Sasaran ini didukung oleh 4 (empat) program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Namun, pencapaiannya masih belum optimal karena sinergi antara program pemberdayaan masyarakat desa dengan prioritas pembangunan daerah belum sepenuhnya terbangun, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masih rendah. Di samping itu, terdapat kendala teknis berupa keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan bagi aparatur desa, serta rendahnya kualitas pendampingan terhadap lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat. Hambatan administrasi serta keterlambatan pelaksanaan kegiatan, ditambah dengan belum tersedianya data akurat sebagai dasar perencanaan, turut memengaruhi rendahnya capaian indikator pada sasaran ini.

4. Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal

a. Sasaran 1 : Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat

Sasaran ini didukung oleh 2 (dua) program pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Capaian program masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan anggaran yang berdampak pada pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan serta pelestarian naskah kuno secara optimal. Selain itu, rendahnya tingkat literasi masyarakat dan minimnya minat baca turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno juga terbentur hambatan teknis, seperti keterbatasan tenaga ahli konservasi dan sarana pendukung yang belum memadai. Sementara itu, kegiatan pembinaan perpustakaan masih menghadapi tantangan dalam pemerataan distribusi layanan ke seluruh wilayah kecamatan dan nagari.

b. Sasaran 2 : Peningkatan Mutu Pendidikan

Sasaran ini didukung oleh 3 (tiga) program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Rendahnya capaian program dipengaruhi oleh lemahnya koordinasi antar unit kerja teknis dan satuan pendidikan dalam pelaksanaan pengembangan kurikulum serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan. Keterbatasan

data akurat mengenai kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi guru juga menyebabkan kegiatan yang dilaksanakan belum sepenuhnya menjawab tantangan di lapangan. Selain itu, rendahnya kesadaran dan partisipasi tenaga pendidik dalam program peningkatan kualitas, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pembelajaran dan pengembangan profesionalisme guru, turut menjadi faktor penghambat pencapaian indikator mutu pendidikan.

c. Sasaran 3 : Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing

Sasaran ini didukung oleh 4 (empat) program pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM. Rendahnya capaian disebabkan oleh belum optimalnya sinergi antara dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan lembaga pelatihan kerja serta unit penempatan tenaga kerja, sehingga program penempatan tenaga kerja tidak terlaksana sesuai rencana. Di samping itu, keterbatasan data pasar kerja terkini serta ketidaksesuaian kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan industri juga menjadi kendala utama dalam meningkatkan efektivitas penempatan tenaga kerja. Kurangnya sosialisasi dan pemanfaatan sistem informasi ketenagakerjaan di kalangan pencari kerja maupun perusahaan turut berkontribusi terhadap rendahnya capaian program penempatan dan perencanaan tenaga kerja.

d. Sasaran 4 : Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga daerah

Sasaran ini didukung oleh 3 (tiga) program pada Dinas Pariwisata dan Olahraga. Rendahnya capaian dipengaruhi oleh belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi antara perangkat daerah, organisasi kepemudaan, serta cabang olahraga dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Selain itu, partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan dan olahraga masih rendah, sehingga berdampak pada minimnya realisasi capaian. Faktor lain yang turut berpengaruh adalah kurangnya inovasi program yang mampu menarik minat generasi muda, serta terbatasnya fasilitasi dan dukungan kelembagaan dalam pembinaan prestasi olahraga dan pengembangan karakter kepemudaan secara berkelanjutan.

5. Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan

a. Sasaran 1 : Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Sasaran ini didukung oleh seluruh perangkat daerah melalui berbagai program, antara lain pada Bapelitbangda, BPKD, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, perangkat daerah penunjang, serta kecamatan. Capaian sasaran ditopang oleh tata kelola pemerintahan yang relatif mapan, regulasi yang jelas, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam perencanaan, pengelolaan keuangan, pengawasan, dan pelaporan. Komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi, ditambah optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem pemerintahan

berbasis elektronik, menjadi faktor utama keberhasilan dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel.

b. Sasaran 2 : Birokrasi yang efisien dan efektif (kapabel)

Sasaran ini didukung oleh 10 (sepuluh) program, terdiri dari 2 (dua) program pada BKPSDM, 4 (empat) program pada Dinas Komunikasi dan Informatika, 3 (tiga) program pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, serta 1 (satu) program pada Sekretariat Daerah. Capaian masih belum optimal karena integrasi antar sistem informasi belum berjalan sepenuhnya dan pemanfaatan teknologi digital belum merata di seluruh perangkat daerah. Hambatan lain meliputi keterbatasan kapasitas SDM dalam penguasaan teknologi informasi serta kurangnya koordinasi lintas sektor. Meski demikian, capaian tinggi pada beberapa program, seperti pengelolaan arsip dan pengembangan aplikasi informatika, menunjukkan adanya unit kerja yang telah melaksanakan reformasi birokrasi secara efektif. Secara keseluruhan, diperlukan peningkatan integrasi sistem, penguatan kapasitas SDM, serta pemerataan infrastruktur digital untuk mewujudkan birokrasi yang kapabel, efisien, dan efektif.

c. Sasaran 3 : Birokrasi yang memiliki pelayanan publik

Sasaran ini didukung oleh 4 (empat) program pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta 1 (satu) program pada Sekretariat Daerah. Peningkatan capaian dipengaruhi oleh tingginya permintaan layanan administrasi kependudukan pasca pandemi dan semakin efektifnya penerapan sistem digitalisasi layanan, seperti pembuatan dokumen secara daring serta perluasan kerja sama dengan nagari dan kecamatan sebagai perpanjangan layanan. Capaian yang melampaui 100% mencerminkan realisasi pelayanan masyarakat yang melebihi target, terutama terkait kebutuhan administrasi untuk bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, dukungan program penunjang dari Sekretariat Daerah memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah sehingga berdampak positif terhadap kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik secara menyeluruh.

6. Misi 6 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat.

a. Sasaran 1 : Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran ini didukung oleh 4 (empat) program pada Dinas Kesehatan. Capaian yang cukup tinggi ditopang oleh pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif di tingkat nagari, seperti posyandu aktif, kader kesehatan, serta kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang mendapat partisipasi tinggi dari masyarakat. Selain itu, keberhasilan layanan kesehatan dasar oleh puskesmas dan jaringannya turut berkontribusi terhadap pencapaian indikator. Namun demikian, capaian rendah masih terlihat pada program penyediaan farmasi dan alat kesehatan yang terkendala oleh proses pengadaan dan distribusi alat serta bahan medis ke

fasilitas kesehatan. Program peningkatan SDM kesehatan juga belum optimal karena terbatasnya jumlah pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan sepanjang tahun berjalan. Keterbatasan tersebut perlu diatasi melalui perencanaan kebutuhan yang lebih matang serta penguatan kerja sama lintas sektor agar capaian sasaran di bidang kesehatan semakin merata dan berkelanjutan.

b. Sasaran 2 : Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk

Sasaran ini didukung oleh 3 (tiga) program pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga. Capaian tinggi ditopang oleh keberhasilan pelaksanaan program pengendalian penduduk dan pembinaan keluarga berencana, yang didukung oleh jaringan pelayanan KB yang tersebar merata, ketersediaan tenaga penyuluh lapangan, serta sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan BKKBN dalam kampanye maupun layanan KB. Namun, capaian rendah terlihat pada program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera, yang masih terbatas pada kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga, pelatihan keterampilan, serta rendahnya keterlibatan kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera). Keterbatasan ini juga dipengaruhi oleh belum optimalnya integrasi dengan sektor lain seperti ketenagakerjaan, UMKM, dan perlindungan sosial yang semestinya dapat memperkuat pencapaian kesejahteraan keluarga.

c. Sasaran 3 : Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Air Minum

Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program. Capaian yang tinggi diperoleh melalui pelaksanaan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan air minum yang berjalan efektif, tepat sasaran, dan melampaui target. Peningkatan koordinasi dengan Perumda Air Minum serta keterlibatan masyarakat penerima manfaat turut memastikan keberhasilan program. Selain itu, dukungan teknis dan pengawasan intensif dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjamin kualitas serta ketepatan waktu pelaksanaan. Kinerja ini semakin diperkuat oleh optimalisasi pemanfaatan sumber air baku lokal dan adanya kebijakan prioritas pemerintah daerah dalam penyediaan air minum bagi wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses.

d. Sasaran 4 : Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Capaian cukup baik karena sebagian besar kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah berhasil dilaksanakan, seperti pembangunan dan rehabilitasi jaringan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) serta sosialisasi pengelolaan sanitasi kepada masyarakat. Namun, capaian belum mencapai 100% akibat kendala teknis di lapangan, antara lain keterlambatan konstruksi, hambatan cuaca, serta lamanya proses pengadaan. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan air limbah juga

menjadi faktor penting yang memengaruhi keberhasilan penuh program ini.

e. Sasaran 5 : pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni

Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan. Capaian cukup baik karena sebagian besar target kegiatan dalam program pengembangan perumahan, seperti pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni, telah berhasil direalisasikan. Namun, capaian belum mencapai 100% akibat beberapa hambatan, antara lain keterbatasan data sasaran penerima bantuan yang valid dan mutakhir, lamanya proses verifikasi lapangan, serta tantangan koordinasi lintas sektor dan pemerintah nagari dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam mendukung program ini juga masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

f. Sasaran 6 : Penguatan Layanan Kebencanaan

Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Capaian program meningkat signifikan karena adanya intensitas bencana yang cukup tinggi sepanjang tahun, seperti banjir, longsor, dan kebakaran, yang memerlukan respons cepat serta alokasi sumber daya lebih besar dari rencana awal. Kebutuhan mendesak untuk tanggap darurat, evakuasi, distribusi logistik, dan pemulihan pasca-bencana mendorong realisasi program melampaui target. Selain itu, kolaborasi aktif dengan TNI/Polri, relawan, dan organisasi kemasyarakatan turut memperkuat efektivitas kegiatan sehingga capaian program menjadi tinggi.

g. Sasaran 7 : Pengurangan Resiko Kebakaran

Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program pada Dinas Satpol PP dan Damkar. Capaian program cukup baik karena meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran yang mendorong efektivitas kegiatan sosialisasi, patroli pencegahan, serta simulasi penanggulangan kebakaran. Selain itu, respons cepat dan kesiapsiagaan personel dalam menangani insiden kebakaran turut memperkuat kinerja program. Namun demikian, capaian belum mencapai 100% karena masih adanya keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, seperti armada pemadam dan peralatan teknis di beberapa wilayah.

h. Sasaran 8 : Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial Masyarakat

Sasaran ini didukung oleh 2 (dua) program pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Capaian tinggi dicapai berkat peningkatan signifikan dalam program perlindungan sosial, yang mencakup bantuan langsung kepada masyarakat terdampak kondisi sosial dan ekonomi. Program rehabilitasi sosial juga menunjukkan hasil positif melalui penguatan jaringan dukungan bagi kelompok rentan, seperti anak

terlantar, lansia, dan penyandang disabilitas. Pencapaian yang sangat tinggi ini turut dipengaruhi oleh peran serta masyarakat, koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat maupun LSM, serta respons cepat terhadap berbagai situasi darurat sosial dan ekonomi.

i. Sasaran 9 : Peningkatan Penanganan Masalah Sosial

Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Capaian program tinggi karena pelaksanaannya tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat terdampak bencana sosial, seperti konflik sosial, keterlantaran, dan ketidakberdayaan. Efektivitas intervensi semakin diperkuat melalui koordinasi antarperangkat daerah, sinergi dengan lembaga sosial masyarakat dan relawan, serta dukungan mekanisme pendataan yang akurat dan cepat. Hal ini memungkinkan identifikasi dan penyaluran bantuan dilakukan secara komprehensif sesuai dengan kondisi di lapangan.

7. Misi 7 : Meningkatkan Sumber-Sumber Pendanaan dan Ketepatan Alokasi Investasi Melalui Penciptaan Iklim Yang Kondusif untuk Pengembangan Usaha dan Penciptaan Lapangan Kerja

a. Sasaran 1 : Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program pada Badan Pendapatan Keuangan Daerah. Capaian tinggi diperoleh melalui optimalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah, peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan pendapatan, serta pemanfaatan teknologi informasi yang membuat administrasi perpajakan lebih transparan dan akuntabel. Inovasi layanan, seperti kemudahan pembayaran secara daring, serta intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan juga turut mendukung pencapaian target pendapatan asli daerah secara maksimal.

b. Sasaran 2 : Peningkatan Nilai Investasi di Padang Pariaman

Sasaran ini didukung oleh 5 (lima) program pada Dinas Pelayanan Modal Terpadu dan Perindustrian. Capaian tinggi terutama ditopang oleh meningkatnya minat dan kepercayaan investor terhadap potensi ekonomi Padang Pariaman, khususnya di sektor industri pengolahan dan pariwisata, yang didorong oleh kemudahan perizinan serta penguatan sistem pelayanan berbasis digital. Program pengembangan iklim penanaman modal dan pengelolaan data investasi menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, transparan, dan terpercaya. Namun demikian, capaian rendah pada program promosi penanaman modal mencerminkan belum optimalnya promosi langsung maupun partisipasi dalam event investasi regional maupun nasional. Kondisi ini dapat membatasi penyebaran informasi potensi investasi daerah kepada calon investor baru. Oleh karena itu, ke depan perlu ditingkatkan sinergi antarperangkat daerah untuk memperkuat branding

investasi dan memperluas jaringan promosi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

2.1.6 Capaian Standar Pelayanan Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2021-2024

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagai bentuk perwujudan pelayanan publik yang adil dan merata. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, sebagai bagian dari pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota, berkewajiban melaksanakan pemenuhan SPM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam urusan wajib pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.

Dalam kurun waktu tahun 2021 hingga 2024, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus berupaya meningkatkan capaian pelaksanaan SPM melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan pemantauan secara berkelanjutan. Capaian tersebut mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam menjamin pelayanan dasar yang berkualitas dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat; dan
6. Sosial

Capaian/realisasi SPM menggunakan data capaian SPM yang dirilis oleh Bagian TPKS Sekretariat daerah pada tahun 2024.

1. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh pemerintah daerah. Pemenuhan SPM di bidang pendidikan bertujuan untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan dasar yang bermutu dan merata, khususnya bagi anak usia sekolah pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP). Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen untuk memenuhi hak setiap warga negara terhadap layanan pendidikan yang layak, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan

Tabel 2.92
Realisasi SPM Bidang Pendidikan
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00%
1 .	Pendidikan Anak Usia Dini					100.00%
			Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80.00%
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	7684	7684	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%
	1. Angka partisipasi sekolah	%	73.08	73.08	0	100.00%
	2. Angka partisipasi murni	%	40	40	0	100.00%
	3. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	46.03	46.03	0	100.00%
	4. Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	83.32	83.32	0	100.00%
	5. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	2.5	2.5	0	100.00%
	6. Kecukupan formasi guru ASN	%	100	100	0	100.00%
	7. Indeks distribusi guru	%	0.5	0.5	0	100.00%
	8. Proporsi PTK bersertifikat	%	65.76	65.76	0	100.00%
	9. Proporsi PTK penggerak*	%	14.25	14.25	0	100.00%
2 .	Pendidikan Dasar					100.00%
			Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80.00%
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	61164	61164	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%
	SD					100.00%
	1. Angka partisipasi kasar	%	98.98	98.98	0	100.00%
	2. Angka partisipasi sekolah	%	93.99	93.99	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	3. Kemampuan literasi	Nilai	72.93	72.93	0	100.00%
	4. Kemampuan numerasi	Nilai	75	75	0	100.00%
	5. Perbedaan skor literasi	Nilai	7.72	7.72	0	100.00%
	6. Perbedaan skor numerasi	Nilai	13.33	13.33	0	100.00%
	7. Indeks iklim keamanan	Nilai	70.64	70.64	0	100.00%
	8. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	67.87	67.87	0	100.00%
	9. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	53.18	53.18	0	100.00%
	10. Kecukupan formasi guru ASN	%	23.32	23.32	0	100.00%
	11. Indeks distribusi guru	%	0.39	0.39	0	100.00%
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%	25.59	25.59	0	100.00%
	13. Proporsi PTK penggerak*	%	6.35	6.35	0	100.00%
	SMP					100.00%
	1. Angka partisipasi kasar	%	109.19	109.19	0	100.00%
	2. Angka partisipasi sekolah	%	99.14	99.14	0	100.00%
	3. Kemampuan literasi	Nilai	71.46	71.46	0	100.00%
	4. Kemampuan numerasi	Nilai	77.93	77.93	0	100.00%
	5. Perbedaan skor literasi	Nilai	6.56	6.56	0	100.00%
	6. Perbedaan skor numerasi	Nilai	22	22	0	100.00%
	7. Indeks iklim keamanan	Nilai	68.59	68.59	0	100.00%
	8. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	70.05	70.05	0	100.00%
	9. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	54.63	54.63	0	100.00%
	10. Kecukupan formasi guru ASN	%	25.97	25.97	0	100.00%
	11. Indeks distribusi guru	%	0.37	0.37	0	100.00%
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%	36.35	36.35	0	100.00%
	13. Proporsi PTK penggerak*	%	9.94	9.94	0	100.00%
3 .	Pendidikan Kesetaraan					100.00%
			Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80.00%
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1115	1115	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%
	1. Angka partisipasi kasar	%	0.14	0.14	0	100.00%
	2. Angka partisipasi sekolah	%	56.5	56.5	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	3. Kemampuan literasi	Nilai	51.56	51.56	0	100.00%
	4. Kemampuan numerasi	Nilai	40.03	40.03	0	100.00%
	5. Perbedaan skor literasi	Nilai	54.84	54.84	0	100.00%
	6. Perbedaan skor numerasi	Nilai	33.55	33.55	0	100.00%
	7. Indeks iklim keamanan	Nilai	60.18	60.18	0	100.00%
	8. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	57.41	57.41	0	100.00%
	9. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	49.03	49.03	0	100.00%
	10. Kecukupan formasi guru ASN	%	4.49	4.49	0	100.00%
	11. Indeks distribusi guru	%	0.07	0.07	0	100.00%
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%	0.53	0.53	0	100.00%
	13. Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	0	100.00%

Sumber : Laporan Penerapan SPM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

Beberapa permasalahan dalam pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024 antara lain:

1. Adanya kendala dalam penetapan target awal karena beberapa data susah didapat sesuai dengan periode waktu yang telah ditentukan.
   Solusi : Perlu Pengumpulan data yang lebih akurat untuk mendapatkan data yang valid.
2. Belum optimal anggaran yang tersedia dari Pemerintah daerah dalam pemenuhan pelayanan minimal di bidang pendidikan.
   Solusi : optimalisasi penggunaan dana yang bersumber dari APBD kabupaten melalui Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) dalam menunjang peningkatan SPM pendidikan .
3. Kekurangan SDM untuk menangani perhitungan dan pelaporan SPM
   Solusi : Perlu rekrutmen SDM yang mumpuni dan profesional dalam penanganan SPM.
4. Masih terbatasnya tenaga pendidik/guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga menyebabkan kebutuhan guru di satuan pendidikan terutama di daerah-daerah terpencil belum dapat dipenuhi dan masih terdapat guru yang belum memiliki kompetensi mengajar minimal S1/DIV .
   Solusi : pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik/guru melalui perekrutan seleksi CPNS atau PPPK yang di lakukan oleh pemerintah.
5. Pengumpulan data yang berkaitan dengan pencapaian SPM bidang pendidikan yang masih belum optimal karena membutuhkan data eksternal dalam mendukung akurasi data yang ada.
   Solusi : melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam mendukung pelaporan SPM dalam hal ini Dinas sosial terkait data mengenai siswa kurang mampu dan Disdukcapil terkait data anak tidak bersekolah.

2. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Bidang kesehatan merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang sangat krusial dalam menjamin derajat kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan layanan kesehatan yang

terjangkau, bermutu, dan berkesinambungan melalui pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan secara nasional. SPM bidang kesehatan mencakup 12 jenis pelayanan dasar yang wajib diberikan kepada setiap penduduk, seperti pelayanan ibu hamil, pelayanan bayi baru lahir, imunisasi dasar, hingga penanganan penyakit menular dan tidak menular.

Kabupaten Padang Pariaman terus berupaya meningkatkan capaian indikator SPM kesehatan melalui berbagai program strategis, baik melalui penguatan layanan di fasilitas kesehatan dasar seperti Puskesmas, peningkatan kapasitas SDM kesehatan, serta perluasan jangkauan layanan hingga ke wilayah terpencil. Pada sub bab ini disajikan capaian pelaksanaan SPM bidang kesehatan selama tahun 2021–2024, disertai dengan identifikasi kendala yang dihadapi serta langkah-langkah korektif yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh penduduk memperoleh pelayanan kesehatan dasar secara adil dan berkualitas.

Tabel 2.93
Realisasi SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS MADYA			85.95 %
1 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	54.58 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	9401	6414	2987	68.23%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.29 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM					96.46 %
	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	7088	3906	3182	55.11 %
	2. Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	1154520	1154520	0	100.00 %
	3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang	7088	7088	0	100.00 %
	4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	7088	7088	0	100.00 %
	5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	7088	7088	0	100.00 %
	6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	1401	1401	0	100.00 %
	7. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan	Paket	25	25	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV					
	8. Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	7088	7088	0	100.00 %
	9. Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	7088	7088	0	100.00 %
	10. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	789	789	0	100.00 %
	11. Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	627	627	0	100.00 %
	12. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)"	Orang	213	213	0	100.00 %
	13. Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	519	519	0	100.00 %
	14. Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	459	459	0	100.00 %
	15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	92	92	0	100.00 %
	16. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	50	50	0	100.00 %
	17. Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	7088	6009	1079	84.78 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					51.79 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	9342	6048	3294	64.74 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM					100.00 %
	1. Formulir partograf	Formulir	6048	6048	0	100.00 %
	2. Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	6048	6048	0	100.00 %
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	6048	6048	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	(Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)					
	4. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	6048	6048	0	100.00 %
	5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	213	213	0	100.00 %
	6. Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Paket	459	459	0	100.00 %
	7. Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	519	519	0	100.00 %
	8. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	92	92	0	100.00 %
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	50	50	0	100.00 %
3 .	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					53.68 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	8903	5974	2929	67.10 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.89 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM					99.43 %
	1. Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	6062	5677	385	93.65 %
	2. Vitamin K1 injeksi	Ampul	6062	6060	2	99.97 %
	3. Salep/tetes mata antibiotik	Orang	6062	6060	2	99.97 %
	4. Formulir bayi baru lahir	Formulir	6062	6060	2	99.97 %
	5. Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	6062	5974	88	98.55 %
	6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	6062	6060	2	99.97 %
	7. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	6062	6060	2	99.97 %
	8. Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	128	128	0	100.00 %
	9. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	459	459	0	100.00 %
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	519	519	0	100.00 %
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	92	92	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	57	57	0	100.00 %
	13. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	56	56	0	100.00 %
	14. Kader Kesehatan	Orang	3945	3945	0	100.00 %
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita					
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					58.06 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	39157	28416	10741	72.57 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					16.68 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM					83.41 %
	1. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	28416	28416	0	100.00 %
	2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	28416	28416	0	100.00 %
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang	28416	28416	0	100.00 %
	4. Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	6062	6062	0	100.00 %
	5. Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	28416	28416	0	100.00 %
	6. Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	6062	5194	868	85.68 %
	7. Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	6062	4327	1735	71.38 %
	8. Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	6062	3542	2520	58.43 %
	9. Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB - Hib	Vaksin	6062	4063	1999	67.02 %
	10. Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	6062	4803	1259	79.23 %
	11. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	6062	1669	4393	27.53 %
	12. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	6062	1958	4104	32.30 %
	13. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	5220	1573	3647	30.13 %
	14. Peralatan Anafilaktik	Paket	26	26	0	100.00 %
	15. Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	25	25	0	100.00 %
	16. Tenaga medis : Dokter	Orang	48	48	0	100.00 %
	17. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	677	677	0	100.00 %
	18. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	261	261	0	100.00 %
	19. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	43	43	0	100.00 %
	20. Guru PAUD	Orang	916	916	0	100.00 %
	21. Kader Kesehatan	Orang	3945	3945	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
5 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar					
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					68.06 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	67285	57244	10041	85.08%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.68 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu Barang / SDM					98.38 %
	1. Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/ pesantren)	Buku	57244	57244	0	100.00 %
	2. Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Buku	57244	57244	0	100.00 %
	3. Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	57244	57244	0	100.00 %
	4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/ pesantren)	Formulir	57244	57244	0	100.00 %
	5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja perPuskesmas)	Formulir	57244	57244	0	100.00 %
	6. Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	Tablet	1035	1035	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opnameyang ada di gudang farmasi kabupaten/kota)					
	7. Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat)	Alat	1035	1035	0	100.00 %
	8. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat)	Strip	1035	1035	0	100.00 %
	9. Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	1035	1035	0	100.00 %
	10. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	22049	15610	6439	70.80 %
	11. Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	48	48	0	100.00 %
	12. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	677	677	0	100.00 %
	13. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	261	261	0	100.00 %
	14. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	43	43	0	100.00 %
	15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	32	32	0	100.00 %
	16. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	57	57	0	100.00 %
	17. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	3334	3334	0	100.00 %
	18. Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	3945	3945	0	100.00 %
6 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					78.97 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	247747	244546	3201	98.71%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					18.65 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM					93.23 %
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	789	789	0	100.00 %
	2. Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	789	789	0	100.00 %
	3. Alat : Tensimeter	Unit	789	789	0	100.00 %
	4. Alat : Glukometer	Unit	789	789	0	100.00 %
	5. Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	25	25	0	100.00 %
	6. Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	61560	39250	22310	63.76 %
	7. Alat : KIT IVA Tes	Unit	25	25	0	100.00 %
	8. Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	25	25	0	100.00 %
	9. Kit Opthalmologi Komunitas	Unit	25	25	0	100.00 %
	10. Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	Dokumen	41297	3174	38123	7.69 %
	11. Alat Pelayanan KB	Unit	50	50	0	100.00 %
	12. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	61560	61560	0	100.00 %
	13. Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul	61560	61560	0	100.00 %
	14. Tenaga medis : Dokter	Orang	48	48	0	100.00 %
	15. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	677	677	0	100.00 %
	16. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	261	261	0	100.00 %
	17. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	43	43	0	100.00 %
	18. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	57	57	0	100.00 %
	19. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	3945	3945	0	100.00 %
7 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	58125	58125	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM					100.00 %
	1. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur	Paket	789	789	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter					
	2. Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	25	25	0	100.00 %
	3. Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	25	25	0	100.00 %
	4. Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	58125	58125	0	100.00 %
	5. Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / *Activity Daily Living* (ADL Barthel)	Paket	58125	58125	0	100.00 %
	6. Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	58125	58125	0	100.00 %
	7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	789	789	0	100.00 %
	8. Tenaga medis : Dokter	Orang	48	48	0	100.00 %
	9. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	677	677	0	100.00 %
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	261	261	0	100.00 %
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	43	43	0	100.00 %
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	57	57	0	100.00 %
	13. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	3945	3945	0	100.00 %
8 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					72.18 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	67791	61166	6625	90.23%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					16.57 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM					82.85 %
	1. Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	67791	17464	50327	25.76 %
	2. Obat Hipertensi	Paket	67791	17464	50327	25.76 %
	3. Tensimeter	Unit	789	789	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	(mengukur tekanan darah)					
	4. Formulir pencatatan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	67791	28905	38886	42.64 %
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	789	789	0	100.00 %
	6. Tenaga medis : Dokter	Orang	48	48	0	100.00 %
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	677	677	0	100.00 %
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	261	261	0	100.00 %
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	43	43	0	100.00 %
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	57	57	0	100.00 %
	11. Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	32	32	0	100.00 %
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	57	57	0	100.00 %
9 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	5238	5501	-263	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					15.02 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM					75.09 %
	1. Obat Diabetes Melitus	Paket	5238	1265	3973	24.15 %
	2. Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Unit	20	20	0	100.00 %
	3. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	5238	1359	3879	25.95 %
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku),	Formulir	5238	1312	3926	25.05 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)					
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	Paket	5238	1359	3879	25.95 %
	6. Tenaga medis : Dokter	Orang	48	48	0	100.00 %
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	677	677	0	100.00 %
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	261	261	0	100.00 %
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	32	32	0	100.00 %
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	57	57	0	100.00 %
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	43	43	0	100.00 %
	12. Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	43	43	0	100.00 %
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat					
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	897	897	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM					100.00 %
	1. Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) bentuk fisik atau elektronik)	Buku	897	897	0	100.00 %
	2. Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Jenus	10	10	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	3. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir	897	897	0	100.00 %
	4. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir	897	897	0	100.00 %
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)					
	6. Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	48	48	0	100.00 %
	7. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	25	25	0	100.00 %
	8. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang	25	25	0	100.00 %
	9. Tenaga profesional lainnya	Orang	25	25	0	100.00 %
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					63.21 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	19030	15035	3995	79.01%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.30 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM					96.52 %
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	25	25	0	100.00 %
	2. Reagen Zn TB	Kit	9248	15035	-5787	100.00 %
	3. Masker bedah dan Masker N95	Paket	20122	15035	5087	74.72 %
	4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	38060	27800	10260	73.04 %
	5. Katrid tes cepat molekuler	Test	9248	15035	-5787	100.00 %
	6. Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	462	462	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	6	6	0	100.00 %
	8. Tuberkulin	Vial	37	37	0	100.00 %
	9. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	27	27	0	100.00 %
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	27	27	0	100.00 %
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	27	27	0	100.00 %
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	27	27	0	100.00 %
	13. Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	27	27	0	100.00 %
	14. Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	2	2	0	100.00 %
	15. Kader Kesehatan	Orang	47	47	0	100.00 %
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)					
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					66.83 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	10001	8355	1646	83.54%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.01 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM					95.06 %
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	25	25	0	100.00 %
	2. Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test	10001	8355	1646	83.54 %
	3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	10001	8355	1646	83.54 %
	4. Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	10001	8355	1646	83.54 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	27	27	0	100.00 %
	6. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	5	5	0	100.00 %
	7. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	27	27	0	100.00 %
	8. Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	27	27	0	100.00 %
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	25	25	0	100.00 %
	10. Tenaga non kesehatan Terlatih/ Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	2	2	0	100.00 %

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

Beberapa permasalahan dalam pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024 antara lain:

1. Masalah Sumber Daya Manusia Kesehatan

   Masalah yang terkait dengan SDM menyangkut kuantitas, kualitas, jenis dan distribusi. Kualitas tenaga kesehatan yang ada dan tersebar di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama belum memadai. Dan masih kurangnya kapasitas SDM di FKTP. Di beberapa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) masih kekurangan tenaga Bidan Desa, Dokter, Apoteker, Bidan, Ahli Gizi, Analis Kesehatan dan tidak tersedianya tenaga administrasi dan tenaga pengelola keuangan di FKTP sehingga beban kerja tenaga kesehatan meningkat. Distribusi tenaga kesehatan belum merata, hal ini dapat dilihat dari Rencana Kebutuhan masing-masing FKTP. Walaupun ini menjadi masalah setiap tahunnya, tetapi pada tahun 2024 ada penambahan tenaga kesehatan dari tenaga Nusantara Sehat.

2. Sumber Daya Alam dan Budaya Masyarakat

   Sumber Daya Alam yang di maksud adalah Sumber Daya Alam yang berhubungan langsung dengan kelangsungan hidup manusia, seperti kurangnya ketersediaan air minum bersih, kurangnya ketersediaan jamban, kondisi geografis yang sulit dijangkau oleh pelayanan kesehatan. Selain itu adalah budaya masyarakat yang sulit atau lamban menerima pendidikan kesehatan melalui penyuluhan individu, kelompok atau massal. Semua hal itu menyebabkan masyarakat tidak menerima perubahan perilaku. Hal ini menjadi penghambat yang sulit dirubah, dimana masyarakat belum menjadikan kesehatan sebagai kebutuhan utama dan

kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan perubahan perilaku. Munculnya kesadaran masih berawal dari sesering berapa kali mereka menderita sakit baru muncul kesadaran. Sedangkan kesadaran yang ditimbulkan oleh paparan informasi kesehatan sangat rendah. Cukup sulit dan membutuhkan waktu yang lama merubah *mindset* masyarakat jika hanya melalui penyuluhan dalam frekuensi terbatas

3. Keterbatasan Peralatan Kesehatan yang layak pakai

   Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala alat kesehatan di FKTP juga merupakan satu kegiatan yang penting dilaksanakan, mengingat banyak alat kesehatan di FKTP yang tidak layak fungsi sehingga menghambat kegiatan pelayanan kesehatan yang ada di FKTP.

4. Belum Optimalnya Koordinasi Lintas Sektor

   Keterlibatan lintas sektor terkait dalam kegiatan pemberantasan dan penanggulangan beberapa penyakit seperti Penyakit Tidak Menular maupun Penyakit Menular dalam penanganan masalah kesehatan tersebut masih kurang. Koordinasi lintas sektor terkait dalam konteks ini adalah memerangi perilaku dan faktor beresiko mulai dari diri sendiri sampai keseluruh masyarakat. Untuk mencapai hal itu harus membutuhkan keterlibatan berbagai pihak untuk menjadi model Perilaku Hidup Bersih dan Sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat.

5. Belum optimalnya pelaksanaan SOP pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan di FKTP

   Pembuatan SOP di FKTP merupakan salah satu satu standar *good serve* di Puskesmas yang sudah terakreditasi. Namun dalam impelementasinya FKTP masih belum memanfaatkan SOP yang dibuat dengan maksimal.

6. Masih kurangnya anggaran yang diperuntukkan bagi bidang kesehatan sehingga berdampak pada capaian kinerja dan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

   Dengan berbagai masalah dan hambatan di atas menyebabkan masih belum maksimalnya pelayanan Pemerintah di Bidang Kesehatan. Oleh karena itu solusi untuk mengantisipasi masalah dan hambatan di atas adalah:

   a. Peningkatan SDM Kesehatan melalui Pendidikan dan Pelatihan teknis bidang kesehatan untuk tenaga kesehatan sesuai kebutuhan seperti Bidan Desa, Dokter Umum, Dokter Gigi, Tenaga Ahli Gizi, Apoteker, Analis Kesehatan, Tenaga Administrasi dan pengelola keuangan sehingga dapat mengatasi masalah ketersediaan SDM Kesehatan yang bermutu. Sedangkan untuk penyebaran tenaga dilakukan pemetaan dan pembuatan rencana kebutuhan tenaga oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.
   b. Ketersediaan Sumber Daya Alam yang terbatas seperti air bersih dan jamban, sudah diusulkan melalui kegiatan PAMSIMAS. Untuk merubah perilaku masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten

Padang Pariaman terus melakukan kegiatan promosi kesehatan di seluruh aspek tatanan kehidupan masyarakat.

c. Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor dengan melakukan pertemuan rutin dan juga melibatkan masyarakat/ memberdayakan masyarakat dalam setiap kegiatan pelayanan kesehatan agar program PAPA Sehat dapat terlaksana dengan baik.
d. Melaksanakan atau menerapkan Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan di evaluasi oleh Dinas Kesehatan
e. Upaya peningkatan PHBS masyarakat melalui Kegiatan GERMAS
f. Perlu adanya penambahan anggaran untuk Bidang Kesehatan dan ditetapkan melalui regulasi
g. Upaya peningkatan indeks PIS PK melalui kegiatan SABERMAS Baru

3. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum

Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pekerjaan umum merupakan bagian dari urusan wajib pelayanan dasar yang ditujukan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat atas layanan infrastruktur, khususnya yang berkaitan dengan akses terhadap air minum dan sistem air limbah domestik. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan pelayanan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna mendukung kualitas hidup masyarakat dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen melaksanakan SPM bidang pekerjaan umum melalui penyediaan infrastruktur air minum yang layak serta pengelolaan sistem air limbah yang memenuhi standar kesehatan dan lingkungan. Pelaksanaan SPM ini mencakup perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem pelayanan yang berorientasi pada peningkatan cakupan dan kualitas layanan kepada masyarakat. Sub bab ini menyajikan capaian pelaksanaan SPM bidang pekerjaan umum dari tahun 2021 hingga 2024, termasuk identifikasi tantangan serta langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan untuk menjamin keberlanjutan layanan infrastruktur dasar bagi seluruh masyarakat

Tabel 2.94
Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					100.00 %
1 .	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					100.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	2384	2384	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani /Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM					100.00 %
	JARINGAN PERPIPAAN					
	1. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	596	596	0	100.00 %
	2. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	596	596	0	100.00 %
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN					
	1. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	0	0	0	100.00 %
	2. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	0	0	0	100.00 %
2 .	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					100.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	96	96	0	100.00
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani /Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM					100.00 %
	1. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	24	24	0	100.00 %
	2. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga	0	0	0	100.00 %
	3. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	24	24	0	100.00 %

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

Beberapa permasalahan dalam pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024 antara lain:

1. Penghitungan kebutuhan air minum dan air limbah domestik sesuai dengan Rencana Strategis Dinas PUPR.
2. Pembangunan SPAM dan Air Limbah Domestik sesuai dengan dokumen perencanaan.
3. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dipergunakan untuk Pembangunan Pipa Distribusi.

4. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan rakyat merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak dasar masyarakat atas hunian yang layak, aman, dan sehat. Sebagai bagian dari urusan wajib pelayanan dasar, penyelenggaraan SPM ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan akses terhadap perumahan,

serta meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus mengupayakan pemenuhan SPM perumahan rakyat melalui berbagai program pembangunan dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) permukiman, serta fasilitasi akses terhadap pembiayaan dan bantuan perumahan. Dalam sub bab ini akan dipaparkan capaian pelaksanaan SPM bidang perumahan rakyat dari tahun 2024, termasuk tantangan yang dihadapi dan strategi yang ditempuh untuk memastikan setiap warga dapat memperoleh tempat tinggal yang layak sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

Tabel 2.95
Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					100.00 %
1	Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00 %
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Terlayani**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	372	372	0	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA /SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	93	93	0	100.00 %
	2. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	100.00 %
	3. Pemukiman kembali bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	100.00 %
	4. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	100.00 %
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat					100.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
	Ada Relokasi Program Pemerintah					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	22	22	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/ DIPENUHI					100.00 %
	1. Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	12	12	0	100.00 %
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal);	Rumah	4	4	0	100.00 %
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan	Rumah	4	4	0	100.00 %
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Rumah	4	4	0	100.00 %
	2. Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Rumah	0	0	0	100.00 %

Sumber : Dinas DLHKPP Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

Beberapa permasalahan dalam pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024 antara lain:

1. Belum optimalnya pendataan SPM terkait dengan rumah yang terkena bencana pada tahun 2024 serta rumah yang berada lokasi rawan bencana.
2. Terbatasnya anggaran dalam perekrutan tim tenaga ahli dan tenaga surveyor untuk pengumpulan data rumah yang terkena bencana serta rumah yang berada di lokasi rawan bencana.
3. Kurangnya SDM yang menangani kegiatan SPM bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

4. Masih rendahnya jumlah sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan di bidang perumahan

Solusi dalam permasalahan penerapan SPM bidang Perumahan ini adalah:

1. Terkait data SPM Korban bencana tersebut dengan segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti BPBD.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas personil yang menangani bidang perumahan.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan bidang perumahan.

5. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjamin rasa aman, tertib, dan terlindunginya masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. SPM ini mencakup penyediaan layanan yang cepat dan responsif dalam penanganan gangguan ketertiban umum, potensi konflik sosial, serta upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pelaksanaan SPM bidang ini dijalankan oleh perangkat daerah yang berwenang melalui program-program yang bertujuan memperkuat kapasitas aparat penegak Perda, meningkatkan kesiapsiagaan dan respons kebencanaan, serta memastikan kehadiran layanan perlindungan masyarakat yang mudah dijangkau. Dalam sub bab ini akan dijabarkan capaian penyelenggaraan SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat pada tahun 2024, termasuk tantangan teknis maupun non-teknis yang dihadapi, serta langkah-langkah strategis yang diambil untuk menjamin layanan ini dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan secara nasional.

Tabel 2.96
Realisasi SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					100.00%
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	16	16	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/ SDM) YANG HARUS DILAYANI/ DIPENUHI					100.00%
	1. Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	Unit	27	27	0	100.00%
	2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	7	7	0	100.00%
	3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi	Orang	50	50	0	100.00%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlin mas)					
	4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	1	1	0	100.00%
	5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang	0	0	0	100.00%
	6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	Orang	0	0	0	100.00%
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR					100.00%
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	16	16	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG / JASA /SDM) YANG HARUS DILAYANI/ DIPENUHI					100.00%
	1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layanan	15	15	0	100.00%
	2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	Dokumen	1	1	0	100.00%
	3. Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh: mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	Unit	84	84	0	100.00%
	4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	40	40	0	100.00%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	5. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran(korban jiwa langsung)	Layanan	16	16	0	100.00%
	6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan	16	16	0	100.00%

Sumber : BPBD dan Satpol PP Damkar Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

Beberapa permasalahan dalam pencapaian SPM Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Tahun 2024 antara lain:

1. Kurangnya anggaran dalam pembelian alat sarana dan prasarana salah satunya adalah mobil rescue, sehingga dapat menghambat dalam mendukung proses penyelamatan dan evakuasi korban bencana, yang jenis layanan tersebut terdapat di dalam salah satu SPM penanggulangan bencana.
2. Masih banyaknya anggota terutama THL yang tidak paham dengan SOP dalam menjalankan kegiatan di lapangan sehingga kadang terjadi kesalahan komunikasi dalam penindakan dan menyebabkan hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan rencana target. Hal ini terjadi karena kegiatan pelatihan peningkatan SDM anggota belum terakomodir dengan alasan rasionalisasi dan anggaran daerah dalam keadaan defisit dan penundaan kegiatan non prioritas.
3. Belum adanya rencana induk sistem pemadam kebakaran sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Pemadam Kebakaran sebagai Pelayan masyarakat dalam Peningkatan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban umum masyarakat
4. Sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran belum sesuai dengan standarisasi pelayanan minimum (SPM) pemadam kebakaran;
5. Peningkatan kesejahteraan keselamatan personil damkar belum sebanding lurus dengan resiko kerja yang tinggi;
6. Belum tersosialisasikannya tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran baik di tiap OPD, Nagari dan masyarakat sehingga mengakibatkan keberadaan Dinas pemadam Kebakaran belum teroptimalkan dalam pelayanan langsung terhadap masyarakat.

6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial merupakan upaya pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap warga

masyarakat mendapatkan perlindungan sosial yang layak dan dapat mengakses bantuan sosial sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam konteks Kabupaten Padang Pariaman, SPM bidang sosial mencakup berbagai layanan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, antara lain melalui program rehabilitasi sosial, bantuan sosial untuk masyarakat miskin, serta pemberdayaan kelompok rentan, seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, dan perempuan yang menjadi korban kekerasan.

Pelaksanaan SPM ini diharapkan dapat menciptakan sistem perlindungan sosial yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dalam sub bab ini akan dibahas capaian pelayanan yang telah diberikan, kendala yang dihadapi, serta upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial guna mencapai standar pelayanan yang optimal, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pencapaian ini mencakup pemberian layanan yang cepat, tepat, dan adil, serta memastikan distribusi bantuan sosial yang merata di seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 2.97
Realisasi SPM Bidang Sosial
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					100%
1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti					100%
			Jumlah Total	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	74	74	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20%
			Jumlah Mutu Yg Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani /Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM					100%
	1. Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	74	74	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	2. Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/ atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/ nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/ orang/hari)	Orang	74	74	0	100.00 %
	3. Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/ atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)	Orang	2	2	0	100.00 %
	4. Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	29	29	0	100.00 %
	5. Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	15	15	0	100.00 %
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan	Orang	2	2	0	100.00 %
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/ olahraga/ outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang	Orang	34	34	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)					
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	34	34	0	100.00 %
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	2	2	0	100.00 %
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	2	2	0	100.00 %
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	2	2	0	100.00 %
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	2	2	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	13. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	2	2	0	100.00 %
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti					100.00 %
			Jumlah Total Yg Harus Dilayani	Jumlah Total Yg Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	141	141	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20%
			Jumlah Mutu Yg Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yg Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM					100.00 %
	1. Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	141	141	0	100.00 %
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	Orang	2	2	0	100.00 %
	3. Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/ atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan/ nama lain dan disesuaikan dengan indeks	Orang	61	61	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	permakanan/ orang/ hari)					
	4. Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	80	80	0	100.00 %
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2	2	0	100.00 %
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	33	33	0	100.00 %
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	33	33	0	100.00 %
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1	1	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/ rumah sakit)	Orang	1	1	0	100.00 %
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	2	2	0	100.00 %
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	2	2	0	100.00 %
	12. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	2	2	0	100.00 %
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti.					100.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	161	161	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani /Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani /Terpenuhi	100.00 %
	1. Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan	Orang	161	161	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Sosial					
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar)	Orang	2	2	0	100.00 %
	3. Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/ nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/ hari)	Orang	161	161	0	100.00 %
	4. Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	121	121	0	100.00 %
	5. Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	15	15	0	100.00 %
	6. Penyediaan perbekalan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya dengan kebutuhan)	Orang	1	1	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	33	33	0	100.00 %
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/ nama lain, dan/ atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	33	33	0	100.00 %
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1	1	0	100.00 %
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	1	1	0	100.00 %
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	2	2	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	2	2	0	100.00 %
	13. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	2	2	0	100.00 %
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti:					100.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	1	1	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani /Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani /Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM					100.00 %
	1. Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	1	1	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	Orang	1	1	0	100.00 %
	3. Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan/ nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/ orang/ hari)	Orang	1	1	0	100.00 %
	4. Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	1	1	0	100.00 %
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan	Orang	1	1	0	100.00 %
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental,spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	1	1	0	100.00 %
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	1	1	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)					
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	1	1	0	100.00 %
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	1	1	0	100.00 %
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang	1	1	0	100.00 %
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	1	1	0	100.00 %
	12. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	1	1	0	100.00 %
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	10795	10795	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani /Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani /Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani /Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM					100.00 %
	1. Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam,bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	10795	10795	0	100.00 %
	2. Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	10795	10795	0	100.00 %
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Unit	3	3	0	100.00 %
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu,toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	5	5	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	5. Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan,edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang	5	5	0	100.00 %

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Beberapa permasalahan dalam pencapaian SPM Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Tahun 2024 antara lain:

1. Belum terdapat data terbaru mengenai Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar dan Gelandangan Pengemis. Pengurangan ataupun penambahan data belum terbarukan dengan maksimal. Data mengenai Gelandangan dan Pengemis juga susah untuk dikumpulkan mengingat Tuna Sosial yang bukan berasal dari Kabupaten Padang Pariaman namun sehari-hari beraktivitas di wilayah Kabupaten. Begitu juga sebaliknya, Tuna Sosial yang berasal dari Kabupaten Padang Pariaman namun tidak beraktivitas di wilayah Kabupaten. Selain itu terbatasnya SDM untuk mengumpulkan data tersebut juga menjadi kendala tersendiri
2. Minimnya anggaran, dan bantuan logistik dari pusat untuk masing-masing kegiatan. Untuk kebencanaan, tidak tertutup kemungkinan setiap tahunnya ada kasus dimana Korban Bencana tidak mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Korban Bencana. Selain itu keterlambatan laporan kejadian bencana dari Nagari juga menjadi kendala dan menyebabkan keterlambatan pemberian Bantuan Perlindungan Sosial Korban Bencana

2.1.7 Capaian SDGs Tahun 2021-2024

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan komitmen global yang menjadi acuan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman secara konsisten mendukung pencapaian 17 tujuan dan 169 target SDGs yang mencakup berbagai aspek pembangunan seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, kesetaraan gender, pertumbuhan ekonomi, hingga pelestarian lingkungan.

Pada periode 2021–2024, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip SDGs ke dalam dokumen perencanaan daerah serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Capaian SDGs di Kabupaten Padang Pariaman selama periode ini menunjukkan kemajuan yang bervariasi pada masing-masing tujuan, yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal seperti kapasitas fiskal, koordinasi antar pemangku kepentingan.

2.1.7.1 Indikator TPB Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional

Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) di Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan progres positif dalam beberapa indikator prioritas. Sejumlah indikator telah berhasil dilaksanakan secara konsisten dan bahkan telah mencapai atau melampaui target nasional yang ditetapkan. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah dalam mengarusutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan lintas sektor.

Pencapaian ini tidak terlepas dari sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, perangkat daerah terkait, lembaga non-pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Indikator-indikator yang telah mencapai target nasional mencakup antara lain bidang pendidikan, kesehatan, pengurangan kemiskinan, serta penguatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan.

Tabel 2.98
Indikator TPB Capaian SS
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2023

No	No. Indikator	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2020	2021	2022	2023	Capaian	Ket
1	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	6,95%	7,22%	6,25%	6,34%	SS	
2	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Meningkat menjadi 17,12%	100%	100%	100%	100%	SS	
3	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Menurun menjadi 2,8 juta	14774 KPM	17452 KPM	19349 KPM	17833 KPM		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat
4	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 70%	99,93%	94,45%	96,90%	99,29%	SS	
5	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Meningkat menjadi 63%.	61,10%	60,70%	82,00%	68,00%	SS	
6	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	Meningkat menjadi 94,78%	87,47%	98,99%	99,26%	99,15%	SS	
7	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun	Meningkat menjadi	88,41%	94,28%	93,78%	92,6%	SS	

No	No. Indikator	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2020	2021	2022	2023	Capaian	Ket
		dengan kepemilikan akta kelahiran.	77,4%.						
8	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkat menjadi 39 daerah	0	14	14	14	SS	Jumlah kecamatan
9	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 151 ribu	140 Jiwa	94 Jiwa	404 jiwa	13883 jiwa	SS	Semua korban bencana menerima bantuan
10	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 81,5 ribu	140 Jiwa	94 Jiwa	404 jiwa	13883 jiwa	SS	Semua korban bencana pendampingan
11	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada	ada	ada	ada	ada	SS	Dokumen KRB, PRB
12	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Meningkat	0,69%	0,70%	0,84%	0,93%	SS	
13	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Meningkat	63%	59%	55%	64%	SS	
14	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Menurun menjadi 17%	2,97%	5,80%	6,63%	7,67%	SS	
15	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Menurun menjadi 28%	14,94%	8,99%	8,36%	9,93%	SS	
16	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Menurun menjadi 28%	9,46%	9,47%	6,94%	8,23%	SS	
17	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Meningkat menjadi 50%	100%	67%	68%	69%	SS	
18	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Menurun menjadi 306	131,44	159,09	45,59	0	SS	Per 1000 kelahiran hidup
19	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkat menjadi 95%	99,93%	94,45%	96,90%	99,29%	SS	
20	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 85 %	99,93%	94,45%	96,90%	99,29%	SS	
21	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	0,8	1,06	1,4	0,26	SS	Per 1000 kelahiran hidup
22	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	2,14	3	4	0,17	SS	Per 1000 kelahiran hidup
23	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun menjadi 24	0,6	0,29	1,17	0,25	SS	Per 1000 kelahiran hidup
24	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Menurun menjadi <0,5%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	SS	
25	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000	Menurun menjadi 245	134,36	176,93	195,89	201,44	SS	Per 100.000 jiwa

No	No. Indikator	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2020	2021	2022	2023	Capaian	Ket
		penduduk.							
26	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Menurun	0	0	0	0	SS	Tidak terjadi kasus malaria
27	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Meningkat menjadi 300	100%	100%	100%	100%	SS	Tidak terjadi kasus malaria
28	3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Meningkat	100%	100%	100%	100%	SS	
29	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Menurun	80%	55%	93%	82%	SS	
30	3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Meningkat menjadi 34 provinsi	0.17	0.28	0.31	18 (0.4)	SS	Jumlah Temuan
31	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis	Meningkat menjadi 35.	1	1	1	1	SS	
32	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Meningkat menjadi 280	100%	100%	100%	100%	SS	
33	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Menurun menjadi angka 0,02%	0,016%	0,018%	0,018%	0,018%	SS	
34	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Meningkat menjadi 66%	34,44%	34,54%	65,29%	65,89%	SS	
35	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	65,56%	65,69%	65,29%	66,19%	SS	
36	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurun menjadi 38	2,42	2,73	2,15	1,73	SS	
37	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Meningkat	73,3%	72,3%	73,9%	78,2%	SS	
38	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Menurun	0	0	0	0	SS	
39	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Meningkat	100%	100%	100%	100%	SS	
40	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Meningkat	1,73	1,88	2,86	5,02	SS	Per 1000 penduduk

No	No. Indikator	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2020	2021	2022	2023	Capaian	Ket
41	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Meningkat				65,21; 64,9. 47,95;4 4,45	SS	Untuk tahun sebelumnya data belum tersedia.
42	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 8,8 tahun	7,87 tahun	7,88 tahun	8,16 tahun	9 tahun	SS	
43	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Meningkat	NA	62,22%	62,18%	62,76%	SS	
44	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 96,1%	98,64%	98,54%	98,61%	98,02%	SS	
45	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Meningkat	98,64%	98,54%	98,61%	99,71%	SS	
46	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	bertambah sebanyak 16	1	1	1	1	SS	
47	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	0,02%	0,02%	0,01%	0,004%	SS	
48	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurun menjadi kurang dari 20,48%	0,053%	0,107%	0,068%	0,049%	SS	
49	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	0,003%	0,012%	0,007%	0,004%	SS	
50	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Meningkat menjadi 70%	100%	100%	100%	100%	SS	
51	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Meningkat menjadi 21 tahun	NA	25,4 tahun	25,5 tahun	25,23 tahun	SS	
52	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurun menjadi 38 tahun	`14	6,31	2,34	3,18	SS	
53	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkat	23%	26%	30%	32%	SS	
54	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Meningkat	NA	76%	79%	82%	SS	

No	No. Indikator	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2020	2021	2022	2023	Capaian	Ket
55	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Meningkat menjadi 118,6 m3/detik	6100 m^3/s	6100 m^3/s	6100 m^3/s	6100 m^3/s	SS	
56	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Meningkat	65%	70%	77%	80%	SS	
57	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)	82	89	92	94	SS	Jumlah kelurahan
58	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Meningkat	1	19	19	31	SS	Jumlah kelurahan
59	6.2.1.(e)	Jumlah kecamatan yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Meningkat.	NA	NA	13	13	SS	Jumlah kecamatan
60	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Meningkat	79,03%	79,59%	75,14%	75,66%	SS	
61	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Meningkat	55,41	58,95	53,81	60,59	SS	Nilai IKA
62	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	8 WS	NA	NA	NA	10	SS	
63	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	10 WS (skala nasional)	5	5	5	5	SS	
64	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	Rp 41,26 juta	Rp 42,13 juta	Rp 49,63 juta	Rp 55,54 juta	SS	
65	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Meningkat	-13,22	3,576	-3,27	0,99	SS	
66	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Meningkat	Rp 62101,03	Rp 62101,03	Rp 62813,48	Rp 68561,9	SS	
67	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Menurun	13,86%	14,49%	14,41%	12,97%	SS	
68	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)	64	22	29	149	SS	Jumlah wisatawan
69	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Meningkat	208808	152185	725564	773695	SS	Jumlah wisatawan
70	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Meningkat	NA	212	220	828	SS	Jumlah pekerja
71	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Meningkat	31	35	37	37	SS	Jumlah ATM dan Kantor Bank

No	No. Indikator	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2020	2021	2022	2023	Capaian	Ket
72	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Meningkat	0,001%	0,001%	0,0048 %	0,1213%	SS	
73	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Meningkat	98,05%	98,05%	98,05%	100,00%	SS	
74	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Meningkat	NA	76%	79%	82%	SS	
75	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Meningkat	NA	76%	79%	82%	SS	
76	10.1.1*	Koefisien Gini.	Menurun menjadi 0,36	0,257	0,269	0,245	0,256	SS	
77	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	6,95%	7,22%	6,25%	6,34%	SS	
78	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Berkurang sebanyak 5.000 desa (skala nasional)	4	2	1	1	SS	Masih ada 1 desa tertinggal. (Sungai Buluah Timur)
79	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Meningkat paling sedikit 2.000 desa	1	3	5	7	SS	
80	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	ada	0	0	0	0	SS	
81	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta	75%	51%	93%	100%	SS	
82	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	3,7 juta rumah tangga	1,73%	1,66%	1,63%	2,09%	SS	
83	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	ada	ada	ada	ada	ada	SS	
84	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Meningkat/ ada	4	4	4	4	SS	Proporsi menurun dari tahun 2022 ke tahun 2023.
85	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	ada	ada	ada	ada	ada	SS	Tidak ada kebijakan yang diskriminatif. Seharusnya target perpres tidak ada.
86	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	20 ton per hari (skala nasional)	0,23 ton	0,34 ton	0,4 ton	1,78 ton	SS	
87	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Meningkat	NA	NA	8	8	SS	

No	No. Indikator	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2020	2021	2022	2023	Capaian	Ket
88	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada	ada	ada	ada	ada	SS	
89	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Meningkat		21%	23,70%	23,70%	SS	
90	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Meningkat	ada	ada	ada	ada	SS	
91	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Menurun	3	3	0	0	SS	
92	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Menurun	0	0	0	0	SS	
93	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Menurun	24	33	31	25	SS	Jumlah kasus
94	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurun	0,03%	0,06%	0,042%	0,038%	SS	
95	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Menurun	0,033%	0,055%	0,047%	0,034%	SS	
96	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Meningkat	97,47%	92,84%	92,50%	93,64%	SS	
97	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/ Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65%	WTP	WTP	WTP	WTP	SS	
98	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/ Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50%	B	B	B	B	SS	
99	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkatk menjadi: Kementerian/ Lembaga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45%	54,32	59,31	61,37	65,04	SS	
100	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil,	Meningkat			99,36%	99,51%	SS	

No	No. Indikator	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2020	2021	2022	2023	Capaian	Ket
		menurut umur.							
101	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Meningkat menjadi 77,4%	88,41%	94,28%	93,78%	92,6%	SS	
102	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Meningkat menjadi 85%	92%	95%	97,60%	97,94%	SS	
103	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	ada	0	0	0	0	SS	Tidak ada kebijakan yang diskriminatif. Seharusnya target perpres tidak ada
104	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Meningkat	0,59%	0,63%	0,57%	0,60%	SS	
105	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Meningkat	3,58%	3,86%	4,39%	5,06%	SS	
106	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% populasi	NA	36%	38%	40%	SS	
107	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi.	98%	98%	98%	100%	SS	
108	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Meningkat	NA	76%	79%	82%	SS	
109	17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	100%	100%	100%	100%	100%	SS	
110	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Meningkat	93,43%	91,94%	95,53%	100%	SS	
111	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Meningkat	93,55%	100%	100%	100%	SS	
112	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Meningkat	11	11	13	14	SS	
113	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (*Vital Statistics Register*)	ada	ada	ada	ada	ada	SS	

No	No. Indikator	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2020	2021	2022	2023	Capaian	Ket
114	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Meningkat	15508	12663	18904	22471	SS	Jumlah Pengunjung
115	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Meningkat	100%	100%	100%	100%	SS	

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Padang Pariaman, 2025

2.1.7.2 Indikator TPB Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional

Kabupaten Padang Pariaman telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengimplementasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Meskipun berbagai upaya telah dilaksanakan secara sistematis, terdapat sejumlah indikator TPB yang sudah dijalankan namun capaiannya belum memenuhi target nasional. Bagian ini akan menguraikan indikator-indikator tersebut beserta analisis kesenjangan yang terjadi.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan TPB di Kabupaten Padang Pariaman, teridentifikasi beberapa indikator yang menunjukkan kemajuan signifikan namun masih berada di bawah target nasional. Kesenjangan ini menjadi fokus perhatian dalam penyusunan strategi percepatan pencapaian TPB ke depan.

Indikator-indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional di Kabupaten Padang Pariaman dapat diklasifikasikan berdasarkan pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu pilar sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Pada pilar sosial, indikator seperti penurunan angka kematian ibu dan bayi, akses pendidikan menengah, serta penurunan kesenjangan gender telah menunjukkan tren positif, namun masih memerlukan intervensi yang lebih intensif.

Tabel 2.99
Indikator TPB Capaian SB
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2023

No	No. Indikator	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2020	2021	2022	2023	Capaian	Ket
1	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkat menjadi 95%	44%	46,02%	59,74%	59,91%	SB	
2	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	75,12%	50,56%	93,06%	79,46%	SB	
3	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	63%	66%	53%	52%	SB	

No	No. Indikator	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2020	2021	2022	2023	Capaian	Ket
4	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	73%	70%	48%	51%	SB	
5	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	54%	53%	51%	50%	SB	
6	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	Meningkat menjadi 82,2%	58,38	77,18	77,27	78,22	SB	
7	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Meningkat menjadi 100%	n.a	404	404	15	SB	Jumlah RT
8	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	0,00553	0,00178	0,00632	0,17832	SB	
9	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	Rp 6.169.000.000	Rp 5.637.000.000	Rp 1.829.500.000	Rp 6.278.115.000	SB	
10	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Menurun	5,55%	5,61%	6,95%	7,41%	SB	
11	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Menurun	15,90%	9,45%	9,04%	9,50%	SB	
12	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Menurun	7,96%	4,13%	3,87%	4,34%	SB	
13	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	79,2	79,1	83,7	81,4	SB	Skor PPH
14	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Meningkat menjadi 95%	36,6%	60,7%	63,2%	39,0%	SB	
15	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Menurun menjadi 5,4%	1,07%	3,75%	3,74%	33,00%	SB	
16	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Menurun menjadi 24,3%	22%	22%	22%	85,1%	SB	
17	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Menurun	21,8%	21,8%	21,8%	59.591= 97%	SB	
18	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Menurun	4	6	5	6	SB	Jumlah kasus
19	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Meningkat menjadi 23,5%	18%	18%	16%	17%	SB	
20	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Menurun menjadi 2,28	2,28	2,28	1,93	1,89	SB	

No	No. Indikator	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2020	2021	2022	2023	Capaian	Ket
21	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkat menjadi minimal 95%	73%	72%	74%	78%	SB	
22	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 84,2%	85,01%	84,95%	84,75%	84,13%	SB	
23	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 81%	78%	80%	77%	77%	SB	
24	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	Meningkat menjadi 114,09%	100,08%	108,92 %	110,92 %	110,54 %	SB	
25	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	Meningkat menjadi 106,94%	87,12%	93,6%	88,36%	95,49%	SB	
26	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkat menjadi 77,2%	19,19%	24,50%	25,14%	24,25%	SB	
27	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Meningkat	1. SD= 100.08 2.SMP= 87,12	1. SD= 97,4 2.SMP= 84	1. SD= 95 2.SMP= 60	1.SD =91,24 2. SMP =50,37	SB	
28	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Meningkat	100%	100%	100%	100%	SB	
29	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Meningkat	85%	88%	89%	53%	SB	
30	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Meningkat	0	0	0	0	SB	
31	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Menurun menjadi 9,9%	14%	16%	16%	16%	SB	
32	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkat menjadi 85%	85,00%	83,60%	85,00%	65,89%	SB	
33	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkat menjadi 100%	73,25%	70,45%	48,45%	50,62%	SB	
34	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	88,73%	86,09%	88,22%	87,19%	SB	

No	No. Indikator	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2020	2021	2022	2023	Capaian	Ket
35	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkat menjadi 100%	59,72%	55,86%	59,76%	61,77%	SB	
36	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Meningkat	-3,5%	-0,41%	1,72%	0,55%	SB	
37	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	51%	66,93%	66,66%	66,66%	36,29%	SB	
38	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun	2,84%	2,68%	3,75%	4,15%	SB	
39	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Meningkat	NA	NA	NA	5,10%	SB	
40	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Menurun (mendekat)	3 km	3 km	3 km	3 km	SB	
41	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Meningkat	11,19%	11,95%	10,92%	10,48%	SB	
42	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	0,38%	-0,72%	9,95%	-0,77%	SB	
43	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Meningkat	3,67%	3,65%	3,77%	3,85%	SB	
44	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Meningkat	5,23%	4,86%	4,14%	3,76%	SB	
45	10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	80 Kabupaten (skala nasional)	4	2	1	0	SB	
46	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	0,00553	0,00178	0,00632	0,17832	SB	Per 100.000 penduduk
47	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurun menjadi 30%	167,21	156,73	156,73	161,48	SB	
48	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	Rp 6.169.000.000	Rp 5.637.000.000	Rp 1.829.500.000	Rp 6.278.115.000	SB	
49	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkat menjadi 80%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	SB	
50	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	0,00553	0,00178	0,00632	0,17832	SB	Per 100.000 penduduk
51	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	5,5 juta ha (skala nasional)	0,002%	0,003%	0,003%	0,003%	SB	
52	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	116	116	123	150	SB	Jumlah kasus yang terlapor
53	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Meningkat menjadi 4,0	3,84	3,88	3,93	3,92	SB	
54	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Menjadi menjadi 80%		8,52%	9,94%	14,97%	SB	
55	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga	Meningkat menjadi: Kementerian: 100%,	4,55	4,49%	4,56%	3,88%	SB	

No	No. Indikator	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2020	2021	2022	2023	Capaian	Ket
		dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/ Kota: 80%						
56	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Meningkat	0	0	0	0	SB	
57	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkat	13%	13%	10,00%	9,68%	SB	
58	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Meningkat	60	55	50	40	SB	
59	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Di atas 12%	0,23%	0,24%	0,23%	0,25%	SB	

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

2.1.7.3 Indikator TPB Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional

Dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Padang Pariaman, pemerintah daerah telah berupaya mengintegrasikan berbagai indikator TPB ke dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah. Beberapa indikator TPB telah mulai diimplementasikan melalui kegiatan sektoral yang relevan dengan tujuan pembangunan global, baik di bidang sosial, ekonomi, lingkungan, maupun tata kelola.

Namun demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa terdapat sejumlah indikator TPB yang meskipun telah dilaksanakan melalui program atau kegiatan daerah, belum memiliki data capaian yang tersedia secara lengkap dan terukur. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam sistem pencatatan dan pelaporan data, baik karena belum tersedianya mekanisme pelacakan yang sistematis, belum ditetapkannya instansi penanggung jawab yang jelas, maupun keterbatasan kapasitas dalam pengumpulan dan pengolahan data.

Ketidaktersediaan data ini menjadi hambatan dalam mengukur secara akurat sejauh mana kemajuan pencapaian TPB di daerah, serta dalam membandingkannya dengan target nasional yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem monitoring dan evaluasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di OPD terkait, serta pengembangan kerja sama dengan lembaga statistik dan mitra pembangunan untuk memperkuat ekosistem data pembangunan berkelanjutan.

Dengan adanya perbaikan dalam sistem pengelolaan data, diharapkan indikator-indikator TPB yang saat ini belum memiliki data dapat segera dimutakhirkan, sehingga dapat memberikan gambaran

yang lebih komprehensif terhadap capaian pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Padang Pariaman.

Tabel 2.100
Indikator TPB Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Ada Data
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2023

No	No. Indikator	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2020	2021	2022	2023	Capaian
1	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Menurun	NA	NA	NA	NA	NA
2	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Menurun menjadi 8,5 %	NA	NA	NA	NA	NA
3	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA
4	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Menurun	NA	NA	NA	NA	NA
5	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Menurun menjadi 9,91%	NA	NA	NA	NA	NA
6	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Menurun	NA	NA	NA	NA	NA
7	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Menurun	NA	NA	NA	NA	NA
8	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA
9	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	ada	NA	NA	NA	NA	NA
10	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA
11	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA
12	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	25%	3%	2%	6%	NA	NA
13	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Meningkat menjadi 8%	NA	NA	NA	NA	NA
14	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA
15	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA
16	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA
17	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA
18	10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Menurun menjadi 14%	NA	NA	NA	NA	NA
19	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang	Menurun	NA	NA	NA	NA	NA

No	No. Indikator	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2020	2021	2022	2023	Capaian
		difabilitas.						
20	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Meningkat menjadi 87	NA	NA	NA	NA	NA
21	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA
22	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	ada	NA	NA	NA	NA	NA
23	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	ada	NA	NA	NA	NA	NA
24	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

2.1.7.4 Indikator TPB Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target

Selain indikator yang telah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional, terdapat pula sejumlah indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Padang Pariaman yang belum dilaksanakan secara optimal dan pada saat yang sama belum menunjukkan capaian yang mendekati target nasional. Indikator-indikator ini umumnya berkaitan dengan bidang-bidang yang belum menjadi fokus prioritas pembangunan daerah atau belum terintegrasi secara memadai dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Beberapa indikator yang termasuk dalam kategori ini antara lain berkaitan dengan isu-isu seperti konsumsi dan produksi yang berkelanjutan (TPB 12), perlindungan keanekaragaman hayati (TPB 15), serta kemitraan untuk pembangunan (TPB 17). Minimnya intervensi program yang spesifik terhadap indikator-indikator ini menyebabkan tidak tersedianya capaian yang dapat diukur dan dilaporkan, serta berdampak pada ketertinggalan dalam pencapaian target nasional.

Kondisi ini mencerminkan perlunya penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah agar lebih menyeluruh dan inklusif, mencakup seluruh dimensi keberlanjutan sebagaimana diamanatkan dalam agenda TPB. Pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi lebih lanjut terhadap indikator-indikator TPB yang belum dilaksanakan, termasuk menganalisis akar penyebabnya, baik dari aspek regulasi, kapasitas kelembagaan, ketersediaan pendanaan, maupun kesadaran pemangku kepentingan terhadap pentingnya isu-isu tersebut.

Perlu disusun strategi integrasi indikator TPB ke dalam dokumen perencanaan daerah secara lebih sistematis, misalnya melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maupun dokumen perencanaan sektoral lainnya. Di samping itu, diperlukan penguatan koordinasi

antarperangkat daerah serta pelibatan aktif masyarakat dan mitra pembangunan untuk memperluas cakupan pelaksanaan TPB.

Tabel 2.101
Indikator TPB Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2023

No	No. Indikator	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2020	2021	2022	2023	Capaian
1	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Meningkat menjadi 450	0	0	0	0	BB
2	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Meningkat	0	0	0	0	BB
3	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Meningkat menjadi 409 kabupaten/kota	0	0	0	0	BB
4	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	ada	0	0	0	0	BB
5	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	ada	0	0	0	0	BB
6	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Ada	0	0	0	0	BB
7	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	0	0	0	0	BB
8	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Meningkat	0	0	0	0	BB
9	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Meningkat	0	0	0	0	BB
10	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	ada	0	0	0	0	BB

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

Kondisi keuangan daerah merupakan salah satu aspek strategis yang sangat menentukan arah, ruang gerak, dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam menjalankan program pembangunan selama periode perencanaan. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029, analisis terhadap kapasitas fiskal daerah menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan dilakukan secara realistis, terukur, dan berkelanjutan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat untuk tahun tertentu. Dengan demikian, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diposisikan sebagai salah satu instrumen kebijakan yang strategis dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan

masyarakat. Untuk mengetahui proyeksi kemampuan keuangan daerah dalam lima tahun mendatang, perlu dilakukan analisis terhadap pelaksanaan APBD selama lima tahun terakhir. Kajian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kemampuan fiskal daerah dalam membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menjelaskan fungsi APBD sebagai berikut ini:

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

2.2.1 Realisasi APBD Tahun 2020-2024

Sebagai bagian dari analisis keuangan daerah, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020–2024 menjadi instrumen penting dalam menilai kinerja fiskal dan kapasitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah selama periode lima tahun terakhir. Analisis ini mencakup perkembangan pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah tahun 2025–2029.

Realisasi APBD dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang mencerminkan kondisi makro ekonomi nasional, kebijakan fiskal pusat, serta tantangan daerah dalam penyesuaian kebijakan pasca pemulihan ekonomi. Kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, mempengaruhi proyeksi pendapatan dan belanja daerah.

Secara umum, pendapatan daerah mengalami peningkatan yang positif dari tahun ke tahun, demikian pula dengan alokasi dan realisasi belanja daerah yang tetap diarahkan untuk mendukung program prioritas dan pelayanan dasar. Pemerintah daerah juga berhasil menjaga

kesinambungan fiskal melalui manajemen pembiayaan daerah yang sehat. Meskipun terjadi defisit anggaran dalam beberapa tahun, hal ini dapat ditutup dengan penerimaan pembiayaan, khususnya dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), yang mencerminkan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah.

Evaluasi terhadap struktur dan capaian realisasi APBD tahun 2020–2024 menjadi landasan penting dalam mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah, serta menjadi dasar untuk perumusan strategi penguatan fiskal pada periode perencanaan berikutnya.

Tabel 2.102
Realisasi APBD Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	**PENDAPATAN**	**1.305.720.742.443**	**1.363.454.281.993**	**1.348.628.181.500**	**1.394.096.335.14**	**1.427.460.140.92**
	A. Pendapatan Asli Daerah	105.893.926.040	116.902.688.649	126.243.905.166	149.562.514.757	144.743.289.384
	B. Pendapatan Transfer	1.133.288.873.244	1.179.715.146.176	1.191.493.250.334	1.244.088.529.388	1.282.716.851.539
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	66.537.943.159	66.836.447.168	30.891.026.000	445.291.000	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.305.720.742.443	1.363.454.281.993	1.348.628.181.500	1.394.096.335.145	1.427.460.140.923
2.	**BELANJA**	**1.343.677.078.853**	**1.326.677.906.469**	**1.314.912.642.338**	**1.405.956.633.17**	**1.450.692.272.38**
	A. Belanja Operasi	964.954.189.152	1.010.763.437.310	1.006.898.685.609	1.034.417.684.452	1.099.877.431.550
	B. Belanja Modal	182.335.821.634	137.156.605.722	135.087.564.500	188.292.502.819	155.053.257.852
	C. Belanja Tak Terduga	22.132.345.315	618.675.500	616.219.436	1.729.558.250	7.691.341.000
	D. Belanja Transfer	174.254.722.752	178.139.187.937	172.310.172.793	181.516.887.649	188.070.241.980
	JUMLAH BELANJA	1.343.677.078.853	1.326.677.906.469	1.314.912.642.338	1.405.956.633.170	1.450.692.272.382
	SURPLUS/DEFISIT	(37.956.336.410)	36.776.375.524	33.715.539.162	(11.860.298.026)	(23.232.131.459)
3.	**PEMBIAYAAN**	**59.763.140.359**	**17.031.494.709**	**46.346.870.233**	**78.763.409.395**	**65.903.111.369**
	A. Penerimaan Pembiayaan	59.763.140.359	17.031.494.709	46.346.870.233	78.763.409.395	65.903.111.369
	B. Pengeluaran Pembiayaan	4.612.493.788	7.461.000.000	1.299.000.000	1.000.000.000	2.206.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	55.150.646.571	9.570.494.709	45.047.870.233	77.763.409.395	63.697.111.369
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	17.194.310.161	46.346.870.233	78.763.409.395	65.903.111.370	40.464.979.910

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2025

Berdasarkan Tabel 2.102 di atas, realisasi APBD Kabupaten Padang Pariaman periode 2020–2024 berjalan dengan cukup baik, ditandai dengan pertumbuhan pendapatan yang stabil dan pengelolaan belanja yang terukur. Meskipun terdapat defisit anggaran setiap tahun, kondisi ini masih tertutup oleh pembiayaan daerah yang memadai. Tren peningkatan PAD menunjukkan perbaikan kapasitas fiskal daerah, sementara struktur belanja mengindikasikan fokus pemerintah terhadap pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Evaluasi ini menjadi dasar penting untuk perbaikan tata kelola fiskal di masa mendatang, terutama dalam penguatan belanja pembangunan dan peningkatan efisiensi belanja rutin.

2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan cerminan dari kualitas tata kelola keuangan daerah, yang tidak hanya dinilai dari aspek realisasi angka, namun juga dari kesesuaian dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam lima tahun terakhir (2020–2024), Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menunjukkan komitmen dalam menjaga kesinambungan dan akuntabilitas fiskal, yang tercermin dari pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Semenjak tahun 2021, telah terjadi penyesuaian terhadap struktur dan klasifikasi belanja dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, sebagai bagian dari harmonisasi dengan regulasi nasional. Analisis terhadap tren pelaksanaan APBD selama periode 2020–2024 dilakukan dengan mempertimbangkan konteks perubahan tersebut. Pelaksanaan APBD Kabupaten Padang Pariaman selama lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang relatif stabil, baik dari sisi pendapatan daerah, belanja daerah, maupun pembiayaan daerah. Capaian ini menunjukkan upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas fiskal dan memastikan efektivitas belanja publik. Rincian lebih lanjut mengenai kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.103 di bawah ini.

Tabel 2.103
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024

Uraian	2020			2021			2022		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
PENDAPATAN									
PENDAPATAN ASLI DAERAH									
Pendapatan Pajak Daerah	40,900,000,000	41,824,536,856	102%	46,920,000,000	44,350,536,153	95%	50,600,000,000	50,121,822,881	99%
Pendapatan Retribusi Daerah	2,725,900,000	2,185,534,022	80%	2,850,200,000	2,171,696,648	76%	2,213,000,000	2,472,939,567	112%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,150,000,000	6,860,844,053	112%	6,000,000,000	5,884,534,467	98%	7,214,956,413	7,214,956,413	100%
Lain-lain PAD yang sah	62,413,812,837	55,023,011,109	88%	67,058,696,489	64,495,921,381	96%	65,961,422,023	66,434,186,305	101%
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	**112,189,712,837**	**105,893,926,040**	**94%**	**122,828,896,489**	**116,902,688,649**	**95%**	**125,989,378,436**	**126,243,905,166**	**100%**
PENDAPATAN TRANSFER									
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT									
Dana Perimbangan	1,000,740,528,014	973,687,956,910	97%	1,042,133,498,000	1,015,949,189,434	97%	1,041,818,348,913	1,019,939,145,626	98%
Dana Insentif Daerah	14,163,265,013	14,163,265,000	100%	-	-	-	1,317,667,000	1,317,667,000	100%
Dana Desa	96,749,416,000	95,726,483,771	99%	99,705,928,000	99,705,927,999	100%	94,772,298,000	94,772,298,000	100%
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat	**1,111,653,209,027**	**1,083,577,705,681**	**97%**	**1,141,839,426,000**	**1,115,655,117,433**	**98%**	**1,137,908,313,913**	**1,116,029,110,626**	**98%**
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH									
Pendapatan Bagi Hasil	54,238,434,812	49,711,167,563	92%	68,320,153,946	62,560,028,743	92%	68,162,595,733	75,464,139,708	111%
Bantuan Keuangan				1,500,000,000	1,500,000,000		-	-	

Uraian	2020			2021			2022		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Jumlah Transfer Antar Daerah	**54,238,434,812**	**49,711,167,563**	**92%**	**69,820,153,946**	**64,060,028,743**	**92%**	**68,162,595,733**	**75,464,139,708**	**111%**
Jumlah Pendapatan Transfer	**1,165,891,643,839**	**1,133,288,873,244**	**97%**	**1,211,659,579,946**	**1,179,715,146,176**	**97%**	**1,206,070,909,646**	**1,191,493,250,334**	**99%**
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH									
Pendapatan Hibah	70,043,295,285	66,516,973,159	95%	15,050,000,000	7,462,975,000	50%	44,592,026,000	30,891,026,000	69%
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	50,000,000	20,970,000	42%	59,867,700,000	59,373,472,168	99%	-	-	
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	**70,093,295,285**	**66,537,943,159**	**95%**	**74,917,700,000**	**66,836,447,168**	**89%**	**44,592,026,000**	**30,891,026,000**	**69%**
JUMLAH PENDAPATAN	**1,348,174,651,961**	**1,305,720,742,443**	**97%**	**1,409,406,176,435**	**1,363,454,281,993**	**97%**	**1,376,652,314,082**	**1,348,628,181,500**	**98%**
BELANJA									
BELANJA OPERASI									
Belanja Pegawai	664,583,175,867	650,205,096,055	98%	**732,479,692,356**	**710,253,561,402**	97%	694,082,621,125	672,789,484,454	97%
Belanja Barang dan Jasa	252,536,759,665	244,771,881,195	97%	312,432,271,800	290,925,392,498	93%	335,943,137,589	319,270,104,255	95%
Belanja Hibah	71,961,859,395	66,652,211,902	93%	11,410,910,000	9,529,483,410	84%	10,335,274,420	10,315,746,900	100%
Bantuan Bantuan Sosial	3,325,000,000	3,325,000,000	100%	91,000,000	55,000,000	60%	4,655,200,000	4,523,350,000	97%
Jumlah Belanja Operasi	**992,406,794,926**	**964,954,189,152**	**97%**	**1,056,413,874,156**	**1,010,763,437,310**	**96%**	**1,045,016,233,134**	**1,006,898,685,609**	**96%**
BELANJA MODAL									
Belanja Tanah	2,073,000,000	2,071,300,000	100%	-	-	#DIV/0!	-	-	
Belanja Peralatan dan Mesin	35,533,654,729	47,180,087,288	133%	51,227,534,565	41,764,570,225	82%	31,058,285,482	30,445,954,899	98%
Belanja Gedung dan Bangunan	60,192,193,772	56,494,532,194	94%	53,513,774,029	39,598,237,372	74%	40,679,258,220	34,708,818,439	85%

Uraian	2020			2021			2022		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	76,894,009,421	69,774,575,610	91%	60,034,781,750	51,222,179,171	85%	110,399,646,865	66,520,884,059	60%
Belanja Aset Tetap Lainnya	2,960,625,000	6,815,326,542	230%	7,473,108,757	4,571,618,954	61%	3,619,289,774	3,411,907,103	94%
Jumlah Belanja Modal (38 s/d 44)	**203,385,034,266**	**182,335,821,634**	**90%**	**172,249,199,101**	**137,156,605,722**	**80%**	**185,756,480,341**	**135,087,564,500**	**73%**
		-							
BELANJA TAK TERDUGA									
Belanja Tak Terduga	25,063,265,013	22,132,345,315	88%	1,500,000,000	618,675,500	41%	3,119,390,571	616,219,436	20%
Jumlah Belanja Tak Terduga	**25,063,265,013**	**22,132,345,315**	**88%**	**1,500,000,000**	**618,675,500**	**41%**	**3,119,390,571**	**616,219,436**	**20%**
BELANJA TRANSFER									
Belanja Bagi Hasil Pajak	4,362,590,000	4,315,046,981	99%	**6,228,295,548**	**4,722,352,138**	76%	6,992,396,669	5,449,491,303	78%
Belanja Bantuan Keuangan	171,045,383,000	169,939,675,771	99%	173,416,835,800	173,416,835,799	100%	167,114,683,600	166,860,681,490	100%
Jumlah Belanja Transfer	**175,407,973,000**	**174,254,722,752**	99%	179,645,131,348	178,139,187,937	99%	**174,107,080,269**	**172,310,172,793**	99%
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (49 + 56)	**1,396,263,067,205**	**1,343,677,078,853**	96%	**1,409,808,204,605**	**1,326,677,906,469**	94%	**1,407,999,184,315**	**1,314,912,642,338**	93%
SURPLUS/DEFISIT (29 - 57)	**(48,088,415,244)**	**(37,956,336,410)**	79%	**(402,028,170)**	**36,776,375,524**	-9148%	**(31,346,870,233)**	**33,715,539,162**	-108%
PEMBIAYAAN									
PENERIMAAN PEMBIAYAAN									
Sisa Lebih Perhitungan Tahun Sebelumnya	48,838,415,244	56,662,140,359	116%	**17,402,028,170**	**17,031,494,709**	98%	46,346,870,233	46,346,870,233	100%
Penerimaan Pembiayaan Lainya sesuai dengen Ketentuan Perundang-undangan	6,694,947,540	3,101,000,000	46%	-	-	#DIV/0!	-		
Jumlah Penerimaan (61 sd 63)	**55,533,362,784**	**59,763,140,359**	108%	17,402,028,170	17,031,494,709	98%	**46,346,870,233**	**46,346,870,233**	100%

Uraian	2020			2021			2022		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN									
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	750,000,000	750,000,000	100%	**17,000,000,000**	**7,461,000,000**	44%	15,000,000,000	1,299,000,000	9%
Pengeluaran Pembiayaan Lainya sesuai dengen Ketentuan Perundang-undangan	6,694,947,540	3,862,493,788	58%	-	-	#DIV/0!	-		
Jumlah Pengeluaran (66 sd 67)	**7,444,947,540**	**4,612,493,788**	62%	17,000,000,000	7,461,000,000	44%	**15,000,000,000**	**1,299,000,000**	9%
PEMBIAYAAN NETTO (64 - 68)	**48,088,415,244**	**55,150,646,571**	115%	402,028,170	9,570,494,709	2381%	**31,346,870,233**	**45,047,870,233**	144%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (58 + 69)		**17,194,310,161**		**-**	**46,346,870,233**		**-**	**78,763,409,395**	

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2025

Tabel 2.104
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 (Lanjutan)

Uraian	2023			2024		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
PENDAPATAN						
PENDAPATAN ASLI DAERAH						
Pendapatan Pajak Daerah	66,050,000,000	61,970,456,486	94%	67,260,000,000.00	61,253,259,287.50	91%
Pendapatan Retribusi Daerah	3,865,000,000	3,603,184,590	93%	72,924,616,090.00	66,154,972,984.00	91%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8,088,751,162	8,088,751,162	100%	8,728,317,039.00	8,728,317,039.00	100%
Lain-lain PAD yang sah	76,404,008,300	75,900,122,519	99%	9,825,000,000.00	8,606,740,073.93	88%
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	**154,407,759,462**	**149,562,514,757**	97%	**158,737,933,129.00**	**144,743,289,384.43**	91%
PENDAPATAN TRANSFER						
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT						
Dana Perimbangan	1,087,361,386,670	1,080,386,025,981	99%	1,074,386,520,400.00	1,074,305,369,388.00	100%
Dana Insentif Daerah	-	-		27,827,229,000.00	27,827,229,000.00	100%
Dana Desa	101,544,125,000	101,544,125,000	100%	103,458,459,000.00	103,458,459,000.00	100%
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat	**1,188,905,511,670**	**1,181,930,150,981**	99%	**1,205,672,208,400.00**	**1,205,591,057,388.00**	100%
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH						
Pendapatan Bagi Hasil	84,822,671,052	61,858,378,407	73%	109,442,048,083.00	75,925,794,151.00	69%
Bantuan Keuangan	300,000,000	300,000,000		2,100,000,000.00	1,200,000,000.00	
Jumlah Transfer Antar Daerah	**85,122,671,052**	**62,158,378,407**	**73%**	**111,542,048,083.00**	**77,125,794,151.00**	**69%**
Jumlah Pendapatan Transfer	**1,274,028,182,722**	**1,244,088,529,388**	**98%**	**1,317,214,256,483.00**	**1,282,716,851,539.00**	**97%**
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH						
Pendapatan Hibah	500,000,000	445,291,000	89%	-	-	
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	

Uraian	2023			2024		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	**500,000,000**	**445,291,000**	**89%**	-	-	
JUMLAH PENDAPATAN	**1,428,935,942,184**	**1,394,096,335,145**	**98%**	**1,475,952,189,612.00**	**1,427,460,140,923.43**	97%
BELANJA						
BELANJA OPERASI						
Belanja Pegawai	706,137,192,896	673,846,730,780	95%	783,442,218,483.48	742,757,984,421.00	95%
Belanja Barang dan Jasa	370,048,964,298	335,371,214,312	91%	342,999,003,668.49	312,307,080,893.00	91%
Belanja Hibah	27,907,204,560	24,899,739,360	89%	45,913,859,840.00	44,812,366,236.68	98%
Bantuan Bantuan Sosial	300,000,000	300,000,000	100%	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi	**1,104,393,361,754**	**1,034,417,684,452**	94%	**1,172,355,081,991.97**	**1,099,877,431,550.68**	94%
BELANJA MODAL						
Belanja Tanah	-	-	#DIV/0!	1,087,632,000.00	1,087,632,000.00	100%
Belanja Peralatan dan Mesin	36,566,375,468	34,104,526,420	93%	24,847,747,915.70	23,888,796,704.00	96%
Belanja Gedung dan Bangunan	31,372,871,506	29,755,595,200	95%	24,270,093,725.01	20,826,064,638.00	86%
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	141,886,618,480	119,326,461,876	84%	112,159,475,731.31	103,545,442,710.00	92%
Belanja Aset Tetap Lainnya	4,922,463,523	5,105,919,323	104%	5,033,603,800.00	5,705,321,800.00	113%
Jumlah Belanja Modal (38 s/d 44)	**214,748,328,977**	**188,292,502,819**	88%	**167,398,553,172.02**	**155,053,257,852.00**	93%
BELANJA TAK TERDUGA						
Belanja Tak Terduga	3,000,000,000	1,729,558,250	58%	10,000,000,000.00	7,691,341,000.00	77%
Jumlah Belanja Tak Terduga	**3,000,000,000**	**1,729,558,250**	58%	**10,000,000,000.00**	**7,691,341,000.00**	77%
BELANJA TRANSFER						
Belanja Bagi Hasil Pajak	7,992,655,682	5,603,798,048	70%	8,846,259,317.80	7,020,835,480.00	79%
Belanja Bantuan Keuangan	176,565,005,166	175,913,089,601	100%	181,049,406,500.00	181,049,406,500.00	100%
Jumlah Belanja Transfer	**184,557,660,848**	**181,516,887,649**	98%	**189,895,665,817.80**	**188,070,241,980.00**	99%

Uraian	2023			2024		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (49 + 56)	**1,506,699,351,579**	**1,405,956,633,170**	93%	**1,539,649,300,981.79**	**1,450,692,272,382.68**	94%
SURPLUS/DEFISIT (29 - 57)	**(77,763,409,395)**	**(11,860,298,026)**	15%	**(63,697,111,369.79)**	**(23,232,131,459.25)**	36%
PEMBIAYAAN						
PENERIMAAN PEMBIAYAAN						
Sisa Lebih Perhitungan Tahun Sebelumnya	78,763,409,395	78,763,409,395	100%	65,903,111,369.70	65,903,111,369.79	100%
Penerimaan Pembiayaan Lainya sesuai dengen Ketentuan Perundang-undangan	-	-	#DIV/0!	-	-	
Jumlah Penerimaan (61 sd 63)	**78,763,409,395**	**78,763,409,395**	100%	**65,903,111,369.70**	**65,903,111,369.79**	100%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1,000,000,000	1,000,000,000	100%	2,206,000,000.00	2,206,000,000.00	100%
Pengeluaran Pembiayaan Lainya sesuai dengen Ketentuan Perundang-undangan	-	-	#DIV/0!			
Jumlah Pengeluaran (66 sd 67)	**1,000,000,000**	**1,000,000,000**	100%	**2,206,000,000.00**	**2,206,000,000.00**	100%
PEMBIAYAAN NETTO (64 - 68)	**77,763,409,395**	**77,763,409,395**	100%	**63,697,111,369.70**	**63,697,111,369.79**	100%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (58 + 69)						

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2025

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan komponen fundamental dalam struktur keuangan daerah yang mencerminkan kapasitas fiskal suatu pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Tingkat kemandirian fiskal daerah sangat ditentukan oleh kemampuan daerah dalam mengelola dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan yang sah, baik yang bersumber dari dalam daerah (Pendapatan Asli Daerah) maupun dari luar daerah (Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel 2.105
Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020-2024

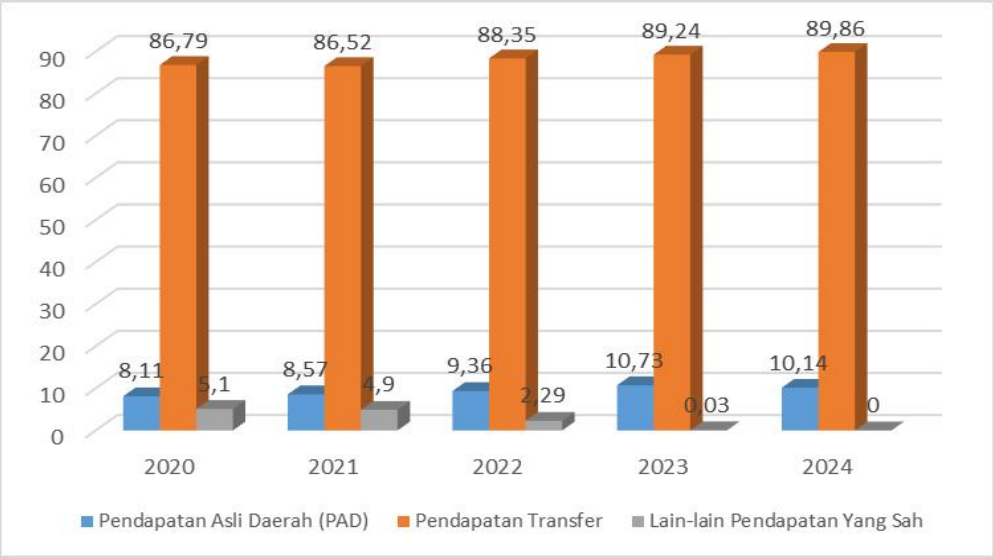
Tahun	Target(Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Pertumbuhan Realisasi
2020	1.348.174.651.961	1.305.720.742.442	96.85	(11.34)	(13,56)
2021	1.409.406.176.435	1.363.454.281.992	96.74	4.54	4.42
2022	1.376.652.314.082	1.348.628.181.500	97.96	(2.32)	(1.09)
2023	1.428.935.942.184	1.394.096.335.144	97.56	3.80	3.37
2024	1.475.952.189.612	1.427.460.140.923	96.71	3.29	2.39
Rata-Rata			**97.17**	**(0.41)**	**(0.89)**

Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024

Selama periode lima tahun (2020–2024), kinerja pendapatan Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan capaian yang relatif stabil, dengan rata-rata tingkat capaian sebesar 97,17% dari target pendapatan yang ditetapkan setiap tahun. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum, kemampuan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam merealisasikan target pendapatan daerah cukup baik, meskipun terdapat dinamika dari sisi pertumbuhan anggaran maupun realisasi.

Kontribusi masing-masing komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 2.101
Grafik Persentase Kontribusi Pendapatan
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020-2024 (dalam persen)



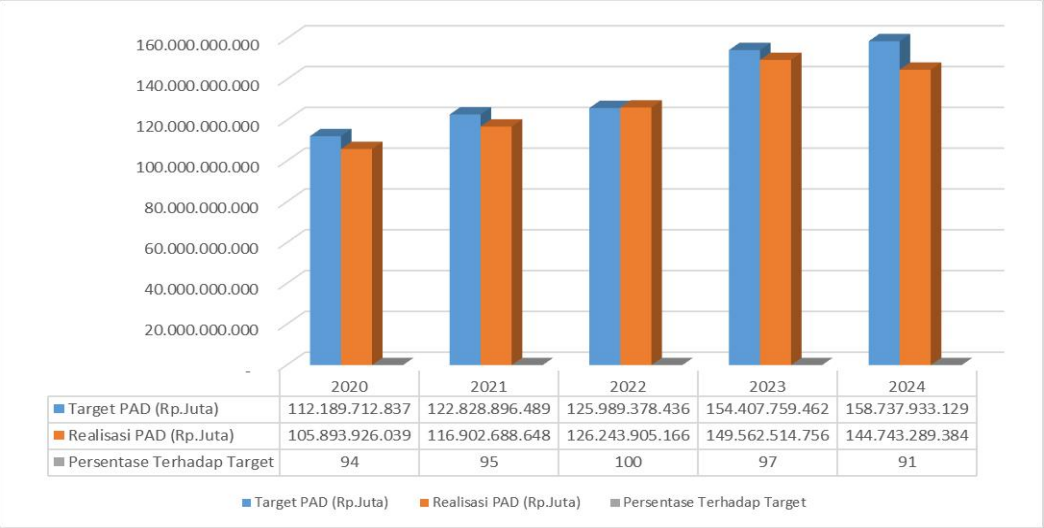
Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer yang terus meningkat dari 86,79% pada tahun 2020 menjadi 89,86% pada tahun 2024, menunjukkan ketergantungan fiskal yang cukup tinggi terhadap pemerintah pusat dan provinsi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren peningkatan dari 8,11% menjadi 10,14% pada periode yang sama, meskipun angkanya masih relatif kecil dan belum mampu menopang kemandirian fiskal daerah secara signifikan. Di sisi lain, kontribusi dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan drastis hingga mencapai 0% pada tahun 2024, yang kemungkinan mencerminkan rasionalisasi atau perubahan klasifikasi dalam sistem pelaporan keuangan daerah. Secara keseluruhan, kondisi ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi sumber-sumber PAD yang berkelanjutan dan berorientasi pada potensi ekonomi lokal.

1) Pendapatan Asli daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Padang Pariaman pada periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan nominal baik dari sisi target maupun realisasi, namun capaian terhadap target tidak selalu stabil. Realisasi PAD mencapai 100% dari target hanya pada tahun 2022, sementara pada tahun-tahun lainnya berada di bawah target, dengan capaian terendah terjadi pada tahun 2024 sebesar 91%. Hal ini mencerminkan perlunya perbaikan dalam perencanaan target yang lebih realistis serta peningkatan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah guna menjaga konsistensi dan efektivitas kinerja PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Gambar 2.102
Grafik Kinerja Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024

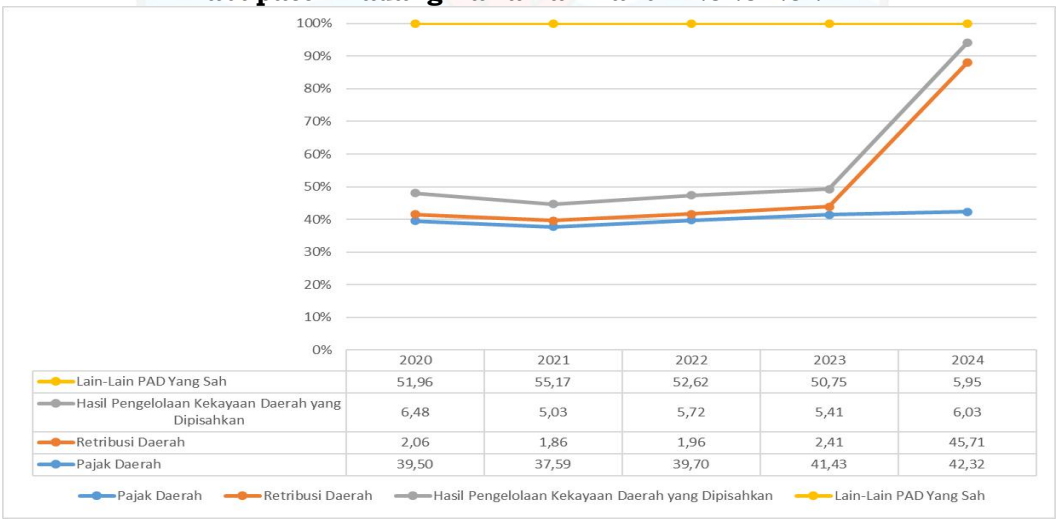


	2020	2021	2022	2023	2024
Target PAD (Rp.Juta)	112.189.712.837	122.828.896.489	125.989.378.436	154.407.759.462	158.737.933.129
Realisasi PAD (Rp.Juta)	105.893.926.039	116.902.688.648	126.243.905.166	149.562.514.756	144.743.289.384
Persentase Terhadap Target	94	95	100	97	91

Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024

Kontribusi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Padang Pariaman mengalami perubahan signifikan pada tahun 2024, dengan pergeseran dominasi dari "Lain-lain PAD yang sah" ke Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jika pada tahun-tahun sebelumnya kontribusi terbesar berasal dari "Lain-lain PAD yang sah", maka pada tahun 2024 komponen ini justru mengalami penurunan drastis menjadi hanya 5,95%, sementara Retribusi Daerah dan Pajak Daerah mengalami lonjakan kontribusi yang signifikan. Perubahan ini mencerminkan perbaikan strategi pengelolaan PAD yang lebih terarah dan mengandalkan sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan serta berada dalam kendali langsung pemerintah daerah.

Gambar 2.103
Grafik Persentase Kontribusi Sumber Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Lain-Lain PAD Yang Sah	51,96	55,17	52,62	50,75	5,95
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,48	5,03	5,72	5,41	6,03
Retribusi Daerah	2,06	1,86	1,96	2,41	45,71
Pajak Daerah	39,50	37,59	39,70	41,43	42,32

Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024

Tabel 2.106
Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-Lain PAD yang Sah	Total
2020	41.824.536.856	2.185.534.022	6.860.844.053	55.023.011.109	105.893.926.040
2021	44.350.536.153	2.171.696.648	5.884.534.467	64.495.921.381	116.902.688.649
2022	50.121.822.881	2.472.939.567	7.214.956.413	66.434.186.305	126.243.905.166
2023	61.970.456.486	3.603.184.590	8.088.751.162	75.900.122.519	149.562.514.757
2024	61.253.259.288	66.154.972.984	8.728.317.039	8.606.740.074	144.743.289.384

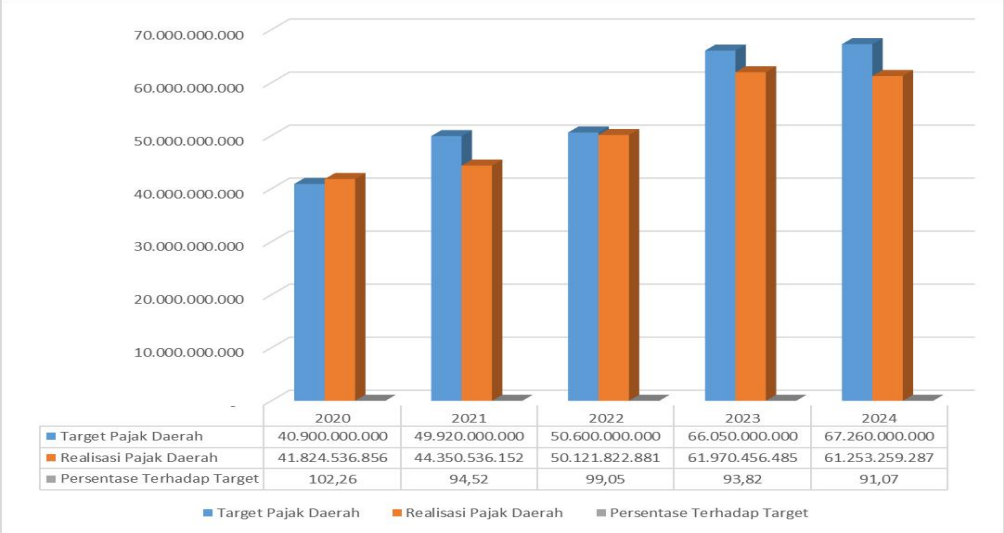
Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024

Perkembangan masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Padang Pariaman dalam lima tahun terakhir sebagai berikut:

a) Pajak Daerah

Realisasi penerimaan dari pajak daerah menunjukkan tren peningkatan yang cukup stabil dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, realisasi pajak daerah tercatat sebesar Rp41,82 miliar, dan meningkat secara konsisten hingga mencapai Rp61,25 miliar pada tahun 2024. Kenaikan yang signifikan terlihat pada tahun 2023 dan 2024, yang mengindikasikan adanya penguatan dalam kapasitas pemungutan pajak serta optimalisasi pendataan objek dan subjek pajak. Peningkatan ini juga mencerminkan keberhasilan implementasi regulasi dan sistem informasi pajak daerah yang lebih terintegrasi. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, termasuk peningkatan kepatuhan wajib pajak dan digitalisasi layanan, turut berkontribusi terhadap pencapaian tersebut.

Gambar 2.104
Grafik Kinerja Pajak Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024



Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024

b) Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu komponen penting dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencerminkan kontribusi masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Dalam lima tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah berupaya melakukan optimalisasi penerimaan retribusi daerah melalui pembaruan regulasi, penyederhanaan prosedur layanan, dan peningkatan kualitas sarana serta prasarana pelayanan. Seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Retribusi Daerah, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang untuk menyesuaikan struktur dan mekanisme pemungutan retribusi secara lebih akuntabel dan efisien.

Retribusi Daerah selama lima tahun terakhir bersifat fluktuatif, peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2024 mencapai Rp 66,154 Milyar dengan capain 90,72%. Hal ini disebabkan oleh adanya regulasi yang menyatakan untuk pendapatan BLUD menjadi bagian dari Retribusi Daerah.

Gambar 2.105
Grafik Kinerja Retribusi Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Retribusi Daerah	2.725.900.000,0	2.850.200.000,0	2.213.000.000,0	3.865.000.000,0	72.924.616.090,
Realisasi Retribusi Daerah	2.185.534.022,0	2.171.696.648,0	2.472.939.567,0	3.603.184.590,0	66.154.972.984,
Persentase Terhadap Target	80,18	76,19	111,75	93,23	90,72

Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024

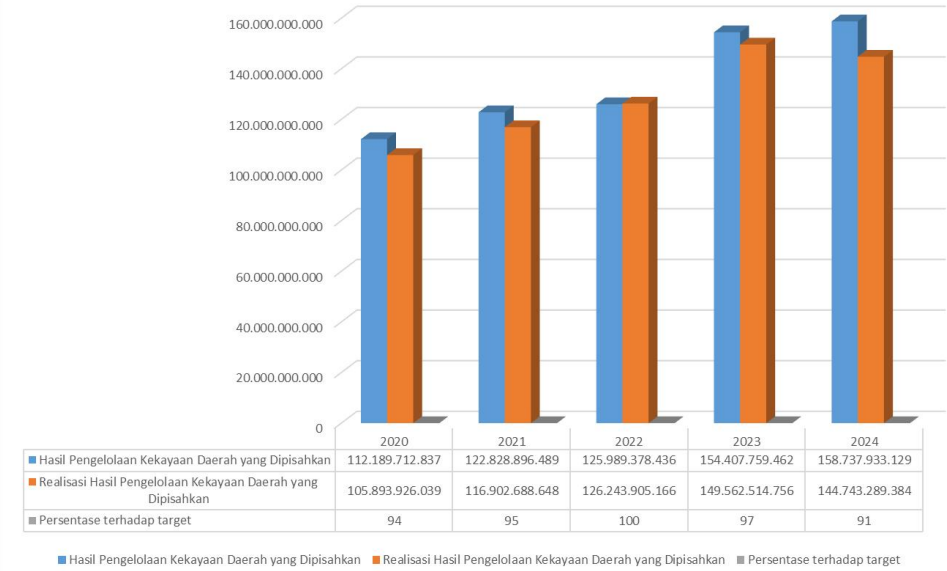
c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun bentuk investasi lainnya. Pendapatan ini mencerminkan kontribusi dari aset daerah yang dikelola secara profesional dan komersial guna menghasilkan nilai tambah bagi keuangan daerah.

Selama periode lima tahun terakhir, kontribusi komponen ini terhadap PAD Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan tren yang cukup positif, meskipun belum signifikan secara proporsional jika

dibandingkan dengan sumber PAD lainnya seperti pajak daerah. Hal ini menunjukkan adanya peluang yang masih dapat dioptimalkan, terutama melalui peningkatan kinerja dan tata kelola BUMD, evaluasi terhadap penyertaan modal yang telah diberikan, serta pengembangan bentuk-bentuk investasi daerah yang produktif.

Gambar 2.106
Grafik Kinerja Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024



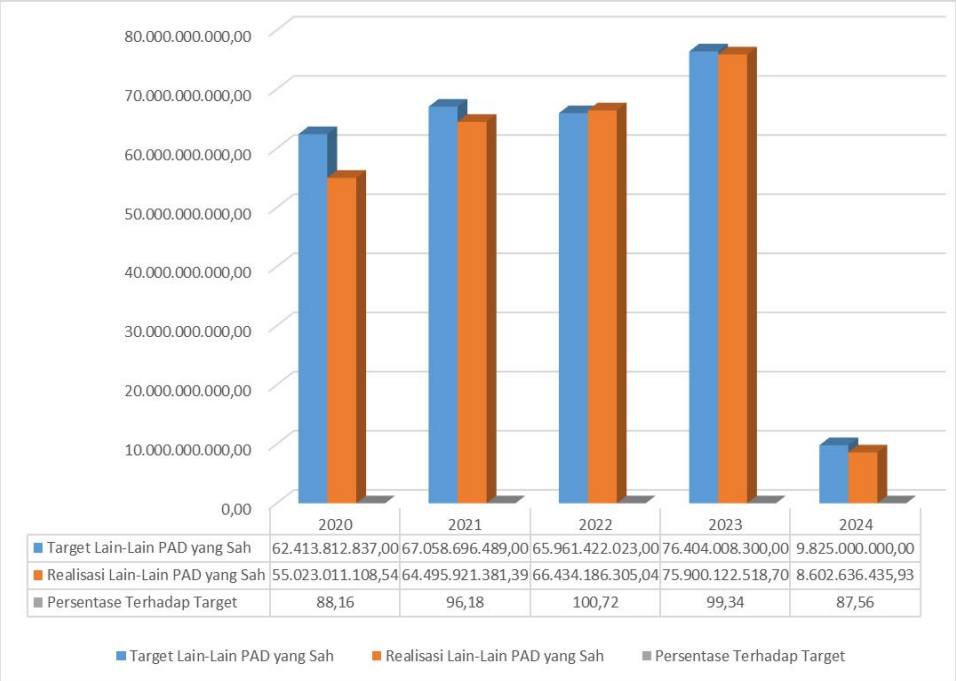
	2020	2021	2022	2023	2024
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	112.189.712.837	122.828.896.489	125.989.378.436	154.407.759.462	158.737.933.129
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	105.893.926.039	116.902.688.648	126.243.905.166	149.562.514.756	144.743.289.384
Persentase terhadap target	94	95	100	97	91

Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024

d) Lain-lain PAD yang Sah

Kinerja lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020–2024 menunjukkan tren capaian yang relatif stabil dan mendekati target, bahkan sempat melampaui target pada tahun 2022 dengan realisasi sebesar Rp66,43 miliar atau 100,72% dari target. Capaian tertinggi secara nominal terjadi pada tahun 2023, dengan realisasi Rp75,90 miliar atau 99,34% dari target. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan drastis baik dari sisi target (Rp9,82 miliar) maupun realisasi (Rp8,60 miliar), sehingga persentase capaian terhadap target juga menurun menjadi 87,56%. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh pergeseran sumber pendapatan atau kebijakan fiskal yang memengaruhi klasifikasi dan alokasi PAD, yang memerlukan kajian lebih lanjut agar kontribusi komponen ini terhadap PAD dapat kembali optimal.

Gambar 2.107
Grafik Kinerja Lain-Lain PAD yang Sah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024



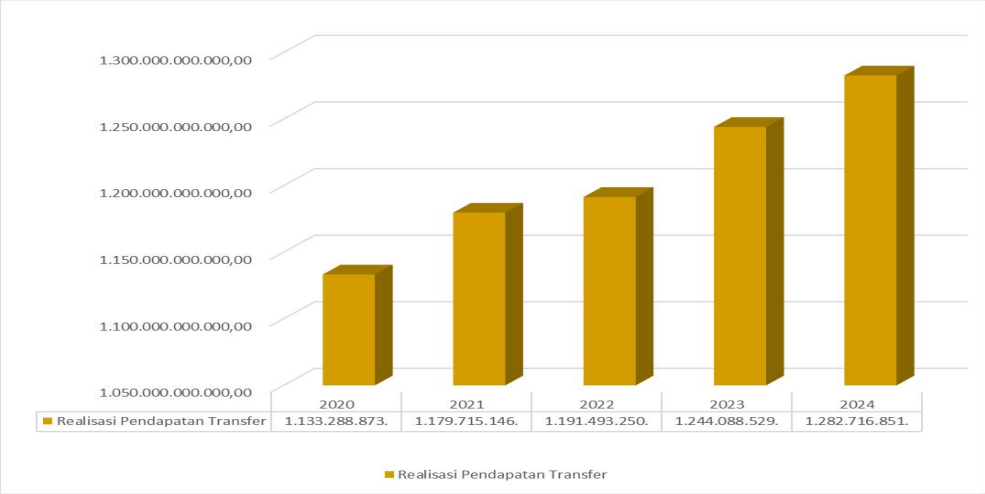
	2020	2021	2022	2023	2024
Target Lain-Lain PAD yang Sah	62.413.812.837,00	67.058.696.489,00	65.961.422.023,00	76.404.008.300,00	9.825.000.000,00
Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah	55.023.011.108,54	64.495.921.381,39	66.434.186.305,04	75.900.122.518,70	8.602.636.435,93
Persentase Terhadap Target	88,16	96,18	100,72	99,34	87,56

Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020–2024, terlihat tren yang konsisten meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, realisasi pendapatan transfer tercatat sebesar Rp1,13 triliun, dan terus meningkat hingga mencapai Rp1,28 triliun pada tahun 2024. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2023 ke 2024, dengan selisih sekitar Rp38,63 miliar. Kenaikan ini mencerminkan ketergantungan pendanaan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi yang cukup besar. Konsistensi pertumbuhan pendapatan transfer ini menjadi tulang punggung utama dalam pembiayaan pembangunan daerah, namun juga mengisyaratkan pentingnya upaya diversifikasi sumber pendapatan daerah agar kemandirian fiskal dapat ditingkatkan.

Gambar 2.108
Grafik Realisasi Pendapatan Transfer
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024

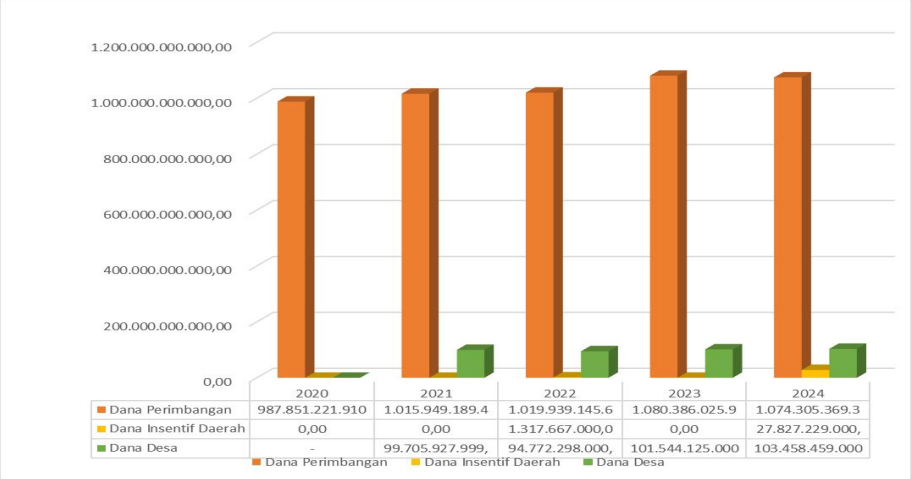


Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan transfer dari pemerintah pusat tetap menjadi sumber utama penerimaan daerah Kabupaten Padang Pariaman, dengan Dana Perimbangan menunjukkan tren stabil dan kontribusi terbesar dalam lima tahun terakhir, mencerminkan komitmen pusat terhadap pemerataan fiskal dan pelayanan dasar. Sementara itu, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa menunjukkan dinamika yang mencerminkan respons terhadap kinerja daerah dan kebutuhan pembangunan berbasis wilayah, di mana DID meningkat signifikan pada 2024 dan Dana Desa mengalami tren kenaikan sejak 2021. Secara keseluruhan, kombinasi ketiga komponen transfer ini mencerminkan pola dukungan fiskal pemerintah pusat yang konsisten, adaptif, dan strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal dan pembangunan daerah.

Gambar 2.109
Grafik Perkembangan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024

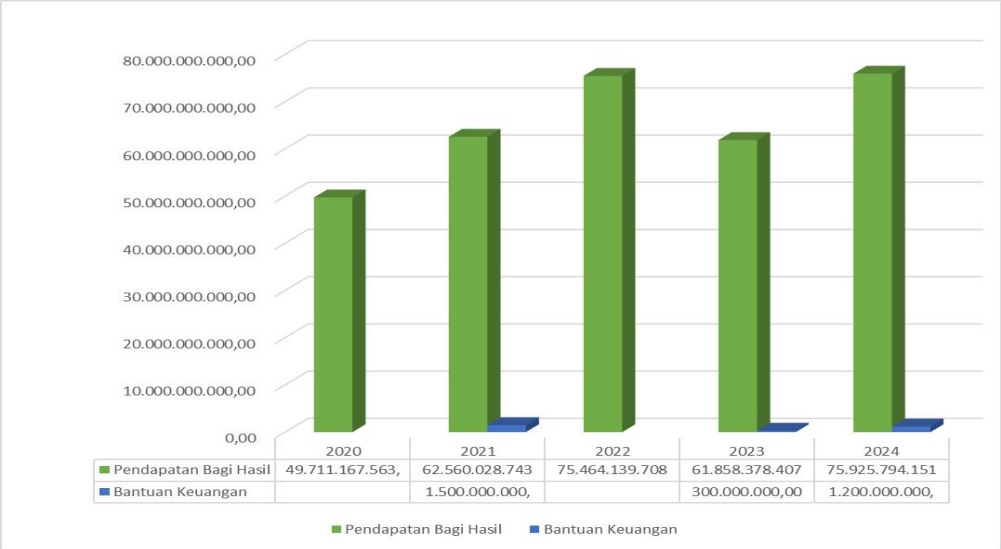


Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024

b) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar daerah di Kabupaten Padang Pariaman mencerminkan bentuk kolaborasi fiskal antar pemerintah daerah yang mendukung program strategis lintas wilayah dan pemerataan pembangunan. Dalam lima tahun terakhir, pendapatan ini didominasi oleh bagi hasil antar daerah yang menunjukkan tren peningkatan meskipun sempat fluktuatif, dengan puncak realisasi pada tahun 2024 sebesar Rp75,93 miliar. Sementara itu, bantuan keuangan antar daerah bersifat tidak rutin dan nilainya relatif kecil, namun tetap berkontribusi dalam mendukung kegiatan strategis tertentu. Secara keseluruhan, transfer antar daerah berperan sebagai instrumen pelengkap yang memperkuat sinergi dan efisiensi dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Gambar 2.110
Grafik Perkembangan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024



Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber di luar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam lima tahun terakhir Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari pendapatan hibah dan menunjukkan tren penurunan yang siginifikan. Rata-rata tingkat capaian terhadap anggaran selama periode tersebut hanya mencapai 68,49%, yang mencerminkan rendahnya tingkat pencapaian target dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya.

Pada tahun 2020, tingkat capaian masih relatif tinggi, yakni sebesar 94,93%, dengan realisasi sebesar Rp66,53 miliar dari anggaran Rp70,09 miliar. Namun, pada tahun 2021, meskipun realisasi tetap berada di kisaran Rp66,83 miliar, tingkat capaian turun menjadi 89,21% akibat peningkatan target anggaran. Penurunan drastis terjadi pada

tahun 2022, di mana anggaran mengalami pemotongan signifikan sebesar -40,48%, dan realisasi turun menjadi Rp30,89 miliar dengan tingkat capaian hanya 69,27%.

Pada tahun 2023 dan 2024, tidak terdapat data anggaran dan realisasi untuk komponen ini, yang mengindikasikan kemungkinan adanya perubahan dalam kebijakan pengelolaan sumber pendapatan ini atau pergeseran strategi fiskal daerah. Berikut disajikan anggaran dan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah beserta pertumbuhannya selama Tahun 2020-2024.

Tabel 2.107
Target dan Realisasi serta Pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020-2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (Rp)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2020	70.093.295.285	66.537.943.159	94,93	-58,89	-64,88
2021	74.917.700.000	66.836.447.168	89,21	6,88	0,45
2022	44.592.026.000	30.891.026.000	69,27	(40,48)	(53,78)
2023	500.000.000	445.291.000	89,06	(99,33)	(99,33)
2024	-	-	-	(100)	(100)
Rata-Rata			**68,49**	**(46,70)**	**(50,66)**

Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024

b. Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah diklasifikasikan atas 4 kelompok, yaitu:

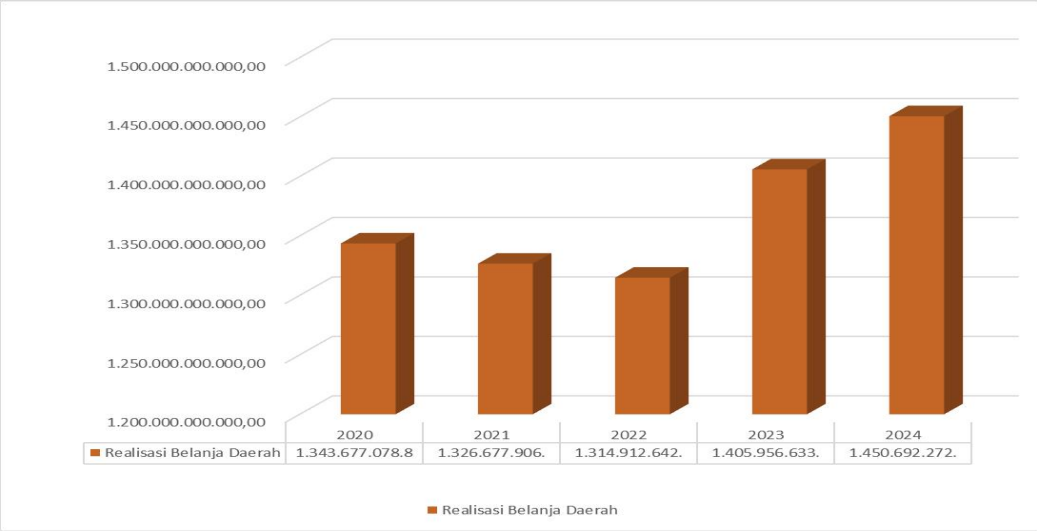
1. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
2. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
3. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
4. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Berdasarkan data realisasi belanja daerah dari tahun 2020 hingga 2024, terjadi fluktuasi dalam jumlah pengeluaran pemerintah daerah. Pada tahun 2020, realisasi belanja daerah mencapai Rp1.343,68 triliun. Namun, pada tahun 2021 dan 2022 terjadi penurunan berturut-turut menjadi Rp1.326,68 triliun dan Rp1.314,91 triliun. Penurunan ini

mencerminkan adanya upaya efisiensi atau penyesuaian belanja, perubahan kebijakan atau keterlambatan dalam pelaksanaan program serta rasionalisasi anggaran belanja daerah.

Pada tahun 2023 terjadi lonjakan signifikan dalam realisasi belanja daerah menjadi Rp1.405,96 triliun, dan terus meningkat pada tahun 2024 hingga mencapai Rp1.450,69 triliun. Peningkatan ini menunjukkan kembali meningkatnya belanja pemerintah daerah, yang kemungkinan besar ditujukan untuk mendukung program-program strategis daerah, percepatan pembangunan, dan peningkatan pelayanan publik. Secara umum, tren belanja daerah memperlihatkan pola pemulihan dan ekspansi fiskal yang bertahap, seiring dengan meningkatnya kapasitas fiskal daerah dan kebutuhan pembiayaan pembangunan.

Gambar 2.111
Grafik Perkembangan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024



Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024

Berdasarkan komposisinya, Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman paling besar digunakan untuk Belanja Operasi dengan rata-rata proporsi mencapai 74,79% terhadap total Belanja Daerah dalam lima tahun terakhir. Angka ini berfluktuatif setiap tahunnya tetapi tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Gambar 2.112
Grafik Proporsi Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata
Belanja Transfer	12,97	13,43	13,10	12,96	12,96	13,07
Belanja Tidak Terduga	1,65	0,05	0,05	0,53	0,53	0,48
Belanja Modal	13,57	10,34	10,27	13,39	10,69	11,65
Belanja Operasi	71,81	76,19	76,58	73,57	75,82	74,79

Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan salah satu komponen utama dalam struktur belanja daerah yang digunakan untuk mendanai kegiatan rutin pemerintahan serta operasional pelayanan publik. Komponen ini mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja Operasi bersifat wajib dan mengikat, karena terkait langsung dengan kelangsungan fungsi-fungsi dasar pemerintahan serta pemenuhan hak-hak masyarakat yang bersifat mendesak dan berkelanjutan.

Berdasarkan data anggaran dan realisasi belanja daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020–2024, terlihat bahwa kinerja pengelolaan anggaran menunjukkan tren yang cukup stabil dengan rata-rata capaian realisasi sebesar 95,35%. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 97,23%, sedangkan capaian terendah pada tahun 2021 yaitu 85,68%, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dinamika pascapandemi COVID-19 yang menyebabkan sejumlah program tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Setelah itu, capaian realisasi kembali membaik di tahun-tahun berikutnya dengan kisaran di atas 93%, mencerminkan upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan program kegiatan oleh pemerintah daerah.

Dari sisi pertumbuhan, rata-rata pertumbuhan anggaran selama lima tahun adalah 3,43%, sementara pertumbuhan realisasi berada pada angka 2,68%. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan anggaran dan realisasi belanja daerah secara moderat dari tahun ke tahun. Pertumbuhan negatif sempat tercatat pada tahun 2022, baik untuk anggaran (–1,08%) maupun realisasi (–0,38%), namun situasi ini berhasil dibalik dengan pertumbuhan positif di tahun-tahun berikutnya, khususnya pada 2024 yang mencatat pertumbuhan realisasi tertinggi sebesar 6,33%. Hal ini dapat menunjukkan perbaikan dalam

perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang lebih adaptif terhadap kondisi dan kebutuhan riil daerah

Tabel 2.108
Target dan Realisasi serta Pertumbuhan Belanja Operasi
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024

Tahun	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2020	992.406.794.926	964.954.189.152	97,23	(0,04)	(0,03)
2021	1.056.413.874.156	1.010.763.437.310	85,68	6,45	4,75
2022	1.045.016.233.134	1.006.898.685.609	96,35	(1,08)	(0,38)
2023	1.104.393.361.754	1.034.417.684.452	93,66	5,68	2,73
2024	1.172.355.081.992	1.099.877.431.551	93,82	6,15	6,33
Rata-Rata			**95,35**	**3,43**	**2,68**

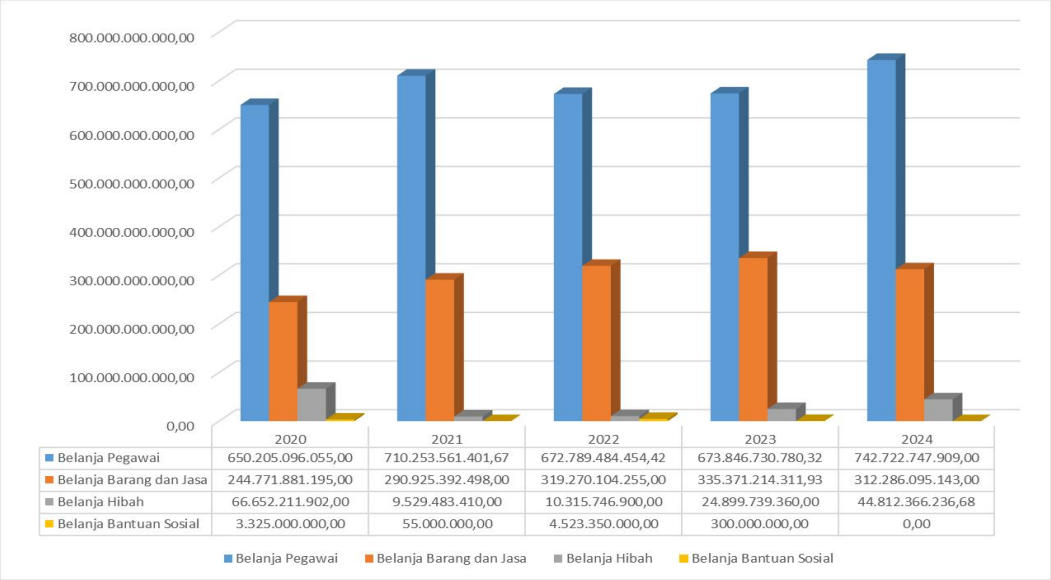
Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024

Selama periode 2020–2024, Belanja Pegawai mengalami tren fluktuatif namun cenderung meningkat secara keseluruhan. Dimulai dari Rp650,21 miliar pada tahun 2020, belanja ini mencapai titik tertinggi pada tahun 2024 sebesar Rp742,72 miliar. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga kesejahteraan aparatur serta konsistensi dalam memenuhi kewajiban rutin pegawai. Belanja pegawai ini mencakup pengeluaran untuk gaji, tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Komponen belanja terbesar kedua adalah Belanja Barang dan Jasa juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup konsisten dari Rp244,77 miliar pada tahun 2020 menjadi puncaknya Rp335,37 miliar di tahun 2023, sebelum sedikit menurun menjadi Rp312,29 miliar di tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan belanja operasional dalam rangka mendukung program dan pelayanan publik.

Sementara itu, Belanja Hibah sempat anjlok dari Rp66,65 miliar di tahun 2020 menjadi Rp9,52 miliar di 2021, lalu perlahan meningkat hingga Rp44,81 miliar di 2024, yang dapat mengindikasikan peningkatan kembali dalam dukungan pemerintah kepada lembaga atau kelompok penerima hibah. Belanja Bantuan Sosial justru menunjukkan tren penurunan yang tajam dan konsisten, dari Rp3,32 miliar pada 2020 menjadi nihil pada 2024. Hal ini bisa menjadi perhatian khusus, mengingat peran bantuan sosial dalam menjaga ketahanan sosial masyarakat, terutama kelompok rentan.

Gambar 2.113
Grafik Realisasi Belanja Operasi
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Pegawai	650.205.096.055,00	710.253.561.401,67	672.789.484.454,42	673.846.730.780,32	742.722.747.909,00
Belanja Barang dan Jasa	244.771.881.195,00	290.925.392.498,00	319.270.104.255,00	335.371.214.311,93	312.286.095.143,00
Belanja Hibah	66.652.211.902,00	9.529.483.410,00	10.315.746.900,00	24.899.739.360,00	44.812.366.236,68
Belanja Bantuan Sosial	3.325.000.000,00	55.000.000,00	4.523.350.000,00	300.000.000,00	0,00

Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024

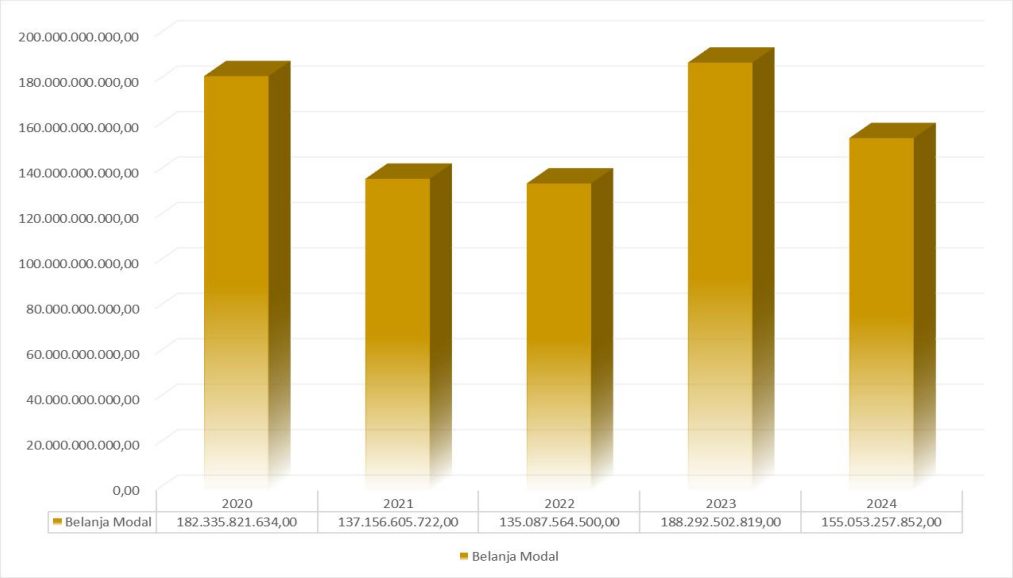
2) Belanja Modal

Belanja Modal Kabupaten Padang Pariaman selama periode tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan pola fluktuatif yang mencerminkan dinamika kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan daerah. Pada tahun 2020, realisasi belanja modal tercatat sebesar Rp182,33 miliar. Namun, pada tahun 2021 mengalami penurunan cukup signifikan menjadi Rp137,15 miliar, dan kembali turun sedikit pada tahun 2022 menjadi Rp135,09 miliar. Penurunan selama dua tahun berturut-turut ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak penyesuaian anggaran akibat pandemi COVID-19 serta perubahan prioritas pengeluaran pemerintah daerah.

Kondisi tersebut berubah drastis pada tahun 2023, di mana belanja modal melonjak menjadi Rp188,29 miliar, yang merupakan angka tertinggi selama periode lima tahun terakhir. Lonjakan ini menunjukkan adanya peningkatan investasi pada sektor fisik, kemungkinan untuk mendukung pelaksanaan proyek-proyek strategis, pembangunan infrastruktur, atau penguatan layanan dasar masyarakat. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan kembali menjadi Rp155,05 miliar, yang meskipun lebih rendah dari tahun sebelumnya, masih berada di atas realisasi tahun 2021 dan 2022.

Secara keseluruhan, rata-rata realisasi belanja modal selama lima tahun terakhir berada pada kisaran Rp159,59 miliar per tahun. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa alokasi belanja modal masih sangat bergantung pada kondisi fiskal tahunan serta prioritas kebijakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, konsistensi dalam penganggaran dan pelaksanaan belanja modal sangat diperlukan untuk menjamin kesinambungan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik secara optimal.

Gambar 2.114
Grafik Perkembangan Realisasi Belanja Modal
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024



Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024

Selama periode lima tahun terakhir, belanja modal Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan dinamika yang fluktuatif dengan tren penurunan baik dari sisi anggaran maupun realisasi, meskipun efisiensi pelaksanaan relatif moderat dengan capaian rata-rata sebesar 84,46%. Penurunan tajam terjadi pada tahun 2021 dan 2022, mencerminkan lemahnya daya serap dan pelaksanaan, meskipun terjadi peningkatan anggaran. Perbaikan kinerja terjadi pada tahun 2023 dengan realisasi tertinggi, namun kembali mengalami penurunan signifikan pada tahun 2024 meskipun capaian tetap tinggi, menandakan adanya penyesuaian fiskal yang cukup besar. Secara keseluruhan, pertumbuhan anggaran dan realisasi belanja modal mengalami tren negatif masing-masing sebesar -2,84% dan -0,97%, yang menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap perencanaan dan pelaksanaan belanja modal guna menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan layanan publik daerah. Hal ini mencerminkan adanya tren penurunan dalam pengalokasian dan pelaksanaan belanja modal, yang perlu menjadi perhatian dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Kabupaten Padang Pariaman.

Tabel 2.109
Target dan Realisasi serta Pertumbuhan Belanja Modal Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024

Tahun	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian)%)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2020	203.385.034.266	182.335.821.634	89,65	(0,28)	(0,31)
2021	172.249.199.101	137.156.605.722	79,63	(15,31)	(24,78)
2022	185.756.480.341	135.087.564.500	72,72	7,84	(1,51)
2023	214.748.328.977	188.292.502.819	87,68	15,61	39,39
2024	167.398.553.172	155.053.257.852	92,63	(22,05)	(17,65)
Rata-Rata			**84,46**	**(2,84)**	**(0,97)**

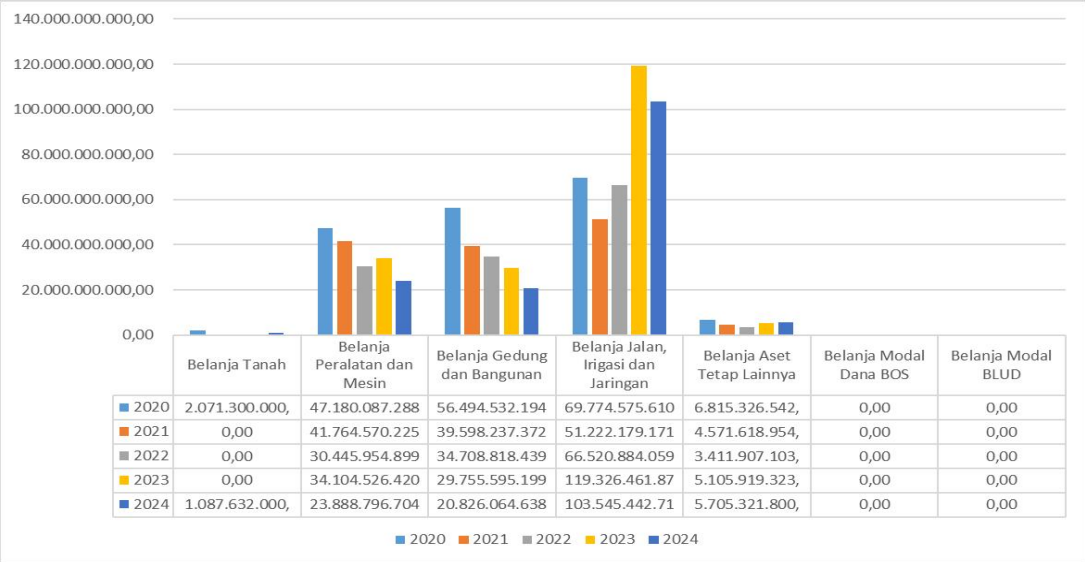
Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024

Dilihat dari proprosi penggunaannya, Belanja Modal sejak tahun 2020-2024 lebih banyak digunakan untuk :

- Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan
- Belanja Gedung dan Bangunan
- Belanja Peralatan dan Mesin
- Belanja Modal Dana BOS
- Belanja Modal BLUD
- Belanja Tanah
- Belanja Aset Tetap Lainnya

Hal ini sesuai dengan komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Padang Pariaman.

Gambar 2.115
Grafik Realisasi Belanja Modal
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024



	Belanja Tanah	Belanja Peralatan dan Mesin	Belanja Gedung dan Bangunan	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Belanja Aset Tetap Lainnya	Belanja Modal Dana BOS	Belanja Modal BLUD
2020	2.071.300.000,	47.180.087.288	56.494.532.194	69.774.575.610	6.815.326.542,	0,00	0,00
2021	0,00	41.764.570.225	39.598.237.372	51.222.179.171	4.571.618.954,	0,00	0,00
2022	0,00	30.445.954.899	34.708.818.439	66.520.884.059	3.411.907.103,	0,00	0,00
2023	0,00	34.104.526.420	29.755.595.199	119.326.461.87	5.105.919.323,	0,00	0,00
2024	1.087.632.000,	23.888.796.704	20.826.064.638	103.545.442.71	5.705.321.800,	0,00	0,00

Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.

3) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan salah satu komponen penting dalam struktur belanja daerah yang dialokasikan untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak dan tidak terprediksi sebelumnya, seperti penanggulangan bencana alam, kejadian luar biasa, atau keadaan darurat lainnya yang memerlukan respon cepat dari pemerintah daerah. Keberadaan pos anggaran ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dan kesiapsiagaan dalam pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menjadi instrumen fleksibilitas fiskal untuk menjamin kesinambungan pelayanan publik di tengah situasi yang tidak terduga.

Tabel 2.110
Target dan Realisasi serta Pertumbuhan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2020	25.063.265.013	22.132.345.315	88,31	7,07	18,31
2021	1.500.000.000	618.675.500	41,25	(94,02)	(97,20)
2022	3.119.390.571	616.219.436	19,75	107,96	(0,40)
2023	3.000.000.000	1.729.558.250	57,65	(3,83)	180,67
2024	10.000.000.000	7.691.341.000	76,91	233,33	-
Rata-Rata			**56,77**	**50,10**	**20,28**

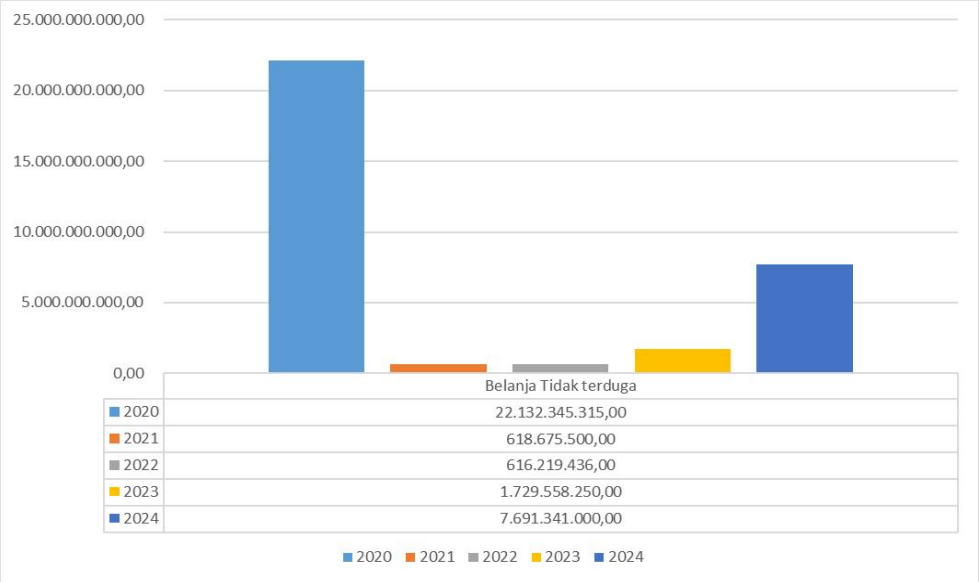
Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

Belanja Tidak Terduga menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan selama periode lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, realisasi belanja ini mencapai angka tertinggi, yaitu sebesar Rp22,13 miliar, yang kemungkinan besar berkaitan dengan kebutuhan penanganan darurat pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2021 dan 2022, realisasi belanja ini menurun drastis masing-masing menjadi hanya Rp618,67 juta dan Rp616,21 juta, mencerminkan situasi yang lebih stabil atau terbatasnya kebutuhan pengeluaran tidak terduga pada periode tersebut.

Pada tahun 2023, kembali terjadi peningkatan menjadi Rp1,73 miliar, yang mengindikasikan adanya kebutuhan mendadak yang cukup besar dibanding dua tahun sebelumnya—kemungkinan berkaitan dengan kejadian luar biasa seperti bencana alam atau kedaruratan lainnya. Sementara itu, pada tahun 2024, belanja ini kembali meningkat cukup signifikan ke angka Rp7,69 miliar, yang bisa mencerminkan antisipasi terhadap risiko atau kebutuhan mendesak pada akhir periode RPJMD.

Secara keseluruhan, rata-rata belanja tidak terduga selama lima tahun masih menunjukkan tren yang tidak konsisten, sesuai dengan sifat dasarnya yang bersifat insidentil dan tidak direncanakan secara rinci sejak awal tahun anggaran. Hal ini mengindikasikan bahwa perencanaan anggaran daerah tetap memperhitungkan fleksibilitas dalam menghadapi dinamika kebutuhan mendadak.

Gambar 2.116
Grafik Realisasi Belanja Tidak Terduga
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024



Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024

4) Belanja Transfer

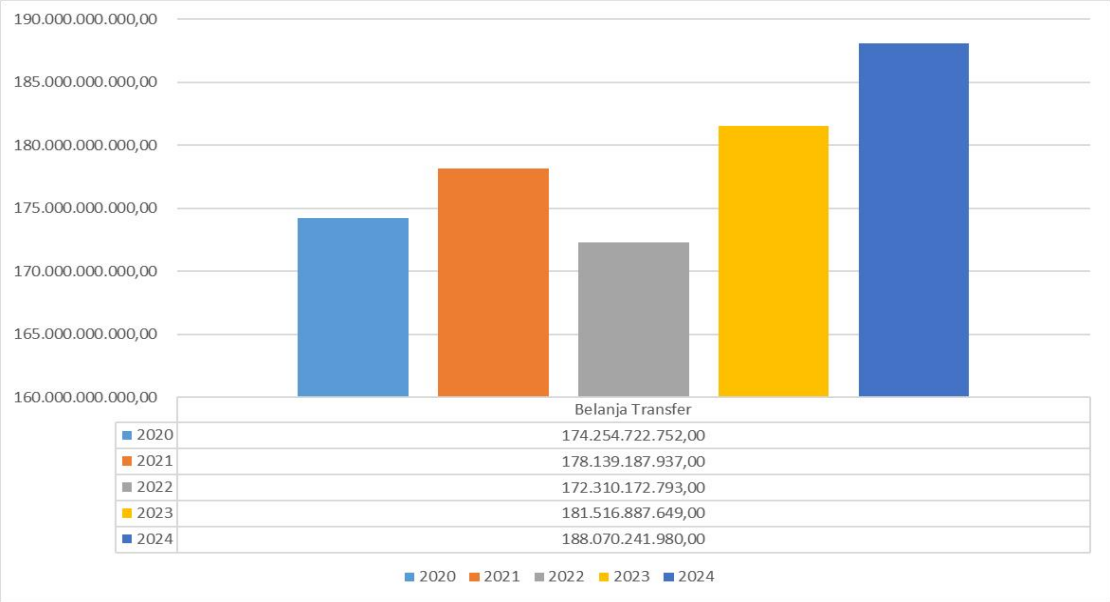
Belanja Transfer merupakan salah satu komponen penting dalam struktur belanja daerah yang bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan oleh pemerintah nagari sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah di tingkat lokal. Belanja ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik melalui dukungan keuangan kepada pemerintah nagari, baik dalam bentuk Dana Desa, Alokasi Dana Nagari (ADN), maupun jenis transfer lainnya.

Selama kurun waktu 2020 hingga 2024, Belanja Transfer Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan kecenderungan yang relatif stabil dengan tren kenaikan moderat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, belanja transfer tercatat sebesar Rp174,25 miliar, kemudian mengalami sedikit peningkatan di tahun 2021 menjadi Rp178,14 miliar atau naik sekitar 2,23%. Kenaikan ini mengindikasikan komitmen daerah dalam mendukung pendanaan untuk desa atau badan penerima lainnya secara konsisten. Pada tahun 2022, terjadi sedikit penurunan menjadi Rp172,31 miliar (turun sekitar 3,28%) dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh efisiensi alokasi anggaran atau perubahan kebijakan penyaluran transfer yang lebih selektif.

Pada tahun 2023, belanja transfer kembali meningkat menjadi Rp181,52 miliar, menunjukkan pemulihan atau peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan di tingkat lokal, khususnya melalui dana transfer. Tren ini berlanjut di tahun 2024 dengan kenaikan menjadi Rp188,07 miliar, mencerminkan pertumbuhan sekitar 3,61% dibanding tahun sebelumnya. Secara keseluruhan,

belanja transfer selama lima tahun terakhir bersifat stabil dengan tren kenaikan perlahan, yang menunjukkan adanya kesinambungan kebijakan transfer daerah ke desa/lembaga lain sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan dan penguatan kapasitas lokal.

Gambar 2.117
Grafik Realisasi Belanja Transfer
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024



Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024

Tabel 2.111
Target dan Realisasi serta Pertumbuhan Belanja Transfer Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2020	175.407.973.000	174.254.722.752	99,34	(0,04)	(0,04)
2021	179.645.131.348	178.139.187.937	99,16	2,42	2,23
2022	174.107.080.269	172.310.172.793	98,97	(3,08)	(3,27)
2023	184.557.660.848	181.516.887.649	98,35	6,00	5,34
2024	189.895.665.818	188.070.241.980	99,04	2,89	3,61
Rata-Rata			**98,97**	**1,64**	**1,57**

Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

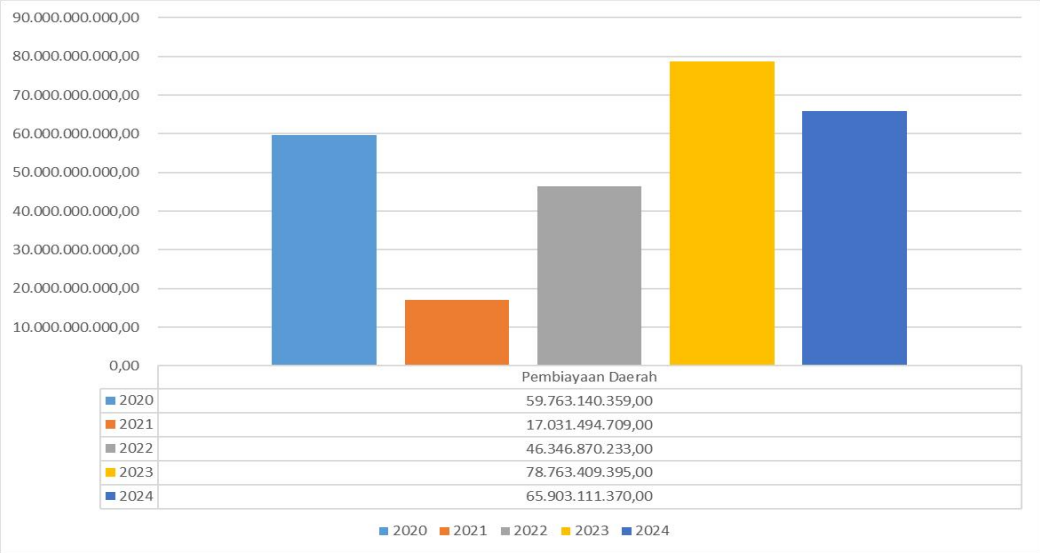
c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan bagian penting dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berfungsi sebagai instrumen untuk menutup defisit atau menampung surplus anggaran. Pembiayaan ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu

penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, yang masing-masing mencerminkan sumber dan penggunaan dana yang tidak termasuk dalam pendapatan atau belanja daerah.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, pembiayaan memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan anggaran serta mendukung keberlanjutan program pembangunan. Analisis terhadap tren pembiayaan daerah dari tahun ke tahun memberikan gambaran mengenai kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah daerah, termasuk kecenderungan dalam penarikan pinjaman daerah, penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), serta penyertaan modal pemerintah daerah.

Gambar 2.118
Grafik Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024



Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024

Realisasi defisit/surplus serta pembiayaan daerah Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2020–2024 menunjukkan tren defisit yang meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, pendapatan daerah tercatat sebesar Rp1,305 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp1,343 triliun, menghasilkan defisit sebesar Rp37,936 miliar. Untuk menutupi defisit ini, pembiayaan yang diterima mencapai Rp59,7 miliar, dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp4,6 miliar, sehingga pembiayaan netto mencapai Rp55,1 miliar, yang berkontribusi pada SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) sebesar Rp17,1 miliar.

Pada tahun 2021, pendapatan daerah meningkat menjadi Rp1,363 triliun, tetapi belanja daerah juga meningkat lebih signifikan menjadi Rp1,326 triliun, menghasilkan defisit sebesar Rp36,7 miliar. Pembiayaan yang diterima mencapai Rp17,03 miliar, dengan pengeluaran sebesar Rp7,4 miliar, sehingga pembiayaan netto mencapai Rp9,6 miliar dan SILPA sebesar Rp6,3 miliar.

Pada tahun 2022, meskipun pendapatan meningkat menjadi Rp1,348 triliun, belanja daerah yang lebih besar sebesar Rp1,314 triliun

menyebabkan defisit Rp33,1 miliar. Pembiayaan netto yang diterima adalah Rp45,0 miliar, sehingga SILPA tahun tersebut mencapai Rp78,7 miliar. Tren defisit semakin meningkat pada tahun 2023 dengan nilai defisit sebesar Rp11,8 miliar, meskipun pendapatan meningkat menjadi Rp1,394 triliun dan belanja daerah menjadi Rp1,405 triliun. Pembiayaan netto yang diterima adalah Rp77,7 miliar, sehingga SILPA tetap tinggi di angka Rp65,6 miliar.

Pada tahun 2024, defisit meningkat signifikan menjadi Rp23,2 miliar, dengan pendapatan sebesar Rp1,427 triliun dan belanja mencapai Rp1,450 triliun. Namun, dengan pembiayaan netto sebesar Rp63,8 miliar, SILPA tetap terjaga di angka Rp40,4 miliar.

Tabel 2.112
Realisasi Defisit/Surplus serta Pembiayaan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN	1.305.720.742.443	1.363.454.281.993	1.348.628.181.500	1.394.096.335.145	1.427.460.140.923
BELANJA	1.343.677.078.853	1.326.677.906.469	1.314.912.642.338	1.405.956.633.170	1.450.692.272.383
SURPLUS/DEFISIT	(37.956.336.410)	36.776.375.524	33.715.539.162	(11.860.298.026)	(23.232.131.459)
PEMBIAYAAN	59.763.140.359	17.031.494.709	46.346.870.233	78.763.409.395	65.903.111.370
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	59.763.140.359	17.031.494.709	46.346.870.233	78.763.409.395	65.903.111.370
PENGGUNAAN SILPA	56.662.140.359	17.031.494.709	46.346.870.233	78.763.409.395	65.903.111.370
PENERIMAAN UTANG JANGKA PENDEK BLUD-PINJAMAN BANK (bpd)	3.101.000.000	-	-	-	-
PINJAMAN DALAM NEGERI-LEMBAGA KEUANGAN BANK	-	-	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.612.493.788	7.461.000.000	1.299.000.000	1.000.000.000	2.206.000.000
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH	750.000.000	7.461.000.000	1.299.000.000	1.000.000.000	2.206.000.000
PEMBAYARAN POKOK PINJAMAN DALAM NEGERI-SEKTOR PERBANKAN	3.862.493.788	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	55.150.646.571	9.570.494.709	45.047.870.233	77.763.409.395	63.697.111.370
SILPA	17.194.310.161	46.346.870.233	78.763.409.395	65.903.111.370	40.464.979.911

Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024

1) Penerimaan Pembiayan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah merupakan elemen strategis dalam struktur keuangan Kabupaten Padang Pariaman yang digunakan untuk menutup defisit anggaran serta membiayai kebutuhan belanja yang tidak dapat ditutupi oleh pendapatan murni. Selama periode 2020–2024, komponen ini menunjukkan peran penting dalam menjaga keseimbangan fiskal daerah, dengan kontribusi utamanya berasal dari SiLPA. Pola penerimaan yang fluktuatif mencerminkan respons adaptif pemerintah daerah terhadap dinamika fiskal, di mana peningkatan atau

penurunan pembiayaan kerap dipengaruhi oleh tekanan eksternal seperti pandemi, kebutuhan pembangunan, atau efisiensi dalam pengelolaan belanja dan pendapatan.

Peningkatan penerimaan pembiayaan terjadi pada tahun 2023 sebesar Rp78,76 miliar, hal ini menunjukkan peningkatan kebutuhan fiskal dalam pelaksanaan program prioritas atau menutup defisit yang melebar. Sebaliknya, penurunan tajam pada tahun 2021 mencerminkan keberhasilan pengendalian fiskal atau efisiensi anggaran. Meski terjadi penurunan pada 2024, nilai penerimaan tetap tinggi (Rp65,90 miliar), menegaskan bahwa pembiayaan masih menjadi instrumen penting dalam menopang APBD. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan perlu dirancang secara hati-hati agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak menciptakan ketergantungan jangka panjang terhadap sumber dana non-pendapatan

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan di Kabupaten Padang Pariaman selama periode 2020–2024 menunjukkan kecenderungan yang strategis dan selektif, dengan fokus utama pada penyertaan modal pemerintah daerah ke BUMD sebagai langkah mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Puncaknya terjadi pada tahun 2021 dengan nilai Rp7,46 miliar, mengindikasikan dorongan kuat terhadap peran BUMD dalam mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, pengeluaran pada tahun 2020 juga mencerminkan pelunasan kewajiban utang, menandakan upaya menjaga kredibilitas fiskal dan manajemen utang yang sehat.

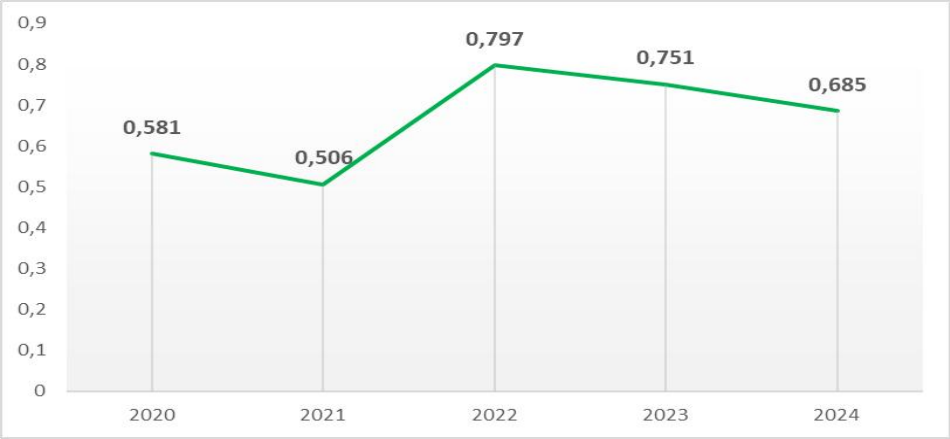
Mulai tahun 2021 hingga 2024, tidak terdapat lagi pembayaran pokok pinjaman, yang dapat diartikan sebagai bentuk keberhasilan dalam menyelesaikan kewajiban pembiayaan sebelumnya atau kebijakan penghentian penarikan pinjaman baru. Tren penurunan pengeluaran pembiayaan pada tahun-tahun berikutnya, yang tetap diarahkan pada penyertaan modal, menunjukkan konsistensi dalam mengalokasikan dana pembiayaan untuk investasi jangka panjang yang potensial mendukung kemandirian fiskal daerah. Dengan demikian, pola pengeluaran pembiayaan ini mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih prudent dan terarah, sejalan dengan prinsip tata kelola keuangan yang efisien, akuntabel, dan produktif.

2.2.1.2 Analisis Kesehatan Fiskal Daerah

a. Rasio Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas fiskal daerah merupakan ukuran kemampuan keuangan suatu daerah dalam mendanai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri dengan mengandalkan sumber-sumber penerimaan yang sah. Rasio kapasitas fiskal menjadi instrumen penting untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) serta memanfaatkan transfer dari pemerintah pusat secara efektif. Berikut ditampilkan perkembangan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Padang Pariaman selama lima tahun terakhir, beserta kriteria yang digunakan.

Gambar 2.119
Kemampuan Fiskal Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2025

Gambar 2.119 menunjukkan kemampuan fiskal Kabupaten Padang Pariaman selama lima tahun tren mengalami fluktuatif dengan kecenderungan turun pasca pandemi *covid*-19 dari pada tahun 2022 indeks bernilai 0,80 menjadi 0,69 pada tahun 2024.

Tabel 2. 113
Indeks Kemampuan Fiskal Daerah
Kabupaten Padang Pariaman

Rentang IKFD	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
IKDF < 0,530	sangat rendah
0,530 ≤ IKDF < 0,727	rendah
0,727 ≤ IKDF < 1,053	Sedang
1,053 ≤ IKDF < 1,838	Tinggi
IKFD ≥ 1,838	Sangat tinggi

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2025

Indeks kemampuan fiskal daerah (IKFD) Kabupaten Padang Pariaman dalam lima tahun terakhir berada pada kisaran antara 0,50 hingga 0,80. Jika dibandingkan dengan kriteria kategori kapasitas fiskal daerah, maka posisi Kabupaten Padang Pariaman cenderung berada pada kategori rendah hingga sedang. Pada tahun 2020 dan 2021, nilai IKFD masing-masing 0,581 dan 0,506 menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah masih berada pada kategori rendah. Kondisi ini mencerminkan tingginya ketergantungan Kabupaten Padang Pariaman terhadap transfer pemerintah pusat dalam membiayai kebutuhan daerahnya.

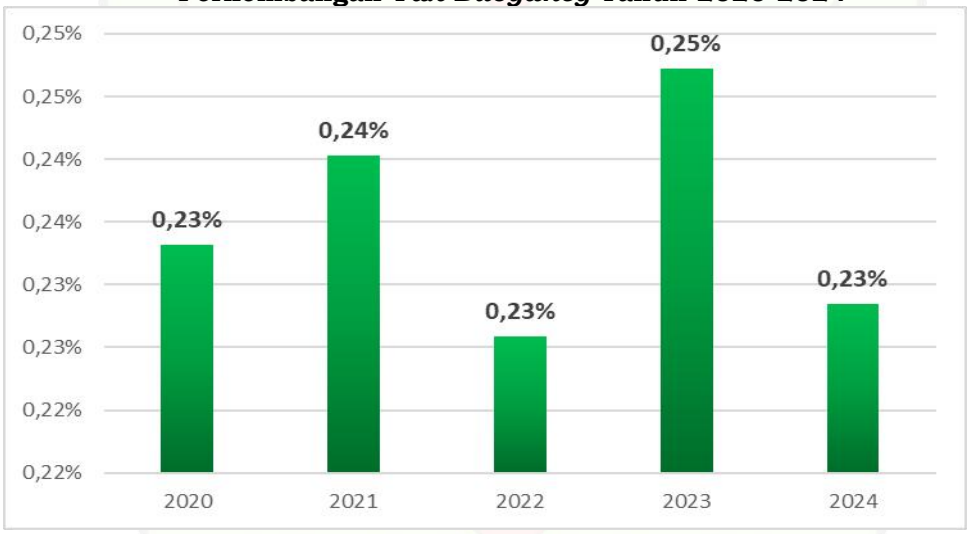
Selanjutnya, pada tahun 2022, indeks kemampuan fiskal meningkat signifikan menjadi 0,797 sehingga masuk ke kategori sedang. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kemampuan fiskal pasca pandemi, di mana daerah mulai mampu meningkatkan penerimaan yang bersumber dari PAD maupun mengoptimalkan sumber fiskal lainnya. Namun, tren tersebut tidak berlanjut pada tahun 2023 dan 2024, di mana IKFD kembali menurun menjadi 0,751 dan 0,685 yang menempatkan Kabupaten Padang Pariaman kembali ke kategori rendah.

b. *Tax Buoyancy*

Tax buoyancy merupakan salah satu indikator penting dalam menganalisis kinerja penerimaan pajak daerah. Indikator ini mengukur seberapa responsif penerimaan pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi regional (PDRB). Dengan kata lain, tax buoyancy menunjukkan kemampuan sistem perpajakan daerah dalam mengikuti dinamika pertumbuhan ekonomi.

Jika nilai *tax buoyancy* lebih besar dari 1, maka penerimaan pajak daerah tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi, yang berarti sistem perpajakan daerah bersifat elastis. Sebaliknya, jika nilainya kurang dari 1, penerimaan pajak daerah tumbuh lebih lambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi, sehingga menunjukkan sifat inelastis. Sementara itu, apabila nilainya sama dengan 1, pertumbuhan pajak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Berikut ditampilkan perkembangan *Tax Buoyancy* Kabupaten Padang Pariaman selama lima tahun terakhir.

Gambar 2.120
Perkembangan *Tax Buoyancy* Tahun 2020-2024



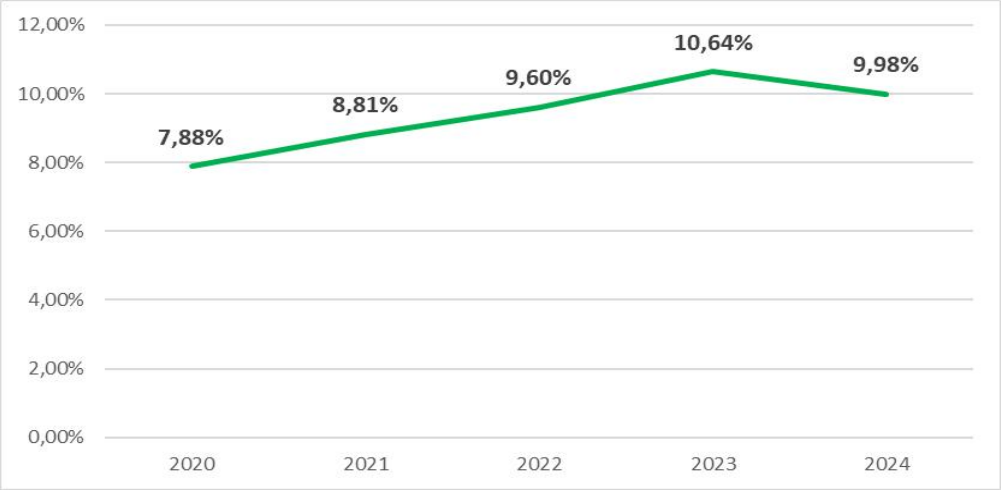
Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2025

Perkembangan *tax buoyancy* Kabupaten Padang Pariaman pada periode 2020–2024 menunjukkan tren yang relatif stabil dengan sedikit fluktuasi. Pada tahun 2020, nilai *tax buoyancy* tercatat sebesar 0,23 dan mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2021 menjadi 0,24. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan kembali ke level 0,23. Kondisi ini berbalik pada tahun 2023, di mana *tax buoyancy* mencapai titik tertinggi sebesar 0,25, sebelum kemudian menurun kembali menjadi 0,23 pada tahun 2024. Angka *tax buoyancy* yang berada di bawah 1 menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak daerah Kabupaten Padang Pariaman masih lebih lambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Hal ini menandakan bahwa sistem perpajakan daerah masih bersifat inelastis, sehingga kenaikan PDRB belum sepenuhnya mampu diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak daerah.

c. *Kemampuan Mendanai Belanja Daerah*

Kemampuan daerah dalam mendanai belanja daerah merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat kemandirian fiskal dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Indikator ini mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya, baik belanja rutin maupun belanja pembangunan, dengan mengandalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) serta dukungan transfer dari pemerintah pusat. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam mendanai belanja, semakin besar pula kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan publik tanpa terlalu bergantung pada bantuan eksternal

Gambar 2.121
Kemampuan Mendanai Belanja Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2025

Gambar 2.121 di atas menunjukkan kemampuan Kabupaten Padang Pariaman dalam mendanai belanja daerah selama periode 2020–2024. dengan tren yang relatif meningkat meskipun mengalami sedikit fluktuasi pada tahun terakhir. Pada tahun 2020, kemampuan mendanai belanja daerah tercatat sebesar 7,88%, kemudian meningkat secara konsisten pada tahun 2021 sebesar 8,81% dan tahun 2022 sebesar 9,60%. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2023, yaitu mencapai 10,64%, yang mencerminkan adanya perbaikan dalam kemandirian fiskal daerah. Namun demikian, pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan menjadi 9,98%, meskipun masih berada pada level yang relatif lebih tinggi dibandingkan awal periode pengamatan.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Padang Pariaman secara bertahap memperbaiki kapasitas fiskalnya untuk membiayai belanja daerah, meskipun masih terdapat ketergantungan pada sumber eksternal seperti transfer pusat. Ke depan, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kunci penting untuk menjaga keberlanjutan peningkatan kemampuan mendanai belanja daerah.

d. *Belanja Pegawai*

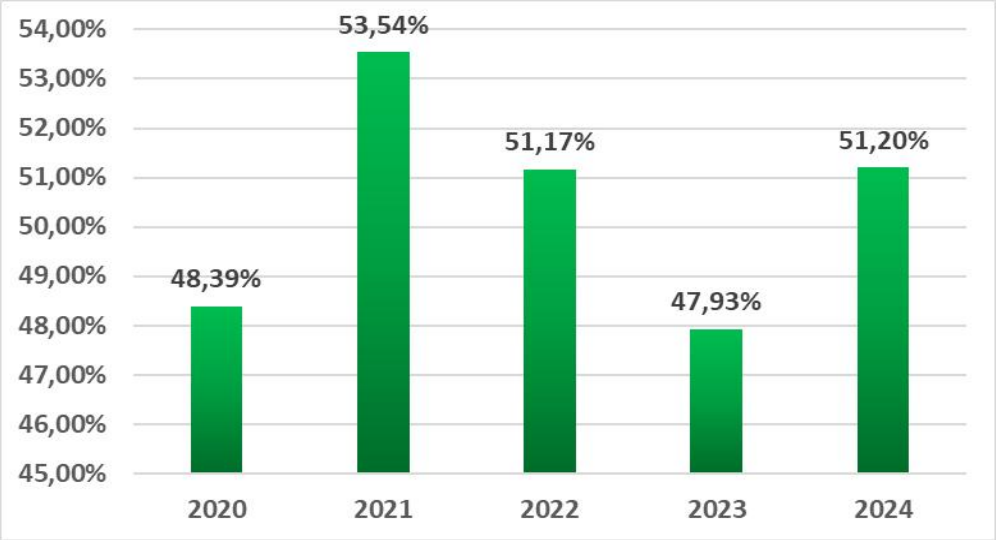
Belanja Pegawai merupakan salah satu komponen terbesar dalam struktur belanja daerah yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk gaji, tunjangan, serta berbagai pengeluaran lain yang melekat pada pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja pegawai memiliki peran penting karena menjadi instrumen utama dalam mendukung kinerja aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, pembangunan, dan tata kelola pemerintahan. Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah sering dijadikan indikator untuk menilai efisiensi serta kualitas pengelolaan keuangan daerah. Rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020 hingga 2024 secara lebih jelas dapat disajikan pada Tabel 2.114 dan Gambar 2.122 di bawah ini:

Tabel 2.114
Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024

Tahun	Belanja Pegawai	Belanja	Proporsi
2020	650.205.096.055,00	1.343.677.078.853,00	**48,39%**
2021	710.253.561.401,67	1.326.677.906.468,67	**53,54%**
2022	672.789.484.454,42	1.314.912.642.338,42	**51,17%**
2023	673.846.730.780,32	1.405.956.633.170,01	**47,93%**
2024	742.757.984.421,00	1.450.692.272.382,68	**51,20%**
Rata-Rata	689.970.571.422,48	1.368.383.306.642,56	**50,44%**

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2025

Gambar 2.122
Tren Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2025

Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah Kabupaten Padang Pariaman selama periode 2020–2024 menunjukkan

fluktuasi dengan rata-rata sebesar 50,44%. Artinya, lebih dari separuh belanja daerah masih didominasi oleh belanja pegawai, sehingga ruang fiskal untuk membiayai belanja pembangunan menjadi relatif terbatas.

Pada tahun 2020, proporsi belanja pegawai tercatat sebesar 48,39%, kemudian meningkat tajam pada tahun 2021 menjadi 53,54%. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan beban belanja pegawai, kemungkinan dipengaruhi oleh penyesuaian gaji atau tunjangan aparatur pasca pandemi. Selanjutnya pada tahun 2022, proporsi belanja pegawai sedikit menurun menjadi 51,17%, dan terus menurun hingga mencapai titik terendah pada tahun 2023 sebesar 47,93%. Namun pada tahun 2024, proporsi kembali naik menjadi 51,20%, menunjukkan kecenderungan bahwa belanja pegawai masih menjadi salah satu komponen utama dalam struktur belanja daerah.

Jika dilihat secara keseluruhan, tren ini memperlihatkan bahwa Kabupaten Padang Pariaman masih menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan alokasi belanja antara belanja aparatur dan belanja publik yang lebih produktif. Idealnya, proporsi belanja pegawai dijaga agar tidak melebihi batas aman (maksimal sekitar 50% dari total belanja daerah sebagaimana rekomendasi dalam praktik pengelolaan keuangan daerah yang sehat). Dengan rata-rata proporsi 50,44%, kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar belanja daerah masih terserap untuk kebutuhan rutin aparatur, sehingga ruang fiskal untuk mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan publik menjadi relatif sempit.

e. *Belanja Modal*

Belanja modal merupakan salah satu komponen penting dalam struktur belanja daerah karena secara langsung berhubungan dengan upaya pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana publik yang menunjang pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah menjadi indikator sejauh mana pemerintah daerah memberikan prioritas pada pengeluaran yang bersifat produktif dan berorientasi jangka panjang, dibandingkan dengan belanja yang bersifat rutin. Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020 hingga 2024 secara lebih jelas dapat disajikan pada Tabel 2.115 di bawah ini:

Tabel 2. 115
Proporsi Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024

TAHUN	BELANJA MODAL	TOTAL BELANJA	PROPORSI
2020	182.335.821.634	1.343.677.078.853	13,57%
2021	137.156.605.722	1.326.677.906.469	10,34%
2022	135.087.564.500	1.314.912.642.338	10,27%
2023	188.292.502.819	1.405.956.633.170	13,39%
2024	155.053.257.852	1.450.692.272.383	10,69%
Rata-Rata	159.585.150.505	1.368.383.306.643	11,65%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2025

Pada tahun 2020, proporsi belanja modal mencapai 13,57%, yang merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Namun, pada tahun 2021 dan 2022 proporsi tersebut mengalami penurunan cukup signifikan masing-masing menjadi 10,34% dan 10,27%. Meskipun sempat meningkat kembali pada tahun 2023 hingga 13,39%, angka ini kembali turun pada tahun 2024 menjadi 10,69%. Fluktuasi ini mencerminkan adanya keterbatasan ruang fiskal daerah dalam mempertahankan alokasi belanja produktif untuk pembangunan infrastruktur.

Secara keseluruhan, proporsi belanja modal Kabupaten Padang Pariaman masih berada pada level rendah (di bawah 20%), sehingga menunjukkan bahwa orientasi belanja daerah masih lebih didominasi oleh belanja rutin dibandingkan belanja yang bersifat produktif. Kondisi ini dapat membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas layanan publik secara berkelanjutan.

2.2.1.3 Neraca Daerah

Secara umum, struktur neraca keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan pertumbuhan positif yang signifikan pada sisi aset dan ekuitas dalam periode 2020–2024. Total aset mengalami peningkatan tajam dari Rp830,02 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp1.340,03 miliar pada tahun 2024, mencerminkan penguatan posisi keuangan daerah. Lonjakan terbesar terjadi pada tahun 2022, terutama dipicu oleh kenaikan yang sangat tinggi pada aset lancar, dari sekitar Rp20,47 miliar (2021) menjadi Rp118,05 miliar (2022), yang kemungkinan besar disebabkan oleh peningkatan kas daerah atau piutang jangka pendek.

Investasi jangka panjang juga mengalami pertumbuhan yang signifikan, naik dari Rp57,41 miliar (2020) menjadi Rp92,83 miliar (2024), menunjukkan konsistensi dalam kebijakan penyertaan modal dan penempatan investasi yang mendukung penguatan kapasitas fiskal jangka panjang. Aset tetap sebagai komponen terbesar dari total aset juga meningkat stabil, mencerminkan akumulasi aset infrastruktur dan barang milik daerah dari tahun ke tahun. Namun, aset lainnya cenderung menurun dari Rp3,93 miliar (2020) menjadi Rp1,74 miliar (2024), yang dapat disebabkan oleh reklasifikasi aset atau penyesuaian administratif.

Di sisi kewajiban, terlihat bahwa Pemda berhasil menjaga beban utang tetap rendah, dengan hanya mencatat kewajiban jangka pendek dan tanpa adanya kewajiban jangka panjang selama lima tahun terakhir. Setelah mengalami lonjakan pada tahun 2022 (Rp16,05 miliar), nilai kewajiban jangka pendek kembali turun menjadi Rp5,93 miliar pada 2024, menandakan pengelolaan utang jangka pendek yang cukup efektif dan terkendali.

Secara umum, struktur neraca keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan pertumbuhan positif yang signifikan pada sisi aset dan ekuitas dalam periode 2020–2024. Total aset mengalami peningkatan tajam dari Rp830,02 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp1.340,03 miliar pada tahun 2024, mencerminkan penguatan posisi keuangan daerah. Lonjakan terbesar terjadi pada

tahun 2022, terutama dipicu oleh kenaikan yang sangat tinggi pada aset lancar, dari sekitar Rp20,47 miliar (2021) menjadi Rp118,05 miliar (2022), yang kemungkinan besar disebabkan oleh peningkatan kas daerah atau piutang jangka pendek.

Investasi jangka panjang juga mengalami pertumbuhan yang signifikan, naik dari Rp57,41 miliar (2020) menjadi Rp92,83 miliar (2024), menunjukkan konsistensi dalam kebijakan penyertaan modal dan penempatan investasi yang mendukung penguatan kapasitas fiskal jangka panjang. Aset tetap sebagai komponen terbesar dari total aset juga meningkat stabil, mencerminkan akumulasi aset infrastruktur dan barang milik daerah dari tahun ke tahun. Namun, aset lainnya cenderung menurun dari Rp3,93 miliar (2020) menjadi Rp1,74 miliar (2024), yang dapat disebabkan oleh reklasifikasi aset atau penyesuaian administratif.

Di sisi kewajiban, terlihat bahwa Pemda berhasil menjaga beban utang tetap rendah, dengan hanya mencatat kewajiban jangka pendek dan tanpa adanya kewajiban jangka panjang selama lima tahun terakhir. Setelah mengalami lonjakan pada tahun 2022 (Rp16,05 miliar), nilai kewajiban jangka pendek kembali turun menjadi Rp5,93 miliar pada 2024, menandakan pengelolaan utang jangka pendek yang cukup efektif dan terkendali.

Ekuitas daerah sebagai indikator akumulasi kekayaan bersih juga menunjukkan peningkatan signifikan dari Rp822,25 miliar (2020) menjadi Rp1.340,03 miliar (2024), mencerminkan peningkatan kapasitas fiskal dan akumulasi aset bersih yang sehat. Kenaikan terbesar terjadi pada 2022 yang sejalan dengan lonjakan aset lancar, meskipun nilai ekuitas sempat stagnan pada 2023 sebelum kembali meningkat pada 2024

Tabel 2.116
Neraca Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	RATA_RATA PERTUMBUHAN
1	ASET						
2	ASET LANCAR						
3	Kas di Kas Daerah	1.460.710.189	5.324.262.445	73.254.300.095	50.486.009.485	28.984.627.889	111,06%
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	363.827.954	8.281.336	12.703	312.658	-	-100,00%
5	Kas di Bendahara Penerimaan	-	172.917.200	-	-	-	0,00%
6	Kas BLUD	-	-	5.365.365.110	6.651.567.237	7.304.357.110	0,00%
7	Kas Dana BOSP	383.303.489	65.236.642	143.751.486	119.055.718	109.706.781	-26,86%
8	Kas Lainnya	581.650.747	321.538.311	-	8.646.498.930	4.065.634.413	62,60%
9	Piutang Pajak Daerah	2.084.592.053	2.868.926.002	47.004.150.766	57.349.860.172	66.558.671.364	137,71%
10	Piutang Retribusi Daerah	997.924.397	1.092.219.639	572.032.650	836.782.650	576.240.650	-12,83%
11	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-	-	112.952.405	189.405.791	208.499.763	0,00%
12	Piutang Atransfer Antar Daerah	4.964.835.818	6.017.751.497	11.461.697.483	26.337.599.443	29.919.993.627	56,68%
13	Piutang Lainnya	755.797.666	755.797.666	11.140.305	11.140.305	11.140.305	-65,16%
14	Penyisihan Piutang	(1.637.461.911)	(1.637.461.911)	(33.464.276.708)	(36.869.449.427)	(42.600.944.493)	125,85%
15	Beban Dibayar Dimuka	-	-	-	207.989.719	197.458.594	0,00%
16	Persediaan	6.614.159.321	5.792.752.528	13.589.991.988	15.879.033.953	15.906.615.980	24,53%
17	Jumlah Aset Lancar	16.569.339.723	20.475.921.230	118.051.188.284	129.845.806.634	111.242.001.982	60,97%
18	INVESTASI JANGKA PANJANG						
19	Investasi Non permanen	-	-	-	-	-	0,00%
20	Investasi Non permanen Lainnya	2.500.000.000	2.500.000.000	4.232.465.232	4.232.465.232	4.224.465.232	14,01%
21	Penyisihan Piutang Inv.Non permanen	(1.760.760.500)	(1.746.423.500)	(4.232.465.232)	(4.232.465.232)	(4.224.465.232)	24,46%
22	Jumlah Investasi Non permanen	739.239.500	753.576.500	-	-	-	-100,00%
23	Investasi Permanen	-	-	-	-	-	0,00%
24	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	56.672.899.000	56.672.899.000	94.766.691.331	91.576.556.217	92.835.113.213	13,13%
25	Jumlah Investasi Permanen	-	-	94.766.691.331	91.576.556.217	92.835.113.213	100,00%
26	Jumlah Investasi Jangka Panjang	57.412.138.500	57.426.475.500	94.766.691.331	91.576.556.217	92.835.113.213	12,77%
27	ASET TETAP						
28	Tanah	99.290.291.029	98.868.789.029	210.556.816.749	213.088.316.749	214.168.748.749	21,19%
29	Peralatan dan Mesin	228.433.239.367	232.772.681.055	466.957.311.323	478.877.100.279	497.426.717.247	21,48%
30	Gedung dan Bangunan	497.738.203.156	525.690.568.143	1.062.489.762.711	1.081.759.974.521	1.111.965.690.028	22,26%

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	RATA_RATA PERTUMBUHAN
31	Jalan, Jaringan dan Irigasi	809.014.409.820	834.738.817.317	2.520.040.258.080	2.566.695.708.812	2.681.736.052.936	34,93%
32	Aset Tetap Lainnya	77.608.877.353	78.131.932.473	84.963.226.604	90.073.340.927	96.005.833.604	5,46%
33	Konstruksi dalam Pengerjaan	59.298.079.691	65.617.242.128	71.948.132.558	83.838.743.955	65.044.837.663	2,34%
34	Akumulasi Penyusutan	(1.019.274.671.467)	(1.124.938.638.026)	(3.329.190.445.270)	(3.412.188.803.156)	(3.526.163.650.186)	36,38%
35	Jumlah Aset Tetap	752.108.428.949	710.881.392.117	1.123.765.062.757	1.102.214.382.087	1.140.184.230.041	10,96%
36	ASET LAINNYA						
37	Tagihan Jangka Panjang	2.433.377.710	2.510.166.664	141.596.387	141.596.387	141.596.387	-50,89%
38	Aset Tidak Berwujud	687.162.000	687.162.000	5.768.892.687	6.652.982.964	6.702.682.964	76,72%
39	Kas yang dibatasi penggunaannya	-	126.935.944	-	-	-	0,00%
40	Aset Lain-Lain	(654.391.167)	(687.162.000)	19.231.950.358	16.809.387.362	18.565.560.298	
41	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	18.523.128.921	15.025.115.805	(4.239.476.519)	(4.952.890.167)	(5.594.737.214)	
42	Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain	(17.055.473.488)	(13.129.065.280)	(18.734.284.951)	(16.311.721.955)	(18.067.894.891)	1,45%
43	Dana Transfer Treasury Deposit Fasilitiy	-	-	1.605.774.707	-	-	
44	Jumlah Aset Lainnya	3.933.803.976	4.533.153.132	3.774.452.669	2.339.354.592	1.747.207.544	-18,36%
45	JUMLAH ASET	830.023.711.148	793.316.941.980	1.340.357.325.040	1.325.976.099.529	1.346.008.552.781	12,85%
46	KEWAJIBAN						
47	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
48	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	175.830.629	3.113.264.201	20.000	332.658	20.000	-89,67%
49	Pendapatan Diterima Dimuka	19.305.450	70.808.016	1.475.775.000	1.744.322.488	1.394.839.416	191,55%
50	Utang Belanja	2.707.045.901	714.975.199	14.581.352.481	6.337.311.835	4.539.909.072	13,80%
51	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.872.912.648	7.937.000				-100,00%
52	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	7.775.094.628	3.906.984.416	16.057.147.481	8.081.966.981	5.934.768.488	-6,53%
53	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
54	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	41.824.407	41.824.407	41.824.407	0,00%
55	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (52)	-	-	41.824.407	41.824.407	41.824.407	0,00%
56	JUMLAH KEWAJIBAN	7.775.094.628	3.906.984.416	16.098.971.888	8.123.791.388	5.976.592.895	-6,37%
57	EKUITAS						
58	EKUITAS	822.248.616.520	789.409.957.564	1.324.258.353.152	1.317.852.308.141	1.340.031.959.885	12,99%
59	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	830.023.711.148	793.316.941.980	1.340.357.325.041	1.325.976.099.529	1.340.031.959.885	12,72%

Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020,2021,2022,2023,2024

Berdasarkan tabel 2.116, Selama periode 2020 hingga 2024 secara umum terjadi peningkatan signifikan pada total aset daerah yang tumbuh rata-rata sebesar 12,85% per tahun. Peningkatan terbesar terjadi pada kelompok aset tetap seperti jalan, jaringan, dan irigasi, serta gedung dan peralatan, yang mencerminkan adanya penguatan investasi pada infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, kenaikan juga diiringi oleh meningkatnya akumulasi penyusutan, yang menandakan penggunaan aset yang makin intensif dan perlu diantisipasi melalui strategi pemeliharaan dan peremajaan aset.

Pada sisi kewajiban, secara umum menunjukkan tren menurun, khususnya kewajiban jangka pendek yang berkurang hingga -6,53% rata-rata per tahun. Pemerintah daerah juga terlihat sangat konservatif dalam pengelolaan utang, terbukti dengan nihilnya kewajiban jangka panjang dan rendahnya proporsi kewajiban terhadap total aset. Hal ini menunjukkan tata kelola keuangan yang berhati-hati, namun juga memberi ruang untuk eksplorasi pendanaan alternatif seperti pinjaman daerah yang produktif bila dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan.

Ekuitas daerah mengalami pertumbuhan stabil rata-rata 12,99% per tahun, sejalan dengan peningkatan aset dan efisiensi kewajiban. Ini mencerminkan ketergantungan pembiayaan yang lebih besar pada sumber internal dan kemampuan fiskal yang cukup mandiri. Namun, perhatian perlu diberikan pada lonjakan piutang pajak yang belum tertagih serta penurunan nilai aset lainnya yang bisa mengindikasikan penurunan kualitas atau nilai guna aset. Oleh karena itu, penguatan manajemen aset dan optimalisasi pendapatan asli daerah akan menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan fiskal di masa depan.

Rasio likuiditas, yang mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, menunjukkan tren yang sangat positif selama lima tahun terakhir. Rasio lancar meningkat signifikan dari 2,13 pada tahun 2020 menjadi 18,74 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah aset lancar jauh melebihi kewajiban jangka pendek, sehingga daerah berada dalam posisi yang sangat likuid. Kenaikan serupa juga terlihat pada rasio quick (rasio cepat), yang naik dari 1,28 menjadi 16,06 dalam periode yang sama. Kenaikan rasio ini menandakan bahwa Pemerintah Daerah tidak hanya memiliki aset lancar yang cukup, tetapi juga memiliki aset yang sangat likuid (seperti kas dan setara kas) dalam jumlah besar, memperkuat kemampuan untuk memenuhi kewajiban mendesak tanpa mengandalkan persediaan.

Sementara itu, rasio solvabilitas juga menunjukkan kinerja keuangan yang sangat sehat. Rasio total utang terhadap total aset terus menurun dari 0,0094 pada tahun 2020 menjadi hanya 0,0044 pada 2024, yang berarti hanya sekitar 0,44% dari total aset dibiayai oleh utang. Rasio utang terhadap modal pun berada pada level sangat rendah, turun dari 0,0095 menjadi 0,0045. Kedua rasio ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap pembiayaan utang sangat kecil dan menunjukkan struktur modal yang konservatif serta aman. Di sisi lain, rasio aktivitas, khususnya rata-rata umur piutang, memperlihatkan efisiensi pengelolaan piutang yang meningkat. Setelah

melonjak tinggi pada 2020 sebesar 246 hari, umur piutang menurun drastis menjadi hanya 0,0166 hari pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa piutang daerah berhasil ditagih lebih cepat, yang berdampak positif terhadap likuiditas dan kinerja kas daerah.

Tabel 2.117
Rasio Keuangan Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	RASIO LIKUIDITAS					
1	Rasio Lancar	2,1311	5,2409	7,3519	16,0661	18,7441
2	Rasio Quick	1,2804	3,7582	6,5056	14,1014	16,0639
B	RASIO SOLVABILITAS					
1	Rasio Total Hutang terhadap Total Aset	0,0094	0,0049	0,0120	0,0061	0,0044
2	Rasio Hutang Terhadap Modal	0,0095	0,0049	0,0122	0,0062	0,0045
C	RASIO AKTIVITAS					
1	Rata-Rata Umur Piutang	246,2329	10,7850	4,7232	12,0669	0,0166

Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020,2021,2022,2023,2024

2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2025-2030

2.2.2.1 Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah merupakan gambaran estimasi penerimaan keuangan yang akan diperoleh pemerintah daerah pada masa mendatang. Proyeksi ini disusun berdasarkan tren historis realisasi pendapatan, asumsi-asumsi ekonomi makro dan mikro, regulasi fiskal yang berlaku, serta potensi riil sumber-sumber pendapatan yang ada di daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan arah kebijakan fiskal daerah secara lebih terukur dan realistis dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Pendapatan daerah diproyeksikan dari tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dalam melakukan proyeksi, analisis dilakukan terhadap pertumbuhan masing-masing komponen pendapatan pada tahun-tahun sebelumnya serta mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat memengaruhi capaian pendapatan, seperti kondisi ekonomi nasional dan daerah, kebijakan pemerintah pusat, perubahan regulasi perpajakan daerah, serta efektivitas sistem pemungutan dan pengelolaan pendapatan. Dengan demikian, proyeksi pendapatan daerah menjadi salah satu instrumen penting dalam penyusunan rencana keuangan daerah yang kredibel dan akuntabel.

Rata-rata pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama periode 2025 hingga 2030 diproyeksikan

mencapai 10,81% per tahun. Pada tahun 2025, total APBD ditetapkan sebesar Rp1.3.66.205.092.839 dan diharapkan terus mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai Rp2.819.578.080.699 pada tahun 2030. Pertumbuhan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas fiskal untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas pembangunan daerah. Kenaikan alokasi anggaran dirancang secara strategis guna mempercepat pencapaian visi dan misi kepala daerah, termasuk peningkatan kualitas infrastruktur, pelayanan publik, pengembangan ekonomi lokal, serta penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Dengan proyeksi pertumbuhan fiskal yang konsisten ini, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Padang Pariaman, perlu dirumuskan arah kebijakan pengelolaan keuangan yang dapat menjadi pedoman umum dalam pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah untuk periode tahun 2025 hingga 2030.

Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025–2030 disusun dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut mengatur sejumlah batasan fiskal yang wajib dipatuhi oleh pemerintah daerah, yang mulai berlaku efektif pada Tahun Anggaran 2027. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman perlu menggenjot pendapatan asli daerah serta mengoptimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik guna mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Adapun ketentuan utama yang harus diperhatikan antara lain: pertama, alokasi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dibiayai melalui Transfer ke Daerah (TKD) dibatasi paling tinggi sebesar 30% dari total belanja APBD. Kedua, pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan paling sedikit 40% dari total belanja APBD, setelah dikurangi belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, untuk belanja infrastruktur pelayanan publik.

Kebijakan-kebijakan tersebut menjadi acuan strategis dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah ke depan, agar tetap sejalan dengan regulasi nasional serta mampu mendorong efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan hasil analisis terhadap data keuangan daerah selama lima tahun terakhir, serta mempertimbangkan dinamika perkembangan sosial ekonomi baik di tingkat regional maupun nasional, dan selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat, maka dilakukan proyeksi pendapatan, belanja daerah, dan pembiayaan daerah untuk periode perencanaan. Proyeksi ini disusun dengan menggunakan sejumlah asumsi dasar sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1) Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli daerah Meningkat rata-rata sebesar 40,66% dari periode tahun 2025 sampai dengan 2030 dari Rp.180.895.259.795,- pada tahun 2025 menjadi Rp.996.073.293.269,-. Peningkatan signifikan terdapat pada pos Retribusi Daerah dengan penjelasan sebagai berikut :

b. Pendapatan Pajak Daerah ditargetkan meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2030, Pendapatan Pajak Daerah direncanakan mencapai sebesar Rp.128.000.000.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp.34.890.729.474.,- dibandingkan dengan tahun 2025. Kenaikan dimulai dari tahun 2025. Lonjakan ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu:

1. Implementasi kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor, yang merupakan kewenangan baru bagi pemerintah daerah sesuai ketentuan terbaru dalam pengelolaan pajak daerah.
2. Kebijakan penghapusan denda dan pokok pajak oleh pemerintah provinsi sebagai bentuk stimulus untuk mendorong kepatuhan wajib pajak.
3. Optimalisasi pajak daerah yang belum di tagih secara maksimal.
4. Optimalisasi pajak sarang burung walet.
5. Optimalisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
6. Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Secara rata-rata, pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah diproyeksikan sebesar 6,57% per tahun selama periode 2025–2030. Proyeksi ini menunjukkan optimisme terhadap potensi peningkatan penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, serta perbaikan sistem pemungutan dan pelayanan perpajakan yang lebih modern dan berbasis teknologi.

c. Pendapatan Retribusi Daerah diproyeksikan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2027 hingga 2030. Pada tahun 2030, target Pendapatan Retribusi Daerah ditetapkan sebesar Rp.841.073.293.269, atau meningkat sebesar Rp767.665.621.069,- dibandingkan dengan target pada tahun 2025. Dengan adanya proyek pembangunan rumah sakit daerah baru yang dibangun pada tahun 2026 dan ditargetkan telah beroperasi pada tahun 2027 dan BLUD maka di target kan mampu memberikan kontribusi maksimal retribusi daerah. Selama periode tersebut, Pendapatan Retribusi Daerah diproyeksikan tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 62,86%. Capaian ini mencerminkan optimisme terhadap penguatan peran retribusi sebagai salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

d. Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan mencapai sebesar Rp.22.000.000.000 pada tahun 2030, mengalami peningkatan sebesar Rp13.271.682..961 dibandingkan dengan tahun 2025. Rata-rata pertumbuhan tahunan untuk komponen pendapatan ini diproyeksikan sebesar 22,78% selama periode 2025–2030. Proyeksi ini menunjukkan adanya optimisme terhadap peningkatan kontribusi dari penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun entitas lainnya. Peningkatan pendapatan dari komponen ini akan didorong melalui sejumlah upaya strategis, di antaranya:
   a) Peningkatan kinerja BUMD melalui perbaikan tata kelola, profesionalisme manajemen, serta inovasi layanan dan produk.
   b) Mendorong peningkatan kontribusi BUMD melalui optimalisasi dividen guna meningkatkan penerimaan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
   c) Optimalisasi aset daerah yang telah dipisahkan, agar memberikan *return* yang lebih besar dan berkelanjutan.
   d) Evaluasi terhadap penyertaan modal daerah, guna memastikan setiap investasi memberikan manfaat ekonomi dan dividen yang layak bagi daerah.
   e) Penerapan sistem monitoring dan evaluasi berkala terhadap kinerja perusahaan penerima penyertaan modal.

   Dengan strategi tersebut, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diharapkan dapat terus tumbuh secara sehat dan menjadi salah satu sumber pembiayaan daerah yang andal serta berkelanjutan.

e. Komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan mencapai sebesar Rp5.000.000.000 pada tahun 2030, mengalami penurunan sebesar Rp650.000.000 dibandingkan dengan target tahun 2025. Rata-rata pertumbuhan tahunan dari komponen ini diproyeksikan sebesar 22,01% selama periode 2025–2030. Peningkatan tertinggi pada tahun 20227 dimana target pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp21.287.320.000,0- dengan menginventarisir aset yang sudah habis umur pemakaian akan dilakukan lelang. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pendapatan dari jasa giro, pendapatan bunga, dan hasil penjualan aset yang tidak dipisahkan serta pendapatan dari

pemanfaatan potensi daerah lainnya yang belum termasuk dalam kategori pajak, retribusi, atau hasil pengelolaan kekayaan daerah.

f. Transfer dari pemerintah pusat menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan yang tinggi pada beberapa komponennya. Secara total, jumlah Transfer Pemerintah Pusat meningkat dari Rp1.139.037.636.000 (2025) menjadi Rp1.139.037.636.000 (2030).

g. Pendapatan Transfer Antar Daerah juga menunjukkan tren penurunan dari Rp46.272.197.074 (2025) menjadi Rp46.249.065.602 pada tahun 2030. Rata-rata pertumbuhan tahunan tercatat sebesar -0,01%. Pendapatan Bagi Hasil antar daerah meningkat dari Rp46.272.197.074 (2025) menjadi Rp46.249.065.602 pada tahun 2030, menunjukkan penguatan kerja sama dan aliran fiskal antar pemerintah daerah. Bantuan Keuangan dari daerah lain belum dianggarkan selama periode ini (nol), sehingga seluruh nilai berasal dari komponen bagi hasil.

2) Belanja Daerah

a. Belanja Operasi mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun ke tahun selama periode 2025 hingga 2030. Total Belanja Operasi naik dari Rp1.205.422.616.536 (2025) menjadi Rp995.812.345.624 (2030), dengan rata-rata penurunan tahunan sekitar -3,75%. Penurunan ini sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan efisiensi sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia.

   Belanja Pegawai merupakan komponen terbesar dalam Belanja Operasi. Pada tahun 2025, anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp886.463.107.275, meningkat secara konsisten hingga mencapai Rp809.238.192.925 pada tahun 2030. Rata-rata penurunan tahunan periode tahun 2025 sampai dengan 2030 mencapai -1,81%. Belanja Pegawai telah memenuhi ketentuan undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah pasal 146. Dimana di haruskan pada tahun 2027 belanja pegawai telah memenuhi maksimal 30% dari total belanja APBD. Belanja pegawai yang dimaksud adalah di luar tunjangan profesi guru. Proyeksi belanja pegawai tahun 2026-2030 dapat dilihat pada Tabel 2.118.

Tabel 2.118
Proyeksi Belanja Pegawai Tahun 2026-2030

URAIAN	2026	2027	2028	2029	2030
Total Belanja APBD	**1.538.547.291**	**2.201.547.291.739**	**2.148.252.884**	**2.151.846.124**	**2.165.357.850**
Belanja Pegawai	859.869.214.057	834.073.137.635	817.391.674.882	813.304.716.508	809.238.192.925
Belanja Tunjangan Guru	173.673.238.000	173.673.238.000	173.673.238.000	173.673.238.000	173.673.238.000
Belanja Pegawai Diluar Tunjangan Guru	**686.195.976.056**	**660.399.899.635**	**643.718.436.882**	**639.631.478.507**	**635.564.954.952**
Rasio %	**44,60**	**30,00%**	**29,96%**	**29,72%**	**29,35%**

a. Belanja Barang dan Jasa mengalami penurunan dari RP.305.633.649.261 (2025) menjadi Rp177.574.152.699 (2030). Rata-rata penurunan per tahun sebesar -10,29%, yang digunakan untuk pembiayaan kebutuhan operasional rutin, pengadaan barang, serta penyediaan jasa layanan publik yang lebih berkualitas dan merata.
b. Komponen Belanja Bunga dialokasikan mulai tahun 2027 sebesar Rp1.500.000.000, dan tetap pada nilai yang sama hingga tahun 2030. Ini menunjukkan adanya rencana kewajiban pembayaran bunga atas pinjaman atau pembiayaan daerah yang mulai berjalan pada pertengahan periode rencana.
c. Belanja Hibah menunjukkan fluktuasi namun tetap dalam kisaran yang relatif stabil. Dari Rp13.325.860.000 (2025) meningkat menjadi Rp.7.500.000.000 pada tahun 2030, dengan rata-rata penurunan tahunan sebesar -10,86%. Alokasi ini digunakan untuk mendukung program-program eksternal pemerintah daerah yang melibatkan masyarakat, organisasi sosial, pendidikan, dan keagamaan.

Belanja Modal mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun 2025 hingga 2030. Pada tahun 2025, total belanja modal tercatat sebesar Rp62.204.949.947, dan meningkat tajam menjadi Rp997.179.290.360 pada tahun 2030. Rata-rata kenaikan pertahun adalah sebesar 74,18%. Belanja Infrastruktur telah diakomodir sesuai amanat undang-undang nomor 1 tahun 2022 dimana belanja infrastruktur minimal sebesar 40% dari APBD di luar belanja bagi hasil dan transfer ke daerah/desa. Proyeksi Belanja Infrastruktur Tahun 2026-2030 dapat dilihat pada Tabel 2.119.

Tabel 2.119
Proyeksi Belanja Infrastruktur Tahun 2026-2030

URAIAN	2026	2027	2028	2029	2030
Total Belanja APBD	**1.538.547.291.739**	**2.201.411.338.631**	**2.148.252.884.071**	**2.151.846.124.044**	**2.165.357.850.681**
Belanja Bagi Hasil dan Transfer desa	**183.472.398.050**	**179.620.768.449**	**177.562.219.204**	**173.843.076.221**	**170.366.214.697**
Total Belanja APBD diluar Belanja Transfer Desa	1.355.074.893.689	2.021.790.570.182	1.970.690.664.867	1.978.003.047.823	1.994.991.635.985
Belanja Infrastuktur	306.251.829.546	1.043.216.654.549	1.015.473.250.886	1.028.140.849.608	1.050.451.536.169
Rasio %	**22,60%**	**51,60%**	**51,53%**	**51,98%**	**52,65%**

a. Belanja Tak Terduga juga mengalami penurunan periode enam tahun ini. Pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp9.400.000.000, dan terus turun hingan menjadi Rp.2.000.000.000 hingga 2030. Rata-rata penurunan belanja tak terduga pertahunnya adalah -26,62%.
b. Belanja Transfer terdiri atas dua komponen: Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Total Belanja Transfer menunjukkan peningkatan yang konsisten dari Rp187.410.378.153 pada tahun 2025 menjadi Rp170.366.214.697 pada tahun 2030. Rata-rata pertumbuhan belanja transfer adalah sebesar -1,89% setiap tahunnya.

Pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berencana mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp150.000.000.000,- yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan strategis. Pinjaman tersebut memiliki jangka waktu pengembalian selama 10 tahun, sehingga angsuran pokok yang harus dibayarkan setiap tahun sebesar Rp15.000.000.000,- dan akan dicatat dalam pos pengeluaran pembiayaan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga akan melakukan penyertaan modal daerah dengan total sebesar Rp15.000.000.000,- selama periode tahun 2025 hingga 2030. Penyertaan modal ini akan dialokasikan secara bertahap setiap tahun sebesar Rp2.500.000.000,-, yang juga akan dicatat dalam pengeluaran pembiayaan daerah.

Tabel 2.120
Proyeksi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030

Uraian	Baseline	Proyeksi Tahun				
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN						
PENDAPATAN ASLI DAERAH						
Pendapatan Pajak Daerah	93.109.270.526	104.282.382.989	126.796.268.948	127.000.000.000	127.500.000.000	128.000.000.000
Pendapatan Retribusi Daerah	73.407.672.200	84.418.823.030	862.309.747.202	822.229.810.261	825.081.826.502	841.073.293.269
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.728.317.039	9.688.431.913	21.754.159.424	21.756.334.840	21.973.898.188	22.000.000.000
Lain-lain PAD yang sah	5.650.000.000	5.876.000.000	21.287.320.000	8.000.000.000	8.000.000.000	5.000.000.000
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	**180.895.259.765**	**204.265.637.932**	**1.032.147.495.574**	**978.986.145.101**	**982.555.724.690**	**996.073.293.269**
PENDAPATAN TRANSFER						
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT						
Dana Perimbangan						
Bagi Hasil	12.533.080.000	12.533.080.000	12.533.080.000	12.533.080.000	12.533.080.000	12.533.080.000
DAU						
DAU yang tidak ditentukan penggunaannya	638.430.057.000	638.430.057.000	638.430.057.000	638.430.057.000	638.430.057.000	638.430.057.000
DAU yang ditentukan penggunaannya	100.395.068.000	100.395.068.000	100.395.068.000	100.395.068.000	100.395.068.000	100.395.068.000
DAK						
DAK Fisik	22.864.258.000	22.864.258.000	22.864.258.000	22.864.258.000	22.864.258.000	22.864.258.000
DAK Non Fisik	254.709.296.000	254.709.296.000	254.709.296.000	254.709.296.000	254.709.296.000	254.709.296.000
Dana Insentif Daerah	7.116.369.000	7.116.369.000	7.116.369.000	7.116.369.000	7.116.369.000	7.116.369.000
Dana Desa	102.989.508.000	102.989.508.000	102.989.508.000	102.989.508.000	102.989.508.000	102.989.508.000
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat	**1.139.037.636.000**	**1.139.037.636.000**	**1.139.037.636.000**	**1.139.037.636.000**	**1.139.037.636.000**	**1.139.037.636.000**

Uraian	Baseline	Proyeksi Tahun				
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH						
Pendapatan Bagi Hasil	46.272.197.074	46.267.569.854	46.262.943.097	46.258.316.803	46.253.690.971	46.249.065.602
Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-
Jumlah Transfer Antar Daerah	**46.272.197.074**	**46.267.569.854**	**46.262.943.097**	**46.258.316.803**	**46.253.690.971**	**46.249.065.602**
Jumlah Pendapatan Transfer	**1.185.309.833.074**	**1.185.281.653.807**	**1.185.263.843.058**	**1.185.266.738.970**	**1.185.290.399.354**	**1.185.284.557.413**
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH						
Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
JUMLAH PENDAPATAN	**1.366.205.092.839**	**1.389.547.291.739**	**2.217.411.338.632**	**2.164.252.884.071**	**2.167.846.124.044**	**2.181.357.850.682**
BELANJA						
BELANJA OPERASI						
Belanja Pegawai	886.463.107.275	859.869.214.057	834.073.137.635	817.391.674.882	813.304.716.508	809.238.192.925
Belanja Barang dan Jasa	305.633.649.261	244.506.919.409	190.715.397.139	181.179.627.282	179.367.831.009	177.574.152.699
Belanja Bunga			1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
Belanja Hibah	13.325.860.000	12.799.006.500	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000
Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi	**1.205.422.616.536**	**1.117.175.139.966**	**1.033.788.534.774**	**1.007.571.302.164**	**1.001.672.547.517**	**995.812.345.624**
BELANJA MODAL						**872.543.140.273**

Uraian	Baseline	Proyeksi Tahun				
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Belanja Tanah	10.000.000	2.500.000.000	51.950.000.000	41.950.000.000	33.000.000.000	48.875.419.132
Belanja Peralatan dan Mesin	18.776.442.929	116.278.431.123	404.300.883.629	357.334.217.338	379.489.736.591	386.406.923.436
Belanja Gedung dan Bangunan	25.106.379.128	93.121.322.601	325.953.770.045	296.513.653.662	296.516.618.798	296.546.270.460
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	18.189.627.890	20.000.000.000	90.533.093.815	146.725.596.585	146.727.063.841	146.741.736.548
Belanja Aset Tetap Lainnya	77.500.000	1.000.000.000	113.264.287.919	118.595.895.117	118.597.081.076	118.608.940.784
Belanja Aset Lainnya	45.000.000	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	**62.204.949.947**	**232.899.753.724**	**986.002.035.408**	**961.119.362.702**	**974.330.500.306**	**997.179.290.360**
BELANJA TAK TERDUGA						
Belanja Tak Terduga	9.400.000.000	5.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
Jumlah Belanja Tak Terduga	**9.400.000.000**	**5.000.000.000**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**
-						
BELANJA TRANSFER						
Belanja Bagi Hasil	9.488.627.054	9.109.081.972	8.744.718.693	8.394.929.945	8.059.132.747	7.897.950.092
Belanja Bantuan Keuangan	177.921.751.100	174.363.316.078	170.876.049.756	169.167.289.259	165.783.943.474	162.468.264.604
Jumlah Belanja Transfer	**187.410.378.154**	**183.472.398.050**	**179.620.768.449**	**177.562.219.204**	**173.843.076.221**	**170.366.214.697**
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	**1.464.437.944.637**	**1.538.547.291.739**	**2.201.411.338.631**	**2.148.252.884.071**	**2.151.846.124.044**	**2.165.357.850.681**
SURPLUS/DEFISIT	**-98.232.851.798**	**-149.000.000.000**	**16.000.000.000**	**16.000.000.000**	**16.000.000.000**	**16.000.000.000**
PEMBIAYAAN						
PENERIMAAN PEMBIAYAAN						
Sisa Lebih Perhitungan Tahun Sebelumnya (SiLPA)	100.732.851.798	0	0	0	0	0
Pinjaman Daerah		150.000.000.000				
Jumlah Penerimaan	**100.732.851.798**	**150.000.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Uraian	Baseline	Proyeksi Tahun				
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PENGELUARAN PEMBIAYAAN						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Pembayaran Pinjaman Pokok	-		15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
Jumlah Pengeluaran	**2.500.000.000**	**1.000.000.000**	**16.000.000.000**	**16.000.000.000**	**16.000.000.000**	**16.000.000.000**
PEMBIAYAAN NETTO	**98.232.851.798**	**149.000.000.000**	**-16.000.000.000**	**-16.000.000.000**	**-16.000.000.000**	**-16.000.000.000**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2.2.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi lima tahun mendatang, diperlukan upaya peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sumber Pajak Daerah, Retribusi Daerah, pengelolaan aset milik daerah, serta sumber-sumber sah lainnya. Seiring dengan kebijakan pengalihan sebagian pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang sebelumnya tercatat sebagai Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota, kini berubah menjadi Opsen PKB dan Opsen BBNKB dengan mekanisme penerimaan langsung ke Kas Daerah Kabupaten/Kota

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, maka terdapat beberapa perbedaan terkait pajak dan retribusi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Opsen pajak merupakan bagian dari penerimaan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan kemudian dibagikan kembali kepada kabupaten/kota berdasarkan ketentuan tertentu. Dalam konteks Kabupaten Padang Pariaman, opsen pajak menjadi salah satu sumber pendapatan baru yang mulai terealisasi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Jenis pajak yang dikenakan opsen antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dalam mekanismenya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memungut pajak tersebut, kemudian memberikan alokasi bagian kepada Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan persentase tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Opsen pajak ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi fiskal antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta untuk mendorong optimalisasi penerimaan daerah melalui pajak yang lebih terkoordinasi.

Bagi Kabupaten Padang Pariaman, kehadiran opsen pajak memberikan kontribusi tambahan terhadap struktur pendapatan daerah, khususnya dalam kategori Pendapatan Transfer Antar Daerah. Keberadaan opsen ini membuka ruang fiskal baru dan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kolaborasi dengan provinsi dalam hal intensifikasi dan ekstensifikasi pajak kendaraan. Optimalisasi pemanfaatan opsen pajak akan menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna mendukung kemandirian daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dan memberikan kepastian hukum bagi aparatur dan perangkat daerah serta masyarakat dalam

melakukan pungutan terhadap Pajak dan retribusi. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas :

1) PBB-P2
2) BPHTB
3) PBJT
4) Pajak Reklame
5) PAT
6) Pajak MBLB
7) Pajak sarang Burung Walet
8) Opsen PKB
9) Opsen BBNKB

Untuk mencapai target PAD yang telah ditetapkan dalam periode 2026-2030, berbagai strategi akan dilaksanakan dengan mepertimbangkan potensi dan tantangan yang ada. Strategi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan pemungutan pajak hingga inovasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.

1) Optimalisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah melalui penerapan *Online System*.
   a) Pengggalian potensi pajak dan retribusi daerah.
   b) Melakukan pemutakhiran data objek pajak.
   c) Melakukan Pemeriksaan pajak
   d) Melakukan Penagihan Piutang Pajak
   e) Melakukan pemasangan sticker atau plang bagi penunggak pajak;
   f) Melakukan penyuluhan/sosialisasi
   g) Memperkuat proses pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
   h) Melaksanakan tertib administrasi pungutan Pajak dan Retribusi
   i) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah.
   j) Menyederhanakan prosedur pengelolaan Pajak dan Retribusi
   k) Meningkatkan pengawasan.
   l) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan pajak.
   m) Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.
   n) Meningkatkan kerjasama dengan pihak kejaksaan dalam hal penagihan piutang pajak.
   o) Menerapkan *reward* dan *punishment* terhadap wajib pajak.
   p) Melakukan kajian perluasan pembayaran pajak melalui Bank dan Meningkatkan kerjasama dengan Bank Nagari dalam penyertaan modal daerah.

q) Membangun sistem terintegrasi antara Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Badan Pertanahan Nasional, PPAT dan Bank dalam pemungutan BPHTB.
r) Optimalisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam penertiban jenis papan reklame.
s) Mengoptimalkan pengoperasian pintu masuk kawasan parkir dan mesin parkir otomatis di pintu masuk terminal untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir.
t) Melakukan kerjasama dengan pemerintah desa dalam pemungutan retribusi kebersihan.
u) Mengoptimalkan pemakaian kekayaan daerah dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah.
v) Peningkatan Pelayanan Retribusi Daerah melalui Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah.
w) Membangun dan mengembangkan ekosistem pembayaran digital yang terintegrasi melalui QRIS, *e-wallet* dan aplikasi *mobile banking*.

2) Peningkatan pemanfaatan Aset Daerah
a) Melakukan inventarisasi dan digitalisasi aset daerah secara menyeluruh.
b) Penilaian ulang seluruh aset untuk mengidentifikasi aset-aset yang memiliki potensi menghasilkan nilai tambah secara ekonomi bagi daerah.
c) Meningkatkan pemanfaatan aset potensial.
d) Melakukan audit aset secara berkala.
e) Peningkatan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

3) Pengembangan Sumber Pendapatan Baru
a) Pemetaan potensi ekonomi lokal yang belum tergarap, seperti potensi wisata alam dan budaya, UMKM unggulan, dan hasil pertanian/perkebunan bernilai tambah
b) Inventarisasi potensi layanan publik yang dapat dikenakan tarif layanan atau retribusi baru sesuai peraturan.
c) Digitalisasi Pendapatan Daerah *Real Time*, melalui :
1) Sistem digital pembayaran pajakn dan retribusi.
2) Integrasi data pendapatan guna memastikan bahwa seluruh data pendapatan dari pajak, retribusi dan penggunaan aset dapat terintegrasi dalam satu platform digital.
3) Laporan Keuangan dan pemantauan real-time
d) Pengembangan kredit karbon sebagai sumber pendapatan daerah, melalui:
1) Identifikasi potensi sumber kredit karbon.

2) Mengembangkan program penanaman pohon dan reboisasi serta konservasi hutan untuk memperoleh sertifikat kredit karbon.
3) Implementasi sistem pengelolaan sampah berbasis *zerowaste* dapat menghasilkan kredit karbon melalui pengurangan emisi dari landfill dan daur ulang sampah organik menjadi kompos atau bioenergi.
4) Menyusun peraturan daerah yang memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan proyek-proyek kredit karbon di daerah, termasuk mekanisme verifikasi, pemantauan dan pelaporan emisi yang terlibat.
5) Menjalin kerjasama dengan lembaga internasional yang menyediakan platform untuk sertifikasi dan perdagangan kredit karbon.
6) Menjalin kemitraan dengan lembaga internasional yang memiliki platform untuk perdagangan kredit karbon dan perusahaan yang tertarik untuk berkontribusi pada pengurangan emisi melalui proyek lokal.

e) Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, melalui :
1) Mendorong kerjasama pemerintah antara pemerintah daerah dengan sektor swasta dalam pengelolaan proyek besar yang dapat menghasilkan pendapatan baru, baik dalam bentuk pembangunan bersama maupun kerjasama untuk pengelolaan layanan publik.
2) Menjalin kemitraan dengan lembaga internasional yang memiliki keahlian dalam pembiayaan pembangunan daerah atau program keberlanjutan.

Terkait dengan kebijakan pendapatan dana transfer/Dana Perimbangan dan Bagi Hasil serta Lain-lain Pendapatan yang Sah dilakukan upaya peningkatannya melalui penyusunan usulan DAK dan DAU oleh pemerintah daerah dengan terukur dan data yang lengkap *(proposal based*). Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah.

Terkait dengan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, kebijakan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yaitu sebagai berikut:

a. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis seperti tanah dan bangunan milik daerah yang dapat disewakan atau dijadikan objek kerjasama dengan Pihak Ketiga;

b. Mengoptimalkan pendataan aset daerah yang belum termanfaatkan secara maksimal.
c. Melakukan audit aset secara berkala untuk mengidentifikasi potensi aset yang dapat dikelola lebih produktif dan menguntungkan.
d. Mengembangkan kerjasama dengan pihak swasta dalam bentuk *public-private partnership* (PPP) untuk mengelola aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
e. Pengembangan aplikasi (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah.

2.2.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan Belanja Daerah dalam 2026-2030 adalah:

a) Menjaga keseimbangan antara *fixed cost* dan *variable cost* dengan fokus pada efisiensi anggaran.
b) Pembuatan sistem yang mengimplementasikan secara penuh dan komprehensif antara *e-budgeting* dan *e-monitoring* dalam memastikan efisiensi pengelolaan anggaran daerah.
c) Pengelolaan belanja daerah Kabupaten Padang Pariaman diarahkan untuk memihak pada kepentingan publik, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, perlindungan, serta peningkatan kualitas hidup. Belanja diarahkan pada program prioritas berbasis hasil sebagai instrumen pencapaian target pembangunan daerah, dengan penyesuaian komponen APBD mengikuti dinamika yang berkembang.
d) Tambahan penghasilan bagi pegawai diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja, lokasi penugasan, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi, serta pertimbangan objektif lainnya yang relevan dan di alokasi maksimal sebesar 30% dari APBD.
e) Belanja barang/jasa dianggarkan melalui program dan kegiatan yang memperhatikan skala prioritas pembangunan Kabupaten Padang Pariaman.
f) Belanja hibah dialokasikan untuk mendukung pencapaian sasaran, program, dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, sesuai kepentingan daerah dalam mendukung fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, dengan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, serta manfaat bagi masyarakat.
g) Belanja bantuan sosial difokuskan untuk memberikan jaminan dan perlindungan sosial, pemberdayaan serta rehabilitasi sosial, termasuk penanggulangan kemiskinan dan bencana di Kabupaten Padang Pariaman

h) Belanja modal dioptimalkan untuk memenuhi ketentuan minimal alokasi 40% belanja infrastruktur dari total APBD guna mendukung perekonomian masyarakat.
i) Belanja tidak terduga dialokasikan untuk kebutuhan darurat yang tidak terprediksi sebelumnya, keperluan mendesak, pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, serta bantuan sosial insidental.
j) Alokasi anggaran mandatory dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
k) Koordinasi rutin dengan seluruh OPD Kabupaten Padang Pariaman dilakukan guna mendorong peningkatan penyerapan anggaran, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi agar belanja daerah berjalan efektif dan efisien.

2.2.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan Pembiayaan Daerah dalam 2026-2030 adalah:

a) Penerimaan pembiayaan diutamakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dimana jumlahnya semakin menurun yang dialokasikan untuk menunjang optimalisasi pelaksanaan program-program prioritas pembangunan di daerah;
b) SILPA tahun berjalan dijadikan sebagai pedoman dasar untuk pengambilan kebijakan pada perhitungan anggaran. Apabila SILPA tahun berjalan yang dihasilkan positif, maka pemerintah daerah dapat memanfaatkan untuk menambah program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/ atau pengeluaran pembiayaan. Sedangkan apabila SILPA tahun berjalan terjadi negatif, maka pemerintah daerah mengurangi bahkan menghapus pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/ atau pengurangan volume program, kegiatan dan sub kegiatan;
c) Bila memungkinkan Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/ atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah, menunjang pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat

2.2.2.5 Arah Kebijakan Belanja Bersifat Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dan Earmark

Belanja daerah yang bersifat wajib, mengikat, prioritas utama, dan earmark merupakan jenis pengeluaran yang tidak dapat ditunda dan harus diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan. Belanja ini mencakup kewajiban seperti pembayaran gaji pegawai, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta honorarium guru dan tenaga kesehatan sebagai bagian dari keberlanjutan pelayanan dasar, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, belanja ini menjadi prioritas utama dalam struktur APBD dan tidak dapat menjadi utang tahun berikutnya.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, belanja mengikat adalah pengeluaran yang dibutuhkan secara terus-menerus dan wajib dialokasikan dalam jumlah cukup untuk setiap bulan dalam satu tahun anggaran. Contohnya termasuk belanja pegawai (seperti pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan), serta belanja barang dan jasa (misalnya biaya telepon, listrik, air, dan internet). Sementara itu, belanja wajib bertujuan menjamin kelangsungan pelayanan dasar publik dan mencakup pembiayaan sektor pendidikan, kesehatan, pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga, serta pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang jatuh tempo.

Belanja wajib dan mengikat saat ini difokuskan pada belanja operasional seperti gaji dan tunjangan ASN, tambahan penghasilan pegawai, penerimaan anggota DPRD, operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta belanja bagi hasil. Mengingat Kabupaten Padang Pariaman belum memiliki Dana Cadangan maupun kontrak jangka panjang yang signifikan, maka pembiayaan utama untuk menutup pengeluaran tersebut hanya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Hal ini menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang hati-hati dan perencanaan fiskal yang berkelanjutan.

2.2.2.6 Proyeksi Kapasitas Riil Kemapuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah

Dalam upaya merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan, diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Proyeksi kemampuan keuangan ini menjadi dasar penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan dapat didanai secara realistis dalam kerangka anggaran yang tersedia. Hal ini sejalan dengan prinsip *money follows program*, yang menekankan bahwa setiap rencana pembangunan harus disusun berdasarkan kemampuan fiskal daerah secara objektif dan terukur.

Kemampuan keuangan daerah tidak hanya dipengaruhi oleh besaran pendapatan yang diterima dari berbagai sumber, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, dan sumber pembiayaan

lainnya, tetapi juga ditentukan oleh belanja yang bersifat wajib, mengikat, dan prioritas, yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum mendanai program pembangunan lainnya. Oleh karena itu, proyeksi ini mencerminkan ruang fiskal yang tersedia bagi pemerintah daerah dalam mendukung agenda pembangunan, serta mengidentifikasi tantangan fiskal yang perlu diantisipasi dalam jangka menengah dan panjang.

Dalam penentuan prioritas rencana penggunaan kapasitas riil kemapuan keuangan daerah tahun 2026-2030 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 158 yang mengamantkan bahwa :

a. Prirotas I dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
b. Proritas II dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah.
c. Prioritas III dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintah lainnya.

Dengan melakukan proyeksi kapasitas riil ini, Pemerintah Daerah dapat merumuskan strategi pembangunan yang lebih adaptif dan tepat sasaran, serta mendorong efisiensi alokasi sumber daya. Selain itu, hasil proyeksi ini menjadi acuan penting dalam menentukan skala prioritas, mendorong optimalisasi pendapatan, dan menjaga keberlanjutan fiskal daerah di tengah dinamika ekonomi dan kebijakan nasional yang terus berkembang. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Berikut merupakan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah selama 6 (lima) tahun mendatang yang disajikan pada tabel 2.121

Tabel 2.121
Kemampuan Riil Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030

URAIAN	PROYEKSI					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pendapatan	1.403.764.809.709	1.443.100.878.813	2.060.546.303.798	2.113.566.824.197	2.169.258.332.940	2.225.435.250.542
Penerimaan Pembiayaan	40.464.979.911	50.000.000.000	55.000.000.000	54.000.000.000	51.000.000.000	48.500.000.000
Total Penerimaan Daerah	**1.444.229.789.620**	**1.493.100.878.813**	**2.115.546.303.798**	**2.167.566.824.197**	**2.220.258.332.940**	**2.273.935.250.542**
dikurangi :						
Belanja Pegawai	750.185.564.265	768.940.203.372	776.629.605.406	792.162.197.514	808.005.441.464	824.165.550.293
Operasional OPD	370.047.433.308	379.198.619.141	388.578.584.619	398.193.049.235	408.047.875.466	418.149.072.352
Total Belanja Wajib dan Mengikat	1.120.232.997.573	1.148.138.822.513	1.165.208.190.025	1.190.355.246.749	1.216.053.316.930	1.242.314.622.646
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	**323.996.792.047**	**344.962.056.300**	**950.338.113.773**	**977.211.577.448**	**1.004.205.016.010**	**1.031.620.627.897**

2.3 Permasalahan dan Isu – Isu Strategis

2.3.1 Permasalahan Pembangunan

A. Permasalahan Pembangunan daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan dasar utama dalam penyusunan RPJMD, karena mencerminkan kondisi faktual dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Padang Pariaman di berbagai sektor. Identifikasi permasalahan dilakukan secara sistematis melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta *top-down* dan *bottom-up*, dengan mengacu pada evaluasi kinerja pembangunan periode sebelumnya, capaian indikator makro dan sektoral, serta aspirasi masyarakat dan isu strategis. Permasalahan dirumuskan berdasarkan misi pembangunan daerah, sehingga menjadi pijakan dalam perumusan tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, dan program prioritas selama periode 2025–2029.

1. Permasalahan Daerah terkait dengan Misi 1 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas merupakan prioritas utama pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman. Namun, masih terdapat berbagai kendala, seperti belum optimalnya tata kelola yang efektif, akuntabel, dan berintegritas, ditandai dengan rendahnya penerapan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara. Pemanfaatan hasil riset dan inovasi pemerintah daerah juga belum maksimal, sehingga peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengambilan kebijakan berbasis bukti belum sepenuhnya tercapai. Selain itu, transformasi digital layanan publik masih terbatas akibat infrastruktur yang kurang memadai, kurangnya integrasi sistem informasi antar perangkat daerah, serta rendahnya literasi digital aparatur dan masyarakat. Kondisi ini menghambat layanan publik yang cepat, mudah, dan transparan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola pemerintahan menjadi kunci dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Informasi lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.122.

Tabel 2.122
Permasalahan Daerah Terkait dengan Misi 1
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas

MASALAH	AKAR MASALAH
Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berintegritas	1. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi 2. Masih rendahnya transparansi dan akuntabilitas kinerja ASN 3. Belum optimalnya keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat 4. Masih lemahnya pengawasan internal 5. Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran berbasis data dan kinerja 6. Belum optimalnya regulasi daerah dalam mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan 7. Belum optimalnya pengelolaan pendapatan daerah
Belum optimalnya penerapan sistem merit	1. Belum optimalnya kebijakan dan regulasi pendukung sistem merit 2. Masih terbatasnya kapasitas kelembagaan dan manajemen SDM dalam implementasi sistem merit 3. Budaya birokrasi yang belum sepenuhnya berbasis kompetensi 4. Masih rendahnya budaya kerja ASN yang berorientasi pada pelayanan publik dan pencapaian kinerja
Masih lemahnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi pemerintah daerah	1. Terbatasnya pengembangan teknologi tepat guna yang relevan dengan potensi dan masalah daerah 2. Belum terbangunnya ekosistem inovasi yang inklusif dan kolaboratif 3. Kebijakan belum sepenuhnya berbasis bukti (*evidence-based policy*) 4. Kurangnya fasilitas kolaboratif antara perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan pemerintah daerah
Belum optimalnya transformasi digital layanan publik	1. Terbatasnya infrastruktur teknologi dan keamanan informasi 2. Belum terintegrasinya sistem informasi antar perangkat daerah 3. Rendahnya literasi digital aparatur dan masyarakat. 4. Belum optimalnya pengembangan layanan publik digital yang inovatif dan berorientasi pengguna. 5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data sektoral untuk mendukung pengambilan kebijakan

Sumber: Hasil Analisis Bapelitbangda, 2025

2. Permasalahan Daerah terkait dengan Misi 2 yaitu Menciptakan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi penting dalam mendukung kemajuan Kabupaten Padang Pariaman, namun tantangan signifikan masih harus diatasi. Akses dan pemerataan pendidikan belum optimal, disertai mutu pendidikan yang masih rendah, sehingga berdampak pada keterbatasan kualitas SDM. Selain itu, akses dan kualitas layanan kesehatan belum memadai, sehingga derajat kesehatan masyarakat sesuai siklus hidup belum tercapai sepenuhnya. Kualitas keluarga, kesetaraan gender, dan perlindungan perempuan serta anak juga masih perlu ditingkatkan. Pencapaian kesejahteraan sosial yang adil dan merata menghadapi kendala dalam pemerataan akses dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, upaya penguatan di berbagai bidang tersebut menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk rincian permasalahan dan akar penyebabnya dapat dilihat pada Tabel 2.123.

Tabel 2.123
Permasalahan Daerah Terkait dengan Misi 2
Menciptakan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing

MASALAH	AKAR MASALAH
1. Belum optimalnya akses dan pemerataan pendidikan	1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan 2. Belum meratanya distribusi guru dan tenaga kependidikan 3. Belum optimalnya kualitas dan pemerataan layanan pendidikan 4. Rendahnya partisipasi pendidikan pada jenjang PAUD
2. Masih rendahnya mutu pendidikan	1. Belum meratanya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 2. Belum optimalnya kurikulum berbasis karakter dan literasi digital 3. Minimnya program pengembangan profesi guru yang berkelanjutan 4. Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan vokasi
3. Belum optimalnya akses dan kualitas layanan kesehatan	1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan 2. Belum meratanya distribusi tenaga kesehatan 3. Masih rendahnya kompetensi tenaga kesehatan 4. Masih tingginya pembiayaan kesehatan
4. Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat sesuai siklus hidup	1. Masih tingginya prevalensi stunting 2. Masih tingginya angka kematian ibu 3. Masih rendahnya usia harapan hidup 4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 5. Belum optimalnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
5. Belum optimalnya kualitas keluarga, kesetaraan gender, dan perlindungan perempuan dan anak	1. Masih rendahnya kualitas pembangunan keluarga 2. Masih tingginya ketimpangan gender

MASALAH	AKAR MASALAH
	3. Belum optimalnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan 4. Belum optimalnya perlindungan terhadap anak upaya pencegahan perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun
6. Belum tercapainya kesejahteraan sosial yang adil, merata	1. Belum meratanya akses terhadap pelayanan dasar 2. Belum optimalnya data terpadu kesejahteraan sosial 3. Belum akuratnya penentuan sasaran program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat 4. Minimnya kapasitas kelembagaan sosial masyarakat

Sumber: Hasil analisis Bapelitbangda, 2025

3. Permasalahan Daerah terkait dengan Misi 3 yaitu Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju, dan Merata

Pembangunan ekonomi yang inklusif, maju, dan merata menjadi fokus utama dalam mendorong kemajuan Kabupaten Padang Pariaman. Namun, sejumlah permasalahan masih menjadi tantangan. Kontribusi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah masih rendah, sementara daya saing sektor perdagangan juga terbatas. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta industri belum optimal, dan nilai tambah dari sektor pariwisata serta ekonomi kreatif masih kurang maksimal. Selain itu, iklim investasi yang kompetitif belum tercipta secara menyeluruh, ketersediaan dan cadangan pangan masih terbatas, dan kesempatan kerja serta produktivitas tenaga kerja belum mencapai potensi penuh. Tingkat kemandirian desa atau nagari juga masih rendah, sehingga pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah belum sepenuhnya terwujud. Untuk informasi lebih rinci mengenai permasalahan dan akar penyebabnya, dapat dilihat pada Tabel 2.124.

Tabel 2.124
Permasalahan Daerah Terkait dengan Misi 3 Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju, dan Merata

MASALAH	AKAR MASALAH
1. Masih terbatasnya kontribusi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	1. Rendahnya adopsi teknologi dan inovasi 2. Terbatasnya akses pembiayaan, subsidi, dan insentif usaha 3. Masih lemahnya integrasi sistem hulu-hilir dan rantai pasok komoditas unggulan 4. Masih lemahnya kelembagaan ekonomi lokal 5. Minimnya kemitraan antara pemerintah daerah dan pelaku usaha 6. Belum optimalnya pendampingan teknis, pelatihan, dan penyuluhan
2. Masih rendahnya daya saing sektor perdagangan	1. Belum terbangunnya sistem distribusi dan infrastruktur perdagangan 2. Masih rendahnya daya saing produk lokal 3. Masih terbatasnya promosi, akses teknologi, dan pasar 4. Masih lemahnya regulasi dan sistem perizinan usaha

MASALAH	AKAR MASALAH
3. Belum optimalnya pengembangan UMKM dan industri	1. Lemahnya kelembagaan pelaku usaha dan minimnya kemitraan strategis 2. Masih rendahnya pemanfaatan inovasi dan teknologi dalam hilirisasi produk 3. Masih terbatasnya akses pelaku industri terhadap pembiayaan dan pendampingan usaha 4. Rendahnya kompetensi pelaku UMKM dan koperasi
4. Masih rendahnya nilai tambah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Belum optimalnya pengelolaan dan promosi destinasi wisata unggulan 2. Terbatasnya infrastruktur pendukung pariwisata 3. Minimnya pelatihan dan pendampingan bagi pelaku ekonomi kreatif serta pelaku wisata lokal 4. Kurangnya kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan pelaku usaha
5. Belum terciptanya iklim investasi yang kompetitif	1. Masih lemahnya infrastruktur pendukung investasi 2. Belum optimalnya proses perizinan dan pelayanan investasi 3. Kurangnya promosi potensi unggulan daerah dan minimnya ketersediaan data peluang investasi yang menarik bagi investor 4. Keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan daerah masih rendah
6. Masih rendahnya ketersediaan dan cadangan pangan	1. Belum optimalnya produksi pangan lokal 2. Belum optimalnya sistem distribusi, logistik, dan cadangan pangan daerah 3. Masih tingginya kerentanan dan ketidakcukupan konsumsi pangan 4. Belum optimalnya pemanfaatan pangan
7. Masih rendahnya kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja	1. Tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja belum memadai 2. Terbatasnya lapangan kerja formal dan peluang usaha produktif 3. Kurangnya akses terhadap pelatihan kerja, magang, dan pembinaan wirausaha
8. Masih rendahnya tingkat kemandirian desa/ nagari	1. Kurangnya kapasitas dan keterampilan masyarakat desa dalam mengelola potensi lokal secara mandiri dan produktif 2. Terbatasnya akses masyarakat desa terhadap sumber daya, modal, dan teknologi 3. Minimnya peran serta dan koordinasi antar lembaga pemerintah, swasta, dan komunitas 4. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa/ nagari

Sumber: Bapelitbangda, 2025

4. Permasalahan Daerah terkait dengan Misi 4 yaitu Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Peningkatan kualitas dan keberlanjutan infrastruktur menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman. Namun, akses masyarakat terhadap infrastruktur yang

berkualitas dan layak masih tergolong rendah, sehingga kebutuhan dasar dan pelayanan publik belum dapat dinikmati secara merata. Pengelolaan lingkungan hidup juga belum optimal, yang berkontribusi pada menurunnya kualitas lingkungan serta berkurangnya kapasitas daerah dalam menghadapi tekanan ekologis. Selain itu, tingkat resiliensi terhadap bencana masih rendah, baik dari segi kesiapsiagaan masyarakat, kapasitas kelembagaan, maupun infrastruktur mitigasi bencana, sehingga daerah rentan terhadap risiko bencana alam. Untuk rincian permasalahan utama serta faktor penyebabnya dapat dilihat pada Tabel 2.125.

Tabel 2.125
Permasalahan Daerah Terkait dengan Misi 4
Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan

MASALAH	AKAR MASALAH
Masih rendahnya akses masyarakat terhadap infrastruktur yang berkualitas dan layak	1. Belum meratanya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan 2. Rendahnya konektivitas dan integrasi antarwilayah 3. Masih rendahnya akses masyarakat terhadap air minum dari jaringan perpipaan 4. Rendahnya akses masyarakat terhadap infrastruktur sanitasi yang layak 5. Belum tersedianya infrastruktur pengelolaan persampahan yang sesuai standar 6. Masih rendahnya akses masyarakat terhadap perumahan layak dan terjangkau 7. Belum optimalnya pengelolaan infrastruktur sumber daya air dan air baku
Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup	1. Masih terbatasnya regulasi dan kebijakan pengelolaan lingkungan 2. Rendahnya penerapan prinsip 3R dan *circular economy* 3. Terbatasnya teknologi, pembiayaan, serta sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan 4. Rendahnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha 5. Masih terbatasnya kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan 6. Belum optimalnya pengendalian perubahan iklim dan kerentanan lingkungan
Masih rendahnya tingkat resiliensi bencana	1. Masih terbatasnya infrastruktur pengurangan risiko bencana 2. Masih rendahnya kesiapsiagaan terhadap bencana 3. Belum terintegrasinya kebijakan pembangunan dengan strategi mitigasi risiko bencana 4. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim 5. Belum optimalnya sistem manajemen bencana dan peringatan dini 6. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan koordinasi dalam penanggulangan bencana

Sumber: Hasil Analisis Bapelitbangda, 2025

5. Permasalahan Daerah terkait dengan Misi 5 yaitu Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya

Permasalahan pembangunan daerah terkait Misi 5 mencakup belum terwujudnya lingkungan sosial yang religius, aman, dan harmonis, sehingga interaksi sosial dan kualitas kehidupan masyarakat belum sepenuhnya kondusif. Internalisasi nilai-nilai adat, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat juga belum optimal, sehingga potensi pembentukan identitas dan karakter sosial daerah belum maksimal. Selain itu, pelestarian dan perlindungan cagar budaya masih belum berjalan secara optimal, sehingga warisan budaya daerah berisiko mengalami kerusakan atau kehilangan nilai historisnya. Untuk informasi lebih rinci mengenai permasalahan dan akar penyebabnya dapat dilihat pada Tabel 2.126.

Tabel 2.126
Permasalahan Daerah Terkait dengan Misi 5
Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya

MASALAH	AKAR MASALAH
Belum terwujudnya lingkungan sosial yang religius, aman dan harmonis	1. Rendahnya internalisasi nilai religius dalam keluarga dan komunitas 2. Belum optimalnya peran lembaga keagamaan dan organisasi masyarakat 3. Minimnya kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat 4. Masih rendahnya kesadaran dan sikap toleransi antar umat beragama 5. Keterbatasan kapasitas aparat keamanan serta belum optimalnya partisipasi masyarakat 6. Belum optimalnya koordinasi penanganan gangguan sosial
Belum optimalnya internalisasi nilai adat, budaya, dan kearifan lokal dalam masyarakat	1. Belum terintegrasinya nilai-nilai budaya dalam pendidikan formal 2. Menurunnya fungsi surau dan komunitas adat sebagai pusat pewarisan budaya 3. Tingginya pengaruh modernisasi dan globalisasi 4. Minimnya regulasi daerah yang mendukung pelestarian budaya lokal
Belum optimalnya pelestarian dan pelindungan cagar budaya	1. Belum terbitnya Peraturan Daerah tentang pelindungan cagar budaya 2. Rendahnya jumlah objek budaya yang telah ditetapkan secara resmi sebagai cagar budaya 3. Minimnya kepastian hukum dalam pelestarian objek budaya 4. Rentannya objek budaya terhadap kerusakan fisik maupun alih fungsi 5. Lemahnya koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan 6. Keterbatasan anggaran dan sumber daya pelestarian cagar budaya

MASALAH	AKAR MASALAH
	5. Kurangnya sosialisasi dan rendahnya kesadaran masyarakat

Sumber: Bapelitbangda, 2025

2.3.2 Isu Strategis

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan target kinerja selama lima tahun masa kepemimpinan kepala daerah. Dalam rangka memastikan dokumen RPJMD ini mampu menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan, maka identifikasi isu-isu strategis menjadi salah satu langkah penting dalam proses perumusannya.

Isu strategis merupakan permasalahan atau tantangan utama yang memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan pembangunan daerah, baik dalam aspek sosial, ekonomi, lingkungan, tata kelola pemerintahan, maupun pelayanan publik. Isu-isu ini muncul dari hasil evaluasi terhadap capaian pembangunan lima tahun sebelumnya, dinamika pembangunan nasional dan global, serta harapan masyarakat yang berkembang di tengah perubahan sosial dan teknologi yang cepat.

A. Isu Strategis Global

Dalam era globalisasi yang semakin dinamis, pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari berbagai isu strategis global yang berkembang. Isu-isu global ini memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan pembangunan di tingkat lokal, termasuk Kabupaten Padang Pariaman. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi, memahami, dan merespons isu-isu global secara adaptif dan terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

Beberapa isu strategis global yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah antara lain:

1. Kebijakan Proteksionisme Ekonomi Amerika Serikat

Perkembangan kebijakan ekonomi global dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkatnya proteksionisme, terutama yang dilakukan oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat (AS). Kebijakan ini ditandai dengan peningkatan tarif impor, pembatasan akses pasar, serta peninjauan ulang terhadap berbagai perjanjian perdagangan internasional. Salah satu bentuk nyata dari kebijakan proteksionisme tersebut adalah perang dagang antara AS dan Tiongkok, yang memunculkan dinamika baru dalam perekonomian global.

Kebijakan tarif yang tinggi terhadap sejumlah produk impor dari mitra dagang utama AS, termasuk Kanada, Meksiko, Uni Eropa, dan Tiongkok, telah menimbulkan tekanan pada sektor perdagangan global. Sebagai bentuk respons, Tiongkok melakukan pembalasan dengan

mengenakan tarif dan pembatasan terhadap produk pertanian AS, yang berimplikasi pada terganggunya rantai pasok global serta menurunnya daya saing industri manufaktur dan pertanian AS.

Efek dari kebijakan proteksionisme ini tidak hanya dirasakan oleh negara-negara maju, tetapi juga berdampak signifikan terhadap negara berkembang seperti Indonesia. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah, penurunan minat investasi asing, serta hambatan terhadap komoditas ekspor utama seperti tekstil, minyak kelapa sawit, dan karet menjadi tantangan nyata. Selain itu, volatilitas pasar keuangan global, fluktuasi nilai mata uang utama dunia, serta kecenderungan investor global mengalihkan aset ke instrumen yang lebih aman seperti emas turut memperkuat ketidakpastian ekonomi global.

Dalam konteks ini, kebijakan ekonomi AS telah memicu perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan meningkatkan risiko resesi. Ketidakpastian yang ditimbulkan juga berdampak pada biaya produksi perusahaan multinasional, menurunkan permintaan manufaktur, serta mendorong relokasi industri ke negara dengan iklim ekonomi yang lebih stabil.

Indonesia, termasuk Kabupaten Padang Pariaman sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional, perlu merespons isu strategis ini secara adaptif. Diperlukan strategi diversifikasi pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar AS, memperkuat hubungan perdagangan dengan kawasan Asia, Afrika, dan Eropa, serta mendorong transformasi struktural ekonomi lokal khususnya pada sektor manufaktur dan pertanian. Selain itu, penguatan daya saing produk lokal melalui pemberian insentif, peningkatan kualitas SDM, serta penguasaan teknologi menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah di tengah dinamika ekonomi global.

Dengan demikian, memahami dan mengantisipasi kebijakan proteksionisme global menjadi bagian penting dari kerangka kebijakan pembangunan daerah ke depan, guna memastikan kesinambungan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

2. Perubahan Iklim dan Krisis Lingkungan Global

Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Pemanasan global menyebabkan kenaikan suhu bumi yang berdampak pada naiknya permukaan laut, mencairnya es kutub, dan frekuensi kejadian cuaca ekstrem seperti banjir bandang, kekeringan, dan badai tropis. Isu ini memiliki dampak yang luas, tidak hanya secara ekologis tetapi juga terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

Kabupaten Padang Pariaman sebagai daerah pesisir dan rawan bencana sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Naiknya permukaan laut dapat mengancam wilayah-wilayah dataran rendah, termasuk permukiman, infrastruktur, dan lahan pertanian produktif. Selain itu, cuaca ekstrem berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan menurunkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan.

Krisis lingkungan global juga memperlihatkan degradasi sumber daya alam dan hilangnya keanekaragaman hayati. Aktivitas manusia yang eksploitatif terhadap lingkungan mengakibatkan rusaknya

ekosistem alami yang pada akhirnya memperburuk krisis iklim. Di tingkat lokal, penggundulan hutan, pencemaran air dan udara, serta penurunan kualitas tanah harus menjadi perhatian serius dalam pembangunan.

Pembangunan yang tidak memperhatikan keberlanjutan akan memperparah kerentanan wilayah terhadap bencana. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan, berbasis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, seperti konservasi lahan kritis, peningkatan ketahanan pangan, dan sistem peringatan dini bencana.

Isu ini menuntut adanya integrasi kebijakan lingkungan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Hal ini mencakup pengarusutamaan kebijakan perubahan iklim dalam RPJMD, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang pengelolaan lingkungan, serta sinergi dengan program pemerintah pusat maupun lembaga internasional.

Sebagai langkah strategis, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman perlu mendorong transisi menuju pembangunan hijau (*green economy*), meningkatkan investasi pada energi terbarukan, serta melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan. Pendekatan ini penting untuk menjaga daya dukung lingkungan dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan jangka panjang.

3. Transformasi Digital dan Revolusi Industri 4.0

Revolusi Industri 4.0 yang ditandai oleh kemajuan pesat dalam bidang teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara hidup, bekerja, dan berinteraksi masyarakat global. Inovasi seperti kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), blockchain, dan big data telah menjadi kekuatan utama penggerak ekonomi dan pemerintahan. Di tingkat lokal, transformasi digital membuka peluang besar untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan mendekatkan pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman perlu menyesuaikan diri dengan tren ini dengan memperkuat infrastruktur digital, memperluas akses internet, serta meningkatkan literasi digital bagi ASN dan masyarakat.

Transformasi digital juga menghadirkan tantangan serius, khususnya terkait dengan kesenjangan akses teknologi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Ketimpangan digital (*digital divide*) berpotensi menciptakan kelompok masyarakat yang tertinggal dan tidak mampu bersaing dalam ekonomi digital.

Kesiapan SDM aparatur pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi juga masih menjadi pekerjaan rumah. Banyak sistem pelayanan publik yang belum sepenuhnya terdigitalisasi, sementara sebagian aparatur belum menguasai keterampilan teknologi yang memadai. Dalam konteks pembangunan daerah, transformasi digital harus diarahkan untuk mempercepat pelayanan publik, membuka peluang ekonomi kreatif berbasis teknologi, dan menciptakan iklim birokrasi yang transparan dan akuntabel. Pemanfaatan data yang akurat dan real-time juga menjadi kunci dalam mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti.

Oleh karena itu, penguatan kebijakan transformasi digital perlu menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah, dengan

mengedepankan inovasi, kolaborasi lintas sektor, dan pengembangan talenta digital di kalangan ASN serta generasi muda.

4. Perkembangan Demografi Global

Perkembangan demografi global merupakan salah satu faktor penting yang sangat mempengaruhi arah pembangunan ekonomi dan sosial dunia. Pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat akan membawa dampak signifikan terhadap kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan, air bersih, energi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Tekanan terhadap sumber daya alam yang terbatas menjadi tantangan besar, terutama ketika pertumbuhan tersebut tidak diimbangi oleh peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya.

Berdasarkan proyeksi yang dirilis oleh World Population Prospects (2022), jumlah populasi dunia yang saat ini sekitar 7 miliar jiwa diperkirakan akan meningkat menjadi 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tren perlambatan dalam laju pertumbuhan penduduk di beberapa negara maju, populasi global secara keseluruhan masih akan terus meningkat, terutama di negara-negara berkembang. Lonjakan populasi ini memerlukan respons kebijakan yang cermat agar pembangunan ekonomi dan sosial tetap seimbang dan berkelanjutan.

Peningkatan jumlah penduduk akan berdampak langsung pada berbagai sektor pembangunan, termasuk perumahan, transportasi, tenaga kerja, dan ketahanan pangan. Pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, harus menyesuaikan strategi pembangunannya agar mampu menyediakan layanan dan infrastruktur publik yang cukup serta layak bagi seluruh penduduk. Kegagalan dalam merespons dinamika demografi dapat menyebabkan meningkatnya pengangguran, kemiskinan, serta tekanan sosial dan lingkungan.

Di sisi lain, pertumbuhan populasi juga dapat menjadi potensi besar bagi pertumbuhan ekonomi apabila dikelola dengan baik. Negara-negara dengan jumlah penduduk besar memiliki peluang untuk memanfaatkan bonus demografi, yaitu kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif lebih tinggi dibandingkan usia non-produktif. Bonus ini dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi jika didukung dengan pendidikan, keterampilan kerja, dan lapangan pekerjaan yang memadai.

Asia dan Afrika diprediksi akan menjadi pusat pertumbuhan demografi dunia pada dekade-dekade mendatang. Kawasan ini akan memainkan peran strategis dalam ekonomi global, tidak hanya karena jumlah penduduknya yang besar, tetapi juga karena potensi pertumbuhan ekonominya yang relatif stabil dan terus meningkat. Indonesia, sebagai bagian dari kawasan Asia Tenggara, dipandang sebagai negara dengan daya tarik tinggi bagi investor asing, terutama karena stabilitas ekonomi dan potensi pasar domestiknya yang besar.

Dengan demikian, dinamika demografi global perlu direspons secara cermat dalam perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah daerah harus menyusun kebijakan yang proaktif dalam mengelola pertumbuhan penduduk, memperkuat ketahanan sosial, dan memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan angka, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

5. Perkembangan Geopolitik dan Geoekonomi Global

Perkembangan geopolitik dan geoekonomi global menjadi faktor eksternal yang signifikan dalam mempengaruhi stabilitas dan arah pembangunan nasional maupun daerah. Ketegangan antarnegara dan dinamika aliansi strategis tidak hanya berdampak pada keamanan global, tetapi juga terhadap arus perdagangan, investasi, dan stabilitas ekonomi regional. Konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia menciptakan ketidakpastian yang memerlukan kewaspadaan dan respons adaptif dari seluruh negara, termasuk Indonesia.

Beberapa isu geopolitik yang mencuat dalam dekade terakhir menunjukkan bahwa persaingan antarnegara besar kian intens. Konflik Rusia-Ukraina, yang telah memicu krisis energi dan pangan global, menjadi contoh nyata bagaimana ketegangan geopolitik dapat berdampak secara luas. Ketegangan di Selat Taiwan dan Semenanjung Korea menimbulkan risiko terhadap stabilitas di kawasan Asia Timur, yang merupakan salah satu pusat ekonomi dunia. Sementara itu, Laut China Selatan dan kawasan Indo-Pasifik menjadi medan persaingan pengaruh antara negara-negara besar yang dapat berpengaruh terhadap kebebasan navigasi dan perdagangan.

Dalam hal ini, posisi Indonesia sebagai negara maritim dan bagian dari ASEAN memiliki nilai strategis. Indonesia perlu memainkan peran aktif dalam diplomasi kawasan untuk menjaga stabilitas dan keamanan regional. Peran sentral ASEAN harus diperkuat sebagai platform kerjasama yang inklusif dan solutif dalam merespons isu-isu geopolitik. Indonesia juga dapat mendorong peningkatan kerja sama intra-ASEAN dalam bidang pertahanan non-militer, diplomasi ekonomi, dan penyelesaian sengketa secara damai.

Transformasi geoekonomi global juga tengah berlangsung, ditandai dengan pergeseran pusat pertumbuhan ekonomi dari negara-negara maju ke negara berkembang. Proyeksi ekonomi global menunjukkan bahwa pada tahun 2050, output ekonomi dunia akan meningkat tiga kali lipat dibandingkan kondisi saat ini. Negara-negara seperti Tiongkok, India, dan Indonesia diperkirakan akan menjadi kekuatan ekonomi utama, menggantikan dominasi negara-negara Barat. Ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan kontribusinya dalam perekonomian global.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi besar, sumber daya alam melimpah, dan posisi geografis yang strategis memiliki modal dasar yang kuat untuk menjadi pemain utama dalam kancah geoekonomi dunia. Namun, hal ini memerlukan penguatan daya saing nasional, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, reformasi struktural ekonomi, serta peningkatan kapasitas SDM yang berorientasi global. Indonesia juga harus mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik arus modal dan teknologi dari berbagai mitra strategis dunia.

Oleh karena itu, dinamika geopolitik dan geoekonomi global harus dipahami dan direspons secara komprehensif dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk di Kabupaten Padang Pariaman. Pemerintah daerah harus menyesuaikan arah kebijakan pembangunan yang tanggap terhadap perkembangan global, memperkuat integrasi ekonomi lokal dengan pasar regional dan internasional, serta

meningkatkan kapasitas diplomasi daerah dalam jejaring kerja sama antardaerah dan internasional. Hal ini penting guna memastikan ketahanan ekonomi daerah sekaligus membuka peluang baru dalam perdagangan, investasi, dan inovasi.

6. Urbanisasi Global dan Mobilitas Penduduk

Urbanisasi adalah fenomena global yang tidak dapat dihindari. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan pergeseran penduduk dari desa ke kota menimbulkan tantangan besar dalam pengelolaan wilayah dan penyediaan layanan publik. Kabupaten Padang Pariaman sebagai daerah penyangga Kota Padang dan Bukittinggi juga menghadapi tekanan urbanisasi yang makin meningkat.

Mobilitas penduduk menyebabkan berkembangnya kawasan permukiman baru yang tidak selalu diiringi dengan penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan transportasi publik yang memadai. Jika tidak ditangani secara terencana, urbanisasi akan menimbulkan kawasan kumuh, kemacetan, dan degradasi lingkungan.

Selain itu, meningkatnya kebutuhan terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perumahan mengharuskan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sosial dan fisik yang berkualitas. Urbanisasi juga meningkatkan risiko konflik lahan, ketimpangan akses, dan tekanan terhadap sumber daya alam.

Pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem perencanaan tata ruang yang berkelanjutan, berbasis pada data kependudukan dan proyeksi pertumbuhan wilayah. Integrasi antara kebijakan penggunaan lahan, transportasi, dan pengendalian pertumbuhan penduduk harus menjadi prioritas dalam RPJMD. Urbanisasi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi lokal jika dikelola dengan baik, seperti pengembangan kawasan ekonomi baru, perluasan pusat perdagangan, dan penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, pemerintah perlu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru yang mampu menyerap urbanisasi dengan pendekatan berbasis wilayah.

Isu mobilitas juga harus dikaitkan dengan ketahanan sosial, khususnya dalam menjaga integrasi sosial dan mengurangi kesenjangan antara wilayah. Hal ini mengharuskan penguatan kebijakan inklusif dan pembangunan berbasis komunitas agar urbanisasi dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial yang merata

7. Dominasi Asia Pasifik dan Tantangan Transformasi Perdagangan Digital

Konstelasi perdagangan global akan berubah dengan peran negara-negara Asia Pasifik yang semakin dominan. Perdagangan internasional dipengaruhi oleh teknologi informasi dan digitalisasi, menciptakan hubungan strategis dalam pola perdagangan dunia. Kawasan Asia Pasifik, khususnya negara-negara seperti Tiongkok, India, Korea Selatan, Jepang, dan negara-negara ASEAN, menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang pesat, peningkatan daya saing industri, serta adopsi teknologi tinggi yang mendorong produktivitas dan efisiensi perdagangan lintas negara.

Perubahan ini menciptakan tantangan baru bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam menyesuaikan strategi

perdagangan, infrastruktur logistik, dan penguatan daya saing produk lokal agar mampu bersaing di pasar global yang semakin terdigitalisasi. Digitalisasi dalam perdagangan mendorong efisiensi transaksi lintas negara, pemanfaatan platform *e-commerce, blockchain* dalam sistem logistik, serta pemrosesan pembayaran internasional yang lebih cepat dan aman.

Transformasi ini juga menimbulkan kesenjangan antara negara-negara yang memiliki infrastruktur digital dan sumber daya manusia yang siap, dengan yang belum. Indonesia, termasuk daerah-daerah seperti Kabupaten Padang Pariaman, harus mampu menyesuaikan diri dengan memperkuat kapasitas teknologi informasi, pengembangan UMKM berbasis digital, serta literasi digital bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Selain itu, meningkatnya proteksionisme dan kebijakan perdagangan yang fluktuatif dari negara mitra dagang besar turut menciptakan ketidakpastian dalam perdagangan internasional. Negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok dapat secara tiba-tiba mengubah arah kebijakan ekspor-impor yang berdampak pada rantai pasok global. Hal ini berpotensi mengganggu kelancaran ekspor komoditas unggulan Indonesia dan menghambat pertumbuhan sektor perdagangan daerah.

Sebagai respons, Indonesia perlu membangun strategi diversifikasi pasar ekspor, memperkuat peran diplomasi ekonomi, serta mempercepat integrasi sistem perdagangan digital yang berdaya saing tinggi. Kabupaten Padang Pariaman sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional harus mulai menyiapkan langkah-langkah konkret dalam menghadapi tantangan ini, termasuk penguatan konektivitas logistik, fasilitasi perdagangan UMKM digital, serta integrasi informasi pasar luar negeri yang dapat diakses oleh pelaku usaha lokal.

Dominasi negara-negara Asia Pasifik dalam perdagangan global dan perkembangan teknologi digital harus disikapi secara adaptif dan strategis. Kabupaten Padang Pariaman perlu mengantisipasi perubahan ini sebagai peluang sekaligus tantangan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan di era perdagangan global yang baru.

8. Meningkatnya Persaingan dan Kelangkaan Sumber Daya Alam di Tengah Pertumbuhan Populasi Global

Persaingan dan kelangkaan sumber daya alam seperti energi, air, dan pangan akan meningkat seiring dengan pertambahan populasi dunia yang pesat. Proyeksi populasi global yang diperkirakan mencapai hampir 10 miliar jiwa pada tahun 2050 akan mendorong lonjakan permintaan terhadap berbagai kebutuhan dasar. Kenaikan ini tidak hanya akan menambah tekanan terhadap ketersediaan sumber daya, tetapi juga menimbulkan potensi konflik, baik dalam skala lokal, nasional, maupun global.

Sumber daya energi, khususnya energi fosil, semakin menipis, sementara transisi menuju energi terbarukan belum sepenuhnya merata dan cepat di semua negara. Negara-negara dengan cadangan energi yang melimpah cenderung mempertahankan dominasi geopolitiknya, sedangkan negara lain berusaha keras untuk mengamankan pasokan energi melalui impor atau pengembangan sumber energi alternatif. Ketimpangan ini menciptakan kompetisi yang tajam, dan Indonesia

sebagai negara berkembang harus mampu menjaga kemandirian energinya dengan mempercepat transisi energi bersih.

Ketersediaan air bersih juga menjadi perhatian besar. Peningkatan konsumsi air untuk kebutuhan rumah tangga, industri, dan pertanian membuat banyak wilayah mengalami tekanan terhadap sumber daya air. Bencana kekeringan dan krisis air bersih yang terjadi di beberapa negara menjadi sinyal bahwa pengelolaan sumber daya air memerlukan pendekatan yang lebih holistik, berbasis konservasi, efisiensi penggunaan, serta teknologi pengolahan air yang lebih canggih.

Pertumbuhan populasi dunia menyebabkan kebutuhan pangan meningkat drastis. Namun, perubahan iklim, konversi lahan pertanian, dan kerusakan ekosistem mempersempit kapasitas produksi pangan global. Ketahanan pangan nasional dan daerah menjadi tantangan yang semakin kompleks, membutuhkan penguatan sistem pertanian yang tangguh terhadap perubahan iklim, serta teknologi pertanian presisi yang efisien dan ramah lingkungan.

Kabupaten Padang Pariaman, sebagai daerah yang masih sangat bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan energi berbasis bahan bakar fosil, perlu mengantisipasi persoalan ini melalui kebijakan adaptif. Upaya pengelolaan lahan dan air secara berkelanjutan, penguatan ketahanan pangan lokal, serta edukasi masyarakat dalam penggunaan energi terbarukan menjadi langkah penting untuk menjaga ketersediaan dan akses sumber daya alam.

Dengan demikian, efektivitas pengelolaan, konservasi, dan pemanfaatan teknologi akan sangat menentukan kemampuan suatu daerah dan negara dalam menjamin keberlanjutan akses terhadap energi, air, dan pangan. Tanpa strategi yang tepat, tantangan ini akan mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, dan lingkungan di masa depan. Pemerintah daerah dituntut untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan, ketahanan sumber daya, dan inovasi teknologi untuk menjawab dinamika global tersebut

B. Isu Strategis Nasional

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 tidak dapat dilepaskan dari dinamika pembangunan nasional. Sinkronisasi dan integrasi antara perencanaan daerah dengan arah kebijakan nasional menjadi penting dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta visi Indonesia Emas 2045.

Beberapa isu strategis nasional yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman meliputi:

1. Kebijakan Ekonomi Nasional dan Proteksionisme Global

Dalam konteks penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029, kebijakan ekonomi nasional dan dinamika proteksionisme global menjadi salah satu isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius. Kebijakan ekonomi nasional yang

ditetapkan oleh pemerintah pusat menjadi pedoman utama bagi daerah dalam merumuskan arah pembangunan ekonomi, termasuk dalam hal penguatan sektor strategis, peningkatan investasi, dan pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan daerah.

Kebijakan nasional yang mengedepankan hilirisasi industri, transformasi ekonomi berbasis digital, peningkatan kemandirian pangan dan energi, serta pemberdayaan UMKM merupakan instrumen penting yang harus diinternalisasikan dalam perencanaan pembangunan daerah. Kabupaten Padang Pariaman dituntut untuk dapat menerjemahkan arah kebijakan tersebut ke dalam program-program nyata yang selaras, terukur, dan berbasis potensi lokal, seperti sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata.

Tren proteksionisme global yang kian menguat, terutama dari negara-negara ekonomi besar, menimbulkan dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional dan daerah. Penerapan kebijakan tarif tinggi, pembatasan impor, serta ketegangan geopolitik yang mempengaruhi rantai pasok global dapat mempengaruhi daya saing ekspor nasional dan memicu fluktuasi harga komoditas strategis. Hal ini dapat berdampak langsung terhadap petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro yang menggantungkan pendapatannya pada pasar yang lebih luas.

Dalam situasi ini, daerah perlu mengantisipasi risiko eksternal tersebut melalui penguatan ketahanan ekonomi lokal. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman perlu mendorong peningkatan produktivitas sektor-sektor riil, membangun ekosistem investasi yang kondusif, serta memperkuat rantai pasok lokal. Diversifikasi ekonomi menjadi penting, agar perekonomian daerah tidak terlalu bergantung pada satu komoditas atau sektor tertentu yang rentan terhadap gejolak global. Kolaborasi dengan pemerintah pusat, dunia usaha, dan sektor swasta harus diperkuat guna menghadirkan inovasi dan teknologi yang mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal. Penguatan kapasitas SDM, perluasan akses pasar melalui digitalisasi, serta peningkatan daya saing produk lokal menjadi langkah strategis dalam menjawab tantangan proteksionisme global.

Dengan demikian, penyusunan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 perlu mempertimbangkan secara cermat dinamika kebijakan ekonomi nasional dan tantangan proteksionisme global, agar mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang adaptif, resilien, dan berorientasi pada kemandirian ekonomi daerah.

2. Isu Fiskal Nasional dan Implikasinya terhadap Perencanaan Daerah

Memasuki tahun 2025, salah satu isu ekonomi makro yang menjadi sorotan nasional adalah potensi pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meskipun pemerintah pusat optimistis bahwa rasio defisit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tidak akan melampaui batas 2,54%, perkembangan fiskal terkini menunjukkan adanya tekanan serius, terutama dari sisi penerimaan negara.

Penerimaan perpajakan yang menjadi tulang punggung pembiayaan APBN menunjukkan tren penurunan, khususnya dari sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri. Kebijakan pembatalan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% menyebabkan

tidak tercapainya ekspektasi penerimaan dari sektor pajak konsumsi. Di sisi lain, penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan juga mengalami kontraksi signifikan, yang mencerminkan pelemahan kinerja korporasi nasional. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap pencapaian target pendapatan negara secara keseluruhan.

Jika dilihat dari sisi belanja negara, terjadi peningkatan signifikan, terutama pada belanja non-kementerian dan lembaga (non-K/L) yang didominasi oleh subsidi energi dan pembayaran bunga utang. Alokasi transfer keuangan pusat ke daerah juga meningkat, meskipun belanja sektor kementerian dan lembaga cenderung stagnan. Ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja ini meningkatkan risiko fiskal dan memperbesar potensi defisit, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kapasitas fiskal pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional, termasuk pembangunan di daerah.

Dalam merespon potensi kesenjangan fiskal, pemerintah pusat cenderung mengandalkan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebagai instrumen pembiayaan. Ketergantungan yang berlebihan terhadap instrumen utang ini meningkatkan beban pembayaran bunga dan berpotensi memperburuk persepsi risiko fiskal di mata investor, sehingga dapat mengganggu stabilitas ekonomi jangka menengah.

Untuk mengatasi tekanan fiskal tersebut, Pemerintahan Presiden Prabowo juga telah meluncurkan kebijakan strategis berupa pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang berfungsi mengelola kekayaan negara di luar struktur APBN guna mendorong investasi di sektor-sektor strategis nasional. Inisiatif ini diharapkan mampu menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang tidak membebani fiskal secara langsung.

Bagi Kabupaten Padang Pariaman, dinamika fiskal nasional ini menjadi sangat relevan dalam proses penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029. Ketergantungan sebagian besar program pembangunan terhadap Transfer ke Daerah (TKD) dari APBN menuntut pemerintah daerah untuk cermat dalam mengelola belanja serta mencari alternatif pembiayaan pembangunan. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan kemitraan investasi, serta pemanfaatan dana transfer secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, konsistensi perencanaan pembangunan daerah harus tetap sejalan dengan arah kebijakan fiskal nasional agar mampu menjawab tantangan pembangunan secara berkelanjutan dan inklusif

3. Danantara sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu isu strategis nasional yang patut menjadi perhatian Provinsi Sumatera Barat, termasuk Kabupaten Padang Pariaman, dalam penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025–2029 adalah peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Lembaga ini dirancang sebagai *sovereign wealth fund* (SWF) Indonesia yang bertujuan untuk mengelola investasi strategis secara terpisah dari APBN. Pemerintah menempatkan Danantara sebagai instrumen utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan investasi di berbagai sektor prioritas.

Keberadaan Danantara diharapkan dapat menjadi katalisator investasi di daerah, termasuk di Sumatera Barat. Fokus utama pengelolaan Danantara meliputi pembiayaan pembangunan

infrastruktur, peningkatan ketahanan pangan, akselerasi hilirisasi industri, serta pengembangan energi baru dan terbarukan. Untuk Kabupaten Padang Pariaman, peluang ini harus ditangkap melalui penyusunan portofolio proyek strategis daerah yang mampu menarik minat investasi, sejalan dengan arah kebijakan Danantara.

Model pengelolaan Danantara mengacu pada praktik sukses dari berbagai negara, seperti Temasek Holdings di Singapura dan Government Pension Fund Global di Norwegia. Pengembangan Danantara diharapkan mampu menarik investasi asing, mengelola aset negara secara lebih produktif, serta mempercepat realisasi proyek-proyek ekonomi strategis nasional maupun daerah. Dalam kerangka tersebut, sinergi antara sektor keuangan dan sektor riil menjadi kunci, termasuk melalui konsolidasi beberapa BUMN dan perbankan nasional di bawah payung Danantara.

Isu yang harus dicermati secara kritis, yaitu potensi dampak kehadiran Danantara terhadap stabilitas sektor keuangan nasional. Tiga bank nasional besar yang tergabung dalam Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), yang menjadi bagian integral dari struktur Danantara, selama ini memegang peran penting dalam pembiayaan UMKM dan pengelolaan dana masyarakat. Kinerja dan stabilitas sektor perbankan nasional sangat menentukan kestabilan perekonomian secara keseluruhan.

Jika pengelolaan Danantara tidak dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel, maka akan muncul risiko sistemik terhadap sistem keuangan nasional. Tekanan terhadap perbankan dapat berdampak terhadap penurunan pembiayaan sektor produktif di daerah, termasuk UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal seperti di Kabupaten Padang Pariaman. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk terus memantau dinamika kebijakan investasi nasional ini dan merumuskan strategi adaptif agar dapat memanfaatkan peluang yang ada sekaligus mengantisipasi potensi risiko.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, Kabupaten Padang Pariaman perlu menyelaraskan prioritas strategisnya dengan arah investasi Danantara. Perlu dilakukan identifikasi dan penyusunan *investment project pipeline* yang *feasible* dan *bankable*, khususnya pada sektor pertanian, ketahanan pangan, energi terbarukan, dan infrastruktur konektivitas. Dengan demikian, daerah tidak hanya menjadi objek pembangunan nasional, tetapi juga berperan aktif dalam menarik investasi yang berkualitas demi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

4. Koperasi Daerah Merah-Putih

Kebijakan strategis nasional lainnya yang patut dicermati dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 adalah rencana pemerintah pusat untuk mengalokasikan pendanaan langsung kepada masing-masing desa melalui pembentukan Koperasi Desa Merah-Putih. Skema ini dirancang sebagai bentuk penguatan ekonomi kerakyatan dengan pendekatan pembiayaan berbasis koperasi, yang diproyeksikan akan melampaui besaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama ini difasilitasi oleh perbankan, khususnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), pada tahun 2024 dan seterusnya.

Model pembiayaan tersebut berpotensi mengubah secara signifikan konsep dan ekosistem pembiayaan mikro di Indonesia. Dengan kepemilikan koperasi berada langsung di tangan masyarakat desa, dana yang disalurkan diharapkan mampu menjadi sumber permodalan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan usaha mikro dan kecil. Namun, perubahan ini juga memberikan dampak struktural terhadap sektor perbankan, khususnya dalam hal permintaan terhadap kredit mikro konvensional yang diperkirakan akan menurun secara bertahap.

Sebagai respons terhadap perubahan tersebut, lembaga perbankan nasional maupun daerah harus melakukan penyesuaian strategi, termasuk mengalihkan fokus pembiayaan dari skema ritel langsung ke masyarakat menuju model *wholesale lending* kepada koperasi desa. Dengan demikian, perbankan tetap dapat berperan sebagai penyedia likuiditas sekaligus mitra pembiayaan produktif bagi koperasi sebagai lembaga perantara. Namun demikian, apabila koperasi tidak dikelola secara profesional dan akuntabel, risiko gagal kelola dana akan meningkat dan masyarakat akan kembali mengandalkan perbankan untuk memperoleh pinjaman usaha.

Transformasi ekosistem ini juga mendorong percepatan digitalisasi layanan perbankan, peningkatan kapasitas pembiayaan berbasis teknologi finansial (fintech), serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap koperasi penerima kredit. Dalam konteks tersebut, penguatan regulasi, kapasitas manajerial koperasi, serta sistem audit dan pelaporan menjadi aspek krusial untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan berbasis koperasi desa.

Perubahan fundamental ini akan menggeser dominasi perbankan sebagai penyedia utama pembiayaan mikro dan membuka ruang baru bagi koperasi desa untuk memainkan peran sentral dalam perekonomian lokal. Jika tidak diantisipasi dengan cepat dan tepat, institusi perbankan—baik di tingkat nasional maupun daerah—dapat kehilangan pangsa pasar dalam pembiayaan mikro, dan koperasi desa akan muncul sebagai aktor utama dalam pembangunan ekonomi berbasis komunitas.

Bagi Kabupaten Padang Pariaman, kebijakan ini menjadi peluang sekaligus tantangan. Pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan koperasi desa dalam mengelola pendanaan yang lebih besar, memperkuat pembinaan dan pengawasan kelembagaan koperasi, serta memfasilitasi sinergi antara koperasi, pelaku UMKM, dan sektor keuangan formal. Dengan demikian, transisi menuju sistem ekonomi berbasis koperasi dapat diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

5. Penguatan Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Bangsa

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu agenda strategis nasional yang menjadi landasan utama dalam mendorong kemajuan bangsa secara berkelanjutan. Pemerintah pusat menempatkan sektor pendidikan, kesehatan, dan pengembangan keterampilan kerja sebagai prioritas utama dalam menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing di tingkat regional maupun global. Upaya penguatan ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup

masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi nasional.

Kabupaten Padang Pariaman sebagai bagian integral dari pembangunan nasional memiliki tanggung jawab untuk menjabarkan kebijakan penguatan SDM ke dalam program-program pembangunan daerah yang konkret dan terukur. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan daerah harus berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah, penguatan layanan kesehatan primer, serta perluasan akses terhadap pelatihan dan sertifikasi keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja saat ini dan masa depan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator kunci pencapaian kualitas SDM perlu menjadi perhatian utama. Kabupaten Padang Pariaman masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan angka harapan lama sekolah, angka harapan hidup, serta pengeluaran riil per kapita masyarakat. Oleh karena itu, program peningkatan mutu guru, revitalisasi sarana prasarana pendidikan, perluasan jaminan kesehatan masyarakat, serta penyediaan pelatihan vokasional dan inkubasi kewirausahaan harus diutamakan dalam RPJMD 2025–2029.

Dalam menghadapi era digitalisasi dan ekonomi berbasis pengetahuan, pembangunan SDM juga harus diarahkan untuk meningkatkan literasi digital, kemampuan adaptif, dan kecakapan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan inovasi. Pemerintah daerah perlu membangun kemitraan dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal untuk mendukung penciptaan ekosistem pembelajaran sepanjang hayat yang inklusif dan relevan.

Peran generasi muda sebagai penggerak pembangunan harus diperkuat melalui program kepemudaan, pengembangan kreativitas, serta peningkatan partisipasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan upaya nasional dalam memanfaatkan bonus demografi sebagai momentum strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.

Dengan demikian, arah pembangunan SDM di Kabupaten Padang Pariaman perlu diselaraskan secara komprehensif dengan kebijakan nasional, baik dalam bentuk program prioritas maupun intervensi lintas sektor, guna memastikan bahwa setiap penduduk memiliki akses yang adil terhadap kesempatan untuk tumbuh, berkembang, dan berkontribusi secara produktif dalam pembangunan daerah dan bangsa.

6. Pembangunan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim

Pembangunan berkelanjutan dan ketahanan terhadap perubahan iklim telah menjadi agenda prioritas nasional yang tidak dapat ditunda. Pemerintah pusat telah mengarahkan agar setiap daerah mengarusutamakan isu lingkungan dan perubahan iklim dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs) serta upaya pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca sesuai dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC).

Kabupaten Padang Pariaman, sebagai salah satu daerah yang memiliki garis pantai dan kontur wilayah yang rawan terhadap bencana

alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami, memiliki urgensi yang tinggi untuk mengintegrasikan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam kebijakan pembangunan daerah. Peningkatan ketangguhan wilayah perlu dilakukan melalui perencanaan tata ruang berbasis risiko bencana, penguatan sistem peringatan dini, rehabilitasi kawasan rawan, serta pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap iklim dan bencana.

Isu lingkungan hidup seperti degradasi lahan, abrasi pantai, pencemaran air dan udara, serta menurunnya kualitas keanekaragaman hayati juga menuntut perhatian serius. Kabupaten Padang Pariaman perlu mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pelestarian kawasan lindung, termasuk hutan mangrove dan daerah aliran sungai. Edukasi lingkungan dan pelibatan masyarakat dalam konservasi juga harus diperkuat sebagai bagian dari strategi adaptif jangka panjang.

Pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau merupakan arah strategis yang perlu diadopsi oleh pemerintah daerah. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan efisiensi energi, pengembangan energi terbarukan, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah yang terintegrasi. Penguatan kapasitas kelembagaan daerah dan integrasi data iklim juga menjadi kunci dalam mendukung kebijakan yang berbasis bukti dan risiko.

Untuk mendukung keberhasilan agenda ini, kemitraan antara pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil harus dibangun secara sinergis. Insentif kebijakan dan pendanaan untuk program-program berbasis lingkungan dan adaptasi iklim juga perlu dioptimalkan, termasuk memanfaatkan peluang pembiayaan hijau dari lembaga nasional dan internasional. Dengan pendekatan pembangunan yang responsif terhadap perubahan iklim dan risiko bencana, Kabupaten Padang Pariaman tidak hanya dapat meningkatkan ketahanan wilayah, tetapi juga mendorong keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

7. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah

Pemerintah pusat menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai pilar utama dalam memperkuat daya saing nasional dan mempercepat pemerataan pembangunan. Infrastruktur tidak hanya dilihat sebagai sarana fisik, tetapi juga sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan wilayah, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, berkelanjutan, dan inklusif menjadi salah satu prioritas strategis nasional yang perlu diterjemahkan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Kabupaten Padang Pariaman memiliki posisi geografis yang sangat strategis, berada pada jalur utama lintas barat Sumatera serta menjadi kawasan penyangga bagi Kota Padang dan pintu gerbang menuju Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Kondisi ini menjadikan pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas wilayah sebagai isu krusial dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029. Peningkatan konektivitas antar wilayah diharapkan dapat membuka akses pasar, mendorong investasi,

serta memperlancar distribusi barang dan jasa, khususnya dari sentra produksi pertanian dan perikanan ke pusat konsumsi.

Pengembangan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, air bersih, sanitasi, dan listrik masih menjadi kebutuhan mendesak, terutama di wilayah pedesaan dan kawasan tertinggal. Peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan jalan kabupaten serta koneksi dengan jaringan jalan provinsi dan nasional harus dioptimalkan untuk memperlancar arus mobilitas orang dan barang. Selain itu, transportasi publik yang efisien dan terjangkau perlu dikembangkan untuk mendukung mobilitas masyarakat dan mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.

Di era transformasi digital, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga menjadi kebutuhan strategis. Pemerintah daerah perlu mendorong perluasan jaringan internet yang merata hingga ke pelosok nagari, sebagai prasyarat utama dalam membangun ekonomi digital, pendidikan berbasis teknologi, serta tata kelola pemerintahan berbasis elektronik *(e-government)*. Konektivitas digital ini juga penting untuk mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif, UMKM, dan layanan publik berbasis daring.

Peningkatan infrastruktur juga harus mempertimbangkan aspek ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim. Oleh karena itu, perencanaan dan pembangunan infrastruktur harus berbasis risiko, ramah lingkungan, dan mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Pemanfaatan material lokal, teknologi tepat guna, serta pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan juga perlu diintegrasikan agar manfaat infrastruktur dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan.

Melalui strategi pembangunan infrastruktur yang terpadu dan berorientasi jangka panjang, Kabupaten Padang Pariaman dapat memperkuat peran strategisnya dalam jaringan wilayah Sumatera Barat dan meningkatkan konektivitas ekonomi, sosial, dan budaya yang mendukung percepatan pembangunan daerah secara menyeluruh.

8. Program Tiga Juta Rumah

Program Tiga Rumah adalah program yang fokus pada penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun masih banyak tantangan, seperti kurangnya kerja sama antara instansi pemerintah, kurangnya penyuluhan kepada masyarakat, serta terbatasnya dana, terutama di daerah-daerah terpencil. Selain itu, masih banyak keluarga yang belum terdata dengan baik dan belum ada dukungan kuat dari pihak swasta dan masyarakat, untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan kerja sama yang lebih baik antar instansi pemerintah, aturan yang mendukung program ini, serta bantuan dari masyarakat dan swasta. Penggunaan teknologi juga penting untuk mendata dan memantau pelaksanaan program. Dengan pendekatan ini, Program Tiga Rumah bisa membantu banyak keluarga keluar dari kemiskinan dan menciptakan kehidupan yang lebih baik.

C. Isu Strategis Regional

Provinsi Sumatera Barat merupakan bagian integral dari sistem perekonomian Pulau Sumatera, yang dalam kurun waktu satu dekade terakhir menempati posisi menengah dalam kinerja ekonomi regional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga konstan menempatkan Sumatera Barat pada peringkat empat terbawah dari sebelas provinsi di wilayah Sumatera, berada di atas Bengkulu, Aceh, dan Lampung. Sementara itu, provinsi dengan tingkat kesejahteraan ekonomi tertinggi di Sumatera masih didominasi oleh Kepulauan Riau dan Riau. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian Sumatera Barat masih menghadapi tantangan dalam akselerasi pertumbuhan yang kompetitif di tingkat regional.

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat selama sepuluh tahun terakhir juga menunjukkan tren yang stagnan dan kurang menonjol dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Sumatera. Hal ini berimplikasi langsung terhadap kabupaten/kota di wilayah tersebut, termasuk Kabupaten Padang Pariaman, yang perlu menyusun strategi pembangunan ekonomi yang lebih agresif dan terarah guna mendorong peningkatan nilai tambah daerah secara berkelanjutan.

Dari sisi ketenagakerjaan, Sumatera Barat mencatat tingkat pengangguran yang relatif tinggi selama satu dasawarsa terakhir, menempati posisi kedua tertinggi setelah Kepulauan Riau. Selain itu, proporsi pekerja formal di provinsi ini juga masih rendah, berada di peringkat ketiga terbawah di atas Bengkulu dan Lampung. Rendahnya tingkat pekerja formal mencerminkan belum optimalnya sektor-sektor produktif dalam menyerap tenaga kerja secara berkelanjutan, yang turut menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman, khususnya dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas angkatan kerja.

Salah satu permasalahan struktural yang cukup signifikan adalah terjadinya fenomena deindustrialisasi prematur, yang tercermin dari semakin menyusutnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB Sumatera Barat. Sejak awal tahun 2000-an, proporsi sektor industri terus mengalami penurunan tanpa sempat mencapai tahapan industrialisasi yang optimal. Kondisi ini menunjukkan belum terbangunnya struktur ekonomi yang kokoh, yang ditandai oleh lemahnya sektor hilirisasi dan manufaktur. Kabupaten Padang Pariaman sebagai bagian dari provinsi ini perlu merancang kebijakan yang mendorong industrialisasi berbasis potensi lokal, seperti pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan pariwisata berkelanjutan.

Meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan tersebut, Provinsi Sumatera Barat mencatat pencapaian yang cukup baik dalam hal pengentasan kemiskinan. Persentase penduduk miskin di provinsi ini menempati peringkat ketiga terendah di Sumatera, setelah Kepulauan Riau dan Bangka Belitung. Capaian ini menjadi modal penting dalam menyusun strategi pembangunan daerah ke depan, termasuk bagi Kabupaten Padang Pariaman, yang perlu mempertahankan tren penurunan kemiskinan dengan memperkuat akses terhadap layanan dasar dan meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029, isu-isu strategis regional seperti stagnasi pertumbuhan ekonomi, rendahnya pendapatan per kapita, tingginya pengangguran, dominasi pekerja informal, dan deindustrialisasi prematur, harus dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada daya saing jangka panjang

D. Isu Strategis KLHS RPJMD

1. Masih rendahnya tingkat pengelolaan sampah
2. Masih rendahnya pemberdayaan ekonomi lokal berbasis rakyat
3. Belum optimalnya infrastruktur pengelolaan lingkungan
4. Peningkatan Penambangan Ilegal (Pertambangan mineral bukan logam dan batuan)
5. Maraknya Tambak Udang Ilegal di Kawasan Pesisir Pantai
6. Tingginya potensi bencana

E. Isu Strategis Daerah

1. Tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas

Meskipun reformasi birokrasi telah dilaksanakan, akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah masih perlu ditingkatkan. Rendahnya keterbukaan informasi, pertanggungjawaban kinerja, serta pengelolaan keuangan dan aset daerah mempengaruhi kepercayaan publik dan efektivitas program pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan, pelaporan kinerja berbasis hasil, dan transparansi dalam pengambilan keputusan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan akuntabel.

Digitalisasi dan integrasi pelayanan publik masih belum optimal, sehingga efisiensi dan kualitas layanan kepada masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Keterbatasan infrastruktur digital, sistem yang belum terintegrasi, serta rendahnya literasi digital aparatur menjadi kendala dalam mempercepat transformasi layanan publik. Untuk itu, diperlukan percepatan implementasi digitalisasi layanan, integrasi sistem antar instansi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar pelayanan publik lebih efektif, cepat, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

Lemahnya penerapan sistem berbasis merit menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan aparatur sipil negara di daerah. Kondisi ini menyebabkan kapasitas dan integritas ASN belum sepenuhnya terjaga, seleksi jabatan dan promosi karier belum selalu berbasis kompetensi, serta kualitas layanan publik berpotensi menurun. Oleh karena itu, perlu penguatan sistem manajemen ASN berbasis merit melalui penerapan prinsip kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahap rekrutmen, promosi, dan pengembangan karier, guna memastikan birokrasi yang profesional, efisien, dan akuntabel.

2. Peningkatan kualitas pendidikan dan cakupan layanan kesehatan

Peningkatan kualitas pendidikan serta perluasan cakupan layanan kesehatan merupakan isu strategis yang sangat esensial dalam mendorong pembangunan Kabupaten Padang Pariaman. Mutu pendidikan yang masih tergolong rendah disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain belum meratanya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh wilayah daerah, kurang optimalnya pelaksanaan kurikulum yang berorientasi pada pengembangan karakter dan literasi digital, minimnya program pengembangan profesi guru yang bersifat berkelanjutan, serta penyelenggaraan pendidikan vokasi yang belum dilaksanakan secara maksimal. Kondisi ini secara signifikan menghambat upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Selain itu, akses dan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Padang Pariaman juga belum mencapai tingkat yang optimal. Keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan, distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, rendahnya kompetensi tenaga kesehatan, serta tingginya biaya pelayanan kesehatan menjadi kendala utama dalam penyelenggaraan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas. Akibatnya, derajat kesehatan masyarakat sesuai dengan siklus hidupnya belum dapat tercapai secara menyeluruh, yang ditunjukkan oleh tingginya prevalensi stunting, angka kematian ibu yang masih signifikan, rendahnya usia harapan hidup, serta kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Disamping itu, upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular maupun tidak menular juga belum berjalan secara optimal.

Urgensi menjadikan peningkatan kualitas pendidikan dan cakupan layanan kesehatan sebagai isu strategis sangatlah penting, mengingat kedua sektor tersebut merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat. Peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan secara signifikan akan memperkuat kapasitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan kompetitif, sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

3. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan anak

Pembangunan daerah yang berkelanjutan menuntut perhatian serius terhadap kesetaraan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Di Kabupaten Padang Pariaman, masih dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan tingginya ketimpangan gender, serta belum optimalnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan. Kondisi ini berdampak pada masih terbatasnya partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun politik.

Selain itu, perlindungan terhadap anak juga masih menghadapi berbagai tantangan. Upaya pencegahan perkawinan usia anak, khususnya di bawah 19 tahun, belum berjalan maksimal sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak serta keberlangsungan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Fenomena ini juga sejalan dengan isu strategis nasional terkait

penurunan angka perkawinan anak dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berdaya saing, dan berdaya tahan terhadap risiko sosial.

Oleh karena itu, penguatan kesetaraan gender dan perlindungan anak perlu menjadi fokus strategis pembangunan daerah. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas pembangunan keluarga, pemberdayaan perempuan di berbagai sektor kehidupan, serta penguatan sistem perlindungan anak yang komprehensif. Upaya tersebut tidak hanya mendukung tercapainya keadilan dan kesetaraan gender, tetapi juga menjadi landasan penting bagi terciptanya generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

4. Penguatan sektor perdagangan dan industri pengolahan

Sektor perdagangan dan industri pengolahan merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, di Kabupaten Padang Pariaman sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum terbangunnya sistem distribusi dan infrastruktur perdagangan yang memadai, rendahnya daya saing produk lokal, serta terbatasnya promosi dan akses pasar. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya kontribusi sektor perdagangan dan industri pengolahan terhadap peningkatan nilai tambah produk serta perluasan kesempatan kerja.

Selain itu, lemahnya regulasi dan sistem perizinan usaha, minimnya kelembagaan dan kemitraan strategis, serta masih terbatasnya pemanfaatan inovasi dan teknologi dalam hilirisasi produk menyebabkan pelaku usaha, khususnya UMKM dan koperasi, belum mampu mengembangkan potensinya secara maksimal. Permasalahan ini semakin diperburuk oleh keterbatasan akses pembiayaan dan pendampingan usaha, serta rendahnya kompetensi pelaku usaha dalam manajemen, produksi, dan pemasaran.

Dengan demikian, penguatan sektor perdagangan dan industri pengolahan menjadi isu strategis yang harus diprioritaskan melalui pembangunan infrastruktur distribusi dan perdagangan, peningkatan kualitas dan daya saing produk lokal, serta penguatan kelembagaan dan kemitraan pelaku usaha. Di samping itu, dorongan terhadap pemanfaatan teknologi, inovasi, dan akses pembiayaan yang lebih luas akan menjadi kunci dalam menciptakan sektor perdagangan dan industri pengolahan yang lebih berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

5. Pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal

Pariwisata merupakan salah satu sektor potensial yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja. Kabupaten Padang Pariaman memiliki beragam potensi wisata alam, budaya, dan kuliner yang dapat dikembangkan menjadi destinasi unggulan. Namun, pengelolaan dan promosi destinasi wisata tersebut belum optimal sehingga daya tarik dan jangkauan pasar wisata masih terbatas. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh terbatasnya infrastruktur

pendukung pariwisata, seperti aksesibilitas, fasilitas umum, serta sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

Selain itu, keberadaan pelaku ekonomi kreatif dan pelaku wisata lokal belum sepenuhnya diberdayakan. Minimnya pelatihan dan pendampingan membuat mereka belum mampu meningkatkan kualitas layanan dan produk wisata yang berdaya saing. Kurangnya kolaborasi antara pemerintah daerah, komunitas, dan pelaku usaha juga menghambat terbentuknya ekosistem pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Padahal, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan destinasi wisata yang tidak hanya menarik bagi wisatawan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat.

Oleh karena itu, pengembangan pariwisata di Kabupaten Padang Pariaman perlu difokuskan pada penguatan pengelolaan dan promosi destinasi unggulan, pembangunan infrastruktur pendukung, pemberdayaan pelaku wisata lokal dan ekonomi kreatif melalui pelatihan serta pendampingan, serta penguatan kolaborasi multipihak. Upaya ini diharapkan mampu menjadikan pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

6. Pemerataan akses terhadap infrastruktur dasar

Ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai merupakan prasyarat penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah. Di Kabupaten Padang Pariaman, pemerataan akses terhadap infrastruktur dasar masih menjadi tantangan. Pembangunan jalan dan jembatan belum merata, sehingga konektivitas dan integrasi antarwilayah belum optimal. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya mobilitas masyarakat dan distribusi barang maupun jasa, serta menghambat pemerataan pembangunan antarwilayah.

Selain itu, akses masyarakat terhadap layanan dasar masih relatif rendah. Cakupan air minum perpipaan dan infrastruktur sanitasi layak belum menjangkau seluruh masyarakat, sementara pengelolaan persampahan belum sesuai standar. Ketersediaan perumahan layak dan terjangkau juga masih terbatas, yang berdampak pada rendahnya kualitas permukiman. Di sisi lain, pengelolaan sumber daya air dan air baku belum optimal sehingga berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, terutama di wilayah pedesaan dan daerah rawan bencana.

Isu ini menjadi sangat penting mengingat infrastruktur dasar berfungsi sebagai fondasi pembangunan yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tanpa pemerataan akses, kesenjangan antarwilayah akan semakin melebar, kualitas sumber daya manusia terhambat, dan potensi ekonomi lokal sulit berkembang. Peningkatan infrastruktur dasar tidak hanya berperan sebagai layanan publik, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mempercepat transformasi sosial-ekonomi, memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

7. Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Isu strategis terkait penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ditandai oleh masih banyaknya MBR yang belum memiliki hunian yang layak dan terjangkau, keterbatasan anggaran serta akses pembiayaan dalam pemenuhan kebutuhan perumahan, serta belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMN, dan pihak swasta dalam penyediaan rumah yang memenuhi standar kelayakan.

Permasalahan ini dipengaruhi oleh tingginya kebutuhan hunian seiring pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan penyediaan perumahan terjangkau. Selain itu, keterbatasan kapasitas fiskal daerah menyebabkan intervensi pemerintah belum mampu mengurangi backlog perumahan secara signifikan. Di sisi lain, skema pembiayaan dan insentif bagi sektor swasta masih belum cukup menarik untuk mendorong terbangunnya rumah layak huni bagi MBR, sehingga diperlukan penguatan regulasi, kemitraan multipihak, serta inovasi pembiayaan agar akses masyarakat terhadap hunian yang aman, sehat, dan layak dapat semakin meningkat.

8. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap berbagai bencana, baik geologis maupun hidrometeorologis, seperti gempa bumi, banjir, longsor, abrasi pantai, dan cuaca ekstrem. Kondisi ini menuntut peningkatan kapasitas resiliensi daerah agar mampu mengurangi risiko, meminimalkan kerugian, serta mempercepat pemulihan pascabencana. Namun, tingkat resiliensi bencana di Kabupaten Padang Pariaman masih rendah. Hal ini terlihat dari terbatasnya infrastruktur pengurangan risiko bencana, rendahnya kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah, serta belum terintegrasinya kebijakan pembangunan dengan strategi mitigasi risiko bencana.

Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim masih rendah, sehingga upaya pengurangan risiko bencana belum berjalan optimal di tingkat komunitas. Sistem manajemen bencana dan peringatan dini juga belum berfungsi secara maksimal, yang menyebabkan potensi keterlambatan dalam respons terhadap bencana. Kelembagaan dan koordinasi antarinstansi dalam penanggulangan bencana pun masih belum optimal, sehingga penanganan bencana seringkali menghadapi kendala koordinasi dan keterbatasan kapasitas.

Isu ini menjadi semakin penting mengingat perubahan iklim secara global telah meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologis. Pada tingkat nasional, resiliensi bencana dan adaptasi perubahan iklim menjadi prioritas pembangunan yang selaras dengan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Oleh karena itu, Kabupaten Padang Pariaman perlu memperkuat strategi resiliensi bencana melalui pembangunan infrastruktur pengurangan risiko bencana, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat, serta integrasi mitigasi risiko ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Upaya ini akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.

9. Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan

Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan daerah, mengingat Kabupaten Padang Pariaman memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana alam dan dampak perubahan iklim. Saat ini, tingkat resiliensi lingkungan dan bencana masih rendah. Hal ini ditandai dengan masih terbatasnya infrastruktur pengurangan risiko bencana, rendahnya kesiapsiagaan, serta belum terintegrasinya kebijakan pembangunan dengan strategi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim. Kondisi tersebut menyebabkan daya dukung dan daya tampung lingkungan berisiko menurun, serta menghambat pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.

Kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana dan pentingnya pelestarian lingkungan masih perlu ditingkatkan. Sistem manajemen bencana dan peringatan dini belum berjalan optimal, sehingga respons terhadap ancaman lingkungan dan bencana sering kali terlambat. Selain itu, kapasitas kelembagaan dan koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan lingkungan dan penanggulangan bencana masih terbatas. Hal ini berdampak pada belum maksimalnya upaya konservasi, rehabilitasi lingkungan, serta pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Oleh karena itu, Kabupaten Padang Pariaman perlu memperkuat pengelolaan lingkungan dengan strategi terpadu, meliputi pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta integrasi mitigasi bencana ke dalam perencanaan pembangunan. Dengan langkah tersebut, diharapkan tercapai keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan, sekaligus mewujudkan pembangunan daerah yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.

10. Penguatan nilai adat, budaya dan kearifan lokal

Adat, budaya, dan kearifan lokal merupakan identitas serta kekuatan sosial yang berperan penting dalam membentuk karakter masyarakat, menjaga kohesi sosial, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Namun, di Kabupaten Padang Pariaman internalisasi nilai-nilai adat, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat belum berjalan optimal. Hal ini tercermin dari belum terintegrasinya nilai-nilai budaya dalam sistem pendidikan formal, sehingga generasi muda belum sepenuhnya memahami dan menghayati warisan budaya daerah.

Selain itu, fungsi surau dan komunitas adat sebagai pusat pewarisan nilai dan pengetahuan budaya mengalami penurunan. Tingginya pengaruh modernisasi dan globalisasi turut menggeser pola pikir dan gaya hidup masyarakat, yang berpotensi melemahkan ikatan sosial dan memudarkan identitas budaya lokal. Kondisi ini diperburuk oleh masih minimnya regulasi daerah yang secara khusus mendukung pelestarian budaya lokal serta pemberdayaan lembaga adat. Akibatnya, peran adat dan budaya dalam membangun masyarakat yang berkarakter, religius, dan harmonis belum dimanfaatkan secara maksimal.

Dalam konteks pembangunan daerah, filosofi “adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah” menjadi landasan penting dalam menjaga harmonisasi antara adat dan agama, sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat Minangkabau. Filosofi ini tidak hanya menegaskan keterkaitan adat dan agama sebagai pedoman hidup, tetapi juga menjadi instrumen moral dalam menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi.

BAB III
VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025-2045

3.1.1 Visi dan Sasaran Visi RPJPD Tahun 2025-2045

Visi pembangunan daerah merupakan pandangan jauh ke depan tentang kondisi ideal yang ingin diwujudkan dalam jangka panjang. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2045, visi memiliki fungsi strategis sebagai pedoman utama dalam perumusan arah kebijakan pembangunan daerah selama periode 20 tahun. Visi tersebut menjadi landasan normatif yang menggambarkan cita-cita daerah dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan, baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun global.

Untuk mendukung pencapaian visi jangka panjang tersebut, maka dalam setiap periode lima tahunan, termasuk pada periode RPJPD 2025–2045, ditetapkan sasaran visi yang bersifat lebih operasional dan terukur. Sasaran visi merupakan tahapan-tahapan strategis yang harus dicapai dalam lima tahun sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi jangka panjang daerah secara bertahap dan konsisten.

Penetapan visi dan sasaran visi RPJPD 2025–2045 disusun dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan daerah, isu-isu strategis pembangunan, serta sinergi dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Visi ini menjadi fondasi bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan, guna mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman secara menyeluruh.

Visi pembangunan jangka panjang daerah pada hakikatnya mencerminkan kondisi ideal yang ingin diwujudkan oleh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman dalam kurun waktu dua puluh tahun ke depan. Rumusan visi ini disusun dengan merujuk pada arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045. Selain itu, visi ini juga mempertimbangkan dinamika kondisi aktual, tren global, serta harapan, aspirasi, dan cita-cita masyarakat yang berkembang secara luas. Dengan demikian, visi tersebut merupakan gambaran masa depan yang bersifat realistis dan dapat dicapai melalui perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan di Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, maka ditetapkan Visi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2045 yaitu :

“PADANG PARIAMAN MAJU, BERKELANJUTAN,
SEJAHTERA DAN MERATA”

MAJU

Maju merujuk pada kemajuan atau peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi masyarakat dan infrastruktur. Makna "maju dalam pembangunan mencakup dimensi ekonomi dan infrastruktur. Dalam konteks **pembangunan**, dapat dilihat dari berbagai dimensi sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi, "maju" dalam pembangunan ekonomi pada Kabupaten Padang Pariaman diarahkan pada pengembangan pertanian, agribisnis, industri, dan pariwisata. Hal ini mencakup peningkatan output ekonomi, pendapatan per-kapita, investasi, dan penciptaan lapangan kerja.
2. Infrastruktur yang berkualitas, peningkatan infrastruktur seperti jaringan transportasi serta teknologi informasi dan komunikasi merupakan bagian dari pembangunan yang dianggap "maju." Penggunaan teknologi informasi, penelitian dan pengembangan, serta inovasi dalam proses produksi yang juga didukung dengan infrastruktur yang berkualitas dapat membantu memperbaiki kondisi hidup masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi.

BERKELANJUTAN

Merupakan harapan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2045, yang berkaitan dengan kemampuan untuk menjaga atau mempertahankan suatu kondisi atau aktivitas tanpa merusak atau mengorbankan sumber daya yang ada. Dalam konteks lingkungan, berkelanjutan merujuk pada cara penggunaan sumber daya alam yang dapat diteruskan tanpa merusak ekosistem atau mengakibatkan dampak lingkungan yang tidak dapat diperbaiki. Hal ini mencakup upaya untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, menjaga keanekaragaman hayati, keadaan lingkungan yang sehat dan terjaga dan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Makna berkelanjutan mencerminkan kesadaran terhadap tanggung jawab kita terhadap generasi mendatang dan lingkungan di sekitar kita. Hal ini mencerminkan keinginan untuk hidup dan beroperasi secara seimbang dengan sumber daya yang tersedia dan tanpa mengorbankan kepentingan masa depan.

SEJAHTERA

Sesuai dengan makna dari kata “sejahtera” yang berarti aman sentosa dan makmur, selamat terlepas dari segala macam gangguan. Serta merujuk pada kata “kesejahteraan” yang berarti hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman jiwa, dan sosial untuk keadaan sejahtera bagi masyarakat.

Kesejahteraan berarti memberikan atau menciptakan kondisi yang aman, sejahtera, dan makmur bagi setiap individu yang dapat dicapai melalui kebebasan masyarakat dari angka kemiskinan, penghasilan yang rendah, layanan dan akses kesehatan yang memadai, kualitas dan fasilitas pendidikan yang baik, kepemilikan hunian yang layak dan nyaman, serta sejahtera lahir dan batin. Selain itu, kata “sejahtera” juga mencakup mencakup aspek-aspek sosial dan budaya kemasyarakatan. Hal ini melibatkan pemberdayaan masyarakat,

kehidupan beragama, kesetaraan gender, keadilan sosial, dan pelestarian budaya lokal.

Dengan demikian, tujuan jangka panjangnya adalah menciptakan kemampuan bagi seluruh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan, hingga akhirnya pada tahun 2045 SDM Kabupaten Padang Pariaman memiliki daya saing yang tinggi dan memberikan kontribusi tinggi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan budaya di seluruh lapisan masyarakat.

MERATA

Berasal dari kata “rata” yang secara harfiah memiliki makna yaitu memiliki permukaan yang sama tinggi dan/atau sama rendah, dan kata “merata” sendiri menjadi rata. Pada konteks pembangunan jangka panjang, pemerataan yang dibutuhkan adalah inklusifitas dalam akses dan kesempatan yang rata bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman untuk memiliki kualitas diri dan kemampuan yang sama, dengan harapan mampu mensejahterakan setiap individu.

Akses dan kesempatan yang dibutuhkan adalah keadilan dalam mendapatkan hak-hak dasar dengan kualitas dan fasilitas yang sama. Regulasi yang adaptif dan taat asas termasuk tata kelola yang baik, serta hukum berkeadilan menjadi kunci untuk mencapai pemerataan ini. Sehingga pada akhirnya di tahun 2045, SDM Kabupaten Padang Pariaman dapat berkontribusi secara nyata yang berakhir mampu mensejahterakan sektor sosial dan ekonomi secara merata.

Merata dalam hal ini juga memberikan hak bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga dilakukan secara menyeluruh dengan memberikan akses dan peluang yang setara kepada semua anggota masyarakat tanpa diskriminasi. Hal ini melibatkan peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi serta sosial bagi setiap individu, terutama kelompok yang terpinggirkan. Sehingga masyarakat dapat dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pembangunan.

Pada tahun 2045, Padang Pariaman memiliki visi yang jelas untuk menjadi daerah yang maju, berkelanjutan, sejahtera, dan merata. Visi ini tidak hanya sekedar impian, tetapi juga sebuah rencana konkret yang telah diwujudkan melalui kerja keras, inovasi, dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Ketercapaian Visi Kabupaten Padang Pariaman Maju, Berkelanjutan, Sejahtera, dan Merata ditunjukkan dengan peningkatan dalam output ekonomi, peningkatan pendapatan per-kapita, dan diversifikasi ekonomi yang mencerminkan majunya sektor-sektor kunci sehingga tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, dan layanan publik lainnya.

Adapun visi yang telah dirumuskan sebelumnya, dijabarkan secara rinci melalui lima sasaran visi yang menggambarkan tahapan-tahapan strategis yang perlu dicapai dalam rangka mewujudkan kondisi ideal daerah di masa depan. Sasaran visi ini disusun secara sistematis untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah berjalan

terarah, terukur, dan berkelanjutan. Masing-masing sasaran mencerminkan fokus pembangunan yang menjadi prioritas dalam lima tahun ke depan, baik dalam aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan daya saing ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur yang merata, pelestarian lingkungan hidup, maupun tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Dengan adanya sasaran visi ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan memiliki acuan yang jelas dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang selaras dengan arah jangka panjang daerah. Sasaran ini juga menjadi dasar dalam mengukur capaian pembangunan secara periodik, serta memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sejalan dengan visi besar pembangunan Kabupaten Padang Pariaman menuju masa depan yang lebih baik.

Tabel 3.1
Sasaran Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2045

No	Sasaran Visi	Indikator Sasaran Visi	TARGET	
			2025	2045
1.	Peningkatan Pendapatan Per Kapita	1. PDRB per Kapita ADHB (Rp Juta)	57,54	330,86
		2. Kontribusi Sektor PDRB Sub Sektor Perikanan	8,43	10,97
		3. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	10,37	13,93
2.	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	1. Tingkat Kemiskinan	3,41-3,92	0,03-0,19
		2. Rasio Gini (Indeks)	0,247	0,180
		3. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,56	5,20
3.	Peningkata Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,68	4,50
4.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	1. Indeks Pembangunan Manusi (IPm)	83,20	96,45
		2. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	71,78	86,84
5.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	76,96	81,19

Sumber : RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2045

3.1.2 Misi RPJPD Tahun 2025-2045

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, maka ditetapkan Misi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2045 yaitu **:**

1. Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Masyarakat yang Sehat Cerdas, Unggul, dan Berdaya Saing

Mewujudkan transformasi sosial menuju masyarakat yang sehat, cerdas, berbudaya, sejahtera, unggul, dan berdaya saing adalah tujuan yang luas dan holistik. Proses transformasi ini melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat dan memerlukan upaya kolaboratif dari berbagai sektor. Menciptakan sistem kesehatan yang mencakup akses universal ke layanan kesehatan berkualitas untuk semua warga masyarakat dan memfokuskan upaya pada promosi kesehatan dan pencegahan penyakit untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat secara keseluruhan termasuk ke dalam upaya untuk peningkatan kesehatan masyarakat.

Memastikan adanya sistem pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern dan mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan masyarakat dapat memberikan upaya untuk peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudi pekerti luhur.

Pemberdayaan budaya dapat dilakukan dengan mendorong pemeliharaan dan promosi budaya lokal sebagai bagian integral dari identitas masyarakat dan mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan budaya, termasuk seni, tradisi, dan kegiatan komunitas. Serta menerapkan sistem perlindungan sosial yang melibatkan pemenuhan hak-hak dasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan, serta mempromosikan keadilan sosial dan kesetaraan gender sebagai bagian dari nilai-nilai inti masyarakat.

Kesuksesan dalam mewujudkan transformasi sosial memerlukan komitmen jangka panjang, koordinasi, dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan. Kabupaten Padang Pariaman berupaya melakukan pemenuhan untuk mewujudkan transformasi sosial menuju masyarakat yang sehat, cerdas, unggul dan berdaya saing tersebut dengan cara melakukan pemenuhan dasar kesehatan, pendidikan dan sosial, pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, penguatan daya saing sumber daya manusia dan berkelanjutan sehingga menjadi perwujudan masyarakat Padang Pariaman yang berbudaya dan maju.

2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Mewujudkan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan melibatkan perubahan mendasar dalam cara kita memahami, mengelola, dan membangun struktur ekonomi. Transformasi ini bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperhatikan keberlanjutan lingkungan, dan memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Menerapkan kebijakan yang mendukung pemerataan pendapatan, termasuk sistem pajak yang adil dan redistribusi sumber daya serta memberdayakan kelompok-kelompok marginal, seperti perempuan, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya melalui akses yang lebih baik ke peluang ekonomi, pendidikan, dan pelatihan

keterampilan, dapat mendukung Inklusivitas dalam pertumbuhan ekonomi.

Mendorong investasi dalam riset dan pengembangan untuk memacu inovasi dalam berbagai sektor ekonomi serta memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja yang berkembang, sehingga masyarakat dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan ekonomi.

Pemberdayaan sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ke akses finansial dengan meningkatkan akses UKM ke sumber pembiayaan melalui pengembangan sistem keuangan inklusif dan dukungan kebijakan seperti menyediakan pelatihan dan dukungan teknis untuk membantu UKM meningkatkan kapasitas dan daya saing mereka serta membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah, sektor industri, dan masyarakat untuk mencapai tujuan transformasi ekonomi, juga dapat mewujudkan misi tersebut.

Mewujudkan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan memerlukan komitmen yang kokoh, kebijakan yang bijaksana, dan kolaborasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Langkah-langkah ini diarahkan untuk menciptakan ekonomi yang memperhitungkan kesejahteraan semua warga, melindungi lingkungan, dan memastikan kesinambungan keberlanjutan untuk generasi mendatang.

Langkah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yaitu dengan perluasan dan penciptaan lapangan pekerjaan serta pembentukan sumber daya manusia tenaga kerja yang kompeten, selanjutnya peningkatan produktivitas, kualitas dan daya saing produk barang dan jasa sektor perekonomian, peningkatan sektor investasi dan hilirisasi industri kecil menengah/ usaha mikro, kecil menengah sehingga dapat menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Mewujudkan transformasi tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif adalah langkah kunci untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. Transformasi ini mencakup perubahan dalam cara suatu organisasi atau entitas dikelola yang dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan memastikan proses pemilihan sumber daya manusia yang profesional serta memberikan pelatihan dan pengembangan yang diperlukan serta Menetapkan dan mengimplementasikan kode etik serta standar profesionalisme untuk semua anggota organisasi.

Meningkatkan keterbukaan dengan secara aktif memberikan informasi yang relevan kepada para pemangku kepentingan, baik itu pihak internal maupun eksternal serta membangun mekanisme yang memudahkan akses masyarakat umum terhadap informasi terkait kebijakan, keputusan, dan kinerja organisasi merupakan Langkah untuk transparansi terhadap tata kelola pemerintahan.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas, perlu ditetapkan mekanisme yang kuat untuk pengawasan internal dan eksternal,

termasuk audit dan evaluasi kinerja rutin serta mendorong tanggung jawab kepemimpinan dalam pengambilan keputusan dan konsekuensinya terhadap hasil organisasi, untuk itu perlu pemahaman yang baik terhadap regulasi dan kebijakan hukum yang berlaku serta berkomitmen untuk mematuhi standar hukum tersebut.

Menciptakan budaya organisasi yang mendukung inovasi, eksperimen, dan pembelajaran terus-menerus dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi juga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan ketepatan dalam transformasi tata kelola pemerintahan yang baik.

Upaya Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah dengan penataan kelembagaan, regulasi, digitalisasi dan pemberdayaan masyarakat, selanjutnya Peningkatan fungsi kelembagaan yang kolaboratif berbasis teknologi informasi, Penguatan kelembagaan adaptif, ASN yang kompetitif dan masyarakat mandiri sehingga diharapkan dapat menjadi perwujudan tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif

4. Mewujudkan Keamanan Daerah Tanggung, Masyarakt Damai, Demokratis serta Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Mewujudkan pembangunan wilayah yang adil, berkualitas, dan ramah lingkungan melibatkan perencanaan dan implementasi kebijakan yang memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan dengan cara mengembangkan rencana tata ruang yang berkelanjutan dengan memperhatikan kebutuhan pertumbuhan ekonomi, pemenuhan kebutuhan sosial, dan pelestarian lingkungan.

Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proyek-proyek pembangunan dan memberdayakan mereka untuk mengelola sumber daya lokal juga dapat menjamin bahwa manfaat dari pembangunan wilayah didistribusikan secara adil di seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang rentan dan daerah yang kurang berkembang. Selanjutnya, memastikan pelestarian sumber daya alam, konservasi hutan, dan perlindungan ekosistem untuk mencegah kerusakan lingkungan serta mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan mengurangi pencemaran lingkungan.

Mendorong penerapan teknologi hijau dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi sumber daya dan mengurangi dampak lingkungan negatif serta melakukan evaluasi rutin terhadap dampak proyek dan kebijakan terhadap masyarakat dan lingkungan dan melakukan program pendidikan dan kesadaran lingkungan untuk memotivasi masyarakat agar peduli terhadap lingkungan dan berperan aktif dalam pelestarian alam.

Dalam melaksanakan misi untuk mewujudkan visi “Padang Pariaman Maju, Berkelanjutan, Sejahtera, dan Merata”, dibutuhkan nilai-nilai ideal yang menjadi pedoman pelaksanaannya. Nilai-nilai luhur Pancasila tentunya menjadi nilai dasar yang melandasi hal itu. Adanya nilai-nilai yang menjadi dasar pelaksanaan misi, diharapkan dapat mewujudkan Padang Pariaman Maju, Berkelanjutan, Sejahtera, dan Merata serta menjadi bagian dari perwujudan Indonesia Emas Tahun 2045.

Langkah yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam hal ini dengan cara pemenuhan supremasi hukum, stabilitas ekonomi makro serta kerjasama antar daerah agar dapat menjadi perwujudan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis, serta stabilitas ekonomi makro daerah.

5. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Berlandaskan Nilai "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"

Frasa "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" memiliki makna yang dalam dan berkaitan dengan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat yang mengacu pada adat istiadat, hukum syarak (hukum Islam), dan Kitabullah (Al-Qur'an). Dalam konteks mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi, prinsip ini dapat diartikan sebagai dasar nilai-nilai yang mengakar dalam adat, diilhami oleh syarak (hukum Islam), dan merujuk pada ajaran Kitabullah (Al-Qur'an).

Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman melakukan upaya upaya untuk melakukan pemenuhan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan pembangunan daerah, selanjutnya penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan daerah, optimalisasi ketangguhan masyarakat dan ekologi dalam menghadapi berbagai perubahan sehingga diharapkan dapat menjadi perwujudan ketahanan sosial budaya dan ekologi berlandaskan nilai "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah".

6. Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Adil dan Merata

Mewujudkan pembangunan wilayah yang adil dan merata memerlukan perencanaan dan implementasi kebijakan yang cermat untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan didistribusikan secara merata di seluruh wilayah. Dengan pembangunan wilayah dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata, di mana setiap wilayah mendapatkan manfaat yang sebanding dari proses pembangunan. Upaya dalam pembangunan wilayah yang adil dan merata, Pemerintah

Daerah Kabupaten Padang Pariaman Pemenuhan panduan dan rencana pengembangan wilayah, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah, percepatan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah sehingga menjadi perwujudan pembangunan yang adil dan merata sesuai dengan tata ruang wilayah.

7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Publik yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Mewujudkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas dan ramah lingkungan memerlukan perencanaan yang matang, implementasi kebijakan yang tepat, dan partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan pembangunan sarana dan prasarana publik dapat menciptakan lingkungan yang nyaman, berkualitas, serta ramah terhadap lingkungan.

Untuk itu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman yaitu dengan penyediaan sarana dan prasarana publik dan pengelolaan lingkungan hidup, selanjutnya pengembangan sarana dan prasarana publik dan pemulihan pengelolaan lingkungan hidup, optimalisasi sarana dan prasarana publik dan

lingkungan hidup sehingga menjadi perwujudan sarana dan prasarana publik berkualitas dan ramah lingkungan.

8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Daerah yang Konsisten dan Terkendali

Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah yang konsisten dan terkendali memerlukan langkah-langkah strategis yang dapat mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan dan dapat dikelola dengan baik. Diharapkan pembangunan daerah dapat berlangsung secara konsisten, terkendali, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melakukan upaya pemenuhan konsistensi perencanaan dan pendanaan dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas, percepatan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, selanjutnya penguatan Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan agar tercipta perwujudan pembangunan yang berkesinambungan, konsisten dan terkendali.

3.1.3 Arah dan Sasaran Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2029

Perumusan arah kebijakan pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045 dibagi dengan 4 tahapan RPJMD dengan penekanan sebagai berikut:

1. Tahap I (Pondasi)
   a. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan sosial;
   b. Perluasan dan penciptaan lapangan pekerjaan serta pembentukan SDM tenaga kerja yang kompeten;
   c. Penataan kelembagaan, regulasi, digitalisasi dan pemberdayaan masyarakat;
   d. Pemenuhan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi makro serta kerjasama antar daerah;
   e. Pemenuhan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan pembangunan daerah;
   f. Pemenuhan panduan dan rencana pengembangan wilayah;
   g. Penyediaan sarana dan prasarana publik dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
   h. Pemenuhan konsistensi perencanaan dan pendanaan dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.

2. Tahap II (Akselerasi)
   a. Pembangunan sumber daya manusia berkualitas;
   b. Peningkatan produktivitas, kualitas dan daya saing produk barang dan jasa sektor perekonomian;
   c. Peningkatan fungsi kelembagaan yang kolaboratif berbasis teknologi informasi;
   d. Penguatan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi makro serta kerjasama antar daerah;
   e. Penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan daerah;

f. Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Wilayah;
g. Pengembangan sarana dan prasarana publik dan pemulihan pengelolaan lingkungan hidup; dan
h. Percepatan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal.

3. Tahap III (Pemantapan)
   a. Penguatan daya saing sumber daya manusia dan keberlanjutan kesejahteraan;
   b. Peningkatan sektor investasi dan hilirisasi industri kecil menengah/usaha mikro, kecil menengah;
   c. Penguatan kelembagaan adaptif, ASN yang kompetitif dan masyarakat mandiri;
   d. Optimalisasi supremasi hukum dan stabilitas ekonomi makro serta kerjasama antar daerah; Optimalisasi ketangguhan masyarakat dan ekologi dalam menghadapi berbagai perubahan;
   e. Percepatan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Wilayah;
   f. Optimalisasi sarana dan prasarana publik dan lingkungan hidup; dan
   g. Penguatan Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan.

4. Tahap IV (Perwujudan)
   a. Perwujudan manusia Padang Pariaman yang maju, berkelanjutan, sejahtera, dan merata;
   b. Pembangunan ekonomi inklusif yang berkelanjutan;
   c. Perwujudan tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel dan inovatif;
   d. Perwujudan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis, serta stabilitas ekonomi makro daerah;
   e. Perwujudan ketahanan sosial budaya dan ekologi berlandaskan nilai "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah";
   f. Perwujudan sarana dan prasarana publik berkualitas dan ramah lingkungan;
   g. Perwujudan Pembangunan yang adil dan Merata sesuai dengan Tata Ruang Wilayah; dan
   h. Perwujudan Pembangunan yang berkesinambungan, konsisten, dan terkendali.

Sementara itu, sasaran pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai tahap pertama dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2045 dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Sasaran Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2045

ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
		2025	2045
KESEHATAN UNTUK SEMUA	1. Usia Harapan Hidup	74,00	78,83
	2. Kesehatan Ibu dan Anak		
	a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran Hidup)	100,00	15,00
	b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	15,00	5,00
	3. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		
	a. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*)	100	100
	b. Angka Keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (Treatment *Succes Rate*)	88	100
	4. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	88	99,50
PENDIDIKAN BERKUALITAS YANG MERATA	5. Hasil Pembelajaran		
	a. Persentase Satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimun pada asesment tingkat nasional		
	i. Literasi	48,62	75,45
	ii. Numerasi	29,08	66,86
	b. Rata-rata lama sekolah	9,07	12,53
	c. Harapan Lama Sekolah	14,94	16,11
	6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	13,63	15,05
	7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	71,20	81,08
PERLINDUNGAN SOSIAL ADAPTIF	8. Tingkat Kemiskinan	3,41-3,92	0,03-0,19
	9. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	35,78	78,32
	10. Persentase Disabilitas bekerja di sektor formal	26,39	54,72
HOTEL,INOVASI DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	11. Rasio PDRB Industri Pengolahan	10,61	14
	12. Pengembangan Pariwisata		
	a. Rasio PDRB Akomodasi Makan Minum	1,36	2,17

ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
		2025	2045
	b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	125	263
	13. Rasio PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Provinsi	1,620	2,593
	14. Produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMN		
	a. Proporsi Jumlah UKM Non Pertanian	10,66	12,62
	b. Proporsi Jumlah IKM	3,15	4,71
	c. Rasio Kewirausahaan	3,37	10,22
	d. Rasio Volumen Koperasi terhadap PDRB	0,33	2,01
	e. ROA BUMD	-3,38	0,00
	15. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,51	4,71
	a. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	34,3	70,29
	16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	54,90	69,37
	17. Indeks Inovasi Daerah	87,72	100
PENERAPAN EKONOMI HIJAU	18. Tingkat penerapan Ekonomi Hijau		
	a. Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	20,34	33,13
	b. Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	97,89	123,12
TRASNFORMASI DIGITAL	19. Indeks Masyarakat Digital Indonesia	50,99	80,00
INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN REGIONAL	20. Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu per Komoditas Bahan Pokok	44	24
	21. Pembentukan Modal Tetap Bruto	30,60	26,44
	22. Ekspor Barang dan Jasa	10,04	38,35
	23. Kota Maju, Inklusif dan Berkelanjutan		
	a. Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	96,48	100
	b. Persentase Desa Mandiri	8,67	26,06
REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF	24. Indeks Reformasi Hukum	72,00	100,00
	25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,00	5,00

ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
		2025	2045
	26. Indeks Pelayanan Publik	4,00	5,00
	27. Survey Penilaian Integritas KPK	78,00	87,00
HUKUM BERKEADILAN, KEAMANAN DAERAH TANGGUH DAN DEMOKRASI SUBSTANSI	28. Indeks Reformasi Hukum	72,00	100,00
	29. Angka Kriminalitas	820	605
	30. Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pilpres/ Pilkada	0,00	85
STABILITAS EKONOMI MAKRO	31. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	0,51	1,00
	32. Tingkat Inflasi	0,00	0,00
	33. Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		
	a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	8,76	82,85
	b. Nilai Transaksi Saham per Kapita (Rupiah)	413.768	1.858.269
	c. Total Kredit/PDRB	4,80	11,00
	34. Rasio PDRB Jasa Keuangan	1,82	4,25
KEMITRAAN KONSTRUKTIF, KEPEMIMPINAN DAN PENGARUH REGIONAL	35. Persentase Kerjasama Wajib yang dilaksanakan	60,00	100,00
	36. Indeks Keamanan Daerah	67,37	73,12
BERAGAMA MASLAHAT DAN BERKEBUDAYAAN MAJU	37. a. Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	85,00	100,00
	b. Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan	66,00	100,00
	38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	72,15	79,00
KELUARGA BERKUALITAS, KESETARAAN GENDER DAN MASYARAKAT INKLUSIF	39. Indeks Pembangunan Keluarga	63,88-63,93	72,74-72,79
	40. a. Indeks Ketimpangan Gender	0,42-0,41	0,23-0,18
	b. Indeks Perlindungan Khusus Anak	61,56	71,00
LINGKUNGAN HIDUP BERKUALITAS	41. Indeks Kualitas Lahan	66,82	68,19
	42. Kualitas Lingkungan Hidup		
	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	76,96	84,1
	b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	5,52	45,50
	c. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	12,30	90,00

ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
		2025	2045
	d. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	12,00	100,00
BERKETAHANAN ENERGI, AIR DAN KEMANDIRIAN PANGAN	43. Ketahanan Energi, Air dan Pangan		
	a. Konsumsi Listrik per Kapita	601,00	1800,00
	b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	6,61	0,27
	c. Kapasitas Air Baku	0,95	2,10
	d. Akses Rumah tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan	22,5	62
RESILIENSI TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM	44. Indeks Risiko bencana (IRBI)	157,12	139-134
	45. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	76,96	84,1

Sumber : RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2045, 2024

3.2 PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2025-2029

3.2.1 Visi RPJMN Tahun 2025-2029

Visi Presiden yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 adalah:

"BERSAMA INDONESIA MAJU, MENUJU INDONESIA EMAS 2045."

Visi ini menegaskan bahwa pembangunan nasional merupakan upaya kolektif yang membutuhkan sinergi seluruh putra-putri terbaik bangsa. Dengan semangat kebersamaan dan landasan yang telah diletakkan oleh pemerintahan sebelumnya, visi ini diarahkan untuk membawa Indonesia sejajar dengan negara-negara maju pada tahun 2045.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Presiden menetapkan delapan misi utama yang dijabarkan ke dalam Delapan Asta Cita, yang selanjutnya dirinci menjadi 17 program prioritas pembangunan. Program-program ini mencakup berbagai sektor strategis dan dilengkapi dengan langkah-langkah percepatan yang dikenal sebagai *Quick Wins* atau Program Hasil Terbaik Cepat. Seluruh kebijakan tersebut dirancang secara komprehensif dan terukur untuk menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan nasional secara efektif, serta membangun fondasi yang kuat dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.

3.2.2 Misi RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMN Tahun 2025–2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025–2029. Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025–2029. Untuk pencapaian sasarannya, setiap Prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta).

Adapun Misi RPJMN Tahun 2025-2029 yang juga menjadi Prioritas Nasional, yakni sebagai berikut :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, yang berfokus pada upaya simultan yang ditujukan untuk memperkokoh ideologi pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia.
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, yang bertujuan untuk mengawal keberhasilan proses pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi, yang bertujuan untuk mengawal keberhasilan proses melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, yang bertujuan untuk mengawal keberhasilan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri, yang bertujuan untuk membangun fondasi industrialisasi yang terintegrasi domestik dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri yang berdaya saing global sehingga menjadi pengungkit perekonomian.

6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan, yang ditujukan untuk pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga berdampak pada pengentasan kemiskinan.
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan, yang dilaksanakan melalui reformasi politik; reformasi hukum; reformasi tata kelola pemerintahan; dan pemberantasan narkoba, judi, dan penyelundupan; serta penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Negara.
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur, yang diarahkan untuk memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

3.2.3 Sasaran Pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029

Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025–2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Adapun sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 yakni:

1. Sasaran Pembangunan 1 yakni Meningkatkan pendapatan perkapita menuju setara negara maju yang ditandai dengan:
   a. Laju pertumbuhan ekonomi menuju 8% di tahun 2029
   b. GNI per kapita meningkat jadi 8.000 USD di tahun 2029
   c. Distribusi PDRB Maritim meningkat menjadi 9,1% di tahun 2029
   d. PDB Manufaktur meningkat menjadi 21,9% di tahun 2029
2. Sasaran Pembangunan 2 yakni Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang ditandai dengan Global Power Index menjadi peringkat 29 di tahun 2029.
3. Sasaran Pembangunan 3 yakni Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang yang ditandai dengan:
   a. Tingkat Kemiskinan turun menjadi 4,5 - 5% di tahun 2009 serta kemiskinan ekstrem kurang dari 0,5% di tahun 2026
   b. Rasio Gini turun menjadi 0,372 - 0,375 di tahun 2029
   c. Kontribusi PDRB KTI meningkat menjadi 22,4% di tahun 2029
4. Sasaran Pembangunan 4 Daya Saing Sumber Daya Manusia meningkat yang ditandai dengan Indeks Modal Manusia menjadi 0,59 tahun 2029
5. Sasaran Pembangunan 5 Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca menurun menuju net *Zero emission* yang ditandai dengan:
   a. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca menjadi 45,17 di tahun 2002
   b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat menjadi 77,20 di tahun 2029

3.3 PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029

3.3.1 Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Dalam rangka menyongsong periode pembangunan jangka menengah tahun 2025– 2029, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan arah pembangunan daerah yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045. RPJMD ini menjadi pedoman strategis dan operasional bagi seluruh perangkat daerah dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan selama lima tahun ke depan.

Sebagai dokumen perencanaan yang bersifat politis-teknokratis, RPJMD harus mencerminkan cita-cita kolektif dan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk membawa Provinsi Sumatera Barat ke arah kemajuan yang lebih baik, dengan menjawab berbagai tantangan global dan nasional, serta memanfaatkan potensi dan kekuatan lokal.

Oleh karena itu, visi pembangunan yang dirumuskan tidak hanya dilahirkan serta mencerminkan harapan jangka menengah Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, tetapi juga selaras dengan arah pembangunan jangka panjang dan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat Sumatera Barat. Visi pembangunan merupakan gambaran ideal tentang kondisi masa depan daerah yang ingin diwujudkan, sebagai arah utama bagi perencanaan strategis di semua sektor pembangunan serta menjadi komitmen semua unsur pembangunan baik Pemerintah Daerah, DPRD, dunia usaha serta masyarakat seluruhnya. Setelah melalui proses perumusan yang melibatkan analisis strategis, pemetaan isu utama pembangunan, dan masukan dari berbagai unsur masyarakat, maka ditetapkanlah Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029, yaitu:

SUMATERA BARAT MADANI YANG MAJU DAN BERKEADILAN

Visi ini memuat tiga kata kunci utama yang menjadi dasar pijakan arah pembangunan lima tahun ke depan, yaitu Madani, Maju, dan Berkeadilan. Ketiga kata ini memiliki makna strategis dan nilai filosofis yang kuat sebagai refleksi dari identitas, potensi, dan harapan masyarakat Sumatera Barat di masa depan.

MADANI

Dalam konteks pembangunan, “madani” mencerminkan masyarakat berperadaban tinggi, menjunjung nilai-nilai etika, moral, dan spiritual, serta menjaga harmoni sosial, hidup dalam keteraturan, menghargai hak dan kewajiban, dan mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat.

Selain itu, madani juga mencerminkan bahwa masyarakat hidup dengan berbasiskan pada kearifan lokal, yakni masyarakat yang

memelihara adat dan budaya Minangkabau yang berlandaskan filosofi "Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK)".

Madani juga menunjukkan kondisi masyarakat yang maju secara sosial dan spiritual, tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata tetapi juga keseimbangan nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan. Dengan demikian, Sumatera Barat Madani adalah daerah yang menjadikan nilai-nilai keagamaan dan adat sebagai fondasi kehidupan sosial dan pemerintahan yang adil, beretika, dan bermartabat.

MAJU

Kata maju dalam visi ini dimaknai sebagai kondisi pembangunan daerah yang berdaya saing tinggi, baik dalam skala nasional maupun internasional melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, teknologi, inovasi, dan infrastruktur. Maju juga menunjukkan konsep pembangunan yang berkelanjutan dimana pembangunan ekonomi dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sosial budaya masyarakat.

Maju juga mencerminkan modern namun tetap berakar pada nilai tradisional, yang berarti tidak meninggalkan identitas lokal dalam proses pembangunan. Sehingga kemajuan pembangunan diharapkan mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta kapasitas daya saing daerah di berbagai bidang strategis.

BERKEADILAN

Keadilan dalam konteks pembangunan tidak hanya bermakna persamaan formal, tetapi juga keadilan substantif yang mencakup terjadinya Pemerataan hasil pembangunan antar wilayah, antar kelompok sosial, dan antar sektor, sehingga tidak ada daerah atau kelompok masyarakat yang tertinggal, terjadinya Kesempatan yang setara dalam mengakses pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur serta terwujudnya Pemberdayaan kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat untuk terlibat aktif dalam pembangunan. Berkeadilan juga mencerminkan semangat inklusivitas dan keberpihakan terhadap kelompok marjinal, serta pengambilan kebijakan berbasis data dan prinsip *no one left behind*.

Sehingga berdasarkan pemaknaan kata kunci dalam visi "Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan", maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bertekad untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang bermartabat, berdaya saing, dan harmonis dalam balutan nilai-nilai lokal dan keagamaan yang kuat, yang diukur dari 5 (lima) sasaran visi yakni sebagai berikut:

Tabel 3.3
Sasaran Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2025-2030

NO	SASARAN VISI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			2025	2030
1.	Pendapatan per Kapita	1. PDRB per Kapita Atas dasar Harga Berlaku (ADHB)(Rp Juta)	62,53	104,76
		2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	25,19	36,41
		3. Kontribusi PDRB Sektor Industri	8,53	9,38
2.	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	1. Tingkat Kemiskinan	5,22	3,85
		2. Rasio Gini (Indeks)	0,282	0,277
		3. Kontribusi PDRB Provinsi	1,50	1,62
		4. Kontribusi PDRB Kab Kep Mentawai terhadap PDRB Provinsi	1,94	2,00
		5. Pertumbuhan Ekonomi	4,80	6,00
3.	Peningkatan Daya Saing Daerah	1. Indeks Daya Saing Daerah	3,58	3,94
4.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	1. Indeks Modal Manusia	0,59	0,64
5.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca menuju zero emission	1. Penurunan Intensitas Emisi GRK	52,62	66,33
		2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,95	79,00

Sumber : RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045

3.3.2 Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Untuk mewujudkan visi “Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan”, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyadari pentingnya arah kebijakan pembangunan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diterjemahkan secara operasional ke dalam berbagai strategi dan program yang terukur serta berdampak nyata bagi masyarakat. Visi tersebut merupakan cerminan dari harapan masyarakat terhadap kondisi ideal masa depan Sumatera Barat, yang memadukan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat (madani), dorongan kemajuan di segala bidang pembangunan (maju), serta jaminan atas perlakuan yang setara dan hasil pembangunan yang merata bagi seluruh warga daerah (berkeadilan).

Dalam rangka menjabarkan visi tersebut ke dalam arah kebijakan yang lebih aplikatif dan sistematis, disusunlah 8 (delapan) misi pembangunan. Misi ini menjadi penjabaran operasional dari visi, yang menggambarkan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah untuk menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan daerah, sekaligus menangkap peluang dan potensi strategis yang dimiliki Sumatera Barat.

Setiap misi disusun berdasarkan prinsip kesinambungan pembangunan daerah, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah secara berkelanjutan. Selain itu, perumusan misi juga memperhatikan relevansinya dengan prioritas nasional, isu-isu strategis regional dan global, serta nilai-nilai lokal yang menjadi karakter khas masyarakat Minangkabau.

Melalui delapan misi inilah arah dan kebijakan pembangunan daerah akan diarahkan selama periode 2025–2029. Masing-masing misi akan menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, hingga pengalokasian anggaran daerah, yang seluruhnya bermuara pada tercapainya visi pembangunan daerah. Adapun 8 (delapan) misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Misi 1. Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas
2. Misi 2. Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan
3. Misi 3. Nagari/Desa sebagai basis Kemajuan
4. Misi 4. Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat
5. Misi 5. Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana
6. Misi 6. Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas
6. Misi 7. Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk Usaha Kecil
7. Misi 8. Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif

3.3.3 Sasaran Pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Sasaran pembangunan merupakan komponen penting dalam perencanaan jangka menengah yang berfungsi sebagai indikator capaian dari tujuan pembangunan daerah. Dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029, sasaran pembangunan disusun sebagai tahapan awal (tahap pertama) dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2045. Oleh karena itu, perumusan sasaran pembangunan lima tahunan ini memegang peranan strategis dalam mengarahkan pembangunan daerah menuju visi jangka panjang yang telah ditetapkan.

Penyusunan sasaran pembangunan didasarkan pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, serta mempertimbangkan dinamika pembangunan global, nasional, dan regional. Selain itu, sasaran ini juga disusun dengan memperhatikan kondisi aktual daerah, permasalahan utama yang dihadapi, serta potensi unggulan yang dapat

dikembangkan. Sasaran-sasaran tersebut mencerminkan hasil yang ingin dicapai secara spesifik dan terukur dalam lima tahun ke depan, baik di bidang ekonomi, sosial, lingkungan hidup, maupun tata kelola pemerintahan

Tabel 3.4
Sasaran Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045

ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
		2025	2045
KESEHATAN UNTUK SEMUA	1. Usia Harapan Hidup	74,26	79,85
	2. Kesehatan Ibu dan Anak		
	a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran Hidup)	130,00	15,00
	b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	20,50	5,00
	3. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		
	a. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*)	71	100
	b. Angka Keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Succes Rate*)	92,11	100
	4. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	94,07	99,50
PENDIDIKAN BERKUALITAS YANG MERATA	5. Hasil Pembelajaran		
	a. Persentase Satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimun pada asesment tingkat nasional		
	i. Literasi	52,42	76,11
	ii. Numerasi	35,44	68,06
	b. Rata-rata lama sekolah	9,91	12,62
	c. Harapan Lama Sekolah	14,39	15,97
	6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	13,38	15,05
	7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	75,31	85,00
PERLINDUNGAN SOSIAL ADAPTIF	8. Tingkat Kemiskinan	4,50-5,10	0,04-0,54
	9. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial	32,20	78,32

ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
		2025	2045
	Ketenagakerjaan		
	10. Persentase penyandang Disabilitas bekerja di sektor formal	15,00	45,00
HOTEL,INOVASI DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	11. Rasio PDRB Industri Pengolahan	8,46-8,53	11,55-11,92
	12. Pengembangan Pariwisata		
	a. Rasio PDRB Akomodasi Makan Minum	1,43	2,43
	b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	43,08	107,70
	13. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif	1,11	1,18
	14. Produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMN		
	a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah pada level provinsi	11,15	13,11
	b. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level provinsi	3,53	5,09
	c. Rasio Kewirausahaan	3,59	9,39
	d. Rasio Volumen Koperasi terhadap PDRB	1,24	3,46
	e. ROA BUMD	1,92	4,81
	15. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,37-5,76	3,03-4,03
	a. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	38	70
	16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	59,41	73,30
	17. Indeks Inovasi Daerah	72,50	80,00
PENERAPAN EKONOMI HIJAU	18.Tingkat penerapan Ekonomi Hijau		
	a. Indeks Ekonomi Hijau	68,69	85,10
	b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	51,70	89,96
TRASNFORMASI DIGITAL	19. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,10	7,50
INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN REGIONAL	20. Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tinglat Provinsi	4,63	3,55
	21. Pembentukan Modal Tetapp Bruto	29,79	37,07
	22. Ekspor Barang dan Jasa	16,50	19,65

ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
		2025	2045
	23. Kota Maju, Inklusif dan Berkelanjutan		
	a. Proporsi Kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap provinsi	39,22	42,82
	b. Rumah Tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau dan Berkelanjutan	64,00	100,00
	c. Persentase Desa Mandiri	7,83	25,22
REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF	24. Indeks Reformasi Hukum	70,00	100,00
	25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,90	5,00
	26. Indeks Pelayanan Publik	3,84	5,00
	27. Indeks Integritas Nasional	73,16	88,13
HUKUM BERKEADILAN, KEAMANAN DAERAH TANGGUH DAN DEMOKRASI SUBSTANSI	28. a. Persentase Penanganan Pelanggaran Perda yang diselesaikan	94	100
	28. b. Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	73,16	90
	29. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	57,76	75,14
	30. Indeks Demokrasi Indonesia	76,27	80,00
STABILITAS EKONOMI MAKRO	31. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	1,17	1,70
	32. Tingkat Inflasi	2,80-3,60	0,90-3,00
	33. Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		
	a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	18,01	54,10
	b. Aset Dana Pensiun/PDRB	0,92	8,11
	c. Nilai Transaksi Saham per Kapita (Rupiah)	2.926.183	26.992.981
	d. Total Kredit/PDRB	24,40	51,10
	34. Inklusi Keuangan	86,72	99,30
KEMITRAAN KONSTRUKTIF, KEPEMIMPINAN DAN PENGARUH REGIONAL	35. Persentase Kerjasama Wajib yang dilaksanakan	37,50	100,00
	36. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	3,06	3,14
BERAGAMA	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan	60-58-60,65	70,18-70,78

ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
		2025	2045
MASLAHAT DAN BERKEBUDAYAAN MAJU	38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	72,23-72,31	78,68-79,55
KELUARGA BERKUALITAS, KESETARAAN GENDER DAN MASYARAKAT INKLUSIF	39. Indeks Pembangunan Keluarga	69,53-69,54	74,53-74,59
	40. a. Indeks Ketimpangan Gender	0,405-0,390	0,200-0,157
	b. Indeks Perlindungan Khusus Anak	66,15	68,15
LINGKUNGAN HIDUP BERKUALITAS	41. Indeks Pengelolaam Keankeragama Hayati daerah	0,613	0,650
	42. Kualitas Lingkungan Hidup		
	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	77,95	85,10
	b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	8,57	50,00
	c. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	11,00	90,00
	d. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	29,00	100,00
BERKETAHANAN ENERGI, AIR DAN KEMANDIRIAN PANGAN	43. Ketahanan Energi, Air dan Pangan		
	a. Konsumsi Listrik per Kapita	707,00	2.325,00
	b. Intensitas Energi Primer	160,00	130,00
	c. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	6,84	0,28
	d. Kapasitas Air Baku	1,08	8,02
	e. Akses Rumah tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan	41,23	100,00
RESILIENSI TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM	44. Indeks Risiko bencana (IRBI)	170,51	145,20-123,49
	45. Persentase Penurunan Emisi GRK		
	a. Kumulatif	18,08	35,91
	b. Tahunan	28,05	62,31

Sumber : RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2045

3.4 VISI DAN MISI RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025-2029

Visi dan misi merupakan komponen fundamental dalam perencanaan pembangunan daerah, yang menjadi arah dan landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan selama periode lima tahun. Dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029, visi dan misi dirumuskan untuk mewujudkan cita-cita dan harapan masyarakat daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang semakin kompleks dan dinamis.

Visi mencerminkan gambaran masa depan yang ingin dicapai Kabupaten Padang Pariaman dalam lima tahun ke depan, selaras dengan potensi, kondisi, dan karakteristik daerah. Visi ini menjadi panduan utama dalam mengarahkan seluruh upaya pembangunan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Sementara itu, misi dijabarkan sebagai langkah-langkah strategis yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi tersebut, dengan menekankan pada peran aktif seluruh pemangku kepentingan dan sinergi antar sektor pembangunan.

Perumusan visi dan misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman juga memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Barat, termasuk visi Presiden dalam RPJMN Tahun 2025–2029 dan visi jangka panjang Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, visi dan misi yang ditetapkan tidak hanya mencerminkan aspirasi lokal, tetapi juga terintegrasi dalam kerangka pembangunan yang lebih luas.

3.4.1 Visi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 merupakan rumusan strategis yang menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Visi ini merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, yang sekaligus menjadi arah kebijakan serta dasar penetapan prioritas pembangunan daerah.

Pernyataan visi tersebut tidak hanya mencerminkan aspirasi dan komitmen kepemimpinan daerah, tetapi juga disusun dengan mempertimbangkan kesinambungan arah pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2045. Selain itu, visi ini dirumuskan dengan memperhatikan berbagai faktor penting, seperti kondisi objektif daerah, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi, potensi sumber daya daerah, serta isu-isu strategis baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun global.

a. Pernyataan Visi

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Padang Pariaman tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan saja, tetapi juga sebagai landasan dalam penyusunan misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, hingga kegiatan pembangunan yang

terukur dan berorientasi pada hasil. Visi ini menjadi kompas arah bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita bersama menuju kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 adalah:

"Padang Pariaman Maju dan Sejahtera."

Visi Padang Pariaman Maju dan Sejahtera mengandung makna yang mencerminkan harapan dan tujuan utama pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Visi ini menjadi komitmen pemerintah daerah untuk mendorong transformasi menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, dengan fokus pada kemajuan daerah yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Penjelasan kata-kata kunci

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, diperlukan perumusan misi yang menjadi penjabaran operasional dan arah strategis guna mencapai kondisi yang dicita-citakan dalam lima tahun mendatang. Misi pembangunan merupakan langkah-langkah sistematis yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai tantangan dan peluang pembangunan, serta sebagai dasar dalam penyusunan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan.

MAJU

Mencerminkan tekad Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk menciptakan daerah yang dinamis, kompetitif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Pembangunan Padang Pariaman ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman lebih maju dalam berbagai aspek pembangunan termasuk :

1. Ekonomi : Meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan. Ini mencakup upaya untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Pendidikan dan Kesehatan, Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan. Program-program seperti Beasiswa Angkat Generasi Indonesia Terdepan (BANGKIT) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Sejahtera (JAMSEHAT) menjadi bagian dari strategi ini.
3. Tata Kelola Pemerintahan, Membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Hal ini termasuk penerapan teknologi dalam pemerintahan (smart city) untuk meningkatkan efisiensi layanan publik.

SEJAHTERA

Tujuan akhir dari proses pembangunan, yaitu tercapainya kondisi kehidupan masyarakat yang layak, adil, dan bermartabat. Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah untuk

meningkatkan kondisi masyarakat yang mencapai taraf kehidupan yang layak, meliputi :

1. Kesejahteraan Ekonomi : Masyarakat memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, perumahan, dan pendidikan, termasuk juga pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.
2. Kesehatan dan Pendidikan, Kesejahteraan juga berarti adanya akses yang baik terhadap layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas, sehingga masyarakat dapat hidup sehat dan berpendidikan.
3. Kehidupan Sosial dan Budaya, Sejahtera juga mencakup aspek sosial dan budaya, di mana masyarakat dapat menjalani kehidupan yang harmonis, menjaga tradisi, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial

Dengan demikian, visi "Padang Pariaman maju dan sejahtera" adalah suatu cita-cita untuk mencapai keseimbangan antara kemajuan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, serta pelestarian nilai-nilai sosial dan budaya di masyarakat.

c. Sasaran Visi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Untuk memastikan bahwa arah pembangunan jangka panjang dapat dicapai secara terukur dan sistematis, pernyataan visi pembangunan daerah perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam bentuk sasaran yang konkret. Sasaran visi merupakan penjabaran operasional dari visi jangka panjang yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang berfungsi sebagai pilar strategis dalam pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan.

Dalam konteks ini, sasaran visi tidak hanya menggambarkan kondisi ideal yang ingin dicapai pada akhir periode RPJPD, tetapi juga menjadi dasar dalam menyusun tujuan, arah kebijakan, serta kerangka indikator kinerja pembangunan jangka menengah dan tahunan. Oleh karena itu, keberadaan sasaran visi sangat penting sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian visi daerah, sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyelaraskan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

Sasaran visi dalam RPJPD Kabupaten Padang Pariaman dirumuskan dengan mempertimbangkan tantangan strategis masa depan, tren global, potensi dan karakteristik daerah, serta integrasi dengan arah kebijakan nasional dan provinsi. Untuk menjamin keterukuran capaian, setiap sasaran visi dilengkapi dengan indikator kinerja utama yang akan digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan pembangunan secara berkala. Indikator-indikator ini mencerminkan hasil pembangunan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan daerah secara keseluruhan.

Tabel 3.5
Sasaran Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030

No	Sasaran Visi	Indikator Sasaran Visi	TARGET	
			2025	2030
1.	Peningkatan Pendapatan Per Kapita	1. PDRB per Kapita ADHB (Rp Juta)	63,57	96,26
		2. Kontribusi Sektor PDRB Sub Sektor Perikanan	8,43	9
		3. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	10,37	11,21
2.	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	1. Tingkat Kemiskinan	5,01	3,78
		2. Rasio Gini (Indeks)	0,251	0,246
		3. Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,37	6,55
3.	Peningkata Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,68	6,4
4.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	1. Indeks Pembangunan Manusi (IPM)	75,82	78,82
		2. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	71,78	75,28
5.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	76,96	78,02

Sumber : RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2045

3.4.2 Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Misi merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi pembangunan daerah yang berfungsi sebagai panduan strategis dalam menetapkan arah kebijakan, tujuan, serta program dan kegiatan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dalam konteks RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029, misi dirumuskan sebagai langkah-langkah utama yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan visi ***"Padang Pariaman Maju dan Sejahtera."***

Misi pembangunan disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD sebelumnya, capaian indikator pembangunan, potensi dan permasalahan daerah, serta isu-isu strategis yang berkembang baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Selain itu, misi juga diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029 serta RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2045 sebagai rencana jangka panjang daerah.

Dengan merumuskan misi yang jelas dan terukur, Pemerintah Daerah memiliki landasan yang kuat untuk mengarahkan seluruh sumber daya pembangunan secara efektif dan efisien, serta mendorong partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Misi juga menjadi dasar dalam menyusun tujuan dan sasaran pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Setiap misi dirancang dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan pembangunan daerah, serta berorientasi pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan daya saing daerah secara berkesinambungan. Penyusunan misi juga mempertimbangkan keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional, dinamika isu strategis di tingkat regional dan global, serta mengakomodasi nilai-nilai budaya lokal yang menjadi identitas masyarakat Minangkabau.

Lima misi yang dirumuskan menjadi arah utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah selama periode 2025–2029. Masing-masing misi akan menjadi pijakan dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, serta pengalokasian sumber daya anggaran secara efektif dan terukur. Seluruh proses ini bertujuan untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah secara menyeluruh dan berdaya guna. Adapun 5 (lima) misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

a. Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas

Misi ini merupakan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada hasil *(result-based governance*), sebagaimana tertuang dalam visi-misi kepala daerah saat pendaftaran ke KPU. Dalam konteks penyusunan RPJMD 2025–2029, misi ini diarahkan untuk memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Misi ini juga sejalan dengan prinsip *good governance*, yaitu tata kelola pemerintahan yang mengedepankan efisiensi, efektivitas, keadilan, dan inklusivitas. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu merespons dinamika pembangunan yang semakin kompleks melalui sistem pengelolaan yang adaptif, profesional, dan berbasis teknologi informasi. Dalam pelaksanaannya, Misi 1 akan difokuskan pada penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya aparatur sipil negara (ASN), percepatan transformasi digital dalam sistem birokrasi, peningkatan kapasitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, penguatan peran pengawasan internal dan partisipasi masyarakat, membangun harmonisasi dan budaya kerja yang sehat, transparan, akuntabel dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), membangun sinergitas arah pembangunan daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi serta mendorong konsep *smart city* di setiap nagari secara bertahap dalam mewujudkan pelayanan prima.

Selain itu, misi ini juga berupaya memperkuat fungsi dukungan kepada DPRD sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta memastikan keterbukaan informasi publik sebagai wujud dari pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.

b. Misi 2 : Menciptakan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Misi ini menekankan pentingnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai modal utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Pembangunan SDM yang

berkualitas tidak hanya ditandai oleh tingkat pendidikan dan kesehatan yang tinggi, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas, keterampilan, karakter, serta integritas masyarakat, khususnya generasi muda, agar mampu menghadapi tantangan global, kemajuan teknologi, dan dinamika pasar tenaga kerja. Misi 2 merupakan perwujudan dari komitmen untuk:

- Memastikan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan bermutu di seluruh wilayah.
- Memberikan jaminan kesehatan bagi keluarga pra sejahtera
- Membangun sinergitas arah pembangunan daerah dengan pemerintahan pusat dan provinsi.
- Membangun dan meningkatkan pemerataan kualitas sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memberikan insentif dan beasiswa pendidikan kepada masyarakat
- Merevitalisasi sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang paripurna kepada masyarakat
- Meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan vokasional dan pengembangan keahlian berbasis potensi daerah.
- Mendorong pembinaan generasi muda, pelestarian nilai-nilai lokal, serta penguatan karakter kebangsaan.
- Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, produktif, inovatif, dan mampu bersaing secara global.

Misi ini juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya di bidang pendidikan berkualitas, kesehatan yang baik, dan pekerjaan layak. Dengan terwujudnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing, Kabupaten Padang Pariaman akan memiliki pondasi kuat untuk membangun ekonomi lokal, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta memperkuat posisi daerah dalam menghadapi persaingan regional dan global.

c. Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju, dan Merata

Pembangunan ekonomi inklusif merupakan strategi untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Misi ini diarahkan pada penguatan sektor unggulan daerah seperti pertanian, UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif, serta penciptaan lapangan kerja yang luas dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari visi kepala daerah, misi ini mendorong peningkatan investasi, kemudahan berusaha, dan pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi. Pemerintah daerah juga akan memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat, memperluas akses permodalan dan pasar, serta melakukan inovasi dalam promosi dan branding produk unggulan daerah. Misi ini akan difokuskan kepada :

- Mendorong setiap pemerintahan nagari menciptakan wisata dan produk unggulan yang berdaya saing.
- membangun sinergitas arah pembangunan daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi.

- mengoptimalkan sektor pariwisata, pertanian dan perikanan sebagai kekuatan utama dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

d. Misi 4 : Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Misi ini menitikberatkan pada penyediaan dan pemerataan infrastruktur dasar yang mendukung pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, drainase, transportasi, dan perumahan layak huni akan menjadi prioritas, seiring dengan peningkatan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.

Misi ini juga mendukung pengembangan kawasan strategis dan konektivitas antar wilayah untuk meningkatkan mobilitas orang dan barang. Pembangunan infrastruktur akan dilaksanakan dengan pendekatan tata ruang yang berwawasan lingkungan serta mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan partisipasi masyarakat. Prioritas pelaksanaan misi ini diarahkan kepada:

- Mempercepat pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, sarana publik lainnya yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.
- Menciptakan ruang-ruang publik di setiap kecamatan.
- Membangun sinergitas arah pembangunan daerah dengan pemerintahan pusat dan provinsi.

e. Misi 5 : Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya

Misi ini mencerminkan komitmen untuk memperkuat nilai-nilai agama, adat, dan budaya lokal dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bertekad membangun masyarakat yang memiliki karakter kuat, menjunjung tinggi moralitas, dan menghargai warisan budaya daerah.

Pelaksanaan misi ini diarahkan pada revitalisasi peran lembaga adat, surau, dan keluarga sebagai pilar pembentukan karakter. Pemerintah daerah juga akan mendorong pelestarian seni dan tradisi lokal, memperkuat integrasi nilai-nilai agama dan budaya dalam sistem pendidikan, serta memfasilitasi ruang ekspresi bagi generasi muda dalam melestarikan identitas budaya. Moderasi beragama dan kerukunan antar umat akan dijaga sebagai pondasi kehidupan sosial yang harmonis dan toleran. Misi ini menitikberatkan kepada:

- Meningkatkan peran dan keterlibatan tigo tali sapilin dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.
- Membangun sinergitas arah pembangunan daerah dengan pemerintahan pusat dan provinsi.
- Meningkatkan peran dan kesejahteraan ulama, pemangku adat dalam membangun karakter generasi muda yang agamais dan berbudaya sesuai falsafah Minang “ Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”

3.4.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025-2029

Tabel 3.6
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Tujuan/Sasaran Per Misi	Indikator KInerja	Satuan	Baseline	Proyeksi Tahun				Kondisi Ahir RPJMD (2030)
			2025	2026	2027	2028	2029	
MISI 1. MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS DAN BERINTEGRITAS								
Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	3,68	4,3	4,9	5,4	5,9	6,4
Sasaran 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	80,00	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00
	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	71,4	72,19	72,99	73,79	74,59	75,39
	Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK	%	78,00	78,4	78,8	79,2	79,6	80,00
Sasaran 2 : Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung Pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	87,72	88,3	88,89	89,47	90,02	90,64
Sasaran 3 : Meningkatnya Transformasi Digital Pelayanan Publik	Indeks SPBE	Indeks	3,51	3,91	4,10	4,21	4,26	4,3
	Indeks Pemerintahan Digital Indonesia (Pemdi)	Indeks	-	1,7	2,0	2,1	2,5	2,7
MISI 2. MENCIPTAKAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING								
Tujuan 1 : Terciptanya Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berdaya Saing dan Inklusif	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	75,82	76,37	76,99	77,59	78,20	78,82
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan berdaya saing	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,79	8,95	9,14	9,34	9,55	9,77
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,42	14,56	14,68	14,85	14,98	15,12
	Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asessment tingkat Nasional							
	Literasi	%	54,00	54,46	54,92	55,38	55,84	56,30
	Numerasi	%	46,50	46,97	47,44	47,91	48,38	48,85

Tujuan/Sasaran Per Misi	Indikator KInerja	Satuan	Baseline	Proyeksi Tahun				Kondisi Ahir RPJMD (2030)
			2025	2026	2027	2028	2029	
Sasaran 2 : Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas, baik, adil dan terjangkau	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,97	74,07	74,17	74,27	74,37	74,47
	Prevalensi Stunting	%	23,90	22,65	21,40	20,15	18,90	17,65
	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Orang/100.000 Kelahiran Hidup	50	50	50	50	50	80
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	57,8	59,2	60,5	61,8	63,1	64,2
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,3	94,68	95,06	95,44	95,82	96,2
	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,715	0,708	0,701	0,694	0,687	0,673
	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	69,68	69,866	70,052	70,238	70,424	70,61
Sasaran 4 : Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusi	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	57,50	60,30	66,30	72,30	75,30	81,25
MISI 3. MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF, MAJU DAN MERATA								
Tujuan 1: Meningkatnya Perekonomian Daerah Yang Maju dan Inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,37	5,55	6,92	6,62	7,81	6,55
	PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	Rp.Juta	63,57	69,14	74,81	81,6	88,77	96,26
	Eksport Barang dan Jasa	%	4,57	5,01	5,45	5,88	6,32	13,92
	Gini Ratio	%	0,251	0,250	0,249	0,248	0,247	0,246
	Tingkat Kemiskinan	%	5,01	4,79	4,55	4,29	4,03	3,78
Sasaran 1 : Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, Kehutanan, dan perikanan terhadap perekonomian daerah	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	%	20,34	20,83	21,32	21,8	22,29	22,78
Sasaran 2 : Meningkatnya kontribusi perdagangan, UMKM dan industri berbasis sektor unggulan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	11,85	13,55	15,25	16,95	18,45	20,00
	Rasio Volume Koperasi Terhadap PDRB	%	0,150	0,192	0,234	0,276	0,318	0,620
	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	8,43	8,6425	8,855	9,0675	9,28	11,46
Sasaran 3 : Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu.Orang	0.125	0.127	0.13	0.135	0.14	0.145
	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Nasional	%	1,622	1,612	1,602	1,582	1,572	1,831

Tujuan/Sasaran Per Misi	Indikator KInerja	Satuan	Baseline	Proyeksi Tahun				Kondisi Ahir RPJMD (2030)
			2025	2026	2027	2028	2029	
	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,36	1,38	1,40	1,42	1,44	1,54
Sasaran 4 : Meningkatnya Kemudahan Investasi	Persentase Peningkatan Investasi	%	2,58	3,44	4,12	5,16	6,55	7,68
	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PDRB)	%	30,60	30,38	30,16	29,93	29,71	29,49
	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	%	8,76	11,59	14,42	17,26	20,09	22,93
	Nilai Transaksi Saham per Kapita	Rupiah	413.768	493.821	573.874	653.927	733.98	814.033
Sasaran 5 : Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	86,2	87,15	88,00	88,7	89,45	90,00
Sasaran 6 : Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,17	5,89	5,76	5,59	5,42	5,28
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah/ Jiwa	71,78	72,3	73,1	73,85	74,6	75,28
	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	%	57,53-58,91	57,84-59,45	58,14-59,99	58,45-60,53	58,75-61,07	59,06-61,61
	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	%	71,20	71,68	72,16	72,63	73,11	73,59
	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal	%	26,39	27,45	28,50	29,56	30,61	31,67
Sasaran 7 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Indeks Desa	Indeks	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00
MISI 4. MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN								
Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan, berketahanan terhadap bencana dan	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	60,5	63,00	65,2	67,8	70,00	72,00

Tujuan/Sasaran Per Misi	Indikator KInerja	Satuan	Baseline	Proyeksi Tahun				Kondisi Ahir RPJMD (2030)
			2025	2026	2027	2028	2029	
Perubahan Iklim								
Sasaran 1 : Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	60,02	62,03	64,05	66,08	68,12	70,17
	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan	%	19,00	20,50	22,00	23,50	25,00	26,50
	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	m3/detik	0,95	0,992	1,034	1,096	1,128	1,160
	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	%	60,25	62,54	64,83	67,12	70,71	72,73
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	76,96	77,17	77,38	77,59	77,80	78,02
	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	16,34	20,31	24,23	27,78	31,66	35,45
	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan penuh pengumpulan sampah	%	40,87	46,7	52,53	58,36	64,19	70,02
Sasaran 3 : Menurunnya risiko b bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	150,89	150,88-149,61	149,6-148,33	148,32-147,05	147,04-145,77	145,76-144,49
MISI 5. MEWUJUDKAN KEHIDUPAN SOSIAL YANG RELIGIUS, HARMONIS DAN BERBUDAYA								
Tujuan 1 : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tentram dan harmonis dalam keberagaman agama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Imdeks	72,15	72,5	72,9	73,2	73,55	73,87
Sasaran 1 : Meningkatnya rasa aman dan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan masyarakat	Indeks Keamanan Daerah	Indeks	67,37	66,88	67,49	67,89	68,38	68,81
	Angka Kriminalitas	%	196,25	186,44	177,12	168,27	159,86	151,87
Sasaran 2 : Meningkatnya pelestarian cagar dan warisan budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	85,00	86,00	87,00	88,00	88,5	89,00
	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	66,00	68,00	70,00	71,00	72,00	74,00

3.4.4 Keterkaitan antara Visi Misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahunan yang memuat arah kebijakan dan strategi pembangunan berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih. Dalam penyusunannya, RPJMD tidak disusun secara terpisah, melainkan harus memperhatikan kesinambungan dan konsistensi terhadap arah pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 merupakan tahap awal dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2045. Oleh karena itu, visi dan misi dalam RPJMD ini disusun dengan tetap mengacu dan menjaga keselarasan terhadap visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah, agar pembangunan daerah dapat berjalan secara terpadu, berkesinambungan, dan bertahap dalam mencapai kondisi ideal pada tahun 2045.

Keterkaitan antara visi dan misi RPJMD dan RPJPD tercermin dalam arah dan substansi pembangunan yang difokuskan, termasuk upaya mewujudkan kemajuan daerah, peningkatan daya saing, kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan masyarakat, tata kelola pemerintahan yang baik, serta ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Padang Padang Pariaman Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7
Keselarasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2045

Visi RPJPD	Visi RPJMD	Misi RPJPD	Misi RPJMD
Padang Pariaman **Maju**, Berkelanjutan, **Sejahtera** dan Merata	Padang Pariaman **Maju** dan **Sejahtera**	Mewujudkan Transformasi Sosial menuju Masyarakat yang Sehat, Cerdas, Unggul dan Berdaya Saing	Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing
		Mewujudkan Transformasi Ekonomi Inklusif dan berkelanjutan	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju dan Merata
		Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, masyarakat Damai, demokratis serta Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan berbudaya
		Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan berintegritas
		Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Berlandaskan Nilai "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"	Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan berbudaya
		Mewujudkan Pembangunan WIlayah yang Adil dan Merata	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan
		Mewujudkan Sarana dan Prasarana Publik yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	
		Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Daerah yang Konsisten dan Terkendali	

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2045. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan, keselarasan, dan konsistensi arah pembangunan daerah, dari periode lima tahunan hingga dua puluh tahunan.

Secara umum, visi RPJMD, yaitu *"Padang Pariaman Maju dan Sejahtera"*, merupakan penjabaran awal dan operasional dari visi RPJPD, yakni *"Padang Pariaman Maju, Berkelanjutan, Sejahtera dan Merata"*. Visi jangka menengah ini menjadi fondasi dan arah kebijakan pembangunan lima tahunan yang secara bertahap akan membawa Kabupaten Padang Pariaman menuju visi jangka panjang pada tahun 2045.

Keterkaitan antar misi RPJPD dan RPJMD ditunjukkan melalui hubungan yang saling mendukung secara tematik dan substansial. Misi-misi RPJMD merupakan turunan dan elaborasi dari misi-misi RPJPD yang lebih bersifat strategis dan makro.

3.4.5 Keterkaitan antara Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 dengan Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Dan Visi Misi RPJMN Tahun 2025-2045

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029, keterpaduan arah kebijakan pembangunan daerah dengan pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan pembangunan nasional menjadi hal yang fundamental.

Visi dan misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tidak hanya mencerminkan aspirasi lokal, tetapi juga dirumuskan dengan mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi, yaitu RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, sebagai bagian dari pencapaian visi besar Indonesia Emas 2045. Keterkaitan ini dimaksudkan untuk menjamin harmonisasi pembangunan antarwilayah dan antartingkat pemerintahan, serta memastikan setiap kebijakan daerah berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Dalam hal ini, visi dan misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 telah dirumuskan dengan mempertimbangkan keselarasan dengan arah pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan, pemerataan, dan peningkatan daya saing daerah, serta mendukung visi nasional yang berorientasi pada kemajuan bersama menuju Indonesia Emas 2045. Kesinambungan tersebut tampak pada prioritas pembangunan,

penguatan sumber daya manusia, transformasi ekonomi, tata kelola pemerintahan, serta pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup.

Untuk memastikan keterpaduan dan kesinambungan arah pembangunan antara tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten, visi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 dirumuskan dengan mengacu dan diselaraskan dengan visi pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) serta visi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat. Tabel berikut menyajikan keselarasan dan keterkaitan antara visi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan RPJMN Tahun 2025–2029, yang menjadi landasan dalam perumusan misi, tujuan, serta prioritas pembangunan daerah ke depan. Keselarasan Visi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan RPJMN Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8
Keselarasan Visi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan RPJMN Tahun 2025-2029

Visi RPJMN	Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat	Visi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman
Bersama Indonesia **Maju**, Menuju Indonesia Emas 2045	Sumatera Barat Madani Yang **Maju** dan Berkeadilan	Padang Pariaman **Maju** dan **Sejahtera**

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 yaitu *"Padang Pariaman Maju dan Sejahtera"* dirumuskan sebagai representasi arah pembangunan daerah yang selaras dengan dinamika kebutuhan masyarakat lokal serta tantangan pembangunan ke depan. Dalam perumusannya, visi ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang saling berjenjang dan terintegrasi.

Secara vertikal, visi tersebut memiliki keterkaitan erat dengan visi pembangunan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029, yaitu "Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan". Kesamaan fokus terhadap kemajuan daerah, keberlanjutan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi benang merah yang menghubungkan keduanya. Padang Pariaman sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Barat turut mendukung terwujudnya masyarakat madani melalui penguatan sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Lebih jauh, visi Kabupaten Padang Pariaman juga diselaraskan dengan visi nasional sebagaimana termuat dalam RPJMN Tahun 2025–2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Hal ini tercermin dari semangat kolaborasi, pemerataan pembangunan, penguatan daya saing, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, visi Kabupaten Padang Pariaman berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi besar nasional, melalui pembangunan daerah yang adaptif, partisipatif, dan terukur.

Keterkaitan ketiga visi ini menunjukkan konsistensi arah dan orientasi pembangunan, mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten. Hal ini penting guna memastikan bahwa seluruh kebijakan

dan program pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman berada dalam satu jalur strategis menuju tujuan bersama: mewujudkan masyarakat yang maju, adil, sejahtera, dan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang

Selain keselarasan visi, perumusan misi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 juga mempertimbangkan relevansi dan keterkaitannya dengan misi pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan misi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025–2029. Misi pembangunan daerah merupakan penjabaran lebih operasional dari visi, yang mengarahkan strategi dan program pembangunan daerah dalam jangka menengah.

Setiap misi dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman disusun dengan mempertimbangkan prinsip kesinambungan dan keterpaduan perencanaan, sehingga selaras dengan Asta Cita Nasional dalam RPJMN yang berfokus pada pembangunan manusia, pemerataan pembangunan, transformasi ekonomi, tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien, serta pelestarian lingkungan hidup. Di tingkat provinsi, misi-misi tersebut juga memiliki keterkaitan langsung dengan arah kebijakan pembangunan Sumatera Barat yang menekankan pembangunan masyarakat madani, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, keterkaitan misi ini mencerminkan komitmen Kabupaten Padang Pariaman dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan regional secara sinergis. Keselarasan ini menjadi dasar untuk menetapkan sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program prioritas yang akan dijalankan selama periode RPJMD 2025–2029. Tabel berikut menggambarkan secara sistematis hubungan antara misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman, misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat, dan misi dalam RPJMN Tahun 2025–2029. Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman dan RPJMN Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 3.9, sedangkan Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3.9
Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman dan RPJMN Tahun 2025-2029

Misi RPJMN	Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman
1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Mewujudkan kehidupan sosial yang religius, harmonis dan berbudaya
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju, dan Merata
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Misi RPJMN	Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman
sentra produksi melalui peran aktif koperasi	
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas	Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju, dan Merata
6. Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju, dan Merata
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Mewujudkan kehidupan sosial yang religius, harmonis dan berbudaya

Tabel 3.10
Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman
dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat	Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman
Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju, dan Merata
Nagari/Desa sebagai basis kemajuan	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju, dan Merata
Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Barat Bagian Barat	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju, dan Merata
Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan
Membangun Kehidupan Beradat dan berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal melalui dukungan keluarga yang berkualitas	Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya
Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk UMKM	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju, dan Merata
Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas

RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN. Sinergi ini dimaksudkan agar pembangunan daerah tidak hanya menjawab kebutuhan lokal, tetapi juga turut mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional secara inklusif dan berkelanjutan

3.5 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI MENURUT TUJUAN DAN SASARAN

3.5.1 Arah Kebijakan dan Strategi pada Tujuan dan Sasaran Kabupaten Padang Padang Pariaman

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029, diperlukan strategi yang tepat, terarah, dan responsif terhadap dinamika tantangan serta peluang pembangunan daerah. Strategi merupakan pendekatan umum yang bersifat menyeluruh dan digunakan sebagai kerangka dasar dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Strategi pembangunan disusun berdasarkan analisis terhadap kondisi daerah, isu strategis, potensi lokal, serta capaian pembangunan sebelumnya, guna memastikan bahwa setiap tujuan dan sasaran yang dirumuskan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Di samping itu, strategi juga mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi agar tercipta sinergi dan keterpaduan dalam pelaksanaan pembangunan antar tingkat pemerintahan.

Dengan adanya strategi yang jelas pada setiap tujuan dan sasaran, diharapkan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman selama lima tahun ke depan dapat berjalan lebih fokus, terukur, dan berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sub bab ini menguraikan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan misi pembangunan yang telah ditetapkan

A. Arah Kebijakan dan Strategi pada Tujuan dan Sasaran Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029, diperlukan arah kebijakan yang sistematis dan terukur melalui penetapan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah. Penjabaran strategi pembangunan ini disusun untuk menjawab isu-isu strategis daerah yang telah diidentifikasi serta mengatasi akar permasalahan yang menjadi tantangan pembangunan di berbagai bidang.

Strategi pembangunan merupakan upaya yang dirancang secara menyeluruh dan terpadu untuk mencapai sasaran pembangunan yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah, serta selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan provinsi. Perumusan strategi juga memperhatikan dinamika global, nasional, dan regional, serta potensi dan karakteristik lokal Kabupaten Padang Pariaman.

Penetapan strategi pada masing-masing tujuan dan sasaran pembangunan dimaksudkan sebagai dasar dalam menyusun arah kebijakan, program prioritas, dan kegiatan pembangunan daerah. Strategi tersebut diharapkan mampu menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan, serta menjamin integrasi lintas sektor, wilayah, dan pemangku kepentingan.Dengan pendekatan tersebut, diharapkan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dalam lima tahun ke depan dapat lebih efektif, inklusif, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat daya saing daerah, dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs). Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 3.11

Tabel 3.11
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

VISI : MEMBANGUN PADANG PARIAMAN MAJU DAN SEJAHTERA		
MISI 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas		
TUJUAN 1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas		
SASARAN	**ARAH KEBIJAKAN**	**STRATEGI**
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas	1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas	1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah berbasis kinerja dan terukur 2. Menata ulang kelembagaan dan restrukturisasi organisasi perangkat daerah 3. Menguatkan efektifitas pengelolaan keuangan dan aset daerah 4. Meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan pengawasan berbasis risiko 5. Memperkuat budaya integritas dan penerapan zona integritas 6. Mengembangkan pusat layanan masyarakat yang terintegrasi di Kecamatan 7. Mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah secara transparan dan akuntabel
	2. Penerapan prinsip meritokrasi	1. Menerapkan prinsip merit dalam rekrutmen, promosi, dan mutasi ASN 2. Mengoptimalkan sistem *reward and punishment* berbasis kinerja 3. Mengembangkan sistem manajemen kinerja yang terintegrasi dan berbasis bukti (*evidence-based*) 4. Meningkatkan kualitas sistem penilaian kinerja ASN 5. Mendorong budaya kerja ASN yang berorientasi pada pelayanan publik 6. Menyusun dan memperkuat kebijakan serta regulasi 7. Meningkatkan kapasitas

		kelembagaan dan pengembangan kompetensi ASN
Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	1. Penguatan pemanfaatan hasil riset dan inovasi berbasis kebutuhan daerah	1. Mengembangkan teknologi tepat guna dan membangun ekosistem inovasi yang inklusif dan kolaboratif. 2. Mendorong perumusan kebijakan pembangunan daerah berbasis riset, kajian, dan data 3. Memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan dunia usaha (*triple helix*) 4. Meningkatkan kapasitas daerah melalui pendirian pusat inovasi dan pelatihan kreativitas 5. Mengembangkan riset terapan yang sesuai dengan kebutuhan sektoral dan potensi ekonomi lokal 6. Mendorong pengembangan budaya inovasi masyarakat melalui program Nagari Inovatif
Meningkatnya transformasi digital layanan publik yang handal	1. Transformasi digital layanan publik	1. Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi yang andal dan aman 2. Memperkuat keamanan siber dan perlindungan data dalam sistem layanan digital 3. Meningkatkan literasi digital aparatur dan masyarakat guna mengoptimalkan pemanfaatan layanan publik digital. 4. Mengembangkan layanan publik digital yang responsif, transparan, ramah pengguna, serta adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. 5. Meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik 6. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan data sektoral untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti 7. Mengoptimalkan dashboard data sektoral terintegrasi
MISI 2 : Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing		
Tujuan : Terciptanya Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berdaya Saing dan Inklusif		
SASARAN	**ARAH KEBIJAKAN**	**STRATEGI**
1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan berdaya saing	1. Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan	1. Meningkatkan pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu 2. Meningkatkan penyediaan seragam gratis bagi siswa SD dan SMP 3. Mendorong percepatan wajib

		belajar 13 tahun 4. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan antar wilayah 5. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah 6. Meningkatkan literasi dan budaya baca masyarakat 7. Memperluas jangkauan layanan literasi dan perpustakaan berbasis inklusi sosial 8. Meningkatkan akses dan partisipasi layanan PAUD yang berkualitas dan inklusif.
	2. Peningkatan mutu pendidikan berorientasi pada kompetensi, karakter, dan daya saing	1. Meningkatkan kompetensi pendidik dan kualitas pembelajaran berbasis kompetensi 2. Menguatkan pendidikan karakter untuk membentuk profil pelajar yang berintegritas dan berdaya saing 3. Meningkatkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan 4. Mengintegrasikan program literasi dan budaya baca dalam ekosistem pembelajaran 5. Mengembangkan pendidikan vokasi dan pelatihan yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja
2. Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau.	1. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan	1. Memperkuat kapasitas dan peran kader kesehatan dalam mendukung layanan kesehatan masyarakat 2. Memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dengan pembangunan rumah sakit daerah tipe D 3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi berbasis keluarga dan terintegrasi 4. Meningkatkan akses dan koordinasi layanan rujukan
	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat sesuai siklus hidup	1. Meningkatkan upaya *promotif preventif* berbasis Nagari 2. Memperkuat upaya pencegahan penyakit menular dan tidak menular 3. Meningkatkan intervensi gizi seimbang untuk penanggulangan stunting dan gizi buruk anak 4. Meningkatkan kesehatan ibu dan remaja melalui upaya promotif–preventif 5. Meningkatkan akses layanan kesehatan lansia melalui kunjungan langsung Dokter dan Perawat Keliling 6. Memperkuat layanan kunjungan rumah oleh

		tenaga kesehatan untuk pencegahan stunting 7. Meningkatkan ketahanan gizi keluarga dan masyarakat secara berkelanjutan
	3. Penguatan sistem ketahanan kesehatan daerah secara menyeluruh	1. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan koordinasi lintas program serta lintas sektor 2. Memperkuat komitmen dan koordinasi pemangku kepentingan 3. Mendorong penguatan layanan kesehatan primer dan rujukan 4. Memperluas akses layanan kesehatan melalui pemberian BPJS gratis
3. Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak	Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga 2. Meningkatkan partisipasi keluarga melalui program pembinaan keluarga dan pusat informasi remaja. 3. Menguatkan sistem data dan perencanaan pembangunan berbasis keluarga dan bukti. 4. Mengembangkan kemitraan lintas sektor
	Penguatan perlindungan perempuan dan anak	1. Meningkatkan partisipasi dan kapasitas perempuan dalam pendidikan, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan 2. Mengarusutamakan perspektif gender dalam seluruh siklus kebijakan pembangunan daerah 3. Meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan perkawinan usia anak 4. Memperkuat layanan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan perkawinan anak 5. Mengembangkan sistem perlindungan anak berbasis keluarga, komunitas, dan kebijakan lokal yang inklusif dan adaptif 6. Membangun sistem informasi digital terpadu untuk pelaporan, pemantauan, dan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk perkawinan anak
4. Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusi	Penguatan sistem perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif	1. Meningkatkan layanan terpadu dan sistem perlindungan sosial yang adil, inklusif dan merata 2. Memperluas akses rumah layak huni, pendidikan inklusif, dan bantuan sosial 3. Memperkuat koordinasi lintas lembaga dan sektor dalam pemberdayaan sosial serta perlindungan

		masyarakat 4. Memperkuat sistem data terpadu kesejahteraan sosial
MISI 3 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju dan Merata		
Tujuan : Meningkatnya Perekonomian Daerah yang Maju dan Inklusif		
SASARAN	**ARAH KEBIJAKAN**	**STRATEGI**
1. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap perekonomian daerah	1. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dan peternakan	1. Mendorong diversifikasi komoditas unggulan bernilai ekonomi tinggi 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian 3. Memperkuat pengendalian kesehatan hewan dan layanan veteriner 4. Mengembangkan kelembagaan petani dan pelaku usaha serta mendorong regenerasi 5. Meningkatkan akses pembiayaan dan kemitraan usaha
	2. Pengembangan sektor perikanan untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi biru	1. Meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan 2. Meningkatkan daya saing, nilai tambah, dan hilirisasi produk perikanan 3. Meningkatkan akses permodalan dan pembiayaan bagi pelaku usaha perikanan 4. Meningkatkan kelembagaan pelaku usaha perikanan 5. Pengembangan kelembagaan untuk peningkatan usaha manfataan usaha tambak (dukungan pengusaha) terhadap peningkatan ekonomi lokal
2. Meningkatnya kontribusi perdagangan, UMKM dan industri berbasis sektor unggulan	1. Peningkatan nilai tambah dan daya saing sektor perdagangan	1. Memperkuat infrastruktur dan sistem distribusi perdagangan 2. Meningkatkan kualitas perdagangan melalui standarisasi dan perlindungan konsumen 3. Memperkuat kelembagaan pelaku usaha serta membangun kemitraan perdagangan

	2. Peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM dan industri pengolahan	1. Meningkatkan nilai tambah produk koperasi dan UMKM 2. Menyederhanakan regulasi dan perizinan usaha mikro dan kecil 3. Memperluas akses pembiayaan mikro, teknologi digital sederhana, dan platform pemasaran *online* 4. Mengembangkan kapasitas pelaku usaha kecil 5. Mengembangan produk unggulan berbasis kawasan melalui OVOP (*One Village One Product*). 6. Mendorong inovasi dan hilirisasi produk industri pengolahan 7. Memperkuat regulasi, insentif, dan iklim investasi industri 8. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan efisiensi produksi 9. Mendorong kemitraan industri dengan lembaga riset, pendidikan vokasi, dan UMKM
3. Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Penguatan daya saing pariwisata berkualitas dan berkelanjutan	1. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur destinasi pariwisata 2. Mengembangkan atraksi wisata berbasis budaya, alam, dan kearifan lokal 3. Menguatkan promosi destinasi melalui media digital, event, dan kemitraan 4. Meningkatkan kompetensi pelaku pariwisata melalui pelatihan dan sertifikasi 5. Mendorong penguatan kelembagaan pariwisata nagari melalui revitalisasi POKDARWIS
	2. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual	1. Meningkatkan kapasitas dan kreativitas pelaku ekonomi kreatif 2. Memperluas akses pasar produk kreatif melalui optimalisasi digitalisasi dan e-commerce 3. Memperkuat akses pembiayaan dan insentif bagi usaha kreatif 4. Meningkatkan perlindungan dan pemanfaatan hak kekayaan intelektual 5. Menguatkan jejaring kolaborasi ekosistem ekonomi kreatif 6. Memperkuat kelembagaan ekonomi kreatif daerah 7. Mengembangkan ruang publik kreatif dan pusat kegiatan kreativitas (Youth Centre) 8. Mengembangkan pusat wisata religi dan budaya Syech Burhannuddin

4. Meningkatnya Kemudahan Investasi	1. Penguatan Ekosistem dan Iklim Investasi Daerah	1. Menguatkan promosi, fasilitasi, dan koordinasi investasi terintegrasi 2. Mengembangkan kawasan industri dan sektor unggulan investasi 3. Meningkatkan literasi keuangan dan peran lembaga intermediasi 4. Menyederhanakan regulasi dan perizinan 5. Mengoptimalkan kapasitas fiskal daerah dan inovasi pembiayaan 6. Mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui KPBU
5. Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	1. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan	1. Meningkatkan produksi dan diversifikasi pangan lokal berbasis potensi wilayah dan teknologi ramah lingkungan 2. Memperkuat distribusi, logistik, cadangan, dan perlindungan sosial pangan 3. Mengoptimalkan konsumsi pangan Bahan Pangan Bergizi, Aman, Sehat, dan Halal (B2SA) 4. Mengembangkan infrastruktur ketahanan pangan
6. Meningkatnya kesempatan dan produktifitas tenaga kerja	1. Penguatan ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, inklusif	1. Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja 2. Memperluas akses informasi dan jejaring pasar kerja 3. Meningkatkan kesempatan kerja melalui program padat karya dan peluang kerja berkelanjutan 4. Mengembangkan kewirausahaan lokal dan sosial berbasis potensi daerah 5. Mendorong kemitraan strategis antara tenaga kerja lokal dengan dunia usaha dan industri 6. Meningkatkan kreativitas dan kompetensi pemuda melalui pelatihan dan sertifikasi berbasis potensi lokal

7. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	1. Peningkatan kemandirian dan daya saing perdesaan yang berkelanjutan	1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan masyarakat 2. Memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan melalui koordinasi lintas sektor 3. Mengembangkan perekonomian desa melalui penguatan BUMDes, inovasi kewirausahaan, dan akses pasar 4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa 5. Menguatkan ekonomi nagari melalui peran aktif petani milenial 6. Peningkatan ragam pemanfaatan dana desa/ nagari untuk pengembangan potensi lokal
MISI 4 : Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan		
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan, berketahanan terhadap bencana dan Perubahan Iklim		
SASARAN	**ARAH KEBIJAKAN**	**STRATEGI**
1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	1. Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur air minum, sanitasi, dan persampahan	1. Memperluas akses masyarakat terhadap layanan air minum, sanitasi, dan persampahan. 2. Menguatkan kelembagaan pengelola air minum dan sanitasi permukiman. 3. Mengembangkan sistem penyediaan air minum regional (SPAM) 4. Mengembangkan tempat pemrosesan akhir (TPA) regional 5. Meningkatkan sanitasi berbasis masyarakat. 6. Meningkatkan sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 7. Mengembangkan sistem drainase terpadu (ecodrain) secara bertahap 8. Meningkatkan kemitraan dalam pengembangan, pembiayaan, dan pengelolaan infrastruktur
	2. Peningkatan pengelolaan sumber daya air dan tata ruang secara berkelanjutan	1. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan. 2. Meningkatkan sinergi pengelolaan air baku. 3. Mengembangkan regulasi air limbah domestik dan industri. 4. Implementasi perencanaan tata ruang (RTRW) dan zona pesisir

	3. Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau	1. Meningkatkan penataan kawasan permukiman kumuh secara terpadu melalui pengurangan rumah tidak layak huni (RTLH) 2. Meningkatkan perencanaan, penyediaan, dan tata kelola infrastruktur dasar permukiman (PSU) guna mendukung kelayakan dan keberlanjutan hunian 3. Mengendalikan dan mengawasi pembangunan kawasan permukiman agar selaras dengan rencana tata ruang
	4. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah	1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas jaringan jalan dan jembatan 2. Meningkatkan standar pelayanan dan keselamatan transportasi 3. Mengintegrasikan sistem transportasi antarmoda secara terpadu dan berkelanjutan 4. Memperkuat kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta dalam pengembangan infrastruktur transportasi. 5. Mengoptimalkan fungsi sarana transportasi kereta api untuk mendukung konektivitas antarwilayah 6. Mengembangkan dermaga untuk memperkuat konektivitas wilayah pesisir dan pulau
2. Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup yang berkelanjutan	1. Penguatan pengelolaan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati	1. Mengembangkan sistem pengelolaan sampah dan limbah terpadu berbasis 3R dan prinsip circular economy 2. Meningkatkan pengelolaan limbah B3 3. Meningkatkan pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan, dan adaptasi perubahan iklim 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kolaborasi multipihak dalam pengelolaan lingkungan 5. Memperkuat perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati 6. Menguatkan kapasitas, kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup 7. Menguatkan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan untuk pembangunan wilayah terpadu 8. Peningkatan luas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), Biopori, Sumur Resapan, dll. 9. Peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam pengendalian pertambangan mineral non logam 10. Pengembangan zonasi

		pemanfataan sumber daya alam (termasuk mineral non logam) melalui implementasi penataan ruang secara konsekuen
3. Menurunnya resiko bencana	Peningkatan ketangguhan dan resiliensi terhadap bencana	1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berketahanan bencana 2. Menguatkan kesiapsiagaan terhadap bencana 3. Melaksanakan pemetaan risiko bencana dan pengarusutamaan mitigasi dalam perencanaan 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim 5. Mengembangkan sistem informasi kebencanaan dan peringatan dini 6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan koordinasi dalam penanggulangan bencana 7. Meningkatkan mitigasi pra, saat, dan pasca terjadi bencana 8. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam usaha evakuasi, pertolongan, penyelamatan korban bencana 9. Optimalisasi penerapan sistem tanggap darurat bencana 10. Meningkatkan pemutakhiran dalam penyusunan RPB terkait pengaruh perubahan iklim terhadap bahaya yang akan terjadi
MISI 5 : Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya		
Tujuan : Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Yang Tenteram Dan Harmonis Dalam Keberagaman Agama		
SASARAN	**ARAH KEBIJAKAN**	**STRATEGI**
1. Meningkatnya rasa aman dan kerukunan antarumat beragama dalam kehidupan masyarakat	1. Perwujudan lingkungan sosial yang religius, aman dan harmonis	1. Meningkatkan internalisasi nilai religius dalam keluarga dan komunitas 2. Memperkuat peran tokoh agama, lembaga keagamaan, dan forum dialog lintas agama 3. Meningkatkan kapasitas aparat dan partisipasi masyarakat 4. Meningkatkan mekanisme penyelesaian dan pencegahan konflik di masyarakat
2. Meningkatnya pelestarian cagar dan warisan budaya	1. Internalisasi nilai adat, budaya, dan kearifan lokal dalam masyarakat	1. Pengintegrasian nilai-nilai budaya dalam pendidikan formal 2. Meningkatkan fungsi surau dan komunitas adat sebagai pusat pewarisan budaya 3. Meningkatnya pemanfaatan modernisasi dan globalisasi sebagai peluang untuk

		pelestarian budaya lokal 4. Memperkuat regulasi daerah yang mendukung pelestarian budaya lokal
	2. Pelestarian budaya lokal dan perlindungan cagar budaya	1. Meningkatkan pelestarian warisan budaya daerah 2. Mengembangkan pendidikan karakter dan nilai-nilai budaya lokal 3. Mengembangkan potensi seni, budaya, dan tradisi lokal 4. Mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan harmoni sosial 5. Meningkatkan dukungan bagi seniman dan budayawan yang melestarikan budaya lokal 6. Mengapresiasi peran Tokoh Adat dan Tokoh Agama dalam penguatan nilai-nilai adat dan agama serta pembentukan karakter generasi muda

B. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman per Tahun

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 disusun untuk menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan daerah secara efektif, efisien, terarah, dan terukur. Arah kebijakan ini merupakan turunan langsung dari visi, misi, tujuan, dan sasaran kepala daerah yang telah ditetapkan, serta memperhatikan isu strategis daerah, potensi lokal, dan tantangan global yang berkembang.

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029, yaitu *"Padang Pariaman Maju dan Sejahtera"*, telah ditetapkan sejumlah misi pembangunan daerah. Setiap misi dijabarkan ke dalam arah kebijakan yang menjadi landasan strategis dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan.

Tabel 3.12
Arah Kebijakan Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2026-2030

a. Arah Kebijakan Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas

SASARAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI				
		TAHUN I (2026)	TAHUN II (2027)	TAHUN III (2028)	TAHUN IV (2029)	TAHUN V (2030)
1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas	1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas	1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah berbasis kinerja dan terukur 2. Menata ulang kelembagaan dan restrukturisasi organisasi perangkat daerah 3. Menguatkan efektifitas pengelolaan keuangan dan aset daerah 4. Meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan pengawasan berbasis risiko 5. Memperkuat budaya integritas dan penerapan zona integritas 6. Mengembangkan pusat layanan masyarakat yang terintegrasi di Kecamatan 7. Mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah secara transparan dan akuntabel	1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah berbasis kinerja dan terukur 2. Menata ulang kelembagaan dan restrukturisasi organisasi perangkat daerah 3. Menguatkan efektifitas pengelolaan keuangan dan aset daerah 4. Meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan pengawasan berbasis risiko 5. Memperkuat budaya integritas dan penerapan zona integritas 6. Mengembangkan pusat layanan masyarakat yang terintegrasi di Kecamatan 7. Mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah secara transparan dan akuntabel	1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah berbasis kinerja dan terukur 2. Menata ulang kelembagaan dan restrukturisasi organisasi perangkat daerah 3. Menguatkan efektifitas pengelolaan keuangan dan aset daerah 4. Meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan pengawasan berbasis risiko 5. Memperkuat budaya integritas dan penerapan zona integritas 6. Mengembangkan pusat layanan masyarakat yang terintegrasi di Kecamatan 7. Mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah secara transparan dan akuntabel	1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah berbasis kinerja dan terukur 2. Menata ulang kelembagaan dan restrukturisasi organisasi perangkat daerah 3. Menguatkan efektifitas pengelolaan keuangan dan aset daerah 4. Meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan pengawasan berbasis risiko 5. Memperkuat budaya integritas dan penerapan zona integritas 6. Mengembangkan pusat layanan masyarakat yang terintegrasi di Kecamatan 7. Mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah secara transparan dan akuntabel	1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah berbasis kinerja dan terukur 2. Menata ulang kelembagaan dan restrukturisasi organisasi perangkat daerah 3. Menguatkan efektifitas pengelolaan keuangan dan aset daerah 4. Meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan pengawasan berbasis risiko 5. Memperkuat budaya integritas dan penerapan zona integritas 6. Mengembangkan pusat layanan masyarakat yang terintegrasi di Kecamatan 7. Mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah secara transparan dan akuntabel

SASARAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI				
		TAHUN I (2026)	TAHUN II (2027)	TAHUN III (2028)	TAHUN IV (2029)	TAHUN V (2030)
	2. Penerapan prinsip meritokrasi	1. Menerapkan prinsip merit dalam rekrutmen, promosi, dan mutasi ASN 2. Mengoptimalkan sistem *reward and punishment* berbasis kinerja 3. Mengembangkan sistem manajemen kinerja yang terintegrasi dan berbasis bukti (*evidence-based*) 4. Meningkatkan kualitas sistem penilaian kinerja ASN 5. Mendorong budaya kerja ASN yang berorientasi pada pelayanan publik 6. Menyusun dan memperkuat kebijakan serta regulasi 7. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pengembangan kompetensi ASN	1. Menerapkan prinsip merit dalam rekrutmen, promosi, dan mutasi ASN 2. Mengoptimalkan sistem *reward and punishment* berbasis kinerja 3. Mengembangkan sistem manajemen kinerja yang terintegrasi dan berbasis bukti (*evidence-based*) 4. Meningkatkan kualitas sistem penilaian kinerja ASN 5. Mendorong budaya kerja ASN yang berorientasi pada pelayanan publik 6. Menyusun dan memperkuat kebijakan serta regulasi 7. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pengembangan kompetensi ASN	1. Menerapkan prinsip merit dalam rekrutmen, promosi, dan mutasi ASN 2. Mengoptimalkan sistem *reward and punishment* berbasis kinerja 3. Mengembangkan sistem manajemen kinerja yang terintegrasi dan berbasis bukti (*evidence-based*) 4. Meningkatkan kualitas sistem penilaian kinerja ASN 5. Mendorong budaya kerja ASN yang berorientasi pada pelayanan publik 6. Menyusun dan memperkuat kebijakan serta regulasi 7. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pengembangan kompetensi ASN	1. Menerapkan prinsip merit dalam rekrutmen, promosi, dan mutasi ASN 2. Mengoptimalkan sistem *reward and punishment* berbasis kinerja 3. Mengembangkan sistem manajemen kinerja yang terintegrasi dan berbasis bukti (*evidence-based*) 4. Meningkatkan kualitas sistem penilaian kinerja ASN 5. Mendorong budaya kerja ASN yang berorientasi pada pelayanan publik 6. Menyusun dan memperkuat kebijakan serta regulasi 7. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pengembangan kompetensi ASN	1. Menerapkan prinsip merit dalam rekrutmen, promosi, dan mutasi ASN 2. Mengoptimalkan sistem *reward and punishment* berbasis kinerja 3. Mengembangkan sistem manajemen kinerja yang terintegrasi dan berbasis bukti (*evidence-based*) 4. Meningkatkan kualitas sistem penilaian kinerja ASN 5. Mendorong budaya kerja ASN yang berorientasi pada pelayanan publik 6. Menyusun dan memperkuat kebijakan serta regulasi 8. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pengembangan kompetensi ASN
Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	3. Penguatan pemanfaatan hasil riset dan inovasi berbasis kebutuhan daerah	1. Mengembangkan teknologi tepat guna dan membangun ekosistem inovasi yang inklusif dan kolaboratif. 2. Mendorong perumusan kebijakan pembangunan daerah berbasis riset, kajian, dan data 3. Memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga	1. Mengembangkan teknologi tepat guna dan membangun ekosistem inovasi yang inklusif dan kolaboratif. 2. Mendorong perumusan kebijakan pembangunan daerah berbasis riset, kajian, dan data 3. Memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga	1. Mengembangkan teknologi tepat guna dan membangun ekosistem inovasi yang inklusif dan kolaboratif. 2. Mendorong perumusan kebijakan pembangunan daerah berbasis riset, kajian, dan data 3. Memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga	1. Mengembangkan teknologi tepat guna dan membangun ekosistem inovasi yang inklusif dan kolaboratif. 2. Mendorong perumusan kebijakan pembangunan daerah berbasis riset, kajian, dan data 3. Memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan dunia	1. Mengembangkan teknologi tepat guna dan membangun ekosistem inovasi yang inklusif dan kolaboratif. 2. Mendorong perumusan kebijakan pembangunan daerah berbasis riset, kajian, dan data 3. Memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga

SASARAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI				
		TAHUN I (2026)	**TAHUN II (2027)**	**TAHUN III (2028)**	**TAHUN IV (2029)**	**TAHUN V (2030)**
		penelitian, dan dunia usaha (triple helix) 4. Meningkatkan kapasitas daerah melalui pendirian pusat inovasi dan pelatihan kreativitas 5. Mengembangkan riset terapan yang sesuai dengan kebutuhan sektoral dan potensi ekonomi lokal 8. Mendorong pengembangan budaya inovasi masyarakat melalui program Nagari Inovatif	penelitian, dan dunia usaha (triple helix) 4. Meningkatkan kapasitas daerah melalui pendirian pusat inovasi dan pelatihan kreativitas 5. Mengembangkan riset terapan yang sesuai dengan kebutuhan sektoral dan potensi ekonomi lokal 8. Mendorong pengembangan budaya inovasi masyarakat melalui program Nagari Inovatif	penelitian, dan dunia usaha (triple helix) 4. Meningkatkan kapasitas daerah melalui pendirian pusat inovasi dan pelatihan kreativitas 5. Mengembangkan riset terapan yang sesuai dengan kebutuhan sektoral dan potensi ekonomi lokal 8. Mendorong pengembangan budaya inovasi masyarakat melalui program Nagari Inovatif	usaha (triple helix) 4. Meningkatkan kapasitas daerah melalui pendirian pusat inovasi dan pelatihan kreativitas 5. Mengembangkan riset terapan yang sesuai dengan kebutuhan sektoral dan potensi ekonomi lokal 9. Mendorong pengembangan budaya inovasi masyarakat melalui program Nagari Inovatif	penelitian, dan dunia usaha (triple helix) 4. Meningkatkan kapasitas daerah melalui pendirian pusat inovasi dan pelatihan kreativitas 5. Mengembangkan riset terapan yang sesuai dengan kebutuhan sektoral dan potensi ekonomi lokal 7. Mendorong pengembangan budaya inovasi masyarakat melalui program Nagari Inovatif
Meningkatnya transformasi digital pelayanan publik	4. Transformasi digital layanan publik	1. Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi yang andal dan aman 2. Memperkuat keamanan siber dan perlindungan data dalam sistem layanan digital 3. Meningkatkan literasi digital aparatur dan masyarakat guna mengoptimalkan pemanfaatan layanan publik digital. 4. Mengembangkan layanan publik digital yang responsif, transparan, ramah pengguna, serta adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. 5. Meningkatkan akuntabilitas dan	1. Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi yang andal dan aman 2. Memperkuat keamanan siber dan perlindungan data dalam sistem layanan digital 3. Meningkatkan literasi digital aparatur dan masyarakat guna mengoptimalkan pemanfaatan layanan publik digital. 4. Mengembangkan layanan publik digital yang responsif, transparan, ramah pengguna, serta adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. 5. Meningkatkan akuntabilitas dan	1. Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi yang andal dan aman 2. Memperkuat keamanan siber dan perlindungan data dalam sistem layanan digital 3. Meningkatkan literasi digital aparatur dan masyarakat guna mengoptimalkan pemanfaatan layanan publik digital. 4. Mengembangkan layanan publik digital yang responsif, transparan, ramah pengguna, serta adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. 5. Meningkatkan akuntabilitas dan	1. Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi yang andal dan aman 2. Memperkuat keamanan siber dan perlindungan data dalam sistem layanan digital 3. Meningkatkan literasi digital aparatur dan masyarakat guna mengoptimalkan pemanfaatan layanan publik digital. 4. Mengembangkan layanan publik digital yang responsif, transparan, ramah pengguna, serta adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. 5. Meningkatkan keterbukaan informasi	1. Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi yang andal dan aman 2. Memperkuat keamanan siber dan perlindungan data dalam sistem layanan digital 3. Meningkatkan literasi digital aparatur dan masyarakat guna mengoptimalkan pemanfaatan layanan publik digital. 4. Mengembangkan layanan publik digital yang responsif, transparan, ramah pengguna, serta adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. 5. Meningkatkan akuntabilitas dan

SASARAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI				
		TAHUN I (2026)	TAHUN II (2027)	TAHUN III (2028)	TAHUN IV (2029)	TAHUN V (2030)
		keterbukaan informasi publik 6. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan data sektoral untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti 6. Mengoptimalkan dashboard data sektoral terintegrasi	keterbukaan informasi publik 6. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan data sektoral untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti 6. Mengoptimalkan dashboard data sektoral terintegrasi	keterbukaan informasi publik 6. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan data sektoral untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti 6. Mengoptimalkan dashboard data sektoral terintegrasi	publik 6. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan data sektoral untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti 6. Mengoptimalkan dashboard data sektoral terintegrasi	keterbukaan informasi publik 6. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan data sektoral untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti 6. Mengoptimalkan dashboard data sektoral terintegrasi

b. Arah Kebijakan Misi 2 : Menciptakan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing

SASARAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI				
		TAHUN I (2026)	TAHUN II (2027)	TAHUN III (2028)	TAHUN IV (2029)	TAHUN V (2030)
1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan berdaya saing	1. Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan	1. Meningkatkan pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu 2. Meningkatkan penyediaan seragam gratis bagi siswa SD dan SMP 3. Mendorong percepatan wajib belajar 13 tahun 4. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan antar wilayah 5. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan	1. Meningkatkan pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu 2. Meningkatkan penyediaan seragam gratis bagi siswa SD dan SMP 3. Mendorong percepatan wajib belajar 13 tahun 4. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan antar wilayah 5. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan	1. Meningkatkan pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu 2. Meningkatkan penyediaan seragam gratis bagi siswa SD dan SMP 3. Mendorong percepatan wajib belajar 13 tahun 4. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan antar wilayah 5. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah	1. Meningkatkan pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu 2. Meningkatkan penyediaan seragam gratis bagi siswa SD dan SMP 3. Mendorong percepatan wajib belajar 13 tahun 4. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan antar wilayah 5. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah	1. Meningkatkan pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu 2. Meningkatkan penyediaan seragam gratis bagi siswa SD dan SMP 3. Mendorong percepatan wajib belajar 13 tahun 4. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan antar wilayah 5. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan

SASARAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI				
		TAHUN I (2026)	TAHUN II (2027)	TAHUN III (2028)	TAHUN IV (2029)	TAHUN V (2030)
		dasar dan menengah 6. Meningkatkan literasi dan budaya baca masyarakat 7. Memperluas jangkauan layanan literasi dan perpustakaan berbasis inklusi sosial 8. Meningkatkan akses dan partisipasi layanan PAUD yang berkualitas dan inklusif.	dasar dan menengah 6. Meningkatkan literasi dan budaya baca masyarakat 7. Memperluas jangkauan layanan literasi dan perpustakaan berbasis inklusi sosial 8. Meningkatkan akses dan partisipasi layanan PAUD yang berkualitas dan inklusif.	6. Meningkatkan literasi dan budaya baca masyarakat 7. Memperluas jangkauan layanan literasi dan perpustakaan berbasis inklusi sosial 8. Meningkatkan akses dan partisipasi layanan PAUD yang berkualitas dan inklusif.	6. Meningkatkan literasi dan budaya baca masyarakat 7. Memperluas jangkauan layanan literasi dan perpustakaan berbasis inklusi sosial 8. Meningkatkan akses dan partisipasi layanan PAUD yang berkualitas dan inklusif.	dasar dan menengah 6. Meningkatkan literasi dan budaya baca masyarakat 7. Memperluas jangkauan layanan literasi dan perpustakaan berbasis inklusi sosial 8. Meningkatkan akses dan partisipasi layanan PAUD yang berkualitas dan inklusif.
	2. Peningkatan mutu pendidikan berorientasi pada kompetensi, karakter, dan daya saing	1. Meningkatkan kompetensi pendidik dan kualitas pembelajaran berbasis kompetensi 1. Menguatkan pendidikan karakter untuk membentuk profil pelajar yang berintegritas dan berdaya saing 2. Meningkatkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan 3. Mengintegrasikan program literasi dan budaya baca dalam ekosistem pembelajaran 4. Mengembangkan pendidikan vokasi dan pelatihan yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	1. Meningkatkan kompetensi pendidik dan kualitas pembelajaran berbasis kompetensi 1. Menguatkan pendidikan karakter untuk membentuk profil pelajar yang berintegritas dan berdaya saing 2. Meningkatkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan 3. Mengintegrasikan program literasi dan budaya baca dalam ekosistem pembelajaran 4. Mengembangkan pendidikan vokasi dan pelatihan yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	5. Meningkatkan kompetensi pendidik dan kualitas pembelajaran berbasis kompetensi 1. Menguatkan pendidikan karakter untuk membentuk profil pelajar yang berintegritas dan berdaya saing 2. Meningkatkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan 3. Mengintegrasikan program literasi dan budaya baca dalam ekosistem pembelajaran 4. Mengembangkan pendidikan vokasi dan pelatihan yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	5. Meningkatkan kompetensi pendidik dan kualitas pembelajaran berbasis kompetensi 1. Menguatkan pendidikan karakter untuk membentuk profil pelajar yang berintegritas dan berdaya saing 2. Meningkatkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan 3. Mengintegrasikan program literasi dan budaya baca dalam ekosistem pembelajaran 4. Mengembangkan pendidikan vokasi dan pelatihan yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	5. Meningkatkan kompetensi pendidik dan kualitas pembelajaran berbasis kompetensi 1. Menguatkan pendidikan karakter untuk membentuk profil pelajar yang berintegritas dan berdaya saing 2. Meningkatkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan 3. Mengintegrasikan program literasi dan budaya baca dalam ekosistem pembelajaran 4. Mengembangkan pendidikan vokasi dan pelatihan yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja

SASARAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI				
		TAHUN I (2026)	TAHUN II (2027)	TAHUN III (2028)	TAHUN IV (2029)	TAHUN V (2030)
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau.	1. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan	1. Memperkuat kapasitas dan peran kader kesehatan dalam mendukung layanan kesehatan masyarakat 2. Memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dengan pembangunan rumah sakit daerah tipe D 3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi berbasis keluarga dan terintegrasi 4. Meningkatkan akses dan koordinasi layanan rujukan	1. Memperkuat kapasitas dan peran kader kesehatan dalam mendukung layanan kesehatan masyarakat 2. Memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dengan pembangunan rumah sakit daerah tipe D 3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi berbasis keluarga dan terintegrasi 4. Meningkatkan akses dan koordinasi layanan rujukan	1. Memperkuat kapasitas dan peran kader kesehatan dalam mendukung layanan kesehatan masyarakat 2. Memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dengan pembangunan rumah sakit daerah tipe D 3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi berbasis keluarga dan terintegrasi 4. Meningkatkan akses dan koordinasi layanan rujukan	1. Memperkuat kapasitas dan peran kader kesehatan dalam mendukung layanan kesehatan masyarakat 2. Memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dengan pembangunan rumah sakit daerah tipe D 3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi berbasis keluarga dan terintegrasi 4. Meningkatkan akses dan koordinasi layanan rujukan	1. Memperkuat kapasitas dan peran kader kesehatan dalam mendukung layanan kesehatan masyarakat 2. Memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dengan pembangunan rumah sakit daerah tipe D 3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi berbasis keluarga dan terintegrasi 4. Meningkatkan akses dan koordinasi layanan rujukan
	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat sesuai siklus hidup	1. Meningkatkan upaya *promotif preventif* berbasis Nagari 2. Memperkuat upaya pencegahan penyakit menular dan tidak menular 3. Meningkatkan intervensi gizi seimbang untuk penanggulangan stunting dan gizi buruk anak 4. Meningkatkan kesehatan ibu dan remaja melalui upaya promotif–preventif 5. Meningkatkan akses layanan kesehatan lansia melalui kunjungan langsung Dokter dan Perawat Keliling	1. Meningkatkan upaya *promotif preventif* berbasis Nagari 2. Memperkuat upaya pencegahan penyakit menular dan tidak menular 3. Meningkatkan intervensi gizi seimbang untuk penanggulangan stunting dan gizi buruk anak 4. Meningkatkan kesehatan ibu dan remaja melalui upaya promotif–preventif 5. Meningkatkan akses layanan kesehatan lansia melalui kunjungan langsung Dokter dan Perawat Keliling	1. Meningkatkan upaya *promotif preventif* berbasis Nagari 2. Memperkuat upaya pencegahan penyakit menular dan tidak menular 3. Meningkatkan intervensi gizi seimbang untuk penanggulangan stunting dan gizi buruk anak 4. Meningkatkan kesehatan ibu dan remaja melalui upaya promotif–preventif 5. Meningkatkan akses layanan kesehatan lansia melalui kunjungan langsung Dokter dan Perawat Keliling 6. Memperkuat layanan kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan untuk	1. Meningkatkan upaya *promotif* preventif berbasis Nagari 2. Memperkuat upaya pencegahan penyakit menular dan tidak menular 3. Meningkatkan intervensi gizi seimbang untuk penanggulangan stunting dan gizi buruk anak 4. Meningkatkan kesehatan ibu dan remaja melalui upaya promotif–preventif 5. Meningkatkan akses layanan kesehatan lansia melalui kunjungan langsung Dokter dan Perawat Keliling 6. Memperkuat layanan kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan untuk	1. Meningkatkan upaya *promotif* preventif berbasis Nagari 2. Memperkuat upaya pencegahan penyakit menular dan tidak menular 3. Meningkatkan intervensi gizi seimbang untuk penanggulangan stunting dan gizi buruk anak 4. Meningkatkan kesehatan ibu dan remaja melalui upaya promotif–preventif 5. Meningkatkan akses layanan kesehatan lansia melalui kunjungan langsung Dokter dan Perawat Keliling

SASARAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI				
		TAHUN I (2026)	TAHUN II (2027)	TAHUN III (2028)	TAHUN IV (2029)	TAHUN V (2030)
		6. Memperkuat layanan kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan untuk pencegahan stunting 7. Meningkatkan ketahanan gizi keluarga dan masyarakat secara berkelanjutan	6. Memperkuat layanan kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan untuk pencegahan stunting 7. Meningkatkan ketahanan gizi keluarga dan masyarakat secara berkelanjutan	pencegahan stunting 7. Meningkatkan ketahanan gizi keluarga dan masyarakat secara berkelanjutan	pencegahan stunting 7. Meningkatkan ketahanan gizi keluarga dan masyarakat secara berkelanjutan	6. Memperkuat layanan kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan untuk pencegahan stunting 7. Meningkatkan ketahanan gizi keluarga dan masyarakat secara berkelanjutan
	3. Penguatan sistem ketahanan kesehatan daerah secara menyeluruh	1. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan koordinasi lintas program serta lintas sektor 2. Memperkuat komitmen dan koordinasi pemangku kepentingan 3. Mendorong penguatan layanan kesehatan primer dan rujukan 4. Memperluas akses layanan kesehatan melalui pemberian BPJS gratis	1. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan koordinasi lintas program serta lintas sektor 2. Memperkuat komitmen dan koordinasi pemangku kepentingan 3. Mendorong penguatan layanan kesehatan primer dan rujukan 4. Memperluas akses layanan kesehatan melalui pemberian BPJS gratis	1. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan koordinasi lintas program serta lintas sektor 2. Memperkuat komitmen dan koordinasi pemangku kepentingan 3. Mendorong penguatan layanan kesehatan primer dan rujukan 4. Memperluas akses layanan kesehatan melalui pemberian BPJS gratis	1. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan koordinasi lintas program serta lintas sektor 2. Memperkuat komitmen dan koordinasi pemangku kepentingan 3. Mendorong penguatan layanan kesehatan primer dan rujukan 4. Memperluas akses layanan kesehatan melalui pemberian BPJS gratis	1. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan koordinasi lintas program serta lintas sektor 2. Memperkuat komitmen dan koordinasi pemangku kepentingan 3. Mendorong penguatan layanan kesehatan primer dan rujukan 4. Memperluas akses layanan kesehatan melalui pemberian BPJS gratis
Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak	1. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga 2. Meningkatkan partisipasi keluarga melalui program pembinaan keluarga dan pusat informasi remaja. 3. Menguatkan sistem data dan perencanaan pembangunan berbasis keluarga dan bukti.	1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga 2. Meningkatkan partisipasi keluarga melalui program pembinaan keluarga dan pusat informasi remaja. 3. Menguatkan sistem data dan perencanaan pembangunan berbasis keluarga dan bukti.	1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga 2. Meningkatkan partisipasi keluarga melalui program pembinaan keluarga dan pusat informasi remaja. 3. Menguatkan sistem data dan perencanaan pembangunan berbasis keluarga dan bukti. 4. Mengembangkan	1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga 2. Meningkatkan partisipasi keluarga melalui program pembinaan keluarga dan pusat informasi remaja. 3. Menguatkan sistem data dan perencanaan pembangunan berbasis keluarga dan bukti. 4. Mengembangkan kemitraan lintas sektor	1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga 2. Meningkatkan partisipasi keluarga melalui program pembinaan keluarga dan pusat informasi remaja. 3. Menguatkan sistem data dan perencanaan pembangunan berbasis keluarga dan bukti.

SASARAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI				
		TAHUN I (2026)	TAHUN II (2027)	TAHUN III (2028)	TAHUN IV (2029)	TAHUN V (2030)
		4. Mengembangkan kemitraan lintas sektor	4. Mengembangkan kemitraan lintas sektor	kemitraan lintas sektor		4. Mengembangkan kemitraan lintas sektor
	2. Penguatan perlindungan perempuan dan anak	1. Meningkatkan partisipasi dan kapasitas perempuan dalam pendidikan, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan 2. Mengarusutamakan perspektif gender dalam seluruh siklus kebijakan pembangunan daerah 3. Meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan perkawinan usia anak 4. Memperkuat layanan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan perkawinan anak 5. Mengembangkan sistem perlindungan anak berbasis keluarga, komunitas, dan kebijakan lokal yang inklusif dan adaptif 6. Membangun sistem informasi digital terpadu untuk pelaporan, pemantauan, dan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk perkawinan anak	1. Meningkatkan partisipasi dan kapasitas perempuan dalam pendidikan, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan 2. Mengarusutamakan perspektif gender dalam seluruh siklus kebijakan pembangunan daerah 3. Meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan perkawinan usia anak 4. Memperkuat layanan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan perkawinan anak 5. Mengembangkan sistem perlindungan anak berbasis keluarga, komunitas, dan kebijakan lokal yang inklusif dan adaptif 6. Membangun sistem informasi digital terpadu untuk pelaporan, pemantauan, dan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk perkawinan anak	1. Meningkatkan partisipasi dan kapasitas perempuan dalam pendidikan, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan 2. Mengarusutamakan perspektif gender dalam seluruh siklus kebijakan pembangunan daerah 3. Meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan perkawinan usia anak 4. Memperkuat layanan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan perkawinan anak 5. Mengembangkan sistem perlindungan anak berbasis keluarga, komunitas, dan kebijakan lokal yang inklusif dan adaptif 6. Membangun sistem informasi digital terpadu untuk pelaporan, pemantauan, dan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk perkawinan anak	1. Meningkatkan partisipasi dan kapasitas perempuan dalam pendidikan, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan 2. Mengarusutamakan perspektif gender dalam seluruh siklus kebijakan pembangunan daerah 3. Meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan perkawinan usia anak 4. Memperkuat layanan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan perkawinan anak 5. Mengembangkan sistem perlindungan anak berbasis keluarga, komunitas, dan kebijakan lokal yang inklusif dan adaptif 6. Membangun sistem informasi digital terpadu untuk pelaporan, pemantauan, dan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk perkawinan anak

SASARAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI				
		TAHUN I (2026)	TAHUN II (2027)	TAHUN III (2028)	TAHUN IV (2029)	TAHUN V (2030)
Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusi	3. Penguatan sistem perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif	1. Meningkatkan layanan terpadu dan sistem perlindungan sosial yang adil, inklusif dan merata 2. Memperluas akses rumah layak huni, pendidikan inklusif, dan bantuan sosial 3. Memperkuat koordinasi lintas lembaga dan sektor dalam pemberdayaan sosial serta perlindungan masyarakat 4. Memperkuat sistem data terpadu kesejahteraan sosial	1. Meningkatkan layanan terpadu dan sistem perlindungan sosial yang adil, inklusif dan merata 2. Memperluas akses rumah layak huni, pendidikan inklusif, dan bantuan sosial 3. Memperkuat koordinasi lintas lembaga dan sektor dalam pemberdayaan sosial serta perlindungan masyarakat 4. Memperkuat sistem data terpadu kesejahteraan sosial	1. Meningkatkan layanan terpadu dan sistem perlindungan sosial yang adil, inklusif dan merata 2. Memperluas akses rumah layak huni, pendidikan inklusif, dan bantuan sosial 3. Memperkuat koordinasi lintas lembaga dan sektor dalam pemberdayaan sosial serta perlindungan masyarakat 4. Memperkuat sistem data terpadu kesejahteraan sosial	1. Meningkatkan layanan terpadu dan sistem perlindungan sosial yang adil, inklusif dan merata 2. Memperluas akses rumah layak huni, pendidikan inklusif, dan bantuan sosial 3. Memperkuat koordinasi lintas lembaga dan sektor dalam pemberdayaan sosial serta perlindungan masyarakat 4. Memperkuat sistem data terpadu kesejahteraan sosial	1. Meningkatkan layanan terpadu dan sistem perlindungan sosial yang adil, inklusif dan merata 2. Memperluas akses rumah layak huni, pendidikan inklusif, dan bantuan sosial 3. Memperkuat koordinasi lintas lembaga dan sektor dalam pemberdayaan sosial serta perlindungan masyarakat 4. Memperkuat sistem data terpadu kesejahteraan sosial

c. Arah Kebijakan Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju, dan Merata

SASARAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI				
		TAHUN I (2026)	TAHUN II (2027)	TAHUN III (2028)	TAHUN IV (2029)	TAHUN V (2030)
1. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap perekonomian	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dan peternakan	1. Mendorong diversifikasi komoditas unggulan bernilai ekonomi tinggi 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian 3. Memperkuat	1. Mendorong diversifikasi komoditas unggulan bernilai ekonomi tinggi 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian 3. Memperkuat	1. Mendorong diversifikasi komoditas unggulan bernilai ekonomi tinggi 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian 3. Memperkuat	1. Mendorong diversifikasi komoditas unggulan bernilai ekonomi tinggi 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian 3. Memperkuat pengendalian	1. Mendorong diversifikasi komoditas unggulan bernilai ekonomi tinggi 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian 3. Memperkuat

SASARAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI				
		TAHUN I (2026)	TAHUN II (2027)	TAHUN III (2028)	TAHUN IV (2029)	TAHUN V (2030)
daerah		pengendalian kesehatan hewan dan layanan veteriner 4. Mengembangkan kelembagaan petani dan pelaku usaha serta mendorong regenerasi 5. Meningkatkan akses pembiayaan dan kemitraan usaha	pengendalian kesehatan hewan dan layanan veteriner 4. Mengembangkan kelembagaan petani dan pelaku usaha serta mendorong regenerasi 5. Meningkatkan akses pembiayaan dan kemitraan usaha	pengendalian kesehatan hewan dan layanan veteriner 4. Mengembangkan kelembagaan petani dan pelaku usaha serta mendorong regenerasi 5. Meningkatkan akses pembiayaan dan kemitraan usaha	kesehatan hewan dan layanan veteriner 4. Mengembangkan kelembagaan petani dan pelaku usaha serta mendorong regenerasi 5. Meningkatkan akses pembiayaan dan kemitraan usaha	pengendalian kesehatan hewan dan layanan veteriner 4. Mengembangkan kelembagaan petani dan pelaku usaha serta mendorong regenerasi 5. Meningkatkan akses pembiayaan dan kemitraan usaha
	Pengembangan sektor perikanan untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi biru	1. Meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan 2. Meningkatkan daya saing, nilai tambah, dan hilirisasi produk perikanan 3. Meningkatkan akses permodalan dan pembiayaan bagi pelaku usaha perikanan 4. Meningkatkan kelembagaan pelaku usaha perikanan 5. Pengembangan kelembagaan untuk peningkatan usaha manfataan usaha tambak (dukungan	1. Meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan 2. Meningkatkan daya saing, nilai tambah, dan hilirisasi produk perikanan 3. Meningkatkan akses permodalan dan pembiayaan bagi pelaku usaha perikanan 4. Meningkatkan kelembagaan pelaku usaha perikanan 5. Pengembangan kelembagaan untuk peningkatan usaha manfataan usaha tambak (dukungan	1. Meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan 2. Meningkatkan daya saing, nilai tambah, dan hilirisasi produk perikanan 3. Meningkatkan akses permodalan dan pembiayaan bagi pelaku usaha perikanan 4. Meningkatkan kelembagaan pelaku usaha perikanan 5. Pengembangan kelembagaan untuk peningkatan usaha manfataan usaha tambak (dukungan pengusaha) terhadap	1. Meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan 2. Meningkatkan daya saing, nilai tambah, dan hilirisasi produk perikanan 3. Meningkatkan akses permodalan dan pembiayaan bagi pelaku usaha perikanan 4. Meningkatkan kelembagaan pelaku usaha perikanan 5. Pengembangan kelembagaan untuk peningkatan usaha manfataan usaha tambak (dukungan pengusaha) terhadap	1. Meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan 2. Meningkatkan daya saing, nilai tambah, dan hilirisasi produk perikanan 3. Meningkatkan akses permodalan dan pembiayaan bagi pelaku usaha perikanan 4. Meningkatkan kelembagaan pelaku usaha perikanan 5. Pengembangan kelembagaan untuk peningkatan usaha manfataan usaha tambak (dukungan

SASARAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI				
		TAHUN I (2026)	**TAHUN II (2027)**	**TAHUN III (2028)**	**TAHUN IV (2029)**	**TAHUN V (2030)**
		pengusaha) terhadap peningkatan ekonomi lokal	pengusaha) terhadap peningkatan ekonomi lokal	peningkatan ekonomi lokal	peningkatan ekonomi lokal	pengusaha) terhadap peningkatan ekonomi lokal
2. Meningkatnya kontribusi perdagangan, UMKM dan industri berbasis sektor unggulan	2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing sektor perdagangan	1. Memperkuat infrastruktur dan sistem distribusi perdagangan 2. Meningkatkan kualitas perdagangan melalui standarisasi dan perlindungan konsumen 3. Memperkuat kelembagaan pelaku usaha serta membangun kemitraan perdagangan	1. Memperkuat infrastruktur dan sistem distribusi perdagangan 2. Meningkatkan kualitas perdagangan melalui standarisasi dan perlindungan konsumen 3. Memperkuat kelembagaan pelaku usaha serta membangun kemitraan perdagangan	1. Memperkuat infrastruktur dan sistem distribusi perdagangan 2. Meningkatkan kualitas perdagangan melalui standarisasi dan perlindungan konsumen 3. Memperkuat kelembagaan pelaku usaha serta membangun kemitraan perdagangan	1. Memperkuat infrastruktur dan sistem distribusi perdagangan 2. Meningkatkan kualitas perdagangan melalui standarisasi dan perlindungan konsumen 3. Memperkuat kelembagaan pelaku usaha serta membangun kemitraan perdagangan	1. Memperkuat infrastruktur dan sistem distribusi perdagangan 2. Meningkatkan kualitas perdagangan melalui standarisasi dan perlindungan konsumen 3. Memperkuat kelembagaan pelaku usaha serta membangun kemitraan perdagangan
	1. Peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM dan industri pengolahan	1. Meningkatkan nilai tambah produk koperasi dan UMKM 2. Menyederhanakan regulasi dan perizinan usaha mikro dan kecil 3. Memperluas akses pembiayaan mikro, teknologi digital sederhana, dan platform pemasaran *online*	1. Meningkatkan nilai tambah produk koperasi dan UMKM 2. Menyederhanakan regulasi dan perizinan usaha mikro dan kecil 3. Memperluas akses pembiayaan mikro, teknologi digital sederhana, dan platform pemasaran *online*	1. Meningkatkan nilai tambah produk koperasi dan UMKM 2. Menyederhanakan regulasi dan perizinan usaha mikro dan kecil 3. Memperluas akses pembiayaan mikro, teknologi digital sederhana, dan platform pemasaran *online* 4. Mengembangkan	1. Meningkatkan nilai tambah produk koperasi dan UMKM 2. Menyederhanakan regulasi dan perizinan usaha mikro dan kecil 3. Memperluas akses pembiayaan mikro, teknologi digital sederhana, dan platform pemasaran *online* 4. Mengembangkan	1. Meningkatkan nilai tambah produk koperasi dan UMKM 2. Menyederhanakan regulasi dan perizinan usaha mikro dan kecil 3. Memperluas akses pembiayaan mikro, teknologi digital sederhana, dan platform pemasaran *online*

SASARAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI				
		TAHUN I (2026)	**TAHUN II (2027)**	**TAHUN III (2028)**	**TAHUN IV (2029)**	**TAHUN V (2030)**
		4. Mengembangkan kapasitas pelaku usaha kecil 5. Mengembangan produk unggulan berbasis kawasan melalui OVOP (*One Village One Product*). 6. Mendorong inovasi dan hilirisasi produk industri pengolahan 7. Memperkuat regulasi, insentif, dan iklim investasi industri 8. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan efisiensi produksi 9. Mendorong kemitraan industri dengan lembaga riset, pendidikan vokasi, dan UMKM	4. Mengembangkan kapasitas pelaku usaha kecil 5. Mengembangan produk unggulan berbasis kawasan melalui OVOP (*One Village One Product*). 6. Mendorong inovasi dan hilirisasi produk industri pengolahan 7. Memperkuat regulasi, insentif, dan iklim investasi industri 8. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan efisiensi produksi 9. Mendorong kemitraan industri dengan lembaga riset, pendidikan vokasi	kapasitas pelaku usaha kecil 5. Mengembangan produk unggulan berbasis kawasan melalui OVOP (*One Village One Product*). 6. Mendorong inovasi dan hilirisasi produk industri pengolahan 7. Memperkuat regulasi, insentif, dan iklim investasi industri 8. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan efisiensi produksi 9. Mendorong kemitraan industri dengan lembaga riset, pendidikan vokasi	kapasitas pelaku usaha kecil 5. Mengembangan produk unggulan berbasis kawasan melalui OVOP (*One Village One Product*). 6. Mendorong inovasi dan hilirisasi produk industri pengolahan 7. Memperkuat regulasi, insentif, dan iklim investasi industri 8. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan efisiensi produksi 9. Mendorong kemitraan industri dengan lembaga riset, pendidikan vokasi	4. Mengembangkan kapasitas pelaku usaha kecil 5. Mengembangan produk unggulan berbasis kawasan melalui OVOP (*One Village One Product*). 6. Mendorong inovasi dan hilirisasi produk industri pengolahan 7. Memperkuat regulasi, insentif, dan iklim investasi industri 8. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan efisiensi produksi 9. Mendorong kemitraan industri dengan lembaga riset, pendidikan vokasi
3. Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Penguatan daya saing pariwisata berkualitas dan berkelanjutan	1. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur destinasi pariwisata 2. Mengembangkan atraksi wisata berbasis budaya, alam, dan kearifan lokal	1. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur destinasi pariwisata 2. Mengembangkan atraksi wisata berbasis budaya, alam, dan kearifan lokal	1. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur destinasi pariwisata 2. Mengembangkan atraksi wisata berbasis budaya, alam, dan kearifan lokal	1. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur destinasi pariwisata 2. Mengembangkan atraksi wisata berbasis budaya, alam, dan kearifan lokal 3. Menguatkan promosi destinasi melalui media	1. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur destinasi pariwisata 2. Mengembangkan atraksi wisata berbasis budaya, alam, dan kearifan lokal

SASARAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI				
		TAHUN I (2026)	TAHUN II (2027)	TAHUN III (2028)	TAHUN IV (2029)	TAHUN V (2030)
		3. Menguatkan promosi destinasi melalui media digital, event, dan kemitraan 4. Meningkatkan kompetensi pelaku pariwisata melalui pelatihan dan sertifikasi 5. Mendorong penguatan kelembagaan pariwisata nagari melalui revitalisasi POKDARWIS	3. Menguatkan promosi destinasi melalui media digital, event, dan kemitraan 4. Meningkatkan kompetensi pelaku pariwisata melalui pelatihan dan sertifikasi 5. Mendorong penguatan kelembagaan pariwisata nagari melalui revitalisasi POKDARWIS	3. Menguatkan promosi destinasi melalui media digital, event, dan kemitraan 4. Meningkatkan kompetensi pelaku pariwisata melalui pelatihan dan sertifikasi 5. Mendorong penguatan kelembagaan pariwisata nagari melalui revitalisasi POKDARWIS	digital, event, dan kemitraan 4. Meningkatkan kompetensi pelaku pariwisata melalui pelatihan dan sertifikasi 5. Mendorong penguatan kelembagaan pariwisata nagari melalui revitalisasi POKDARWIS	3. Menguatkan promosi destinasi melalui media digital, event, dan kemitraan 4. Meningkatkan kompetensi pelaku pariwisata melalui pelatihan dan sertifikasi 5. Mendorong penguatan kelembagaan pariwisata nagari melalui revitalisasi POKDARWIS
	3. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual	1. Meningkatkan kapasitas dan kreativitas pelaku ekonomi kreatif 2. Memperluas akses pasar produk kreatif melalui optimalisasi digitalisasi dan *e-commerce* 3. Memperkuat akses pembiayaan dan insentif bagi usaha kreatif 4. Meningkatkan perlindungan dan pemanfaatan hak kekayaan intelektual 5. Menguatkan jejaring	1. Meningkatkan kapasitas dan kreativitas pelaku ekonomi kreatif 2. Memperluas akses pasar produk kreatif melalui optimalisasi digitalisasi dan *e-commerce* 3. Memperkuat akses pembiayaan dan insentif bagi usaha kreatif 4. Meningkatkan perlindungan dan pemanfaatan hak kekayaan intelektual 5. Menguatkan jejaring	1. Meningkatkan kapasitas dan kreativitas pelaku ekonomi kreatif 2. Memperluas akses pasar produk kreatif melalui optimalisasi digitalisasi dan *e-commerce* 3. Memperkuat akses pembiayaan dan insentif bagi usaha kreatif 4. Meningkatkan perlindungan dan pemanfaatan hak kekayaan intelektual 5. Menguatkan jejaring	1. Meningkatkan kapasitas dan kreativitas pelaku ekonomi kreatif 2. Memperluas akses pasar produk kreatif melalui optimalisasi digitalisasi dan *e-commerce* 3. Memperkuat akses pembiayaan dan insentif bagi usaha kreatif 4. Meningkatkan perlindungan dan pemanfaatan hak kekayaan intelektual 5. Menguatkan jejaring	1. Meningkatkan kapasitas dan kreativitas pelaku ekonomi kreatif 2. Memperluas akses pasar produk kreatif melalui optimalisasi digitalisasi dan *e-commerce* 3. Memperkuat akses pembiayaan dan insentif bagi usaha kreatif 4. Meningkatkan perlindungan dan pemanfaatan hak kekayaan intelektual 5. Menguatkan jejaring

SASARAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI				
		TAHUN I (2026)	**TAHUN II (2027)**	**TAHUN III (2028)**	**TAHUN IV (2029)**	**TAHUN V (2030)**
		kolaborasi ekosistem ekonomi kreatif 6. Memperkuat kelembagaan ekonomi kreatif daerah 7. Mengembangkan ruang publik kreatif dan pusat kegiatan kreativitas (*Youth Centre*) 8. Mengembangkan pusat wisata religi dan budaya Syech Burhannuddin	kolaborasi ekosistem ekonomi kreatif 6. Memperkuat kelembagaan ekonomi kreatif daerah 7. Mengembangkan ruang publik kreatif dan pusat kegiatan kreativitas (*Youth Centre*) 8. Mengembangkan pusat wisata religi dan budaya Syech Burhannuddin	kolaborasi ekosistem ekonomi kreatif 6. Memperkuat kelembagaan ekonomi kreatif daerah 7. Mengembangkan ruang publik kreatif dan pusat kegiatan kreativitas (*Youth Centre*) 8. Mengembangkan pusat wisata religi dan budaya Syech Burhannuddin	kolaborasi ekosistem ekonomi kreatif 6. Memperkuat kelembagaan ekonomi kreatif daerah 7. Mengembangkan ruang publik kreatif dan pusat kegiatan kreativitas (*Youth Centre*) 8. Mengembangkan pusat wisata religi dan budaya Syech Burhannuddin	kolaborasi ekosistem ekonomi kreatif 6. Memperkuat kelembagaan ekonomi kreatif daerah 7. Mengembangkan ruang publik kreatif dan pusat kegiatan kreativitas (*Youth Centre*) 8. Mengembangkan pusat wisata religi dan budaya Syech Burhannuddin
4. Meningkatnya Kemudahan Investasi	1. Penguatan Ekosistem dan Iklim Investasi Daerah	1. Menguatkan promosi, fasilitasi, dan koordinasi investasi terintegrasi 2. Mengembangkan kawasan industri dan sektor unggulan investasi 3. Meningkatkan literasi keuangan dan peran lembaga intermediasi 4. Menyederhanakan regulasi dan perizinan 5. Mengoptimalkan kapasitas fiskal daerah dan inovasi pembiayaan	1. Menguatkan promosi, fasilitasi, dan koordinasi investasi terintegrasi 2. Mengembangkan kawasan industri dan sektor unggulan investasi 3. Meningkatkan literasi keuangan dan peran lembaga intermediasi 4. Menyederhanakan regulasi dan perizinan 5. Mengoptimalkan kapasitas fiskal daerah dan inovasi pembiayaan	1. Menguatkan promosi, fasilitasi, dan koordinasi investasi terintegrasi 2. Mengembangkan kawasan industri dan sektor unggulan investasi 3. Meningkatkan literasi keuangan dan peran lembaga intermediasi 4. Menyederhanakan regulasi dan perizinan 5. Mengoptimalkan kapasitas fiskal daerah dan inovasi pembiayaan 6. Mendorong keterlibatan sektor	1. Menguatkan promosi, fasilitasi, dan koordinasi investasi terintegrasi 2. Mengembangkan kawasan industri dan sektor unggulan investasi 3. Meningkatkan literasi keuangan dan peran lembaga intermediasi 4. Menyederhanakan regulasi dan perizinan 5. Mengoptimalkan kapasitas fiskal daerah dan inovasi pembiayaan 6. Mendorong keterlibatan sektor swasta dalam	1. Menguatkan promosi, fasilitasi, dan koordinasi investasi terintegrasi 2. Mengembangkan kawasan industri dan sektor unggulan investasi 3. Meningkatkan literasi keuangan dan peran lembaga intermediasi 4. Menyederhanakan regulasi dan perizinan 5. Mengoptimalkan kapasitas fiskal daerah dan inovasi pembiayaan

SASARAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI				
		TAHUN I (2026)	**TAHUN II (2027)**	**TAHUN III (2028)**	**TAHUN IV (2029)**	**TAHUN V (2030)**
		6. Mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui KPBU	6. Mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui KPBU	swasta dalam pembangunan daerah melalui KPBU	pembangunan daerah melalui KPBU	6. Mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui KPBU
5. Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	1. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan	1. Meningkatkan produksi dan diversifikasi pangan lokal berbasis potensi wilayah dan teknologi ramah lingkungan 2. Memperkuat distribusi, logistik, cadangan, dan perlindungan sosial pangan 3. Mengoptimalkan konsumsi pangan Bahan Pangan Bergizi, Aman, Sehat, dan Halal (B2SA) 4. Mengembangkan infrastruktur ketahanan pangan	1. Meningkatkan produksi dan diversifikasi pangan lokal berbasis potensi wilayah dan teknologi ramah lingkungan 2. Memperkuat distribusi, logistik, cadangan, dan perlindungan sosial pangan 3. Mengoptimalkan konsumsi pangan Bahan Pangan Bergizi, Aman, Sehat, dan Halal (B2SA) 4. Mengembangkan infrastruktur ketahanan pangan	1. Meningkatkan produksi dan diversifikasi pangan lokal berbasis potensi wilayah dan teknologi ramah lingkungan 2. Memperkuat distribusi, logistik, cadangan, dan perlindungan sosial pangan 3. Mengoptimalkan konsumsi pangan Bahan Pangan Bergizi, Aman, Sehat, dan Halal (B2SA) 4. Mengembangkan infrastruktur ketahanan pangan	1. Meningkatkan produksi dan diversifikasi pangan lokal berbasis potensi wilayah dan teknologi ramah lingkungan 2. Memperkuat distribusi, logistik, cadangan, dan perlindungan sosial pangan 3. Mengoptimalkan konsumsi pangan Bahan Pangan Bergizi, Aman, Sehat, dan Halal (B2SA) 4. Mengembangkan infrastruktur ketahanan pangan	1. Meningkatkan produksi dan diversifikasi pangan lokal berbasis potensi wilayah dan teknologi ramah lingkungan 2. Memperkuat distribusi, logistik, cadangan, dan perlindungan sosial pangan 3. Mengoptimalkan konsumsi pangan Bahan Pangan Bergizi, Aman, Sehat, dan Halal (B2SA) 4. Mengembangkan infrastruktur ketahanan pangan
6. Meningkatnya kesempatan dan produktifitas tenaga kerja	4. Penguatan ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, inklusif	1. Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja 2. Memperluas akses informasi dan jejaring pasar kerja	1. Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja 2. Memperluas akses informasi dan	1. Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja 2. Memperluas akses informasi dan jejaring pasar kerja	1. Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja 2. Memperluas akses informasi dan jejaring pasar kerja	1. Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja 2. Memperluas akses informasi dan

SASARAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI				
		TAHUN I (2026)	**TAHUN II (2027)**	**TAHUN III (2028)**	**TAHUN IV (2029)**	**TAHUN V (2030)**
		3. Meningkatkan kesempatan kerja melalui program padat karya dan peluang kerja berkelanjutan 4. Mengembangkan kewirausahaan lokal dan sosial berbasis potensi daerah 5. Mendorong kemitraan strategis antara tenaga kerja lokal dengan dunia usaha dan industri 6. Meningkatkan kreativitas dan kompetensi pemuda melalui pelatihan dan sertifikasi berbasis potensi lokal	jejaring pasar kerja 3. Meningkatkan kesempatan kerja melalui program padat karya dan peluang kerja berkelanjutan 4. Mengembangkan kewirausahaan lokal dan sosial berbasis potensi daerah 5. Mendorong kemitraan strategis antara tenaga kerja lokal dengan dunia usaha dan industri 6. Meningkatkan kreativitas dan kompetensi pemuda melalui pelatihan dan sertifikasi berbasis potensi lokal	3. Meningkatkan kesempatan kerja melalui program padat karya dan peluang kerja berkelanjutan 4. Mengembangkan kewirausahaan lokal dan sosial berbasis potensi daerah 5. Mendorong kemitraan strategis antara tenaga kerja lokal dengan dunia usaha dan industri 6. Meningkatkan kreativitas dan kompetensi pemuda melalui pelatihan dan sertifikasi berbasis potensi lokal	3. Meningkatkan kesempatan kerja melalui program padat karya dan peluang kerja berkelanjutan 4. Mengembangkan kewirausahaan lokal dan sosial berbasis potensi daerah 5. Mendorong kemitraan strategis antara tenaga kerja lokal dengan dunia usaha dan industri 6. Meningkatkan kreativitas dan kompetensi pemuda melalui pelatihan dan sertifikasi berbasis potensi lokal	jejaring pasar kerja 3. Meningkatkan kesempatan kerja melalui program padat karya dan peluang kerja berkelanjutan 4. Mengembangkan kewirausahaan lokal dan sosial berbasis potensi daerah 5. Mendorong kemitraan strategis antara tenaga kerja lokal dengan dunia usaha dan industri 6. Meningkatkan kreativitas dan kompetensi pemuda melalui pelatihan dan sertifikasi berbasis potensi lokal
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Peningkatan kemandirian dan daya saing perdesaan yang berkelanjutan	1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan masyarakat 2. Memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan melalui koordinasi lintas sektor 3. Mengembangkan	1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan masyarakat 2. Memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan melalui koordinasi lintas sektor 3. Mengembangkan	1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan masyarakat 2. Memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan melalui koordinasi lintas sektor 3. Mengembangkan	1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan masyarakat 2. Memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan melalui koordinasi lintas sektor 3. Mengembangkan perekonomian desa melalui penguatan	1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan masyarakat 2. Memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan melalui koordinasi lintas sektor 3. Mengembangkan

SASARAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI				
		TAHUN I (2026)	TAHUN II (2027)	TAHUN III (2028)	TAHUN IV (2029)	TAHUN V (2030)
		perekonomian desa melalui penguatan BUMDes, inovasi kewirausahaan, dan akses pasar 4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa 5. Menguatkan ekonomi nagari melalui peran aktif petani milenial 7. Peningkatan ragam pemanfaatan dana desa/ nagari untuk pengembangan potensi lokal	perekonomian desa melalui penguatan BUMDes, inovasi kewirausahaan, dan akses pasar 4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa 5. Menguatkan ekonomi nagari melalui peran aktif petani milenial 7. Peningkatan ragam pemanfaatan dana desa/ nagari untuk pengembangan potensi lokal	perekonomian desa melalui penguatan BUMDes, inovasi kewirausahaan, dan akses pasar 4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa 5. Menguatkan ekonomi nagari melalui peran aktif petani milenial 6. Peningkatan ragam pemanfaatan dana desa/ nagari untuk pengembangan potensi lokal	BUMDes, inovasi kewirausahaan, dan akses pasar 4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa 5. Menguatkan ekonomi nagari melalui peran aktif petani milenial 7. Peningkatan ragam pemanfaatan dana desa/ nagari untuk pengembangan potensi lokal	perekonomian desa melalui penguatan BUMDes, inovasi kewirausahaan, dan akses pasar 4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa 5. Menguatkan ekonomi nagari melalui peran aktif petani milenial 7. Peningkatan ragam pemanfaatan dana desa/ nagari untuk pengembangan potensi lokal

d. Arah Kebijakan Misi 4 : Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan

SASARAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI				
		TAHUN I (2026)	TAHUN II (2027)	TAHUN III (2028)	TAHUN IV (2029)	TAHUN V (2030)
1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	1. Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur air minum, sanitasi, dan persampahan	1. Memperluas akses masyarakat terhadap layanan air minum, sanitasi, dan persampahan. 2. Menguatkan kelembagaan pengelola	1. Memperluas akses masyarakat terhadap layanan air minum, sanitasi, dan persampahan. 2. Menguatkan kelembagaan	1. Memperluas akses masyarakat terhadap layanan air minum, sanitasi, dan persampahan. 2. Menguatkan kelembagaan pengelola air minum dan	1. Memperluas akses masyarakat terhadap layanan air minum, sanitasi, dan persampahan. 2. Menguatkan kelembagaan pengelola air minum dan	1. Memperluas akses masyarakat terhadap layanan air minum, sanitasi, dan persampahan. 2. Menguatkan kelembagaan

SASARAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI				
		TAHUN I (2026)	**TAHUN II (2027)**	**TAHUN III (2028)**	**TAHUN IV (2029)**	**TAHUN V (2030)**
		air minum dan sanitasi permukiman. 3. Mengembangkan sistem penyediaan air minum regional (SPAM) 4. Mengembangkan tempat pemrosesan akhir (TPA) regional 5. Meningkatkan sanitasi berbasis masyarakat. 6. Meningkatkan sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 7. Mengembangkan sistem drainase terpadu (*ecodrain*) secara bertahap 8. Meningkatkan kemitraan dalam pengembangan, pembiayaan, dan pengelolaan infrastruktur	pengelola air minum dan sanitasi permukiman. 3. Mengembangkan sistem penyediaan air minum regional (SPAM) 4. Mengembangkan tempat pemrosesan akhir (TPA) regional 5. Meningkatkan sanitasi berbasis masyarakat. 6. Meningkatkan sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 7. Mengembangkan sistem drainase terpadu (*ecodrain*) secara bertahap 8. Meningkatkan kemitraan dalam pengembangan, pembiayaan, dan pengelolaan infrastruktur	sanitasi permukiman. 3. Mengembangkan sistem penyediaan air minum regional (SPAM) 4. Mengembangkan tempat pemrosesan akhir (TPA) regional 5. Meningkatkan sanitasi berbasis masyarakat. 6. Meningkatkan sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 7. Mengembangkan sistem drainase terpadu (*ecodrain*) secara bertahap 8. Meningkatkan kemitraan dalam pengembangan, pembiayaan, dan pengelolaan infrastruktur	sanitasi permukiman. 3. Mengembangkan sistem penyediaan air minum regional (SPAM) 4. Mengembangkan tempat pemrosesan akhir (TPA) regional 5. Meningkatkan sanitasi berbasis masyarakat. 6. Meningkatkan sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 7. Mengembangkan sistem drainase terpadu (*ecodrain*) secara bertahap 8. Meningkatkan kemitraan dalam pengembangan, pembiayaan, dan pengelolaan infrastruktur	pengelola air minum dan sanitasi permukiman. 3. Mengembangkan sistem penyediaan air minum regional (SPAM) 4. Mengembangkan tempat pemrosesan akhir (TPA) regional 5. Meningkatkan sanitasi berbasis masyarakat. 6. Meningkatkan sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 7. Mengembangkan sistem drainase terpadu (*ecodrain*) secara bertahap 8. Meningkatkan kemitraan dalam pengembangan, pembiayaan, dan pengelolaan infrastruktur
	2. Peningkatan pengelolaan sumber daya air dan tata ruang secara berkelanjutan	1. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan. 2. Meningkatkan sinergi pengelolaan air baku. 3. Mengembangkan regulasi air limbah domestik dan industri. 4. Implementasi perencanaan tata ruang (RTRW) dan zona pesisir	1. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan. 2. Meningkatkan sinergi pengelolaan air baku. 3. Mengembangkan regulasi air limbah domestik dan industri. 4. Implementasi perencanaan tata ruang (RTRW) dan	1. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan. 2. Meningkatkan sinergi pengelolaan air baku. 3. Mengembangkan regulasi air limbah domestik dan industri. 4. Implementasi perencanaan tata ruang (RTRW) dan zona pesisir	1. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan. 2. Meningkatkan sinergi pengelolaan air baku. 3. Mengembangkan regulasi air limbah domestik dan industri. 4. Implementasi perencanaan tata ruang (RTRW) dan zona pesisir	1. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan. 2. Meningkatkan sinergi pengelolaan air baku. 3. Mengembangkan regulasi air limbah domestik dan industri. 4. Implementasi perencanaan tata ruang (RTRW) dan

SASARAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI				
		TAHUN I (2026)	**TAHUN II (2027)**	**TAHUN III (2028)**	**TAHUN IV (2029)**	**TAHUN V (2030)**
			zona pesisir			zona pesisir
	3. Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau	1. Meningkatkan penataan kawasan permukiman kumuh secara terpadu melalui pengurangan rumah tidak layak huni (RTLH) 2. Meningkatkan perencanaan, penyediaan, dan tata kelola infrastruktur dasar permukiman (PSU) guna mendukung kelayakan dan keberlanjutan hunian 3. Mengendalikan dan mengawasi pembangunan kawasan permukiman agar selaras dengan rencana tata ruang	1. Meningkatkan penataan kawasan permukiman kumuh secara terpadu melalui pengurangan rumah tidak layak huni (RTLH) 2. Meningkatkan perencanaan, penyediaan, dan tata kelola infrastruktur dasar permukiman (PSU) guna mendukung kelayakan dan keberlanjutan hunian 3. Mengendalikan dan mengawasi pembangunan kawasan permukiman agar selaras dengan rencana tata ruang	4. Meningkatkan penataan kawasan permukiman kumuh secara terpadu melalui pengurangan rumah tidak layak huni (RTLH) 5. Meningkatkan perencanaan, penyediaan, dan tata kelola infrastruktur dasar permukiman (PSU) guna mendukung kelayakan dan keberlanjutan hunian 6. Mengendalikan dan mengawasi pembangunan kawasan permukiman agar selaras dengan rencana tata ruang	7. Meningkatkan penataan kawasan permukiman kumuh secara terpadu melalui pengurangan rumah tidak layak huni (RTLH) 8. Meningkatkan perencanaan, penyediaan, dan tata kelola infrastruktur dasar permukiman (PSU) guna mendukung kelayakan dan keberlanjutan hunian 9. Mengendalikan dan mengawasi pembangunan kawasan permukiman agar selaras dengan rencana tata ruang	10. Meningkatkan penataan kawasan permukiman kumuh secara terpadu melalui pengurangan rumah tidak layak huni (RTLH) 11. Meningkatkan perencanaan, penyediaan, dan tata kelola infrastruktur dasar permukiman (PSU) guna mendukung kelayakan dan keberlanjutan hunian 12. Mengendalikan dan mengawasi pembangunan kawasan permukiman agar selaras dengan rencana tata ruang
	4. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah	1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas jaringan jalan dan jembatan 2. Meningkatkan standar pelayanan dan keselamatan transportasi 3. Mengintegrasikan sistem transportasi antarmoda secara terpadu dan berkelanjutan 4. Memperkuat kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah, BUMN, dan	1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas jaringan jalan dan jembatan 2. Meningkatkan standar pelayanan dan keselamatan transportasi 3. Mengintegrasikan sistem transportasi antarmoda secara terpadu dan berkelanjutan 4. Memperkuat	1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas jaringan jalan dan jembatan 2. Meningkatkan standar pelayanan dan keselamatan transportasi 3. Mengintegrasikan sistem transportasi antarmoda secara terpadu dan berkelanjutan 4. Memperkuat kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah, BUMN, dan	1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas jaringan jalan dan jembatan 2. Meningkatkan standar pelayanan dan keselamatan transportasi 3. Mengintegrasikan sistem transportasi antarmoda secara terpadu dan berkelanjutan 4. Memperkuat kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah, BUMN, dan	1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas jaringan jalan dan jembatan 2. Meningkatkan standar pelayanan dan keselamatan transportasi 3. Mengintegrasikan sistem transportasi antarmoda secara terpadu dan berkelanjutan 4. Memperkuat

SASARAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI				
		TAHUN I (2026)	TAHUN II (2027)	TAHUN III (2028)	TAHUN IV (2029)	TAHUN V (2030)
		sektor swasta dalam pengembangan infrastruktur transportasi. 5. Mengoptimalkan fungsi sarana transportasi kereta api untuk mendukung konektivitas antarwilayah 6. Mengembangkan dermaga untuk memperkuat konektivitas wilayah pesisir dan pulau	kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta dalam pengembangan infrastruktur transportasi. 5. Mengoptimalkan fungsi sarana transportasi kereta api untuk mendukung konektivitas antarwilayah 6. Mengembangkan dermaga untuk memperkuat konektivitas wilayah pesisir dan pulau	sektor swasta dalam pengembangan infrastruktur transportasi. 5. Mengoptimalkan fungsi sarana transportasi kereta api untuk mendukung konektivitas antarwilayah 6. Mengembangkan dermaga untuk memperkuat konektivitas wilayah pesisir dan pulau	sektor swasta dalam pengembangan infrastruktur transportasi. 5. Mengoptimalkan fungsi sarana transportasi kereta api untuk mendukung konektivitas antarwilayah 6. Mengembangkan dermaga untuk memperkuat konektivitas wilayah pesisir dan pulau	kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta dalam pengembangan infrastruktur transportasi. 5. Mengoptimalkan fungsi sarana transportasi kereta api untuk mendukung konektivitas antarwilayah 6. Mengembangkan dermaga untuk memperkuat konektivitas wilayah pesisir dan pulau
2. Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup yang berkelanjutan	1. Penguatan pengelolaan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati	1. Mengembangkan sistem pengelolaan sampah dan limbah terpadu berbasis 3R dan prinsip circular economy 2. Meningkatkan pengelolaan limbah B3 3. Meningkatkan pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan, dan adaptasi perubahan iklim 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kolaborasi multipihak dalam pengelolaan lingkungan 5. Memperkuat perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati	1. Mengembangkan sistem pengelolaan sampah dan limbah terpadu berbasis 3R dan prinsip circular economy 2. Meningkatkan pengelolaan limbah B3 3. Meningkatkan pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan, dan adaptasi perubahan iklim 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kolaborasi multipihak dalam pengelolaan lingkungan 5. Memperkuat perlindungan dan	1. Mengembangkan sistem pengelolaan sampah dan limbah terpadu berbasis 3R dan prinsip circular economy 2. Meningkatkan pengelolaan limbah B3 3. Meningkatkan pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan, dan adaptasi perubahan iklim 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kolaborasi multipihak dalam pengelolaan lingkungan 5. Memperkuat perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati 6. Menguatkan kapasitas, kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup	1. Mengembangkan sistem pengelolaan sampah dan limbah terpadu berbasis 3R dan prinsip circular economy 2. Meningkatkan pengelolaan limbah B3 3. Meningkatkan pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan, dan adaptasi perubahan iklim 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kolaborasi multipihak dalam pengelolaan lingkungan 5. Memperkuat perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati 6. Menguatkan kapasitas, kelembagaan pengelolaan	1. Mengembangkan sistem pengelolaan sampah dan limbah terpadu berbasis 3R dan prinsip circular economy 2. Meningkatkan pengelolaan limbah B3 3. Meningkatkan pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan, dan adaptasi perubahan iklim 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kolaborasi multipihak dalam pengelolaan lingkungan 5. Memperkuat perlindungan dan

SASARAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI				
		TAHUN I (2026)	**TAHUN II (2027)**	**TAHUN III (2028)**	**TAHUN IV (2029)**	**TAHUN V (2030)**
		6. Menguatkan kapasitas, kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup 7. Menguatkan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan untuk pembangunan wilayah terpadu 8. Peningkatan luas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), Biopori, Sumur Resapan, dll. 9. Peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam pengendalian pertambangan mineral non logam 10. Pengembangan zonasi pemanfataan sumber daya alam (termasuk mineral non logam) melalui implementasi penataan ruang secara konsekuen	pemanfaatan keanekaragaman hayati 6. Menguatkan kapasitas, kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup 7. Menguatkan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan untuk pembangunan wilayah terpadu 8. Peningkatan luas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), Biopori, Sumur Resapan, dll. 9. Peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam pengendalian pertambangan mineral non logam Pengembangan zonasi pemanfataan sumber daya alam (termasuk mineral non logam) melalui implementasi penataan ruang secara konsekuen	7. Menguatkan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan untuk pembangunan wilayah terpadu 8. Peningkatan luas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), Biopori, Sumur Resapan, dll. 9. Peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam pengendalian pertambangan mineral non logam Pengembangan zonasi pemanfataan sumber daya alam (termasuk mineral non logam) melalui implementasi penataan ruang secara konsekuen	lingkungan hidup 7. Menguatkan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan untuk pembangunan wilayah terpadu 8. Peningkatan luas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), Biopori, Sumur Resapan, dll. 9. Peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam pengendalian pertambangan mineral non logam Pengembangan zonasi pemanfataan sumber daya alam (termasuk mineral non logam) melalui implementasi penataan ruang secara konsekuen	pemanfaatan keanekaragaman hayati 6. Menguatkan kapasitas, kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup 7. Menguatkan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan untuk pembangunan wilayah terpadu 8. Peningkatan luas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), Biopori, Sumur Resapan, dll. 9. Peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam pengendalian pertambangan mineral non logam Pengembangan zonasi pemanfataan sumber daya alam (termasuk mineral non logam) melalui implementasi penataan ruang secara konsekuen
3. Menurunnya resiko bencana	1. Peningkatan ketangguhan dan resiliensi terhadap bencana	1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berketahanan bencana 2. Menguatkan kesiapsiagaan terhadap bencana 3. Melaksanakan pemetaan risiko bencana dan pengarusutamaan mitigasi dalam perencanaan	1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berketahanan bencana 2. Menguatkan kesiapsiagaan terhadap bencana 3. Melaksanakan pemetaan risiko bencana dan pengarusutamaan mitigasi dalam	1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berketahanan bencana 2. Menguatkan kesiapsiagaan terhadap bencana 3. Melaksanakan pemetaan risiko bencana dan pengarusutamaan mitigasi dalam perencanaan 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap	1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berketahanan bencana 2. Menguatkan kesiapsiagaan terhadap bencana 3. Melaksanakan pemetaan risiko bencana dan pengarusutamaan mitigasi dalam perencanaan 4. Meningkatkan kesadaran	1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berketahanan bencana 2. Menguatkan kesiapsiagaan terhadap bencana 3. Melaksanakan pemetaan risiko bencana dan pengarusutamaan mitigasi dalam

SASARAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI				
		TAHUN I (2026)	TAHUN II (2027)	TAHUN III (2028)	TAHUN IV (2029)	TAHUN V (2030)
		4. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim 5. Mengembangkan sistem informasi kebencanaan dan peringatan dini 6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan koordinasi dalam penanggulangan bencana 7. Meningkatkan mitigasi pra, saat, dan pasca terjadi bencana 8. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam usaha evakuasi, pertolongan, penyelamatan korban bencana 9. Optimalisasi penerapan sistem tanggap darurat bencana 10. Meningkatkan pemutakhiran dalam penyusunan RPB terkait pengaruh perubahan iklim terhadap bahaya yang akan terjadi	perencanaan 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim 5. Mengembangkan sistem informasi kebencanaan dan peringatan dini 6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan koordinasi dalam penanggulangan bencana 7. Meningkatkan mitigasi pra, saat, dan pasca terjadi bencana 8. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam usaha evakuasi, pertolongan, penyelamatan korban bencana 9. Optimalisasi penerapan sistem tanggap darurat bencana 10. Meningkatkan pemutakhiran dalam penyusunan RPB terkait pengaruh perubahan iklim terhadap bahaya yang akan terjadi	risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim 5. Mengembangkan sistem informasi kebencanaan dan peringatan dini 6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan koordinasi dalam penanggulangan bencana 7. Meningkatkan mitigasi pra, saat, dan pasca terjadi bencana 8. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam usaha evakuasi, pertolongan, penyelamatan korban bencana 9. Optimalisasi penerapan sistem tanggap darurat bencana 10. Meningkatkan pemutakhiran dalam penyusunan RPB terkait pengaruh perubahan iklim terhadap bahaya yang akan terjadi	masyarakat terhadap risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim 5. Mengembangkan sistem informasi kebencanaan dan peringatan dini 6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan koordinasi dalam penanggulangan bencana 7. Meningkatkan mitigasi pra, saat, dan pasca terjadi bencana 8. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam usaha evakuasi, pertolongan, penyelamatan korban bencana 9. Optimalisasi penerapan sistem tanggap darurat bencana 10. Meningkatkan pemutakhiran dalam penyusunan RPB terkait pengaruh perubahan iklim terhadap bahaya yang akan terjadi	perencanaan 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim 5. Mengembangkan sistem informasi kebencanaan dan peringatan dini 6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan koordinasi dalam penanggulangan bencana 7. Meningkatkan mitigasi pra, saat, dan pasca terjadi bencana 8. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam usaha evakuasi, pertolongan, penyelamatan korban bencana 9. Optimalisasi penerapan sistem tanggap darurat bencana 10. Meningkatkan pemutakhiran dalam penyusunan RPB terkait pengaruh perubahan iklim terhadap bahaya yang akan terjadi

e. Arah Kebijakan Misi 5 : Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya

SASARAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI				
		TAHUN I (2026)	TAHUN II (2027)	TAHUN III (2028)	TAHUN IV (2029)	TAHUN V (2030)
1. Meningkatnya rasa aman dan kerukunan antarumat beragama dalam kehidupan masyarakat	1. Perwujudan lingkungan sosial yang religius, aman dan harmonis	1. Meningkatkan internalisasi nilai religius dalam keluarga dan komunitas 2. Memperkuat peran tokoh agama, lembaga keagamaan, dan forum dialog lintas agama 3. Meningkatkan kapasitas aparat dan partisipasi masyarakat 4. Meningkatkan mekanisme penyelesaian dan pencegahan konflik di masyarakat	1. Meningkatkan internalisasi nilai religius dalam keluarga dan komunitas 2. Memperkuat peran tokoh agama, lembaga keagamaan, dan forum dialog lintas agama 3. Meningkatkan kapasitas aparat dan partisipasi masyarakat 4. Meningkatkan mekanisme penyelesaian dan pencegahan konflik di masyarakat	1. Meningkatkan internalisasi nilai religius dalam keluarga dan komunitas 2. Memperkuat peran tokoh agama, lembaga keagamaan, dan forum dialog lintas agama 3. Meningkatkan kapasitas aparat dan partisipasi masyarakat 4. Meningkatkan mekanisme penyelesaian dan pencegahan konflik di masyarakat	1. Meningkatkan internalisasi nilai religius dalam keluarga dan komunitas 2. Memperkuat peran tokoh agama, lembaga keagamaan, dan forum dialog lintas agama 3. Meningkatkan kapasitas aparat dan partisipasi masyarakat 4. Meningkatkan mekanisme penyelesaian dan pencegahan konflik di masyarakat	1. Meningkatkan internalisasi nilai religius dalam keluarga dan komunitas 2. Memperkuat peran tokoh agama, lembaga keagamaan, dan forum dialog lintas agama 3. Meningkatkan kapasitas aparat dan partisipasi masyarakat 4. Meningkatkan mekanisme penyelesaian dan pencegahan konflik di masyarakat
2. Meningkatnya pelestarian cagar dan warisan budaya	2. Internalisasi nilai adat, budaya, dan kearifan lokal dalam masyarakat	1. Pengintegrasian nilai-nilai budaya dalam pendidikan formal 2. Meningkatkan fungsi surau dan komunitas adat sebagai pusat pewarisan budaya 3. Meningkatnya pemanfaatan modernisasi dan globalisasi sebagai peluang untuk pelestarian budaya lokal 4. Memperkuat regulasi daerah yang mendukung pelestarian budaya lokal 5. Meningkatkan dukungan bagi seniman dan budayawan yang	1. Pengintegrasian nilai-nilai budaya dalam pendidikan formal 2. Meningkatkan fungsi surau dan komunitas adat sebagai pusat pewarisan budaya 3. Meningkatnya pemanfaatan modernisasi dan globalisasi sebagai peluang untuk pelestarian budaya lokal 4. Memperkuat regulasi daerah yang mendukung pelestarian budaya lokal 5. Meningkatkan dukungan bagi seniman dan budayawan yang	1. Pengintegrasian nilai-nilai budaya dalam pendidikan formal 2. Meningkatkan fungsi surau dan komunitas adat sebagai pusat pewarisan budaya 3. Meningkatnya pemanfaatan modernisasi dan globalisasi sebagai peluang untuk pelestarian budaya lokal 4. Memperkuat regulasi daerah yang mendukung pelestarian budaya lokal 5. Meningkatkan dukungan bagi seniman dan budayawan yang	1. Pengintegrasian nilai-nilai budaya dalam pendidikan formal 2. Meningkatkan fungsi surau dan komunitas adat sebagai pusat pewarisan budaya 3. Meningkatnya pemanfaatan modernisasi dan globalisasi sebagai peluang untuk pelestarian budaya lokal 4. Memperkuat regulasi daerah yang mendukung pelestarian budaya lokal 5. Meningkatkan dukungan bagi seniman dan budayawan yang melestarikan budaya lokal 6. Mengapresiasi peran Tokoh Adat dan Tokoh Agama	1. Pengintegrasian nilai-nilai budaya dalam pendidikan formal 2. Meningkatkan fungsi surau dan komunitas adat sebagai pusat pewarisan budaya 3. Meningkatnya pemanfaatan modernisasi dan globalisasi sebagai peluang untuk pelestarian budaya lokal 4. Memperkuat regulasi daerah yang mendukung pelestarian budaya lokal

SASARAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI				
		TAHUN I (2026)	TAHUN II (2027)	TAHUN III (2028)	TAHUN IV (2029)	TAHUN V (2030)
		melestarikan budaya lokal 6. Mengapresiasi peran Tokoh Adat dan Tokoh Agama dalam penguatan nilai-nilai adat dan agama serta pembentukan karakter generasi muda	melestarikan budaya lokal 6. Mengapresiasi peran Tokoh Adat dan Tokoh Agama dalam penguatan nilai-nilai adat dan agama serta pembentukan karakter generasi muda	melestarikan budaya lokal 6. Mengapresiasi peran Tokoh Adat dan Tokoh Agama dalam penguatan nilai-nilai adat dan agama serta pembentukan karakter generasi muda	dalam penguatan nilai-nilai adat dan agama serta pembentukan karakter generasi muda	5. Meningkatkan dukungan bagi seniman dan budayawan yang melestarikan budaya lokal 6. Mengapresiasi peran Tokoh Adat dan Tokoh Agama dalam penguatan nilai-nilai adat dan agama serta pembentukan karakter generasi muda
	3. Pelestarian dan perlindungan cagar budaya	1. Menguatkan regulasi perlindungan cagar budaya 2. Meningkatkan pelestarian dan perlindungan cagar budaya 3. Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian dan perlindungan cagar budaya	1. Menguatkan regulasi perlindungan cagar budaya 2. Meningkatkan pelestarian dan perlindungan cagar budaya 3. Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian dan perlindungan cagar budaya	1. Menguatkan regulasi perlindungan cagar budaya 2. Meningkatkan pelestarian dan perlindungan cagar budaya 3. Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian dan perlindungan cagar budaya	1. Menguatkan regulasi perlindungan cagar budaya 2. Meningkatkan pelestarian dan perlindungan cagar budaya 3. Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian dan perlindungan cagar budaya	1. Menguatkan regulasi perlindungan cagar budaya 2. Meningkatkan pelestarian dan perlindungan cagar budaya 3. Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian dan perlindungan cagar budaya

3.5.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2030

a. Program Prioritas Pembangunan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi 1 : Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dengan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkelanjutan

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berkelanjutan, diperlukan program pembangunan yang fokus pada penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembenahan sistem manajemen pemerintahan daerah yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Program-program ini diharapkan dapat menjawab tantangan birokrasi yang masih belum optimal, rendahnya kepercayaan publik, serta kebutuhan adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi dan tuntutan layanan publik yang semakin dinamis.

Program pembangunan yang mendukung pencapaian Misi 1 diarahkan untuk memperkuat landasan kelembagaan dan sistem tata kelola yang modern, dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* serta nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Fokus utama diarahkan pada reformasi birokrasi, penguatan kapasitas sumber daya aparatur, pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi pemerintahan, dan peningkatan pengawasan serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Tabel 3.13
Program Prioritas Pembangunan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi 1 : Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dengan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkelanjutan

Tujuan	**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas**	
Sasaran	**Outcome**	**Program Prioritas**
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas.	Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Meningkatnya Pelayanan Umum Sekretraiat Daerah	
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Sekretriat Daerah	
	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	
	Meningkatnya Pembinaan Kapasitas SDM APIP	
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	
	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	
	Menurunnya tingkat penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun kewenangan	Program Penyelenggaraan Pengawasan
	Meningkatnya implementasi sistem pengendalian Intern Pemerintah Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	

Tujuan	**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas**	
Sasaran	**Outcome**	**Program Prioritas**
	Meningkatnya implementasi sistem pengendalian Intern Pemerintah Bidang perekonomian	
	Meningkatnya implementasi sistem pengendalian Intern Pemerintah Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan	
	Meningkatnya implementasi sistem pengendalian Intern Pemerintah Nagari di Kabupaten Padang Pariaman	
	Meningkatnya Kapabilitas APIP Sesuai Standar IACM	
	Meningkatnya Kepatuhan OPD dalam memenuhi dokumen Implementasi SAKIP	
	Meningkatnya Penanganan Kejadian Korupsi	
	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
	Meningkatkan fasilitasi pengawasan manajemen risiko	
	Meningkatnya Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi	
	Meningkatnya Strategi Pencegahan Korupsi	
	Meningkatnya kualitas layanan administrasi Kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah
	Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir ASN	
	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya Kualitas perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Program Koordinasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	
	Meningkatnya tata kelola anggaran	Program Pegelolaan Keuangan Daerah
	Meningkatnya tata kelola Perbendaharaan	
	Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	
	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Meningkatnya kualitas Pengawasan dan Pelaporan	
	Meningkatny penerapan sistem Informasi keuangan berbasis digital	
	Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaran urusan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan

Tujuan	**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas**	
Sasaran	**Outcome**	**Program Prioritas**
	pemerintahan terkait	Publik
Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Program Penelitian dan Pengembangan
	Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	
	Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijkan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	
	Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	
	Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Program Riset dan Inovasi Daerah
	Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan unggulan potensi daerah	
	Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	
	Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah	
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Program Peningkatan Kerjasama Desa
Meningkatnya Transformasi Digital Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Program pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik
	Tercapainya kolaborasi integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

b. Program Prioritas Pembangunan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Pembangunan sumber daya manusia merupakan fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang unggul, produktif, dan kompetitif. Dalam konteks Kabupaten Padang Pariaman, peningkatan kualitas SDM diarahkan untuk menjawab berbagai tantangan, seperti rendahnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesenjangan akses layanan pendidikan dan kesehatan, serta masih terbatasnya keterampilan angkatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Misi ini diterjemahkan ke dalam serangkaian program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas, penguatan institusi keluarga, serta peningkatan kapasitas generasi muda dan kelompok rentan. Selain itu, pengarusutamaan gender, perlindungan anak, dan penguatan literasi juga menjadi bagian penting dalam mendorong SDM yang inklusif dan berkeadilan.

Tabel 3.14
Program Prioritas Pembangunan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Tujuan	**Terciptanya Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berdaya Saing dan Inklusif**	
Sasaran	**Outcome**	**Program Prioritas**
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan berdaya saing	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan
	Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Program Pengembangan Kurikulum
	Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Institusi Pendidikan	Program Pengendalian dan Perizinan Pendidikan
	Terlestarikannya Bahasa dan Sastra Daerah	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Naional Perpustakaan	Pembinaan Perpustakaan
	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas, baik, adil dan terjangkau	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	
	Meningatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya Efektivitas program sediaan farmasi dan pangan olahan di Pemerintah Daerah	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masayarakat bidang kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	Meningkatnya akreditasi pelayanan kesehatan	Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan

Tujuan	Terciptanya Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berdaya Saing dan Inklusif	
Sasaran	**Outcome**	**Program Prioritas**
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Program pengendalian Penduduk
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program pembinaan Keluarga berencana (KB)
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan KB	
	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan program keluarga berencana (KB)	
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Program Perlindungan Perempuan
	Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG dan Peran Perempaun dalam pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, ekploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Program Perlindungan Khusus Anak
	Terjaminnya Pemenuhan Hak semua anak secara Komprehensif	Program Pemenuhan Hak Anak
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Program Pemberdayaan Sosial
	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Program Rehabilitasi Sosial
	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Program Penanganan Bencana

c. Program Prioritas Pembangunan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju dan Merata

Pembangunan ekonomi yang inklusif, maju, dan merata merupakan upaya untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, dapat berpartisipasi aktif dan memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Misi ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan lokal, mendorong produktivitas sektor-sektor strategis, serta menciptakan pemerataan ekonomi antarwilayah.

Kabupaten Padang Pariaman memiliki kekuatan pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, industri rumah tangga, serta pariwisata dan ekonomi kreatif. Peningkatan kontribusi sektor-sektor ini terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi prioritas dalam mewujudkan struktur ekonomi yang lebih tangguh dan berdaya saing

Tabel 3.15
Program Prioritas Pembangunan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju dan Merata

Tujuan	**Terwujudnya Perekonomian Daerah Yang Maju dan Inklusif**	
Sasaran	**Outcome**	**Program Prioritas**
Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap perekonomian daerah	Meningkatnya penggunaan sarana pertanaman tanaman pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Meningkatnya penggunaan sarana pertanian pra panen	
	Meningkatkan penggunaan sarana produksi tanaman perkebunan	
	Meningkatnya penggunaan sarana pertanaman tanaman hortikultura	
	Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana peternakan	
	Meningkatkan Penggunaan Prasarana Irigasi Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Meningkatkan Penggunaan Prasarana Pertanian	
	Meningkatnya perlindungan lahan pertanian pangan	
	Meningkatkan Penggunaan Prasarana Pertanian Perkebunan	
	Meningkatnya aksesibilitas transportasi areal perkebunan	
	Meningkatkan penyediaan dan pengembangan prasarana peternakan	
	Meningkatkan pengelolaan kesehatan hewan ternak	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
	Meningkatkan pengendalian kesehatan hewan ternak produksi	
	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budi daya
	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
	Meningkatnya Pengawasan Perikanan	Program pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil perikanan
Meningkatnya kontribusi perdagangan, UMKM dan industri berbasis sektor unggulan	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
	Meningkatnya Kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Program Stabilisasi Harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting
	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Program Pengembangan Eksport
	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Meningkatnya penempatan	Program Penempatan tenaga Kerja

Tujuan	Terwujudnya Perekonomian Daerah Yang Maju dan Inklusif	
Sasaran	**Outcome**	**Program Prioritas**
	tenaga kerja	
	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
	Meningkatnya daya saing UMKM	Program pengembangan UMKM
	Meningkatnya produktivitas koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Program Perencanaan Pembangunan Industri
	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Program Pengendalian izin Usaha Industri
	Meningkatnya pemanfaatan Informasi Industri	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Program Pemasaran pariwisata
	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
Meningkatnya Kemudahan Investasi	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Program Promosi Penanaman Modal
	Meningkatnya Perizinan berusaha berbasis risiko	Program pelayanan Penanaman Modal
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Program Penataan Bangunan Gedung
	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Stabiltas harga pangan utama di tingkat konsumen	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	
	Menurunnya Desa/Nagari Rawan Pangan	Program Penanganan Kerawanan pangan
	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Program Pengawasan keamanan pangan
Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Terkelolanya informasi tenaga kerja	Program perencanaan tenaga kerja
	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Program Penempatan tenaga Kerja
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Program pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat Hukum adat
	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasab pemerintahan desa	Program Administrasi pemerintahan Desa
	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan pemerintah desa	
	Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan
	Meningkatnya Kualitas	Program Pengembangan

Tujuan	Terwujudnya Perekonomian Daerah Yang Maju dan Inklusif	
Sasaran	**Outcome**	**Program Prioritas**
	Kurikulum Pendidikan	Kurikulum
	Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Program pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan Upaya kesehatan masyarakat
	Meningatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM Kesehatan	Program peningkatan Kapasitas sumber daya manusia Kesehatan
	Meningkatnya Efektivitas program sediaan farmasi dan pangan olahan di Pemerintah Daerah	Program sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan Minuman
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Program pengembangan dan Perumahan
	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Program peningkatan Ketenteraman dan ketertiban Umum
	Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	
	Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	
	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Program Rehabilitasi Sosial
	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Program perlindungan dan Jaminan sosial
	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Program Penanganan Bencana

d. Program Prioritas Pembangunan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi 4 : Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Misi keempat RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas wilayah, layanan dasar masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan. Infrastruktur yang berkualitas dan merata akan meningkatkan efisiensi pelayanan publik, memperkuat daya saing daerah, serta menjadi fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk memperkecil kesenjangan antarwilayah, meningkatkan daya dukung terhadap sektor-sektor strategis (seperti pertanian, pariwisata, dan UMKM), serta memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim.

Tabel 3.16
Program Prioritas Pembangunan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi 4 : Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Tujuan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan, berketahanan terhadap bencana dan Perubahan Iklim	
Sasaran	**Outcome**	**Program Prioritas**
Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air
	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Program pengembangan dan Perumahan
	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Program Kawasan Permukiman
	Meningkatnya Kualitas Jalan dalam Kondisi Mantap	Program penyelenggaraan Jalan
	Meningkatnya kualitas layanan sarana dan prasarana transportasi	Program penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ)
	Meningkatnya penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan jalan(LLAP)	
	Meningkatnya pengelolaan Perlintasan Kereta Api	Program Pengelolaan Perkeretaapian
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Program pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup
	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Program perencanaan Lingkungan Hidup
	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Program Pengendalian Bahan berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (Limbah B3)
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekragaman hayati	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
	Meningkatnya tata kelola persampahan	Program Pengelolaan Persampahan
	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
	Meningkatnya layanan persampahan regional	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
Menurunnya risiko bencana	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program penanggulangan Bencana
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	
	Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Program Penanggulangan penyelamatan kebakaran dan Non kebakaran
	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban	

Tujuan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan, berketahanan terhadap bencana dan Perubahan Iklim	
Sasaran	**Outcome**	**Program Prioritas**
	kebakaran	
	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Program Pengembangan dan Perumahan
	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Program Penanganan Bencana

e. Program Prioritas Pembangunan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi 5 : Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmoni dan Berbudaya

Misi kelima bertujuan untuk memperkuat tatanan sosial masyarakat Kabupaten Padang Pariaman yang religius, rukun, serta memiliki jati diri dan karakter berbasis nilai-nilai budaya lokal. Dinamika globalisasi, disrupsi sosial, dan derasnya arus informasi menuntut penguatan ketahanan sosial budaya, agar masyarakat tetap mampu menjaga keharmonisan hidup beragama dan keberagaman, serta tidak tergerus oleh pengaruh negatif budaya luar. Program prioritas pembangunan pada misi ini berfokus pada penguatan nilai-nilai keagamaan, harmoni sosial, ketahanan ideologi, dan pelestarian budaya

Tabel 3.17
Program Prioritas Pembangunan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi 5 : Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmoni dan Berbudaya

Tujuan	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tentram dan harmonis dalam keberagaman agama	
Sasaran	**Outcome**	**Program Prioritas**
Meningkatnya rasa aman dan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan masyarakat	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	
	Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	
	Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Program penanganan warga Negara migran korban tindak Kekerasan
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Program pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat
	Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	
	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	
	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Program Perlindungan Perempuan

Tujuan	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tentram dan harmonis dalam keberagaman agama	
Sasaran	**Outcome**	**Program Prioritas**
	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, ekploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Program Perlindungan Khusus Anak
Meningkatnya pelestarian cagar dan warisan budaya	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Program pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat
	Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	
	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

3.5.3 Tema dan Fokus Pembangunan Tahun 2025-2030

Tema dan fokus pembangunan tahunan merupakan arah kebijakan strategis yang dirumuskan untuk menjamin keterpaduan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah dengan implementasi program dan kegiatan tahunan secara lebih operasional. Penyusunan tema dan fokus pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2030 mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain evaluasi terhadap capaian pembangunan periode sebelumnya, dinamika isu strategis daerah dan nasional, serta proyeksi kebutuhan pembangunan jangka menengah yang berkelanjutan.

Tema pembangunan tahunan disusun untuk memberikan penekanan pada prioritas utama pembangunan pada masing-masing tahun, yang mencerminkan upaya percepatan pencapaian visi dan misi daerah. Fokus pembangunan ditetapkan sebagai penjabaran dari tema, yang mengarahkan konsentrasi program dan kegiatan pembangunan pada bidang atau sektor prioritas secara lebih spesifik dan terukur.

Dengan pendekatan ini, diharapkan arah pembangunan Kabupaten Padang Pariaman selama periode 2025–2030 akan berjalan secara sistematis, terfokus, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan secara tepat sasaran, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang berkualitas, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Tahapan pembangunan tahunan yang disusun dari tahun pertama hingga tahun kelima dirancang secara berkesinambungan dan saling mendukung. Pada awal periode, perhatian utama difokuskan pada penguatan fondasi pelayanan publik, pemenuhan layanan dasar, serta peningkatan ketahanan pangan guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara optimal. Selanjutnya, arah pembangunan

diarahkan pada percepatan transformasi ekonomi dan peningkatan inklusi sosial, yang kemudian dilanjutkan dengan upaya memperkuat konektivitas antarwilayah dan daya saing ekonomi daerah. Memasuki tahun keempat, fokus pembangunan bergeser pada konsolidasi pertumbuhan yang berkualitas serta peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan. Sedangkan pada tahun terakhir periode RPJMD, pembangunan ditujukan untuk memperkuat keberlanjutan pembangunan melalui penekanan pada prinsip keadilan, perluasan perlindungan sosial, dan penguatan inovasi daerah secara menyeluruh.

Tabel 3.18
Tema dan Fokus Pembangunan Pada RPJMD Tahun 2026-2030

TEMA PEMBANGUNAN	FOKUS PEMBANGUNAN
Tahun Pertama (2026)	
Penguatan Layanan Publik dan Infrastruktur Dasar untuk Mendorong Pembangunan Inklusif dan Merata	1. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan pendidikan dasar dan menengah. 2. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan perlindungan sosial. 3. Transformasi pelayanan publik melalui digitalisasi sistem pelayanan dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas tata kelola pemerintahan 4. Penguatan ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan, pemberdayaan nagari sebagai pusat pertumbuhan lokal, serta pengembangan tata kelola pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. 5. Pengembangan sistem tata kelola data pembangunan daerah untuk mendukung perencanaan berbasis bukti (*evidence-based planning).* 6. Peningkatan konektivitas infrastruktur dasar seperti akses jalan, air bersih, sanitasi, dan irigasi terutama di wilayah terdampak bencana, serta penyediaan prasarana dan sarana umum termasuk penanganan rumah korban bencana dan relokasi kawasan pemerintah 7. Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan melalui sistem pengelolaan sampah berbasis nagari/desa yang partisipatif dan berkelanjutan.
Tahun Kedua (2027)	
Percepatan Transformasi Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan melalui Penguatan Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Sosial.	1. Peningkatan infrastruktur ketahanan pangan 2. Memperkuat daya saing industri kecil, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta sektor ekonomi kreatif sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi lokal. 3. Mengembangkan sektor pariwisata berkelanjutan serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif berbasis potensi lokal dan budaya daerah. 4. Peningkatan akses perlindungan sosial dan jaminan kesejahteraan 5. Mendorong transformasi ekonomi perdesaan melalui penguatan kelembagaan ekonomi lokal seperti BUMNag dan koperasi sebagai motor penggerak pembangunan desa 6. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan secara berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. 7. Meningkatkan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan dalam pasar kerja dan

TEMA PEMBANGUNAN	FOKUS PEMBANGUNAN
	kegiatan ekonomi produktif
Tahun Ketiga (2028)	
Memperkuat Aksesibilitas Antarwilayah dan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Pemerataan Pembangunan Berbasis Potensi Lokal dan Ekonomi Inklusif	1. Pengembangan dan pemerataan infrastruktur. 2. Peningkatan daya saing sektor unggulan daerah 3. Peningkatan akses layanan dasar dan sosial 4. Peningkatan investasi pada sektor-sektor strategis, penguatan ekspor, serta pengembangan industri kecil dan menengah sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah 5. Pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pembangunan ekonomi wilayah. 6. Pengembangan desa mandiri melalui optimalisasi potensi lokal dan penguatan peran pasar desa sebagai pusat ekonomi masyarakat. 7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta memperkuat kapasitas daerah dalam mitigasi dan adaptasi terhadap risiko bencana
Tahun Keempat (2029)	
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal dan UMKM dan Tata Kelola Yang Efektif	1. Percepatan transformasi digital dalam layanan publik. 2. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis data dan kinerja. 3. Pengembangan kawasan perdagangan dan industri berbasis potensi unggulan lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. 4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. 5. Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya tarik daerah.
Tahun Kelima (2030)	
Peningkatan Daya Saing Daerah dan Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat	1. Penguatan nilai-nilai religius dan moralitas dalam kehidupan sosial 2. Revitalisasi dan pelestarian budaya lokal 3. Penguatan ketahanan sosial masyarakat. 4. Perluasan perlindungan sosial dan mendorong kesetaraan akses terhadap layanan dasar bagi kelompok rentan guna mewujudkan pembangunan yang inklusif dan adil. 5. Penyelesaian proyek strategis daerah

3.6 PROGRAM UNGGULAN PER MISI

3.6.1 Program Unggulan Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dengan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkelanjutan

Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik, meningkatkan efektivitas pelayanan, serta mempercepat pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks RPJMD Kabupaten Padang Pariaman 2025–2029, Misi 1

diarahkan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang responsif, transparan, dan inovatif dengan penguatan kapasitas kelembagaan serta partisipasi aktif masyarakat.

Sebagai perwujudan visi daerah yang progresif dan adaptif terhadap tantangan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menetapkan Program Unggulan dari Misi 1 adalah "MANDIRI" (Modernisasi Akses, Nasehat, Destinasi, Inovasi, Riset, Inspirasi) sebagai pendekatan inovatif yang mendukung pelaksanaan Misi 1. Program ini tidak hanya menekankan aspek birokrasi yang efisien, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi lintas sektor. Program unggulan pada misi 1 ini adalah:

1) Pengembangan Pusat Konsultasi di Setiap Kecamatan
   Layanan pusat konsultasi ini dirancang sebagai ruang kolaboratif untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan sosial, hukum, dan ekonomi. Dengan melibatkan tokoh masyarakat, praktisi hukum, penyuluh sosial, dan aparatur kecamatan, pusat konsultasi ini memperkuat fungsi pelayanan publik yang inklusif dan solutif di tingkat lokal. Tujuan utamanya adalah menciptakan mekanisme penyelesaian masalah secara cepat, tepat, dan berbasis musyawarah.
2) Pengembangan Inovasi di Tingkat Nagari melalui Lomba Inovasi Anak Nagari
   Mendorong kreativitas dan semangat inovasi di tingkat nagari merupakan langkah strategis untuk memperkuat otonomi lokal dan menjawab tantangan pembangunan berbasis komunitas. Lomba inovasi ini menjadi sarana untuk menjaring ide-ide solutif dari anak nagari dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, lingkungan, pelayanan publik, dan pendidikan. Inisiatif ini sekaligus menjadi instrumen penguatan kapasitas SDM dan kaderisasi kepemimpinan lokal yang inovatif.

Tujuan program unggulan pada Misi 1 ini adalah:

1) Meningkatkan kapasitas dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang inklusif dan solutif
2) Mendorong inovasi berkelanjutan di tingkat nagari sebagai pilar utama transformasi daerah
3) Mewujudkan pelayanan publik yang adaptif, berbasis data, serta menjawab kebutuhan riil masyarakat.

3.6.2 Program Unggulan Misi 2 : Mencipatakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan investasi jangka panjang yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah secara menyeluruh. SDM yang cerdas, sehat, produktif, dan berdaya saing menjadi pilar utama dalam menjawab tantangan zaman, khususnya dalam menghadapi transformasi sosial ekonomi berbasis digital dan pengetahuan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Misi 2 dalam RPJMD Tahun 2025–2029 menegaskan komitmennya untuk mendorong peningkatan kualitas

pendidikan dan menjamin akses yang merata terhadap layanan pendidikan, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan.

Program unggulan yang mendukung pelaksanaan Misi 2 Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing adalah Program 'BANGKIT' (Beasiswa Angkat Generasi Indonesia Terdepan dan JAMSEHAT (Jaminan Kesehatan Masyarakat Sejahtera)), yang merupakan inisiatif strategis Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk meningkatkan akses pendidikan bagi generasi muda berprestasi, khususnya dari keluarga kurang mampu, guna mencetak SDM unggul, mandiri, dan berdaya saing tinggi, dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Beasiswa SAN (Sarjana Anak Nagari)
   Pemberian beasiswa bagi siswa SMA atau sederajat yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik, berasal dari keluarga tidak mampu, dan tidak tercakup dalam skema beasiswa nasional seperti KIP Kuliah atau beasiswa swasta lainnya. Melalui Beasiswa SAN, pemerintah daerah memberikan bantuan finansial yang memungkinkan siswa melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi tanpa terkendala masalah ekonomi. Inisiatif ini tidak hanya memutus rantai kemiskinan, tetapi juga melahirkan SDM unggul lokal yang diharapkan dapat kembali membangun nagari asalnya.
2) Beasiswa AMEH (Anak Mande Ekonomi LemaH)
   Beasiswa ini diperuntukkan bagi siswa tingkat SMP yang menunjukkan prestasi namun berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi lemah. Sasaran program ini adalah menjamin kesinambungan pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, sehingga tidak terjadi putus sekolah akibat keterbatasan biaya. Beasiswa AMEH juga menjadi langkah awal untuk membentuk motivasi dan semangat juang dalam meraih cita-cita sejak usia dini
3) Bantuan Seragam Gratis bagi siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
4) Pemberian BPJS Gratis kepada masyarakat
5) Kunjungan rutin tenaga kesehatan ke rumah warga lanjut usia yang memiliki keterbatasan mobilitas untuk mengakses layanan di puskesmas atau rumah sakit. Program ini tidak hanya menjadi solusi akses, tetapi juga memperkuat pendekatan humanis dalam pelayanan kesehatan melalui Lansia Sehat Bersama DARLING (Dokter dan Perawat Keliling)
6) Pendampingan berkelanjutan bagi ibu hamil dan anak usia dini oleh tenaga kesehatan dan tim pendamping keluarga. Program ini difokuskan untuk menurunkan prevalensi stunting dan meningkatkan kualitas gizi serta kesadaran keluarga terhadap pentingnya 1.000 hari pertama kehidupan melalui program KIA Cegah Stunting.

Tujuan dari Program Unggulan Misi 2 adalah :

1) Menurunkan kesenjangan akses pendidikan.
2) Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada generasi muda untuk meraih pendidikan tinggi.

3) Menciptakan generasi muda unggul, berkarakter, dan mampu bersaing secara nasional dan global.
4) Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang layak dan terjangkau.
5) Memastikan layanan kesehatan bersifat proaktif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk lansia yang memiliki keterbatasan mobilitas.
6) Menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak.
7) Mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan nasional dan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

3.6.3 Program Unggulan Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju dan Merata

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi 3 RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 yaitu mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif, maju, dan merata, Pemerintah Daerah menginisiasi Program Unggulan "GEBRAK" (Gerakan Berbasis Ekonomi Kreatif dan Inklusif). Program ini hadir sebagai respons terhadap tantangan ketimpangan ekonomi, kurang optimalnya pemanfaatan potensi lokal, serta keterbatasan akses masyarakat terutama pemuda dan pelaku usaha mikro kecil terhadap ekosistem ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.

Tujuan utama dari program unggulan ini adalah untuk mendorong transformasi ekonomi daerah yang berbasis pada potensi lokal dan kekuatan sumber daya manusia di nagari, khususnya generasi muda. GEBRAK dirancang untuk mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah produk lokal, serta penguatan ekonomi nagari yang berbasis pertanian, industri kreatif, dan kewirausahaan sosial.

Program unggulan dari Misi 3 mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif, maju, dan merata adalah :

1) pengembangan produk unggulan berbasis kawasan melalui OVOP *(One Village One Product).*
2) pelatihan dan sertifikasi kreativitas berbasis potensi lokal serta kompetensi pemuda/milenial melalui Bengkel Kreatif Anak Nagari.
3) pengembangan potensi ekonomi nagari berbasis kekayaan lokal dan pemberdayaan petani milenial melalui Peningkatan Ekonomi Nagari.
4) Mengembangkan sektor pariwisata, pertanian dan perikanan sebagai kekuatan utama dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
5) Revitalisasi Pokdarwis, Destinasi Wisata Nagari Unggulan, dan Peningkatan Kualitas Lingkungan

Tujuan program unggulan pada Misi 3 ini adalah:

1) Mendorong transformasi ekonomi daerah yang berbasis pada potensi lokal dan kekuatan sumber daya manusia di nagari, khususnya generasi muda.

2) Mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah produk lokal, serta penguatan ekonomi nagari yang berbasis pertanian, industri kreatif, dan kewirausahaan sosial.
3) Mengangkat potensi ekonomi khas tiap nagari dengan mengembangkan satu produk unggulan yang memiliki nilai tambah dan daya saing tinggi, serta memperluas akses pasar melalui pendekatan kawasan dan integrasi hulu–hilir. Program ini juga mendorong lahirnya *petani milenial* yang inovatif dan adaptif terhadap teknologi.
4) Meningkatkan kapasitas dan daya saing generasi muda dalam bidang industri kreatif dan ekonomi digital, melalui pelatihan berbasis potensi lokal serta program sertifikasi yang terstandarisasi dan mencetak wirausahawan muda yang produktif dan inovatif.
5) Memperkuat basis ekonomi nagari dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal melalui kegiatan produktif dan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat ketahanan ekonomi lokal secara berkelanjutan.
6) Meningkatkan kontribusi sektor unggulan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
7) Mengembangkan destinasi pariwisata unggulan daerah.
8) Mewujudkan ekonomi daerah yang tangguh dan adaptif dengan kolaborasi antara pelaku usaha lokal, koperasi merah putih dan investor dalam mengelola potensi sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan secara berkelanjutan.

3.6.4 Program Unggulan Misi 4 : Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Infrastruktur tidak hanya dilihat sebagai prasarana fisik untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial, tetapi juga sebagai wadah penting dalam mendorong pengembangan potensi sumber daya manusia dan kohesi sosial masyarakat. Dalam kerangka pencapaian Misi 4 RPJMD Kabupaten Padang Pariaman 2025–2029, pembangunan infrastruktur diarahkan agar lebih inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya generasi muda.

Untuk mendukung misi ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman meluncurkan Program Unggulan “MEKAR” (Membangun Ruang Publik Kreatif) sebagai upaya strategis dalam menciptakan infrastruktur sosial yang adaptif dan partisipatif. Program ini memiliki fokus pada pengembangan ruang publik yang mendorong tumbuhnya kreativitas, spiritualitas, dan produktivitas generasi muda serta pelestarian nilai-nilai budaya dan keagamaan.

Program unggulan dari Misi 4 Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan adalah :

1) Pembangunan ruang publik berbasis masjid dengan merevitalisasi area pekarangan masjid di setiap kecamatan menjadi kawasan terbuka yang dilengkapi fasilitas untuk kegiatan seni, literasi, edukasi keagamaan, dan olahraga ringan. Diharapkan, ruang publik ini mampu menjadi pusat aktivitas

sosial yang mempererat hubungan antar generasi dan mendorong kemajuan pemuda nagari.

2) Pembangunan Youth Centre di beberapa titik strategis, yang menyediakan sarana pengembangan minat dan bakat pemuda dalam bidang seni, teknologi, kewirausahaan, dan budaya.
3) Mengembangkan kawasan religi dan budaya sebagai pusat wisata edukatif melalui pengembangan kawasan Syech Burhannuddin. Kawasan ini akan ditata dan dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk mendukung peran strategisnya sebagai destinasi wisata religi dan budaya unggulan, yang tidak hanya menjadi pusat ziarah dan pelestarian warisan keagamaan, tetapi juga mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif lokal di sekitar kawasan.
4) Mempercepat pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, sarana publik lainnya yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.
5) Revitalisasi sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang paripurna kepada masyarakat

Tujuan program unggulan pada Misi 4 ini adalah :

1) Mendukung pengembangan potensi seni, literasi, olahraga, serta pendidikan keagamaan yang menyasar berbagai kelompok usia, khususnya generasi muda.
2) Meningkatkan kapasitas dan kreativitas pemuda nagari, dengan menyediakan *Youth Centre* sebagai ruang pembinaan dan ekspresi pemuda dalam bidang seni, teknologi, kewirausahaan, dan budaya lokal. Pusat ini dirancang untuk menjadi tempat pengembangan potensi generasi muda yang produktif dan berdaya saing.
3) Memperkuat pelestarian nilai-nilai budaya dan keagamaan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif masyarakat sekitar.
4) Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah, melalui percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan serta sarana publik lainnya. Infrastruktur ini menjadi prasyarat penting bagi pergerakan ekonomi, distribusi layanan dasar, serta penguatan konektivitas antar nagari dan kecamatan.
5) Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, melalui revitalisasi sarana dan prasarana kesehatan yang layak, representatif, dan ramah masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk mendukung terselenggaranya pelayanan kesehatan yang paripurna, merata, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3.6.5 Program Unggulan Misi 5 : Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya.

Dalam rangka memperkuat kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Padang Pariaman yang religius, harmonis, dan berbudaya, Pemerintah Daerah menetapkan program unggulan "MAJU" (Meningkatkan Apresiasi dan Jaminan untuk Umat) sebagai bagian dari

strategi pelaksanaan Misi 5 RPJMD 2025–2029. Program ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran para tokoh agama, tokoh adat, serta seniman dan budayawan dalam menjaga nilai-nilai luhur, identitas lokal, serta ketahanan sosial masyarakat di tengah tantangan modernisasi dan pergeseran budaya.

Ketiga unsur tersebut memiliki kontribusi besar dalam membentuk karakter generasi muda serta memperkuat harmoni sosial lintas golongan dan komunitas. Namun demikian, keberadaan dan pengabdian mereka seringkali belum mendapatkan pengakuan dan dukungan yang layak dari negara. Melalui program "MAJU", pemerintah daerah berkomitmen memberikan bentuk nyata apresiasi dan jaminan sosial sebagai penghormatan terhadap dedikasi mereka.

Program unggulan dari Misi 5 Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan adalah :

1) Penguatan Apresiasi dan Insentif bagi Seniman dan Budayawan Lokal
   Memberikan penghargaan dan insentif kepada seniman dan budayawan lokal yang secara konsisten menjaga, mengembangkan, dan melestarikan kekayaan budaya daerah, sehingga dapat terus menumbuhkan semangat berkesenian dan memperkuat identitas budaya lokal di kalangan generasi muda.
2) Pemberian Insentif dan Apresiasi bagi Pemuka Agama dalam Penguatan Nilai Keagamaan
   Memberikan apresiasi dalam bentuk insentif kepada pemuka agama atau tuangku yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan di masyarakat, membina moral generasi muda, serta menjaga kerukunan umat beragama sebagai bagian penting dari ketahanan spiritual masyarakat Padang Pariaman.
3) Pemberian Insentif bagi Tokoh Adat dalam Pelestarian Nilai Adat dan Kearifan Lokal
   Memberikan insentif kepada tokoh adat yang terus aktif dalam merawat nilai-nilai adat dan kearifan lokal, serta menjaga kesinambungan tradisi sebagai warisan identitas nagari. Insentif ini diharapkan menjadi bentuk dukungan moral dan material yang memperkuat posisi tokoh adat dalam struktur sosial masyarakat.

Tujuan program unggulan pada Misi 5 ini adalah:

1) Meningkatkan peran dan kesejahteraan ulama, pemangku adat dalam membangun karakter generasi muda yang agamais dan berbudaya sesuai falsafah minang "Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah"
2) Memperkuat ketahanan sosial dan identitas lokal.
3) Menjamin keberlangsungan peran tokoh adat dalam pelestarian nilai-nilai kearifan lokal, serta memperkuat posisi adat sebagai pilar sosial yang mampu menjaga harmoni dan tatanan kehidupan masyarakat nagari.

A. Program Prioritas Pembangunan Daerah disertai Pagu Indikatif

Tabel 3.19
Program Prioritas Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	80,10	539.658.198.741	81,15	516.233.888.320	81,65	506.233.888.300	82,35	505.733.888.300	83,05	519.432.866.800	85,15	505.294.681.800	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	85,00		86,31		88,01		90,42		92,76		95,30		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	93,25		94,10		94,85		95,60		96,20		97,15		
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	62,80	95.469.814.466	65,84	233.519.488.100	68,88	148.135.259.200	71,92	197.490.363.900	74,96	183.291.385.400	78,00	192.859.570.400	
				Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	99,19		99,24		99,29		99,35		99,4		99,46		
				Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	%	64,44		70,93		71,69		72,46		73,22		73,98		
				Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	60,31		64,63		70,38		77,57		86,19		94,82		
				Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	%	85,90		86,40		86,90		87,40		87,90		88,40		
				Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	%	74,28		75,18		76,08		76,98		77,88		78,78		
				Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	%	68,71		70,21		71,71		73,21		74,71		76,21		
				Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD	%	69,98		70,98		71,98		72,98		73,98		74,98		
				Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP	%	68,53		69,53		70,53		71,53		72,53		73,53		
				Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	%	59,95		62,45		64,95		67,45		69,95		72,45		
				Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	%	57,03		59,43		61,83		64,23		66,63		69,03		
1	01	03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	%	8,05	51.999.000	8,05	51.999.000	8,05	59.286.500	62,46	66.421.900	98,96	66.421.900	100	66.421.900	
1	01	04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks pemerataan guru	Indeks	0,34	208.747.400	0,68	208.747.400	1,02	238.002.700	1,36	266.647.500	1,7	266.647.500	2,04	266.647.500	
				Persentase Guru Berserrtifikasi	%													
1	01	05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan/diperbarui	%	0	0	2,73	200.000.000	2,75	228.029.300	2,8	360.000.000	2,85	360.000.000	2,9	360.000.000	

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	01	06	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase pengembangan bahasa dan sastra	%	0	0	8,05	200.000.000	8,05	228.029.300	62,46	255.473.800	98,96	255.473.800	98,96	255.473.800	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																		
2	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	%	64	1.321.909.700	65	1.321.909.700	70	1.507.170.700	75	1.823.028.700	80	1.823.028.700	80	1.823.028.700	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	22	03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	%	21	23.725.000	22	23.725.000	23	27.049.900	24	60.000.000	25	60.000.000	25	60.000.000	
2	22	05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	%	66	468.887.500	67	468.887.500	69	534.600.400	81	598.942.300	85	598.942.300	90	598.942.300	
				Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	%	68,2		69,5		70,3		71,8		72,9		80,1		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																		
1	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	98.080.594.709	100	112.218.648.594	100	108.630.926.356	100	109.271.673.248	100	109.944.138.035	100	112.575.860.793	**Dinas Kesehatan**
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	B		A		A		A		A		A		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun	%	0,8	168.431.006.895	0,8	94.263.956.448	0,8	112.903.818.482	0,8	85.126.225.517	0,8	116.989.737.781	0,8	117.604.404.644	
				Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	70		70,01		70,02		70,03		70,04		70,05		
				Prevalensi Obesitas ≥ 18 tahun	%	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100		100		100		100		100		100		
				Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	94		94		94		94		98		98		
				Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	%	85		85,01		85,02		85,03		85,04		85,05		
				Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Faskes dengan Nilai Indeks Nasional Mutu (INM) 100 %	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase lanjut usia yang mandiri	%	87,5		87,75		88		88,5		89		89,5		

Kode	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
				Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	%	12,4		11,4		10,4		9,4		8,4		7,4		
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	%	99		99		100		100		100		100		
		Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)	%	88		88,4		88,8		89,2		89,6		90		
		Angka Kematian Balita	Orang/1000 kelahiran hidup	15		13,8		13,10		12,50		11,90		11,90		
		Angka Kematian Bayi	Orang/1000 kelahiran hidup	12,62		11,63		10,97		10,46		9,96		9,96		
		Angka Kematian Neonatal	Orang/1000 kelahiran hidup	9,2		8,4		8,0		7,6		7,2		7,2		
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100		100		100		100		100		100		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100		100		100		100		100		100		
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100		100		100		100		100		100		
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100		100		100		100		100		100		
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100		100		100		100		100		100		
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100		100		100		100		100		100		
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100		100		100		100		100		100		
		Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100		100		100		100		100		100		
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100		100		100		100		100		100		
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100		100		100		100		100		100		

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100		100		100		100		100		100		
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	%	100	2.101.525.600,00	100	1.121.311.600	100	243.311.600	100	3.521.311.600	100	2.621.311.600	100	2.621.311.600	
				Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	%	100		100		100		100		100		100		
1	02	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar	%	10	474.341.000	15	306.350.000	20	168.350.000	25	123.721.000	30	168.350.000	100	168.350.000	
				Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	%	10		12		15		18		20		22		
				Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	%	70,00		75,00		80,00		85,00		85,00		85,00		
				Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	100		100		100		100		100		100		
1	02	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan	%	100	443.953.440	100	444.145.010	100	643.614.194	100	846.050.355	100	963.640.813	100	1.113.985.599	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (RSUD)																		
1	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	29.812.592.342	100	44.445.000.000	100	43.265.000.000	100	43.265.000.000	100	43.265.000.000	100	43.265.000.000	**Rumah Sakit Umum Daerah**
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian 48 Jam setelah dirawat untuk setiap 1000 penderita keluar dari Rumah Sakit	%	1,50	61.767.949.553	1,25	135.935.000.000	1,05	468.435.000.000	0,98	597.735.000.000	0,70	565.285.000.000	0,50	579.785.000.000	
				Angka Pemanfaatan Tempat Tidur RS (Bed Occupancy Rate =BOR)(60%-85%)	%	68		70		72		74		76		78		
				Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	%	0,48		0,66		0,76		0,86		0,96		1,06		
				Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	%	100		100		100		100		100		100		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
1	03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang	%	100	11.756.702.322	100	14.900.000.000	100	13.400.000.000	100	13.400.000.000	100	12.770.000.000	100	12.350.000.000	**Dinas Pekerjaan Umum dan**

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Daerah Kabupaten/Kota	ditindaklanjuti														Penataan Ruang
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	85		85,05		85,10		85,15		85,20		85,25		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	%	13,60	3.004.909.500	15,85	4.840.000.000	18,1	4.700.000.000	20,35	4.700.000.000	22,6	4.637.000.000	24,85	4.595.000.000	
				Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	%	67,47		68,17		68,87		69,57		70,27		70,97		
				Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	%	67,47		68,17		68,87		69,57		70,27		70,97		
				Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota	%	48,19		48,25		48,33		48,43		48,55		48,69		
1	03	03	Program Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase terlaksananya pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	%	83,89	0	84,19	520.000.000	84,49	500.000.000	84,79	500.000.000	85,09	491.000.000	85,39	485.000.000	
				Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	%	83,89		84,19		84,49		84,79		85,09		85,39		
1	03	04	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Persentase kondisi baik infrastruktur persampahan	%	0,00	0	1	110.000.000	1,5	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2,5	95.500.000,00	2	92.500.000,00	
1	03	05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	2,34	4.422.790.500	2,38	310.000.000	2,42	300.000.000,00	2,46	300.000.000,00	2,5	295.500.000,00	2,54	292.500.000,00	
				Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	77,07		77,37		77,67		77,97		78,27		78,57		
1	03	06	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	%	24,68	616.400.000	25,18	160.000.000	25,68	150.000.000,00	26,18	150.000.000,00	26,68	145.500.000,00	27,18	142.500.000,00	
1	03	08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	%	62,00	2.497.310.500	64,00	1.360.000.000	66,00	1.300.000.000,00	68,00	1.300.000.000,00	70,00	1.273.000.000,00	72,00	1.255.000.000,00	
1	03	10	Program penyelenggaraan jalan	Persentase jalan kabupaten yang ditingkatkan	%	63,94	18.347.162.690	64,94	10.200.000.000	66,44	10.000.000.000,00	67,94	10.000.000.000,00	69,44	9.910.000.000,00	70,94	9.850.000.000,00	
				Persentase jembatan kabupaten yang ditingkatkan	%	92,31		94,31		96,31		98,31		100,31		102,31		
1	03	12	Program	Persentase kepatuhan pemanfaataan ruang	%	50,00	399.038.352	55,00		60,00	600.000.000,00	65,00	600.000.000,00	70,00	546.000.000,00	75,00	510.000.000,00	

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			penyelenggaraan penataan ruang	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	%	20		20	720.000.000	20		20		20		20		
				Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	%	100		100		100		100		100		100		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																		
1	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	10.641.056.082	100	8.516.813.164	100	8.116.813.164	100	8.116.813.164	100	8.116.813.164	100	7.792.403.164	**Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	80		80		80		80		80		80		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
1	05	02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	112.362.600	100	155.975.000,00	100	155.975.000,00	100	155.975.000,00	100	155.975.000,00	100	155.975.000,00	
				Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	%	84,5		85		85,2		85,50		86		87		
				Presentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	65		70		75		80		85		90		
				Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	%	62		65		67,5		70		72,5		75		
				Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	%	30		35		40		45		50		55		
				Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	%	40		50		55		65		70		75		
				Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya	%	11,43		14,29		17,14		20		22,86		25,71		
				Jumlah PPNS pada Satpol PP	Orang	3		4		5		6		7		7		
1	05	04	Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan kebakaran dan Non Kebakaran	Cakupan penyebaran Informasi dan Edukasi rawan Kebakaran	%	60	556.044.188	65	577.211.836	70	577.211.836	75	577.211.836	80	577.211.836	85	433.696.836	
				Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100		100		100		100		100		100		
				Waktu tanggap (response time) penanganan	%	15 Menit		14.50 Menit		13 Menit		12 Menit		11 Menit		10 Menit		

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				kebakaran														
				Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100		100		100		100		100		100		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA																		
1	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	6.006.806.154	100	4.984.785.079	100	4.811.600.000	100	4.811.600.000	100	4.811.600.000	100	4.811.600.000	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	83		86		89		92		95		100		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
1	05	03	Program Penanggulangan bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	%	100	518.070.900	100	215.214.921	100	188.400.000	100	188.400.000	100	188.400.000	100	188.400.000	
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase penanganan pasca bencana	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase penanganan pasca bencana	%	100		100		100		100		100		100		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																		
1	06	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	3.992.543.347	100	3.522.671.000	100	3.363.618.000	100	3.349.841.972	100	3.349.841.972	100	3.213.848.000	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,3		80,35		80,4		80,45		80,5		80,55		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dlaam panti rehabilitasi sosial	%	80	0	82	133.400.000	84	153.400.000	86	153.400.000	88	153.400.000	90	96.700.000	

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana pada Masa Tanggap darurat dan Pasca Bencana sesuai Standar	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	%	65		67		69		71		73		75		
				Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	%	63		68		70		72		75		78		
				Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	%	78		80		82		84		86		88		
1	06	03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan dam dan luar negeri yang mendapatkan layanan pemulangan	Orang	2	6.800.000	2	6.800.000	3	6.800.000	3	6.800.000	4	6.800.000	4	6.800.000	
				Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	%	100		100		100		100		100		100		
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	241.130.200	100	177.682.000	100	177.682.000	100	191.458.028	100	191.458.028	100	142.652.000	
				Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	%	100		100		100		100		100		100		

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentae Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100		100		100		100		100		100		
				Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	Indeks	67		68		69		70		71		72		
				Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	Indeks	64		65		66		67		68		69		
				Indeks Peranan Sosial	Indeks	46		48		50		52		54		56		
1	06	05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	100	0	100	71.910.000	100	31.400.000	100	31.400.000	100	31.400.000	100	31.400.000	
				Persentase penerima Manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Daerah yang Melaksanakan peneglolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	%	100		100		100		100		100		100		
				Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar	%	81,25		81,50		82		82,25		82,50		83		
				Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	%	4,81		5		5,15		5,2		5,25		5,3		
				Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	%	88		89		90		91		92		93		
1	06	06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	426.257.200	100	157.727.000	100	129.700.000	100	129.700.000	100	129.700.000	100	82.100.000	
				Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan layanan pemulihan sosial	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	%	75		78		80		82		84		86		

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
2	08	02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Aggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	%	3,1	151.841.000	3.120	119.050.000	3.150	102.300.000,00	3,20	102.300.000,00	3.225	102.300.000,00	3.250	102.300.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	60		61		62		63		64		65		
2	08	03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	46.057.200	100	119.730.000	100	91.430.000,00	100	91.430.000,00	100	91.430.000,00	100	-	
2	08	04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Pembelajaran keluarga (puspaga) yang berspektif Gender dan Hak Anak sesuai standar	%	45	194.045.200	50	122.030.000	60	111.660.000,00	70	111.660.000,00	80	111.660.000,00	90	-	
2	08	06	Program Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	%	60,33	84.352.400	60,83	78.850.000	61,33	72.350.000,00	61,83	72.350.000,00	62,33	72.350.000,00	62,83	72.350.000,00	
2	08	07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layana komprehensif	%	28	107.606.900	32	143.420.000	35	143.760.000	38	143.760.000	42	143.760.000	45	143.760.000	
				Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	28		32		35		38		42		45		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																		
2	11	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	5.302.113.859	100	4.891.905.051	100	24.004.999.991	100	12.955.904.536	100	15.494.495.445	100	15.743.073.535	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	85		85		85		85		85		85		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
2	11	02	Program perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	%	85	67.606.800	100	5.000.000	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	
2	11	03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase kualitas air yang memenuhi standar baku mutu	%	100	386.302.950	100	355.000.000	100	7.950.000.000	100	8.300.000.000	100	8.900.000.000	100	9.200.000.000	
				Persentase kualitas udara yang memenuhi standar baku mutu	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase peningkatan kelompok masyarakat peduli lingkungan	%	45		50		55		60		65		70		
2	11	04	Program pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH	%	100	34.041.800	100	35.000.000	100	4.800.000.000,00	100	4.800.000.000,00	100	4.850.000.000,00	100	4.850.000.000,00	

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	11	05	Program Pengendalian Bahan berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang terkelola	%	100	3.327.000	100	2.000.000	100	370.000.000,00	100	400.000.000,00	100	450.000.000,00	100	500.000.000,00	
2	11	06	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan, Izin PPLH dan PUULH	%	79	17.437.300	79,05	19.000.000	79,10	300.000.000,00	79,15	450.000.000,00	79,20	600.000.000,00	79,25	750.000.000,00	
2	11	08	Program Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	%	20	11.775.000	40	-	60	500.000.000,00	80	700.000.000,00	100	900.000.000,00	100	900.000.000,00	
2	11	11	Program Pengelolaan persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Angka	36	414.572.949	41	17.594.949	46	15.200.000.009	51	15.200.000.009	56	15.400.000.009	61	15.500.000.009	
				Persentase Pengelolaan Sampah yang dilakukan	%	100		4		5		6		7		8		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN																		
1	04	02	Program pengembangan dan Perumahan	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	41.525.010	100	38.000.000	100	64.780.000.000	100	45.065.000.000	100	45.565.000.000	100	46.165.000.000	**Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan**
				Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	9,41		10,61		11,81		13,21		14,61		16,21		
				Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100		100		100		100		100		100		
1	04	03	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	4,66	330.786.258	5,59	35.000.000	6,39	50.520.000.000	7,29	50.635.000.000	8,29	50.735.000.000	9,49	50.835.000.000	
				Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Unit	50		65		75		85		95		105		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL																		
2	12	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	5.069.581.276	100	3.940.000.000	100	3.700.000.000	100	3.700.000.000	100	3.700.000.000	100	3.700.000.000	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	94,2		90		91		91,5		92		92,5		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		
2	13	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	3.273.502.949	100	2.770.000.000	100	2.655.000.000	100	2.655.000.000	100	2.655.000.000	100	2.655.000.000	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan**

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	100		100		100		100		100		100		Desa
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
2	13	03	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	100	0	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	
2	13	04	Program Administrasi pemerintahan Desa	Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	%	100	102.568.500,00	100	305.000.000,00	100	115.000.000,00	100	172.500.000,00	100	172.500.000,00	100	172.500.000,00	
				Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	22,33		24,27		26,21		28,16		30,10		32,04		
				Persentase Fasilitasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Fasilitasi Tata Kelola keuangan dan Aset Desa	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Fasilitasi Bumnag	%	6,80		6,80		6,80		6,80		6,80		6,80		
2	13	05	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	100	710.208.800	100	315.000.000,00	100	320.000.000,00	100	320.000.000,00	100	320.000.000,00	100	320.000.000,00	
				Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	44,66		0,97		0,97		0,97		0,97		0,97		
				Persentase Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong	%	3,88		4,85		4,85		4,85		4,85		4,85		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
2	14	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	3.888.960.833	100	3.610.131.330	100	3.506.325.000	100	3.515.010.000	100	3.523.460.000	100	3.490.262.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	75		75		75		75		78		81		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
2	14	02	Program pengendalian Penduduk	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Wanita	Umur	22,7	493.445.000	23	543.484.650	23,25	415.915.000	23,5	415.064.000	24	416.969.000	24,5	329.874.000	
				Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	indeks	74		79,7		83,4		85,8		87,3		88,3		
				Kepadatan Penduduk	jiwa/km2	341		347		353		359		365		372		
2	14	03	Program pembinaan Keluarga berencana (KB)	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	63,7	7.452.049.500	63,9	3.750.254.020	64	2.830.273.000	64,1	2.825.298.000	64,2	2.820.447.000	64,3	2.230.688.000	
				Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	%	14		12,3		11,1		10,2		9,5		9		
				Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	%	24,4		34		43,7		53,4		62,1		67,1		
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	15,21		15,19		15,17		15,15		15,13		15,11		
2	14	04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	%	65,65	1.987.000.000	65,68	1.846.130.000	65,7	1.397.487.000	65,73	1.394.628.000	65,76	1.389.124.000	65,79	1.099.176.000	

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	per1000 kelahiran	5,0		4,0		3,4		3,1		2,9		2,7		
				Indeks Lansia Berdaya	Indeks	65,5		66,3		67		67,6		68,3		68,9		
				Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	81,3		82,9		84,3		85,6		86,9		88		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																		
2	15	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	5.042.081.673	100	4.159.000.000	100	4.060.000.000	100	4.060.000.000	100	4.065.000.000	100	4.061.000.000	**Dinas Perhubungan**
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	82		83		83		84		84		85		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
2	15	02	Program penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ)	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	86	19.104.504.300	88	12.723.000.000	89	9.660.000.000	89	9.660.000.000	90	9.655.000.000	91	7.629.000.000	
				Konektivitas Darat	rasio	0,52		0,54		0,55		0,56		0,57		0,58		
				Persentase Keselamatan Berlalu Lintas	%	85		87		87		88		88		89		
2	15	03	Program Pengelolaan Pelayaran	Konektivitas Laut	rasio	0	0	20	0,00	22	20.000.000,00	23	20.000.000,00	24	20.000.000,00	25	20.000.000,00	
2	15	04	Program Pengelolaan Penerbangan	Persentase Pengendalian KKOP	%	0	0	20	0,00	22	20.000.000,00	23	20.000.000,00	24	20.000.000,00	25	20.000.000,00	
2	15	05	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	%	88	1.440.300	88	18.000.000	89	20.000.000,00	89	20.000.000,00	90	20.000.000,00	90	20.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOUNIKASI DAN INFORMATIKA																		
2	16	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	3.616.844.912	100	3.800.000.000	100	2.750.000.000	100	2.750.000.000	100	2.750.000.000	100	2.650.000.000	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
2	16	02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	%	70	649.170.000	72	176.350.000	75	188.985.000	80	202.883.500	83	218.171.850	86	184.989.035	
				Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	%	92		92,92		93,85		94,79		95,74		96,7		
				Persentase Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	78,33		81,34		85,65		87,45		89,96		92,34		
				Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah	%	92		92,92		93,85		94,79		95,74		96,7		

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Kabupaten/Kota														
2	16	03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (TIK)	%	100	2.540.390.800	100	0	100	2.100.031.000	100	2.080.034.100	100	2.058.037.510	100	2.008.841.261	
				Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (Egov)	%	78,88		79,67		80,47		81,28		82,09		82,91		
				Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	50		60		70		80		90		100		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																		
2	20	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Penyelenggaraan Statistik Sektoral	%	2,8	4.730.000,0	3	55.440.000	3,2	60.984.000	3,4	67.082.400	3,6	73.790.640	3,8	56.169.704	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
				Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100		100		100		100		100		100		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																		
2	21	02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	2	10.700.000	2,5	50.000.000	3	50.000.000	3,5	50.000.000	4	50.000.000	4,5	50.000.000	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
				Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	2		2,5		3		3,5		4		4,5		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																		
3	30	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	6.129.299.434	100	5.497.293.255	100	5.222.963.816,00	100	5.222.963.816,00	100	5.222.963.816,00	100	5.222.963.816,00	**Dinas Perdagangan, Tenaga kerja, Koperasi dan UKM**
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	100		100		100		100		100		100		

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
3	30	04	Program Stabilisasi Harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting	%	6	13.500.500	6	17.662.681	6	21.306.185,00	6	21.306.185,00	6	21.306.185,00	6	21.306.185,00	
				Persentase kinerja realisasi pupuk	%	53		57		61		65		69		72		
3	30	05	Program Pengembangan Eksport	Nilai Ekspor Barang	%	10	0	4,20	8.831.340	4,50	8.355.170,00	4,70	8.355.170,00	4,80	8.355.170,00	5,10	8.355.170,00	
3	30	07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase promosi Produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	%	20	200.841.600	18	123.638.770	17,25	134.385.896,00	18	134.385.896,00	18	134.385.896,00	18	134.385.896,00	
				Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota	Nilai	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																		
2	07	02	Program perencanaan tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	0	0	0	13.247.011	0	12.532.755	0	12.532.755	0	12.532.755	0	12.532.755	**Dinas Perdagangan, Tenaga kerja, Koperasi dan UKM**
				Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	9,34		9,84		10,34		10,84		11,34		11,84		
				Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	%	23,55		24,05		24,55		25,05		25,55		26,05		
2	07	03	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	%	70	17.399.200	71	22.078.351	71	25.065.510,00	72	25.065.510,00	73	25.065.510,00	74	25.065.510,00	
				Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,85		0,85		0,86		0,87		0,88		0,89		
2	07	04	Program Penempatan tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	13,5	0	14	13.247.011	14,5	12.532.755,00	15	12.532.755,00	15,5	12.532.755,00	16	12.532.755,00	
				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah/Jiwa	71,78		72,3		73,1		73,85		74,6		75,28		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																		
2	17	06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	25	9.934.500	25	8.773.495	40	21.668.716,00	50	21.668.716,00	55	21.668.716,00	60	21.668.716,00	**Dinas Perdagangan, Tenaga kerja, Koperasi dan UKM**
2	17	07	Program pemberdayaan Usaha Menengah, usaha Kecil dan usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Kecil yang Bertarsnformasi dari Informal ke Formal	%	0,35	29.386.400	0,33	28.070.946	0,4	34.912.580	0,42	34.912.580	0,44	34.912.580	0,46	34.912.580	
				Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	65,5		65,51		65,53		65,56		65,58		65,6		
				Pertumbuhan Wirausaha	%	0,34		0,36		0,39		0,41		0,43		0,45		
2	17	08	Program pengembangan UMKM	Proporsi UKM Menjalin kemitraan dan ekspor	%	0,35	0	0,37	13.247.011	0,39	12.532.755	0,42	12.532.755	0,45	12.532.755	0,47	12.532.755	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN SATU PINTU																		
2	18	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang	%	100	4.595.624.363	100	4.227.000.000	100	4.084.000.000	100	4.084.000.000	100	4.084.000.000	100	4.084.000.000	**Dinas Penanaman**

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Daerah Kabupaten/Kota	ditindaklanjuti														Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	91,06		91,07		91,08		91,09		91,10		91,11		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	10	18.390.900	12	11.000.000	15	11.000.000,00	17	11.000.000,00	19	11.000.000,00	21	11.000.000,00	
2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investor yang Berinvestasi	%	1,10	9.863.000	1,20	10.000.000	1,30	8.000.000,00	1,50	8.000.000,00	1,70	8.000.000,00	1,90	8.000.000,00	
2	18	04	Program pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai Ketentuan	%	85,00	26.822.015	85,50	21.000.000	86,00	20.000.000,00	86,50	20.000.000,00	87,00	20.000.000,00	87,50	20.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																		
3	31	02	Program Perencanaan Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	%	3,2	16.250.000	3,4	18.000.000	3,6	18.000.000	3,8	18.000.000	4,0	18.000.000	4,2	18.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian
				Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	3,2		3,4		3,6		3,8		4,0		4,2		
				Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah	%	3,1		3,2		3,3		3,4		3,5		3,6		
				Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	68,28		68,30		68,50		68,70		68,90		69,10		
3	31	03	Program Pengendalian izin Usaha Industri	Persentase izin Usaha Industri yang diterbitkan	%	35	5.000.000	37	4.000.000	39	4.000.000	41	4.000.000	43	4.000.000	45	4.000.000	
				Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	3		3,2		3		3,6		4		4,0		

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	1		1		1		1		1		1		
				Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%	44,5		45		45,5		46		46,5		47		
				Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan.	%	100		100		100		100		100		100		
3	31	04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Informasi Industri Secara Lengkap, akurat dan terkini	%	65	4.800.000	67	3.000.000	69	3.000.000,00	71	3.000.000,00	73	3.000.000,00	75	3.000.000,00	
				Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan.	%	1,68		1,69		1,71		1,73		1,75		1,77		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																		
2	26	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	4.418.900.608	100	4.405.693.326	100	4.183.190.111	100	4.183.190.111	100	4.183.190.111	100	4.183.190.111	**Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga**
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85		85,50		85,75		86,00		86,25		86,50		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
2	26	02	Program Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan kinjungan wisatawan	%	93,12	-	2,00	434.000.000	2,00	229.000.000	2,00	234.000.000	2,00	234.000.000	2,00	234.000.000	
				Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	10,00		10,14		10,16		10,19		10,09		10,21		
				Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	93,16		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		
				Kontribusi sektor	%	3,13		3,20		3,27		3,33		3,40		3,47		

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Pariwisata terhadap PAD														
				Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	%	N/A		25,00		8,00		11,11		10,00		6,06		
				Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%													
2	26	03	Program Pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	%	8,7	12.801.800	4,0	110.006.674	3,85	110.809.889	3,70	110.809.889	3,57	110.809.889	3,45	110.809.889	
				Tingkat Hunian Akomodasi	%	25,00		25,03		25,08		25,14		25,20		25,25		
				Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	1,26		1,26		1,27		1,27		1,28		1,28		
2	26	04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	%	4,47	-	6,50	80.000.000	7,72	30.000.000,00	8,94	30.000.000,00	10,16	30.000.000,00	11,38	30.000.000,00	
2	26	05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang aktif dan tervalidasi	%	54,88	516.592.100	56,91	560.000.000	58,13	340.000.000,00	59,35	340.000.000,00	60,57	340.000.000,00	61,79	340.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																		
2	19	02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	0,59	298.263.000	0,60	382.000.000,0	0,61	167.000.000,0	0,63	167.000.000,0	0,64	167.000.000,0	0,65	167.000.000,0	**Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga**
				Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	2,11		2,13		2,15		2,17		2,19		2,21		
				Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	%	0,07		0,07		0,07		0,07		0,07		0,07		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																		
2	24	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	3.571.363.162	100	3.287.423.840	100	5.205.183.840	100	3.182.423.840	100	3.177.423.840	100	3.177.423.840	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																		
2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	59	252.982.745	60	245.576.160	61	48.127.816.160,00	62	220.576.160,00	63	175.576.160,00	64	175.576.160,00	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
3	25	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	3.844.460.757	100	3.119.717.118	100	3.019.717.118,00	100	3.019.717.118,00	100	3.019.717.118,00	100	3.019.717.118,00	**Dinas Perikanan**
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	75		75,5		76		76,5		77		77,5		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	Ton/Tahun	19.994,03	814.770.000	19.995,64	278.999.004	19.997,27	228.999.004,00	19.998,92	228.999.004,00	20.000,59	228.999.004,00	20.338,60	228.999.004,00	
3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budi daya	Jumlah Total produksi Perikanan Budidaya	Ton/Tahun	59.119,25	50.946.460	60.360,76	163.842.940	61.640,41	163.842.940,00	62.959,52	163.842.940,00	64.319,45	163.842.940,00	65.721,60	163.842.940,00	
				Jumlah Produksi Benih	Ekor/Tahun	552.160.000		564.036.000		575.946.000		587.856.000		599.766.000		611.676.000		
3	25	05	Program pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Lubuk Larangan Yang Diawasi	Titik/Tahun	20	0	25	25.000.000	30	25.000.000	32	25.000.000	34	25.000.000	35	25.000.000	
				Persentase Pokdakan/UPR yang diawasai	%													
3	25	06	Program Pengolahan Pemasaran Hasil perikanan	Jumlah Total Produksi Ikan Olahan	Ton/Tahun	192,57	12.440.938	196,33	62.440.938	200,26	62.440.938	204,37	62.440.938	208,67	62.440.938	213,1	62.440.938	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																		
3	27	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	11.954.087.954	100	9.575.362.850	100	9.475.362.850	100	9.482.879.250	100	9.482.879.250	100	9.467.879.250	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	80		80		81		82		83		84		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
3	27	02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Luas tanam tanaman pangan (padi dan jagung) (Ha)	Hektar (Ha)	670	328.538.800	680	311.637.150	700	250.000.000	720	200.000.000	730	200.000.000	734	150.000.000	
				Rasio pengunaan alsintan pra panen	Rasio	0		0,75		0,76		0,77		0,78		0,79		
				Luas areal pengembangan dan peremajaan tanaman perkebunan (Ha)	Hektar (Ha)	25,5		26		26		26		26		26		
				Luas pengembangan tanaman hortikultura (Ha)	Hektar (Ha)	0		0		5		7,5		10		12,5		
3	27	03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan areal sawah terairi irigasi teknis dan/atau non teknis (%)	%	0	0	2	203.000.000	2	153.000.000	2	242.120.750	2	242.120.750	2	192.120.750	
				Persentase peningkatan areal sawah yang terbuka akses transportasi (%)	Persen (%)	0		0		0,8		0,8		0,8		0,8		
				Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Hektar (Ha)	17.488,61		17.488,61		17.488,61		17.488,61		17.488,61		17.488,61		
				Luas areal tanaman perkebunan yang tersertifikasi (Ha)	Hektar (Ha)	0		0		10		10		10		10		
				Persentase peningkatan areal perkebunan yang terbuka akses transportasi (%)	Persen (%)	0		0		10		15		20		30		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																		
3	27	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	4.922.313.855	100	4.431.164.535	100	4.291.849.435	100	4.291.849.435	100	4.291.849.435	100	4.291.849.435	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	0		0		80		85		90		100		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
3	27	02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana peternakan	%	0	20.153.200	1	19.153.200,00	1,2	8.468.300,00	1,3	8.468.300,00	1,5	8.468.300	1,6	8.468.300	
3	27	03	Program Penyediaan dan	Persentase ketersediaan	%	7,11	60.048.000	0	60.000.000,00	0	60.000.000,00	2	60.000.000,00	3		4		

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Pengembangan Prasarana Pertanian	dan pengembangan prasarana peternakan											60.000.000		60.000.000	
3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase layanan kesehatan hewan	%	10	15.682.200	15	12.682.200,00	20	12.682.200,00	25	12.682.200,00	30	12.682.200,00	35		
				Cakupan pelayanan kesehatan hewan ternak produksi	%	17,00		17,00		17,00		17,00		17,00		17,00		
				Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveilance penyakit dari 5 PHMS)	%	54,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																		
2	09	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian Pangan	Persentase penyediaan bahan pangan utama terhadap jumlah kebutuhan pangan utama	%	0	0	0	-	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**
2	09	03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase stabilitas koefisien harga pangan utama di tingkat konsumen	%	5	705.192.000	5	510.000.000	5	380.000.000	5	375.000.000	5	375.000.000	5	300.000.000	
				Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	80,80		81,61		82,42		83,25		84,08		84,92		
2	09	04	Program Penanganan Kerawanan pangan	Persentase penurunan Desa/Nagari Rawan Pangan	%	0	100.000.000	1	100.000.000	1	91.637.150,00	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	1	60.000.000,00	
				Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	8,5		7		5,5		4		2,5		1		
2	09	05	Program Pengawasan keamanan pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan mutu keamanan pangan	%	95	0	95	-	95	50.000.000,00	95	40.000.000,00	95	40.000.000,00	95	40.000.000,00	
SEKRETARIAT DAERAH																		
4	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaetn/Kota	Indeks Kematangan Organisasi	%	31	37.202.876.852	33	31.548.000.000	35	29.687.500.000,00	36	28.713.000.000,00	37	31.591.500.000,00	39	28.084.000.000,00	**Sekretariat Daerah**
				Persentase UPP dengan NIlai IPP baik hasil evaluasi mandiri.	%	30		30		30		30		30		30		
				Persentase LKJiP tepat waktu	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Pemenuhan Operasional Pimpinan Sesuai Aturan	%	100		100		100		100		100		100		
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Sekretariat Daerah	%	85		86		87		88		89		89		
				Persentase Capaian Rencana Pengembangan Kompetensi	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan Pimpinan Sesuai Aturan	%	81		81,5		82		82,5		83		83,5		
				Persentase realisasi anggaran Sekretariat Daerah	%	100		100		100		100		100		100		

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Persentase Fasilitasi Keprotokolan kegiatan Daerah yang sesuai aturan	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan yang dilaksanakan sesuai strategi Komunikasi	%	100		100		100		100		100		100		
4	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang efektif dilaksanakan	%	100	4.914.278.200	100	1.112.000.000	100	909.500.000	100	930.500.000	100	944.500.000	100	929.000.000	
				Indeks Zakat Nasional (IZN)	indeks	0,645		0,67		0,695		0,72		0,745		0,77		
				Persentase produk hukum yang dihasilkan	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase penyelesaian permasalahan Hukum yang difasilitasi	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Kerjasama Wajib yang dilaksanakan	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Administrasi Tata pemerintahan Yang Dilaksanakan	%	100		100		100		100		100		100		
				Penyusunan LPPD Kabupaten tepat waktu	%	100		100		100		100		100		100		
SEKRETARIAT DPRD																		
4	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	26.277.626.371	100	21.561.943.430	100	21.421.943.430	100	21.844.093.430	100	20.571.943.430	100	20.136.943.430	**Sekretariat DPRD**
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase penyelenggaraan layanan keuangan dan admnistrasi DPRD dan sekretaraiat DPRD yg difasilitasi	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase penyelenggaraan adminsitrasi umum Perangkat daerah yang difasilitasi	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase sarana dan prasarana pendukung yang disediakan	%	100		100		100		100		100		100		
PERENCANAAN																		
5	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	3.632.688.552	100	4.818.000.000	100	3.836.350.300	100	3.912.205.475	100	3.587.961.500	100	3.357.548.200	**Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah**
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	85		85		85		90		95		95		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
5	01	02	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	93	728.342.500	94	386.000.000	95	302.663.300	96	237.513.825	97	512.075.000	98	696.966.300	
				Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah	%	93		94		95		96		97		98		

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	100		100		100		100		100		100		
5	01	03	Program Koordinasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Pemerinttahan dan Pembangunan Manusia	%	93	215.848.800	94	360.000.000	95	328.991.750	96	319.053.000	97	371.028.000	98	399.339.800	
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	93		94		95		96		97		98		
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA	%	93		94		95		96		97		98		
KEUANGAN																		
5	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	18.827.718.773	100	14.065.303.900	100	12.925.303.900	100	12.925.303.900	100	12.925.303.900	100	12.925.303.900	**Badan Pengelola Keuangan Daerah**
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	88,6		88,72		88,81		88,87		88,9		89		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
5	02	02	Program Pegelolaan Keuangan Daerah	Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	%	45,34	198.905.177.013	42,57	189.802.636.760	29,94	172.302.636.760	29,76	172.402.636.760	29,94	171.302.636.760	29,94	170.302.636.760	
				Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	%	21,79		22,5		23		23,5		24		24,5		
				Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	16,87		12,28		10,14		10,02		10,03		9,98		
				Persentase Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase realisasi anggaran Belanja Wajib Pelayanan Dasar	%	94,591		94,594		94,594		94,59		94,588		94,587		
				Persentase penurunan SILPA	%	-52,84		100		0		0		0		0		
				Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	6,94		6,5		6		5,5		5		4,5		
				Persentase Kepemilikan NPWP	%	32,54		34,02		35,57		37,19		38,88		40,65		
				Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100		100		100		100		100		100		
				Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	-6,904		-6,903		-6,901		-6,901		-6,905		-6,903		
				Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	%	81,403		59,472		49,194		48,605		48,643		48,413		
				Opini Laporan Keuangan	%	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	89,707		89,71		89,71		89,707		89,708		89,705		
5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penambahan nilai aset tetap	%	1	1.013.309.540	1	923.309.540	1	713.309.540	1	713.309.540	1	713.309.540	1	713.309.540	
				Assets Management	Ya	Ya		Ya		Ya		Ya		Ya		Ya		
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	13,241	938.749.800	10,236	758.749.800	8,981	658.749.800	9,297	658.749.800	9,524	658.749.800	9,712	658.749.800	
				Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	-6,401		-6,397		-6,395		-6,396		-6,397		-6,397		
				Cakupan pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase penerapan sistem infromasi keuangan berbasis digital	%	100		100		100		100		100		100		
KEPEGAWAIAN																		
2	03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	33.585.231.010	100	30.400.265.365	100	26.350.265.365	100	26.350.265.365	100	26.350.265.365	100	26.350.265.365	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	86		87		88		89		90		91		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
2	03	02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	%	70	722.424.416	71	423.563.356	72	348.563.356	73	348.563.356	74	348.563.356	75	348.563.356	
				Persentase ketersediaan data dan informasi ASN	%	80		81		82		83		84		85		
				Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai kompetensinya	%	50		51		52		53		54		55		
				Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	%	20		21		22		23		24		25		
				Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	%	75		76		77		78		79		80		
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																		
2	04	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	50	534.571.800	51	426.171.279	52	351.171.279	53	351.171.279	54	351.171.279	55	351.171.279	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
				Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	20		21		22		23		24		25		
				Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	80		81		82		83		84		85		
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																		

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5	05	02	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	%	85	617.000.000	85	96.000.000	90	88.999.650	90	88.827.700	95	87.650.500	100	99.515.700	**Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah**
				Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	%	85		85		90		90		95		100		
				Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	%	75		80		85		90		95		100		
				Persentase fasilitasi, pembinaan, Bimbingan Teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	%	0		75		80		85		90		100		
5	05	03	Program Riset dan Inovasi Daerah	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	%	90	0	93	40.000.000	95	42.995.000	97	42.400.000	99	41.285.000	100	46.630.000	
				Persentase kajian berbasis buktu dalam pengembangan potensi unggulan daerah	%	0		75		75		80		85		100		
				Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah	%	0		75		75		80		85		100		
				Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	%	80		85		90		95		100		100		
INSPEKTORAT DAERAH																		
5	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	90	7.406.706.965	100	6.197.042.000	100	5.962.420.000	100	5.962.420.000	100	5.960.990.000	100	5.957.420.000	**Inspektorat Daerah**
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	92		92,2		92,4		92,6		92,8		93		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase APIP yang memenuhi jam pendidikan/pelatihan minimal 120 jam/tahun	%	0		100		100		100		100		100		
6	01	02	Progran Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Ketuntasan Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	60	513.525.047	70	493.458.000,00	74	385.810.000,00	78	385.810.000,00	82	385.810.000,00	85	385.810.000,00	

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Persentase Ketuntasan Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Internal	%	79		79		80		81		82		83		
				Persentase Ketuntasan Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Internal Eksternal	%	60		70		74		78		82		85		
				Persentase pengawasan di Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	%	90		90		90		90		90		90		
				Persentase pengawasan di Bidang perekonomian sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	%	90		90		90		90		90		90		
				Persentase pengawasan di Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan sesuai dengan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	%	90		90		90		90		90		90		
				Persentase pengawasan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	%	90		90		90		90		90		90		
				Persentase Pemenuhuan Key Process Area pada Penilaian Mandiri Berdasarkan Standar IACM	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase perangkat daerah yang memperoleh Nilai Minimal BB	%	50		55		60		65		70		75		
				Nilai Penanganan Kejadian Korupsi	%	73		75		77		80		83		85		
6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	%	80	51.874.000	80	109.500.000	80	97.770.000	80	99.200.000	80	99.200.000	80	99.200.000	
				Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	%	80		80		80		80		80		80		
				Jumlah OPD yang memperoleh Predikat WBK/WBBM	Perangkat Daerah	1		1		1		1		1		1		
				Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Nagari	%	80		80		80		80		80		80		
				Persentase fasilitasi	%	100		100		100		100		100		100		

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				pengawasan manajemen risiko														
				Nilai Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi	%	73		75		77		80		83		85		
				Nilai Penerapan Strategi Pencegahan Korupsi	%	73		75		77		80		83		85		
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																		
8	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	1.374.003.704	100	1.136.019.779	100	1.098.040.510	100	1.095.015.999	100	1.092.015.999	100	1.098.515.999	**Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	100		87		88		89		90		91		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
8	01	05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah Yang dilaksanakan	%	80	9.350.000	78	13.710.000	75	12.710.000,00	73	11.710.000,00	72	11.710.000,00	70	11.710.000,00	
8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	%	92	166.552.000	94	113.000.000	95	89.499.269,00	97	84.499.269,00	98	89.499.269,00	100	79.533.780,00	
KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUNG																		
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	734.420.669	100	640.050.000	100	620.050.000	100	620.050.000	100	620.050.000	100	620.050.000	**2x11 Anam Lingkuang**
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84,00		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	7.230.000	3,15	3.500.000	3,45	3.500.000	3,65	3.500.000	3,95	3.500.000	4,25	3.500.000	
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100		100		
KECAMATAN 2X11 KAYU TANAM																		
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	698.975.652	100	644.460.000	100	616.950.000	100	613.940.000	100	617.770.000	100	611.430.000	**2x11 Kayu Tanam**
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84,00		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	0	3,15	13.440.000	3,45	6.450.000	3,65	13.700.000	3,95	8.130.000	4,25	14.950.000	
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100		100		

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
KECAMATAN BATANG GASAN																		
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	677.485.093	100	634.040.000	100	606.240.000	100	605.900.000	100	604.440.000	100	605.500.000	Batang Gasan
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84,00		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	3.540.000	3,15	5.960.000	3,45	3.000.000	3,65	3.000.000	3,95	3.560.000	4,25	3.000.000	
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100		100		
KECAMATAN BATANG ANAI																		
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	773.122.554	100	693.770.000	100	683.670.000	100	683.670.000	100	683.670.000	100	683.670.000	Batang Anai
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84,00		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	6.750.000	3,15	7.650.000	3,45	7.750.000	3,65	7.750.000	3,95	7.750.000	4,25	7.750.000	
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100		100		
KECAMATAN ANAM LINGKUANG																		
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	720.661.108	100	651.660.000	100	631.640.000	100	631.640.000	100	631.640.000	100	631.640.000	Anam Lingkuang
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84,00		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	5.160.000	3,15	10.480.000	3,45	7.500.000	3,65	7.500.000	3,95	7.500.000	4,25	7.500.000	
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100		100		
KECAMATAN IV KOTO AUA MALINTANG																		
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	523.367.086	100	527.000.000		488.400.000	100	477.740.000	100	477.740.000	100	477.740.000	IV Koto Aua Malintang
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84,00		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	36.153.000	3,15	11.200.000		6.500.000	3,65	13.200.000	3,95	13.200.000	4,25	13.200.000	
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100		100		
KECAMATAN LUBUAK ALUANG																		

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	762.575.321	100	657.241.000	100	652.234.000	100	652.234.000	100	652.234.000	100	652.234.000	**Lubuak Aluang**
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84,00		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	11.290.000	3,15	7.830.000	3,45	7.290.000	3,65	7.290.000	3,95	7.290.000	4,25	7.290.000	
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100		100		
KECAMATAN NAN SABARIS																		
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	676.170.433	100	655.000.000	100	620.000.000	100	620.000.000	100	620.000.000	100	620.000.000	**Nan Sabaris**
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84,00		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	16.712.500	3,15	17.300.000	3,45	17.200.000	3,65	17.200.000	3,95	17.200.000	4,25	17.200.000	
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100		100		
KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO																		
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	701.577.917	100	660.933.500	100	619.281.000	100	619.281.000	100	619.201.000	100	619.201.000	**VII Koto Padang Sago**
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84,00		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	2.725.000	3,15	2.725.000	3,45	2.340.000	3,65	2.340.000	3,95	2.340.000	4,25	2.340.000	
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100		100		
KECAMATAN VII KOTO PATAMUAN																		
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	735.107.964	100	661.058.000	100	641.042.000	100	641.042.000	100	641.042.000	100	641.042.000	**VII Koto Patamuan**
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84,00		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	2.540.000	3,15	16.438.000	3,45	16.454.000	3,65	16.454.000	3,95	16.454.000	4,25	16.454.000	
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100		100		
KECAMATAN SUNGAI GARINGGIANG																		
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	746.616.162	100	670.944.401	100	618.600.000	100	618.600.000	100	618.600.000	100	618.600.000	**Sungai Garinggiang**

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84,00		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	6.590.000	3,15	15.104.599	3,45	5.500.000	3,65	5.500.000	3,95	5.500.000	4,25	5.500.000	
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100		100		
KECAMATAN SUNGAI LIMAU																		
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	720.661.108	100	633.660.000	100	534.640.000	100	534.640.000	100	534.640.000	100	534.640.000	**Sungai Limau**
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84,00		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	5.160.000	3,15	10.480.000	3,45	7.500.000	3,65	7.500.000	3,95	7.500.000	4,25	7.500.000	
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100		100		
KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG																		
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	702.007.872	100	656.780.552	100	626.500.000	100	621.500.000	100	623.000.000	100	614.299.970	**Sintuak Toboh Gadang**
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84,00		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	4.210.000	3,15	4.710.000	3,45	8.000.000	3,65	8.000.000	3,95	8.000.000	4,25	8.000.000	
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100		100		
KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH																		
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	678.496.153	100	676.084.428	100	641.580.000	100	612.015.630	100	611.020.532	100	611.086.705	**Ulakan Tapakih**
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84,00		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	7.630.000	3,15	7.630.000	3,45	18.000.000	3,65	19.000.000	3,95	19.000.000	4,25	19.000.000	
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100		100		
KECAMATAN V KOTO TIMUR																		
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	583.090.261	100	525.100.000	100	502.900.000	100	502.900.000	100	502.900.000	100	502.900.000	**V Koto Timur**
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84,00		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	6.000.000	3,15	3.000.000	3,45	3.500.000	3,65	3.500.000	3,95	3.500.000	4,25	3.500.000	
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100		100		
KECAMATAN V KOTO																		
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	716.195.608	100	647.350.000	100	622.150.000	100	623.019.983	100	622.500.000	100	622.500.000	**V Koto**
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84,00		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	1.520.000	3,15	2.500.000	3,45	5.000.000	3,65	5.000.000	3,95	5.000.000	4,25	5.000.000	
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100		100		
KECAMATAN VII KOTO																		
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	774.036.073	100	651.090.000	100	596.620.000	100	596.120.000	100	596.120.000	100	596.120.000	**VII Koto**
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84,00		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	20.890.000	3,15	24.130.000	3,45	19.000.000	3,65	19.500.000	3,95	19.500.000	4,25	19.500.000	
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100		100		

3.6.6 Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah terhadap Fokus Prioritas RPJMN Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang selaras dan terintegrasi antara pusat dan daerah, arah kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada fokus prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Hal ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian visi nasional "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045" melalui pelaksanaan pembangunan di tingkat kabupaten.

RPJMN 2025–2029 menetapkan delapan misi pembangunan nasional yang dituangkan ke dalam Asta Cita dan dijabarkan ke dalam program prioritas nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berupaya memastikan bahwa arah kebijakan dan program pembangunan daerah selaras dengan agenda-agenda strategis nasional tersebut, tanpa mengesampingkan kebutuhan lokal dan karakteristik daerah.

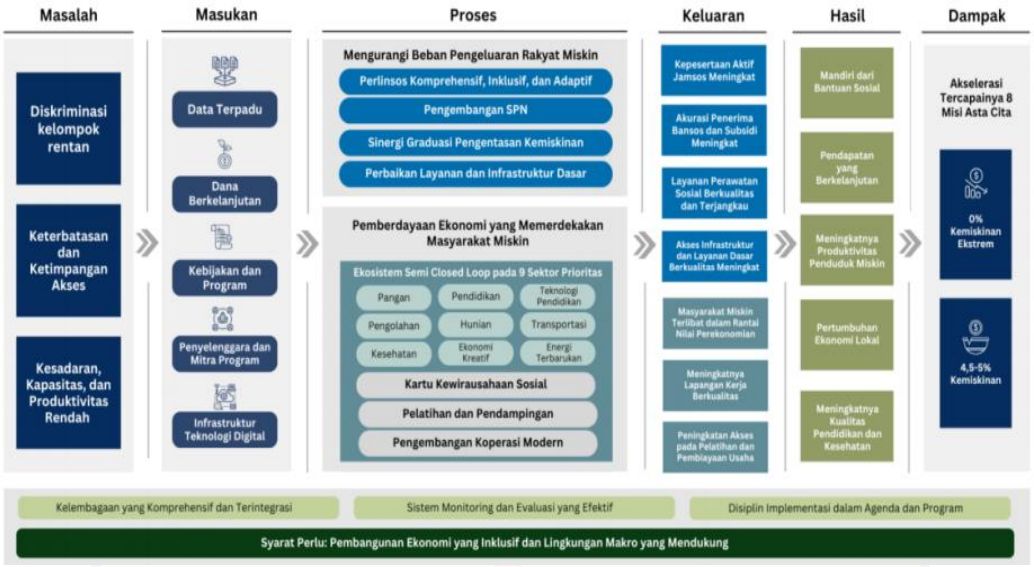
A. Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah untuk Penurunan Tingkat Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas utama pembangunan daerah yang harus ditangani secara komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan. Tingkat kemiskinan tidak hanya mencerminkan rendahnya daya beli masyarakat, tetapi juga menggambarkan keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lapangan kerja yang layak. Oleh karena itu, upaya penurunan tingkat kemiskinan menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan daerah.

Dalam kerangka RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029, arah kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan disusun dengan memperhatikan kondisi baseline tahun 2025, serta ditetapkan target kinerja tahunan hingga tahun 2030 sebagai bagian dari kesinambungan rencana pembangunan jangka menengah menuju pencapaian tujuan jangka panjang daerah. Kebijakan yang akan diambil diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, memperluas kesempatan kerja dan usaha, meningkatkan kualitas SDM, serta memperkuat perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Arah kebijakan dalam pengentasan kemiskinan diarahkan untuk menyinergikan program perlindungan sosial dengan upaya pemberdayaan ekonomi yang inklusif. Dalam Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan Nasional Tahun 2025–2029, terdapat tiga isu pokok yang menjadi tantangan dalam pengentasan kemiskinan, yaitu masih adanya diskriminasi terhadap kelompok rentan, terbatasnya dan timpangnya akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi, serta rendahnya kesadaran, kapasitas, dan produktivitas masyarakat miskin.

Gambar 3.1
Arah Pengentasan Kemiskinan



Sumber : Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan Nasional Tahun 2025-2029

Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan finansial semata, tetapi juga mendorong pencapaian kemandirian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, melalui peningkatan produktivitas

Strategi pengentasan kemiskinan juga disinergikan dengan program nasional dan provinsi, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari sektor pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil. Melalui intervensi kebijakan dan program yang tepat sasaran, terukur, dan berorientasi pada hasil, diharapkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman dapat terus menurun secara signifikan dalam lima tahun ke depan.

Berdasarkan arah pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam dokumen RPJPD Tahun 2025–2045, kebijakan penanggulangan kemiskinan difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar. Berikut Arah kebijakan dan program prioritas untuk penurunan tingkat kemiskinan :

Tabel 3.20
Arah Kebijakan dan Program Prioritas Penurunan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

No	Arah Kebijakan	Program Prioritas
1.	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial melalui : 1. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. 2. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana serta sarana	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui Penyempurnaan Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (BDTKS) dan Data Kemiskinan Mikro 2. Penyediaan Bantuan Sosial Darurat dan Adaptif untuk Kelompok Paling Rentan 3. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Fasilitas Umum. 4. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan yang Aman Bencana

No	Arah Kebijakan	Program Prioritas
	transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. 3. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah. 4. Percepatan pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan 5. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.	5. Peningkatan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 6. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Lingkungan Permukiman 7. Pengembangan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan, dan Industri Olahan 8. Peningkatan Kapasitas dan Akses Permodalan UMKM 9. Pengembangan Sektor Pariwisata Berbasis Ekowisata dan Budaya 10. Penyediaan Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik kurang mampu dan Berprestasi

B. Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah untuk Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu pilar utama dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan inklusif di Kabupaten Padang Pariaman. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, transformasi digital, serta tuntutan dunia kerja dan industri, peningkatan kompetensi, produktivitas, dan karakter masyarakat menjadi aspek krusial yang harus diperkuat melalui arah kebijakan yang terarah dan program pembangunan yang tepat sasaran.

Peningkatan kualitas SDM yang berfokus pada akses dan mutu pendidikan, penguatan kesehatan masyarakat, pengembangan kompetensi tenaga kerja, serta pembentukan karakter berbasis nilai-nilai lokal dan religius. Arah kebijakan dan program pembangunan dalam sub sektor ini juga disusun selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Barat, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah secara berkelanjutan.

Berikut Arah kebijakan dan program prioritas untuk peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia :

Tabel 3.21
Arah Kebijakan dan Program Prioritas Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia di Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2025-2029

No	Arah Kebijakan	Program Prioritas
1.	1. Pendidikan Berkualitas dan Merata a. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan b. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). c. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan d. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau	1. Perluasan akses pendidikan yang berkualitas dan penguatan infrastruktur layanan pendidikan. 2. Penyediaan Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik kurang mampu dan Berprestasi 3. Peningkatan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. 4. Peningkatan cakupan .*Universal Health Coverage* (UHC) dan Perluasan Kepesertaan JKN. 5. Peningkatan gizi masyarakat dan ketahanan pangan.

No	Arah Kebijakan	Program Prioritas
	bagi yang memiliki prestasi. e. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah 2. Kesehatan Untuk Semua a. Peningkatan Kualitas sarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan. b. Meningkatkan Cakupan Kepesertaan JKN. c. Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan d. Peningkatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam program kesehatan. e. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat. f. Pemberdayaan Masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas. g. Peningkatan Kualitas sarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan. h. Peningkatan upaya promotif, preventif dan pembudayaan prilaku hidup sehat.. 3. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif a. Peningkatan akses layanan kesehatan, pendidikan keluarga, dan program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. b. Peningkatan sistem perlindungan anak yang komprehensif untuk menjamin hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipas c. Pengembangan kapasitas, kreativitas, dan peran aktif pemuda dalam pembangunan daerah d. Pemenuhan hak serta peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas dan lanjut usia secara inklusif. e. Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	6. Penguatan Ketahanan Keluarga melalui Akses Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Produktif. 7. Layanan pengaduan, pendampingan, dan edukasi keluarga untuk menjamin perlindungan terhadap anak dan remaja 8. Pelatihan keterampilan, wirausaha pemuda, dan dukungan prestasi di bidang olahraga dan seni.. 9. Peningkatan aksesibilitas layanan dan partisipasi masyarakat rentan melalui pelatihan keterampilan dan jaminan sosial dasar. 10. Edukasi dan pelatihan bagi perempuan dalam kewirausahaan.

C. Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan baseline 2025 dan Target Kinerja Tahun 2026-2030

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan merupakan pilar penting dalam pencapaian visi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029, yaitu *"Padang Pariaman Maju dan Sejahtera"*. Dalam lima tahun ke depan, pembangunan ekonomi diarahkan tidak hanya untuk mendorong laju pertumbuhan,

tetapi juga menjamin bahwa manfaat pembangunan dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Arah kebijakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman akan difokuskan pada peningkatan produktivitas sektor unggulan, penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penciptaan iklim investasi yang kondusif. Strategi ini juga diarahkan untuk mendorong transformasi ekonomi dari sektor tradisional menuju sektor bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan, seperti pengembangan ekonomi kreatif, pertanian modern, dan pariwisata berbasis budaya dan alam.

Selain itu, program-program pembangunan akan dirancang agar dapat mengurangi kesenjangan antarwilayah, memperluas lapangan kerja yang layak, serta mendorong partisipasi aktif kelompok rentan dan marjinal dalam kegiatan ekonomi. Pendekatan pembangunan ekonomi hijau juga akan diintegrasikan guna menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup.

Berikut Arah kebijakan dan program prioritas untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan :

Tabel 3.22
Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

No	Arah Kebijakan	Program Prioritas
1.	1. Penguatan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan berbasis potensi lokal dan berkelanjutan. 2. Pengembangan UMKM dan industri kreatif lokal. 3. Peningkatan nilai tambah dan produktivitas sektor unggulan daerah. 4. Perluasan kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran 5. Peningkatan investasi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 6. Pengembangan pariwisata berbasis budaya, alam, dan religius. 7. Pemberdayaan ekonomi nagari dan kewirausahaan masyarakat. 8. Pengembangan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi daerah	1. Penguatan Ketahanan dan Kemandirian Pangan melalui Modernisasi Pertanian dan Regenerasi Petani. 2. Penguatan UMKM dan Ekonomi Kreatif. 3. Digitalisasi dan Akses Permodalan UMKM. 4. Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Kawasan (OVOP). 5. Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja Lokal. 6. Peningkatan Promosi dan Kemudahan Investasi Daerah 7. Penguatan Iklim Usaha yang Kondusif . 8. Pengembangan Destinasi Wisata Nagari. 9. Revitalisasi POKDARWIS dan Infrastruktur Pendukung Wisata. 10. Peningkatan Ekonomi Nagari Berbasis Potensi Lokal. 11. Peningkatan Infrastruktur Jalan Usaha Tani, Irigasi, dan Akses Pasar

Tabel 3.23
Target Kinerja Fokus Prioritas RPJMN Tahun 2025-2030

Sasaran/Indikator Kinerja Visi		Satuan	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
I.	**Peningkatan Pendapatan Per Kapita**							
1.	PDRB per Kapita ADHB (Rp Juta)	Rp. Juta	63,57	69,14	74,81	81,60	88,77	96,26
2.	Kontribusi Sektor PDRB Sub Sektor Perikanan	%	8,43	8,54	8,65	8,76	8,88	9

Sasaran/Indikator Kinerja Visi		Satuan	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	%	10,37	10,52	10,67	10,82	11,02	11,21
II. Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan								
1.	Tingkat Kemiskinan	%	5,01	4,79	4,55	4,29	4,03	3,78
2.	Rasio Gini (Indeks)	Indeks	0,251	0,250	0,249	0,248	0,247	0,246
3.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	%	4,37	5,55	6,92	6,62	7,81	6,55
III. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah								
1.	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	3,68	4,30	4,90	5,40	5,90	6,4
IV. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia								
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	75,82	76,37	76,99	77,59	78,20	78,82
2.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah/ Jiwa	71,78	72,30	73,10	73,85	74,60	75,28
V. Peningkatan Kualitas Lingkungan								
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	76,96	77,17	77,38	77,59	77,80	78,02

3.7 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERDIMENSI KEWILAYAHAN

3.7.1 Isu Strategis Kewilayahan

Pembangunan daerah tidak hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi secara makro, tetapi juga harus menjamin pemerataan hasil pembangunan antarwilayah. Kabupaten Padang Pariaman sebagai daerah yang memiliki karakteristik geografis yang heterogen terdiri dari wilayah pesisir, dataran rendah, dan perbukitan, menghadapi tantangan ketimpangan pembangunan antar wilayah yang masih cukup signifikan.

Keterbatasan aksesibilitas wilayah perbukitan dan daerah terisolir, serta belum optimalnya pelayanan dasar dan infrastruktur di wilayah timur dan selatan Kabupaten Padang Pariaman, memperkuat potensi ketimpangan spasial. Ketimpangan ini berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial dan keterbatasan daya saing wilayah, serta dapat menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Oleh karena itu, isu strategis kewilayahan yang perlu mendapat perhatian dalam RPJMD 2025–2029 adalah:

1. Masih tingginya ketimpangan pembangunan antar wilayah.
2. Belum meratanya akses infrastruktur dan layanan dasar.
3. Kurangnya distribusi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang merata di setiap kecamatan.
4. Lemahnya integrasi perencanaan tata ruang dan pembangunan antar wilayah, yang menyebabkan ketidakseimbangan antara kawasan pesisir, dataran, dan perbukitan.

3.7.2 Arah Kebijakan Kewilayahan Nasional

Dalam RPJMN 2025–2029, telah ditetapkan sejumlah kebijakan serta arah pengembangan wilayah yang menjadi fokus pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. Pembagian wilayah dilakukan berdasarkan kategori strategis, antara lain: Kawasan Pertumbuhan Ekonomi, Kawasan Komoditas Unggulan, Kawasan Afirmasi, Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi, serta Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana.

Untuk kawasan perkotaan, RPJMN menetapkan Kawasan Perkotaan Padang–Pariaman sebagai pusat pertumbuhan utama, serta mengintegrasikan pengembangan Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dataran Tinggi Minangkabau, yang mencakup Kawasan Perkotaan Bukittinggi–Padang Panjang dan Solok–Sawahlunto.

Sementara itu, untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi, wilayah Dataran Tinggi Minangkabau seperti Kabupaten Tanah Datar, Agam, Solok, Solok Selatan, Lima Puluh Kota, Sijunjung, Dharmasraya, dan Pasaman diarahkan sebagai kawasan swasembada pangan. Adapun wilayah pesisir seperti Kabupaten Pesisir Selatan, Padang Pariaman, dan Pasaman Barat ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Swasembada Pangan Minangkabau Pesisir, yang berperan penting dalam menjaga stabilitas produksi dan distribusi pangan regional.

Arah kebijakan kewilayahan yang dirumuskan dalam RPJMN 2025–2029 memiliki irisan yang kuat dengan isu strategis kewilayahan di Provinsi Sumatera Barat, termasuk Kabupaten Padang Pariaman. Beberapa titik temu antara arah kebijakan tersebut dengan kondisi faktual daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kawasan Perkotaan Padang–Pariaman
   Intervensi strategis diarahkan pada pengembangan koridor industri rintisan, meliputi sektor hilirisasi kelapa, kelapa sawit, industri makanan dan minuman, serta industri transportasi laut dan galangan kapal. Isu kewilayahan mengidentifikasi Kabupaten Padang Pariaman sebagai kawasan inti yang menunjukkan potensi unggulan dalam sektor industri, meskipun Kota Padang sebagai simpul utama belum sepenuhnya mencerminkan keunggulan yang sama.
2. Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dataran Tinggi Minangkabau
   Fokus pengembangan kawasan ini meliputi peningkatan elemen 6A pariwisata (Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas, Ancillary services, Akomodasi, dan Aktivitas), pembaruan kawasan kota (urban renewal), serta pembangunan pasar wisata terpadu yang terhubung dengan pusat seni dan budaya di wilayah Bukittinggi, Sawahlunto, Batusangkar, Payakumbuh, dan Padang Panjang. Isu strategis menunjukkan bahwa kota-kota tersebut—terutama Sawahlunto dan Payakumbuh—telah memiliki daya saing tinggi di sektor pariwisata, diikuti oleh Bukittinggi, Padang Panjang, dan Solok.
3. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi di Dataran Tinggi Minangkabau
   Kawasan ini menunjukkan keunggulan utama dalam sektor pertanian, terutama di Kabupaten Pasaman, Agam, Dharmasraya, dan Solok.

Sementara itu, beberapa kabupaten lainnya seperti Tanah Datar, Lima Puluh Kota, Sijunjung, dan Solok Selatan masih memerlukan penguatan kapasitas untuk bisa menunjukkan keunggulan serupa.

4. Kawasan Swasembada Pangan Minangkabau Pesisir
   Kabupaten Padang Pariaman, Pesisir Selatan, dan Pasaman Barat yang termasuk dalam kawasan ini menunjukkan kekuatan ekonomi daerah di sektor pertanian, khususnya tanaman pangan dan hortikultura yang relevan dengan kebutuhan lokal maupun ekspor.
5. Kawasan Komoditas Unggulan Kelapa Sawit dan Ekonomi Biru
   Kabupaten Pasaman Barat ditetapkan sebagai wilayah inti kawasan ini, mengingat kontribusinya yang signifikan terhadap produksi kelapa sawit—lebih dari 50% total produksi Sumatera Barat berasal dari daerah ini. Selain itu, potensi ekonomi biru (perikanan tangkap dan budidaya, serta industri pengolahan hasil laut) juga menjadi perhatian utama di kawasan pesisir lainnya.

3.7.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Padang Pariaman

Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi sumberdaya alam yang beragam dalam sektor pertanian padi sawah, perkebunan, perikanan, industri, perdagangan dan jasa, pariwisata serta pelayanan sosial pendidikan dan kesehatan. Posisi Kabupaten Padang Pariaman yang berada pada wilayah tengah Provinsi Sumatera Barat berbatasan dengan Kota Padang sebagai ibukota Provinsi menjadi keuntungan lokasi kabupaten untuk mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa, pariwisata serta pelayanan sosial pendidikan dan kesehatan.

Perkembangan investasi dan program pembangunan pemerintah di Padang Pariaman menunjukkan perkembangan yang pesat. Tercatat berbagai program pembangunan yang telah, sedang, dan akan dibangun seperti: Politeknik Pelayaran di Tiram; Asrama Embarkasi Haji dan *Islamic Centre* di Kecamatan Batang Anai; pembangunan Stadion Utama Sumbar di Nagari Sikabu dan Lubuk Alung Kecamatan Lubuak Aluang di areal seluas lebih kurang 50 Ha; menyiapkan Kawasan Kota Industri Terpadu di lahan seluas 5.000 ha di Nagari Lubuk Alung dan Sikabu Kecamatan Lubuak Aluang; Pembangunan Kawasan Pendidikan Terpadu di Padang Pariaman diatas lahan seluas 697 hektar yang direncanakan akan dibangun untuk berbagai kampus; pembangunan infrastruktur seperti pengembangan jalur kereta api Duku-Bandara Internasional Minangkabau; pembangunan infrastruktur jalan lingkar Duku-Sicincin, pembangunan jalan tol; serta infrastruktur pengairan seperti irigasi Anai II dan normalisasi Batang Tampunik, normalisasi Batang Kalampaian, normalisasi Batang Gasan, normalisasi Batang Mangor, normalisasi Batang Anai, dan normalisasi Batang Ulakan.

Posisi Padang Pariaman yang strategis yaitu pada lintas yang menghubungkan Bagian Utara dan Timur Sumatera Barat menyebabkan pertumbuhan wilayah akan semakin cepat. Apalagi dengan telah ditetapkannya PKN Palapa sebagai pusat kegiatan nasional. Dengan demikian wilayah yang dilalui oleh lintasan tersebut seperti Lubuak Aluang - Kayu Tanam, Lubuak Aluang – Pariaman - Sungai Garinggiang, Batas Kota Padang – Katapiang - Ulakan merupakan poros-poros

perkembangan wilayah dimasa yang akan datang terutama untuk kegiatan perkotaan seperti kawsan permukiman, industri, perdagangan, pendidikan, dan pariwisata.

Dengan adanya rencana Kawasan Pendidikan Tarok dan jalan tol yang melewati Sicincin maka kawasan tersebut akan menjadi pusat pengembangan wilayah dimasa yang akan datang di samping Lubuak Aluang sebagai kota penyangga untuk perkembangan Kota Padang Bagian utara. Dengan demikian sektor-sektor yang akan bertumbuh adalah sektor konstruksi, sektor industri, jasa kesehatan, transportasi, dan jasa pendidikan.

Adapun arah kebijakan pembangunan wilayah Kab. Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

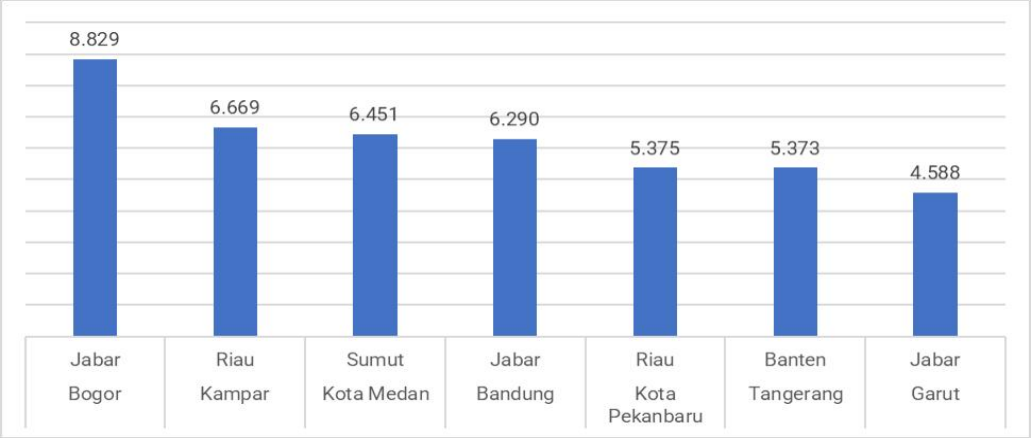
1) Pengembangan pusat kegiatan pelayanan perkotaan nasional sebagai bagian dari kawasan perkotaan Padang-Lubuak Aluang-Pariaman, meliputi:
   - Meningkatkan jangkauan dan kapasitas pelayanan sistem transportasi untuk mendukung konektivitas antar wilayah; dan
   - mengembangkan pusat kegiatan secara berhierarki sesuai dengan potensi wilayah dengan dilengkapi prasarana dan sarana penunjang.
2) Pengembangan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan dalam mewujudkan keseimbangan pembangunan meliputi:
   - meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat kegiatan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
   - membangun fasilitas umum dan jaringan utilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
   - mengembangkan prasarana dan sarana mitigasi bencana.
3) Pengembangan pemanfaatan kawasan peruntukan budidaya yang berkelanjutan, meliputi:
   - Mengembangkan kawasan agropolitan dan sarana prasarana pertanian untuk meningkatkan produktivitas sebagai lumbung padi Sumatera Barat.
   - Mengembangkan ekonomi perikanan.
   - Mengembangkan kegiatan pariwisata dan sarana prasarana penunjang pariwisata untuk menunjang pemerataan ekonomi wilayah yang bercirikan kearifan lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
   - Mengembangkan kegiatan industri dan sarana prasarana penunjang industri untuk menunjang pemerataan ekonomi wilayah.
   - Mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan permukiman perkotaan dengan pembangunan sarana dan prasarana; dan
   - Mengelola sumber daya alam tak terbarukan dan sumber daya alam yang terbarukan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
4) Peningkatan fungsi pemanfaatan kawasan peruntukan lindung yang berkelanjutan, meliputi:
   - Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung.

- Mempertahankan dan melestarikan kawasan lindung; dan RANPERDA
- Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup.

5) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, meliputi:
   - Menyediakan ruang untuk kawasan pertahanan dan keamanan.
   - Mengembangkan kegiatan secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan keamanan; dan
   - Mengembangkan zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun di sekitarnya.

Kabupaten Padang Pariaman perlu mengembangkan ekonominya sektor industri pengolahan yang menunjukkan keunggulan komparatif dengan berbasis pada sektor pertanian secara luas, baik di pertanian tanaman pangan, perkebunan, maupun kehutanan dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalian dan jasa pendidikan yang menunjukkan keunggulan komparatif. Sedangkan secara spasial ekonomi Kabupaten Padang Pariaman lebih berorientasi lokal dengan daerah tujuan utama Kota Padang, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Pariaman. Sementara itu arus barang dari Kabupaten Padang Pariaman mayoritas bermuara ke Kabupaten Bogor, Kabupaten Kampar, Kota Medan, Kabupaten Bandung, Kota Pekanbaru, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Garut.

Gambar 3.2
Daerah Tujuan Ekspor Utama Kabupaten Padang Pariaman



Sumber: RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Selain itu beberapa kebijakan yang perlu didorong adalah: Pengembangan ekosistem dan destinasi kepariwisataan holistik 6A guna mewujudkan quality dan sustainable tourism, termasuk melalui urban renewal, revitalisasi/pengembangan Kawasan prioritas, serta pengembangan MICE economy; dan Pengembangan ekosistem holistik dan infrastruktur pendukung high value economy dan industri. Untuk mendukung peran PKN Kota Padang dan Kawasan Metropolitan Palapa

terdapat beberapa kebijakan yaitu: Pengembangan BRT Padang – Pariaman dan Peningkatan layanan KA Komuter Padang – Pariaman.

Beberapa kebijakan berdasarkan potensi ekonomi daerah yang bisa dikembangkan di Kabupaten Padang Pariaman dalam beberapa tahun kedepan antara lain:

1. Revitalisasi PDAM dan Sistem Air Minum Regional

   Kabupaten Padang Pariaman menjadi prioritas dalam program regionalisasi dan modernisasi sistem penyediaan air minum. Pemerintah daerah didorong untuk menjalin kerja sama dengan pihak swasta nasional dan asing melalui skema joint venture (JV) 51% untuk membangun sistem distribusi air bersih yang efisien, digital, dan terjangkau bagi masyarakat serta kawasan pertumbuhan industri pesisir. Revitalisasi ini juga mencakup pembenahan infrastruktur jaringan pipa, instalasi pengolahan air (IPA), dan pengelolaan keuangan PDAM berbasis akuntabilitas publik. Potensi mitra yang dapat digandeng termasuk perusahaan air dari Jepang, Belanda, dan Korea Selatan yang berpengalaman dalam sistem air minum kawasan pesisir.
2. Digitalisasi Nagari dan Pemerintahan Berbasis Data

   Sebagai salah satu daerah dengan jumlah nagari cukup besar, Padang Pariaman diarahkan menjadi pilot project untuk implementasi Nagari Digital Center. Strategi ini meliputi pelatihan teknologi informasi untuk anak muda nagari, penyusunan e-village planning, serta pengembangan aplikasi pelayanan publik desa. Selain itu, digitalisasi data aset desa, produksi pertanian, UMKM, dan data keuangan nagari dilakukan untuk memperkuat smart governance dan mendorong nagari menjadi basis produksi dan ekspor digital.
3. Kawasan Tanggap Bencana dan Logistik Regional

   Sebagai daerah rawan bencana gempa dan tsunami, Padang Pariaman disiapkan sebagai salah satu pusat logistik tanggap darurat regional Sumatera Barat. Gudang logistik pertanian dan kemanusiaan akan dibangun di lokasi strategis yang terhubung dengan jalur kereta api, jalan nasional, dan kawasan pesisir. Konsep ini akan diperkuat dengan sistem digital early warning, data stok bahan pokok berbasis cloud, dan kendaraan logistik siap gerak. Strategi ini menyatu dengan pendekatan ketahanan pangan lokal dan kemitraan BUMDes untuk penyediaan komoditas darurat

3.8 RENCANA PENGEMBANGAN SEKTOR STRATEGIS

3.8.1. Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor utama dalam pembangunan ekonomi inklusif di Kabupaten Padang Pariaman. Karena sebagian besar penduduk masih bergantung pada kegiatan pertanian, baik sebagai mata pencaharian utama maupun sebagai penunjang ketahanan pangan keluarga. Oleh karena itu, dalam RPJMD 2025-2030 ini sektor pertanian ditetapkan sebagai sektor strategis untuk mewujudkan visi pembangunan daerah mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, maju dan merata. Rencana pengembangan pertanian diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan daerah,

meningkatkan produktivitas dan daya saing petani, serta menciptakan nilai tambah melalui integrasi hulu-hilir. Strategi utama yang akan dilakukan meliputi:

1. Peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha tani melalui penerapan teknologi pertanian modern, pemanfaatan varietas unggul, penguatan sistem irigasi, serta penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang memadai.
2. Pemberdayaan petani dan kelembagaan tani melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan petani, termasuk koperasi dan kelompok tani.
3. Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditas Bernilai Tinggi; Pembangunan pertanian akan difokuskan pada kawasan dengan komoditas unggulan bernilai ekonomi tinggi, seperti kopi, kakao kawasan sentra produksi berbasis komoditas unggulan lokal, seperti padi, jagung, hortikultura, dan komoditas perkebunan strategis, sesuai dengan potensi wilayah.
4. Mendorong industrialisasi pertanian melalui pembangunan agroindustri dan dukungan rantai pasok dari produksi hingga pasar, termasuk fasilitasi akses pembiayaan, sertifikasi produk, dan pemasaran digital.
5. Penguatan ketahanan pangan lokal dengan mendorong diversifikasi pangan, penguatan cadangan pangan masyarakat, dan pengembangan sistem distribusi yang menjangkau daerah terpencil dan rentan rawan pangan.
6. Adaptasi terhadap perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui pertanian ramah lingkungan dan perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi.
7. Peningkatkan kompetensi petani melalui program pelatihan vokasi pertanian, sekolah lapang, dan transfer pengetahuan terutama dalam budidaya modern, pemanfaatan teknologi digital, dan pengelolaan usaha tani secara efisien.
8. Mendorong regenerasi petani muda/milenial dengan menciptakan pelatihan kewirausahaan pertanian bagi generasi muda desa agar tertarik dan mampu mengembangkan pertanian sebagai sektor yang menjanjikan secara ekonomi
9. Memperluas kemitraan dengan lembaga pendidikan, penyuluhan, dan sektor swasta, untuk menghadirkan pelatihan berbasis inovasi dan kewirausahaan agribisnis

Pengembangan sektor strategis pertanian dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 bukan hanya menjadi bagian dari upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga merupakan strategi penting dalam mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan kesejahteraan petani, dan pengurangan kesenjangan antarwilayah, melalui pendekatan pembangunan pertanian yang holistik dan terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir, dari penguatan kelembagaan petani hingga adopsi teknologi modern. Diharapkan sektor ini mampu tumbuh dan berkembang lebih adaptif, produktif, dan berkelanjutan. Selain itu sektor ini juga diharapkan tidak hanya menjadi penopang ekonomi lokal, tetapi juga berperan strategis dalam penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta

peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman secara merata dan berkelanjutan.

3.8.2 Perikanan

Sektor perikanan merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi sumber daya perikanan yang cukup besar, baik perikanan tangkap di wilayah pesisir maupun perikanan budidaya di perairan darat, yang selama ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal.

Sebagai bagian dari arah pembangunan jangka menengah, sektor perikanan diarahkan untuk tumbuh secara inklusif, produktif, dan berkelanjutan, melalui strategi-strategi berikut:

1. Peningkatan kapasitas produksi perikanan budidaya dan tangkap, dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, penyuluhan teknologi ramah lingkungan, dan peningkatan akses terhadap benih unggul serta pakan yang berkualitas.
2. Pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan kecil, melalui pelatihan, pendampingan usaha, penguatan kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan dan perlindungan usaha.
3. Pengembangan kawasan sentra perikanan terpadu berbasis komoditas unggulan lokal, baik untuk budidaya air tawar maupun perikanan laut, guna mendorong ekonomi wilayah secara merata.
4. Penguatan rantai nilai perikanan (*fish value chain)* melalui pengolahan pascapanen, peningkatan mutu dan daya saing produk perikanan, serta perluasan akses pasar berbasis digital dan kemitraan usaha.
5. Pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, termasuk konservasi ekosistem pesisir dan perairan, pengendalian penangkapan ikan berlebih, serta adaptasi terhadap perubahan iklim.
6. Pengembangan inovasi dan digitalisasi sektor perikanan, untuk meningkatkan efisiensi produksi, pemasaran, dan layanan pendukung lainnya, serta menarik keterlibatan generasi muda dalam sektor ini.

Melalui strategi tersebut, sektor perikanan diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang inklusif dan berkelanjutan, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya komunitas nelayan dan pembudidaya ikan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman melalui beberapa program dan inovasi :

1. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP)
   KNMP merupakan program unggulan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Indonesia. Program ini juga berfokus pada pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang terintegrasi untuk mendukung kegiatan perikanan. Sasaran dari program ini adalah Kelompok Usaha Bersama/Kelompok Nelayan serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
   Tujuan dan Cakupan Program KNMP adalah:
   a. Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan

Program ini berupaya meningkatkan taraf hidup nelayan melalui berbagai kegiatan, termasuk penyediaan infrastruktur, pelatihan, dan akses pasar;

b. Membangun Kampung Nelayan yang Produktif dan Berkelanjutan;

c. Program ini tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memastikan keberlanjutan kegiatan ekonomi di kampung nelayan;

d. Mendukung Ekonomi Biru
Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari konsep ekonomi biru yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan;

e. Mengembangkan Koperasi
Program ini mendorong pembentukan dan penguatan koperasi nelayan sebagai wadah kegiatan ekonomi yang terorganisir dan berkelanjutan;

f. Diversifikasi Ekonomi
Selain penangkapan ikan, program ini juga mendorong pengembangan budidaya perikanan air tawar, payau, dan laut;

g. Pembangunan Infrastruktur
Program ini mencakup pembangunan dermaga, gudang beku, balai pelatihan, pabrik es, sentra kuliner, menara pandang, dan fasilitas lainnya.

h. Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu proritas lokasi pembangunan KNMP Tahun 2025 yang berlokasi di Nagari Kataping Kecamatan Batang Anai.

2. Kampung Perikanan Budidaya

Kampung Perikanan Budidaya adalah suatu kawasan yang berbasis komoditas unggulan dan/atau komoditas lokal dengan mensinergikan berbagai potensi untuk mendorong berkembangnya usaha pembudidayaan ikan yang berdaya saing dan berkelanjutan, menjaga kelestarian sumber daya ikan yang digerakkan oleh masyakarat, sehingga mampu menjamin produksi yang kontinyu dan terjadwal.

Pengembangan perikanan melalui program terobosan pembangunan kampung perikanan budidaya air tawar yang berbasis kearifan lokal, dimana Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu daerah yang ditetapkan untuk pengembangan kampung perikanan budidaya air tawar dengan komoditas ikan gurami. Hal ini telah tertuang melalui Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2023 tentang Kampung Perikanan Budidaya. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menetapkan Nagari Sungai Asam Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang sebagai kawasan kampung perikanan budidaya air tawar sesuai dengan potensi perikanan yaitu ikan Gurami. Adapun tujuan pengembangan kampung perikanan budidaya ini diantaranya:

a. Mewujudkan kegiatan usaha budidaya yang terhubung mulai dari sarana dan prasarana produksi budidaya, sarana

prasarana pasca panen, pengembangan skala usaha para pelaku usaha, dan mekanisme pasar;
b. Meningkatkan produksi perikanan budidaya;
c. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya ikan;
d. Meningkatkan partisipasi masyarakat lokal.

3. Diversifikasi Produk Olahan Perikanan
Salah satu sasaran yang menjadi objek promosi gemarikan yaitu kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan (Poklahsar) diutamakan kelompok milenial serta anggota PKK. Kelompok sasaran Poklahsar dan PKK tersebut bisa diajak berkontribusi untuk mengajak minimal anggota keluarganya agar menyukai dan mengkonsumsi ikan sehari hari melalui penyediaan menu makanan berbahan baku ikan. Supaya menu yang mereka sajikan tidak monoton dan menarik untuk dikonsumsi anggota keluarga. Supaya dapat menyasar pada sasaran kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan melakukan pembinan kepada Polaksar binaan dan anggota PKK dalam bimtek diversifikasi poroduk olahan perikanan dengan tujuan untuk mengedukasi anggota PKK dalam menghasilkan produk olahan berbahan baku ikan yang akan dikonsumsi oleh keluarganya serta dijadikan sebagai produk UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga).

3.8.3 Peternakan

Sektor peternakan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan hewani, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penyediaan lapangan kerja, terutama di wilayah pedesaan. Dengan potensi sumber daya alam, ketersediaan lahan, serta tradisi beternak yang telah mengakar di masyarakat, sektor peternakan diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan pembangunan peternakan yang maju, berdaya saing, dan ramah lingkungan, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman merumuskan arah pengembangan sektor ini melalui strategi-strategi berikut:

1. Peningkatan populasi dan produktivitas ternak melalui pengembangan bibit unggul, perbaikan manajemen pemeliharaan, serta pemanfaatan teknologi peternakan modern.
2. Penguatan sistem pembibitan dan penggemukan lokal, terutama untuk komoditas strategis seperti sapi, kambing, ayam, dan itik, guna mengurangi ketergantungan dari luar daerah.
3. Pengembangan kawasan peternakan terpadu yang terintegrasi dengan pakan ternak, pengolahan limbah, dan pengolahan hasil peternakan untuk menciptakan nilai tambah.
4. Pemberdayaan peternak rakyat melalui pelatihan, penyuluhan, kemitraan usaha, serta peningkatan akses terhadap pembiayaan dan pemasaran hasil ternak.

5. Peningkatan layanan kesehatan hewan dan pengendalian penyakit ternak secara berkelanjutan untuk menjaga kualitas dan keamanan produk peternakan.
6. Pengembangan agribisnis peternakan berbasis usaha kecil dan menengah (UMKM), serta penguatan rantai pasok dari hulu ke hilir, termasuk pengolahan produk seperti susu, daging, dan telur.
7. Penerapan peternakan ramah lingkungan yang memperhatikan kelestarian sumber daya alam, kesejahteraan hewan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Dengan penguatan sektor peternakan melalui pendekatan tersebut, diharapkan dapat tercipta kemandirian pangan hewani, peningkatan kesejahteraan peternak, serta kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor peternakan akan terus dikembangkan sebagai bagian penting dari pembangunan pertanian yang menyeluruh dan berorientasi masa depan.

3.8.4 Pariwisata

Sebagai bagian dari upaya transformasi ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menetapkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan yang dikembangkan secara terencana dan integratif, dengan fokus pada pembangunan destinasi, penguatan pelaku industri pariwisata, dan perluasan pasar wisatawan yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. Untuk mencapai tujuan dari strategi pengembangan sektor ini diarahkan pada:

1. Pengembangan Kawasan Ulakan Tapakih – Nan Sabaris sebagai Kawasan Wisata Religi, Kuliner dan Bahari, melalui:
   a. Pemantapan Makam Syech Burhanuddin sebagai Kawasan Wisata Religi dan Edukasi Islam di Sumatera Barat;
   b. Pemantapan Pantai Tiram sebagai kawasan Rekreasi Pantai Keluarga dan Kuliner;
   c. Mengembangkan Kawasan Pulau Pieh sebagai Daerah Tujuan Wisata Bahari Kabupaten Padang Pariaman;
   d. Pengembangan Kawasan Ulakan Tapakih – Nan Sabaris sebagai Kawasan Ziarah dan Sejarah.
2. Pengembangan Batang Anai – Lubuak Aluang sebagai Kawasan Pintu Gerbang Sumatera Barat, Rekreasi Alam dan *Water-front Resort*, melalui:
   a. Pemantapan Citra Kabupaten Padang Pariaman sebagai Gerbang Pintu Masuk Sumatera Barat;
   b. Pengembangan *Adventure Tourism* dan Rekreasi Wisata Alam Pegunungan Lubuak Aluang dan Sekitarnya;
   c. Pencanangan Kawasan Pantai Katapiang sebagai Kawasan Investasi Water-Front Resort berbasis *Ecolodge* (ramah lingkungan dan bertanggung jawab);
   d. Pengembangan Desa Wisata di Kawasan Batang Anai-Lubuak Aluang dan sekitarnya sesuai dengan potensi Wisata Alam.
3. Pengembangan Kawasan Kayu Tanam – Patamuan sebagai Kawasan Wisata Edukasi, Rekreasi, Alam, Tirta dan MICE, melalui:
   a. Pengembangan Kawasan Malibou Anai sebagai Kawasan Edukasi, Rekreasi, Alam dan Tirta Terpadu.

b. Pengembangan Kawasan Agrowisata Coklat dan Sentra Kuliner di sekitar Kawasan Wisata Malibou Anai, Pencanangan Kawasan Malibou Anai sebagai Kawasan MICE;
c. Mempersiapkan Kawasan Malibou Anai sebagai jalur Distribusi *Cable Car* yang menghubungkan Padang Pariaman – Padang Panjang – Tanah Datar;
d. Mengembangkan Desa Wisata di Kawasan Gunuang Tigo dan sekitarnya sebagai Kawasan Rantai Desa Wisata;
e. Pengembangan Desa Wisata di Kawasan Kayu Tanam – Patamuan dan sekitarnya sesuai dengan potensi Wisata Alam.

4. Pengembangan Anam Lingkuang dan Sekitarnya sebagai Kawasan Sejarah, melalui:
   a. Pengembangan Jalur Wisata Sejarah Anam Lingkuang dan Sekitarnya;
   b. Pengembangan Sarana dan Fasilitas Umum, Utilitas dan Infrastruktur perkotaan Anam Lingkuang dan Sekitarnya sehingga mampu menunjang kebutuhan wisatawan selama kunjungan di Padang Pariaman;
   c. Mengembangkan kawasan Anam Lingkuang dan Sekitarnya sebagai kawasan pendidikan, budaya dan sejarah;
   d. Mengembangkan taman wisata kota/kecamatan Anam Lingkuang sebagai ruang terbuka hijau Masyarakat;
   e. Pengembangan Desa Wisata di Anam Lingkuang dan sekitarnya dengan Potensi Wisata Buatan,
5. Pembangunan Kawasan Sungai Limau sebagai kawasan wisata tepi pantai berbasis relaksasi dan keluarga melalui :
   a. Mengembangkan Pantai Arta Indah, Pantai Arta Permai, Pantai Baselona sebagai pantai rekreasi keluarga dan outbond;
   b. Mengembangkan Pantai Baselona sebagai kawasan wisata pantai relaksasi;
   c. Pengembangan Desa Wisata di Kawasan Sungai Limau-Batang Gasan dan sekitarnya dengan potensi Wisata Alam,
6. Pengembangan Kawasan Sungai Garinggiang – V Koto sebagai Kawasan Agrowisata dan Ziarah melalui:
   a. Mengembangkan IV Koto Aua Malintang Dalam sebagai Kawasan Agrowisata;
   b. Pengembangan Jalur Wisata Ziarah dan Sejarah Sungai Garinggiang;
   c. Pengembangan Desa Wisata di Kawasan Sungai Garinggiang – V Koto dengan potensi wisata Alam dan Budaya.
7. Pembangunan Kawasan Koto Timur – VII Koto dan Sekitarnya sebagai kawasan wisata *agro culture*, melalui:
   a. mengembangkan kawasan wisata budaya V Koto Timur – VII Koto;
   b. Mengembangkan kawasan wisata *agro culture*.
8. Peningkatan kualitas dan daya saing destinasi wisata, melalui pembangunan infrastruktur pendukung, penataan kawasan wisata, serta penyediaan fasilitas publik yang ramah pengunjung dan ramah lingkungan.

9. Peningkatan kapasitas pelaku pariwisata melalui pelatihan, sertifikasi, dan penguatan jejaring usaha, baik untuk pengelola destinasi, pelaku ekonomi kreatif, maupun penyedia jasa wisata.
10. Promosi dan pemasaran pariwisata secara digital dan kreatif, untuk meningkatkan visibilitas dan kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara.
11. Pengembangan event pariwisata daerah secara berkelanjutan, baik dalam bentuk festival budaya, olahraga, maupun atraksi lokal yang mendukung citra dan identitas pariwisata kabupaten.
12. Penguatan tata kelola pariwisata daerah, termasuk kolaborasi lintas sektor, kemitraan dengan swasta, dan penyiapan regulasi pendukung yang mendorong investasi pariwisata.

Melalui strategi tersebut, sektor pariwisata mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat citra Kabupaten Padang Pariaman sebagai destinasi unggulan yang mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional. Pariwisata bukan hanya sektor ekonomi, tetapi juga ruang strategis untuk memperkuat identitas, membangun kebanggaan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

3.8.5 Perindustrian

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan, sektor perindustrian ditetapkan sebagai salah satu sektor strategis yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan ekonomi daerah. Pengembangan sektor ini diarahkan pada hilirisasi untuk mendorong nilai tambah sumber daya lokal, memperkuat peran pelaku industri kecil dan menengah (IKM), serta mendukung kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah. Sebagai bagian dari program prioritas kepala daerah, pengembangan industri lokal terintegrasi dengan program peningkatan nilai tambah komoditas unggulan daerah, penciptaan lapangan kerja produktif, dan peningkatan daya saing produk lokal. Strategi yang akan ditempuh meliputi:

1. Peningkatan nilai tambah produksi dan pengembangan produk serta pembangunan sentra-sentra industri unggulan daerah melalui:
    a. fasilitasi, koordinasi dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
    b. Fasilitasi dan kerjasama lembaga pemerhati dan pecinta produk unggulan daerah;
    c. Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah;
    d. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri kecil, menengah dan besar dengan swasta;
    e. Fasilitasi pemasaran, promosi dan perbandingan produk IKM;
    f. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;
    g. Pengembangan dan pelayanan teknologi industri;
    h. Pembangunan dan Revitalisasi Sentra-sentra industri unggulan daerah;
    i. Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat.

2. Peningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan sumber daya

manusia dalam rangka mewujudkan industri yang berwawasan lingkungan dan industri yang kompetitif, yang dilakukan melalui:

a. Peningkatan kualitas, produktifitas dan efisiensi produk industri unggulan serta industri potensial lainnya;
b. Penguatan dan pendalaman struktur industri dan penguasaan inovasi serta teknologi industri;
c. Pengembangan industri pengolahan yang berwawasan lingkungan atau industri hijau;
d. Peningkatan Sumber Daya Manusia industri yang berkualitas dan produktif;
e. Fasilitasi dan pembinaan bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumberdaya alam;
f. Penyiapan Sumber Daya Manusia yang kreatif dan inovatif serta kompeten di bidang industri;
g. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri;
h. Peningkatan dan pembinaan kapasitas inovasi dan kemampuan teknologi industri.

Melalui kebijakan dan strategi tersebut, sektor perindustrian diharapkan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah yang menciptakan peluang usaha baru, meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, serta memperkuat kemandirian ekonomi . Selain itu, kehadiran industri halal yang terintegrasi akan membuka akses pasar lebih luas dan menempatkan Kabupaten Padang Pariaman sebagai pusat pertumbuhan industri yang inklusif dan berdaya saing tinggi di tingkat regional.

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 diturunkan dalam bentuk program dan kerangka pendanaan. Upaya ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan dapat dijalankan secara nyata oleh setiap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Rencana program perangkat daerah merupakan penjabaran operasional dari strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD. Program-program ini disusun secara sistematis, terukur, dan berbasis pada prioritas pembangunan untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah, serta sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, setiap program perangkat daerah dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan yang disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah serta memperhatikan prinsip keberlanjutan dan keadilan antar sektor maupun antar wilayah.

Rencana program ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Oleh karena itu, pengalokasian pendanaan setiap tahunnya dilakukan secara proporsional, mempertimbangkan urgensi, skala prioritas, serta dukungan terhadap pencapaian indikator kinerja utama daerah. Rencana program dan pendanaan ini dapat menjadi instrumen pengelolaan pembangunan daerah yang akuntabel, transparan, dan mampu menjawab tantangan strategis Kabupaten Padang Pariaman dalam lima tahun ke depan.

Tabel 4. 1
Program Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembanguna Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penaggung Jawab
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas																		
Tujuan 1.1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas				**Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**3,68**	**1.159.629.622.951**	**4,3**	**1.086.430.440.103**	**4,9**	**1.059.090.791.373**	**5,4**	**1.044.774.999.301**	**5,9**	**1.061.922.058.399**	**6,4**	**1.044.114.868.418,00**	
Sasaran 1.1.1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, akuntabel dan berintegritas.				**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**80**	**1.159.012.622.951**	**82**	**1.086.294.440.103**	**83**	**1.058.958.796.723**	**84**	**1.044.643.771.601**	**85**	**1.061.793.122.899**	**86**	**1.043.968.722.718**	
				Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	**Nilai**	**71,4**		**72,19**		**72,99**		**73,79**		**74,59**		**75,39**		
				Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK	**%**	**78,00**		**78,40**		**78,80**		**79,20**		**79,60**		**80,00**		
4	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang efektif dilaksanakan	%	100	4.914.278.200	100	1.112.000.000	100	909.500.000	100	930.500.000	100	944.500.000	100	929.000.000	**Sekretariat Daerah**
				Indeks Zakat Nasional (IZN)	indeks	0,645		0,67		0,695		0,72		0,745		0,77		
				Persentase produk hukum yang dihasilkan	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase penyelesaian permasalahan Hukum yang difasilitasi	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Kerjasama Wajib yang dilaksanakan	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Administrasi Tata pemerintahan Yang Dilaksanakan	%	100		100		100		100		100		100		
				Penyusunan LPPD Kabupaten tepat waktu	%	100		100		100		100		100		100		
4	01	03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan pengelolaan perekonomian dan SDA yang Efektf dilaksanakan	%	100	414.070.900	100	630.000.000	100	665.000.000	100	634.000.000	100	705.000.000	100	707.000.000	
				Return on Aset (ROA) BUMD	%	0		0		0		0		0		0		
				Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan	%	1,82		1,88		1,94		2		2,07		2,14		
				Konsumsi listrik per kapita	KwH	654		667,7		682		696,6		711,3		726,2		
				Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks	62		63		64		65		66		67		
				Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0		0		0		0		0		0		
				Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	88		90		91		92		93		95		
				Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	25		30		35		40		45		50		
				Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	90		92		93		94		95		95		
				Persentase kebijakan Administrasi Pembangunan Yang Efektif Dilaksanakan	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Proyek Strategis daerah yang terkendalikan	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	7.230.000	3,15	3.500.000	3,45	3.500.000	3,65	3.500.000	3,95	3.500.000	4,25	3.500.000	**2x11 Anam Lingkuang**
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	22.650.000	100	21.450.000	100	21.450.000	100	21.450.000	100	21.450.000	100	21.450.000	
				Persentase UKM yang	%	30		35		40		45		50		60		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembanguna Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penaggung Jawab
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Kelurahan	difasilitasi dalam Pengembangan Usaha														
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	1.850.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	2.500.000,00	100	2.500.000,00	100	2.500.000,00	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Partai Politik yang Aktif di Kecamatan	%	20	11.075.000	22	9.000.000	25	9.500.000	27	9.500.000	30	9.500.000	35	9.500.000	
				Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	25	1.730.000	40	3.000.000	55	3.000.000	65	3.000.000	85	3.000.000	100	3.000.000	
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	0	3,15	13.440.000	3,45	6.450.000	3,65	13.700.000	3,95	8.130.000	4,25	14.950.000	**2x11 Kayu Tanam**
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	5.010.950	100	9.000.000	100	13.000.000	100	9.000.000	100	10.500.000	100	10.500.000	
				Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	30		35		40		45		50		60		
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	0	100	1.440.000	100	1.440.000	100	1.440.000	100	1.440.000	100	1.200.000,00	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan	%	70	16.720.250	75	10.220.000	80	20.720.000	85	20.720.000	90	20.720.000	95	20.480.000	
				Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	25	0	40	1.440.000	55	1.440.000,00	65	1.200.000,00	85	1.440.000,00	100	1.440.000,00	
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	3.540.000	3,15	5.960.000	3,45	3.000.000	3,65	3.000.000	3,95	3.560.000	4,25	3.000.000	**Batang Gasan**
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	1.000.000	100	18.000.000	100	17.760.000	100	18.000.000	100	18.000.000	100	17.000.000	
				Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	30		35		40		45		50		60		
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	1.000.000	100	2.500.000	100	2.000.000,00	100	2.100.000,00	100	2.000.000,00	100	2.500.000,00	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan	%	70	16.400.000	75	17.500.000	80	19.000.000	85	19.000.000	90	20.000.000	95	20.000.000	
				Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	25	910.000	40	2.000.000	55	2.000.000,00	65	2.000.000,00	85	2.000.000,00	100	2.000.000,00	
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	6.750.000	3,15	7.650.000	3,45	7.750.000	3,65	7.750.000	3,95	7.750.000	4,25	7.750.000	**Batang Anai**
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	30.220.000	100	16.220.000	100	16.220.000	100	16.220.000	100	16.220.000	100	16.220.000	
				Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	30		35		40		45		50		60		
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	2.160.000	100	2.160.000	100	2.160.000,00	100	2.160.000,00	100	2.160.000,00	100	2.160.000,00	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan	%	70	5.760.000	75	5.760.000	80	5.760.000	85	5.760.000	90	5.760.000	95	5.760.000	
				Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100		100		100		100		100		100		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembanguna Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penaggung Jawab
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	25	3.945.000	40	4.440.000	55	4.440.000,00	65	4.440.000,00	85	4.440.000,00	100	4.440.000,00	
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	5.160.000	3,15	10.480.000	3,45	7.500.000	3,65	7.500.000	3,95	7.500.000	4,25	7.500.000	Anam Lingkuang
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	19.419.500	100	15.160.000,00	100	18.160.000,00	100	18.160.000,00	100	18.160.000,00	100	18.160.000,00	
				Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	30		35		40		45		50		60		
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	1.120.000	100	1.200.000	100	1.200.000,00	100	1.200.000,00	100	1.200.000,00	100	1.200.000,00	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan	%	70	0	75	-	80	-	85	-	90	-	95	-	
				Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	25	1.440.000	40	1.500.000	55	1.500.000,00	65	1.500.000,00	85	1.500.000,00	100	1.500.000,00	
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	36.153.000	3,15	11.200.000		6.500.000	3,65	13.200.000	3,95	13.200.000	4,25	13.200.000	IV Koto Aua Malintang
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	26.866.500	100	17.000.000	100	14.500.000	100	15.460.000	100	15.460.000	100	15.460.000	
				Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	30		35		40		45		50		60		
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	710.000	100	500.000	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan	%	70	23.250.000	75	22.000.000	80	17.500.000	85	20.200.000	90	20.200.000	95	20.200.000	
				Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	25	7.457.000	40	2.300.000	55	2.100.000,00	65	2.400.000,00	85	2.400.000,00	100	2.400.000,00	
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	11.290.000	3,15	7.830.000	3,45	7.290.000	3,65	7.290.000	3,95	7.290.000	4,25	7.290.000	Lubuak Aluang
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	36.667.000	100	21.540.000	100	20.967.000	100	20.967.000	100	20.967.000	100	20.967.000	
				Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	30		35		40		45		50		60		
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	6.815.000	100	6.815.000	100	6.815.000,00	100	6.815.000,00	100	6.815.000,00	100	6.815.000,00	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Partai Politik yang Aktif di Kecamatan	%	70	16.774.000	75	55.604.000	80	16.774.000	85	16.774.000	90	16.774.000	95	16.774.000	
				Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	25	5.920.000	40	5.920.000	55	5.920.000	65	5.920.000	85	5.920.000	100	5.920.000	
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	16.712.500	3,15	17.300.000	3,45	17.200.000	3,65	17.200.000	3,95	17.200.000	4,25	17.200.000	Nan Sabaris
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	03	Program Pemberdayaan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	21.842.000	100	26.000.000	100	22.000.000	100	22.000.000	100	22.000.000	100	22.000.000	

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembanguna Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penaggung Jawab
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	30		35		40		45		50		60		
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	3.786.500	100	4.200.000	100	3.800.000	100	3.800.000,00	100	3.800.000,00	100	3.800.000,00	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Partai Politik yang Aktif di Kecamatan	%	70	26.756.500	75	22.000.000	80	20.000.000	85	20.000.000	90	20.000.000	95	20.000.000	
				Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	25	760.000	40	1.200.000	55	1.000.000	65	1.000.000,00	85	1.000.000,00	100	2.300.000,00	
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	2.725.000	3,15	2.725.000	3,45	2.340.000	3,65	2.340.000	3,95	2.340.000	4,25	2.340.000	VII Koto Padang Sago
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	19.061.500	100	19.061.500	100	13.919.000	100	13.919.000	100	13.919.000	100	13.919.000	
				Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	30		35		40		45		50		60		
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	1.090.000	100	1.090.000	100	1.090.000,00	100	1.090.000,00	100	1.090.000,00	100	1.090.000,00	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Partai Politik yang Aktif di Kecamatan	%	70	29.164.000	75	19.430.000	80	22.430.000	85	22.430.000	90	22.430.000	95	22.430.000	
				Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	25	1.760.000	40	1.760.000	55	940.000,00	65	940.000,00	85	1.020.000,00	100	1.020.000,00	
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	2.540.000	3,15	16.438.000	3,45	16.454.000	3,65	16.454.000	3,95	16.454.000	4,25	16.454.000	VII Koto Patamuan
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	18.132.000	100	10.402.000	100	10.402.000	100	10.402.000	100	10.402.000	100	10.402.000	
				Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	30		35		40		45		50		60		
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	1.800.000	100	1.800.000	100	1.800.000,00	100	1.800.000,00	100	1.800.000,00	100	1.800.000,00	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan	%	70	10.800.000	75	8.502.000	80	8.502.000	85	8.502.000	90	8.502.000	95	8.502.000	
				Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	25	1.800.000	40	1.800.000	55	1.800.000,00	65	1.800.000,00	85	1.800.000,00	100	1.800.000,00	
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	6.590.000	3,15	15.104.599	3,45	5.500.000	3,65	5.500.000	3,95	5.500.000	4,25	5.500.000	Sungai Garinggiang
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	5.351.000	100	12.351.000	100	3.900.000	100	3.900.000	100	3.900.000	100	3.900.000	
				Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	30		35		40		45		50		60		
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	1.260.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan	%	70	24.670.000	75	25.600.000	80	26.000.000	85	26.000.000	90	26.000.000	95	26.000.000	
				Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100		100		100		100		100		100		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembanguna Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penaggung Jawab
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	25	2.400.000	40	4.000.000	55	4.000.000	65	4.000.000	85	4.000.000	100	4.000.000	
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	5.160.000	3,15	10.480.000	3,45	7.500.000	3,65	7.500.000	3,95	7.500.000	4,25	7.500.000	Sungai Limau
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	17.419.500	100	13.160.000	100	15.160.000	100	15.160.000	100	15.160.000	100	15.160.000	
				Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	30		35		40		45		50		60		
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	1.120.000	100	1.200.000	100	1.200.000,00	100	1.200.000,00	100	1.200.000,00	100	1.200.000,00	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan	%	70	0	75	40.000.000	80	60.000.000	85	60.000.000	90	60.000.000	95	60.000.000	
				Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	25	1.440.000	40	1.500.000	55	1.500.000,00	65	1.500.000,00	85	1.500.000,00	100	1.500.000,00	
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	4.210.000	3,15	4.710.000	3,45	8.000.000	3,65	8.000.000	3,95	8.000.000	4,25	8.000.000	Sintuak Toboh Gadang
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	17.740.000	100	24.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	
				Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	30		35		40		45		50		60		
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	1.500.000	100	2.000.000	100	3.500.000,00	100	3.500.000,00	100	4.000.000,00	100	5.700.000,00	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan	%	70	7.999.000	75	6.740.000	80	15.000.000	85	20.000.000	90	18.000.000	95	25.000.000	
				Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	25	5.700.000	40	3.500.000	55	2.000.000,00	65	2.000.000,00	85	2.000.000,00	100	2.000.000,00	
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	7.630.000	3,15	7.630.000	3,45	18.000.000	3,65	19.000.000	3,95	19.000.000	4,25	19.000.000	Ulakan Tapakih
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	25.235.000	100	25.760.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	
				Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	30		35		40		45		50		60		
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	2.960.000	100	4.870.000	100	4.950.000,00	100	5.500.000,00	100	5.700.000,00	100	5.700.000,00	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan	%	70	8.105.000	75	12.915.000	80	23.000.000	85	23.500.000	90	23.500.000	95	23.500.000	
				Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	25	0	40	-	55	-	65	2.000.000,00	85	2.300.000,00	100	2.300.000,00	
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	6.000.000	3,15	3.000.000	3,45	3.500.000	3,65	3.500.000	3,95	3.500.000	4,25	3.500.000	V Koto Timur
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	03	Program	Persentase Lembaga	%	100	27.921.500	100	26.900.000	100	26.400.000	100	26.400.000	100	26.400.000	100	26.400.000	

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembanguna Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penaggung Jawab
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kemasyarakatan Yang Aktif														
				Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	30		35		40		45		50		60		
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	46.500.000	100	3.000.000	100	3.600.000,00	100	3.600.000,00	100	3.600.000,00	100	3.600.000,00	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan	%	70	29.450.000	75	40.000.000	80	40.000.000	85	40.000.000	90	40.000.000	95	40.000.000	
				Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	25	2.240.000	40	2.000.000	55	3.600.000,00	65	3.600.000,00	85	3.600.000,00	100	3.600.000,00	
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	1.520.000	3,15	2.500.000	3,45	5.000.000	3,65	5.000.000	3,95	5.000.000	4,25	5.000.000	**V Koto**
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	12.515.000	100	12.650.000	100	12.850.000	100	12.480.017	100	13.000.000	100	13.000.000	
				Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	30		35		40		45		50		60		
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	690.000	100	1.500.000	100	3.000.000,00	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan	%	70	14.190.000	75	14.500.000	80	15.000.000	85	15.500.000	90	5.500.000	95	15.500.000	
				Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	25	690.000	40	1.500.000	55	2.000.000,00	65	2.000.000,00	85	2.000.000,00	100	2.000.000,00	
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	20.890.000	3,15	24.130.000	3,45	19.000.000	3,65	19.500.000	3,95	19.500.000	4,25	19.500.000	**VII Koto**
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	22.360.000	100	22.800.000	100	18.500.000	100	18.500.000	100	18.500.000	100	18.500.000	
				Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	30		35		40		45		50		60		
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	6.280.000	100	8.000.000	100	6.000.000,00	100	6.000.000,00	100	6.000.000,00	100	6.000.000,00	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan	%	70	15.515.000	75	19.000.000	80	16.000.000	85	16.000.000	90	16.000.000	95	16.000.000	
				Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	25	4.580.000	40	4.980.000	55	3.880.000,00	65	3.880.000,00	85	3.880.000,00	100	3.880.000,00	
4	02	02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Ketepatan penetapan Perda APBD tahun N	%	100	13.456.255.800	100	9.638.056.570	100	8.178.056.570	100	7.255.906.570	100	7.528.056.570	100	6.963.056.570	**Sekretariat Dewan**
				Persentase Penetapan Ranperda tahun N	%	85		86		87		88		89		90		
				Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	90		91		92		93		94		95		
				Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Peningkatan Kapasitas DPRD	%	90		91		92		93		94		95		
2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas kependuduka Digital	%	20	0	25	340.000.000	30	300.000.000	35	300.000.000	40	300.000.000	50	300.000.000	**Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**
				Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari	%	62		64		66		68		70		72		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembanguna Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penaggung Jawab
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				yang memiliki KIA														
				Perekaman KTP Elektronik	%	99,6		99,65		99,7		99,75		99,8		99,8		
2	12	03	Program pencatatan Sipil	Persentase Akte Kematian yang Diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	0	100	85.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	
				Persentase akte kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Akte perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100		100		100		100		100		100		
2	12	04	Program pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	%	100	24.000.000	80	76.500.000	85	67.500.000	90	67.500.000	95	67.500.000	100	67.500.000	
				Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Perangkat Daerah	33		34		36		38		40		42		
2	12	05	Program pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	%	100	0	100	8.500.000	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	
2	24	02	Program pengelolaan Arsip	Persentase perangkat daerah yang memiliki laporan audit kearsipan internal predikat baik	%	69.5	65.000.000	70	52.000.000	70.5	42.000.000,00	71	82.000.000,00	72	82.000.000,00	73	82.000.000,00	**Dinas Arsip dan Perpustakaan**
2	24	03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%	58	25.000.000	59	0,00	60	15.000.000	61	0,00	62	0,00	62	0,00	
				Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	67		68		69		70		71		72		
				Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	34		35		36		37		38		39		
2	24	04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan arsip yang bersifat tertutup	%	0	15.000.000	2	0,00	3	0,00	5	0,00	7	0,00	10	0,00	
2	03	2	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	%	70	722.424.416	71	423.563.356	72	348.563.356	73	348.563.356	74	348.563.356	75	348.563.356	**BKPSDM**
				Persentase ketersediaan data dan informasi ASN	%	80		81		82		83		84		85		
				Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai kompetensinya	%	50		51		52		53		54		55		
				Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	%	20		21		22		23		24		25		
				Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	%	75		76		77		78		79		80		
5	04	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	50	534.571.800	51	426.171.279	52	351.171.279	53	351.171.279	54	351.171.279	55	351.171.279	
				Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	20		21		22		23		24		25		
				Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar	%	80		81		82		83		84		85		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembanguna Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penaggung Jawab
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				(%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)														
5	02	02	Program Pegelolaan Keuangan Daerah	Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	%	45,34	198.905.177.013	42,57	189.802.636.760	29,94	172.302.636.760	29,76	172.402.636.760	29,94	171.302.636.760	29,94	170.302.636.760	Badan Pengelolaan keuangan Daerah (BPKD)
				Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	%	21,79		22,5		23		23,5		24		24,5		
				Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	16,87		12,28		10,14		10,02		10,03		9,98		
				Persentase Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase realisasi anggaran Belanja Wajib Pelayanan Dasar	%	94,591		94,594		94,594		94,594		94,588		94,587		
				Persentase penurunan SILPA	%	-52,84		100		0		0		0		0		
				Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	6,94		6,5		6		5,5		5		4,5		
				Persentase Kepemilikan NPWP	%	32,54		34,02		35,57		37,19		38,88		40,65		
				Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100		100		100		100		100		100		
				Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	-6,904		-6,903		-6,901		-6,901		-6,905		-6,903		
				Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	%	81,403		59,472		49,194		48,605		48,643		48,413		
				Opini Laporan Keuangan	%	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
				Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	89,707		89,71		89,71		89,707		89,708		89,705		
5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penambahan nilai aset tetap	%	1	1.013.309.540	1	923.309.540	1	713.309.540	1	713.309.540	1	713.309.540	1	713.309.540	
				Assets Management	Ya/Tidak	Ya		Ya		Ya		Ya		Ya		Ya		
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	13,241	938.749.800	10,236	758.749.800	8,981	658.749.800	9,297	658.749.800	9,524	658.749.800	9,712	658.749.800	
				Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	-6,401		-6,397		-6,395		-6,396		-6,397		-6,397		
				Cakupan pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase penerapan sistem infromasi keuangan berbasis digital	%	100		100		100		100		100		100		
5	01	02	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	93	728.342.500	94	386.000.000	95	302.663.300	96	237.513.825	97	512.075.000	98	696.966.300	Bapelitbangda
				Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah	%	93		94		95		96		97		98		
				Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	100		100		100		100		100		100		
5	01	03	Program Koordinasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Pemerinttahan dan Pembangunan Manusia	%	93	215.848.800	94	360.000.000	95	328.991.750	96	319.053.000	97	371.028.000	98	399.339.800	
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	93		94		95		96		97		98		
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA	%	93		94		95		96		97		98		
X	XX	01	Program Penunjang	Persentase rekomendasi LHE	%	80,10	539.658.198.741	81,15	516.233.888.320	81,65	506.233.888.300	82,35	505.733.888.300	83,05	519.432.866.800	85,15	505.294.681.800	Dinas Pendidikan

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembanguna Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penaggung Jawab
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	SAKIP yang ditindaklanjuti														dan Kebudayaan
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	85,00		86,31		88,01		90,42		92,76		95,30		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	93,25		94,10		94,85		95,60		96,20		97,15		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	98.080.594.709	100	112.218.648.594	100	108.266.926.356	100	109.271.673.248	100	109.944.138.035	100	112.575.860.793	Dinas Kesehatan
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	B		A		A		A		A		A		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	29.812.592.342	100	44.445.000.000	100	43.265.000.000	100	43.265.000.000	100	43.265.000.000	100	43.265.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	11.756.702.322	100	14.900.000.000	100	13.400.000.000	100	13.400.000.000	100	12.770.000.000	100	12.350.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	85		85,05		85,10		85,15		85,20		85,25		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	5.302.113.859	100	4.891.905.051	100	24.004.999.991	100	12.955.904.536	100	15.494.495.445	100	15.743.073.535	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	85		85		85		85		85		85		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	10.641.056.082	100	8.516.813.164	100	8.116.813.164	100	8.116.813.164	100	8.116.813.164	100	7.792.403.164	Dinas Satuan Polisi Praja dan Pemadam Kebakaran
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	80		80		80		80		80		80		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	6.006.806.154	100	4.984.785.079	100	4.811.600.000	100	4.811.600.000	100	4.811.600.000	100	4.811.600.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	83		86		89		92		95		100		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	3.992.543.347	100	3.522.671.000	100	3.363.618.000	100	3.349.841.972	100	3.349.841.972	100	3.213.848.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,3		80,35		80,4		80,45		80,5		80,55		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	11.954.087.954	100	9.575.362.850	100	9.475.362.850	100	9.482.879.250	100	9.482.879.250	100	9.467.879.250	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	80		80		81		82		83		84		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	5.069.581.276	100	3.940.000.000	100	3.700.000.000	100	3.700.000.000	100	3.700.000.000	100	3.700.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	94,2		90		91		91,5		92		92,5		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	3.273.502.949	100	2.770.000.000	100	2.655.000.000	100	2.655.000.000	100	2.655.000.000	100	2.655.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	3.888.960.833	100	3.610.131.330	100	3.506.325.000	100	3.515.010.000	100	3.523.460.000	100	3.490.262.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	75		75		75		75		78		81		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	5.042.081.673	100	4.159.000.000	100	4.060.000.000	100	4.060.000.000	100	4.065.000.000	100	4.061.000.000	Dinas Perhubungan
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	82		83		83		84		84		85		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	3.616.844.912	100	3.800.000.000	100	2.750.000.000	100	2.750.000.000	100	2.750.000.000	100	2.650.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembanguna Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penaggung Jawab
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	6.129.299.434	100	5.497.293.255	100	5.222.963.816,00	100	5.222.963.816,00	100	5.222.963.816,00	100	5.222.963.816,00	Dinas Perdagangan, Tenaga kerja, Koperasi dan UKM
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	4.595.624.363	100	4.227.000.000	100	4.084.000.000	100	4.084.000.000	100	4.084.000.000	100	4.084.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	91,06		91,07		91,08		91,09		91,10		91,11		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	4.418.900.608	100	4.405.693.326	100	4.183.190.111	100	4.183.190.111	100	4.183.190.111	100	4.183.190.111	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	85		85,50		85,75		86,00		86,25		86,50		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	3.571.363.162	100	3.287.423.840	100	5.205.183.840	100	3.182.423.840	100	3.177.423.840	100	3.177.423.840	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	3.844.460.757	100	3.119.717.118	100	3.019.717.118,00	100	3.019.717.118,00	100	3.019.717.118,00	100	3.019.717.118,00	Dinas Perikanan
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	75		75,5		76		76,5		77		77,5		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	4.922.313.855	100	4.431.164.535	100	4.291.849.435	100	4.291.849.435	100	4.291.849.435	100	4.291.849.435	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	0		0		80		85		90		100		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaetn/Kota	Indeks Kematangan Organisasi	%	31	37.202.876.852	33	31.548.000.000	35	29.687.500.000,00	36	28.713.000.000,00	37	31.591.500.000,00	39	28.084.000.000,00	Sekretariat Daerah
				Persentase UPP dengan Nilai IPP baik hasil evaluasi mandiri		30		30		30		30		30		30		
				Penyusunan LKJiP Tepat Waktu		100		100		100		100		100		100		
				Persentase Pemenuhan Operasional Pimpinan Sesuai Aturan	%	100		100		100		100		100		100		
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Sekretariat Daerah	%	85		86		87		88		89		89		
				Persentase Capaian Rencana Pengemnbangan Kompetensi	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan Pimpinan Sesuai Aturan	%	81		81,5		82		82,5		83		83,5		
				Persentase realisasi anggaran Sekretariat Daerah	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Fasilitasi Keprotokolan kegiatan Daerah yang sesuai aturan	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan yang dilaksanakan sesuai strategi Komunikasi	%	100		100		100		100		100		100		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	26.277.626.371	100	21.561.943.430	100	21.421.943.430	100	21.844.093.430	100	20.571.943.430	100	20.136.943.430	Sekretariat DPRD
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase penyelenggaraan layanan keuangan dan admnistrasi DPRD dan sekretaraiat DPRD yg difasilitasi	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase penyelenggaraan adminsitrasi umum Perangkat daerah yang difasilitasi	%	100		100		100		100		100		100		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembanguna Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penaggung Jawab
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Persentase sarana dan prasarana pendukung yang disediakan	%	100		100		100		100		100		100		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	3.632.688.552	100	4.818.000.000	100	3.836.350.300	100	3.912.205.475	100	3.587.961.500	100	3.357.548.200	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	85		85		85		90		95		95		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	18.827.718.773	100	14.065.303.900	100	12.925.303.900	100	12.925.303.900	100	12.925.303.900	100	12.925.303.900	Badan Pengelola Keuangan Daerah
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	88,6		88,72		88,81		88,87		88,9		89		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	33.585.231.010	100	30.400.265.365	100	26.350.265.365	100	26.350.265.365	100	26.350.265.365	100	26.350.265.365	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	86		87		88		89		90		91		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	90	7.406.706.965	100	6.197.042.000	100	5.962.420.000	100	5.962.420.000	100	5.960.990.000	100	5.957.420.000	Inspektorat Daerah
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	92		92,2		92,4		92,6		92,8		93		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase APIP yang memenuhi jam pendidikan/pelatihan minimal 120 jam/tahun	%	0		100		100		100		100		100		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	1.374.003.704	100	1.136.019.779	100	1.098.040.510	100	1.095.015.999	100	1.092.015.999	100	1.098.515.999	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	100		87		88		89		90		91		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	734.420.669	100	640.050.000	100	620.050.000	100	620.050.000	100	620.050.000	100	620.050.000	2x11 Anam Lingkuang
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84,00		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	698.975.652	100	644.460.000	100	616.950.000	100	613.940.000	100	617.770.000	100	611.430.000	2x11 Kayu Tanam
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84,00		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	677.485.093	100	634.040.000	100	606.240.000	100	605.900.000	100	604.440.000	100	605.500.000	Batang Gasan
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84,00		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	773.122.554	100	693.770.000	100	683.670.000	100	683.670.000	100	683.670.000	100	683.670.000	Batang Anai
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84,00		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	720.661.108	100	651.660.000	100	631.640.000	100	631.640.000	100	631.640.000	100	631.640.000	Anam Lingkuang
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84,00		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	523.367.086	100	527.000.000		488.400.000	100	477.740.000	100	477.740.000	100	477.740.000	IV Koto Aua Malintang
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84,00		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembanguna Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penaggung Jawab
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	762.575.321	100	657.241.000	100	652.234.000	100	652.234.000	100	652.234.000	100	652.234.000	**Lubuak Aluang**
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84,00		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	676.170.433	100	655.000.000	100	620.000.000	100	620.000.000	100	620.000.000	100	620.000.000	**Nan Sabaris**
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84,00		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	701.577.917	100	660.933.500	100	619.281.000	100	619.281.000	100	619.201.000	100	619.201.000	**VII Koto Padang Sago**
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84,00		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	735.107.964	100	661.058.000	100	641.042.000	100	641.042.000	100	641.042.000	100	641.042.000	**VII Koto Patamuan**
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84,00		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	746.616.162	100	670.944.401	100	618.600.000	100	618.600.000	100	618.600.000	100	618.600.000	**Sungai Garinggiang**
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84,00		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	720.661.108	100	633.660.000	100	534.640.000	100	534.640.000	100	534.640.000	100	534.640.000	**Sungai Limau**
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84,00		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	702.007.872	100	656.780.552	100	626.500.000	100	621.500.000	100	623.000.000	100	614.299.970	**Sintuak Toboh Gadang**
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84,00		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	678.496.153	100	676.084.428	100	641.580.000	100	612.015.630	100	611.020.532	100	611.086.705	**Ulakan Tapakih**
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84,00		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	583.090.261	100	525.100.000	100	502.900.000	100	502.900.000	100	502.900.000	100	502.900.000	**V Koto Timur**
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84,00		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	716.195.608	100	647.350.000	100	622.150.000	100	623.019.983	100	622.500.000	100	622.500.000	**V Koto**
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84,00		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	774.036.073	100	651.090.000	100	596.620.000	100	596.120.000	100	596.120.000	100	596.120.000	**VII Koto**
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84,00		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
6	01	02	Progran Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Ketuntasan Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	60	513.525.047	70	493.458.000,00	74	385.810.000,00	78	385.810.000,00	82	385.810.000,00	85	385.810.000,00	**Inspektorat Daerah**

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembanguna Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penaggung Jawab
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Persentase Ketuntasan Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Internal	%	79		79		80		81		82		83		
				Persentase Ketuntasan Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Internal Eksternal	%	60		70		74		78		82		85		
				Persentase pengawasan di Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	%	90		90		90		90		90		90		
				Persentase pengawasan di Bidang perekonomian sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	%	90		90		90		90		90		90		
				Persentase pengawasan di Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan sesuai dengan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	%	90		90		90		90		90		90		
				Persentase pengawasan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	%	90		90		90		90		90		90		
				Persentase perangkat daerah yang memperoleh Nilai Minimal BB	%	50		55		60		65		70		75		
				Nilai Penanganan Kejadian Korupsi	%	73		75		77		80		83		85		
6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	%	80	51.874.000	80	109.500.000	80	97.770.000	80	99.200.000	80	99.200.000	80	99.200.000	
				Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	%	80		80		80		80		80		80		
				Jumlah OPD yang memperoleh Predikat WBK/WBBM	Perangkat Daerah	1		1		1		1		1		1		
				Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Nagari	%	80		80		80		80		80		80		
				Persentase Pemenuhuan Key Process Area pada Penilaian Mandiri Berdasarkan Standar IACM	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase fasilitasi pengawasan manajemen risiko	%	100		100		100		100		100		100		
				Nilai Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi	%	73		75		77		80		83		85		
				Nilai Penerapan Strategi Pencegahan Korupsi	%	73		75		77		80		83		85		
Sasaran 1.1.2 Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi dalam mendukung Pembangunan Daerah				**Indeks Inovasi Daerah**	**Indeks**	**87,72**	**617.000.000**	**88,3**	**136.000.000**	**88,87**	**131.994.650,00**	**89,44**	**131.227.700,00**	**90,04**	**128.935.500,00**	**90,64**	**146.145.700,00**	
5	05	02	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	%	85	617.000.000	85	96.000.000	90	88.999.650	90	88.827.700	95	87.650.500	100	99.515.700	**Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah**
				Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	%	85		85		90		90		95		100		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembanguna Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penaggung Jawab
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	%	75		80		85		90		95		100		
				Persentase fasilitasi, pembinaan, Bimbingan Teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	%	0		75		80		85		90		100		
5	05	03	Program Riset dan Inovasi Daerah	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	%	90	0	93	40.000.000	95	42.995.000	97	42.400.000	99	41.285.000	100	46.630.000	
				Persentase kajian berbasis buktu dalam pengembangan potensi unggulan daerah	%	0		75		75		80		85		100		
				Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah	%	0		75		75		80		85		100		
				Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	%	80		85		90		95		100		100		
Sasaran 1.1.3 Meningkatnya Transformasi Digital Layanan Publik Yang Handal				**Indeks SPBE**	Indeks	**3,51**	**3.204.990.800**	**3,91**	**281.790.000**	**4,1**	**2.400.000.000**	**4,21**	**2.400.000.000**	**4,26**	**2.400.000.000**	**4,3**	**2.300.000.000**	
				Indeks Pemerintahan Digital Indonesia (Pemdi)	Indeks	-		**1,7**		**2**		**2,1**		**2,5**		**2,7**		
2	16	02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	%	70	649.170.000	72	176.350.000	75	188.985.000	80	202.883.500	83	218.171.850	86	184.989.035	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
				Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	%	92		92,92		93,85		94,79		95,74		96,7		
				Persentase Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	78,33		81,34		85,65		87,45		89,96		92,34		
				Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	92		92,92		93,85		94,79		95,74		96,7		
2	16	03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (TIK)	%	100	2.540.390.800	100	0	100	2.100.031.000	100	2.080.034.100	100	2.058.037.510	100	2.008.841.261	
				Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (Egov)	%	78,88		79,67		80,47		81,28		82,09		82,91		
				Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	50		60		70		80		90		100		
2	20	02	Program	Indeks Penyelenggaraan	%	2,8	4.730.000,0	3	55.440.000	3,2	60.984.000	3,4	67.082.400	3,6	73.790.640	3,8	56.169.704	

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembanguna Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penaggung Jawab
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Statistik Sektoral														
				Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100		100		100		100		100		100		
2	21	02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	2	10.700.000	2,5	50.000.000	3	50.000.000	3,5	50.000.000	4	50.000.000	4,5	50.000.000	
				Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	2		2,5		3		3,5		4		4,5		
Misi 2 : Menciptakan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
Tujuan 2.1 Terciptanya Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berdaya Saing dan Inklusif				**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Indeks**	**75,82**	**249.961.931.249**	**76,37**	**476.444.552.042**	**76,99**	**787.408.212.123,00**	**77,59**	**890.717.808.520,00**	**78,20**	**876.192.213.082,00**	**78,82**	**899.682.145.903,00**	
Sasaran 2.1.1 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan berdaya saing				**Rata-Rata Lama Sekolah**	**Tahun**	**8,79**	**98.799.881.915**	**8,95**	**236.056.110.660**	**9,14**	**198.338.423.160**	**9,34**	**199.986.483.260**	**9,55**	**185.742.504.760**	**9,77**	**195.310.689.760**	
				Harapan Lama Sekolah	**Tahun**	**14,42**		**14,56**		**14,68**		**14,85**		**14,98**		**15,12**		
				Skor Literasi	**%**	**54,00**		**54,46**		**54,92**		**55,38**		**55,84**		**56,30**		
				Skor Numerasi	**%**	**46,50**		**46,97**		**47,44**		**47,90**		**48,38**		**48,85**		
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	62,80	95.469.814.466	65,84	233.519.488.100	68,88	148.135.259.200	71,92	197.490.363.900	74,96	183.291.385.400	78,00	192.859.570.400	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
				Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	99,19		99,24		99,29		99,35		99,4		99,46		
				Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	%	64,44		70,93		71,69		72,46		73,22		73,98		
				Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	60,31		64,63		70,38		77,57		86,19		94,82		
				Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	%	85,90		86,40		86,90		87,40		87,90		88,40		
				Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	%	74,28		75,18		76,08		76,98		77,88		78,78		
				Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	%	68,71		70,21		71,71		73,21		74,71		76,21		
				Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD	%	69,98		70,98		71,98		72,98		73,98		74,98		
				Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP	%	68,53		69,53		70,53		71,53		72,53		73,53		
				Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	%	59,95		62,45		64,95		67,45		69,95		72,45		
				Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	%	57,03		59,43		61,83		64,23		66,63		69,03		
1	01	03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	%	8,05	51.999.000	8,05	51.999.000	8,05	59.286.500	62,46	66.421.900	98,96	66.421.900	100	66.421.900	
1	01	04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks pemerataan guru	%	0,34	208.747.400	0,68	208.747.400	1,02	238.002.700	1,36	266.647.500	1,7	266.647.500	2,04	266.647.500	
				Persentase Guru Bersertifikasi	%													
1	01	05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan/diperbarui	%	0	0	2,73	200.000.000	2,75	228.029.300	2,8	360.000.000	2,85	360.000.000	2,9	360.000.000	
1	01	06	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase pengembangan bahasa dan sastra	%	0	0	8,05	200.000.000	8,05	228.029.300	62,46	255.473.800	98,96	255.473.800	98,96	255.473.800	
2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan sekolah dan perpustakaan nagari yang terakreditasi	%	25	252.982.745	26	245.576.160	27	48.127.816.160,00	28	220.576.160,00	29	175.576.160,00	30	175.576.160,00	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**
2	23	03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dimiliki	%	12	0	14	15.000.000	16	10.000.000,00	18	15.000.000,00	20	15.000.000,00	22	15.000.000,00	
2	19	02	Program Pengembangan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi	%	0,59	298.263.000	0,60	382.000.000,00	0,61	167.000.000,00	0,63	167.000.000,00	0,64	167.000.000,00	0,65	167.000.000,00	**Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah**

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembanguna Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penaggung Jawab
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Mandiri														Raga
				Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	2,11		2,13		2,15		2,17		2,19		2,21		
				Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	%	0,07		0,07		0,07		0,07		0,07		0,07		
2	19	03	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Prestasi Olahraga	%	55	2.268.075.304	60	955.000.000,00	65	895.000.000,00	70	895.000.000,00	75	895.000.000,00	80	895.000.000,00	
				Persentase atlet yang masuk pelatnas	%	0,13		0,13		0,13		0,13		0,26		0,26		
				Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	%	1,28		1,28		1,53		1,92		2,17		2,56		
2	19	04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	%	2,67	250.000.000	2,68	278.300.000,00	2,69	250.000.000,00	2,70	250.000.000,00	2,71	250.000.000,00	2,71	250.000.000,00	
Sasaran 2.1.2 Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas, baik, adil dan terjangkau				**Angka Harapan Hidup**	**Tahun**	**73,97**	**139.948.542.734**	**74,07**	**233.094.243.712**	**74,17**	**583.389.731.963**	**74,27**	**685.046.177.232**	**74,37**	**684.773.010.294**	**74,47**	**700.017.756.143**	
				Prevalensi Stunting	**%**	**23,90**		**22,65**		**21,40**		**20,15**		**18,90**		**17,65**		
				Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	**%**	**50,00**		**50,00**		**50,00**		**50,00**		**50,00**		**50,00**		
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun	%	0,8	168.431.006.895	0,8	94.263.956.448	0,8	112.903.818.482	0,8	85.126.225.517	0,8	116.989.737.781	0,8	117.604.404.644	Dinas Kesehatan
				Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	70		70,01		70,02		70,03		70,04		70,05		
				Prevalensi Obesitas ≥ 18 tahun	%	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4				
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100		100		100		100		100		100		
				Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	94		94		94		94		98		98		
				Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	%	85		85,01		85,02		85,03		85,04		85,05		
				Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	%	100		100		100		100		100				
				Persentase Faskes dengan Nilai Indeks Nasional Mutu (INM) 100 %	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase lanjut usia yang mandiri	%	87,5		87,75		88		88,5		89		89,5		
				Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	%	12,4		11,4		10,4		9,4		8,4		7,4		
				Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	%	99		99		100		100		100		100		
				Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)	%	88		88,4		88,8		89,2		89,6		90		
				Angka Kematian Balita	Orang/1000 kelahiran hidup	15		13,8		13,10		12,50		11,90		11,90		
				Angka Kematian Bayi	Orang/1000 kelahiran hidup	12,62		11,63		10,97		10,46		9,96		9,96		
				Angka Kematian Neonatal	Orang/1000 kelahiran hidup	9,2		8,4		8,0		7,6		7,2		7,2		
				Persentase ibu hamil	%	100		100		100		100		100		100		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembanguna Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penaggung Jawab
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil														
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100		100		100		100		100		100		
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100		100		100		100		100		100		
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	%	100	2.101.525.600,00	100	1.121.311.600	100	243.311.600	100	3.521.311.600	100	2.621.311.600	100	2.621.311.600	
				Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	%	100		100		100		100		100		100		
1	02	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar	%	10	474.341.000	15	306.350.000	20	168.350.000	25	123.721.000	30	168.350.000	100	168.350.000	
				Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	%	10		12		15		18		20		22		
				Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	%	70,00		75,00		80,00		85,00		85,00		85,00		
				Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	100		100		100		100		100		100		
1	02	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan	%	100	443.953.440	100	444.145.010	100	643.614.194	100	846.050.355	100	963.640.813	100	1.113.985.599	

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembanguna Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penaggung Jawab
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Kesehatan															
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian 48 Jam setelah dirawat untuk setiap 1000 penderita keluar dari Rumah Sakit	%	1,50	61.767.949.553	1,25	135.935.000.000	1,05	468.435.000.000	0,98	597.735.000.000	0,70	565.285.000.000	0,50	579.785.000.000	RSUD
				Angka Pemanfaatan Tempat Tidur RS (Bed Occupancy Rate =BOR)(60%-85%)	%	68		70		72		74		76		78		
				Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	%	0,48		0,66		0,76		0,86		0,96		1,06		
				Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	%	100		100		100		100		100		100		
Sasaran 2.1.3 Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak				**Indeks Pembangunan Keluarga**	**Indeks**	**57,8**	**10.538.197.200**	**59,2**	**6.729.048.670**	**60,5**	**5.171.275.000**	**61,8**	**5.162.590.000**	**63,1**	**5.154.140.000**	**64,2**	**3.984.248.000**	
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	**Indeks**	**94,3**		**94,68**		**95,06**		**95,44**		**95,82**		**96,2**		
				Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	**Indeks**	**0,715**		**0,708**		**0,701**		**0,694**		**0,687**		**0,673**		
				Indeks Perlindungan Anak (IPA)	**Indeks**	**69,68**		**69.866**		**70.052**		**70.238**		**70.424**		**70,61**		
2	14	02	Program pengendalian Penduduk	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Wanita	Umur	22,7	493.445.000	23	543.484.650	23,25	415.915.000	23,5	415.064.000	24	416.969.000	24,5	329.874.000	DPPKB
				Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	indeks	74		79,7		83,4		85,8		87,3		88,3		
				Kepadatan Penduduk	jiwa/km2	341		347		353		359		365		372		
2	14	03	Program pembinaan Keluarga berencana (KB)	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	63,7	7.452.049.500	63,9	3.750.254.020	64	2.830.273.000	64,1	2.825.298.000	64,2	2.820.447.000	64,3	2.230.688.000	
				Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	%	14		12,3		11,1		10,2		9,5		9		
				Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	%	24,4		34		43,7		53,4		62,1		67,1		
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	15,21		15,19		15,17		15,15		15,13		15,11		
2	14	04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	%	65,65	1.987.000.000	65,68	1.846.130.000	65,7	1.397.487.000	65,73	1.394.628.000	65,76	1.389.124.000	65,79	1.099.176.000	
				Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	per1000 kelahiran	5,0		4,0		3,4		3,1		2,9		2,7		
				Indeks Lansia Berdaya	Indeks	65,5		66,3		67		67,6		68,3		68,9		
				Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	81,3		82,9		84,3		85,6		86,9		88		
2	08	02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Aggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	%	3,1	151.841.000	3.120	119.050.000	3.150	102.300.000,00	3,20	102.300.000,00	3.225	102.300.000,00	3.250	102.300.000,00	DinsosP3A
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	60		61		62		63		64		65		
2	08	03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	46.057.200	100	119.730.000	100	91.430.000,00	100	91.430.000,00	100	91.430.000,00	100	80.530.000	
2	08	04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Pembelajaran keluarga (puspaga) yang berspektif Gender dan Hak Anak sesuai standar	%	45	194.045.200	50	122.030.000	60	111.660.000,00	70	111.660.000,00	80	111.660.000,00	90	111.660.000,00	
2	08	05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Tingkat pemanfataan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	%	53	21.800.000	55	6.100.000	57	6.100.000	59	6.100.000	61	6.100.000	64	6.100.000	
2	08	06	Program Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	%	60,33	84.352.400	60,83	78.850.000	61,33	72.350.000,00	61,83	72.350.000,00	62,33	72.350.000,00	62,83	72.350.000,00	
2	08	07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	28	107.606.900	32	143.420.000	35	143.760.000	38	143.760.000	42	143.760.000	45	143.760.000	

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembanguna Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penaggung Jawab
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	28		32		35		38		42		45		
Sasaran 2.1.4 Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif				**Indeks Kesejahteraan Sosial**	Indeks	**57,50**	**675.309.400**	**60,30**	**565.149.000**	**66,30**	**508.782.000,00**	**72,30**	**522.558.028,00**	**75,30**	**522.558.028,00**	**81,25**	**369.452.000,00**	
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dlaam panti rehabilitasi sosial	%	80	0	82	133.400.000	84	153.400.000	86	153.400.000	88	153.400.000	90	96.700.000	**DinsosP3A**
				Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana pada Masa Tanggap darurat dan Pasca Bencana sesuai Standar	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	%	65		67		69		71		73		75		
				Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	%	63		68		70		72		75		78		
				Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	%	78		80		82		84		86		88		
1	06	03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan dam dan luar negeri yang mendapatkan layanan pemulangan	Orang	2	6.800.000	2	6.800.000	3	6.800.000	3	6.800.000	4	6.800.000	4	6.800.000	
				Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	%	100		100		100		100		100		100		
1	06	04	Program Rahabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	241.130.200	100	177.682.000	100	177.682.000	100	191.458.028	100	191.458.028	100	142.652.000	
				Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100		100		100		100		100		100		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembanguna Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penaggung Jawab
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Persentae Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100		100		100		100		100		100		
				Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	Indeks	67		68		69		70		71		72		
				Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	Indeks	64		65		66		67		68		69		
				Indeks Peranan Sosial	Indeks	46		48		50		52		54		56		
1	06	05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	100	0	100	71.910.000	100	31.400.000	100	31.400.000	100	31.400.000	100	31.400.000	
				Persentase penerima Manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Daerah yang Melaksanakan peneglolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	%	100		100		100		100		100		100		
				Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar	%	81,25		81,50		82		82,25		82,50		83		
				Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	%	4,81		5		5,15		5,2		5,25		5,3		
				Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	%	88		89		90		91		92		93		
1	06	06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	426.257.200	100	157.727.000	100	129.700.000	100	129.700.000	100	129.700.000	100	82.100.000	
				Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan layanan pemulihan sosial	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	%	75		78		80		82		84		86		
1	06	07	Program pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase taman makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik	%	100	1.122.000	100	17.630.000	100	9.800.000,00	100	9.800.000,00	100	9.800.000,00	100	9.800.000,00	
Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju, dan Merata																		
Tujuan 3.1 Meningkatnya Perekonomian Daerah Yang Maju dan Inklusif				**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	**4,37**	**4.595.694.850**	**5,55**	**3.958.188.039**	**6,92**	**3.155.633.788**	**6,62**	**3.148.117.388**	**7,81**	**3.148.117.388**	**6,55**	**2.800.457.098**	
				PDRB Per Kapita ADHB (Rp.Juta)	**Rp.Juta**	**63,57**		**69,14**		**74,81**		**81,6**		**88,77**		**96,26**		
				Ekspor Barang dan Jasa	**%**	**4,57**		**5,01**		**5,45**		**5,88**		**6,32**		**13,92**		
				Gini Ratio	**%**	**0,251**		**0,250**		**0,249**		**0,248**		**0,247**		**0,246**		
				Tingkat Kemiskinan	**%**	**5,01**		**4,79**		**4,55**		**4,29**		**4,03**		**3,78**		
Sasaran 3.1.1 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, Kehutanan dan perikanan terhadap perekonomian daerah				**Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**	**%**	**20,34**	**1.864.818.285**	**20,83**	**983.472.615**	**21,32**	**836.150.565,00**	**21,8**	**850.271.315,00**	**22,29**	**850.271.315,00**	**22,78**	**662.589.115,00**	
3	27	02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Luas tanam tanaman pangan (padi dan jagung) (Ha)	Hektar (Ha)	670	328.538.800	680	311.637.150	700	250.000.000	720	200.000.000	730	200.000.000	734	150.000.000	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**
				Rasio pengunaan alsintan pra panen	Rasio	0		0,75		0,76		0,77		0,78		0,79		
				Luas areal pengembangan dan peremajaan tanaman perkebunan (Ha)	Hektar (Ha)	25,5		26		26		26		26		26		
				Luas pengembangan tanaman hortikultura (Ha)	Hektar (Ha)	0		0		5		7,5		10		12,5		
3	27	03	Program Penyediaan	Persentase peningkatan areal	%	0	0	2	203.000.000	2	153.000.000	2	242.120.750	2	242.120.750	2	192.120.750	

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembanguna Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penaggung Jawab
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			dan Pengembangan Prasarana Pertanian	sawah terairi irigasi teknis dan/atau non teknis (%)														
				Persentase peningkatan areal sawah yang terbuka akses transportasi (%)	Persen (%)	0		0		0,8		0,8		0,8		0,8		
				Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Hektar (Ha)	17.488,61		17.488,61		17.488,61		17.488,61		17.488,61		17.488,61		
				Luas areal tanaman perkebunan yang tersertifikasi (Ha)	Hektar (Ha)	0		0		10		10		10		10		
				Persentase peningkatan areal perkebunan yang terbuka akses transportasi (%)	Persen (%)	0		0		10		15		20		30		
3	27	05	Program Pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian	Luas lahan tanaman pangan yang terserang OPT yang dikendalikan (Ha)	Hektar (Ha)	0	0	20	50.000.000	25	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	
				Luas lahan tanaman perkebunan yang terserang OPT yang dikendalikan (Ha)	Hektar (Ha)	100		100		100		100		100		100		
				Luas lahan tanaman hortikultura yang terserang OPT yang dikendalikan (Ha)	Hektar (Ha)	0		0		6		7		8		9		
3	27	06	Program perizinan usaha Pertanian	Jumlah surat keterangan peruntukkan lahan (Dokumen)	Dokumen	0	0	1	0	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM tenaga penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang ditingkatkan	%	30	552.528.687	31	300.000.000,00	31	250.000.000,00	31	225.000.000,00	31	225.000.000,00	31	150.000.000,00	
				Persentase SDM petani yang ditingkatkan	%	7		7		7		7		7		7		
3	27	02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana peternakan	%	0	20.153.200	1	19.153.200,00	1,2	8.468.300,00	1,3	8.468.300,00	1,5	8.468.300	1,6	8.468.300	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**
3	27	03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase ketersediaan dan pengembangan prasarana peternakan	%	7,11	60.048.000	0	60.000.000,00	0	60.000.000,00	2	60.000.000,00	3	60.000.000	4	60.000.000	
3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase layanan kesehatan hewan	%	10	15.682.200	15	12.682.200,00	20	12.682.200,00	25	12.682.200,00	30	12.682.200,00	35		
				Cakupan pelayanan kesehatan hewan ternak produksi	%	17,00		17,00		17,00		17,00		17,00		17,00		
				Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveilance penyakit dari 5 PHMS)	%	54,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
3	27	06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase pelayanan perizinan bidang peternakan	%	0	0	100	7.000.000,00	100	7.000.000,00	100	7.000.000,00	100	7.000.000	100	7.000.000	
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani terbina	%	0,06	9.710.000	0,07	20.000.065,00	0,08	20.000.065,00	0,09	20.000.065,00	0,1	20.000.065,00	0,11	20.000.065,00	
3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	Ton/Tahun	19.994,03	814.770.000	19.995,64	278.999.004	19.997,27	228.999.004,00	19.998,92	228.999.004,00	20.000,59	228.999.004,00	20.338,60	228.999.004,00	**Dinas Perikanan**
3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budi daya	Jumlah Total produksi Perikanan Budidaya	Ton/Tahun	59.119,25	50.946.460	60.360,76	163.842.940	61.640,41	163.842.940,00	62.959,52	163.842.940,00	64.319,45	163.842.940,00	65.721,60	163.842.940,00	
				Jumlah Produksi Benih	Ekor/Tahun	552.160.000		564.036.000		575.946.000		587.856.000		599.766.000		611.676.000		
3	25	05	Program pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Lubuk Larangan Yang Diawasi	Titik/Tahun	20	0	25	25.000.000	30	25.000.000	32	25.000.000	34	25.000.000	35	25.000.000	
				Persentase Pokdakan/UPR yang diawasai	%													
			Program Pengolahan Pemasaran Hasil perikanan	Jumlah Total Produksi Ikan Olahan	Ton/Tahun	192,57	12.440.938	196,33	62.440.938	200,26	62.440.938	204,37	62.440.938	208,67	62.440.938	213,1	62.440.938	
Sasaran 3.1.2 Meningkatnya kontribusi perdagangan, UMKM dan industri berbasis sektor unggulan				**Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB**	**%**	**11,85**	**339.598.000**	**13,55**	**357.013.869**	**15,25**	**426.839.654,00**	**16,95**	**426.839.654,00**	**18,45**	**426.839.654,00**	**20**	**366.861.564,00**	
				Rasio Volume Koperasi Terhadap PDRB	**%**	**0,150**		**0,192**		**0,234**		**0,276**		**0,318**		**0,80**		
				Rasio PDRB Industri Pengolahan	**%**	**8,43**		**8,6425**		**8,855**		**9,0675**		**9,28**		**11,46**		
3	30	02	Program Perizinan dan	Persentase Izin Usaha	%	63	13.679.800	70	17.662.681	73	19.784.876	75	19.784.876	77	19.784.876	79	19.784.876	**Dinas**

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembanguna Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penaggung Jawab
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Pendaftaran Perusahaan	Perdagangan yang difasilitasi														Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM
				Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	65		70		75		80		85		90		
3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	%	3,33	6.978.000	1,12	8.831.340	1,15	17.527.476	2,01	17.527.476	2,6	17.527.476	3,01	17.527.476	
3	30	04	Program Stabilisasi Harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting	%	6	13.500.500	6	17.662.681	6	21.306.185,00	6	21.306.185,00	6	21.306.185,00	6	21.306.185,00	
				Persentase kinerja realisasi pupuk	%	53		57		61		65		69		72		
3	30	05	Program Pengembangan Eksport	Nilai Ekspor Barang	%	10	0	4,20	8.831.340	4,50	8.355.170,00	4,70	8.355.170,00	4,80	8.355.170,00	5,10	8.355.170,00	
3	30	06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	3,33	22.859.000	3,33	20.187.561	3,33	21.605.634,00	3,33	21.605.634,00	3,33	21.605.634,00	3,33	21.605.634,00	
3	30	07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam negeri	Persentase promosi Produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	%	20	200.841.600	18	123.638.770	17,25	134.385.896,00	18	134.385.896,00	18	134.385.896,00	18	134.385.896,00	
				Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota	Nilai	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		
2	17	02	Program Pelayanan izin usaha Simpan Pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	7%	0	7%	13.247.011	9%	12.532.755,00	11%	12.532.755,00	13%	12.532.755,00	15%		
2	17	03	Program pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	Persentase Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	%	25	6.864.000	25	19.308.843	40	34.142.567,00	50	34.142.567,00	55	34.142.567,00	60	34.142.567,00	
2	17	04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	25	9.504.200	25	8.393.482	40	21.309.193,00	50	21.309.193,00	55	21.309.193,00	60	21.309.193,00	
2	17	05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	25	0	25	44.158.708	25	41.775.851,00	25	41.775.851,00	40	41.775.851,00	40	41.775.851,00	
2	17	06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	25	9.934.500	25	8.773.495	40	21.668.716,00	50	21.668.716,00	55	21.668.716,00	60	21.668.716,00	
2	17	07	Program pemberdayaan Usaha Menengah, usaha Kecil dan usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Kecil yang Bertarsnformasi dari Informal ke Formal	%	0,35	29.386.400	0,33	28.070.946	0,4	34.912.580	0,42	34.912.580	0,44	34.912.580	0,46	34.912.580	
				Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	65,5		65,51		65,53		65,56		65,58		65,6		
				Pertumbuhan Wirausaha	%	0,34		0,36		0,39		0,41		0,43		0,45		
2	17	08	Program pengembangan UMKM	Proporsi UKM Menjalin kemitraan dan ekspor	%	0,35	0	0,37	13.247.011	0,39	12.532.755	0,42	12.532.755	0,45	12.532.755	0,47	12.532.755	
2	17	09	Program Penguatan Badan Hukum Koperasi	Persentase Koperasi yang memiliki Izin usaha Simpan Pinjam	%	20	0	22	0,00	24	0,00	26	0,00	28	0,00	30	0,00	
3	31	02	Program Perencanaan Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	%	3,2	16.250.000	3,4	18.000.000	3,6	18.000.000	3,8	18.000.000	4,0	18.000.000	4,2	18.000.000	DPMPTP
				Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	3,2		3,4		3,6		3,8		4,0		4,2		
				Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah	%	3,1		3,2		3,3		3,4		3,5		3,6		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembanguna Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penaggung Jawab
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	68,28		68,30		68,50		68,70		68,90		69,10		
3	31	03	Program Pengendalian izin Usaha Industri	Persentase izin Usaha Industri yang diterbitkan	%	35	5.000.000	37	4.000.000	39	4.000.000	41	4.000.000	43	4.000.000	45	4.000.000	
				Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	3		3,2		3		3,6		4		4,0		
				Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya liintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	1		1		1		1		1		1		
				Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%	44,5		45		45,5		46		46,5		47		
				Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan.	%	100		100		100		100		100		100		
3	31	04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Informasi Industri Secara Lengkap, akurat dan terkini	%	65	4.800.000	67	3.000.000	69	3.000.000,00	71	3.000.000,00	73	3.000.000,00	75	3.000.000,00	
				Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan.	%	1,68		1,69		1,71		1,73		1,75		1,77		
Sasaran 3.1.3 Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif				**Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara**	**Ribu Orang**	**0,125**	**529.381.200**	**0,192**	**1.184.006.674**	**0,234**	**709.809.889**	**0,276**	**709.809.889**	**141.000**	**709.809.889**	**145.000**	**709.809.889**	
				Rasio PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Nasional	**%**	**1,622**		**1.612**		**1.602**		**1.582**		**1.572**		**1.831**		
				Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	**%**	**1,36**		**1,38**		**1,4**		**1,42**		**1,44**		**1,54**		
2	26	02	Program Peningkatan daya tarik destinasi	Persentase pertumbuhan kinjungan wisatawan	%	93,12	-	2,00	434.000.000	2,00	229.000.000	2,00	234.000.000	2,00	234.000.000	2,00	234.000.000	**Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah**

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembanguna Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penaggung Jawab
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	10,00		10,14		10,16		10,19		10,09		10,21		Raga
				Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	93,16		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		
				Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	%	3,13		3,20		3,27		3,33		3,40		3,47		
				Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	%	N/A		25,00		8,00		11,11		10,00		6,06		
				Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%													
2	26	03	Program Pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	%	8,7	12.801.800	4,0	110.006.674	3,85	110.809.889	3,70	110.809.889	3,57	110.809.889	3,45	110.809.889	
				Tingkat Hunian Akomodasi	%	25,00		25,03		25,08		25,14		25,20		25,25		
				Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	1,26		1,26		1,27		1,27		1,28		1,28		
2	26	04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	%	4,47	-	6,50	80.000.000	7,72	30.000.000,00	8,94	30.000.000,00	10,16	30.000.000,00	11,38	30.000.000,00	
2	26	05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang aktif dan tervalidasi	%	54,88	516.592.100	56,91	560.000.000	58,13	340.000.000,00	59,35	340.000.000,00	60,57	340.000.000,00	61,79	340.000.000,00	
Sasaran 3.1.4 Meningkatnya Kemudahan Investasi				**Persentase peningkatan investasi**	**%**	**2,58**	**83.675.915**	**3,44**	**73.000.000**	**4,12**	**66.000.000**	**5,16**	**66.000.000**	**6,55**	**66.000.000**	**7,68**	**66.000.000**	
				Pembentukan Modal Tetap Bruto (PDRB)	**%**	**30,60**		**30,38**		**30,16**		**29,93**		**29,71**		**29,49**		
				Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	**%**	**8,76**		**11,59**		**14,42**		**17,26**		**20,09**		**22,93**		
				Nilai Transaksi Saham per Kapita	**Rupiah**	**413.768**		**493,821**		**573.874,000**		**653.927,000**		**733.980,000**		**814.033,000**		
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total terhadap Target Investasi	**%**	10	18.390.900	12	11.000.000	15	11.000.000,00	17	11.000.000,00	19	11.000.000,00	21	11.000.000,00	**DPMPTP**
2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investor yang Berinvestasi	**%**	1,10	9.863.000	1,20	10.000.000	1,30	8.000.000,00	1,50	8.000.000,00	1,70	8.000.000,00	1,90	8.000.000,00	
2	18	04	Program pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai Ketentuan	**%**	85,00	26.822.015	85,50	21.000.000	86,00	20.000.000,00	86,50	20.000.000,00	87,00	20.000.000,00	87,50	20.000.000,00	
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	**%**	80,00	26.950.000	80,00	26.000.000	80,00	24.000.000,00	80,00	24.000.000,00	80,00	24.000.000,00	80,00	24.000.000,00	
2	18	06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemanfaatan data dan infromasi penanaman modal	**%**	80,00	1.650.000	80,50	5.000.000	81,00	3.000.000,00	81,50	3.000.000,00	82,00	3.000.000,00	82,50	3.000.000,00	
Sasaran 3.1.5 Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau				**Indeks Ketahanan Pangan**	**Indeks**	**86,2**	**805.192.000**	**87,15**	**610.000.000**	**88**	**546.637.150,00**	**88,7**	**525.000.000,00**	**89,45**	**525.000.000,00**	**90**	**425.000.000,00**	
2	09	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian Pangan	Persentase penyediaan bahan pangan utama terhadap jumlah kebutuhan pangan utama	%	0	0	0	-	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	**Distan KP**
2	09	03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase stabilitas koefisien harga pangan utama di tingkat konsumen	%	5	705.192.000	5	510.000.000	5	380.000.000	5	375.000.000	5	375.000.000	5	300.000.000	
				Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	80,80		81,61		82,42		83,25		84,08		84,92		
2	09	04	Program Penanganan Kerawanan pangan	Persentase penurunan Desa/Nagari Rawan Pangan	%	0	100.000.000	1	100.000.000	1	91.637.150,00	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	1	60.000.000,00	
				Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	8,5		7		5,5		4		2,5		1		
2	09	05	Program Pengawasan	Persentase pangan segar yang	%	95	0	95	-	95	50.000.000,00	95	40.000.000,00	95	40.000.000,00	95	40.000.000,00	

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembanguna Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penaggung Jawab
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			keamanan pangan	memenuhi persyaratan mutu keamanan pangan														
Sasaran 3.1.6 Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja				**Tingkat Pengangguran Terbuka**	**%**	**6,17**	**41.549.150**	**5,89**	**70.694.881**	**5,76**	**75.196.530**	**5,59**	**75.196.530**	**5,42**	**75.196.530**	**5,28**	**75.196.530**	
				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	**Rupiah/ Jiwa**	**71,78**		**72,3**		**73,1**		**73,85**		**74,6**		**75,28**		
				Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	**%**	**57,53-58,91**		**57,84-59,45**		**58,14-59,99**		**58,45-60,53**		**58,75-61,07**		**59,06-61,61**		
				Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	**%**	**71,20**		**71,68**		**72,16**		**72,63**		**73,11**		**73,59**		
				Persentase disabilitas bekerja di sektor formal	**%**	**26,39**		**27,45**		**28,50**		**29,56**		**30,61**		**31,67**		
2	07	02	Program perencanaan tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	0	0	0	13.247.011	0	12.532.755	0	12.532.755	0	12.532.755	0	12.532.755	**Disdagnakerkop**
				Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	9,34		9,84		10,34		10,84		11,34		11,84		
				Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	%	23,55		24,05		24,55		25,05		25,55		26,05		
2	07	03	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	%	70	17.399.200	71	22.078.351	71	25.065.510,00	72	25.065.510,00	73	25.065.510,00	74	25.065.510,00	
				Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,85		0,85		0,86		0,87		0,88		0,89		
2	07	04	Program Penempatan tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	13,5	0	14	13.247.011	14,5	12.532.755,00	15	12.532.755,00	15,5	12.532.755,00	16	12.532.755,00	
				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah/ Jiwa	71,78		72,3		73,1		73,85		74,6		75,28		
2	07	05	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	47,00	24.149.950	47,00	22.122.508	48,0	25.065.510	48,00	25.065.510	49,00	25.065.510	49,00	25.065.510	
				Persentase Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	%	60		61		62		63		64		65		
2	07	06	Program pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya	%	85	0	90	0	92	0	94	0	95	0	96	0	
Sasaran 3.1.7 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa				**Indeks Desa**	**Indeks**	**70,00**	**931.480.300**	**71,00**	**680.000.000**	**72,00**	**495.000.000,00**	**73,00**	**495.000.000,00**	**74,00**	**495.000.000,00**	**75,00**	**495.000.000,00**	
2	13	02	Program Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	51,46	118.703.000	56,31	50.000.000	61,17	50.000.000	66,02	50.000.000	70,87	50.000.000	75,73	50.000.000	**DPMD**
				Persentase Fasilitasi Pembentukan Desa	%	2,91		3,88		4,85		5,83		6,8		7,77		
2	13	03	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	100	0	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	
2	13	04	Program Administrasi pemerintahan Desa	Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	%	100	102.568.500,00	100	305.000.000,00	100	115.000.000,00	100	172.500.000,00	100	172.500.000,00	100	172.500.000,00	
				Persentase pengentasan desa tertinggal	%	0		0		0		0		0		0		
				Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	22,33		24,27		26,21		28,16		30,10		32,04		
				Persentase Fasilitasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Fasilitasi Tata Kelola keuangan dan Aset Desa	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Fasilitasi Bumnag	%	6,80		6,80		6,80		6,80		6,80		6,80		
2	13	05	Program	Persentase Fasilitasi	%	100	710.208.800	100	315.000.000,00	100	320.000.000,00	100	320.000.000,00	100	320.000.000,00	100	320.000.000,00	

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembanguna Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penaggung Jawab
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)														
				Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	44,66		0,97		0,97		0,97		0,97		0,97		
				Persentase Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong	%	3,88		4,85		4,85		4,85		4,85		4,85		
Misi 4 : Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan																		
Tujuan 4.1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan, berketahanan terhadap bencana dan Perubahan Iklim				**Indeks Infrastruktur Daerah**	**Indeks**	**60,5**	**50.308.059.959**	**63,00**	**32.114.309.870**	**65,2**	**258.750.900.009,00**	**67,8**	**170.052.495.464,00**	**70**	**167.247.904.555,00**	**72,00**	**165.699.326.465,00**	
Sasaran 4.1.1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas				**Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)**	**Indeks**	**60,02**	**48.765.867.410**	**62,03**	**31.417.000.000**	**64,05**	**143.170.000.000**	**66,08**	**123.685.000.000**	**68,12**	**124.019.000.000**	**70,17**	**123.419.000.000**	
				Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan	**%**	**19,00**		**20,50**		**22,00**		**23,50**		**25,00**		**26,50**		
				Kapasitas Air Baku (m3/detik)	**m3/detik**	**0,95**		**0,992**		**1,034**		**1,096**		**1,128**		**1,16**		
				Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	**%**	**60,25**		**62,54**		**64,83**		**67,12**		**70,71**		**72,73**		
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	%	13,60	3.004.909.500	15,85	4.840.000.000	18,1	4.700.000.000	20,35	4.700.000.000	22,6	4.637.000.000	24,85	4.595.000.000	**PUPR**
				Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	%	67,47		68,17		68,87		69,57		70,27		70,97		
				Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	%	67,47		68,17		68,87		69,57		70,27		70,97		
				Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota	%	48,19		48,25		48,33		48,43		48,55		48,69		
1	03	03	Program Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase terlaksananya pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	%	83,89	0	84,19	520.000.000	84,49	500.000.000	84,79	500.000.000	85,09	491.000.000	85,39	485.000.000	
				Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	%	83,89		84,19		84,49		84,79		85,09		85,39		
1	03	04	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Persentase kondisi baik infrastruktur persampahan	%	0,00	0	1	110.000.000	1,5	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2,5	95.500.000,00	2	92.500.000,00	
1	03	05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	2,34	4.422.790.500	2,38	310.000.000	2,42	300.000.000,00	2,46	300.000.000,00	2,5	295.500.000,00	2,54	292.500.000,00	
				Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	77,07		77,37		77,67		77,97		78,27		78,57		
1	03	06	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	%	24,68	616.400.000	25,18	160.000.000	25,68	150.000.000,00	26,18	150.000.000,00	26,68	145.500.000,00	27,18	142.500.000,00	
1	03	07	Program Pengembangan Permukiman	Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik	%	1,00		2,00	110.000.000	3,00	100.000.000,00	4,00	100.000.000,00	5,00	95.500.000,00	6,00	92.500.000,00	
1	03	08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	%	62,00	2.497.310.500	64,00	1.360.000.000	66,00	1.300.000.000,00	68,00	1.300.000.000,00	70,00	1.273.000.000,00	72,00	1.255.000.000,00	
1	03	09	Program Penataan	Persentase penataan	%	0	0	1,00	160.000.000	1,50	150.000.000	2,00	150.000.000	2,50	145.500.000	3,00	142.500.000	

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembanguna Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penaggung Jawab
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Bangunan dan Lingkungan	bangunan dan lingkungan														
				Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	%	2		3		4		5		6		7		
				Mengukur rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	2,00		3,00		4,00		5,00		6,00		7,00		
1	03	10	Program penyelenggaraan jalan	Persentase jalan kabupaten yang ditingkatkan	%	63,94	18.347.162.690	64,94	10.200.000.000	66,44	10.000.000.000,00	67,94	10.000.000.000,00	69,44	9.910.000.000,00	70,94	9.850.000.000,00	
				Persentase jembatan kabupaten yang ditingkatkan	%	92,31		94,31		96,31		98,31		100,31		102,31		
1	03	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	%	0,25	0	0,35	110.000.000	0,45	100.000.000	0,55	100.000.000	0,65	95.500.000	0,75	92.500.000	
				Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	%	2,82		4,32		6,02		8,02		10,52		13,52		
				Persentase Pengawasan penyelenggaran Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	60		62,5		65		67,5		70		72,5		
				Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
1	03	12	Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kepatuhan pemanfaataan ruang	%	50,00	399.038.352	55,00	720.000.000	60,00	600.000.000,00	65,00	600.000.000,00	70,00	546.000.000,00	75,00	510.000.000,00	
				Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	%	20		20		20		20		20		20		
				Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	%	100		100		100		100		100		100		
2	15	02	Program penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ)	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	86	19.104.504.300	88	12.723.000.000	89	9.660.000.000	89	9.660.000.000	90	9.655.000.000	91	7.629.000.000	Dinas Perhubungan
				Konektivitas Darat	rasio	0,52		0,54		0,55		0,56		0,57		0,58		
				Persentase Keselamatan Berlalu Lintas	%	85		87		87		88		88		89		
2	15	03	Program Pengelolaan Pelayaran	Konektivitas Laut	rasio	0	0	20	0,00	22	20.000.000,00	23	20.000.000,00	24	20.000.000,00	25	20.000.000,00	
2	15	04	Program Pengelolaan Penerbangan	Persentase Pengendalian KKOP	%	0	0	20	0,00	22	20.000.000,00	23	20.000.000,00	24	20.000.000,00	25	20.000.000,00	
2	15	05	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	%	88	1.440.300	88	18.000.000	89	20.000.000,00	89	20.000.000,00	90	20.000.000,00	90	20.000.000,00	
1	04	02	Program pengembangan dan Perumahan	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	41.525.010	100	38.000.000	100	64.780.000.000	100	45.065.000.000	100	45.565.000.000	100	46.165.000.000	DLHKPP
				Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	9,41		10,61		11,81		13,21		14,61		16,21		
				Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100		100		100		100		100		100		
1	04	03	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	4,66	330.786.258	5,59	35.000.000	6,39	50.520.000.000	7,29	50.635.000.000	8,29	50.735.000.000	9,49	50.835.000.000	

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembanguna Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penaggung Jawab
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Unit	50		65		75		85		95		105		
1	04	05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utulitas Umum)	%	100	0	100	3.000.000	100	150.000.000	100	265.000.000	100	265.000.000	100	265.000.000	
1	04	6	Program peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau badan Hukum yang Melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	%		0		0		0		0		0		0	
Sasaran 4.1.2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan				**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**	**Indeks**	**76,96**	**1.024.121.649**	**77,17**	**482.094.949**	**77,38**	**115.392.500.009**	**77,59**	**46.179.095.464**	**77,8**	**43.040.504.555**	**78,02**	**42.091.926.465**	
				Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	**%**	**16,34**		**20,31**		**24,23**		**27,78**		**31,66**		**35,45**		
				Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan layanan Penuh Pengumpulan Sampah	**%**	**40,87**		**46,7**		**52,53**		**58,36**		**64,19**		**70,02**		
2	11	02	Program perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	%	85	67.606.800	100	5.000.000	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	**DLHKPP**
2	11	03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	persentase kualitas air yang memenuhi standar baku mutu	%	100	386.302.950	100	355.000.000	100	7.950.000.000	100	8.300.000.000	100	8.900.000.000	100	9.200.000.000	
				persentase kualitas udara yang memenuhi standar baku mutu	%	100		100		100		100		100		100		
				persentase peningkatan kelompok masyarakat peduli lingkungan	%	45		50		55		60		65		70		
2	11	04	Program pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH	%	100	34.041.800	100	35.000.000	100	4.800.000.000,00	100	4.800.000.000,00	100	4.850.000.000,00	100	4.850.000.000,00	
2	11	05	Program Pengendalian Bahan berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang terkelola	%	100	3.327.000	100	2.000.000	100	370.000.000,00	100	400.000.000,00	100	450.000.000,00	100	500.000.000,00	
2	11	06	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan, Izin PPLH dan PUULH	%	79	17.437.300	79,05	19.000.000	79,10	300.000.000,00	79,15	450.000.000,00	79,20	600.000.000,00	79,25	750.000.000,00	
2	11	07	Program pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan Lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang ditingkatkan kapasitasnya	%	0	0	0	-	5	100.000.000,00	10	150.000.000,00	15	250.000.000,00	20	250.000.000,00	
2	11	08	Program Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	%	20	11.775.000	40	-	60	500.000.000,00	80	700.000.000,00	100	900.000.000,00	100	900.000.000,00	
2	11	09	Program penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	43	7.987.500	46	8.000.000	49	250.000.000,00	51	350.000.000,00	54	450.000.000,00	57	550.000.000,00	
2	11	10	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	%	100	0	100	-	100	350.000.000,00	100	500.000.000,00	100	600.000.000,00	100	700.000.000,00	
2	11	11	Program Pengelolaan persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Angka	36	414.572.949	41	17.594.949	46	15.200.000.009	51	15.200.000.009	56	15.400.000.009	61	15.500.000.009	
				Persentase Pengelolaan	%	100		4		5		6		7		8		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembanguna Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penaggung Jawab
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Sampah yang dilakukan														
2	10	03	Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan umum	Persentase tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diselesaikan tepat waktu	%	100	0	100		100		100		100		100		
				Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	0		0		0		0		0		0		
				Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	%	0		0		0		0		0		0		
				Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/ Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran	Hektar	11		12		13		14		15		16		
				Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran	Hektar	10		15		20		25		30		35		
				jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran		6		7		8		9		10		11		
2	10	04	Program penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	%	0	0	0	-	20	-	25	-	30	-	35	-	
				Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	0		0		20		25		30		35		
				Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	%	0		0		0		0		0		0		
				Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas	%	0		0		0,5		1		1,5		2		
2	10	05	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	%	100	10.499.750	100	500.000	100	84.472.500.000	100	14.104.095.455	100	9.215.504.546	100	7.266.926.456	
				Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	100		100		100		100		100		100		
				Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	100		100		100		100		100		100		
				Luas Tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran	Hektar	52		55		58		61		64		67		
2	10	06	Program redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum	Tersedianya tanah obyek Landreform(TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan	%	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembanguna Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penaggung Jawab
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			dan tanah asente	maksimum dan tanah absente														
2	10	07	Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase tanah ulayat yang ditetapkan	%	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2	10	08	Program Pengelolaan tanah kosong	Persentase tanah Kosong yang dikelola	%	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2	10	10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase luas lokasi konsolidasi tanah	%	10	70.570.600	12	40.000.000	14	800.000.000,00	16	925.000.000,00	18	1.125.000.000,00	20	1.325.000.000,00	
				Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota	%	0,22		0,23		0,24		0,25		0,26		0,27		
2	10	12	Program pengurusan hak-hak atas tanah	ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan pemerintah daerah	%	0	0	0	0,00	10	0,00	20	0,00	30	0,00	40	0,00	
				Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB	%	0,22		0,23		0,21		0,22		0,23		0,24		
2	10	13	Program Survei, pengukuran dan pemetaan	Persentase Kejelasan hak milik atas tanah	%	25	0	27	0,00	29	0,00	31	0,00	33	0,00	35	0,00	
2	10	14	Program Pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanahan	Persentase SDM Bidang Pertanahan yang ditingkatkan kompetensinya	%	0	0	15	0,00	30	0,00	45	0,00	60	0,00	75	0,00	
2	10	16	Program Pembanguna Sistem Informasi pertanahan	Persentase infromasi pertanahan yang dimanfaatkan	%	0	0	0	0,00	5	0,00	7	0,00	9	0,00	11	0,00	
2	10	17	Program penanganan konflik, sengketa dan perkara pertanahan	Persentase penyelesaian konflik, sengketa dan perkara dan pertanahan	%	100	0	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
Sasaran 4.1.3 Menurunnya resiko bencana				**Indeks Risiko Bencana**	**Indeks**	**150,89**	**518.070.900**	**150,88-149,61**	**215.214.921**	**149,6-148,33**	**188.400.000,00**	**148,32-147,05**	**188.400.000,00**	**147,04-145,77**	**188.400.000,00**	**145,76-144,49**	**188.400.000,00**	
1	05	03	Program Penanggulangan bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	%	100	518.070.900	100	215.214.921	100	188.400.000	100	188.400.000	100	188.400.000	100	188.400.000	**BPBD**
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase penanganan pasca bencana	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase penanganan pasca bencana	%	100		100		100		100		100		100		
Misi 5 : Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya																		
Tujuan 5.1 Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tentram dan harmonis dalam keberagaman agama				**Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)**	**Indeks**	**72,15**	**4.372.177.988**	**72,5**	**4.281.334.257**	**72,9**	**4.565.441.757,00**	**73,2**	**5.024.166.168,00**	**73,55**	**8.022.166.168,00**	**73,87**	**5.025.631.657,00**	
Sasaran 5.1.1				**Indeks Keamanan Daerah**	**Indeks**	**67,37**	**2.491.300.788**	**66,88**	**2.200.457.057**	**67,49**	**2.192.937.057**	**67,89**	**2.201.961.568**	**68,38**	**5.199.961.568**	**68,81**	**2.203.427.057**	

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembanguna Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penaggung Jawab
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya rasa aman dan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan masyarakat				**Angka Kriminalitas**	**%**	**196,25**		**186,44**		**177,12**		**168,27**		**159,86**		**151,87**		
1	05	02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	112.362.600	100	155.975.000,00	100	155.975.000,00	100	155.975.000,00	100	155.975.000,00	100	155.975.000,00	**SATPOL PP**
				Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	%	84,5		85		85,2		85,50		86		87		
				Presentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	65		70		75		80		85		90		
				Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	%	62		65		67,5		70		72,5		75		
				Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	%	30		35		40		45		50		55		
				Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	%	40		50		55		65		70		75		
				Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya	%	11,43		14,29		17,14		20		22,86		25,71		
				Jumlah PPNS pada Satpol PP	Orang	3		4		5		6		7		7		
1	05	04	Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan kebakaran dan Non Kebakaran	Cakupan penyebaran Informasi dan Edukasi rawan Kebakaran	%	60	556.044.188	65	577.211.836	70	577.211.836	75	577.211.836	80	577.211.836	85	433.696.836	
				Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100		100		100		100		100		100		
				Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	%	15 Menit		14.50 Menit		13 Menit		12 Menit		11 Menit		10 Menit		
				Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100		100		100		100		100		100		
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	85	630.346.000	87	425.564.221	88	421.534.221,00	90	422.534.221,00	92	422.534.221,00	94	422.534.221,00	**KESBANGPOL**
8	01	03	Program Peningkatan Peran Parta Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	%	85	1.013.646.000	87	1.024.206.000	88	1.018.216.000,00	90	1.030.206.000,00	92	4.026.740.511,00	94	1.030.206.000,00	
8	01	04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi	Persentase organisasi kemasyarakatan yang terdaftar dan aktif	%	91	3.000.000	93	17.500.000	94	20.000.000,00	95	16.034.511,00	96	17.500.000,00	98	17.500.000,00	
8	01	05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah Yang dilaksanakan	%	80	9.350.000	78	13.710.000	75	12.710.000,00	73	11.710.000,00	72	11.710.000,00	70	11.710.000,00	
8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	%	92	166.552.000	94	113.000.000	95	89.499.269,00	97	84.499.269,00	98	89.499.269,00	100	79.533.780,00	
Sasaran 5.1.2 Terwujudnya berkebudayaan maju				**Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan**	**%**	**85,00**	**1.880.877.200**	**86,00**	**2.080.877.200**	**87,00**	**2.372.504.700**	**88,00**	**2.822.204.600**	**88,50**	**2.822.204.600**	**89,00**	**2.822.204.600**	
				Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	**%**	**66,00**		**68,00**		**70,00**		**71,00**		**72,00**		**74,00**		
2	22	02	Program	Tingkat partisipasi	%	64	1.321.909.700	65	1.321.909.700	70	1.507.170.700	75	1.823.028.700	80	1.823.028.700	80	1.823.028.700	**Dinas Pendidikan**

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembanguna Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penaggung Jawab
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Pengembangan Kebudayaan	masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan														dan Kebudayaan
2	22	03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	%	21	23.725.000	22	23.725.000	23	27.049.900	24	60.000.000	25	60.000.000	25	60.000.000	
2	22	04	Program Pembinaan Sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	%	45	66.355.000	47	66.355.000	48	75.654.400	50	84.759.800	55	90.233.600	60	90.233.600	
2	22	05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	%	66	468.887.500	67	468.887.500	69	534.600.400	81	598.942.300	85	598.942.300	90	598.942.300	
				Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	%	68,2		69,5		70,3		71,8		72,9		80,1		
2	22	06	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	%	0	0	50	200.000.000	53	228.029.300	55	255.473.800	60	250.000.000	65	250.000.000	

4.2 INDIKATOR KINERJA MAKRO

Indikator kinerja makro merupakan ukuran utama yang mencerminkan kondisi umum pembangunan daerah secara menyeluruh. Indikator-indikator ini memberikan gambaran tentang keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029, indikator kinerja makro menjadi landasan penting dalam merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun ke depan.

indikator kinerja makro mencakup antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat ketimpangan (gini ratio), dan laju inflasi. Capaian dan tren dari indikator-indikator ini menjadi cerminan efektivitas kebijakan yang telah dijalankan serta menjadi dasar dalam menyusun strategi intervensi yang lebih terarah dan berdampak ke depan.

Kabupaten Padang Pariaman masih menghadapi tantangan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif, menurunkan angka kemiskinan di wilayah pedesaan, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat terhadap gejolak eksternal. Oleh karena itu, pemantauan dan analisis indikator makro dilakukan secara komprehensif sebagai bagian dari proses perencanaan yang berbasis bukti (*evidence-based planning*), guna memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Dengan menjadikan indikator kinerja makro sebagai dasar dalam perumusan RPJMD 2025–2029, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen untuk membangun daerah secara lebih adil, merata, dan berkelanjutan, serta menjadikan dokumen RPJMD sebagai instrumen strategis dalam mengarahkan pembangunan yang berdampak nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 4. 2
Indikator Kinerja Makro
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030

No	Indikator	Baseline (2025)	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
1.	Pertumbuhan Ekonomi	4,37	5,55	6,92	6,62	7,81	6,55
2.	PDRB Per Kapita ADHK (Rp.Juta)	32,11	33,33	35,04	36,75	38,97	40,86
3.	PDRB Per Kapita ADHB (Rp.Juta)	63,57	69,14	74,81	81,60	88,77	96,26
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,82	76,37	76,99	77,59	78,20	78,82
5.	Angka Harapan Hidup (Tahun)	73,97	74,07	74,17	74,27	74,37	74,47
6.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,42	14,56	14,68	14,85	14,98	15,12
7.	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,79	8,95	9,14	9,34	9,55	9,77

No	Indikator	Baseline (2025)	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
8.	Pengeluaran Per Kapita (Rp.Ribu)	11.932	12.113	12.301	12.496	12.697	12.905
9.	Tingkat Kemiskinan (%)	5,01	4,79	4,55	4,29	4,03	3,78
10.	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	23.407	22.738	21.954	21.075	20.106	19.157
11.	Gini Ratio	0,251	0,250	0,249	0,248	0,247	0,246
12.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,17	5,89	5,76	5,59	5,42	5,28

4.3 INDIKATOR KINERJA SASARAN VISI

Indikator kinerja sasaran visi merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian visi pembangunan jangka menengah daerah. Indikator Kinerja Sasaran Visi dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 memiliki peran strategis sebagai tolok ukur utama dalam memastikan arah pembangunan daerah tetap selaras dengan visi jangka menengah yang telah ditetapkan. Indikator-indikator ini tidak hanya menggambarkan target capaian, tetapi juga mencerminkan arah transformasi daerah menuju kondisi ideal sebagaimana dituju dalam visi jangka panjang yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2025–2045.

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara perencanaan jangka menengah dan jangka panjang, indikator kinerja sasaran visi RPJMD 2025–2029 secara sistematis diselaraskan dengan indikator sasaran visi dalam RPJPD 2025–2045. Penyelarasan ini dimaksudkan agar pembangunan daerah dapat berlangsung secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan, serta tidak terputus akibat pergantian periode lima tahunan.

Dengan demikian, pencapaian indikator kinerja dalam RPJMD periode 2025–2029 menjadi fondasi penting bagi keberhasilan visi jangka panjang daerah, sekaligus berfungsi sebagai pengendali kebijakan agar tetap berada dalam koridor visi besar pembangunan jangka panjang. Setiap capaian indikator tidak hanya dinilai sebagai keberhasilan tahunan atau lima tahunan semata, melainkan sebagai bagian dari kontribusi kumulatif untuk mewujudkan visi “Padang Pariaman Unggul, Religius, Berkelanjutan dan Tangguh dalam Menghadapi Perubahan” pada tahun 2045.

Lebih jauh lagi, indikator-indikator ini juga menjadi instrumen akuntabilitas publik, yang menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan dilakukan secara terencana, berkelanjutan, dan terukur. Pemerintah daerah dapat memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan memiliki arah dan tujuan yang jelas, tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga menyiapkan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Adapun daftar indikator kinerja sasaran visi dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4. 3
Target Indikator Kinerja Sasaran Visi
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030

Sasaran/Indikator Kinerja Visi		Satuan	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
I. Peningkatan Pendapatan Per Kapita								
1.	PDRB per Kapita ADHB (Rp Juta)	Rp. Juta	63,57	69,14	74,81	81,60	88,77	96,26
2.	Kontribusi Sektor PDRB Sub Sektor Perikanan	%	8,43	8,54	8,65	8,76	8,88	9
3.	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	%	10,37	10,52	10,67	10,82	11,02	11,21
II. Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan								
1.	Tingkat Kemiskinan	%	5,01	4,79	4,55	4,29	4,03	3,78
2.	Rasio Gini (Indeks)	Indeks	0,251	0,250	0,249	0,248	0,247	0,246
3.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	%	4,37	5,55	6,92	6,62	7,81	6,55
III. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah								
1.	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	3,68	4,30	4,90	5,40	5,90	6,4
IV. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia								
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	75,82	76,37	76,99	77,59	78,20	78,82
2.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah/ Jiwa	71,78	72,30	73,10	73,85	74,60	75,28
V. Peningkatan Kualitas Lingkungan								
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	76,96	77,17	77,38	77,59	77,80	78,02

4.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 merupakan tolok ukur strategis yang digunakan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode lima tahun ke depan. Setiap IKU dirumuskan secara langsung dari tujuan dan sasaran pada masing-masing misi pembangunan, yang merupakan turunan dari visi pembangunan jangka menengah, sekaligus cerminan dari visi jangka panjang sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2045.

Keberadaan IKU memiliki posisi yang sangat penting, karena indikator ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kinerja teknokratis, tetapi juga merepresentasikan akuntabilitas politik dan sosial dari kepala daerah kepada masyarakat. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dirumuskan dalam RPJMD merupakan bentuk penjabaran dari janji kepala daerah terpilih, sehingga pencapaian terhadap IKU secara langsung akan menjadi parameter publik dalam menilai sejauh mana mandat dan amanah tersebut telah dilaksanakan dengan baik.

Dalam konteks pembangunan jangka panjang, IKU juga dirancang untuk menjaga kesinambungan perencanaan lintas periode. Oleh karena itu, penyusunan IKU dilakukan dengan mengacu pada Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2045. Sinkronisasi ini dimaksudkan agar arah pembangunan daerah tidak terputus akibat pergantian kepemimpinan atau perubahan siklus lima tahunan, melainkan terus bergerak secara konsisten menuju visi jangka panjang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2045. IKU juga menjadi instrumen penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan oleh perangkat daerah. Melalui IKU, seluruh pihak baik Pemerintah Daerah, DPRD, maupun masyarakat, memiliki acuan yang jelas dalam memantau, mengevaluasi, serta memberikan umpan balik atas pelaksanaan pembangunan daerah. Pada akhirnya, keberhasilan pencapaian IKU tidak hanya mencerminkan prestasi pemerintahan dalam satu periode, tetapi juga menjadi pondasi utama bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Padang Pariaman secara berkelanjutan.

Adapun daftar Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 disajikan pada Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4. 4
Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030

Tujuan/Sasaran Per Misi	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Proyeksi Tahun				Kondisi Ahir RPJMD (2030)
			2025	2026	2027	2028	2029	
MISI 1. MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS DAN BERINTEGRITAS								
Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	3,68	4,3	4,9	5,4	5,9	6,4
Sasaran 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	80,00	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00
	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Indeks	71,4	72,19	72,99	73,79	74,59	75,39
	Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK	%	78,00	78,4	78,8	79,2	79,6	80,00
Sasaran 2 : Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung Pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	87,72	88,3	88,87	89,44	90,04	90,64
Sasaran 3 : Meningkatnya Transformasi Digital Pelayanan Publik	Indeks SPBE	Indeks	3,51	3,91	4,10	4,21	4,26	4,3
	Indeks Pemerintahan Digital Indonesia (Pemdi)	Indeks	-	1,7	2,00	2,1	2,5	2,7
MISI 2. MENCIPTAKAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING								
Tujuan 1 : Terciptanya Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berdaya Saing dan Inklusif	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	75,82	76,37	76,99	77,59	78,20	78,82
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan berdaya saing	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,79	8,95	9,14	9,34	9,55	9,77
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,42	14,56	14,68	14,85	14,98	15,12
	Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asessment tingkat Nasional							
	Literasi	%	54,00	54,46	54,92	55,38	55,84	56,30
	Numerasi	%	46,50	46,97	47,44	47,90	48,38	48,85
Sasaran 2 : Tercapainya Masyarakat sehat dan	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,97	74,07	74,17	74,27	74,37	74,47
	Prevalensi Stunting	%	23,90	22,65	21,40	20,15	18,90	17,65

Tujuan/Sasaran Per Misi	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Proyeksi Tahun				Kondisi Ahir RPJMD (2030)
			2025	2026	2027	2028	2029	
Produktif sesuai siklus Hidup	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Orang/100.000 Kelahiran Hidup	50	50	50	50	50	80
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	57,8	59,2	60,5	61,8	63,1	64,2
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,3	94,68	95,06	95,44	95,82	96,2
	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,715	0,708	0,701	0,694	0,687	0,673
	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	69,68	69,87	70,052	70,238	70,424	70,61
Sasaran 4 : Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusi	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	57,50	60,30	66,30	72,30	75,30	81,25
MISI 3. MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF, MAJU DAN MERATA								
Tujuan 1: Meningkatnya Perekonomian Daerah Yang Maju dan Inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,37	5,55	6,92	6,62	7,81	6,55
	PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	Rp.Juta	63,57	69,14	74,81	81,6	88,77	96,26
	Eksport Barang dan Jasa	%	4,57	5,01	5,45	5,88	6,32	13,92
	Gini Ratio	%	0,251	0,250	0,249	0,248	0,247	0,246
	Tingkat Kemiskinan	%	5,01	4,79	4,55	4,29	4,03	3,78
Sasaran 1 : Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, Kehutanan, dan perikanan terhadap perekonomian daerah	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	%	20,34	20,83	21,32	21,8	22,29	22,78
Sasaran 2 : Meningkatnya kontribusi perdagangan, UMKM dan industri berbasis sektor unggulan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	11,85	13,55	15,25	16,95	18,45	20,00
	Rasio Volume Koperasi Terhadap PDRB	%	0,150	0,192	0,234	0,276	0,318	0,620
	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	8,43	8,6425	8',855	9,0675	9,28	11,46
Sasaran 3 : Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu.Orang	0.125	0.127	0.13	0.135	0.14	0.145
	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Nasional	%	1,622	1,612	1,602	1,582	1,572	1,831
	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,36	1,38	1,40	1,42	1,44	1,54
Sasaran 4 : Meningkatnya Kemudahan Investasi	Persentase Peningkatan Investasi	%	2,58	3,44	4,12	5,16	6,55	7,68
	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PDRB)	%	30,6	30,38	30,16	29,93	29,71	29,49
	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	%	8,76	11,59	14,42	17,26	20,09	22,93

Tujuan/Sasaran Per Misi	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Proyeksi Tahun				Kondisi Ahir RPJMD (2030)
			2025	2026	2027	2028	2029	
	Nilai Transaksi Saham per Kapita	Rupiah	413.768	493.821	573.874	653.927	733.98	814.033
Sasaran 5 : Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	86,2	87,15	88,00	88,7	89,45	90,00
Sasaran 6 : Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,17	5,89	5,76	5,59	5,42	5,28
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah/Jiwa	71,78	72,3	73,1	73,85	74,6	75,28
	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	%	57,53-58,91	57,84-59,45	58,14-59,99	58,45-60,53	58,75-61,07	59,06-61,61
	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	%	71,20	71,68	72,16	72,63	73,11	73,59
	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal	%	26,39	27,45	28,50	29,56	30,61	31,67
Sasaran 7 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Indeks Desa	Indeks	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00
MISI 4. MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN								
Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan, berketahanan terhadap bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	60,5	63,00	65,2	67,8	70,00	72,00
Sasaran 1 : Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	60,02	62,03	64,05	66,08	68,12	70,17
	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan	%	19,00	20,50	22,00	23,50	25,00	26,50
	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	m3/detik	0,95	0,992	1,034	1,096	1,128	1,160
	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	%	60,25	62,54	64,83	67,12	70,71	72,73

Tujuan/Sasaran Per Misi	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Proyeksi Tahun				Kondisi Ahir RPJMD (2030)
			2025	2026	2027	2028	2029	
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	76,96	77,17	77,38	77,59	77,80	78,02
	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	16,34	20,31	24,23	27,78	31,66	35,45
	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan penuh pengumpulan sampah	%	40,87	46,7	52,53	58,36	64,19	70,02
Sasaran 3 : Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	150,89	150,88-149,61	149,6-148,33	148,32-147,05	147,04-145,77	145,76-144,49
MISI 5. MEWUJUDKAN KEHIDUPAN SOSIAL YANG RELIGIUS, HARMONIS DAN BERBUDAYA								
Tujuan 1 : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tentram dan harmonis dalam keberagaman agama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	72,15	72,5	72,9	73,2	73,55	73,87
Sasaran 1 : Meningkatnya rasa aman dan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan masyarakat	Indeks Keamanan Daerah	Indeks	67,37	66,88	67,49	67,89	68,38	68,81
	Angka Kriminalitas	%	196,25	186,44	177,12	168,27	159,86	151,87
Sasaran 2 : Meningkatnya pelestarian cagar dan warisan budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	85,00	86,00	87,00	88,00	88,5	89,00
	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	66,00	68,00	70,00	71,00	72,00	74,00

4.5 INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam dokumen RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 disusun sebagai instrumen strategis untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh. IKD ini menjadi acuan utama dalam menilai ketercapaian sasaran pembangunan jangka menengah, sekaligus memastikan keselarasan dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2045.

Penyusunan indikator ini memperhatikan empat aspek strategis, yakni: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Pendekatan multidimensi ini bertujuan agar pengukuran kinerja tidak hanya fokus pada satu sektor, tetapi mencerminkan kondisi pembangunan secara berimbang dan kontekstual sesuai karakteristik lokal.

Dalam pelaksanaannya, IKD menjadi dasar dalam proses evaluasi pembangunan tahunan maupun lima tahunan. Pemerintah daerah bersama DPRD dan pemangku kepentingan dapat memanfaatkan indikator ini untuk memantau kemajuan pembangunan, mengidentifikasi kendala, serta menetapkan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan secara lebih cepat dan tepat sasaran.

Melalui penerapan IKD secara konsisten dan terukur, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menegaskan arah pembangunan yang lebih fokus pada hasil (*outcome-oriented),* bukan semata-mata pada serapan anggaran. Pendekatan ini diharapkan dapat membangun budaya kinerja yang lebih profesional dan akuntabel, serta menjadi fondasi yang kokoh dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan menuju visi daerah tahun 2045.

Adapun daftar lengkap Indikator Kinerja Daerah (IKD) untuk periode RPJMD 2025–2029 disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4. 5
Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

NO	ASPEK/SASARAN INDIKATOR UTAMA	SATUAN	BASELINE	Proyeksi Tahun					Perangkat Daerah
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)									
A	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**								
1	Konsumsi listrik per kapita	KwH	601	656	711	764	817	869	Setda
2	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan *(Prevalence of Undernourishment)* (%)	%	6,61	6,2	5,79	5,38	4,56	4,16	Distan KP
3	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	m^3/detik	0,95	0,992	1,034	1,096	1,128	1,160	DPUPR
4	Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%)	%	19	20,5	22	23,5	25	26,5	DPUPR
5	Indeks Kualitas Tutupan lahan	Indeks	66,82	66,91	67	67,09	67,13	67,16	DLHPKPP
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	76,96	77,17	77,38	77,59	77,80	78,02	DLHPKPP
7	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	%	7,62	9,33	11,09	12,86	14,62	18,38	DPUPR
8	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	%	16,34	20,31	24,23	27,78	31,66	31,73	DLHPKPP
9	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	%	40,87	46,7	52,53	58,36	64,19	40	DLHPKPP
10	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	150,89	150,88 - 149,61	149,6 - 148,33	148,32 - 147,05	147,04 - 145,77	145,76 - 144,49	BPBD
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	76,96	77,17	77,38	77,59	77,80	78,02	DLHPKPP
12	Jumlah Penduduk	Jiwa	458.310	466.238	474.304	482.509	490.856	499.338	Disdukcapil
13	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	Disdukcapil
14	Rasio Penduduk	per seratus	101,38	101,39	101,45	101,55	102,11	102,35	Disdukcapil
15	Kepadatan Penduduk	jiwa/km2	341	347	353	359	365	372	Disdukcapil
B	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,37	5,55	6,92	6,62	7,81	6,55	Bapelitbangda
2	Tingkat Kemiskinan	%	5,01	4,79	4,55	4,29	4,03	3,78	Bapelitbangda

3	PDRB Per kapita	%	57,54	70	85	102	120	140,26	Bapelitbangda
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,17	5,89	5,76	5,59	5,42	5,28	Disdagnakerkop & UKM
5	Ketimpangan Pendapatan / Gini Ratio	%	0,251	0,250	0,249	0,248	0,247	0,246	Bapelitbangda
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,82	76,37	76,99	77,59	78,20	78,82	Bapelitbangda
7	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	Juta/Orang	71,78	72,48	73,18	73,88	74,58	75,28	Disdagnakerkop & UKM
8	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,97	74,07	74,17	74,27	74,37	74,47	DINKES
9	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Orang/100.000 Kelahiran Hidup	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	80,00	DINKES
10	Prevalansi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	%	23,90	22,65	21,40	20,15	18,90	17,65	DINKES
11	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis *(treatment coverage)*	%	99	99	100	100	100	100	DINKES
12	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis *(treatment success rate) (%)*	%	89,00	89,00	89,00	90,00	90,00	90,00	DINKES
13	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	%	94	94	94	94	98	98	DINKES
14	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi	%	54	54,46	54,92	55,38	55,84	56,3	DISDIKBUD
15	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	%	46,5	46,97	47,44	47,91	48,38	48,85	DISDIKBUD
16	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,79	8,95	9,14	9,34	9,55	9,77	DISDIKBUD
17	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,42	14,56	14,68	14,85	14,98	15,12	DISDIKBUD
18	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	11,5	11,62	11,74	11,86	11,96	12,06	Disdagnakerkop & UKM
19	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	%	71,20	71,68	72,16	72,63	73,11	73,59	Disdagnakerkop & UKM
20	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	%	36,69	39,22	41,75	44,28	46,81	49,34	Disdagnakerkop & UKM
21	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)	%	26,39	27,45	28,5	29,56	30,61	31,67	Disdagnakerkop & UKM
22	Persentase Cagar Budaya Yang di lestarikan	%	85	86	87	88	88,5	89	DISDIKBUD
23	Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan	%	66	68	70	71	72	74	DISDIKBUD
24	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	72,15	72,5	72,9	73,2	73,55	73,87	Setda

25	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	57,8	59,2	60,5	61,8	63,1	64,2	DPPKB
26	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,715	0,708	0,701	0,694	0,687	0,673	Dinsos P3A
27	Indeks Perlindungan Khusus Anak	Indeks	61,56	62,01	62,45	62,9	63,34	63,79	Dinsos P3A
28	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di Tingkat Kabupaten	Unit Layanan	-	-	-	1	1	1	Disdagnakerkop & UKM
29	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan / atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan	Orang	232	315	393	479	551	625	Disdagnakerkop & UKM
C	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**								
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	%	8,43	8,6425	8.855	9,0675	9,28	11,46	DPMPTP
2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	%	1,36	1,38	1,4	1,42	1,44	1,54	DISPARPORA
3	Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu.Orang	0,125	0,127	0,13	0,135	0,14	0,145	DISPARPORA
4	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Nasional	%	1,622	1,612	1,602	1,582	1,572	1,831	DISPARPORA
5	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian (%)	%	2,20	2,22	2,24	2,26	2,28	11,15	Disdagnakerkop & UKM
6	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah(%)	%	3,15	3,23	3,31	3,38	3,46	3,54	Disdagnakerkop & UKM
7	Rasio kewirausaahan (%)	%	3,68	3,81	3,95	4,08	4,21	4,26	Disdagnakerkop & UKM
8	Rasio Volume Koperasi Terhadap PDRB	%	0,150	0,192	0,234	0,276	0,318	0,62	Disdagnakerkop & UKM
9	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	%	0	0	0	0	0	0	Setda
10	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	%	32,77	33,97	35,17	36,37	37,57	47,58	Disdagnakerkop & UKM
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	57,53-58,91	57,84-59,45	58,14-59,99	58,45-60,53	58,75-61,07	59,06-61,61	Disdagnakerkop & UKM
12	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	87,72	88,3	88,89	89,47	90,02	90,64	Bapelitbangda
13	Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan(%)	%	20,34	20,83	21,32	21,8	22,29	22,78	Distan KP
14	Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Juta/orang)	Juta/Orang	97,89	99,57	101,04	102,52	103,91	105,31	Disdagnakerkop & UKM
15	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Indeks	50,99	52,44	53,5	54,75	56	58,24	Diskominfo
16	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu per Komoditas Bahan Pokok (%)	%	44	42,8	41,6	40,4	39,2	38	Disdagnakerkop & UKM
17	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	% PDRB	30,60	30,38	30,16	29,93	29,71	29,49	Disdagnakerkop & UKM

18	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	% PDRB	4,57	5,01	5,45	5,88	6,32	13,92	Disdagnakerkop & UKM
19	Persentase Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	%	60,25	62,54	64,83	67,12	70,71	72,73	DLHPKPP
20	Persentase Desa Mandiri (%)	%	8,67	9,17	9,67	10,67	11,67	12,67	DPMD
21	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%)	%	8,76	11,59	14,42	17,26	20,09	22,93	DPMPTP
22	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per (Rupiah)	Rupiah	413,768	493,821	573,874	653,927	733,98	814,033	DPMPTP
23	Total Kredit/PDRB (%)	%	8,76	11,59	14,42	17,26	20,09	6,5	DPMPTP
24	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)	%	1,82	1,88	1,94	2	2,07	2,14	Setda
25	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	%	0,51	0,53	0,55	0,57	0,59	0,6	BPKD
D	**ASPEK PELAYANAN UMUM**								
1	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	72	73,2	74,4	75,6	76,8	78	Setda
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,51	3,91	4,10	4,21	4,26	4,30	Diskominfo
3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,3	4,31	4,33	4,37	4,44	4,51	Setda
4	Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK	Nilai	78	78,4	78,8	79,2	79,6	80	Inspektorat
5	Indeks Kemanaan Daerah	%	67,37	66,88	67,49	67,89	68,38	68,81	Dinas SatpolPP & Damkar
6	Angka Kriminalitas	%	196,25	186,44	177,12	168,27	159,86	151,87	Dinas SatpolPP & Damkar
7	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pilpres/Pilkada	%	0	0	0	0	70	70	Kesbangpol
8	Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan	%	60	62	64	66	68	70	Setda
9	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	3,68	4,3	4,9	5,4	5,9	6,4	Setda
INDIKATOR KINERJA KUNCI									
A	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
1	**Urusan Wajib Pendidikan**								
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	62,80	65,84	68,88	71,92	74,96	78,00	
2	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	99,19	99,24	99,29	99,35	99,40	99,46	
3	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	%	64,44	70,93	71,69	72,46	73,22	73,98	

4	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	62,62	65,12	67,62	70,12	72,62	75,12	
5	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	55,95	58,85	61,75	64,65	67,55	70,45	
6	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	68,12	69,22	70,32	71,42	72,52	73,62	
7	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	61,76	63,26	64,76	66,26	67,76	69,26	
8	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	60,31	64,63	70,38	77,57	86,19	94,82	
9	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	%	85,90	86,40	86,90	87,40	87,90	88,40	
10	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	Nilai	74,28	75,18	76,08	76,98	77,88	78,78	
11	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	Nilai	68,71	70,21	71,71	73,21	74,71	76,21	
12	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD	Nilai	69,98	70,98	71,98	72,98	73,98	74,98	
13	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP	Nilai	68,53	69,53	70,53	71,53	72,53	73,53	
14	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	Nilai	59,95	62,45	64,95	67,45	69,95	72,45	
15	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	Nilai	57,03	59,43	61,83	64,23	66,63	69,03	
2	**Urusan Wajib Kesehatan**								
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio	0,56	0,66	0,76	0,86	0,96	1,06	
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	
3	Jumlah Kematian Ibu	Orang	5	5	5	4	4	3	
4	Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita	%	23,90	22,65	21,40	20,15	18,90	17,65	
5	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	

9	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	
15	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	
16	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	
3	**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**								
1	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	Rasio	13,6	15,85	18,1	20,35	22,6	24,85	
2	Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio	48,19	48,25	48,33	48,43	48,55	48,69	
3	Persentase luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	Rasio	67,47	68,17	68,87	69,57	70,27	70,97	
4	Persentase kondisi irigasi kewenangan kab/kota	%	67,47	68,17	68,87	69,57	70,27	70,97	
5	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	%	83,89	84,19	84,49	84,79	85,09	85,39	
6	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	77,07	77,37	77,67	77,97	78,27	78,57	

7	Rasio kepatuhan IMB	%	100	100	100	100	100	100	
8	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/ Kota	%	63,94	64,94	66,44	67,94	69,44	70,94	
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman		2,34	2,38	2,42	2,46	2,5	2,54	
11	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota		2	3	4	5	6	7	
12	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis		2,82	4,32	6,02	8,02	10,52	13,52	
13	Persentase Pengawasan penyelenggaran Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan		60	62,5	65	67,5	70	72,5	
14	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah		20	20	20	20	20	20	
15	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota		100	100	100	100	100	100	
4	**Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**								
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	0	4,49	5,29	6,29	7,49	8,69	
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	9,41	10,61	11,81	13,21	14,61	16,21	

5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	100	100	100	100	100	100	
5	**Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**								
1	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	%	84,50%	85,00%	85,20%	85,50%	86,00%	87,00%	
2	Jumlah PPNS pada Satpol PP	orang	3	4	5	6	7	7	
3	Presentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	0,65	0,7	0,75	0,8	0,85	0,9	
4	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	%	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5	0,6	
5	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	%		0,5	0,55	0,65	0,7	0,75	
6	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase penanganan pra bencana	%	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase penanganan pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100	
9	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	100	50	50	50	50	50	
10	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	80,13	82,13	84,13	86,13	88,13	90,13	
11	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	
12	Pesentaase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	
15	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	

16	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	8,5	8	7,5	7	6,5	6	
6	**Urusan Sosial**								
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	%	60	64	68	72	76	80	
6	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	%	80	82	84	86	88	90	
7	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	%	75	78	80	82	84	86	
9	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	%	78	80	82	84	86	88	
10	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDSyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	86	88	90	92	94	96	

11	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	%	78	80	82	84	86	88	
12	Pesentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	98	98	98	98	99	100	
13	Pesentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	2	3	3	3	3	100	
14	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	%	88	89	90	91	92	100	
B	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
1.	**Urusan Tenaga Kerja**								
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	0	0	0	0	0	0	
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,84	0,85	0,86	0,87	0,88	0,89	
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah/Jiwa	71,78	72,3	73,1	73,85	74,6	75,28	
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	47	47	48	48	49	49	
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	13,5	14	14,5	15	15,5	16	
2.	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**								
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,52	95,12	95,72	96,32	96,92	97,52	
2	Persentase ARG Daerah	%	3,1	3,12	3,15	3,2	3,225	3.250	
3	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	28	32	35	38	42	45	
4	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	
5	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	3,7	3,6	3,2	2,8	2,1	1,5	
3.	**Urusan Pangan**								

1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	%	40,00	55,00	65,00	75,00	85,00	100,00	
2	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota	Nilai 0-100	80,80	81,61	82,42%	83,25	84,08	84,92	
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	8,5	7,0	5,5	4	2,5	1	
4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	95	95	95	95	95	95	
4.	**Urusan Pertanahan**								
1	Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/ Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran	%	11	12	13	14	15	16	
2	Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran	%	10	15	20	25	30	35	
3	Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran	%	52	55	58	61	64	67	
4	jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran	%	6	7	8	9	10	11	
5	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	%	0	0%	0%	0%	0	0%	
6	Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas	%	0	0	0,5	1	1,5	2	
7	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	%	7,57	7,6	7,63	7,65	7,68	7,71	
8	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota	%	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	

9	Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB	%	0,22	0,23	0,21	0,22	0,23	0,24	
10	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	0	0	0	0	0	0	
11	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	100	100	100	100	100	100	
12	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	%	0	0	0	0	0	0	
13	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	0	0	0	0	0	0	
14	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	
15	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	100	100	100	
5.	**Lingkungan Hidup**								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	76,96	77,22	77,48	77,65	77,84	78,02	
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	%	36	41	46	51	56	61	
3	Terlaksananya Pengelolaan Sampah	%	3	4	5	6	7	8	
4	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	79	79,05	79,1	79,15	79,2	79,25	
6.	**Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**								
1	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	N/A	100	100	100	100	100	
4	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	%	98,35	99,1	99,2	99,3	99,4	99,5	
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	57,53	64	66	68	70	72	
6	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun	%	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen	12,53	25	30	35	40	50	

8	Perekaman KTP Elektronik	%	99,6	99,7	99,75	99,8	99,8	99,85	
9	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	62	64	66	68	70	72	
10	Kepemilikan akta kelahiran	%	57	59	61	63	64	65	
11	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Peramgkat Daerah	33	34	36	38	40	42	
7.	**Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa**								
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	22,33	24,27	26,21	28,16	30,1	32,04	
2	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	51,46	56,31	61,17	66,02	70,87	75,73	
3	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	22,33	24,27	26,21	28,16	30,1	32,04	
4	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga emasyarakatan Desa	%	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	
5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	
6	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	0	0	0	0	0	0	
8.	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**								
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Angka	2,37	2,34	2,32	2,30	2,28	2,26	
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	63,7	63,9	64	64,1	64,2	64,3	
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	15,21	15,19	15,17	15,15	15,13	15,11	
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15 - 19 tahun	5	4	3,4	3,1	2,9	2,7	
9.	**Perhubungan**								
1	Konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56	0,56	
2	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota	%	85	86	86	86	86	86	
3	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	%	20	30	35	40	45	50	
4	Rasio konektivitas	%	0,6	0,63	0,66	0,69	0,072	0,75	
5	V/C RASIO di Jalan Kabupaten/Kota	%	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,3	

10.	**Komunikasi dan Informatika**								
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	78,88	79,67	80,47	81,28	82,09	82,91	
4	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	92	92,92	93,85	94,79	95,74	96,7	
11.	**Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah**								
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	0,86	1,2	2	2,5	2,8	3	
2	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	27,7	27,9	28,2	28,4	28,6	28,8	
3	Pertumbuhan Wirausha	%	0,67	0,70	0,73	0,76	0,80	0,83	
4	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	25	25	40	50	55	60	
5	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	65,5	65,51	65,53	65,56	65,58	65,6	
12.	**Penanaman Modal**								
1	Persentase peningkatan investasi	%	1,88	1,89	2	2,1	2,13	2,15	
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%							
13.	**Kepemudaan dan Olahraga**								
1	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	%	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	
2	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	%	3,72	3,72	3,72	4,46	5,58	6,32	
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,59	0,6	0,61	0,63	0,64	0,65	
4	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	2,11	2,13	2,15	2,17	2,19	2,21	
5	Peningkatan Prestasi Olahraga	%	55	60	65	70	75	80	

14..	**Statistik**								
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	
2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	
15.	**Persandian**								
1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	%	20	30	40	50	60	75	
2	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	2	2,5	3	3,5	4	4,5	
16.	**Kebudayaan**								
1	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	%	66	67	69	81	85	90	
2	Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	%	70	75	80	85	90	95	
3	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifkasi profesi dibidang kebudayaan	%	30	40	45	50	60	70	
4	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	85,00	86,00	87,00	88,00	88,5	89,00	
17	**Perpustakaan**								
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	59	60	61	62	63	64	
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	5	6	7	8	9	10	
18	**Kearsipan**								
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	%	71	72	72,50	73	74	75	
2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	67	68	69	70	71	72	
3	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	34	35	36	37	38	39	

19.	**Kelautan dan Perikanan**								
1	Produksi Perikanan Tangkap	%	1,59	1,61	1,63	1,65	1,67	1,69	
2	Produksi Perikanan Budi Daya	%	2,08	2,10	2,12	2,14	2,16	2,18	
3	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	%	102	102,3	102,5	102,7	102,9	103	
20	**Pariwisata**								
1	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	%	0	25,00	8,00	11,11	10,00	6,06	
3	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	4,47	6,50	7,72	8,94	10,16	11,38	
4	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per Kebangsaan	%	76,00	77,50	79,00	80,50	82,00	83,50	
5	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	93,16	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
6	Tingkat hunian akomodasi	%	26,00	28,00	30,00	32,00	34,00	36,00	
7	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	1,60	1,95	2,30	2,65	3,00	3,35	
8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	
21	**Pertanian**								
1	Peningkatan produksi tanaman pangan	%	2,94	2,95	2,96	2,96	2,97	2,98	
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	3,07	3,09	3,10	3,12	3,14	3,15	
3	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	%	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
4	Peningkatan Produksi komoditas Perkebunan	%	0,54	0,55	0,55	0,55	0,56	0,56	
5	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	31,00	34,00	37,00	40,00	43,00	46,00	
6	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS)	%	0,54	100	100	100	100	100	
7	Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun								
	1. Padi	Ton/Ha	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5	
	2. Jagung	Ton/Ha	5,97	5,94	6,00	6,06	6,12	6,18	

8	Persentase penurunan kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan	%	-98	-99	-100	-100	-100	-100	
22	**Perdagangan**								
1	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	10	10,2	10,3	10,5	10,6	10,9	
3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	65	70	75	80	85	90	
4	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	53	57	61	65	69	72	
23	**Perindustrian**								
1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	68,28%	68,30%	68,50%	68,70%	68,90%	69,10%	
2	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%	44,5	45	45,5	46	46,5	47	
3	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasa	%	1	1	1	1	1	1	

4	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan	%	1,68%	1,69%	1,71%	1,73%	1,75%	1,77%	
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	%	100	100	100	100	100	100	
6	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah	%	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	
7	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,2	
8	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	
9	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	1	1	1	1	1	1	
24	**Sekretariat Daerah**								
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	poin	25	30	35	40	45	50	
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	poin	13,85	18,46	20,77	25,38	27,69	30	
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	poin	40	55	60	68	75	80	
4	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0	0	0	0	
5	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	88	90	91	92	93	95	
6	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	25	30	35	40	45	50	

7	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	90	92	93	94	95	95	
8	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	90,59	91,37	92,11	92,88	93,5	93,89	
25	**Sekretariat DPRD**								
1	Persentase ketepatan penetapan Perda APBD Tahun N	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase penetapan Ranperda Tahun N	%	85	86	87	88	89	90	
26	**Perencanaan**								
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	100	100	100	100	100	100	
27	**Keuangan**								
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	%	45,34	42,57	29,94	29,76	29,94	29,94	
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	13.241	10.236	8.981	9.297	9.524	9.712	
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	94.591	94.594	94.594	94.591	94.588	94.587	
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	1	1	1	1	1	1	
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	21,79	22,5	23	23,5	24	24,5	
6	Persentase Penurunan SILPA	%	52,84	-100	0	0	0	0	
7	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	-6.904	-6.903	-6.901	-6.901	-6.905	-6.903	
8	Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	-6.401	-6.397	-6.395	-6.396	-6.397	-6.397	
9	Assets Management	%	YA	YA	YA	YA	YA	YA	
10	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	6,94	0	0	0	0	0	
11	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	16,866	12,275	10,141	10,02	10,029	9,981	
12	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	%	81.403	59.472	49.194	48.605	48.643	48.413	
28	**Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**								

1	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	Indeks	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	
2	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	80	81	82	83	84	85	
3	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	30	31	32	33	34	35	
4	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	20	21	22	23	24	25	
5	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	50	51	52	53	54	55	
29	**Penelitian dan Pengembangan**								
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	%	85,00	85,00	90,00	90,00	95,00	100,00	
2	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	%	93	95	97	99	100	93	
30	**Inspektorat**								
1	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	Kategori / Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai (1-5)	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai (2-5)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
4	Manajemen Risiko Indeks	Nilai (1-5)	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	
5	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	60,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	
31	**Kewilayahan**								
1	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	3,15	3,45	3,65	3,95	4,25	
2	Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Partai Politik yang Aktif di Kecamatan	%	70	75	80	85	90	95	
4	Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	

6	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	25	40	55	65	85	100	
7	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	30	35	40	45	50	60	
32	**Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**								
1	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah Yang dilaksanakan	%	80	78	75	73	72	70	
2	Persentase Potensi Konflik Sosial yang Diselesaikan	%	92	94	95	97	98	100	
3	Cakupan penguatan Ideologi Pancasila dan Karaketr Kebangsaan	%	85	87	88	90	92	94	
4	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	%	85	87	88	90	92	94	
5	Persentase organisasi kemasyarakatan yang terdaftar dan aktif	%	91	93	94	95	96	98	
39	**Transparansi dan Partisipasi Publik**								
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (*Information on resources available to frontline service delivery units*)	%	90,5	91,5	92,5	93,5	94,5	95	
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	100	100	100	100	100	100	

4.6 PAGU PROGRAM PERANGKAT DAERAH PER URUSAN

Pagu Program Perangkat Daerah per urusan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 disusun sebagai kerangka pendanaan indikatif pembangunan daerah selama lima tahun. Pagu ini menjadi acuan dalam memastikan keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah secara berkelanjutan.

Pengelompokan pagu dilakukan berdasarkan urusan pemerintahan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non-pelayanan dasar, dan urusan pilihan. Setiap urusan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, sehingga alokasi pagu mencerminkan distribusi kewenangan dan tanggung jawab pembangunan daerah.

Penyusunan pagu program per urusan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, proyeksi pendapatan dan belanja lima tahunan, target Indikator Kinerja Daerah (IKD), pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Dengan demikian, pagu yang disusun bersifat indikatif dan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan APBD setiap tahunnya.

Dalam pelaksanaannya, pagu program per urusan berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih terarah, efisien, dan akuntabel. Pendekatan ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terhadap prinsip money follow program prioritas serta penguatan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan berbasis kinerja.

Adapun rincian pagu program Perangkat Daerah per urusan untuk periode RPJMD Tahun 2025–2029 disajikan pada Tabel 4.6 berikut.

Tabel 4. 6
Pagu Program Perangkat Daerah Per Urusan
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
-1			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
1	0 1	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	80,10	539.658.198.741	81,15	516.233.888.320	81,65	506.233.888.300	82,35	505.733.888.300	83,05	519.432.866.800	85,15	505.294.681.800	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	85,00		86,31		88,01		90,42		92,76		95,30		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	93,25		94,10		94,85		95,60		96,20		97,15		
1	0 1	0 2	Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	62,80	95.469.814.466	65,84	233.519.488.100	68,88	148.135.259.200	71,92	197.490.363.900	74,96	183.291.385.400	78,00	192.859.570.400	
				Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	99,19		99,24		99,29		99,35		99,4		99,46		
				Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	%	64,44		70,93		71,69		72,46		73,22		73,98		
				Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	60,31		64,63		70,38		77,57		86,19		94,82		
				Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	%	85,90		86,40		86,90		87,40		87,90		88,40		
				Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	%	74,28		75,18		76,08		76,98		77,88		78,78		
				Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	%	68,71		70,21		71,71		73,21		74,71		76,21		
				Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD	%	69,98		70,98		71,98		72,98		73,98		74,98		
				Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP	%	68,53		69,53		70,53		71,53		72,53		73,53		
				Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	%	59,95		62,45		64,95		67,45		69,95		72,45		
				Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	%	57,03		59,43		61,83		64,23		66,63		69,03		
1	0 1	0 3	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	%	8,05	51.999.000	8,05	51.999.000	8,05	59.286.500	62,46	66.421.900	98,96	66.421.900	100	66.421.900	
1	0 1	0 4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks pemerataan guru	%	0,34	208.747.400	0,68	208.747.400	1,02	238.002.700	1,36	266.647.500	1,7	266.647.500	2,04	266.647.500	
				Persentase Guru Berserrtifikasi	%													
1	0 1	0 5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan/diperbarui	%	0	0	2,73	200.000.000	2,75	228.029.300	2,8	360.000.000	2,85	360.000.000	2,9	360.000.000	
1	0 1	0 6	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase pengembangan bahasa dan sastra	%	0	0	8,05	200.000.000	8,05	228.029.300	62,46	255.473.800	98,96	255.473.800	98,96	255.473.800	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
2	2 2	0 2	Program Pengembangan Kebudayaan	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	%	64	1.321.909.700	65	1.321.909.700	70	1.507.170.700	75	1.823.028.700	80	1.823.028.700	80	1.823.028.700	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	2 2	0 3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	%	21	23.725.000	22	23.725.000	23	27.049.900	24	60.000.000	25	60.000.000	25	60.000.000	
2	2 2	0 4	Program Pembinaan Sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	%	45	66.355.000	47	66.355.000	48	75.654.400	50	84.759.800	55	90.233.600	60	90.233.600	
2	2	0	Program Pelestarian dan	Persentase Warisan Budaya	%	66	468.887.500	67	468.887.500	69	534.600.400	81	598.942.300	85	598.942.300	90	598.942.300	

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
-1			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2	5	Pengelolaan Cagar Budaya	yang dilestarikan														
				Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	%	68,2		69,5		70,3		71,8		72,9		80,1		
2	2	0	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	%	0	0	50	200.000.000	53	228.029.300	55	255.473.800	60	250.000.000	65	250.000.000	
	2	6																
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
1	0	0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	98.080.594.709	100	112.218.648.594	100	108.266.926.356	100	109.271.673.248	100	109.944.138.035	100	112.575.860.793	**Dinas Kesehatan**
	2	1		Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	85		85		85		85		85		85		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
1	0	0	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun	%	0,8	168.431.006.895	0,8	94.363.956.448	0,8	112.903.818.482	0,8	85.126.225.517	0,8	116.989.737.781	0,8	117.604.404.644	
	2	2		Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	70		70,01		70,02		70,03		70,04		70,05		
				Prevalensi Obesitas ≥ 18 tahun	%	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		
				Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	%	85		85,01		85,02		85,03		85,04		85,05		
				Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Faskes dengan Nilai Indeks Nasional Mutu (INM) 100 %	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase lanjut usia yang mandiri	%	87,5		87,75		88		88,5		89		89,5		
				Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	%	12,4		11,4		10,4		9,4		8,4		7,4		
				Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	%	99		99		100		100		100		100		
				Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)	%	88		88,4		88,8		89,2		89,6		90		
				Angka Kematian Balita	Orang/1000 Kelahiran Hidup	15		13,8		13,10		12,50		11,90		11,90		
				Angka Kematian Bayi	Orang/1000 Kelahiran Hidup	12,62		11,63		10,97		10,46		9,96		9,96		
				Angka Kematian Neonatal	Orang/1000 Kelahiran Hidup	9,2		8,4		8,0		7,6		7,2		7,2		
				Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100		100		100		100		100		100		
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan	%	100		100		100		100		100		100		

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
-1			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				kesehatan sesuai standar														
				Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100		00		100		100		100		100		
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100		100		100		100		100		100		
1	0 2	0 3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	%	100	2.101.525.600,00	100	1.121.311.600	100	243.311.600	100	3.521.311.600	100	2.621.311.600	100	2.621.311.600	
				Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	%	100		100		100		100		100		100		
1	0 2	0 4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar	%	10	474.341.000	15	306.350.000	20	168.350.000	25	123.721.000	30	168.350.000	100	168.350.000	
				Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	%	10		12		15		18		20		22		
				Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	%	70,00		75,00		80,00		85,00		85,00		85,00		
				Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	100		100		100		100		100		100		
1	0 2	0 5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan	%	100	443.953.440	100	64.700.000	100	64.700.000	100	114.700.000	100	64.700.000	100	64.700.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (RSUD)																		
1	0 2	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	29.812.592.342	100	44.445.000.000	100	43.265.000.000	100	43.265.000.000	100	43.265.000.000	100	43.265.000.000	**Rumah Sakit Umum Daerah**
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
1	0 2	0 2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian 48 Jam setelah dirawat untuk setiap 1000 penderita keluar dari Rumah Sakit	%	1,50	61.767.949.553	1,25	135.935.000.000	1,05	468.435.000.000	0,98	597.735.000.000	0,70	565.285.000.000	0,50	579.785.000.000	
				Angka Pemanfaatan Tempat	%	68		70		72		74		76		78		

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
-1			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Tidur RS (Bed Occupancy Rate =BOR)(60%-85%)														
				Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	%	0,48		0,66		0,76		0,86		0,96		1,06		
				Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	%	100		100		100		100		100		100		
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
1	0 3	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	11.756.702.322	100	14.900.000.000	100	13.400.000.000	100	13.400.000.000	100	12.770.000.000	100	12.350.000.000	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	85		85,05		85,10		85,15		85,20		85,25		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
1	0 3	0 2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	%	13,60	3.004.909.500	15,85	4.840.000.000	18,1	4.700.000.000	20,35	4.700.000.000	22,6	4.637.000.000	24,85	4.595.000.000	
				Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	%	67,47		68,17		68,87		69,57		70,27		70,97		
				Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	%	67,47		68,17		68,87		69,57		70,27		70,97		
				Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota	%	48,19		48,25		48,33		48,43		48,55		48,69		
1	0 3	0 3	Program Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase terlaksananya pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	%	83,89	0	84,19	520.000.000	84,49	500.000.000	84,79	500.000.000	85,09	491.000.000	85,39	485.000.000	
				Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	%	83,89		84,19		84,49		84,79		85,09		85,39		
1	0 3	0 4	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Persentase kondisi baik infrastruktur persampahan	%	0,00	0	1	110.000.000	1,5	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2,5	95.500.000,00	2	92.500.000,00	
1	0 3	0 5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	2,34	4.422.790.500	2,38	310.000.000	2,42	300.000.000,00	2,46	300.000.000,00	2,5	295.500.000,00	2,54	292.500.000,00	
				Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	77,07		77,37		77,67		77,97		78,27		78,57		
1	0 3	0 6	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	%	24,68	616.400.000	25,18	160.000.000	25,68	150.000.000,00	26,18	150.000.000,00	26,68	145.500.000,00	27,18	142.500.000,00	
1	0 3	0 7	Program Pengembangan Permukiman	Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik	%	1,00	0	2,00	110.000.000	3,00	100.000.000,00	4,00	100.000.000,00	5,00	95.500.000,00	6,00	92.500.000,00	
1	0 3	0 8	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	%	62,00	2.497.310.500	64,00	1.360.000.000	66,00	1.300.000.000,00	68,00	1.300.000.000,00	70,00	1.273.000.000,00	72,00	1.255.000.000,00	
1	0 3	0 9	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	%	0	0	1,00	160.000.000	1,50	150.000.000	2,00	150.000.000	2,50	145.500.000	3,00	142.500.000	
				Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	%	2		3		4		5		6		7		
				Mengukur rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	2,00		3,00		4,00		5,00		6,00		7,00		
1	0 3	1 0	Program penyelenggaraan jalan	Persentase jalan kabupaten yang ditingkatkan	%	63,94	18.347.162.690	64,94	10.200.000.000	66,44	10.000.000.000	67,94	10.000.000.000	69,44	9.910.000.000	70,94	9.850.000.000	

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
-1			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Persentase jembatan kabupaten yang ditingkatkan	%	92,31		94,31		96,31		98,31		100,31		102,31		
1	0 3	1 1	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	%	0,25	0	0,35	110.000.000	0,45	100.000.000	0,55	100.000.000	0,65	95.500.000	0,75	92.500.000	
				Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	%	2,82		4,32		6,02		8,02		10,52		13,52		
				Persentase Pengawasan penyelenggaran Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	60		62,5		65		67,5		70		72,5		
				Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
1	0 3	1 2	Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang	%	50,00	399.038.352	55,00	720.000.000	60,00	600.000.000,00	65,00	600.000.000,00	70,00	546.000.000,00	75,00	510.000.000,00	
				Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	%	20		20		20		20		20		20		
				Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	%	100		100		100		100		100		100		
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
1	0 5	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	10.641.056.082	100	8.516.813.164	100	8.116.813.164	100	8.116.813.164	100	8.116.813.164	100	7.792.403.164	**Dinas Satuan Polisi Praja dan Pemadam Kebakaran**
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	80		80		80		80		80		80		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
1	0 5	0 2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	112.362.600	100	155.975.000,00	100	155.975.000,00	100	155.975.000,00	100	155.975.000,00	100	155.975.000,00	
				Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	%	84,5		85		85,2		85,50		86		87		
				Presentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	65		70		75		80		85		90		
				Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	%	62		65		67,5		70		72,5		75		
				Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	%	30		35		40		45		50		55		
				Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	%	40		50		55		65		70		75		
				Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya	%	11,43		14,29		17,14		20		22,86		25,71		
				Jumlah PPNS pada Satpol PP	Orang	3		4		5		6		7		7		

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
-1			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	05	04	Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan kebakaran dan Non Kebakaran	Cakupan penyebaran Informasi dan Edukasi rawan Kebakaran	%	60	556.044.188	65	577.211.836	70	577.211.836	75	577.211.836	80	577.211.836	85	433.696.836	
				Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100		100		100		100		100		100		
				Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	%	15 Menit		14.50 Menit		13 Menit		12 Menit		11 Menit		10 Menit		
				Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100		100		100		100		100		100		
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA															
1	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	6.006.806.154	100	4.984.785.079	100	4.811.600.000	100	4.811.600.000	100	4.811.600.000	100	4.811.600.000	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	83		86		89		92		95		100		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
1	05	03	Program Penanggulangan bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	%	100	518.070.900	100	215.214.921	100	188.400.000	100	188.400.000	100	188.400.000	100	188.400.000	
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase penanganan pasca bencana	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase penanganan pasca bencana	%	100		100		100		100		100		100		
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
1	06	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	3.992.543.347	100	3.522.671.000	100	3.363.618.000	100	3.349.841.972	100	3.349.841.972	100	3.213.848.000	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,3		80,35		80,4		80,45		80,5		80,55		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dlaam panti rehabilitasi sosial	%	80	0	82	133.400.000	84	153.400.000	86	153.400.000	88	153.400.000	90	96.700.000	
				Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya diluar HIV/AIDS dan	%	100		100		100		100		100		100		

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
-1			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				NAPZA														
				Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana pada Masa Tanggap darurat dan Pasca Bencana sesuai Standar	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	%	65		67		69		71		73		75		
				Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	%	63		68		70		72		75		78		
				Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	%	78		80		82		84		86		88		
1	0 6	0 3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan dam dan luar negeri yang mendapatkan layanan pemulangan	Orang	2	6.800.000	2	6.800.000	3	6.800.000	3	6.800.000	4	6.800.000	4	6.800.000	
				Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	%	100		100		100		100		100		100		
1	0 6	0 4	Program Rahabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	241.130.200	100	177.682.000	100	177.682.000	100	191.458.028	100	191.458.028	100	142.652.000	
				Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentae Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100		100		100		100		100		100		
				Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	Indeks	67		68		69		70		71		72		
				Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	Indeks	64		65		66		67		68		69		
				Indeks Peranan Sosial	Indeks	46		48		50		52		54		56		
1	0 6	0 5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	100	0	100	71.910.000	100	31.400.000	100	31.400.000	100	31.400.000	100	31.400.000	
				Persentase penerima Manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	100		100		100		100		100		100		

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
-1			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Persentase Daerah yang Melaksanakan peneglolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	%	100		100		100		100		100		100		
				Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar	%	81,25		81,50		82		82,25		82,50		83		
				Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	%	4,81		5		5,15		5,2		5,25		5,3		
				Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	%	88		89		90		91		92		93		
1	0 6	0 6	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	426.257.200	100	157.727.000	100	129.700.000	100	129.700.000	100	129.700.000	100	82.100.000	
				Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan layanan pemulihan sosial	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	%	75		78		80		82		84		86		
1	0 6	0 7	Program pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase taman makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik	%	100	1.122.000	100	17.630.000	100	9.800.000,00	100	9.800.000,00	100	9.800.000,00	100	9.800.000,00	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
2	0 8	0 2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Aggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	%	3,1	151.841.000	3.120	119.050.000	3.150	102.300.000,00	3,20	102.300.000,00	3.225	102.300.000,00	3.250	102.300.000,00	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	60		61		62		63		64		65		
2	0 8	0 3	Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	46.057.200	100	119.730.000	100	91.430.000,00	100	91.430.000,00	100	91.430.000,00	100	-	
2	0 8	0 4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Pembelajaran keluarga (puspaga) yang berspektif Gender dan Hak Anak sesuai standar	%	45	194.045.200	50	122.030.000	60	111.660.000,00	70	111.660.000,00	80	111.660.000,00	90	-	
2	0 8	0 5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Tingkat pemanfataan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	%	53	21.800.000	55	6.100.000	57	6.100.000	59	6.100.000	61	6.100.000	64	6.100.000	
2	0 8	0 6	Program Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	%	60,33	84.352.400	60,83	78.850.000	61,33	72.350.000,00	61,83	72.350.000,00	62,33	72.350.000,00	62,83	72.350.000,00	
2	0 8	0 7	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	28	107.606.900	32	143.420.000	35	143.760.000	38	143.760.000	42	143.760.000	45	143.760.000	
				Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	100		100		100		100		100		100		

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
-1			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	28		32		35		38		42		45		
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
2	1 1	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	5.302.113.859	100	4.891.905.051	100	24.004.999.991	100	12.955.904.536	100	15.494.495.445	100	15.743.073.535	**Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan**
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	85		85		85		85		85		85		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
2	1 1	0 2	Program perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	%	85	67.606.800	100	5.000.000	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	
2	1 1	0 3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase kualitas air yang memenuhi standar baku mutu	%	100	386.302.950	100	355.000.000	100	7.950.000.000	100	8.300.000.000	100	8.900.000.000	100	9.200.000.000	
				Persentase kualitas udara yang memenuhi standar baku mutu	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase peningkatan kelompok masyarakat peduli lingkungan	%	45		50		55		60		65		70		
2	1 1	0 4	Program pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH	%	100	34.041.800	100	35.000.000	100	4.800.000.000,00	100	4.800.000.000,00	100	4.850.000.000,00	100	4.850.000.000,00	
2	1 1	0 5	Program Pengendalian Bahan berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang terkelola	%	100	3.327.000	100	2.000.000	100	370.000.000,00	100	400.000.000,00	100	450.000.000,00	100	500.000.000,00	
2	1 1	0 6	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan, Izin PPLH dan PUULH	%	79	17.437.300	79,05	19.000.000	79,10	300.000.000,00	79,15	450.000.000,00	79,20	600.000.000,00	79,25	750.000.000,00	
2	1 1	0 7	Program pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan Lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang ditingkatkan kapasitasnya	%	0	0	0	-	5	100.000.000,00	10	150.000.000,00	15	250.000.000,00	20	250.000.000,00	
2	1 1	0 8	Program Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	%	20	11.775.000	40	-	60	500.000.000,00	80	700.000.000,00	100	900.000.000,00	100	900.000.000,00	
2	1 1	0 9	Program penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	43	7.987.500	46	8.000.000	49	250.000.000,00	51	350.000.000,00	54	450.000.000,00	57	550.000.000,00	
2	1 1	1 0	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	%	100	0	100	-	100	350.000.000,00	100	500.000.000,00	100	600.000.000,00	100	700.000.000,00	
2	1 1	1 1	Program Pengelolaan persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Angka	36	414.572.949	41	17.594.949	46	15.200.000.009	51	15.200.000.009	56	15.400.000.009	61	15.500.000.009	
				Persentase Pengelolaan Sampah yang dilakukan	%	100		4		5		6		7		8		
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN															
1	0 4	0 2	Program pengembangan dan Perumahan	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	41.525.010	100	38.000.000	100	64.780.000.000	100	45.065.000.000	100	45.565.000.000	100	46.165.000.000	**Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan**
				Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	9,41		10,61		11,81		13,21		14,61		16,21		
				Penyediaan dan rehabilitasi	%	100		100		100		100		100		100		

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
-1			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota														
1	0 4	0 3	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	4,66	330.786.258	5,59	35.000.000	6,39	50.520.000.000	7,29	50.635.000.000	8,29	50.735.000.000	9,49	50.835.000.000	
				Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Unit	50		65		75		85		95		105		
1	0 4	0 5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utulitas Umum)	%	100	0	100	3.000.000	100	150.000.000	100	265.000.000	100	265.000.000	100	265.000.000	
1	0 4	0 6	Program peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau badan Hukum yang Melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	%		0											
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN															
2	1 0	0 3	Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan umum	Persentase tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diselesaikan tepat waktu	%	100	0	100		100		100		100		100		**Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan**
				Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	0		0		0		0		0		0		
				Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	%	0		0		0		0		0		0		
				Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/ Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran	Hektar													
				Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran	Hektar													
				jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran														
2	1 0	0 4	Program penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum	%	0	0	0	-	20	-	25	-	30	-	35	-	

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
-1			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi														
				Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	0		0		20		25		30		35		
				Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	%	0		0		0		0		0		0		
				Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas	%	0		0		0,5		1		1,5		2		
2	1 0	0 5	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	%	100	10.499.750	100	500.000	100	84.472.500.000	100	14.104.095.455	100	9.215.504.546	100	7.266.926.456	
				Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	100		100		100		100		100		100		
				Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	100		100		100		100		100		100		
				Luas Tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran	Hektar	52		55		58		61		64		67		
2	1 0	0 6	Program redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah asente	Tersedianya tanah obyek Landreform(TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absente	%	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2	1 0	0 7	Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase tanah ulayat yang ditetapkan	%	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2	1 0	0 8	Program Pengelolaan tanah kosong	Persentase tanah Kosong yang dikelola	%	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2	1 0	1 0	Program Penatagunaan Tanah	Persentase luas lokasi konsolidasi tanah	%	10	70.570.600	12	40.000.000	14	800.000.000,00	16	925.000.000,00	18	1.125.000.000,00	20	1.325.000.000,00	
				Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota	%	0,22		0,23		0,24		0,25		0,26		0,27		
2	1 0	1 2	Program pengurusan hak-hak atas tanah	ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan pemerintah daerah	%	0	0	0	0,00	10	0,00	20	0,00	30	0,00	40	0,00	
				Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB	%	0,22		0,23		0,21		0,22		0,23		0,24		
2	1 0	1 3	Program Survei, pengukuran dan pemetaan	Persentase Kejelasan hak milik atas tanah	%	25	0	27	0,00	29	0,00	31	0,00	33	0,00	35	0,00	
2	1 0	1 4	Program Pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanahan	Persentase SDM Bidang Pertanahan yang ditingkatkan kompetensinya	%	0	0	15	0,00	30	0,00	45	0,00	60	0,00	75	0,00	
2	1 0	1 6	Program Pembanguna Sistem Informasi pertanahan	Persentase infromasi pertanahan yang dimanfaatkan	%	0	0	0	0,00	5	0,00	7	0,00	9	0,00	11	0,00	
2	1 0	1 7	Program penanganan konflik, sengketa dan perkara pertanahan	Persentase penyelesaian konflik, sengketa dan perkara dan pertanahan	%	100	0	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL																		
2	1 2	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	5.069.581.276	100	3.940.000.000	100	3.700.000.000	100	3.700.000.000	100	3.700.000.000	100	3.700.000.000	Dinas Kependudukan dan

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
-1			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Kabupaten/Kota Program Pendaftaran Penduduk	Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	94,2		90		91		91,5		92		92,5		Pencatatan Sipil
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
2	1 2	0 2		Persentase Kepemilikan Identitas kependuduka Digital	%	20	0	25	340.000.000	30	300.000.000	35	300.000.000	40	300.000.000	50	300.000.000	
				Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	62		64		66		68		70		72		
				Perekaman KTP Elektronik	%	99,6		99,65		99,7		99,75		99,8		99,8		
2	1 2	0 3	Program pencatatan Sipil	Persentase Akte Kematian yang Diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	0	100	85.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	
				Persentase akte kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Akte perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100		100		100		100		100		100		
2	1 2	0 4	Program pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	%	100	24.000.000	80	76.500.000	85	67.500.000	90	67.500.000	95	67.500.000	100	67.500.000	
				Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Perangkat Daerah	33		34		36		38		40		42		
2	1 2	0 5	Program pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	%	100	0	100	8.500.000	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		
2	1 3	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	3.273.502.949	100	2.770.000.000	100	2.655.000.000	100	2.655.000.000	100	2.655.000.000	100	2.655.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
2	1 3	0 2	Program Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	51,46	118.703.000	56,31	50.000.000	61,17	50.000.000	66,02	50.000.000	70,87	50.000.000	75,73	50.000.000	
				Persentase Fasilitasi Pembentukan Desa	%	2,91		3,88		4,85		5,83		6,8		7,77		
2	1 3	0 3	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	100	0	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	
2	1 3	0 4	Program Administrasi pemerintahan Desa	Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	%	100	102.568.500	100	305.000.000,00	100	115.000.000,00	100	115.000.000,00	100	115.000.000,00	100	115.000.000,00	
				Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%	0		0		0		0		0		0		
				Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	22,33		24,27		26,21		28,16		30,10		32,04		
				Persentase Fasilitasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Fasilitasi Tata Kelola keuangan dan Aset Desa	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Fasilitasi Bumnag	%	6,80		6,80		6,80		6,80		6,80		6,80		
2	1 3	0 5	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	100	710.208.800	100	315.000.000,00	100	320.000.000,00	100	320.000.000,00	100	320.000.000,00	100	320.000.000,00	
				Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	44,66		0,97		0,97		0,97		0,97		0,97		
				Persentase Fasilitasi Bulan	%	3,88		4,85		4,85		4,85		4,85		4,85		

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
-1			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Bhakti Gotong Royong														
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
2	1 4	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	3.888.960.833	100	3.610.131.330	100	3.506.325.000	100	3.515.010.000	100	3.523.460.000	100	3.490.262.000	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	75		75		75		75		78		81		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
2	1 4	0 2	Program pengendalian Penduduk	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Wanita	Umur	22,7	493.445.000	23	543.484.650	23,25	415.915.000	23,5	415.064.000	24	416.969.000	24,5	329.874.000	
				Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	indeks	74		79,7		83,4		85,8		87,3		88,3		
				Kepadatan Penduduk	jiwa/km2	341		347		353		359		365		372		
2	1 4	0 3	Program pembinaan Keluarga berencana (KB)	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	63,7	7.452.049.500	63,9	3.750.254.020	64	2.830.273.000	64,1	2.825.298.000	64,2	2.820.447.000	64,3	2.230.688.000	
				Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	%	14		12,3		11,1		10,2		9,5		9		
				Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	%	24,4		34		43,7		53,4		62,1		67,1		
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	15,21		15,19		15,17		15,15		15,13		15,11		
2	1 4	0 4	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	%	65,65	1.987.000.000	65,68	1.846.130.000	65,7	1.397.487.000	65,73	1.394.628.000	65,76	1.389.124.000	65,79	1.099.176.000	
				Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	per1000 kelahiran	5,0		4,0		3,4		3,1		2,9		2,7		
				Indeks Lansia Berdaya	Indeks	65,5		66,3		67		67,6		68,3		68,9		
				Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	81,3		82,9		84,3		85,6		86,9		88		
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN															
2	1 5	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	5.042.081.673	100	4.159.000.000	100	4.060.000.000	100	4.060.000.000	100	4.065.000.000	100	4.061.000.000	**Dinas Perhubungan**
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	82		83		83		84		84		85		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
2	1 5	0 2	Program penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ)	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	86	19.104.504.300	88	12.723.000.000	89	9.660.000.000	89	9.660.000.000	90	9.655.000.000	91	7.629.000.000	
				Konektivitas Darat	rasio	0,52		0,54		0,55		0,56		0,57		0,58		
				Persentase Keselamatan Berlalu Lintas	%	85		87		87		88		88		89		
2	1 5	0 3	Program Pengelolaan Pelayaran	Konektivitas Laut	rasio	0	0	20	0,00	22	20.000.000,00	23	20.000.000,00	24	20.000.000,00	25	20.000.000,00	
2	1 5	0 4	Program Pengelolaan Penerbangan	Persentase Pengendalian KKOP	%	0	0	20	0,00	22	20.000.000,00	23	20.000.000,00	24	20.000.000,00	25	20.000.000,00	
2	1 5	0 5	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	%	88	1.440.300	88	18.000.000	89	20.000.000,00	89	20.000.000,00	90	20.000.000,00	90	20.000.000,00	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOUNIKASI DAN INFORMATIKA															
2	1 6	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	3.616.844.912	100	3.800.000.000	100	2.750.000.000	100	2.750.000.000	100	2.750.000.000	100	2.650.000.000	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
2	1 6	0 2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	%	70	649.170.000	72	176.350.000	75	188.985.000	80	202.883.500	83	218.171.850	86	184.989.035	
				Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk	%	92		92,92		93,85		94,79		95,74		96,7		

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
-1			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)														
				Persentase Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	78,33		81,34		85,65		87,45		89,96		92,34		
				Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	92		92,92		93,85		94,79		95,74		96,7		
2	16	03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (TIK)	%	100	2.540.390.800	100	0	100	2.100.031.000	100	2.080.034.100	100	2.058.037.510	100	2.008.841.261	
				Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (Egov)	%	78,88		79,67		80,47		81,28		82,09		82,91		
				Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	50		60		70		80		90		100		
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK															
2	20	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Penyelenggaraan Statistik Sektoral	%	2,8	4.730.000,0	3	55.440.000	3,2	60.984.000	3,4	67.082.400	3,6	73.790.640	3,8	56.169.704	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
				Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100		100		100		100		100		100		
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN															
2	21	02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	2	10.700.000	2,5	50.000.000	3	50.000.000	3,5	50.000.000	4	50.000.000	4,5	50.000.000	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
				Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	2		2,5		3		3,5		4		4,5		
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															
3	30	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	6.129.299.434	100	5.497.293.255	100	5.222.963.816,00	100	5.222.963.816,00	100	5.222.963.816,00	100	5.222.963.816,00	**Dinas Perdagangan, Tenaga kerja, Koperasi dan UKM**
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
3	30	02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang difasilitasi	%	63	13.679.800	70	17.662.681	73	19.784.876	75	19.784.876	77	19.784.876	79	19.784.876	
				Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP	%	65		70		75		80		85		90		

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
-1			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)														
3	3 0	0 3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	%	3,33	6.978.000	1,12	8.831.340	1,15	17.527.476	2,01	17.527.476	2,6	17.527.476	3,01	17.527.476	
3	3 0	0 4	Program Stabilisasi Harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting	%	6	13.500.500	6	17.662.681	6	21.306.185,00	6	21.306.185,00	6	21.306.185,00	6	21.306.185,00	
				Persentase kinerja realisasi pupuk	%	53		57		61		65		69		72		
3	3 0	0 5	Program Pengembangan Eksport	Nilai Ekspor Barang	%	10	0	4,20	8.831.340	4,50	8.355.170,00	4,70	8.355.170,00	4,80	8.355.170,00	5,10	8.355.170,00	
3	3 0	0 6	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	3,33	22.859.000	3,33	20.187.561	3,33	21.605.634,00	3,33	21.605.634,00	3,33	21.605.634,00	3,33	21.605.634,00	
3	3 0	0 7	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase promosi Produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	%	20	200.841.600	18	123.638.770	17,25	134.385.896,00	18	134.385.896,00	18	134.385.896,00	18	134.385.896,00	
				Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota	Nilai	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
2	0 7	0 2	Program perencanaan tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	0	0	0	13.247.011	0	12.532.755	0	12.532.755	0	12.532.755	0	12.532.755	**Dinas Perdagangan, Tenaga kerja, Koperasi dan UKM**
				Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	9,34		9,84		10,34		10,84		11,34		11,84		
				Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	%	23,55		24,05		24,55		25,05		25,55		26,05		
2	0 7	0 3	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	%	70	17.399.200	71	22.078.351	71	25.065.510,00	72	25.065.510,00	73	25.065.510,00	74	25.065.510,00	
				Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,85		0,85		0,86		0,87		0,88		0,89		
2	0 7	0 4	Program Penempatan tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	13,5	0	14	13.247.011	14,5	12.532.755,00	15	12.532.755,00	15,5	12.532.755,00	16	12.532.755,00	
				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah/ JIwa	71,78		72,3		73,1		73,85		74,6		75,28		
2	0 7	0 5	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	47,00	24.149.950	47,00	22.122.508	48,0	25.065.510	48,00	25.065.510	49,00	25.065.510	49,00	25.065.510	
				Persentase Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	%	60		61		62		63		64		65		
2	0 7	0 6	Program pengawsan Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya	%	85	0	90	0,00	92	0,00	94	0,00	95	0,00	96	0,00	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH															
2	1 7	0 2	Program Pelayanan izin usaha Simpan Pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	7	0	7	13.247.011	9	12.532.755,00	11	12.532.755,00	13	12.532.755,00	15		**Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM**
2	1 7	0 3	Program pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	Persentase Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	%	25	6.864.000	25	19.308.843	40	34.142.567,00	50	34.142.567,00	55	34.142.567,00	60	34.142.567,00	
2	1 7	0 4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	25	9.504.200	25	8.393.482	40	21.309.193,00	50	21.309.193,00	55	21.309.193,00	60	21.309.193,00	
2	1	0	Program Pendidikan dan Latihan	Persentase Koperasi yang	%	25	0	25	44.158.708	25	41.775.851,00	25	41.775.851,00	40	41.775.851,00	40	41.775.851,00	

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
-1			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7	5	Perkoperasian	diberikan dukungan fasilitasi pelatihan														
2	1 7	0 6	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	25	9.934.500	25	8.773.495	40	21.668.716,00	50	21.668.716,00	55	21.668.716,00	60	21.668.716,00	
2	1 7	0 7	Program pemberdayaan Usaha Menengah, usaha Kecil dan usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Kecil yang Bertarsnformasi dari Informal ke Formal	%	0,35	29.386.400	0,33	28.070.946	0,4	34.912.580	0,42	34.912.580	0,44	34.912.580	0,46	34.912.580	
				Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	65,5		65,51		65,53		65,56		65,58		65,6		
				Pertumbuhan Wirausaha	%	0,34		0,36		0,39		0,41		0,43		0,45		
2	1 7	0 8	Program pengembangan UMKM	Proporsi UKM Menjalin kemitraan dan ekspor	%	0,35	0	0,37	13.247.011	0,39	12.532.755	0,42	12.532.755	0,45	12.532.755	0,47	12.532.755	
2	1 7	0 9	Program Penguatan Badan Hukum Koperasi	Persentase Koperasi yang memiliki Izin usaha Simpan Pinjam	%	20	0	22	0,00	24	0,00	26	0,00	28	0,00	30	0,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN SATU PINTU																		
2	1 8	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	4.595.624.363	100	4.227.000.000	100	4.084.000.000	100	4.084.000.000	100	4.084.000.000	100	4.084.000.000	**Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian**
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	91,06		91,07		91,08		91,09		91,10		91,11		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
2	1 8	0 2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	10	18.390.900	12	11.000.000	15	11.000.000,00	17	11.000.000,00	19	11.000.000,00	21	11.000.000,00	
2	1 8	0 3	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investor yang Berinvestasi	%	1,10	9.863.000	1,20	10.000.000	1,30	8.000.000,00	1,50	8.000.000,00	1,70	8.000.000,00	1,90	8.000.000,00	
2	1 8	0 4	Program pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai Ketentuan	%	85,00	26.822.015	85,50	21.000.000	86,00	20.000.000,00	86,50	20.000.000,00	87,00	20.000.000,00	87,50	20.000.000,00	
2	1 8	0 5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	%	80,00	26.950.000	80,00	26.000.000	80,00	24.000.000,00	80,00	24.000.000,00	80,00	24.000.000,00	80,00	24.000.000,00	
2	1 8	0 6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemanfaatan data dan infromasi penanaman modal	%	80,00	1.650.000	80,50	5.000.000	81,00	3.000.000,00	81,50	3.000.000,00	82,00	3.000.000,00	82,50	3.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																		
3	3 1	0 2	Program Perencanaan Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	%	3,2	16.250.000	3,4	18.000.000	3,6	18.000.000	3,8	18.000.000	4,0	18.000.000	4,2	18.000.000	**Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian**
				Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	3,2		3,4		3,6		3,8		4,0		4,2		
				Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah	%	3,1		3,2		3,3		3,4		3,5		3,6		
				Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	%	68,28		68,30		68,50		68,70		68,90		69,10		

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
-1			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Kabupaten/Kota														
3	3 1	0 3	Program Pengendalian izin Usaha Industri	Persentase izin Usaha Industri yang diterbitkan	%	35	5.000.000	37	4.000.000	39	4.000.000	41	4.000.000	43	4.000.000	45	4.000.000	
				Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	3		3,2		3		3,6		4		4,0		
				Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	1		1		1		1		1		1		
				Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%	4,45		4,5		4,55		4,6		4,65		4,70		
				Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan.	%	100		100		100		100		100		100		
3	3 1	0 4	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Informasi Industri Secara Lengkap, akurat dan terkini	%	65	4.800.000	67	3.000.000	69	3.000.000,00	71	3.000.000,00	73	3.000.000,00	75	3.000.000,00	
				Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan.	%	1,68	0	1,69	0	1,71	0	1,73	0	1,75	0	1,77	0	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															
2	2 6	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	4.418.900.608	100	4.405.693.326	100	4.183.190.111	100	4.183.190.111	100	4.183.190.111	100	4.183.190.111	**Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga**
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	85		85,50		85,75		86,00		86,25		86,50		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
2	2 6	0 2	Program Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan kinjungan wisatawan	%	93,12	182.881.000	2,00	434.000.000	2,00	229.000.000	2,00	229.000.000	2,00	229.000.000	2,00	229.000.000	
				Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	10,00		10,14		10,16		10,19		10,09		10,21		
				Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	93,16		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		
				Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	%	3,13		3,20		3,27		3,33		3,40		3,47		
				Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	%	0		25		8		11,11		10		6.06		

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
-1			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%													
2	2 6	0 3	Program Pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	%	8,7	12.801.800	4,0	110.006.674	3,85	110.809.889	3,70	110.809.889	3,57	110.809.889	3,45	110.809.889	
				Tingkat Hunian Akomodasi	%	25,00		25,03		25,08		25,14		25,20		25,25		
				Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	1,26		1,26		1,27		1,27		1,28		1,28		
2	2 6	0 4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	%	4,47	0	6,50	80.000.000	7,72	30.000.000,00	8,94	30.000.000,00	10,16	30.000.000,00	11,38	30.000.000,00	
2	2 6	0 5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang aktif dan tervalidasi	%	54,88	333.698.400	56,91	560.000.000	58,13	340.000.000,00	59,35	340.000.000,00	60,57	340.000.000,00	61,79	340.000.000,00	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
2	1 9	0 2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	0,59	298.263.000	0,60	382.000.000,0	0,61	167.000.000,0	0,63	167.000.000,0	0,64	167.000.000,0	0,65	167.000.000,0	**Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga**
				Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	2,11		2,13		2,15		2,17		2,19		2,21		
				Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	%	0,07		0,07		0,07		0,07		0,07		0,07		
2	1 9	0 3	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Prestasi Olahraga	%	55	2.268.075.304	60	955.000.000,00	65	895.000.000,00	70	895.000.000,00	75	895.000.000,00	80	895.000.000,00	
				Persentase atlet yang masuk pelatnas	%	0,13		0,13		0,13		0,13		0,26		0,26		
				Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	%	1,28		1,28		1,53		1,92		2,17		2,56		
2	1 9	0 4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	%	2,67	250.000.000	2,68	278.300.000,00	2,69	250.000.000,00	2,70	250.000.000,00	2,71	250.000.000,00	2,71	250.000.000,00	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN															
2	2 4	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	3.571.363.162	100	3.287.423.840	100	5.205.183.840	100	3.182.423.840	100	3.177.423.840	100	3.177.423.840	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
2	2 4	0 2	Program pengelolaan Arsip	Persentase PD yang memiliki Laporan Audit Kearsipan Internal Predikat Baik	%	69,5	65.000.000	70	52.000.000	70,5	42.000.000,00	71	82.000.000,00	72	82.000.000,00	73	82.000.000,00	
2	2 4	0 3	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%	58	25.000.000	59	0,00	60	15.000.000	61	0,00	62	0,00	62	0,00	
				Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	67		68		69		70		71		72		
				Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan	%	34		35		36		37		38		39		

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
-1			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				rakyat														
2	2 4	0 4	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan arsip yang bersifat tertutup	%	0	15.000.000	2	0,00	3	0,00	5	0,00	7	0,00	10	0,00	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN															
2	2 3	0 2	Program Pembinaan Perpustakaan	persentase Perpustakaan sekolah dan perpustakaan Nagari yang terakreditasi	%	25	252.982.745	26	245.576.160	27	48.127.816.160,00	28	220.576.160,00	29	175.576.160,00	30	175.576.160,00	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**
2	2 3	0 3	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dimiliki	%	12	0	14	15.000.000	16	10.000.000,00	18	15.000.000,00	20	15.000.000,00	22	15.000.000,00	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
3	2 5	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	3.844.460.757	100	3.119.717.118	100	3.019.717.118,00	100	3.019.717.118,00	100	3.019.717.118,00	100	3.019.717.118,00	**Dinas Perikanan**
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	75		75,5		76		76,5		77		77,5		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
3	2 5	0 3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	Ton/Tahun	19.994,03	814.770.000	19.995,64	278.999.004	19.997,27	228.999.004,00	19.998,92	228.999.004,00	20.000,59	228.999.004,00	20.338,60	228.999.004,00	
3	2 5	0 4	Program Pengelolaan Perikanan Budi daya	Jumlah Total produksi Perikanan Budidaya	Ton/Tahun	59.119,25	50.946.460	60.360,76	163.842.940	61.640,41	163.842.940,00	62.959,52	163.842.940,00	64.319,45	163.842.940,00	65.721,60	163.842.940,00	
				Jumlah Produksi Benih	Ekor/Tahun	552.160.000		564.036.000		575.946.000		587.856.000		599.766.000		611.676.000		
3	2 5	0 5	Program pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Lubuk Larangan Yang Diawasi	Titik/Tahun	20	0	25	25.000.000	30	25.000.000	32	25.000.000	34	25.000.000	35	25.000.000	
				Persentase Pokdakan/UPR yang diawasi	%													
3	2 5	0 6	Program Pengolahan Pemasaran Hasil perikanan	Jumlah Total Produksi Ikan Olahan	Ton/Tahun	192,57	12.440.938	196,33	62.440.938	200,26	62.440.938	204,37	62.440.938	208,67	62.440.938	213,1	62.440.938	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
3	2 7	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	11.954.087.954	100	9.575.362.850	100	9.475.362.850	100	9.482.879.250	100	9.482.879.250	100	9.467.879.250	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	80		80		81		82		83		84		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
3	2 7	0 2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Luas tanam tanaman pangan (padi dan jagung) (Ha)	Hektar (Ha)	670	328.538.800	680	311.637.150	700	250.000.000	720	200.000.000	730	200.000.000	734	150.000.000	
				Rasio pengunaan alsintan pra panen	Rasio	0		0,75		0,76		0,77		0,78		0,79		
				Luas areal pengembangan dan peremajaan tanaman perkebunan (Ha)	Hektar (Ha)	25,5		26		26		26		26		26		
				Luas pengembangan tanaman hortikultura (Ha)	Hektar (Ha)	0		0		5		7,5		10		12,5		
3	2 7	0 3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan areal sawah terairi irigasi teknis dan/atau non teknis (%)	%	0	0	2	203.000.000	2	153.000.000	2	242.120.750	2	242.120.750	2	192.120.750	
				Persentase peningkatan areal sawah yang terbuka akses transportasi (%)	Persen (%)	0		0		0,8		0,8		0,8		0,8		
				Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Hektar (Ha)	17.488,61		17.488,61		17.488,61		17.488,61		17.488,61		17.488,61		
				Luas areal tanaman perkebunan yang tersertifikasi (Ha)	Hektar (Ha)	0		0		10		10		10		10		
				Persentase peningkatan areal perkebunan yang terbuka akses transportasi (%)	Persen (%)	0		0		10		15		20		30		
3	2 7	0 5	Program Pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian	Luas lahan tanaman pangan yang terserang OPT yang dikendalikan (Ha)	Hektar (Ha)	0	0	20	50.000.000	25	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	
				Luas lahan tanaman perkebunan yang terserang	Hektar (Ha)	100		100		100		100		100		100		

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
-1			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				OPT yang dikendalikan (Ha)														
				Luas lahan tanaman hortikultura yang terserang OPT yang dikendalikan (Ha)	Hektar (Ha)	0		0		6		7		8		9		
3	27	06	Program perizinan usaha Pertanian	Jumlah surat keterangan peruntukkan lahan (Dokumen)	Dokumen	0	0	1	0	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM tenaga penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang ditingkatkan	%	30	552.528.687	31	300.000.000,00	31	250.000.000,00	31	225.000.000,00	31	225.000.000,00	31	150.000.000,00	
				Persentase SDM petani yang ditingkatkan	%	7		7		7		7		7		7		
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
3	27	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	4.922.313.855	100	4.431.164.535	100	4.291.849.435	100	4.291.849.435	100	4.291.849.435	100	4.291.849.435	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	0		0		80		85		90		100		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
3	27	02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana peternakan	%	0	20.153.200	1	19.153.200,00	1,2	8.468.300,00	1,3	8.468.300,00	1,5	8.468.300	1,6	8.468.300	
3	27	03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase ketersediaan dan pengembangan prasarana peternakan	%	7,11	60.048.000	0	60.000.000,00	0	60.000.000,00	2	60.000.000,00	3	60.000.000	4	60.000.000	
3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase layanan kesehatan hewan	%	10	15.682.200	15	12.682.200,00	20	12.682.200,00	25	12.682.200,00	30	12.682.200,00	35		
				Cakupan pelayanan kesehatan hewan ternak produksi	%	17,00		17,00		17,00		17,00		17,00		17,00		
				Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveilance penyakit dari 5 PHMS)	%	54,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
3	27	06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase pelayanan perizinan bidang peternakan	%	0	0	100	7.000.000,00	100	7.000.000,00	100	7.000.000,00	100	7.000.000	100	7.000.000	
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani terbina	%	0,06	9.710.000	0,07	20.000.065,00	0,08	20.000.065,00	0,09	20.000.065,00	0,1	20.000.065,00	0,11	20.000.065,00	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN															
2	09	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian Pangan	Persentase penyediaan bahan pangan utama terhadap jumlah kebutuhan pangan utama	%	0	0	0	-	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**
2	09	03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase stabilitas koefisien harga pangan utama di tingkat konsumen	%	5	705.192.000	5	510.000.000	5	380.000.000	5	375.000.000	5	375.000.000	5	300.000.000	
				Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	80,80		81,61		82,42		83,25		84,08		84,92		
2	09	04	Program Penanganan Kerawanan pangan	Persentase penurunan Desa/Nagari Rawan Pangan	%	0	100.000.000	1	100.000.000	1	91.637.150,00	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	1	60.000.000,00	
				Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	8,5		7		5,5		4		2,5		1		
2	09	05	Program Pengawasan keamanan pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan mutu keamanan pangan	%	95	0	95	-	95	50.000.000,00	95	40.000.000,00	95	40.000.000,00	95	40.000.000,00	
			SEKRETARIAT DAERAH															
4	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kematangan Organisasi	%	31	37.202.876.852	33	31.548.000.000	35	29.687.500.000	36	28.713.000.000	37	31.591.500.000	39	28.084.000.000	**Sekretariat Daerah**
				Persentase UPP dengan Nilai IPP baik hasil evaluasi mandiri	%	30		30		30		30		30		30		
				Penyusunan LKJiP Tepat Waktu	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Pemenuhan Operasional Pimpinan Sesuai Aturan	%	100		100		100		100		100		100		

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
-1			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Sekretariat Daerah	%	85		86		87		88		89		89		
				Persentase Capaian Rencana Pengemnbangan Kompetensi	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan Pimpinan Sesuai Aturan	%	81		81,5		82		82,5		83		83,5		
				Persentase realisasi anggaran Sekretariat Daerah	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Fasilitasi Keprotokolan kegiatan Daerah yang sesuai aturan	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan yang dilaksanakan sesuai strategi Komunikasi	%	100		100		100		100		100		100		
4	0 1	0 2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang efektif dilaksanakan	%	100	4.914.278.200	100	1.112.000.000	100	909.500.000	100	930.500.000	100	944.500.000	100	929.000.000	
				Indeks Zakat Nasional (IZN)	indeks	0,645		0,67		0,695		0,72		0,745		0,77		
				Persentase produk hukum yang dihasilkan	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase penyelesaian permasalahan Hukum yang difasilitasi	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Kerjasama Wajib yang dilaksanakan	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Administrasi Tata pemerintahan Yang Dilaksanakan	%	100		100		100		100		100		100		
				Penyusunan LPPD Kabupaten tepat waktu	%	100		100		100		100		100		100		
4	0 1	0 3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan pengelolaan perekonomian dan SDA yang Efektf dilaksanakan	%	100	414.070.900	100	630.000.000	100	665.000.000	100	634.000.000	100	705.000.000	100	707.000.000	
				Return on Aset (ROA) BUMD	%	0		0		0		0		0		0		
				Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan	%	1,82		1,88		1,94		2		2,07		2,14		
				Konsumsi listrik per kapita	KwH	654		667,7		682		696,6		711,3		726,2		
				Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks	62		63		64		65		66		67		
				Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0		0		0		0		0		0		
				Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	88		90		91		92		93		95		
				Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	25		30		35		40		45		50		
				Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	90		92		93		94		95		95		
				Persentase kebijakan Administrasi Pembangunan Yang Efektif Dilaksanakan	%	100		100		100		100		100		100		

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
-1			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Persentase Proyek Strategis daerah yang terkendalikan	%	100		100		100		100		100		100		
			SEKRETARIAT DPRD															
4	0 2	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	26.277.626.371	100	21.561.943.430	100	21.421.943.430	100	21.844.093.430	100	20.571.943.430	100	20.136.943.430	**Sekretariat DPRD**
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase penyelenggaraan layanan keuangan dan admnistrasi DPRD dan sekretaraiat DPRD yg difasilitasi	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase penyelenggaraan adminsitrasi umum Perangkat daerah yang difasilitasi	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase sarana dan prasarana pendukung yang disediakan	%	100		100		100		100		100		100		
4	0 2	0 2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Ketepatan penetapan Perda APBD tahun N	%	100	13.456.255.800	100	9.638.056.570	100	8.178.056.570	100	7.255.906.570	100	7.528.056.570	100	6.963.056.570	
				Persentase Penetapan Ranperda tahun N	%	85		86		87		88		89		90		
				Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	90		91		92		93		94		95		
				Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Peningkatan Kapasitas DPRD	%	90		91		92		93		94		95		
			PERENCANAAN															
5	0 1	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	3.632.688.552	100	4.818.000.000	100	3.836.350.300	100	3.912.205.475	100	3.587.961.500	100	3.357.548.200	**Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah**
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	85		85		85		90		95		95		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
5	0 1	0 2	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	93	728.342.500	94	386.000.000	95	302.663.300	96	237.513.825	97	512.075.000	98	696.966.300	
				Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah	%	93		94		95		96		97		98		
				Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	100		100		100		100		100		100		
5	0 1	0 3	Program Koordinasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Pemerinttahan dan Pembangunan Manusia	%	93	215.848.800	94	360.000.000	95	328.991.750	96	319.053.000	97	371.028.000	98	399.339.800	
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	93		94		95		96		97		98		
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA	%	93		94		95		96		97		98		
			KEUANGAN															
5	0 2	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	18.827.718.773	100	14.065.303.900	100	12.925.303.900	100	12.925.303.900	100	12.925.303.900	100	12.925.303.900	**Badan Pengelola Keuangan Daerah**
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	88,6		88,72		88,81		88,87		88,9		89		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
-1			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5	0 2	0 2	Program Pegelolaan Keuangan Daerah	Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	%	45,34	198.905.177.013	42,57	189.802.636.760	29,94	172.302.636.760	29,76	172.402.636.760	29,94	171.302.636.760	29,94	170.302.636.760	
				Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	%	21,79		22,5		23		23,5		24		24,5		
				Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	16,87		12,28		10,14		10,02		10,03		9,98		
				Persentase Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase realisasi anggaran Belanja Wajib Pelayanan Dasar	%	94,591		94,594		94,594		94,594		94,588		94,587		
				Persentase penurunan SILPA	%	-52,84		100		0		0		0		0		
				Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	6,94		6,5		6		5,5		5		4,5		
				Persentase Kepemilikan NPWP	%	32,54		34,02		35,57		37,19		38,88		40,65		
				Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100		100		100		100		100		100		
				Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	-6,904		-6,903		-6,901		-6,901		-6,905		-6,903		
				Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	%	81,403		59,472		49,194		48,605		48,643		48,413		
				Opini Laporan Keuangan	%	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
				Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	89,707		89,71		89,71		89,707		89,708		89,705		
5	0 2	0 3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penambahan nilai aset tetap	%	1	1.013.309.540	1	923.309.540	1	713.309.540	1	713.309.540	1	713.309.540	1	713.309.540	
				Assets Management	Ya	Ya		Ya		Ya		Ya		Ya		Ya		
5	0 2	0 4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	13,241	938.749.800	10,236	758.749.800	8,981	658.749.800	9,297	658.749.800	9,524	658.749.800	9,712	658.749.800	
				Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	-6,401		-6,397		-6,395		-6,396		-6,397		-6,397		
				Cakupan pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase penerapan sistem infromasi keuangan berbasis digital	%	100		100		100		100		100		100		
			KEPEGAWAIAN															
2	0 3	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	33.585.231.010	100	30.400.265.365	100	26.350.265.365	100	26.350.265.365	100	26.350.265.365	100	26.350.265.365	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	86		87		88		89		90		91		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
2	0 3	0 2	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	%	70	722.424.416	71	423.563.356	72	348.563.356	73	348.563.356	74	348.563.356	75	348.563.356	
				Persentase ketersediaan data dan informasi ASN	%	80		81		82		83		84		85		
				Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai kompetensinya	%	50		51		52		53		54		55		
				Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan	%	20		21		22		23		24		25		

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
-1			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				tenaga kesehatan														
				Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	%	75		76		77		78		79		80		
			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
2	0 4	0 2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	50	534.571.800	51	426.171.279	52	351.171.279	53	351.171.279	54	351.171.279	55	351.171.279	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
				Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	20		21		22		23		24		25		
				Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	80		81		82		83		84		85		
			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
5	0 5	0 2	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	%	85	617.000.000	85	96.000.000	90	88.999.650	90	88.827.700	95	87.650.500	100	99.515.700	**Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah**
				Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	%	85		85		90		90		95		100		
				Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	%	75		80		85		90		95		100		
				Persentase fasilitasi, pembinaan, Bimbingan Teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	%	0		75		80		85		90		100		
5	0 5	0 3	Program Riset dan Inovasi Daerah	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	%	90	0	93	40.000.000	95	42.995.000	97	42.400.000	99	41.285.000	100	46.630.000	
				Persentase kajian berbasis buktu dalam pengembangan potensi unggulan daerah	%	0		75		75		80		85		100		
				Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah	%	0		75		75		80		85		100		
				Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	%	80		85		90		95		100		100		
			INSPEKTORAT DAERAH															
5	0 1	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	90	7.406.706.965	100	6.197.042.000	100	5.962.420.000	100	5.962.420.000	100	5.960.990.000	100	5.957.420.000	**Inspektorat Daerah**
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	92		92,2		92,4		92,6		92,8		93		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase APIP yang memenuhi jam pendidikan/pelatihan minimal 120 jam/tahun	%	0		100		100		100		100		100		
6	0	0	Progran Penyelenggaraan	Persentase Ketuntasan Tindak	%	60	513.525.047	70	493.458.000,00	74	385.810.000,00	78	385.810.000,00	82	385.810.000,00	85	385.810.000,00	

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
-1			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1	2	Pengawasan	lanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1														
				Persentase Ketuntasan Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Internal	%	79		79		80		81		82		83		
				Persentase Ketuntasan Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Internal Eksternal	%	60		70		74		78		82		85		
				Persentase pengawasan di Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	%	90		90		90		90		90		90		
				Persentase pengawasan di Bidang perekonomian sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	%	90		90		90		90		90		90		
				Persentase pengawasan di Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan sesuai dengan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	%	90		90		90		90		90		90		
				Persentase pengawasan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	%	90		90		90		90		90		90		
				Persentase perangkat daerah yang memperoleh Nilai Minimal BB	%	50		55		60		65		70		75		
				Nilai Penanganan Kejadian Korupsi	%	73		75		77		80		83		85		
6	0 1	0 3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	%	80	51.874.000	80	109.500.000	80	97.770.000	80	99.200.000	80	99.200.000	80	99.200.000	
				Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	%	80		80		80		80		80		80		
				Jumlah OPD yang memperoleh Predikat WBK/WBBM	Perangkat Daerah	1		1		1		1		1		1		
				Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Nagari	%	80		80		80		80		80		80		
				Persentase pemenuhan key Process Area pada penilaian Mandiri berdasarkan standar IACM	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase fasilitasi pengawasan manajemen risiko	%	100		100		100		100		100		100		
				Nilai Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi	%	73		75		77		80		83		85		
				Nilai Penerapan Strategi Pencegahan Korupsi	%	73		75		77		80		83		85		
			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
8	0 1	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	1.374.003.704	100	1.136.019.779	100	1.098.040.510	100	1.095.015.999	100	1.092.015.999	100	1.098.515.999	**Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	100		87		88		89		90		91		

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
-1			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	85	630.346.000	87	425.564.221	88	421.534.221,00	90	422.534.221,00	92	422.534.221,00	94	422.534.221,00	
8	01	03	Program Peningkatan Peran Parta Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	%	85	1.013.646.000	87	1.024.206.000	88	1.018.216.000,00	90	1.030.206.000,00	92	4.026.740.511,00	94	1.030.206.000,00	
8	01	04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi	Persentase organisasi kemasyarakatan yang terdaftar dan aktif	%	91	3.000.000	93	17.500.000	94	20.000.000,00	95	16.034.511,00	96	17.500.000,00	98	17.500.000,00	
8	01	05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah Yang dilaksanakan	%	80	9.350.000	78	13.710.000	75	12.710.000,00	73	11.710.000,00	72	11.710.000,00	70	11.710.000,00	
8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	%	92	166.552.000	94	113.000.000	95	89.499.269,00	97	84.499.269,00	98	89.499.269,00	100	79.533.780,00	
			KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG															
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	734.420.669	100	640.050.000	100	620.050.000	100	620.050.000	100	620.050.000	100	620.050.000	**2x11 Anam Lingkuang**
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84,00		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	7.230.000	3,15	3.500.000	3,45	3.500.000	3,65	3.500.000	3,95	3.500.000	4,25	3.500.000	
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	22.650.000	100	21.450.000	100	21.450.000	100	21.450.000	100	21.450.000	100	21.450.000	
				Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	30		35		40		45		50		60		
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	1.850.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	2.500.000,00	100	2.500.000,00	100	2.500.000,00	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan	%	20	11.075.000	22	9.000.000	25	9.500.000	27	9.500.000	30	9.500.000	35	9.500.000	
				Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	25	1.730.000	40	3.000.000	55	3.000.000	65	3.000.000	85	3.000.000	100	3.000.000	
			KECAMATAN 2X11 KAYU TANAM															
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	698.975.652	100	644.460.000	100	616.950.000	100	613.940.000	100	617.770.000	100	611.430.000	**2x11 Kayu Tanam**
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84,00		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	0	3,15	13.440.000	3,45	6.450.000	3,65	13.700.000	3,95	8.130.000	4,25	14.950.000	
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100		100		
7	0	0	Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Lembaga	%	100	5.010.950	100	9.000.000	100	13.000.000	100	9.000.000	100	10.500.000	100	10.500.000	

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
-1			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1	3	Desa dan Kelurahan	Kemasyarakatan Yang Aktif														
				Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	30		35		40		45		50		60		
7	0 1	0 4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	0	100	1.440.000	100	1.440.000	100	1.440.000	100	1.440.000	100	1.200.000	
7	0 1	0 5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan	%	70	16.720.250	75	10.220.000	80	20.720.000	85	20.720.000	90	20.720.000	95	20.480.000	
				Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100		100		100		100		100		100		
7	0 1	0 6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	25	0	40	1.440.000	55	1.440.000,00	65	1.200.000,00	85	1.440.000,00	100	1.440.000,00	
			KECAMATAN BATANG GASAN															
7	0 1	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	677.485.093	100	634.040.000	100	606.240.000	100	605.900.000	100	604.440.000	100	605.500.000	**Batang Gasan**
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84,00		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
7	0 1	0 2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	3.540.000	3,15	5.960.000	3,45	3.000.000	3,65	3.000.000	3,95	3.560.000	4,25	3.000.000	
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100		100		
7	0 1	0 3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	1.000.000	100	18.000.000	100	17.760.000	100	18.000.000	100	18.000.000	100	17.000.000	
				Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	30		35		40		45		50		60		
7	0 1	0 4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	1.000.000	100	2.500.000	100	2.000.000,00	100	2.100.000,00	100	2.000.000,00	100	2.500.000,00	
7	0 1	0 5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan	%	70	16.400.000	75	17.500.000	80	19.000.000	85	19.000.000	90	20.000.000	95	20.000.000	
				Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100		100		100		100		100		100		
7	0 1	0 6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	25	910.000	40	2.000.000	55	2.000.000,00	65	2.000.000,00	85	2.000.000,00	100	2.000.000,00	
			KECAMATAN BATANG ANAI															
7	0 1	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	773.122.554	100	693.770.000	100	683.670.000	100	683.670.000	100	683.670.000	100	683.670.000	**Batang Anai**
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84,00		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
7	0 1	0 2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	6.750.000	3,15	7.650.000	3,45	7.750.000	3,65	7.750.000	3,95	7.750.000	4,25	7.750.000	
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100		100		
7	0 1	0 3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	30.220.000	100	16.220.000	100	16.220.000	100	16.220.000	100	16.220.000	100	16.220.000	
				Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	30		35		40		45		50		60		
7	0 1	0 4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	2.160.000	100	2.160.000	100	2.160.000,00	100	2.160.000,00	100	2.160.000,00	100	2.160.000,00	
7	0 1	0 5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan	%	70	5.760.000	75	5.760.000	80	5.760.000	85	5.760.000	90	5.760.000	95	5.760.000	

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
-1			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100		100		100		100		100		100		
7	0 1	0 6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	25	3.945.000	40	4.440.000	55	4.440.000,00	65	4.440.000,00	85	4.440.000,00	100	4.440.000,00	
			KECAMATAN ANAM LINGKUANG															
7	0 1	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	720.661.108	100	651.660.000	100	631.640.000	100	631.640.000	100	631.640.000	100	631.640.000	**Anam Lingkuang**
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84,00		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
7	0 1	0 2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	5.160.000	3,15	10.480.000	3,45	7.500.000	3,65	7.500.000	3,95	7.500.000	4,25	7.500.000	
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100		100		
7	0 1	0 3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	19.419.500	100	15.160.000,00	100	18.160.000,00	100	18.160.000,00	100	18.160.000,00	100	18.160.000,00	
				Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	30		35		40		45		50		60		
7	0 1	0 4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	1.120.000	100	1.200.000	100	1.200.000	100	1.200.000	100	1.200.000	100	1.200.000	
7	0 1	0 5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan	%	70	0	75	-	80	-	85	-	90	-	95	-	
				Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100		100		100		100		100		100		
7	0 1	0 6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	25	1.440.000	40	1.500.000	55	1.500.000,00	65	1.500.000,00	85	1.500.000,00	100	1.500.000,00	
			KECAMATAN IV KOTO AUA MALINTANG															
7	0 1	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	523.367.086	100	527.000.000	100	488.400.000	100	477.740.000	100	477.740.000	100	477.740.000	**IV Koto Aua Malintang**
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84,00		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
7	0 1	0 2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	36.153.000	3,15	11.200.000		6.500.000	3,65	13.200.000	3,95	13.200.000	4,25	13.200.000	
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100		100		
7	0 1	0 3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	26.866.500	100	17.000.000	100	14.500.000	100	15.460.000	100	15.460.000	100	15.460.000	
				Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	30		35		40		45		50		60		
7	0 1	0 4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	710.000	100	500.000	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	
7	0 1	0 5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan	%	70	23.250.000	75	22.000.000	80	17.500.000	85	20.200.000	90	20.200.000	95	20.200.000	
				Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100		100		100		100		100		100		
7	0 1	0 6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	25	7.457.000	40	2.300.000	55	2.100.000,00	65	2.400.000,00	85	2.400.000,00	100	2.400.000,00	
			KECAMATAN LUBUAK ALUANG															
7	0 1	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	762.575.321	100	657.241.000	100	652.234.000	100	652.234.000	100	652.234.000	100	652.234.000	**Lubuak Aluang**
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84,00		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
-1			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
7	0 1	0 2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	11.290.000	3,15	7.830.000	3,45	7.290.000	3,65	7.290.000	3,95	7.290.000	4,25	7.290.000	
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100		100		
7	0 1	0 3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	36.667.000	100	21.540.000	100	20.967.000	100	20.967.000	100	20.967.000	100	20.967.000	
				Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	30		35		40		45		50		60		
7	0 1	0 4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	6.815.000	100	6.815.000	100	6.815.000,00	100	6.815.000,00	100	6.815.000,00	100	6.815.000,00	
7	0 1	0 5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Partai Politik yang Aktif di Kecamatan	%	70	16.774.000	75	55.604.000	80	16.774.000	85	16.774.000	90	16.774.000	95	16.774.000	
				Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100		100		100		100		100		100		
7	0 1	0 6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	25	5.920.000	40	5.920.000	55	5.920.000	65	5.920.000	85	5.920.000	100	5.920.000	
			KECAMATAN NAN SABARIS															
7	0 1	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	676.170.433	100	655.000.000	100	620.000.000	100	620.000.000	100	620.000.000	100	620.000.000	**Nan Sabaris**
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84,00		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
7	0 1	0 2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	16.712.500	3,15	17.300.000	3,45	17.200.000	3,65	17.200.000	3,95	17.200.000	4,25	17.200.000	
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100		100		
7	0 1	0 3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	21.842.000	100	26.000.000	100	22.000.000	100	22.000.000	100	22.000.000	100	22.000.000	
				Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	30		35		40		45		50		60		
7	0 1	0 4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	3.786.500	100	4.200.000	100	3.800.000	100	3.800.000,00	100	3.800.000,00	100	3.800.000,00	
7	0 1	0 5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Partai Politik yang Aktif di Kecamatan	%	70	26.756.500	75	22.000.000	80	20.000.000	85	20.000.000	90	20.000.000	95	20.000.000	
				Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100		100		100		100		100		100		
7	0 1	0 6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	25	760.000	40	1.200.000	55	1.000.000	65	1.000.000,00	85	1.000.000,00	100	2.300.000,00	
			KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO															
7	0 1	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	701.577.917	100	660.933.500	100	619.281.000	100	619.281.000	100	619.201.000	100	619.201.000	**VII Koto Padang Sago**
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84,00		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
7	0 1	0 2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	2.725.000	3,15	2.725.000	3,45	2.340.000	3,65	2.340.000	3,95	2.340.000	4,25	2.340.000	
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100		100		
7	0 1	0 3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	19.061.500	100	19.061.500	100	13.919.000	100	13.919.000	100	13.919.000	100	13.919.000	
				Persentase UKM yang difasilitasi dalam	%	30		35		40		45		50		60		

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
-1			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Pengembangan Usaha														
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	1.090.000	100	1.090.000	100	1.090.000,00	100	1.090.000,00	100	1.090.000,00	100	1.090.000,00	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Partai Politik yang Aktif di Kecamatan	%	70	29.164.000	75	19.430.000	80	22.430.000	85	22.430.000	90	22.430.000	95	22.430.000	
				Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	25	1.760.000	40	1.760.000	55	940.000,00	65	940.000,00	85	1.020.000,00	100	1.020.000,00	
			KECAMATAN VII KOTO PATAMUAN															
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	735.107.964	100	661.058.000	100	641.042.000	100	641.042.000	100	641.042.000	100	641.042.000	**VII Koto Patamuan**
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84,00		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	2.540.000	3,15	16.438.000	3,45	16.454.000	3,65	16.454.000	3,95	16.454.000	4,25	16.454.000	
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	18.132.000	100	10.402.000	100	10.402.000	100	10.402.000	100	10.402.000	100	10.402.000	
				Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	30		35		40		45		50		60		
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	1.800.000	100	1.800.000	100	1.800.000,00	100	1.800.000,00	100	1.800.000,00	100	1.800.000,00	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan	%	70	10.800.000	75	8.502.000	80	8.502.000	85	8.502.000	90	8.502.000	95	8.502.000	
				Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	25	1.800.000	40	1.800.000	55	1.800.000,00	65	1.800.000,00	85	1.800.000,00	100	1.800.000,00	
			KECAMATAN SUNGAI GARINGGIANG															
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	746.616.162	100	670.944.401	100	618.600.000	100	618.600.000	100	618.600.000	100	618.600.000	**Sungai Garinggiang**
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84,00		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	6.590.000	3,15	15.104.599	3,45	5.500.000	3,65	5.500.000	3,95	5.500.000	4,25	5.500.000	
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	5.351.000	100	12.351.000	100	3.900.000	100	3.900.000	100	3.900.000	100	3.900.000	
				Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	30		35		40		45		50		60		
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	1.260.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan	%	70	24.670.000	75	25.600.000	80	26.000.000	85	26.000.000	90	26.000.000	95	26.000.000	
				Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100		100		100		100		100		100		
7	0	0	Program Pembinaan dan	Persentase Desa Mandiri di	%	25	2.400.000	40	4.000.000	55	4.000.000	65	4.000.000	85	4.000.000	100	4.000.000	

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
-1			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1	6	Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan														
			KECAMATAN SUNGAI LIMAU															
7	0 1	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	720.661.108	100	633.660.000	100	534.640.000	100	534.640.000	100	534.640.000	100	534.640.000	**Sungai Limau**
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84,00		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
7	0 1	0 2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	5.160.000	3,15	10.480.000	3,45	7.500.000	3,65	7.500.000	3,95	7.500.000	4,25	7.500.000	
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100		100		
7	0 1	0 3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	17.419.500	100	13.160.000	100	15.160.000	100	15.160.000	100	15.160.000	100	15.160.000	
				Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	30		35		40		45		50		60		
7	0 1	0 4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	1.120.000	100	1.200.000	100	1.200.000,00	100	1.200.000,00	100	1.200.000,00	100	1.200.000,00	
7	0 1	0 5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan	%	70	0	75	40.000.000	80	60.000.000	85	60.000.000	90	60.000.000	95	60.000.000	
				Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100		100		100		100		100		100		
7	0 1	0 6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	25	1.440.000	40	1.500.000	55	1.500.000,00	65	1.500.000,00	85	1.500.000,00	100	1.500.000,00	
			KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG															
7	0 1	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	702.007.872	100	656.780.552	100	626.500.000	100	621.500.000	100	623.000.000	100	614.299.970	**Sintuak Toboh Gadang**
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84,00		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
7	0 1	0 2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	4.210.000	3,15	4.710.000	3,45	8.000.000	3,65	8.000.000	3,95	8.000.000	4,25	8.000.000	
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100		100		
7	0 1	0 3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	17.740.000	100	24.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	
				Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	30		35		40		45		50		60		
7	0 1	0 4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	1.500.000	100	2.000.000	100	3.500.000,00	100	3.500.000,00	100	4.000.000,00	100	5.700.000,00	
7	0 1	0 5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan	%	70	7.999.000	75	6.740.000	80	15.000.000	85	20.000.000	90	18.000.000	95	25.000.000	
				Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100		100		100		100		100		100		
7	0 1	0 6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	25	5.700.000	40	3.500.000	55	2.000.000,00	65	2.000.000,00	85	2.000.000,00	100	2.000.000,00	
			KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH															
7	0 1	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	678.496.153	100	676.084.428	100	641.580.000	100	612.015.630	100	611.020.532	100	611.086.705	**Ulakan Tapakih**
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84,00		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
7	0	0	Program Penyelenggaraan	Nilai PEKPPP Mandiri	%	2,95	7.630.000	3,15	7.630.000	3,45	18.000.000	3,65	19.000.000	3,95	19.000.000	4,25	19.000.000	

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
-1			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1	2	Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan														
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100		100		
7	0 1	0 3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	25.235.000	100	25.760.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	
				Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	30		35		40		45		50		60		
7	0 1	0 4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	2.960.000	100	4.870.000	100	4.950.000,00	100	5.500.000,00	100	5.700.000,00	100	5.700.000,00	
7	0 1	0 5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan	%	70	8.105.000	75	12.915.000	80	23.000.000	85	23.500.000	90	23.500.000	95	23.500.000	
				Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100		100		100		100		100		100		
7	0 1	0 6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	25	0	40	-	55	-	65	2.000.000,00	85	2.300.000,00	100	2.300.000,00	
			KECAMATAN V KOTO TIMUR															
7	0 1	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	583.090.261	100	525.100.000	100	502.900.000	100	502.900.000	100	502.900.000	100	502.900.000	**V Koto Timur**
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84,00		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
7	0 1	0 2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	6.000.000	3,15	3.000.000	3,45	3.500.000	3,65	3.500.000	3,95	3.500.000	4,25	3.500.000	
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100		100		
7	0 1	0 3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	27.921.500	100	26.900.000	100	26.400.000	100	26.400.000	100	26.400.000	100	26.400.000	
				Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	30		35		40		45		50		60		
7	0 1	0 4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	46.500.000	100	3.000.000	100	3.600.000,00	100	3.600.000,00	100	3.600.000,00	100	3.600.000,00	
7	0 1	0 5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan	%	70	29.450.000	75	40.000.000	80	40.000.000	85	40.000.000	90	40.000.000	95	40.000.000	
				Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100		100		100		100		100		100		
7	0 1	0 6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	25	2.240.000	40	2.000.000	55	3.600.000,00	65	3.600.000,00	85	3.600.000,00	100	3.600.000,00	
			KECAMATAN V KOTO															
7	0 1	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	716.195.608	100	647.350.000	100	622.150.000	100	623.019.983	100	622.500.000	100	622.500.000	**V Koto**
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84,00		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
7	0 1	0 2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	1.520.000	3,15	2.500.000	3,45	5.000.000	3,65	5.000.000	3,95	5.000.000	4,25	5.000.000	
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100		100		
7	0 1	0 3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	12.515.000	100	12.650.000	100	12.850.000	100	12.480.017	100	13.000.000	100	13.000.000	
				Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	30		35		40		45		50		60		

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
-1			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	690.000	100	1.500.000	100	3.000.000,00	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan	%	70	14.190.000	75	14.500.000	80	15.000.000	85	15.500.000	90	15.500.000	95	15.500.000	
				Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	25	690.000	40	1.500.000	55	2.000.000,00	65	2.000.000,00	85	2.000.000,00	100	2.000.000,00	
			KECAMATAN VII KOTO															
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	774.036.073	100	651.090.000	100	596.620.000	100	596.120.000	100	596.120.000	100	596.120.000	**VII Koto**
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84,00		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	20.890.000	3,15	24.130.000	3,45	19.000.000	3,65	19.500.000	3,95	19.500.000	4,25	19.500.000	
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	22.360.000	100	22.800.000	100	18.500.000	100	18.500.000	100	18.500.000	100	18.500.000	
				Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	30		35		40		45		50		60		
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	6.280.000	100	8.000.000	100	6.000.000,00	100	6.000.000,00	100	6.000.000,00	100	6.000.000,00	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan	%	70	15.515.000	75	19.000.000	80	16.000.000	85	16.000.000	90	16.000.000	95	16.000.000	
				Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100		100		100		100		100		100		
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	25	4.580.000	40	4.980.000	55	3.880.000,00	65	3.880.000,00	85	3.880.000,00	100	3.880.000,00	

BAB V
PENUTUP

5.1. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN RPJMD.

5.1.1. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah serta mengantisipasi belum tersusunnya RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029, maka RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 tetap dijadikan pedoman dalam penyusunan RKPD dan RAPBD pada tahun pertama pemerintahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Umum berikutnya. Penyusunan tersebut tetap mengacu pada arah pembangunan jangka panjang daerah melalui RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2045 dan tetap selaras dengan kebijakan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2025–2029.

5.1.2 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang harus dijalankan secara tertib, efisien, efektif, dan bertanggung jawab. RPJMD ini menjadi pedoman utama bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun ke depan, sekaligus menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya.

Sebagai bagian dari tatanan pembangunan daerah yang selaras dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029, pelaksanaan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman juga mengacu pada prinsip-prinsip koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan untuk memastikan implementasi yang konsisten, partisipatif, transparan, dan inovatif, dengan mengedepankan prinsip kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen untuk:

1. Menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Padang Pariaman kepada seluruh masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik.
2. Mengarahkan seluruh potensi daerah secara optimal dalam mencapai sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan;
3. Memastikan seluruh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan strategis sesuai dengan arah kebijakan dalam RPJMD.

4. Mewajibkan seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra dengan berpedoman pada dokumen RPJMD sebagai acuan dalam perencanaan dan penganggaran tahunan.
5. Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
6. Seluruh Perangkat Daerah mempedomani RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
7. Penetapan target indikator kinerja daerah dalam RPJMD 2025-2029 dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah Daerah dengan DPRD.
8. RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya mulai dari tahun 2025-2029.
9. RKPD Kabupaten Padang Pariaman merupakan dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya yang sebelumnya dirumuskan dalam Kebijakan Umu Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
10. Program yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan didukung oleh instansi vertikal serta masyarakat dan dunia usaha.
11. Program dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 adalah program yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

5.2. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD

Pengendalian pelaksanaan RPJMD merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi program dan kegiatan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan rencana, target, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Pengendalian dilakukan secara berkelanjutan guna mengidentifikasi deviasi, hambatan, maupun potensi akselerasi pencapaian sasaran pembangunan.

Evaluasi pelaksanaan RPJMD bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, relevansi, dan keberlanjutan pelaksanaan pembangunan daerah dalam kerangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah. Evaluasi dilakukan berdasarkan capaian indikator kinerja utama daerah, indikator kinerja sasaran, serta indikator kinerja perangkat daerah.

5.2.1. Pengendalian Pelaksanaan RPJMD

Pengendalian pelaksanaan RPJMD bertujuan untuk menjamin tercapainya sasaran utama pembangunan daerah dengan cara memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Proses ini juga mencakup penyusunan rekomendasi kebijakan sebagai respons terhadap dinamika pelaksanaan di lapangan.

Pengendalian dilakukan secara menyeluruh dan terpadu oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dalam prosesnya, pengendalian tidak hanya berfokus pada kesesuaian pelaksanaan dengan sasaran yang direncanakan, namun juga memperhatikan kontribusi berbagai intervensi, baik nasional maupun lokal, yang mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Pendekatan pengendalian RPJMD juga mengintegrasikan prinsip manajemen risiko dalam setiap tahapan pelaksanaan tahunan. Identifikasi tingkat risiko dan langkah-langkah mitigasi dilakukan secara berkala guna meningkatkan efektivitas kebijakan dan mencegah potensi hambatan dalam pencapaian sasaran. Proses ini memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan senantiasa adaptif terhadap perubahan dan tantangan yang dihadapi.

Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan monitoring dan supervisi atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam dokumen RPJMD. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan serta mampu mencapai target yang telah dirumuskan. Bila ditemukan adanya deviasi atau ketidaksesuaian, langkah-langkah korektif dan perbaikan akan segera dilakukan agar pelaksanaan pembangunan tetap berada dalam jalur yang tepat menuju tujuan pembangunan daerah.

Pengendalian pelaksanaan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 diarahkan untuk mendorong terciptanya tindakan korektif yang berkelanjutan sepanjang periode perencanaan. Tujuan utamanya adalah menjamin pelaksanaan pembangunan daerah tetap selaras dengan sasaran dan prioritas yang telah ditetapkan. Tindakan korektif yang dimaksud mencakup dua pendekatan utama:

a. Tindakan operasional tahunan, yakni penyesuaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan agar tetap sesuai dengan arah perencanaan. Penyesuaian ini dapat berupa perbaikan strategi, percepatan pelaksanaan, penyesuaian teknis di lapangan, serta optimalisasi dukungan kelembagaan dan regulasi pelaksanaan.
b. Tindakan kebijakan, yaitu penyesuaian dalam kerangka perencanaan strategis selama periode RPJMD. Penyesuaian ini dapat mencakup penghentian program/proyek yang tidak lagi relevan (terminasi), penajaman lokasi dan sasaran intervensi, penyusunan ulang strategi pelaksanaan, serta penyesuaian kelembagaan dan regulasi yang mendukung pencapaian target pembangunan.

Tindak lanjut dari upaya pengendalian tersebut dilandaskan pada hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 yang saling terkait dan terintegrasi dalam sistem manajemen pembangunan daerah.

a. Pemantauan pelaksanaan RPJMD dilakukan secara berkala untuk melihat perkembangan pelaksanaan prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, kementerian/lembaga, maupun mitra pembangunan lainnya. Pemantauan ini juga mencakup pelaksanaan mitigasi risiko pembangunan daerah dan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan RKPD setiap tahun. Hasil pemantauan ini menjadi dasar untuk pengambilan keputusan pengendalian yang bersifat operasional.
b. Evaluasi pelaksanaan RPJMD dilakukan dalam dua tahapan:

- Evaluasi tahunan, dilakukan melalui evaluasi pelaksanaan RKPD serta capaian kinerja perangkat daerah terhadap indikator sasaran pembangunan daerah.
- Evaluasi Triwulanan, yang bertujuan memberikan umpan balik strategis untuk penyesuaian kebijakan dan arah pembangunan dalam sisa masa RPJMD, agar tujuan akhir dapat tercapai secara optimal.

5.2.2. Evaluasi Akhir Pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029

Evaluasi akhir RPJMD dilaksanakan pada penghujung tahun terakhir masa berlakunya dokumen RPJMD, dan dapat diperbarui paling lambat pada triwulan pertama tahun berikutnya setelah periode RPJMD berakhir. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pencapaian sasaran pembangunan daerah selama lima tahun, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala, hambatan, maupun faktor pendukung dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah.

Proses evaluasi akhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 mencakup penilaian terhadap capaian kinerja pembangunan serta efektivitas kebijakan dan program strategis yang telah dijalankan. Hasil evaluasi ini akan menjadi masukan penting dalam proses perumusan arah kebijakan pembangunan untuk periode RPJMD selanjutnya, serta menjadi bagian integral dari penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2045.

5.3. MANAJEMEN RISIKO PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 tidak hanya menitikberatkan pada perumusan tujuan dan sasaran pembangunan, namun juga memperhatikan aspek pengelolaan risiko secara terstruktur. Manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan daerah menjadi bagian penting dari sistem pengendalian internal pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengantisipasi ketidakpastian dan memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Penerapan manajemen risiko pada penyusunan RPJMD ini dilaksanakan dalam kerangka mendorong terciptanya perencanaan yang adaptif terhadap dinamika internal maupun eksternal, sekaligus sebagai upaya untuk menghindari potensi kegagalan dalam pencapaian tujuan pembangunan. Risiko dalam konteks pembangunan daerah dapat bersumber dari berbagai faktor, seperti perubahan kebijakan nasional, fluktuasi pendapatan daerah, keterbatasan kapasitas kelembagaan, maupun ketidaksesuaian antara rencana dan penganggaran. Jika tidak diidentifikasi dan dikelola secara sistematis, risiko-risiko tersebut dapat berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan. :

Oleh karena itu, dalam penyusunan dan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman, manajemen risiko diterapkan melalui dua tahapan utama, yaitu :

1) Pengendalian pada tahap perencanaan
   a. Konsistensi dokumen perencanaan, pengendalian ini dilakukan untuk memastikan keterpaduan substansi antar dokumen perencanaan pembangunan yang mencakup keselarasan tujuan, sasaran dan indikator kinerja pembangunan serta kesinambungan antara kebijakan, program, hingga kegiatan indikatif. Konsistensi ini harus tercermin dalam keterhubungan hierarkis dokumen, mulai dari RPJPD dengan RPJPN, RPJMD dengan RPJMN, RKPD dengan RKP dan RPJMD, hingga Renstra dan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan.

   b. Penetapan prioritas pembangunan: Pengendalian diarahkan pada pemilahan program prioritas yang didasarkan pada urgensi permasalahan pembangunan, serta dirumuskan secara terukur, terarah, dan memiliki kerangka waktu pelaksanaan yang jelas, disertai indikator keberhasilan yang dapat dimonitor dan dievaluasi.

   c. Keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran: Pengendalian juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan memperoleh dukungan alokasi anggaran yang memadai, sehingga dapat diimplementasikan secara optimal sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan daerah.

   d. Identifikasi dan mitigasi risiko perencanaan: Dalam rangka menjamin ketahanan pelaksanaan rencana pembangunan, dilakukan identifikasi terhadap potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian sasaran. Proses ini meliputi pengenalan terhadap jenis risiko, penyebabnya, serta dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap capaian pembangunan. Risiko diklasifikasikan berdasarkan sumber (internal atau eksternal) dan tingkat dampaknya, serta ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana mitigasi yang bertujuan untuk mengurangi tingkat risiko sekaligus

menjaga efektivitas implementasi program, sehingga manfaat pembangunan tetap dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat

2) Pengendalian pada tahap pelaksanaan
Pengendalian dalam tahapan pelaksanaan dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh proses pembangunan dijalankan sesuai dengan arah, kebijakan, serta rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Mekanisme pengendalian ini dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi rencana pembangunan jangka menengah maupun jangka pendek, yang mencakup:
a. Pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.
b. Evaluasi atas capaian sasaran prioritas pembangunan daerah, berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
c. Evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan yang mencakup Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD), serta Indikator Kinerja Program yang berkontribusi terhadap tercapainya tujuan pembangunan.

Agar pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan berdaya guna, diperlukan dukungan kebijakan dan regulasi yang kuat. Regulasi ini perlu menyinergikan aspek pemantauan, evaluasi, manajemen risiko pembangunan, serta manajemen kinerja daerah. Harmonisasi regulasi tersebut menjadi kunci dalam menjaga keterpaduan, keselarasan, dan konsistensi implementasi pengendalian terhadap seluruh tahapan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Lebih lanjut, untuk menjamin kualitas dan relevansi pengendalian, regulasi yang berlaku harus dievaluasi secara berkala serta disesuaikan dengan perkembangan kebijakan nasional dan dinamika pembangunan daerah.

5.4. TATA KELOLA SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN

5.4.1 Memperkuat Tata Kelola Pembangunan dan Mendorong Transformasi Digital Daerah

Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pembangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman menempatkan tata kelola pembangunan yang didukung oleh transformasi digital dan pengelolaan data yang berkualitas sebagai elemen strategis yang tak terpisahkan. Di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan dinamika kebutuhan masyarakat, data yang andal, akurat, mutakhir, dan terintegrasi menjadi landasan utama bagi perencanaan yang berbasis bukti (*evidence-based planning*), pengambilan kebijakan yang tepat sasaran, serta evaluasi program yang akuntabel dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan tata kelola pembangunan yang lebih adaptif dan responsif, Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman secara aktif mengadopsi dan menginternalisasi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Kebijakan ini mendorong penguatan tata kelola data melalui peningkatan standardisasi, interoperabilitas, dan kolaborasi lintas sektor guna menghindari duplikasi data, serta memastikan sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

Transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah tidak hanya difokuskan pada penyediaan infrastruktur teknologi informasi, tetapi juga mencakup pembenahan sistem dan proses bisnis pemerintahan agar lebih efisien, transparan, dan terintegrasi. Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman terus mendorong penguatan kapasitas Perangkat Daerah (OPD) dalam pengelolaan data sektoral yang terstandar, termasuk penggunaan metadata, kode referensi, serta platform berbagi pakai data yang mendukung keterpaduan informasi antar sektor dan antar tingkatan pemerintahan.

Pemanfaatan data dalam siklus pembangunan daerah, dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat dan berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan. Melalui integrasi sistem informasi pembangunan daerah dengan pendekatan digital yang progresif, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap dapat mendorong perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap perubahan, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memperkuat pengawasan pembangunan secara *real-time*.

Dengan demikian, penguatan tata kelola pembangunan berbasis data dan transformasi digital bukan hanya menjadi instrumen teknis, tetapi merupakan strategi fundamental untuk membangun pemerintahan daerah yang terbuka, inovatif, dan berorientasi hasil (*result-oriented governance*). Upaya ini akan terus dikawal melalui pembaruan regulasi, penguatan kelembagaan, serta peningkatan literasi data di seluruh perangkat daerah, guna memastikan konsistensi pelaksanaan pembangunan yang selaras dengan arah kebijakan nasional dan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Padang Pariaman.

5.4.2. Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Padang Pariaman

Sebagai bentuk komitmen terhadap pelaksanaan kebijakan nasional Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menempatkan pembangunan Portal Satu Data Indonesia Daerah (SDID) sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola data yang terbuka, akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Portal ini dirancang sebagai simpul utama dalam sistem informasi pembangunan daerah, yang berfungsi tidak hanya sebagai pusat data, tetapi juga sebagai landasan utama dalam pengambilan keputusan berbasis bukti

(*evidence-based policymaking*), penyusunan perencanaan, serta evaluasi pembangunan yang lebih objektif dan terukur.

Sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, portal Satu Data Kabupaten Padang Pariaman diharapkan menjadi *single source of truth* bagi seluruh data sektoral yang dikelola oleh Perangkat Daerah (OPD). Penguatan fungsi portal ini akan mendukung interoperabilitas antar sistem informasi daerah dan nasional, sehingga mampu mendorong efisiensi pertukaran data lintas sektor, menghindari redundansi informasi, serta meningkatkan koordinasi lintas instansi. Keberadaan portal tersebut juga diharapkan mempercepat agenda transformasi digital pemerintahan daerah melalui konektivitas layanan publik yang semakin transparan, akuntabel, dan terintegrasi.

Keberhasilan pengelolaan portal Satu Data di tingkat kabupaten akan sangat ditentukan oleh kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Satu Data Indonesia, termasuk penetapan walidata dan produsen data, penerapan standar data dan metadata, serta penggunaan kode referensi yang seragam. Dengan adanya ekosistem data yang tertata, terbuka, dan mudah diakses, proses perencanaan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dapat dilakukan secara lebih responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan.

Optimalisasi Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Padang Pariaman diharapkan mampu memperkuat sinergi antarpelaku pembangunan, mulai dari sektor publik, swasta, akademisi, hingga masyarakat sipil, dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif, berbasis bukti, dan berorientasi pada hasil (*result-oriented development*). Dengan demikian, portal ini tidak hanya menjadi alat bantu teknis, tetapi juga pondasi utama dalam membangun tata kelola pembangunan yang lebih adaptif, transparan, dan berkelanjutan.

5.4.3 Satu Data Indonesia Padang Pariaman

Sebagai langkah strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen untuk mengakselerasi implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah. Kebijakan ini tidak hanya menjadi bagian integral dari agenda reformasi birokrasi, tetapi juga merupakan fondasi penting dalam mempercepat transformasi layanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penguatan infrastruktur data melalui pendekatan integratif antar perangkat daerah bertujuan untuk menciptakan ekosistem data yang terstandar, terbuka, dan interoperabel. Dengan demikian, proses perencanaan pembangunan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi program dapat dilakukan secara lebih efisien dan berbasis bukti yang valid (*evidence-based policy*). Sistem data yang terintegrasi akan memberikan landasan yang kokoh bagi pengambilan keputusan strategis yang lebih tepat sasaran, kontekstual, dan adaptif terhadap dinamika lokal.

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Padang Pariaman diharapkan mampu menjadi simpul penghubung lintas sektor

dan antar-level pemerintahan, memperkuat sinergi perencanaan pembangunan antara kabupaten, provinsi, dan pusat. Pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola data juga akan mendorong akselerasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan.

Keberhasilan kebijakan ini akan sangat menentukan dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan memperluas akses informasi yang berkualitas bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, Kabupaten Padang Pariaman akan memiliki keunggulan dalam membangun sistem pemerintahan yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

5.5. KOLABORASI MULTIPIHAK DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka mewujudkan proses pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, pendekatan kolaborasi multipihak menjadi salah satu strategi yang fundamental. Kolaborasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah pusat dan daerah, DPRD, dunia usaha, masyarakat sipil, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, media massa, hingga kelompok rentan. Prinsip-prinsip partisipatif, inklusivitas, transparansi, keadilan, akuntabilitas, kemitraan, sinergi, dan keberlanjutan menjadi landasan dalam penyelenggaraan kolaborasi tersebut.

Pada tingkat daerah, penerapan kolaborasi multipihak dilakukan secara menyeluruh dalam setiap tahapan siklus perencanaan pembangunan, baik dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka pendek, serta dokumen perencanaan perangkat daerah. Kolaborasi ini mencakup tahapan perumusan, penetapan, pelaksanaan, hingga pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan.

Adapun ruang lingkup kolaborasi multipihak pada masing-masing tahapan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap Penyusunan

   Kolaborasi multipihak bertujuan untuk menghimpun berbagai aspirasi, kebutuhan, dan masukan dari pemangku kepentingan, sehingga perumusan arah kebijakan, sasaran, dan prioritas pembangunan benar-benar mencerminkan kondisi objektif dan kebutuhan masyarakat. Kegiatan yang umumnya dilaksanakan pada tahap ini meliputi forum konsultasi publik, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), forum perangkat daerah, diskusi tematik, seminar kebijakan, hingga forum akademik

2. Tahap Penetapan

   Pada tahap ini, dokumen perencanaan pembangunan yang telah dirumuskan ditetapkan sebagai dokumen resmi. Kolaborasi

multipihak berperan penting dalam memastikan keterpaduan antara perencanaan daerah dengan kebijakan pembangunan lintas sektor, serta dalam proses diseminasi dokumen kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi publik

3. Tahap Pelaksanaan dan Pengendalain

   Kolaborasi difokuskan pada pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan agar sesuai dengan rencana, baik dari aspek waktu, capaian, maupun efisiensi anggaran. Kolaborasi dilakukan melalui penyusunan laporan pelaksanaan, pelibatan masyarakat dalam monitoring program, pelaksanaan forum evaluatif, serta pembentukan mekanisme umpan balik dari pelaksana dan penerima manfaat

4. Tahap Evaluasi

   Pada tahap evaluasi, kolaborasi multipihak diarahkan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan memberikan masukan perbaikan untuk perencanaan ke depan. Bentuk kolaborasi dapat berupa penyelenggaraan forum evaluasi pembangunan, *focus group discussion* (FGD), pelibatan akademisi dan praktisi, serta penyusunan laporan evaluasi yang disampaikan secara terbuka kepada publik.

   Dengan mengarusutamakan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor pembangunan, perencanaan pembangunan daerah akan semakin responsif, akuntabel, dan mampu menjawab dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan secara tepat. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

BUPATI PADANG PARIAMAN

JOHN KENEDY AZIS

METADATA INDIKATOR KINERJA PADA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025-2029

I. INDIKATOR KINERJA MAKRO

1. Pertumbuhan Ekonomi (%)

Nama Indikator	**Pertumbuhan Ekonomi (%)**
Definisi	Merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	$r(k) = \frac{PDRB(k)\text{t}}{PDRB\,(k)t-1} x\ 100\%$ Keterangan k = Komponen t = Tahun berjalan (atas dasar harga konstan) t-1 = Tahun sebelum tahun berjalan (atas dasar harga konstan)
Interpretasi	Hasil perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

2. PDRB Per Kapita ADHK (Rp.Juta)

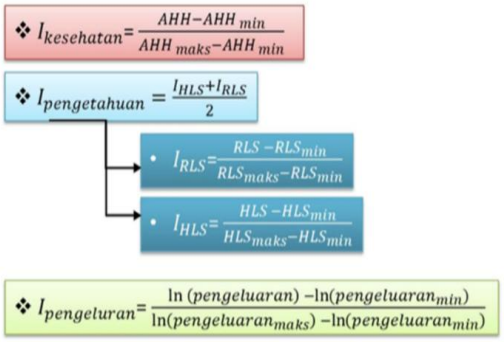
Nama Indikator	**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita ADHK (Rp Juta)**
Definisi	PDRB per kapita ADHK menunjukkan nilai PDRB atas dasar harga konstan per satu orang penduduk. Indikator ini dihitung dengan membagi total PDRB ADHK dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, sehingga mencerminkan rata-rata kontribusi ekonomi per penduduk pada harga konstan (menghilangkan pengaruh inflasi).
Rumus Perhitungan	*PDRB per kapita* ADHK = $\frac{PDRB_{ADHK}}{populasi}$ Keterangan: $PDRB_{ADHK}$ = PDRB Atas Dasar Harga Konstan Populasi = jumlah penduduk regional t = periode
Interpretasi	Peningkatan PDRB per kapita ADHK mengindikasikan pertumbuhan ekonomi riil per penduduk, yang umumnya diartikan sebagai kemajuan ekonomi dan peningkatan standar hidup. Namun, indikator ini tidak menggambarkan pemerataan pendapatan atau kesenjangan ekonomi, sehingga perlu dilengkapi dengan indikator distribusi pendapatan untuk analisis yang lebih komprehensif.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

3. PDRB Per Kapita ADHB (Rp. Juta)

Nama Indikator	**Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rp Juta)**
Definisi	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Rumus Perhitungan	$PDRB\ per\ kapita = \frac{PDRB_{ADHB}}{populasi}$ Keterangan: $PDRB_{ADHB}$ = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Populasi = jumlah penduduk regional t = periode
Interpretasi	Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Nama Indikator	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**
Definisi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan, dan kehidupan layak. IPM memberikan informasi yang penting bagi pembuat kebijakan untuk mengembangkan kebijakan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.
Rumus Perhitungan	Indeks pembangunan manusia diukur melalui tiga komponen utama: 1. Angka/Umur Harapan Hidup saat Lahir Angka Angka Harapan Hidup (AHH) saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Indikator ini merefleksikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Metodologi penghitungan indikator ini adalah pendekatan tak langsung (indirect estimation) dan distandardisasi menggunakan standar penghitungan UNDP. 2. Dimensi Pengetahuan (Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kedua indikator ini merupakan representasi dari kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan formal. HLS menggambarkan kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan formal dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar, sementara RLS menggambarkan tingkat pendidikan stok modal manusia yang dimiliki oleh suatu wilayah dan dihitung berdasarkan jumlah tahun yang ditempuh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
	Penghitungan kedua indikator ini memanfaatkan data yang bersumber dari Susenas bulan Maret, data jumlah siswa yang menjalani pendidikan dengan bermukim dari Kementerian Agama, serta hasil inventarisasi data sektoral di kabupaten/kota. 3. Pengeluaran riil per Kapita Disesuaikan Pengeluaran riil per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas modul konsumsi bulan Maret, indeks harga konsumen, serta harga komoditas nonmakanan hasil survei harga konsumen.  $\text{IPM} = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pengetahuan} \times I_{daya\ beli}}$
	Klasifi Sanga Tinggi 70 ≤ IPM < 80 Sedang 60 ≤ IPM < 70 Rendah IPM < 60
Interpretasi	Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.
Sumber Data/ OPD Penanggung Jawab	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

5. Angka Harapan Hidup (Tahun)

Nama Indikator	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
Definisi	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.
Rumus Perhitungan	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate*/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Microcomputer Program *for Demographic Analysis* (MCPDA) atau *Mortpack*

Interpretasi	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
Sumber Data	Proyeksi dari SUPAS dan SP sebagai proksi/pendekatan Badan Pusat Statistik
Frekuensi	SP: 10 tahunan SUPAS: 10 tahunan

6. Harapan Lama Sekolah (Tahun)

Nama Indikator	**Harapan Lama Sekolah (Tahun)**
Definisi	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang
Rumus Perhitungan	$nEt\ Harapan\ Lama\ Sekolah = FK\ iPti=<i$ Keterangan: FK = Faktor koreksi pesantren Et = Jumlah penduduk usia I yang bersekolah pada tahun t $iP_t\ i$ = Jumlah penduduk usia i pada tahun t Usia (7,8, ……., n)
Interpretasi	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal: HLS Indonesia pada tahun 2022 sebesar 13,10 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,10 tahun atau setara dengan Diploma I.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)

7. Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)

Nama Indikator	**Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (tahun)**

Definisi	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut:
	a. Tidak punya ijazah = 0 tahun;
	b. SD = 6 tahun;
	c. SMP = 9 tahun;
	d. SMA = 12 tahun;
	e. D1/D2 = 14 tahun;
	f. D3 = 15 tahun;

Nama Indikator	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (tahun)

	g. D4 = 16 tahun;
	h. S1 = 17 tahun;
	i. S2 = 19 tahun;
	j. S3 = 22 tahun.
	Konversi ijazah ke menjadilamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini:
	a. Tidak pernah sekolah = 0 tahun;
	b. Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1;
	c. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1;
	d. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir;
	e. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir –1

Rumus Perhitungan	$Rata\text{-}rata\ Lama\ Sekolah\ 15+ = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$ Keterangan: P_{15+} = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas x_i = Lama sekolah penduduk ke- i
Interpretasi	Misal: RLS 15+ Indonesia tahun 2022 = 9,08 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,08 tahun atau telah menamatkan kelas IX.
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)

8. Pengeluaran Per Kapita (Rp.Ribu)

Nama Indikator	Pengeluaran Per Kapita (Rp.Ribu)
Definisi	Merupakan indikator yang menunjukkan rata-rata jumlah pengeluaran konsumsi per orang dalam periode waktu tertentu. Pengeluaran per kapita dihitung dengan membagi total pengeluaran konsumsi penduduk dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, sehingga mencerminkan tingkat konsumsi rata-rata individu di suatu wilayah.
Rumus Perhitungan	Pengeluaran Per Kapita = $\frac{Total\ Pengeluaran\ Konsumsi}{Jumlah\ Penduduk}$ Keterangan: Total Pengeluaran Konsumsi = jumlah seluruh pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam satu tahun Jumlah Penduduk = penduduk pertengahan tahun (regional) t = periode penghitungan (tahun)
Interpretasi	Semakin tinggi nilai pengeluaran per kapita menunjukkan semakin besar rata-rata kemampuan konsumsi masyarakat. Namun, indikator ini tidak menggambarkan pemerataan kemampuan konsumsi antar penduduk sehingga perlu dilengkapi dengan indikator ketimpangan untuk analisis yang lebih mendalam.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS)

Frekuensi	Tahunan

9. Tingkat Kemiskinan (%)

Nama Indikator	**Tingkat Kemiskinan (%)**
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). $Pa = 1n\Sigma[z - yiz]$ Keterangan: a = 0 z = garis kemiskinan yi = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1,2,3,…,q), $yi < z$ q = banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Maret dan September)

10. Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)

Nama Indikator	**Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)**
Definisi	Banyaknya penduduk yang tidak mampu memenuhi hak dasar (hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan) secara layak dan mandiri; atau penduduk yang memiliki rata- rata pengeluaran per kapita sebulan di bawah garis kemiskinan.
Rumus Perhitungan	$Jumlah\ Penduduk\ Miskin = \sum_{i=1}^{n} Penduduk\ dengan\ Pengeluaran\ Per\ Kapita < GK$ Jumlah penduduk dengan dinilai pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan
Interpretasi	Semakin besar nilai, maka semakin banyak jumlah penduduk miskin
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

11. Gini Ratio

Nama Indikator	Rasio Gini
Definisi	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva Lorenz dan aspek matematis.
Rumus Perhitungan	Rasio Gini = $1 - \sum_{i=1}^{n} (\ pi - pi\text{-}1)(\ Yi - Yi\text{-}1)$ Keterangan: pi = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i Yi = Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i n = jumlah observasi
Interpretasi	Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut: 1. Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang. 2. Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukan ketimpangan sedang. 3. Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukan pemerataan relatif baik. Secara visual, rasio gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva Lorenz, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (perfect equality) dan kurva Lorenz. Semakin jauh jarak kurva Lorenz dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Maret dan September)

12. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

Nama Indikator	**Tingkat Pengangguran Terbuka (%)**
Definisi	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Rumus Perhitungan	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ Keterangan: TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)
Interpretasi	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

II. Indikator Sasaran Visi

1. PDRB per Kapita ADHB (Rp Juta)

Nama Indikator	**Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rp Juta)**
Definisi	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Rumus Perhitungan	$PDRB\ per\ kapita = \frac{PDRB_{ADHB}}{populasi}$ Keterangan: PDRBADHB = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Populasi = jumlah penduduk regional

	t = periode
Interpretasi	Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

2. Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan

Nama Indikator	**Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan**
Definisi	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan khususnya pada subsektor Perikanan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sub sektor perikanan terhadap PDB.
Rumus Perhitungan	Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan (%) $= \frac{Nilai\ Tambah\ Sektor\ Pertanian, Kehutanan, dan\ Perikanan}{PDRB\ \ ADHB} \times 100\%$
Interpretasi	Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah subsektor perikanan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sub sektor perikanan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, ceteris paribus.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Dinas Perikanan
Frekuensi	Triwulanan, Tahunan

3. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)

Nama Indikator	**Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)**
Definisi	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDB.
Rumus Perhitungan	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%) $= \frac{Nilai\ Tambah\ Sektor\ Industri\ Pengolahan}{Nilai\ PDRB\ ADHB} \times 100\%$
Interpretasi	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB . Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, ceteris paribus.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, DPMPTP (Dinas Penanaman Modal

	Pelayanan Terpadu dan Perindustrian)
Frekuensi	Triwulanan, Tahunan

4. Tingkat Kemiskinan (%)

Nama Indikator	**Tingkat Kemiskinan (%)**
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Rumus Perhitungan	$Pa = 1n\Sigma[z-yiz]$ Keterangan: a = 0 z = garis kemiskinan yi = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1,2,3,...,q), $yi < z$ q = banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Maret dan September)

5. Rasio Gini (indeks)

Nama Indikator	**Rasio Gini**
Definisi	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva Lorenz dan aspek matematis.
Rumus Perhitungan	Rasio Gini = $1 - \sum_{i=1}^{n} (\ pi - pi\text{-}1)(\ Yi - Yi\text{-}1)$ Keterangan: pi = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i Yi = Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i n = jumlah observasi
Interpretasi	Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut: 1. Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70

Nama Indikator	Rasio Gini
	menandakan pemerataan sangat timpang. 2. Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukan ketimpangan sedang. 3. Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukan pemerataan relatif baik. Secara visual, rasio gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva Lorenz, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (perfect equality) dan kurva Lorenz. Semakin jauh jarak kurva Lorenz dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Maret dan September)

6. Pertumbuhan Ekonomi (%)

Nama Indikator	Pertumbuhan Ekonomi (%)
Definisi	Merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu
Rumus Perhitungan	$r(k)=\frac{PDRB(k)t}{PDRB\ (k)t-1} x\ 100\%$ Keterangan
	k = Komponen t = Tahun berjalan (atas dasar harga konstan) t-1 = Tahun sebelum tahun berjalan (atas dasar harga konstan)
Interpretasi	Hasil perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

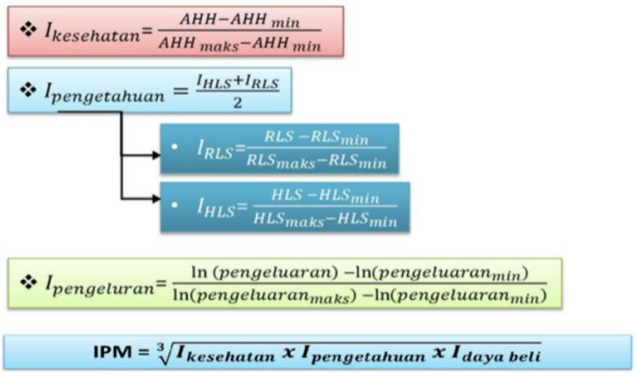
7. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah

Nama Indikator	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) (Nilai)
Definisi	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. EKPPD dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah.

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) (Nilai)</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>Nilai EKPPD merupakan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK)* yang disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, Kabupaten dan Kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (KPPD) diperoleh melalui akumulasi capaian kinerja makro (CKM), capaian kinerja urusan pemerintahan (CKUP) dan perubahan kinerja makro (PKM). Ilustrasi sebagai berikut:
KPPD = [CKM + CKUP] x 0.75 + [PKM] x 0.25
Berdasarkan skor kinerja yang diperoleh di atas, maka disusun ranking kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota.
Status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi sebagai berikut:
<table>
<tr><td>No</td><td>Skor Kinerja</td><td>Status Kinerja</td></tr>
<tr><td>1</td><td>1.00 – 1.80</td><td>Sangat Rendah</td></tr>
<tr><td>2</td><td>1.81 - 2.60</td><td>Rendah</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2.61 – 3.40</td><td>Sedang</td></tr>
<tr><td>4</td><td>3.41- 4.20</td><td>Tinggi</td></tr>
<tr><td>5</td><td>4.21 – 5.00</td><td>Sangat Tinggi</td></tr>
</table>
*Rincian setiap indikator capaian kinerja dapat dilihat pada: Permendagri 18 Tahun 2020.pdf</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Semakin tinggi skor EKPPD yang dihasilkan maka semakin baik kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Kementerian Dalam Negeri</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
</table>

8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Nama Indikator	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**
Definisi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan, dan kehidupan layak. IPM memberikan informasi yang penting bagi pembuat kebijakan untuk mengembangkan kebijakan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.
Rumus Perhitungan	Indeks pembangunan manusia diukur melalui tiga komponen utama: 1. Angka/Umur Harapan Hidup saat Lahir Angka Angka Harapan Hidup (AHH) saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Indikator ini merefleksikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Metodologi penghitungan indikator ini adalah pendekatan tak langsung (indirect estimation) dan distandardisasi menggunakan standar penghitungan UNDP.

Nama Indikator	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**
	2. Dimensi Pengetahuan (Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)) Kedua indikator ini merupakan representasi dari kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan formal. HLS menggambarkan kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan formal dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar, sementara RLS menggambarkan tingkat pendidikan stok modal manusia yang dimiliki oleh suatu wilayah dan dihitung berdasarkan jumlah tahun yang ditempuh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan kedua indikator ini memanfaatkan data yang bersumber dari Susenas bulan Maret, data jumlah siswa yang menjalani pendidikan dengan bermukim dari Kementerian Agama, serta hasil inventarisasi data sektoral di kabupaten/kota. 3. Pengeluaran riil per Kapita Disesuaikan Pengeluaran riil per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas modul konsumsi bulan Maret, indeks harga konsumen, serta harga komoditas nonmakanan hasil survei harga konsumen.  Klasifikasi IPM — Capaian IPM Sangat Tinggi — IPM ≥ 80 Tinggi — 70 ≤ IPM < 80 Sedang — 60 ≤ IPM < 70 Rendah — IPM < 60
Interpretasi	Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

9. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Nama Indikator	**Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta/orang)**

Nama Indikator	**Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta/orang)**
Definisi	Produktivitas tenaga kerja adalah kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang produksi. Indikator ini mencerminkan besaran kontribusi tenaga kerja dalam kegiatan ekonomi.
Rumus Perhitungan	Produktivitas Tenaga Kerja (Juta/orang) $= \frac{PDRB\ tahun\ berjalan\ ADHK}{Jumlah\ Tenaga\ Kerja}$
Interpretasi	Semakin tinggi tingkat produktivitas tenaga kerja (juta/orang), semakin efisien penggunaan tenaga kerja dalam menghasilkan output atau produksi. Ini menunjukkan bahwa setiap orang dalam pekerjaan atau sektor tersebut mampu menghasilkan jumlah output yang lebih besar.
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan Publikasi PDRB oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Tahunan

10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>Perhitungan IKLH Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara melakukan penjumlahan dari semua komponen indeks di Kabupaten/Kota (IKA, IKU, dan IKL) yang dikalikan masing-masing bobot sesuai dengan rumus penghitungan IKLH Kabupaten/Kota.
a. IKLH Kabupaten/ Kota dengan Ekosistem Gambut
$IKLH$ = (0,3760 x IKA) + (0,4050 x IKU) + (0,1712 x IKTL) + (0,0478 x IKEG)
b. IKLH Kabupaten/ Kota tanpa Ekosistem Gambut
$IKLH$ = (0,3760 x IKA) + (0,4050 x IKU) + (0,1712 x IKTL)
Keterangan
IKA = Indeks Kualitas Air
IKU = Indeks Kualitas Udara
IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan
IKEG = Indeks Kualitas Ekosistem Gambut</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
<table>
<tr><td>No.</td><td>Kategori</td><td>Angka Rentang</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Sangat Baik</td><td>90 ≤ x ≤ 100</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Baik</td><td>70 ≤ x < 90</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Sedang</td><td>50 ≤ x < 70</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Kurang</td><td>25 ≤ x < 50</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Sangat Kurang</td><td>0 ≤ x < 25</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, tutupan lahan, tutupan ekosistem gambut, dan air laut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Dinas Lingkungan Hidup Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DLHPKPP)</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
</table>

III. Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) (Nilai)

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) (Nilai)</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. EKPPD dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah.</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>Nilai EKPPD merupakan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK)* yang disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, Kabupaten dan Kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (KPPD) diperoleh melalui akumulasi capaian kinerja makro (CKM), capaian kinerja urusan pemerintahan (CKUP) dan perubahan kinerja makro (PKM). Ilustrasi sebagai berikut:
KPPD = [CKM + CKUP] x 0.75 + [PKM] x 0.25
Berdasarkan skor kinerja yang diperoleh di atas, maka disusun ranking kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota.
Status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi sebagai berikut:
<table>
<tr><td>No</td><td>Skor Kinerja</td><td>Status Kinerja</td></tr>
<tr><td>1</td><td>1.00 – 1.80</td><td>Sangat Rendah</td></tr>
<tr><td>2</td><td>1.81 - 2.60</td><td>Rendah</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2.61 – 3.40</td><td>Sedang</td></tr>
<tr><td>4</td><td>3.41- 4.20</td><td>Tinggi</td></tr>
<tr><td>5</td><td>4.21 – 5.00</td><td>Sangat Tinggi</td></tr>
</table>
*Rincian setiap indikator capaian kinerja dapat dilihat pada: Permendagri 18 Tahun 2020.pdf</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Semakin tinggi skor EKPPD yang dihasilkan maka semakin baik kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Kementerian Dalam Negeri</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
</table>

2. Indeks Reformasi Birokrasi

Nama Indikator	**Indeks Reformasi Birokrasi [Skor indeks (0–100)]**
Definisi	Indeks ini mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah, mencakup delapan area perubahan seperti manajemen perubahan, penataan kelembagaan, penguatan akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Penilaian juga mencakup integritas pegawai, efektivitas pengawasan internal, serta penerapan sistem merit dalam manajemen SDM aparatur. Indeks ini menjadi tolok ukur upaya pemerintah daerah dalam membangun birokrasi yang bersih, efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.
Rumus	Indeks = (Skor seluruh area perubahan / Skor maksimal) x 100
Interpretasi	Indeks yang tinggi menunjukkan birokrasi daerah semakin bersih, efektif, dan melayani, mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil mendorong perubahan organisasi dan budaya kerja menuju birokrasi kelas dunia.
Sumber Data	Kementerian PANRB
Frekuensi	Tahunan

3. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah [Skor huruf dan angka (0–100)]

Nama Indikator	**Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah [Skor huruf dan angka (0–100)] (Nilai)**
Definisi	Nilai SAKIP menggambarkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran berbasis kinerja dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Penilaian dilakukan melalui evaluasi sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara berjenjang dan akuntabel. Penilaian juga mempertimbangkan sejauh mana kinerja diukur secara sistematis dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial.
Rumus	Nilai = Hasil evaluasi SAKIP dari Kementerian PANRB (skor akhir evaluasi)
Interpretasi	Nilai tinggi menandakan Pemda berhasil mengelola anggaran dan program kerja secara transparan, akuntabel, serta berorientasi hasil. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam menerapkan manajemen kinerja organisasi secara menyeluruh dan terintegrasi.
Sumber Data	Kementerian PANRB
Frekuensi	Tahunan

4. Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK (Nilai)

Nama Indikator	**Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK (Nilai)**
Definisi	Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah perangkat diagnostik yang dapat digunakan sebagai alat ukur objektif untuk memetakan capaian dan kemajuan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD). SPI berusaha mengukur penilaian persepsi dan

Nama Indikator	Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK (Nilai)
	pengalaman sebagai pemangku kepentingan di instansi K/1/PD, yang berbagi menjadi dua penilaian yaitu penilaian internal dengan responden adalah pegawai pada instansi tersebut dan penilaian eksternal dengan responden adalah pengguna layanan/mitra kerja sama.
Metode Perhitungan	Metodologi yang dilakukan dalam perhitungan nilai SPI adalah: • Teknik sampling terdiri dari Propotional Stratified Random Sampling (Probability Sampling) yang dilakukan secara acak pada populasi unit kerja dengan memperhatikan keterwakilan setiap Unit Eselon I, zona wilayah, dan level risiko dan pemilihan sampel mendapat pengawalan dari BPS; • Kuisioner survei penilaian integritas (SPI) oleh KPK; • Variabel penliaian terdiri dari: internal (43 variabel penilaian) dan eksternal (12 variabel penilaian); • Perhitungan indeks: penilaian internal (0,45) + penilaian eksternal (0,45) + pendalaman FGD (0,1) – Faktor koreksi (berupa angka absolut, maksimal -17); • Pengumpulan data primer melalui survei online menggunakan platform KPK dan melalui FGD anonim dalam rangka pendalaman hasil survei dan data sekunder melalui informasi kejadian OTT< hasil investigasi, informasi APH dan pengkondisian survei; dan • Komponen & dimensi penilaian yang terdiri dari perdangan pengaruh, pengelolaan PBJ, pnegelolaan anggaran, pengelolaan SDM, integritas dalam pelaksanaan tugas, sosialisasi anti korupsi, transparansi, pencegahan korupsi, transparansi dan keadilan layanan, dan integritas pegawai.
Interpretasi	Semakin tinggi tingkat nilai yang didapatkan oleh K/L/PD terhadap penilaian SPI, menunjukan kepercayaan responden internal dan eksternal terhadap kinerja sebuah instansi terhadap transparansi dan integritasnya.
Sumber Data	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Frekuensi	Tahunan

5. Indeks Inovasi Daerah

Nama Indikator	Indeks Inovasi Daerah
Definisi	Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bentuk kebaharuan didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintah daerah pada setiap tingkatannya. Adapun tujuan kegiatan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (Innovative Government Award) adalah: • Memotivasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan inovasi dalam pelayanan masyarakat sesuai dengan kategori sangat inovatif, inovatif, kurang inovatif, dan tidak dapat nilai; • Mendorong penerapan good governance; • Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses inovasi yang dilakukan oleh pemerintah

Nama Indikator	Indeks Inovasi Daerah
	daerah; dan • Memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berhasil menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dalam upaya peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.
Rumus Perhitungan	Penghitungan Skor Total $SPD = \sum_{i=1}^{15} Skor\ Indikator\ Satuan\ Pemda\ ke-i$ $Skor\ Jumlah\ Inovasi = Jumlah\ Inovasi\ x\ 0{,}38$ $SID = \frac{\sum_{j=1}^{n}(\sum_{i=16}^{35} Skor\ Indikator\ Satuan\ Inovasi\ ke\ i)\ Inovasi\ ke\ j}{MAX\ (10, n)} + Skor\ Jumlah\ Inovasi$ $\boldsymbol{Skor\ Total = SPD + SID}$ Keterangan: n adalah Jumlah Inovasi Daerah suatu Pemerintah Daerah Penghitungan Indeks Inovasi Daerah $\boldsymbol{Indeks\ Inovasi\ Daerah = \frac{Skor\ Total}{Skor\ Total\ Maksimum}\ x\ 100}$ Keterangan: - Skor Total Maksimum diperoleh dari penjumlahan Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID). - Skor Total Maksimum adalah 250. - Skala IID adalah 0 s.d. 100.
Interpretasi	Indeks inovasi daerah dapat dijadikan ukuran yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimilikinya guna tercapainya kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan berdaya saing Semakin tinggi nilai yang didapatkan oleh hasil inovasi daerah yang didapatkan menunjukan meningkatnya motivasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya terhadap kepuasan masyarakat.
Sumber Data	Laporan inovasi daerah yang disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri
Frekuensi	Tahunan

6. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Nama Indikator	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Definisi	SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.

Nama Indikator	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Rumus Perhitungan	Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut: $Indeks\ Domain_i = \frac{1}{BD_i} \sum_{j=m}^{n} NA_{ij} \times BA_{ij}$ dimana: • NDj adalah nilai indeks domain ke-j; • BDj adalah nilai bobot domain ke-j.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks domain dan bobot domain maka akan semakin besar pula nilai indeks SPBE yang dihasilkan.
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Frekuensi	Tahunan

7. Indeks Pemerintahan Digital Indonesia (PEMDI)

Nama Indikator	Indeks Pemerintahan Digital Indonesia (PEMDI)
Definisi	Indeks SPBE adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kematangan dan kualitas penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan instansi pemerintah daerah. Indeks ini mencerminkan kemampuan instansi dalam mengelola dan menyelenggarakan layanan pemerintahan secara digital, terintegrasi, dan berorientasi pada pelayanan publik yang efisien. Penilaian dilakukan berdasarkan domain kebijakan internal, tata kelola, manajemen SPBE, serta layanan SPBE yang mencakup layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik digital. Indeks ini memberikan gambaran tentang kemajuan transformasi digital di sektor pemerintahan.
Rumus	PEMDI = (0,25 × A) + (0,20 × B) + (0,35 × C) + (0,20 × D) Keterangan: • A = Skor Infrastruktur Digital Pemerintahan (0–100) • B = Skor Kapasitas SDM Digital Pemerintah (0–100) • C = Skor Layanan Pemerintah Berbasis Digital (0–100) • D = Skor Tata Kelola dan Strategi Transformasi Digital (0–100)
Interpretasi	Indeks PEMDI merupakan ukuran komposit yang menunjukkan tingkat kematangan digital pemerintahan daerah. Skor akhir berada dalam rentang 0 hingga 100. Semakin tinggi skor, semakin tinggi pula tingkat kesiapan dan implementasi digitalisasi pemerintahan. Indeks ini mencerminkan empat aspek utama: ketersediaan infrastruktur digital, kapasitas sumber daya manusia, layanan publik berbasis digital, serta tata kelola dan kebijakan digital. Kategori skor dapat diinterpretasikan sebagai berikut: • 0–49 : Rendah (Perlu Percepatan Transformasi Digital) • 50–64 : Cukup (Dalam Proses Pengembangan) • 65–79 : Baik (Transformasi Digital Berjalan)

Nama Indikator	Indeks Pemerintahan Digital Indonesia (PEMDI)
	• 80–100 : Sangat Baik (Kematangan Digital Tinggi)
Sumber Data	Kementerian PANRB
Frekuensi	Tahunan

8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Definisi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan, dan kehidupan layak. IPM memberikan informasi yang penting bagi pembuat kebijakan untuk mengembangkan kebijakan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.
Rumus Perhitungan	Indeks pembangunan manusia diukur melalui tiga komponen utama: 1. Angka/Umur Harapan Hidup saat Lahir Angka Angka Harapan Hidup (AHH) saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Indikator ini merefleksikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Metodologi penghitungan indikator ini adalah pendekatan tak langsung (indirect estimation) dan distandardisasi menggunakan standar penghitungan UNDP. 2. Dimensi Pengetahuan (Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)) Kedua indikator ini merupakan representasi dari kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan formal. HLS menggambarkan kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan formal dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar, sementara RLS menggambarkan tingkat pendidikan stok modal manusia yang dimiliki oleh suatu wilayah dan dihitung berdasarkan jumlah tahun yang ditempuh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan kedua indikator ini memanfaatkan data yang bersumber dari Susenas bulan Maret, data jumlah siswa yang menjalani pendidikan dengan bermukim dari Kementerian Agama, serta hasil inventarisasi data sektoral di kabupaten/kota. 3. Pengeluaran riil per Kapita Disesuaikan Pengeluaran riil per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</td></tr>
<tr><td></td><td>diperoleh dari Susenas modul konsumsi bulan Maret, indeks harga konsumen, serta harga komoditas nonmakanan hasil survei harga konsumen.

❖ $I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$
❖ $I_{pengetahuan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$
• $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$
• $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$
❖ $I_{pengeluran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$
Klasi
Sang
$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pengetahuan} \times I_{daya\ beli}}$
<table><tr><td>Tinggi</td><td>70 ≤ IPM < 80</td></tr><tr><td>Sedang</td><td>60 ≤ IPM < 70</td></tr><tr><td>Rendah</td><td>IPM < 60</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Badan Pusat Statistik</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
</table>

9. Rata-rata Lama Sekolah

Nama Indikator	**Rata-rata Lama Sekolah (Penduduk Usia di Atas 15 Tahun) (tahun)**

Definisi	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut:
	a. Tidak punya ijazah = 0 tahun;
	b. SD = 6 tahun;
	c. SMP = 9 tahun;
	d. SMA = 12 tahun;
	e. D1/D2 = 14 tahun;
	f. D3 = 15 tahun;
	g. D4 = 16 tahun;
	h. S1 = 17 tahun;
	i. S2 = 19 tahun;
	j. S3 = 22 tahun.
	Konversi ijazah ke menjadilamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini:
	a. Tidak pernah sekolah = 0 tahun;
	b. Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1;
	c. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1;
	d. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir;
	e. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir –1

Rumus Perhitungan	$Rata-rata\ Lama\ Sekolah\ 15+ = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$ Keterangan: P15+ = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas xi = Lama sekolah penduduk ke- i
Interpretasi	Misal: RLS 15+ Indonesia tahun 2022 = 9,08 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,08 tahun atau telah menamatkan kelas IX.
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)

10. Harapan Lama Sekolah

Nama Indikator	**Harapan Lama Sekolah (Tahun)**
Definisi	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang
Rumus Perhitungan	$nEt\ Harapan\ Lama\ Sekolah = FK\ iPti=<i$ Keterangan: FK = Faktor koreksi pesantren Et = Jumlah penduduk usia I yang bersekolah pada tahun t iPt i = Jumlah penduduk usia i pada tahun t Usia (7,8, ……., n)
Interpretasi	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal: HLS Indonesia pada tahun 2022 sebesar 13,10 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,10 tahun atau setara dengan Diploma I.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)

11. Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional

Nama Indikator	**Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:** **i. Literasi membaca** **ii. Numerasi**
Definisi	Jumlah satuan pendidikan di provinsi X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di provinsi X. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.

Rumus Perhitungan	$\%satdik\ min.SKM = \frac{\sum_{i=1}^{n} satdik\ min.SKM}{n}$ Keterangan: $satdik\ min.\ SKM$ = Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi n = Jumlah satuan pendidikan
Interpretasi	Misal: Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca tahun 2022 sebesar 29,16%. Artinya, ada 29,16% satuan pendidikan di Indonesia atau sebanyak 83.808 satuan pendidikan yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca (paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap").
Sumber Data	Asesmen Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

12. Angka Usia Harapan Hidup

Nama Indikator	**Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)**
Definisi	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.
Rumus Perhitungan	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Microcomputer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack
Interpretasi	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
Sumber Data	Proyeksi dari SUPAS dan SP sebagai proksi/pendekatan Badan Pusat Statistik
Frekuensi	SP: 10 tahunan SUPAS: 10 tahunan

13. Prevalensi Stunting Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita

Nama Indikator	**Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)**
Definisi	Stunting (pendek/sangat pendek) 25anggu kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U 25 anggu sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010. a. Sangat pendek: *Zscore* < -3,0 b. Pendek: *Zscore* ≥ -3,0 s/d *Zscore* < -2,0
Rumus Perhitungan	Cara perhitungan (1) 1). Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB\ (5)P\ stunting = \frac{aJAB\ (5)P\ stunting}{JAB\ (5)}\ X\ 100\%$ Keterangan $PAB(5)P$ = Prevalensi anak balita yang stunting menderita $JAB(5)Pstunting$ = pendek (stunting) Jumlah anak balita $JAB(5)$ = pendek (stunting) pada waktu tertentu Jumlah anak balita pada waktu yang sama Cara perhitungan (2) 2). Jumlah Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB\ (5)SP\ stunting = \frac{JAB\ (5)P\ stunting}{JAB\ (5)}\ X\ 100\%$ $PAB\ (5)SP\ stunting = \frac{JAB\ (5)SP\ stunting}{JAB\ (5)}\ X\ 100\%$
	$PAB(5)P$ = Prevalensi anak balita = yang stunting menderita $JAB(5)Pstunting$ = pendek (stunting) Jumlah anak balita $JAB(5)$ pendek (stunting) pada waktu tertentu Jumlah anak balita pada waktu yang sama

Nama Indikator	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
	Cara perhitungan (3) $Prevalensi\ stunting = PAB(5)P + PAB(5)SP$
Interpretasi	Prevalensi stunting yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk: 1). Kekurangan Gizi: Stunting 26 anggu indikator kekurangan gizi kronis. Prevalensi stunting yang tinggi menunjukkan bahwa banyak anak di wilayah tersebut menderita kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. 2). Akses Pelayanan Kesehatan: Prevalensi stunting yang tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan 26 angguh 26 n berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan 26angguh26n ibu dan anak. 3). Kemiskinan: Stunting sering kali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan stunting. 4). Pendidikan: Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, juga berpengaruh terhadap prevalensi stunting. Orang tua yang berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya gizi dan 26 angguh 26 n bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. 5). Faktor Lingkungan: Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat berkontribusi terhadap prevalensi stunting.
Sumber Data	SSGI Survei Kesehatan Indonesia perlu dieksplor penggunaan data program Kementerian Kesehatan (E-PPGBM) untuk penyediaan data tahunan
Frekuensi	SSGI: tahunan Survei Kesehatan Indonesia : 5 tahunan

14. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)

Nama Indikator	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
Definisi	Angka Kematian Ibu (AKI) 26 anggu banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.
Rumus Perhitungan	Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 100.000. $AKI = \frac{JKI}{JLH} X\ 100.000$ Keterangan: AKI = Angka Kematian Ibu JKI = Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau estimasi pada waktu tertentu
Interpretasi	Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) 26anggu ukuran yang

Nama Indikator	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
	digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. AKI sangat penting karena memberikan 27angguh27 tentang kualitas pelayanan 27angguh27n ibu dan anak di suatu negara atau wilayah. Angka Kematian Ibu (AKI) yang rendah di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: 1. Kualitas Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah biasanya mencerminkan kualitas pelayanan 27angguh 27n yang baik, termasuk pelayanan 27angguh27n ibu dan anak, pelayanan antenatal, persalinan, dan pasca persalinan. 2. Akses Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan akses yang baik ke pelayanan 27 angguh27n. Ini bisa berarti bahwa fasilitas 27angguh 27n mudah dijangkau dan terjangkau oleh 27angguh 27na. 3. Pendidikan Kesehatan: AKI yang rendah bisa mencerminkan 27angguh pengetahuan dan kesadaran 27angguh27na tentang 27angguh27n reproduksi dan pentingnya pelayanan 27 angguh 27 n selama kehamilan dan persalinan 4. Status Gizi: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan status gizi ibu yang baik. Gizi yang baik selama kehamilan sangat penting untuk mencegah komplikasi yang bisa mengancam nyawa ibu. 5. Kesadaran Masyarakat: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan 27 angguh kesadaran 27 angguh 27 na tentang pentingnya perawatan 27 angguh 27 n selama kehamilan dan persalinan
Sumber Data	Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)
Frekuensi	Sensus Penduduk (SP): 10 tahunan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS): 10 tahunan

15. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Indeks
Definisi	Indeks Pembangunan Keluarga 27 anggu suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. iBangga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. Terdiri dari 3 dimensi (ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan), 11 indikator, dan 17 variabel
Rumus	iBangga = (Skor Dimensi Ketenteraman + Skor Dimensi Kemandirian + Skor Dimensi Kebahagiaan)
Interpretasi	Nilai Indeks Pembangunan Keluarga menunjukkan tingkatan kualitas 27angguh27nan keluarga di Indonesia, iBangga dengan nilai lebih dari 70 maka akan masuk kategori 27 angguh, antara 40-70 akan masuk dalam kategori berkembang, dan apabila kurang dari 40 akan masuk dalam kategori rentan.
Sumber Data	BKKBN

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Indeks
Frekuensi	Tahunan

16. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks) (0-100))
Definisi	IPG adalah indeks yang menggambarkan capaian pembangunan manusia perempuan dibandingkan laki-laki berdasarkan tiga dimensi: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Indeks ini menunjukkan kesetaraan pencapaian antara perempuan dan laki-laki. IPG digunakan untuk menilai sejauh mana pembangunan memperhatikan kesetaraan gender.
Rumus	IPG = (IPM Perempuan / IPM Laki-laki) × 100
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IPG (mendekati 100), menunjukkan semakin kecil kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki.
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

17. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Definisi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.
Rumus Perhitungan	Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formulayang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki $G_p = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} \times \left(PR_p \times SE_p\right)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_p}$ $G_L = \sqrt[3]{1 \times \left(PR_L \times SE_L\right)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_L}$ 2. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki- laki dengan rata-rata harmonic $HARM\left(G_P, G_L\right) = \left[\frac{\left(G_P\right)^{-1} + \left(G_L\right)^{-1}}{2}\right]^{-1}$ 3. Menghitung indeks masing – masing dimensi

Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
	$$IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}} + 1\right)}{2}$$ $$IPK = \frac{TPAK_P + TPAK_L}{2}$$ $$IP = \frac{\left(\sqrt{PR_P \times SE_P} + \sqrt{PR_L \times SE_L}\right)}{2}$$ 4. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik $$G_{P,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$$ 5. Menghitung Indeks Kesetaraan Gender $$Indeks\ Kesetaraan\ Gender = \frac{HARM(G_P, G_L)}{G_{P,L}}$$ 6. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender $$IKG = 1 - \frac{HARM\left(G_P, G_L\right)}{G_{P,L}}$$ Keterangan: • G_P = Indeks Perempuan • G_L = Indeks Laki-laki • MTF = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan • MHPK20 = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun • PR_P = Persentase perempuan di legislatif • PR_L = Persentase laki-laki di legislatif • SE_P = Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas • SE_L = Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas • $TPAK_P$ = Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja • $TPAK_L$= Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja • $HARM(G_P,G_L)$= Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonik • IKR = Indeks dimensi kesehatan reproduksi • IP = Indeks dimensi pemberdayaan • IPK = Indeks dimensi pasar tenaga kerja • G_{PL}= Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik • IKG = Indeks Ketimpangan Gender
Interpretasi	IKG bernilai antara 0 - 1 dan bermakna positif. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yang semakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi, dan

Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
	sebaliknya.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, dan Sekretaris Dewan (Sekwan)
Frekuensi	Tahunan

18. Indeks Perlindungan Anak

Nama Indikator	Indeks Perlindungan Anak (indeks 0-100)
Definisi	Angka yang menggambarkan pencapaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak meliputi hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, dan perlindungan khusus.
Rumus	$IPA = \sum_{J=1}^{5} (W_j \, x \, Indeks \, K_j)$ Metode Perhitungan: Menghitung angka indikator penyusun Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang terdiri dari 5 klaster dengan 27 indikator: KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN 1. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran 2. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang pernah mengunjungi perpustakaan /memanfaatkan taman bacaan masyarakat 3. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang pernah menggunakan internet 4. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang pernah mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar 5. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang ikut serta dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja atau sekolah KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF 1. Persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun 2. Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak 3. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang tidak tinggal bersama kedua orang tua 4. Angka kesiapan sekolah KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN 1. Persentase perempuan pernah kawin berusia 15-49 Tahun yang melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan 2. Persentase balita stunting 3. Persentase anak berusia 0-5 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif 4. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang konsumsi kalorinya < 1400 kkal 5. Persentase anak berusia 0-17 Tahun yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak

Nama Indikator	Indeks Perlindungan Anak (indeks 0-100)
	6. Persentase Anak berusia 0-17 Tahun yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak 7. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang merokok 8. Persentase anak berusia 12-23 Bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA 1. Persentase anak berusia 7-17 tahun yang tidak sekolah 2. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengunjungi peninggalan sejarah dan warisan budaya Indonesia 3. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengikuti kursus (selain bimbingan belajar) 4. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang masih bersekolah yang pernah mengikuti ekstrakurikuler 5. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang terlibat dalam pertunjukan seni KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS 1. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja 2. Rasio anak berusia 5-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang pernah mengakses internet 3. Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak berusia 7-17 Tahun (disabilitas/non disabilitas) 4. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan 5. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang telantar II. melakukan normalisasi indikator penyusun Indeks Perlindungan Anak (IPA) III. menghitung Indeks Perlindungan Anak (IPA)
Interpretasi	Nilai IPA tinggi, semakin baik upaya pemerintah dalam perlindungan anak
Sumber Data	Kementerian PPPA, Dinas PPPA Daerah
Frekuensi	Tahunan

19. Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS)

Nama Indikator	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS)
Definisi	Indikator komposit yang menggambarkan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat berdasarkan beberapa dimensi penting, seperti: pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan sosial, partisipasi sosial, ketahanan keluarga, dan akses terhadap layanan sosial dasar.
Rumus	IKS = (∑ nilai dimensi × bobot masing-masing dimensi) ÷ total bobot $IKS = 1/n \sum_{i=1}^{n} X_i$ • IKS = Indeks Kesejahteraan Sosial • X_1, X_2, …, X_n = Skor masing-masing dimensi kesejahteraan sosial (sudah dinormalisasi dalam skala 0–100) • n = Jumlah dimensi indikator
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi tingkat kesejahteraan sosial masyarakat di suatu wilayah
Sumber Data	Dinas Sosial, BPS, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kemensos

Nama Indikator	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS)
Frekuensi	Tahunan

20. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Nama Indikator	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
Definisi	Merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu
Rumus Perhitungan	$r(k)=\frac{PDRB(k)t}{PDRB\ (k)t-1} x\ 100\%$ Keterangan k = Komponen t = Tahun berjalan (atas dasar harga konstan) t-1 = Tahun sebelum tahun berjalan (atas dasar harga konstan)
Interpretasi	Hasil perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

21. PDRB per Kapita ADHB

Nama Indikator	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rp Juta)
Definisi	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Rumus Perhitungan	$PDRB\ per\ kapita = \frac{PDRB_{ADHB}}{populasi}$ Keterangan: PDRBADHB = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Populasi = jumlah penduduk regional t = periode
Interpretasi	Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik

Frekuensi	Tahunan

22. Ekspor Barang dan Jasa

Nama Indikator	**Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)**
Definisi	Ekspor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan non residen. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan. Ekspor barang dan jasa (% PDRB) merupakan share ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Provinsi.
Rumus Perhitungan	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) $= \frac{Ekspor\ Barang\ dan\ Jasa}{PDRB\ ADHK}\ x\ 100\%$ Keterangan: Ekspor Barang dan Jasa = Total Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) PDRB ADHK = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)
	Ekspor Barang dan Jasa = Total Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) PDRB ADHK = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)
Interpretasi	Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. PDB adalah ukuran nilai total produksi dalam suatu negara dalam satu periode waktu. Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk- produk domestik di pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Ketika ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan, maka pendapatan negara juga juga meningkat karena peningkatan penjualan dan penerimaan deviden. Peningkatan pendapatan ini mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan produksi barang dan jasa yang diekspor. Selain itu, ekspor juga meningkatkan efisiensi dan daya saing industri

Nama Indikator	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)
	dalam negeri untuk dapat bersaing di pasar global.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

23. Gini Ratio

Nama Indikator	Gini Ratio [Indeks]
Definisi	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva *Lorenz* dan aspek matematis.
Rumus	$$Rasio\,Gini = 1 - \sum_{i=1}^{n}(p_i - p_{i-1})(Y_i - Y_{i-1})$$ dimana: • *pi* = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan ke-i • *Yi*= Proporsi kumulatif pengeluaran per kapita ke-i • n = jumlah observasi
Interpretasi	Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. • Rasio Gini = 0 → menunjukkan ketimpangan rendah (pemerataan sempurna). • Rasio Gini = 1 → menunjukkan ketimpangan tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai rasio gini adalah: • 0,50 – 0,70 → ketimpangan sangat timpang • 0,36 – 0,49 → ketimpangan sedang • 0,20 – 0,35 → pemerataan relatif baik Secara visual, rasio gini dijelaskan dengan kurva Lorenz, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi suatu variabel (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (perfect equality) dan kurva Lorenz. Semakin jauh jarak kurva Lorenz dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.

Nama Indikator	Gini Ratio [Indeks]
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Tahunan

24. Tingkat Kemiskinan (%)

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (%)
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Rumus Penghitungan	$$P_\alpha = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}\left[\frac{z - y_i}{z}\right]^\alpha$$ dengan keterangan: • α =0 • z = garis kemiskinan • yi = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i=1,2,3, ..., qi = 1,2,3, ..., qi=1,2,3, ..., q), yi<zy_i < zyi <z • q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan • n = jumlah penduduk
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk regional.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Maret dan September)

25. Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan [%]

Nama Indikator	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)
Definisi	Proporsi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas dalam kelompok lapangan usaha (sektor) pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan.

Nama Indikator	**Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)**
Metode Perhitungan	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) $= \frac{Nilai\ Tambah\ Sektor\ Pertanian,\ Kehutanan,\ dan\ Perikanan}{Nilai\ PDRB\ Kab.ADHB} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, semakin tinggi proporsinya terhadap PDB regional, ceteris paribus. Selain itu, peningkatan kontribusi pada sektor tersebut dapat dijadikan proksi dalam meningkatkan ekonomi hijau dan kelestarian lingkungan, khususnya dalam meningkatkan sub-indikator ekonomi pada indeks ekonomi hijau daerah yaitu produktivitas pertanian.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Triwulanan, Tahunan

26. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB [%]

Nama Indikator	**Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB [%]**
Definisi	Indikator ini menggambarkan kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sektor perdagangan sering kali menjadi indikator daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi lokal.
Rumus	(PDRB sektor perdagangan / Total PDRB) × 100%
Interpretasi	Kontribusi yang tinggi menunjukkan sektor perdagangan berkembang dan berperan signifikan dalam ekonomi daerah.
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

27. Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB [%]

Nama Indikator	**Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)**
Definisi	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah (PDRB ADHB). Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.
Metode Perhitungan	$Rasio\ Volume\ Usaha\ Koperasi\ terhadap\ PDRB = \frac{Volume\ Usaha\ Koperasi\ Daerah}{PDRB\ ADHB} \times 100\ (pers$
Interpretasi	Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut.

Nama Indikator	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)
Sumber Data	• Volume usaha koperasi daerah: ODS Koperasi. Kementerian Koperasi dan UKM. (DISDAGNAKERKOP UKM) • PDRB: PDRB Seri 2010. Badan Pusat Statistik.
Frekuensi	Tahunan

28. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)

Nama Indikator	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)
Definisi	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB.
Metode Perhitungan	Proporsi PDRB Sektor Industri Pengolahan (%) $= \frac{Nilai\ Tambah\ Sektor\ Industri\ Pengolahan}{Nilai\ PDRB\ Kab.ADHB} \times 100\%$
Interpretasi	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, ceteris paribus.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Triwulanan, Tahunan

29. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara [Ribu Orang]

Nama Indikator	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)
Definisi	Jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap di hotel /*homestay* di daerah tertentu
Metode Perhitungan	*Data Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara* (*di setiap hotel* / homestay *di daerah tertentu*)
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap di hotel/ *homestay* di daerah tertentu maka akan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata secara nasional.
Sumber Data	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

30. Rasio PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Nasional [%]

Nama Indikator	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Nasional [%]
Definisi	Indikator ini menunjukkan besarnya kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap total PDB. Ekonomi kreatif mencakup kegiatan berbasis kreativitas, inovasi, dan kekayaan intelektual yang menciptakan nilai tambah ekonomi. Rasio ini menjadi penting untuk melihat arah transformasi ekonomi berbasis inovasi dan kreativitas lokal. Dalam penghitungan PDRB dan PDB Ekonomi Kreatif menggunakan tujuh lapangan usaha, yaitu: 1. Industri Pengolahan; 2. Perdagangan Besar dan Eceran' Reparasi Mobil

Nama Indikator	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Nasional [%]
	dan Sepeda Motor; 3. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 4. Informasi dan Komunikasi; 5. Jasa Perusahaan; 6. Jasa Pendidikan; dan 7. Jasa Lainnya
Rumus	(PDRB ekonomi kreatif / Total PDB) × 100%
Interpretasi	Rasio yang tinggi menunjukkan potensi pengembangan ekonomi berbasis kreativitas dan menandakan dinamika inovatif di wilayah tersebut.
Sumber Data	BPS, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
Frekuensi	Tahunan

31. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum [%]

Nama Indikator	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum [%]
Definisi	Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi: 1. Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan, dan 2. Penyediaan Jasa Makan dan Minum.
Rumus	$= \frac{Nilai\ Tambah\ Penyediaan\ Akmamin}{Nilai\ PDRB\ ADHB} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB regional, ceteris paribus. Ke depan, perlu ada pemutakhiran dari aktivitas-aktivitas yang terkait pariwisata.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

32. Persentase Peningkatan Investasi [%]

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Investasi [%]
Definisi	Indikator ini menunjukkan tingkat pertumbuhan investasi di daerah dalam satu tahun, baik dari investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA). Kenaikan nilai investasi mencerminkan kepercayaan investor terhadap iklim usaha daerah dan kesiapan infrastruktur serta pelayanan investasi.
Rumus	((Total nilai investasi tahun berjalan - Total nilai investasi tahun sebelumnya) / Total nilai investasi tahun sebelumnya) × 100%
Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan daerah mampu menarik lebih banyak investor sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Sumber Data	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Nama Indikator	Persentase **Peningkatan Investasi [%]**
Frekuensi	Tahunan

33. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

Nama Indikator	**Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)**
Definisi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan *share* PMTB terhadap PRDB Provinsi.
Rumus Perhitungan	$Pembentukan\ PMTB\ (\%PDRB) = \frac{PMTB}{PDRB\ ADHK} \times 100\%$ Keterangan: Pembentukan Modal Tetap Bruto = Total PMTB berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah)
	PDRB $ADHK$ = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)
Interpretasi	PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (financial leasing), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (financial leasing). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Triwulanan dan Tahunan

34. Total Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB [%]

Nama Indikator	**Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)**

Nama Indikator	**Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)**
Definisi	Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di suatu daerah provinsi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) adalah persentase rasio total dana pihak ketiga perbankan di suatu provinsi terhadap PDRB provinsi tersebut pada suatu waktu tertentu.
Rumus Penghitungan	$Total\ Dana\ Pihak\ Ketiga/PDRB(\%) = \frac{Total\ Dana\ Pihak\ Ketiga}{PDRB}$ x 100.000 Total Dana Pihak Ketiga (DPK) = Total DPK Bank Umum + Total DPK BPR-BPRS (di suatu provinsi) PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (atas dasar harga berlaku)
Interpretasi	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan suatu daerah terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai Total DPK/PDRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana peningkatan angka rasio Total DPK/PDRB (%), menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah.
Sumber Data	Total Dana Pihak Ketiga = Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PDB = Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Dana Pihak Ketiga = Bulanan PDRB = Triwulan

35. Nilai Transaksi Saham per Kapita [Rp]

Nama Indikator	Nilai Transaksi Saham per Kapita [Rp]
Definisi	Total transaksi saham per provinsi adalah total nilai transaksi saham yang dilakukan oleh investor berdasarkan domisili (provinsi). Nilai transaksi saham merupakan hasil dari volume atau jumlah saham yang ditransaksikan dikali dengan harga saham.
Rumus	Total nilai transaksi saham / Jumlah penduduk
Interpretasi	Semakin tinggi nilai transaksi saham/kapita menunjukkan partisipasi masyarakat yang masuk dalam pasar modal meningkat, dengan kata lain ukuran atau likuiditas di pasar modal meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan kapitalisasi pasar modal.
Sumber Data	Laporan Bulanan Statistik Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

36. Indeks Ketahanan Pangan

Nama Indikator	Indeks Ketahanan Pangan
Definisi	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Ketahanan Pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Ketahanan pangan merupakan ukuran kelentingan terhadap gangguan pada masa depan atau ketiadaan suplai pangan penting akibat berbgai faktor seperti kekeringan, gangguan perkapalan, kelangkaanbahan bakar. ketidakstabilanekonomi, peperangan, dan sebagainya.
Rumus	$Y(j)=\sum 9n=1aiXij$ 1. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan z-score dan distance to scale (0 – 100) 2. Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus: Indeks Ketahanan Pangan = penjumlahan dari Bobot masing-masing indikator dikalikan dengan Nilai standarisasi masing-masing indikator 3. Mengelompokan wilayah ke dalam 6 kelompok berdasarkan cut off point IKP Keterangan Rumus: i = Indikator 1-9 j = Kab/kota a = Bobot masing-masing indikator ke-i X = Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-i pada kab/kota ke-j
Interpretasi	Indeks Ketahanan Pangan Nasional (IKP) disusun berdasarkan tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan dengan mempertimbangkan ketersediaan data sampai dengan tingkat kabupaten/. IKP dikelompokkan lebih lanjut ke dalam 6 kelompok ketahanan pangan dengan kelompok 1 sebagai wilayah yang paling rentan pangan. IKP yang disusun merupakan bagian dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA), sehingga hasil IKP sejalan dengan hasil peta FSVA. IKP dapat digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan dan penyusunan program dan intervensi kegiatan oleh para pemangku kepentingan baik di level nasional maupun daerah.
Sumber Data	Bappenas, Badan Ketahanan Pangan
Frekuensi	Tahunan

37. Tingkat Pengangguran Terbuka [%]

Nama Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka [%]
Definisi	Tingkat pengangguran terbuka 41 ingka persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah 41 ingkat 41 kerja. Angkatan Kerja 41ingka penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganggguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Rumus	TPT = $\frac{PP}{PAK}\ x\ 100\%$ Keterangan: TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang)

Nama Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka [%]
	PAK = Jumlah 42ingkat42 kerja (orang)
Interpretasi	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan 42ingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antarkelompok tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Tahunan, Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

38. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja [Rp/Jiwa]

Nama Indikator	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja [Rp/Jiwa]
Definisi	Indikator ini menunjukkan rata-rata nilai tambah bruto (output) yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja dalam suatu wilayah selama periode tertentu. Produktivitas tenaga kerja menggambarkan efisiensi dan efektivitas sumber daya manusia dalam proses produksi barang dan jasa, serta menjadi indikator penting dalam mengukur daya saing daerah.
Rumus	PDRB atas dasar harga konstan / Jumlah tenaga kerja
Interpretasi	Semakin tinggi produktivitas, semakin efisien penggunaan tenaga kerja, dan mencerminkan kualitas tenaga kerja serta teknologi yang digunakan.
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

39. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan [%]

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
Definisi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.
Rumus	$$TPAK_p = \frac{PAK_p}{P_{(15+,p)}} \times 100\%$$ Keterangan: $TPAK_p$ = Tingkat Partisipas Angkatan Kerja Perempuan (%) PAKp = Jumlah angkatan kerja perempuan (orang)

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
	$P(15+,_p)$ = Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas (orang)
Interpretasi	TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (labor supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja. Kegunaan indikator ini antara lain untuk memproyeksikan pasokan tenaga kerja, menetapkan kebijakan tenaga kerja, merancang kebijakan perawatan, menentukan kebutuhan pelatihan, dan merencanakan pembiayaan sistem perlindungan sosial
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

40. Persentase Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal [%]

Nama Indikator	Persentase Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal [%]
Definisi	Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan 4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat.
Rumus	Persentase Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal = (Pekerja penyandang disabilitas sektor formal / Angkatan Kerja Penyandang Disabillitas) × 100%
Interpretasi	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan proporsi penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai terhadap total angkatan kerja penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal mendapatkan jobs security, penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang lebih baik untuk mendapatkan kehidupan yang layak dibandingkan mereka yang bekerja di sektor informal.

Nama Indikator	**Persentase Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal [%]**
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), BPS Provinsi
Frekuensi	Tahunan

41. Indeks Desa

Nama Indikator	**Indeks Desa**
Definisi	Angka yang menggambarkan status kemajuan dan kemandirian desa yang ditentukan dalam aspek ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan, yang digunakan sebagai informasi dasar dalam pembangunan desa; dengan aspek ketahanan sosial mencakup dimensi modal sosial, kesehatan, pendidikan, permukiman; ketahanan ekonomi mencakup dimensi ekonomi; dan ketahanan ekologi mencakup dimensi ekologi.
Rumus	Indeks Desa = $\frac{IKS+IKL=IKE}{3}$ Dimana: IKS = Indeks Ketahanan Sosial IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan
Interpretasi	Semakin tinggi angka indeks menunjukkan kemandirian desa, sebagai dampak ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah.
Sumber Data	Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
Frekuensi	Tahunan

42. Indeks Infrastruktur Daerah

Nama Indikator	**Indeks Infrastruktur Daerah**
Definisi	Indikator ini menggambarkan tingkat ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas infrastruktur dasar di suatu daerah yang meliputi infrastruktur transportasi, energi, air bersih, sanitasi, serta infrastruktur digital. Indeks ini mencerminkan tingkat kemajuan pembangunan infrastruktur sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengukuran ini penting untuk menentukan ketimpangan infrastruktur antardaerah serta menjadi dasar perencanaan penguatan konektivitas dan pelayanan dasar.

Nama Indikator	Indeks Infrastruktur Daerah
Rumus	$I = \sum_{i=1}^{n} \omega_i \, x \, X_i$ Keterangan : I : Indeks Infrastruktur ω_i : Bobot untuk indikator ke – i XI : Nilai indikator ke-i yang telah di normalisasi n : Jumlah indikator yang digunakan
Interpretasi	Nilai Indeks Infrastruktur yang tinggi mencerminkan bahwa utilitas dasar seperti listrik, air bersih, jalan, drainase, pengelolaan limbah, persampahan, dan irigasi telah berfungsi baik, serta fasilitas pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan transportasi tersedia memadai dan berkualitas. Sebaliknya, nilai indeks yang rendah menunjukkan masih adanya keterbatasan atau ketimpangan infrastruktur yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kualitas hidup masyarakat.
Sumber Data	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bapelitbangda
Frekuensi	Tahunan

43. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)

Nama Indikator	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)
Definisi	Indikator ini mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur publik seperti jalan, air bersih, listrik, dan fasilitas umum lainnya. Indeks ini disusun berdasarkan hasil survei persepsi dan pengmisialaman masyarakat dalam mengakses dan menggunakan layanan infrastruktur. IKLI memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan publik dan menjadi bahan evaluasi serta perbaikan kebijakan infrastruktur.
Rumus	Skor rata-rata hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur
Interpretasi	Nilai indeks yang tinggi menunjukkan bahwa layanan infrastruktur publik dirasakan bermanfaat, mudah diakses, dan sesuai harapan masyarakat.
Sumber Data	BPS, Kementerian PUPR
Frekuensi	Tahunan

44. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum dari Jaringan Perpipaan [%]

Nama Indikator	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)

Nama Indikator	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)
Definisi	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan 46 ndust rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2. Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halam rumah (on premises); 3. Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4. Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.
Rumus Perhitungan	**PASMPP** $= \frac{JRTASMPP}{JRT}$X100% • PASMPP: Persentase rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan. • JRTASMPP: Jumlah rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan. • JRT: Jumlah rumah tangga seluruhnya di perkotaan.
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur capaian target RPJMD yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah.
Sumber Data	1. Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga oleh Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan 2. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS
Frekuensi	1. SKAM RT : Tahunan 2. Susenas KOR : Tahunan

45. Kapasitas Air Baku (m^3/detik)

Nama Indikator	Kapasitas Air Baku (m^3/detik)
Definisi	Debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, 46ndustry, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya.
Rumus Perhitungan	Total kapasitas debit pengambilan air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, 46ndustry dan lain-lain di setiap sumber air meliputi mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, dan atau sumber air lainnya.
Interpretasi	
Sumber Data	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
Frekuensi	Tahunan

46. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (%)

Nama Indikator	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (%)

Nama Indikator	**Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (%)**
Definisi	Maka rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi: a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut: 1. Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat, 2. Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita ≥ 7,2 m2 3. Memiliki akses air minum layak 4. Memiliki akses sanitasi layak
Rumus Perhitungan	1. Bagi kabupaten/kota yang telah menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh menggunakan rumus sebagai berikut: Persentase Rumah Tangga yang mengakses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan $PHLTB = \frac{JRTHLHTB}{JRT\ X\ 100}$ PHLTB = Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRTHLTB = Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRT = Jumlah rumah tangga 2. Bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka dapat menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak). PHLTB (proksi) $= \frac{JRTHLHTB\ (proksi)}{JRT\ X\ 100}$ PHLTB (proksi) Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRTHLTB (proksi) Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan;

Nama Indikator	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (%)
	JRT Jumlah rumah tangga Segregasi pengolahan data ini dapat digunakan untuk tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, perkotaan-perdesaan, dan desil pengeluaran
Interpretasi	Indikator ini untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan
Sumber Data	• Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS • Data Kementerian PUPR (untuk mengetahui status pelaksanaan PBG dan SLF di Kabupaten/Kota)
Frekuensi	Tahunan

47. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)
Definisi	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).
Rumus Perhitungan	Perhitungan IKLH Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara melakukan penjumlahan dari semua komponen indeks di Kabupaten/Kota (IKA, IKU, dan IKL) yang dikalikan masing-masing bobot sesuai dengan rumus penghitungan IKLH Kabupaten/Kota. IKLH Kabupaten/Kota dengan Ekosistem Gambut: IKLH = (0.3760 x IKA) + (0.4050 x IKU) + (0.1712 x IKTL) + (0.0478 x IKEG IKLH Kabupaten/Kota tanpa Ekosistem Gambut: IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKTL)
Interpretasi	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nomor | Kategori | Angka Rentang 1 | Sangat Baik | 90 ≤ x ≤ 100 2 | Baik | 70 ≤ x < 90 3 | Sedang | 50 ≤ x < 70 4 | Kurang | 25 ≤ x < 50 5 | Sangat Kurang | 0 ≤ x < 25
Sumber Data	Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, tutupan lahan, tutupan ekosistem gambut, dan air laut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DLHPKPP)
Frekuensi	Tahunan

48. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah [%]

Nama Indikator	**Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)**
Definisi	Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan; a. Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, vermi composting, biodigester, dsb. b. Daur ulang materi (material recovery) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti; plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memproses, dan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan pendaur ulang rantai akhir. Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta. Catatan: Mengacu pada definisi global dari UN-Habitat, bahwa makna dari waste recovery sepadan dengan kegiatan pengolahan sampah. Pemulihan (recovery) itu sendiri merupakan setiap kegiatan yang secara prinsip utamanya adalah sampah memiliki fungsi untuk mengganti bahan material lain untuk memenuhi fungsi tertentu, dalam alur produksi atau ekonomi yang lebih luas. Kegiatan pengolahan sampah menjadi energi dan/atau bahan bakar lainnya tidak dihitung ke dalam indikator sampah terolah.

Nama Indikator	**Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)**
Rumus Perhitungan	**Langkah ke-1: Menghitung Jumlah Sampah Terolah** Terdapat dua alternatif menghitung jumah sampah terolah: **Cara (1)** $SO = ST - MFPA + RDP$ **Keterangan:** SO — Sampah terolah (ton/hari) ST — Sampah terkumpul (ton/hari) MFPA — Sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari) RPD — Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) **Cara (2)** $SO = MFPD + DPA - RPD$ **Keterangan:** SO — Sampah terolah (ton/hari) MFPD — Sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan- daur ulang sampah (ton/hari) DPA — Material daur ulang yang diambil dari fasilitas pemrosesan akhir oleh sektor informal (ton/hari) RPD — Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) **Langkah ke-2: Menghitung Timbulan Sampah** $TS = TP\ x\ (TPRT + TPNRT)$ **Keterangan:** TS — Timbulan sampah (kg/hari) TP — Total populasi (orang) TPRT — Timbulan sampah per kapita dari rumah tangga (kg/orang/hari) TPNRT — Timbulan sampah per kapita dari non-rumah tangga (kg/hari)
	Jika tidak terdapat informasi TPNRT, maka pendekatan dapat diestimasi menggunakan perhitungan berikut. TS = 70% $dari\ rumah\ tangga$ + 30% $dari\ non - rumah\ tangga$ TS = $\frac{TSRT}{70\%}$ Keterangan:
	TS : Timbulan sampah (ton/hari) TSRT : Timbulan sampah rumah tangga (ton/hari) RT **Langkah ke-3: Menghitung Tingkat Sampah Terolah** **%SO** = $\frac{SO\ x\ 100\%}{ts}$ **Keterangan:** %SO : Tingkat sampah terolah (%) SO : Sampah terolah (ton/hari) TS : Timbulan sampah (ton/hari)

Nama Indikator	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengolahan sampah di Provinsi.
Sumber Data	1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS dan Podes (masih dalam proses uji coba) 2. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. SI INSAN Kementerian PUPR
Frekuensi	1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS dan Podes: Tahunan 2. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Tahunan 3. SI INSAN Kementerian PUPR: Tahunan

49. Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)

Nama Indikator	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)
Definisi	**Pengumpulan Sampah** Pengumpulan sampahadalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari- hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah rumah tangga yang: • Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau • Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu. Catatan: Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota. Penting untuk diketahui bahwa (a) Sampah terkumpul, dan (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah dua konsep yang berbeda. Pada (a) Sampah Terkumpul mengacu pada jumlah sampah yang mencapai fasilitas pengelolaan sampah, sementara (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mempertimbangkan rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah. Praktik lapangan yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota, sampah yang terkumpul dibuang ke

Nama Indikator	**Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)**
	lingkungan (tidak diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah). Dalam hal ini rumah tangga tersebut memiliki pelayanan pengumpulan sampah, namun sampah terkumpul mencemari lingkungan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan suatu Kabupaten/Kota memiliki nilai yang tinggi dalam "Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah", namun jumlah "sampah terkumpul" dan diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah rendah.
Rumus Perhitungan	Unit Satuan: Persentase Rumah tangga Cara Perhitungan: $$\textbf{PRTLP} = \frac{JRTLA}{JRTS}\ X\ 100\%$$ Keterangan: PRTLA = Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah JRTLA = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya **Sumber:** Diadaptasi dari Metadata SDGs, 2021 Rancangan Platform Pengelolaan Persampahan Nasional, 2023
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pelayanan rumah tangga untuk pengumpulan sampah di Provinsi.
Sumber Data	1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) MKP BPS 2. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS (masih dalam tahap pengusulan)
Frekuensi	1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) MKP BPS: 3 Tahunan 2. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS: Tahunan

50. Indeks Risiko Bencana

Nama Indikator	Indeks Risiko Bencana
Definisi	IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

Nama Indikator	Indeks Risiko Bencana
Rumus Perhitungan	$Risk = Hazard\ x\ \frac{Vulnerability}{Capacity}$ **Keterangan** Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Kapasitas (Capacity) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: 1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; 2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; 3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; 4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana; 5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; 6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan 7. Pengembangan sistem pemulihan bencana
Interpretasi	Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan. Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut: • lndeks <13 adalah Rendah • lndeks 13 - 144 adalah Sedang • lndeks >144 adalah Tinggi
Sumber Data	BNPB
Frekuensi	Tahunan

51. Indeks Kerukunan Umat Beragama [IKUB]

Nama Indikator	Indeks Kerukunan Umat Beragama [IKUB]
Definisi	Indeks yang menggambarkan sejauh mana tingkat kerukunan umat beragama. IKUB diukur melalui tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.
Rumus	$IKUB = \frac{\sum_{j=1}^{3} Indeks\ D_j}{3}$ Keterangan: • IPK = Indeks Kerukunan Umat Beragama • Dj = Dimensi ke-j Rumus menghitung indeks dimensi (Dj): $Indeks\ D_j = \frac{\sum_{i=1}^{n} SX_{ji}}{n_j}$

Nama Indikator	Indeks Kerukunan Umat Beragama [IKUB]
	Keterangan: • Dj = Dimensi ke-j • SX{ji} = Nilai indikator i pada dimensi ke-j • nj = Jumlah indikator dimensi ke-j
Interpretasi	Nilai IKUB terdiri dari 5 kategori, yaitu: • 0,00 – 20,00 = rukun sangat rendah • 20,01 – 40,00 = rukun rendah • 40,01 – 60,00 = rukun sedang • 60,01 – 80,00 = rukun tinggi • 80,01 – 100,00 = rukun sangat tinggi
Sumber Data	Bapelitbangda, Kementerian Agama,
Frekuensi	Tahunan

52. Indeks Keamanan Daerah

Nama Indikator	Indeks Keamanan Daerah
Definisi	Indeks Keamanan Daerah merupakan indeks yang mengukur capaian dari beberapa indikator yang terkait dengan ketentraman dan keamanan daerah. Indeks Keamanan merupakan indeks yang mengukur capaian dari beberapa indikator yang terkait dengan ketentraman dan keamanan daerah. Persentase yang terkait dengan ketentraman dan keamanan daerah. Persentase yang dihitung dari capaian 3 Indikator : 1) Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk (bobot 40%), 2) Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (bobot 30%), 3) Persentase Capaian Layanan Waktu Tanggap Kebakaran (bobot 30%)
Metode Perhitungan	**Indeks Keamanan Daerah** = (AK x 40%) + (PrKTPPO x 30%) + (RT x 30%) AK = Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk PrKTPPO = Persentase Perempuan Korban Kekerasan RT = Persentase Capaian Layanan Waktu Tanggap Kebakaran (bobot 30%)
Interpretasi	Bobot maksimal dari setiap indikator pembentuk disesuaikan dengan bobot masing-masing, misalnya untuk indikator AK, Ketika hasil Perhitungannya melebihi bobot 40% maka tetap dihitung sebesar 40%
Sumber Data	BPS Provinsi Sumatera Barat, Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Padang Pariaman, Dinsos PPPA Kabupaten Padang Pariaman
Frekuensi	Tahunan

53. Angka Kriminalitas [Per 100.000 Penduduk]

Nama Indikator	**Angka Kriminalitas [Per 100.000 Penduduk]**
Definisi	Indikator ini menunjukkan jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum per 100.000 penduduk dalam satu tahun. Angka ini mencerminkan tingkat keamanan publik serta efektivitas penanganan kejahatan oleh aparat keamanan. Kategori kriminalitas yang dihitung mencakup kejahatan konvensional seperti pencurian, perampokan, kekerasan, dan kejahatan lainnya. Data ini penting dalam merancang kebijakan keamanan daerah dan membangun rasa aman di masyarakat.
Rumus	(Jumlah kasus kriminal / Jumlah penduduk) × 100.000
Interpretasi	Semakin rendah angka kriminalitas, semakin baik tingkat keamanan dan ketertiban sosial di suatu daerah.
Sumber Data	Polres, BPS
Frekuensi	Tahunan

54. Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan [%]

Nama Indikator	**Persentase benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi (%)**
Definisi	Persentase situs cagar budaya yang dilestarikan adalah suatu indikator yang menunjukkan seberapa banyak situs cagar budaya yang telah teridentifikasi dan ditetapkan sebagai cagar budaya, kemudian berhasil dilindungi dan dilestarikan.
Metode Perhitungan	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan $= \frac{jumlah\ cagar\ budaya\ yang\ telah\ dilestarikan}{Jumlah\ cagar\ budaya\ yang\ di\ terdata}$ x 100%
Interpretasi	Angka persentase ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah situs cagar budaya yang telah dilestarikan dengan total jumlah situs cagar budaya yang telah teridentifikasi
Sumber Data	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

55. Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan [%]

Nama Indikator	**Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan [%]**
Definisi	Indikator ini mengukur tingkat pelestarian warisan budaya tak benda (WBTB) oleh pemerintah daerah, baik melalui pengakuan resmi, pembinaan, pewarisan nilai budaya, maupun penguatan eksistensi pelaku budaya. Warisan budaya tak benda mencakup tradisi, ekspresi lisan, seni pertunjukan, praktik sosial, ritual, serta pengetahuan dan keterampilan tradisional. Pelestarian ini mencerminkan komitmen terhadap keberlanjutan identitas budaya lokal di tengah arus globalisasi.
Rumus	(Jumlah WBTB yang dilestarikan / Total WBTB terdaftar) × 100%
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, menunjukkan semakin kuat komitmen pemerintah daerah dalam menjaga dan melestarikan kekayaan budaya non-material.
Sumber Data	Dinas Kebudayaan, BPS
Frekuensi	Tahunan

IV. INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)

A. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

1. Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)

Nama Indikator	**Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)**
Definisi	Konsumsi Listrik per kapita (kWh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (*kilo Watt hours)* energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung.
Rumus Perhitungan	$$\textbf{KLpk} = \frac{KLpln + KLnonpln}{P}$$ Keterangan: KLpk : Konsumsi listrik per kapita KL*pln* : Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh PT. PLN KL*nonpln*: Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh non PT. PLN P: Jumlah penduduk Catatan: 1. Jumlah pemakaian tenaga listrik adalah total penjualan listrik PT. PLN dan non PT. PLN yang disalurkan ke pelanggan; 2. Perhitungan indikator masih difokuskan pada wilayah usaha Pt. PLN.
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengetahui kualitas pemenuhan kebutuhan listrik dan rata-rata konsumsi listrik per kapita yang didukung oleh pengelolaan ketenagalistrikan guna mencapai keberhasilan pembangunan nasional.
Sumber Data	PT PLN, BPS
Frekuensi	Tahunan

2. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)

Nama Indikator	**Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)**
Definisi	• Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. • Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya

Nama Indikator	**Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)**
Rumus Perhitungan	$$PoU = \int_{x<MDER} f(x)\,dx$$ Keterangan: PoU : Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal. MDER : Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kkal (*Minimum Dietary Energy Requirement*). f(x) : Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu PoU = Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal. MDER = Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kkal (*Minimum Dietary Energy Requirement*). f(x) = Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu
Interpretasi	Mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasikan semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

3. Kapasitas Air Baku (m^3/detik)

Nama Indikator	**Kapasitas Air Baku (m^3/detik)**
Definisi	Debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya.
Rumus Perhitungan	Total kapasitas debit pengambilan air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri dan lain-lain di setiap sumber air meliputi mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, dan atau sumber air lainnya.
Interpretasi	
Sumber Data	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
Frekuensi	Tahunan

4. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)

Nama Indikator	**Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)**
Definisi	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2. Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halam rumah (on premises); 3. Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4. Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.
Rumus Perhitungan	$\textbf{PASMPP} = \frac{JRTASMPP}{JRT} \text{X}100\%$ • PASMPP: Persentase rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan. • JRTASMPP: Jumlah rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan. • JRT: Jumlah rumah tangga seluruhnya di perkotaan.
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur capaian target RPJMD yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah.
Sumber Data	1. Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga oleh Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan 2. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS
Frekuensi	1. SKAM RT : Tahunan 2. Susenas KOR : Tahunan

5. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Nama Indikator	**Indeks Kualitas Tutupan Lahan [Indeks]**
Definisi	Indeks Kualitas Tutupan Lahan adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan.
Rumus Perhitungan	'IKTL = 100 – ((84,3 – (TL x 100)) x 50/54,3)
Interpretasi	IKTL = Sangat baik (90 = x = 100) IKTL = Baik (70 = x < 90) IKTL = Sedang (50 = x < 70) IKTL = Kurang (25 = x < 50) IKTL = Sangat Kurang (0 = x < 25)
Sumber Data	KLHK (Peta Tutupan Lahan), Dinas Lingkungan Hidup, Citra Satelit (Landsat/Sentinel), Bappenas melalui sistem SDG Dashboard atau DSS, BPS Provinsi Sumatera Barat
Frekuensi	Tahunan/Dua Tahunan

6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nama Indikator	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>Perhitungan IKLH Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara melakukan penjumlahan dari semua komponen indeks di Kabupaten/Kota (IKA, IKU, dan IKL) yang dikalikan masing-masing bobot sesuai dengan rumus penghitungan IKLH Kabupaten/Kota.
a. IKLH Kabupaten/ Kota dengan Ekosistem Gambut
$IKLH$ = (0,3760 x IKA) + (0,4050 x IKU) + (0,1712 x IKTL) + (0,0478 x IKEG)
b. IKLH Kabupaten/ Kota tanpa Ekosistem Gambut
$IKLH$ = (0,3760 x IKA) + (0,4050 x IKU) + (0,1712 x IKTL)
Keterangan
IKA = Indeks Kualitas Air
IKU = Indeks Kualitas Udara
IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan
= Indeks Kualitas Ekosistem Gambut
IKEG</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
<table>
<tr><td>No.</td><td>Kategori</td><td>Angka Rentang</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Sangat Baik</td><td>90 ≤ x ≤ 100</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Baik</td><td>70 ≤ x < 90</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Sedang</td><td>50 ≤ x < 70</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Kurang</td><td>25 ≤ x < 50</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Sangat Kurang</td><td>0 ≤ x < 25</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Sumber Data/ PD Penanggung Jawab</td><td>Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, tutupan lahan, tutupan ekosistem gambut, dan air laut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Dinas Lingkungan Hidup Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DLHPKPP)</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
</table>

7. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)

Nama Indikator	**Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)**
Definisi	Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)
Rumus Perhitungan	$PSA = \frac{JRTST + JRIPLT\ X\ 100\%}{JRTS}$

Nama Indikator	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)
	PSA = Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman JRTSPAL = Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T JRTIPLT = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangka septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data akses sanitasi aman sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Akses terhadap sanitasi yang aman serta sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat
Sumber Data	1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS 2. Data Infrastruktur Kementerian PUPR
Frekuensi	Tahunan

8. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)

Nama Indikator	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
Definisi	Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan; c. Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, vermi composting, biodigester, dsb. d. Daur ulang materi (material recovery) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna

Nama Indikator	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
	setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti; plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memproses, dan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan pendaur ulang rantai akhir. Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta. Catatan: Mengacu pada definisi global dari UN-Habitat, bahwa makna dari waste recovery sepadan dengan kegiatan pengolahan sampah. Pemulihan (recovery) itu sendiri merupakan setiap kegiatan yang secara prinsip utamanya adalah sampah memiliki fungsi untuk mengganti bahan material lain untuk memenuhi fungsi tertentu, dalam alur produksi atau ekonomi yang lebih luas. Kegiatan pengolahan sampah menjadi energi dan/atau bahan bakar lainnya tidak dihitung ke dalam indikator sampah terolah.
Rumus Perhitungan	**Langkah ke-1: Menghitung Jumlah Sampah Terolah** Terdapat dua alternatif menghitung jumah sampah terolah: **Cara (1)** $SO = ST - MFPA + RDP$ **Keterangan:** SO — Sampah terolah (ton/hari) ST — Sampah terkumpul (ton/hari) MFPA — Sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari) RPD — Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) **Cara (2)** $SO = MFPD + DPA - RPD$ **Keterangan:**
	SO — Sampah terolah (ton/hari) MFPD — Sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan- daur ulang sampah (ton/hari) DPA — Material daur ulang yang diambil dari fasilitas pemrosesan akhir oleh sektor informal (ton/hari) RPD — Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari)
	Langkah ke-2: Menghitung Timbulan Sampah $TS = TP\ x\ (TPRT + TPNRT)$

Nama Indikator	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
	Keterangan: TS — Timbulan sampah (kg/hari) TP — Total populasi (orang) TPRT — Timbulan sampah per kapita dari rumah tangga (kg/orang/hari) TPNRT — Timbulan sampah per kapita dari non-rumah tangga (kg/hari) Jika tidak terdapat informasi TPNRT, maka pendekatan dapat diestimasi menggunakan perhitungan berikut. $TS = 70\%\ dari\ rumah\ tangga + 30\%\ dari\ non - rumah\ tangga$ $\text{TS} = \frac{TSRT}{70\%}$ Keterangan: TS : Timbulan sampah (ton/hari) TSRT : Timbulan sampah rumah tangga (ton/hari) RT **Langkah ke-3: Menghitung Tingkat Sampah Terolah** $\%SO = \frac{SO\ x\ 100\%}{ts}$ **Keterangan:** %SO : Tingkat sampah terolah (%) SO : Sampah terolah (ton/hari) TS : Timbulan sampah (ton/hari)
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengolahan sampah di Provinsi.
Sumber Data	1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS dan Podes (masih dalam proses uji coba) 2. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. SI INSAN Kementerian PUPR
Frekuensi	1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS dan Podes: Tahunan 2. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Tahunan 3. SI INSAN Kementerian PUPR: Tahunan

9. Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)

Nama Indikator	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)
Definisi	**Pengumpulan Sampah** Pengumpulan sampahadalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah rumah tangga yang:

Nama Indikator	**Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)**
	• Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau • Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu. Catatan: Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota. Penting untuk diketahui bahwa (a) Sampah terkumpul, dan (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah dua konsep yang berbeda. Pada (a) Sampah Terkumpul mengacu pada jumlah sampah yang mencapai fasilitas pengelolaan sampah, sementara (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mempertimbangkan rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah. Praktik lapangan yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota, sampah yang terkumpul dibuang ke lingkungan (tidak diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah). Dalam hal ini rumah tangga tersebut memiliki pelayanan pengumpulan sampah, namun sampah terkumpul mencemari lingkungan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan suatu Kabupaten/Kota memiliki nilai yang tinggi dalam "Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah", namun jumlah "sampah terkumpul" dan diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah rendah.
Rumus Perhitungan	Unit Satuan: Persentase Rumah tangga Cara Perhitungan: $$\textbf{PRTLP} = \frac{JRTLA}{JRTS} X\ 100\%$$ Keterangan:

10. Indeks Risiko Bencana

Nama Indikator	**Indeks Risiko Bencana**
Definisi	IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

Nama Indikator	Indeks Risiko Bencana
Rumus Perhitungan	$Risk = Hazard\ x\ \frac{Vulnerability}{Capacity}$ **Keterangan** Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Kapasitas (Capacity) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: 1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; 2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; 3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; 4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana; 5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; 6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan 7. Pengembangan sistem pemulihan bencana
Interpretasi	Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan. Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut: • lndeks <13 adalah Rendah • lndeks 13 - 144 adalah Sedang • lndeks >144 adalah Tinggi
Sumber Data	BNPB
Frekuensi	Tahunan

11. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Definisi	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).
Rumus Perhitungan	Perhitungan IKLH Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara melakukan penjumlahan dari semua komponen indeks di Kabupaten/Kota (IKA, IKU, dan IKL) yang dikalikan masing-masing bobot sesuai dengan rumus penghitungan IKLH Kabupaten/Kota. a. IKLH Kabupaten/ Kota dengan Ekosistem Gambut $IKLH$ = (0,3760 x IKA) + (0,4050 x IKU) + (0,1712 x IKTL) + (0,0478 x IKEG) b. IKLH Kabupaten/ Kota tanpa Ekosistem Gambut $IKLH$ = (0,3760 x IKA) + (0,4050 x IKU) + (0,1712 x IKTL) Keterangan

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</td></tr>
<tr><td></td><td>IKA = Indeks Kualitas Air
IKU = Indeks Kualitas Udara
IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan
IKEG = Indeks Kualitas Ekosistem Gambut</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
<table>
<tr><td>No.</td><td>Kategori</td><td>Angka Rentang</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Sangat Baik</td><td>90 ≤ x ≤ 100</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Baik</td><td>70 ≤ x < 90</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Sedang</td><td>50 ≤ x < 70</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Kurang</td><td>25 ≤ x < 50</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Sangat Kurang</td><td>0 ≤ x < 25</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Sumber Data/ PD Penanggung Jawab</td><td>Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, tutupan lahan, tutupan ekosistem gambut, dan air laut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Dinas Lingkungan Hidup Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DLHPKPP)</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
</table>

12. Jumlah Penduduk (jiwa)

Nama Indikator	**Jumlah Penduduk (jiwa)**
Definisi	Jumlah penduduk adalah total banyaknya individu yang secara de jure (berdasarkan administrasi kependudukan) berdomisili tetap di suatu wilayah administrasi (kabupaten/kota) pada waktu tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, dari semua kelompok umur.
Rumus	∑ Seluruh penduduk yang tercatat secara administratif di wilayah pada tahun tertentu (berdasarkan data Disdukcapil atau BPS)
Interpretasi	Menunjukkan total populasi daerah. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula potensi kebutuhan akan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih, permukiman), serta sumber daya manusia sebagai faktor pembangunan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS): Hasil proyeksi penduduk tahunan, Sensus Penduduk
Frekuensi	Tahunan

13. Laju Pertumbuhan Penduduk (%)

Nama Indikator	**Laju Pertumbuhan Penduduk (%)**
Definisi	Laju Pertumbuhan Penduduk adalah persentase pertambahan jumlah penduduk dalam suatu wilayah pada kurun waktu tertentu (biasanya tahunan), yang disebabkan oleh kelahiran, kematian, dan migrasi (perpindahan penduduk).
Rumus	$r = [\ln(Pt / P_0) / t] \times 100$ Keterangan: r = Laju pertumbuhan penduduk per tahun (%) Pt = Jumlah penduduk pada tahun akhir P_0 = Jumlah penduduk pada tahun awal t = Selisih tahun (periode) ln = Logaritma natural

Nama Indikator	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
Interpretasi	Menunjukkan seberapa cepat populasi bertambah. Laju pertumbuhan yang tinggi berimplikasi pada peningkatan kebutuhan layanan dasar (kesehatan, pendidikan, perumahan), sementara pertumbuhan yang rendah bisa menunjukkan stagnasi atau bahkan penurunan jumlah penduduk.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Tahunan

14. Rasio Penduduk (jiwa/km²)

Nama Indikator	Rasio Penduduk (jiwa/km²)
Definisi	Rasio Penduduk adalah indikator yang menunjukkan tingkat kepadatan penduduk, dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk terhadap luas wilayah suatu daerah. Ini mencerminkan tekanan penduduk terhadap ruang dan sumber daya.
Rumus	Rasio Penduduk = Jumlah Penduduk / Luas Wilayah Keterangan: Jumlah Penduduk dalam satuan jiwa Luas Wilayah dalam satuan km²
Interpretasi	Rasio penduduk yang tinggi menunjukkan daerah dengan kepadatan tinggi, yang dapat memicu tekanan terhadap infrastruktur, layanan publik, dan lingkungan. Rasio yang terlalu rendah bisa menunjukkan daerah yang belum berkembang atau memiliki keterbatasan akses.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS), Disdukcapil, DPUPR
Frekuensi	Tahunan

15. Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)

Nama Indikator	Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)
Definisi	Kepadatan Penduduk adalah indikator yang menunjukkan banyaknya penduduk yang mendiami setiap satuan luas wilayah (biasanya per kilometer persegi). Indikator ini mencerminkan distribusi spasial penduduk dan menjadi acuan dalam penataan ruang, penyediaan layanan publik, serta evaluasi tekanan terhadap sumber daya wilayah.
Rumus	Kepadatan Penduduk = Jumlah Penduduk / Luas Wilayah (km²) Keterangan: Jumlah Penduduk dalam satuan jiwa Luas Wilayah dalam km² (mengacu pada batas administrasi resmi)
Interpretasi	Nilai kepadatan penduduk yang tinggi menunjukkan wilayah yang padat penduduk dan berpotensi membutuhkan perhatian khusus dalam aspek tata ruang, layanan dasar, dan pengelolaan lingkungan. Nilai yang rendah menunjukkan sebaran penduduk yang jarang atau wilayah yang belum banyak dihuni.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Tahunan

B ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

Nama Indikator	**Pertumbuhan Ekonomi (%)**
Definisi	Merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu
Rumus Perhitungan	$r(k)=\frac{PDRB(k)t}{PDRB\ (k)t-1} x\ 100\%$ Keterangan k = Komponen t = Tahun berjalan (atas dasar harga konstan) t-1 = Tahun sebelum tahun berjalan (atas dasar harga konstan)
Interpretasi	Hasil perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

2. Tingkat Kemiskinan (%)

Nama Indikator	**Tingkat Kemiskinan (%)**
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Rumus Penghitungan	$P_\alpha = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}\left[\frac{z-y_i}{z}\right]^\alpha$ dengan keterangan: • α =0 • z = garis kemiskinan • yi = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i=1,2,3, …, qi = 1,2,3, …, qi=1,2,3, …, q), yi<zy_i < zyi <z • q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan • n = jumlah penduduk
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk regional.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Maret dan September)

3. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rp Juta)

Nama Indikator	**Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rp Juta)**
Definisi	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Rumus Perhitungan	$PDRB\ per\ kapita = \frac{PDRB_{ADHB}}{populasi}$ Keterangan: $PDRB_{ADHB}$ = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Populasi = jumlah penduduk regional t = periode
Interpretasi	Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

4. Tingkat Pengangguran Terbuka [%]

Nama Indikator	**Tingkat Pengangguran Terbuka [%]**
Definisi	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganggguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Rumus	TPT = $\frac{PP}{PAK}\ x\ 100\%$ Keterangan: TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)
Interpretasi	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antarkelompok tersebut.

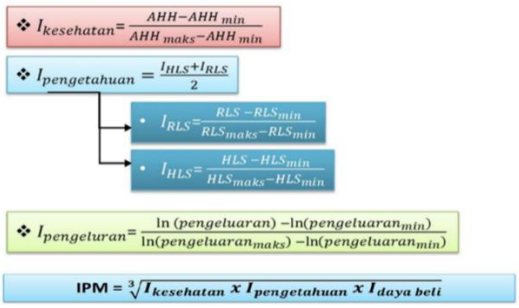
Nama Indikator	**Tingkat Pengangguran Terbuka [%]**
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Tahunan, Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

5. Ketimpangan Pendapatan/ Gini Ratio

Nama Indikator	**Ketimpangan Pendapatan/ Gini Ratio**
Definisi	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva Lorenz dan aspek matematis.
Rumus Perhitungan	Rasio Gini = $1 - \sum_{i=1}^{n} (\ pi - pi\text{-}1)(\ Yi - Yi\text{-}1)$ Keterangan: pi = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i Yi = Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i n = jumlah observasi
Interpretasi	Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut: 1. Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang. 2. Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukan ketimpangan sedang. 3. Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukan pemerataan relatif baik. Secara visual, rasio gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva Lorenz, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (perfect equality) dan kurva Lorenz. Semakin jauh jarak kurva Lorenz dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Maret dan September)

6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Nama Indikator	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**
Definisi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan, dan kehidupan layak. IPM memberikan informasi yang penting bagi pembuat kebijakan untuk mengembangkan kebijakan pembangunan yang lebih baik dan

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</td></tr>
<tr><td></td><td>berkelanjutan.</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>Indeks pembangunan manusia diukur melalui tiga komponen utama:
1. Angka/Umur Harapan Hidup saat Lahir
Angka Angka Harapan Hidup (AHH) saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Indikator ini merefleksikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Metodologi penghitungan indikator ini adalah pendekatan tak langsung (indirect estimation) dan distandardisasi menggunakan standar penghitungan UNDP.
2. Dimensi Pengetahuan (Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS))
Kedua indikator ini merupakan representasi dari kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan formal. HLS menggambarkan kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan formal dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar, sementara RLS menggambarkan tingkat pendidikan stok modal manusia yang dimiliki oleh suatu wilayah dan dihitung berdasarkan jumlah tahun yang ditempuh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan kedua indikator ini memanfaatkan data yang bersumber dari Susenas bulan Maret, data jumlah siswa yang menjalani pendidikan dengan bermukim dari Kementerian Agama, serta hasil inventarisasi data sektoral di kabupaten/kota.
3. Pengeluaran riil per Kapita Disesuaikan
Pengeluaran riil per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas modul konsumsi bulan Maret, indeks harga konsumen, serta harga komoditas nonmakanan hasil survei harga konsumen.
 

<table><tr><td>Klasifikasi IPM</td><td>Capaian IPM</td></tr><tr><td>Sangat Tinggi</td><td>IPM ≥ 80</td></tr><tr><td>Tinggi</td><td>70 ≤ IPM < 80</td></tr><tr><td>Sedang</td><td>60 ≤ IPM < 70</td></tr><tr><td>Rendah</td><td>IPM < 60</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh</td></tr>
</table>

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
	suatu daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.
Sumber Data/ OPD Penanggung Jawab	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

7. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta/ orang)

Nama Indikator	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta/ orang)
Definisi	Produktivitas tenaga kerja adalah kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang produksi. Indikator ini mencerminkan besaran kontribusi tenaga kerja dalam kegiatan ekonomi.
Rumus Perhitungan	Produktivitas Tenaga Kerja (Juta/orang) $= \frac{PDRB\ tahun\ berjalan\ ADHK}{Jumlah\ Tenaga\ Kerja}$
Interpretasi	Semakin tinggi tingkat produktivitas tenaga kerja (juta/orang), semakin efisien penggunaan tenaga kerja dalam menghasilkan output atau produksi. Ini menunjukkan bahwa setiap orang dalam pekerjaan atau sektor tersebut mampu menghasilkan jumlah output yang lebih besar.
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan Publikasi PDRB oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Tahunan

8. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)

Nama Indikator	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
Definisi	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.
Rumus Perhitungan	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate*/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program *Microcomputer Program for Demographic Analysis* (MCPDA) atau Mortpack
Interpretasi	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
Sumber Data Jawab	Proyeksi dari SUPAS dan SP sebagai proksi/pendekatan Badan Pusat Statistik
Frekuensi	SP: 10 tahunan SUPAS: 10 tahunan

9. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)

Nama Indikator	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)

Nama Indikator	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
Definisi	Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.
Rumus Perhitungan	Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 100.000. $AKI = \frac{JKI}{JLH} X\ 100.000$ Keterangan: AKI = Angka Kematian Ibu JKI = Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau estimasi pada waktu tertentu
Interpretasi	Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) adalah ukuran yang digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. AKI sangat penting karena memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara atau wilayah. Angka Kematian Ibu (AKI) yang rendah di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: 1. Kualitas Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah biasanya mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan antenatal, persalinan, dan pasca persalinan. 2. Akses Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan akses yang baik ke pelayanan kesehatan. Ini bisa berarti bahwa fasilitas kesehatan mudah dijangkau dan terjangkau oleh masyarakat. 3. Pendidikan Kesehatan: AKI yang rendah bisa mencerminkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya pelayanan kesehatan selama kehamilan dan persalinan 4. Status Gizi: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan status gizi ibu yang baik. Gizi yang baik selama kehamilan sangat penting untuk mencegah komplikasi yang bisa mengancam nyawa ibu. 5. Kesadaran Masyarakat: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan selama kehamilan dan persalinan
Sumber Data	Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)
Frekuensi	Sensus Penduduk (SP): 10 tahunan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS): 10 tahunan

10. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)

Nama Indikator	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)

Nama Indikator	**Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)**
Definisi	Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010. **a.** Sangat pendek: *Zscore* < -3,0 **b.** Pendek: *Zscore* ≥ -3,0 s/d *Zscore* < -2,0
Rumus Perhitungan	Cara perhitungan (1) 1). Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB\ (5)P\ stunting = \frac{aJAB\ (5)P\ stunting}{JAB\ (5)}\ X\ 100\%$ Keterangan $PAB(5)P$ = Prevalensi anak balita yang stunting menderita pendek $JAB(5)Pstunting$ = (stunting) Jumlah anak balita pendek $JAB(5)$ = (stunting) pada waktu tertentu Jumlah anak balita pada waktu yang sama Cara perhitungan (2) 2). Jumlah Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB\ (5)SP\ stunting = \frac{JAB\ (5)P\ stunting}{JAB\ (5)}\ X\ 100\%$ $PAB\ (5)SP\ stunting = \frac{JAB\ (5)SP\ stunting}{JAB\ (5)}\ X\ 100\%$ $PAB(5)P$ = Prevalensi anak balita yang = stunting menderita pendek $JAB(5)Pstunting$ = (stunting) Jumlah anak balita pendek $JAB(5)$ (stunting) pada waktu tertentu Jumlah anak balita pada waktu yang sama Cara perhitungan (3) $Prevalensi\ stunting = PAB(5)P + PAB(5)SP$
Interpretasi	Prevalensi stunting yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk: 1). Kekurangan Gizi: Stunting adalah indikator kekurangan gizi kronis. Prevalensi stunting yang tinggi menunjukkan bahwa banyak anak di wilayah tersebut menderita kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. 2). Akses Pelayanan Kesehatan: Prevalensi stunting yang

Nama Indikator	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
	tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak. 3). Kemiskinan: Stunting sering kali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan stunting. 4). Pendidikan: Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, juga berpengaruh terhadap prevalensi stunting. Orang tua yang berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya gizi dan kesehatan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. 5). Faktor Lingkungan: Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat berkontribusi terhadap prevalensi stunting.
Sumber Data	SSGI Survei Kesehatan Indonesia perlu dieksplor penggunaan data program Kementerian Kesehatan (E-PPGBM) untuk penyediaan data tahunan
Frekuensi	SSGI: tahunan Survei Kesehatan Indonesia : 5 tahunan

11. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)

Nama Indikator	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)
Definisi	Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu
Rumus Perhitungan	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu.
Interpretasi	Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting: **1. Penemuan Kasus**: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis. **2. Pengobatan Kasus**: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis.
Sumber Data	Data Program Kementerian Kesehatan (Dinas Kesehatan)
Frekuensi	Tahunan

12. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)

Nama Indikator	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) (%)

Definisi	Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap
Rumus Perhitungan	Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan.
Interpretasi	Ini adalah indikator penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah.
Sumber Data	Data Program Kementerian Kesehatan (Dinas Kesehatan)
Frekuensi	Tahunan

13. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)

Nama Indikator	**Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)**
Definisi	Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.
Rumus Perhitungan	Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia dikali 100%. $Persentase\ cakupan\ kepesertaan\ JKN = \frac{Jumlah\ peserta\ JKN}{Jumlah\ penduduk\ Indonesia} \times 100\%$
Interpretasi	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: 1. Akses Pelayanan Kesehatan: Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan. 2. Kesadaran Masyarakat: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. 3. Komitmen Pemerintah Daerah: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional. 4. Pencapaian Universal Health Coverage (UHC): Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian Universal Health Coverage (UHC), yaitu kondisi dmana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan.
Sumber Data	BPJS, DJSN, Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

14. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:

i. Literasi membaca

ii. Numerasi

Nama Indikator	**Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:** **iii. Literasi membaca** **iv. Numerasi**
Definisi	Jumlah satuan pendidikan di provinsi X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di provinsi X. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 5. Perlu intervensi khusus 6. Dasar 7. Cakap 8. Mahir Dikategorikan sudah "mencapai kompetensi minimum" jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap".
Rumus Perhitungan	$\%satdik\ min.SKM = \frac{\sum_{i=1}^{n} satdik\ min.SKM}{n}$ Keterangan: $satdik\ min.\ SKM$ = Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi n = Jumlah satuan pendidikan
Interpretasi	Misal: Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca tahun 2022 sebesar 29,16%. Artinya, ada 29,16% satuan pendidikan di Indonesia atau sebanyak 83.808 satuan pendidikan yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca (paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap").

Sumber Data	Asesmen Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

15. Rata-rata Lama Sekolah (Penduduk Usia di Atas 15 Tahun) (tahun)

Nama Indikator	**Rata-rata Lama Sekolah (Penduduk Usia di Atas 15 Tahun) (tahun)**

Definisi	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut:
	a. Tidak punya ijazah = 0 tahun;
	b. SD = 6 tahun;
	c. SMP = 9 tahun;
	d. SMA = 12 tahun;
	e. D1/D2 = 14 tahun;
	f. D3 = 15 tahun;
	g. D4 = 16 tahun;
	h. S1 = 17 tahun;
	i. S2 = 19 tahun;
	j. S3 = 22 tahun.
	Konversi ijazah ke menjadilamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini:
	a. Tidak pernah sekolah = 0 tahun;
	b. Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1;
	c. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1;
	d. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir;
	e. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir –1

Rumus Perhitungan	$Rata-rata\ Lama\ Sekolah\ 15+ = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$ Keterangan: $P15+$ = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas xi = Lama sekolah penduduk ke- i
Interpretasi	Misal: RLS 15+ Indonesia tahun 2022 = 9,08 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,08 tahun atau telah menamatkan kelas IX.
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)

16. Harapan Lama Sekolah

Nama Indikator	**Harapan Lama Sekolah**
Definisi	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang
Rumus Perhitungan	$nEt\ Harapan\ Lama\ Sekolah = FK\ iPti=<i$ Keterangan: FK = Faktor koreksi pesantren Et = Jumlah penduduk usia I yang bersekolah pada tahun t iPt i = Jumlah penduduk usia i pada tahun t Usia (7,8, ..., n)
Interpretasi	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal: HLS Indonesia pada tahun 2022 sebesar 13,10 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,10 tahun atau setara dengan Diploma I.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)

17. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)

Nama Indikator	**Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)**
Definisi	• Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. • Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% (seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di provinsi tersebut sudah menyelesaikan pendidikan tinggi). • Jenjang pendidikan tinggi mencakup: **a.** Diploma I-IV **b.** S1 **c.** S2 **d.** S2 Terapan **e.** S3

Rumus Perhitungan	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi $= \frac{Jumlah\ penduduk\ 15\ tahun\ ke\ atas,\ yang\ lulus/berijazah\ pendidikan\ tinggi\ di\ Provinsi\ X}{Jumlah\ penduduk\ 15\ tahun\ ke\ atas\ di\ Provinsi\ X} \times 100\%$
Interpretasi	• Positif • Tingginya proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Tahunan

18. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)

Nama Indikator	**Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)**
Definisi	Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. • Bidang keahlian menengah (semi-skilled) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan mental tinggi. • Bidang keahlian tinggi (skilled) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja dengan pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas pekerjaan yang dilakukannya sehingga mampu menyelesaikan tugas yang sifatnya kompleks dan membutuhkan kemampuan mental tinggi. • Indikator ini diperoleh dengan membagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi dengan jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian rendah atau menengah atau tinggi.

Tingkat Pendidikan	Tingkat Pendidikan	Tingkat Pendidikan Tinggi
▪ Tidak/ belum tamat SD ▪ SD/ MI/ SDLB/ Paket A ▪ SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B	▪ SMA/ MA/ SMLB/ Paket C ▪ SMK ▪ MAK	▪ Diploma I/II/III ▪ Diploma IV ▪ S1 ▪ S2 ▪ S2 terapan ▪ S3

Rumus Perhitungan	$Persentase\ pekerja\ lulusan\ pendidikan\ menengah\ dan\ tinggi\ yang\ bekerja\ di\ bidang\ keahlian\ menengah\ tinggi\ (Provinsi\ X) = \frac{Jumlah\ penduduk\ 15\ tahun\ ke\ atas,\ yang\ lulus\ pendidikan\ menengah\ atau\ pendidikan\ tinggi,\ dan\ sedang\ bekerja\ pada\ bidang\ keahlian\ menengah\ atau\ tinggi,\ pada\ tahun\ T\ di\ Provinsi\ X}{Jumlah\ penduduk\ 15\ tahun\ ke\ atas,\ yang\ lulus\ pendidikan\ menengah\ atau\ pendidikan\ tinggi,\ dan\ sedang\ bekerja\ pada\ tahun\ T\ di\ Provinsi\ X} X\ 100\%$

Interpretasi	Positif: Meningkatnya persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi menggambarkan peningkatan link and match tenaga kerja antara dunia pendidikan (supply) dan lapangan kerja (demand) dengan klasifikasi keahlian yang sesuai dengan tingkat pendidikan.
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus), namun yang digunakan adalah publikasi Agustus.

19. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)

Nama Indikator	**Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)**
Definisi	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.
Rumus Penghitungan	$Cakupan\ Jamsos\ Naker = \frac{Jumlah\ peserta\ BPJS\ Ketenagakerjaan}{Jumlah\ semesta\ penduduk\ bekerja} \times 100\%$ Dimana: *Peserta*= Pekerja Penerima Upah (PPU), Jasa Konstruksi, dan Pekerja Bukan Penerima Upah *Semesta penduduk bekerja* = Penduduk Bekerja yang berusia 15-65 tahun
Interpretasi	Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko- risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak.
Sumber Data	BPJS Ketenagakerjaan dan BPS, Susenas.
Frekuensi	Setiap bulan dan survei dua kali setahun, bulan Maret dan September setiap tahunnya.

20. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)

Nama Indikator	**Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)**
Definisi	Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakan jari atau

Nama Indikator	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)
	tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan 4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat.
Rumus Perhitungan	$\% PD_{formal} = \frac{\sum PD_{formal}}{\sum AKPD} x\ 100\%$ PDformal = Pekerja penyandang disabilitas sektor formal AKPD = Angkatan kerja penyandang disabilitas
Interpretasi	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan proporsi penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai terhadap total angkatan kerja penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal mendapatkan jobs security, penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang lebih baik untuk mendapatkan kehidupan yang layak dibandingkan mereka yang bekerja di sektor informal.
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), BPS Provinsi

21. Persentase Cagar Budaya yang di lestarikan

Nama Indikator	Persentase Cagar Budaya yang di lestarikan
Definisi	Persentase situs cagar budaya yang dilestarikan adalah suatu indikator yang menunjukkan seberapa banyak situs cagar budaya yang telah teridentifikasi dan ditetapkan sebagai cagar budaya, kemudian berhasil dilindungi dan dilestarikan.
Metode Perhitungan	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan $= \frac{jumlah\ cagar\ budaya\ yang\ telah\ dilestarikan}{Jumlah\ cagar\ budaya\ yang\ di\ terdata}$ x 100%
Interpretasi	Angka persentase ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah situs cagar budaya yang telah dilestarikan dengan total jumlah situs cagar budaya yang telah teridentifikasi
Sumber Data	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

22. Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan [%]

Nama Indikator	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan [%]

Definisi	Indikator ini mengukur tingkat pelestarian warisan budaya tak benda (WBTB) oleh pemerintah daerah, baik melalui pengakuan resmi, pembinaan, pewarisan nilai budaya, maupun penguatan eksistensi pelaku budaya. Warisan budaya tak benda mencakup tradisi, ekspresi lisan, seni pertunjukan, praktik sosial, ritual, serta pengetahuan dan keterampilan tradisional. Pelestarian ini mencerminkan komitmen terhadap keberlanjutan identitas budaya lokal di tengah arus globalisasi.
Rumus	(Jumlah WBTB yang dilestarikan / Total WBTB terdaftar) × 100%
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, menunjukkan semakin kuat komitmen pemerintah daerah dalam menjaga dan melestarikan kekayaan budaya non-material.
Sumber Data	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BPS
Frekuensi	Tahunan

23. Indeks Kerukunan Umat Beragama [IKUB]

Nama Indikator	**Indeks Kerukunan Umat Beragama [IKUB]**
Definisi	Indeks yang menggambarkan sejauh mana tingkat kerukunan umat beragama. IKUB diukur melalui tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.
Rumus	$$IKUB = \frac{\sum_{j=1}^{3} Indeks\, D_j}{3}$$ Keterangan: • IPK = Indeks Kerukunan Umat Beragama • Dj = Dimensi ke-j Rumus menghitung indeks dimensi (Dj): $$Indeks\, D_j = \frac{\sum_{i=1}^{n} SX_{ji}}{n_j}$$ Keterangan: • Dj = Dimensi ke-j • SX{ji} = Nilai indikator i pada dimensi ke-j • nj = Jumlah indikator dimensi ke-j
Interpretasi	Nilai IKUB terdiri dari 5 kategori, yaitu: • 0,00 – 20,00 = rukun sangat rendah • 20,01 – 40,00 = rukun rendah • 40,01 – 60,00 = rukun sedang • 60,01 – 80,00 = rukun tinggi • 80,01 – 100,00 = rukun sangat tinggi
Sumber Data	Bapelitbangda, Kementerian Agama
Frekuensi	Tahunan

24. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Nama Indikator	**Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Indeks**

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Indeks
Definisi	Indeks Pembangunan Keluarga adalah suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. iBangga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. Terdiri dari 3 dimensi (ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan), 11 indikator, dan 17 variabel
Rumus	iBangga = (Skor Dimensi Ketenteraman + Skor Dimensi Kemandirian + Skor Dimensi Kebahagiaan)
Interpretasi	Nilai Indeks Pembangunan Keluarga menunjukkan tingkatan kualitas pembangunan keluarga di Indonesia, iBangga dengan nilai lebih dari 70 maka akan masuk kategori tangguh, antara 40-70 akan masuk dalam kategori berkembang, dan apabila kurang dari 40 akan masuk dalam kategori rentan.
Sumber Data	BKKBN
Frekuensi	Tahunan

25. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Definisi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.
Rumus Perhitungan	Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formulayang digunakan adalah sebagai berikut: 7. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki $G_p = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} \times \left(PR_p \times SE_p\right)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_p}$ $G_L = \sqrt[3]{1 \times \left(PR_L \times SE_L\right)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_L}$ 8. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki- laki dengan rata-rata harmonic $HARM\left(G_P, G_L\right) = \left[\frac{\left(G_P\right)^{-1} + \left(G_L\right)^{-1}}{2}\right]^{-1}$ 9. Menghitung indeks masing – masing dimensi

Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
	$$IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}} + 1\right)}{2}$$ $$IPK = \frac{TPAK_P + TPAK_L}{2}$$ $$IP = \frac{\left(\sqrt{PR_P \times SE_P} + \sqrt{PR_L \times SE_L}\right)}{2}$$ 10. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik $$G_{P,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$$ 11. Menghitung Indeks Kesetaraan Gender $$Indeks\ Kesetaraan\ Gender = \frac{HARM(G_P, G_L)}{G_{P,L}}$$ 12. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender $$IKG = 1 - \frac{HARM\left(G_P, G_L\right)}{G_{P,L}}$$ Keterangan: • G_P = Indeks Perempuan • G_L = Indeks Laki-laki • MTF = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan • MHPK20 = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun • PR_P = Persentase perempuan di legislatif • PR_L = Persentase laki-laki di legislatif • SE_P = Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas • SE_L = Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas • $TPAK_P$ = Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja • $TPAK_L$= Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja • $HARM(G_P,G_L)$= Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonik • IKR = Indeks dimensi kesehatan reproduksi • IP = Indeks dimensi pemberdayaan • IPK = Indeks dimensi pasar tenaga kerja • G_{PL}= Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik • IKG = Indeks Ketimpangan Gender
Interpretasi	IKG bernilai antara 0 - 1 dan bermakna positif. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yang semakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi, dan

Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
	sebaliknya.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, dan Sekretaris Dewan (Sekwan)
Frekuensi	Tahunan

26. Indeks Perlindungan Khusus Anak

Nama Indikator	Indeks Perlindungan Khusus Anak
Definisi	Indikator yang menggambarkan kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak, dan anak terlantar baik secara nasional maupun di tingkat provinsi.
Metode Perhitungan	$IPKA = \sum_{I=1}^{5} (\text{Wi}) x\ SXi)$ Dimana IPKA = Indeks Perlindungan Khusus Anak Wi = Bobot Indikator ke-i SXi = Nilai Indikator ke-i yang telah dinormalisasi
Interpretasi	IPKA memberikan gambaran umum tentang seberapa baik suatu daerah atau negara melindungi anak-anak yang rentan. Skor yang tinggi menunjukkan upaya perlindungan yang lebih baik, sedangkan skor yang rendah mengindikasikan adanya celah dalam sistem perlindungan anak
Sumber Data	Kerja Sama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

27. Jumlah Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan di Tingkat Kabupaten (Unit)

Nama Indikator	Jumlah Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan di Tingkat Kabupaten (Unit)
Definisi	Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang ketenagakerjaan adalah unit yang dibentuk di tingkat daerah (kabupaten/kota) yang berfungsi untuk memfasilitasi aksesibilitas penyandang disabilitas dalam dunia kerja, mulai dari pelatihan, penempatan kerja, hingga perlindungan ketenagakerjaan.
Rumus	Jumlah ULD = ∑ Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan yang aktif di tingkat kabupaten
Interpretasi	Semakin banyak ULD yang tersedia dan aktif, semakin baik komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan akses ketenagakerjaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Indikator ini juga mencerminkan pelaksanaan amanat UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Sumber Data	Disdagnakerkop UKM
Frekuensi	Tahunan

28. Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas Ketenagakerjaan (Orang)

Nama Indikator	**Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas Ketenagakerjaan (Orang)**
Definisi	Jumlah individu penyandang disabilitas yang memperoleh layanan ketenagakerjaan dari Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan/atau dari Dinas Tenaga Kerja, baik berupa pelatihan, bimbingan kerja, akses informasi lowongan kerja, penempatan kerja, pemagangan, atau bentuk fasilitasi lainnya.
Rumus	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlayani = ∑ Penyandang Disabilitas yang Difasilitasi oleh ULD dan/atau Disnaker
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah penyandang disabilitas yang difasilitasi, menunjukkan meningkatnya inklusivitas layanan ketenagakerjaan di daerah. Indikator ini juga mencerminkan pelaksanaan prinsip kesetaraan akses pekerjaan bagi semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas.
Sumber Data	Disdagnakerkop UKM
Frekuensi	Tahunan

C ASPEK DAYA SAING DAERAH

1. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)

Nama Indikator	**Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)**
Definisi	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDB.
Rumus	Proporsi PDRB Sektor Industri Pengolahan (%) $= \frac{Nilai\ Tambah\ Sektor\ Industri\ Pengolahan}{Nilai\ PDRB\ Kab./\overline{Kota}\ ADHB} \times 100\%$
Interpretasi	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, ceteris paribus.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, DPMPTP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian)

Nama Indikator	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)
Frekuensi	Triwulanan, Tahunan

2. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum [%]

Nama Indikator	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum [%]
Definisi	Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi: 1. Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan, dan 2. Penyediaan Jasa Makan dan Minum.
Rumus	$= \frac{Nilai\ Tambah\ Penyediaan\ Akmamin}{Nilai\ PDRB\ ADHB} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB regional, ceteris paribus. Ke depan, perlu ada pemutakhiran dari aktivitas-aktivitas yang terkait pariwisata.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

3. Rasio PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Nasional (%)

Nama Indikator	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Nasional (%)
Definisi	PDRB pada definisi BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada satu daerah. Dengan demikian, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persentase kontribusi nilai tambah bruto ekonomi kreatif suatu daerah dibandingkan dengan total nilai tambah bruto ekonomi kreatif secara nasional pada periode tertentu. Dalam penghitungan PDRB dan PDB Ekonomi Kreatif menggunakan tujuh lapangan usaha yang termasuk: 1. Industri Pengolahan; 2. Perdagangan Besar dan Eceran; 3. Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 4. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 5. Informasi dan Komunikasi; 6. Jasa Perusahaan; Jasa Pendidikan; dan 7. Jasa Lainnya

Nama Indikator	**Rasio PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Nasional (%)**
Metode Perhitungan	$= \frac{\sum PDRB\ 7\ Sub\ Sektor\ Ekonomi\ Kreatif}{PDB\ Ekonomi\ Kreatif\ 7\ Sub\ Sektor} x\ 100\%$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh subsektor ekonomi kreatif, semakin tinggi proporsinya terhadap PDB nasional, ceteris paribus. Namun dalam penerjemahannya ke depan, perlu diperhatikan nilai rupiah dari PDRB subsektor ekonomi kreatif untuk menghindari misinterpretasi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

4. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian (%)

Nama Indikator	**Proporsi JumlahUsaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian (%)**
Definisi	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama.
Metode Perhitungan	
Interpretasi	Usaha kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari UMKM yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi UKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Sumber Data	• Sensus Ekonomi (10 tahun sekali). • Data Pendataan Lengkap UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM (masih dalam tahap pengumpulan dan pengembangan) • Data UMKM yang dikumpulkan oleh daerah • DISDAGNAKERKOP UKM
Frekuensi	Tahunan

5. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) (%)

Nama Indikator	**Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) (%)**
Definisi	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama.
Metode Perhitungan	Proporsi IKM (%) $= \frac{Jumlah\ Unit\ Industri\ Kecil\ dan\ Menengah}{Total\ Jumlah\ Unit\ Industri} \times 100\%$
Interpretasi	Industri kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi IKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Nama Indikator	**Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) (%)**
Sumber Data	• Survei Industri Kecil dan Menengah, Badan Pusat Statistik • Survei Industri Menengah dan Besar, Badan Pusat Statistik • DPMPTP
Frekuensi	Tahunan

6. Rasio Kewirausahaan (%)

Nama Indikator	**Rasio Kewirausahaan (%)**
Definisi	Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
Metode Perhitungan	Rasio Kewirausahaan Daerah $= \frac{Berusaha\ dibantu\ buruh\ tetap\ Daerah}{Total\ angkatan\ kerja\ Daerah} x\ 100\%$
Interpretasi	Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Sakernas dilaksanakan dua kali dalam setahun (Februari dan Agustus). Perhitungan untuk indikator merujuk pada Sakernas bulan Agustus.

7. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)

Nama Indikator	**Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)**
Definisi	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah (PDRB ADHB). Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah

Nama Indikator	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)
	barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.
Metode Perhitungan	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB $= \frac{Volume\ Usaha\ Koperasi\ Daerah}{PDRB\ ADHB} x\ 100\%$
Interpretasi	Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut.
Sumber Data	• Volume usaha koperasi daerah: ODS Koperasi. Kementerian Koperasi dan UKM. (DISDAGNAKERKOP UKM) • PDRB: PDRB Seri 2010. Badan Pusat Statistik.
Frekuensi	Tahunan

8. Return on Asset (ROA) BUMD (%)

Nama Indikator	*Return on Asset* (ROA) BUMD (%)
Definisi	Return On Asset (ROA) Adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Return On Asset (ROA) dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan.
Metode Perhitungan	Return on Asset (ROA) BUMD $Return\ on\ Asset\ (ROA) = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Aset} x100\%$
Interpretasi	Return On Asset (ROA) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan.
Sumber Data	LKPD, BPS, Laporan keuangan BUMD. (*) *menyesuaikan ketersediaan data di daerah dan akan dikonfirmasi lebih lanjut
Frekuensi	Tahunan

9. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)

Nama Indikator	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)
Definisi	Tenaga Kerja Formal adalah tenaga kerja yang dengan status pekerjaan utama termasuk dalam pekerja dengan kategori berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar, dan buruh/ karyawan/ pegawai.

Nama Indikator	**Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)**
Rumus Perhitungan	$Tenaga\ Kerja\ Formal = \left(\frac{\sum_{i=3}^{4} y_i}{\sum_{i=1}^{7} y_i}\right) x\ 100\% ; i = 1,2,3, \dots ,7$ Keterangan: Tenaga Kerja Formal = Proporsi penciptaan lapangan kerja formal Yi = Jumlah pekerja dari status 1 = pekerjaan utama ke-i 2 = Berusaha sendiri 3 = Berusaha dibantu buruh tidak tetap 4 = Berusaha dibantu buruh Tetap/ dibayar 5 = Buruh/ karyawan/pegawai 6 = Pekerja bebas di pertanian Pekerja bebas di non pertanian 7 = Pekerja keluarga/ tak dibayar
Interpretasi	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal dengan satuan nilai dalam bentuk persentase menunjukan seberapa dominan pekerja dengan status pekerjaan utama yang termasuk dalam pekerja formal sesuai dengan ketentuan nasional yang berlaku. Semakin tinggi nilai persentasenya, maka semakin dominan kekuatan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan kerja formal.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

10. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)

Nama Indikator	**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)**
Definisi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.
Rumus Perhitungan	$TPAKp = \frac{PAKp}{P(15,p)}\ X\ 100\%$ Keterangan: TPAKp = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) PAKp = Jumlah angkatan kerja perempuan (orang) P(15+,p) = Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas (orang)

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
Interpretasi	TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (labor supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja. Kegunaan indikator ini antara lain untuk memproyeksikan pasokan tenaga kerja, menetapkan kebijakan tenaga kerja, merancang kebijakan perawatan, menentukan kebutuhan pelatihan, dan merencanakan pembiayaan sistem perlindungan sosial
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

11. Indeks Inovasi Daerah

Nama Indikator	Indeks Inovasi Daerah
Definisi	Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bentuk kebaharuan didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintah daerah pada setiap tingkatannya. Adapun tujuan kegiatan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (Innovative Government Award) adalah: • Memotivasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan inovasi dalam pelayanan masyarakat sesuai dengan kategori sangat inovatif, inovatif, kurang inovatif, dan tidak dapat nilai; • Mendorong penerapan good governance; • Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah; dan • Memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berhasil menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dalam upaya peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Nama Indikator	Indeks Inovasi Daerah
Rumus Perhitungan	Penghitungan Skor Total $SPD = \sum_{i=1}^{15} Skor\ Indikator\ Satuan\ Pemda\ ke-i$ $Skor\ Jumlah\ Inovasi = Jumlah\ Inovasi\ x\ 0{,}38$ $SID = \frac{\sum_{j=1}^{n}(\sum_{i=16}^{35} Skor\ Indikator\ Satuan\ Inovasi\ ke\ i)\ Inovasi\ ke\ j}{MAX\ (10, n)} + Skor\ Jumlah\ Inovasi$ $\boldsymbol{Skor\ Total = SPD + SID}$ Keterangan: n adalah Jumlah Inovasi Daerah suatu Pemerintah Daerah Penghitungan Indeks Inovasi Daerah $\boldsymbol{Indeks\ Inovasi\ Daerah = \frac{Skor\ Total}{Skor\ Total\ Maksimum}\ x\ 100}$ Keterangan: - Skor Total Maksimum diperoleh dari penjumlahan Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID). - Skor Total Maksimum adalah 250. - Skala IID adalah 0 s.d. 100.
Interpretasi	Indeks inovasi daerah dapat dijadikan ukuran yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimilikinya guna tercapainya kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan berdaya saing Semakin tinggi nilai yang didapatkan oleh hasil inovasi daerah yang didapatkan menunjukan meningkatnya motivasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya terhadap kepuasan masyarakat.
Sumber Data	Laporan inovasi daerah yang disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri
Frekuensi	Tahunan

12. Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)

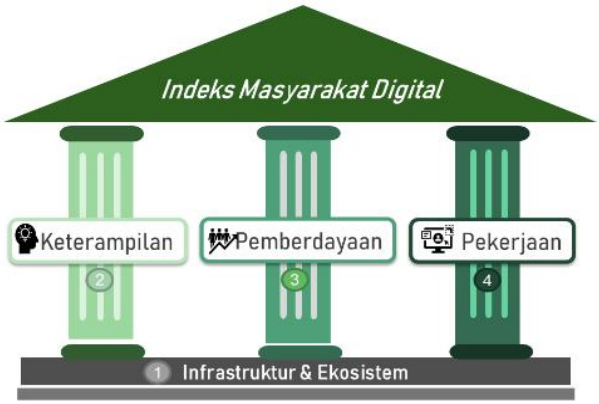
Nama Indikator	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)
Definisi	Proporsi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas dalam kelompok lapangan usaha (sektor) pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan.
Metode Perhitungan	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) $= \frac{Nilai\ Tambah\ Sektor\ Pertanian, Kehutanan, dan\ Perikanan}{Nilai\ PDRB\ Kab.ADHB} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, semakin tinggi proporsinya terhadap PDB regional, ceteris paribus. Selain itu, peningkatan kontribusi pada sektor tersebut dapat dijadikan proksi dalam meningkatkan ekonomi hijau dan kelestarian lingkungan, khususnya dalam meningkatkan sub-indikator ekonomi pada indeks ekonomi hijau daerah yaitu produktivitas pertanian.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Triwulanan, Tahunan

13. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan (Juta/orang)

Nama Indikator	**Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan (Juta/orang)**
Definisi	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja adalah besaran kontribusi tenaga kerja dalam pen=mbentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi yang dihitung dengan pendekatan rasio antara produk berupa barang dan jasa dengan tenaga kerja yang digunakan, baik individu ataupun kelompok satuan waktu tertentu. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah sektor ekonomi yang mencakup semua aktivitas yang berkaitan dengan pengolahan sumber daya alam hayati, seperti tanaman, hewan, hutan, dan perairan.
Metode Perhitungan	Produk Domestik Regional Bruto dibagi dengan Jumlah Penduduk yang Bekerja. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan $= \left(\frac{\text{PDRB } pertanian,\ \ kehutanan\ dan\ perikanan}{PYB}\right)$ PDRB $_{\text{pertanian, kehutanan dan perikanan}}$ = Produk Domestik Regional Bruto PYB = Penduduk Yang Bekerja
Interpretasi	Rupiah Per tenaga Kerja
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

14. Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)

Nama Indikator	**Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)**
Definisi	IMDI atau Indeks Masyarakat Digital Indonesia merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya.
Metode Perhitungan	Metode Kuantitatif: Survei kepada responden (individu dan industri) dilakukan secara tatap muka melalui penyebaran kuesioner. Survei dilaksanakan pada 514 Kab./Kota di seluruh Indonesia dan menggunakan Computer-Assisted Personel Interviewing (CAPI). Survei IMDI dilaksanakan sejak tahun 2022. Terdapat empat pilar dalam menyusun IMDI, yaitu:

Nama Indikator	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)
	 Infrastruktur dan Ekosistem Infrastruktur digital merupakan fondasi utama dalam menentukan kualitas ekosistem dan lingkungan dalam masyarakat digital. Pilar ini menggarisbawahi pentingnya kesetaraan akses infrastruktur digital. Terbentuk dari 3 subpilar, yaitu: Akses dan Adopsi Teknologi Digital, Ekosistem Pembelajaran, dan Digitalisasi Pemerintah. Keterampilan Digital Keterampilan digital adalah rangkaian kemampuan menggunakan perangkat digital, aplikasi komunikasi dan internet untuk mengakses dan mengelola informasi (UNESCO, 2018).Pilar ini terbentuk dari 3 subpillar, yaitu: Komplementaritas (persepsi kemampuan responden), Pengenalan TIK, dan Keamanan. Pemberdayaan Kegiatan yang mencerminkan kemampuan digital masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup (pemberdayaan ekonomi) atau aktivitas digital masyarakat yang menghasilkan pendapatan. Pilar ini merepresentasikan operasionalisasi dari tingkat literasi dan tingkat keterampilan digital. Pilar ini menyoroti pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan peranan sharing economy dalam proses digitalisasi. Pekerjaan Pilar pekerjaan berfokus pada keahlian digital terkait pekerjaan, di mana digitalisasi akan menciptakan tugas-tugas dan jenis pekerjaan baru yang menuntut keahlian baru. Pilar pekerjaan terdiri dari 2 subpilar, yaitu: Permintaan Keterampilan Digital dan Penawaran Keterampilan Digital yang Tersedia.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks IMDI menunjukkan semakin baik tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital. Indikator ini juga mencerminkan inklusivitas dalam ekonomi digital dan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan program pengembangan SDM Digital.
Sumber Data	• Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika (BPSDM Kominfo) • Website IMDI
Frekuensi	Tahunan

15. Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu per Komoditas Bahan Pokok (%)

Nama Indikator	**Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu per Komoditas Bahan Pokok (%)**
Definisi	Koefisien variasi merupakan perbandingan simpangan baku pada periode 1 tahun terhadap harga rata-rata pada periode 1 tahun
Rumus Perhitungan	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu per Komoditas Bahan Pokok (%) **KVpt** $= \frac{s}{x} x\ 100\%$ KVpt = Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu s = Standar deviasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu x = Harga rata-rata selama bulan Januari s.d Desember
Interpretasi	Semakin kecil koefisien variasi maka data harga suatu komuditas semakin homogen (seragam)
Sumber Data	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM (Disdagnakerkop UKM)
Frekuensi	Tahunan

16. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

Nama Indikator	**Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)**
Definisi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PRDB Provinsi.
Rumus Perhitungan	$Pembentukan\ PMTB\ (\%PDRB) = \frac{PMTB}{PDRB\ ADHK} \times\ 100\%$ Keterangan: Pembentukan Modal Tetap Bruto = Total PMTB berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) $PDRB\ ADHK$ = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)
Interpretasi	PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (financial leasing), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (financial leasing). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik

Frekuensi	Triwulanan dan Tahunan

17. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)

Nama Indikator	**Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)**
Definisi	Ekspor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan non residen. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan. Ekspor barang dan jasa (% PDRB) merupakan share ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Provinsi.
Rumus Perhitungan	**Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)** $= \frac{Ekspor\ Barang\ dan\ Jasa}{PDRB\ ADHK}\ x\ 100\%$ Keterangan: Ekspor Barang dan Jasa = Total Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) PDRB ADHK = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah) Ekspor Barang dan Jasa = Total Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) PDRB ADHK = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)
Interpretasi	Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. PDB adalah ukuran nilai total produksi dalam suatu negara dalam satu periode waktu. Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk- produk domestik di pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Ketika ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan, maka pendapatan negara juga juga meningkat karena peningkatan penjualan dan penerimaan deviden. Peningkatan pendapatan ini mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan produksi barang dan jasa yang diekspor. Selain itu, ekspor juga meningkatkan efisiensi dan daya saing industri dalam negeri untuk dapat bersaing di pasar global.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

18. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (%)

Nama Indikator	**Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (%)**
Definisi	Maka rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi: a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut: 1. Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat, 2. Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita ≥ 7,2 m^2 3. Memiliki akses air minum layak 4. Memiliki akses sanitasi layak
Rumus Perhitungan	Bagi kabupaten/kota yang telah menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh menggunakan rumus sebagai berikut: Persentase Rumah Tangga yang mengakses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan $PHLTB = \frac{JRTHLHTB}{JRT\ X\ 100}$ PHLTB = Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRTHLTB = Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRT = Jumlah rumah tangga Bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka dapat menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak). PHLTB (proksi) $= \frac{JRTHLHTB\ (proksi)}{JRT\ X\ 100}$ PHLTB (proksi) = Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRTHLTB (proksi) = Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau,

Nama Indikator	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (%)
	berkelanjutan; JRT = Jumlah rumah tangga
	Segregasi pengolahan data ini dapat digunakan untuk tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, perkotaan-perdesaan, dan desil pengeluaran
Interpretasi	Indikator ini untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan
Sumber Data	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM (Disdagnakerkop UKM)
Frekuensi	• Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS • Data Kementerian PUPR (untuk mengetahui status pelaksanaan PBG dan SLF di Kabupaten/Kota)

19. Persentase Desa Mandiri (%)

Nama Indikator	Persentase Desa Mandiri (%)
Definisi	Indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/ pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT.
Rumus Perhitungan	Perhitungan Indeks Desa $ID = \sqrt[6]{D_1 \times D_2 \times D_3 \times D_4 \times D_5 \times D_6}$ Keterangan: ID : Indeks Desa D : Dimensi
Interpretasi	Klasifikasi Status Desa • Mandiri: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik. • Maju: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah baik. • Berkembang: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah cukup baik. • Tertinggal: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih terbatas. • Sangat Tertinggal: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih sangat terbatas.

Sumber Data	• Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT • DLHPKPP
Frekuensi	Tahunan

20. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)

Nama Indikator	**Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)**
Definisi	Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR- BPRS) di suatu daerah provinsi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) adalah persentase rasio total dana pihak ketiga perbankan di suatu provinsi terhadap PDRB provinsi tersebut pada suatu waktu tertentu.
Rumus Penghitungan	$Total\ Dana\ Pihak\ Ketiga/PDRB\ (\%)$ $= \frac{Total\ Dana\ Pihak\ Ketiga}{PDRB}$ x 100.000 Total Dana Pihak Ketiga (DPK) = Total DPK Bank Umum + Total DPK BPR-BPRS (di suatu provinsi) PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (atas dasar harga berlaku)
Interpretasi	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan suatu daerah terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai Total DPK/PDRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana peningkatan angka rasio Total DPK/PDRB (%), menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah.
Sumber Data	Total Dana Pihak Ketiga = Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PDB = Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Dana Pihak Ketiga = Bulanan PDRB = Triwulan

21. Nilai Transaksi Saham Per Kapita (dalam Rupiah)

Nama Indikator	Nilai Transaksi Saham Per Kapita (dalam Rupiah)
Definisi	Total transaksi saham per provinsi adalah total nilai transaksi saham yang dilakukan oleh investor berdasarkan domisili (provinsi). Nilai transaksi saham merupakan hasil dari volume atau jumlah saham yang ditransaksikan dikali dengan harga saham.
Rumus Perhitungan	Nilai Transaksi Saham Per Kapita (dalam Rupiah) $= \frac{Nilai\ Transaksi\ Saham\ Per\ Kabupaten}{Jumlah\ Penduduk}$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai transaksi saham/kapita menunjukkan partisipasi masyarakat yang masuk dalam pasar modal meningkat, dengan kata lain ukuran atau likuditas di pasar modal meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan kapitalisasi pasar modal.
Sumber Data	Laporan Bulanan Statistik Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Bulanan

22. Total Kredit per PDRB (%)

Nama Indikator	Total Kredit /PDRB (%)
Definisi	Total Kredit per Provinsi adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di lingkup provinsi. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional/wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Total Kredit per Provinsi /PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu provinsi terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) provinsi tersebut pada suatu waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	$= \frac{Total\ Kredit\ per\ provinsi}{PDRB} \times 100$ **Keterangan:** Total Kredit per provinsi = Total Penyaluran Kredit Bank Umum + Total Penyaluran Kredit BPR-BPRS di masing-masing provinsi PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (atas dasar harga berlaku)
Interpretasi	Total Kredit per provinsi/ PDRB (%) menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di provinsi sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai Total Kredit per provinsi/ PDRB (%) menunjukkan semakin berfungsinya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha dalam perekonomian provinsi tersebut.
Sumber Data	• Total Kredit per provinsi= Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Nama Indikator	Total Kredit /PDRB (%)
	• PDRB = Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Total Kredit per Provinsi = Bulanan, PDRB = Triwulanan

23. Rasio PDRB Jasa Keuangan (%)

Nama Indikator	Rasio PDRB Jasa Keuangan (%)
Definisi	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Jasa Keuangan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor Jasa Keuangan terhadap PDRB.
Metode Perhitungan	Rasio PDRB Jasa Keuangan (%) $= \frac{Nilai\ Tambah\ Sektor\ Jasa\ Keuangan}{Nilai\ PDRB\ ADHB} \times 100\%$
Interpretasi	Kontribusi sektor Jasa Keuangan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor jasa keuangan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor jasa keuangan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, ceteris paribus.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik

24. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)

Nama Indikator	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
Definisi	• Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. • PDRB adalah Penjumlahan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu regional/negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode penghitungan. • Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah.
Metode Perhitungan	$\text{RPDRBt} = \frac{Penerimaan\ Pajak\ Daerah\ t}{PDRBt} \times 100\%$
Interpretasi	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik

D ASPEK PELAYANAN UMUM

1. Indeks Reformasi Hukum

Nama Indikator	**Indeks Reformasi Hukum**
Definisi	Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.
Rumus Perhitungan	Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagai berikut: a. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%. b. Penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang PUU yang berkualitas, dengan bobot 25%. c. Kualitas re-regulasi atau de-regulasi PUU berdasarkan hasil reviu, dengan bobot 35%. d. Penataan database PUU, dengan bobot 15%. Dalam hal ini, sumber data yang digunakan oleh IRH adalah data administratif Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Kategori penilaian IRH:
	Pada penghitungan IRH, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri (self-assesment) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi terhadap self-assesment tersebut dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penilaian.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IRH, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan.
Sumber Data	Kementerian Hukum dan HAM
Frekuensi	Tahunan

2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Nama Indikator	**Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**
Definisi	SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.

Nama Indikator	**Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**
Rumus Perhitungan	Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut: $Indeks\ Domain_i = \frac{1}{BD_i} \sum_{j=m}^{n} NA_{ij}\ x\ BA_{ij}$ dimana: • NDj adalah nilai indeks domain ke-j; • BDj adalah nilai bobot domain ke-j.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks domain dan bobot domain maka akan semakin besar pula nilai indeks SPBE yang dihasilkan
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Frekuensi	Tahunan

3. Indeks Pelayanan Publik

Nama Indikator	**Indeks Pelayanan Publik**
Definisi	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.
Rumus Perhitungan	Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik. 1. Menentukan nilai untuk setiap indikator Nilai per indikator: $\left(\frac{nilai\ FO1 + nilai\ FO2 + nilai\ FO3}{3}\right) \times bobot\ per\ indikator$ 2. Menentukan nilai setiap aspek Nilai per aspek: $\sum nilai\ per\ indikator$ 3. Menentukan nilai setiap aspek Nilai indeks: $\sum (nilai\ aspek_n \times bobot\ aspek_n)$

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Indeks Pelayanan Publik</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Prinsip-prinsip tersebut adalah:
1. Keadilan (Fairness);
2. Partisipasi (Participation);
3. Akuntabilitas (Accountability);
4. Transparansi (transparency);
5. Berdayaguna (useful);
6. Aksesibilitas (accessibility)

Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 37 indikator penilaian yang diisi melalui Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluator) dan Formulir F03 (Pengguna Layanan).
Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi:
<table>
<tr><th>Range Nilai</th><th>Kategori</th><th>Makna</th></tr>
<tr><td>0 – 1,00</td><td>F</td><td>Gagal</td></tr>
<tr><td>1,01 – 1,50</td><td>E</td><td>Sangat Buruk</td></tr>
<tr><td>1,51 – 2,00</td><td>D</td><td>Buruk</td></tr>
<tr><td>2,01 – 2,50</td><td>C-</td><td>Cukup (Dengan Catatan)</td></tr>
<tr><td>2,51 – 3,00</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr>
<tr><td>3,01 – 3,50</td><td>B-</td><td>Baik (Dengan Catatan)</td></tr>
<tr><td>3,51 – 4,00</td><td>B</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>4,01 – 4,50</td><td>A-</td><td>Sangat Baik</td></tr>
<tr><td>4,51 – 5,00</td><td>A</td><td>Pelayanan Prima</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
</table>

4. Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK (Nilai)

Nama Indikator	**Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK (Nilai)**
Definisi	Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah perangkat diagnostik yang dapat digunakan sebagai alat ukur objektif untuk memetakan capaian dan kemajuan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD). SPI berusaha mengukur penilaian persepsi dan pengalaman sebagai pemangku kepentingan di instansi K/l/PD, yang berbagi menjadi dua penilaian yaitu penilaian internal dengan responden adalah pegawai pada instansi tersebut dan penilaian eksternal dengan responden adalah pengguna layanan/mitra kerja sama.
Metode Perhitungan	Metodologi yang dilakukan dalam perhitungan nilai SPI adalah: • Teknik sampling terdiri dari Propotional Stratified Random Sampling (Probability Sampling) yang dilakukan secara acak pada populasi unit kerja dengan memperhatikan keterwakilan setiap Unit

Nama Indikator	Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK (Nilai)
	Eselon I, zona wilayah, dan level risiko dan pemilihan sampel mendapat pengawalan dari BPS; • Kuisioner survei penilaian integritas (SPI) oleh KPK; • Variabel penliaian terdiri dari: internal (43 variabel penilaian) dan eksternal (12 variabel penilaian); • Perhitungan indeks: penilaian internal (0,45) + penilaian eksternal (0,45) + pendalaman FGD (0,1) – Faktor koreksi (berupa angka absolut, maksimal -17); • Pengumpulan data primer melalui survei online menggunakan platform KPK dan melalui FGD anonim dalam rangka pendalaman hasil survei dan data sekunder melalui informasi kejadian OTT< hasil investigasi, informasi APH dan pengkondisian survei; dan • Komponen & dimensi penilaian yang terdiri dari perdangan pengaruh, pengelolaan PBJ, pnegelolaan anggaran, pengelolaan SDM, integritas dalam pelaksanaan tugas, sosialisasi anti korupsi, transparansi, pencegahan korupsi, transparansi dan keadilan layanan, dan integritas pegawai.
Interpretasi	Semakin tinggi tingkat nilai yang didapatkan oleh K/L/PD terhadap penilaian SPI, menunjukan kepercayaan responden internal dan eksternal terhadap kinerja sebuah instansi terhadap transparansi dan integritasnya.
Sumber Data	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Frekuensi	Tahunan

5. Indeks Keamanan Daerah

Nama Indikator	Indeks Keamanan Daerah
Definisi	Indeks Keamanan Daerah merupakan indeks yang mengukur capaian dari beberapa indikator yang terkait dengan ketentraman dan keamanan daerah. Indeks Keamanan merupakan indeks yang mengukur capaian dari beberapa indikator yang terkait dengan ketentraman dan keamanan daerah. Persentase yang terkait dengan ketentraman dan keamanan daerah. Persentase yang dihitung dari capaian 3 Indikator : 1) Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk (bobot 40%), 2) Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (bobot 30%), 3) Persentase Capaian Layanan Waktu Tanggap Kebakaran (bobot 30%)
Metode Perhitungan	Indeks Keamanan Daerah = (AK x 40%) + (PrKTPPO x 30%) + (RT x 30%) AK = Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk PrKTPPO = Persentase Perempuan Korban Kekerasan RT = Persentase Capaian Layanan Waktu Tanggap Kebakaran (bobot 30%)
Interpretasi	Bobot maksimal dari setiap indikator pembentuk disesuaikan dengan bobot masing-masing, misalnya untuk indikator AK, Ketika hasil Perhitungannya melebihi bobot 40% maka tetap dihitung sebesar 40%
Sumber Data	BPS Provinsi Sumatera Barat, Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Padang Pariaman, Dinsos PPPA Kabupaten Padang Pariaman
Frekuensi	Tahunan

6. Angka Kriminalitas [Per 100.000 Penduduk]

Nama Indikator	**Angka Kriminalitas [Per 100.000 Penduduk]**
Definisi	Indikator ini menunjukkan jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum per 100.000 penduduk dalam satu tahun. Angka ini mencerminkan tingkat keamanan publik serta efektivitas penanganan kejahatan oleh aparat keamanan. Kategori kriminalitas yang dihitung mencakup kejahatan konvensional seperti pencurian, perampokan, kekerasan, dan kejahatan lainnya. Data ini penting dalam merancang kebijakan keamanan daerah dan membangun rasa aman di masyarakat.
Rumus	(Jumlah kasus kriminal / Jumlah penduduk) × 100.000
Interpretasi	Semakin rendah angka kriminalitas, semakin baik tingkat keamanan dan ketertiban sosial di suatu daerah.
Sumber Data	Polres, BPS
Frekuensi	Tahunan

7. Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pilpres/Pilkada

Nama Indikator	**Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pilpres/Pilkada**
Definisi	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah persentase jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya dari total jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada suatu pemilihan
Metode Perhitungan	$Tingkat\ Partisipasi\ Pemilih\ dalam\ Pilpres/Pilkada = \frac{Jumlah\ Data\ Pemilih\ Tetap}{Jumlah\ Pemilih\ yang\ Mencoblos}$ x 100.000
Interpretasi	Semakin banyak jumlah pemilih maka tinggi Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Tahunan

8. Persentase kerja sama wajib yang dilaksanakan

Nama Indikator	**Persentase kerja sama wajib yang dilaksanakan**
Definisi	Peningkatan persentase kerja sama wajib yang dilaksanakan setiap tahunnya menunjukan keberhasilan Pemerintah Daerah pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam membuat inovasi di bidang penawaran dan kerja sama yang bertujuan meningkatkan investasi dan percepatan perkembangan dunia usaha.
Metode Perhitungan	$= \frac{Jumlah\ Kerja\ sama\ wajib\ yang\ dilaksanakan\ pada\ tahun\ t}{Jumlah\ Kerja\ sama\ wajib\ yang\ dilaksanakan\ pada\ tahun\ t}$ x 100%
Interpretasi	Semakin tinggi tingkat persentase kerja sama wajib yang dilaksanakan menunjukan hasil kinerja dan inovasi Pemerintah Daerah pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan investasi dan perkembangan dunia usaha.
Sumber Data	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama (TPKS) Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Frekuensi	Tahunan

9. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. EKPPD dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah.</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>Nilai EKPPD merupakan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK)* yang disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, Kabupaten dan Kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (KPPD) diperoleh melalui akumulasi capaian kinerja makro (CKM), capaian kinerja urusan pemerintahan (CKUP) dan perubahan kinerja makro (PKM). Ilustrasi sebagai berikut:
KPPD = [CKM + CKUP] x 0.75 + [PKM] x 0.25
Berdasarkan skor kinerja yang diperoleh di atas, maka disusun ranking kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota.
Status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi sebagai berikut:
<table>
<tr><td>No</td><td>Skor Kinerja</td><td>Status Kinerja</td></tr>
<tr><td>1</td><td>1.00 – 1.80</td><td>Sangat Rendah</td></tr>
<tr><td>2</td><td>1.81 - 2.60</td><td>Rendah</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2.61 – 3.40</td><td>Sedang</td></tr>
<tr><td>4</td><td>3.41- 4.20</td><td>Tinggi</td></tr>
<tr><td>5</td><td>4.21 – 5.00</td><td>Sangat Tinggi</td></tr>
</table>
*Rincian setiap indikator capaian kinerja dapat dilihat pada: Permendagri 18 Tahun 2020.pdf</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Semakin tinggi skor EKPPD yang dihasilkan maka semakin baik kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Kementerian Dalam Negeri</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
</table>

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

a. Urusan Wajib Pendidikan

1. Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)

Nama Indikator	**Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)**
Definisi	Indikator untuk mengukur akses anak usia 5-6 tahun terhadap pendidikan
Rumus	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan Pendidikan}}{\text{jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan}} \times 100\%$
Interpretasi	APS yang tinggi mengindikasikan bahwa hampir semua anak usia 5-6 tahun terdaftar di sekolah, baik di PAUD, TK, atau bahkan kelas awal SD.
Sumber Data	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

2. Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)

Nama Indikator	**Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)**
Definisi	Persentase jumlah anak usia 7-15 tahun yang bersekolah di berbagai jenjang pendidikan, dibandingkan dengan total populasi anak usia 7-15 tahun
Rumus	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan Pendidikan}}{\text{jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi APS, semakin baik kesempatan pendidikan yang tersedia bagi anak-anak dalam rentang usia tersebut.
Sumber Data	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Frekuensi	Tahunan

3. Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)

Nama Indikator	**Jumlah anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)**
Definisi	Angka yang mengukur persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan di antara seluruh anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi Jumlah anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar menunjukkan semakin banyak anak dan remaja putus sekolah yang tetap memperoleh akses pendidikan alternatif untuk mendukung pencapaian wajib belajar.
Sumber Data	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Frekuensi	Tahunan

4. Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional

Nama Indikator	**Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional**
Definisi	Rata-rata kemampuan literasi SD adalah nilai rata-rata capaian kompetensi literasi peserta didik jenjang Sekolah Dasar yang diukur melalui Asesmen Nasional (AN), khususnya Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Literasi.
Rumus	Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)
Interpretasi	Semakin tinggi nilai rata-rata literasi SD, semakin baik kualitas kemampuan membaca dan memahami teks siswa.
Sumber Data	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) • Asesmen Nasional (AN) melalui platform Rapor Pendidikan. • Subkomponen: AKM Literasi SD/MI/SDLB.
Frekuensi	Tahunan

5. Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional

Nama Indikator	**Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional**
Definisi	Rata-rata kemampuan numerasi SD adalah nilai rata-rata capaian kompetensi numerasi peserta didik jenjang Sekolah Dasar yang diukur melalui Asesmen Nasional (AN), khususnya Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Numerasi.
Rumus	Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan
Interpretasi	Semakin tinggi nilai rata-rata numerasi, semakin baik kemampuan peserta didik dalam memahami dan menerapkan konsep-konsep dasar matematika.
Sumber Data	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) • Asesmen Nasional (AN) melalui platform Rapor Pendidikan. • Subkomponen: AKM Literasi SD/MI/SDLB.
Frekuensi	Tahunan

6. Rata-rata kemampuan literasi SPM berdasarkan Asesmen Nasional

Nama Indikator	**Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional**
Definisi	Rata-rata kemampuan literasi SMP adalah nilai rata-rata capaian kompetensi literasi peserta didik jenjang Sekolah Menengah Pertama yang diukur melalui Asesmen Nasional (AN), khususnya Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Literasi.
Rumus	Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)
Interpretasi	Semakin tinggi nilai rata-rata literasi SMP, semakin baik kemampuan siswa membaca, memahami, dan berpikir kritis terhadap teks.
Sumber Data	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) • Asesmen Nasional (AN) pada jenjang SMP/MTs/SMPLB. • Diakses melalui Rapor Pendidikan (versi sekolah dan versi pemerintah daerah). • Subkomponen: AKM Literasi SMP.
Frekuensi	Tahunan

7. Rata-rata kemampuan numerasi SPM berdasarkan Asesmen Nasional

Nama Indikator	**Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional**
Definisi	Rata-rata kemampuan numerasi SMP adalah nilai rata-rata capaian kompetensi numerasi peserta didik jenjang Sekolah Menengah Pertama yang diukur melalui Asesmen Nasional (AN), khususnya Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Numerasi.
Rumus	Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan
Interpretasi	Semakin tinggi nilai rata-rata numerasi SMP, semakin baik kemampuan peserta didik dalam memahami dan menerapkan konsep matematika untuk memecahkan masalah.
Sumber Data	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) • Asesmen Nasional (AN) – AKM Numerasi SMP/MTs/SMPLB.
Frekuensi	Tahunan

8. Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B

Nama Indikator	**Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B**
Definisi	Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) meliputi TK, KB, SPS, dan TPA, yang telah memperoleh peringkat akreditasi minimal B dari Badan Akreditasi Nasional PAUD dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF) terhadap total seluruh satuan PAUD yang ada di daerah.
Rumus	Persentase jumlah satuan PAUD yang terakreditasi minimal B terhadap satuan PAUD yang sudah diakreditasi di kota/kabupaten.
Interpretasi	Semakin tinggi proporsi, semakin baik kualitas penyelenggaraan layanan PAUD di daerah.
Sumber Data	• BAN PAUD dan PNF (Badan Akreditasi Nasional PAUD dan Pendidikan Nonformal) • Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota • Kemendikbudristek
Frekuensi	Tahunan

9. Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV

Nama Indikator	**Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV**
Definisi	Proporsi guru pada satuan PAUD formal (TK/RA/KB/SPS yang berstatus formal) yang telah memiliki kualifikasi pendidikan minimal Strata-1 (S1) atau Diploma IV (D-IV) dibandingkan dengan seluruh jumlah guru PAUD formal pada suatu daerah dalam satu periode tertentu.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah Guru PAUD Formal berijazah S1/D4}}{\text{Total Guru PAUD Formal}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai indikator yang semakin tinggi menunjukkan semakin banyak guru PAUD formal yang memenuhi standar kualifikasi pendidikan minimal.
Sumber Data	1. Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

10. Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD

Nama Indikator	**Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD**
Definisi	Indeks yang menggambarkan kondisi keamanan di sekolah dasar (SD) berdasarkan persepsi peserta didik terhadap berbagai aspek kesejahteraan psikologis dan rasa aman dari potensi kekerasan. Aspek yang diukur meliputi perundungan (bullying), hukuman fisik, kekerasan seksual, serta paparan terhadap rokok, minuman keras, dan narkoba. Indeks dihitung berdasarkan hasil Survei Lingkungan Belajar (SLB) dalam Asesmen Nasional.
Rumus	Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar
Interpretasi	Nilai indeks yang lebih tinggi mencerminkan kondisi sekolah yang lebih aman secara fisik maupun psikologis bagi peserta didik. Nilai yang rendah menunjukkan adanya potensi masalah keamanan, seperti tingginya tingkat perundungan atau paparan terhadap perilaku berisiko.
Sumber Data	1. Survei Lingkungan Belajar (SLB), Asesmen Nasional – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

11. Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP

Nama Indikator	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP
Definisi	Indeks yang menggambarkan tingkat keamanan di sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan persepsi peserta didik terhadap kondisi kesejahteraan psikologis dan rasa aman dari berbagai bentuk kekerasan maupun perilaku berisiko.
Rumus	Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar
Interpretasi	1. Nilai indeks yang lebih tinggi menunjukkan bahwa lingkungan sekolah SMP semakin aman, nyaman, dan mendukung kesejahteraan psikologis peserta didik. 2. Nilai yang rendah menunjukkan adanya risiko keamanan yang perlu mendapat perhatian, seperti tingginya kasus perundungan, kekerasan, atau perilaku berisiko di lingkungan sekolah.
Sumber Data	1. Survei Lingkungan Belajar (SLB), Asesmen Nasional – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

12. Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD

Nama Indikator	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP
Definisi	Indeks yang menggambarkan sejauh mana sekolah menengah pertama (SMP) menciptakan lingkungan yang inklusif, menghargai keberagaman, dan mendorong interaksi positif antar peserta didik dari berbagai latar belakang.
Rumus	Nilai rerata iklim kebinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar
Interpretasi	1. Nilai indeks yang tinggi menunjukkan bahwa sekolah memiliki budaya kebinekaan yang kuat, mendorong toleransi, inklusivitas, dan sikap saling menghargai antar peserta didik. 2. Nilai yang rendah menunjukkan perlunya penguatan pendidikan karakter, penerapan sekolah inklusif, serta peningkatan program pembiasaan yang mendukung sikap toleran dan menghargai perbedaan.
Sumber Data	1. Survei Lingkungan Belajar (SLB), Asesmen Nasional – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

	Teknologi 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

13. Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP

Nama Indikator	**Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP**
Definisi	Indeks yang menggambarkan tingkat keamanan psikologis dan fisik peserta didik di lingkungan sekolah jenjang SMP, termasuk rasa aman dari perundungan, kekerasan, diskriminasi, serta kenyamanan dalam berinteraksi di sekolah. Nilai indeks diperoleh dari hasil Survei Lingkungan Belajar yang mengukur persepsi siswa dan guru terkait kondisi keamanan sekolah.
Rumus	Nilai rerata iklim kebinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik kondisi keamanan sekolah, baik dari aspek psikologis maupun fisik. Nilai rendah menunjukkan adanya potensi perundungan, kekerasan, intoleransi, atau kondisi lingkungan belajar yang tidak aman bagi peserta didik.
Sumber Data	1. Survei Lingkungan Belajar (SLB), Asesmen Nasional – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

14. Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD

Nama Indikator	**Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD**
Definisi	Indeks yang menggambarkan tingkat inklusivitas satuan pendidikan dasar dalam memberikan layanan yang ramah, setara, dan aksesibel bagi seluruh peserta didik, termasuk peserta didik penyandang disabilitas.
Rumus	Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar
Interpretasi	1. Nilai indeks tinggi menunjukkan sekolah semakin inklusif, memberikan layanan yang layak, responsif, dan aksesibel bagi semua peserta didik, termasuk yang berkebutuhan khusus. 2. Nilai indeks rendah menandakan masih terbatasnya fasilitas, layanan, serta rendahnya sensitivitas warga sekolah terhadap kebutuhan peserta didik disabilitas.
Sumber Data	1. Survei Lingkungan Belajar (SLB), Asesmen Nasional – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

15. Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP

Nama Indikator	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP
Definisi	Indeks yang menggambarkan tingkat inklusivitas satuan pendidikan jenjang SMP dalam menyediakan layanan pendidikan yang setara, ramah, dan aksesibel bagi seluruh peserta didik, termasuk peserta didik penyandang disabilitas.
Rumus	Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan sekolah telah menerapkan prinsip inklusi dengan baik, menyediakan akses, fasilitas, dan layanan yang memadai bagi seluruh peserta didik. Semakin rendah nilai indeks menunjukkan masih terbatasnya dukungan sekolah terhadap peserta didik disabilitas, baik dari sisi layanan, fasilitas, maupun sikap warga sekolah.
Sumber Data	• Survei Lingkungan Belajar (SLB), Asesmen Nasional – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

b. Urusan Wajib Kesehatan

1. Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan (Rasio)

Nama Indikator	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan (Rasio)
Definisi	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan merupakan indikator yang menggambarkan kapasitas layanan kesehatan rujukan di suatu kabupaten/kota, yang diukur melalui perbandingan antara jumlah seluruh tempat tidur (*bed*) pada fasilitas kesehatan yang ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Perhitungan mencakup seluruh rumah sakit rujukan, baik negeri maupun swasta, serta Puskesmas yang ditetapkan sebagai fasilitas rujukan melalui Peraturan Bupati/Walikota.
Rumus	(Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan / Jumlah penduduk di kabupaten/kota) × 1.000
Interpretasi	Semakin tinggi rasio daya tampung rumah sakit rujukan menunjukkan kapasitas pelayanan memadai bagi penduduk, sedangkan semakin rendah rasio tersebut menandakan keterbatasan akses dan potensi penurunan mutu layanan kesehatan.
Sumber Data	• Dinas Kesehatan, RSUD • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi (%)

Nama Indikator	**Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi (%)**
Konsep/ Definisi	Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi merupakan indikator yang menggambarkan tingkat pemenuhan standar mutu pelayanan pada rumah sakit rujukan di suatu daerah. Indikator ini mengukur proporsi rumah sakit rujukan, baik milik pemerintah maupun swasta, yang telah memperoleh status akreditasi (perdana, dasar, madya, utama, atau paripurna) berdasarkan sertifikat akreditasi yang masih berlaku. Rumah sakit yang dihitung merupakan fasilitas rujukan yang ditetapkan melalui Peraturan atau Keputusan Bupati/Walikota.
Rumus	(Jumlah Rumah Sakit Rujukan Kabupaten/Kota yang terakreditasi / Jumlah Rumah Sakit Kabupaten/Kota) × 100%
Interpretasi	Semakin tinggi persentase rumah sakit rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi menunjukkan peningkatan kualitas tata kelola, mutu pelayanan, dan keselamatan pasien pada fasilitas kesehatan di daerah dalam rangka memperkuat sistem pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berstandar nasional.
Sumber Data	• Dinas Kesehatan, RSUD • Dinas Kesehatan, RSUD
Frekuensi	Tahunan

3. Jumlah Kematian Ibu

Nama Indikator	**Jumlah Kematian Ibu**
Definisi	Jumlah Kematian Ibu adalah jumlah perempuan yang meninggal selama masa kehamilan, persalinan, atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, tanpa memandang lama dan tempat terjadinya kehamilan, akibat sebab yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, namun bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat risiko kematian pada ibu di suatu wilayah.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah Kematian Ibu}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai menunjukkan tingginya risiko kematian ibu, serta mengindikasikan perlu adanya peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan ibu, terutama selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Semakin rendah nilai mencerminkan kondisi kesehatan ibu yang lebih baik dan efektivitas sistem pelayanan kesehatan maternal di wilayah tersebut.

Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

4. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita

Nama Indikator	**Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)**
Definisi	Stunting (pendek/sangat pendek) 118 anggu kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U 118 anggu sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010. a. Sangat pendek: Zscore < -3,0 b. Pendek: *Zscore* ≥ -3,0 s/d *Zscore* < -2,0
Rumus Perhitungan	Cara perhitungan (1) 1). Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB\ (5)P\ stunting = \frac{aJAB\ (5)P\ stunting}{JAB\ (5)}\ X\ 100\%$ Keterangan $PAB(5)P$ = Prevalensi anak balita yang stunting menderita $JAB(5)Pstunting$ = pendek (stunting) Jumlah anak balita $JAB(5)$ = pendek (stunting) pada waktu tertentu Jumlah anak balita pada waktu yang sama Cara perhitungan (2) 2). Jumlah Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB\ (5)SP\ stunting = \frac{JAB\ (5)P\ stunting}{JAB\ (5)}\ X\ 100\%$ $PAB\ (5)SP\ stunting = \frac{JAB\ (5)SP\ stunting}{JAB\ (5)}\ X\ 100\%$
	$PAB(5)P$ = Prevalensi anak balita = yang stunting menderita $JAB(5)Pstunting$ = pendek (stunting) Jumlah anak balita $JAB(5)$ pendek (stunting) pada waktu tertentu

Nama Indikator	**Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)**
	Jumlah anak balita pada waktu yang sama Cara perhitungan (3) $Prevalensi\ stunting = PAB(5)P + PAB(5)SP$
Interpretasi	Prevalensi stunting yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk: 1). Kekurangan Gizi: Stunting 119 anggu indikator kekurangan gizi kronis. Prevalensi stunting yang tinggi menunjukkan bahwa banyak anak di wilayah tersebut menderita kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. 2). Akses Pelayanan Kesehatan: Prevalensi stunting yang tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan 119 angguh 119 n berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan 119angguh119n ibu dan anak. 3). Kemiskinan: Stunting sering kali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan stunting. 4). Pendidikan: Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, juga berpengaruh terhadap prevalensi stunting. Orang tua yang berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya gizi dan 119angguh119n bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. 5). Faktor Lingkungan: Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat berkontribusi terhadap prevalensi stunting.
Sumber Data	SSGI Survei Kesehatan Indonesia perlu dieksplor penggunaan data program Kementerian Kesehatan (E-PPGBM) untuk penyediaan data tahunan
Frekuensi	SSGI: tahunan Survei Kesehatan Indonesia : 5 tahunan

5. Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar

Nama Indikator	**Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar**
Definisi	Indikator yang menggambarkan proporsi ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar pelayanan kebidanan dalam kurun waktu satu tahun.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (nominator) waktu satu tahun (nominator)}}{\text{Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa sebagian besar ibu hamil telah menerima pelayanan antenatal sesuai standar, mencerminkan baiknya mutu layanan kesehatan

	maternal dan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan.. Semakin rendah nilai menandakan masih banyak ibu hamil yang belum mendapatkan pelayanan antenatal yang memadai, sehingga berpotensi meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, persalinan, dan kematian ibu.
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

6. Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar

Nama Indikator	**Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi ibu bersalin yang memperoleh pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dalam satu tahun. Pelayanan sesuai standar mencakup proses persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan kompeten, pemantauan kala I–IV, tindakan pencegahan komplikasi, penanganan kegawatdaruratan sesuai prosedur, serta pencatatan dan pelaporan sesuai pedoman pelayanan maternal.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasyankes di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan semakin baiknya kualitas pelayanan persalinan serta meningkatnya keamanan dan keselamatan ibu saat melahirkan. Semakin rendah nilai mengindikasikan masih adanya keterbatasan akses, kualitas layanan, ketersediaan tenaga kesehatan, atau belum optimalnya penerapan standar pelayanan persalinan.
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

7. Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar

Nama Indikator	**Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi bayi baru lahir (0–28 hari) yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dalam satu tahun. Pelayanan sesuai standar meliputi pemeriksaan fisik lengkap, inisiasi menyusu dini, pemantauan tanda bahaya, pemberian imunisasi dasar sesuai usia, konseling perawatan bayi, serta rujukan tepat waktu bila ditemukan kelainan, sebagaimana diatur dalam pedoman pelayanan kesehatan bayi baru lahir.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu}} \times 100\%$

	tahun yang sama
Interpretasi	Semakin tinggi nilai yang tinggi menunjukkan semakin baiknya cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan neonatal, yang berkontribusi pada penurunan risiko kesakitan dan kematian bayi. Semakin rendah nilai mengindikasikan perlunya peningkatan akses, kualitas layanan neonatal, kompetensi tenaga kesehatan, serta peran keluarga dalam deteksi dini dan perawatan bayi baru lahir.
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

8. Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Nama Indikator	**Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar**
Definisi	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar merupakan indikator yang menggambarkan proporsi balita usia 12–59 bulan yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar pada periode satu tahun.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + balita usia 36-59 bulan mendapakan pelayanan sesuai standar}}{\text{Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai menunjukkan cakupan pelayanan kesehatan balita yang baik dan konsisten, mencerminkan kualitas pelayanan serta efektivitas program pemantauan pertumbuhan balita. Semakin rendah menandakan belum meratanya pelayanan kesehatan balita, berpotensi meningkatkan risiko gangguan pertumbuhan, masalah gizi, serta keterlambatan deteksi masalah kesehatan anak.
Sumber Data	Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas
Frekuensi	Tahunan

9. Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar

Nama Indikator	**Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar**
Definisi	Persentase yang menggambarkan proporsi anak usia pendidikan dasar (7–15 tahun), baik yang berada pada satuan pendidikan formal seperti SD/MI dan SMP/MTs, maupun yang berada di luar satuan pendidikan seperti pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA, serta Posyandu remaja, yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam satu tahun.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran}}{\text{Jumlah semua anak usia pendidikan dasar}} \times 100\%$

	yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin baik cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar. Angka yang rendah menunjukkan perlunya peningkatan akses, kualitas, atau pelaksanaan program pelayanan kesehatan sekolah.
Sumber Data	• Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas • Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Frekuensi	Tahunan

10. Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar

Nama Indikator	**Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi penduduk usia produktif (15–59 tahun) yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dalam satu tahun. Pelayanan sesuai standar mencakup edukasi kesehatan (termasuk keluarga berencana), serta deteksi dini faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular yang diberikan oleh fasilitas layanan kesehatan negeri maupun swasta.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota yang mendapatkan layanan kesehatan produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai menunjukkan semakin baiknya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk usia produktif. Semakin rendah nilai mengindikasikan perlunya peningkatan cakupan layanan, kualitas fasilitas kesehatan, kapasitas tenaga kesehatan, serta upaya promotif dan preventif.
Sumber Data	• Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas • Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Frekuensi	Tahunan

11. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Nama Indikator	**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi penduduk lanjut usia (≥60 tahun) yang menerima pelayanan kesehatan sesuai standar minimal satu kali dalam satu tahun. Pelayanan kesehatan sesuai standar mencakup pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut, lingkar lengan atas, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, skrining lansia sederhana, pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut, serta anamnesis perilaku berisiko. Pelayanan dilakukan pada fasilitas layanan kesehatan negeri maupun swasta.

Rumus	$\frac{\text{Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (nominator)}}{\text{Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai menunjukkan meningkatnya cakupan layanan kesehatan lansia dan upaya pemerintah dalam menjaga kualitas hidup serta kemandirian penduduk lanjut usia. Semakin rendah nilai yang rendah menunjukkan perlunya peningkatan akses layanan, kapasitas fasyankes, pelayanan promotif-preventif, serta sistem pendataan lansia agar pelayanan lebih menyeluruh dan tepat sasaran.
Sumber Data	• Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas • Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Frekuensi	Tahunan

12. Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar

Nama Indikator	**Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar (%)**
Definisi	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar adalah ukuran yang menggambarkan proporsi penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam satu tahun. Pelayanan sesuai standar meliputi pengukuran tekanan darah, edukasi non-farmakologi, pemberian terapi farmakologi, serta konseling kepatuhan terhadap terapi non-farmakologi dan farmakologi yang diberikan di fasilitas pelayanan kesehatan negeri maupun swasta.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai menunjukkan semakin optimalnya deteksi, penanganan, dan pemantauan penderita hipertensi oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Semakin rendah nilai mengindikasikan perlunya peningkatan cakupan skrining, kepatuhan pengobatan, kualitas layanan, akses masyarakat terhadap fasyankes, serta peran aktif masyarakat dalam pengendalian faktor risiko hipertensi.
Sumber Data	Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas
Frekuensi	Tahunan

13. Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar

Nama Indikator	**Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar (%)**
Definisi	ukuran yang menggambarkan proporsi penderita Diabetes Melitus berusia 15 tahun ke atas yang menerima pelayanan kesehatan sesuai standar dalam satu tahun. Pelayanan sesuai standar meliputi pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang, terapi non-farmakologi (edukasi gaya hidup sehat), serta terapi farmakologi yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan negeri maupun swasta.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerja kabupaten/kota berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nlai menunjukkan semakin baiknya deteksi, penanganan, dan pemantauan penderita diabetes melitus oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Semakin rendah nilai mengindikasikan perlunya peningkatan cakupan skrining DM, akses terhadap layanan, kepatuhan berobat, serta penguatan upaya promotif dan preventif terkait pola makan, aktivitas fisik, dan pengendalian faktor risiko.
Sumber Data	Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas
Frekuensi	Tahunan

14. Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar

Nama Indikator	**Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam satu tahun. Pelayanan sesuai standar meliputi deteksi dan asesmen kondisi mental, pemberian terapi farmakologis maupun non-farmakologis, kunjungan rumah (bila diperlukan), pemantauan kepatuhan pengobatan, manajemen kasus, serta rujukan ke fasilitas kesehatan rujukan apabila kondisi mengharuskan.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$

Interpretasi	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan jiwa bagi ODGJ berat telah berjalan optimal, baik dari segi cakupan maupun kualitas intervensi. Semakin rendah nilai mengindikasikan perlunya peningkatan deteksi, pemantauan rutin, akses layanan kesehatan jiwa, kapasitas tenaga kesehatan, serta penguatan jejaring layanan dan dukungan keluarga atau komunitas.
Sumber Data	Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas
Frekuensi	Tahunan

15. Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar

Nama Indikator	**Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi orang yang terduga tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam satu tahun. Pelayanan standar meliputi pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis, seperti pemeriksaan dahak dengan metode mikroskopis, *molecular rapid test* (TCM), kultur, rontgen toraks, serta pemeriksaan klinis sesuai pedoman nasional penanggulangan TBC.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah perkiraan orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa layanan deteksi dini bagi orang terduga TBC telah menjangkau sasaran secara optimal dan sesuai standar pelayanan. Semakin rendah nilai menandakan kurangnya akses, rendahnya penemuan kasus, atau lemahnya sistem skrining dan jejaring layanan TBC di wilayah tersebut.
Sumber Data	Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas
Frekuensi	Tahunan

16. Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar

Nama Indikator	**Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar (%)**
Definisi	Indikator yang mengukur persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun di wilayah kabupaten/kota. Orang berisiko terinfeksi HIV mencakup: ibu hamil, pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), pasien tuberkulosis (TBC), pekerja perempuan seks (WPS), laki-laki seks dengan laki-laki (LSL), pengguna narkotika suntik (Penasun), warga binaan pemasyarakatan (WBP), serta transgender/waria.
Rumus	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV (Ibu hamil, Pasien IMS, Pasien TBC, WPS, LSL, Penasun, WBP, dan Transgender/Waria) yang mendapatkan

	$\frac{\text{pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV (Ibu hamil, Pasien IMS, Pasien TBC, WPS, LSL, Penasun, WBP, dan Transgender/Waria) di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik sistem deteksi dini, penjangkauan, dan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan, sehingga berkontribusi pada pencegahan penularan HIV secara lebih efektif.
Sumber Data	Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas
Frekuensi	Tahunan

c. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

1. Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota

Nama Indikator	**Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur persentase luas kawasan permukiman rawan bencana banjir yang telah memperoleh perlindungan melalui pembangunan atau peningkatan infrastruktur pengendalian banjir yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Kawasan rawan banjir yang dimaksud merupakan kawasan permukiman yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten/Kota serta Peta Rawan Bencana Banjir.
Rumus	$\frac{\text{Luas Kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir Kewenangan Kab/Kota (ha)}}{\text{Luas kawasan rawan banjir Kewenangan Kab/Kota (ha)}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin besar bagian kawasan rawan banjir yang telah dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir, sehingga upaya mitigasi risiko bencana semakin optimal. Semakin rendah nilai menunjukkan bahwa proporsi kawasan permukiman rawan banjir yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir masih kecil.
Sumber Data	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota

Nama Indikator	**Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota (%)**
Definisi	Mengukur persentase luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang tergolong rawan abrasi, dan banjir

Nama Indikator	Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota (%)
	rob yang telah mendapatkan perlindungan melalui infrastruktur pengaman pantai pada wilayah sungai kewenangan kabupaten/kota. Indikator ini mencerminkan efektivitas upaya mitigasi bencana pesisir dan perlindungan terhadap permukiman masyarakat.
Rumus	$\frac{\text{Luas Kawasan sepanjang pantai rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai Kewenangan Kabupaten/Kota (ha)}}{\text{Luas Kawasan sepanjang pantai rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai Kewenangan Kabupaten/Kota (ha)}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai nunjukkan semakin baik perlindungan permukiman pesisir dari abrasi dan erosi sedangkan semakin rendah nilai menandakan terbatasnya perlindungan yang meningkatkan risiko kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat pesisir.
Sumber Data	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota

Nama Indikator	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota (%)
Definisi	Indikator ini mengukur persentase luas jaringan irigasi multikomoditas yang berada di bawah kewenangan kabupaten/kota dan telah dioperasikan serta dipelihara dengan baik. Irigasi multikomoditas mencakup sistem irigasi yang digunakan untuk mendukung berbagai jenis komoditas pertanian, baik pangan maupun hortikultura.
Rumus	$\frac{\text{Luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dioperasikan dan dipelihara (Ha)}}{\text{Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai menunjukkan jaringan irigasi kabupaten/kota berfungsi optimal, ketersediaan air mencukupi, mendukung produktivitas dan keberlanjutan pertanian. Semakin rendah nilai mendandakan banyak jaringan irigasi belum berfungsi atau tidak dipelihara dengan baik.
Sumber Data	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase kondisi irigasi kewenangan kab/kota

Nama Indikator	Persentase kondisi irigasi kewenangan kab/kota (%)

Nama Indikator	**Persentase kondisi irigasi kewenangan kab/kota (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur persentase luas jaringan irigasi yang berada di bawah kewenangan kabupaten/kota dan berada dalam kondisi baik. Kondisi baik berarti jaringan irigasi terawat, berfungsi sesuai peruntukan, mampu menyalurkan air secara efektif, dan mendukung produktivitas pertanian di wilayah layanan. Indikator ini mencerminkan kualitas dan kinerja infrastruktur irigasi kabupaten/kota.
Rumus	$\frac{\text{Luas daerah irigasi kewenangan kab/kota dalam kondisi baik (Ha)}}{\text{Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai menunjukkan sebagian besar jaringan irigasi dalam kondisi baik, menunjukkan perawatan yang memadai, kinerja optimal, dan dukungan maksimal terhadap produktivitas pertanian. Semakin rendah nilai mengindisikan semakin banyak jaringan irigasi dalam kondisi rusak atau tidak terpelihara, berpotensi menurunkan efektivitas distribusi air dan produktivitas pertanian, memerlukan perbaikan atau pemeliharaan segera.
Sumber Data	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi	Tahunan

5. Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota

Nama Indikator	**Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi penduduk kabupaten/kota yang memiliki akses terhadap air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi maupun bukan jaringan perpipaan terlindungi.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kabupaten/kota pada tahun N}}{\text{Jumlah total penduduk kabupaten/kota}} \times 100\%$

Interpretasi	Semakin tinggi nilai menunjukkan sebagian besar penduduk telah memiliki akses terhadap air minum aman, yang artinya cakupan layanan SPAM yang baik dan dukungan terhadap kesehatan masyarakat optimal. Semakin rendah nilai, mengindikasikan banyak penduduk belum memperoleh akses air minum aman, menandakan perlunya perluasan jaringan SPAM atau peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan.
Sumber Data	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi	Tahunan

6. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)

Nama Indikator	**Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi rumah tangga di kabupaten/kota yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik sesuai standar. Layanan ini mencakup fasilitas pengolahan air limbah dari kegiatan domestik sehari-hari, seperti mandi, cuci, kakus, dan dapur, yang berasal dari permukiman, real estate, atau rumah tangga individu. Fasilitas pengolahan meliputi cubluk, Instalasi Pengolahan Limbah Terpusat (IPLT), dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD).
Rumus	$\frac{\text{((Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di kabupaten/kota) × 100\%}} \text{ x 100\%}$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin baik layanan pengolahan air limbah domestik yang mendukung kesehatan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat, sedangkan semakin rendah persentase menandakan keterbatasan layanan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan risiko kesehatan.
Sumber Data	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi	Tahunan

7. Rasio Kepatuhan IMB (%)

Nama Indikator	**Rasio Kepatuhan IMB (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur tingkat kepatuhan bangunan

	terhadap persyaratan perizinan IMB di kabupaten/kota. Rasio ini menunjukkan seberapa besar bangunan yang memperoleh persetujuan IMB telah mematuhi peruntukannya dan standar teknis Bangunan Gedung. Indikator ini digunakan untuk menilai efektivitas pengawasan pembangunan serta kepatuhan masyarakat atau pengembang terhadap peraturan perizinan.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan persetujuan bangunan gedung yang sesuai peruntukannya}}{\text{Jumlah persetujuan bangunan gedung yang berlaku}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi rasio menunjukkan semakin baik kepatuhan masyarakat dalam mengurus dan mematuhi perizinan pembangunan melalui IMB yang mendukung tertib tata ruang dan keselamatan bangunan, sedangkan semakin rendah rasio menandakan masih rendahnya kesadaran dan pengawasan.
Sumber Data	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi	Tahunan

8. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/ Kota

Nama Indikator	**Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/ Kota (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi panjang jalan kabupaten/kota yang berada dalam kondisi baik atau sedang terhadap total panjang jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Tingkat kemantapan jalan mencerminkan kualitas dan kinerja jaringan jalan kabupaten/kota dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang, dan konektivitas antar wilayah.
Rumus	$\frac{\text{(Panjang Jalan Kondisi Baik + Panjang Jalan Kondisi Sedang) panjang jalan kewenangan kabupaten/kota (km)}}{\text{Panjang jalan kewenangan kabupaten/kota (km)}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai menunjukkan sebagian besar jalan kabupaten/kota berada dalam kondisi baik atau sedang, menunjukkan kualitas infrastruktur jalan memadai dan mobilitas terjamin. Semakin rendah nilai menandakan banyak jalan dalam kondisi rusak, menunjukkan perlunya perbaikan atau pemeliharaan jalan untuk mendukung mobilitas, konektivitas, dan keselamatan pengguna jalan.
Sumber Data	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi	Tahunan

9. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi

Nama Indikator	**Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi proyek konstruksi yang berada di bawah kewenangan pengawasan suatu instansi dan tidak mengalami kecelakaan konstruksi selama pelaksanaan. Indikator ini digunakan untuk menilai

	efektivitas penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), kualitas pengawasan, serta kepatuhan terhadap standar teknis proyek konstruksi.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi}}{\text{Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi rasio menunjukkan semakin baik penerapan standar keselamatan kerja dan efektivitas pengawasan proyek konstruksi, sedangkan semakin rendah rasio menandakan masih lemahnya penerapan K3 yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan dan menurunkan kualitas pelaksanaan konstruksi.
Sumber Data	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi	Tahunan

10. Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (%)

Nama Indikator	**Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman, meliputi fasilitas pengolahan air limbah domestik sesuai standar.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar + jumlah rumah tangga yang tersambung pada jaringan perpipaan PALD-T skala permukiman berbasis masyarakat/ permukiman/ perkotaan/kawasan tertentu/regional pada tahun N + Jumlah penduduk yang tersambung pada jaringan perpipaan SPALD-T skala permukiman berbasis masyarakat/permukiman/ perkotaan/kawasan tertentu/regional + jumlah rumah tangga yang terlayani jasa penyedotan lumpur tinja pada tahun N}}{\text{Jumlah penduduk di kabupaten/kota}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai menunjukkan sebagian besar penduduk telah memiliki akses sanitasi layak dan aman, menandakan perlindungan kesehatan lingkungan yang baik. Semakin rendah nilai mengindikasikan banyak penduduk belum memperoleh layanan sanitasi layak, menunjukkan perlunya peningkatan akses sanitasi, perbaikan infrastruktur, dan pengelolaan air limbah domestik.
Sumber Data	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi	Tahunan

11. Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota

Nama Indikator	**Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota**
Definisi	Indikator ini mengukur tingkat kepatuhan pemanfaatan bangunan gedung terhadap peraturan perizinan PBG dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Rasio ini mencerminkan efektivitas pengawasan dan pelayanan perizinan bangunan gedung, serta kepatuhan masyarakat atau pengembang terhadap standar teknis dan peruntukan bangunan.
Rumus	$\frac{\text{Permohonan PBG \& SLF yang diproses terhadap permohonan PBG \& SLF yang masuk}}{\text{Peningkatan jumlah permohonan PBG \& SLF per tahun Kesesuaian pemanfaatan bangunan gedung terhadap PBG \& SLF yang telah diterbitkan}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai menunjukkan sebagian besar bangunan telah sesuai PBG & SLF, menunjukkan pengawasan efektif dan kepatuhan pembangunan baik. Semakin rendah nilai mengindikasikan banyak bangunan belum sesuai PBG & SLF, menandakan lemahnya kepatuhan perizinan dan perlunya peningkatan pengawasan.
Sumber Data	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi	Tahunan

12. Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis

Nama Indikator	**Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi tenaga kerja konstruksi di kabupaten/kota yang telah memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai kualifikasi operator, teknisi, atau analis. Sertifikasi menunjukkan tingkat keterampilan dan kompetensi profesional tenaga kerja konstruksi, serta kesiapan mereka dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai standar keselamatan, kualitas, dan teknis.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/analis yang bekerja Pada tahun berjalan}}{\text{jumlah target sertifikasi yang tercantum dalam rencana kerja kab/kota}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai menunjukkan sebagian besar tenaga kerja konstruksi telah terlatih dan tersertifikasi, menunjukkan kualitas SDM konstruksi yang baik dan kesiapan menghadapi proyek dengan standar profesional tinggi. Semakin rendah nilai mengindikasikan banyak

	tenaga kerja konstruksi belum tersertifikasi, menandakan perlunya peningkatan pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi SDM konstruksi.
Sumber Data	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi	Tahunan

13. Persentase Pengawasan penyelenggaran Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Nama Indikator	**Persentase Pengawasan penyelenggaran Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi pengawasan kegiatan penyelenggaraan jasa konstruksi di kabupaten/kota yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan meliputi aspek tertib usaha, tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, dan tertib pemanfaatan produk konstruksi.
Rumus	$\frac{\text{(rasio pengawasan tertib usaha + rasio pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi + rasio pengawasan tertib pemanfaatan produk)}}{3}$ x 100%
Interpretasi	Semakin tinggi nilai menunjukkan sebagian besar pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai peraturan, menunjukkan efektivitas pengawasan yang baik dan kepatuhan yang tinggi. Semakin rendah nilai menunjukkan banyak pengawasan belum sesuai ketentuan, menandakan lemahnya kepatuhan penyelenggara jasa konstruksi dan perlunya peningkatan pengawasan.
Sumber Data	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi	Tahunan

14. Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah

Nama Indikator	**Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah (Hari)**
Definisi	Indikator ini mengukur lama waktu rata-rata pelayanan penerbitan Keterangan Kelayakan Penggunaan Ruang (KKPR) bagi pemohon baik berusaha maupun non berusaha di wilayah kabupaten/kota. Lama pelayanan dihitung sejak permohonan diterima hingga KKPR

	diterbitkan dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dibayarkan oleh pemohon.
Rumus	Rata-rata jumlah hari layanan penerbitan KKPR yang telah dibayarkan PNBP KKPR-nya oleh pemohon
Interpretasi	Semakin sedikit (jumlah hari) menunjukkan layanan cepat dan efisien, hal ini berarti kualitas pelayanan publik yang baik. Semakin tinggi nilai (jumlah hari banyak) menunjukkan layanan lambat, ini berarti perlunya peningkatan proses administrasi, efisiensi, dan kapasitas pelayanan.
Sumber Data	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi	Tahunan

15. Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota

Nama Indikator	**Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota)%)**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di kabupaten/kota yang berhasil diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun. Penyelesaian kasus mencakup tindakan administratif, penegakan peraturan, atau proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang terselesaikan dalam waktu 1 tahun}}{\text{Jumlah Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang ditargetkan selesai dalam waktu 1 tahun}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai menunjukkan sebagian besar kasus pelanggaran berhasil diselesaikan, menunjukkan efektivitas pengawasan dan penegakan peraturan yang baik. Semakin rendah nilai mengindikasikan banyak kasus pelanggaran belum terselesaikan, menandakan perlunya peningkatan kapasitas pengawasan, penegakan hukum, dan penyelesaian administratif.
Sumber Data	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi	Tahunan

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni

Nama Indikator	**Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi korban bencana di kabupaten/kota yang menerima layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun tertentu. Layanan ini mencakup perbaikan atau

	pembangunan rumah yang aman, layak, dan sesuai standar teknis untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan penghuni.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun ke N}}{\text{Jumlah total rencana warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun-N}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai menunjukkan sebagian besar korban bencana memperoleh rumah layak huni, menunjukkan efektivitas penanganan dan pemulihan pascabencana yang baik. Semakin rendah nilai menunjukkan banyak korban bencana belum memperoleh rumah layak huni, menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas penyediaan perumahan darurat dan rehabilitasi.
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni

Nama Indikator	**Persentasewarga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi warga negara yang terdampak relokasi program kabupaten/kota dan menerima fasilitasi penyediaan rumah layak huni pada tahun tertentu. Layanan ini mencakup penyediaan rumah yang aman, layak, dan sesuai standar teknis untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan penghuni.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah warga negara terkena relokasi program kabupaten/kota yang mendapatkan layanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni pada tahun ke N}}{\text{Jumlah total rencana warga negara terkena relokasi program provinsi yang akan ditangani pada tahun-N}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai menunjukkan sebagian besar warga yang direlokasi memperoleh rumah layak huni, menunjukkan efektivitas program relokasi dan pemenuhan hak hunian yang baik. Semakin rendah nilai menunjukkan banyak warga yang direlokasi belum memperoleh rumah layak huni, menandakan perlunya peningkatan perencanaan, penyediaan hunian, dan manajemen relokasi.
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani (%)

Nama Indikator	**Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani (%)**

Nama Indikator	**Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi kawasan permukiman kumuh dengan luas kurang dari 10 hektar yang telah ditangani melalui program perbaikan lingkungan permukiman, rehabilitasi, dan peningkatan fasilitas dasar pada tahun tertentu.
Rumus	$\frac{\text{Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani tahun N (Ha)}}{\text{Target luas kawasan kumuh dibawah10 Ha pada tahun N}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai menunjukkan sebagian besar kawasan kumuh <10 Ha telah ditangani, menunjukkan efektivitas program penanganan permukiman kumuh yang baik. Semakin rendah nilai menunjukkan banyak kawasan kumuh <10 Ha belum ditangani, menandakan perlunya peningkatan program, sumber daya, dan prioritas penanganan permukiman kumuh.
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani

Nama Indikator	**Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi rumah tidak layak huni di kabupaten/kota yang telah mendapatkan penanganan atau perbaikan pada tahun tertentu. Penanganan dapat berupa perbaikan struktural, peningkatan fasilitas sanitasi, air bersih, dan aspek hunian lainnya sesuai standar rumah layak huni.
Rumus	$\frac{\text{jumlah RTLH yang tertangani pada pada Tahun-N}}{\text{jumlah RTLH pada Tahun-N}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai menunjukkan sebagian besar RTLH telah tertangani, menunjukkan keberhasilan program perbaikan hunian dan peningkatan kualitas permukiman. Semakin rendah nilai menunjukkan banyak RTLH belum tertangani, menandakan perlunya peningkatan sumber daya, prioritas, dan strategi perbaikan rumah layak huni.
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Frekuensi	Tahunan

5. Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)

Nama Indikator	**Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi perumahan di kabupaten/kota yang telah dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) sesuai ketentuan pada tahun tertentu. PSU mencakup fasilitas pendukung perumahan seperti jalan lingkungan, saluran drainase, jaringan air bersih, jaringan Listrik, sarana publik

	lainnya (taman, ruang terbuka hijau, fasilitas olahraga.
Rumus	$\frac{\text{Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan PSU di Tahun N}}{\text{Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan PSU di tahun N}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai menunjukkan sebagian besar perumahan telah dilengkapi PSU, menunjukkan kualitas pengembangan perumahan yang baik dan pemenuhan standar hunian layak. Semakin **rendah** nilai menunjukkan banyak perumahan belum dilengkapi PSU, menandakan perlunya peningkatan pengawasan, perencanaan, dan pelaksanaan fasilitas pendukung perumahan.
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Frekuensi	Tahunan

e. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Persentase Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP

Nama Indikator	**Persentase Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi pengaduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (Tibumtranmas) yang berhasil ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di kabupaten/kota pada tahun tertentu.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah pengaduan Pelanggaran trantibum yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan Pelanggaran trantibum yang dilaporkan}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai menunjukkan sebagian besar pengaduan pelanggaran ketertiban umum ditangani, menunjukkan efektivitas Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Semakin rendah nilai menunjukkan banyak pengaduan belum ditangani, menandakan perlunya peningkatan kapasitas Satpol PP, koordinasi, dan sistem penanganan pengaduan masyarakat.
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Frekuensi	Tahunan

2. Jumlah PPNS pada Satpol PP

Nama Indikator	**Jumlah PPNS pada Satpol PP**
Definisi	Indikator ini mengukur jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang memiliki kualifikasi

	sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di kabupaten/kota.
Rumus	Jumlah anggota Satpol PP yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS
Interpretasi	Semakin tinggi nilai menunjukkan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum Satpol PP cukup memadai. Semakin rendah nilai menandakan keterbatasan SDM Satpol PP yang memiliki kewenangan penyidikan, sehingga perlu peningkatan pelatihan atau rekrutmen PPNS.
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas

Nama Indikator	**Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi Standard Operating Procedure (SOP) yang tersedia dan diterapkan untuk penegakan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (Tibumtranmas) di kabupaten/kota.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah SOP yang tersedia}}{\text{Jumlah SOP yang dibutuhkan}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai menunjukkan sebagian besar SOP telah tersedia, menunjukkan kesiapan, keteraturan, dan kepastian hukum dalam penegakan Perda/Perkada dan Tibumtranmas. Nilai rendah Banyak SOP belum tersedia, menandakan perlunya penyusunan pedoman operasional untuk mendukung penegakan hukum dan pelayanan Tibumtranmas.
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat

Nama Indikator	**Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan Masyarakat (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur ketersediaan sarana dan prasarana minimal yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan:

	• Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), • Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (Tibumtranmas), • Pelaksanaan fungsi perlindungan masyarakat (Linmas).
Rumus	$\frac{\text{Jumlah sarana prasarana yang tersedia}}{\text{Jumlah sarana Prasarana yang di butuhkan}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai menunjukkan sarana dan prasarana operasional Satpol PP sebagian besar sudah terpenuhi, menunjukkan kesiapan yang baik dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada, Tibumtranmas, dan Linmas. Semakin rendah nilai menunjukkan banyak sarana prasarana belum terpenuhi sehingga dapat menghambat efektivitas pelaksanaan tugas, termasuk kegiatan penertiban, patroli, penindakan, dan perlindungan masyarakat.
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Frekuensi	Tahunan

5. Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar

Nama Indikator	**Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur tingkat kompetensi dasar anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melalui proporsi ASN Satpol PP yang telah mengikuti Diklat Dasar sesuai standar pembinaan aparatur. Diklat dasar dimaksud meliputi pelatihan dasar penegakan Perda/Perkada, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat (Linmas), yang menjadi fondasi kompetensi bagi setiap personel Satpol PP.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah anggota ASN Satpol PP yang mengikuti diklat dasar}}{\text{Jumlah Keseluruhan ASN Satpol PP}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai menunjukkan sebagian besar anggota ASN Satpol PP telah memiliki kompetensi dasar yang sesuai standar, sehingga kualitas penegakan Perda/Perkada, Tibumtranmas, dan fungsi perlindungan masyarakat semakin baik. Semakin rendah nilai mengindikasikan banyak anggota belum mendapatkan pelatihan dasar sehingga berpotensi mengurangi profesionalitas, kemampuan teknis, dan efektivitas pelaksanaan tugas operasional.
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Frekuensi	Tahunan

6. Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal

Nama Indikator	**Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (%)**

Definisi	Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian penyusunan dokumen kebencanaan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah hingga memperoleh status sah/legal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rumus	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen kebencanaan yang disusun pada tahun n}}{\text{Jumlah dokumen kebencanaan yang akan disusun pada tahun n}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai menunjukkan proses penyusunan dokumen kebencanaan berjalan efektif, tepat waktu, dan berhasil mencapai status sah/legal sesuai target tahun berjalan. Semakin rendah nilai mengindikasikan adanya keterlambatan atau kendala dalam penyusunan, verifikasi, atau legalisasi dokumen kebencanaan, yang dapat berdampak pada lemahnya perencanaan dan mitigasi bencana.
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Frekuensi	Tahunan

7. Persentase penanganan pra bencana

Nama Indikator	**Persentase penanganan pra bencana (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur tingkat realisasi pelaksanaan kegiatan pra bencana oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam satu tahun anggaran.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah kegiatan pra-bencana yang dilaksanakan kabupaten/kota pada tahun n}}{\text{Jumlah target kegiatan pra-bencana yang akan dilaksanakan kabupaten/kota yang terdapat pada rencana kerja Perangkat Daerah pada tahun n}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan bahwa kegiatan pra bencana telah dilaksanakan sesuai atau melampaui target, mencerminkan kesiapsiagaan daerah yang baik dan efektivitas upaya mitigasi bencana. Semakin rendah nilai indikator menunjukkan rendahnya tingkat kesiapsiagaan dan implementasi kegiatan pra bencana, sehingga risiko dampak bencana terhadap masyarakat dan infrastruktur menjadi lebih tinggi.
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Frekuensi	Tahunan

8. Persentase penanganan pasca bencana

Nama Indikator	**Persentase penanganan pasca bencana (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur tingkat keterlaksanaan kegiatan penanganan pascabencana yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam satu tahun berjalan. Penanganan pascabencana mencakup kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang direncanakan dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

Rumus	$\frac{\text{Jumlah kegiatan pascabencana yang dilaksanakan kabupaten/kota pada tahun n}}{\text{Jumlah target kegiatan penanganan pascabencana pada dokumen R3P}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan penanganan pascabencana telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan dalam dokumen R3P. Semakin rendah nilai menunjukkan adanya keterlambatan, kendala teknis, atau ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi program penanganan pascabencana.
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Frekuensi	Tahunan

9. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Nama Indikator	**Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur persentase tingkat pemenuhan penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam satu tahun berjalan. Peralatan tersebut mencakup kelengkapan yang digunakan untuk mitigasi, evakuasi, penyelamatan, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan personel dalam menghadapi potensi bencana.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah unit Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana di kabupaten/kota pada tahun n}}{\text{Jumlah total rencana penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang terdapat pada rencana kerja Perangkat Daerah di kabupaten/kota pada tahun n}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa pemenuhan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana telah sesuai dengan target rencana kerja perangkat daerah. Semakin rendah nilai menunjukkan adanya keterbatasan dalam pengadaan, distribusi, atau perencanaan peralatan yang dibutuhkan untuk upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Frekuensi	Tahunan

10. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)

Nama Indikator	**Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)**

Definisi	Indikator ini mengukur tingkat efektivitas pemerintah daerah dalam menangani dan menyelesaikan berbagai bentuk gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) yang dilaporkan masyarakat. Gangguan Trantibum mencakup pelanggaran peraturan daerah, kerawanan sosial, ketidaknyamanan publik, serta kondisi lain yang berpotensi mengganggu stabilitas dan ketenteraman masyarakat.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masu}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin baik kapasitas pemerintah daerah dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum melalui penanganan gangguan yang cepat dan efektif, sedangkan semakin rendah persentase menandakan masih terbatasnya kemampuan penyelesaian yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan kenyamanan masyarakat.
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Frekuensi	Tahunan

11. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

Nama Indikator	**Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang memuat ketentuan sanksi. Penegakan dilakukan melalui tindakan preventif maupun represif oleh Satpol PP serta, bila diperlukan, melibatkan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi yang telah ditetapkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang direncanakan}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin baik efektivitas penegakan hukum daerah dalam mendukung kepastian hukum, ketertiban, dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan, sedangkan semakin rendah persentase menandakan masih lemahnya penegakan yang berpotensi menurunkan wibawa pemerintah daerah dan kepatuhan masyarakat.
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Frekuensi	Tahunan

12. Pesentaase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

Nama Indikator	**Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur tingkat jangkauan layanan informasi rawan bencana kepada masyarakat, khususnya warga negara berusia 15–64 tahun yang tinggal di daerah rawan bencana. Pengukuran dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah mampu menyebarluaskan informasi terkait potensi

	bahaya, jalur evakuasi, dan langkah kesiapsiagaan melalui berbagai media dan metode penyampaian.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang menjadi target layanan informasi rawan bencana}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin baik penyebaran informasi kebencanaan yang meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat, sedangkan semakin rendah persentase menandakan masih terbatasnya akses informasi yang dapat meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap risiko bencana.
Sumber Data	• Badan Penanggulangan Bencana Daerah • Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Frekuensi	Tahunan

13. Persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)

Nama Indikator	**Persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)**
Definisi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. Pengukuran dilakukan untuk menilai efektivitas pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan pencegahan, simulasi, dan gladi kesiapsiagaan bencana sebagaimana ditetapkan dalam dokumen kebencanaan.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin baik cakupan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan yang memperkuat ketangguhan masyarakat menghadapi bencana, sedangkan semakin rendah persentase menandakan masih terbatasnya upaya mitigasi yang dapat meningkatkan kerentanan dan risiko dampak bencana.
Sumber Data	• Badan Penanggulangan Bencana Daerah • Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Frekuensi	Tahunan

14. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)

Nama Indikator	**Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur tingkat jangkauan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang

	diberikan oleh pemerintah daerah. Fokusnya adalah menilai efektivitas upaya pencarian, pertolongan, evakuasi, serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga negara yang terdampak bencana.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai menunjukkan semakin baik kapasitas layanan penyelamatan dan evakuasi dalam melindungi masyarakat saat bencana, sedangkan semakin rendah nilai menandakan masih terbatasnya kemampuan penanganan darurat yang dapat meningkatkan risiko korban jiwa dan kerugian.
Sumber Data	• Badan Penanggulangan Bencana Daerah • Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Frekuensi	Tahunan

15. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)

Nama Indikator	**Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur tingkat jangkauan dan efektivitas pelayanan penyelamatan serta evakuasi korban kebakaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pengukuran dilakukan berdasarkan layanan pemadaman, pengendalian, penyelamatan, dan evakuasi yang diberikan secara cepat sesuai standar waktu tanggap (response time).
Rumus	$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah) + (Jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai menunjukkan semakin baik kapasitas layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam melindungi masyarakat dan meminimalkan dampak kebakaran, sedangkan semakin rendah nilai menandakan masih terbatasnya kemampuan penanganan darurat yang dapat meningkatkan risiko korban jiwa, kerugian, dan kerusakan lingkungan.
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Frekuensi	Tahunan

16. Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran

Nama Indikator	**Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (Menit)**
Definisi	Indikator ini mengukur rata-rata waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran. Rata-rata waktu

	tanggap (respon time) penanganan kebakaran adalah rata-rata dari jumlah total waktu tanggap seluruh kejadian kebakaran baik yang dibawah waktu 15 menit (respon time) maupun yang diluar batas waktu respon time sejak diterima informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi dalam waktu satu tahun dibagi dengan jumlah seluruh kejadian kebakaran.
Rumus	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran
Interpretasi	Semakin cepat waktu tanggap menunjukkan semakin baik kesiapsiagaan dan kapasitas layanan pemadam kebakaran dalam mencegah meluasnya dampak kebakaran, sedangkan semakin lambat waktu tanggap menandakan masih adanya keterbatasan sarana, prasarana, atau koordinasi yang dapat meningkatkan risiko kerugian dan korban.
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Frekuensi	Tahunan

f. Urusan Sosial

1. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti

Nama Indikator	**Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi penyandang disabilitas terlantar yang tinggal di luar panti dan telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar meliputi akses pangan, sandang, papan, layanan kesehatan, dan bantuan sosial minimal sesuai standar pelayanan kesejahteraan sosial.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator, semakin efektif upaya pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar di luar panti. Semakin rendah nilai indikator menunjukkan bahwa banyak penyandang disabilitas terlantar yang belum terjangkau layanan dasar, menandakan masih terbatasnya akses, cakupan program, kualitas intervensi, maupun koordinasi lintas pihak dalam pemenuhan kebutuhan dasar di luar panti.
Sumber Data	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti

Nama Indikator	**Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi anak terlantar yang

	tinggal di luar panti dan telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar meliputi pemenuhan pangan, sandang, papan, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial minimal sesuai standar pelayanan kesejahteraan sosial.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah anak terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai indikator yang tinggi menunjukkan semakin baiknya kapasitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar anak terlantar di luar panti. Nilai indikator yang rendah menunjukkan bahwa masih banyak anak terlantar yang belum mendapatkan layanan dasar secara memadai, yang dapat mengindikasikan keterbatasan jangkauan program, kurang optimalnya intervensi perlindungan anak, serta lemahnya koordinasi dan dukungan layanan sosial bagi anak yang tinggal di luar panti.
Sumber Data	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti

Nama Indikator	**Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi lanjut usia (lansia) terlantar yang tinggal di luar panti dan telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar meliputi pemenuhan pangan, sandang, papan, layanan kesehatan, dukungan sosial, serta bantuan kesejahteraan minimal sesuai standar pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi lansia.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai indikator yang tinggi menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi lansia terlantar yang berada di luar panti. Nilai indikator yang rendah mengindikasikan bahwa banyak lansia terlantar di luar panti yang belum terjangkau layanan dasar, menunjukkan keterbatasan cakupan program, kurang optimalnya intervensi rehabilitasi sosial, serta belum memadainya dukungan layanan kesehatan, bantuan sosial, maupun pendampingan bagi lansia di masyarakat.
Sumber Data	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti

Nama Indikator	**Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)**

Definisi	Indikator ini mengukur proporsi gelandangan dan pengemis (gepeng) yang berada di luar panti dan telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar meliputi akses pangan, sandang, papan, layanan kesehatan, bantuan sosial, serta intervensi rehabilitasi sosial dasar sesuai standar pelayanan kesejahteraan sosial.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah gelandangan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi gelandangan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai indikator yang tinggi menunjukkan bahwa kebutuhan dasar gelandangan dan pengemis di luar panti telah terpenuhi dengan baik. Nilai yang rendah menandakan banyak gepeng belum terlayani secara memadai, sehingga akses dan dukungan layanan masih perlu ditingkatkan.
Sumber Data	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

5. Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti

Nama Indikator	**Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur tingkat kesesuaian sarana dan prasarana pelayanan sosial yang disediakan pemerintah daerah di luar panti dengan standar. Sarana prasarana tersebut mendukung pelayanan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis, seperti tempat layanan, fasilitas mobilitas, peralatan pendukung, titik layanan rujukan, dan prasarana rehabilitasi sosial lainnya.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah sarana prasarana yang disediakan untuk pelayanan sosial penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis di luar panti sesuai standar}}{\text{Jumlah sarana prasarana untuk pelayanan sosial di luar panti yang disediakan}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai indikator yang tinggi menunjukkan bahwa sarana prasarana pelayanan sosial di luar panti telah disediakan sesuai standar dan mendukung efektivitas layanan bagi kelompok rentan. Sebaliknya, nilai yang rendah menandakan banyak sarana prasarana belum memenuhi standar, sehingga kualitas layanan, akses, dan upaya rehabilitasi sosial menjadi kurang optimal.
Sumber Data	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

6. Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar

Nama Indikator	**Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang memberikan pelayanan sosial di luar panti sesuai dengan standar kompetensi, prosedur, dan pedoman operasional yang telah ditetapkan.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar}}{\text{Jumlah pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai indikator yang tinggi menunjukkan tenaga pelayanan sosial di luar panti bekerja sesuai standar. Nilai rendah menandakan kepatuhan terhadap standar masih kurang, sehingga kualitas layanan dan pendampingan menjadi tidak optimal.
Sumber Data	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

7. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)

Nama Indikator	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi korban bencana alam, sosial, dan non-alam yang menerima pemenuhan kebutuhan dasar selama masa tanggap darurat dan pascatanggap darurat. Kebutuhan dasar meliputi pangan, sandang, tempat tinggal sementara, layanan kesehatan, perlindungan, serta bantuan sosial untuk mengurangi dampak bencana.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah korban bencana alam, sosial dan non alam kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi korban bencana alam, sosial dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai menunjukkan semakin baik efektivitas layanan tanggap darurat dalam memenuhi kebutuhan dasar korban bencana, sedangkan semakin rendah nilai menandakan masih terbatasnya kapasitas penanganan darurat yang dapat meningkatkan risiko penderitaan dan kerugian sosial-ekonomi bagi korban.
Sumber Data	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

8. Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar

Nama Indikator	**Persentase sarana prasarana bagi korban bencana**

	kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar (%)
Definisi	Indikator ini mengukur tingkat kesesuaian sarana dan prasarana yang disediakan bagi korban bencana dengan standar pelayanan tanggap darurat yang berlaku. Sarana prasarana tersebut mencakup tempat pengungsian, dapur umum, air bersih, sanitasi, peralatan kesehatan darurat, logistik dasar, serta fasilitas pendukung lainnya yang digunakan selama masa tanggap darurat dan pascatanggap darurat.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah sarana prasarana bagi korban bencana yang sesuai standar}}{\text{Jumlah sarana prasarana bagi korban bencana}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai indikator yang tinggi menunjukkan bahwa sarana prasarana yang disediakan telah memenuhi standar dan mendukung penanganan korban bencana secara efektif. Sebaliknya, nilai yang rendah mengindikasikan banyak sarana prasarana belum memenuhi standar, sehingga kualitas layanan darurat dan kenyamanan korban bencana masih perlu ditingkatkan.
Sumber Data	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

9. Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar

Nama Indikator	**Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang menjalankan penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat dan pascabencana sesuai standar kompetensi, prosedur operasional, dan pedoman layanan penanggulangan bencana yang berlaku.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah pekerja sosial professional, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar}}{\text{Jumlah pekerja sosial professional, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai indikator yang tinggi menunjukkan bahwa tenaga pelayanan bencana telah bekerja sesuai standar, sehingga penanganan korban bencana berlangsung lebih efektif dan berkualitas. Sebaliknya, nilai rendah menandakan kepatuhan terhadap standar masih terbatas, yang dapat mengurangi kualitas layanan, respons, serta pendampingan bagi korban bencana.
Sumber Data	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

10. Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti

Nama Indikator	**Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)**
Definisi	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar melalui layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti pada wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun berjalan.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai indikator yang tinggi menunjukkan bahwa kebutuhan dasar PPKS lainnya di luar HIV/AIDS telah terpenuhi dengan baik melalui layanan di luar panti. Sebaliknya, nilai yang rendah menandakan masih terbatasnya pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga kualitas pelayanan dan dukungan sosial bagi PPKS belum optimal.
Sumber Data	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

11. Persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar

Nama Indikator	**Persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi PSKS perorangan (misal individu, tokoh masyarakat, atau relawan sosial) yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar kompetensi dan pedoman operasional yang berlaku.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar terpenuhi}}{\text{Populasi potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai indikator yang tinggi menunjukkan bahwa PSKS perorangan telah melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar, sehingga kualitas dan efektivitas layanan sosial meningkat. Nilai rendah menandakan masih terbatasnya kepatuhan terhadap standar, yang dapat menurunkan kualitas dan konsistensi pelayanan sosial.
Sumber Data	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

12. Pesentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar

Nama Indikator	**Pesentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi masyarakat miskin, fakir miskin, dan kelompok rentan yang telah memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar melalui program perlindungan dan layanan kesejahteraan sosial di kabupaten/kota.

Rumus	$\frac{\text{Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar}}{\text{Populasi masyarakat miskin, fakir miksin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah kabupaten/kota}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai indikator yang tinggi menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar bagi penerima manfaat telah berjalan efektif, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial. Nilai rendah menandakan masih banyak penerima manfaat yang belum terpenuhi kebutuhannya, sehingga kualitas layanan dan efektivitas program perlu ditingkatkan.
Sumber Data	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

13. Pesentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi

Nama Indikator	**Pesentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi fakir miskin, masyarakat miskin, dan kelompok rentan yang memperoleh peningkatan kemandirian ekonomi melalui program pemberdayaan sosial-ekonomi di kabupaten/kota.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi}}{\text{Populasi fakir miskin serta masyarakat miskin dan rentan cakupan daerah kabupaten/kota yang mendapatkan pemberdayaan sosial ekonomi}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai indikator yang tinggi menunjukkan bahwa program pemberdayaan sosial-ekonomi berhasil meningkatkan kemandirian ekonomi penerima manfaat, memperkuat kesejahteraan dan kapasitas ekonomi mereka. Nilai rendah menandakan bahwa peningkatan kemandirian ekonomi masih terbatas, sehingga efektivitas program perlu diperkuat.
Sumber Data	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

14. Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun

Nama Indikator	**Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur persentase pemutakhiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan pemerintah daerah dalam satu tahun.

Rumus	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun. Pemutakhiran dilakukan minimal setiap bulan sesuai SK pengesahan oleh pejabat berwenang daerah kabupaten/kota 1 kali setiap bulan. walaupun update di aplikasi bisa dilakukan setiap hari. Pengesahan oleh daerah menjadi dasar dalam penetapan SK DTKS yang diterbitkan setiap bulan
Interpretasi	Nilai indikator yang tinggi menunjukkan pemutakhiran data dilakukan rutin dan sesuai prosedur, sehingga data untuk perencanaan dan penyaluran bantuan lebih akurat. Nilai rendah menandakan pemutakhiran data belum memadai, yang dapat mempengaruhi validitas data dan efektivitas program kesejahteraan sosial.
Sumber Data	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

g. Urusan Tenaga Kerja

1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)

Nama Indikator	**Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang sesuai dengan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD), sebagai ukuran keselarasan pelaksanaan program dengan perencanaan tenaga kerja yang telah ditetapkan.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD}}{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai indikator yang tinggi menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sejalan dengan RTKD, sehingga perencanaan tenaga kerja daerah lebih terimplementasi secara efektif. Sebaliknya, nilai rendah menandakan banyak kegiatan yang tidak mengacu pada RTKD, yang dapat menurunkan konsistensi dan efektivitas program terkait tenaga kerja.
Sumber Data	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)

Nama Indikator	**Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi tenaga kerja di kabupaten/kota yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai standar yang berlaku, sebagai ukuran peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja.

Rumus	$\frac{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD}}{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai indikator yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja telah memiliki sertifikasi kompetensi, sehingga kapasitas dan kualitas tenaga kerja lebih terjamin. Sebaliknya, nilai rendah menandakan masih banyak tenaga kerja yang belum bersertifikat, yang dapat mempengaruhi produktivitas dan daya saing tenaga kerja di daerah.
Sumber Data	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM
Frekuensi	Tahunan

3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Nama Indikator	**Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja**
Definisi	Indikator ini mengukur produktivitas tenaga kerja dengan membandingkan kontribusi PDRB atas dasar harga konstan terhadap jumlah tenaga kerja di kabupaten/kota, sebagai ukuran efisiensi dan kinerja ekonomi tenaga kerja.
Rumus	$\frac{\text{PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)}}{\text{Jumlah tenaga kerja}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi tingkat produktivitas tenaga kerja menunjukkan efisiensi dan kontribusi ekonomi yang lebih besar dari setiap tenaga kerja serta kualitas SDM yang baik, sedangkan semakin rendah nilai produktivitas menandakan rendahnya efisiensi, keterampilan, atau kemampuan tenaga kerja yang dapat membatasi pertumbuhan ekonomi daerah.
Sumber Data	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)

Nama Indikator	**Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi perusahaan di kabupaten/kota yang telah menerapkan tata kelola kerja yang layak, meliputi perjanjian kerja/perjanjian bersama (PP/PKB), keberadaan LKS Bipartit, struktur dan skala upah yang jelas, serta kepesertaan pekerja pada BPJS

	Ketenagakerjaan.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah Perusahaan}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai indikator yang tinggi menunjukkan banyak perusahaan telah menerapkan tata kelola kerja yang layak, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja. Sebaliknya, nilai rendah menandakan sebagian besar perusahaan belum memenuhi standar tata kelola kerja yang layak, yang dapat memengaruhi hak dan perlindungan pekerja.
Sumber Data	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM
Frekuensi	Tahunan

5. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota

Nama Indikator	**Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi pencari kerja yang berhasil ditempatkan di lapangan kerja, baik di dalam maupun luar negeri, melalui mekanisme layanan Antar Kerja di kabupaten/kota.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencaker yang terdaftar}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin efektif mekanisme layanan antar kerja dalam menyalurkan tenaga kerja ke lapangan kerja yang sesuai, meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan produktivitas, sedangkan semakin rendah persentase menandakan masih terbatasnya efektivitas penempatan yang dapat menyebabkan tingginya pengangguran dan ketidaksesuaian tenaga kerja dengan kebutuhan pasar.
Sumber Data	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM
Frekuensi	Tahunan

h. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Nama Indikator	**Indeks Pembangunan Gender (IPG)**
Definisi	IPG adalah indeks yang menggambarkan capaian pembangunan manusia perempuan dibandingkan laki-laki berdasarkan tiga dimensi: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Indeks ini menunjukkan kesetaraan pencapaian antara perempuan dan laki-laki. IPG digunakan untuk menilai sejauh mana pembangunan memperhatikan

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
	kesetaraan gender.
Rumus	IPG = (IPM Perempuan / IPM Laki-laki) × 100
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IPG (mendekati 100), menunjukkan semakin kecil kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki.
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase Aggaran Responsif Gender (ARG) Daerah

Nama Indikator	Persentase Aggaran Responsif Gender (ARG) Daerah (%)
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi anggaran daerah yang direncanakan dan dilaksanakan secara responsif gender, dibandingkan dengan total belanja operasi (barang/jasa dan bansos) serta belanja modal OPD, yang dibuktikan dengan dokumen Gender Budget Statement (GBS) atau Kerangka Acuan Kerja Responsif Gender (KAK RG).
Rumus	% Anggaran Responsif Gender dibandingkan Belanja Operasi (Barang Jasa dan Bansos) dan Belanja Modal OPD yang dibuktikan dengan adanya dokumen GBS / KAK RG
Interpretasi	Nilai indikator yang tinggi menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam penganggaran yang responsif gender, mendukung kesetaraan dan inklusi. Sebaliknya, nilai rendah menandakan alokasi anggaran responsif gender masih terbatas, sehingga potensi pemenuhan kebutuhan kelompok perempuan dan laki-laki secara adil belum optimal.
Sumber Data	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif

Nama Indikator	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif (%)

Definisi	Indikator ini mengukur proporsi anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang telah menerima layanan komprehensif, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, psikososial, hukum, dan perlindungan sosial sesuai kebutuhan anak.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif}}{\text{Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus}} \times 100\%$ Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun). Layanan komprehensif sesuai hasil asesmen mencakup: a. Pengaduan masyarakat; b. Penjangkauan korban; c. Pengelolaan kasus; d. Penampungan sementara; e. Mediasi; dan f. Pendampingan korban.
Interpretasi	Nilai indikator yang tinggi menunjukkan pemerintah daerah efektif dalam memberikan layanan komprehensif bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Sebaliknya, nilai rendah menandakan banyak AMPK belum mendapatkan layanan memadai, sehingga risiko kerentanan dan dampak negatif terhadap anak tetap tinggi.
Sumber Data	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota (%)

Nama Indikator	**Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi anak (usia < 18 tahun) korban kekerasan yang telah ditangani oleh instansi terkait di tingkat kabupaten/kota, termasuk pendampingan dan layanan pemulihan psikososial sesuai kewenangan daerah.
Rumus	(Jumlah anak (penduduk usia < 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi / Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota) × 100%
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin baik kapasitas dan respons instansi terkait dalam menangani anak korban kekerasan, mendukung perlindungan anak dan pemulihan psikososial, sedangkan semakin rendah persentase menandakan masih terbatasnya penanganan yang dapat meningkatkan risiko trauma dan dampak jangka panjang pada anak.
Sumber Data	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Regulasi	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak

5. Persentase kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)

Nama Indikator	**Persentase kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang telah memperoleh layanan komprehensif, meliputi perlindungan hukum, psikososial, kesehatan, dan rehabilitasi sosial.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan koprehensif}}{\text{Jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai indikator yang tinggi menunjukkan pemerintah daerah efektif dalam memberikan layanan komprehensif bagi korban perempuan, sehingga perlindungan, pemulihan, dan rehabilitasi berjalan optimal. Sebaliknya, nilai rendah menandakan banyak korban yang belum memperoleh layanan memadai, meningkatkan risiko trauma dan dampak sosial jangka panjang.
Sumber Data	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

i. Urusan Pangan

1. Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (%)

Nama Indikator	**Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (%)**
Konsep/ Definisi	Mengukur persentase cadangan pangan Kabupaten/kota. Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/ kota Adalah jumlah cadangan/persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah yang selanjutnya disebut CBPK. Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/ kota yang ditetapkan adalah jumlah target cadangan/ persediaan beras pada pemerintah daerah kabupaten/ kota. Cadangan Beras Pemerintah Provinsi yang selanjutnya disingkat CBPP adalah persediaan Beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah provinsi. Jumlah cadangan Beras pemerintah daerah ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah cadangan Beras pemerintah daerah dihitung dengan mempertimbangkan: a. produksi Beras di daerah; b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat di daerah; dan c. kerawanan pangan di daerah. Penghitungan jumlah cadangan Beras pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan: kebutuhan konsumsi

	masyarakat di daerah; dan potensi sumber daya di daerah.
Rumus	*(Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota / Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan) × 100%* Tahapan penghitungan jumlah cadangan Beras pemerintah daerah sebagai berikut: 1. Tahap 1 Menghitung untuk Penghitungan Cadangan Beras Daerah (DDCBD) Data Dasar Cadangan Beras Daerah (DDCBD) adalah total jumlah CBPD, CBPK, CBPP, dan cadangan Beras masyarakat di 1 (satu) wilayah kabupaten/kota. Penghitungan DDCBD berdasarkan rumus: **DDCBD = ∑ [(%WTB+%PKP) x IRBI x Pop x K]** Dimana: WTB: Wilayah terdampak bencana PKP: Prevalensi kerawanan pangan IRBI: Indeks kerawanan bencana Pop: Jumlah penduduk K: Konsumsi per kapita per tahun 2. Tahap 2 Menghitung Cadangan Beras Daerah (CBD) di satu wilayah kabupaten/kota. CBD adalah jumlah CBPP, CBPK dan CBPD di satu wilayah kabupaten/kota. Penghitungan CBD berdasarkan rumus: CBD = 0,5 % XDDCBD DDCBD: Data Dasar Cadangan Beras Daerah 3. Tahap 3 Menghitung CBPP dan CBPK CBPP = 20 % X CBD dimana CBD: Cadangan Beras Daerah CBPK = [(A + P)/2]X 75% CBD dimana: (A) Proporsi APBD = Realisasi APBD kabupaten/kota / Jumlah total Realisasi APBD Kabupaten/Kota di satu Kabupaten/Kota (P) Proporsi Produksi = Produksi Beras di Kabupaten/ Kota / Jumlah total produksi beras kabupaten/kota di satu Kabupaten/Kota
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin baik kesiapan pemerintah daerah dalam mengelola cadangan pangan untuk menghadapi kerawanan pangan dan keadaan darurat, sedangkan semakin rendah persentase menandakan terbatasnya cadangan pangan yang dikuasai dan dikelola pemerintah, sehingga potensi risiko kekurangan pangan meningkat.
Sumber Data	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Frekuensi	Tahunan

2. Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota

Nama Indikator	**Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota**
Definisi	Indikator ini mengukur kualitas konsumsi pangan masyarakat di kabupaten/kota berdasarkan komposisi pangan yang seimbang dan sesuai pedoman Pola Pangan Harapan. Skor PPH dihitung dengan mengukur

	kontribusi energi dari berbagai kelompok pangan terhadap total energi aktual dan Angka Kecukupan Energi (AKE), kemudian dikalikan dengan bobot masing-masing kelompok pangan untuk mendapatkan skor total.
Rumus	1. Pengelompokkan pangan 2. Konversi bentuk, jenis dan satuan 3. Menghitung sub total kandungan energi menurut kelompok pangan 4. Menghitung total energi aktual seluruh kelompok pangan 5. Menghitung kontribusi energi dari setiap kelompok pangan terhdap total energi aktual (dalam bentuk persen) 6. Menghitung kontribusi energi setiap kelompok pangan terhadap Angak Kecukupan Energi (% AKE) 7. Menghitung skor aktual berdasarkan kontribusi aktual dikalikan bobot masing-masing kelompok pangan. 8. Menghitung skor AKE 9. Menghitung Skor PPH 10. Menghitung Total Skor Pola Pangan Harapan
Interpretasi	Skor tinggi menunjukkan pola konsumsi pangan masyarakat lebih seimbang dan sesuai pedoman PPH, sedangkan skor rendah menandakan kebutuhan diversifikasi pangan dan pemenuhan gizi masih perlu ditingkatkan.
Sumber Data	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan

Nama Indikator	**Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi desa atau kelurahan di kabupaten/kota yang tergolong rentan rawan pangan, yaitu wilayah yang memiliki keterbatasan akses, ketersediaan, dan konsumsi pangan yang dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat secara memadai.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah desa dan/atau kelurahan rentan rawan pangan}}{\text{Jumlah total desa dan/atau kelurahan di kota/kabupaten}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan banyak wilayah yang rentan rawan pangan, menandakan perlunya intervensi pangan dan program ketahanan pangan. Nilai rendah menunjukkan sebagian besar wilayah relatif aman dari kerawanan pangan.
Sumber Data	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan

Nama Indikator	**Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi standar mutu dan keamanan

	pangan. Penilaian dilakukan melalui kegiatan pengawasan post-market (pengambilan contoh dan pengujian) dengan bobot 60% dan pre-market (registrasi, sertifikasi, surveilan) dengan bobot 40%.
Rumus	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu pangan dan keamanan pangan dihitung berdasarkan capaian kegiatan pengawasan mutu dan kemanan pangan segar asal tumbuhan post market (pengambilan contoh dan pengujian) dengan bobot sebesar 60% dan pre market (registrasi/sertifikasi/surveilan) sebesar 40%
Interpretasi	Nilai indikator yang tinggi menunjukkan pangan segar yang beredar aman dan bermutu sesuai standar, mendukung kesehatan masyarakat. Nilai rendah menandakan masih banyak pangan segar yang tidak memenuhi standar mutu dan keamanan, sehingga berisiko bagi konsumen.
Sumber Data	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Frekuensi	Tahunan

j. Urusan Pertanahan

1. Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/ Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran

Nama Indikator	**Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/ Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran**
Definisi	Indikator ini mengukur luas tanah yang ditetapkan sebagai Tanah Objek Landreform (TOL) yang berasal dari tanah kelebihan maksimum atau tanah absentee, serta jumlah subjek penerima manfaat yang ditetapkan pada tahun anggaran berjalan. Indikator ini mencerminkan capaian program redistribusi tanah dalam rangka pemerataan penguasaan tanah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah Luas Tanah objek Landreform}}{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform}}$ x 100%
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan kepada petani penggarap dengan luasan memadai (≥ 0,5 ha), mendukung pemerataan kepemilikan tanah dan peningkatan kesejahteraan petani, sedangkan semakin rendah persentase menandakan masih terbatasnya TOL yang siap didistribusikan, berpotensi memperlambat program reformasi agraria dan ketahanan pangan.
Sumber Data	• Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan • Badan Pertanahan Nasional
Frekuensi	Tahunan

2. Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran

Nama Indikator	**Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran**
Definisi	Indikator ini menggambarkan sejauh mana potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang ada dapat ditindaklanjuti melalui kegiatan redistribusi tanah dan penataan akses. Indikator ini mengukur ketersediaan dan pemanfaatan tanah garapan yang belum bersertipikat sebagai objek reforma agraria, sekaligus mencerminkan progres penyelesaian kasus pertanahan yang menghambat pemberian akses legal dan pemberdayaan kepada calon subjek penerima manfaat.
Rumus	$\frac{\text{Luas realisasi dari target luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee}}{\text{Realisasi dari target jumlah subjek yang ditetapkan}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai persentase yang lebih tinggi menunjukkan semakin besar proporsi tanah garapan belum bersertipikat yang sudah ditangani dibandingkan total pengaduan atau potensi kasus. Semakin tinggi angkanya, semakin siap potensi TORA tersebut ditindaklanjuti untuk redistribusi tanah dan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Sumber Data	• Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan • Badan Pertanahan Nasional
Frekuensi	Tahunan

3. Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran

Nama Indikator	**Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran**
Definisi	Indikator ini mengukur tingkat realisasi penetapan tanah ganti kerugian yang dapat ditindaklanjuti sebagai objek redistribusi tanah dalam rangka pelaksanaan reforma agraria. Indikator ini menunjukkan sejauh mana proses penetapan, verifikasi, dan penyelesaian ganti kerugian tanah berhasil menghasilkan tanah siap redistribusi sesuai target pada tahun anggaran berjalan.
Rumus	$\frac{\text{Luas realisasi tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah}}{\text{Target luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai persentase yang tinggi menunjukkan semakin optimalnya realisasi penetapan tanah ganti kerugian yang dapat diproses lebih lanjut sebagai objek redistribusi tanah. Nilai yang rendah menunjukkan adanya kendala administratif, teknis, atau hukum dalam proses verifikasi dan penetapan tanah ganti kerugian.
Sumber Data	• Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan • Badan Pertanahan Nasional
Frekuensi	Tahunan

4. Jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran

Nama Indikator	**Jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran (%)**
Definisi	Indikator ini menggambarkan efektivitas proses penetapan subjek dan objek redistribusi tanah yang dilakukan pemerintah daerah dan menjadi cerminan kemajuan pelaksanaan program TORA pada tahun berjalan.
Rumus	$\frac{\text{Realisasi jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi tanah yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah}}{\text{Target jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi tanah yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai yang lebih tinggi menunjukkan bahwa pelaksanaan redistribusi tanah—baik dari segi jumlah subjek yang ditetapkan maupun luas objek yang difasilitasi, semakin mendekati atau melampaui target. Nilai yang rendah menunjukkan perlunya percepatan dalam penetapan subjek, verifikasi objek, atau fasilitasi teknis dan administratif dalam redistribusi tanah.
Sumber Data	• Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan • Badan Pertanahan Nasional
Frekuensi	Tahunan

5. Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi

Nama Indikator	**Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian kasus tanah garapan yang belum bersertipikat melalui mekanisme mediasi pada tahun anggaran berjalan. Indikator ini mencerminkan efektivitas upaya fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan pemerintah daerah bersama instansi terkait, sehingga kasus tanah garapan dapat ditangani dan diselesaikan tanpa melalui proses hukum yang panjang.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah kasus tanah garapan belum}}{\text{Jumlah pengaduan kasus tanah garapan belum bersertipikat}} \times 100\%$
Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan semakin efektifnya proses mediasi dalam menyelesaikan kasus tanah garapan belum bersertipikat. Persentase yang rendah menunjukkan masih adanya hambatan dalam proses mediasi, baik dari sisi administratif, teknis, maupun partisipasi para pihak.
Sumber Data	• Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan • Badan Pertanahan Nasional
Frekuensi	Tahunan

6. **Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas**

Nama Indikator	**Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur tingkat kepastian dan tertib administrasi pertanahan melalui perbandingan antara luas tanah aset Pemerintah Daerah yang telah bersertipikat dengan keseluruhan luas tanah yang tercatat sebagai aset Pemerintah Daerah. Indikator ini mencerminkan sejauh mana penguasaan aset tanah pemerintah telah memiliki bukti hukum yang sah, lengkap, dan berkualitas sehingga dapat mendukung kepastian hukum, optimalisasi pemanfaatan aset, serta perencanaan pembangunan.
Rumus	$\frac{\text{Luas Tanah yang telah bersertipikat dalam penguasaan Pemerintah Daerah}}{\text{Luas seluruh tanah yang masuk dalam aset Pemerintah Daerah}} \times 100\%$
Interpretasi	Persentase tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar tanah aset Pemerintah Daerah telah memiliki sertipikat yang sah, lengkap, dan berkualitas. Persentase rendah menunjukkan bahwa banyak aset tanah Pemerintah Daerah yang belum memiliki sertipikat.
Sumber Data	• Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan • Badan Pertanahan Nasional
Frekuensi	Tahunan

7. Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah

Nama Indikator	**Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menetapkan hak atas tanah yang berada dalam penguasaan atau pengelolaannya melalui dukungan terhadap pelaksanaan Konsolidasi Tanah.
Rumus	$\frac{\text{Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/ Kota}}{\text{Luas Lokasi Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota}} \times 100\%$
Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar lokasi konsolidasi tanah telah memperoleh dukungan pembangunan dari Pemerintah Daerah. Persentase yang rendah menunjukkan bahwa dukungan pembangunan terhadap lokasi konsolidasi tanah masih terbatas.
Sumber Data	• Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan • Badan Pertanahan Nasional
Frekuensi	Tahunan

8. Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB

Nama Indikator	**Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan Peta Nilai Tanah (PNT) dalam penyelenggaraan pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh Pemerintah Daerah. Indikator ini menunjukkan sejauh mana PNT yang tersedia di wilayah kabupaten/kota telah dikerjasamakan dan digunakan sebagai dasar penilaian dalam proses pelayanan BPHTB
Rumus	$\frac{\text{Luas Peta Nilai Tanah yang telah dikerjasamakan untuk dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB}}{\text{Luas Peta Nilai Tanah pada wilayah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$
Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa Peta Nilai Tanah sudah dimanfaatkan secara optimal dalam pelayanan BPHTB. Sebaliknya, persentase yang rendah mengindikasikan bahwa pemanfaatan Peta Nilai Tanah masih terbatas dan memerlukan peningkatan kerja sama serta integrasi data.
Sumber Data	• Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan • Badan Pertanahan Nasional
Frekuensi	Tahunan

9. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan

Nama Indikator	**Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan.
Rumus	$\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)}}{\text{Seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin baik kepatuhan pemanfaatan tanah terhadap peruntukkannya dan izin lokasi yang diterbitkan, mendukung tertib tata ruang dan pembangunan berkelanjutan, sedangkan semakin rendah persentase menandakan masih adanya pemanfaatan tanah yang tidak sesuai peruntukkan, berpotensi menimbulkan konflik, pelanggaran tata ruang, dan risiko kerugian lingkungan atau sosial.

Sumber Data	• Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan • Badan Pertanahan Nasional
Frekuensi	Tahunan

10. Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum (%)

Nama Indikator	**Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur tingkat kesesuaian pemanfaatan tanah untuk pembangunan fasilitas umum berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
Rumus	$\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)}}{\text{Seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin baik kepatuhan pemanfaatan tanah terhadap peruntukkannya dan izin lokasi yang diterbitkan, mendukung tertib tata ruang dan pembangunan berkelanjutan, sedangkan semakin rendah persentase menandakan masih adanya pemanfaatan tanah yang tidak sesuai peruntukkan.
Sumber Data	• Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan • Badan Pertanahan Nasional
Frekuensi	Tahunan

11. Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal

Nama Indikator	**Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan tanah yang telah diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk mendukung kegiatan penanaman modal, sekaligus menunjukkan sejauh mana lokasi yang telah ditetapkan melalui KKPR benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukan ruangnya.
Rumus	$\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai peruntukan di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang}}{\text{Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik ketersediaan dan pemanfaatan lokasi pembangunan sesuai peruntukan; semakin rendah persentasenya, semakin terbatas lokasi yang siap dan sesuai, sehingga dapat menghambat penanaman modal dan pertumbuhan investasi daerah.
Sumber Data	• Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan • Badan Pertanahan Nasional

Frekuensi	Tahunan

12. Tersedianya tanah untuk masyarakat

Nama Indikator	**Tersedianya tanah untuk Masyarakat (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan tanah yang telah diberikan izin membuka tanah melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga mencerminkan ketersediaan lahan yang siap dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
Rumus	$\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah Kegiatan Pemanfaatan Ruang}}{\text{Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin baik ketersediaan dan pemanfaatan tanah yang sesuai izin untuk masyarakat, mendukung akses lahan bagi kegiatan ekonomi, permukiman, dan pembangunan lokal, sedangkan semakin rendah persentase menandakan masih terbatasnya tanah yang siap dimanfaatkan, berpotensi menghambat pengembangan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat
Sumber Data	• Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan • Badan Pertanahan Nasional
Frekuensi	Tahunan

13. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi

Nama Indikator	**Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi**
Definisi	Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian sengketa tanah garapan melalui mekanisme mediasi sebagai upaya penyelesaian non-litigasi yang cepat, efisien, dan berorientasi pada kesepakatan antara para pihak.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan}} \times 100\%$
Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan efektivitas penanganan sengketa melalui mediasi, sedangkan persentase yang rendah mengindikasikan masih banyak pengaduan yang belum terselesaikan melalui proses mediasi.
Sumber Data	• Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan • Badan Pertanahan Nasional
Frekuensi	Tahunan

k. Lingkungan Hidup

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>Perhitungan IKLH Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara melakukan penjumlahan dari semua komponen indeks di Kabupaten/Kota (IKA, IKU, dan IKL) yang dikalikan masing-masing bobot sesuai dengan rumus penghitungan IKLH Kabupaten/Kota.
a. IKLH Kabupaten/ Kota dengan Ekosistem Gambut
$IKLH$ = (0,3760 x IKA) + (0,4050 x IKU) + (0,1712 x IKTL) + (0,0478 x IKEG)
b. IKLH Kabupaten/ Kota tanpa Ekosistem Gambut
$IKLH$ = (0,3760 x IKA) + (0,4050 x IKU) + (0,1712 x IKTL)
Keterangan
IKA = Indeks Kualitas Air
IKU = Indeks Kualitas Udara
IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan
IKEG = Indeks Kualitas Ekosistem Gambut</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
<table>
<tr><td>No.</td><td>Kategori</td><td>Angka Rentang</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Sangat Baik</td><td>90 ≤ x ≤ 100</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Baik</td><td>70 ≤ x < 90</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Sedang</td><td>50 ≤ x < 70</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Kurang</td><td>25 ≤ x < 50</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Sangat Kurang</td><td>0 ≤ x < 25</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Sumber Data/ PD Penanggung Jawab</td><td>Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, tutupan lahan, tutupan ekosistem gambut, dan air laut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Dinas Lingkungan Hidup Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DLHPKPP)</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
</table>

2. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)

Nama Indikator	**Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)**
Definisi	Indikator ini mengukur kinerja pengelolaan sampah secara komprehensif melalui penilaian terhadap aspek kelembagaan, sumber daya manusia, sarana prasarana, pendanaan, implementasi kebijakan, efektivitas program, efisiensi anggaran, serta kondisi kebersihan dan kualitas lingkungan yang terkait dengan pengelolaan sampah.
Rumus	1. Kebijakan Pengelolaan Sampah 2. SDM pengelola sampah 3. Sarana dan prasarana (pengangkutan dan pengolahan sampah) 4. Anggaran pengelolaan sampah 5. Sosialisasi dan pemahaman pengelolaan sampah 6. Acceptability & implementasi 7. Capaian terhadap target dan kapasitas 8. Efisiensi anggaran (rasio incremental capaian dan target per kelas anggaran) 9. Kota bersih (penilaian adipura) 10. Nilai IKA (Indeks Kualitas Air), Komponen dari IKLH

Interpretasi	Nilai IKPS yang tinggi menunjukkan kinerja pengelolaan sampah yang efektif, terencana, dan berkelanjutan, sedangkan nilai yang rendah mengindikasikan masih lemahnya aspek kelembagaan, sarana, pendanaan, maupun implementasi program pengelolaan sampah.
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Frekuensi	Tahunan

3. Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota

Nama Indikator	**Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota**
Definisi	Indikator ini mengukur efektivitas pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota, mulai dari pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir sampah.
Rumus	$\frac{\text{Total volume sampah yang ditangani}}{\text{Total volume timbunan sampah kabupaten/kota}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin efektif pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota, mencakup pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir, sehingga mendukung kebersihan, kesehatan lingkungan, dan keberlanjutan sumber daya; sedangkan semakin rendah persentase menandakan masih terbatasnya pengelolaan sampah, berpotensi menimbulkan pencemaran, risiko kesehatan, dan degradasi lingkungan.
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Frekuensi	Tahunan

4. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota (%)

Nama Indikator	**Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur tingkat kepatuhan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan Peraturan/Undang-undang Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin rendah persentase menunjukkan semakin baik ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH, mencerminkan pengelolaan usaha yang tertib, aman, dan ramah lingkungan, sedangkan semakin tinggi persentase menandakan masih banyak pelanggaran izin yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap

	lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Frekuensi	Tahunan

l. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan

Nama Indikator	**Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi penduduk yang melaporkan kematian dan memperoleh akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Rumus	$\frac{\text{Akta Kematian yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan yang tercatat dan melaporkan}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, menunjukkan pelayanan pencatatan kematian lebih cepat, akurat, dan aksesibel bagi masyarakat. Semakin rendah persentase, menandakan masih adanya keterlambatan atau kendala dalam penerbitan akta kematian bagi penduduk yang melaporkan.
Sumber Data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan

Nama Indikator	**Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi pasangan yang melaporkan peristiwa perkawinan dan memperoleh akta perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Rumus	$\frac{\text{Akta Perkawinan yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan yang tercatat dan melaporkan}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan pelayanan pencatatan perkawinan berjalan efektif, aksesibel, dan responsif terhadap laporan masyarakat. Semakin rendah persentase menunjukkan adanya kendala dalam proses pelayanan, seperti keterlambatan penerbitan, kelengkapan dokumen, atau akses pelaporan.

Sumber Data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan

4.

Nama Indikator	**Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)**
Definisi	Mengukur proporsi penduduk yang melaporkan peristiwa perceraian dan memperoleh akta perceraian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Rumus	$\frac{\text{Akta Perceraian yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan yang tercatat dan melaporkan}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan pelayanan pencatatan perceraian berjalan efektif, cepat, dan responsif terhadap laporan masyarakat. Semakin rendah persentase menandakan adanya hambatan dalam proses penerbitan akta, misalnya terkait kelengkapan dokumen, proses verifikasi, atau akses pelaporan.
Sumber Data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Frekuensi	Tahunan

5. Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan

Nama Indikator	**Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi anak yang dilaporkan kelahirannya dan telah diterbitkan akta kelahirannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Indikator ini mencerminkan tingkat aksesibilitas dan efektivitas pelayanan pencatatan kelahiran.
Rumus	$\frac{\text{Akta Kelahiran yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah anak usia 0 – 17 tahun}} \times 100\%$
Interpretasi	Persentase tinggi menunjukkan cakupan kepemilikan akta kelahiran yang baik serta pelayanan administrasi kependudukan yang efektif. Persentase rendah menunjukkan masih adanya hambatan dalam pelaporan kelahiran atau penerbitan akta, seperti akses layanan, kelengkapan dokumen, atau keterlambatan proses.
Sumber Data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Frekuensi	Tahunan

6. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak

Nama Indikator	**Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur tingkat cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) pada anak usia wajib KIA sebagai bagian dari pelayanan administrasi kependudukan untuk menjamin identitas, perlindungan, dan akses layanan dasar bagi anak.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah anak yang memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak wajib KIA}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin baik cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), mencerminkan akses layanan administrasi kependudukan yang merata dan perlindungan identitas anak yang efektif, sedangkan semakin rendah persentase menandakan masih banyak anak yang belum memiliki KIA, berpotensi menimbulkan kesulitan akses layanan publik dan perlindungan hukum bagi anak.
Sumber Data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Frekuensi	Tahunan

7. Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun

Nama Indikator	**Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur tingkat pemenuhan penyusunan Data Profil Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam satu tahun, sebagai dokumen yang berisi kondisi, dinamika, dan karakteristik penduduk yang menjadi dasar perencanaan dan pelayanan kependudukan.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun}}{\text{2 Dokumen}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan penyusunan dokumen profil kependudukan telah dilaksanakan sesuai standar dan target. Semakin rendah persentase menunjukkan belum optimalnya penyusunan dokumen

	profil, yang dapat berdampak pada keterbatasan data dalam perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan.
Sumber Data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Frekuensi	Tahunan

8. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital

Nama Indikator	**Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi penduduk yang telah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) dari total penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP-el. Indikator ini menggambarkan tingkat adopsi layanan digital kependudukan yang mendukung transformasi layanan administrasi kependudukan yang lebih cepat, aman, dan mudah diakses.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki identitas kependudukan digital}}{\text{Total Penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan adopsi IKD yang semakin baik, mencerminkan peningkatan akses, literasi digital, dan efektivitas layanan adminduk berbasis digital. Semakin rendah persentase menunjukkan masih rendahnya penggunaan IKD, dapat disebabkan oleh kendala teknis, akses internet, literasi digital, atau minimnya sosialisasi.
Sumber Data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Frekuensi	Tahunan

9. Perekaman KTP Elektronik

Nama Indikator	**Perekaman KTP Elektronik**
Definisi	Mengukur proporsi penduduk wajib KTP (usia 17 tahun ke atas atau sudah menikah) yang telah melakukan perekaman KTP-el. Indikator ini menunjukkan ketersediaan identitas legal bagi penduduk serta efektivitas layanan perekaman data kependudukan.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP elektronik}}{\text{Total Penduduk wajib KTP}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan layanan perekaman KTP-el berjalan baik, jangkauan layanan luas, serta terpenuhinya hak identitas penduduk. Semakin rendah persentase menunjukkan masih banyak penduduk wajib KTP yang belum terekam.
Sumber Data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Frekuensi	Tahunan

10. Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama

Nama Indikator	**Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama**
Definisi	Mengukur persentase perangkat daerah di Kabupaten/Kota yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$
Interpretasi	Persentase tinggi menunjukkan semakin banyak perangkat daerah memanfaatkan data kependudukan melalui kerja sama, sehingga tata kelola data, pelayanan publik, dan perencanaan berbasis data menjadi lebih efektif. Sebaliknya, persentase rendah menunjukkan pemanfaatan data masih terbatas, yang berdampak pada kurangnya akurasi perencanaan dan kualitas layanan.
Sumber Data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Frekuensi	Tahunan

m. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Persentase peningkatan status desa mandiri

Nama Indikator	**Persentase peningkatan status desa mandiri (%)**
Definisi	Mengukur persentase peningkatan jumlah desa berstatus mandiri dari tahun sebelumnya. Indikator ini menggambarkan efektivitas pemberdayaan desa dalam meningkatkan kemandirian melalui tata kelola, pelayanan dasar, ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah desa mandiri tahun}_n - \text{Jumlah desa mandiri tahun}_{n-1}}{\text{Jumlah desa mandiri tahun}_{n-1}} \times 100\%$ Untuk tahun 2024 masih menggunakan IDM, sementara untuk tahun 2025 pakai indeks desa, jika mau dipisahkan menggunakan output Jumlah Bumdes.

Interpretasi	Persentase tinggi menunjukkan semakin banyak desa yang naik status menjadi desa mandiri, mencerminkan keberhasilan intervensi pembangunan, peningkatan kapasitas desa, dan penguatan ekonomi lokal. Persentase rendah atau nol menunjukkan peningkatan desa mandiri belum signifikan.
Sumber Data	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase Fasilitasi Penataan Desa

Nama Indikator	**Persentase Fasilitasi Penataan Desa (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi desa yang mendapatkan fasilitasi penataan desa, baik terkait penetapan batas desa, kelembagaan, kewenangan, maupun dokumen perencanaan desa, sesuai ketentuan perundang-undangan.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah desa yang terfasilitasi}}{\text{Jumlah desa}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan pelaksanaan fasilitasi penataan desa berjalan efektif dan merata, mendukung kepastian wilayah, penguatan tata kelola, serta peningkatan kapasitas desa. Semakin rendah persentase menunjukkan fasilitasi belum optimal.
Sumber Data	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa

Nama Indikator	**Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi kerjasama desa yang telah difasilitasi hingga mencapai tahap penetapan dan berlaku sesuai ketentuan, baik kerjasama antardesa, desa dengan pihak ketiga, maupun kerjasama lainnya untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat desa.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah Kerjasama desa yang telah ditetapkan dan berlaku}}{\text{Jumlah Kerjasama Desa yang ditangani}} \times 100\%$
Interpretasi	Persentase tinggi menunjukkan fasilitasi kerjasama desa berjalan efektif, memperkuat kolaborasi antardesa dan dengan pihak lain, serta mendukung pembangunan desa berbasis kemitraan. Persentase rendah menunjukkan proses fasilitasi belum optimal, berpotensi menghambat pengembangan inovasi desa dan optimalisasi sumber daya melalui kerjasama.
Sumber Data	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Nama Indikator	**Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (%)**
Definisi	Mengukur proporsi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan oleh pemerintah daerah, meliputi peningkatan kapasitas,

	pendampingan, penguatan kelembagaan, atau dukungan program lainnya untuk meningkatkan partisipasi dan kinerja lembaga desa.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah LKD yang terfasilitasi}}{\text{Jumlah LKD}} \times 100\%$
Interpretasi	Persentase tinggi menunjukkan fasilitasi pemberdayaan berjalan baik dan merata, yang memperkuat kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat. Persentase rendah menunjukkan masih terbatasnya fasilitasi, yang dapat berdampak pada lemahnya peran dan kinerja lembaga desa dalam pembangunan lokal.
Sumber Data	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Frekuensi	Tahunan

5. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat

Nama Indikator	**Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)**
Definisi	Mengukur proporsi Lembaga Adat Desa (LAD) dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (LMHA) yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan, seperti peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan, pendampingan, atau dukungan program untuk menjaga keberlanjutan adat istiadat, nilai budaya, dan tata kelola masyarakat adat.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah LAD dan LMHA yang}}{\text{Jumlah LAD dan LMHA}} \times 100\%$
Interpretasi	Persentase tinggi menunjukkan fasilitasi berjalan efektif, memperkuat peran lembaga adat dalam pelestarian budaya, penyelesaian adat, dan dukungan terhadap pembangunan desa. Persentase rendah menunjukkan masih terbatasnya pemberdayaan lembaga adat, berpotensi melemahkan pelestarian nilai adat dan partisipasi masyarakat adat dalam pembangunan.
Sumber Data	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Frekuensi	Tahunan

6. Persentase pengentasan desa tertinggal (%)

Nama Indikator	**Persentase pengentasan desa tertinggal (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi desa tertinggal yang berhasil meningkat statusnya menjadi desa berkembang dalam satu tahun berdasarkan hasil pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM). Indikator ini mencerminkan efektivitas intervensi pembangunan desa, pengurangan kesenjangan wilayah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun}}{\text{Jumlah desa tertinggal (per awal tahun – n)}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin besar jumlah desa tertinggal yang berhasil meningkat statusnya menjadi desa berkembang, mencerminkan efektivitas program pembangunan desa, pengurangan kesenjangan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, semakin rendah persentase menandakan masih banyak desa yang tertinggal, yang berpotensi

	memperlambat pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.
Sumber Data	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Frekuensi	Tahunan

n. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*/TFR) per WUS usia

Nama Indikator	**Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia**
Definisi	Angka Kelahiran Total (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduktifnya (usia 15–49 tahun), apabila ia mengalami tingkat fertilitas tertentu pada setiap kelompok umur selama hidupnya. Indikator ini menggambarkan tingkat fertilitas suatu wilayah dan digunakan untuk menilai keberhasilan program pengendalian penduduk.
Rumus	$\frac{\text{Total Fertility Rate tahun (TFR) Kabupaten/ Kota}}{\text{Target Fertility Rate/TFR Kabaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terhadap kabupaten/kota yang bersangkutan}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin sesuainya TFR dengan target, mencerminkan efektivitas program pengendalian penduduk dan layanan KB. Sebaliknya, semakin rendah persentase menandakan TFR masih di atas target, yang berpotensi meningkatkan beban kependudukan dan menghambat pembangunan keluarga.
Sumber Data	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Frekuensi	Tahunan

2. Angka prevalensi kontrasepsi modern/*modern Contraceptive* (mCPR)

Nama Indikator	**Angka prevalensi kontrasepsi modern/*modern Contraceptive* (mCPR)**
Definisi	Persentase pasangan usia subur (PUS) yang sedang menggunakan metode kontrasepsi modern pada periode tertentu.
Rumus	$\frac{\text{Banyaknya peserta KB aktif modern}}{\text{Banyaknya pasangan usia subur}} \times 100\%$ (PUS) PA Modern: Peserta KB Aktif modern PUS: Pasangan Usia Subur usia 15-49 tahun
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak PUS yang menggunakan kontrasepsi modern, mencerminkan efektivitas pelayanan KB dan keberhasilan pengendalian kelahiran. Sebaliknya, semakin rendah persentase menandakan masih

	terbatasnya penggunaan metode modern, yang berpotensi meningkatkan risiko kehamilan tidak direncanakan dan beban kependudukan.
Sumber Data	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)

Nama Indikator	**Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)**
Definisi	Indikator ini mengukur persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*).
Rumus	$\frac{\text{Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (}\textit{unmeet need}\text{) kabupaten/kota}}{\text{Target Prosentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota yang bersangkutan}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak pasangan usia subur yang tidak terpenuhi kebutuhan ber-KB-nya, menandakan akses atau kualitas layanan keluarga berencana masih rendah dan berpotensi meningkatkan kehamilan tidak direncanakan. Sebaliknya, semakin rendah persentase mencerminkan kebutuhan ber-KB yang semakin terpenuhi, dengan akses dan kualitas layanan KB yang lebih baik.
Sumber Data	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Frekuensi	Tahunan

4. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR 15-19)

Nama Indikator	**Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR 15-19)**
Definisi	Angka yang menunjukkan jumlah kelahiran hidup dari perempuan remaja usia 15–19 tahun per 1.000 perempuan dalam kelompok usia yang sama pada tahun tertentu.
Rumus	$[\![\text{ASFR}]\!](15\text{-}19) = K_(15\text{-}19)/P_(15\text{-}19) \times 1000$ Keterangan: • K_{15-19} = Jumlah kelahiran hidup dari perempuan usia 15–19 tahun • P_{15-19} = Jumlah perempuan usia 15–19 tahun
Interpretasi	Semakin tinggi nilai ASFR menunjukkan semakin banyak remaja usia 15–19 tahun yang melahirkan,

	mencerminkan tingginya risiko kesehatan reproduksi, rendahnya akses edukasi dan layanan kesehatan reproduksi, serta meningkatnya potensi putus sekolah dan masalah sosial ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah nilai ASFR menandakan keberhasilan upaya pencegahan kehamilan remaja melalui edukasi, pendampingan, dan layanan kesehatan reproduksi yang lebih baik.
Sumber Data	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Frekuensi	Tahunan

5. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Nama Indikator	**Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)**
Definisi	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)adalah indeks komposit yang mengukur kualitas pembangunan keluarga
Rumus	Nilai Komposit dari 3 dimensi dengan mempertimbangkan bobot tertentu, yaitu: (a) Dimensi Ketentraman dengan indikator antara lain (1) kegiatan ibadah; (2) legalitas keluarga; (3) jaminan kesehatan; (4) jaminan keuangan; dan (5) keharmonisan keluarga; (b) Dimensi Kemandirian dengan indikator antara lain (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) keberlangsungan pendidikan; (3) kesehatan kelaurga; (4) akses informasi; (c) Dimensi Kebahagiaan dengan indikator antara lain (1) interaksi keluarga; (2) interaksi sosial Formula iBangga: iBangga = 1/3 (Indeks ketentraman + Indeks kemandirian + Indeks kebahagiaan) x 100
Interpretasi	Semakin tinggi nilai iBangga menunjukkan kualitas keluarga yang lebih baik, dengan tingkat ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan yang optimal. Semakin rendah nilai iBangga menandakan masih adanya keluarga yang perlu mendapatkan perhatian dalam aspek ketentraman, kemandirian, atau kebahagiaan.
Sumber Data	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Frekuensi	Tahunan

o. Perhubungan

1. Konektivitas Kabupaten/ Kota

Nama Indikator	**Konektivitas Kabupaten/ Kota**
Definisi	Indikator ini menggambarkan tingkat keterhubungan wilayah kabupaten/kota melalui moda transportasi darat dan laut. Konektivitas diukur berdasarkan capaian infrastruktur, aksesibilitas, dan kualitas layanan transportasi yang memungkinkan perpindahan orang dan barang secara lancar, efektif, dan efisien antarwilayah di dalam maupun keluar kabupaten/kota.
Rumus	$KT_{Daerah} = (K_{TD} \times W_{TD}) + (K_{TL} \times W_{TL})$ KTD = Konektivitas Transportasi Darat WTD = Bobot Konektivitas Transportasi Darat

	(Ditentukan Daerah, dengan satuan %) KTL = Konektivitas Transportasi Laut WTL = Bobot Konektivitas Transportasi Laut (Ditentukan Daerah, dengan satuan %) Jumlah WTD + WTL = 100%
Interpretasi	Nilai yang lebih tinggi menunjukkan konektivitas wilayah yang semakin baik melalui transportasi darat dan laut, sedangkan nilai yang rendah menandakan perlunya peningkatan aksesibilitas, infrastruktur, dan kualitas layanan transportasi.
Sumber Data	Dinas Perhubungan
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota

Nama Indikator	**Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur tingkat pemenuhan perlengkapan jalan yang telah terpasang dibandingkan dengan kondisi ideal sesuai standar kebutuhan pada ruas jalan kabupaten/kota.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah perlengkapan jalan yang terpanjang}}{\text{Jumlah kebutuhan perlengkapan jalan}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai yang lebih tinggi menunjukkan bahwa kelengkapan jalan semakin mendekati kondisi ideal, sedangkan nilai rendah menunjukkan perlunya peningkatan pemasangan perlengkapan jalan.
Sumber Data	Dinas Perhubungan
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan

Nama Indikator	**Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur tingkat kepatuhan perusahaan angkutan umum terhadap standar keselamatan melalui kepemilikan sertifikasi sistem manajemen keselamatan.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan}}{\text{Jumlah perusahaan angkutan umum}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai yang lebih tinggi menunjukkan semakin banyak perusahaan angkutan umum yang memenuhi standar

	keselamatan, sedangkan nilai rendah menunjukkan perlunya peningkatan penerapan dan sertifikasi sistem manajemen keselamatan.
Sumber Data	Dinas Perhubungan
Frekuensi	Tahunan

4. Rasio Konektivitas

Nama Indikator	**Rasio Konektivitas**
Definisi	Mengukur rasio konektivitas Kabupaten/Kota dan mengetahui tingkat konektivitas jaringan transportasi darat dan sungai, danau dan penyebrangan di wilayah kewenangan kabupaten/kota.
Rumus	Rasio Konektivitas = (IK1×Bobot Angkutan Jalan)+(IK2×Bobot Angkutan sungai, danau dan penyeberangan) $$IK1 = \frac{(Jumlah\ Trayek\ yang\ Dilayani \times Bobot\ Trayek)}{Jumlah\ Kebutuhan\ Trayek}$$ $$IK2 = \frac{(Jumlah\ Lintas\ yang\ Beroperasi \times Bobot\ Lintas)}{Jumlah\ Kebutuhan\ Lintas}$$ Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) • Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek Angkutan Perdesaan Perkotaan • Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek Angkutan Perdesaan Perkotaan dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) • Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil • Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan: 1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan =30); 2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan=50); 3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30, bobot angkutan jalan =70); 4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) Bobot Trayek atau Lintas: 1. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1

Nama Indikator	Rasio Konektivitas
	2. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot =0.8 3. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5
Interpretasi	Semakin tinggi rasio konektivitas menunjukkan semakin baiknya keterhubungan jaringan transportasi darat dan angkutan sungai, danau, serta penyeberangan, yang mendukung kelancaran mobilitas dan aktivitas ekonomi wilayah. Sebaliknya, nilai yang rendah menandakan keterhubungan yang masih terbatas dan berpotensi menghambat pelayanan transportasi serta distribusi barang.
Sumber Data	Dinas Perhubungan
Frekuensi	Tahunan

5. V/C RASIO di Jalan Kabupaten/Kota

Nama Indikator	V/C RASIO di Jalan Kabupaten/Kota
Konsep/ Definisi	Mengukur kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota. Hasil pengukuran kinerja lalu lintas pada ruas jalan kewenangan Kabupaten/Kota.
Rumus	Volume lalu lintas (V) / Kapasitas jalan (C)
Interpretasi	Semakin tinggi nilai V/C Rasio menunjukkan semakin besar volume lalu lintas dibandingkan kapasitas jalan, yang mencerminkan tingkat kemacetan semakin tinggi serta menurunnya kinerja lalu lintas di ruas jalan kabupaten/kota. Sebaliknya, semakin rendah nilai V/C Rasio menunjukkan kapasitas jalan masih mampu menampung volume lalu lintas, mencerminkan kelancaran arus kendaraan dan kinerja lalu lintas yang baik.
Sumber Data	Dinas Perhubungan
Frekuensi	Tahunan

p. Komunikasi dan Informatika

1. Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (%)

Nama Indikator	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (%)
Definisi	Indikator ini mengukur persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo.
Rumus	_____

	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak perangkat daerah yang telah terhubung dengan jaringan internet yang disediakan Dinas Kominfo, mencerminkan pemerataan akses teknologi informasi, peningkatan efisiensi kerja, serta penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Sebaliknya, semakin rendah persentase menandakan masih terbatasnya perangkat daerah yang terhubung, yang berpotensi menghambat integrasi sistem informasi, keterpaduan layanan, dan percepatan transformasi digital pemerintahan daerah.
Sumber Data	Dinas Komunikasi dan Informatika
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Nama Indikator	**Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur tingkat keterhubungan Perangkat Daerah dengan jaringan intra pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya integrasi layanan, pertukaran data, dan efisiensi tata kelola pemerintahan.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah tingkat kab/kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah}}{\text{Jumlah keseluruhan Perangkat Daerah tingkat Kab/kota}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai yang lebih tinggi menunjukkan semakin banyak Perangkat Daerah yang telah terintegrasi dalam jaringan intra pemerintah daerah, mencerminkan peningkatan efisiensi komunikasi, koordinasi, dan pengelolaan data. Sebaliknya, nilai yang rendah menunjukkan masih perlunya perluasan konektivitas dan penguatan infrastruktur TIK di lingkungan pemerintah daerah.
Sumber Data	Dinas Komunikasi dan Informatika
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi

Nama Indikator	**Persentase Layanan Publik yang** diselenggarakan **secara online dan terintegrasi (%)**
Definisi	Mengukur persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi.
Rumus	$\text{Jumlah layanan publik yang diselenggarakan} \times 100\%$

	secara online dan terintegrasi Jumlah layanan publik
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak layanan publik yang sudah berbasis online dan terintegrasi, mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah, kemudahan akses bagi masyarakat, efisiensi birokrasi, serta dukungan terhadap transformasi digital pemerintahan. Sebaliknya, semakin rendah persentase menandakan masih terbatasnya layanan publik yang terintegrasi secara digital, yang berpotensi mengurangi efektivitas pelayanan, keterpaduan sistem, dan kepuasan masyarakat.
Sumber Data	Dinas Komunikasi dan Informatika
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)

Nama Indikator	**Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)**
Definisi	Mengukur persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
Rumus	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya / Jumlah penduduk x 100%
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan efektivitas penyebaran informasi publik, sehingga masyarakat memahami kebijakan dan program prioritas pemerintah; sebaliknya, persentase rendah mencerminkan masih terbatasnya jangkauan atau efektivitas diseminasi informasi.
Sumber Data	Dinas Komunikasi dan Informatika
Frekuensi	Tahunan

q. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

1. Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi

Nama Indikator	**Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur persentase peningkatan atau penurunan volume usaha koperasi dari tahun

	sebelumnya untuk melihat dinamika perkembangan kinerja koperasi di kabupaten/kota.
Rumus	$\frac{\Sigma \text{ Volume usaha Koperasi tahun berjalan} - \Sigma \text{ Volume usaha Koperasi tahun sebelumnya}}{\Sigma \text{ Volume usaha Koperasi tahun sebelumnya}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai yang lebih tinggi menunjukkan peningkatan kinerja dan aktivitas usaha koperasi dari tahun ke tahun, sedangkan nilai yang rendah atau negatif mengindikasikan penurunan aktivitas usaha yang memerlukan perhatian dan intervensi pembinaan.
Sumber Data	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM
Frekuensi	Tahunan

2. Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal

Nama Indikator	**Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal**
Definisi	Indikator ini mengukur persentase usaha mikro yang telah beralih dari sektor informal ke formal melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Rumus	$\frac{\sum \text{ usaha Mikro yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)}}{\sum \text{ Jumlah UMKM}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai yang lebih tinggi menunjukkan semakin banyak usaha mikro yang telah terdaftar secara resmi dan memperoleh legalitas usaha, sedangkan nilai yang rendah mengindikasikan masih terbatasnya proses formalitas usaha mikro di daerah.
Sumber Data	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM
Frekuensi	Tahunan

3. Pertumbuhan Wirausaha

Nama Indikator	**Pertumbuhan Wirausaha**
Definisi	Indikator ini mengukur tingkat peningkatan atau penurunan jumlah wirausaha dari tahun sebelumnya untuk melihat dinamika perkembangan kewirausahaan di daerah.
Rumus	$\frac{(\sum \text{ Wirausaha tahun berjalan} - \sum \text{ Wirausaha tahun sebelunya})}{\sum \text{ Wirausaha tahun sebelumnya}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai yang lebih tinggi menunjukkan peningkatan jumlah wirausaha dan dinamika pertumbuhan sektor usaha, sedangkan nilai yang rendah atau negatif menandakan perlambatan atau penurunan jumlah wirausaha yang perlu mendapat perhatian dalam kebijakan pengembangan ekonomi.
Sumber Data	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM
Frekuensi	Tahunan

4. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas

Nama Indikator	**Meningkatnya Koperasi yang berkualitas**
Definisi	Indikator ini mengukur persentase koperasi aktif yang

	mengalami peningkatan kualitas melalui pelaksanaan RAT, peningkatan volume usaha, dan pertumbuhan aset sesuai standar penilaian koperasi yang sehat.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha, dan aset}}{\text{Jumlah seluruh koperasi aktif}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan keberhasilan pembinaan koperasi yang aktif, sehat, dan berkembang dalam melaksanakan RAT, peningkatan usaha, serta pengelolaan aset.
Sumber Data	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM
Frekuensi	Tahunan

5. Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha

Nama Indikator	**Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha**
Definisi	Mengukur persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha}}{\textit{Jumlah usaha mikro keseluruhan}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai yang lebih tinggi menunjukkan semakin banyak usaha mikro yang tumbuh dan berkembang menjadi wirausaha, menandakan peningkatan kapasitas pelaku usaha dan efektivitas program pemberdayaan ekonomi. Sebaliknya, nilai yang rendah menunjukkan perlunya penguatan pendampingan, pelatihan, dan akses permodalan.
Sumber Data	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM
Frekuensi	Tahunan

r. Urusan Penanaman Modal

1. Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota (%)

Nama Indikator	**Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota (%)**
Definisi	
Rumus	$\frac{\text{Jumlah nilai investasi tahun n- jumlah nilai investasi tahun n-1}}{\text{Jumlah nilai investasi tahun n-1 di kab/kota}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan meningkatnya minat dan kepercayaan investor dalam menanamkan modalnya di Kabupaten/Kota, mencerminkan iklim investasi yang kondusif, dukungan regulasi yang baik, serta potensi ekonomi daerah yang menarik. Sebaliknya, persentase rendah atau menurun mengindikasikan masih adanya hambatan dalam iklim usaha, keterbatasan fasilitas penunjang investasi, atau kurang optimalnya promosi dan pelayanan perizinan, sehingga dapat mengurangi daya tarik daerah bagi investor.
Sumber Data	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian
Frekuensi	Tahunan

2. Realisasi Total terhadap Target Investasi

Nama Indikator	**Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur persentase capaian realisasi investasi kabupaten/kota dibandingkan dengan target investasi yang ditetapkan oleh BKPM Provinsi.
Rumus	$\frac{\text{Total Realisasi Investasi Kab/ Kota}}{\text{Target Investasi Kap/Kota yang ditetapkan oleh BKPM Provinsi kepada Kab/Kota yang bersangkutan}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai yang lebih tinggi menunjukkan kinerja investasi daerah yang semakin baik karena realisasi investasi mendekati atau melampaui target. Sebaliknya, nilai yang rendah menunjukkan bahwa pencapaian investasi masih di bawah target sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan iklim investasi dan promosi penanaman modal.
Sumber Data	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian
Frekuensi	Tahunan

s. Kepemudaan dan Olahraga

1. Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat

Nama Indikator	**Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur persentase pemuda usia 16–30 tahun yang telah mengikuti pelatihan, kursus, atau training serta memperoleh sertifikat sebagai bukti peningkatan kapasitas dan keterampilan.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah Pemuda berusia 16-30 tahun di kab/kota yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat}}{\text{Jumlah Pemuda berusia 16-30 tahun di kab/kota}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai yang lebih tinggi menunjukkan semakin banyak pemuda yang meningkatkan kompetensi melalui pelatihan bersertifikat, mencerminkan penguatan kapasitas sumber daya manusia muda di daerah. Sebaliknya, nilai yang rendah menunjukkan masih terbatasnya akses atau partisipasi pemuda dalam kegiatan peningkatan keterampilan.
Sumber Data	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi

Nama Indikator	**Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur persentase atlet yang dibina pada tingkat kabupaten/kota yang berhasil lolos dan masuk ke Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) Provinsi.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah Atlet daerah di Kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi}}{\text{Jumlah Atlet daerah yang dibina ditingkat kab/kota (KONI, PPLD, Induk Cabor)}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai yang lebih tinggi menunjukkan semakin efektifnya pembinaan atlet di tingkat kabupaten/kota karena mampu menghasilkan atlet yang lolos ke Pelatda Provinsi. Sebaliknya, nilai yang rendah mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas pembinaan, pelatihan, dan fasilitas olahraga di daerah.
Sumber Data	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

3. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri

Nama Indikator	**Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah pemuda usia 16-30 tahun yang berwirausaha di kabupaten/kota}}{\text{Jumlah pemuda usia 16-30 tahun di kabupaten/kota}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan meningkatnya kemandirian dan kontribusi pemuda dalam kegiatan wirausaha serta efektivitas program pemberdayaan. Sebaliknya, persentase yang rendah menandakan masih terbatasnya peran dan kapasitas pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri.
Sumber Data	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

4. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)

Nama Indikator	**Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)**
Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial.
Rumus	$\frac{\textit{Jumlah pemuda usia } 16-30 \textit{ tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota}}{\textit{Jumlah pemuda usia } 16-30 \textit{ tahun di kabupaten/kota}} x\ 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan dan sosial, mencerminkan peran serta kepedulian mereka dalam pembangunan daerah. Sebaliknya, persentase rendah menandakan keterlibatan pemuda yang terbatas dan potensi kontribusi yang kurang optimal.
Sumber Data	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

5. Peningkatan Prestasi Olahraga

Nama Indikator	**Peningkatan Prestasi Olahraga**
Definisi	Indikator ini mengukur peningkatan prestasi olahraga. Jumlah perolehan medali emas, perak dan perunggu pada event olahraga nasional dan internasional yang diikuti Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
Rumus	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional.
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah perolehan medali menunjukkan peningkatan kualitas pembinaan dan prestasi olahraga di daerah, serta keberhasilan atlet dalam bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Sebaliknya, perolehan medali yang rendah mencerminkan perlunya penguatan program pembinaan olahraga, peningkatan sarana dan prasarana, serta dukungan terhadap atlet agar mampu berprestasi lebih baik di masa mendatang.
Sumber Data	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

t. Statistik

1. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

Nama Indikator	**Indeks Pembangunan Statistik (IPS)**
Definisi	Indikator ini mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.
Rumus	5 Domain: Prinsip Satu Data Indonesia, Kualitas Data, Proses Bisnis Statistik, Kelembagaan, Statistik Nasional. Setiap Domain terdiri dari beberapa aspek dan setiap aspek terdiri dari beberapa indikator.
Interpretasi	Nilai IPS yang lebih tinggi menunjukkan penggunaan data statistik yang lebih luas dan efektif dalam perencanaan pembangunan daerah, sedangkan nilai rendah menandakan masih terbatasnya pemanfaatan data statistik dalam pengambilan keputusan.
Sumber Data	Dinas Komunikasi dan Informatika
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)

Nama Indikator	**Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah pemuda usia 16-30 tahun yang berwirausaha di kabupaten/kota}}{\text{Jumlah pemuda usia 16-30 tahun di kabupaten/kota}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin baik pemanfaatan data statistik dalam proses evaluasi pembangunan daerah. Sebaliknya, persentase yang rendah mencerminkan masih terbatasnya penggunaan data dalam evaluasi.
Sumber Data	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah

Nama Indikator	**Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam evaluasi pembangunan daerah}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin baik pemanfaatan data statistik dalam proses evaluasi pembangunan daerah. Sebaliknya, persentase yang rendah mencerminkan masih terbatasnya penggunaan data dalam evaluasi, yang berpotensi mengurangi akurasi dan kualitas pengambilan keputusan pembangunan.
Sumber Data	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

u. Persandian

1. Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah

Nama Indikator	**Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur sejauh mana pemerintah daerah siap dan mampu mengamankan informasi serta data elektronik melalui penerapan standar dan pedoman keamanan informasi.
Rumus	$\frac{\text{Nilai Indeks KAMI hasil verifikasi}}{\text{Nilai Optimal Indeks KAMI}}$ x 100%
Interpretasi	Nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam pengamanan informasi yang semakin baik, sedangkan nilai rendah menandakan perlunya peningkatan kebijakan, prosedur, dan sarana keamanan informasi.
Sumber Data	Dinas Komunikasi dan Informatika
Frekuensi	Tahunan

2. Tingkat keamanan informasi pemerintah

Nama Indikator	**Tingkat keamanan informasi pemerintah**
Definisi	Mengukur tingkat keamanan informasi pemerintah kabupaten/kota.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah nilai per area keamanan informasi}}{\text{Jumlah area penilaian}}$ x 100%
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan tingkat keamanan informasi pemerintah daerah semakin baik, mencerminkan kesiapan dan kepatuhan terhadap standar keamanan informasi nasional. Sebaliknya, persentase yang rendah menunjukkan masih lemahnya pengelolaan keamanan informasi.
Sumber Data	Dinas Komunikasi dan Informatika
Frekuensi	Tahunan

v. Kebudayaan

1. Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan

Nama Indikator	**Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan**
Definisi	Indikator ini mengukur persentase warisan budaya, termasuk cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan, yang telah dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah Cagar budaya dan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dan dimanfaatkan}}{\text{Jumlah Cagar budaya dan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan}}$ x 100%
Interpretasi	Nilai yang lebih tinggi menunjukkan semakin luasnya upaya pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya, sedangkan nilai rendah menunjukkan perlunya peningkatan perlindungan dan pengembangan budaya di

	daerah.
Sumber Data	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan

Nama Indikator	**Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan**
Definisi	Indikator ini mengukur persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang telah diajukan untuk pendaftaran resmi melalui rekomendasi penetapan.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi penetapan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda meliputi Jumlah rekomendasi penetapan Cagar Budaya ditambah jumlah rekomendasi penetapan WBTb}}{\text{Jumlah rekomendasi Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda meliputi Jumlah rekomendasi penetapan Cagar Budaya ditambah jumlah rekomendasi WBTb}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai yang lebih tinggi menunjukkan semakin banyak cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang terdaftar secara resmi, mencerminkan upaya perlindungan dan dokumentasi budaya yang efektif. Sebaliknya, nilai rendah menunjukkan perlunya peningkatan pendaftaran dan pelestarian budaya.
Sumber Data	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifkasi profesi dibidang kebudayaan

Nama Indikator	**Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifkasi profesi dibidang kebudayaan (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur persentase tenaga kebudayaan yang telah memiliki sertifikasi profesi sebagai bukti kompetensi dan profesionalisme di bidang kebudayaan.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah tenaga kebudayaan yang disertifiksikasi}}{\text{Jumlah Tenaga Kebudayaan}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai yang lebih tinggi menunjukkan semakin banyak tenaga kebudayaan yang tersertifikasi dan profesional, sedangkan nilai rendah menunjukkan perlunya peningkatan program sertifikasi dan pengembangan kompetensi.
Sumber Data	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Frekuensi	Tahunan

4. Terlestarikannya Cagar Budaya

Nama Indikator	**Terlestarikannya Cagar Budaya**
Definisi	Indikator ini mengukur tingkat pelestarian cagar budaya.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah cagar budaya yang ditetapkan}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak cagar budaya yang berhasil dilestarikan sesuai regulasi. Persentase yang rendah menunjukkan masih terbatasnya perhatian atau alokasi sumber daya terhadap pelestarian.
Sumber Data	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

w. Perpustakaan

1. Nilai tingkat kegemaran membaca Masyarakat

Nama Indikator	**Nilai tingkat kegemaran membaca Masyarakat**
Konsep/ Definisi	Mengukur nilai tingkat kegemaran membaca Masyarakat. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian adalah kegemaran membaca masyarakat disuatu pemerintah daerah dengan mengukur sejumlah variabel utama seperti: Indikator Frekuensi Membaca, Indikator Durasi Membaca, Indikator Jumlah Bahan Bacaan, Frekuensi Akses Internet dan Durasi Akses Internet, untuk Penetapan sampel (5% dari total populasi usia membaca penduduk berusia 15-69 tahun di Kabupaten/Kota).
Rumus	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat
Interpretasi	Semakin tinggi nilai yang diperoleh menunjukkan tingkat kegemaran membaca masyarakat semakin baik, yang berarti literasi masyarakat meningkat serta mendorong pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan daya saing daerah. Sebaliknya, nilai yang rendah mencerminkan minat baca masyarakat masih terbatas.
Sumber Data	Dinas Kearsipan dan Perpustkaan
Frekuensi	Tahunan

2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Definisi	Mengukur indeks pembangunan literasi masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat, yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM), Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dapat diambil dari Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah skor capaian seluruh dimensi literasi masyarakat}}{\text{Jumlah skor maksimum seluruh dimensi literasi masyarakat}} \times 100\%$ UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM4 = Tingkat Kunjungan masyarakat ke Perpustakaan UPLM5 = Perpustakaan yang dibina sesuai standar UPLM6 = Keterlibatan Masyarakat dalam Perpustakaan UPLM7 = Anggota Perpustakaan AM = Aspek Masyarakat
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IPLM menunjukkan semakin baik pembangunan literasi di daerah, mencerminkan ketersediaan layanan perpustakaan, koleksi, tenaga, serta partisipasi masyarakat yang mendorong terciptanya budaya literasi. Sebaliknya, nilai rendah menunjukkan perlunya penguatan kapasitas perpustakaan dan program literasi masyarakat.
Sumber Data	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Frekuensi	Tahunan

x. Urusan Kearsipan Kabupaten/Kota

1. Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah

Nama Indikator	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah
Definisi	Indeks yang menggambarkan tingkat kepatuhan, kualitas, dan efektivitas penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah, berdasarkan hasil pengawasan eksternal dan internal sesuai ketentuan perundang-

Nama Indikator	**Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah**
	undangan.
Rumus	IHPKpd = 0,6 NHPe + 0,4 NHPi IHPKpd = Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah NHPe = Nilai Hasil Pengawasan dan Kearsipan Eksternal NHPi = Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal
Interpretasi	Nilai IHPKpd yang semakin tinggi menunjukkan bahwa penyelenggaraan kearsipan di Pemerintah Daerah semakin tertib, efektif, dan sesuai standar baik dari hasil pengawasan eksternal maupun internal. Nilai rendah menunjukkan perlunya peningkatan dalam kebijakan, kelembagaan, sumber daya, sarana prasarana, serta implementasi penyelenggaraan kearsipan.
Sumber Data	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Frekuensi	Tahunan

2. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional

Nama Indikator	**Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional**
Konsep/Definisi	Mengukur tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan).
Rumus	T = (a + i + s + j)/4 T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN
Interpretasi	Semakin tinggi nilai T menunjukkan semakin baik ketersediaan arsip yang dapat dijadikan bahan akuntabilitas, bukti hukum yang sah, dan pertanggungjawaban nasional. Sebaliknya, nilai rendah mencerminkan masih terbatasnya ketersediaan arsip yang terdokumentasi secara sistematis.
Sumber Data	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Frekuensi	Tahunan

3. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat

Nama Indikator	**Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (%)**
Konsep/ Definisi	Mengukur tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan public dan kesejahteraan rakyat.
Rumus	T = (m + b + g + a + c + i)/6 T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis danarsip hasil alih media dengan NSPK c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK
Interpretasi	Semakin tinggi nilai T menunjukkan bahwa keberadaan dan keutuhan arsip telah dikelola dengan baik sesuai NSPK sehingga mampu menjadi bahan pertanggungjawaban yang sah bagi negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, nilai T yang rendah mencerminkan masih adanya kelemahan dalam pelaksanaan pengelolaan arsip sesuai standar yang berlaku.
Sumber Data	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Frekuensi	Tahunan

y. Kelautan dan Perikanan

1. Produksi Perikanan Tangkap

Nama Indikator	**Produksi Perikanan Tangkap**
Definisi	Jumlah hasil tangkapan ikan yang diperoleh oleh nelayan dalam kurun waktu satu tahun di wilayah perairan Kabupaten/Kota, baik perairan laut maupun perairan umum daratan. Produksi dihitung dalam satuan ton.
Rumus	$\frac{\text{Produksi Perikanan Tangkap}}{\text{Target Produksi Perikanan Tangkap}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai produksi perikanan tangkap menunjukkan meningkatnya aktivitas dan produktivitas sektor perikanan, yang dapat mencerminkan ketersediaan stok ikan, efektivitas armada tangkap, serta kondisi cuaca dan ekosistem perairan. Penurunan produksi dapat mengindikasikan penurunan stok ikan, hambatan operasional, cuaca buruk, atau perubahan ekologi perairan.
Sumber Data	Dinas Perikanan
Frekuensi	Tahunan

2. Produksi Perikanan Budidaya

Nama Indikator	**Produksi Perikanan Budidaya**
Definisi	Indikator yang menggambarkan tingkat pencapaian produksi perikanan hasil kegiatan budidaya (air tawar, air payau, maupun laut) dalam satu tahun, dibandingkan dengan target produksi yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Rumus	$\frac{\text{Produksi Perikanan Budidaya}}{\text{Target Produksi Perikanan Budidaya}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase Produksi Perikanan Budidaya, maka semakin efektif dan berhasil pelaksanaan program budidaya perikanan di daerah. Sebaliknya, nilai yang rendah menunjukkan produksi belum mencapai target dan memerlukan perbaikan.
Sumber Data	Dinas Perikanan
Frekuensi	Tahunan

3. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (%)

Nama Indikator	**Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur total produksi perikanan Kabupaten/Kota.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) kab/kota}}{\text{Target produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin baik capaian produksi perikanan kabupaten/kota dibandingkan target yang ditetapkan, mencerminkan kontribusi sektor perikanan dalam mendukung ketahanan pangan, ekonomi lokal, dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, persentase rendah menunjukkan realisasi produksi perikanan belum optimal sehingga memerlukan upaya penguatan budidaya, penangkapan yang berkelanjutan, serta peningkatan sarana dan prasarana perikanan.
Sumber Data	Dinas Perikanan
Frekuensi	Tahunan

z. Urusan Pariwisata Kabupaten/Kota

1. Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum

Nama Indikator	**Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum**
Definisi	Indikator yang mengukur persentase pertumbuhan investasi pada sektor penyediaan akomodasi, makanan, dan minuman dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan.
Rumus	$\frac{\text{Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum Tahun N – Investasi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Tahun N-1}}{\text{Investasi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Tahun N-1}} \times 100\%$

Interpretasi	Semakin tinggi nilai pertumbuhan investasi, maka semakin baik dinamika perkembangan sektor akomodasi, makanan, dan minuman, yang mencerminkan meningkatnya kepercayaan pelaku usaha dan potensi ekonomi daerah. Sebaliknya, nilai rendah atau negatif menunjukkan perlambatan atau penurunan minat investasi di sektor ini.
Sumber Data	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

2. Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)

Nama Indikator	**Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)**
Definisi	Indikator yang mengukur persentase pertumbuhan jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap di hotel berbintang dan non-bintang pada tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Rumus	$\frac{\text{(Jumlah tamu wisatawan mancanegara (di setiap hotel berbintang dan Non Bintang Tahun N) - (Jumlah tamu wisatawan mancanegara di setiap hotel berbintang Tahun N-1}}{\text{(Jumlah tamu wisatawan mancanegara (di setiap hotel berbintang Tahun N-1)}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase pertumbuhan tamu wisatawan asing, maka semakin meningkat daya tarik dan kinerja sektor pariwisata daerah. Sebaliknya, pertumbuhan yang rendah atau negatif menunjukkan perlambatan kunjungan wisatawan asing dan perlunya evaluasi terhadap strategi promosi serta kualitas layanan wisata.
Sumber Data	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual

Nama Indikator	**Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual**
Definisi	Indikator yang menggambarkan proporsi pelaku ekonomi kreatif (Ekraf) yang telah memiliki perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) seperti hak cipta, merek, paten, desain industri, atau indikasi geografis—dibandingkan dengan total pelaku Ekraf yang terdata.
Rumus	$\frac{\text{Identifikasi Pelaku Ekraf yang sudah memiliki KI berdasarkan Sub-sektor Ekonomi Kreatif Data dapat diperoleh dari Kanwil Kemenkumham}}{} \times 100\%$

	(Jumlah tamu wisatawan mancanegara (di setiap hotel berbintang Tahun N-1)
Interpretasi	Semakin tinggi persentase pelaku Ekraf yang memiliki Kekayaan Intelektual, maka semakin baik perlindungan hukum, daya saing, dan nilai tambah produk ekonomi kreatif di daerah. Sebaliknya, nilai rendah menunjukkan perlunya peningkatan literasi KI dan fasilitasi pendaftaran KI bagi pelaku Ekraf.
Sumber Data	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)

Nama Indikator	**Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)**
Definisi	Mengukur tingkat pertumbuhan wisatawan mancanegara yang masuk ke Kabupaten/Kota.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun n - Jumlah wisatawan tahun n-1)}}{\text{Jumlah wisatawan tahun n-1}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan peningkatan daya tarik wisata daerah dan keberhasilan strategi pemasaran pariwisata terhadap berbagai segmen kebangsaan. Sebaliknya, jika persentase pertumbuhan rendah atau negatif, hal ini mencerminkan perlunya penguatan promosi, peningkatan kualitas destinasi, serta perbaikan aksesibilitas dan layanan wisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara.
Sumber Data	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

5. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota

Nama Indikator	**Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota (%)**
Definisi	Mengukur pertumbuhan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun n - Jumlah wisatawan tahun n-1}}{\text{Jumlah wisatawan tahun n-1)}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan pertumbuhan positif sektor pariwisata daerah, yang mencerminkan meningkatnya daya tarik destinasi, keberhasilan promosi, serta dukungan infrastruktur dan layanan

	wisata. Sebaliknya, persentase yang rendah atau negatif menunjukkan adanya tantangan dalam menarik wisatawan, sehingga perlu strategi pengembangan destinasi, peningkatan aksesibilitas, serta penguatan promosi wisata nusantara.
Sumber Data	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

6. Tingkat hunian akomodasi

Nama Indikator	**Tingkat hunian akomodasi**
Definisi	Inidikator ini untuk mengukur tingkat hunian akomodasi di Kabupaten/Kota.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase tingkat hunian akomodasi menunjukkan pertumbuhan positif sektor pariwisata daerah, yang mencerminkan meningkatnya daya tarik destinasi, keberhasilan promosi, serta dukungan infrastruktur dan layanan wisata. Sebaliknya, persentase yang rendah menunjukkan adanya tantangan dalam menarik wisatawan, sehingga perlu strategi pengembangan destinasi, peningkatan aksesibilitas, serta penguatan promosi wisata nusantara.
Sumber Data	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

7. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku

Nama Indikator	**Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku**
Definisi	Mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten/Kota (harga berlaku).
Rumus	$\frac{\text{Kontribusi sektor pariwisata pada PDRB}}{\text{Total PDRB yang berlaku}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase tingkat hunian akomodasi menunjukkan pertumbuhan positif sektor pariwisata daerah, yang mencerminkan meningkatnya daya tarik destinasi, keberhasilan promosi, serta dukungan infrastruktur dan layanan wisata. Sebaliknya, persentase

	yang rendah menunjukkan adanya tantangan dalam menarik wisatawan, sehingga perlu strategi pengembangan destinasi, peningkatan aksesibilitas, serta penguatan promosi wisata nusantara.
Sumber Data	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

8. Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD (%)

Nama Indikator	**Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%)**
Definisi	Mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten/Kota (harga berlaku).
Rumus	$\frac{\text{Total realisasi PAD dari sektor pariwisata}}{\text{Total realisasi PAD}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD, maka semakin besar peran sektor ini dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Sebaliknya, persentase yang rendah menunjukkan belum optimalnya penerimaan PAD dari pariwisata dan perlunya peningkatan pengelolaan, promosi, serta kualitas destinasi.
Sumber Data	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Frekuensi	Tahunan

aa. Pertanian

1. Peningkatan produksi tanaman pangan

Nama Indikator	**Peningkatan produksi tanaman pangan**
Definisi	Indikator yang mengukur persentase pertumbuhan produksi tanaman pangan pada tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Rumus	$\frac{\text{Produksi Tanaman Pangan Tahun ini} - \text{Produksi Tanaman Pangan Tahun Kemarin}}{\text{Produksi Tanaman Pangan Tahun Kemarin}} \times 100\%$

Interpretasi	Semakin tinggi persentase peningkatan produksi tanaman pangan, maka semakin baik produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah. Sebaliknya, persentase yang rendah atau negatif menunjukkan penurunan produktivitas dan perlu evaluasi faktor teknis, cuaca, hama, dan dukungan sarana produksi.
Sumber Data	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Frekuensi	Tahunan

2. Peningkatan Produksi Hortikultura

Nama Indikator	**Peningkatan Produksi Hortikultura**
Definisi	Indikator yang mengukur persentase pertumbuhan produksi hortikultura pada tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Komoditas hortikultura meliputi sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat.
Rumus	$\frac{\text{(Produksi Holtikultura Tahun ini- Produksi hortikultura Tahun Kemarin)}}{\text{Produksi hortikultura tahun kemarin}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase peningkatan produksi hortikultura, maka semakin baik pertumbuhan produktivitas dan pengembangan komoditas hortikultura di daerah. Sebaliknya, nilai yang rendah atau negatif menunjukkan perlunya evaluasi terhadap faktor budidaya, cuaca, hama penyakit, serta dukungan sarana produksi.
Sumber Data	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Frekuensi	Tahunan

3. Peningkatan Produksi komoditas Peternakan

Nama Indikator	**Peningkatan Produksi komoditas Peternakan**
Definisi	Indikator yang mengukur persentase pertumbuhan produksi komoditas peternakan pada tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya. Komoditas peternakan meliputi daging, telur, susu, dan hasil ternak lainnya.

Rumus	$\frac{\text{Produksi komoditas Peternakan Tahun ini - Produksi komoditas peternakan Tahun Kemarin}}{\text{Produksi komoditas Peternakan Tahun Kemarin}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase peningkatan produksi komoditas peternakan, maka semakin baik pertumbuhan sektor peternakan dan kapasitas produksi daerah. Sebaliknya, nilai yang rendah atau negatif menunjukkan perlunya evaluasi terhadap manajemen budidaya ternak, kesehatan hewan, ketersediaan pakan, serta dukungan sarana produksi.
Sumber Data	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Frekuensi	Tahunan

4. Peningkatan Produksi komoditas Perkebunan

Nama Indikator	**Peningkatan Produksi komoditas Perkebunan (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur persentase peningkatan produksi komoditas perkebunan dibandingkan tahun sebelumnya untuk melihat efektivitas upaya pengembangan subsektor perkebunan.
Rumus	$\frac{\text{Produksi Tanaman Pangan Tahun N – Produksi Perkebunan Tahun N-1}}{\text{Produksi komoditas Peternakan Tahun Kemarin-Produksi Perkebunan tahun N-1}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase peningkatan produksi, maka semakin berhasil upaya pengembangan komoditas perkebunan dan peningkatan produktivitas di wilayah tersebut.
Sumber Data	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Frekuensi	Tahunan

5. Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Nama Indikator	**Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi luas areal yang terdampak Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/DPI

	yang berhasil ditangani melalui kegiatan pengendalian dan penanggulangan pada tahun berjalan.
Rumus	$\frac{\text{Luas terkena DPI yang ditangani tahun ini}}{\text{Di bagi luas terkena DPI total}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase penanganan areal terdampak DPI, maka semakin efektif upaya pengendalian dan penanggulangan serangan DPI terhadap tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
Sumber Data	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Frekuensi	Tahunan

6. Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS)

Nama Indikator	**Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit** hewan **menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS)**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi wilayah yang berhasil dikendalikan dari penyakit hewan menular strategis berdasarkan hasil surveilans penyakit pada lima jenis Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS).
Rumus	$\frac{\text{Luas wilayah terkendali dari penyakit hewan Menular strategis tahun ini}}{\text{Wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, maka semakin efektif pengendalian penyakit hewan menular strategis di wilayah tersebut. Sebaliknya, jika persentase menurun, maka efektivitas pengendalian penyakit melemah, cakupan wilayah terkendali berkurang, dan risiko penularan penyakit hewan strategis meningkat.
Sumber Data	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Frekuensi	Tahunan

7. Produktivitas pertanian per hektar per tahun

Nama Indikator	**Produktivitas pertanian per hektar per tahun (Ton Per Hektar Per Tahun)**

Definisi	Ukuran keluaran produksi tanaman pangan rata-rata yang dihasilkan per hektar lahan panen dalam satu tahun.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun}}{\text{Luas panen}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi produktivitas pertanian per hektar per tahun mencerminkan efisiensi pemanfaatan lahan, keberhasilan teknologi budidaya, serta dukungan sarana dan infrastruktur pertanian. Sebaliknya, nilai yang rendah menunjukkan adanya kendala seperti kesuburan tanah, ketersediaan air, atau serangan hama penyakit, sehingga diperlukan penguatan inovasi budidaya dan peningkatan sarana prasarana pertanian.
Sumber Data	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Frekuensi	Tahunan

8. Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan (%)

Nama Indikator	**Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan (%)**
Konsep/Definisi	Mengukur tingkat penurunan kejadian penyakit hewan menular (%).
Rumus	((Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun t - Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun t-1) / Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun t-1) × 100%
Interpretasi	Semakin tinggi persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menunjukkan keberhasilan pengendalian dan penanggulangan penyakit, yang mencerminkan efektivitas sistem kesehatan hewan serta peningkatan kesadaran peternak. Sebaliknya, persentase rendah atau negatif menandakan masih adanya tantangan dalam pencegahan dan penanganan penyakit, sehingga perlu penguatan program vaksinasi, pengawasan, serta edukasi masyarakat peternak.
Sumber Data	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Frekuensi	Tahunan

ab. Perdagangan

1. Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota

Nama Indikator	**Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota**

Definisi	Persentase capaian nilai penjualan barang hasil pertanian yang dipasarkan ke kabupaten/kota lain dalam satu tahun dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.
Rumus	$\frac{\text{Realisasi Jumlah nilai penjualan barang ke kab/kota lain dalam 1 tahun (dalam juta rupiah)}}{\text{Target jumlah nilai penjualan barang ke kab/kota lain dalam 1 tahun (dalam juta rupiah)}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase penjualan antar wilayah menunjukkan meningkatnya daya saing, kualitas produk, serta kelancaran distribusi komoditas pertanian ke daerah lain. Sebaliknya, persentase yang rendah menunjukkan belum optimalnya pemasaran antar daerah.
Sumber Data	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku

Nama Indikator	**Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi alat ukur takaran, timbangan, dan perlengkapannya (UTTP) yang telah memiliki tera sah sesuai ketentuan dan berlaku di wilayah kabupaten/kota.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku}}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan kepatuhan pelaku usaha dan masyarakat dalam menggunakan UTTP yang sah, sehingga mencerminkan keadilan transaksi, perlindungan konsumen, serta kepastian hukum dalam kegiatan perdagangan. Sebaliknya, persentase yang rendah mengindikasikan masih rendahnya kepatuhan tera ulang dan potensi terjadinya ketidaksesuaian pengukuran.
Sumber Data	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM

Frekuensi	Tahunan

3. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) (%)

Nama Indikator	**Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan).
Rumus	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah pelaku usaha di wilayah kab/kota}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan, mencerminkan tertib administrasi, kepastian hukum, dan iklim usaha yang sehat. Sebaliknya, persentase rendah menandakan masih banyak pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban perizinan.
Sumber Data	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase Kinerja Realisasi Pupuk

Nama Indikator	**Persentase Kinerja Realisasi Pupuk**
Definisi	Indikator yang mengukur tingkat pencapaian realisasi penyaluran pupuk sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) petani.
Rumus	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{RDKK}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan efektivitas penyaluran pupuk sesuai dengan rencana kebutuhan, yang mencerminkan ketepatan distribusi dan dukungan terhadap produktivitas pertanian. Sebaliknya, persentase yang rendah mengindikasikan adanya kendala dalam distribusi atau pemenuhan kebutuhan pupuk, sehingga diperlukan perbaikan sistem pendataan, pengawasan, serta koordinasi dengan penyalur pupuk bersubsidi.
Sumber Data	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM
Frekuensi	Tahunan

ac. Industri

1. Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah

Nama Indikator	**Pencapaian sasaran Pembangunan industri daerah, meliputi:** **1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota** **2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota** **3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota** **4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota** **5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota**
Definisi	Indikator ini menggambarkan tingkat pencapaian sasaran pembangunan industri daerah berdasarkan lima indikator utama sektor industri pengolahan nonmigas. Pencapaian dihitung dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan dengan capaian aktual pada akhir tahun. Setiap indikator memiliki bobot tertentu yang mencerminkan tingkat prioritasnya dalam mendukung pengembangan industri daerah.
Rumus	Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan yang disepakati dengan capaian pada akhir tahun tersebut: 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentase capaian sasaran Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal sebesar 30%, misalnya: - Capaian 100 % --> Bobot maksimal 30% - Capaian 90 % --> Bobot (90% x 30 %) = 27% - Capaian 80 % --> Bobot (80% x 30 %) = 24% dan seterusnya 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentasi capaian sasaran Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal 30%, misalnya: - Capaian 100% --> Bobot maksimal 30% - Capaian 90% --> Bobot (90% x 30%) =27% - Capaian 80% --> Bobot (80% x 30%) = 24% dan seterusnya 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal sebesar 15 %, misalnya: - Capaian 100% --> Bobot maksimal 15% - Capaian 90% --> Bobot (90% x 15%) = 13,5% - Capaian 80% --> Bobot (80% x 15%) = 12% dan seterusnya 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan

	persentase capaian Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal sebesar 5%, misalnya: - Capaian 100% --> Bobot maksimal 5% - Capaian 90% --> Bobot (90% x 5%) = 4,5% - Capaian 80% --> Bobot (80% x 5%) = 4% dan seterusnya 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal sebesar 20%, misalnya: - Capaian 100% --> Bobot maksimal 20% - Capaian 90% --> Bobot (90% x 20%) = 18% - Capaian 80% --> Bobot (80% x 20%) = 16% dan seterusnya Nilai outcome diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut: (Indikator 1 + Indikator 2 + Indikator 3 + Indikator 4 + Indikator 5) dikalikan bobot IKK Outcome 40%
Interpretasi	Nilai yang semakin tinggi menunjukkan bahwa pembangunan industri daerah berjalan efektif sesuai target yang ditetapkan, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, kontribusi terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja, peningkatan ekspor, maupun investasi pada sektor industri pengolahan nonmigas. Sebaliknya, nilai yang rendah mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap kebijakan, program, dan dukungan dalam pengembangan industri daerah.
Sumber Data	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor

Nama Indikator	**Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur besarnya kontribusi investasi pada sektor industri dan kawasan industri terhadap total realisasi investasi dari seluruh sektor dalam satu tahun. Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat minat dan peran sektor industri dalam mendorong pertumbuhan investasi daerah.
Rumus	$\frac{\text{Nilai investasi sektor industri dan kawasan industri}}{\text{total investasi seluruh sektor}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentase, semakin besar kontribusi sektor industri dan kawasan industri terhadap total investasi daerah. Sebaliknya, nilai persentase yang rendah mengindikasikan perlunya upaya peningkatan daya saing sektor industri melalui

	perbaikan iklim investasi, promosi, dan pengembangan fasilitas penunjang.
Sumber Data	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan

Nama Indikator	**Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur tingkat kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan yang telah diberikan oleh pemerintah daerah.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan}}{\text{jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai persentase yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar Perusahaan Industri dan Kawasan Industri patuh dan responsif terhadap rekomendasi hasil pengawasan. Sebaliknya, persentase yang rendah mengindikasikan perlunya peningkatan pembinaan, penguatan mekanisme pengawasan, serta perbaikan komunikasi dan pendampingan kepada pelaku industri.
Sumber Data	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan

Nama Indikator	**Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang mencapai tingkat kepatuhan minimal kategori *"Baik"* setelah dilakukan pembinaan oleh pemerintah daerah.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik'}}{\text{seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan}} \times 100\%$

Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah efektif dalam meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan dan standar industri. Sebaliknya, nilai persentase yang rendah mengindikasikan perlunya penguatan strategi pembinaan, peningkatan intensitas pendampingan, atau perbaikan mekanisme penilaian kepatuhan.
Sumber Data	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian
Frekuensi	Tahunan

5. Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini

Nama Indikator	**Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini**
Definisi	Indikator ini mengukur ketersediaan dan ketepatan waktu penyampaian informasi industri yang meliputi data, laporan, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan sektor industri. Informasi dinilai berdasarkan kelengkapan, akurasi, dan ketepatan waktu penyampaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Rumus	Laporan informasi industri dan informasi lain sektor industri secara akurat, lengkap, dan tepat waktu, dengan ketentuan: - Jika laporan disampaikan dari tanggal 1 Januari sampai 31 Maret maka berbobot 100% - Jika laporan disampaikan setelah tanggal 31 Maret maka berbobot 0%
Interpretasi	Nilai 100% menunjukkan bahwa laporan informasi industri telah disusun dan disampaikan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. Nilai 0% menunjukkan laporan disampaikan terlambat, tidak sesuai ketentuan jadwal.
Sumber Data	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian
Frekuensi	Tahunan

6. Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota

Nama Indikator	**Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota**
Definisi	Indikator ini mengukur tingkat pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun n - Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1)}}{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan pertumbuhan positif sektor industri kecil dan menengah, yang mencerminkan meningkatnya iklim usaha, penyerapan tenaga kerja. Sebaliknya, persentase yang rendah atau negatif menunjukkan adanya tantangan dalam pengembangan IKM, sehingga diperlukan strategi penguatan daya saing, fasilitasi perizinan, dukungan pembiayaan, serta peningkatan akses pasar.

Sumber Data	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian
Frekuensi	Tahunan

7. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK (%)

Nama Indikator	**Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur persentase pencapaian sasaran pembangunan industri daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten (RPIK) dan mengacu pada turunan indikator dalam RIPIN. Terdapat lima sasaran utama pembangunan industri daerah yang harus ditetapkan target tahunannya dalam dokumen perencanaan industri tahunan sebagai dasar evaluasi capaian akhir tahun.
Rumus	Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan yang disepakati dengan capaian pada akhir tahun tersebut dan setiap sasaran memiliki bobot 20%. dokumen perencanaan pembangunan industri daerah yang terdiri dari: 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non migas Kabupaten/ Kota (satuan persentase) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian sasaran Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal sebesar 20%, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran Contoh perhitungan: • Jika capaian 100%, maka perhitungan (100% × 20%) = 20% • Jika capaian 90%, maka perhitungan (90% × 20%) = 18% • Jika capaian 80%, maka perhitungan (80% × 20%) = 16% • dan seterusnya. 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRBKabupaten/Kota (satuan persentase) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian sasaran Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal 20%, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran Contoh perhitungan: • Jika capaian 100% maka perhitungan (100% X 20%) = 20%; • Jika Capaian 90% maka perhitungan (90% x 20%) = 18%; • jika Capaian 80% maka perhitungan (80% x 20%) = 16%; dst 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/kota (satuan orang) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Non migas Kabupaten/kota

Nama Indikator	**Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK (%)**
	dengan bobot maksimal sebesar 15 %, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran Contoh perhitungan: • Jika capaian 100% maka perhitungan (100% X 20%) = 20%; • Jika Capaian 90% maka perhitungan (90% x 20%) = 18%; Jika Capaian 80% maka perhitungan (80%x20%) = 16%; 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/kota (satuan US$) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/kota dengan bobot maksimal sebesar 20%, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran. Contoh perhitungan: • Jika capaian 100% maka perhitungan (100% X 20%) = 20%; • Jika Capaian 90% maka perhitungan (90% x 20%) = 18%; • Jika Capaian 80% maka perhitungan (80% x 20%) = 16%; dst 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terdiri dari Penanaman Modal Asing (Satuan US$) dan Penanaman Modal Dana Negeri (Satuan Rp.) Kabupaten/kota diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/kota dengan bobot maksimal sebesar 20 %, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran Contoh perhitungan: • Jika capaian 100% maka perhitungan (100% X 20%) = 20%; • Jika Capaian 90% maka perhitungan (90% x 20%) = 18%; • Jika Capaian 80% maka perhitungan (80% x 20%) = 16%; dst
Interpretasi	Semakin tinggi persentase pencapaian sasaran pembangunan industri, termasuk turunan indikator dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK, menunjukkan keberhasilan pengembangan sektor industri, meningkatnya produktivitas, penyerapan tenaga kerja, serta kontribusi investasi terhadap perekonomian daerah. Sebaliknya, persentase yang rendah menunjukkan adanya hambatan dalam pencapaian target industri, sehingga diperlukan strategi penguatan kapasitas industri, fasilitasi perizinan, dukungan pembiayaan, dan peningkatan akses pasar.
Sumber Data	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian
Frekuensi	Tahunan

8. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait

Nama Indikator	**Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan**

	dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)
Konsep/ Definisi	Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait.
Rumus	(Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan / Jumlah izin yang dikeluarkan) × 100%
Interpretasi	Semakin tinggi persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan terhadap Izin Usaha Industri (IUI) Besar menunjukkan efektivitas pengawasan industri, kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan. Sebaliknya, persentase yang rendah menunjukkan adanya risiko ketidakpatuhan atau lemahnya pengawasan, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas pengawas, pemanfaatan teknologi informasi.
Sumber Data	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian
Frekuensi	Tahunan

9. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)

Nama Indikator	**Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah** kabupaten**/kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)**
Definisi	Mengukur Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait.
Rumus	(Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan / Jumlah izin yang dikeluarkan) × 100%
Interpretasi	Semakin tinggi persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan terhadap Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah menunjukkan efektivitas pengawasan kawasan industri, kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan, serta koordinasi antar kabupaten/kota dalam pengelolaan kawasan industri. Sebaliknya, persentase yang rendah menunjukkan potensi risiko ketidakpatuhan atau lemahnya pengawasan lintas daerah, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas pengawas, sinergi antar instansi, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau dan mengendalikan pengembangan kawasan industri
Sumber Data	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian
Frekuensi	Tahunan

ad. Sekretariat Daerah

1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan

Nama Indikator	**Pemanfaatan Sistem Pengadaan**
Definisi	Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan pengadaan.
Rumus	Skor Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan
Interpretasi	Nilai skor yang tinggi menunjukkan bahwa perangkat daerah telah memanfaatkan Sistem Pengadaan secara optimal, mencakup perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, hingga pelaporan secara elektronik. Sebaliknya, skor yang rendah mengindikasikan masih rendahnya pemanfaatan sistem, perlunya peningkatan kapasitas, kepatuhan, atau perbaikan tata kelola pengadaan.
Sumber Data	Sekretariat Daerah
Frekuensi	Tahunan

2. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ

Nama Indikator	**Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ**
Definisi	Indikator ini mengukur tingkat kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ) pada perangkat daerah. Penilaian mencakup kesesuaian sertifikasi, kemampuan teknis, profesionalisme, serta pemenuhan standar kompetensi yang ditetapkan dalam regulasi pengadaan.
Rumus	Skor Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ
Interpretasi	Nilai skor yang tinggi menunjukkan bahwa SDM PBJ memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai, tersertifikasi, serta mampu menjalankan proses pengadaan secara efektif, profesional, dan sesuai ketentuan. Skor rendah menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas, pelatihan, sertifikasi, dan penguatan kompetensi teknis SDM PBJ.
Sumber Data	Sekretariat Daerah
Frekuensi	Tahunan

3. Tingkat Kematangan UKPBJ

Nama Indikator	**Tingkat Kematangan UKPBJ**
Definisi	Indikator ini mengukur tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam menjalankan fungsi pengadaan pemerintah. Penilaian mencakup aspek kelembagaan, sumber daya manusia, tata kelola, proses bisnis, manajemen kinerja, inovasi, serta kemampuan UKPBJ dalam bertransformasi menuju pusat keunggulan pengadaan.
Rumus	Skor Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ
Interpretasi	Skor yang tinggi menunjukkan bahwa UKPBJ berada pada tingkat kematangan yang lebih baik, dengan tata kelola yang efektif, proses yang terdokumentasi, manajemen kinerja yang baik, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan. Skor yang rendah menunjukkan perlunya

	peningkatan kelembagaan, penguatan SDM, perbaikan proses bisnis, dan peningkatan kualitas layanan pengadaan.
Sumber Data	Sekretariat Daerah
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama

Nama Indikator	**Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama (%)**
Definisi	Mengukur persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal dan ditandatangani pada kuartal pertama tahun n}}{\text{Jumlah kontrak keseluruhan tahun n}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase proyek konstruksi besar yang ditandatangani pada kuartal pertama menunjukkan efektivitas perencanaan dan percepatan pembangunan. Sebaliknya, persentase rendah menunjukkan keterlambatan kontrak, sehingga diperlukan perencanaan lebih awal dan koordinasi antar pihak terkait.
Sumber Data	Sekretariat Daerah
Frekuensi	Tahunan

5. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif

Nama Indikator	**Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif**
Definisi	Mengukur tingkat pelaksanaan pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif}}{\text{Jumlah seluruh pengadaan}} \times 100\%$

Interpretasi	Semakin tinggi persentase pengadaan dengan metode kompetitif menunjukkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Sebaliknya, persentase rendah menunjukkan kurangnya kompetisi dalam pengadaan, sehingga diperlukan peningkatan penerapan metode kompetitif dan pengawasan proses pengadaan
Sumber Data	Sekretariat Daerah
Frekuensi	Tahunan

6. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah

Nama Indikator	**Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan**
Definisi	Mengukur tingkat pelaksanaan pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif
Rumus	$\frac{\text{Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan}}{\text{Total belanja operasi dan modal}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi rasio nilai belanja melalui pengadaan menunjukkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran operasi dan modal. Sebaliknya, rasio rendah menunjukkan sebagian belanja belum melalui pengadaan formal, sehingga diperlukan peningkatan penerapan prosedur pengadaan dan pengawasan belanja
Sumber Data	Sekretariat Daerah
Frekuensi	Tahunan

7. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah

Nama Indikator	**Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah (%)**
Definisi	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah
Rumus	Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, UMK, dan koperasi tahun n -

	$\frac{\text{Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, UMK, dan koperasi tahun n-1}}{\text{Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, UMK, dan koperasi tahun n-1}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri, UMK, dan koperasi pada pengadaan barang/jasa menunjukkan dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan industri lokal dan pemberdayaan usaha kecil. Sebaliknya, persentase rendah menunjukkan perlunya strategi peningkatan penggunaan produk lokal melalui kebijakan pengadaan dan fasilitasi bagi UMK serta koperasi.
Sumber Data	Sekretariat Daerah
Frekuensi	Tahunan

ae. Sekretariat DPRD

1. Persentase Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N

Nama Indikator	**Persentase Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N**
Definisi	Mengukur persentase ketepatan waktu penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Tahun Anggaran N sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh Perda APBD}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase ketepatan penetapan Perda APBD menunjukkan disiplin perencanaan anggaran, kepatuhan terhadap peraturan, dan kelancaran proses pengelolaan keuangan daerah. Sebaliknya, persentase rendah menunjukkan keterlambatan penyusunan APBD, sehingga diperlukan perbaikan koordinasi, perencanaan lebih awal, dan kepatuhan terhadap jadwal regulasi.
Sumber Data	Sekretariat DPRD
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase Penetapan Ranperda Tahun N

Nama Indikator	**Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (%)**
Definisi	Mengukur persentase Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang berhasil ditetapkan menjadi Peraturan Daerah pada Tahun N. Jumlah Ranperda yang ditetapkan menjadi Perda pada Tahun N adalah jumlah Ranperda yang disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah yang dituangkan dalam dokumen persetujuan dan penetapan. Jumlah total Ranperda adalah keseluruhan Ranperda yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah dalam Propemperda Tahun N.

Rumus	$\frac{\text{Jumlah Ranperda yang ditetapkan menjadi Perda}}{\text{Jumlah total Ranperda yang diajukan pada Tahun N}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase Ranperda yang ditetapkan menjadi Perda menunjukkan efektivitas penyusunan dan pembahasan peraturan daerah, serta sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD. Sebaliknya, persentase rendah menunjukkan hambatan dalam proses legislasi, sehingga diperlukan peningkatan koordinasi, perencanaan, dan pemantauan penyusunan Ranperda
Sumber Data	Sekretariat DPRD
Frekuensi	Tahunan

af. Perencanaan

1. Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah

Nama Indikator	**Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah (%)**
Definisi	Persentase yang menunjukkan tingkat dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program Prioritas Nasional melalui keselarasan program dalam dokumen perencanaan daerah. Indikator ini menggambarkan kontribusi daerah dalam pencapaian target nasional sesuai arah kebijakan pembangunan nasional.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah Program Prioritas yang didukung Program Daerah}}{\text{Jumlah Program Prioritas Nasional}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai persentase yang tinggi menunjukkan semakin kuatnya integrasi dan sinkronisasi antara perencanaan daerah dan prioritas pembangunan nasional. Sebaliknya, nilai persentase yang rendah menandakan masih kurangnya penyelarasan antara program daerah dengan program prioritas nasional.
Sumber Data	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Frekuensi	Tahunan

ag. Keuangan

1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD

Nama Indikator	**Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD (%)**

Definisi	Persentase yang menggambarkan proporsi anggaran belanja pegawai (di luar tunjangan guru) yang dialokasikan melalui Tambahan Penghasilan Pegawai (TPK/TKD) dalam APBD. Indikator ini menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mengelola dan mengarahkan belanja pegawai melalui mekanisme TKD untuk mendukung peningkatan disiplin, kinerja, dan tata kelola aparatur.
Rumus	$\frac{\text{Anggaran Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD}}{\text{Anggaran Belanja dalam APBD}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin besar porsi belanja pegawai (non-tunjangan guru) yang dialokasikan melalui mekanisme TKD. Sebaliknya, persentase yang rendah menunjukkan bahwa alokasi TKD terhadap belanja pegawai masih terbatas, sehingga potensi insentif kinerja ASN belum optimal.
Sumber Data	Badan Pengelola Keuangan Daerah
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Nama Indikator	**Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)**
Definisi	Persentase yang menggambarkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah dalam satu tahun anggaran. Indikator ini menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi.
Rumus	$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin besar kontribusi PAD dalam struktur pendapatan daerah, yang berarti kemandirian fiskal daerah semakin baik. Persentase yang rendah menandakan bahwa pendapatan daerah masih sangat bergantung pada sumber-sumber pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat atau provinsi.
Sumber Data	Badan Pengelola Keuangan Daerah
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Nama Indikator	**Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)**
Definisi	Persentase yang menunjukkan tingkat realisasi anggaran

	belanja untuk urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta sosial) dibandingkan dengan total anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan tersebut dalam tahun berjalan.
Rumus	$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin optimalnya pelaksanaan anggaran untuk pelayanan dasar, yang mencerminkan efektivitas penyelenggaraan layanan publik yang wajib dipenuhi daerah. Persentase yang rendah mengindikasikan adanya kendala dalam pelaksanaan program, seperti keterlambatan kegiatan, efisiensi yang belum optimal, atau realisasi yang tidak sesuai rencana.
Sumber Data	Badan Pengelola Keuangan Daerah
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap

Nama Indikator	**Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap**
Definisi	Persentase yang menunjukkan besarnya peningkatan nilai aset tetap pemerintah daerah dari tahun sebelumnya, dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun berjalan. Indikator ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam menambah aset tetap sebagai bentuk investasi pemerintah untuk pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Rumus	$\frac{\text{Nilai Aset Tetap Tahun N dikurang Nilai Aset Tetap Tahun N} - 1}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$
Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan meningkatnya kinerja investasi pemerintah daerah dalam bentuk penambahan aset tetap, seperti infrastruktur, peralatan, bangunan, dan aset lainnya yang mendukung pelayanan publik. Persentase yang rendah mengindikasikan bahwa penambahan aset tetap relatif kecil dibandingkan kapasitas fiskal daerah, atau pemda lebih banyak mengalokasikan pendapatan untuk belanja non-investasi.
Sumber Data	Badan Pengelola Keuangan Daerah
Frekuensi	Tahunan

5. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Nama Indikator	**Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)**
Definisi	Persentase yang menunjukkan proporsi anggaran yang dialokasikan untuk belanja infrastruktur pelayanan public dibandingkan dengan total belanja APBD (tidak termasuk belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa). Indikator ini mencerminkan komitmen

	pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik berbasis infrastruktur.
Rumus	$\frac{\text{Alokasi Belanja Infrastruktur Tetap Pelayanan Publik}}{\text{Total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa}} \times 100\%$
Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah memberikan prioritas besar pada pengembangan infrastruktur pelayanan publik. Persentase yang rendah mengindikasikan bahwa porsi anggaran untuk infrastruktur pelayanan publik masih terbatas dibandingkan belanja lainnya.
Sumber Data	Badan Pengelola Keuangan Daerah
Frekuensi	Tahunan

6. Persentase Penurunan SILPA

Nama Indikator	**Persentase Penurunan SILPA (%)**
Definisi	Persentase yang menggambarkan tingkat penurunan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dari tahun sebelumnya. Indikator ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran sehingga mengurangi sisa dana yang tidak terserap.
Rumus	$\frac{\text{Nilai SILPA Tahun N dikurangi Nilai SILPA Tahun N - 1}}{\text{Nilai SILPA Tahun N – 1}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai persentase negatif menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menurunkan SILPA. Nilai persentase positif menunjukkan peningkatan SILPA dibanding tahun sebelumnya.
Sumber Data	Badan Pengelola Keuangan Daerah
Frekuensi	Tahunan

7. *Budget execution*: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD

Nama Indikator	***Budget execution*: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD**

Definisi	Persentase penyimpangan (deviasi) antara realisasi belanja dengan total belanja yang dianggarkan dalam APBD. Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat akurasi perencanaan anggaran serta efektivitas pelaksanaan belanja pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran.
Rumus	$\frac{\text{Total belanja dalam realisasi - 1}}{\text{Total belanja APBD}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin kecil deviasi realisasi belanja terhadap belanja total APBD menunjukkan kredibilitas anggaran yang tinggi, perencanaan belanja yang akurat, dan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Sebaliknya, deviasi besar menunjukkan rendahnya akurasi perencanaan atau pelaksanaan belanja.
Sumber Data	Badan Pengelola Keuangan Daerah
Frekuensi	Tahunan

8. *Revenue mobilization*: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD

Nama Indikator	**Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD (%)**
Definisi	Persentase penyimpangan (deviasi) antara realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan anggaran PAD yang ditetapkan dalam APBD. Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat akurasi perencanaan pendapatan serta efektivitas pemerintah daerah dalam memobilisasi sumber-sumber PAD selama tahun anggaran.
Rumus	$\frac{\text{Total PAD dalam realisasi - 1}}{\text{Total PAD pada APBD}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin kecil deviasi realisasi PAD terhadap anggaran menunjukkan kredibilitas perencanaan pendapatan daerah yang tinggi dan efektivitas mobilisasi PAD. Sebaliknya, deviasi besar menunjukkan rendahnya akurasi perencanaan atau hambatan dalam penerimaan PAD, sehingga diperlukan perbaikan perencanaan pendapatan dan peningkatan pengelolaan potensi PAD.
Sumber Data	Badan Pengelola Keuangan Daerah
Frekuensi	Tahunan

9. Assets Management

Nama Indikator	**Assets Management**

Konsep/ Definisi	Melihat manajemen aset seluruh perangkat daerah yang ada. Manajemen asset adalah menjawab pertanyaan pada rumus di atas dalam format Ya atau Tidak. Apabila seluruh pertanyaan dijawab Iya, Pemerintah Daerah mengisi angka 4 dalam SILPPD.
Rumus	1. Apakah ada daftar aset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)
Interpretasi	Semakin lengkap dan terkelola manajemen aset di seluruh perangkat daerah menunjukkan pengelolaan aset yang efektif, akuntabel, dan transparan. Sebaliknya, manajemen aset yang kurang lengkap atau tidak terstruktur menunjukkan perlunya perbaikan inventarisasi, dokumentasi, dan pelaporan aset
Sumber Data	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Frekuensi	Tahunan

10. Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya

Nama Indikator	**Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD (%)**
Definisi	Persentase yang menunjukkan besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dibandingkan dengan total belanja pada tahun anggaran sebelumnya. Indikator ini mencerminkan efektivitas perencanaan anggaran, pengelolaan kas, serta optimalisasi penyerapan belanja pemerintah daerah.
Rumus	$\frac{\text{Nilai realisasi SiLPA}}{\text{Total belanja anggaran tahun sebelumnya}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin kecil rasio anggaran sisa terhadap total belanja menunjukkan efektivitas pengelolaan kas dan optimalisasi penggunaan anggaran. Sebaliknya, rasio tinggi menunjukkan potensi perencanaan atau pelaksanaan belanja yang kurang tepat, sehingga diperlukan perbaikan perencanaan anggaran dan pengendalian realisasi belanja
Sumber Data	Badan Pengelola Keuangan Daerah
Frekuensi	Tahunan

11. Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan

Nama Indikator	**Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan (%)**
Definisi	Persentase yang menunjukkan proporsi belanja pegawai non-guru dan non-tenaga kesehatan dibandingkan dengan total APBD. Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat beban belanja aparatur yang tidak terkait dengan layanan dasar.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin kecil rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan menunjukkan beban belanja aparatur yang lebih terkendali dan ruang fiskal yang lebih luas untuk belanja produktif. Sebaliknya, rasio yang tinggi menandakan dominasi belanja pegawai non-guru dan non-tenaga kesehatan, yang mengurangi fleksibilitas fiskal dan menunjukkan perlunya pengendalian belanja aparatur serta peningkatan efisiensi anggaran.
Sumber Data	Badan Pengelola Keuangan Daerah
Frekuensi	Tahunan

12. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi *Transfer Expenditures*) (%)

Nama Indikator	**Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures) (%)**
Definisi	Mengukur efisiensi belanja langsung di luar transfer expenditures atau rasio belanja langsung dalam APBD di luar transfer expenditures.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures}}{\text{Jumlah belanja APBD}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin kecil rasio belanja urusan pemerintahan umum menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran karena belanja aparatur dan operasional lebih terkendali, sehingga ruang fiskal untuk belanja pembangunan meningkat. Sebaliknya, rasio yang tinggi menandakan dominasi belanja pemerintahan umum yang mengurangi alokasi untuk belanja prioritas pembangunan, sehingga diperlukan pengendalian belanja aparatur dan optimalisasi belanja yang lebih produktif.
Sumber Data	Badan Pengelola Keuangan Daerah
Frekuensi	Tahunan

ah. Kepegawaian

1. Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN

Nama Indikator	**Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN**
Definisi	Indikator ini mengukur tingkat penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen Aparatur Sipil Negara di pemerintah daerah. Penilaian dilakukan untuk melihat sejauh mana praktik manajemen ASN—termasuk perencanaan, pengadaan, pengembangan, penilaian kinerja, disiplin, dan layanan kepegawaian—telah sesuai dengan ketentuan nasional yang ditetapkan.
Rumus	Kategori penilaian: A = 80,01 – 100 B = 60,01-80 C = 40,01-60 D = 20,01-40 E = 0-20
Interpretasi	Nilai indeks yang tinggi (kategori A atau B) menunjukkan bahwa implementasi NSPK manajemen ASN telah berjalan baik dan sesuai standar nasional, mencerminkan tata kelola SDM aparatur yang profesional dan akuntabel. Sebaliknya, nilai indeks yang rendah (kategori C, D, atau E) menunjukkan masih adanya kelemahan dalam penerapan kebijakan manajemen ASN dan perlunya perbaikan pada aspek-aspek seperti perencanaan kebutuhan, pola karier, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, dan kepatuhan terhadap regulasi.
Sumber Data	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Frekuensi	Tahunan

2. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Nama Indikator	**Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)**
Definisi	Mengukur rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).
Rumus	$\frac{\text{Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (\%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Seluruh jumlah pegawai (tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi rasio pegawai berpendidikan tinggi menunjukkan kualitas SDM aparatur yang lebih baik dan mendukung peningkatan kinerja birokrasi. Sebaliknya, rasio rendah menunjukkan keterbatasan kompetensi pegawai sehingga perlu peningkatan kualifikasi dan pengembangan kapasitas aparatur.
Sumber Data	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

	Manusia
Frekuensi	Tahunan

3. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Nama Indikator	**Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)**
Definisi	Persentase yang menunjukkan proporsi pegawai negeri sipil (PNS) dalam jabatan fungsional di luar guru dan tenaga kesehatan—dibandingkan dengan total PNS (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan). Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana pemanfaatan pegawai sesuai keahlian dan kompetensi spesifik telah diterapkan di pemerintah daerah.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah pegawai PNS fungsional (di luar guru dan tenaga kesehatan}}{\text{Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi rasio pegawai fungsional (di luar guru dan tenaga kesehatan) menunjukkan semakin optimal pemanfaatan aparatur sesuai keahlian dan keterampilan tertentu untuk mendukung kinerja birokrasi. Sebaliknya, rasio rendah menunjukkan masih dominannya jabatan struktural atau non-fungsional sehingga perlu dorongan peningkatan penempatan pegawai dalam jabatan fungsional.
Sumber Data	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Frekuensi	Tahunan

4. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Nama Indikator	**Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)**
Definisi	Persentase pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional (di luar guru dan tenaga kesehatan) dan telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan standar profesi. Indikator ini menggambarkan tingkat profesionalisme, pemenuhan standar kompetensi, serta kesiapan aparatur dalam melaksanakan tugas berbasis keahlian tertentu.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (di luar guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi menunjukkan semakin baik kualitas dan profesionalisme aparatur dalam melaksanakan tugas berbasis keahlian. Sebaliknya, rasio yang rendah mengindikasikan masih terbatasnya kompetensi yang terstandar, sehingga diperlukan percepatan sertifikasi dan pengembangan kompetensi pegawai fungsional.

Sumber Data	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Frekuensi	Tahunan

ai. Pendidikan dan Pelatihan

1. Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya

Nama Indikator	**Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)**
Definisi	Persentase ini mengukur proporsi ASN di Kabupaten/Kota yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi selama tahun berjalan dibandingkan dengan total ASN di Kabupaten/Kota. Pelatihan peningkatan kompetensi yang dihitung meliputi semua jenis pelatihan yang diikuti ASN pada tahun berjalan baik pelatihan teknis maupun manajerial.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi selama tahun berjalan}}{\text{Total ASN di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase ASN yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi menunjukkan semakin baik upaya pengembangan kapasitas aparatur dalam mendukung kinerja pemerintahan. Sebaliknya, persentase yang rendah mengindikasikan masih terbatasnya kesempatan atau akses pelatihan bagi ASN, sehingga diperlukan strategi peningkatan kualitas dan kuantitas program pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.
Sumber Data	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Frekuensi	Tahunan

aj. Penelitian dan Pengembangan

1. Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi Pembangunan

Nama Indikator	**Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan (%)**
Definisi	Mengukur persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang berhasil diimplementasikan sebagai landasan pelaksanaan pembangunan dalam satu tahun berjalan. Rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dimaksud adalah hasil kajian, masukan, dan arahan strategis yang menjadi acuan dalam
Rumus	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi Pembangunan daerah}}{\text{Total rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang ada}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase rekomendasi kebijakan yang dijadikan landasan pembangunan menunjukkan semakin efektif perencanaan berbasis kajian. Sebaliknya, persentase rendah mengindikasikan lemahnya keterhubungan antara rekomendasi dan implementasi,

	sehingga perlu penguatan koordinasi dan integrasi hasil kajian dalam perencanaan daerah.
Sumber Data	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah

Nama Indikator	**Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah (%)**
Definisi	Mengukur persentase produk inovasi yang telah dikembangkan oleh pemerintah daerah dan berhasil dimanfaatkan dalam berbagai sektor pembangunan daerah selama satu tahun berjalan. Produk inovasi adalah hasil pengembangan baru yang berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan, efisiensi, dan daya saing daerah.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah produk inovasi yang dikembangkan}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase produk inovasi yang dimanfaatkan menunjukkan semakin berhasil pemerintah daerah mengembangkan inovasi yang relevan dan aplikatif bagi peningkatan layanan publik serta pembangunan daerah. Sebaliknya, persentase rendah menunjukkan masih terbatasnya implementasi hasil inovasi, sehingga diperlukan penguatan kualitas inovasi serta strategi pemanfaatannya di berbagai sektor pembangunan.
Sumber Data	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Frekuensi	Tahunan

ak. Inspektorat

1. Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)

Nama Indikator	**Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)**
Definisi	Indikator ini menunjukkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah berdasarkan opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Opini merupakan pernyataan profesional auditor atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
Rumus	1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion : laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Nama Indikator	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)
	2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion: laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. 3. Opini Tidak Wajar atau adversed opinion: laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 4. Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP): Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.
Interpretasi	Semakin tinggi frekuensi pencapaian opini WTP dalam 10 tahun terakhir, semakin menunjukkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Sebaliknya, semakin rendah frekuensi pencapaian WTP, hal ini mengindikasikan masih adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern, kepatuhan regulasi, maupun penyajian laporan keuangan.
Sumber Data	Inspektorat
Frekuensi	Tahunan

2. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Nama Indikator	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Definisi	Mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan pemerintah daerah berdasarkan hasil Penilaian Mandiri (PM), Penjaminan Kualitas (PK), dan Evaluasi BPKP.
Rumus	Tingkatan Maturitas SPIP sebagai berikut: - Melakukan Penilaian Mandiri (PM), nilai capaian 1; - Melakukan PM dan PK (Penjaminan Kualitas), nilai capaian 2; - Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai capaian 3; - Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai capaian 4; dan - Dievaluasi - dengan hasil level 3 ke atas capaian 5 Penentuan level berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah
Interpretasi	Semakin tinggi level maturitas SPIP menunjukkan semakin baik pelaksanaan pengendalian intern pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel. Sebaliknya, level yang rendah menunjukkan masih lemahnya penerapan pengendalian intern, sehingga diperlukan penguatan sistem, peningkatan kepatuhan, dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan serta penyelenggaraan pemerintahan.

Sumber Data	Inspektorat
Frekuensi	Tahunan

3. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Nama Indikator	**Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)**
Definisi	Indikator ini mengukur tingkat peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik.
Rumus	Tingkatan Kapabilitas APIP sebagai berikut: - Melakukan Penilaian Mandiri (PM) nilai capaian 2; - Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai capaian 3; - Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai capaian 4; dan - Dievaluasi - dengan hasil level 3 ke atas, nilai capaian 5 Penetuan level berdasarkan Laporan Hasil Evaluas BPKP atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Pemerintah Daerah
Interpretasi	Semakin tinggi kapabilitas APIP menunjukkan semakin baik kemampuan pengawasan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Sebaliknya, kapabilitas rendah mencerminkan keterbatasan peran APIP sehingga perlu penguatan kapasitas dan kualitas pengawasan.
Sumber Data	Inspektorat Daerah
Frekuensi	Tahunan

4. Manajemen Risiko Indeks

Nama Indikator	**Manajemen Risiko Indeks**
Definisi	Indeks Manajemen Risiko (MRI) adalah ukuran tingkat kapabilitas pemerintah daerah dalam menerapkan manajemen risiko sebagai bagian dari penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). MRI menggambarkan sejauh mana perangkat daerah telah melakukan identifikasi, analisis, evaluasi, serta respons terhadap risiko secara sistematis dan terdokumentasi sesuai pedoman BPKP.
Rumus	Penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah sebagai berikut: - Melakukan Penilaian Mandiri (PM) MR, nilai capaian 1; - Melakukan PM dan PK (Penjaminan Kualitas), nilai capaian 2; - Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai capaian 3; - Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai capaian 4; dan - Dievaluasi - dengan hasil level 3 ke atas capaian 5. Penentuan level berdasarkan Laporan Hasil Evaluas BPKP atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah yang didalamnya terdapat capaian MRI.
Interpretasi	Nilai MRI yang lebih tinggi menunjukkan semakin

	baiknya tingkat kapabilitas pemerintah daerah dalam mengimplementasikan manajemen risiko secara terstruktur dan berkelanjutan. Sebaliknya, nilai yang rendah mengindikasikan perlunya penguatan proses identifikasi risiko, dokumentasi, serta perbaikan tata kelola pengendalian intern.
Sumber Data	Inspektorat Daerah
Frekuensi	Tahunan

5. Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1

Nama Indikator	**Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1**
Definisi	Indikator ini mengukur persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Tahun Anggaran N-1 yang telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran N. Tindak lanjut mencakup penyelesaian rekomendasi sesuai ketentuan yang dinyatakan selesai oleh BPK, baik melalui perbaikan administrasi, penyetoran ke kas daerah/negara, maupun tindakan lain sesuai rekomendasi pemeriksaan.
Rumus	$\frac{\text{Tindaklanjut Rekomendasi BPK tahun anggaran ke-N}}{\text{Rekomendasi BPK Tahun Anggaran Tahun N-1}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase tindak lanjut menunjukkan semakin baik komitmen dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Hal ini mencerminkan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, perbaikan tata kelola, serta penguatan pengendalian intern. Persentase rendah dapat mengindikasikan adanya hambatan pada proses perbaikan, koordinasi, atau pengawasan internal.
Sumber Data	Inspektorat Daerah
Frekuensi	Tahunan

al. Kewilayahan

1. Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan

Nama Indikator	**Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan**
Definisi	Indikator ini mengukur tingkat kemandirian Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah dan Pembangunan (PEKPPP) pada tingkat kecamatan dengan mempertimbangkan pelaksanaan program, kualitas laporan, serta inisiatif dan inovasi yang dihasilkan. Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan mencakup evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan program pembangunan, kinerja aparatur, serta partisipasi masyarakat di tingkat kecamatan sebagai cerminan kemandirian dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Rumus	$\frac{\text{Skor total capaian PEKPPP mandiri kecamatan}}{\text{Skor maksimal PEKPPP}} \times 100\%$

Interpretasi	Semakin tinggi nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan menunjukkan semakin baik kemandirian kecamatan dalam melaksanakan program pembangunan, pengelolaan pemerintahan, serta mendorong partisipasi masyarakat dan inovasi. Nilai rendah mencerminkan perlunya peningkatan kapasitas, kualitas laporan, dan dukungan teknis.
Sumber Data	Kecamatan
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik

Nama Indikator	**Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik (%)**
Definisi	Persentase sarana dan prasarana di kecamatan yang memenuhi standar kualitas dan kondisi operasional baik untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana kecamatan dalam kondisi baik}}{\text{Total sarana dan prasarana kecamatan}} \times 100\%$
Interpretasi	Indikator ini mengukur ketersediaan dan kualitas sarana serta prasarana di tingkat kecamatan yang berfungsi optimal sesuai standar teknis dan pemeliharaan, termasuk gedung kantor, alat transportasi, fasilitas komunikasi, dan perlengkapan lainnya.
Sumber Data	Kecamatan
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase Partai Politik yang Aktif di Kecamatan

Nama Indikator	**Persentase Partai Politik yang Aktif di Kecamatan**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi partai politik yang aktif melaksanakan kegiatan atau memiliki struktur kepengurusan di tingkat kecamatan dibandingkan dengan total partai politik yang terdaftar. Partai politik aktif adalah partai yang memiliki kepengurusan tingkat kecamatan dan/atau secara rutin menyelenggarakan kegiatan organisasi di tingkat kecamatan, berdasarkan verifikasi dari instansi terkait. Jumlah total partai politik adalah seluruh partai yang memiliki SK terdaftar dari KPU.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah partai politik yang aktif di kecamatan}}{\text{Jumlah total partai politik yang terdaftar}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak partai politik yang aktif menjalankan fungsi organisasi di tingkat kecamatan, sehingga mencerminkan dinamika politik lokal yang sehat dan partisipatif. Persentase rendah menunjukkan lemahnya keberadaan atau aktivitas partai di tingkat kecamatan sehingga perlu penguatan fasilitasi dan pembinaan.
Sumber Data	Kecamatan

Frekuensi	Tahunan

4. Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan

Nama Indikator	**Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang aktif melaksanakan kegiatan atau memiliki struktur kepengurusan di tingkat kecamatan dibandingkan dengan total ormas yang terdaftar. Ormas aktif adalah organisasi yang memiliki kepengurusan di tingkat kecamatan dan/atau secara rutin menyelenggarakan kegiatan sesuai AD/ART organisasi. Keaktifan dibuktikan melalui laporan kegiatan, keberadaan pengurus, dan/atau verifikasi dari instansi terkait. Jumlah total ormas adalah organisasi yang memiliki SK terdaftar dari instansi berwenang.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah ormas yang aktif di kecamatan}}{\text{Jumlah total ormas yang terdaftar}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak ormas yang berfungsi aktif dalam kegiatan sosial dan pembangunan di tingkat kecamatan. Sebaliknya, persentase rendah mencerminkan rendahnya partisipasi dan kapasitas ormas, sehingga memerlukan fasilitasi dan pembinaan lebih lanjut.
Sumber Data	Kecamatan
Frekuensi	Tahunan

5. Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan (%)

Nama Indikator	**Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur persentase jumlah permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang berhasil diselesaikan oleh pihak berwenang di tingkat kecamatan dibandingkan dengan total permasalahan yang dilaporkan. Permasalahan keamanan dan ketertiban yang terselesaikan adalah kasus atau gangguan kamtibmas (seperti konflik sosial, gangguan ketertiban umum, kriminal ringan) yang telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai melalui mediasi, penegakan hukum, atau penyelesaian berbasis masyarakat. Data dihitung berdasarkan laporan masuk dan tindak lanjut yang dicatat oleh aparat kecamatan atau kepolisian setempat.

Rumus	$\frac{\text{Jumlah permasalahan keamanan dan ketertiban yang terselesaikan}}{\text{Jumlah total permasalahan yang dilaporkan}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan efektivitas aparat kecamatan dan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Persentase rendah menandakan masih banyak kasus kamtibmas yang belum terselesaikan, sehingga perlu peningkatan koordinasi, kapasitas penanganan, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban.
Sumber Data	Kecamatan
Frekuensi	Tahunan

6. Persentase Desa Mandiri di Kecamatan

Nama Indikator	**Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi desa yang berstatus mandiri di suatu kecamatan dibandingkan dengan total jumlah desa di kecamatan tersebut. Desa Mandiri adalah desa dengan status perkembangan tertinggi menurut Indeks Desa Membangun (IDM), yang mencerminkan kemandirian dalam aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Status ini ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui penilaian tahunan berbasis data IDM.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah desa mandiri di kecamatan}}{\text{Jumlah total desa di kecamatan}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan meningkatnya kemandirian desa dalam aspek sosial, ekonomi, dan ekologi, sedangkan persentase rendah mencerminkan masih perlunya intervensi pembangunan dan penguatan kapasitas desa.
Sumber Data	Kecamatan
Frekuensi	Tahunan

7. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif

Nama Indikator	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi lembaga kemasyarakatan yang aktif menjalankan fungsi dan kegiatannya di tingkat desa/kelurahan dibandingkan dengan jumlah total lembaga kemasyarakatan yang ada. Lembaga kemasyarakatan yang aktif adalah organisasi lokal seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna, LPM, dan sejenisnya yang melaksanakan kegiatan secara rutin, memiliki kepengurusan aktif, serta terdokumentasi dalam laporan kegiatan desa/kelurahan.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif}}{\text{Jumlah total lembaga kemasyarakatan yang ada}} \times 100\%$

Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan partisipasi masyarakat yang lebih baik melalui kelembagaan desa/kelurahan yang aktif, sedangkan persentase rendah mengindikasikan perlunya penguatan peran, kapasitas, dan pembinaan lembaga kemasyarakatan.
Sumber Data	Kecamatan
Frekuensi	Tahunan

8. Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha

Nama Indikator	**Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha (%)**
Definisi	Mengukur persentase Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang mendapatkan fasilitasi dalam bentuk pelatihan, pendampingan, atau bantuan teknis untuk pengembangan usaha dibandingkan dengan total UKM yang terdaftar di wilayah tertentu. UKM yang difasilitasi adalah UKM yang telah mengikuti program pelatihan, pendampingan usaha, atau menerima bantuan teknis dari pemerintah daerah, dinas terkait, atau lembaga pendukung lainnya dalam periode pelaporan.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah UKM yang difasilitasi dalam pengembangan usaha}}{\text{Jumlah total UKM yang terdaftar}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak UKM yang memperoleh dukungan pengembangan usaha, sedangkan persentase rendah menandakan perlunya peningkatan fasilitasi, pendampingan, dan pembinaan UKM.
Sumber Data	Kecamatan
Frekuensi	Tahunan

am.Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah Yang dilaksanakan

Nama Indikator	**Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah Yang dilaksanakan (%)**

Definisi	Indikator ini mengukur tingkat pelaksanaan kebijakan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah pada bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya; pencegahan penyalahgunaan narkotika; serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan. Kebijakan yang dimaksud dapat berupa program, kegiatan, maupun bentuk fasilitasi lainnya yang menjadi tugas dan fungsi kecamatan serta perangkat daerah terkait.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah kebijakan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah total kebijakan yang direncanakan}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, pencegahan narkotika, dan kerukunan umat beragama yang berhasil dilaksanakan, sedangkan persentase rendah mencerminkan masih terbatasnya implementasi kebijakan yang telah direncanakan.
Sumber Data	Kecamatan
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase Potensi Konflik Sosial yang Diselesaikan

Nama Indikator	**Persentase Potensi Konflik Sosial yang Diselesaikan (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur persentase potensi konflik sosial yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian damai di tingkat kecamatan dibandingkan dengan total potensi konflik sosial yang teridentifikasi. Potensi konflik sosial yang diselesaikan adalah kasus-kasus konflik sosial yang telah ditangani dan diselesaikan melalui mediasi, musyawarah, atau intervensi lembaga terkait sehingga tidak berkembang menjadi konflik terbuka.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah potensi konflik sosial yang diselesaikan}}{\text{Jumlah total potensi konflik sosial yang teridentifikasi}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin efektif upaya penyelesaian potensi konflik sosial di tingkat kecamatan, sedangkan persentase rendah mencerminkan masih adanya potensi konflik yang belum tertangani secara optimal.
Sumber Data	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Frekuensi	Tahunan

3. Cakupan penguatan Ideologi Pancasila dan Karaketr Kebangsaan

Nama Indikator	**Cakupan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang bertujuan memperkuat pemahaman Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan di wilayah kecamatan atau kabupaten. Program dan kegiatan penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan mencakup penyuluhan, pelatihan, sosialisasi, dan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh perangkat

	daerah, sekolah, atau lembaga masyarakat.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah program/kegiatan penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang terlaksana}}{\text{Jumlah program/kegiatan yang direncanakan}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin efektif pelaksanaan program penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan di daerah, sedangkan persentase rendah mencerminkan masih terbatasnya kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana.
Sumber Data	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase pendidikan politik pada kader partai politik

Nama Indikator	**Persentase pendidikan politik pada kader partai politik (%)**
Definisi	Indikator ini mengukur persentase kader partai politik yang telah mengikuti pendidikan politik dalam periode tertentu dibandingkan dengan total kader partai politik yang terdaftar di wilayah kecamatan atau kabupaten. Pendidikan politik adalah kegiatan pelatihan, seminar, atau workshop yang diselenggarakan oleh partai politik atau lembaga terkait untuk meningkatkan pemahaman kader terhadap proses politik, ideologi partai, dan tata kelola pemerintahan.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah kader partai politik yang mengikuti pendidikan politik}}{\text{Jumlah total kader partai politik yang terdaftar}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin efektif upaya partai politik dalam meningkatkan kapasitas kader melalui pendidikan politik, sedangkan persentase rendah mencerminkan masih terbatasnya partisipasi kader dalam kegiatan pendidikan politik yang diselenggarakan.
Sumber Data	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Frekuensi	Tahunan

5. Persentase organisasi kemasyarakatan yang terdaftar dan aktif

Nama Indikator	**Persentase organisasi kemasyarakatan yang terdaftar dan aktif (%)**

Definisi	Mengukur persentase organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terdaftar secara resmi dan aktif menjalankan kegiatan di wilayah kecamatan atau kabupaten dibandingkan dengan total organisasi kemasyarakatan yang terdaftar. Organisasi kemasyarakatan yang terdaftar dan aktif adalah ormas yang memiliki Surat Keputusan (SK) resmi dari instansi terkait dan secara rutin melaksanakan kegiatan sesuai AD/ART serta melaporkan kegiatannya.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah ormas yang terdaftar dan aktif}}{\text{Jumlah total ormas yang terdaftar}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin baik keberadaan dan peran organisasi kemasyarakatan dalam mendukung kehidupan sosial di daerah, sedangkan persentase rendah mencerminkan masih terbatasnya ormas yang benar-benar aktif meskipun telah terdaftar secara resmi.
Sumber Data	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Frekuensi	Tahunan

an. Transparansi dan Partisipasi Publik

1. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (*Information on resources available to frontline service delivery units*)

Nama Indikator	**Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)**
Definisi	Melihat ketersediaan informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan.
Rumus	$\frac{\text{Realisasi belanja anggaran untuk unit pelayanan yang dapat diakses di website pemda}}{\text{Anggaran belanja untuk unit pelayanan yang dapat diakses di website pemda}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin baik keterbukaan informasi terkait realisasi dan alokasi anggaran unit pelayanan, sedangkan persentase rendah mencerminkan masih terbatasnya transparansi informasi anggaran yang dapat diakses publik.
Sumber Data	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Frekuensi	Tahunan

2. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (*Public access to fiscal information*)

Nama Indikator	**Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)**
Definisi	Indikator ini untuk melihat ketersediaan informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan.
Rumus	$\frac{\text{Jumlah dokumen yang dipublikasi di website}}{\text{Total jumlah dokumen yang telah dirinci}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin baik transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sedangkan persentase rendah mencerminkan masih terbatasnya keterbukaan informasi publik.
Sumber Data	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Frekuensi	Tahunan

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025-2029

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda	**: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman**
Tahun Penilaian	**: 2025**
Periode yang dinilai	**: Periode RPJMD Tahun 2025 - 2029**
Sumber Data	: RPJMD Kabupaten Padang Pariaman
Visi	: Membangun Padang Pariaman Maju dan Sejahtera
Misi Strategis RPJMD	1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas 2. Menciptakan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing 3. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju, dan Merata 4. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas
Tujuan Strategis RPJMD	Tujuan 1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas Tujuan 2 Terciptanya Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berdaya Saing dan Inklusif Tujuan 3 Meningkatnya Perekonomian Daerah yang maju dan inklusif Tujuan 4 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan, berketahanan terhadap bencana dan Perubahan Iklim Tujuan 5 Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tentram dan harmonis dalam keberagaman agama
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	Tujuan 1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas
Sasaran RPJMD	1. 1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas 1. 2 Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah 1. 3 Meningkatnya Transformasi Digital Pelayanan Publik
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	1. 1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas 1. 2 Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah 1. 3 Meningkatnya Transformasi Digital Pelayanan Publik
IKU Sasaran RPJMD	1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah 3. Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK 4. Indeks Inovasi Daerah 5. Indeks SPBE 6. Indeks Pemerintahan Digital Indonesia (PEMDI)
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah 3. Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK 4. Indeks Inovasi Daerah 5. Indeks SPBE 6. Indeks Pemerintahan Digital Indonesia (PEMDI)
Prioritas pembangunan dan program unggulan	I. SEKRETARIAT DAERAH 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 3. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN II. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 1. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 2. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA III. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH IV. BAPELITBANGDA 1. PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 2. PROGRAM KOORDINASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 4 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH V. SELURUH PERANGKAT DAERAH 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

	VI. INSPEKTORAT DAERAH 1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 2. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
	VII. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 2. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
Urusan Pemerintahan Daerah	1. URUSAN SEKRETARIAT DAERAH 2 URUSAN PENUNJANG 3 URUSAN KEPEGAWAIAN 4 URUSAN KEUANGAN 5 URUSAN PENDAPATAN 6 URUSAN PERENCANAAN 7 URUSAN PENGAWASAN 8 URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 9 URUSAN KOMINFO
Nama Dinas Terkait	1. Sekretariat Daerah 3. Seluruh Perangkat Daerah 5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 6. Badan Pengelola Keuangan Daerah 7. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah 8 INSPEKTORAT DAERAH 9 Dinas Komunikasi dan Informatika
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	SEKRETARIAT DAERAH Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas Sasaran 1.1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas IKU : Indeks Reformasi Birokrasi Program : 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 3. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas Sasaran 1.1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas IKU : 1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah 3. Nilai Monitoring Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK Program : 1. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 2. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas Sasaran 1.1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas IKU : 1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah 3. Nilai Monitoring Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK Program : 1. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas Sasaran 1.1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas IKU : 1. Reformasi Birokrasi Program 1. PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 2. PROGRAM KOORDINASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas Sasaran 1.2 : Terwujudnya kualitas pembangunan yang adaptif dan inovatif IKU : 1. Indeks Inovasi Daerah Program 1. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 2. PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH

	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas Sasaran 1.3 : Terwujudnya transformasi digital layanan publik yang handal IKU : 1. Indeks SPBE 2. Indeks Pemerintahan Digital Indonesia (PEMDI) Program : 1. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 2. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
	DINAS INSPEKTORAT Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas Sasaran 1.1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas IKU : 1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah 3. Nilai Monitoring Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK Program : 1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 2. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

KEPALA BAPELITBANGDA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemda : **Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman**
Nama OPD : **OPD Pengampu Misi 1**
Tahun Penilaian : **2025**
Periode yang dinilai : **2025-2029**
Urusan Pemerintahan : **Urusan Penunjang, Urusan Pemerintahan**

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	**Tujuan 1** **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas**	**Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah Masih Rendah	RSP - 001	Bupati	Masih rendahnya konsistensi perencanaan dan penganggaran	Internal	C	Rendahnya Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kepala Daerah PD Pengampu SPM
2	**1.1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	Rendahnya nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	RSP - 002	Bupati	1. Belum Terbangunnya Budaya Kinerja dan Integritas secara Menyeluruh. 2. Rendahnya Kualitas Manajemen Kinerja 3. Belum Maksimalnya Tata Kelola Sumber Daya Manusia (SDM) ASN	Internal	C	Penurunan Nilai Indesk RD	Kepala Daerah Sleuruh PD
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaetn/Kota	1. Indeks Kematangan Organisasi	1. Rendahnya Tata Kelola Organisasi Berbasis Kinerja 2. Belum Tertanamnya Prinsip Tata Kelola yang Adaptif dan Kolaboratif	RSP - 003	Bupati	Kurangnya pemahaman dan penerapan manajemen risiko, pengendalian intern, dan pengelolaan kinerja	Internal	C	Kinerja organisasi stagnan dan Kurangnya kepercayaan stakeholder terhadap kapabilitas institusi	Seluruh OPD dan pejabat struktural terkait perencanaan dan pengendalian
4		Persentase Pemenuhan Operasional Pimpinan Sesuai Aturan	Tidak tercapainya pemenuhan kebutuhan operasional pimpinan sesuai ketentuan	RSP - 004	Sekretariat Daerah	Ketidaktepatan perencanaan anggaran kebutuhan pimpinan dan keterlambatan proses administrasi	Internal	C	Menurunnya efisiensi kinerja pimpinan dan adanya Potensi temuan pemeriksaan atas penggunaan anggaran	Bagian Umum, Bagian Keuangan, dan OPD pengguna anggaran pimpinan
5		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Sekretariat Daerah	Rendahnya nilai SKM terhadap layanan Sekretariat Daerah	RSP - 005	Sekretariat Daerah	Layanan belum sepenuhnya berbasis digital atau responsif	Internal	C	Masyarakat tidak puas dengan pelayanan pemerintah	Seluruh OPD penyedia layanan publik
6		Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	Rekomendasi SAKIP tidak ditindaklanjuti tepat waktu	RSP - 006	Bapelitbangda / Inspektorat	Kurangnya komitmen OPD untuk menindaklanjuti dan minimnya kapasitas perencana dalam memahami rekomendasi teknis	Internal	C	Penurunan nilai SAKIP Pemerintah Daerah	OPD perencana (Bapelitbangda), seluruh OPD pelaksana program
7		Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan Pimpinan Sesuai Aturan	Pelayanan keuangan pimpinan tidak sesuai aturan	RSP - 007	Sekretariat DPRD / Bagian Umum	Lemahnya pengawasan internal	Internal	C	Poetensi temuan pemeriksaan BPK	Inspektorat, pimpinan OPD, dan pejabat pengelola kegiatan
8		Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti	Temuan BPK tidak ditindaklanjuti secara menyeluruh atau tepat waktu	RSP - 008	Inspektorat	Kurangnya koordinasi dan pengawasan terhadap tindak lanjut temuan BPK	Internal	C	Menurunnya Kepercayaan Publik terhadap akuntabilitas keuangan	Inspektorat, BPKD, dan seluruh OPD yang menjadi objek pemeriksaan BPK
9		Persentase Fasilitasi Keprotokolan kegiatan Daerah yang sesuai aturan	Fasilitasi keprotokolan tidak sesuai standar atau prosedur	RSP - 009	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kurangnya tenaga keprotokolan yang bersertifikasi	Internal	C	Acara resmi daerah tidak tertata dengan baik	Bagian Protokol, Subbagian Umum, dan pejabat protokoler OPD
10		Persentase Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan yang dilaksanakan sesuai strategi Komunikasi	Fasilitasi komunikasi pimpinan tidak efektif dan tidak sesuai dengan strategi komunikasi daerah	RSP - 010	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Tidak adanya pedoman komunikasi	Internal	C	Pesan kebijakan tidak tersampaikan dengan baik ke publik	Dinas Kominfo, seluruh OPD, dan pejabat pengelola informasi
11	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang efektif dilaksanakan	Keterlambatan implementasi kebijakan	RSP - 011	Bagian Kesra	Keterbatasan SDM dan koordinasi antar instansi	Internal	C	Capaian program tidak tercapai	Masyarakat, Pemerintah Daerah
12		Persentase produk hukum yang dihasilkan	Kualitas produk hukum tidak sesuai standar	RSP - 012	Bagian Hukum	Kurangnya kajian mendalam dan review tentang produk hukum yang dihasilkan	Internal	C	Produk hukum tidak efektof	Pemerintah Daerah
13		Persentase Kerjasama Wajib yang dilaksanakan	Kerjasama tidak berjalan optimal	RSP - 013	Bagian TPKS	Perbedaan kepentingan dan komitmen	Eksternal	UC	Target Kerjasama tidka tercapai	Stakeholder
14		Persentase Administrasi Tata pemerintahan Yang Dilaksanakan	Keterlambatan proses administrasi	RSP - 014	Bagian TPKS	Banyaknya beban kerja	Eksternal	C	Pelayanan publik tidak maksimal	Masyarakat
15	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	Perencanaan kebutuhan ASN tidak sesuai dengan formasi yang dibutuhkan	RSP-044	BKPSDM	Kurangnya analisis jabatan dan beban kerja yang akurat	Internal	C	Distribusi ASN tidak merata dan tidak efisien	Pemerintah Daerah
16		Persentase ketersediaan data dan informasi ASN	Data dan informasi ASN tidak tersedia secara lengkap atau mutakhir	RSP-045	BKPSDM	Sistem informasi kepegawaian tidak terintegrasi atau kurang diperbarui	Internal	UC	Pengambilan keputusan kepegawaian menjadi tidak tepat	OPD dan Pemerintah Daerah
17		Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai kompetensinya	Pengembangan karir ASN tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki	RSP-046	BKPSDM	Tidak ada pemetaan kompetensi dan pelatihan yang tepat sasaran	Internal	C	ASN tidak termotivasi dan kinerja menurun	ASN dan Instansi Pemerintah
18		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	Proporsi pegawai fungsional tidak seimbang	RSP-047	BKPSDM	Terbatasnya alih jabatan atau peningkatan kompetensi ke jabatan fungsional	Internal	UC	Kelebihan beban kerja pada jabatan struktural dan pelayanan publik terganggu	Pemerintah dan Masyarakat
19	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Rendahnya persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	RSP-048	BKPSDM	Anggaran pelatihan terbatas dan perencanaan pelatihan tidak tepat	Internal	C	Kapasitas ASN stagnan dan pelayanan publik menurun	ASN dan Masyarakat
20		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi masih rendah	RSP-049	BKPSDM	Terbatasnya akses atau fasilitas uji kompetensi jabatan fungsional	Internal	UC	Mutu pelaksanaan tugas fungsional tidak optimal	Instansi Pemerintah dan Masyarakat
21		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Ketimpangan tingkat pendidikan ASN (lebih dominan menengah/dasar)	RSP-050	BKPSDM	Rekrutmen masa lalu tidak mempertimbangkan latar pendidikan tinggi	Internal	C	Lambatnya inovasi dan adaptasi terhadap teknologi	Organisasi Pemerintah Daerah

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
22	Program Pegelolaan Keuangan Daerah	Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	Tingginya proporsi belanja pegawai di luar tunjangan guru dari TKD	RSP-051	BPKD	Struktur anggaran belum efisien dan rasionalisasi belum optimal	Internal	C	Ruang fiskal untuk belanja pembangunan terbatas	Pemerintah Daerah
23		Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Rendahnya alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	RSP-052	BPKD	Prioritas anggaran belum difokuskan pada layanan dasar publik	Internal	UC	Kualitas layanan publik stagnan atau menurun	Masyarakat
24		Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Tingginya rasio belanja pegawai (di luar guru dan nakes)	RSP-053	BPKD	Jumlah ASN struktural tinggi, belum optimalnya evaluasi beban kerja	Internal	C	Ketidakseimbangan alokasi belanja daerah	Organisasi Pemerintah Daerah
25		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Rendahnya akses publik terhadap informasi keuangan daerah	RSP-054	BPKD	Transparansi dan publikasi data keuangan belum maksimal	Internal	UC	Tingkat kepercayaan publik terhadap pemda menurun	Masyarakat
26		Persentase realisasi anggaran Belanja Wajib Pelayanan Dasar	Rendahnya realisasi belanja wajib pelayanan dasar	RSP-055	BPKD	Pelaksanaan program tidak tepat waktu atau hambatan regulasi	Internal	C	Layanan dasar masyarakat terganggu	Masyarakat
27		Persentase penurunan SILPA	Tingginya nilai SILPA dari tahun ke tahun	RSP-056	BPKD	Perencanaan anggaran kurang akurat dan realisasi lambat	Internal	C	Efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran rendah	Pemerintah Daerah
28		Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	Rasio anggaran sisa (cash management) tinggi	RSP-057	BPKD	Tidak optimalnya monitoring dan pengelolaan kas daerah	Internal	UC	Idle cash tinggi, potensi kehilangan manfaat fiskal	Pemerintah Daerah
29		Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	Keterlambatan penyampaian laporan keuangan	RSP-058	BPKD	Terlambatnya rekap data dari OPD dan keterbatasan SDM akuntansi	Internal	C	Hambatan dalam audit dan evaluasi kinerja keuangan	Inspektorat dan BPK
30		Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Tingginya deviasi realisasi belanja terhadap APBD	RSP-059	BPKD	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal atau terkendala pengadaan	Internal	C	Target pembangunan tidak tercapai tepat waktu	OPD dan Masyarakat
31		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	Tingginya rasio belanja urusan pemerintahan umum	RSP-060	BPKD	Komponen belanja operasional masih mendominasi	Internal	C	Fungsi pelayanan publik tidak mendapat alokasi optimal	Masyarakat
32		Opini Laporan Keuangan	Turunnya opini laporan keuangan dari BPK	RSP-061	BPKD	Adanya temuan material dan pengendalian internal yang lemah	Internal	UC	Citra dan akuntabilitas pemerintah daerah menurun	Pemda dan Publik
33		Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Kurangnya informasi ketersediaan sumber daya pelayanan	RSP-062	BPKD	Sistem informasi aset dan anggaran belum terintegrasi	Internal	C	Perencanaan dan pelayanan publik tidak berbasis data	OPD dan Masyarakat
34	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD	Realisasi PAD yang rendah dibanding target	RSP-065	BPKD	Optimalisasi potensi pendapatan belum maksimal	Internal	C	Ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat	Pemerintah Daerah
35		Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD yang tinggi	RSP-066	BPKD	Perencanaan pendapatan belum akurat	Internal	C	Menurunnya kepercayaan publik terhadap kinerja fiskal	Pemda, DPRD
36		Cakupan pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan belum merata	RSP-067	BPKD	Terbatasnya SDM pengawas di tingkat kecamatan	Internal	UC	Tidak optimalnya pemungutan pajak daerah	Masyarakat, Pemda
37		Persentase penerapan sistem infromasi keuangan berbasis digital	Rendahnya adopsi sistem informasi keuangan berbasis digital	RSP-068	BPKD	Sarana dan prasarana TIK belum memadai	Internal	UC	Keterlambatan pelaporan dan kesalahan data keuangan	BPKD, Inspektorat
38	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	RPJMD tidak selaras dengan RKPD	RSP-069	Bapelitbangda	Koordinasi antar perangkat daerah kurang optimal	Internal	C	Pelaksanaan program tidak sinkron dengan arah pembangunan	Pemerintah Daerah
39		Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah	RPJMD tidak selaras dengan Renstra Perangkat Daerah	RSP-070	Bapelitbangda	Penyusunan renstra oleh OPD tidak mengacu penuh pada RPJMD	Internal	C	Terhambatnya pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah	Pemerintah Daerah
40	Program Koordinasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Sosial Budaya	RKPD tidak selaras dengan Renja OPD bidang Sosial Budaya	RSP-071	Bapelitbangda	Lemahnya koordinasi antar OPD dalam proses perencanaan	Internal	C	Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia menjadi tidak efektif	Pemerintah Daerah
41		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	RKPD tidak selaras dengan Renja OPD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	RSP-072	Bapelitbangda	Tidak adanya integrasi sistem perencanaan lintas sektor	Internal	C	Ketidakefisienan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan	Pemerintah Daerah
42		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA	RKPD tidak selaras dengan Renja OPD bidang Perekonomian dan SDA	RSP-073	Bapelitbangda	Data sektoral yang digunakan dalam perencanaan tidak mutakhir	Internal	C	Rencana pembangunan ekonomi dan pengelolaan SDA menjadi tidak optimal	Pemerintah Daerah
43	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	Rekomendasi LHE SAKIP tidak sepenuhnya ditindaklanjuti	RSP-074	Inspektorat dan Bagian Organisasi	Kurangnya komitmen dan pemantauan dari pimpinan perangkat daerah	Internal	C	Peningkatan kinerja organisasi terhambat dan nilai SAKIP stagnan	Pemerintah Daerah
44		Survey Kepuasan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat rendah terhadap pelayanan publik	RSP-075	Bagian Organisasi & OPD Pelayanan	Kurangnya inovasi layanan dan respon terhadap keluhan masyarakat	Internal	C	Penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah	Masyarakat
45		Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	Temuan BPK tidak ditindaklanjuti tepat waktu dan tuntas	RSP-076	Inspektorat dan OPD terkait	Kurangnya pengawasan dan tindak lanjut sistematis terhadap rekomendasi audit	Internal	C	Potensi sanksi dan rusaknya reputasi pengelolaan keuangan daerah	Pemerintah Daerah

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
46	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Ketuntasan Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 tidak tuntas	RSP-077	Inspektorat	Kurangnya pengawasan dan monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi audit eksternal	Internal	C	Potensi penilaian negatif dari BPK dan rusaknya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Pemerintah Daerah
47		Persentase Ketuntasan Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Internal	Tindak lanjut hasil pemeriksaan internal tidak ditindaklanjuti tepat waktu	RSP-078	Inspektorat	Tidak ada sistem pelaporan dan evaluasi yang rutin	Internal	C	Pemborosan anggaran dan lemahnya perbaikan tata kelola internal	Pemerintah Daerah
48		Persentase Ketuntasan Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Internal Eksternal	Tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal tidak optimal	RSP-079	Inspektorat dan OPD terkait	Kurangnya koordinasi antar OPD dalam menindaklanjuti temuan eksternal	Internal	C	Penurunan kredibilitas pengawasan eksternal dan potensi sanksi administratif	Pemerintah Daerah
49		Persentase pengawasan di Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Pengawasan bidang infrastruktur dan lingkungan hidup tidak sesuai PKPT	RSP-080	Inspektorat dan Dinas terkait	Terbatasnya SDM auditor dan belum optimalnya pelaksanaan PKPT	Internal	C	Proyek infrastruktur rawan penyimpangan dan merugikan publik	Masyarakat
50		Persentase pengawasan di Bidang perekonomian sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Pengawasan di bidang perekonomian tidak sesuai PKPT	RSP-081	Inspektorat dan Dinas Terkait	Kurangnya koordinasi antara Inspektorat dan OPD sektor ekonomi	Internal	C	Potensi kebocoran anggaran dan tidak tercapainya target ekonomi daerah	Pemerintah Daerah
51		Persentase pengawasan di Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan sesuai dengan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Pengawasan reformasi birokrasi dan kesejahteraan tidak maksimal	RSP-082	Inspektorat dan Bagian Organisasi	Tidak adanya pengawasan khusus terhadap reformasi birokrasi	Internal	C	Reformasi birokrasi stagnan dan pelayanan publik tidak meningkat	Pemerintah Daerah
52		Persentase pengawasan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Pengawasan terhadap Nagari tidak dilaksanakan sesuai PKPT	RSP-083	Inspektorat dan DPMD	Terbatasnya jadwal dan anggaran pengawasan nagari	Internal	C	Potensi penyimpangan dana desa dan menurunnya akuntabilitas nagari	Masyarakat Nagari
53		Persentase perangkat daerah yang memenuhi dokumen implementasi SAKIP secara tepat waktu	Dokumen implementasi SAKIP tidak dipenuhi tepat waktu oleh perangkat daerah	RSP-084	Inspektorat dan Bagian Organisasi	Kurangnya pemahaman dan komitmen perangkat daerah	Internal	C	Nilai SAKIP rendah dan kinerja OPD tidak terukur secara optimal	Pemerintah Daerah
54		Nilai Penanganan Kejaidan Korupsi	Nilai penanganan kejadian korupsi rendah	RSP-085	Inspektorat	Kurangnya sistem pelaporan dan pencegahan dugaan tindak korupsi	Internal	C	Reputasi daerah memburuk dan risiko kerugian keuangan daerah meningkat	Pemerintah Daerah
55	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Pendampingan dan asistensi bidang infrastruktur dan lingkungan hidup tidak optimal	RSP-086	Inspektorat	Kurangnya tenaga pendamping yang kompeten di bidang teknis	Internal	C	Pelaksanaan program tidak efisien dan terjadi kesalahan teknis	Pemerintah Daerah
56		Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Pendampingan bidang perekonomian tidak terlaksana sesuai target	RSP-087	Inspektorat	Tidak adanya jadwal dan prioritas pendampingan yang jelas	Internal	C	Pengelolaan program ekonomi tidak optimal dan potensi ketidaksesuaian kebijakan	Pemerintah Daerah
57		Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Perangkat Daerah Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan	Pendampingan bidang reformasi birokrasi dan kesejahteraan tidak dilakukan	RSP-088	Inspektorat	Terbatasnya anggaran dan sumber daya untuk asistensi bidang RB dan kesejahteraan	Internal	C	Stagnasi reformasi birokrasi dan menurunnya kesejahteraan ASN	Pemerintah Daerah
58		Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Nagari	Pendampingan dan asistensi nagari tidak maksimal	RSP-089	Inspektorat dan DPMD	Kurangnya pelibatan unsur nagari dalam kegiatan asistensi	Internal	C	Pengelolaan dana desa berisiko tidak akuntabel dan tidak sesuai perencanaan	Nagari
59		Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Penegakan Integritas	Asistensi penegakan integritas tidak terlaksana dengan baik	RSP-090	Inspektorat	Tidak adanya SOP dan program kerja khusus penegakan integritas	Internal	C	Peningkatan risiko pelanggaran etika dan lemahnya budaya antikorupsi	Pemerintah Daerah
60		Persentase fasilitasi pengawasan manajemen risiko	Fasilitasi pengawasan manajemen risiko tidak berjalan optimal	RSP-091	Inspektorat dan OPD	Tidak adanya dokumen manajemen risiko di sebagian perangkat daerah	Internal	C	Tingginya risiko operasional dan kegagalan pencapaian tujuan program	Pemerintah Daerah
61		Nilai Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi	Nilai kapabilitas pengelolaan risiko korupsi rendah	RSP-092	Inspektorat	Kurangnya pelatihan dan pemahaman perangkat daerah terkait pengelolaan risiko korupsi	Internal	C	Terjadi pembiaran terhadap potensi korupsi yang dapat merugikan keuangan daerah	Pemerintah Daerah
62		Nilai Penerapan Strategi Pencegahan Korupsi	Nilai penerapan strategi pencegahan korupsi rendah	RSP-093	Inspektorat dan OPD terkait	Tidak diterapkannya strategi pencegahan secara konsisten	Internal	C	Maraknya praktik korupsi dan menurunnya kepercayaan publik	Pemerintah Daerah
63	**Sasaran 1.2 : Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah**	**Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis hasil kajian**	Hasil kajian tidak dimanfaatkan dalam perencanaan	RSP-094	Bappelitbangda	Kurangnya koordinasi OPD, rendahnya komitmen penggunaan hasil penelitian	Internal	C	Perencanaan tidak berbasis data, kebijakan kurang tepat sasaran	Pemda, masyarakat
64	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Jumlah penelitian yang selesai tepat waktu	Penelitian tidak selesai sesuai target	RSP-095	Bappelitbangda	Keterbatasan SDM peneliti, anggaran terlambat	Internal	C	Output penelitian tertunda, pengambilan keputusan terhambat	OPD pengguna data
65	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Jumlah inovasi daerah terdaftar di Jaringan Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi tidak terdokumentasi dan tidak terdaftar	RSP-096	Bappelitbangda	Rendahnya minat OPD mengusulkan inovasi, lemahnya sistem dokumentasi	Internal	C	Potensi inovasi tidak diakui secara resmi, peluang penghargaan hilang	Pemda, masyarakat
66	**Sasaran 1.3 : Meningkatnya Transformasi Digital Pelayanan Publik**	**Persentase layanan publik terintegrasi secara digital**	Integrasi layanan publik tidak optimal	RSP-097	Diskominfo	Perbedaan platform, kurangnya interoperabilitas	Internal	C	Layanan publik tidak efisien, keluhan masyarakat meningkat	Masyarakat, pelaku usaha
67	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase publikasi informasi sesuai standar KIP	Informasi publik tidak tepat waktu atau tidak lengkap	RSP-098	Diskominfo	Proses verifikasi lama, kurangnya SDM pengelola	Internal	C	Masyarakat kesulitan mengakses informasi resmi	Masyarakat, media
68	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi yang berfungsi optimal	Aplikasi tidak berfungsi sesuai kebutuhan	RSP-099	Diskominfo	Bug, kurang pemeliharaan, server down	Internal	C	Gangguan layanan publik, rendahnya kepuasan pengguna	Masyarakat, OPD

KEPALA BAPELITBANGDA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

...

Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda	**: Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman**
Tahun Penilaian	**: 2025**
Tujuan Strategis	**: Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing**
Urusan Pemerintahan	**: Urusan Penunjang, Urusan Pemerintahan**

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
1	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah Masih Rendah	RSP - 001	4	4	16
2	Rendahnya nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	RSP - 002	4	4	16
3	1. Rendahnya Tata Kelola Organisasi Berbasis Kinerja 2. Belum Tertanamnya Prinsip Tata Kelola yang Adaptif dan Kolaboratif	RSP - 003	4	3	12
4	Tidak tercapainya pemenuhan kebutuhan operasional pimpinan sesuai ketentuan	RSP - 004	3	3	9
5	Rendahnya nilai SKM terhadap layanan Sekretariat Daerah	RSP - 005	3	3	9
6	Rekomendasi SAKIP tidak ditindaklanjuti tepat waktu	RSP - 006	4	3	12
7	Pelayanan keuangan pimpinan tidak sesuai aturan	RSP - 007	3	3	9
8	Temuan BPK tidak ditindaklanjuti secara menyeluruh atau tepat waktu	RSP - 008	4	3	12
9	Fasilitasi keprotokolan tidak sesuai standar atau prosedur	RSP - 009	3	3	9
10	Fasilitasi komunikasi pimpinan tidak efektif dan tidak sesuai dengan strategi komunikasi daerah	RSP - 010	3	3	9
11	Keterlambatan implementasi kebijakan	RSP - 011	3	4	12
12	Kualitas produk hukum tidak sesuai standar	RSP - 012	4	3	12
13	Kerjasama tidak berjalan optimal	RSP - 013	3	3	9
14	Keterlambatan proses administrasi	RSP - 014	3	3	9
15	Perencanaan kebutuhan ASN tidak sesuai dengan formasi yang dibutuhkan	RSP-044	4	3	12
16	Data dan informasi ASN tidak tersedia secara lengkap atau mutakhir	RSP-045	4	2	8
17	Pengembangan karir ASN tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki	RSP-046	3	3	9
18	Proporsi pegawai fungsional tidak seimbang	RSP-047	3	2	6
19	Rendahnya persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	RSP-048	4	2	8
20	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi masih rendah	RSP-049	4	2	8
21	Ketimpangan tingkat pendidikan ASN (lebih dominan menengah/dasar)	RSP-050	3	3	9
22	Tingginya proporsi belanja pegawai di luar tunjangan guru dari TKD	RSP-051	4	3	12
23	Rendahnya alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	RSP-052	4	2	8
24	Tingginya rasio belanja pegawai (di luar guru dan nakes)	RSP-053	4	2	8
25	Rendahnya akses publik terhadap informasi keuangan daerah	RSP-054	3	3	9
26	Rendahnya realisasi belanja wajib pelayanan dasar	RSP-055	4	2	8
27	Tingginya nilai SILPA dari tahun ke tahun	RSP-056	4	3	12
28	Rasio anggaran sisa (cash management) tinggi	RSP-057	4	2	8
29	Keterlambatan penyampaian laporan keuangan	RSP-058	3	3	9
30	Tingginya deviasi realisasi belanja terhadap APBD	RSP-059	4	3	12
31	Tingginya rasio belanja urusan pemerintahan umum	RSP-060	3	3	9
32	Turunnya opini laporan keuangan dari BPK	RSP-061	4	2	8
33	Kurangnya informasi ketersediaan sumber daya pelayanan	RSP-062	3	3	9
34	Realisasi PAD yang rendah dibanding target	RSP-065	4	3	12
35	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD yang tinggi	RSP-066	4	3	12
36	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan belum merata	RSP-067	3	2	6
37	Rendahnya adopsi sistem informasi keuangan berbasis digital	RSP-068	3	2	6
38	RPJMD tidak selaras dengan RKPD	RSP-069	4	3	12
39	RPJMD tidak selaras dengan Renstra Perangkat Daerah	RSP-070	4	3	12
40	RKPD tidak selaras dengan Renja OPD bidang Sosial Budaya	RSP-071	4	3	12

41	RKPD tidak selaras dengan Renja OPD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	RSP-072	4	3	12
42	RKPD tidak selaras dengan Renja OPD bidang Perekonomian dan SDA	RSP-073	4	3	12
43	Rekomendasi LHE SAKIP tidak sepenuhnya ditindaklanjuti	RSP-074	3	3	9
44	Tingkat kepuasan masyarakat rendah terhadap pelayanan publik	RSP-075	3	2	6
45	Temuan BPK tidak ditindaklanjuti tepat waktu dan tuntas	RSP-076	4	3	12
46	Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 tidak tuntas	RSP-077	4	3	12
47	Tindak lanjut hasil pemeriksaan internal tidak ditindaklanjuti tepat waktu	RSP-078	3	2	6
48	Tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal tidak optimal	RSP-079	3	2	6
49	Pengawasan bidang infrastruktur dan lingkungan hidup tidak sesuai PKPT	RSP-080	3	2	6
50	Pengawasan di bidang perekonomian tidak sesuai PKPT	RSP-081	3	2	6
51	Pengawasan reformasi birokrasi dan kesejahteraan tidak maksimal	RSP-082	3	2	6
52	Pengawasan terhadap Nagari tidak dilaksanakan sesuai PKPT	RSP-083	3	2	6
53	Dokumen implementasi SAKIP tidak dipenuhi tepat waktu oleh perangkat daerah	RSP-084	3	2	6
54	Nilai penanganan kejadian korupsi rendah	RSP-085	4	3	12
55	Pendampingan dan asistensi bidang infrastruktur dan lingkungan hidup tidak optimal	RSP-086	3	2	6
56	Pendampingan bidang perekonomian tidak terlaksana sesuai target	RSP-087	3	2	6
57	Pendampingan bidang reformasi birokrasi dan kesejahteraan tidak dilakukan	RSP-088	3	2	6
58	Pendampingan dan asistensi nagari tidak maksimal	RSP-089	3	2	6
59	Asistensi penegakan integritas tidak terlaksana dengan baik	RSP-090	3	2	6
60	Fasilitasi pengawasan manajemen risiko tidak berjalan optimal	RSP-091	3	2	6
61	Nilai kapabilitas pengelolaan risiko korupsi rendah	RSP-092	3	3	9
62	Nilai penerapan strategi pencegahan korupsi rendah	RSP-093	3	3	9
63	Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis hasil kajian	RSP-094	3	3	9
64	Jumlah penelitian yang selesai tepat waktu	RSP-095	3	3	9
65	Jumlah inovasi daerah terdaftar di Jaringan Inovasi Pelayanan Publik	RSP-096	4	3	12
66	Persentase layanan publik terintegrasi secara digital	RSP-097	5	4	20
67	Persentase publikasi informasi sesuai standar KIP	RSP-098	4	3	12
68	Persentase aplikasi yang berfungsi optimal	RSP-099	5	4	20

KEPALA BAPELITBANGDA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

...

Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda : **Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman**
Tahun Penilaian : **2025**
Tujuan Strategis : **Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing**
Urusan Pemerintahan : **Urusan Penunjang, Urusan Pemerintahan**

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
1	Persentase layanan publik terintegrasi secara digital	RSP-097	20	Diskominfo	Kurangnya infrastruktur TI dan SDM terlatih	Pelayanan publik lambat, akses masyarakat terganggu
2	Persentase aplikasi yang berfungsi optimal	RSP-099	20	Diskominfo	Bug dan minim pemeliharaan aplikasi	Gangguan operasional, layanan tidak optimal bagi pengguna
4	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah Masih Rendah	RSP - 001	16	Bupati / Sekretariat Daerah	Tidak optimalnya koordinasi pelaporan dan pembinaan kinerja daerah	Turunnya kepercayaan publik dan pengawasan pusat
5	Rendahnya nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	RSP - 002	16	Bupati / Sekretariat	Tidak optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Menurunnya efisiensi efektivitas dan akuntabilitas pelayanan publik
7	1. Rendahnya Tata Kelola Organisasi Berbasis Kinerja 2. Belum Tertanamnya Prinsip Tata Kelola yang Adaptif dan Kolaboratif	RSP - 003	12	Bupati / Sekretariat Daerah	Struktur organisasi belum mendukung kinerja berbasis hasil dan budaya kerja kolaboratif	Kinerja perangkat daerah tidak optimal
8	Rekomendasi SAKIP tidak ditindaklanjuti tepat waktu	RSP - 006	12	Inspektorat	Kurangnya perhatian perangkat daerah terhadap rekomendasi	Menurunnya nilai evaluasi SAKIP
9	Temuan BPK tidak ditindaklanjuti secara menyeluruh atau tepat waktu	RSP - 008	12	Inspektorat	Tidak ada sanksi tegas terhadap kelalaian tindak lanjut	Reputasi dan opini audit keuangan menurun
10	Keterlambatan implementasi kebijakan	RSP - 011	12	Sekretariat Daerah	Kurangnya sinergi lintas perangkat daerah dan kendala administratif	Target pembangunan tidak tercapai tepat waktu
11	Kualitas produk hukum tidak sesuai standar	RSP - 012	12	Bagian Hukum	Sumber daya penyusun regulasi belum memadai dan minim pelatihan hukum	Menimbulkan multitafsir dan hambatan implementasi
21	Perencanaan kebutuhan ASN tidak sesuai dengan formasi yang dibutuhkan	RSP-044	12	BKPSDM	Pemetaan kebutuhan ASN belum berbasis analisis jabatan dan beban kerja	Tidak optimalnya distribusi dan kualitas pelayanan publik
22	Tingginya proporsi belanja pegawai di luar tunjangan guru dari TKD	RSP-051	12	Badan Keuangan Daerah	Tidak optimalnya pengendalian belanja pegawai dan rasionalisasi belanja	Terbatasnya ruang fiskal untuk program strategis
23	Tingginya nilai SILPA dari tahun ke tahun	RSP-056	12	Badan Keuangan Daerah	Perencanaan anggaran tidak realistis dan rendahnya serapan belanja	Menurunnya efisiensi anggaran dan ketidakpercayaan publik
24	Tingginya deviasi realisasi belanja terhadap APBD	RSP-059	12	Badan Keuangan Daerah	Kualitas perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan belum optimal	Terbengkalainya kegiatan prioritas daerah
26	Realisasi PAD yang rendah dibanding target	RSP-065	12	Badan Keuangan Daerah & BPKD	Target PAD tidak realistis dan potensi pajak belum tergali maksimal	Ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat
27	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD yang tinggi	RSP-066	12	BPKD	Perencanaan pendapatan tidak akurat serta lemahnya penagihan PAD	Tidak tercapainya target PAD dan pengaruh terhadap pembiayaan pembangunan
28	RPJMD tidak selaras dengan RKPD	RSP-069	12	Bapelitbangda & Sekretariat Daerah	Kurangnya koordinasi lintas OPD dan pergeseran arah kebijakan	Terhambatnya pencapaian visi dan misi daerah
29	RPJMD tidak selaras dengan Renstra Perangkat Daerah	RSP-070	12	Bapelitbangda & Sekretariat Daerah	Penyusunan RPJMD tidak mengakomodir rencana kerja perangkat daerah	Program daerah tidak selaras dan berpotensi tumpang tindih
30	RKPD tidak selaras dengan Renja OPD bidang Sosial Budaya	RSP-071	12	Bapelitbangda & OPD bidang Pem-PMK	Terbatasnya komunikasi dan sinkronisasi antara perencana daerah dan OPD	Pencapaian sasaran bidang Pem-PMK tidak optimal
31	RKPD tidak selaras dengan Renja OPD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	RSP-072	12	Bapelitbangda & OPD bidang Infrastruktur	Sinkronisasi program infrastruktur tidak berjalan dengan baik	Terbengkalainya pembangunan infrastruktur strategis
32	RKPD tidak selaras dengan Renja OPD bidang Perekonomian dan SDA	RSP-073	12	Bapelitbangda & OPD bidang Ekonomi	Sasaran pembangunan bidang ekonomi tidak diterjemahkan secara rinci oleh OPD	Pertumbuhan ekonomi daerah tidak sesuai target
33	Temuan BPK tidak ditindaklanjuti tepat waktu dan tuntas	RSP-076	12	Inspektorat	Kurangnya komitmen dan sistem pengawasan internal yang lemah	Opini BPK bisa turun dan menurunkan kepercayaan publik
34	Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 tidak tuntas	RSP-077	12	Inspektorat	Tindak lanjut hasil audit tidak dilakukan menyeluruh karena kurang pengawasan	Rekomendasi BPK menumpuk dan jadi temuan berulang
35	Nilai penanganan kejadian korupsi rendah	RSP-085	12	Inspektorat	Kapasitas dan independensi APIP belum optimal dalam mendeteksi serta menindak korupsi	Tingkat korupsi tetap tinggi dan kepercayaan publik menurun
36	Jumlah inovasi daerah terdaftar di Jaringan Inovasi Pelayanan Publik	RSP-096	12	Bappelitbangda	Minimnya dukungan pendanaan dan kapasitas inovasi daerah	Kurangnya inovasi baru yang berdampak pada pelayanan publik
37	Persentase publikasi informasi sesuai standar KIP	RSP-098	12	Diskominfo	Kurangnya pemahaman standar KIP dan SDM terbatas	Informasi publik tidak sesuai standar, menurunkan transparansi dan kepercayaan masyarakat

KEPALA BAPELITBANGDA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

...

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)

Nama Pemda : **Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman**
Tahun Penilaian : **2025**
Tujuan Strategis : **Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing**
Urusan Pemerintahan : **Urusan Penunjang, Urusan Pemerintahan**

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penangungg Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	**Risiko Strategis**						
1	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah Masih Rendah	RSP - 001	Evaluasi kinerja tahunan, pembinaan OPD	1. Pemantauan kinerja daerah belum optimal. 2. Mekanisme tindak lanjut hasil evaluasi belum terstruktur. 3. Kapasitas aparatur dalam manajemen kinerja masih terbatas.	1. Penyusunan rencana aksi peningkatan kinerja daerah berbasis hasil evaluasi. 2. Penguatan sistem monitoring dan pelaporan kinerja secara berkala. 3. Pelatihan manajemen kinerja bagi aparatur.	Bupati / Sekretariat Daerah	2025-2029
2	Rendahnya nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	RSP - 002	Monitoring RB, pembinaan unit kerja	1. Inovasi pelayanan publik masih rendah. 2. Koordinasi antar unit kerja belum optimal. 3. Dokumentasi dan eviden reformasi birokrasi kurang lengkap.	1. Penguatan koordinasi lintas OPD untuk pencapaian target RB. 2. Pendampingan penyusunan eviden dan dokumentasi RB. 3. Pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis digital.	Bupati / Sekretariat Daerah	2025-2029
3	1. Rendahnya Tata Kelola Organisasi Berbasis Kinerja 2. Belum Tertanamnya Prinsip Tata Kelola yang Adaptif dan Kolaboratif	RSP - 003	Penguatan SOP kinerja, sosialisasi tata kelola	1. Tata kelola berbasis kinerja belum merata di seluruh OPD. 2. Budaya kerja adaptif dan kolaboratif belum melembaga. 3. Kurangnya evaluasi implementasi tata kelola.	1. Penyusunan pedoman tata kelola adaptif dan kolaboratif di lingkungan Pemda. 2. Pelatihan dan workshop budaya kerja adaptif bagi aparatur. 3. Evaluasi tahunan implementasi tata kelola.	Bupati / Sekretariat Daerah	2025-2029
4	Rekomendasi SAKIP tidak ditindaklanjuti tepat waktu	RSP - 006	SOP tindak lanjut rekomendasi SAKIP, rapat koordinasi	1. Mekanisme tindak lanjut SAKIP belum berbasis target waktu. 2. Pemantauan progres rekomendasi belum terintegrasi. 3. Pemahaman OPD terhadap rekomendasi SAKIP masih bervariasi.	1. Penyusunan jadwal dan target waktu tindak lanjut rekomendasi SAKIP. 2. Pembuatan dashboard monitoring progres tindak lanjut. 3. Pelatihan pemahaman rekomendasi SAKIP untuk OPD.	Inspektorat	2025-2029
5	Temuan BPK tidak ditindaklanjuti secara menyeluruh atau tepat waktu	RSP - 008	Rapat tindak lanjut temuan, pembinaan pengelolaan keuangan	1. Penyelesaian tindak lanjut temuan BPK belum menyeluruh. 2. Pemantauan progres tindak lanjut tidak terdokumentasi dengan baik. 3. Kapasitas pengelola keuangan daerah belum merata.	1. Penyusunan SOP tindak lanjut temuan BPK dengan target waktu. 2. Pengembangan sistem pelaporan progres tindak lanjut. 3. Pelatihan pengelolaan keuangan daerah sesuai rekomendasi BPK.	Inspektorat	2025-2029
6	Keterlambatan implementasi kebijakan	RSP - 011	Sosialisasi kebijakan, rapat koordinasi lintas OPD	1. Proses implementasi kebijakan belum terencana dengan baik. 2. Koordinasi antar OPD pelaksana kebijakan masih lemah. 3. Pemantauan pelaksanaan kebijakan belum optimal.	1. Penyusunan rencana implementasi kebijakan lengkap dengan jadwal. 2. Penguatan koordinasi pelaksanaan kebijakan lintas OPD. 3. Monitoring dan evaluasi rutin implementasi kebijakan.	Sekretariat Daerah	2025-2029
7	Kualitas produk hukum tidak sesuai standar	RSP - 012	Review produk hukum, pendampingan penyusunan	1. Proses perumusan produk hukum belum mengikuti standar penuh. 2. Kapasitas perancang peraturan masih terbatas. 3. Evaluasi produk hukum belum terjadwal.	1. Pelatihan penyusunan produk hukum sesuai standar. 2. Pendampingan teknis perumusan produk hukum. 3. Evaluasi berkala kualitas produk hukum.	Bagian Hukum	2025-2029
15	Perencanaan kebutuhan ASN tidak sesuai dengan formasi yang dibutuhkan	RSP-044	Analisis kebutuhan ASN, koordinasi BKPSDM	1. Perencanaan kebutuhan ASN belum berbasis analisis jabatan dan beban kerja. 2. Formasi yang diajukan tidak sesuai kebutuhan riil OPD. 3. Kurangnya koordinasi antar OPD terkait kebutuhan ASN.	1. Penyusunan perencanaan ASN berbasis analisis jabatan dan beban kerja. 2. Penyesuaian usulan formasi dengan kebutuhan riil OPD. 3. Koordinasi rutin antar OPD terkait formasi ASN.	BKPSDM	2025-2029
16	Tingginya proporsi belanja pegawai di luar tunjangan guru dari TKD	RSP-051	Evaluasi belanja pegawai, pembatasan TKD	1. Proporsi belanja pegawai di luar tunjangan guru masih tinggi. 2. Pengendalian TKD belum optimal. 3. Anggaran belanja pegawai belum sesuai kemampuan keuangan daerah.	1. Penyusunan kebijakan pengendalian belanja pegawai non-guru. 2. Penyesuaian TKD dengan kinerja pegawai. 3. Evaluasi berkala komposisi belanja pegawai.	Badan Keuangan Daerah	2025-2029
17	Tingginya nilai SILPA dari tahun ke tahun	RSP-056	Monitoring anggaran, perencanaan belanja	1. SILPA tinggi menunjukkan perencanaan dan penyerapan anggaran kurang efektif. 2. Pelaksanaan program tidak sesuai jadwal. 3. Koordinasi realisasi belanja belum optimal.	1. Penyusunan perencanaan belanja yang realistis. 2. Monitoring bulanan serapan anggaran. 3. Percepatan proses administrasi pencairan anggaran.	Badan Keuangan Daerah	2025-2029
18	Tingginya deviasi realisasi belanja terhadap APBD	RSP-059	Evaluasi penyerapan anggaran, pengendalian belanja	1. Deviasi realisasi belanja terhadap APBD tinggi. 2. Penyusunan anggaran tidak realistis. 3. Pengendalian pelaksanaan belanja belum memadai.	1. Penyusunan anggaran berbasis kinerja dan kebutuhan riil. 2. Monitoring mingguan realisasi belanja. 3. Penyesuaian anggaran selama tahun berjalan.	Badan Keuangan Daerah	2025-2029
19	Pengelolaan aset tidak sesuai prinsip manajemen aset modern	RSP-064	Inventarisasi aset, penertiban dokumen	1. Pengelolaan aset belum sesuai prinsip manajemen modern. 2. Data aset belum akurat dan terintegrasi. 3. Pemanfaatan aset belum optimal.	1. Penyusunan database aset terintegrasi. 2. Penilaian dan pemutakhiran data aset. 3. Penyusunan rencana pemanfaatan aset berbasis potensi.	BPKD	2025-2029
20	Realisasi PAD yang rendah dibanding target	RSP-065	Monitoring PAD, evaluasi sumber penerimaan	1. Realisasi PAD rendah dibanding target. 2. Potensi PAD belum tergali optimal. 3. Pengawasan pemungutan PAD kurang efektif.	1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD. 2. Digitalisasi sistem pemungutan PAD. 3. Evaluasi berkala target dan realisasi PAD.	Badan Keuangan Daerah & BPKD	2025-2029
21	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD yang tinggi	RSP-066	Pengawasan pemungutan PAD, revisi target	1. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran tinggi. 2. Target PAD tidak realistis. 3. Pengendalian pemungutan belum memadai.	1. Penetapan target PAD berbasis potensi riil. 2. Penguatan sistem pelaporan realisasi PAD. 3. Pengawasan lapangan secara rutin.	BPKD	2025-2029
22	RPJMD tidak selaras dengan RKPD	RSP-069	Sinkronisasi perencanaan, forum koordinasi	1. RPJMD tidak selaras dengan RKPD. 2. Sinkronisasi perencanaan belum optimal. 3. Koordinasi antar OPD dalam perencanaan kurang intensif.	1. Peninjauan kembali RPJMD untuk penyesuaian dengan RKPD. 2. Forum koordinasi perencanaan tahunan antar OPD. 3. Evaluasi kesesuaian dokumen perencanaan.	Bapelitbangda & Sekretariat Daerah	2025-2029
23	RPJMD tidak selaras dengan Renstra Perangkat Daerah	RSP-070	Sinkronisasi perencanaan, pendampingan OPD	1. RPJMD tidak selaras dengan Renstra OPD. 2. Sinkronisasi perencanaan belum optimal. 3. Koordinasi antar OPD kurang intensif.	1. Penyesuaian RPJMD dengan Renstra OPD. 2. Forum koordinasi perencanaan tahunan. 3. Evaluasi kesesuaian dokumen perencanaan OPD.	Bapelitbangda & Sekretariat Daerah	2025-2029

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penangungg Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
24	RKPD tidak selaras dengan Renja OPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	RSP-071	Koordinasi RKPD dengan Renja OPD bidang Sosial Budaya	1. RKPD tidak selaras dengan Renja OPD bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya. 2. Proses sinkronisasi belum efektif. 3. Koordinasi antar bidang perencanaan belum optimal.	1. Penyesuaian RKPD dengan Renja OPD bidang Sosial Budaya. 2. Forum koordinasi lintas bidang. 3. Evaluasi tahunan kesesuaian dokumen perencanaan.	Bapelitbangda & OPD bidang Pem-PMK	2025-2029
25	RKPD tidak selaras dengan Renja OPD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	RSP-072	Koordinasi RKPD dengan Renja OPD bidang Infrastruktur	1. RKPD tidak selaras dengan Renja OPD bidang Infrastruktur. 2. Proses sinkronisasi belum efektif. 3. Koordinasi antar bidang perencanaan belum optimal.	1. Penyesuaian RKPD dengan Renja OPD bidang Infrastruktur. 2. Forum koordinasi lintas bidang. 3. Evaluasi tahunan kesesuaian dokumen perencanaan.	Bapelitbangda & OPD bidang Infrastruktur	2025-2029
26	RKPD tidak selaras dengan Renja OPD bidang Perekonomian dan SDA	RSP-073	Koordinasi RKPD dengan Renja OPD bidang Perekonomian	1. RKPD tidak selaras dengan Renja OPD bidang Perekonomian dan SDA. 2. Proses sinkronisasi belum efektif. 3. Koordinasi antar bidang perencanaan belum optimal.	1. Penyesuaian RKPD dengan Renja OPD bidang Perekonomian dan SDA. 2. Forum koordinasi lintas bidang. 3. Evaluasi tahunan kesesuaian dokumen perencanaan.	Bapelitbangda & OPD bidang Ekonomi	2025-2029
27	Temuan BPK tidak ditindaklanjuti tepat waktu dan tuntas	RSP-076	Rapat tindak lanjut temuan BPK, pembinaan keuangan	1. Tindak lanjut temuan BPK tidak tuntas. 2. Mekanisme monitoring progres tindak lanjut belum optimal. 3. Kapasitas pengelola keuangan belum merata.	1. Penyusunan jadwal tindak lanjut temuan BPK dengan batas waktu jelas. 2. Pengembangan sistem monitoring progres. 3. Pelatihan pengelolaan keuangan sesuai rekomendasi BPK.	Inspektorat	2025-2029
28	Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 tidak tuntas	RSP-077	Monitoring tindak lanjut rekomendasi BPK	1. Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 tidak tuntas. 2. Pemantauan progres tindak lanjut belum terdokumentasi dengan baik. 3. Koordinasi antar OPD belum optimal.	1. Penyusunan SOP tindak lanjut rekomendasi BPK. 2. Dashboard monitoring progres tindak lanjut. 3. Koordinasi rutin antar OPD untuk percepatan tindak lanjut.	Inspektorat	2025-2029
29	Nilai penanganan kejadian korupsi rendah	RSP-085	Sosialisasi anti korupsi, penguatan pengawasan	1. Nilai penanganan kejadian korupsi rendah. 2. Pengawasan internal belum optimal. 3. Kesadaran aparatur terhadap pencegahan korupsi masih rendah.	1. Pelatihan pencegahan korupsi bagi aparatur. 2. Penguatan peran inspektorat dalam pengawasan. 3. Kampanye anti korupsi di seluruh OPD.	Inspektorat	2025-2029
33	Persentase aplikasi yang berfungsi optimal	RSP-099	Pemeliharaan rutin aplikasi; Evaluasi fungsi aplikasi; Layanan helpdesk terbatas	1. Beberapa modul tidak sesuai kebutuhan 2. Kurangnya SDM IT 3. Sistem monitoring belum terintegrasi	1. Peningkatan kapasitas SDM IT; 2. Integrasi monitoring aplikasi; 3. Upgrade modul yang tidak optimal	Dinas Kominfo	2025-2029
35	Persentase layanan publik terintegrasi secara digital	RSP-097	Pemeliharaan sistem layanan publik digital; Evaluasi integrasi; Pelatihan pegawai	1. Beberapa layanan belum digital 2. Kurangnya kapasitas SDM 3. Sistem monitoring terbatas	1. Upgrade sistem digital; 2. Pelatihan lanjutan SDM; 3. Integrasi layanan baru secara bertahap	Dinas Kominfo, Bapelitbangda	2025-2029
36	Jumlah inovasi daerah terdaftar di Jaringan Inovasi Pelayanan Publik	RSP-096	Fasilitasi pendaftaran inovasi; Monitoring dan evaluasi inovasi; Publikasi inovasi	1. Beberapa inovasi tidak terdokumentasi 2. Kurangnya promosi 3. Standar penilaian belum seragam	1. Penyusunan SOP pendaftaran inovasi; 2. Sosialisasi ke OPD/masyarakat; 3. Audit inovasi rutin	Bapelitbangda, Dinas Penelitian & Pengembangan	2025-2029
37	Persentase publikasi informasi sesuai standar KIP	RSP-098	Sosialisasi standar KIP; Monitoring publikasi; Evaluasi konten informasi	1. Beberapa OPD belum mempublikasikan 2. Kualitas informasi bervariasi 3. Tidak ada monitoring rutin	1. Peningkatan pelatihan KIP; 2. Audit konten publikasi; 3. Integrasi platform publikasi	Bapelitbangda, Dinas Kominfo	2025-2029

KEPALA BAPELITBANGDA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

...

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda	**: Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman**
Tahun Penilaian	**: 2025**
Tujuan Strategis	**: Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing**
Urusan Pemerintahan	**: Urusan Penunjang, Urusan Pemerintahan**

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	1. Penyusunan rencana aksi peningkatan kinerja daerah berbasis hasil evaluasi. 2. Penguatan sistem monitoring dan pelaporan kinerja secara berkala. 3. Pelatihan manajemen kinerja bagi aparatur.	Surat edaran, rapat koordinasi, website resmi pemda, media sosial, workshop	Bagian Organisasi Setda / Bapelitbangda	Seluruh OPD dan aparatur daerah	2025-2029		
2	1. Penguatan koordinasi lintas OPD untuk pencapaian target RB. 2. Pendampingan penyusunan eviden dan dokumentasi RB. 3. Pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis digital.	Rapat koordinasi, bimbingan teknis, media daring, aplikasi pelayanan publik	Bagian Organisasi Setda / Dinas terkait	OPD pelaksana RB dan tim inovasi pelayanan	2025-2029		
3	1. Penyusunan pedoman tata kelola adaptif dan kolaboratif di lingkungan Pemda. 2. Pelatihan dan workshop budaya kerja adaptif bagi aparatur. 3. Evaluasi tahunan implementasi tata kelola.	Dokumen pedoman, workshop, rapat kerja, portal internal pemda	Bagian Organisasi Setda	Seluruh aparatur Pemda	2025-2029		
4	1. Penyusunan jadwal dan target waktu tindak lanjut rekomendasi SAKIP. 2. Pembuatan dashboard monitoring progres tindak lanjut. 3. Pelatihan pemahaman rekomendasi SAKIP untuk OPD.	Surat resmi, rapat koordinasi, dashboard online, workshop	Bapelitbangda / Bagian Organisasi	OPD pelaksana SAKIP	2025-2029		
5	1. Penyusunan SOP tindak lanjut temuan BPK dengan target waktu. 2. Pengembangan sistem pelaporan progres tindak lanjut. 3. Pelatihan pengelolaan keuangan daerah sesuai rekomendasi BPK.	Dokumen SOP, rapat koordinasi, aplikasi monitoring, bimtek keuangan	Inspektorat Daerah / BPKD	OPD pengelola anggaran dan keuangan	2025-2029		
6	1. Penyusunan rencana implementasi kebijakan lengkap dengan jadwal. 2. Penguatan koordinasi pelaksanaan kebijakan lintas OPD. 3. Monitoring dan evaluasi rutin implementasi kebijakan.	Rapat koordinasi lintas OPD, surat edaran, dashboard Monev, laporan periodik	Bagian Organisasi Setda / Bapelitbangda	Seluruh OPD pelaksana kebijakan	2025-2029		

15	1. Penyusunan perencanaan ASN berbasis analisis jabatan dan beban kerja. 2. Penyesuaian usulan formasi dengan kebutuhan riil OPD. 3. Koordinasi rutin antar OPD terkait formasi ASN.	Rapat koordinasi, aplikasi perencanaan ASN, laporan formasi, surat usulan formasi	BKPSDM	OPD pengusul formasi ASN	2025-2029		
16	1. Penyusunan kebijakan pengendalian belanja pegawai non-guru. 2. Penyesuaian TKD dengan kinerja pegawai. 3. Evaluasi berkala komposisi belanja pegawai.	Rapat koordinasi, SK kebijakan belanja pegawai, laporan evaluasi, dashboard monitoring	BKPSDM	Seluruh OPD pengelola pegawai	2025-2029		
17	1. Penyusunan perencanaan belanja yang realistis. 2. Monitoring bulanan serapan anggaran. 3. Percepatan proses administrasi pencairan anggaran.	Rapat teknis perencanaan, aplikasi monitoring serapan anggaran, laporan bulanan, surat percepatan	BPKD	Seluruh OPD pengelola anggaran	2025-2029		
18	1. Penyusunan anggaran berbasis kinerja dan kebutuhan riil. 2. Monitoring mingguan realisasi belanja. 3. Penyesuaian anggaran selama tahun berjalan.	Aplikasi anggaran berbasis kinerja, rapat monitoring mingguan, dokumen revisi anggaran, laporan realisasi	BPKD	Seluruh OPD pengelola anggaran	2025-2029		
19	1. Penyusunan database aset terintegrasi. 2. Penilaian dan pemutakhiran data aset. 3. Penyusunan rencana pemanfaatan aset berbasis potensi.	Aplikasi database aset, survei lapangan, laporan penilaian aset, rencana pemanfaatan aset	BPKD	Seluruh OPD pengelola aset	2025-2029		
20	1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD. 2. Digitalisasi sistem pemungutan PAD. 3. Evaluasi berkala target dan realisasi PAD.	Portal PAD digital, pelatihan petugas, sosialisasi pajak, laporan evaluasi realisasi	BPKD	Wajib pajak daerah	2025-2029		
21	1. Penetapan target PAD berbasis potensi riil. 2. Penguatan sistem pelaporan realisasi PAD. 3. Pengawasan lapangan secara rutin.	Sistem pelaporan PAD, rapat pengawasan rutin, inspeksi lapangan, laporan kinerja PAD	BPKD	Wajib pajak dan petugas pemungut PAD	2025-2029		
22	1. Peninjauan kembali RPJMD untuk penyesuaian dengan RKPD. 2. Forum koordinasi perencanaan tahunan antar OPD. 3. Evaluasi kesesuaian dokumen perencanaan.	Rapat peninjauan RPJMD, forum koordinasi OPD, laporan evaluasi dokumen perencanaan	Bapelitbangda	Seluruh OPD	2025-2029		
23	1. Penyesuaian RPJMD dengan Renstra OPD. 2. Forum koordinasi perencanaan tahunan. 3. Evaluasi kesesuaian dokumen perencanaan OPD.	Rapat penyesuaian RPJMD-Renstra, forum koordinasi tahunan, laporan evaluasi Renstra	Bapelitbangda	Seluruh OPD	2025-2029		
24	1. Penyesuaian RKPD dengan Renja OPD bidang PPM. 2. Forum koordinasi lintas bidang. 3. Evaluasi tahunan kesesuaian dokumen perencanaan.	Rapat lintas bidang PPM, dokumen penyesuaian RKPD, laporan evaluasi tahunan	Bapelitbangda	OPD bidang Sosbud	2025-2029		
25	1. Penyesuaian RKPD dengan Renja OPD bidang Infrastruktur. 2. Forum koordinasi lintas bidang. 3. Evaluasi tahunan kesesuaian dokumen perencanaan.	Rapat lintas bidang infrastruktur, dokumen penyesuaian RKPD, laporan evaluasi tahunan	Bapelitbangda	OPD bidang Infrastruktur	2025-2029		
26	1. Penyesuaian RKPD dengan Renja OPD bidang Perekonomian dan SDA. 2. Forum koordinasi lintas bidang. 3. Evaluasi tahunan kesesuaian dokumen perencanaan.	Rapat lintas bidang perekonomian & SDA, dokumen penyesuaian RKPD, laporan evaluasi tahunan	Bapelitbangda	OPD bidang Perekonomian dan SDA	2025-2029		

27	1. Penyusunan jadwal tindak lanjut temuan BPK dengan batas waktu jelas. 2. Pengembangan sistem monitoring progres. 3. Pelatihan pengelolaan keuangan sesuai rekomendasi BPK.	Jadwal tindak lanjut BPK, aplikasi monitoring progres, laporan keuangan, pelatihan teknis	BPKD	Seluruh OPD pengelola keuangan	2025-2029		
28	1. Penyusunan SOP tindak lanjut rekomendasi BPK. 2. Dashboard monitoring progres tindak lanjut. 3. Koordinasi rutin antar OPD untuk percepatan tindak lanjut.	SOP tindak lanjut BPK, dashboard progres, rapat koordinasi percepatan tindak lanjut	BPKD	Seluruh OPD pengelola keuangan	2025-2029		
29	1. Pelatihan pencegahan korupsi bagi aparatur. 2. Penguatan peran inspektorat dalam pengawasan. 3. Kampanye anti korupsi di seluruh OPD.	Materi pelatihan anti korupsi, rapat koordinasi inspektorat, media kampanye anti korupsi	Inspektorat	Seluruh OPD	2025-2029		
33	1. Peningkatan kapasitas SDM IT; 2. Integrasi monitoring aplikasi; 3. Upgrade modul yang tidak optimal	Pelatihan IT, monitoring, workshop	Dinas Kominfo	SDM IT OPD	2025-2029		
34	1. Pelatihan OPD terkait integrasi data; 2. Standarisasi format data; 3. Audit data berkala	Pelatihan OPD, standar data, audit	Dinas Kominfo/Inspektorat	OPD terkait	2025-2029		
35	1. Upgrade sistem digital; 2. Pelatihan lanjutan SDM; 3. Integrasi layanan baru secara bertahap	Sistem digital, pelatihan, integrasi layanan	Dinas Kominfo	OPD dan masyarakat	2025-2029		
36	1. Penyusunan SOP pendaftaran inovasi; 2. Sosialisasi ke OPD/masyarakat; 3. Audit inovasi rutin	SOP inovasi, sosialisasi, audit	Bappelitbangda	OPD/masyarakat	2025-2029		
37	1. Peningkatan pelatihan KIP; 2. Audit konten publikasi; 3. Integrasi platform publikasi	Pelatihan KIP, audit konten, integrasi platform	Dinas Kominfo	OPD/masyarakat	2025-2029		

KEPALA BAPELITBANGDA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

...

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemda	**: Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman**
Tahun Penilaian	**: 2025**
Tujuan Strategis	**: Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing**
Urusan Pemerintahan	**: Urusan Penunjang, Urusan Pemerintahan**

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	1. Penyusunan rencana aksi peningkatan kinerja daerah berbasis hasil evaluasi. 2. Penguatan sistem monitoring dan pelaporan kinerja secara berkala. 3. Pelatihan manajemen kinerja bagi aparatur.	Review laporan kinerja triwulanan dan verifikasi hasil pelatihan.	Bagian Organisasi Setda / Bapelitbangda	2025-2029		
2	1. Penguatan koordinasi lintas OPD untuk pencapaian target RB. 2. Pendampingan penyusunan eviden dan dokumentasi RB. 3. Pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis digital.	Monitoring capaian indikator RB lintas OPD dan verifikasi eviden.	Bagian Organisasi Setda / Dinas terkait	2025-2029		
3	1. Penyusunan pedoman tata kelola adaptif dan kolaboratif di lingkungan Pemda. 2. Pelatihan dan workshop budaya kerja adaptif bagi aparatur. 3. Evaluasi tahunan implementasi tata kelola.	Evaluasi tahunan pedoman tata kelola melalui survei internal.	Bagian Organisasi Setda	2025-2029		
4	1. Penyusunan jadwal dan target waktu tindak lanjut rekomendasi SAKIP. 2. Pembuatan dashboard monitoring progres tindak lanjut. 3. Pelatihan pemahaman rekomendasi SAKIP untuk OPD.	Pemantauan progres tindak lanjut SAKIP via dashboard dan rapat triwulanan.	Bapelitbangda / Bagian Organisasi	2025-2029		
5	1. Penyusunan SOP tindak lanjut temuan BPK dengan target waktu. 2. Pengembangan sistem pelaporan progres tindak lanjut. 3. Pelatihan pengelolaan keuangan daerah sesuai rekomendasi BPK.	Pemeriksaan dokumen tindak lanjut BPK dan uji petik lapangan.	Inspektorat Daerah / BPKD	2025-2029		
6	1. Penyusunan rencana implementasi kebijakan lengkap dengan jadwal. 2. Penguatan koordinasi pelaksanaan kebijakan lintas OPD. 3. Monitoring dan evaluasi rutin implementasi kebijakan.	Monitoring realisasi jadwal implementasi kebijakan dan laporan lintas OPD.	Bagian Organisasi Setda / Bapelitbangda	2025-2029		
15	1. Penyusunan perencanaan ASN berbasis analisis jabatan dan beban kerja. 2. Penyesuaian usulan formasi dengan kebutuhan riil OPD. 3. Koordinasi rutin antar OPD terkait formasi ASN.	Review dokumen perencanaan ASN dan verifikasi kesesuaian formasi.	BKPSDM	2025-2029		
16	1. Penyusunan kebijakan pengendalian belanja pegawai non-guru. 2. Penyesuaian TKD dengan kinerja pegawai. 3. Evaluasi berkala komposisi belanja pegawai.	Monitoring realisasi pengendalian belanja pegawai dan evaluasi TKD.	BKPSDM	2025-2029		
17	1. Penyusunan perencanaan belanja yang realistis. 2. Monitoring bulanan serapan anggaran. 3. Percepatan proses administrasi pencairan anggaran.	Evaluasi bulanan serapan anggaran dan pemeriksaan administrasi pencairan.	BPKD	2025-2029		
18	1. Penyusunan anggaran berbasis kinerja dan kebutuhan riil. 2. Monitoring mingguan realisasi belanja. 3. Penyesuaian anggaran selama tahun berjalan.	Pemantauan mingguan realisasi belanja dan penyesuaian anggaran.	BPKD	2025-2029		
19	1. Penyusunan database aset terintegrasi. 2. Penilaian dan pemutakhiran data aset. 3. Penyusunan rencana pemanfaatan aset berbasis potensi.	Verifikasi database aset dan pengecekan lapangan pemanfaatan aset.	BPKD	2025-2029		
20	1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD. 2. Digitalisasi sistem pemungutan PAD. 3. Evaluasi berkala target dan realisasi PAD.	Monitoring realisasi PAD dan audit digitalisasi pemungutan.	BPKD	2025-2029		
21	1. Penetapan target PAD berbasis potensi riil. 2. Penguatan sistem pelaporan realisasi PAD. 3. Pengawasan lapangan secara rutin.	Evaluasi capaian target PAD dan inspeksi lapangan.	BPKD	2025-2029		
22	1. Peninjauan kembali RPJMD untuk penyesuaian dengan RKPD. 2. Forum koordinasi perencanaan tahunan antar OPD. 3. Evaluasi kesesuaian dokumen perencanaan.	Review kesesuaian RPJMD dengan RKPD dan hasil forum koordinasi.	Bapelitbangda	2025-2029		
23	1. Penyesuaian RPJMD dengan Renstra OPD. 2. Forum koordinasi perencanaan tahunan. 3. Evaluasi kesesuaian dokumen perencanaan OPD.	Monitoring sinkronisasi RPJMD dengan Renstra OPD.	Bapelitbangda	2025-2029		
24	1. Penyesuaian RKPD dengan Renja OPD bidang PPM. 2. Forum koordinasi lintas bidang. 3. Evaluasi tahunan kesesuaian dokumen perencanaan.	Evaluasi tahunan kesesuaian RKPD bidang PPM dengan Renja OPD.	Bapelitbangda	2025-2029		
25	1. Penyesuaian RKPD dengan Renja OPD bidang Infrastruktur. 2. Forum koordinasi lintas bidang. 3. Evaluasi tahunan kesesuaian dokumen perencanaan.	Evaluasi tahunan kesesuaian RKPD bidang Infrastruktur dengan Renja OPD.	Bapelitbangda	2025-2029		
26	1. Penyesuaian RKPD dengan Renja OPD bidang Perekonomian dan SDA. 2. Forum koordinasi lintas bidang. 3. Evaluasi tahunan kesesuaian dokumen perencanaan.	Evaluasi tahunan kesesuaian RKPD bidang Perekonomian dan SDA dengan Renja OPD.	Bapelitbangda	2025-2029		
27	1. Penyusunan jadwal tindak lanjut temuan BPK dengan batas waktu jelas. 2. Pengembangan sistem monitoring progres. 3. Pelatihan pengelolaan keuangan sesuai rekomendasi BPK.	Monitoring progres tindak lanjut temuan BPK dan pemeriksaan dokumen.	BPKD	2025-2029		
28	1. Penyusunan SOP tindak lanjut rekomendasi BPK. 2. Dashboard monitoring progres tindak lanjut. 3. Koordinasi rutin antar OPD untuk percepatan tindak lanjut.	Pemantauan dashboard progres rekomendasi BPK dan rapat koordinasi.	BPKD	2025-2029		
29	1. Pelatihan pencegahan korupsi bagi aparatur. 2. Penguatan peran inspektorat dalam pengawasan. 3. Kampanye anti korupsi di seluruh OPD.	Evaluasi efektivitas pelatihan anti korupsi dan observasi pengawasan OPD.	Inspektorat	2025-2029		
33	1. Peningkatan kapasitas SDM IT; 2. Integrasi monitoring aplikasi; 3. Upgrade modul yang tidak optimal	Review kapasitas SDM IT Audit integrasi sistem aplikasi	Dinas Kominfo	2025-2029		
34	1. Pelatihan OPD terkait integrasi data; 2. Standarisasi format data; 3. Audit data berkala	Pemantauan pelatihan OPD Audit format dan kualitas data	Dinas Kominfo/Inspektorat	2025-2029		
35	1. Upgrade sistem digital; 2. Pelatihan lanjutan SDM; 3. Integrasi layanan baru secara bertahap	Monitoring implementasi layanan Evaluasi pelatihan lanjutan	Dinas Kominfo	2025-2029		
36	1. Penyusunan SOP pendaftaran inovasi; 2. Sosialisasi ke OPD/masyarakat; 3. Audit inovasi rutin	Pemeriksaan kepatuhan SOP Audit sosialisasi dan dokumentasi inovasi	Bapelitbangda	2025-2029		
37	1. Peningkatan pelatihan KIP; 2. Audit konten publikasi; 3. Integrasi platform publikasi	Monitoring pelatihan KIP Audit konten dan integrasi publikasi	Dinas Kominfo	2025-2029		

KEPALA BAPELITBANGDA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

...

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda : **Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman**
Tahun Penilaian : **2025**
Tujuan Strategis : **Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing**
Urusan Pemerintahan : **Urusan Penunjang, Urusan Pemerintahan**

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
I	**Risiko Strategis Pemda**									
1	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah Masih Rendah	RSP - 001	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Penyusunan rencana aksi peningkatan kinerja daerah berbasis hasil evaluasi. 2. Penguatan sistem monitoring dan pelaporan kinerja secara berkala. 3. Pelatihan manajemen kinerja bagi aparatur.			
2	Rendahnya nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	RSP - 002	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Penguatan koordinasi lintas OPD untuk pencapaian target RB. 2. Pendampingan penyusunan eviden dan dokumentasi RB. 3. Pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis digital.			
3	1. Rendahnya Tata Kelola Organisasi Berbasis Kinerja 2. Belum Tertanamnya Prinsip Tata Kelola yang Adaptif dan Kolaboratif	RSP - 003	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Penyusunan pedoman tata kelola adaptif dan kolaboratif di lingkungan Pemda. 2. Pelatihan dan workshop budaya kerja adaptif bagi aparatur. 3. Evaluasi tahunan implementasi tata kelola.			
4	Rekomendasi SAKIP tidak ditindaklanjuti tepat waktu	RSP - 006	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Penyusunan jadwal dan target waktu tindak lanjut rekomendasi SAKIP. 2. Pembuatan dashboard monitoring progres tindak lanjut. 3. Pelatihan pemahaman rekomendasi SAKIP untuk OPD.			
5	Temuan BPK tidak ditindaklanjuti secara menyeluruh atau tepat waktu	RSP - 008	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Penyusunan SOP tindak lanjut temuan BPK dengan target waktu. 2. Pengembangan sistem pelaporan progres tindak lanjut. 3. Pelatihan pengelolaan keuangan daerah sesuai rekomendasi BPK.			
6	Keterlambatan implementasi kebijakan	RSP - 011	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Penyusunan rencana implementasi kebijakan lengkap dengan jadwal. 2. Penguatan koordinasi pelaksanaan kebijakan lintas OPD. 3. Monitoring dan evaluasi rutin implementasi kebijakan.			
15	Perencanaan kebutuhan ASN tidak sesuai dengan formasi yang dibutuhkan	RSP-044	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Penyusunan perencanaan ASN berbasis analisis jabatan dan beban kerja. 2. Penyesuaian usulan formasi dengan kebutuhan riil OPD. 3. Koordinasi rutin antar OPD terkait formasi ASN.			
16	Tingginya proporsi belanja pegawai di luar tunjangan guru dari TKD	RSP-051	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Penyusunan kebijakan pengendalian belanja pegawai non-guru. 2. Penyesuaian TKD dengan kinerja pegawai. 3. Evaluasi berkala komposisi belanja pegawai.			
17	Tingginya nilai SILPA dari tahun ke tahun	RSP-056	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Penyusunan perencanaan belanja yang realistis. 2. Monitoring bulanan serapan anggaran. 3. Percepatan proses administrasi pencairan anggaran.			
18	Tingginya deviasi realisasi belanja terhadap APBD	RSP-059	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Penyusunan anggaran berbasis kinerja dan kebutuhan riil. 2. Monitoring mingguan realisasi belanja. 3. Penyesuaian anggaran selama tahun berjalan.			
19	Pengelolaan aset tidak sesuai prinsip manajemen aset modern	RSP-064	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Penyusunan database aset terintegrasi. 2. Penilaian dan pemutakhiran data aset. 3. Penyusunan rencana pemanfaatan aset berbasis potensi.			
20	Realisasi PAD yang rendah dibanding target	RSP-065	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD. 2. Digitalisasi sistem pemungutan PAD. 3. Evaluasi berkala target dan realisasi PAD.			
21	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD yang tinggi	RSP-066	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Penetapan target PAD berbasis potensi riil. 2. Penguatan sistem pelaporan realisasi PAD. 3. Pengawasan lapangan secara rutin.			
22	RPJMD tidak selaras dengan RKPD	RSP-069	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Peninjauan kembali RPJMD untuk penyesuaian dengan RKPD. 2. Forum koordinasi perencanaan tahunan antar OPD. 3. Evaluasi kesesuaian dokumen perencanaan.			
23	RPJMD tidak selaras dengan Renstra Perangkat Daerah	RSP-070	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Penyesuaian RPJMD dengan Renstra OPD. 2. Forum koordinasi perencanaan tahunan. 3. Evaluasi kesesuaian dokumen perencanaan OPD.			
24	RKPD tidak selaras dengan Renja OPD bidang Sosial Budaya	RSP-071	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Penyesuaian RKPD dengan Renja OPD bidang Sosial Budaya. 2. Forum koordinasi lintas bidang. 3. Evaluasi tahunan kesesuaian dokumen perencanaan.			
25	RKPD tidak selaras dengan Renja OPD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	RSP-072	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Penyesuaian RKPD dengan Renja OPD bidang Infrastruktur. 2. Forum koordinasi lintas bidang. 3. Evaluasi tahunan kesesuaian dokumen perencanaan.			

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keteranga
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
26	RKPD tidak selaras dengan Renja OPD bidang Perekonomian dan SDA	RSP-073	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Penyesuaian RKPD dengan Renja OPD bidang Perekonomian dan SDA. 2. Forum koordinasi lintas bidang. 3. Evaluasi tahunan kesesuaian dokumen perencanaan.			
27	Temuan BPK tidak ditindaklanjuti tepat waktu dan tuntas	RSP-076	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Penyusunan jadwal tindak lanjut temuan BPK dengan batas waktu jelas. 2. Pengembangan sistem monitoring progres. 3. Pelatihan pengelolaan keuangan sesuai rekomendasi BPK.			
28	Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 tidak tuntas	RSP-077	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Penyusunan SOP tindak lanjut rekomendasi BPK. 2. Dashboard monitoring progres tindak lanjut. 3. Koordinasi rutin antar OPD untuk percepatan tindak lanjut.			
29	Nilai penanganan kejadian korupsi rendah	RSP-085	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Pelatihan pencegahan korupsi bagi aparatur. 2. Penguatan peran inspektorat dalam pengawasan. 3. Kampanye anti korupsi di seluruh OPD.			
33	Persentase aplikasi yang berfungsi optimal	RSP-099	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Peningkatan kapasitas SDM IT; 2. Integrasi monitoring aplikasi; 3. Upgrade modul yang tidak optimal			
34	Persentase data sektoral yang terintegrasi dengan Satu Data Indonesia	RSP-100	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Pelatihan OPD terkait integrasi data; 2. Standarisasi format data; 3. Audit data berkala			
35	Persentase layanan publik terintegrasi secara digital	RSP-097	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Upgrade sistem digital; 2. Pelatihan lanjutan SDM; 3. Integrasi layanan baru secara bertahap			
36	Jumlah inovasi daerah terdaftar di Jaringan Inovasi Pelayanan Publik	RSP-096	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Penyusunan SOP pendaftaran inovasi; 2. Sosialisasi ke OPD/masyarakat; 3. Audit inovasi rutin			
37	Persentase publikasi informasi sesuai standar KIP	RSP-098	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Peningkatan pelatihan KIP; 2. Audit konten publikasi; 3. Integrasi platform publikasi			

KEPALA BAPELITBANGDA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

...

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda **Tahun Penilaian** **Periode yang dinilai**	**: Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman** **: 2025** **: Periode RPJMD Tahun 2025 - 2029**
Sumber Data	: RPJMD Kabupaten Padang Pariaman
Visi	: Membangun Padang Pariaman Maju dan Sejahtera
Misi Strategis RPJMD	1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas 2. Menciptakan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing 3. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju, dan Merata 4. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	1. Menciptakan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Tujuan Strategis RPJMD	Tujuan 1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas Tujuan 2 Terciptanya Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berdaya Saing dan Inklusif Tujuan 3 Meningkatnya Perekonomian Daerah yang maju dan inklusif Tujuan 4 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan, berketahanan terhadap bencana dan Perubahan Iklim Tujuan 5 Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tentram dan harmonis dala keberagaman agama
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	Tujuan 2 Terciptanya Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berdaya Saing dan Inklusif
Sasaran RPJMD	1.1 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan berdaya saing 1.2 Tercapainya masyarakat yang sehat dan produktif sesuai silus hidup 1.3 Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak 1.4 Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	1.1 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan berdaya saing 1.2 Tercapainya masyarakat yang sehat dan produktif sesuai silus hidup 1.3 Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak 1.4 Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif
IKU Sasaran RPJMD	1. Rata-rata Lama Sekolah 2. Harapan Lama Sekolah 3. Skor Literasi 4. Skor Numerasi 5. Angka Harapan Hidup 6. Angka Kematian Ibu 7. Prevalensi Stunting 8. Indeks Pembangunan Keluarga 9. Indeks Pembangunan gender (IPG) 10. Indeks Ketimpangan Gender 11. Indeks Perlindungan anak 12. Indeks Kesejahteraan Sosial
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	1. Rata-rata Lama Sekolah 2. Harapan Lama Sekolah 3. Skor Literasi 4. Skor Numerasi 5. Angka Harapan Hidup 6. Angka Kematian Ibu 7. Prevalensi Stunting 8. Indeks Pembangunan Keluarga 9. Indeks Pembangunan gender (IPG) 10. Indeks Ketimpangan Gender 11. Indeks Perlindungan anak 12. Indeks Kesejahteraan Sosial
Prioritas pembangunan dan program unggulan	I. DINAS PENDIDIKAN 1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pengembangan Kurikulum 3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan II. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 1. Pembinaan Perpustakaan III. DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA 1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan IV. DINAS KESEHATAN 1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan V. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1. Program pengendalian Penduduk 2. Program pembinaan Keluarga berencana (KB) 3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) VI. DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1. Program Perlindungan Perempuan 2. Program Perlindungan Khusus Anak
Urusan Pemerintahan Daerah	1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA 4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA 6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 7. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Nama Dinas Terkait	1. Dinas Pendidikan
	2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	3. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
	4. Dinas Kesehatan
	5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	6. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	DINAS PENDIDIKAN Tujuan 1 Terciptanya Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berdaya Saing dan Inklusif Sasaran 1.1 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan berdaya saing IKU : 1. Rata-Rata Lama SekolahAngka Harapan Hidup (AHH) 2. Harapan Lama Sekolah 3. Skor Literasi/Numerasi Program : 1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pengembangan Kurikulum 3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Tujuan 1 Terciptanya Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berdaya Saing dan Inklusif Sasaran 1.1 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan berdaya saing IKU : 1. Rata-Rata Lama SekolahAngka Harapan Hidup (AHH) 2. Harapan Lama Sekolah 3. Skor Literasi/Numerasi Program : 1. Pembinaan Perpustakaan DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA Tujuan 1 Terciptanya Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berdaya Saing dan Inklusif Sasaran 1.1 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan berdaya saing IKU : 1. Rata-Rata Lama SekolahAngka Harapan Hidup (AHH) 2. Harapan Lama Sekolah 3. Skor Literasi/Numerasi Program : 1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan DINAS KESEHATAN Tujuan 1 Terciptanya Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berdaya Saing dan Inklusif Sasaran 1.2 : Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas, baik, adil dan terjangkau Program: 1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Tujuan 1 Terciptanya Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berdaya Saing dan Inklusif Sasaran 1.3 : Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak Program: 1. Program pengendalian Penduduk 2. Program pembinaan Keluarga berencana (KB) 3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Tujuan 1 Terciptanya Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berdaya Saing dan Inklusif Sasaran 1.3 : Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak Sasaran 1.4 : Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif Program: 1. Program Perlindungan Perempuan 2. Program Perlindungan Khusus Anak

KEPALA BAPELITBANGDA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

...

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemda	**: Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman**
Nama OPD	**: OPD Pengampu Misi 2**
Tahun Penilaian	**: 2025**
Periode yang dinilai	**: 2025-2029**
Urusan Pemerintahan	**: Urusan Kesehatan, Urusan Pendidikan, Urusan Tenaga Kerja**

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	**Tujuan 2 Terciptanya Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berdaya Saing dan Inklusif**	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	Penurunan atau stagnasi nilai IPM	R-0001	Bapelitbangda / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan / Dinas Kesehatan	Rendahnya akses layanan pendidikan & kesehatan, kemiskinan yang tinggi	Internal & Eksternal	UC	Kualitas SDM menurun, daya saing daerah melemah	Masyarakat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha
2	**1.1 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan berdaya saing**	**Rata-rata Lama Sekolah (RLS)**	Rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas	R-0002	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tingginya angka putus sekolah, rendahnya minat melanjutkan pendidikan, keterbatasan fasilitas	Internal & Eksternal	C	Produktivitas tenaga kerja rendah, daya saing daerah menurun	Peserta didik, Keluarga, Dunia Usaha, Pemerintah Daerah
3	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar (APS)	Penurunan partisipasi anak dalam pendidikan dasar	R-001	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kurangnya akses pendidikan di daerah terpencil	Internal dan Eksternal	UC	Menurunnya angka partisipasi dan meningkatnya angka putus sekolah	Peserta didik, sekolah, pemerintah daerah
4	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Kurikulum muatan lokal tidak dikembangkan secara optimal	R-002	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kurangnya kapasitas guru dalam menyusun kurikulum loka	Internal	C	Kurikulum tidak kontekstual dengan kebutuhan daerah	Sekolah, peserta didik, masyarakat loka
5	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Pemerataan Guru	Kesenjangan distribusi guru antar wilayah	R-003	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketimpangan penempatan guru akibat minimnya insentif di daerah terpencil	Internal dan Eksternal	UC	Kualitas pendidikan tidak merata, berdampak pada capaian hasil belajar	Peserta didik, sekolah di daerah 3T
6		Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik	Rendahnya proporsi guru yang bersertifikat pendidik	R-004	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbatasnya anggaran pelatihan dan sertifikasi guru; kurangnya sosialisasi program sertifikasi	Internal dan Eksternal	C	Menurunnya mutu proses pembelajaran di sekolah	Peserta didik, sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Rendahnya tingkat kegemaran membaca masyarakat	R-007	Dinas Perpustakaan/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbatasnya akses terhadap bahan bacaan yang berkualitas; rendahnya budaya literasi	Internal dan Eksternal	UC	Lemahnya kapasitas literasi masyarakat yang berdampak pada kualitas SDM	Masyarakat, peserta didik, lembaga pendidikan
8	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	Rendahnya rasio wirausaha pemuda di daerah	R-010	Dinas Pemuda dan Olahraga	Minimnya akses pelatihan dan pembiayaan; rendahnya minat dan literasi kewirausahaan pemuda	Internal dan Eksternal	C	Lambatnya pertumbuhan ekonomi lokal dan tingginya angka pengangguran pemuda	Pemuda, dunia usaha, pemerintah daerah
9	**1.2 Tercapainya Masyarakat yang Sehat dan Produktif sesuai Siklus Hidup**	**Angka Harapan Hidup**	Rendahnya usia harapan hidup penduduk	R-014	Dinas Kesehatan	Angka kematian tinggi pada usia produktif dan lansia; akses layanan kesehatan belum merata	Internal dan Eksternal	UC	Kualitas hidup dan produktivitas masyarakat menurun	Penduduk, pemerintah daerah, sektor tenaga kerja
10		**Angka Kematian Ibu**	Tingginya angka kematian ibu	R-015	Dinas Kesehatan	Keterlambatan penanganan komplikasi; keterbatasan fasilitas pelayanan kesehatan ibu	Internal dan Eksternal	C	Tingginya risiko kesehatan ibu dan bayi baru lahir	Keluarga, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan
11		**Angka Kematian Balita**	Tingginya angka kematian balita	R-016	Dinas Kesehatan	Rendahnya cakupan imunisasi, gizi buruk, dan keterlambatan penanganan penyakit balita	Internal dan Eksternal	C	Meningkatnya beban kesehatan masyarakat dan risiko kehilangan generasi masa depan	Keluarga, anak-anak, sistem kesehatan
12		**Prevalensi Stunting**	Tingginya prevalensi stunting pada balita	R-017	Dinas Kesehatan	Rendahnya asupan gizi, pola pengasuhan tidak optimal, sanitasi dan air bersih belum memadai	Internal dan Eksternal	C	Gangguan tumbuh kembang anak dan rendahnya kualitas SDM jangka panjang	Balita, keluarga, masyarakat, pemerintah
13		**Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis**	Rendahnya cakupan masyarakat yang menerima pemeriksaan kesehatan gratis	R-018	Dinas Kesehatan	Minimnya sosialisasi, keterbatasan akses layanan, dan kendala administratif	Internal dan Eksternal	C	Peningkatan risiko penyakit tidak terdeteksi sejak dini	Masyarakat umum, fasilitas kesehatan, pemerintah daerah
14		**Cakupan Imunisasi bayi lengkap**	Rendahnya cakupan imunisasi bayi lengkap	R-019	Dinas Kesehatan	Kurangnya edukasi orang tua; hambatan logistik distribusi vaksin	Internal dan Eksternal	C	Risiko kejadian luar biasa penyakit menular meningkat	Bayi dan balita, keluarga, fasilitas kesehatan
15		**Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional**	Rendahnya cakupan kepesertaan aktif JKN	R-020	Dinas Kesehatan/BPJS	Kurangnya literasi JKN, hambatan pendaftaran dan pembayaran iuran	Internal dan Eksternal	C	Masyarakat tidak terlindungi secara finansial dalam pelayanan kesehatan	Masyarakat umum, fasilitas kesehatan, BPJS
16		**Angka Keberhasilan Pengobatan TB**	Rendahnya angka keberhasilan pengobatan TB	R-021	Dinas Kesehatan	Kepatuhan pasien rendah; kurang pengawasan petugas dan ketersediaan obat	Internal dan Eksternal	C	Potensi meningkatnya kasus TB aktif dan resistensi obat tinggi	Penderita TB, keluarga, masyarakat sekitar
17		**Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	Rendahnya proporsi penderita hipertensi yang mendapat layanan sesuai standar	R-022	Dinas Kesehatan	Deteksi dini kurang, keterbatasan SDM dan sarana di puskesmas	Internal dan Eksternal	C	Komplikasi penyakit tidak menular meningkat (stroke, ginjal, jantung)	Penderita hipertensi, keluarga, layanan kesehatan

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
18		**Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup**	Rendahnya proporsi penduduk yang melakukan aktivitas fisik cukup	R-023	Dinas Kesehatan	Gaya hidup sedentari; minimnya edukasi dan fasilitas olahraga publik	Internal dan Eksternal	UC	Peningkatan risiko penyakit tidak menular dan beban kesehatan jangka panjang	Masyarakat umum, tenaga kerja, pemerintah daerah
19	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun	Tingginya prevalensi depresi pada penduduk usia ≥ 15 tahun	R-024	Dinas Kesehatan	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan jiwa; kurangnya layanan psikososial	Internal dan Eksternal	C	Kualitas hidup dan produktivitas masyarakat terganggu	Masyarakat umum, fasilitas kesehatan, keluarga
20		Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	Rendahnya cakupan desa/kelurahan dengan sanitasi total berbasis masyarakat	R-025	Dinas Kesehatan	Perilaku hidup bersih rendah; keterbatasan infrastruktur dan pendampingan STBM	Internal dan Eksternal	C	Tingginya risiko penyakit berbasis lingkungan seperti diare dan stunting	Masyarakat desa/kelurahan, dinas kesehatan, pemerintah desa
21		Prevalensi Obesitas ≥ 18 tahun	Tingginya prevalensi obesitas pada usia ≥ 18 tahun	R-026	Dinas Kesehatan	Perubahan pola konsumsi, aktivitas fisik rendah, kurangnya edukasi gizi	Internal dan Eksternal	UC	Meningkatnya risiko penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi	Penduduk dewasa, fasilitas kesehatan, dunia kerja
22		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Rendahnya proporsi fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	R-027	Dinas Kesehatan	Keterbatasan sarana, prasarana, dan SDM serta belum optimalnya pengawasan	Internal dan Eksternal	C	Penurunan mutu pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan	Masyarakat pengguna layanan, fasilitas kesehatan, pemerintah daerah
23		Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	Rendahnya tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	R-028	Dinas Kesehatan	Pelayanan belum optimal; komunikasi, kecepatan, dan kenyamanan belum memadai	Internal	C	Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan	Pasien, keluarga pasien, tenaga kesehatan
24		Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	Rendahnya persentase tempat pengelolaan pangan yang memenuhi syarat	R-029	Dinas Kesehatan	Kurangnya pengawasan sanitasi pangan dan kesadaran pengelola	Internal dan Eksternal	C	Risiko penyakit akibat makanan meningkat (keracunan, diare, hepatitis)	Konsumen, masyarakat, pelaku usaha pangan
25		Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	Rendahnya integrasi fasilitas kesehatan dalam sistem informasi kesehatan nasional	R-030	Dinas Kesehatan	Belum semua fasilitas terhubung digital; keterbatasan SDM dan perangkat TIK	Internal dan Eksternal	C	Pelaporan data kesehatan tidak akurat dan menghambat perencanaan berbasis data	Pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, Kemenkes
26		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	Rendahnya proporsi fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi paripurna	R-031	Dinas Kesehatan	Kurangnya pendampingan dan kesiapan fasilitas dalam memenuhi standar akreditasi	Internal dan Eksternal	C	Mutu layanan tidak terstandar dan berisiko menurun	Pasien, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan
27		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	Rendahnya ketersediaan perbekalan kesehatan sesuai standar di fasilitas pelayanan	R-032	Dinas Kesehatan	Distribusi tidak merata, sistem logistik belum optimal, kendala pengadaan	Internal dan Eksternal	C	Gangguan dalam pelayanan kesehatan dan meningkatnya risiko medis	Pasien, tenaga medis, fasilitas kesehatan
28		Persentase lanjut usia yang mandiri	Rendahnya proporsi lanjut usia yang mandiri	R-033	Dinas Kesehatan	Terbatasnya program pelayanan kesehatan lansia dan dukungan keluarga	Internal dan Eksternal	C	Ketergantungan tinggi pada keluarga dan meningkatnya beban sosial dan ekonomi	Lansia, keluarga, pemerintah daerah
29		Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	Tingginya prevalensi merokok pada penduduk usia 10–21 tahun	R-034	Dinas Kesehatan dan OPD Terkait	Pengawasan iklan rokok lemah; minimnya edukasi bahaya merokok pada remaja	Internal dan Eksternal	UC	Meningkatnya risiko penyakit kronis sejak usia muda dan beban pembiayaan kesehatan	Remaja, keluarga, fasilitas pendidikan, pemerintah
30		Cakupan penemuan kasus TB	Rendahnya cakupan penemuan kasus TB	R-035	Dinas Kesehatan	Tidak aktifnya pelacakan kontak dan pemeriksaan rutin; stigma masyarakat	Internal dan Eksternal	C	Potensi penyebaran TB tetap tinggi dan pengobatan tidak tuntas	Penderita TB, keluarga, masyarakat umum
31		Angka Kematian 48 Jam setelah dirawat untuk setiap 1000 penderita keluar dari Rumah Sakit	Tingginya angka kematian dalam 48 jam setelah perawatan rumah sakit	R-036	Dinas Kesehatan/Pengelola RS	Keterlambatan deteksi kondisi kritis; mutu pelayanan RS belum optimal	Internal dan Eksternal	C	Turunnya kepercayaan terhadap layanan RS dan potensi tuntutan hukum	Pasien, keluarga, rumah sakit, pemerintah
32		Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rendahnya rasio daya tampung rumah sakit rujukan terhadap kebutuhan layanan	R-037	Dinas Kesehatan/Kemenkes/Kemendagri	Pertumbuhan pasien lebih cepat dari perluasan kapasitas layanan	Internal dan Eksternal	UC	Kepadatan layanan, antrean panjang, penurunan mutu dan keselamatan pasien	Pasien rujukan, rumah sakit, tenaga medis
33	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar	Rendahnya tingkat pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar	R-041	Dinas Kesehatan/Pertanian/Koperasi	Pelaku usaha belum memahami regulasi; lemahnya pembinaan dan pengawasan	Internal dan Eksternal	C	Risiko peredaran produk pangan rumah tangga yang tidak aman dan tidak bermutu	Masyarakat konsumen, pelaku usaha IRTP, pemerintah daerah
34		Persentase pangan industri rumah tanggan aman dan bermutu	Tingginya proporsi pangan industri rumah tangga yang tidak aman dan tidak bermutu	R-042	Dinas Kesehatan/Koperasi/Pertanian	Pengawasan dan pembinaan belum menyeluruh; lemahnya kesadaran pelaku usaha	Internal dan Eksternal	C	Potensi gangguan kesehatan masyarakat dan turunnya kepercayaan konsumen	Masyarakat umum, pelaku industri rumah tangga, dinas teknis
35		Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	Rendahnya persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan sanitasi dan higiene	R-043	Dinas Kesehatan dan OPD terkait	Fasilitas produksi belum memadai; keterbatasan pendampingan teknis dan modal	Internal dan Eksternal	C	Risiko keamanan pangan meningkat dan produk tidak kompetitif di pasar	Produsen IRTP, konsumen, dinas teknis
36		Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	Apotek dan toko obat tidak memenuhi persyaratan perizinan secara berkelanjutan	R-044	Dinas Kesehatan	Lemahnya pengawasan, administrasi perizinan belum sepenuhnya digital	Internal dan Eksternal	C	Potensi peredaran obat yang tidak sesuai standar dan hilangnya akuntabilitas layanan	Masyarakat pengguna, tenaga farmasi, pemerintah daerah
37		Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	Rendahnya tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan lintas sektor	R-045	Dinas Kesehatan, lintas OPD	Koordinasi antar OPD belum efektif; lemahnya mekanisme pengendalian dan pelaporan	Internal dan Eksternal	C	Rekomendasi pengawasan tidak berdampak signifikan; peredaran produk berisiko tetap terjadi	Pemerintah daerah, masyarakat, pelaku usaha

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
38	Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan	Rendahnya tingkat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan	R-047	Dinas Kesehatan	Minimnya pelatihan dan fasilitasi kader; kurangnya sinergi dengan lembaga lokal	Internal dan Eksternal	C	Partisipasi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif kesehatan menjadi lemah	Masyarakat, kader kesehatan, fasilitas pelayanan, pemerintah daerah
39	**1.3 Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak**	**Indeks Pembangunan Keluarga**	Rendahnya nilai Indeks Pembangunan Keluarga	R-048	DinsosP3A	Ketimpangan peran dalam keluarga; keterbatasan akses layanan dan pendidikan keluarga	Internal dan Eksternal	C	Menurunnya kualitas ketahanan keluarga dan risiko disfungsi sosial meningkat	Keluarga, anak-anak, remaja, masyarakat luas
40		**Indeks Pembangunan Gender (IPG)**	Rendahnya capaian Indeks Pembangunan Gender	R-049	DinsosP3A dan OPD Terkait	Kesenjangan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan	Internal dan Eksternal	C	Ketidaksetaraan gender berlanjut dan menghambat pembangunan inklusif	Perempuan, laki-laki, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah
41		**Indeks Ketimpangan Gender (IKG)**	Tingginya nilai Indeks Ketimpangan Gender	R-050	DinsosP3A dan OPD Terkait	Perempuan kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan; partisipasi rendah di ekonomi formal	Internal dan Eksternal	C	Perempuan kurang terlindungi secara sosial, ekonomi, dan politik	Perempuan, rumah tangga, dunia kerja, pemerintah
42		**Indeks Perlindungan Anak (IPA)**	Rendahnya capaian Indeks Perlindungan Anak	R-051	DinsosP3A dan Lintas Sektor	Lemahnya sistem pelaporan kekerasan; belum meratanya layanan perlindungan anak	Internal dan Eksternal	C	Anak rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan pengabaian	Anak-anak, keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah daerah
43	Program pengendalian Penduduk	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Wanita	Rendahnya median usia kawin pertama wanita	R-052	DPPKB dan OPD Terkait	Norma budaya dan sosial; kurangnya edukasi kesehatan reproduksi dan perlindungan anak	Internal dan Eksternal	C	Peningkatan risiko pernikahan dini, putus sekolah, dan komplikasi kehamilan remaja	Remaja perempuan, keluarga, sistem pendidikan, layanan kesehatan
44		Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Rendahnya capaian Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	R-053	DPPKB dan Bapelitbangda	Pemanfaatan data kependudukan belum optimal dalam perencanaan; koordinasi sektoral lemah	Internal dan Eksternal	C	Pengambilan kebijakan tidak berbasis demografi; pembangunan tidak adaptif terhadap dinamika kependudukan	Pemerintah daerah, masyarakat umum, perencana pembangunan
45	Program pembinaan Keluarga berencana (KB)	Proprosi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (*Proportion Of Demand Satisfied by Modern Methods*)	Rendahnya proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi dengan metode modern	R-054	DPPKB dan Fasilitas Kesehatan	Terbatasnya akses dan informasi terkait metode kontrasepsi modern; stigma penggunaan KB	Internal dan Eksternal	C	Peningkatan kehamilan tidak direncanakan dan gangguan perencanaan keluarga	Keluarga, pasangan usia subur, layanan kesehatan
46		Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Tingginya persentase kehamilan tidak direncanakan	R-055	DPPKB dan Dinas Kesehatan	Rendahnya edukasi KB; keterbatasan akses alat kontrasepsi dan layanan konseling	Internal dan Eksternal	C	Meningkatnya risiko kesehatan ibu dan anak serta tekanan ekonomi rumah tangga	Ibu, keluarga, fasilitas kesehatan
47		Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Rendahnya persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang mandiri	R-056	DPPKB dan Pemerintah Desa	Kurangnya dukungan lintas sektor; partisipasi masyarakat rendah; keterbatasan fasilitator	Internal dan Eksternal	C	Program pembangunan keluarga tidak berkelanjutan dan berdaya guna	Masyarakat desa, kader, pemerintah daerah
48		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Tingginya persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	R-057	DPPKB dan OPD Terkait	Kurangnya layanan konseling dan distribusi alat kontrasepsi terutama di daerah pinggiran	Internal dan Eksternal	C	Potensi kenaikan angka kelahiran dan beban demografi meningkat	Pasangan usia subur, keluarga, penyedia layanan KB
49		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Rendahnya prevalensi penggunaan kontrasepsi modern	R-058	DPPKB dan Fasilitas Kesehatan	Kurangnya edukasi, preferensi metode tradisional, dan keterbatasan pilihan alat KB	Internal dan Eksternal	C	Peningkatan kehamilan tidak direncanakan dan ketidaktercapaian target TFR	Pasangan usia subur, keluarga, layanan kesehatan
50	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Rendahnya partisipasi keluarga dalam kelompok kegiatan ketahanan keluarga	R-059	DPPKB dan Pemerintah Desa/Kelurahan	Minimnya sosialisasi, kurangnya motivasi dan dukungan lingkungan	Internal dan Eksternal	C	Menurunnya kapasitas keluarga dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi	Keluarga, masyarakat, kader pembina keluarga
51		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Tingginya angka kelahiran remaja usia 15–19 tahun	R-060	DPPKB dan Dinas Kesehatan	Edukasi kesehatan reproduksi rendah; pengawasan keluarga lemah	Internal dan Eksternal	C	Risiko putus sekolah, kemiskinan, dan komplikasi kehamilan meningkat	Remaja perempuan, keluarga, sistem kesehatan dan pendidikan
52		Indeks Lansia Berdaya	Rendahnya capaian Indeks Lansia Berdaya	R-061	DPPKB dan DinsosP3A	Lansia kurang mendapat ruang produktif dan akses pelayanan publik terbatas	Internal dan Eksternal	C	Kualitas hidup lansia menurun dan ketergantungan meningkat	Lansia, keluarga, komunitas, penyedia layanan sosial dan kesehatan
53		Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Rendahnya capaian Indeks Pengasuhan Keluarga dengan Remaja	R-062	DPPKB dan Lembaga Pendidikan	Keluarga belum dibekali keterampilan pengasuhan remaja; minim pendampingan psikososial	Internal dan Eksternal	C	Konflik antar generasi dan risiko perilaku menyimpang remaja meningkat	Remaja, orang tua, sekolah, masyarakat sekitar
54	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Pembelajaran keluarga (puspaga) yang berspektif Gender dan Hak Anak sesuai standar	Rendahnya pelaksanaan pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif Gender dan Hak Anak sesuai standar	R-065	DPPKB dan Pemerintah Daerah	Ketersediaan SDM dan fasilitator terbatas; belum semua daerah memiliki Puspaga yang aktif dan terstandar	Internal dan Eksternal	C	Keluarga kurang mendapat dukungan pengasuhan dan perlindungan anak berbasis hak serta kesetaraan gender	Keluarga, anak-anak, orang tua, komunitas, pemerintah daerah
55	Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Rendahnya persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	R-066	DinsosP3A, UPTD PPA, dan OPD Terkait	Terbatasnya akses layanan, keterbatasan SDM terlatih, dan stigma terhadap korban kekerasan	Internal dan Eksternal	C	Perempuan korban kekerasan tidak mendapatkan pemulihan optimal dan rawan reviktimisasi	Perempuan korban, keluarga korban, penyedia layanan, masyarakat
56	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layana komprehensif	Rendahnya persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan mendapatkan layanan komprehensif	R-067	DinsosP3A, UPTD PPA, dan OPD Terkait	Keterbatasan sistem rujukan dan layanan terpadu; belum meratanya jangkauan layanan	Internal dan Eksternal	C	Pemenuhan hak dan perlindungan anak rentan terabaikan, meningkatkan risiko kekerasan lanjutan	Anak-anak, keluarga, penyedia layanan, pemerintah daerah

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
57		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	Rendahnya persentase anak korban kekerasan yang ditangani oleh instansi terkait	R-068	DinsosP3A, UPTD PPA, Aparat Penegak Hukum	Rendahnya pelaporan kasus; stigma sosial dan ketakutan keluarga korban; koordinasi belum optimal	Internal dan Eksternal	C	Anak korban kekerasan tidak mendapatkan keadilan dan pemulihan yang layak	Anak-anak, keluarga korban, lembaga layanan dan perlindungan anak
58	**1.4 Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif**	**Persentase Pemberian Bantuan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**	Rendahnya persentase pemberian bantuan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	R-069	Dinas Sosial dan OPD Terkait	Validasi data PPKS belum optimal; keterbatasan anggaran dan jangkauan layanan	Internal dan Eksternal	C	PPKS tidak mendapatkan bantuan yang sesuai, berpotensi meningkatkan kerentanan sosial dan eksklusi sosial	Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), masyarakat, penyedia layanan sosial

KEPALA BAPELITBANGDA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

...

Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda	**: Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman**
Tahun Penilaian	**: 2025**
Tujuan Strategis	**: Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing**
Urusan Pemerintahan	**: Urusan Kesehatan, Urusan Pendidikan, Urusan Tenaga Kerja**

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	R-0001	5	3	15
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	R-0002	4	4	16
3	Penurunan partisipasi anak dalam pendidikan dasar	R-001	5	3	15
4	Kurikulum muatan lokal tidak dikembangkan secara optimal	R-002	4	4	16
5	Kesenjangan distribusi guru antar wilayah	R-003	4	4	16
6	Rendahnya proporsi guru yang bersertifikat pendidik	R-004	3	4	12
7	Rendahnya tingkat kegemaran membaca masyaraka	R-007	4	4	16
8	Rendahnya rasio wirausaha pemuda di daerah	R-010	4	4	16
9	Rendahnya usia harapan hidup penduduk	R-014	5	3	15
10	Tingginya angka kematian ibu	R-015	5	4	20
11	Tingginya angka kematian balita	R-016	5	4	20
12	Tingginya prevalensi stunting pada balita	R-017	5	5	25
13	Rendahnya cakupan masyarakat yang menerima pemeriksaan kesehatan gratis	R-018	4	4	16
14	Rendahnya cakupan imunisasi bayi lengkap	R-019	5	4	20
15	Rendahnya cakupan kepesertaan aktif JKN	R-020	4	4	16
16	Rendahnya angka keberhasilan pengobatan TB	R-021	5	3	15
17	Rendahnya proporsi penderita hipertensi yang mendapat layanan sesuai standar	R-022	4	4	16
18	Rendahnya proporsi penduduk yang melakukan aktivitas fisik cukup	R-023	3	4	12
19	Tingginya prevalensi depresi pada penduduk usia ≥ 15 tahun	R-024	4	4	16
20	Rendahnya cakupan desa/kelurahan dengan sanitasi total berbasis masyarakat	R-025	4	4	16
21	Tingginya prevalensi obesitas pada usia ≥ 18 tahun	R-026	4	3	12

22	Rendahnya proporsi fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	R-027	4	4	16
23	Rendahnya tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	R-028	4	3	12
24	Rendahnya persentase tempat pengelolaan pangan yang memenuhi syarat	R-029	3	3	9
25	Rendahnya integrasi fasilitas kesehatan dalam sistem informasi kesehatan nasional	R-030	3	4	12
26	Rendahnya proporsi fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi paripurna	R-031	4	4	16
27	Rendahnya ketersediaan perbekalan kesehatan sesuai standar di fasilitas pelayanan	R-032	4	4	16
28	Rendahnya proporsi lanjut usia yang mandiri	R-033	4	3	12
29	Tingginya prevalensi merokok pada penduduk usia 10–21 tahun	R-034	4	4	16
30	Rendahnya cakupan penemuan kasus TB	R-035	5	3	15
31	Tingginya angka kematian dalam 48 jam setelah perawatan rumah sakit	R-036	5	3	15
32	Rendahnya rasio daya tampung rumah sakit rujukan terhadap kebutuhan layanan	R-037	5	4	20
33	Rendahnya tingkat pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar	R-041	4	3	12
34	Tingginya proporsi pangan industri rumah tangga yang tidak aman dan tidak bermutu	R-042	4	4	16
35	Rendahnya persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan sanitasi dan higiene	R-043	4	3	12
36	Apotek dan toko obat tidak memenuhi persyaratan perizinan secara berkelanjutan	R-044	4	4	16
37	Rendahnya tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan lintas sektor	R-045	3	3	9
38	Rendahnya tingkat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan	R-047	4	3	12
39	Rendahnya nilai Indeks Pembangunan Keluarga	R-048	4	3	12
40	Rendahnya capaian Indeks Pembangunan Gender	R-049	4	3	12
41	Tingginya nilai Indeks Ketimpangan Gender	R-050	4	3	12
42	Rendahnya capaian Indeks Perlindungan Anak	R-051	4	4	16
43	Rendahnya median usia kawin pertama wanita	R-052	3	4	12
44	Rendahnya capaian Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	R-053	4	3	12
45	Rendahnya proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi dengan metode modern	R-054	4	4	16
46	Tingginya persentase kehamilan tidak direncanakan	R-055	4	4	16
47	Rendahnya persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang mandiri	R-056	3	3	9
48	Tingginya persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	R-057	4	4	16

49	Rendahnya prevalensi penggunaan kontrasepsi modern	R-058	4	4	16
50	Rendahnya partisipasi keluarga dalam kelompok kegiatan ketahanan keluarga	R-059	4	3	12
51	Tingginya angka kelahiran remaja usia 15–19 tahun	R-060	4	4	16
52	Rendahnya capaian Indeks Lansia Berdaya	R-061	4	4	16
53	Rendahnya capaian Indeks Pengasuhan Keluarga dengan Remaja	R-062	4	3	12
54	Rendahnya pelaksanaan pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif Gender dan Hak Anak sesuai standar	R-065	3	3	9
55	Rendahnya persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	R-066	3	3	9
56	Rendahnya persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan mendapatkan layanan komprehensif	R-067	4	3	12
57	Rendahnya persentase anak korban kekerasan yang ditangani oleh instansi terkait	R-068	4	4	16
58	Rendahnya persentase pemberian bantuan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	R-069	4	4	16

KEPALA BAPELITBANGDA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

...

Kertas Kerja

Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda : **Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman**

Tahun Penilaian : **2025**

Tujuan Strategis : **Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing**

Urusan Pemerintahan : **Urusan Kesehatan, Urusan Pendidikan, Urusan Tenaga Kerja**

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
1	Rendahnya usia harapan hidup penduduk	R-014	25	Dinas Kesehatan	Masih rendahnya akses pelayanan kesehatan yang merata, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan	Rendahnya angka harapan hidup dan meningkatnya beban penyakit kronis
2	Penurunan partisipasi anak dalam pendidikan dasar	R-001	20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Faktor ekonomi, budaya, dan keterbatasan akses transportasi ke sekolah	Tingginya angka putus sekolah dan rendahnya capaian rata-rata lama sekolah
3	Tingginya angka kematian ibu	R-015	20	Dinas Kesehatan	Minimnya kualitas layanan kesehatan ibu hamil dan pasca melahirkan	Tingginya angka kematian ibu dan meningkatnya risiko komplikasi kehamilan
4	Tingginya angka kematian balita	R-016	20	Dinas Kesehatan	Minimnya layanan kesehatan neonatal dan gizi buruk balita	Tingginya angka kematian bayi dan balita serta menurunnya kualitas generasi penerus
5	Rendahnya cakupan imunisasi bayi lengkap	R-019	20	Dinas Kesehatan	Belum optimalnya sistem imunisasi dasar dan distribusi vaksin	Rentannya balita terhadap penyakit menular yang seharusnya bisa dicegah
6	Rendahnya rasio daya tampung rumah sakit rujukan terhadap kebutuhan layanan	R-037	20	Dinas Kesehatan	Terbatasnya kapasitas rumah sakit rujukan daerah, termasuk ruang rawat inap dan ICU	Overload layanan di rumah sakit, meningkatkan angka rujukan keluar daerah
7	Rendahnya rasio tenaga kesehatan dan medis terhadap populasi	R-038	20	Dinas Kesehatan	Kekurangan tenaga kesehatan dan penyebaran tidak merata	Menurunnya mutu layanan dasar kesehatan terutama di wilayah pedesaan
8	Rendahnya persentase puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar	R-039	20	Dinas Kesehatan	Belum semua puskesmas memiliki SDM sesuai standar nasional pelayanan dasar	Menurunnya kualitas pelayanan dan tidak terpenuhinya standar akreditasi
9	Kurangnya rumah sakit pemerintah yang memiliki dokter spesialis sesuai standar	R-040	20	Dinas Kesehatan	Terbatasnya jumlah RS pemerintah dengan spesialis lengkap	Menurunnya kemampuan layanan kesehatan tingkat lanjut bagi masyarakat
10	Rendahnya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana	R-092	20	DINSOSP3A	Kurangnya koordinasi lintas sektor dalam penyediaan layanan dasar saat bencana	Pengungsi tidak mendapatkan layanan memadai, memperburuk dampak bencana
11	Rendahnya tingkat graduasi keluarga miskin dan rentan dari program perlindungan sosial	R-091	16	DINSOSP3A	Kurangnya pendampingan dan pemberdayaan berkelanjutan untuk KPM	Rendahnya keberhasilan keluarga keluar dari kemiskinan atau ketergantungan program
12	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	R-0001	16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapelitbangda	Masih rendahnya akses atau ketertarikan masyarakat terhadap pendidikan lanjut, Keterbatasan sarana & tenaga pendidik, Jarak sekolah jauh ke akses pendidikan menengah	Produktivitas dan kualitas SDM daerah turun, Daya saing SDM menurun di level regional dan nasional
13	Kurikulum muatan lokal tidak dikembangkan secara optimal	R-002	16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kurangnya regulasi dan dukungan terhadap pengembangan konten lokal dalam kurikulum	Hilangnya identitas budaya lokal dan kurangnya relevansi pendidikan dengan kondisi daerah
14	Kesenjangan distribusi guru antar wilayah	R-003	16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penempatan guru tidak merata dan kurangnya insentif di wilayah 3T	Ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah dan rendahnya prestasi belajar siswa
15	Rendahnya tingkat kegemaran membaca masyaraka	R-007	16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kurangnya budaya literasi di lingkungan keluarga dan sekolah	Rendahnya minat baca siswa dan rendahnya hasil literasi nasional

16	Rendahnya rasio wirausaha pemuda di daerah	R-010	16	Dinas Pemuda dan Olahraga	Minimnya program kewirausahaan pemuda dan keterbatasan akses modal	Rendahnya jumlah wirausaha muda dan tingginya angka pengangguran usia produktif
17	Rendahnya cakupan masyarakat yang menerima pemeriksaan kesehatan gratis	R-018	16	Dinas Kesehatan	Terbatasnya informasi dan layanan pemeriksaan gratis di fasilitas kesehatan	Rendahnya kesadaran deteksi dini penyakit dan meningkatnya beban pembiayaan masyarakat
18	Rendahnya cakupan kepesertaan aktif JKN	R-020	16	Dinas Kesehatan	Belum optimalnya sosialisasi dan kepesertaan aktif dalam program JKN	Rendahnya akses jaminan kesehatan dan tingginya out of pocket masyarakat
19	Rendahnya proporsi penderita hipertensi yang mendapat layanan sesuai standar	R-022	16	Dinas Kesehatan	Belum optimalnya manajemen layanan hipertensi dan keterbatasan fasilitas	Rendahnya kontrol tekanan darah dan peningkatan komplikasi penyakit kardiovaskular
20	Tingginya prevalensi depresi pada penduduk usia ≥ 15 tahun	R-024	16	Dinas Kesehatan	Minimnya deteksi dan penanganan dini gangguan mental ringan sampai berat	Meningkatnya kasus depresi tidak tertangani dan penurunan produktivitas
21	Rendahnya cakupan desa/kelurahan dengan sanitasi total berbasis masyarakat	R-025	16	Dinas Kesehatan	Rendahnya cakupan STBM dan minimnya kesadaran masyarakat	Meningkatnya penyakit berbasis lingkungan seperti diare dan ISPA
22	Rendahnya proporsi fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	R-027	16	Dinas Kesehatan	Tidak semua fasilitas pelayanan memenuhi syarat akreditasi sesuai standar	Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan
23	Rendahnya proporsi fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi paripurna	R-031	16	Dinas Kesehatan	Terbatasnya jumlah fasilitas kesehatan yang mendapat akreditasi paripurna	Rendahnya standar mutu layanan dan risiko hukum bagi fasilitas layanan
24	Rendahnya ketersediaan perbekalan kesehatan sesuai standar di fasilitas pelayanan	R-032	16	Dinas Kesehatan	Distribusi dan pengadaan logistik medis belum berjalan optimal	Seringnya terjadi kekosongan obat/alat medis dan terganggunya pelayanan pasien
25	Tingginya prevalensi merokok pada penduduk usia 10–21 tahun	R-034	16	Dinas Kesehatan	Tingginya paparan iklan rokok, lemahnya pengawasan, dan kurangnya edukasi kesehatan	Meningkatnya risiko penyakit tidak menular sejak usia muda dan menurunnya kualitas generasi muda
26	Tingginya proporsi pangan industri rumah tangga yang tidak aman dan tidak bermutu	R-042	16	Dinas Kesehatan	Belum optimalnya pengawasan keamanan pangan dan rendahnya pemahaman pelaku usaha rumah tangga tentang standar pangan	Ancaman keracunan makanan dan meningkatnya risiko gangguan kesehatan masyarakat
27	Apotek dan toko obat tidak memenuhi persyaratan perizinan secara berkelanjutan	R-044	16	Dinas Kesehatan	Lemahnya sistem pemantauan izin dan tidak berkelanjutannya proses pengawasan perizinan	Distribusi obat tidak aman dan hilangnya kepercayaan masyarakat pada pelayanan farmasi
28	Rendahnya capaian Indeks Perlindungan Anak	R-051	16	DINSOSP3A	Belum optimalnya kebijakan, edukasi, dan perlindungan anak dalam aspek sosial dan hukum	Rendahnya kesejahteraan anak dan meningkatnya risiko kekerasan serta eksploitasi
29	Rendahnya proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi dengan metode modern	R-054	16	Dinas Kesehatan	Kurangnya akses dan penyuluhan tentang metode KB modern di wilayah terpencil	Tingginya risiko kehamilan tidak direncanakan dan peningkatan angka kelahiran
30	Tingginya persentase kehamilan tidak direncanakan	R-055	16	Dinas Kesehatan	Kurangnya edukasi dan layanan perencanaan keluarga yang inklusif	Menurunnya kesehatan ibu dan anak serta tingginya beban ekonomi keluarga
31	Tingginya persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	R-057	16	Dinas Kesehatan	Kurangnya distribusi layanan KB dan informasi yang tidak menyeluruh	Angka kelahiran tinggi dan meningkatnya kebutuhan akan layanan dasar
32	Rendahnya prevalensi penggunaan kontrasepsi modern	R-058	16	Dinas Kesehatan	Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap metode KB modern dan keterbatasan tenaga kesehatan	Angka kehamilan tidak direncanakan tetap tinggi, berdampak pada kesejahteraan ibu-anak
33	Tingginya angka kelahiran remaja usia 15–19 tahun	R-060	16	DPPKB	Edukasi seksual dan kesehatan reproduksi belum menyentuh kelompok remaja secara efektif	Tingginya risiko komplikasi kehamilan remaja dan meningkatnya angka putus sekolah
34	Rendahnya capaian Indeks Lansia Berdaya	R-061	16	DPPKB	Minimnya program pemberdayaan lansia dan kurangnya keterlibatan dalam kegiatan sosial dan ekonomi	Meningkatnya ketergantungan lansia dan rendahnya kesejahteraan sosial kelompok lansia
35	Rendahnya persentase anak korban kekerasan yang ditangani oleh instansi terkait	R-068	16	DINSOSP3A	Lemahnya sistem pelaporan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak	Anak korban kekerasan tidak mendapat perlindungan dan berisiko mengalami trauma jangka panjang
36	Rendahnya persentase pemberian bantuan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	R-069	16	DINSOSP3A	Distribusi bantuan belum merata dan data PPKS belum diperbaharui secara berkala	Peningkatan kerentanan kelompok rentan dan ketimpangan kesejahteraan sosial

KEPALA BAPELITBANGDA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

...

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)

Nama Pemda : **Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman**
Tahun Penilaian : **2025**
Tujuan Strategis : **Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing**
Urusan Pemerintahan : **Urusan Kesehatan, Urusan Pendidikan, Urusan Tenaga Kerja**

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penangungg Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	**Risiko Strategis**						
1	Rendahnya usia harapan hidup penduduk	R-014	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar	1. Akses layanan kesehatan belum merata; 2. Perilaku hidup sehat masyarakat masih rendah	1. Meningkatkan promosi kesehatan dan PHBS; 2. Meningkatkan fasilitas layanan kesehatan di daerah terpencil; 3. Pelatihan tenaga kesehatan komunitas	Dinas Kesehatan	2025-2029
2	Penurunan partisipasi anak dalam pendidikan dasar	R-001	Optimalisasi program wajib belajar	1. Partisipasi anak pada pendidikan dasar menurun di beberapa wilayah; 2. Faktor ekonomi keluarga menghambat kehadiran siswa	1. Pemberian bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu; 2. Kampanye pentingnya pendidikan dasar; 3. Penguatan peran guru dan pengawas sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2025-2029
3	Tingginya angka kematian ibu	R-015	Penguatan layanan kesehatan ibu	1. Cakupan pemeriksaan kehamilan belum optimal; 2. Ketersediaan tenaga bidan di daerah terpencil rendah	1. Menambah tenaga kesehatan di daerah kurang terlayani; 2. Pelatihan bidan dan tenaga kesehatan; 3. Penguatan rujukan kasus risiko tinggi	Dinas Kesehatan	2025-2029
4	Tingginya angka kematian balita	R-016	Penguatan layanan kesehatan balita	1. Cakupan pemantauan tumbuh kembang belum optimal; 2. Masih tingginya balita gizi buruk	1. Peningkatan layanan posyandu; 2. Penyediaan suplementasi gizi; 3. Edukasi gizi kepada orang tua	Dinas Kesehatan	2025-2029
5	Rendahnya cakupan imunisasi bayi lengkap	R-019	Pemenuhan program imunisasi	1. Kesadaran orang tua terhadap imunisasi masih rendah; 2. Distribusi vaksin belum merata	1. Sosialisasi manfaat imunisasi; 2. Peningkatan logistik vaksin; 3. Pelatihan petugas imunisasi	Dinas Kesehatan	2025-2029
6	Rendahnya rasio daya tampung rumah sakit rujukan terhadap kebutuhan layanan	R-037	Penguatan kapasitas rumah sakit rujukan	1. Jumlah tempat tidur rumah sakit rujukan belum mencukupi; 2. Distribusi rumah sakit belum merata	1. Pembangunan/penambahan ruang rawat inap; 2. Optimalisasi peran RSUD; 3. Kerjasama dengan RS swasta	Dinas Kesehatan	2025-2029
7	Rendahnya rasio tenaga kesehatan dan medis terhadap populasi	R-038	Pemenuhan SDM kesehatan	1. Rasio tenaga medis terhadap populasi masih rendah; 2. Distribusi tenaga medis belum merata	1. Rekrutmen tenaga medis baru; 2. Distribusi tenaga medis sesuai kebutuhan; 3. Insentif untuk daerah terpencil	Dinas Kesehatan	2025-2029
8	Rendahnya persentase puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar	R-039	Pemenuhan SDM puskesmas sesuai standar	1. Beberapa puskesmas tidak memiliki tenaga sesuai standar; 2. Tingginya rotasi pegawai berdampak pada pelayanan	1. Rekrutmen dan penempatan SDM sesuai standar; 2. Pelatihan tenaga puskesmas; 3. Peningkatan insentif	Dinas Kesehatan	2025-2029
9	Kurangnya rumah sakit pemerintah yang memiliki dokter spesialis sesuai standar	R-040	Pemenuhan dokter spesialis di RS pemerintah	1. Beberapa RS belum memiliki spesialis lengkap; 2. Distribusi dokter spesialis belum merata	1. Rekrutmen dokter spesialis; 2. Penempatan berdasarkan kebutuhan daerah; 3. Kerjasama pendidikan spesialis	Dinas Kesehatan	2025-2029
10	Rendahnya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana	R-092	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	1. Stok logistik darurat terbatas; 2. Koordinasi antar instansi belum optimal	1. Penyediaan gudang logistik bencana; 2. Pelatihan relawan; 3. Perbaikan SOP penyaluran bantuan	DINSOSP3A	2025-2029
11	Rendahnya tingkat graduasi keluarga miskin dan rentan dari program perlindungan sosial	R-091	Peningkatan graduasi keluarga miskin dari perlindungan sosial	1. Ketergantungan pada bantuan masih tinggi; 2. Akses terhadap lapangan kerja terbatas	1. Program pemberdayaan ekonomi keluarga; 2. Pelatihan keterampilan kerja; 3. Fasilitasi akses ke permodalan	DINSOSP3A	2025-2029
12	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	R-0001	Beasiswa, program wajib belajar, kerja sama lintas instansi.	Jangkauan program belum merata, transportasi terbatas.	Perluasan beasiswa, transportasi siswa, e-learning.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapelitbangda	2025-2029
13	Kurikulum muatan lokal tidak dikembangkan secara optimal	R-002	Pengembangan kurikulum muatan lokal	1. Kurikulum muatan lokal belum diperbarui; 2. Tenaga pendidik kurang pelatihan untuk materi lokal	1. Review kurikulum muatan lokal; 2. Pelatihan guru untuk implementasi kurikulum; 3. Integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2025-2029
14	Kesenjangan distribusi guru antar wilayah	R-003	Pemerataan distribusi guru	1. Kesenjangan jumlah guru antar wilayah; 2. Guru enggan ditempatkan di daerah terpencil	1. Penataan distribusi guru; 2. Insentif bagi guru di daerah terpencil; 3. Rekrutmen guru sesuai kebutuhan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2025-2029
15	Rendahnya tingkat kegemaran membaca masyaraka	R-007	Peningkatan minat baca masyarakat	1. Akses terhadap bahan bacaan terbatas; 2. Budaya membaca belum terbentuk	1. Pembangunan/rehabilitasi perpustakaan; 2. Program literasi di sekolah dan masyarakat; 3. Penyediaan buku murah/hibah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2025-2029
16	Rendahnya rasio wirausaha pemuda di daerah	R-010	Peningkatan kewirausahaan pemuda	1. Minat wirausaha pemuda rendah; 2. Akses permodalan terbatas	1. Pelatihan keterampilan wirausaha; 2. Fasilitasi akses permodalan; 3. Pendampingan usaha pemuda	Dinas Pemuda dan Olahraga	2025-2029
17	Rendahnya cakupan masyarakat yang menerima pemeriksaan kesehatan gratis	R-018	Pemeriksaan kesehatan gratis	1. Sosialisasi layanan gratis belum optimal; 2. Keterbatasan tenaga dan fasilitas pemeriksaan	1. Sosialisasi masif layanan pemeriksaan gratis; 2. Penambahan tenaga pemeriksa; 3. Pengadaan peralatan pemeriksaan	Dinas Kesehatan	2025-2029
18	Rendahnya cakupan kepesertaan aktif JKN	R-020	Peningkatan kepesertaan aktif JKN	1. Kesadaran masyarakat terhadap manfaat JKN rendah; 2. Proses pendaftaran dirasa rumit	1. Sosialisasi manfaat JKN; 2. Fasilitasi pendaftaran di desa/Nagari; 3. Subsidi iuran bagi keluarga miskin	Dinas Kesehatan	2025-2029

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penangungg Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
19	Rendahnya proporsi penderita hipertensi yang mendapat layanan sesuai standar	R-022	Pelayanan hipertensi sesuai standar	1. Penderita hipertensi belum rutin kontrol; 2. Ketersediaan obat hipertensi tidak selalu terjamin	1. Edukasi penderita untuk kontrol rutin; 2. Menjamin stok obat hipertensi; 3. Pelatihan tenaga kesehatan tentang tata laksana hipertensi	Dinas Kesehatan	2025-2029
20	Tingginya prevalensi depresi pada penduduk usia ≥ 15 tahun	R-024	Penanggulangan depresi	1. Kesadaran masyarakat tentang kesehatan jiwa rendah; 2. Tenaga kesehatan jiwa terbatas	1. Sosialisasi kesehatan jiwa; 2. Pelatihan tenaga kesehatan jiwa; 3. Penyediaan layanan konseling di puskesmas	Dinas Kesehatan	2025-2029
21	Rendahnya cakupan desa/Nagari dengan sanitasi total berbasis masyarakat	R-025	Peningkatan sanitasi berbasis masyarakat	1. Masih banyak desa belum mencapai STBM; 2. Perilaku buang air sembarangan masih ada	1. Sosialisasi dan edukasi STBM; 2. Pembangunan sarana sanitasi; 3. Pelatihan kader sanitasi	Dinas Kesehatan	2025-2029
22	Rendahnya proporsi fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	R-027	Pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	1. Peralatan medis belum memenuhi standar; 2. Gedung pelayanan kesehatan belum memadai	1. Pengadaan peralatan sesuai standar; 2. Renovasi/rehabilitasi fasilitas; 3. Pengawasan pemenuhan standar	Dinas Kesehatan	2025-2029
23	Rendahnya proporsi fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi paripurna	R-031	Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan	1. Sebagian fasilitas belum terakreditasi paripurna; 2. Keterbatasan sumber daya untuk memenuhi persyaratan akreditasi	1. Pendampingan fasilitas menuju akreditasi; 2. Pengadaan sarana pendukung; 3. Pelatihan tim mutu pelayanan	Dinas Kesehatan	2025-2029
24	Rendahnya ketersediaan perbekalan kesehatan sesuai standar di fasilitas pelayanan	R-032	Pemenuhan perbekalan kesehatan	1. Stok perbekalan kesehatan tidak selalu tersedia; 2. Distribusi perbekalan belum optimal	1. Perencanaan kebutuhan perbekalan; 2. Peningkatan sistem distribusi; 3. Pengawasan stok secara berkala	Dinas Kesehatan	2025-2029
25	Tingginya prevalensi merokok pada penduduk usia 10–21 tahun	R-034	Kampanye anti-rokok di sekolah dan media lokal	Kurangnya pengawasan iklan rokok, rendahnya partisipasi keluarga dalam pengawasan anak	Memperkuat regulasi iklan rokok; Mengadakan penyuluhan rutin di sekolah	Dinas Kesehatan	2025-2029
26	Tingginya proporsi pangan industri rumah tangga yang tidak aman dan tidak bermutu	R-042	Pelatihan produksi pangan aman bagi IRT dan inspeksi rutin	Kurangnya sarana uji laboratorium; Lemahnya sanksi pelanggaran	Menambah fasilitas uji mutu pangan; Meningkatkan penegakan sanksi	Dinas Kesehatan	2025-2029
27	Apotek dan toko obat tidak memenuhi persyaratan perizinan secara berkelanjutan	R-044	Pengawasan izin apotek dan toko obat berkala	Minimnya tenaga pengawas; Data izin tidak terintegrasi	Merekrut dan melatih pengawas; Membangun sistem perizinan online	Dinas Kesehatan	2025-2029
28	Rendahnya capaian Indeks Perlindungan Anak	R-051	Sosialisasi perlindungan anak di sekolah dan desa	Pengawasan lemah; Data kasus tidak lengkap	Memperkuat mekanisme pelaporan; Meningkatkan koordinasi lintas sektor	DPPKB	2025-2029
29	Rendahnya proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi dengan metode modern	R-054	Pelayanan KB metode modern di puskesmas	Stigma masyarakat; Distribusi alat kontrasepsi terbatas	Memperluas distribusi; Mengadakan edukasi berbasis komunitas	Dinas Kesehatan	2025-2029
30	Tingginya persentase kehamilan tidak direncanakan	R-055	Edukasi kesehatan reproduksi remaja di sekolah dan posyandu remaja	Stigma pembicaraan seks; Minimnya layanan konseling	Menambah layanan konseling remaja; Mengintegrasikan edukasi ke kurikulum	Dinas Kesehatan	2025-2029
31	Tingginya persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	R-057	Pendataan kebutuhan KB melalui kader desa	Minimnya update data; Alat kontrasepsi kurang tersedia	Memperkuat sistem pencatatan; Menambah distribusi alat kontrasepsi	Dinas Kesehatan	2025-2029
32	Rendahnya prevalensi penggunaan kontrasepsi modern	R-058	Distribusi kontrasepsi modern di semua puskesmas	Persepsi negatif masyarakat; Jangkauan wilayah terpencil	Program penyuluhan door-to-door; Layanan KB keliling	Dinas Kesehatan	2025-2029
33	Tingginya angka kelahiran remaja usia 15–19 tahun	R-060	Program edukasi kesehatan reproduksi remaja	Kurangnya akses ke informasi akurat; Minimnya dukungan keluarga	Kelas parenting remaja; Penyuluhan di media sosial	DPPKB	2025-2029
34	Rendahnya capaian Indeks Lansia Berdaya	R-061	Pelatihan lansia dalam kewirausahaan ringan	Minimnya program lanjutan; Kurangnya akses permodalan	Membentuk kelompok usaha lansia; Menyediakan dana bergulir	DPPKB	2025-2029
35	Rendahnya persentase anak korban kekerasan yang ditangani oleh instansi terkait	R-068	Pelatihan penanganan anak korban kekerasan bagi petugas	Kurangnya SDM terlatih; Koordinasi antarinstansi lemah	Menambah tenaga pendamping; Membuat SOP bersama	DINSOSP3A	2025-2029
36	Rendahnya persentase pemberian bantuan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	R-069	Pendistribusian bantuan PPKS sesuai data	Minimnya update data penerima; Kurangnya stok bantuan	Meningkatkan frekuensi pendataan; Menambah anggaran bantuan	DINSOSP3A	2025-2029

KEPALA BAPELITBANGDA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

...

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda	**: Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman**
Tahun Penilaian	**: 2025**
Tujuan Strategis	**: Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing**
Urusan Pemerintahan	**: Urusan Kesehatan, Urusan Pendidikan, Urusan Tenaga Kerja**

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	1. Meningkatkan promosi kesehatan dan PHBS; 2. Meningkatkan fasilitas layanan kesehatan di daerah terpencil; 3. Pelatihan tenaga kesehatan komunitas	Poster, brosur, media sosial, penyuluhan lapangan, rapat koordinasi lintas sektor	Dinas Kesehatan, Puskesmas	Masyarakat umum, kader kesehatan, tenaga kesehatan komunitas	2025-2029		
2	1. Pemberian bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu; 2. Kampanye pentingnya pendidikan dasar; 3. Penguatan peran guru dan pengawas sekolah	Pengumuman resmi, media cetak, kampanye media sosial, lokakarya guru	Dinas Pendidikan, sekolah, Pemda	Masyarakat umum, siswa, guru, pengawas sekolah	2025-2029		
3	1. Menambah tenaga kesehatan di daerah kurang terlayani; 2. Pelatihan bidan dan tenaga kesehatan; 3. Penguatan rujukan kasus risiko tinggi	Pengumuman perekrutan, koordinasi lapangan, pelatihan tatap muka, sistem rujukan terintegrasi	Dinas Kesehatan, rumah sakit, puskesmas	Tenaga kesehatan, bidan, petugas rujukan	2025-2029		
4	1. Peningkatan layanan posyandu; 2. Penyediaan suplementasi gizi; 3. Edukasi gizi kepada orang tua	Penyuluhan posyandu, spanduk, media komunitas, distribusi vitamin, buku panduan gizi	Dinas Kesehatan, kader posyandu	Ibu hamil, balita, orang tua, pengasuh anak	2025-2029		
5	1. Sosialisasi manfaat imunisasi; 2. Peningkatan logistik vaksin; 3. Pelatihan petugas imunisasi	Kampanye publik, media cetak, media sosial, laporan distribusi logistik, pelatihan teknis	Dinas Kesehatan, gudang farmasi, puskesmas	Masyarakat umum, petugas vaksin	2025-2029		
6	1. Pembangunan/penambahan ruang rawat inap; 2. Optimalisasi peran RSUD; 3. Kerjasama dengan RS swasta	Rapat koordinasi teknis, laporan pembangunan, publikasi di media resmi	Dinas Kesehatan, RSUD	Pemda, tenaga kesehatan, masyarakat	2025-2029		
7	1. Rekrutmen tenaga medis baru; 2. Distribusi tenaga medis sesuai kebutuhan; 3. Insentif untuk daerah terpencil	Pengumuman resmi, portal rekrutmen, koordinasi lintas daerah	Dinas Kesehatan, BKD	Tenaga medis baru, fasilitas kesehatan	2025-2029		
8	1. Rekrutmen dan penempatan SDM sesuai standar; 2. Pelatihan tenaga puskesmas; 3. Peningkatan insentif	Pengumuman rekrutmen, pelatihan tatap muka, modul pembelajaran	Dinas Kesehatan, puskesmas	SDM kesehatan, tenaga puskesmas	2025-2029		
9	1. Rekrutmen dokter spesialis; 2. Penempatan berdasarkan kebutuhan daerah; 3. Kerjasama pendidikan spesialis	Koordinasi dengan fakultas kedokteran, publikasi lowongan, MoU kerjasama	Dinas Kesehatan, RS rujukan, universitas	Dokter spesialis, Pemda	2025-2029		
10	1. Penyediaan gudang logistik bencana; 2. Pelatihan relawan; 3. Perbaikan SOP penyaluran bantuan	Pengumuman logistik, pelatihan lapangan, simulasi SOP kebencanaan	BPBD, Dinas Kesehatan	Relawan, aparat desa, masyarakat	2025-2029		
11	1. Program pemberdayaan ekonomi keluarga; 2. Pelatihan keterampilan kerja; 3. Fasilitasi akses ke permodalan	Penyuluhan, media sosial, modul pelatihan, pertemuan kelompok	DINSOSP3A, Dinas Koperasi	Masyarakat, kelompok usaha, keluarga	2025-2029		

12	1. Review kurikulum muatan lokal; 2. Pelatihan guru untuk implementasi kurikulum; 3. Integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran	Rapat guru, workshop, buku panduan kurikulum	Dinas Pendidikan, MGMP	Guru, kepala sekolah	2025-2029		
13	1. Penataan distribusi guru; 2. Insentif bagi guru di daerah terpencil; 3. Rekrutmen guru sesuai kebutuhan	Pengumuman resmi, koordinasi lintas sekolah, publikasi lowongan guru	Dinas Pendidikan, BKD	Guru, kepala sekolah, Pemda	2025-2029		
14	1. Pembangunan/rehabilitasi perpustakaan; 2. Program literasi di sekolah dan masyarakat; 3. Penyediaan buku murah/hibah	Laporan pembangunan, kampanye literasi, media cetak, media sosial	Dinas Pendidikan, perpustakaan daerah	Sekolah, masyarakat umum	2025-2029		
15	1. Pelatihan keterampilan wirausaha; 2. Fasilitasi akses permodalan; 3. Pendampingan usaha pemuda	Workshop, pendampingan lapangan, publikasi peluang usaha	Dinas Koperasi, Dinas Pemuda & Olahraga	Pemuda, pelaku usaha baru	2025-2029		
16	1. Sosialisasi masif layanan pemeriksaan gratis; 2. Penambahan tenaga pemeriksa; 3. Pengadaan peralatan pemeriksaan	Poster, spanduk, media sosial, mobil keliling layanan kesehatan	Dinas Kesehatan, Puskesmas	Masyarakat umum, pasien	2025-2029		
17	1. Sosialisasi manfaat JKN; 2. Fasilitasi pendaftaran di desa/Nagari; 3. Subsidi iuran bagi keluarga miskin	Media cetak, penyuluhan desa, pendaftaran keliling	BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan	Masyarakat umum, keluarga miskin	2025-2029		
18	1. Edukasi penderita untuk kontrol rutin; 2. Menjamin stok obat hipertensi; 3. Pelatihan tenaga kesehatan tentang tata laksana hipertensi	Edukasi tatap muka, buku panduan pasien, pelatihan tenaga medis	Dinas Kesehatan, puskesmas	Penderita hipertensi, tenaga kesehatan	2025-2029		
19	1. Sosialisasi kesehatan jiwa; 2. Pelatihan tenaga kesehatan jiwa; 3. Penyediaan layanan konseling di puskesmas	Media sosial, seminar kesehatan jiwa, brosur di fasilitas kesehatan	Dinas Kesehatan, rumah sakit	Pasien, keluarga, tenaga kesehatan	2025-2029		
20	1. Sosialisasi dan edukasi STBM; 2. Pembangunan sarana sanitasi; 3. Pelatihan kader sanitasi	Penyuluhan desa, kampanye media, pelatihan teknis kader sanitasi	Dinas Kesehatan, desa/Nagari	Masyarakat umum, kader sanitasi	2025-2029		
21	1. Pengadaan peralatan sesuai standar; 2. Renovasi/rehabilitasi fasilitas; 3. Pengawasan pemenuhan standar	Laporan teknis, publikasi pembangunan, inspeksi fasilitas	Dinas Kesehatan, Pemda	Fasilitas kesehatan, masyarakat	2025-2029		
22	1. Pendampingan fasilitas menuju akreditasi; 2. Pengadaan sarana pendukung; 3. Pelatihan tim mutu pelayanan	Rapat koordinasi, pelatihan tim mutu, publikasi hasil akreditasi	Dinas Kesehatan, tim akreditasi	Fasilitas kesehatan, tenaga medis	2025-2029		
23	1. Perencanaan kebutuhan perbekalan; 2. Peningkatan sistem distribusi; 3. Pengawasan stok secara berkala	Sistem informasi logistik, laporan bulanan, rapat evaluasi	Dinas Kesehatan, gudang farmasi	Fasilitas kesehatan, tenaga logistik	2025-2029		
24	Memperkuat regulasi iklan rokok; Mengadakan penyuluhan rutin di sekolah	Peraturan daerah, kampanye sekolah bebas rokok, media cetak	Dinas Kesehatan, Satpol PP	Sekolah, siswa, masyarakat	2025-2029		
25	Menambah fasilitas uji mutu pangan; Meningkatkan penegakan sanksi	Publikasi resmi, laporan uji mutu, koordinasi dengan industri	Dinas Kesehatan, Balai POM	Produsen pangan, masyarakat umum	2025-2029		
26	Merekrut dan melatih pengawas; Membangun sistem perizinan online	Pengumuman resmi, pelatihan tatap muka, portal perizinan online	Dinas Kesehatan, Dinas Perizinan	Pengawas, pelaku usaha	2025-2029		
27	Menambah pendamping; Membuat jadwal percepatan akreditasi	Rapat koordinasi, surat edaran, jadwal kegiatan resmi	Dinas Kesehatan, tim akreditasi	Fasilitas kesehatan, tenaga medis	2025-2029		
28	Memperluas distribusi; Mengadakan edukasi berbasis komunitas	Media cetak, penyuluhan komunitas, distribusi bahan informasi	Dinas Kesehatan, Puskesmas	Masyarakat umum, kelompok komunitas	2025-2029		
29	Menambah layanan konseling remaja; Mengintegrasikan edukasi ke kurikulum	Penyuluhan sekolah, media sosial, modul edukasi remaja	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan	Remaja, guru, orang tua	2025-2029		
30	Memperkuat sistem pencatatan; Menambah distribusi alat kontrasepsi	Sistem informasi pencatatan, distribusi logistik, laporan bulanan	Dinas Kesehatan, DPPKB	Fasilitas kesehatan, tenaga KB	2025-2029		
31	Program penyuluhan door-to-door; Layanan KB keliling	Penyuluhan langsung, mobil layanan keliling, media komunitas	DPPKB, Puskesmas	Pasangan usia subur, masyarakat	2025-2029		
32	Kelas parenting remaja; Penyuluhan di media sosial	Kelas tatap muka, webinar parenting, konten media sosial	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan	Remaja, orang tua	2025-2029		

33	Membentuk kelompok usaha lansia; Menyediakan dana bergulir	Pertemuan kelompok, modul usaha, publikasi peluang dana	DINSOSP3A, Disdagnakerkop UKM	Lansia, kelompok usaha	2025-2029		
34	Menambah tenaga pendamping; Membuat SOP bersama	Rapat koordinasi lintas pihak, publikasi SOP bersama	DINSOSP3A, Pemda	Pendamping, organisasi masyarakat	2025-2029		
35	Meningkatkan frekuensi pendataan; Menambah anggaran bantuan	Pendataan lapangan, publikasi hasil, pertemuan evaluasi	DINSOSP3A, desa/Nagari	Masyarakat penerima bantuan	2025-2029		
36	Mengadakan pelatihan tahunan; Mencari dukungan CSR	Pelatihan tatap muka, publikasi CSR, forum kemitraan	Dinas Koperasi, Dinas Tenaga Kerja	Pelaku usaha, pihak swasta	2025-2029		

KEPALA BAPELITBANGDA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

...

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemda : **Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman**
Tahun Penilaian : **2025**
Tujuan Strategis : **Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing**
Urusan Pemerintahan : **Urusan Kesehatan, Urusan Pendidikan, Urusan Tenaga Kerja**

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	1. Meningkatkan promosi kesehatan dan PHBS; 2. Meningkatkan fasilitas layanan kesehatan di daerah terpencil; 3. Pelatihan tenaga kesehatan komunitas	Monitoring PHBS & fasilitas; laporan pelatihan	Dinas Kesehatan, Puskesmas	2025-2029		
2	1. Pemberian bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu; 2. Kampanye pentingnya pendidikan dasar; 3. Penguatan peran guru dan pengawas sekolah	Verifikasi bantuan; monitoring kampanye; penilaian guru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sekolah, Pemda	2025-2029		
3	1. Menambah tenaga kesehatan di daerah kurang terlayani; 2. Pelatihan bidan dan tenaga kesehatan; 3. Penguatan rujukan kasus risiko tinggi	Monitoring penempatan; evaluasi pelatihan; monitoring rujukan	Dinas Kesehatan, rumah sakit, puskesmas	2025-2029		
4	1. Peningkatan layanan posyandu; 2. Penyediaan suplementasi gizi; 3. Edukasi gizi kepada orang tua	Observasi posyandu; pencatatan suplementasi; survei gizi	Dinas Kesehatan, kader posyandu	2025-2029		
5	1. Sosialisasi manfaat imunisasi; 2. Peningkatan logistik vaksin; 3. Pelatihan petugas imunisasi	Monitoring cakupan imunisasi; pengecekan logistik; evaluasi petugas	Dinas Kesehatan, gudang farmasi, puskesmas	2025-2029		
6	1. Pembangunan/penambahan ruang rawat inap; 2. Optimalisasi peran RSUD; 3. Kerjasama dengan RS swasta	Inspeksi ruang rawat; evaluasi RSUD; monitoring kerjasama	Dinas Kesehatan, RSUD	2025-2029		
7	1. Rekrutmen tenaga medis baru; 2. Distribusi tenaga medis sesuai kebutuhan; 3. Insentif untuk daerah terpencil	Monitoring rekrutmen; evaluasi distribusi; monitoring insentif	Dinas Kesehatan, BKD	2025-2029		
8	1. Rekrutmen dan penempatan SDM sesuai standar; 2. Pelatihan tenaga puskesmas; 3. Peningkatan insentif	Audit rekrutmen; evaluasi pelatihan; monitoring insentif	Dinas Kesehatan, puskesmas	2025-2029		
9	1. Rekrutmen dokter spesialis; 2. Penempatan berdasarkan kebutuhan daerah; 3. Kerjasama pendidikan spesialis	Monitoring rekrutmen spesialis; evaluasi penempatan; monitoring kerjasama	Dinas Kesehatan, RS rujukan, universitas	2025-2029		
10	1. Penyediaan gudang logistik bencana; 2. Pelatihan relawan; 3. Perbaikan SOP penyaluran bantuan	Inspeksi gudang; simulasi relawan; evaluasi SOP	BPBD, Dinas Kesehatan	2025-2029		
11	1. Program pemberdayaan ekonomi keluarga; 2. Pelatihan keterampilan kerja; 3. Fasilitasi akses ke permodalan	Monitoring program & pelatihan; evaluasi akses modal	DINSOSP3A, Dinas Koperasi	2025-2029		

12	1. Review kurikulum muatan lokal; 2. Pelatihan guru untuk implementasi kurikulum; 3. Integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran	Review kurikulum; evaluasi pelatihan guru; monitoring integrasi lokal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, MGMP	2025-2029		
13	1. Penataan distribusi guru; 2. Insentif bagi guru di daerah terpencil; 3. Rekrutmen guru sesuai kebutuhan	Monitoring distribusi guru; evaluasi insentif; monitoring rekrutmen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BKD	2025-2029		
14	1. Pembangunan/rehabilitasi perpustakaan; 2. Program literasi di sekolah dan masyarakat; 3. Penyediaan buku murah/hibah	Inspeksi perpustakaan; monitoring literasi; evaluasi distribusi buku	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, perpustakaan daerah	2025-2029		
15	1. Pelatihan keterampilan wirausaha; 2. Fasilitasi akses permodalan; 3. Pendampingan usaha pemuda	Evaluasi pelatihan wirausaha; monitoring akses modal; pendampingan usaha	Dinas Koperasi, Dinas Pemuda & Olahraga	2025-2029		
16	1. Sosialisasi masif layanan pemeriksaan gratis; 2. Penambahan tenaga pemeriksa; 3. Pengadaan peralatan pemeriksaan	Monitoring sosialisasi; evaluasi tenaga pemeriksa; inspeksi peralatan	Dinas Kesehatan, Puskesmas	2025-2029		
17	1. Sosialisasi manfaat JKN; 2. Fasilitasi pendaftaran di desa/Nagari; 3. Subsidi iuran bagi keluarga miskin	Monitoring sosialisasi JKN; evaluasi pendaftaran; monitoring subsidi	BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan	2025-2029		
18	1. Edukasi penderita untuk kontrol rutin; 2. Menjamin stok obat hipertensi; 3. Pelatihan tenaga kesehatan tentang tata laksana hipertensi	Edukasi penderita; monitoring stok obat; evaluasi pelatihan tenaga	Dinas Kesehatan, puskesmas	2025-2029		
19	1. Sosialisasi kesehatan jiwa; 2. Pelatihan tenaga kesehatan jiwa; 3. Penyediaan layanan konseling di puskesmas	Monitoring sosialisasi jiwa; evaluasi pelatihan; monitoring layanan konseling	Dinas Kesehatan, rumah sakit	2025-2029		
20	1. Sosialisasi dan edukasi STBM; 2. Pembangunan sarana sanitasi; 3. Pelatihan kader sanitasi	Monitoring sosialisasi STBM; inspeksi sarana; evaluasi pelatihan kader	Dinas Kesehatan, desa/Nagari	2025-2029		
21	1. Pengadaan peralatan sesuai standar; 2. Renovasi/rehabilitasi fasilitas; 3. Pengawasan pemenuhan standar	Inspeksi peralatan; monitoring renovasi; evaluasi pemenuhan standar	Dinas Kesehatan, Pemda	2025-2029		
22	1. Pendampingan fasilitas menuju akreditasi; 2. Pengadaan sarana pendukung; 3. Pelatihan tim mutu pelayanan	Pendampingan akreditasi; inspeksi sarana; evaluasi tim mutu	Dinas Kesehatan, tim akreditasi	2025-2029		
23	1. Perencanaan kebutuhan perbekalan; 2. Peningkatan sistem distribusi; 3. Pengawasan stok secara berkala	Monitoring perencanaan; evaluasi distribusi; pengawasan stok	Dinas Kesehatan, gudang farmasi	2025-2029		
24	Memperkuat regulasi iklan rokok; Mengadakan penyuluhan rutin di sekolah	Monitoring regulasi; evaluasi penyuluhan	Dinas Kesehatan, Satpol PP	2025-2029		
25	Menambah fasilitas uji mutu pangan; Meningkatkan penegakan sanksi	Inspeksi fasilitas; evaluasi penegakan	Dinas Kesehatan, Balai POM	2025-2029		
26	Merekrut dan melatih pengawas; Membangun sistem perizinan online	Monitoring rekrutmen & pelatihan; evaluasi sistem online	Dinas Kesehatan, Dinas Perizinan	2025-2029		
27	Menambah pendamping; Membuat jadwal percepatan akreditasi	Monitoring pendamping; evaluasi jadwal akreditasi	Dinas Kesehatan, tim akreditasi	2025-2029		

28	Memperluas distribusi; Mengadakan edukasi berbasis komunitas	Monitoring distribusi; evaluasi edukasi komunitas	Dinas Kesehatan, Puskesmas	2025-2029		
29	Menambah layanan konseling remaja; Mengintegrasikan edukasi ke kurikulum	Monitoring layanan konseling; evaluasi integrasi edukasi	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2025-2029		
30	Memperkuat sistem pencatatan; Menambah distribusi alat kontrasepsi	Evaluasi pencatatan; monitoring distribusi kontrasepsi	Dinas Kesehatan, DPPKB	2025-2029		
31	Program penyuluhan door-to-door; Layanan KB keliling	Monitoring penyuluhan; evaluasi layanan keliling	DPPKB, Puskesmas	2025-2029		
32	Kelas parenting remaja; Penyuluhan di media sosial	Evaluasi parenting; monitoring penyuluhan media sosial	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2025-2029		
33	Membentuk kelompok usaha lansia; Menyediakan dana bergulir	Monitoring kelompok usaha; evaluasi dana bergulir	DINSOSP3A, Disdagnakerkop UKM	2025-2029		
34	Menambah tenaga pendamping; Membuat SOP bersama	Monitoring pendamping; evaluasi SOP bersama	DINSOSP3A, Pemda	2025-2029		
35	Meningkatkan frekuensi pendataan; Menambah anggaran bantuan	Monitoring pendataan; evaluasi anggaran bantuan	DINSOSP3A, desa/Nagari	2025-2029		
36	Mengadakan pelatihan tahunan; Mencari dukungan CSR	Evaluasi pelatihan; monitoring dukungan CSR	Disdagnakerkop UKM	2025-2029		

KEPALA BAPELITBANGDA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

...

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda : **Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman**
Tahun Penilaian : **2025**
Tujuan Strategis : **Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing**
Urusan Pemerintahan : **Urusan Kesehatan, Urusan Pendidikan, Urusan Tenaga Kerja**

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	R-0001	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		Perluasan beasiswa, transportasi siswa, e-learning.			
2	Rendahnya usia harapan hidup penduduk	R-014	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Meningkatkan promosi kesehatan dan PHBS; 2. Meningkatkan fasilitas layanan kesehatan di daerah terpencil; 3. Pelatihan tenaga kesehatan komunitas			
3	Penurunan partisipasi anak dalam pendidikan dasar	R-001	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Pemberian bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu; 2. Kampanye pentingnya pendidikan dasar; 3. Penguatan peran guru dan pengawas sekolah			
4	Tingginya angka kematian ibu	R-015	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Menambah tenaga kesehatan di daerah kurang terlayani; 2. Pelatihan bidan dan tenaga kesehatan; 3. Penguatan rujukan kasus risiko tinggi			
5	Tingginya angka kematian balita	R-016	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Peningkatan layanan posyandu; 2. Penyediaan suplementasi gizi; 3. Edukasi gizi kepada orang tua			
6	Rendahnya cakupan imunisasi bayi lengkap	R-019	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Sosialisasi manfaat imunisasi; 2. Peningkatan logistik vaksin; 3. Pelatihan petugas imunisasi			
7	Rendahnya rasio daya tampung rumah sakit rujukan terhadap kebutuhan layanan	R-037	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Pembangunan/penambahan ruang rawat inap; 2. Optimalisasi peran RSUD; 3. Kerjasama dengan RS swasta			
8	Rendahnya rasio tenaga kesehatan dan medis terhadap populasi	R-038	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Rekrutmen tenaga medis baru; 2. Distribusi tenaga medis sesuai kebutuhan; 3. Insentif untuk daerah terpencil			
9	Rendahnya persentase puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar	R-039	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Rekrutmen dan penempatan SDM sesuai standar; 2. Pelatihan tenaga puskesmas; 3. Peningkatan insentif			
10	Kurangnya rumah sakit pemerintah yang memiliki dokter spesialis sesuai standar	R-040	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Rekrutmen dokter spesialis; 2. Penempatan berdasarkan kebutuhan daerah; 3. Kerjasama pendidikan spesialis			
11	Rendahnya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana	R-092	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Penyediaan gudang logistik bencana; 2. Pelatihan relawan; 3. Perbaikan SOP penyaluran bantuan			
12	Rendahnya tingkat graduasi keluarga miskin dan rentan dari program perlindungan sosial	R-091	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Program pemberdayaan ekonomi keluarga; 2. Pelatihan keterampilan kerja; 3. Fasilitasi akses ke permodalan			
13	Kurikulum muatan lokal tidak dikembangkan secara optimal	R-002	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Review kurikulum muatan lokal; 2. Pelatihan guru untuk implementasi kurikulum; 3. Integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran			
14	Kesenjangan distribusi guru antar wilayah	R-003	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Penataan distribusi guru; 2. Insentif bagi guru di daerah terpencil; 3. Rekrutmen guru sesuai kebutuhan			
15	Rendahnya tingkat kegemaran membaca masyaraka	R-007	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Pembangunan/rehabilitasi perpustakaan; 2. Program literasi di sekolah dan masyarakat; 3. Penyediaan buku murah/hibah			
16	Rendahnya rasio wirausaha pemuda di daerah	R-010	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Pelatihan keterampilan wirausaha; 2. Fasilitasi akses permodalan; 3. Pendampingan usaha pemuda			
17	Rendahnya cakupan masyarakat yang menerima pemeriksaan kesehatan gratis	R-018	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Sosialisasi masif layanan pemeriksaan gratis; 2. Penambahan tenaga pemeriksa; 3. Pengadaan peralatan pemeriksaan			
18	Rendahnya cakupan kepesertaan aktif JKN	R-020	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Sosialisasi manfaat JKN; 2. Fasilitasi pendaftaran di desa/Nagari; 3. Subsidi iuran bagi keluarga miskin			
19	Rendahnya proporsi penderita hipertensi yang mendapat layanan sesuai standar	R-022	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Edukasi penderita untuk kontrol rutin; 2. Menjamin stok obat hipertensi; 3. Pelatihan tenaga kesehatan tentang tata laksana hipertensi			

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
20	Tingginya prevalensi depresi pada penduduk usia ≥ 15 tahun	R-024	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Sosialisasi kesehatan jiwa; 2. Pelatihan tenaga kesehatan jiwa; 3. Penyediaan layanan konseling di puskesmas			
21	Rendahnya cakupan desa/Nagari dengan sanitasi total berbasis masyarakat	R-025	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Sosialisasi dan edukasi STBM; 2. Pembangunan sarana sanitasi; 3. Pelatihan kader sanitasi			
22	Rendahnya proporsi fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	R-027	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Pengadaan peralatan sesuai standar; 2. Renovasi/rehabilitasi fasilitas; 3. Pengawasan pemenuhan standar			
23	Rendahnya proporsi fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi paripurna	R-031	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Pendampingan fasilitas menuju akreditasi; 2. Pengadaan sarana pendukung; 3. Pelatihan tim mutu pelayanan			
24	Rendahnya ketersediaan perbekalan kesehatan sesuai standar di fasilitas pelayanan	R-032	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Perencanaan kebutuhan perbekalan; 2. Peningkatan sistem distribusi; 3. Pengawasan stok secara berkala			
25	Tingginya prevalensi merokok pada penduduk usia 10–21 tahun	R-034	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		Memperkuat regulasi iklan rokok; Mengadakan penyuluhan rutin di sekolah			
26	Tingginya proporsi pangan industri rumah tangga yang tidak aman dan tidak bermutu	R-042	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		Menambah fasilitas uji mutu pangan; Meningkatkan penegakan sanksi			
27	Apotek dan toko obat tidak memenuhi persyaratan perizinan secara berkelanjutan	R-044	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		Merekrut dan melatih pengawas; Membangun sistem perizinan online			
28	Rendahnya capaian Indeks Perlindungan Anak	R-051	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		Memperkuat mekanisme pelaporan; Meningkatkan koordinasi lintas sektor			
29	Rendahnya proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi dengan metode modern	R-054	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		Memperluas distribusi; Mengadakan edukasi berbasis komunitas			
30	Tingginya persentase kehamilan tidak direncanakan	R-055	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		Menambah layanan konseling remaja; Mengintegrasikan edukasi ke kurikulum			
31	Tingginya persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	R-057	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		Memperkuat sistem pencatatan; Menambah distribusi alat kontrasepsi			
32	Rendahnya prevalensi penggunaan kontrasepsi modern	R-058	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		Program penyuluhan door-to-door; Layanan KB keliling			
33	Tingginya angka kelahiran remaja usia 15–19 tahun	R-060	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		Kelas parenting remaja; Penyuluhan di media sosial			
34	Rendahnya capaian Indeks Lansia Berdaya	R-061	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		Membentuk kelompok usaha lansia; Menyediakan dana bergulir			
35	Rendahnya persentase anak korban kekerasan yang ditangani oleh instansi terkait	R-068	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		Menambah tenaga pendamping; Membuat SOP bersama			
36	Rendahnya persentase pemberian bantuan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	R-069	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		Meningkatkan frekuensi pendataan; Menambah anggaran bantuan			

KEPALA BAPELITBANGDA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

...

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda **Tahun Penilaian** **Periode yang dinilai**	**: Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman** **: 2025** **: Periode RPJMD Tahun 2025 - 2029**
Sumber Data	: RPJMD Kabupaten Padang Pariaman
Visi	: Membangun Padang Pariaman Maju dan Sejahtera
Misi Strategis RPJMD	1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas 2. Menciptakan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing 3. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju, dan Merata 4. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	1. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju, dan Merata
Tujuan Strategis RPJMD	Tujuan 1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas Tujuan 2 Terciptanya Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berdaya Saing dan Inklusif Tujuan 3 Meningkatnya Perekonomian Daerah yang maju dan inklusif Tujuan 4 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan, berketahanan terhadap bencana dan Perubahan Iklim Tujuan 5 Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tentram dan harmonis dala keberagaman agama
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	Tujuan 3 Meningkatnya Perekonomian Daerah yang maju dan inklusif
Sasaran RPJMD	1.1 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, peternakan dan perikanan terhadap perekonomian daerah 1.2 Meningkatnya kontribusi perdagangan, UMKM dan industri berbasis sektor unggulan 1.3 Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif 1.4 Meningkatnya kemudahan Berinvestasi 1.5 Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau 1.6 Meningkatnya kesempatan dan produktifitas tenaga kerja 1.7 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	1.1 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, peternakan dan perikanan terhadap perekonomian daerah 1.2 Meningkatnya kontribusi perdagangan, UMKM dan industri berbasis sektor unggulan 1.3 Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif 1.4 Meningkatnya kemudahan Berinvestasi 1.5 Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau 1.6 Meningkatnya kesempatan dan produktifitas tenaga kerja 1.7 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa
IKU Sasaran RPJMD	1. Rasio PDRB Sektor Pertanian. Kehutanan Perikanan 2. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%) 3. Rasio Volume Koperasi Terhadap PDRB 4. Rasio PDRB Industri Pengolahan 5. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara 6. Rasio PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Nasional 7. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum 8. Persentase Peningkatan Investasi 9. Pembentukan Modal tetap Bruto (%) PDRB 10. Total Dana Pihak Ketiga / PDRB 11. Nilai Transaksi Saham per Kapita 12. Indeks Ketahanan Pangan 13. Tingkat Pengangguran Terbuka 14. Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja 15. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) 16. Persentase Pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%) 17. Persentase Disabilitas bekerja di sektor formal (%) 18. Indeks Desa
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	1. Rasio PDRB Sektor Pertanian. Kehutanan Perikanan 2. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%) 3. Rasio Volume Koperasi Terhadap PDRB 4. Rasio PDRB Industri Pengolahan 5. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara 6. Rasio PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Nasional 7. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum 8. Persentase Peningkatan Investasi 9. Pembentukan Modal tetap Bruto (%) PDRB 10. Total Dana Pihak Ketiga / PDRB 11. Nilai Transaksi Saham per Kapita 12. Indeks Ketahanan Pangan 13. Tingkat Pengangguran Terbuka 14. Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja 15. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) 16. Persentase Pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%) 17. Persentase Disabilitas bekerja di sektor formal (%) 18. Indeks Desa

Prioritas pembangunan dan program unggulan	I. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian II. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 1. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner III. DINAS PERIKANAN 1. Program Pengelolaan Perikanan Budi daya 2. Program Pengelolaan Pemasaran Hasil perikanan IV. DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM 1. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam negeri 2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 3. Program pemberdayaan Usaha Menengah, usaha Kecil dan usaha Mikro (UMKM) V. DPMPTP 1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2. Program Promosi Penanaman Modal 3. Program pelayanan Penanaman Modal 4. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 5. Program Kerja Sama Penanaman Modal 6. Program Pelatihan Kerja dan Produktovitas Tenaga Kerja VI. DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA 1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata 2. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif V. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1. Program Penataan Desa 2. Program Peningkatan Kerja Sama Desa 3. Program Administrasi Pemerintahan Desa 4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat VI. Dinas Kesehatan 1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 4. Program Pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan VII. Satpol PP Damkar 1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum VIII. DINSOSP3A 1. Program Rehabilitasi Sosial 2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Urusan Pemerintahan Daerah	1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PETERNAKAN 3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIKANAN 4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN UKM 6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INDUSTRI 7. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 8. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INVESTASI 9. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Nama Dinas Terkait	1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3. Dinas Perikanan
	4. Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koeprasi dan UKM
	5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	6. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
	7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Tujuan 1 Meningkatnya Perekonomian Daerah yang maju dan inklusif Sasaran 1.1 : Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, peternakan dan perikanan terhadap perekonomian daerah Sasaran 1.5 : Meningkatnya ketersediaan cadangan pangan yang yang berkualitas dan terjangkau IKU : 1. Kontribusi sektor pertanian, peternakan dan perikanan terhadap PDRB 2. Indeks Ketahanan Pangan Program : 1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3. Program Pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian 4. Program perizinan usaha Pertanian 5. Program Penyuluhan Pertanian 6. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian Pangan 7. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 8. Program Penanganan Kerawanan pangan

	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Tujuan 1 Meningkatnya Perekonomian Daerah yang maju dan inklusif Sasaran 1.1 : Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, peternakan dan perikanan terhadap perekonomian daerah IKU : 1. Kontribusi sektor pertanian, peternakan dan perikanan terhadap PDRB Program : 1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasrana Pertanian 2. Program Perizinan Usaha Pertanian 3. Program Penyuluhan Pertanian 4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
	DINAS PERIKANAN Tujuan 1 Meningkatnya Perekonomian Daerah yang maju dan inklusif Sasaran 1.1 : Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, peternakan dan perikanan terhadap perekonomian daerah IKU : 1. Kontribusi sektor pertanian, peternakan dan perikanan terhadap PDRB Program : 1. Program pengelolaan kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau kecil 2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 3. Program Pengelolaan Perikanan Budi daya 4. Program pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 5. Program Pengelolaan Pemasaran Hasil perikanan
	DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM Tujuan 1 Meningkatnya Perekonomian Daerah yang maju dan inklusif Sasaran 1.2: Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan, UMKM dan industri berbasis sektor unggulan Sasaran 1.6: Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja IKU : 1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 2. Rasio Volume Koperasi Terhadap PDRB 3. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB 4. Rasio PDRB Industri Pengolahan 5. Tingkat Pengangguran Terbuka 6. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 8. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi bekerja di bidang keahlian menengah tinggi 9. Persentase disabilitas bekerja disektor formal Program: 1. Program pengawasan dan pemeriksaan Koperasi 2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP koperasi 3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 5. Program Penguatan badan Hukum Koperasi 6. Program Pelayanan izin usaha Simpan Pinjam 7. Program pemberdayaan Usaha Menengah, usaha Kecil dan usaha Mikro (UMKM) 8. Program pengembangan UMKM 9. Program perencanaan tenaga kerja 10. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja 11. Program Penempatan tenaga Kerja 12. Program Hubungan Industrial 13. Program pengawsan Ketenagakerjaan
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU Tujuan 1 Meningkatnya Perekonomian Daerah yang maju dan inklusif Sasaran 1.2 : Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan, UMKM dan industri berbasis sektor unggulan Sasaran 1.4 : Meningkatnya Kemudahan Investasi IKU : 1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 2. Rasio Volume Koperasi Terhadap PDRB 3. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB 4. Rasio PDRB Industri Pengolahan 5. Persentase Peningkatan Investasi 6. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PDRB) 7. Total Dana Pihak Ketiga / PDRB 8. Nilai Transaksi Saham Per Kapita Program: 1. Program Perencanaan Pembangunan Industri 2. Program Pengendalian izin Usaha Industri 3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 4. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 5. Program Promosi Penanaman Modal 6. Program pelayanaSn Penanaman Modal 7. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 8. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 9. Program Kerja Sama Penanaman Modal

	DINAS PEMUDA PARIWISATA DAN OLAHRAGA Tujuan 1 Meningkatnya Perekonomian Daerah yang maju dan inklusif Sasaran 1.3 : Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif IKU : 1. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara 2. Rasio PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Provinsi 3. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Program: 1. Program Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata 2. Program Pemasaran pariwisata 3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tujuan 1 Meningkatnya Perekonomian Daerah yang maju dan inklusif Sasaran 1.7 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemadirian Desa IKU : 1. Indeks Desa Membangun (IDM) Program: 1. Program Penataan Desa 2. Program Peningkatan Kerjasama Desa 3. Program Administrasi Pemerintahan Desa 4. Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat

KEPALA BAPELITBANGDA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

...

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemda	**: Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman**
Nama OPD	**: OPD Pengampu Misi 3**
Tahun Penilaian	**: 2025**
Periode yang dinilai	**: 2025-2029**
Urusan Pemerintahan	**: Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pemerintahan dasar**

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	**Tujuan 3.1** **Meningkatnya Perekonomian Daerah yang maju dan inklusif**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	Rendahnya laju pertumbuhan ekonomi daerah	R-096	Bapelitbangda Dinas Pertanian, Disdagnakerkop UKM dan OPD terkait	Ketergantungan pada sektor tertentu, daya saing rendah, investasi terbatas	Internal dan Eksternal	C	Perekonomian stagnan, penyerapan tenaga kerja rendah, kemiskinan sulit diturunkan	Masyarakat umum, pelaku usaha, pekerja, pemerintah daerah
2		**PDRB Per Kapita ADHB**	Rendahnya PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB)	R-097	Bapelitbangda, BPS, Disdagnakerkop UKM	Pertumbuhan ekonomi tidak seimbang antar sektor, pendapatan tidak merata	Internal dan Eksternal	C	Kesejahteraan masyarakat terhambat, kesenjangan sosial meningkat	Masyarakat, pelaku usaha, kelompok berpenghasilan rendah
3		**Ekspor Barang dan Jasa**	Menurunnya volume ekspor barang dan jasa daerah	R-098	Disdagnakerkop UKM, Bapelitbangda	Keterbatasan akses pasar, hambatan regulasi, kurang promosi produk unggulan	Internal dan Eksternal	C	Kinerja perdagangan menurun, penerimaan daerah terbatas, UMKM sulit berkembang	Pelaku ekspor, UMKM, pemerintah daerah, asosiasi dagang
4		**Rasio PDRB Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan**	Menurunnya kontribusi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan terhadap PDRB	R-099	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Bapelitbangda, Distan KP	Lahan pertanian berkurang, regenerasi petani rendah, dukungan teknologi terbatas	Internal dan Eksternal	C	Perekonomian sektor primer melemah, kesejahteraan petani/nelayan menurun	Petani, nelayan, pelaku agribisnis, masyarakat pedesaan
5	**Sasaran 3.1.1** **Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, Perikanan, dan perikanan terhadap perekonomian daerah**	**Kontribusi sektor pertanian, peternakan dan perikanan terhadap PDRB**	Rendahnya kontribusi sektor pertanian, peternakan dan perikanan terhadap PDRB	R-100	Dinas Pertanian, Distan KP, Dinas Perikanan, Bapelitbangda	Produktivitas rendah, alih fungsi lahan, minimnya inovasi dan investasi di sektor primer	Internal dan Eksternal	C	Keseimbangan struktur ekonomi terganggu, penghidupan petani/nelayan memburuk, ketahanan pangan terancam	Petani, peternak, nelayan, pelaku agribisnis, masyarakat pedesaan
6	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Luas tanam tanaman pangan (padi dan jagung) (Ha)	Penurunan luas tanam tanaman pangan padi dan jagung	R-101	Dinas Pertanian, Distan KP, Bapelitbangda	Alih fungsi lahan, ketergantungan musim, keterbatasan sarana produksi pertanian	Internal dan Eksternal	C	Produksi pangan menurun, swasembada pangan terganggu, harga pangan tidak stabil	Petani, konsumen, pelaku distribusi pangan, pemerintah daerah
7		Rasio pengunaan alsintan pra panen	Rendahnya rasio penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) pra panen	R-102	Dinas Pertanian, Disdagnakerkop UKM, Bapelitbangda	Keterbatasan akses pembiayaan, kurangnya pelatihan, minim inovasi pertanian	Internal dan Eksternal	C	Efisiensi produksi rendah, biaya usaha tani tinggi, daya saing produk pertanian menurun	Petani, kelompok tani, penyuluh pertanian, pemerintah
8		Luas areal pengembangan dan peremajaan tanaman perkebunan (Ha)	Terbatasnya areal pengembangan dan peremajaan tanaman perkebunan	R-103	Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Bapelitbangda, KPH	Pohon tua belum diganti, perizinan lahan lambat, keterbatasan modal petani	Internal dan Eksternal	C	Produksi hasil perkebunan stagnan, kesejahteraan petani menurun, ekspor menurun	Petani, koperasi tani, pelaku agroindustri, pemerintah daerah
9		Luas pengembangan tanaman hortikultura (Ha)	Rendahnya luas pengembangan tanaman hortikultura	R-104	Dinas Pertanian, Bapelitbangda, Dinas PUPR	Keterbatasan irigasi, minim akses pasar, lemahnya pendampingan teknologi	Internal dan Eksternal	C	Produksi hortikultura tidak optimal, harga berfluktuasi, ketersediaan pangan segar terbatas	Petani hortikultura, konsumen, pelaku agribisnis, pemerintah
10	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan areal sawah terairi irigasi teknis dan/atau non teknis (%)	Rendahnya peningkatan areal sawah yang terairi irigasi teknis/non teknis	R-105	Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Bapelitbangda	Infrastruktur irigasi rusak, keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi lintas sektor	Internal dan Eksternal	C	Produksi pertanian terganggu, ketergantungan musim tinggi, ketahanan pangan rentan	Petani, pemerintah daerah, pelaku distribusi pangan
11		Persentase peningkatan areal sawah yang terbuka akses transportasi (%)	Terbatasnya peningkatan akses transportasi ke areal sawah	R-106	Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Bapelitbangda, Pemerintah Desa	Kondisi geografis sulit, prioritas pembangunan belum merata, keterbatasan dana	Internal dan Eksternal	C	Efisiensi distribusi hasil pertanian rendah, biaya produksi tinggi, hasil panen terbuang	Petani, pembeli, pelaku distribusi pertanian
12		Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Lemahnya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	R-107	Dinas Pertanian, Bapelitbangda, ATR/BPN, Pemerintah Daerah	Alih fungsi lahan, lemahnya regulasi, minimnya pengawasan dan insentif	Internal dan Eksternal	C	Ketahanan pangan terancam, luas tanam menurun, pembangunan tidak berkelanjutan	Petani, pemerintah, masyarakat luas
13		Luas areal tanaman perkebunan yang tersertifikasi (Ha)	Rendahnya areal tanaman perkebunan yang tersertifikasi	R-108	Dinas Perkebunan, Lembaga Sertifikasi, Dinas Perdagangan	Kurangnya pengetahuan petani, biaya sertifikasi tinggi, lemahnya fasilitasi pemerintah	Internal dan Eksternal	C	Daya saing hasil perkebunan menurun, akses pasar ekspor terbatas, pendapatan petani stagnan	Petani, pelaku ekspor, pemerintah

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
14		Persentase peningkatan areal perkebunan yang terbuka akses transportasi (%)	Terbatasnya akses transportasi ke areal perkebunan	R-109	Dinas Perkebunan, Dinas PUPR, Bapelitbangda, Pemerintah Desa	Topografi sulit, pembangunan belum prioritas, keterbatasan dana	Internal dan Eksternal	C	Distribusi hasil lambat, biaya tinggi, hasil rusak sebelum sampai pasar	Petani, pelaku usaha perkebunan, konsumen
15		Persentase peningkatan areal tanaman hortikultura yang terbuka akses transportasi (%)	Lambatnya peningkatan akses transportasi ke areal hortikultura	R-110	Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Bapelitbangda	Akses jalan terbatas, keterbatasan alokasi anggaran, belum jadi prioritas daerah	Internal dan Eksternal	C	Distribusi hasil tidak efisien, potensi kerusakan hasil tinggi, pendapatan petani menurun	Petani hortikultura, pengepul, pedagang, konsumen
16	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase layanan kesehatan hewan	Rendahnya cakupan layanan kesehatan hewan	R-120	Dinas Peternakan, UPTD Pusat Kesehatan Hewan, Dinas Kesehatan, Dinas	Keterbatasan tenaga medis hewan, sarana prasarana kurang memadai, rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan hewan	Internal dan Eksternal	C	Peningkatan risiko penyebaran penyakit zoonosis, kerugian ekonomi bagi peternak, ancaman terhadap kesehatan masyarakat	Peternak, pemilik hewan, masyarakat umum, pemerintah daerah
17		Cakupan pelayanan kesehatan hewan ternak produksi	Rendahnya cakupan pelayanan kesehatan pada ternak produksi	R-121	Dinas Peternakan, UPTD Pusat Kesehatan Hewan	Keterbatasan layanan medis hewan, kurangnya kunjungan lapangan, keterbatasan SDM dan logistik	Internal dan Eksternal	C	Produktivitas dan kesehatan ternak menurun, meningkatnya risiko penyebaran penyakit, kerugian ekonomi peternak	Peternak, pelaku usaha peternakan, masyarakat konsumen, pemerintah daerah
18	Program Pengelolaan Perikanan Budi daya	Jumlah Total produksi Perikanan Budidaya	Penurunan produksi perikanan budidaya	R-123	Dinas Perikanan, Kelompok Pembudidaya Ikan, UPT Perikanan,	Kualitas air menurun, penyakit ikan, pakan tidak mencukupi atau mahal, keterbatasan teknologi budidaya	Internal dan Eksternal	C	Pendapatan pembudidaya turun, pasokan ikan terganggu, kerugian ekonomi daerah	Pembudidaya, konsumen, pelaku usaha, pemerintah daerah
19		Jumlah Produksi Benih	Penurunan jumlah produksi benih	R-124	Dinas Perikanan, Balai Benih Ikan, UPT Perikanan, Kelompok Pembenih	Kualitas indukan rendah, gangguan hama penyakit, keterbatasan sarana produksi, kurangnya pendampingan teknis	Internal dan Eksternal	C	Gangguan pada rantai produksi budidaya, harga benih meningkat, ketergantungan pada suplai luar daerah	Pembenih, pembudidaya, pelaku usaha perikanan, pemerintah daerah
20	Program Pengelolaan Pemasaran Hasil perikanan	Jumlah Total Produksi Ikan Olahan	Penurunan produksi ikan olahan	R-126	Dinas Perikanan, Pelaku UMKM Perikanan, Koperasi, UPT Pengolahan Ikan	Kurangnya pasokan bahan baku, lemahnya keterampilan pengolahan, terbatasnya akses pasar dan teknologi, perizinan belum lengkap	Internal dan Eksternal	C	Terbatasnya produk olahan di pasar, penurunan pendapatan pelaku usaha, melemahnya daya saing sektor perikanan	UMKM perikanan, konsumen, pemerintah daerah, pelaku distribusi
21		Angka Konsumsi Ikan	Rendahnya angka konsumsi ikan di masyarakat	R-127	Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan, TP-PKK, Media, Sekolah	Kurangnya edukasi gizi ikan, budaya konsumsi rendah, distribusi tidak merata, harga relatif tinggi	Internal dan Eksternal	C	Masalah gizi masyarakat, pasar lokal produk ikan stagnan, potensi ekonomi perikanan tidak optimal	Masyarakat umum, anak-anak, rumah tangga, pelaku industri ikan, pemerintah daerah
22	**Sasaran 3.1.2 Meningkatnya kontribusi perdagangan, UMKM dan industri berbasis sektor unggulan**	**Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB**	Menurunnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	R-128	Dinas Perdagangan, Pelaku Usaha, BUMDes, Koperasi	Daya beli masyarakat menurun, digitalisasi belum merata, keterbatasan infrastruktur pasar dan logistik, iklim usaha tidak kondusif	Internal dan Eksternal	C	PDRB stagnan, pengangguran meningkat, daya saing daerah melemah	Pelaku UMKM, masyarakat, investor, pemerintah daerah
23		**Rasio Volume Koperasi Terhadap PDRB**	Rendahnya volume usaha koperasi	R-129	Dinas Koperasi dan UMKM, Koperasi, Lembaga Pembiayaan	Manajemen koperasi lemah, minim digitalisasi, rendahnya partisipasi anggota, keterbatasan akses permodalan	Internal dan Eksternal	C	Kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah rendah, kesejahteraan anggota tidak meningkat	Anggota koperasi, pelaku UMKM, pemerintah daerah
24		**Kontribusi sektor industri terhadap PDRB**	Rendahnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB	R-130	Dinas Perindustrian, Pelaku Industri, Kawasan Industri, BUMD	Keterbatasan infrastruktur, bahan baku tidak stabil, investasi rendah, daya saing lemah, regulasi tidak sinkron	Internal dan Eksternal	C	Lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah, pengangguran meningkat, hilangnya peluang ekspor dan inovasi	Pelaku industri, tenaga kerja, pemerintah daerah, investor
25		**Rasio PDRB Industri Pengolahan**	Rendahnya rasio industri pengolahan dalam PDRB	R-131	Dinas Perindustrian, UMKM Pengolahan, BUMD	Pengolahan primer dominan, minim inovasi teknologi, rendahnya nilai tambah, terbatasnya jejaring pasar dan kemitraan	Internal dan Eksternal	C	PDRB stagnan, tidak terjadi hilirisasi, pelaku UMKM pengolahan tidak berkembang	Pelaku industri kecil dan menengah, konsumen, pemerintah daerah
26	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam negeri	Persentase promosi Produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	Rendahnya persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	R-136	Disdagnakerkop UKM	Terbatasnya anggaran dan koordinasi lintas sektor untuk promosi produk lokal	Internal	C	Terhambatnya penetrasi pasar produk lokal dan daya saing pelaku UMKM menurun	UMKM, pelaku usaha lokal, pemerintah daerah
27	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	Rendahnya persentase koperasi yang meningkat kualitasnya	R-140	Disdagnakerkop UKM	Minimnya pendampingan dan pembinaan berkelanjutan terhadap koperasi	Internal	C	Produktivitas dan daya saing koperasi rendah, berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal	Koperasi, anggota, pelaku usaha lokal
28	Program pemberdayaan Usaha Menengah, usaha Kecil dan usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Kecil yang Bertarsnformasi dari Informal ke Formal	Rendahnya persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	R-143	Disdagnakerkop UKM	Terbatasnya pemahaman pelaku UMKM tentang manfaat legalitas usaha	Internal	C	Pelaku usaha tetap berada di sektor informal, mengurangi akses terhadap pembiayaan dan perlindungan hukum	Pelaku UMKM, lembaga keuangan, pemerintah daerah
29		Pertumbuhan Wirausaha	Rendahnya tingkat pertumbuhan wirausaha baru	R-144	Disdagnakerkop UKM	Terbatasnya akses terhadap pelatihan kewirausahaan dan permodalan	Internal	C	Peluang ekonomi tidak optimal, peningkatan lapangan kerja terhambat	Calon wirausaha, pelaku UMKM, masyarakat pencari kerja
30	**Sasaran 3.1.3 Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif**	**Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara**	Rendahnya jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung	R-153	Disparpora	Terbatasnya promosi dan konektivitas antar daerah serta daya tarik wisata yang kurang optimal	Eksternal	C	Potensi sektor pariwisata tidak dimaksimalkan sehingga berdampak pada rendahnya pendapatan daerah dan penciptaan lapangan kerja	Pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, masyarakat

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
31		**Rasio PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Provinsi**	Rendahnya kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDRB daerah	R-154	Disparpora, Disdagnakerkop UKM	Terbatasnya fasilitasi pelaku ekonomi kreatif dalam akses pasar, pendanaan, dan pelatihan	Internal	C	Sektor ekonomi kreatif kurang berkembang sehingga peluang penciptaan nilai tambah dan lapangan kerja baru terhambat	Pelaku ekonomi kreatif, pemerintah daerah
32		**Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum**	Rendahnya kontribusi sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum terhadap PDRB daerah	R-155	Disparpora, Disdagnakerkop UKM	Terbatasnya standar pelayanan, infrastruktur pendukung, serta promosi destinasi	Eksternal	C	Sektor perhotelan dan kuliner tidak berkembang optimal sehingga mengurangi potensi penerimaan daerah dan peluang kerja lokal	Pelaku usaha, tenaga kerja, pemerintah daerah
33	Program Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan kinjungan wisatawan	Pertumbuhan kunjungan wisatawan tidak sesuai target	R-156	Disparpora	Kurangnya inovasi daya tarik destinasi, promosi yang belum menjangkau pasar luas, serta aksesibilitas terbatas	Eksternal	C	Potensi pendapatan daerah dan kontribusi sektor pariwisata menurun, serta berkurangnya peluang ekonomi lokal	Pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, masyarakat sekitar destinasi
34	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	Rendahnya kepemilikan hak kekayaan intelektual di kalangan pelaku ekonomi kreatif	R-158	Disparpora, Disdagnakerkop UKM	Minimnya pemahaman pelaku terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual dan terbatasnya akses layanan pendaftaran	Hybrid (Internal & Eksternal)	C	Potensi pencurian karya dan persaingan usaha tidak sehat, menurunkan daya saing pelaku ekonomi kreatif dan potensi ekonomi daerah	Pelaku ekonomi kreatif, pemerintah daerah, masyarakat
35	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang aktif dan tervalidasi	Tingginya jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang belum tervalidasi dan tidak aktif	R-159	Disparpora, Disdagnakerkop UKM	Terbatasnya mekanisme pendataan dan verifikasi serta lemahnya koordinasi lintas sektor	Internal	C	Data tidak akurat dalam perencanaan dan kebijakan, menurunkan efektivitas pembinaan dan fasilitasi pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata	Pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, pemerintah daerah
36	**Sasaran 3.1.4 Meningkatnya Kemudahan berinvestasi**	**Persentase peningkatan investasi**	Rendahnya peningkatan investasi daerah	R-160	DPMPTP	Lambatnya proses perizinan dan minimnya promosi investasi	Internal	C	Peluang investasi tidak termanfaatkan optimal, memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah	Pelaku usaha, pemerintah daerah
37		**Pembentukan Modal Tetap Bruto (%) PDRB**	Rendahnya kontribusi PMTB terhadap PDRB	R-161	Bapelitbangda dan DPMPTP	Kurangnya proyek infrastruktur produktif dan rendahnya belanja modal pemerintah	Internal	C	Lambatnya akselerasi pembangunan sektor riil, pengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi	Pemda, investor, pelaku ekonomi lokal
38		**Total Dana Pihak Ketiga / PDRB**	Rendahnya rasio dana pihak ketiga terhadap PDRB	R-162	OJK/Perbankan/TKD D	Minimnya literasi keuangan dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan	Eksternal	C	Rendahnya likuiditas pembiayaan kegiatan ekonomi daerah	Pelaku usaha, sektor keuangan, pemerintah daerah
39		**Nilai Transaksi Saham per Kapita**	Rendahnya nilai transaksi saham per kapita	R-163	OJK/Bursa Efek Indonesia	Terbatasnya akses dan pemahaman masyarakat terhadap investasi pasar modal	Eksternal	C	Terbatasnya sumber pembiayaan sektor usaha modern dan rendahnya partisipasi publik dalam pasar modal	Investor lokal, pemerintah daerah
40	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Rendahnya realisasi investasi terhadap target	R-164	DPMPTP	Kurangnya minat investor akibat ketidakpastian regulasi dan iklim usaha kurang kondusif	Eksternal	C	Target investasi tidak tercapai, memengaruhi pencapaian sasaran pembangunan ekonomi daerah	Pemerintah daerah, pelaku usaha, investor
41	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investor yang Berinvestasi	Rendahnya persentase peningkatan investor yang berinvestasi	R-165	DPMPTP	Promosi penanaman modal kurang efektif dan tidak tepat sasaran	Eksternal	C	Minat investasi menurun, berakibat pada perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah	Pemerintah daerah, pelaku usaha, investor
42	Program pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai Ketentuan	Rendahnya persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	R-166	DPMPTP	Proses perizinan yang lambat, rumit, dan kurang transparan	Internal	C	Menurunnya kepercayaan pelaku usaha dan hambatan dalam pengembangan usaha	Pelaku usaha, pemerintah daerah
43	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemanfaatan data dan infromasi penanaman modal	Rendahnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	R-168	DPMPTP	Kurangnya integrasi dan pembaruan sistem informasi investasi daerah dengan sistem pusat	Internal	C	Pengambilan kebijakan penanaman modal menjadi tidak tepat sasaran, serta peluang investasi tidak terinformasikan secara optimal	Pemerintah daerah, calon investor
44	Program Kerja Sama Penanaman Modal	Persentase kerja sama penanaman modal yang ditindaklanjuti	Rendahnya tindak lanjut terhadap kerja sama penanaman modal	R-169	DPMPTP	Terbatasnya koordinasi lintas sektor dan belum optimalnya mekanisme monitoring kerja sama	Internal	C	Peluang kerja sama strategis tidak berkembang, menghambat peningkatan investasi daerah	Pemerintah daerah, investor potensial
45	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	Rendahnya peningkatan produktivitas tenaga kerja di sektor prioritas	R-185	Disdagnakerkop UKM	Terbatasnya pelatihan kerja berbasis kebutuhan sektor prioritas	Internal	C	Daya saing tenaga kerja menurun, pertumbuhan sektor prioritas terhambat	Tenaga kerja, pelaku usaha, sektor prioritas
46		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Rendahnya persentase tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	R-186	Disdagnakerkop UKM	Terbatasnya akses uji kompetensi dan sertifikasi profesi	Internal	C	Tenaga kerja tidak memenuhi standar industri, memperbesar kesenjangan pasar kerja	Tenaga kerja, dunia usaha, lembaga pelatihan
47	**Sasaran 3.1.7 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa**	**Indeks Desa Membangun (IDM)**	Lambatnya peningkatan status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM)	R-191	DPMD	Terbatasnya kapasitas aparatur desa dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa	Internal	C	Pembangunan desa tidak optimal, ketimpangan pembangunan antar wilayah desa meningkat	Masyarakat desa, pemerintah daerah
48	Program Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Rendahnya capaian fasilitasi penataan desa	R-192	DPMD	Keterbatasan data dan informasi kewilayahan desa serta koordinasi lintas sektor	Internal	C	Penataan desa tidak berjalan optimal, berisiko menimbulkan tumpang tindih wilayah administrasi dan pelayanan publik	Pemerintah daerah, masyarakat desa
49		Persentase Fasilitasi Pembentukan Desa	Rendahnya fasilitasi pembentukan desa baru	R-193	DPMD	Proses verifikasi dan validasi data tidak berjalan maksimal serta keterbatasan anggaran	Internal	C	Pembentukan desa terhambat, berpengaruh pada pelayanan publik dan efektivitas pemerintahan desa	Masyarakat calon desa, pemerintah daerah
50	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Daerah	Rendahnya fasilitasi kerja sama antar desa dan pihak lain	R-194	DPMD	Minimnya inisiatif dari desa dan kurangnya pendampingan teknis untuk membangun kerja sama	Internal	C	Potensi ekonomi dan sosial desa tidak berkembang optimal, memperlambat kemandirian desa	Pemerintah desa, masyarakat desa, mitra kerja sama

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
51	Program Administrasi pemerintahan Desa	Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	Terbatasnya peningkatan kapasitas aparatur desa dan BPD	R-195	DPMD	Kurangnya pelatihan dan fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur dan BPD	Internal	C	Menurunnya kualitas tata kelola pemerintahan desa dan layanan publik	Masyarakat desa, aparatur desa, BPD
52		Persentase pengentasan desa tertinggal	Lambatnya pengentasan desa tertinggal	R-196	DPMD	Terbatasnya intervensi pembangunan berbasis kebutuhan dan kapasitas desa tertinggal	Internal	C	Tertinggalnya pembangunan ekonomi dan sosial di desa tersebut	Masyarakat desa tertinggal, pemerintah daerah
53		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Rendahnya peningkatan status desa mandiri	R-197	DPMD	Belum optimalnya pemanfaatan potensi lokal dan sinergi program lintas sektor	Internal	C	Pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa tidak tercapai maksimal	Masyarakat desa, pemda
54		Persentase Fasilitasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Kurangnya fasilitasi tata kelola administrasi desa	R-198	DPMD	Kurangnya tenaga pendamping dan sistem pendukung tata kelola desa	Internal	C	Administrasi pemerintahan desa tidak tertib, berdampak pada akuntabilitas dan transparansi layanan publik	Pemerintah desa, masyarakat desa
55		Persentase Fasilitasi Tata Kelola keuangan dan Aset Desa	Rendahnya fasilitasi tata kelola keuangan dan aset desa	R-199	DPMD	Terbatasnya bimbingan teknis dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan aset desa	Internal	C	Potensi penyimpangan dan inefisiensi penggunaan dana desa meningkat	Masyarakat desa, auditor internal
56		Persentase Fasilitasi Bumnag	Rendahnya fasilitasi pengembangan BUMNag	R-200	DPMD	Minimnya pendampingan usaha dan akses pasar untuk BUMNag	Internal	C	Usaha milik desa tidak berkembang, berdampak pada pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat	Masyarakat desa, pengurus BUMNag
57	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Rendahnya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	R-201	DPMD	Terbatasnya program fasilitasi dan pembinaan terhadap LKD di desa	Internal	C	LKD tidak berfungsi optimal dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik desa	Masyarakat desa, pemerintah desa
58		Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Kurangnya pemberdayaan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	R-202	DPMD	Tidak adanya regulasi teknis dan keterbatasan data serta pemetaan kelembagaan adat	Internal	C	Pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan peran kelembagaan adat dalam pembangunan desa melemah	Masyarakat adat, pemerintah daerah
59		Persentase Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong	Menurunnya pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong	R-203	DPMD	Minimnya partisipasi masyarakat dan alokasi anggaran kegiatan gotong royong	Internal	C	Nilai-nilai kebersamaan dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan menurun	Masyarakat desa, lembaga desa
60	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar	Menurunnya cakupan pelayanan kesehatan dasar	R-203-1	Dinas Kesehatan	Distribusi tenaga kesehatan tidak merata, fasilitas kesehatan kurang memadai	Internal dan Eksternal	C	Kesehatan masyarakat menurun, angka kesakitan meningkat, produktivitas menurun	Masyarakat umum, pemerintah daerah
61	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	Kurangnya tenaga kesehatan berkualitas	R-203-2	Dinas Kesehatan	Keterbatasan anggaran pelatihan, ketidaksesuaian rekrutmen	Internal	C	Kualitas pelayanan menurun, keluhan masyarakat meningkat, target pembangunan kesehatan tidak tercapai	Tenaga kesehatan, masyarakat, pemerintah daerah
62	Program sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Ketersediaan obat dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan	Kekurangan ketersediaan obat dan alat kesehatan	R-203-3	Dinas Kesehatan	Distribusi logistik tidak lancar, pengadaan lambat	Internal dan Eksternal	UC	Layanan kesehatan terganggu, pasien tidak mendapatkan pengobatan tepat waktu	Masyarakat, pasien, tenaga kesehatan
63	Program Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan	Persentase desa/kelurahan dengan program kesehatan aktif	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam program kesehatan	R-203-4	Dinas Kesehatan	Minimnya edukasi kesehatan, kurangnya kader kesehatan	Internal	C	Perilaku hidup sehat rendah, penyakit menular sulit dikendalikan	Masyarakat umum, pemerintah daerah
64	Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Indeks ketentraman dan ketertiban umum	Menurunnya rasa aman masyarakat	R-203-5	Satpol PP dan Damkar	Koordinasi aparat kurang, patroli tidak rutin	Internal dan Eksternal	UC	Kriminalitas meningkat, keresahan sosial	Masyarakat umum, pelaku usaha, pemerintah daerah
65	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi	Kurangnya jangkauan layanan rehabilitasi sosial	R-203-6	DINSOSP3A	Keterbatasan tenaga pekerja sosial, sarana prasarana kurang memadai	Internal	C	Penyandang masalah sosial tidak tertangani, kerentanan sosial meningkat	Penyandang masalah sosial, keluarga, pemerintah daerah
66	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase warga miskin yang mendapatkan bantuan sosial	Distribusi bantuan sosial tidak tepat sasaran	R-203-7	DINSOSP3A	Data penerima tidak valid, mekanisme penyaluran tidak optimal	Internal dan Eksternal	UC	Ketimpangan sosial meningkat, konflik sosial	Masyarakat miskin, pemerintah daerah

KEPALA BAPELITBANGDA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

...

Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda	**: Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman**
Tahun Penilaian	**: 2025**
Tujuan Strategis	**: Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing**
Urusan Pemerintahan	**: Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pemerintahan dasar**

No.	**"Risiko" yang Teridentifikasi**	**Kode Risiko**	**Analisis Risiko**		
			Skala Dampak*)	**Skala Kemungkinan *)**	**Skala Risiko**
a	b	c	**d**	**e**	**f=dxe**
1	Rendahnya laju pertumbuhan ekonomi daerah	R-096	4	4	16
2	Rendahnya PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB)	R-097	4	4	16
3	Menurunnya volume ekspor barang dan jasa daerah	R-098	3	4	12
4	Menurunnya kontribusi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan terhadap PDRB	R-099	4	3	12
5	Rendahnya kontribusi sektor pertanian, peternakan dan perikanan terhadap PDRB	R-100	4	3	12
6	Penurunan luas tanam tanaman pangan padi dan jagung	R-101	3	3	9
7	Rendahnya rasio penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) pra panen	R-102	3	3	9
8	Terbatasnya areal pengembangan dan peremajaan tanaman perkebunan	R-103	3	3	9
9	Rendahnya luas pengembangan tanaman hortikultura	R-104	2	3	6
10	Rendahnya peningkatan areal sawah yang terairi irigasi teknis/non teknis	R-105	3	2	6
11	Terbatasnya peningkatan akses transportasi ke areal sawah	R-106	3	2	6
12	Lemahnya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	R-107	3	3	9
13	Rendahnya areal tanaman perkebunan yang tersertifikasi	R-108	2	3	6
14	Terbatasnya akses transportasi ke areal perkebunan	R-109	3	3	9
15	Lambatnya peningkatan akses transportasi ke areal hortikultura	R-110	2	2	4
16	Rendahnya cakupan layanan kesehatan hewan	R-120	3	4	12
17	Rendahnya cakupan pelayanan kesehatan pada ternak produksi	R-121	2	2	4
18	Penurunan produksi perikanan budidaya	R-123	4	3	12
19	Penurunan jumlah produksi benih	R-124	2	3	6
20	Penurunan produksi ikan olahan	R-126	2	2	4
21	Rendahnya angka konsumsi ikan di masyarakat	R-127	4	4	16
22	Menurunnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	R-128	3	2	6
23	Rendahnya volume usaha koperasi	R-129	2	3	6
24	Rendahnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB	R-130	4	4	16
25	Rendahnya rasio industri pengolahan dalam PDRB	R-131	4	2	8
26	Rendahnya persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	R-136	2	2	4
27	Rendahnya persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	R-137	2	2	4
28	Rendahnya persentase koperasi aktif	R-138	3	2	6
29	Rendahnya persentase koperasi yang difasilitasi pelatihan	R-139	3	2	6
30	Rendahnya persentase koperasi yang meningkat kualitasnya	R-140	2	2	4
31	Rendahnya persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	R-143	3	3	9

32	Rendahnya tingkat pertumbuhan wirausaha baru	R-144	2	2	4
33	Rendahnya jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung	R-153	4	3	12
34	Rendahnya kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDRB daerah	R-154	4	2	8
35	Rendahnya kontribusi sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum terhadap PDRB daerah	R-155	4	2	8
36	Pertumbuhan kunjungan wisatawan tidak sesuai target	R-156	3	2	6
37	Rendahnya kepemilikan hak kekayaan intelektual di kalangan pelaku ekonomi kreatif	R-158	2	2	4
38	Tingginya jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang belum tervalidasi dan tidak aktif	R-159	4	3	12
39	Rendahnya peningkatan investasi daerah	R-160	3	2	6
40	Rendahnya kontribusi PMTB terhadap PDRB	R-161	2	4	8
41	Rendahnya rasio dana pihak ketiga terhadap PDRB	R-162	4	4	16
42	Rendahnya nilai transaksi saham per kapita	R-163	3	2	6
43	Rendahnya realisasi investasi terhadap target	R-164	2	2	4
44	Rendahnya persentase peningkatan investor yang berinvestasi	R-165	4	2	8
45	Rendahnya persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	R-166	2	2	4
46	Rendahnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	R-168	3	2	6
47	Rendahnya tindak lanjut terhadap kerja sama penanaman modal	R-169	4	2	8
48	Rendahnya peningkatan produktivitas tenaga kerja di sektor prioritas	R-185	3	2	6
49	Rendahnya persentase tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	R-186	3	2	6
50	Lambatnya peningkatan status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM)	R-191	3	3	9
51	Rendahnya capaian fasilitasi penataan desa	R-192	3	2	6
52	Rendahnya fasilitasi pembentukan desa baru	R-193	2	2	4
53	Rendahnya fasilitasi kerja sama antar desa dan pihak lain	R-194	4	2	8
54	Terbatasnya peningkatan kapasitas aparatur desa dan BPD	R-195	2	2	4
55	Lambatnya pengentasan desa tertinggal	R-196	4	2	8
56	Rendahnya peningkatan status desa mandiri	R-197	2	3	6
57	Kurangnya fasilitasi tata kelola administrasi desa	R-198	2	2	4
58	Rendahnya fasilitasi tata kelola keuangan dan aset desa	R-199	3	2	6
59	Rendahnya fasilitasi pengembangan BUMNag	R-200	3	2	6
60	Rendahnya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	R-201	2	2	4
61	Kurangnya pemberdayaan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	R-202	2	2	4
62	Menurunnya pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong	R-203	3	2	6
63	Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar	R-203-1	4	4	16
64	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	R-203-2	4	3	12
65	Ketersediaan obat dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan	R-203-3	4	3	12
66	Persentase desa/kelurahan dengan program kesehatan aktif	R-203-4	3	3	9
67	Indeks ketentraman dan ketertiban umum	R-203-5	4	4	16
68	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi	R-203-6	3	3	9
69	Persentase warga miskin yang mendapatkan bantuan sosial	R-203-7	4	3	12

KEPALA BAPELITBANGDA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

...

Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda : **Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman**

Tahun Penilaian : **2025**

Tujuan Strategis : **Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing**

Urusan Pemerintahan : **Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pemerintahan dasar**

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	**Risiko Strategis**					
1	Rendahnya laju pertumbuhan ekonomi daerah	R-096	16	Bapelitbangda	Perencanaan pembangunan daerah yang kurang adaptif terhadap dinamika ekonomi global dan nasional	Penurunan daya saing daerah dan perlambatan pembangunan ekonomi
2	Rendahnya PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB)	R-097	16	Bapelitbangda	Kinerja sektor-sektor ekonomi unggulan rendah dan tidak seimbang	Penurunan kemampuan fiskal daerah dan ketimpangan kesejahteraan
3	Rendahnya angka konsumsi ikan di masyarakat	R-127	16	Dinas Perikanan	Rendahnya kesadaran dan edukasi konsumsi ikan di masyarakat	Potensi gizi masyarakat rendah dan permintaan lokal terhadap ikan menurun
4	Rendahnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB	R-130	16	Disdagnakerkop UKM	Rendahnya minat investasi di sektor industri	Peluang kerja berkurang dan pertumbuhan ekonomi tersendat
5	Rendahnya rasio dana pihak ketiga terhadap PDRB	R-162	16	Bapelitbangda	Kurangnya sosialisasi dan literasi keuangan masyarakat serta minimnya akses perbankan	Perputaran modal rendah dan pengembangan ekonomi terganggu
6	Menurunnya volume ekspor barang dan jasa daerah	R-098	12	Disdagnakerkop UKM	Kemampuan daya saing produk daerah menurun akibat kurangnya inovasi dan dukungan promosi	Penurunan pendapatan daerah dari sektor perdagangan
7	Menurunnya kontribusi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan terhadap PDRB	R-099	12	Disdagnakerkop UKM	Rendahnya minat investasi dan minimnya insentif bagi sektor perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB stagnan
8	Rendahnya kontribusi sektor pertanian, peternakan dan perikanan terhadap PDRB	R-100	12	DistanKP	Minimnya inovasi dan investasi di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan	Kontribusi terhadap PDRB rendah dan ketahanan pangan terganggu
9	Rendahnya cakupan layanan kesehatan hewan	R-120	12	Dinas Peternakan dan Kesehatan	Keterbatasan SDM dan fasilitas layanan kesehatan hewan	Peningkatan risiko penyakit hewan dan gangguan produksi ternak

10	Penurunan produksi perikanan budidaya	R-123	12	Dinas Perikanan	Tingginya biaya produksi, serangan hama penyakit, dan kualitas benih rendah	Penurunan produksi dan kerugian ekonomi bagi pembudidaya ikan
11	Rendahnya jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung	R-153	12	Disparpora	Kurangnya promosi dan aksesibilitas pariwisata internasional	Potensi devisa dari wisatawan mancanegara tidak optimal
12	Tingginya jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang belum tervalidasi dan tidak aktif	R-159	12	Disparpora, Disdagnakerkop UKM	Belum optimalnya sistem pendataan dan validasi pelaku pariwisata dan ekraf	Penyaluran bantuan dan pembinaan tidak tepat sasaran, serta kebijakan tidak efektif
13	Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar	R-203-1	16	Dinas Kesehatan	Keterbatasan fasilitas, distribusi tenaga medis tidak merata	Akses layanan menurun, angka kesakitan meningkat
14	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	R-203-2	12	Dinas Kesehatan	Kurangnya pelatihan, distribusi tenaga tidak seimbang	Kualitas layanan turun, risiko malpraktik meningkat
15	Ketersediaan obat dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan	R-203-3	12	Dinas Kesehatan	Keterlambatan distribusi, anggaran terbatas	Stok kosong, layanan terganggu
16	Indeks ketentraman dan ketertiban umum	R-203-5	16	Satpol PP dan Damkar	Keterbatasan aparat, koordinasi instansi lemah	Gangguan keamanan meningkat, rasa aman menurun
17	Persentase warga miskin yang mendapatkan bantuan sosial	R-203-7	12	DINSOSP3A	Data penerima tidak akurat, anggaran terbatas	Warga miskin tidak terlayani, ketimpangan meningkat

KEPALA BAPELITBANGDA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

...

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)

Nama Pemda	**: Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman**
Tahun Penilaian	**: 2025**
Tujuan Strategis	**: Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing**
Urusan Pemerintahan	**: Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pemerintahan dasar**

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	**Risiko Strategis**						
1	Rendahnya laju pertumbuhan ekonomi daerah	R-096	Penguatan sektor unggulan, promosi ekonomi daerah	1. Pengembangan sektor unggulan belum maksimal. 2. Daya saing ekonomi rendah. 3. Koordinasi antar OPD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kurang efektif.	1. Optimalisasi program pengembangan sektor unggulan. 2. Peningkatan promosi potensi ekonomi daerah. 3. Koordinasi lintas sektor secara berkala.	Bapelitbangda	2025-2029
2	Rendahnya PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB)	R-097	Pemantauan PDRB, fasilitasi kegiatan ekonomi	1. Nilai PDRB per kapita masih rendah. 2. Produktivitas sektor ekonomi rendah. 3. Diversifikasi usaha masyarakat minim.	1. Pengembangan usaha berbasis potensi lokal. 2. Peningkatan pelatihan kewirausahaan. 3. Penguatan akses pasar dan pembiayaan.	Bapelitbangda	2025-2029
3	Rendahnya angka konsumsi ikan di masyarakat	R-127	Kampanye gemar makan ikan, distribusi ikan segar	1. Angka konsumsi ikan rendah. 2. Distribusi ikan tidak merata. 3. Edukasi gizi kurang.	1. Program edukasi gizi berbasis ikan. 2. Penyediaan pasar ikan keliling. 3. Penguatan rantai pasok ikan segar.	Dinas Perikanan	2025-2029
4	Rendahnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB	R-130	Fasilitasi industri lokal, promosi produk	1. Kontribusi industri terhadap PDRB rendah. 2. Teknologi industri tertinggal. 3. Akses pasar terbatas.	1. Pendampingan teknologi industri. 2. Promosi produk industri daerah. 3. Pengembangan jejaring pasar.	Disdagnakerkop UKM	2025-2029
5	Rendahnya rasio dana pihak ketiga terhadap PDRB	R-162	Fasilitasi perbankan dan lembaga keuangan	1. Rasio dana pihak ketiga terhadap PDRB rendah. 2. Literasi keuangan masyarakat rendah. 3. Akses keuangan belum merata.	1. Edukasi literasi keuangan. 2. Fasilitasi pembukaan rekening massal. 3. Kerjasama dengan perbankan.	Bapelitbangda	2025-2029
6	Menurunnya volume ekspor barang dan jasa daerah	R-098	Promosi ekspor, fasilitasi pelaku usaha	1. Volume ekspor menurun. 2. Ketergantungan pada pasar tertentu tinggi. 3. Diversifikasi produk ekspor minim.	1. Diversifikasi pasar ekspor. 2. Pelatihan ekspor untuk pelaku usaha. 3. Peningkatan kualitas produk ekspor.	Disdagnakerkop UKM	2025-2029
7	Menurunnya kontribusi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan terhadap PDRB	R-099	Program penguatan sektor pertanian, peternakan, perikanan	1. Kontribusi sektor pertanian, peternakan, perikanan terhadap PDRB menurun. 2. Produktivitas sektor rendah. 3. Hilirisasi belum optimal.	1. Pengembangan hilirisasi produk. 2. Peningkatan teknologi produksi. 3. Pemasaran hasil produksi.	Disdagnakerkop UKM	2025-2029
8	Rendahnya kontribusi sektor pertanian, peternakan dan perikanan terhadap PDRB	R-100	Penguatan sektor pertanian, peternakan, perikanan	1. Kontribusi sektor pertanian, peternakan, perikanan rendah. 2. Investasi sektor minim. 3. Kurangnya inovasi produk.	1. Fasilitasi investasi sektor. 2. Inovasi teknologi pertanian, peternakan, perikanan. 3. Pelatihan kewirausahaan sektor.	DistanKP	2025-2029
9	Rendahnya cakupan layanan kesehatan hewan	R-120	Pelayanan kesehatan hewan, vaksinasi	1. Cakupan layanan kesehatan hewan rendah. 2. Peralatan layanan terbatas. 3. Kesadaran pemilik ternak rendah.	1. Penambahan tenaga medis hewan. 2. Penyediaan peralatan layanan. 3. Edukasi kesehatan hewan.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2025-2029
10	Penurunan produksi perikanan budidaya	R-123	Pembinaan pembudidaya ikan, distribusi benih	1. Produksi perikanan budidaya menurun. 2. Teknologi budidaya terbatas. 3. Akses pakan berkualitas rendah.	1. Pelatihan budidaya modern. 2. Penyediaan benih unggul. 3. Subsidi pakan berkualitas.	Dinas Perikanan	2025-2029
11	Rendahnya jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung	R-153	Promosi pariwisata mancanegara	1. Jumlah wisatawan mancanegara rendah. 2. Aksesibilitas wisata terbatas. 3. Promosi internasional minim.	1. Promosi pariwisata ke pasar internasional. 2. Peningkatan infrastruktur pendukung wisata. 3. Kerja sama agen perjalanan luar negeri.	Disparpora	2025-2029
12	Tingginya jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang belum tervalidasi dan tidak aktif	R-159	Validasi data pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Data pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif belum lengkap. 2. Banyak pelaku tidak aktif. 3. Basis data belum terintegrasi.	1. Validasi dan pemutakhiran data pelaku. 2. Pembinaan pelaku tidak aktif. 3. Integrasi basis data antar instansi.	Disparpora, Disdagnakerkop UKM	2025-2029
13	Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar	R-203-1	1. Pelaporan capaian layanan kesehatan dasar melalui Puskesmas dan Dinkes	1. Sistem monitoring belum terintegrasi 2. Keterlambatan pelaporan	1. Integrasi sistem informasi kesehatan 2. Peningkatan kapasitas SDM pengelola data	Dinas Kesehatan	2025-2029

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
14	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	R-203-2	1. Sertifikasi tenaga kesehatan 2. Pelatihan tenaga kesehatan	1. Belum semua tenaga kesehatan mengikuti pelatihan 2. Belum semua tenaga kesehatan tersertifikasi	1. Perluasan program pelatihan 2. Penjadwalan sertifikasi berkala	Dinas Kesehatan	2025-2029
15	Ketersediaan obat dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan	R-203-3	1. Pengadaan obat dan alkes rutin melalui e-catalog 2. Gudang farmasi daerah	1. Keterlambatan distribusi 2. Keterbatasan stok di fasilitas kesehatan	1. Optimalisasi manajemen logistik 2. Penguatan monitoring ketersediaan obat/alkes	Dinas Kesehatan	2025-2029
16	Indeks ketentraman dan ketertiban umum	R-203-5	1. Patroli rutin Satpol PP 2. Pelaporan gangguan ketertiban	1. Belum ada sistem pelaporan cepat berbasis digital	1. Pengembangan aplikasi pengaduan masyarakat 2. Peningkatan koordinasi antar instansi keamanan	Satpol PP dan Damkar	2025-2029
17	Persentase warga miskin yang mendapatkan bantuan sosial	R-203-7	1. Distribusi bantuan sosial melalui DTKS 2. Program rutin Dinsos	1. Validasi data penerima belum optimal 2. Potensi inclusion/exclusion error	1. Pemutakhiran DTKS secara berkala 2. Penguatan mekanisme pengawasan distribusi	DINSOSP3A	2025-2029

KEPALA BAPELITBANGDA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

...

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda : **Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman**
Tahun Penilaian : **2025**
Tujuan Strategis : **Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing**
Urusan Pemerintahan : **Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pemerintahan dasar**

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	1. Optimalisasi program pengembangan sektor unggulan. 2. Peningkatan promosi potensi ekonomi daerah. 3. Koordinasi lintas sektor secara berkala.	Laporan perkembangan, brosur promosi, rapat koordinasi lintas sektor	Disdagnakerkop UKM, Disparpora	Pelaku usaha, investor, OPD terkait	2025-2029		
2	1. Pengembangan usaha berbasis potensi lokal. 2. Peningkatan pelatihan kewirausahaan. 3. Penguatan akses pasar dan pembiayaan.	Pameran produk lokal, pelatihan kewirausahaan, publikasi akses pasar	Disdagnakerkop UKM	Pelaku usaha, koperasi, masyarakat	2025-2029		
3	1. Program edukasi gizi berbasis ikan. 2. Penyediaan pasar ikan keliling. 3. Penguatan rantai pasok ikan segar.	Leaflet gizi ikan, publikasi pasar ikan keliling, rapat rantai pasok	Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan	Masyarakat, nelayan, pedagang ikan	2025-2029		
4	1. Pendampingan teknologi industri. 2. Promosi produk industri daerah. 3. Pengembangan jejaring pasar.	Buku panduan teknologi industri, brosur promosi, jejaring pasar	Disdagnakerkop UKM	Pelaku industri, asosiasi usaha	2025-2029		
5	1. Edukasi literasi keuangan. 2. Fasilitasi pembukaan rekening massal. 3. Kerjasama dengan perbankan.	Brosur literasi keuangan, event pembukaan rekening massal, MoU dengan bank	Disdagnakerkop UKM, Perbankan	Masyarakat umum, pelaku usaha	2025-2029		
6	1. Diversifikasi pasar ekspor. 2. Pelatihan ekspor untuk pelaku usaha. 3. Peningkatan kualitas produk ekspor.	Brosur peluang pasar ekspor, pelatihan ekspor, publikasi standar kualitas produk	Disdagnakerkop UKM	Pelaku usaha, eksportir	2025-2029		
7	1. Pengembangan hilirisasi produk. 2. Peningkatan teknologi produksi. 3. Pemasaran hasil produksi.	Publikasi hilirisasi produk, panduan teknologi produksi, katalog hasil produksi	Disdagnakerkop UKM	Pelaku industri, UMKM	2025-2029		
8	1. Fasilitasi investasi sektor. 2. Inovasi teknologi pertanian, peternakan, perikanan. 3. Pelatihan kewirausahaan sektor.	Dokumen fasilitasi investasi, panduan teknologi sektor, modul kewirausahaan	Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan	Petani, peternak, nelayan, pelaku usaha	2025-2029		
9	1. Penambahan tenaga medis hewan. 2. Penyediaan peralatan layanan. 3. Edukasi kesehatan hewan.	Pengumuman rekrut tenaga medis hewan, distribusi peralatan layanan, leaflet kesehatan hewan	Dinas Peternakan	Peternak, masyarakat	2025-2029		
10	1. Pelatihan budidaya modern. 2. Penyediaan benih unggul. 3. Subsidi pakan berkualitas.	Buku panduan budidaya, distribusi benih unggul, publikasi subsidi pakan	Dinas Perikanan, Dinas Pertanian	Pembudidaya, petani, nelayan	2025-2029		

11	1. Promosi pariwisata ke pasar internasional. 2. Peningkatan infrastruktur pendukung wisata. 3. Kerja sama agen perjalanan luar negeri.	Brosur wisata internasional, laporan pembangunan infrastruktur, MoU agen perjalanan	Disparpora, Bapelitbangda	Wisatawan mancanegara, pelaku wisata	2025-2029		
12	1. Validasi dan pemutakhiran data pelaku. 2. Pembinaan pelaku tidak aktif. 3. Integrasi basis data antar instansi.	Form validasi data pelaku, laporan pembinaan, publikasi integrasi data	Disdagnakerkop UKM	Pelaku usaha, OPD terkait	2025-2029		
13	1. Integrasi sistem informasi kesehatan 2. Peningkatan kapasitas SDM pengelola data	Portal data & rapat koordinasi	Dinas Kesehatan	OPD terkait & tenaga kesehatan	2025-2029		
14	1. Perluasan program pelatihan 2. Penjadwalan sertifikasi berkala	Workshop & modul pelatihan	Dinas Kesehatan	ASN & tenaga kesehatan	2025-2029		
15	1. Optimalisasi manajemen logistik 2. Penguatan monitoring ketersediaan obat/alkes	Platform e-logistik & dashboard monitoring	Dinas Kesehatan	Fasilitas kesehatan & OPD terkait	2025-2029		
16	1. Pengembangan aplikasi pengaduan masyarakat 2. Peningkatan koordinasi antar instansi keamanan	Aplikasi pengaduan & forum koordinasi lintas sektor	Satpol PP dan Damkar	Masyarakat & OPD keamanan	2025-2029		
17	1. Pemutakhiran DTKS secara berkala 2. Penguatan mekanisme pengawasan distribusi	SIKS-NG & forum validasi data	DINSOSP3A	Masyarakat penerima bantuan & DPRD	2025-2029		

KEPALA BAPELITBANGDA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

...

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemda : **Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman**
Tahun Penilaian : **2025**
Tujuan Strategis : **Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing**
Urusan Pemerintahan : **Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pemerintahan dasar**

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	1. Optimalisasi program pengembangan sektor unggulan. 2. Peningkatan promosi potensi ekonomi daerah. 3. Koordinasi lintas sektor secara berkala.	Optimalisasi sektor unggulan; promosi ekonomi; koordinasi lintas sektor	Disdagnakerkop UKM, Disparpora	2025-2029		
2	1. Pengembangan usaha berbasis potensi lokal. 2. Peningkatan pelatihan kewirausahaan. 3. Penguatan akses pasar dan pembiayaan.	Pengembangan usaha lokal; pelatihan wirausaha; akses pasar	Disdagnakerkop UKM	2025-2029		
3	1. Program edukasi gizi berbasis ikan. 2. Penyediaan pasar ikan keliling. 3. Penguatan rantai pasok ikan segar.	Edukasi gizi ikan; pasar ikan keliling; rantai pasok ikan	Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan	2025-2029		
4	1. Pendampingan teknologi industri. 2. Promosi produk industri daerah. 3. Pengembangan jejaring pasar.	Pendampingan teknologi industri; promosi produk; jejaring pasar	Disdagnakerkop UKM	2025-2029		
5	1. Edukasi literasi keuangan. 2. Fasilitasi pembukaan rekening massal. 3. Kerjasama dengan perbankan.	Edukasi literasi keuangan; rekening massal; kerjasama bank	Disdagnakerkop UKM, Perbankan	2025-2029		
6	1. Diversifikasi pasar ekspor. 2. Pelatihan ekspor untuk pelaku usaha. 3. Peningkatan kualitas produk ekspor.	Diversifikasi ekspor; pelatihan ekspor; kualitas produk	Disdagnakerkop UKM	2025-2029		
7	1. Pengembangan hilirisasi produk. 2. Peningkatan teknologi produksi. 3. Pemasaran hasil produksi.	Hilirisasi produk; teknologi produksi; pemasaran hasil	Disdagnakerkop UKM	2025-2029		
8	1. Fasilitasi investasi sektor. 2. Inovasi teknologi pertanian, peternakan, perikanan. 3. Pelatihan kewirausahaan sektor.	Fasilitasi investasi; inovasi teknologi sektor; pelatihan wirausaha	Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan	2025-2029		
9	1. Penambahan tenaga medis hewan. 2. Penyediaan peralatan layanan. 3. Edukasi kesehatan hewan.	Tenaga medis hewan; peralatan layanan; edukasi kesehatan hewan	Dinas Peternakan	2025-2029		
10	1. Pelatihan budidaya modern. 2. Penyediaan benih unggul. 3. Subsidi pakan berkualitas.	Pelatihan budidaya modern; benih unggul; subsidi pakan	Dinas Perikanan, Dinas Pertanian	2025-2029		
11	1. Promosi pariwisata ke pasar internasional. 2. Peningkatan infrastruktur pendukung wisata. 3. Kerja sama agen perjalanan luar negeri.	Promosi pariwisata internasional; infrastruktur wisata; kerja sama agen	Disparpora, Bapelitbangda	2025-2029		
12	1. Validasi dan pemutakhiran data pelaku. 2. Pembinaan pelaku tidak aktif. 3. Integrasi basis data antar instansi.	Validasi data pelaku; pembinaan tidak aktif; integrasi basis data	Disdagnakerkop UKM	2025-2029		

13	1. Integrasi sistem informasi kesehatan 2. Peningkatan kapasitas SDM pengelola data	Integrasi sistem informasi kesehatan; Peningkatan kapasitas SDM pengelola data,Audit data rutin; Evaluasi kinerja SDM	Dinas Kesehatan	2025-2029		
14	1. Perluasan program pelatihan 2. Penjadwalan sertifikasi berkala	Perluasan program pelatihan; Penjadwalan sertifikasi berkala,Monitoring jadwal pelatihan; Review hasil sertifikasi	Dinas Kesehatan	2025-2029		
15	1. Optimalisasi manajemen logistik 2. Penguatan monitoring ketersediaan obat/alkes	Optimalisasi manajemen logistik; Penguatan monitoring ketersediaan obat/alkes,Pelaporan stok berkala; Inspeksi lapangan	Dinas Kesehatan	2025-2029		
16	1. Pengembangan aplikasi pengaduan masyarakat 2. Peningkatan koordinasi antar instansi keamanan	Pengembangan aplikasi pengaduan masyarakat; Peningkatan koordinasi antar instansi keamanan,Uji coba aplikasi; Rapat koordinasi rutin	Satpol PP dan Damkar	2025-2029		
17	1. Pemutakhiran DTKS secara berkala 2. Penguatan mekanisme pengawasan distribusi	Pemutakhiran DTKS secara berkala; Penguatan mekanisme pengawasan distribusi,Verifikasi data lapangan; Audit distribusi bantuan	DINSOSP3A	2025-2029		

KEPALA BAPELITBANGDA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

...

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda : **Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman**
Tahun Penilaian : **2025**
Tujuan Strategis : **Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing**
Urusan Pemerintahan : **Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pemerintahan dasar**

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
I	**Risiko Strategis Pemda**									
1	Rendahnya laju pertumbuhan ekonomi daerah	R-096	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Optimalisasi program pengembangan sektor unggulan. 2. Peningkatan promosi potensi ekonomi daerah. 3. Koordinasi lintas sektor secara berkala.			
2	Rendahnya PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB)	R-097	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Pengembangan usaha berbasis potensi lokal. 2. Peningkatan pelatihan kewirausahaan. 3. Penguatan akses pasar dan pembiayaan.			
3	Rendahnya angka konsumsi ikan di masyarakat	R-127	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Program edukasi gizi berbasis ikan. 2. Penyediaan pasar ikan keliling. 3. Penguatan rantai pasok ikan segar.			
4	Rendahnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB	R-130	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Pendampingan teknologi industri. 2. Promosi produk industri daerah. 3. Pengembangan jejaring pasar.			
5	Rendahnya rasio dana pihak ketiga terhadap PDRB	R-162	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Edukasi literasi keuangan. 2. Fasilitasi pembukaan rekening massal. 3. Kerjasama dengan perbankan.			
6	Menurunnya volume ekspor barang dan jasa daerah	R-098	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Diversifikasi pasar ekspor. 2. Pelatihan ekspor untuk pelaku usaha. 3. Peningkatan kualitas produk ekspor.			
7	Menurunnya kontribusi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan terhadap PDRB	R-099	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Pengembangan hilirisasi produk. 2. Peningkatan teknologi produksi. 3. Pemasaran hasil produksi.			
8	Rendahnya kontribusi sektor pertanian, peternakan dan perikanan terhadap PDRB	R-100	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Fasilitasi investasi sektor. 2. Inovasi teknologi pertanian, peternakan, perikanan. 3. Pelatihan kewirausahaan sektor.			
9	Rendahnya cakupan layanan kesehatan hewan	R-120	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Penambahan tenaga medis hewan. 2. Penyediaan peralatan layanan. 3. Edukasi kesehatan hewan.			
10	Penurunan produksi perikanan budidaya	R-123	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Pelatihan budidaya modern. 2. Penyediaan benih unggul. 3. Subsidi pakan berkualitas.			
11	Rendahnya jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung	R-153	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Promosi pariwisata ke pasar internasional. 2. Peningkatan infrastruktur pendukung wisata. 3. Kerja sama agen perjalanan luar negeri.			

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
12	Tingginya jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang belum tervalidasi dan tidak aktif	R-159	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Validasi dan pemutakhiran data pelaku. 2. Pembinaan pelaku tidak aktif. 3. Integrasi basis data antar instansi.			
13	Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar	R-203-1	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Integrasi sistem informasi kesehatan 2. Peningkatan kapasitas SDM pengelola data			
14	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	R-203-2	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Perluasan program pelatihan 2. Penjadwalan sertifikasi berkala			
15	Ketersediaan obat dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan	R-203-3	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Optimalisasi manajemen logistik 2. Penguatan monitoring ketersediaan obat/alkes			
16	Indeks ketentraman dan ketertiban umum	R-203-5	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Pengembangan aplikasi pengaduan masyarakat 2. Peningkatan koordinasi antar instansi keamanan			
17	Persentase warga miskin yang mendapatkan bantuan sosial	R-203-7	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Pemutakhiran DTKS secara berkala 2. Penguatan mekanisme pengawasan distribusi			

KEPALA BAPELITBANGDA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

...

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda **Tahun Penilaian** **Periode yang dinilai**	**: Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman** **: 2025** **: Periode RPJMD Tahun 2025 - 2029**
Sumber Data	: RPJMD Kabupaten Padang Pariaman
Visi	: Membangun Padang Pariaman Maju dan Sejahtera
Misi Strategis RPJMD	1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas 2. Menciptakan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing 3. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju, dan Merata 4. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	1. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan
Tujuan Strategis RPJMD	Tujuan 1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas Tujuan 2 Terciptanya Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berdaya Saing dan Inklusif Tujuan 3 Meningkatnya Perekonomian Daerah yang maju dan inklusif Tujuan 4 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan, berketahanan terhadap bencana dan Perubahan Iklim Tujuan 5 Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tentram dan harmonis dala keberagaman agama
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	Tujuan 4 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan, berketahanan terhadap bencana dan Perubahan Iklim
Sasaran RPJMD	1.1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas 1.2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan 1.3 Menurunnya risiko bencana
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	1.1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas 1.2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan 1.3 Menurunnya risiko bencana
IKU Sasaran RPJMD	1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) 2. Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan 3. Kapasitas Air Baku (m3/detik) 4.Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau 5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 6. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah 7. Indeks Risiko Bencana
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) 2. Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan 3. Kapasitas Air Baku (m3/detik) 4.Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau 5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 6. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah 7. Indeks Risiko Bencana
Prioritas pembangunan dan program unggulan	I. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1. Program penyelenggaraan jalan 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air 3. Program Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum 4. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional 5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 6. Program Penataan Bangunan Gedung 7. Program penyelenggaraan penataan ruang
	II. DINAS PERHUBUNGAN 1. Program penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ) 2. Program Pengelolaan Perkeretaapian
	III. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1. Program pengembangan dan Perumahan 2. Program perencanaan Lingkungan Hidup 3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 4. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH 5. Program Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat 6. Program penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 7. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup 8. Program pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 9. Program Pengelolaan persampahan
	IV. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1. Program Penanggulangan bencana
	V. SATPOL PP DAMKAR 1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan Non-Kebakaran
Urusan Pemerintahan Daerah	1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENATAAN RUANG 2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN 4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSAMPAHAN 6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 7. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG BENCANA
Nama Dinas Terkait	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	2. Dinas Perhubungan
	3. Dinas lingkungan hidup kawasan permukiman dan pertanahan

	4. Badan Penanggulangan Bencaan Daerah
	5. Satpol PP damkar
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tujuan 1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan, berketahanan terhadap bencana dan Perubahan Iklim Sasaran 1.1 :Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas IKU : 1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) 2. Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan 3. Kapasitas Air Baku (m3/detik) 4. Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau Program : 1. Program penyelenggaraan jalan 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air 3. Program Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum 4. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional 5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 6. Program Penataan Bangunan Gedung 7. Program penyelenggaraan penataan ruang
	DINAS PERHUBUNGAN Tujuan 1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan, berketahanan terhadap bencana dan Perubahan Iklim Sasaran 1.1 :Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas IKU : 1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) 2. Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan 3. Kapasitas Air Baku (m3/detik) 4. Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau Program : 1. Program penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ) 2. Program Pengelolaan Perkeretaapian
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Tujuan 1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan, berketahanan terhadap bencana dan Perubahan Iklim Sasaran 1.1 :Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas Sasaran 1.2 :Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan IKU : 1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) 2. Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan 3. Kapasitas Air Baku (m3/detik) 4. Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau 5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 6. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Program : 1. Program pengembangan dan Perumahan 2. Program perencanaan Lingkungan Hidup 3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 4. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH 5. Program Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat 6. Program penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 7. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup 8. Program pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 9. Program Pengelolaan persampahan
	IV. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Tujuan 1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan, berketahanan terhadap bencana dan Perubahan Iklim Sasaran 1.3 :Menurunnya Risiko Bencana IKU : 1. Indeks Risiko Bencana Program : 1. Program pengembangan dan Perumahan

KEPALA BAPELITBANGDA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

...

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemda : **Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman**
Nama OPD : **OPD Pengampu Misi 4**
Tahun Penilaian : **2025**
Periode yang dinilai : **2025-2029**
Urusan Pemerintahan : **Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pemerintahan dasar**

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	**Tujuan 4.1** **Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan, berketahanan terhadap bencana dan Perubahan Iklim**	**Indeks Infrastruktur Daerah**	Rendahnya skor Indeks Infrastruktur Daerah	R-204	Dinas PUPR	Keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur dan lemahnya koordinasi lintas sektor	Internal	C	Pembangunan infrastruktur tidak merata, menurunkan konektivitas dan daya saing daerah	Masyarakat, pelaku usaha, pemerintah daerah
2	**Sasaran 4.1.1** **Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas**	**Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)**	Rendahnya Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	R-205	Dinas PUPR	Kualitas infrastruktur belum merata dan belum sesuai standar pelayanan minimal	Internal	C	Tingkat kepuasan masyarakat menurun, berdampak pada kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah	Masyarakat, pengguna layanan infrastruktur, pemerintah daerah
3	Program penyelenggaraan jalan	Persentase jalan kabupaten yang ditingkatkan	Rendahnya peningkatan kualitas jalan kabupaten	R-206	Dinas PUPR	Terbatasnya anggaran pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten	Internal	C	Jalan rusak dan tidak layak dilalui, menghambat mobilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah	Masyarakat, pengguna jalan, pelaku usaha, pemerintah daerah
4		Persentase jembatan kabupaten yang ditingkatkan	Rendahnya peningkatan kualitas jembatan kabupaten	R-207	Dinas PUPR	Tingginya backlog jembatan rusak dan keterbatasan perencanaan teknis	Internal	C	Gangguan konektivitas antarwilayah, potensi kecelakaan meningkat, memperlambat distribusi barang dan jasa	Masyarakat, pengguna jalan, pelaku usaha, pemerintah daerah
5	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	Rendahnya perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	R-208	Dinas PUPR	Kurangnya infrastruktur pengendali banjir dan minimnya koordinasi dalam penataan ruang	Internal	C	Permukiman terdampak banjir berulang, kerusakan aset dan terganggunya aktivitas sosial ekonomi	Masyarakat, pemerintah daerah
6		Persentase luas layanan irigasi	Terbatasnya cakupan layanan irigasi	R-209	Dinas PUPR	Saluran irigasi rusak dan belum terintegrasinya sistem jaringan irigasi	Internal	C	Produktivitas pertanian menurun, ketahanan pangan terganggu, potensi konflik penggunaan air meningkat	Petani, masyarakat, pemerintah daerah
7	Program Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase terlaksananya pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Rendahnya tingkat pengelolaan dan pengembangan SPAM	R-210	Dinas PUPR	Terbatasnya anggaran dan kapasitas teknis pengelola, serta kurangnya kolaborasi dengan BUMD Air Minum	Internal	C	Akses masyarakat terhadap air minum layak terbatas, meningkatkan risiko kesehatan dan memperburuk kualitas hidup	Masyarakat, pemerintah daerah
8	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Persentase kondisi baik infrastruktur persampahan	Rendahnya persentase infrastruktur persampahan dalam kondisi baik	R-211	Dinas PUPR	Terbatasnya pemeliharaan, pembiayaan, dan teknologi pengelolaan persampahan	Internal	C	Pengolahan sampah tidak optimal, menyebabkan pencemaran lingkungan dan risiko kesehatan masyarakat	Masyarakat, pemerintah daerah
9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi Aman	Rendahnya peningkatan rumah tangga dengan akses sanitasi aman	R-212	Dinas PUPR / Dinas Kesehatan	Terbatasnya pembangunan dan rehabilitasi sistem air limbah serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap sanitasi	Internal	C	Risiko penyebaran penyakit berbasis lingkungan dan penurunan kualitas hidup masyarakat	Masyarakat, pemerintah daerah
10	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	Rendahnya persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	R-214	Dinas PUPR	Kurangnya pengawasan teknis dan kepatuhan terhadap standar bangunan serta keterbatasan anggaran rehabilitasi bangunan	Internal	C	Meningkatnya risiko kecelakaan, kerusakan infrastruktur, dan menurunnya kualitas lingkungan binaan	Masyarakat, pemerintah daerah
11	Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang	Rendahnya tingkat kepatuhan pemanfaatan ruang	R-220	Dinas PUPR	Tidak optimalnya pengawasan dan penegakan aturan tata ruang	Internal	C	Terjadinya alih fungsi lahan yang tidak sesuai RTRW, mengganggu keberlanjutan lingkungan dan investasi	Pemerintah daerah, masyarakat, pelaku usaha
12	Program penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ)	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi idela	Keterbatasan kelengkapan fasilitas jalan	R-221	Dinas Perhubungan	Terbatasnya anggaran dan lemahnya koordinasi lintas sektor	Internal	C	Terganggunya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan	Masyarakat pengguna jalan
13		Konektivitas Darat	Rendahnya konektivitas antar wilayah	R-222	Dinas Perhubungan	Tidak meratanya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi darat	Eksternal	C	Terhambatnya mobilitas orang dan barang, menghambat pertumbuhan ekonomi lokal	Masyarakat, pelaku usaha, pemerintah daerah
14		Persentase Keselamatan Berlalu Lintas	Rendahnya tingkat keselamatan berlalu lintas	R-223	Dinas Perhubungan	Minimnya edukasi keselamatan, infrastruktur belum memadai	Internal	C	Meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas dan kerugian sosial-ekonomi	Masyarakat pengguna jalan
15	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	Masih banyaknya perlintasan sebidang yang belum ditangani	R-224	Dinas Perhubungan	Terbatasnya anggaran dan prioritas pembangunan infrastruktur kereta api	Internal	C	Tingginya risiko kecelakaan di perlintasan dan gangguan kelancaran lalu lintas	Masyarakat pengguna jalan dan penumpang kereta
16	Program pengembangan dan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Keterlambatan pemenuhan rumah layak huni bagi korban bencana	R-227	Dinas Lingkungan Hidup	Terbatasnya anggaran dan lambatnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan pascabencana	Internal & Eksternal	UC	Memperburuk kondisi sosial-ekonomi korban, meningkatkan angka kemiskinan dan kerentanan sosial	Korban bencana, masyarakat terdampak, Pemda
17		Persentase warga negara yang terkean relokasi akibat program kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Warga terdampak relokasi tidak memperoleh fasilitas rumah layak huni sesuai standar	R-228	Dinas Lingkungan Hidup	Perencanaan tidak akurat, rendahnya kesiapan lahan dan sarana prasarana pendukung	Internal	UC	Timbulnya permukiman kumuh baru, konflik sosial, dan penolakan program relokasi	Warga terdampak relokasi, Pemda, OPD teknis
18	**Sasaran 4.1.2** **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**	Penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) akibat degradasi lingkungan yang tidak terkendali	R-234	Dinas Lingkungan Hidup	Tingginya pencemaran air, udara, dan tanah; lemahnya pengawasan terhadap kegiatan industri dan domestik	Internal & Eksternal	UC	Terjadinya krisis lingkungan, peningkatan risiko bencana ekologis, penurunan daya dukung wilayah	Masyarakat, Pemda, generasi mendatang, OPD teknis
19		**Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah**	Rendahnya proporsi timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah resmi	R-235	Dinas Lingkungan Hidup	Kurangnya fasilitas pengolahan, rendahnya kesadaran masyarakat, dan lemahnya pengelolaan sampah terpilah	Internal & Eksternal	UC	Penumpukan sampah, pencemaran lingkungan, dan meningkatnya biaya penanganan limbah	Masyarakat, Pemda, Dinas Lingkungan Hidup

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
20	Program perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	Rendahnya tingkat penindaklanjutan terhadap rekomendasi kajian lingkungan hidup	R-236	Dinas Lingkungan Hidup	Kurangnya komitmen dan koordinasi lintas sektor, serta minimnya integrasi hasil kajian dalam perencanaan	Internal & Eksternal	UC	Dampak lingkungan tidak termitigasi secara optimal, munculnya konflik pemanfaatan ruang dan degradasi ekosistem	Pemda, masyarakat terdampak, pelaku usaha, OPD teknis
21	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	persentase kualitas air yang memenuhi standar baku mutu	Rendahnya kualitas air yang tidak memenuhi standar baku mutu lingkungan	R-237	Dinas Lingkungan Hidup	Pencemaran dari limbah domestik dan industri, lemahnya pengawasan terhadap sumber pencemar	Internal & Eksternal	UC	Gangguan kesehatan masyarakat, degradasi ekosistem perairan, menurunnya kualitas hidup	Masyarakat, Pemda, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup
22		persentase kualitas udara yang memenuhi standar baku mutu	Kualitas udara tidak memenuhi standar baku mutu akibat tingginya emisi dan aktivitas pencemar	R-238	Dinas Lingkungan Hidup	Emisi kendaraan, pembakaran terbuka, dan kegiatan industri tidak ramah lingkungan	Internal & Eksternal	UC	Peningkatan penyakit ISPA, penurunan kenyamanan hidup, dan kerugian ekonomi akibat pencemaran udara	Masyarakat, Pemda, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan
23		persentase peningkatan kelompok masyarakat peduli lingkungan	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup dan pengelolaan sampah	R-239	Dinas Lingkungan Hidup	Kurangnya edukasi, dukungan fasilitasi kegiatan lingkungan, dan minimnya insentif	Internal	UC	Lambatnya perubahan perilaku, keberlanjutan program lingkungan terganggu, peningkatan beban Pemda	Masyarakat, komunitas lokal, Pemda, Dinas Lingkungan Hidup
24	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan, Izin PPLH dan PUULH	Rendahnya tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap persetujuan lingkungan, Izin PPLH, dan PUULH	R-240	Dinas Lingkungan Hidup	Lemahnya pengawasan, kurangnya sanksi tegas, dan minimnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi lingkungan	Internal & Eksternal	UC	Terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah	Pemda, masyarakat terdampak, pelaku usaha, Dinas Lingkungan Hidup
25	Program Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	Kompetensi penyuluh lingkungan hidup tidak meningkat secara merata dan berkelanjutan	R-242	Dinas Lingkungan Hidup	Minimnya pelatihan teknis, keterbatasan anggaran, dan belum adanya kurikulum penyuluhan berbasis lokal	Internal	UC	Efektivitas edukasi lingkungan rendah, kesadaran masyarakat tidak tumbuh optimal, serta target program lingkungan sulit tercapai	Masyarakat, penyuluh lingkungan, Pemda, Dinas Lingkungan Hidup
26	Program penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meskipun telah disediakan insentif atau penghargaan	R-243	Bapelitbangda (Bidang Sosial Budaya)	Kurangnya sosialisasi program, minimnya transparansi seleksi penghargaan, dan tidak meratanya akses informasi lingkungan	Internal & Eksternal	UC	Program penghargaan menjadi tidak efektif, semangat kolektif menjaga lingkungan melemah, serta tujuan edukatif tidak tercapai	Masyarakat, komunitas lingkungan, Pemda, Dinas Lingkungan Hidup
27	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Rendahnya tingkat penyelesaian sengketa atau tindak pidana lingkungan hidup secara efektif dan tuntas	R-244	Dinas Lingkungan Hidup	Proses hukum yang panjang, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum lingkungan, dan rendahnya pelaporan masyarakat	Internal & Eksternal	UC	Tumbuhnya ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah, peningkatan konflik lingkungan, dan dampak pencemaran tidak tertangani	Masyarakat terdampak, Pemda, aparat penegak hukum, OPD teknis
28	Program pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH	Penurunan persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan	R-245	Bapelitbangda (Bidang Sosial Budaya)	Alih fungsi lahan tanpa pengendalian, lemahnya regulasi perlindungan RTH, dan kurangnya kepedulian masyarakat	Internal & Eksternal	UC	Degradasi ekosistem lokal, berkurangnya kualitas udara dan iklim mikro, serta rusaknya habitat flora-fauna	Masyarakat, Pemda, OPD teknis, generasi mendatang
29	Program Pengelolaan persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Rendahnya indeks kinerja pengelolaan sampah akibat lemahnya tata kelola dan infrastruktur pendukung	R-247	Dinas Lingkungan Hidup	Kurangnya integrasi perencanaan pengelolaan sampah, keterbatasan sarana-prasarana, dan lemahnya SDM pengelola	Internal	UC	Peningkatan volume sampah tidak terkelola, munculnya TPS liar, dan risiko pencemaran lingkungan	Masyarakat, Pemda, Dinas Lingkungan Hidup
30		Persentase Pengelolaan Sampah yang dilakukan	Persentase pengelolaan sampah yang dilakukan masih rendah dibandingkan dengan timbulan harian	R-248	Dinas Lingkungan Hidup	Rendahnya partisipasi masyarakat, terbatasnya jangkauan layanan pengangkutan dan pengolahan sampah	Internal & Eksternal	UC	Tumpukan sampah di lingkungan pemukiman, risiko kesehatan, serta turunnya kualitas estetika wilayah	Masyarakat, Pemda, Dinas Kebersihan/Lingkungan Hidup
31	**Sasaran 4.1.3** **Menurunnya resiko bencana**	**Indeks Risiko Bencana**	Indeks Risiko Bencana tetap tinggi akibat keterbatasan mitigasi, pemetaan rawan bencana, dan kesiapsiagaan masyarakat yang rendah	R-262	Bapelitbangda (Bidang Sosial Budaya)	Terbatasnya kapasitas daerah dalam pengurangan risiko bencana, keterbatasan anggaran dan SDM BPBD, serta rendahnya edukasi masyarakat	Internal dan Eksternal	UC	Tingginya potensi korban jiwa dan kerugian harta benda serta melambatnya pembangunan daerah	BPBD, Dinas PUPR, DINSOSP3A, Camat, Lurah/Kades, TNI/Polri
32	Program Penanggulangan bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana tetap rendah	R-263	BPBD	Keterbatasan anggaran, media edukasi, dan jaringan informasi di wilayah rawan bencana	Internal dan Eksternal	UC	Masyarakat tidak memahami risiko bencana dan tidak siap menghadapi kejadian darurat	Bapelitbangda, Diskominfo, BPBD, Camat/Lurah
33		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana tidak meningkat signifikan	R-264	BPBD	Terbatasnya jumlah relawan, pelatihan kesiapsiagaan, serta minimnya keterlibatan masyarakat	Internal dan Eksternal	UC	Meningkatnya kerentanan masyarakat terhadap bencana	BPBD, DINSOSP3A, Dinas Pendidikan, Camat
34		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana belum merata	R-265	BPBD	Kurangnya diseminasi data rawan bencana serta terbatasnya teknologi informasi dan komunikasi	Internal dan Eksternal	UC	Lambatnya respon masyarakat terhadap peringatan dini bencana	BPBD, Diskominfo, RT/RW
35		Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Persentase penanganan tanggap darurat bencana rendah	R-266	BPBD, DINSOSP3A	Lambatnya mobilisasi bantuan/logistik, koordinasi antar OPD tidak optimal, dan keterbatasan personel lapangan	Internal dan Eksternal	UC	Meningkatnya dampak korban jiwa, kerusakan, dan kekacauan sosial	BPBD, Dinas Kesehatan, TNI/Polri, PMI
36		Persentase penanganan pasca bencana	Persentase penanganan pasca bencana rendah dan tidak tepat waktu	R-267	BPBD, Dinas PUPR, DINSOSP3A	Terbatasnya anggaran pemulihan, kurangnya database kerusakan, serta birokrasi dalam distribusi bantuan	Internal dan Eksternal	UC	Lambatnya pemulihan sosial ekonomi masyarakat terdampak, meningkatkan risiko bencana lanjutan	BPBD, Dinas PUPR, Dinas Perkim, DINSOSP3A
37	Program Pencegahan, Penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan Non Kebakaran	Waktu tanggap darurat kebakaran	Lambatnya respon penanganan kebakaran dan non kebakaran	R-267-1	Satpol PP dan Damkar	Keterbatasan armada dan peralatan, jarak lokasi kejadian jauh	Internal dan Eksternal	C	Kerugian harta benda meningkat, korban jiwa meningkat	Masyarakat umum, pelaku usaha, pemerintah daerah
38	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Jalan rusak tidak tertangani tepat waktu	R-267-2	Dinas PUPR	Anggaran pemeliharaan terbatas, curah hujan tinggi	Internal dan Eksternal	C	Aksesibilitas terganggu, biaya logistik meningkat	Masyarakat, pelaku usaha, pemerintah daerah

KEPALA BAPELITBANGDA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

...

Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda	**: Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman**
Tahun Penilaian	**: 2025**
Tujuan Strategis	**: Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat,**
Urusan Pemerintahan	**: Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pemerintahan dasar**

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
1	Rendahnya skor Indeks Infrastruktur Daerah	R-204	4	4	16
2	Rendahnya Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	R-205	4	3	12
3	Rendahnya peningkatan kualitas jalan kabupaten	R-206	3	3	9
4	Rendahnya peningkatan kualitas jembatan kabupaten	R-207	3	2	6
5	Rendahnya perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	R-208	4	3	12
6	Terbatasnya cakupan layanan irigasi	R-209	3	2	6
7	Rendahnya tingkat pengelolaan dan pengembangan SPAM	R-210	3	3	9
8	Rendahnya persentase infrastruktur persampahan dalam kondisi baik	R-211	3	3	9
9	Rendahnya peningkatan rumah tangga dengan akses sanitasi aman	R-212	3	3	9
10	Rendahnya persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	R-214	2	2	4
11	Rendahnya tingkat kepatuhan pemanfaatan ruang	R-220	4	3	12
12	Keterbatasan kelengkapan fasilitas jalan	R-221	3	3	9
13	Rendahnya konektivitas antar wilayah	R-222	4	2	8
14	Rendahnya tingkat keselamatan berlalu lintas	R-223	4	3	12
15	Masih banyaknya perlintasan sebidang yang belum ditangani	R-224	3	3	9
16	Keterlambatan pemenuhan rumah layak huni bagi korban bencana	R-227	3	2	6
17	Warga terdampak relokasi tidak memperoleh fasilitas rumah layak huni sesuai standar	R-228	3	2	6
18	Penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) akibat degradasi lingkungan yang tidak terkendali	R-234	4	3	12
19	Rendahnya proporsi timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah resmi	R-235	3	2	6
20	Rendahnya tingkat penindaklanjutan terhadap rekomendasi kajian lingkungan hidup	R-236	4	3	12

21	Rendahnya kualitas air yang tidak memenuhi standar baku mutu lingkungan	R-237	4	2	8
22	Kualitas udara tidak memenuhi standar baku mutu akibat tingginya emisi dan aktivitas pencemar	R-238	3	2	6
23	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup dan pengelolaan sampah	R-239	3	3	9
24	Rendahnya tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap persetujuan lingkungan, Izin PPLH, dan PUULH	R-240	4	3	12
25	Kompetensi penyuluh lingkungan hidup tidak meningkat secara merata dan berkelanjutan	R-242	3	2	6
26	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meskipun telah disediakan insentif atau penghargaan	R-243	3	3	9
27	Rendahnya tingkat penyelesaian sengketa atau tindak pidana lingkungan hidup secara efektif dan tuntas	R-244	4	2	8
28	Penurunan persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan	R-245	4	3	12
29	Rendahnya indeks kinerja pengelolaan sampah akibat lemahnya tata kelola dan infrastruktur pendukung	R-247	4	3	12
30	Persentase pengelolaan sampah yang dilakukan masih rendah dibandingkan dengan timbulan harian	R-248	4	3	12
31	Indeks Risiko Bencana tetap tinggi akibat keterbatasan mitigasi, pemetaan rawan bencana, dan kesiapsiagaan masyarakat yang rendah	R-262	4	4	16
32	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana tetap rendah	R-263	3	3	9
33	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana tidak meningkat signifikan	R-264	3	3	9
34	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana belum merata	R-265	3	3	9
35	Persentase penanganan tanggap darurat bencana rendah	R-266	4	3	12
36	Persentase penanganan pasca bencana rendah dan tidak tepat waktu	R-267	4	3	12
37	Waktu tanggap darurat kebakaran	R-267-1	4	4	16
38	Persentase jalan dalam kondisi mantap	R-267-2	4	3	12

KEPALA BAPELITBANGDA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

...

Kertas Kerja

Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda	**: Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman**
Tahun Penilaian	**: 2025**
Tujuan Strategis	**: Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing**
Urusan Pemerintahan	**: Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pemerintahan dasar**

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
1	Rendahnya skor Indeks Infrastruktur Daerah	R-204	16	Dinas PUPR	Rendahnya kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan bencana masyarakat serta minimnya pemetaan rawan bencana	Kerusakan infrastruktur, korban jiwa dan ekonomi akibat bencana tidak tertangani dengan baik
2	Indeks Risiko Bencana tetap tinggi akibat keterbatasan mitigasi, pemetaan rawan bencana, dan kesiapsiagaan masyarakat yang rendah	R-262	16	Dinas PUPR	Rendahnya kualitas infrastruktur layanan dasar serta keterbatasan akses dan pemeliharaan fasilitas umum	Turunnya kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur
3	Rendahnya Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	R-205	12	Dinas PUPR	Kurangnya pengawasan dan pemeliharaan kawasan permukiman serta lemahnya penegakan aturan zonasi	Permukiman tetap berada di wilayah rawan banjir, menimbulkan kerugian dan kerusakan
4	Rendahnya perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	R-208	12	Dinas PUPR	Kurangnya pengendalian pemanfaatan ruang dan lemahnya penegakan peraturan zonasi	Terjadi pembangunan tidak sesuai tata ruang yang berdampak pada bencana dan konflik lahan
5	Rendahnya tingkat kepatuhan pemanfaatan ruang	R-220	12	Dinas Perhubungan	Kurangnya fasilitas keselamatan jalan serta rendahnya kesadaran berlalu lintas	Kecelakaan lalu lintas meningkat, menyebabkan kerugian jiwa dan harta
6	Rendahnya tingkat keselamatan berlalu lintas	R-223	12	Dinas Perhubungan	Keterbatasan cakupan jaringan SPAM dan sumber air bersih serta pengelolaan yang belum optimal	Rendahnya akses masyarakat terhadap air minum layak dan aman, berdampak pada kesehatan
7	Penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) akibat degradasi lingkungan yang tidak terkendali	R-234	12	DLH	Lemahnya pengawasan terhadap implementasi hasil kajian lingkungan dan kurangnya SDM pengawas	Pencemaran lingkungan tidak tertangani, mengganggu kesehatan dan ekosistem
8	Rendahnya tingkat penindaklanjutan terhadap rekomendasi kajian lingkungan hidup	R-236	12	DLH & DPMPTP	Lemahnya pengawasan serta kurangnya sanksi terhadap pelanggaran izin lingkungan dan kegiatan usaha	Terjadi pencemaran lingkungan dan konflik sosial akibat kegiatan usaha tak ramah lingkungan
9	Rendahnya tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap persetujuan lingkungan, Izin PPLH, dan PUULH	R-240	12	DLH & DPMPTSP	Lemahnya pengawasan, sosialisasi, dan penegakan hukum pada pelaku usaha yang melanggar izin lingkungan	Terjadi pencemaran lingkungan, konflik sosial, dan penurunan kualitas hidup masyarakat

10	Penurunan persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan	R-245	12	DLH	Alih fungsi lahan dan lemahnya penataan ruang yang mengabaikan keberadaan RTH	Berkurangnya keanekaragaman hayati dan meningkatnya risiko bencana ekologis
11	Rendahnya indeks kinerja pengelolaan sampah akibat lemahnya tata kelola dan infrastruktur pendukung	R-247	12	DLH	Lemahnya tata kelola sampah, kurangnya sarana prasarana pengelolaan, dan kesadaran masyarakat rendah	Volume sampah menumpuk, menurunkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat
12	Persentase pengelolaan sampah yang dilakukan masih rendah dibandingkan dengan timbulan harian	R-248	12	DLH	Kurangnya fasilitas pengolahan dan pengumpulan sampah serta rendahnya kepatuhan masyarakat	Tumpukan sampah mengganggu kebersihan lingkungan dan potensi penyebaran penyakit
13	Persentase penanganan tanggap darurat bencana rendah	R-266	12	BPBD & DINSOSP3A	Kurangnya sarana prasarana, tenaga terlatih, dan pendanaan untuk penanganan darurat	Tingginya jumlah korban jiwa dan kerugian akibat lambatnya penanganan bencana
14	Persentase penanganan pasca bencana rendah dan tidak tepat waktu	R-267	12	BPBD & DINSOSP3A	Keterbatasan logistik, dana, dan koordinasi lintas sektor dalam pemulihan pasca bencana	Pemulihan masyarakat terdampak tidak optimal, memperpanjang penderitaan dan kerugian
15	Waktu tanggap darurat kebakaran	R-267-1	16	Satpol PP dan Damkar	Keterbatasan armada dan peralatan, SDM pemadam kurang, koordinasi lintas instansi lemah	Keterlambatan penanganan kebakaran, meningkatnya kerugian harta benda dan korban jiwa
16	Persentase jalan dalam kondisi mantap	R-267-2	12	Dinas PUPR	Anggaran pemeliharaan terbatas, cuaca ekstrem, kualitas konstruksi tidak sesuai standar	Aksesibilitas dan konektivitas berkurang, peningkatan biaya transportasi, terhambatnya pertumbuhan ekonomi daerah

KEPALA BAPELITBANGDA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

...

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)

Nama Pemda : **Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman**
Tahun Penilaian : **2025**
Tujuan Strategis : **Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing**
Urusan Pemerintahan : **Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pemerintahan dasar**

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penangungg Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	**Risiko Strategis**						
1	Rendahnya skor Indeks Infrastruktur Daerah	R-204	Optimalisasi pembangunan infrastruktur dasar	1. Kualitas infrastruktur belum merata antar wilayah. 2. Pemeliharaan infrastruktur kurang terjadwal. 3. Kurangnya inovasi dalam pengembangan infrastruktur.	1. Penyusunan rencana pemeliharaan berkala. 2. Pengembangan inovasi infrastruktur ramah lingkungan. 3. Peningkatan koordinasi lintas OPD.	Dinas PUPR	2025-2029
2	Indeks Risiko Bencana tetap tinggi akibat keterbatasan mitigasi, pemetaan rawan bencana, dan kesiapsiagaan masyarakat yang rendah.	R-262	Penyusunan peta risiko bencana, pembentukan tim siaga bencana	1. Pemetaan risiko belum komprehensif. 2. Sosialisasi kesiapsiagaan rendah. 3. Sarana mitigasi terbatas.	1. Pemutakhiran peta rawan bencana. 2. Peningkatan kapasitas tim siaga. 3. Penyediaan peralatan mitigasi.	Dinas PUPR	2025-2029
3	Rendahnya Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	R-205	Pelayanan infrastruktur publik	1. Kualitas layanan infrastruktur belum memenuhi ekspektasi masyarakat. 2. Pengaduan belum ditindaklanjuti cepat. 3. Monitoring layanan belum optimal.	1. Standarisasi pelayanan infrastruktur. 2. Penguatan sistem pengaduan. 3. Monitoring kinerja berkala.	Dinas PUPR	2025-2029
4	Rendahnya perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	R-208	Pengawasan kawasan permukiman	1. Penegakan perlindungan kawasan rawan banjir lemah. 2. Drainase tidak memadai. 3. Koordinasi antar instansi rendah.	1. Rehabilitasi dan pembangunan drainase. 2. Penegakan aturan perlindungan kawasan. 3. Sosialisasi mitigasi banjir.	Dinas PUPR	2025-2029
5	Rendahnya tingkat kepatuhan pemanfaatan ruang	R-220	Pengendalian pemanfaatan ruang	1. Tingkat kepatuhan pemanfaatan ruang rendah. 2. Penegakan aturan lemah. 3. Sosialisasi tata ruang minim.	1. Pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang. 2. Penegakan sanksi tegas. 3. Sosialisasi rencana tata ruang.	Dinas Perhubungan	2025-2029
6	Rendahnya tingkat keselamatan berlalu lintas	R-223	Pengawasan lalu lintas	1. Kesadaran keselamatan berlalu lintas rendah. 2. Infrastruktur lalu lintas kurang memadai. 3. Penegakan hukum belum konsisten.	1. Sosialisasi keselamatan berlalu lintas. 2. Peningkatan infrastruktur jalan. 3. Penegakan aturan lalu lintas.	Dinas Perhubungan	2025-2029
7	Penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) akibat degradasi lingkungan yang tidak terkendali	R-234	Pemantauan kualitas lingkungan	1. Penurunan IKLH akibat degradasi lingkungan. 2. Pemantauan kualitas lingkungan tidak rutin. 3. Edukasi lingkungan minim.	1. Pemantauan berkala kualitas lingkungan. 2. Rehabilitasi kawasan kritis. 3. Edukasi masyarakat.	DLH	2025-2029
8	Rendahnya tingkat penindaklanjutan terhadap rekomendasi kajian lingkungan hidup	R-236	Tindak lanjut kajian lingkungan	1. Rekomendasi kajian lingkungan tidak diimplementasikan optimal. 2. Koordinasi antar OPD lemah. 3. Pengawasan minim.	1. Penetapan SOP tindak lanjut kajian. 2. Penguatan koordinasi lintas sektor. 3. Monitoring pelaksanaan.	DLH & DPMPTP	2025-2029
9	Rendahnya tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap persetujuan lingkungan, Izin PPLH, dan PUULH	R-240	Pengawasan izin lingkungan	1. Kepatuhan pelaku usaha terhadap izin lingkungan rendah. 2. Pengawasan tidak rutin. 3. Penegakan hukum lemah.	1. Intensifikasi pengawasan izin lingkungan. 2. Penerapan sanksi tegas. 3. Pembinaan pelaku usaha.	DLH & DPMPTP	2025-2029
10	Penurunan persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati dan kualitas	R-245	Pengelolaan RTH	1. Penurunan luas RTH. 2. Alih fungsi lahan tinggi. 3. Pemeliharaan RTH kurang optimal.	1. Rehabilitasi dan penanaman pohon. 2. Perlindungan lahan hijau. 3. Peningkatan peran masyarakat.	DLH	2025-2029
11	Rendahnya indeks kinerja pengelolaan sampah akibat lemahnya tata kelola dan infrastruktur pendukung	R-247	Pengelolaan sampah	1. Indeks kinerja pengelolaan sampah rendah. 2. Infrastruktur pendukung kurang memadai. 3. Tata kelola lemah.	1. Peningkatan sarana pengelolaan sampah. 2. Perbaikan tata kelola. 3. Edukasi masyarakat.	DLH	2025-2029
12	Persentase pengelolaan sampah yang dilakukan masih rendah dibandingkan dengan timbulan harian	R-248	Pengelolaan sampah harian	1. Persentase pengelolaan sampah rendah dibanding timbulan harian. 2. Partisipasi masyarakat rendah. 3. Fasilitas terbatas.	1. Perluasan layanan pengangkutan sampah. 2. Peningkatan peran masyarakat. 3. Penambahan fasilitas.	DLH	2025-2029

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penangungg Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
13	Persentase penanganan tanggap darurat bencana rendah	R-266	Penanganan tanggap darurat	1. Respons tanggap darurat bencana lambat. 2. Fasilitas dan peralatan terbatas. 3. Koordinasi lemah.	1. Penguatan kapasitas tim tanggap darurat. 2. Penambahan peralatan. 3. Simulasi rutin.	BPBD & DINSOSP3A	2025-2029
14	Persentase penanganan pasca bencana rendah dan tidak tepat waktu	R-267	Penanganan pasca bencana	1. Penanganan pasca bencana tidak tepat waktu. 2. Koordinasi lintas sektor kurang. 3. Anggaran terbatas.	1. Penyusunan rencana pasca bencana. 2. Penguatan koordinasi lintas sektor. 3. Optimalisasi penggunaan anggaran.	BPBD & DINSOSP3A	2025-2029
15	Waktu tanggap darurat kebakaran	R-267-1	SOP penanggulangan kebakaran sudah tersedia, Posko damkar tersedia di beberapa kecamatan, Tim damkar rutin siaga	1. Jumlah posko dan armada belum merata 2. Waktu respon masih bervariasi antar wilayah 3. Belum ada sistem pemantauan terpadu	1. Penambahan posko dan armada damkar di wilayah rawan 2. Peningkatan kapasitas SDM dan pelatihan rutin 3. Penerapan sistem monitoring digital waktu respon	Satpol PP dan Damkar	2025-2029
16	Persentase jalan dalam kondisi mantap	R-267-2	Inventarisasi jalan dan jembatan rutin dilakukan, Terdapat anggaran pemeliharaan berkala, Koordinasi dengan provinsi dalam pembangunan jalan utama	1. Keterbatasan anggaran pemeliharaan 2. Data kondisi jalan belum sepenuhnya terintegrasi 3. Perbaikan lebih banyak menunggu laporan warga	1. Peningkatan alokasi anggaran perbaikan jalan 2. Integrasi data kondisi jalan dengan sistem GIS 3. Program perbaikan preventif berbasis prioritas	Dinas PUPR	2025-2029

KEPALA BAPELITBANGDA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

...

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda	**: Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman**
Tahun Penilaian	**: 2025**
Tujuan Strategis	**: Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing**
Urusan Pemerintahan	**: Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pemerintahan dasar**

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	1. Penyusunan rencana pemeliharaan berkala. 2. Pengembangan inovasi infrastruktur ramah lingkungan. 3. Peningkatan koordinasi lintas OPD.	Surat Edaran, Rapat Koordinasi, Website OPD	Bapelitbangda, Dinas PUPR	OPD terkait, Masyarakat	2025-2029		
2	1. Pemutakhiran peta rawan bencana. 2. Peningkatan kapasitas tim siaga. 3. Penyediaan peralatan mitigasi.	Peta Digital Interaktif, Media Sosial, Pelatihan Teknis	BPBD, Bapelitbangda	OPD terkait, Tim Siaga Bencana, Masyarakat	2025-2029		
3	1. Standarisasi pelayanan infrastruktur. 2. Penguatan sistem pengaduan. 3. Monitoring kinerja berkala.	Website Resmi, Laporan Berkala, Forum Konsultasi Publik	Dinas PUPR, Bapelitbangda	OPD terkait, Masyarakat, DPRD	2025-2029		
4	1. Rehabilitasi dan pembangunan drainase. 2. Penegakan aturan perlindungan kawasan. 3. Sosialisasi mitigasi banjir.	Poster, Spanduk, Pertemuan Warga, Media Sosial	Dinas PUPR, DLH, Bapelitbangda	Masyarakat, OPD terkait	2025-2029		
5	1. Pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang. 2. Penegakan sanksi tegas. 3. Sosialisasi rencana tata ruang.	Workshop, Media Sosial, Portal Informasi RTRW	Bapelitbangda, Dinas Tata Ruang	OPD teknis, Pelaku Usaha, Masyarakat	2025-2029		
6	1. Sosialisasi keselamatan berlalu lintas. 2. Peningkatan infrastruktur jalan. 3. Penegakan aturan lalu lintas.	Media Sosial, Penyuluhan Lapangan, Spanduk Keselamatan	Dinas Perhubungan, Satlantas	OPD terkait, Pengendara, Masyarakat	2025-2029		
7	1. Pemantauan berkala kualitas lingkungan. 2. Rehabilitasi kawasan kritis. 3. Edukasi masyarakat.	Website, Media Sosial, Edukasi Lapangan	DLH, Bapelitbangda	OPD terkait, Komunitas Lingkungan, Masyarakat	2025-2029		
8	1. Penetapan SOP tindak lanjut kajian. 2. Penguatan koordinasi lintas sektor. 3. Monitoring pelaksanaan.	Surat Edaran, Rapat Lintas Sektor, Website OPD	Bapelitbangda, OPD terkait	OPD lintas sektor, DPRD, Masyarakat	2025-2029		
9	1. Intensifikasi pengawasan izin lingkungan. 2. Penerapan sanksi tegas. 3. Pembinaan pelaku usaha.	Media Sosial, Workshop, Laporan Pengawasan DLH	DLH, Bapelitbangda	Pelaku Usaha, OPD terkait, Masyarakat	2025-2029		

10	1. Rehabilitasi dan penanaman pohon. 2. Perlindungan lahan hijau. 3. Peningkatan peran masyarakat.	Poster, Media Sosial, Penyuluhan Lingkungan	DLH, Bapelitbangda	Komunitas, OPD terkait, Masyarakat	2025-2029		
11	1. Peningkatan sarana pengelolaan sampah. 2. Perbaikan tata kelola. 3. Edukasi masyarakat.	Spanduk, Media Sosial, Penyuluhan Lapangan	DLH, Dinas Kebersihan	OPD terkait, Masyarakat	2025-2029		
12	1. Perluasan layanan pengangkutan sampah. 2. Peningkatan peran masyarakat. 3. Penambahan fasilitas.	Media Sosial, Radio Lokal, Penyuluhan Lapangan	DLH, Dinas Kebersihan	Masyarakat, OPD terkait	2025-2029		
13	1. Penguatan kapasitas tim tanggap darurat. 2. Penambahan peralatan. 3. Simulasi rutin.	Media Sosial, Pelatihan Teknis, Simulasi Lapangan	BPBD, Bapelitbangda	OPD terkait, Relawan, Masyarakat	2025-2029		
14	1. Penyusunan rencana pasca bencana. 2. Penguatan koordinasi lintas sektor. 3. Optimalisasi penggunaan anggaran.	Rapat Koordinasi, Website, Laporan Berkala	BPBD, Bapelitbangda	OPD lintas sektor, DPRD, Masyarakat	2025-2029		
15	1. Penambahan posko dan armada damkar di wilayah rawan 2. Peningkatan kapasitas SDM dan pelatihan rutin 3. Penerapan sistem monitoring digital waktu respon	Laporan kinerja bulanan, dashboard digital, worksh	Satpol PP dan Damkar	Masyarakat & OPD terkait	2025-2029		
16	1. Peningkatan alokasi anggaran perbaikan jalan 2. Integrasi data kondisi jalan dengan sistem GIS 3. Program perbaikan preventif berbasis prioritas	Publikasi laporan & dashboard GIS	Dinas PUPR	Masyarakat & OPD terkait	2025-2029		

KEPALA BAPELITBANGDA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

...

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemda : **Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman**
Tahun Penilaian : **2025**
Tujuan Strategis : **Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing**
Urusan Pemerintahan : **Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pemerintahan dasar**

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	1. Penyusunan rencana pemeliharaan berkala. 2. Pengembangan inovasi infrastruktur ramah lingkungan. 3. Peningkatan koordinasi lintas OPD.	Penyusunan rencana pemeliharaan; inovasi infrastruktur hijau; koordinasi OPD	Bapelitbangda, Dinas PUPR	2025-2029		
2	1. Pemutakhiran peta rawan bencana. 2. Peningkatan kapasitas tim siaga. 3. Penyediaan peralatan mitigasi.	Pemutakhiran peta bencana; kapasitas tim siaga; peralatan mitigasi	BPBD, Bapelitbangda	2025-2029		
3	1. Standarisasi pelayanan infrastruktur. 2. Penguatan sistem pengaduan. 3. Monitoring kinerja berkala.	Standarisasi layanan; sistem pengaduan; monitoring kinerja	Dinas PUPR, Bapelitbangda	2025-2029		
4	1. Rehabilitasi dan pembangunan drainase. 2. Penegakan aturan perlindungan kawasan. 3. Sosialisasi mitigasi banjir.	Rehabilitasi drainase; perlindungan kawasan; sosialisasi banjir	Dinas PUPR, DLH, Bapelitbangda	2025-2029		
5	1. Pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang. 2. Penegakan sanksi tegas. 3. Sosialisasi rencana tata ruang.	Pengawasan ruang; sanksi tegas; sosialisasi tata ruang	Bapelitbangda, Dinas Tata Ruang	2025-2029		
6	1. Sosialisasi keselamatan berlalu lintas. 2. Peningkatan infrastruktur jalan. 3. Penegakan aturan lalu lintas.	Sosialisasi lalu lintas; infrastruktur jalan; penegakan aturan	Dinas Perhubungan, Satlantas	2025-2029		
7	1. Pemantauan berkala kualitas lingkungan. 2. Rehabilitasi kawasan kritis. 3. Edukasi masyarakat.	Pemantauan kualitas lingkungan; rehabilitasi kawasan; edukasi masyarakat	DLH, Bapelitbangda	2025-2029		
8	1. Penetapan SOP tindak lanjut kajian. 2. Penguatan koordinasi lintas sektor. 3. Monitoring pelaksanaan.	SOP tindak lanjut; koordinasi lintas sektor; monitoring pelaksanaan	Bapelitbangda, OPD terkait	2025-2029		
9	1. Intensifikasi pengawasan izin lingkungan. 2. Penerapan sanksi tegas. 3. Pembinaan pelaku usaha.	Pengawasan izin lingkungan; sanksi tegas; pembinaan pelaku usaha	DLH, Bapelitbangda	2025-2029		
10	1. Rehabilitasi dan penanaman pohon. 2. Perlindungan lahan hijau. 3. Peningkatan peran masyarakat.	Rehabilitasi pohon; perlindungan lahan hijau; peran masyarakat	DLH, Bapelitbangda	2025-2029		
11	1. Peningkatan sarana pengelolaan sampah. 2. Perbaikan tata kelola. 3. Edukasi masyarakat.	Sarana pengelolaan sampah; tata kelola; edukasi masyarakat	DLH	2025-2029		
12	1. Perluasan layanan pengangkutan sampah. 2. Peningkatan peran masyarakat. 3. Penambahan fasilitas.	Layanan angkut sampah; peran masyarakat; fasilitas tambahan	DLH	2025-2029		
13	1. Penguatan kapasitas tim tanggap darurat. 2. Penambahan peralatan. 3. Simulasi rutin.	Kapasitas tim darurat; peralatan tambahan; simulasi rutin	BPBD, Bapelitbangda	2025-2029		
14	1. Penyusunan rencana pasca bencana. 2. Penguatan koordinasi lintas sektor. 3. Optimalisasi penggunaan anggaran.	Rencana pasca bencana; koordinasi sektor; optimalisasi anggaran	BPBD, Bapelitbangda	2025-2029		
15	1. Penambahan posko dan armada damkar di wilayah rawan 2. Peningkatan kapasitas SDM dan pelatihan rutin 3. Penerapan sistem monitoring digital waktu respon	Audit operasional posko damkar, Evaluasi berkala kapasitas dan kompetensi SDM, Pemantauan real time melalui dashboard digital, Uji coba simulasi tanggap darurat secara periodik, Pelaporan insiden dan analisis waktu respon	Satpol PP dan Damkar	2025-2029		
16	1. Peningkatan alokasi anggaran perbaikan jalan 2. Integrasi data kondisi jalan dengan sistem GIS 3. Program perbaikan preventif berbasis prioritas	Peningkatan alokasi anggaran perbaikan jalan; Integrasi data kondisi jalan dengan sistem GIS; Program perbaikan preventif berbasis prioritas,Audit anggaran; Monitoring GIS kondisi jalan; Evaluasi program perbaikan	Dinas PUPR	2025-2029		

KEPALA BAPELITBANGDA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

...

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda	**: Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman**
Tahun Penilaian	**: 2025**
Tujuan Strategis	**: Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing**
Urusan Pemerintahan	**: Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pemerintahan dasar**

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
I	**Risiko Strategis Pemda**									
1	Rendahnya skor Indeks Infrastruktur Daerah	R-204	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Penyusunan rencana pemeliharaan berkala. 2. Pengembangan inovasi infrastruktur ramah lingkungan. 3. Peningkatan koordinasi lintas OPD.			
2	Indeks Risiko Bencana tetap tinggi akibat keterbatasan mitigasi, pemetaan rawan bencana, dan kesiapsiagaan masyarakat yang rendah	R-262	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Pemutakhiran peta rawan bencana. 2. Peningkatan kapasitas tim siaga. 3. Penyediaan peralatan mitigasi.			
3	Rendahnya Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	R-205	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Standarisasi pelayanan infrastruktur. 2. Penguatan sistem pengaduan. 3. Monitoring kinerja berkala.			
4	Rendahnya perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	R-208	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Rehabilitasi dan pembangunan drainase. 2. Penegakan aturan perlindungan kawasan. 3. Sosialisasi mitigasi banjir.			
5	Rendahnya tingkat kepatuhan pemanfaatan ruang	R-220	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang. 2. Penegakan sanksi tegas. 3. Sosialisasi rencana tata ruang.			
6	Rendahnya tingkat keselamatan berlalu lintas	R-223	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Sosialisasi keselamatan berlalu lintas. 2. Peningkatan infrastruktur jalan. 3. Penegakan aturan lalu lintas.			
7	Penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) akibat degradasi lingkungan yang tidak terkendali	R-234	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Pemantauan berkala kualitas lingkungan. 2. Rehabilitasi kawasan kritis. 3. Edukasi masyarakat.			
8	Rendahnya tingkat penindaklanjutan terhadap rekomendasi kajian lingkungan hidup	R-236	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Penetapan SOP tindak lanjut kajian. 2. Penguatan koordinasi lintas sektor. 3. Monitoring pelaksanaan.			
9	Rendahnya tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap persetujuan lingkungan, Izin PPLH, dan PUULH	R-240	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Intensifikasi pengawasan izin lingkungan. 2. Penerapan sanksi tegas. 3. Pembinaan pelaku usaha.			

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
10	Penurunan persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan	R-245	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Rehabilitasi dan penanaman pohon. 2. Perlindungan lahan hijau. 3. Peningkatan peran masyarakat.			
11	Rendahnya indeks kinerja pengelolaan sampah akibat lemahnya tata kelola dan infrastruktur pendukung	R-247	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Peningkatan sarana pengelolaan sampah. 2. Perbaikan tata kelola. 3. Edukasi masyarakat.			
12	Persentase pengelolaan sampah yang dilakukan masih rendah dibandingkan dengan timbulan harian	R-248	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Perluasan layanan pengangkutan sampah. 2. Peningkatan peran masyarakat. 3. Penambahan fasilitas.			
13	Persentase penanganan tanggap darurat bencana rendah	R-266	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Penguatan kapasitas tim tanggap darurat. 2. Penambahan peralatan. 3. Simulasi rutin.			
14	Persentase penanganan pasca bencana rendah dan tidak tepat waktu	R-267	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Penyusunan rencana pasca bencana. 2. Penguatan koordinasi lintas sektor. 3. Optimalisasi penggunaan anggaran.			
15	Waktu tanggap darurat kebakaran	R-267-1	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Penambahan posko dan armada damkar di wilayah rawan 2. Peningkatan kapasitas SDM dan pelatihan rutin 3. Penerapan sistem monitoring digital waktu respon			
16	Persentase jalan dalam kondisi mantap	R-267-2	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Peningkatan alokasi anggaran perbaikan jalan 2. Integrasi data kondisi jalan dengan sistem GIS 3. Program perbaikan preventif berbasis prioritas			

KEPALA BAPELITBANGDA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

...

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda **Tahun Penilaian** **Periode yang dinilai**	**: Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman** **: 2025** **: Periode RPJMD Tahun 2025 - 2029**
Sumber Data	: RPJMD Kabupaten Padang Pariaman
Visi	: Membangun Padang Pariaman Maju dan Sejahtera
Misi Strategis RPJMD	1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas 2. Menciptakan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing 3. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju, dan Merata 4. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	1. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya
Tujuan Strategis RPJMD	Tujuan 1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas Tujuan 2 Terciptanya Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berdaya Saing dan Inklusif Tujuan 3 Meningkatnya Perekonomian Daerah yang maju dan inklusif Tujuan 4 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan, berketahanan terhadap bencana dan Perubahan Iklim Tujuan 5 Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang harmonis dan toleran antar umat beragama
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	Tujuan 5 Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang harmonis dan toleran antar umat beragama
Sasaran RPJMD	1.1 Meningkatnya rasa aman dan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan masyarakat 1.2 Meningkatnya pelestarian cagar dan warisan budaya
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	1.1 Meningkatnya rasa aman dan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan masyarakat 1.2 Meningkatnya pelestarian cagar dan warisan budaya
IKU Sasaran RPJMD	1. Indeks Keamanan Daerah 2. Angka Kriminalitas 3. Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan 4. Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	1. Indeks Keamanan Daerah 2. Angka Kriminalitas 3. Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan 4. Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan
Prioritas pembangunan dan program unggulan	I. DINAS SATPOL PP DAMKAR 1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 2. Program Penanggulangan penyelamatan kebakaran dan Non kebakaran
	II. KESBANGPOL 1. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 2. Pemberian Insentif dan Apresiasi bagi pemuka Agama dalam penguatan Nilai Keagamaan
	III. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 2. Program Pengembangan Kebudayaan 4. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 5. Program Pengelolaan Permuseuman
	IV. DINSOSP3A 1. Program Penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan
Urusan Pemerintahan Daerah	1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Nama Dinas Terkait	1. SATPOL PP DAMKAR
	2. KESBANGPOL
	3. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	4. DINSOSP3A
	5. Bagian Kesra

Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	SATPOL PP DAMKAR Tujuan 1 Terwujdunya kehidupan masyarakat yang tentram dan harmonis dalam keberagaman agama Sasaran 1.1 : Meningkatnya rasa aman, nyaman serta kerukunan dan toleransi antar umat beragama dalam kehidupan masyarakat IKU : 1. Indeks Keamanan Daerah 2. Angka Kriminalitas Program : 1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 2. Program Penanggulangan penyelamatan kebakaran dan Non kebakaran
	KESBANGPOL Tujuan 1 Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tentram dan harmonis dalam keberagaman agama Sasaran 1.1 : Meningkatnya rasa aman, nyaman serta kerukunan dan toleransi antar umat beragama dalam kehidupan masyarakat IKU : 1. Indeks Keamanan Daerah 2. Angka Kriminalitas Program : 1. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 3. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 4. Program Peningkatan Peran Parta Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik 5. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Tujuan 1 Terwujdunya kehidupan masyarakat yang tentram dan harmonis dalam keberagaman agama Sasaran 1.2 : Meningkatnya pelestarian cagar dan warisan budaya IKU : 1. Persentase cagar Budaya yang diekstarikan 2. Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan3. Program : 1. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 2. Program Pengembangan Kebudayaan 3. Program Pembinaan Sejarah 4. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 5. Program Pengelolaan Permuseuman

KEPALA BAPELITBANGDA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

...

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemda	**: Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman**
Nama OPD	**: OPD Pengampu Misi 5**
Tahun Penilaian	**: 2025**
Periode yang dinilai	**: 2025-2029**
Urusan Pemerintahan	**: Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pemerintahan dasar**

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	**Tujuan 5.1** **Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang harmonis dan toleran antar umat beragama**	**Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)**	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) stagnan atau menurun	R-268	Kesbangpol	Kurangnya dialog lintas agama, isu intoleransi di media sosial, dan minimnya kegiatan bersama antar umat beragama	Internal dan Eksternal	UC	Meningkatnya potensi konflik sosial dan menurunnya kohesi sosial antar kelompok keagamaan	Kesbangpol, Kemenag, FKUB, Camat/Lurah, Tokoh Agama
2	**Sasaran 5.1.1** **Meningkatnya rasa aman dan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan masyarakat**	**Indeks Keamanan Daerah**	Indeks Keamanan Daerah stagnan atau menurun	R-269	Kepolisian, Satpol PP, Kesbangpol, Kecamatan, Nagari	Maraknya tindakan kriminalitas, konflik sosial, atau gangguan ketertiban umum	Internal dan Eksternal	UC	Menurunnya rasa aman masyarakat dan berkurangnya minat investasi	Kepolisian, Satpol PP, Kesbangpol, Kecamatan, Nagari
3		**Angka Kriminalitas**	Angka Kriminalitas meningkat	R-270	Kepolisian, Satpol PP, Kesbangpol, Kecamatan, Nagari	Tingginya tingkat pengangguran, kemiskinan, lemahnya pengawasan sosial	Internal dan Eksternal	UC	Meningkatnya rasa tidak aman masyarakat, terganggunya stabilitas daerah	Kepolisian, Satpol PP, Kesbangpol, Kecamatan, Nagari
4	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Perda dan Perkada tidak ditegakkan dengan optimal	R-271	Satpol PP	Kurangnya pengawasan dan sumber daya manusia	Internal	UC	Ketertiban umum terganggu, hukum tidak dihormati	Masyarakat umum
5		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Gangguan ketertiban umum tidak tertangani dengan baik	R-272	Satpol PP	Terbatasnya personel dan sarana prasarana	Internal	UC	Rasa aman masyarakat menurun	Masyarakat umum
6		Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Kemampuan PPNS tidak memadai dalam menegakkan hukum	R-273	Satpol PP	Terbatasnya pelatihan dan pengembangan kapasitas	Internal	UC	Penegakan hukum tidak efektif, pelanggaran meningkat	Masyarakat umum
7		Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya	Partisipasi masyarakat dalam perlindungan rendah	R-274	Satpol PP	Minimnya sosialisasi dan edukasi	Internal	UC	Respons terhadap gangguan trantib lambat dan kurang efektif	Masyarakat umum
8	Program Penanggulangan penyelamatan kebakaran dan Non kebakaran	Cakupan penyebaran Informasi dan Edukasi rawan Kebakaran	Informasi dan edukasi rawan kebakaran belum menjangkau seluruh masyarakat	R-275	Damkar	Kurangnya kegiatan sosialisasi dan keterbatasan SDM	Internal	UC	Masyarakat tidak siap menghadapi kebakaran, risiko korban meningkat	Masyarakat umum
9		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran tidak optimal	R-276	Damkar	Terbatasnya armada dan petugas penyelamat	Internal	UC	Proses evakuasi lambat, risiko korban jiwa dan luka meningkat	Masyarakat terdampak
10		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Waktu tanggap penanganan kebakaran tidak sesuai standar	R-277	Damkar	Jarak pos pemadam terlalu jauh dari lokasi rawan kebakaran	Eksternal	UC	Kebakaran meluas, kerugian harta dan nyawa meningkat	Masyarakat umum
11		Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran belum merata	R-278	Damkar	Belum semua wilayah terjangkau layanan evakuasi	Internal	UC	Masyarakat di daerah terpencil berisiko tinggi tidak tertangani	Masyarakat wilayah terpencil
12	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Penyelesaian konflik sosial belum optimal	R-280	Kesbangpol	Kurangnya sumber daya fasilitator dan pemetaan konflik	Internal	UC	Konflik sosial meluas, stabilitas daerah terganggu	Masyarakat umum
13	**Sasaran 5.1.2** **Meningkatnya pelestarian cagar dan warisan budaya**	**Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan**	Cagar budaya tidak terawat dan berpotensi rusak	R-284	Disdikbud	Terbatasnya anggaran dan sumber daya pelestarian	Internal	UC	Hilangnya nilai sejarah dan potensi wisata budaya	Masyarakat, generasi penerus
14		**Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan**	Warisan budaya tak benda tidak terdokumentasi dan terancam punah	R-285	Disdikbud	Lemahnya dokumentasi dan pewarisan budaya	Internal	UC	Identitas budaya lokal melemah, potensi ekonomi budaya menurun	Masyarakat, pelaku budaya
15	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	Pelestarian warisan budaya tidak optimal	R-286	Disdikbud	Terbatasnya kegiatan pelestarian dan partisipasi masyarakat	Internal	UC	Warisan budaya terancam punah dan kehilangan nilai edukatif	Masyarakat, pelaku budaya
16		Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	Penetapan cagar budaya dan warisan tak benda lambat	R-287	Disdikbud	Proses verifikasi dan administrasi yang rumit	Internal	UC	Warisan budaya tidak terlindungi secara hukum	Pemerintah daerah, masyarakat adat
17		Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan stagnan	R-288	Disdikbud	Terbatasnya sumber daya dan kolaborasi lintas sektor	Internal	UC	Potensi wisata dan edukasi budaya tidak berkembang	Masyarakat umum, sektor pariwisata

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
18	Program Pengembangan Kebudayaan	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	Partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebudayaan rendah	R-289	Disdikbud	Minimnya edukasi dan ruang ekspresi budaya	Internal	UC	Pengembangan budaya lokal terhambat dan nilai budaya luntur	Pelaku budaya, masyarakat umum
19	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	Pelestarian dan pengembangan kesenian tradisional belum optimal	R-291	Disdikbud	Terbatasnya dana dan kurangnya minat generasi muda	Internal	UC	Hilangnya kesenian tradisional, berkurangnya identitas budaya	Masyarakat, pelaku seni
20	Program Penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase korban yang mendapatkan perlindungan	Lambatnya penanganan korban	R-291-1	DINSOSP3A	Koordinasi lintas instansi kurang, data korban tidak akurat	Internal dan Eksternal	UC	Korban tidak mendapatkan perlindungan maksimal, trauma berkepanjangan	Korban, keluarga, pemerintah daerah
21	Pemberian Insentif dan Apresiasi bagi pemuka Agama dalam penguatan Nilai Keagamaan	Persentase pemuka agama penerima insentif	Distribusi insentif tidak merata	R-292-2	Bagian Kesra	Data penerima tidak valid, proses administrasi lambat	Internal	UC	Menurunnya motivasi pemuka agama, kegiatan keagamaan berkurang	Pemuka agama, masyarakat, pemerintah daerah

KEPALA BAPELITBANGDA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

...

Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda	**: Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman**
Tahun Penilaian	**: 2025**
Tujuan Strategis	**: Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing**
Urusan Pemerintahan	**: Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pemerintahan dasar**

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) stagnan atau menurun	R-268	4	3	12
2	Indeks Keamanan Daerah stagnan atau menurun	R-269	4	3	12
3	Angka Kriminalitas meningkat	R-270	4	4	16
4	Perda dan Perkada tidak ditegakkan dengan optimal	R-271	3	3	9
5	Gangguan ketertiban umum tidak tertangani dengan baik	R-272	4	3	12
6	Kemampuan PPNS tidak memadai dalam menegakkan hukum	R-273	3	3	9
7	Partisipasi masyarakat dalam perlindungan rendah	R-274	4	3	12
8	Informasi dan edukasi rawan kebakaran belum menjangkau seluruh masyarakat	R-275	3	4	12
9	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran tidak optimal	R-276	4	4	16
10	Waktu tanggap penanganan kebakaran tidak sesuai standar	R-277	4	3	12
11	Layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran belum merata	R-278	3	3	9
12	Penyelesaian konflik sosial belum optimal	R-280	4	3	12
13	Cagar budaya tidak terawat dan berpotensi rusak	R-284	4	3	12
14	Warisan budaya tak benda tidak terdokumentasi dan terancam punah	R-285	4	3	12
15	Pelestarian warisan budaya tidak optimal	R-286	3	3	9

16	Penetapan cagar budaya dan warisan tak benda lambat	R-287	3	2	6
17	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan stagnan	R-288	3	3	9
18	Partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebudayaan rendah	R-289	3	2	6
19	Pelestarian dan pengembangan kesenian tradisional belum optimal	R-291	3	3	9
20	Persentase korban yang mendapatkan perlindungan	R-291-1	4	3	12
21	Persentase pemuka agama penerima insentif	R-292-2	3	3	9

KEPALA BAPELITBANGDA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

...

Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda	**: Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman**
Tahun Penilaian	**: 2025**
Tujuan Strategis	**: Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing**
Urusan Pemerintahan	**: Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pemerintahan dasar**

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
1	Angka Kriminalitas meningkat	R-270	16	Satpol PP dan Damkar	Dinamika sosial dan ekonomi yang tinggi di masyarakat tanpa diimbangi sistem keamanan yang adaptif	Meningkatnya rasa tidak aman dan terganggunya ketertiban umum
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran tidak optimal	R-276	16	Dinas Satpol PP dan Damkar	Terbatasnya armada dan personel dalam evakuasi serta kurangnya pelatihan rutin	Proses evakuasi korban tidak optimal dan potensi korban jiwa lebih tinggi
3	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) stagnan atau menurun	R-268	12	Kantor Kesbangpol	Lemahnya program moderasi beragama dan kurangnya forum kerukunan	Konflik horizontal dan gangguan stabilitas sosial
4	Indeks Keamanan Daerah stagnan atau menurun	R-269	12	Bagian Pemerintahan Umum dan Kesbangpol	Kurangnya program penguatan keamanan dan rendahnya kehadiran negara di tingkat lokal	Potensi konflik sosial dan penurunan rasa aman masyarakat
5	Gangguan ketertiban umum tidak tertangani dengan baik	R-272	12	Dinas Satpol PP dan Damkar	Kurangnya koordinasi antarinstansi dan keterbatasan sarana pengendalian gangguan	Rendahnya penanganan terhadap gangguan ketertiban
6	Partisipasi masyarakat dalam perlindungan rendah	R-274	12	DINSOSP3A dan Dinas Satpol PP	Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam sistem perlindungan sosial	Peningkatan risiko sosial bagi kelompok rentan
7	Informasi dan edukasi rawan kebakaran belum menjangkau seluruh masyarakat	R-275	12	Dinas Satpol PP dan Damkar	Kampanye edukasi belum merata dan kurang inovatif	Masyarakat tidak tanggap terhadap potensi kebakaran
8	Waktu tanggap penanganan kebakaran tidak sesuai standar	R-277	12	Dinas Satpol PP dan Damkar	Kurangnya SOP dan sumber daya penanganan kebakaran	Respon lambat dan korban jiwa atau kerugian materi meningkat

9	Penyelesaian konflik sosial belum optimal	R-280	12	DINSOSP3A	Kurangnya fasilitator dan strategi mediasi yang lemah	Potensi eskalasi konflik dan ketidakstabilan sosial
10	Cagar budaya tidak terawat dan berpotensi rusak	R-284	12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kurangnya anggaran dan perhatian terhadap pelestarian budaya	Hilangnya identitas budaya lokal
11	Warisan budaya tak benda tidak terdokumentasi dan terancam punah	R-285	12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Minimnya dokumentasi dan pewarisan budaya secara turun temurun	Punahnya warisan budaya tak benda
12	Persentase korban yang mendapatkan perlindungan	R-291-1	12	DINSOSP3A	SDM pendamping terbatas, koordinasi lintas lembaga kurang, keterbatasan anggaran	Korban tidak mendapatkan layanan perlindungan optimal, meningkatnya kerentanan sosial dan psikologis korban

KEPALA BAPELITBANGDA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

...

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)

Nama Pemda	**: Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman**						
Tahun Penilaian	**: 2025**						
Tujuan Strategis	**: Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing**						
Urusan Pemerintahan	**: Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pemerintahan dasar**						
No	**Risiko Prioritas**	**Kode Risiko**	**Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)**	**Celah Pengendalian**	**Rencana Tindak Pengendalian**	**Pemilik/ Penangungg Jawab**	**Target Waktu Penyelesaian**
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	h
I	**Risiko Strategis**						
1	Angka Kriminalitas meningkat	R-270	Penguatan kerukunan umat beragama	1. Dialog lintas agama belum rutin. 2. Edukasi toleransi kurang meluas. 3. Fasilitasi kegiatan lintas iman terbatas.	1. Fasilitasi forum kerukunan umat beragama. 2. Sosialisasi nilai toleransi. 3. Pendampingan kegiatan lintas iman.	Satpol PP dan Damkar	2025-2029
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran tidak optimal	R-276	Penguatan keamanan daerah	1. Sinergi aparat keamanan belum optimal. 2. Sistem keamanan lingkungan lemah. 3. Pemantauan wilayah rawan kurang.	1. Koordinasi intensif aparat keamanan. 2. Pembentukan pos keamanan lingkungan. 3. Pemasangan CCTV di titik rawan.	Dinas Satpol PP dan Damkar	2025-2029
3	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) stagnan atau menurun	R-268	Penanganan kriminalitas	1. Kasus kriminalitas meningkat. 2. Partisipasi masyarakat dalam pencegahan rendah. 3. Pemanfaatan teknologi keamanan terbatas.	1. Patroli rutin. 2. Edukasi masyarakat. 3. Peningkatan sarana teknologi keamanan.	Kantor Kesbangpol	2025-2029
4	Indeks Keamanan Daerah stagnan atau menurun	R-269	Penguatan penegakan ketertiban umum	1. Gangguan ketertiban umum tidak tertangani cepat. 2. Koordinasi aparat lemah. 3. Kesadaran hukum masyarakat rendah.	1. Penegakan Perda secara konsisten. 2. Patroli gabungan. 3. Sosialisasi peraturan daerah.	Bagian Pemerintahan Umum dan Kesbangpol	2025-2029
5	Gangguan ketertiban umum tidak tertangani dengan baik	R-272	Peningkatan partisipasi perlindungan masyarakat	1. Partisipasi masyarakat dalam perlindungan rendah. 2. Kapasitas Linmas terbatas. 3. Sosialisasi perlindungan belum menjangkau luas.	1. Pelatihan Linmas. 2. Sosialisasi perlindungan masyarakat. 3. Peningkatan peralatan Linmas.	Dinas Satpol PP dan Damkar	2025-2029
6	Partisipasi masyarakat dalam perlindungan rendah	R-274	Pencegahan kebakaran	1. Informasi rawan kebakaran belum menjangkau seluruh masyarakat. 2. Edukasi kebakaran minim. 3. Simulasi kebakaran jarang dilakukan.	1. Penyebaran informasi rawan kebakaran. 2. Edukasi pencegahan kebakaran. 3. Simulasi kebakaran rutin.	DINSOSP3A dan Dinas Satpol PP	2025-2029
7	Informasi dan edukasi rawan kebakaran belum menjangkau seluruh masyarakat	R-275	Peningkatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran	1. Peralatan penyelamatan terbatas. 2. Prosedur evakuasi belum terstandar. 3. Koordinasi antar instansi kurang.	1. Pengadaan peralatan penyelamatan. 2. Penyusunan SOP evakuasi. 3. Latihan bersama antar instansi.	Dinas Satpol PP dan Damkar	2025-2029
8	Waktu tanggap penanganan kebakaran tidak sesuai standar	R-277	Peningkatan kecepatan tanggap kebakaran	1. Waktu tanggap penanganan kebakaran melebihi standar. 2. Keterbatasan armada dan personel. 3. Akses jalan ke lokasi sulit.	1. Penambahan armada dan personel. 2. Penempatan pos damkar strategis. 3. Perbaikan akses jalan lokasi rawan.	Dinas Satpol PP dan Damkar	2025-2029

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penangungg Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
9	Penyelesaian konflik sosial belum optimal	R-280	Penyelesaian konflik sosial	1. Mekanisme penyelesaian konflik tidak efektif. 2. Koordinasi lintas sektor lemah. 3. Mediasi jarang dilakukan.	1. Pembentukan tim mediasi konflik. 2. Koordinasi lintas sektor. 3. Edukasi resolusi konflik.	DINSOSP3A	2025-2029
10	Cagar budaya tidak terawat dan berpotensi rusak	R-284	Pelestarian cagar budaya	1. Cagar budaya tidak terawat. 2. Anggaran perawatan minim. 3. Partisipasi masyarakat rendah.	1. Pemeliharaan rutin cagar budaya. 2. Peningkatan anggaran pelestarian. 3. Edukasi pelestarian budaya.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2025-2029
11	Warisan budaya tak benda tidak terdokumentasi dan terancam punah	R-285	Pelestarian warisan budaya tak benda	1. Dokumentasi warisan budaya minim. 2. Regenerasi pelaku budaya rendah. 3. Dukungan anggaran terbatas.	1. Pendokumentasian warisan budaya. 2. Pelatihan generasi muda. 3. Peningkatan anggaran pelestarian.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2025-2029
12	Persentase korban yang mendapatkan perlindungan	R-291-1	Program perlindungan sosial sudah berjalan, Tersedia layanan pengaduan di beberapa instansi, Ada kerjasama dengan lembaga sosial/LSM	1. Belum semua korban teridentifikasi dengan cepat 2. Layanan perlindungan masih terbatas di wilayah tertentu 3. Koordinasi antar lembaga belum optimal	1. Penguatan sistem pendataan korban terpadu 2. Perluasan jangkauan layanan perlindungan hingga ke desa/kelurahan 3. Peningkatan koordinasi lintas sektor (pemda, kepolisian	DINSOSP3A	2025-2029

KEPALA BAPELITBANGDA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

...

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda : **Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman**
Tahun Penilaian : **2025**
Tujuan Strategis : **Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing**
Urusan Pemerintahan : **Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pemerintahan dasar**

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	1. Fasilitasi forum kerukunan umat beragama. 2. Sosialisasi nilai toleransi. 3. Pendampingan kegiatan lintas iman.	Dialog Lintas Agama, Media Sosial, Spanduk	Bagian Kesra, FKUB	Masyarakat, Tokoh Agama, OPD terkait	2025-2029		
2	1. Koordinasi intensif aparat keamanan. 2. Pembentukan pos keamanan lingkungan. 3. Pemasangan CCTV di titik rawan.	Rapat Koordinasi, Surat Edaran, Media Sosial	Satpol PP, Polres, Kodim	OPD terkait, Masyarakat	2025-2029		
3	1. Patroli rutin. 2. Edukasi masyarakat. 3. Peningkatan sarana teknologi keamanan.	Patroli Lapangan, Brosur Edukasi, Aplikasi Keamanan	Satpol PP, Polres	Masyarakat, OPD terkait	2025-2029		
4	1. Penegakan Perda secara konsisten. 2. Patroli gabungan. 3. Sosialisasi peraturan daerah.	Media Sosial, Radio Lokal, Penyuluhan Lapangan	Satpol PP, Bagian Hukum	Masyarakat, OPD terkait	2025-2029		
5	1. Pelatihan Linmas. 2. Sosialisasi perlindungan masyarakat. 3. Peningkatan peralatan Linmas.	Pelatihan Lapangan, Video Edukasi, Spanduk	BPBD, Satpol PP	Linmas, OPD terkait, Masyarakat	2025-2029		
6	1. Penyebaran informasi rawan kebakaran. 2. Edukasi pencegahan kebakaran. 3. Simulasi kebakaran rutin.	Leaflet, Radio Lokal, Simulasi Kebakaran	BPBD, Damkar	Masyarakat, OPD terkait	2025-2029		
7	1. Pengadaan peralatan penyelamatan. 2. Penyusunan SOP evakuasi. 3. Latihan bersama antar instansi.	Rapat Koordinasi, Video Tutorial, Latihan Lapangan	BPBD, Damkar	OPD terkait, Relawan, Masyarakat	2025-2029		

8	1. Penambahan armada dan personel. 2. Penempatan pos damkar strategis. 3. Perbaikan akses jalan lokasi rawan.	Media Sosial, Papan Informasi, Penyuluhan Lapangan	Damkar, BPBD	Masyarakat, OPD terkait	2025-2029		
9	1. Pembentukan tim mediasi konflik. 2. Koordinasi lintas sektor. 3. Edukasi resolusi konflik.	Forum Dialog, Brosur Edukasi, Rapat Koordinasi	Bagian Kesra, FKUB	Masyarakat, OPD lintas sektor	2025-2029		
10	1. Pemeliharaan rutin cagar budaya. 2. Peningkatan anggaran pelestarian. 3. Edukasi pelestarian budaya.	Pameran Budaya, Media Sosial, Workshop	Dinas Pariwisata & Kebudayaan	Masyarakat, Sekolah, Komunitas	2025-2029		
11	1. Pendokumentasian warisan budaya. 2. Pelatihan generasi muda. 3. Peningkatan anggaran pelestarian.	Buku Dokumentasi, Video Dokumenter, Pelatihan	Dinas Pariwisata & Kebudayaan	Generasi Muda, OPD terkait, Komunitas	2025-2029		
12	1. Penguatan sistem pendataan korban terpadu 2. Perluasan jangkauan layanan perlindungan hingga ke desa/kelurahan 3. Peningkatan koordinasi lintas sektor (pemda, kepolisian	Laporan terpadu & forum koordinasi lintas sektor	DINSOSP3A	Masyarakat, Pemerintah Desa, OPD terkait	2025-2029		

KEPALA BAPELITBANGDA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

...

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemda	**: Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman**
Tahun Penilaian	**: 2025**
Tujuan Strategis	**: Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing**
Urusan Pemerintahan	**: Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pemerintahan dasar**

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	1. Fasilitasi forum kerukunan umat beragama. 2. Sosialisasi nilai toleransi. 3. Pendampingan kegiatan lintas iman.	Fasilitasi forum kerukunan; sosialisasi toleransi; pendampingan lintas iman	Bagian Kesra, FKUB	2025-2029		
2	1. Koordinasi intensif aparat keamanan. 2. Pembentukan pos keamanan lingkungan. 3. Pemasangan CCTV di titik rawan.	Koordinasi aparat keamanan; pos keamanan lingkungan; CCTV titik rawan	Satpol PP, Polres, Kodim	2025-2029		
3	1. Patroli rutin. 2. Edukasi masyarakat. 3. Peningkatan sarana teknologi keamanan.	Patroli rutin; edukasi masyarakat; sarana teknologi keamanan	Satpol PP, Polres	2025-2029		
4	1. Penegakan Perda secara konsisten. 2. Patroli gabungan. 3. Sosialisasi peraturan daerah.	Penegakan Perda; patroli gabungan; sosialisasi perda	Satpol PP, Bagian Hukum	2025-2029		
5	1. Pelatihan Linmas. 2. Sosialisasi perlindungan masyarakat. 3. Peningkatan peralatan Linmas.	Pelatihan Linmas; sosialisasi perlindungan; peralatan Linmas	BPBD, Satpol PP	2025-2029		
6	1. Penyebaran informasi rawan kebakaran. 2. Edukasi pencegahan kebakaran. 3. Simulasi kebakaran rutin.	Informasi rawan kebakaran; edukasi pencegahan; simulasi kebakaran	BPBD, Damkar	2025-2029		
7	1. Pengadaan peralatan penyelamatan. 2. Penyusunan SOP evakuasi. 3. Latihan bersama antar instansi.	Peralatan penyelamatan; SOP evakuasi; latihan bersama	BPBD, Damkar	2025-2029		
8	1. Penambahan armada dan personel. 2. Penempatan pos damkar strategis. 3. Perbaikan akses jalan lokasi rawan.	Armada & personel tambahan; pos damkar strategis; akses jalan rawan	Damkar, BPBD	2025-2029		

9	1. Pembentukan tim mediasi konflik. 2. Koordinasi lintas sektor. 3. Edukasi resolusi konflik.	Tim mediasi konflik; koordinasi lintas sektor; edukasi resolusi konflik	Bagian Kesra, FKUB	2025-2029		
10	1. Pemeliharaan rutin cagar budaya. 2. Peningkatan anggaran pelestarian. 3. Edukasi pelestarian budaya.	Pemeliharaan cagar budaya; anggaran pelestarian; edukasi budaya	Dinas Pariwisata & Kebudayaan	2025-2029		
11	1. Pendokumentasian warisan budaya. 2. Pelatihan generasi muda. 3. Peningkatan anggaran pelestarian.	Dokumentasi warisan budaya; pelatihan generasi muda; anggaran pelestarian	Dinas Pariwisata & Kebudayaan	2025-2029		
12	1. Penguatan sistem pendataan korban terpadu 2. Perluasan jangkauan layanan perlindungan hingga ke desa/kelurahan 3. Peningkatan koordinasi lintas sektor (pemda, kepoli	Penguatan sistem pendataan korban terpadu, Perluasan jangkauan layanan perlindungan hingga ke desa/kelurahan; Peningkatan koordinasi lintas	DINSOSP3A	2025-2029		

KEPALA BAPELITBANGDA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

...

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda : Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Tahun Penilaian : 2025
Tujuan Strategis : Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pemerintahan dasar

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
I	Risiko Strategis Pemda									
1	Angka Kriminalitas meningkat	R-270	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Fasilitasi forum kerukunan umat beragama. 2. Sosialisasi nilai toleransi. 3. Pendampingan kegiatan lintas iman.			
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran tidak optimal	R-276	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Koordinasi intensif aparat keamanan. 2. Pembentukan pos keamanan lingkungan. 3. Pemasangan CCTV di titik rawan.			
3	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) stagnan atau menurun	R-268	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Patroli rutin. 2. Edukasi masyarakat. 3. Peningkatan sarana teknologi keamanan.			
4	Indeks Keamanan Daerah stagnan atau menurun	R-269	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Penegakan Perda secara konsisten. 2. Patroli gabungan. 3. Sosialisasi peraturan daerah.			
5	Gangguan ketertiban umum tidak tertangani dengan baik	R-272	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Pelatihan Linmas. 2. Sosialisasi perlindungan masyarakat. 3. Peningkatan peralatan Linmas.			
6	Partisipasi masyarakat dalam perlindungan rendah	R-274	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Penyebaran informasi rawan kebakaran. 2. Edukasi pencegahan kebakaran. 3. Simulasi kebakaran rutin.			
7	Informasi dan edukasi rawan kebakaran belum menjangkau seluruh masyarakat	R-275	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Pengadaan peralatan penyelamatan. 2. Penyusunan SOP evakuasi. 3. Latihan bersama antar instansi.			
8	Waktu tanggap penanganan kebakaran tidak sesuai standar	R-277	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Penambahan armada dan personel. 2. Penempatan pos damkar strategis. 3. Perbaikan akses jalan lokasi rawan.			
9	Penyelesaian konflik sosial belum optimal	R-280	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Pembentukan tim mediasi konflik. 2. Koordinasi lintas sektor. 3. Edukasi resolusi konflik.			
10	Cagar budaya tidak terawat dan berpotensi rusak	R-284	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Pemeliharaan rutin cagar budaya. 2. Peningkatan anggaran pelestarian. 3. Edukasi pelestarian budaya.			
11	Warisan budaya tak benda tidak terdokumentasi dan terancam punah	R-285	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Pendokumentasian warisan budaya. 2. Pelatihan generasi muda. 3. Peningkatan anggaran pelestarian.			
	Persentase korban yang mendapatkan perlindungan	R-291-1	Belum Terjadi	Belum Terjadi	Belum Terjadi		1. Penguatan sistem pendataan korban terpadu 2. Perluasan jangkauan layanan perlindungan hingga ke desa/kelurahan 3. Peningkatan koordinasi lintas sektor (pemda, kepoli			

KEPALA BAPELITBANGDA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS


RPJMD
2025-2029
PADANG PARIAMAN
SAIYO SAKATO